Bank Muamalat
Pertama Murni Syariah



Transformasi untuk Pertumbuhan Bisnis yang Berkelanjutan

Transformation for Sustainable Business Growth

2019 Laporan Tahunan
Annual Report



2019

Transformasi untuk Pertumbuhan Bisnis yang Berkelanjutan

Transformation for Sustainable Business Growth

Sebagai pionir di industri perbankan syariah di Indonesia, Bank Muamalat Indonesia berkomitmen untuk terus berperan aktif dan terus mendorong kemajuan industri perbankan syariah di tanah air. Dengan pengalaman dan kapasitas yang dimilikinya, Bank Muamalat Indonesia telah menjadi salah satu pusat ekosistem ekonomi syariah di Indonesia.

Tahun 2019, Bank Muamalat Indonesia memulai proses transformasi dengan melakukan review secara menyeluruh terhadap kapasitas organisasi dan tantangan yang akan dihadapi ke depan. Perseroan senantiasa melakukan perbaikan dan penyempurnaan pada produk dan layanan agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada nasabah. Bersamaan dengan proses penguatan struktur permodalan, Bank Muamalat Indonesia terus melakukan berbagai persiapan untuk meraih pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

Melalui tagar #AyoHijrah, Perseroan mengajak seluruh umat terutama umat muslim agar lebih lekat dengan Bank Syariah. Program kampanye ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap kinerja Perseroan dan industri perbankan syariah pada umumnya. Perseroan meyakini, industri perbankan syariah memiliki potensi yang sangat besar dan Bank Muamalat Indonesia akan berada di garis terdepan untuk mengoptimalkan potensi tersebut.

As a pioneer in the sharia banking industry in Indonesia, Bank Muamalat Indonesia is committed to continue playing an active roles and encourage the development of sharia banking industry in the country. With its experience and capacity Bank Muamalat Indonesia has become one of the center of Islamic economic ecosystem in Indonesia.

In 2019, Bank Muamalat Indonesia began the transformation process by conducting a thorough review of the organization capacity and the challenges in the future. The Company continue to make improvements and enchancements to its products and services in order to provide the best service to customers. Concurrent with strengthening process to the capital structure, Bank Muamalat Indonesia continues to make various preparations to achieve a sustainable business growth.

Through the hashtag #AyoHijrah, the Company invites people, especially Moslems to be more attached to sharia banks. This campaign program is expected to make a positive contribution to the Company's performance and the sharia banking industry in general. The Company believes, the sharia banking industry has a very large potential and Bank Muamalat Indonesia will be at the forefront to optimize that potential.



2018

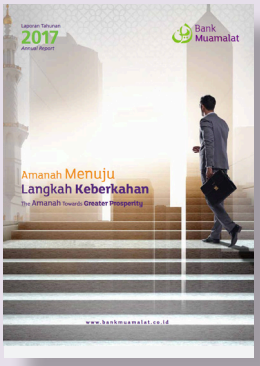
Strengthening Sharia Business Ecosystems

Bank Muamalat Indonesia memiliki komitmen yang kuat dalam memberikan pelayanan yang amanah terhadap nasabah serta seluruh pemangku kepentingan. Bank Muamalat Indonesia terus menjaga konsistensinya dalam membangun perekonomian umat melalui "Penguatan Ekosistem Bisnis Syariah" dengan melakukan berbagai strategi untuk meningkatkan nilai. Komitmen Bank Muamalat Indonesia dalam menjaga konsistensinya ini, merupakan upaya menuju keberkahan untuk kepentingan bersama.

Bank senantiasa berkomitmen untuk mewujudkan cita-cita untuk menjadi pusat ekosistem ekonomi syariah di Indonesia. Sepanjang tahun 2018, secara umum kinerja Bank sesuai target yang dicanangkan. Bank juga mulai meluncurkan kampanye dengan tagar #AyoHijrah. Tagar #AyoHijrah ini adalah sebuah gerakan untuk mengajak umat terutama umat muslim agar lekat dengan Bank Syariah. Sementara itu, Bank Muamalat Indonesia juga telah membentuk Unit kerja Islamic Enterprise and Alliances, yang bertugas khusus untuk menjalin sinergi Bank dengan organisasi-organisasi Islam dan seluruh elemen umat Islam. Hal ini diyakini akan mendorong peningkatan literasi keuangan syariah pada komunitas-komunitas Islam sekaligus turut serta dalam upaya pertumbuhan pembiayaan baik di segmen ritel maupun korporasi.

Bank Muamalat Indonesia has a strong commitment in providing trustworthy services to customers and all the stakeholders. Our company will continue to maintain its consistency in building the people's economy through "Strengthening Sharia Business Ecosystems" by carrying out various strategies to increase value. It has been the commitment of Bank Muamalat Indonesia to maintain its consistency in order to achieve blessing for the common good.

The Bank has always been committed to realize the goals that become the center of the sharia economic ecosystem in Indonesia. Throughout 2018, in general the Bank's performance was in accordance with the target set. The Bank also began to launch a campaign with #AyoHijrah hashtag. #AyoHijrah is a movement aiming to invite people, especially Muslims, to migrate to Islamic banks. Meanwhile, Bank Muamalat Indonesia has also formed a work unit namely, the Islamic Enterprise and Alliances, which main duty is to synergize the Bank with Islamic organizations and all elements of the Muslim community. This synergy is believed to be able to encourage Islamic financial literacy in Islamic communities and also participation in order to grow financing in both the retail and corporate segments.



2017

The Amanah Towards Greater Prosperity

Sepanjang tahun 2017, PT Bank Muamalat Indonesia Tbk ("Bank Muamalat Indonesia" atau "Bank") telah berhasil mencatatkan performa yang positif dan berkelanjutan. Bank Muamalat Indonesia adalah bank syariah pertama dan satu-satunya yang memiliki cabang penuh di luar negeri. Sebagai pelopor industri perbankan syariah di Indonesia, Bank Muamalat Indonesia senantiasa meningkatkan performa bisnisnya melalui layanan prima di seluruh jaringan usaha serta mengembangkan produk dan jasa yang mampu mengakomodir kebutuhan nasabah baik perorangan maupun korporasi.

Throughout 2017, Bank Muamalat Indonesia ("Bank Muamalat Indonesia" or "Bank") managed to achieve positive and sustainable performance. Bank Muamalat Indonesia is the country's first sharia bank and the only one with overseas branch offices. As the pioneer in the sharia banking industry in Indonesia, Bank Muamalat Indonesia continues to improve its business performance by providing primary services across all of its business network and grow its products and services to accommodate the needs of individual or corporate customers.



2016

Standing Firm Stepping Confidently

Perjalanan Bank Muamalat Indonesia selama hampir seperempat abad di tahun 2016 memasuki tahap pembangunan budaya perusahaan dan infrastruktur Bank. Keduanya merupakan landasan yang harus diutamakan agar ke depannya Bank Muamalat Indonesia memiliki fondasi yang kokoh dan dapat mewujudkan pertumbuhan yang berkelanjutan. Sebagai inti dari pertumbuhan Bank, transformasi keduanya merupakan langkah strategis yang tepat untuk memantapkan langkah menjadi bank syariah terbaik dan 10 bank terbesar di Indonesia dengan kehadiran regional yang kuat. Dengan bermodalkan komitmen kuat, Indonesia optimis untuk mewujudkan Visi 2017 di mana Bank Muamalat Indonesia akan memfokuskan kegiatan usahanya pada sektor ritel.

The journey of Bank Muamalat Indonesia for nearly a quarter century in 2016 entered the stage of development of corporate culture and Bank's infrastructure. Both serve as the foundation that shall be put forward so that Bank Muamalat Indonesia will have a robust foundation to achieve sustainable growth. As the core of the Bank's growth, the transformation of both aspects are the appropriate strategic measure to become the best Islamic bank and top 10 bank in Indonesia with strong regional presence. Armed with unwavering commitment, Bank Muamalat Indonesia is optimistic to achieve Vision 2017 in which Bank Muamalat Indonesia will shift its business activity to retail sector.

Daftar Isi
Table of Contents

Ikhtisar Kinerja 2019
2019 Performance Highlights

Ikhtisar Kinerja Keuangan
Financial Performance Highligts 8

Penghargaan dan Sertifikasi
Awards and Certifications 12

Peristiwa Penting
Event Highlights 14

Laporan Manajemen
Management Report

Laporan Dewan Pengawas Syariah
Sharia Supervisory Board Report 18

Laporan Dewan Komisaris
Board of Commissioners Report 24

Laporan Direksi
Board of Directors Report 34

Surat Pernyataan Dewan Komisaris Tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2019 PT Bank Muamalat Indonesia Tbk
Responsibility Statement of the Board of Commissioners on the 2019 Annual Report of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk 48

Surat Pernyataan Direksi Tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2019 PT Bank Muamalat Indonesia Tbk
Responsibility Statement of the Board of Directors on the 2019 Annual Report of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk 49

Profil Perusahaan
Company Profile

Identitas Perusahaan
Company Identity 52

Sekilas Bank Muamalat Indonesia
Bank Muamalat Indonesia at a Glance 54

Jejak Langkah
Milestones 56

Logo Perusahaan
Company Logo 58

Bidang Usaha
Line of Business 59

Peta Jaringan Bisnis dan Wilayah Operasi
Map of Business Networks and Operating Areas 70

Wilayah Operasional
Operational Area 72

Visi, Misi dan Budaya Perusahaan
Vision, Mission, and Company Culture 88

Struktur Organisasi
Organization Structure 94

Profil Dewan Pengawas Syariah
Sharia Supervisory Board Profile 96

Profil Dewan Komisaris
Board of Commissioners Profile 100

Profil Direksi
Board of Directors Profile 110

Pejabat Eksekutif Senior
Senior Management Executives 124

Profil Pejabat Eksekutif
Management Executives Profile 128

Struktur dan Komposisi Pemegang Saham
Structure and Composition of Shareholders 134

Struktur Grup Perusahaan
Corporate Group Structure 144

Analisis dan Pembahasan Manajemen
Management Discussion and Analysis

Tinjauan Industri
Industry Overview 158

Tinjauan Operasional
Operational Overview 166

Aspek Pemasaran
Marketing Aspects 169

Tinjauan Keuangan
Financial Review 194

Komitmen dan Kontinjensi
Commitment and Contingencies 208

Informasi Kinerja Keuangan Lain (SEOJK No.10/2017)
Other Financial Performance Information (SEOJK No.10/2017) 209

Kemampuan Membayar Utang dan Tingkat Kolektibilitas Piutang
Ability to Pay Debt and Accounts Receivable Rate 216

Kemampuan Membayar Utang (Jangka Pendek Maupun Jangka Panjang)
Ability to Pay Debt (Short-term or Long-term) 216

Kolektibilitas Piutang
Receivable Collectibility 217

Struktur Modal
Capital Structure 218

Ikatan yang Material untuk Investasi Barang Modal
Material Ties for Capital Investment 220

Realisasi Investasi Barang Modal
Realization of Capital Goods Investment 220

Informasi dan Fakta Material yang Terjadi setelah Tanggal Laporan Akuntan
Material Information and Facts That Occur after the Date of the Accountant Report 220

Perbandingan antara Target dan Realisasi serta Proyeksi Satu Tahun ke Depan
Comparison between Target and Realization and Projection for One Year in the Future 221

Kebijakan dan Pembagian Dividen
Dividend Policy and Distribution 223

Kepatuhan Pembayaran Pajak
Tax Payment Compliance 224

Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan dan atau Manajemen
Employee and/or Management Share Ownership Program 224

Informasi Material Mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Penggabungan/Peleburan Usaha, Akuisisi, Restrukturisasi Utang/Modal
Material Information Regarding Investment, Expansion, Divestment, Merger/Business Consolidation, Acquisition, Debt/Capital Restructuring. 224

Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Realization of the Use of Funds from Public Offering 227

Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi
Material Transaction Information Containing Conflict Interests and/or Transactions with Affiliates 227

Perubahan Peraturan Perundang-undangan terhadap Perusahaan pada Tahun Buku Terakhir
Changes in Legislation Significant to the Bank in Last Fiscal Year 230

Informasi Kelangsungan Usaha
Business Continuity Information 240

Fungsi Penunjang Bisnis
Business Support Functions

Sumber Daya Manusia
Human Capital 244

Teknologi Informasi
Information Technology 261

Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance

Komitmen dan Kebijakan Perusahaan dalam Menerapkan Good Corporate Governance
The Commitment and the Company Policy in Terms of Good Corporate Governance Implementation 266

Peningkatan Kualitas
Quality Improvement 272

Penerapan Aspek dan Prinsip Tata Kelola Perusahaan Sesuai Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
The Implementation of Good Corporate Governance Aspect and Principles According to Financial Services Authority Regulation 276

Struktur dan Mekanisme Corporate Governance
Corporate Governance Structure and Mechanism 292

Dewan Pengawas Syariah
Sharia Supervisiory Board 328

Dewan Komisaris
Board of Commissioners 339

Komisaris Independen
Independent Commissioners 356

Direksi
Board of Directors 359

Kebijakan Keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi
Policy on the Board of Commissoners and the Board of Directors Diversity 375

Kebijakan Remunerasi Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Direksi
Remuneration Policy of Sharia Supervisory Board, Board of Commissioners, and Board of Directors 379

Rapat Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Direksi
Meeting of Sharia Supervisory Board, Board of Commissioners, and Board of Directors 385

Komite Audit
Audit Committee 406

Komite Nominasi dan Remunerasi
Nomination and Remuneration Committee 415

Komite Pemantau Risiko
Risk Oversight Committee 424

Komite Tata Kelola Perusahaan
Corporate Governance Committee 433

Komite Tata Kelola Terintegrasi
Integrated Corporate Governance Committee 439

Komite-Komite Tingkat Direksi
Committee Under Board of Directors 444

Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary 460

Satuan Kerja Audit Internal
Internal Audit Working Unit 465

Sistem Pengendalian Intern (SPI)
Internal Control System (SPI) 469

Audit Ekstern
External Audit 472

Manajemen Risiko
Risk Management 474

Satuan Kerja Kepatuhan
Compliance Working Unit 528

Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT)
Anti Money Laundering and Prevention of Terrorism Funding (APU & PPT) ... 534

Permasalahan Hukum/Litigasi Perusahaan dan Anak Perusahaan
Legal Issues/Litigation of Company and Subsidiaries 536

Akses Informasi dan Data Perusahaan
Information Access and Company Data 538

Kode Etik
Code of Conduct 541

Kebijakan Anti Korupsi/Fraud dan Sosialisasinya
Anti-Corruption/Fraud Policy and the Implementation 542

Pengendalian Gratifikasi
Gratification Control 547

Transparansi Kondisi Keuangan dan Non-Keuangan Perusahaan
Trasparency of Financial and Non-Financial Condition of the Company ... 548

Pembelian Kembali (*Buyback*) Saham dan Obligasi Bank Muamalat Indonesia
Bank Muamalat Indonesia's Shares and Bonds Buyback 549

Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Politik
Provision of Funds for Social and Political Activities 549

Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan
Provision of Funds to Related Parties 549

Kebijakan Perlindungan Nasabah
Protection Policy of Customer 549

Perlindungan Hak Kreditur
Protection Creditor's Rights 550

Sistem Pelaporan Pelanggaran *(Whistleblowing System)*
Whistleblowing System 551

Sumber Daya Manusia
Human Resources 554

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility 554

Pendapatan Non Halal dan Penggunaannya
Non-Halal Income and its allocations 554

Penerapan Tata kelola Terintegrasi
Implementation of Integrated Governance 555

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility

Tata Kelola Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility Management. 570

Tanggung Jawab Sosial Terkait Hak Asasi Manusia
Social Responsibilities Related to Human Rights 578

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Operasi yang Adil
Corporate Social Responsibilities Related to Fair Operations 581

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Bidang Lingkungan Hidup
Corporate Social Responsibilities in the Environment 586

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Praktik Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja
Corporate Social Rensponsibilities in Employment, Health and Safety Practice 589

Tanggung Jawab Sosial Lingkup Tanggung Jawab terhadap Produk/Jasa serta Konsumen
The Social Responsibility for Products/Services and Consumers 597

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Bidang Pengembangan Sosial dan Masyarakat
Corporate Social Responsibilities in the Social and Community Development 600

Laporan Keuangan
Financial Report



01.

Ikhtisar Kinerja 2019

2019 Performance Highlights


e Across Fixed Income Assets
1,975
2,259
1,860
2010
2012
2014
2016
2018
F2020
EM Corporates
Agency MBS
Munis
EM Sovereign
CMBS
Private Placements

Ikhtisar Kinerja Keuangan
Financial Performance Highlights

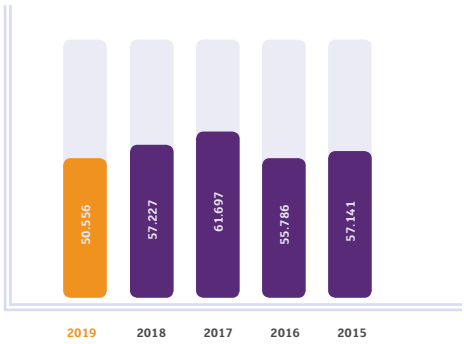
dalam miliar rupiah
in billion rupiah

Uraian *Description*	2019	2018	2017	2016	2015
Total Aset / *Total Asset*	50.556	57.227	61.697	55.786	57.141
Investasi pada Surat Berharga /*Investments in Marketable Securities*	11.333	12.185	3.821	3.831	4.505
Pembiayaan / *Financing*	29.867	33.559	41.288	40.010	40.706
Giro / *Demand Deposits*	3.663	3.601	5.573	3.900	4.872
Tabungan / *Saving Deposits*	14.781	14.201	12.929	11.939	12.454
Deposito / *Time Deposits*	21.913	27.834	30.185	26.081	27.751
Dana Pihak Ketiga / *Third-party Fund*	40.357	45.636	48.686	41.920	45.078
Total Liabilitas / *Total Liabilities*	46.618	53.306	56.152	52.168	53.622
Total Ekuitas / *Total Equity*	3.937	3.922	5.545	3.619	3.519
Pendapatan Pengelolaan Dana / *Revenue from Fund Management*	2.780	3.220	3.710	3.801	4.949
Bagi Hasil Dana Syirkah Temporer / *Share on Return of Temporary Syirkah Funds*	(2.397)	(2.242)	(2.541)	(2.302)	(2.854)
Hak Bagi Hasil Milik Bank / *Bank's Share in Profit Sharing*	383	978	1.169	1.499	2.095
Pendapatan Operasional Lainnya / *Other Operating Revenue*	647	349	476	325	312
Beban Operasional Lainnya / *Other Operating Expenses*	(1.550)	(1.643)	(1.614)	(1.709)	(2.011)
Beban Cadangan Kerugian / *Reserve Loss Cost*	507	352	(8)	(47)	(253)
Laba Operasional / *Operational Profit*	20	69	43	86	167
Pendapatan (Beban) Non Operasional-Neto / *Non - Operational Income - Net*	7	(23)	17	31	(58)
Laba sebelum Beban Pajak / *Profits Before Tax Expenses*	26	46	60	116	109
Laba Neto / *Net Profit*	16	46	26	81	74
Laba Komprehensif / *Comprehensive Income*	16	41	249	100	150
Laba (Rugi) per Saham / *Earnings (Loss) per Share*	1,60	4,51	2,56	7,89	7,30
Tingkat Pengembalian Aset / *Return on Assets (ROA)*	0,05%	0,08%	0,04%	0,14%	0,13%
Tingkat Pengembalian Ekuitas / *Return on Equity (ROE)*	0,45%	1,17%	0,47%	2,22%	2,12%
Laba (Rugi) Net terhadap Pendapatan / *Net Profit (Loss) toward Income*	0,48%	1,30%	0,62%	1,94%	1,43%
Aset Lancar terhadap Total Aset / *Current Assets toward Total Assets*	7,22%	11,83%	13,53%	12,74%	13,82%
Liabilitas terhadap Ekuitas / *Liabilities toward Equity*	1184,05%	1359,26%	1012,58%	1441,59%	1523,96%
Liabilitas terhadap Aset / *Liabilities toward Asset*	92,21%	93,15%	91,01%	93,51%	93,84%

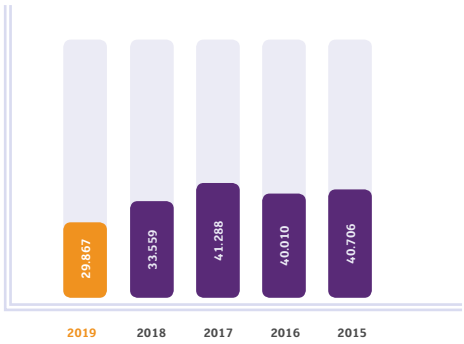
dalam miliar rupiah
in billion rupiah

Uraian *Description*	2019	2018	2017	2016	2015
Rasio Kecukupan Modal / *Capital Adequacy Ratio*	12,42%	12,34%	13,62%	12,74%	12,00%
Pembiayaan Bermasalah Bersih / *Non Performing Financing (NPF) Net*	4,30%	2,58%	2,75%	1,40%	4,20%
Pembiayaan terhadap Dana Pihak Ketiga / *Financing to Deposits Ratio (FDR)*	73,51%	73,18%	84,41%	95,13%	90,30%
Margin Pendapatan Bersih / *Net Income Margin (NIM)*	0,83%	2,22%	2,48%	3,21%	4,09%
Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) / *Operating Expenses to Operating Revenues*	99,50%	98,24%	97,68%	97,76%	97,36%
Giro Wajib Minimum (GWM) / *Statutory Reserves*	4,82%	5,41%	5,10%	5,58%	5,10%
Posisi Devisa Netto / *Net Open Position (NOP)*	0,21%	0,40%	0,21%	0,18%	13,50%

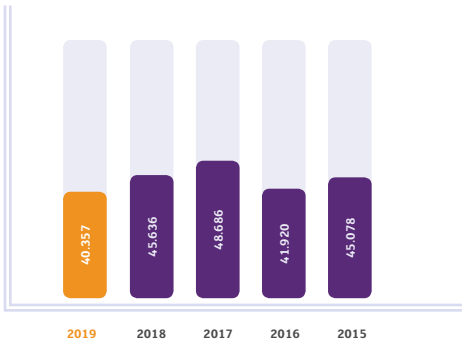
Grafik Pertumbuhan Aset 2015-2019
Asset Growth Chart in 2015-2019
(Dalam miliar Rupiah/In billion Rp)



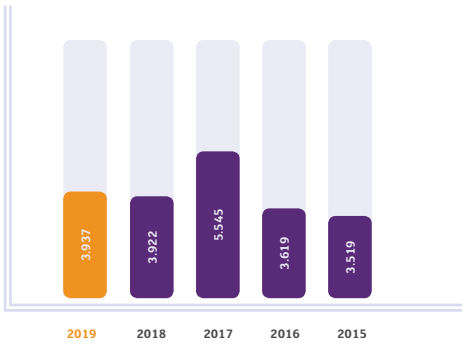
Pembiayaan
Financing
(Dalam miliar Rupiah/In billion Rp)



Dana Pihak Ketiga
Third-party Fund
(Dalam miliar Rupiah/In billion Rp)



Grafik Pertumbuhan Ekuitas 2015-2019
Equity Growth Chart in 2015-2019
(Dalam miliar Rupiah/In billion Rp)



Ikhtisar Saham

Stock Highlights

Keterangan *Description*	Jumlah Saham *Number of Shares*	Kepemilikan *Ownership*	
		Jumlah Nominal (Rp) *Amount (Rp)*	Persentase (%) *Percentage (%)*
Modal Dasar *Authorized Capital*			
Saham Seri A (nilai nominal Rp200) *Series A (amount Rp200)*	826.649.175	165.329.835.000	1,91%
Saham Seri B (nilai nominal Rp100) *Series B (amount Rp100)*	42.346.701.650	4.234.670.165.000	98,09%
Jumlah *Total*	43.173.350.825	4.400.000.000.000	100%
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh *Issued and Fully Paid-up Capital*			
Jumlah Saham Seri A *Total Series A*	826.649.175	165.329.835.000	8,10%
Jumlah Saham Seri B *Total Series B*	9.381.053.160	938.105.316.000	91,90%
Jumlah *Total*	10.207.702.335	1.103.435.151.000	100%
Saham dalam Portepel *Shares in Portfolio*			
Saham Seri A (nilai nominal Rp200) *Series A (amount Rp200)*	-	-	-
Saham Seri B (nilai nominal Rp100) *Series B (amount Rp100)*	32.965.648.490	3.296.564.849.000	100%
Jumlah *Total*	32.965.648.490	3.296.564.849.000	100%

Saham Bank Muamalat Indonesia tidak diperjualbelikan di bursa efek dalam negeri maupun bursa efek internasional. Bank Muamalat Indonesia telah mendapatkan izin sebagai Bank Devisa dan terdaftar sebagai perusahaan publik yang tidak listing di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Shares of Bank Muamalat Indonesia are not traded in local or international stock exchanges. Bank Muamalat Indonesia has obtained a license as a Foreign Exchange Bank and registered as a public company that is not listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX).

Aksi Korporasi

Corporate Actions

Sepanjang tahun 2019, Bank Muamalat Indonesia tidak melakukan aksi korporasi seperti pemecahan saham *(stock split)*, penggabungan saham *(reverse stock)*, dividen saham, saham bonus dan perubahan nilai nominal saham.

During 2019, Bank Muamalat Indonesia did not conduct any corporate actions such as stock splits, reverse stock, stock dividends, bonus shares and changes in share nominal value.

iB

Bank Muamalat
Pertama Murni Syariah

1hram
1 *Stop Service Hajj* & Umrah Muamalat



Inilah Waktunya Rencanakan Umrah Anda dengan lebih Mudah, Tenang & *Insyaallah* Berkah

#AyoHijrah

Info lengkap hubungi: SalaMuamalat **1500016** | www.bankmuamalat.co.id

BankMuamalatIndonesia BankMuamalat Bank.Muamalat BankMuamalat

Bank Muamalat Indonesia terdaftar dan diawasi oleh OJK Otoritas Jasa Keuangan LPS Lembaga Penjamin Simpanan

Penghargaan dan Sertifikasi
Awards and Certifications



22 Februari 2019
February 22, 2019

Economic Review

Rank II in Corporate Secretary & Corporate Communication Kategori Bank Tbk Aset > 25T

Rank II in Corporate Secretary & Corporate Communication Bank Bank Tbk with Assets > 25T Category

Indonesia Corporate Secretary & Corporate Communication IV 2019
Indonesia Corporate Secretary & Corporate Communication IV 2019



22 Februari 2019
February 22, 2019

Warta Ekonomi

Innovative Company in Quickly Responding to Customer Problems in Islamic Digital Financial Services Kategori Islamic Banking

Innovative Company in Quickly Responding to Customer Problems in Islamic Digital Financial Services - Islamic Banking Category

Indonesia Digital Innovation Award 2019
Indonesia Digital Innovation Award 2019



14 Maret 2019
March 14, 2019

Infobank

Peringkat 1 SLE Index 2019 - Bank Umum Syariah

Rank 1 SLE Index 2019 - Commercial Sharia Banks

Satisfaction Loyalty Engagement Awards 2019
Satisfaction Loyalty Engagement Awards 2019



16 Mei 2019
May 16, 2019

Infobank

Peringkat 1 Tabungan - Bank Umum Syariah

Rank 1 Savings - Sharia Commercial Bank

Digital Brand Awards
Digital Brand Awards



16 Mei 2019
May 16, 2019

Infobank

1st Best Overall Kartu Debit Bank Umum Syariah untuk Shar-E Debit Muamalat

1st Best Overall Sharia Bank Debit Card for Shar-E Debit Muamalat

Digital Brand Awards
Digital Brand Awards



16 Mei 2019
May 16, 2019

Infobank

Peringkat I kategori Bank Umum Syariah Modal Inti Rp1 Triliun sd di bawah Rp5 Triliun

Rank I in the Sharia Commercial Bank Core Capital category of Rp1 Trillion up to under Rp5 Trillion

Digital Brand Awards
Digital Brand Awards



16 Mei 2019
May 16, 2019

Infobank

Peringkat I The Best Digital Brand 2014-2018 Bank Umum Syariah

Rank I of The Best Digital Brand 2014-2018 Commercial Sharia Bank

Digital Brand Awards
Digital Brand Awards



28 Juni 2019
June 28, 2019

Warta Ekonomi

Top Tabungan Umum Syariah 2019, Kategori Perbankan Syariah

Top Sharia General Savings 2019, Category: Islamic Banking

Anugerah Produk Keuangan Terbaik 2019: Pilihan Milenial
Best Financial Products Award 2019: Millennial Choice



23 August 2019
August 23, 2019

Economic Review

Award 2nd the best Indonesia GCG Implementation Economic Review

Award 2nd the best Indonesia GCG Implementation Economic Review

Indonesia Good Corporate Governance Award 2019
Indonesia Good Corporate Governance Award 2019

Peristiwa Penting
Event Highlights



20 Januari 2019
January 20, 2019

Tanggap Tsunami Krakatau
Krakatau Tsunami Response

Tak hanya mendapatkan dukungan penuh dari pejabat daerah setempat, kegiatan dukungan psikososial dalam penanggulangan efek psikologi tsunami Krakatau, Bank Muamalat menerjunkan Mobil Prestasi Muamalat selama seminggu penuh pada Januari 2019. Adapun total penerima manfaat dari di Pandeglang yakni 1.417 siswa terdiri dari 5 Sekolah Dasar, 1 SMP dan 2 komunitas.

Not only does the Company Obtain full support from the local officials, psychosocial support events in recovering psychological effects from Krakatau tsunami, Bank Muamalat operated Mobil Prestasi Muamalat for a week in Januari 2019. Benefit recipients in Pandeglang were 1,417 students of five Elementary School, one Junior High School, and two communities.



20 Februari 2019
February 20, 2019

Kerja Sama dengan Al-Multazam Hajj & Umroh Service
Cooperation with Al-Multazam Hajj & Umroh Service

Bank Muamalat menjalin kerja-sama dengan Al Multazam Group untuk membuat tabungan haji dan umroh yang aman diberi nama Tahapan Haji & Umroh Berencana (THUB) yang juga menggandeng perusahaan asuransi BUMN Askrindo Syariah.

Bank Muamalat cooperated with Al Multazam Group to make a safe Hajj and Umrah savings service called Tahapan Hajj & Umrah Planning (THUB). It was also done in cooperation with state-owned insurance company Askrindo Syariah.



26 Februari 2019
February 26, 2019

Tasyakuran Layanan Muamalat Prioritas Ke-2
2nd Muamalat Priority Tasyakuran Service

Muamalat Prioritas terus memperluas jangkauan layanan dengan membuka Muamalat Prioritas Center di 5 kota, yaitu Jakarta, Surabaya, Makassar, Medan dan Bandung.

Muamalat Prioritas continued to expand its range of services by opening Muamalat Priority Centers in 5 cities, namely, Jakarta, Surabaya, Makassar, Medan and Bandung.



4 April 2019
April 4, 2019

Volunteer Day
Volunteer Day

Manajemen beserta karyawan mengunjungi Kampung Pemulung Koja, Jakarta Utara, sebagai salah satu rangkaian Milad Bank Muamalat ke-27. Selain sebagai 'ajang' relawan karyawan, kegiatan ini juga bertujuan memberikan inspirasi kepada anak-anak pemulung beserta penduduk yang menjadi dilema sosial baik bagi pemerintah maupun masyarakat setempat. Kegiatan ini juga dilaksanakan sebagai salah satu kegiatan literasi keuangan bank.

Management and employees visited Kampung Pemulung Koja, North Jakarta, as part of its 27th Bank Muamalat Milad activity series. Apart from serving as an "event" for volunteering employees, this activity also aimed to inspire scavenger children and residents who represented social dilemmas for both the government and the local community. This activity was also carried out as one of the bank's financial literacy activities.



15 Agustus 2019
August 15, 2019

Bantuan Tandon Air untuk Masyarakat NTT
Water Reservoir Aid for NTT People

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk memberikan bantuan berupa fasilitas penampungan air bersih bagi warga Raknamo, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur pada 15 Agustus 2019. Sebanyak 18 kepala keluarga telah diberikan tangki berkapasitas 550 liter beserta filter pembersih air. Bantuan diberikan untuk kebutuhan air bersih masyarakat sekitar dan meningkatkan kualitas kesehatan warga. Sebelumnya, warga menggunakan drum penampungan dengan kondisi berkarat dan tanpa penutup.

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk provided aid in the form of clean water storage facilities for residents of Raknamo, Kupang Regency, East Nusa Tenggara on August 15, 2019. A total of 18 heads of families have been given 550-liter tank along with water purifier filters. The aid aims to provide the clean water needs of surrounding communities and to improve the quality of health of residents. Previously, residents used rusty shelter drums without a cover.



11 September 2019
September 11, 2019

Indonesian National Risk Assessment on Money Laundering & Terrorist Financing
Indonesian National Risk Assessment on Money Laundering & Terrorist Financing

Bank Muamalat Indonesia menyelenggarakan Business Corner dengan tema Indonesian National Risk Assessment on Money Laundering & Terrorist Financing bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang disampaikan oleh Direktur Pemeriksanaan, Riset, dan Pengembangan PPATK Bapak Ivan Yustiavandana pada tanggal 11 September 2019.

Bank Muamalat Indonesia held a Business Corner with the theme of the Indonesian National Risk Assessment on Money Laundering & Terrorist Financing with the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK) delivered by the Director of PPATK Research, Research and Development, Mr. Ivan Yustiavandana on September 11, 2019.



11 Oktober 2019
October 11, 2019

Kick Off Rumah Berkah Muamalat
Blessed Muamalat House Kick-Off

Bersama dengan Baitulmaal Muamalat (BMM), Bank Muamalat menggelar acara kick off pemberian Rumah Berkah Muamalat kepada 21 penerima manfaat di Desa Ciladaeun, Pandeglang, Banten. Pada bulan Oktober 2019, Baitulmaal Muamalat juga memberikan bantuan rumah kepada 30 penerima manfaat di Sukabumi, Jawa Barat. Program ini adalah kerja-sama Bank Muamalat, BMM dan Bakrie Amanah berupa renovasi rumah tidak layak huni dan tidak sehat sebagai salah satu dukungan bank terhadap program Sustainable Development Goals (SDG).

Together with Baitulmaal Muamalat (BMM), Muamalat Bank held a kick-off event for the handing over of Blessed Muamalat Houses to 21 beneficiaries in Ciladaeun Village in Pandeglang, Banten. In October 2019, Baitulmaal Muamalat also provided housing assistance to 30 beneficiaries in Sukabumi, West Java. This program is a collaboration between Bank Muamalat, BMM and Bakrie Amanah that provided renovations for uninhabitable and unhealthy houses as part of the bank's way of supporting Sustainable Development Goals (SDG).



14 November 2019
November 14, 2019

Launching DIN
Digital Islamic Network Launching

Peluncuran mobile banking baru dengan nama Muamalat DIN (Digital Islamic Network). Muamalat DIN dibekali berbagai peningkatan dari aplikasi sebelumnya, antara lain dari segi keamanan (biometrik sidik jari), top up GO-PAY & OVO, hingga fitur pembukaan rekening.

A new mobile banking service under the name Muamalat DIN (Digital Islamic Network) was launched. Muamalat DIN is equipped with various improvements from previous applications, including in terms of security (fingerprint biometrics), GO-PAY & OVO top up services, as well as an account-opening feature.



2 Mei 2019
May 2, 2019

Peluncuran Muamalat Hijrah Coffee
Launching of Muamalat Hijrah Coffee

Selain mempermudah nasabah dalam mengakses layanan melalui plaform digital #AyoHijrah, Bank Muamalat Indonesia memperkenalkan coffee banking sebagai konsep digital lounge yang berfungsi sebagai tempat pelayanan non-kantor kas dengan fasilitas internet, multimedia, serta akomodasi ringan yang memungkinkan nasabah dan calon nasabah mempelajari dan melakukan kegiatan perbankan dengan nyaman.

In addition to making it easier for customers to access services through its #AyoHijrah digital platform, Bank Muamalat Indonesia introduced "coffee banking" as a digital lounge concept that functions as a non-cash office service area with internet, multimedia and lightweight accommodation facilities that allowed customers and prospective customers to learn about and conduct banking activities comfortably.



17 Mei 2019
May 17, 2019

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa
Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa PT Bank Muamalat Indonesia Tbk digelar pada tanggal 17 Mei 2019 di Ballroom, Muamalat Tower, Jakarta.

The Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk was held on May 17, 2019 at the Ballroom of Muamalat Tower in Jakarta.



26 Mei 2019
May 26, 2019

Event Hijrah Fest 2019
Hijrah Fest 2019 Event

Untuk kedua kalinya, Bank Muamalat Indonesia mensponsori kegiatan Hijrah Fest di JCC Senayan, Jakarta, yang dirasa selaras dengan tagline Bank Muamalat Indonesia saat ini. Event yang diprakarsai oleh Arie K. Untung dan dibuka oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan tersebut meliputi kegiatan kajian hingga menghapal Al-Qur'an, sesi bisnis syariah dan literasi perbankan syariah.

For the second time, Bank Muamalat Indonesia sponsored Hijrah Fest activities at JCC Senayan, Jakarta, which was in line with the current tagline of Bank Muamalat Indonesia. The event was initiated by Arie K. Untung and opened by the Governor of DKI Jakarta, Anies Baswedan, and included study activities to memorize the Qur'an, as well as sharia business and sharia banking literacy sessions.



22 November 2019
November 22, 2019

Bantuan Banjir Konawe
Konawe Flood Relief

Bank Muamalat Indonesia menyalurkan bantuan *Corporate Social Responsibility* (CSR) lebih dari Rp1,8 miliar pada pembukaan event Hijrah Fest Makassar pada Jumat, 22 November 2019. Penyaluran dana zakat tersebut di antaranya senilai lebih dari Rp1.362 miliar untuk program renovasi 12 masjid di Konawe, Rp368 juta untuk program beasiswa 14 mahasiswa Universitas Hasanuddin, Rp20 juta untuk Masjid Jabal Taqwa Tanete, serta Rp5 juta untuk Masjid Ash-Shabuur Kampong Kawa dan Rp25 juta untuk nikah massal.

Bank Muamalat distributed corporate social responsibility (CSR) assistance of more Rp1.8 billion to the inauguration of Hijrah Fest Makassar event on Friday, November 22, 2019. The distribution of the zakat assistance is worth Rp1,362 billion for renovation program of 12 mosques in Konawe, Rp368 million for scholarship program for 14 students of Hasanuddin University, Rp20 million for Jabal Taqwa Tanete Mosque, and Rp5 million for Ash Shabuur Kampong Kawa Mosque and Rp25 million for massal marriage.



16 Desember 2019
December 16, 2019

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
Extraordinary General Meeting of Shareholders

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa di Ballroom, Muamalat Tower Jakarta.

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk held an Extraordinary General Meeting of Shareholders at the Ballroom in Muamalat Tower in Jakarta.



Sepanjang 2019
Throughout 2019

Kegiatan Hapus Tato
Hapus Tato Activities

Bank Muamalat Indonesia mengadakan sederet kegiatan CSR Hapus Tato selama 2019 baik gratis maupun 'diskon' bagi Muslim yang ingin menghapus tato yang ada di tubuhnya. Selama bulan Agustus 2019, Mobil Hapus Tato melakukan touring beberapa kota, yakni Yogyakarta, Bali dan Lombok. Mobil Hapus Tato Bank Muamalat Indonesia juga beberapa kali mengunjungi lapas Nusakambangan bekerja sama dengan pemerintah dan juga komunitas anak punk. Lebih kurang 4.000 orang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini.

Bank Muamalat Indonesia held a series of CSR activities to Hapus Tato throughout 2019, with both free and "discount" services for Muslims who wanted to Hapus Tato on their bodies. Throughout August 2019, a Mobil Hapus Tato toured several cities, namely, Yogyakarta, Bali and Lombok. Mobil Hapus Tato of Bank Muamalat Indonesia also visited Nusakambangan Prison several times in collaboration with the government and the punk community. Around 4,000 people have participated in this activity.



02.

Laporan Manajemen

Management Report



Laporan Dewan Pengawas Syariah

Sharia Supervisory Board Report



"Dewan Pengawas Syariah telah melakukan kajian terhadap *Standard Operating Procedure* dan kebijakan Bank untuk memastikan bahwa produk dan layanan yang ditawarkan Bank Muamalat Indonesia telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah."

"The Sharia Supervisory Board has conducted reviews on Standard Operating Procedure and Bank's policies to ensure products and services offered by the Bank Muamalat Indonesia is in accordance with Sharia Principles."

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillaahirrohmaanirrohiim

Alhamdulillaahi Rabbil Aalamin, Wa Shalatu Wa Salamu Ala Nabiyyina Muhammad, Wa Ala Aalihi Wa Shahbihi Wa Sallam, Amma Badu.

Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat dan serta salam semoga tercurah untuk Baginda Rasulullah SAW, beserta seluruh keluarga dan kerabatnya.

Melemahnya kondisi ekonomi global berpengaruh pada pelemahan kondisi ekonomi di dalam negeri. Hal itu juga berpengaruh pada kondisi perbankan secara umum, termasuk Bank Muamalat Indonesia. Di sisi lain, meluasnya penggunaan berbagai produk dan instrumen keuangan syariah akan dapat mendekatkan hubungan antara sektor perbankan syariah dengan sektor rill dan berujung pada harmonisasi antara kedua sektor tersebut. Di samping itu, penggunaan produk dan instrumen keuangan syariah akan mendukung kegiatan bisnis masyarakat dan mengurangi transaksi-transaksi yang bersifat spekulatif, sehingga mendukung stabilitas keuangan secara menyeluruh.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada seluruh jajaran Manajemen yang secara aktif dan responsif melakukan langkah penguatan Bank Muamalat Indonesia melalui perbaikan dan peningkatan efisiensi serta *governance* yang baik. Secara berkala DPS mengadakan rapat dengan Dewan Komisaris, Direksi dan Manajemen dalam rangka mencari langkah yang tepat dalam upaya penguatan Bank Muamalat Indonesia.

Selain itu, Dewan Pengawas Syariah juga telah melakukan *review* terhadap *Standard Operating Procedure* (SOP) dan kebijakan di Bank, sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan rekomendasi dan opini syariah. Secara singkat, kegiatan yang dilakukan Dewan Pengawas Syariah sepanjang tahun 2019 dapat dilaporkan sebagai berikut:

1. Secara periodik melakukan rapat rutin bulanan
   Selama tahun 2019, pembahasan terkait dengan hal-hal yang memerlukan opini DPS untuk memastikan kesesuaian dengan aspek syariah diantaranya adalah:
   a. *Benefit Free Tansfer*, Biaya Layanan VA/CMS & Buku Cek/BG;
   b. Penerapan Zakat Emas pada Hadiah Titipan berupa Emas;
   c. Pembatalan Unit *Indent;*
   d. Pengembalian Hadiah Bersyarat;
   e. Iqalah – Pembatalan PPJB & DP;
   f. Skema IMFD pada Obyek Barang *Indent;*
   g. Sekuritisasi Aset melalui Penerbitan Efek Beragun Aset Syariah;

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillaahirrohmaanirrohiim

Alhamdulillaahi Rabbil Aalamin, Wa Shalatu Wa Salamu Ala Nabiyyina Muhammad, Wa Ala Aalihi Wa Shahbihi Wa Sallam, Amma Badu.

We have no words but praise and gratitude for what God has provided for all of us. Peace be upon the Messenger of Allah and his family and his companions.

The decline of global economic is affecting Indonesia's economic conditions. This decline affects the general banking conditions in the country, including Bank Muamalat Indonesia. On the other hand, the widespread use of various Islamic financial products and instruments will be able to bring closer relations between the Islamic banking sector with the real sector that can lead to harmonization between the two sectors. In addition, the use of Islamic financial products and instruments will support community business activities and reduce speculative transactions, thereby supporting overall financial stability.

Sharia Supervisory Board (DPS) gives a very high appreciation to all Management levels who has taken the steps to strengthen Bank Muamalat Indonesia actively and responsively through improvements in efficiency and Good Corporate Governance. DPS periodically holds meetings with the Board of Commissioners, Directors and Management in order to find the right steps to strengthen Bank Muamalat Indonesia.

In addition, the Sharia Supervisory Board has also reviewed the Standard Operating Procedure (SOP) and policies at the Bank, as a material for consideration in providing recommendations and sharia opinions. In brief, the activities carried out by the Sharia Supervisory Board throughout 2019 can be reported as follows:

1. *Periodically arrange routine monthly meeting*
   During 2019, discussions related to the aspect that requires Sharia Supervisory Board opinion to ensure compliance with sharia aspects include:
   a. *Benefit Free Transfer, VA/CMS Service Fee & Check Book/BG;*
   b. *Application of Gold Zakat in the Prize Deposit in the form of Gold;*
   c. *Cancellation of Indent Unit;*
   d. *Conditional Gift Returns;*
   e. *Iqalah - Cancellation of PPJB & DP;*
   f. *IMFD Scheme on Objects for Indent Goods;*
   g. *Asset Securitization through Sharia Asset Backed Securities Issuance;*

h. Pelunasan Dipercepat pada Skema IMBT Refinancing;
i. Insiatif ILHAM (Investasi Logam Mulia Hijrah Muamalat);
j. Skema Factoring & Forefeiting Berdasarkan Prinsip Syariah;
k. Review Akad Pembiayaan:
   i. Istishna' Nasabah (Mustashni') dengan Bank (Shani');
   ii. Istishna' Bank (Mustashni') dengan Kontraktor/ Developer (Shani');
l. Mekanisme Teknis Jual Beli Piutang;
m. One Day Service Take Over;
n. Skema Channeling Pembiayaan Talangan Haji;
o. Skema Pembiayaan Properti Indent dengan Menggunakan Akad LF Murabahah;
p. Usulan Simplifikasi Pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan;
q. Skema Top Up MMQ;
r. Ketentuan pada Akad IMBT;
s. Implementasi Akad Mu'allaq;

2. Memberikan opini atas produk baru yang diterbitkan oleh Unit Bisnis;
3. Melakukan uji petik terhadap kegiatan operasional penyaluran dan penghimpunan dana untuk menjalankan tugas dan fungsi pengawasan DPS terhadap produk rumah program dan aktifitas Bank yang telah dan sedang berjalan, maka DPS melakukan uji petik atau audit di beberapa kantor cabang yang telah ditetapkan. Selama tahun 2019, pelaksanaan uji petik telah dilakukan di beberapa Unit Kerja dan Kantor Cabang yaitu:
   a. Unit Retail Banking Product – Consumer Liability pada tanggal 26–28 Juni 2019
   b. Unit Corporate Legal pada tanggal 30 September 2019
   c. Kantor Cabang Wolter Monginsidi pada tanggal 15–17 Oktober 2019
   d. Kantor Cabang Depok pada tanggal 19-22 November 2019
   e. Kantor Cabang Muamalat Tower pada tanggal 13-18 November 2019
   f. Kantor Cabang Kebon Jeruk pada tanggal 25-27 November 2019
   g. Kantor Cabang Melawai pada tanggal 28-29 November 2019
   h. Kantor Cabang Rawamangun pada tanggal 2-4 Desember 2019
4. Memberikan *sharing knowledge* terkait aspek syariah secara berkala baik kepada Level Manajemen dan karyawan secara umum.
5. Memberikan saran dalam hal peningkatan kode etik karyawan sebagai realisasi akhlaqul karimah.

Fokus perhatian DPS terhadap operasional Bank Muamalat Indonesia tahun 2019 antara lain:

1. Percepatan proses penyelesaian pembiayaan bermasalah salah satunya dengan memberikan advice melalui skema penjualan cessie/piutang;
2. Peningkatan *skill & knowledge* seluruh jajaran Karyawan pada segala level dalam hal pengetahuan tentang perbankan syariah baik secara konsep maupun implementasi;
3. Fokus pada *service excellence* untuk menjaga dan meningkatkan *competitiveness* khususnya di dunia Perbankan Syariah.

Secara umum, pengawasan kepatuhan kesyariahan didesain secara berlapis, sehingga pelaksanaan prinsip syariah pada produk dan layanan jasa di Bank Muamalat Indonesia telah dilakukan dengan baik. Meskipun ada beberapa catatan dari aspek pelaksanaan di

h. Accelerated Repayment on IMBT Refinancing Schemes;
i. ILHAM (Investasi Logam Mulia Hijrah Muamalat) Initiative;
j. Factoring & Forefeiting Schemes Based on Sharia Principles;
k. Financing Contract Review:
   i. Istishna' Customer (Mustashni') with Bank (Shani');
   ii. Istishna' Bank (Mustashni') with Contractor/Developer (Shani');
l. Technical Mechanisms of Buying and Receiving Receivables;
m. One Day Service Take Over;
n. Hajj Financing Channeling Scheme;
o. Indent Property Financing Scheme Using the Murabahah LF Contract;
p. Proposed Simplification of Multipurpose Financing without Collateral;
q. MMQ Top Up Scheme;
r. Provisions on IMBT Contract;
s. Implementation of the Mu'allaq Contract;

2. Provide opinions on new products issued by the Business Unit;
3. Conduct sampling tests on the operational activities of channeling and raising funds to carry out the duties and functions of Sharia Supervisory Board supervision of the Bank's house products and activities that have been and are currently running. Hence, DPS conducts random assessment or audit tests at several predetermined branch offices. During 2019, the assessment had been conducted in several Work Units and Branch Offices, namely:
   a. Retail Banking Product Unit - Consumer Liability on June 26-28, 2019
   b. Corporate Legal Unit on September 30, 2019
   c. Wolter Monginsidi Branch Office on October 15-17, 2019
   d. Depok Branch Office on November 19-22, 2019
   e. Muamalat Tower Branch Office on November 13-18, 2019
   f. Kebon Jeruk Branch Office on November 25-27, 2019
   g. Melawai Branch Office on November 28-29, 2019
   h. Rawamangun Branch Office on December 2-4, 2019
4. Knowledge sharing related to sharia aspects periodically both to the Management Level and employees in general.
5. Providing advice in terms of improving employee code of ethics as a realization of akhlaqul karimah.

In 2019, DPS is focusing their attention on several Bank Muamalat Indonesia operations, namely:

1. Accelerating the process of solving problematic financing, one of which is by providing advice through a cessie/receivables sales scheme;
2. Increasing skills & knowledge of all employees at all levels in terms of knowledge of sharia banking both in concept and implementation;
3. Focusing on excellence service to maintain and enhance competitiveness, especially in the world of Sharia Banking.

In general, oversight of compliance within sharia is designed in layers, so that the implementation of sharia principles on products and services at Bank Muamalat Indonesia has been carried out properly. Although there are some notes on several aspects of implementation

lapangan. Yang baik dipertahankan dan ditingkatkan kemudian yang masih kurang harus diperbaiki ke depannya.

in the field, the good ones are maintained and improved then those that are still lacking must be improved in the future.

DPS berharap agar seluruh jajaran Manajemen dapat menindaklanjuti isu-isu syariah terkini yang ada di lapangan dan industri serta menerjemahkan dalam bentuk strategi yang rill sehingga *sharia awareness* dapat meningkat bagi seluruh Karyawan Bank Muamalat Indonesia. DPS juga menyarankan agar Dewan Komisaris dan Direksi memperhatikan prinsip kehati-hatian dan risiko reputasi.

DPS expects that all levels of Management can follow up the latest sharia issues in the field and industry, and transform it to the form of a real strategy so that sharia awareness can be increased amongst all of Bank Muamalat Indonesia employees. DPS also suggests that the Board of Commissioners and Directors pay attention to the principles of prudence and reputation risk.

Pada tahun 2019, komposisi Dewan Pengawas Syariah Bank Muamalat Indonesia mengalami perubahan sesuai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 16 Desember 2019, yaitu dengan komposisi sebagai berikut:

In 2019, the composition of the Sharia Supervisory Board of Bank Muamalat Indonesia was changed according to the Extraordinary General Meeting of Shareholders dated December 16, 2019, with the following composition:

Jabatan *Position*	Nama *Name*
Ketua Dewan Pengawas Syariah *Chairman of the Sharia Supervisory Board*	Sholahudin Al-Aiyub
Anggota Dewan Pengawas Syariah *Member of the Sharia Supervisory Board*	Siti Haniatunnisa*)

*) Efektif setelah memperoleh persetujuan dari OJK
*) *Effective after obtaining approval from FSA*

Rapat tersebut menegaskan pengunduran diri Prof. Dr. (HC) KH. Ma'aruf Amin dari jabatan beliau sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah dan mengesahkan pengunduran diri Dr. H. Oni Sahroni, M.A dari jabatan beliau sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah. Pada kesempatan ini, saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. Dr. (HC) KH. Ma'aruf Amin dan Dr. H. Oni Sahroni, M.A atas kontribusinya selama masa jabatannya di Bank Muamalat Indonesia.

The meeting acknowledged Prof. Dr. (HC) KH. Ma'aruf Amin's resignation from his previous position as the Chairman of the Sharia Supervisory Board and accepted Dr. H. Oni Sahroni, M.A resignation from his previous position as the Member of the Sharia Supervisory. On this opportunity, I would like to express my gratitude to Prof. Dr. (HC) KH. Ma'aruf Amin and Dr. H. Oni Sahroni, M.A for his contribution during his tenure in Bank Muamalat Indonesia.

Selanjutnya, DPS berharap Bank Muamalat Indonesia dapat tumbuh lebih baik dari tahun sebelumnya dengan menunjukkan peningkatan di berbagai segi baik dari sisi profitabilitas, *service excellence, customer based* sesuai dengan tuntutan profesionalisme modern dalam kerangka implementasi prinsip syariah secara komprehensif pada pelayanan jasa keuangan dan finansial. DPS juga mendorong Bank masuk lebih banyak ke sektor ritel dan UMKM.

Furthermore, DPS expects that Bank Muamalat Indonesia can grow better than the previous year by showing improvements in various aspects both in terms of profitability, excellence service, customer-based in accordance with the demands of modern professionalism in the framework of implementing sharia principles comprehensively in financial services. DPS also encourages the Bank to be more involved in the retail and MSME sectors.

Pada kesempatan ini Dewan Pengawas Syariah juga senantiasa mengingatkan manajemen Bank Muamalat Indonesia agar tetap berkomitmen untuk menjaga pemenuhan prinsip-prinsip syariah serta kepatuhan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mudah-mudahan semua hal yang kita lakukan untuk memajukan Bank Muamalat Indonesia mendapat pertolongan Allah SWT serta curahan keberkahan-Nya. Semoga kita juga selalu berada dalam taufik dan hidayah serta inayah-Nya untuk dapat mencapai kesuksesan di dunia maupun di akhirat kelak dan kepada-Nyalah kita selalu berserah diri.

On this occasion, the Sharia Supervisory Board also constantly reminds the management of Bank Muamalat Indonesia to remain committed on maintaining compliance with sharia principles and applicable laws and regulations. We are hoping that every effort we make to grow Bank Muamalat Indonesia would be worthy of Allah's help and blessing. May we always be blessed with His direction and guidance in order to achieve a success in the world and hereafter and to Allah we shall completely surrender.

Wassalamualaikum
Warahmatullahi Wabarakatuh,

Jakarta, Maret 2020
Jakarta, March 2020



Sholahudin Al-Aiyub
Ketua Dewan Pengawas Syariah
Chairman of the Sharia Supervisory Board



1

Siti Haniatunnisa *)

Anggota Dewan Pengawas Syariah
Member of the Sharia Supervisory Board

*) Efektif setelah memperoleh persetujuan dari OJK
*) *Effective after obtaining approval from FSA*



2

Sholahudin Al-Aiyub

Ketua Dewan Pengawas Syariah
Chairman of the Sharia Supervisory Board

Laporan Dewan Komisaris
Board of Commissioners Report



"Dewan Komisaris secara aktif melakukan pengawasan terhadap penerapan strategi dan memastikan bahwa upaya yang dilakukan manajemen Bank telah sesuai dengan visi dan misi Bank. Berbagai tantangan yang dihadapi Bank sepanjang tahun 2019 menjadi perhatian utama Dewan Komisaris. Dewan Komisaris senantiasa mendorong manajemen untuk mempercepat proses transformasi Bank agar dapat kembali mewujudkan pertumbuhan usaha yang berkelanjutan."

"The Board of Commissioners actively supervises the implementation of strategies and ensures that the efforts made by the Bank's management are in acccordance with the Bank's vision and mission. Various challenges faced by Bank throughout 2019 became the main concern of the Board of Commissioners. The Board of Commissioners continues to encourage the management to accelerate the Bank's transformation process in order to be able to realize sustainable business growth."

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillaahirrohmaanirrohiim

Alhamdulillaahi Rabbil Aalamin, Wa Shalatu Wa Salamu Ala Nabiyyina Muhammad, Wa Ala Aalihi Wa Shahbihi Wa Sallam, Amma Badu.

Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat, rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Atas seijin-Nya pula PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dapat melalui tahun 2019 dengan hasil yang relatif baik. Ijinkan kami untuk menyampaikan pokok-pokok laporan pengawasan terhadap pengelolaan Bank di sepanjang tahun 2019 yang menjadi bagian dari pelaksanaan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Kondisi Lingkungan Eksternal Bank

Kondisi ekonomi global sepanjang tahun 2019 diwarnai dengan ketidakpastian yang menyebabkan banyak negara maju yang menarik dana investasi mereka dan menempatkan investasinya kembali ke negara-negara *safe haven*. Indonesia sebagai salah satu negara tujuan investasi tentunya juga terdampak dengan kebijakan ini, dimana dengan gejolak ekonomi global belakangan ini telah mengakibatkan naiknya risiko investasi di Indonesia.

Untuk menghadapi keadaan global tersebut, Bank Indonesia telah memberikan stimulus moneter untuk tetap menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menurunkan tingkat suku bunga acuan BI 7 *Days Repo Rate* sebesar 100 bps secara bertahap. Penurunan suku bunga acuan ini tentunya diharapkan dapat memberikan stimulus bagi dunia perbankan, dimana Bank bisa menurunkan *cosf of fund*nya. Namun, dampak dari penurunan *cost of fund* ini membutuhkan waktu untuk bisa dirasakan oleh industri perbankan, karena Bank tidak bisa serta merta menurunkan nilai bagi hasil yang diberikan kepada nasabah, terutama kepada fasilitas *existing*, namun untuk nasabah baru tentunya hal ini akan menjadi keuntungan tersendiri bagi Bank.

Selain itu kebijakan penurunan GWM yang dilakukan oleh Bank Indonesia sepanjang tahun 2019 juga sangat membantu likuiditas perbankan. Hal ini juga sangat berpengaruh untuk membantu posisi likuiditas Bank, meskipun dalam hal penurunan GWM ini tidak bisa langsung mendorong Bank untuk bisa langsung menyalurkan pembiayaannya secara signifikan, namun hal ini tentunya memberikan kesempatan bagi perbankan untuk bisa meningkatkan margin keuntungan dari dana yang disalurkan kepada nasabah baik melalui fasilitas pembiayaan yang disalurkan ataupun melalui berbagai produk perbankan lainnya.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillaahirrohmaanirrohiim

Alhamdulillaahi Rabbil Aalamin, Wa Shalatu Wa Salamu Ala Nabiyyina Muhammad, Wa Ala Aalihi Wa Shahbihi Wa Sallam, Amma Badu.

Dear Shareholders and Stakeholders,

All praise is due to Allah SWT who has bestowed His blessings and gifts upon all of us. Through His permission, PT Bank Muamalat Indonesia Tbk can get through 2019 with a relatively decent result. Please allow us to convey the main points of the supervisory report on the Bank's management throughout 2019 which are part of the implementation of the Good Corporate Governance principles.

External Condition of Bank

The year of 2019 was marked by an uncertainty in the global economic condition. As a result, many developed countries retrieved their investments and put it back on the safe haven countries. Indonesia as one of the investment destination countries had certainly affected by this policy. These recent global economic turmoil had also impacted to the increase of risk of investment in Indonesia.

To face this global situation, Bank Indonesia has provided monetary stimulus to maintain the momentum of economic growth in Indonesia. One of the steps is to reduce the BI 7 Days Repo Rate interest rate by 100 bps gradually. The decline in the benchmark interest rate will certainly provide a stimulus for the banking industry, which the Bank can reduce its cost of funds. However, the impact of reduction in cost of funds requires time to be perceived by the banking industry as the Bank could not directly reduce the return provided to customers, especially to existing facilities. However, for new customers, this will certainly be a distinct advantage for the Bank.

In addition, the reduction in the statutory reserve requirement which was carried out by Bank Indonesia throughout 2019 also greatly helped banking liquidity. This condition was also very influential to help the Bank's liquidity position. Although, in terms of reducing the statutory reserve requirement, it could not directly encourage the Bank to directly channel its financing significantly, the reduction certainly has provided an opportunity for banking industry to be able to increase the profit margin of the funds channeled to customers through either financing facilities or various other banking products.

Stimulus akomodatif yang diberikan oleh regulator ini tentunya berpengaruh pada bisnis Bank, namun dengan tingkat NPF Bank Muamalat Indonesia yang masih relatif tinggi, Bank juga sangat selektif dan berhati-hati dalam menyalurkan dana ke masyarakat. Selain itu, proses penambahan modal yang masih berjalan juga masih menjadi perhatian utama Bank. Hal ini juga menyebabkan perkembangan bisnis Bank menjadi kurang optimal yang pada akhirnya berpengaruh pada nilai pendapatan yang bisa dihasilkan oleh Bank.

This accommodative stimulus given by the regulator had affected the Bank's business. However, with a relatively high NPF, Bank Muamalat Indonesia had been very selective and prudent in providing financing to public. On the other hand, the on-going capital strengthening process has been a major concern for us. This issue has resulted in the Bank's limited business growth that eventually affected the overall revenue of the Bank.

Penilaian atas Kinerja Direksi

Kinerja Direksi sepanjang tahun 2019 patut untuk diapresiasi, mengingat begitu banyak hal yang dihadapi oleh Bank Muamalat Indonesia. Kondisi global yang kurang kondusif, proses penguatan permodalan yang masih terus berjalan, komposisi aset yang belum optimal, hingga tekanan terhadap margin yang berakibat pada tidak optimalnya laba yang dihasilkan. Tentunya hal-hal yang menjadi tantangan tersebut menjadi tidak mudah untuk bisa diatasi dan memerlukan keahlian serta dedikasi yang tinggi untuk bisa menghadapinya. Sepanjang tahun 2019 Direksi terus berupaya untuk menjalankan Bank Muamalat Indonesia dengan sebaik-baiknya dimana pertemuan rutin antar Direksi dan Dewan Komisaris dilakukan secara berkala untuk mencari solusi terbaik bagi Bank Muamalat Indonesia.

Assessment of Board of Directors Performance

The Board of Directors' performance in 2019 should be appreciated, given many obstacles faced by Bank Muamalat Indonesia. Unsupported global condition, ongoing capital strengthening process, unoptimal asset, and the pressure on margin that led to a less optimum income for the Bank. Surely, the challenges were not easy to be solved and required expertise and high dedication to be able to deal with them. Throughout 2019, the Board of Directors continued to run the business of Bank Muamalat Indonesia with the best practices. The regular meetings between the Directors and the Board of Commissioners had been held periodically to find the best solution for Bank Muamalat Indonesia.

Direksi melaporkan kepada Dewan Komisaris bahwa hingga Desember 2019 total aset tercatat sebesar Rp50,56 triliun atau turun sebesar 11,66% persen dibandingkan tahun sebelumnya yaitu Rp57,23 triliun. Tingkat penurunan aset ini sangat dipengaruhi oleh realisasi penambahan modal yang masih terus berjalan. Sementara dari sisi pembiayaan, pada tahun 2019 Bank Muamalat Indonesia mencatatkan nilai total pembiayaan sebesar Rp29,87 trilliun atau turun 11,00% dibandingkan pencapaian tahun buku 2018 yang sebesar Rp33,56 triliun. Penurunan pembiyaan ini dipengaruhi oleh strategi Bank di tahun 2019 yang selektif dalam menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat. Sementara itu, Dana Pihak Ketiga (DPK) mengalami penurunan sejalan dengan penurunan total aset. Pada akhir Desember 2019 DPK tercatat sebesar Rp40,36 triliun turun 11,57% dari posisi tahun lalu yang tercatat sebesar Rp45,64 triliun. Penurunan DPK ini juga merupakan salah satu strategi Bank untuk menurunkan biaya bagi hasil atau *cost of fund*. Dari sisi ekuitas Bank Muamalat Indonesia mencatatkan nilai ekuitas sebesar Rp3,94 trilliun naik 0,40% dari tahun lalu sebesar Rp3,92 trilliun.

The Board of Directors reported to the Board of Commissioners that up to December 2019 total assets were recorded at Rp50.56 trillion, decreasing 11.66% compared to the previous year at Rp57.23 trillion. The decline in assets is greatly influenced by the realization of capital strengthening process that is still going on. Meanwhile in 2019, Bank Muamalat Indonesia recorded a total financing of Rp29.87 trillion, decreased by 11.00% compared to the achievement in 2018 of Rp33.56 trillion. The decrease was due to selective strategy in 2019 in channeling financing to the public. In terms of liabilities, the level of Third Party Fund (TPF) decreased in line with the decline in total assets. At the end of December 2019, the TPF value was recorded at Rp40.36 trillion, decreasing by 11.57% from the total value of last year which was recorded at Rp45,64 trillion. The decline in the value of TPF was also one of the Bank's strategies to lower the cost of fund. In terms of equity, Bank Muamalat Indonesia recorded an equity value of Rp3.94 trillion, which increased by 0,40% from last year's of Rp3.92 trillion.

Dewan Komisaris menilai, walaupun telah banyak dilakukan program-program dan upaya efisiensi oleh manajemen Bank Muamalat Indonesia sepanjang tahun 2019, namun hal ini masih belum cukup berdampak pada tingkat profitabilitas. Hal ini terutama disebabkan oleh tipisnya margin pendapatan yang diperoleh oleh Bank. Pada bulan Desember 2019, Laba Sebelum Pajak (PBT) menunjukkan hasil sebesar Rp26 miliar atau turun sebesar 42,88% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp46 mlliar.

The Board of Commissioners considers that although there were many efficiency programs and initiatives carried out by the management of Bank Muamalat Indonesia throughout 2019 but these efforts have not yet had significant impact on the level of profitability. This was mainly due to the thin margin of income earned by the Bank. In December 2019, Profit Before Tax (PBT) recorded at Rp26 billion, a decrease of 42.88% compared to the same period in the previous year which was recorded at Rp46 billion.

Pada sisi rasio-rasio pada akhir Desember tahun 2019 tercatat rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) sebesar 12,42% atau naik 8 bps dibandingkan dengan posisi akhir tahun 2018 yang tercatat sebesar 12,34%. Sementara nilai *Return on Equity* (ROE) pada akhir Desember 2019 Bank Muamalat Indonesia mencatatkan nilai ROE sebesar 0,45% atau turun 71 bps dari posisi tahun lalu yang sebesar 1,16%.

On the ratios at the end of December 2019, the Capital Adequacy Ratio (CAR) ratio was recorded at 12.42%, increasing by 8 bps compared to the position at the end of 2018 which was recorded at 12.34%. Meanwhile, the Return on Equity (ROE) value at the end of December 2019 Bank Muamalat Indonesia recorded an ROE value of 0.45%, decreased by 71 bps from last year position of 1.16%.

Pengawasan terhadap Penerapan Strategi

Sesuai dengan fungsi dari Dewan Komisaris yang bertugas untuk melakukan pengawasan, Dewan Komisaris memberikan masukan-masukan yang diberikan terkait dengan praktek-praktek *Good Corporate Governance* yang harus diterapkan secara penuh dan juga pengelolaan risiko yang harus diperhatikan. Hal-hal tersebut memiliki implikasi terhadap operasional Bank secara keseluruhan, sebagai contoh adalah terkait dengan pengelolaan manajemen risiko Bank telah melakukan *self assessment* untuk mengetahui adanya masalah-masalah yang terjadi dan Bank melalui manajemen telah menyusun rencana kerja yang akan dilakukan untuk bisa mengelola faktor risiko tersebut. Tugas dari Dewan Komisaris adalah mengawasi pelaksanaan dari rencana kerja tersebut agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Supervision of Strategy Implementation

In accordance with the Board of Commissioners' supervision function, the Board of Commissioners provides inputs related to the Good Corporate Governance practices that must be applied thoroughly and the risk management that must be considered. These things have implications to the Bank's overall operations, for example risk management. The Bank has conducted a self-assessment to find out the problems that occurred. In addition, the Bank through the management has prepared a work plan that would be carried out to be able to manage these risk factors. Furthermore, the Board of Commissioners' duty is to oversee the implementation of work plan so that it is carried out properly.

Dewan Komisaris menilai, terdapat sejumlah inisiatif strategis yang dijalankan Direksi tahun 2019 yang berdampak positif terhadap kinerja Bank, baik untuk tahun 2019 maupun tahun-tahun mendatang. Inisiatif penghematan yang dilakukan oleh Direksi tentunya patut untuk diapresiasi, karena dengan kondisi menurunnya pendapatan yang diterima oleh Bank, maka penghematan adalah sebuah keniscayaan yang harus dilakukan demi menurunkan beban yang ada. Beberapa program penghematan yang dilakukan olah Direksi adalah pengurangan biaya sewa gedung terutama terkait dengan cabang, penghematan biaya IT, penghematan biaya karyawan, penghematan biaya transportasi dan penghematan lainnya yang telah dilakukan sepanjang tahun 2019.

The Board of Commissioners considers there were several strategic initiatives done by the Board of Directors in 2019 that have a positive impact on the Bank's performance for 2019 and the upcoming years. The savings initiative undertaken by the Board of Directors deserves an appreciation, because given the condition of declining income gained by the Bank, efficiency is a necessity that must be executed in order to reduce the existing costs. Several savings programs undertaken by the Board of Directors were reducing building rental costs mainly related to branch offices, IT cost savings, employee cost savings, savings of transportation cost and other savings that had been carried out throughout 2019.

Selain strategi efisiensi yang telah ditetapkan, dalam mengarungi tahun 2019 Direksi memiliki 3 fokus utama yang menjadi perhatian Bank yaitu:

1. *Bad Bank and Capital* (Penyelesaian pembiayaan bermasalah dan penguatan permodalan).
2. *Good Bank* (Perbaikan proses dan pertumbuhan bisnis yang sehat serta berkesinambungan).
3. *New Bank* (Pengembangan bisnis dengan fokus kepada Lembaga/Organisasi/Komunitas Islam dan Pemanfaatan kesempatan bisnis dari ekosistem bisnis nasabah eksisting).

In addition to the efficiency strategies that have been implemented, in 2019 the Board of Directors has three main focuses that become the Bank's concern, namely:

1. *Bad Bank and Capital (Settlement of non-performing financing and strengthening capital).*
2. *Good Bank (Improvement of business processes and sound and sustainable growth).*
3. *New Bank (Business development focusing on Islamic Institutions/Organizations/Communities and Utilization of business opportunities from existing customer business ecosystems).*

Ketiga *focus strategy* tersebut, merupakan hasil identifikasi dari Manajemen Bank Muamalat Indonesia terhadap masalah utama yang dialami Bank dan telah berusaha dengan baik untuk bisa menyelesaikannya, berbagai cara telah dilakukan oleh Direksi untuk bisa mewujudkan hal-hal tersebut. Meskipun demikian harus sama-

The three focus strategies are the results of identification from the Management of Bank Muamalat Indonesia on the main problems experienced by the Bank and has tried the best ways to be able to solve them. Directors have conducted various approaches to actualize these matters. However, we should understand that the three focus

sama kita pahami bahwasanya ketiga *focus strategy* tersebut bukan merupakan hal mudah untuk bisa dieksekusi dengan cepat mengingat kompleksitas dari keadaan Bank pada saat ini yang belum bisa bergerak dengan optimal.

Pengawasan Dewan Komisaris terhadap Direksi

Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris terhadap kinerja dan pencapaian pada Rencana Bisnis Bank (RBB) dilakukan antara lain melalui meeting-meeting formal yang dilakukan secara berkala dan meeting-meeting ad-hoc yang diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan. Dewan Komisaris secara formal melaporkan hasil pengawasan pencapaian RBB kepada OJK setiap 6 bulan sekali, dimana melalui laporan ini Dewan Komisaris memberikan tanggapan terkait dengan keadaan keuangan, manajemen risiko, sampai dengan penerapan *Good Corporate Governance* yang dilakukan. Diharapkan dengan adanya kontrol ini dapat membantu manajemen untuk bisa mengelola seluruh risiko yang ada dan juga pencapaian target keuangan yang telah ditetapkan.

Pandangan atas Prospek Usaha Bank

Dewan Komisaris memliki optimisme bahwasanya Bank Muamalat Indonesia ke depannya mampu untuk terus mengembangkan bisnisnya. Optimisme ini didasari oleh masih tingginya tingkat kepercayaan masyarakat kepada Bank Muamalat Indonesia. Masih tingginya tingkat kepercayaan masyarakat ini tentunya memberikan sinyal bahwasanya Bank Muamalat Indonesia masih dinilai sebagai salah satu mitra perbankan terbaik bagi masyarakat. Selain itu dengan masih berlangsungnya proses penguatan modal yang sedang dilaksanakan maka Dewan Komisaris percaya bahwa dengan segera terealisasinya proses ini, maka bisnis Bank Muamalat Indonesia dapat kembali bergerak dan tumbuh secara optimal sehingga pada gilirannya akan menumbuhkan aset dan juga laba bagi Bank.

Terkait dengan visi jangka panjang Bank Muamalat Indonesia untuk dapat menjadi Bank Syariah terbaik dan termasuk dalam 10 besar bank di Indonesia dengan eksistensi yang diakui di tingkat regional tentunya membutuhkan kerja keras yang konsisten. Dewan Komisaris sangat percaya kepada insan-insan Bank Muamalat Indonesia bahwasanya hal ini bisa digapai dengan sinergi team yang dilakukan dan atas izin Tuhan Yang Maha Esa rencana yang telah dicanangkan ini bisa terlaksana dengan baik.

Pandangan atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Dewan Komisaris menilai penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*/GCG) di Bank Muamalat Indonesia secara umum sudah cukup baik. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip GCG yang cukup memadai. Namun tentunya Bank masih memiliki ruang untuk memperbaiki secara terus menerus hal ini ke depan.

Dari sisi *Governance Structure*, Dewan Komisaris telah memperbarui keanggotaan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi serta Komite Tata Kelola Perusahaan.

strategies are not easy to execute quickly, given the complexity of the Bank's current state that has not been able to operate optimally.

Board of Commissioners Oversight to Board of Directors

The supervision had been carried out by the Board of Commissioners related to the performance and achievement targets that had been set through the Bank's Business Plan (RBB) either by a periodically formal meetings or ad-hoc meetings based on needs. The Board of Commissioners formally reports the supervision results on the Company's performance to the OJK every 6 months. Through this report, the Board of Commissioners provides responses related to financial conditions, risk management, and the implementation of Good Corporate Governance. It is expected that this control could help management to be able to manage all existing risks and also achieve the set financial targets.

View of Bank Business Prospects

The Board of Commissioners is optimistic that Bank Muamalat Indonesia will be able to continue developing its business going forward. This optimism is based on the remaining high level of public trust in Bank Muamalat Indonesia. indicating that Bank Muamalat Indonesia is still considered one of the best banking partners for the public. In addition, with the on-going capital strengthening process being carried out, the Board of Commissioners believes that with the immediate realization of this process, Bank Muamalat Indonesia would be able to shift and grow its business optimally, which in turn will grow the Bank's asset and income.

In connection with the long-term vision of Bank Muamalat Indonesia to become the best Sharia Bank and be among the top 10 banks in Indonesia with the existing recognition at the regional level, it certainly requires consistent hard work. The Board of Commissioners strongly believes in the Bank Muamalat Indonesia's employees that this is achievable through the team synergy. In addition, with the blessing of God Almighty, this plan could be well executed in the near future.

View of Corporate Governance Implementation

In general, the Board of Commissioners considers that the implementation of Good Corporate Governance (GCG) principles at Bank Muamalat Indonesia is fairly good. This is reflected in the adequate implementation of GCG principles. However, the Bank still has room for continous improvement going in the forward.

In terms of Governance Structure, the Board of Commissioners has formed and fulfilled the composition of the Audit Committee, the Risk Monitoring Committee, the Nomination and Remuneration Committee

Direksi juga telah membentuk 4 (empat) komite yaitu *Risk Management Committee*, IT *Steering Committee*, ALCO dan *Human Capital Committee* guna mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi. Selain ke-4 Komite tersebut, Direksi juga telah melengkapi organisasi dengan satuan kerja Audit, Manajemen Risiko dan Kepatuhan yang independen dari satuan kerja Operasional sehingga diharapkan mampu mendukung kegiatan operasional Bank Muamalat Indonesia dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan GCG.

and the Corporate Governance Committee. The Board of Directors has also formed four committees namely Risk Management Committee, IT Steering Committee, ALCO and Human Capital Committee to support the effectiveness of the implementation of the Directors' duties and responsibilities. In addition to the four Committees, the Board of Directors has also facilitated the organization with an Audit, Risk Management and Compliance work unit that operate independently from the Operational work unit so that their presences are expected to be able to support the operational activities of Bank Muamalat Indonesia by taking into account the prudence and GCG principles.

Kami berpendapat bahwa infrastruktur tata kelola Bank berupa Kebijakan dan Prosedur Bank, Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing struktur organisasi telah memadai dan mampu untuk mendukung kegiatan usaha Bank.

We are in the opinion that the Bank's governance infrastructures in the form of Bank Policies and Procedures, Main Tasks and Functions of each organizational structure are adequate to support the Bank's business activities.

Penilaian Kinerja Komite di bawah Dewan Komisaris

Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan dibantu oleh lima organ penunjang yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Tata Kelola Perusahaan, dan Komite Tata Kelola Terintegrasi. Komite-komite tersebut telah menyelenggarakan rapat-rapat sesuai ketentuan dan kebutuhan Bank serta telah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris sesuai dengan fungsinya.

Committee Performance Evaluation under Board of Commissioners

In carrying out its supervisory function, the Board of Commissioners is assisted by five supporting organs, namely the Audit Committee, the Risk Monitoring Committee, the Nomination and Remuneration Committee, the Corporate Governance Committee and Integrated Corporate Governance Committee. These committees have held meetings in accordance with the Bank's provisions and requirements. In addition, they have provided recommendations to the Board of Commissioners in accordance with their respective functions.

Komite-komite tersebut juga telah memberikan masukan dan saran kepada Dewan Komisaris sesuai dengan bidang tanggung jawabnya.

These committees have also provided input and advice to the Board of Commissioners in accordance with their responsibilities.

Adapun dasar penilaian kinerja Komite yang digunakan Dewan Komisaris antara lain meliputi penilaian kinerja Komite secara kolegial dan secara individu. Penilaian secara kolegial meliputi struktur Komite Dewan Komisaris, efektivitas rapat, serta efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Sedangkan penilaian secara individu meliputi kompetensi dan kapabilitas, serta efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Komite.

The basis for evaluating Committee performance used by the Board of Commissioners includes collegial and individual performance assessment. The collegial assessment includes the structure of the Board of Commissioners' Committee, the effectiveness of the meeting, and the effectiveness of duties and responsibilities implementation. Meanwhile, individual assessments include competencies and capabilities, as well as the Committee members' effectiveness of the duties and responsibilities implementation.

Pandangan Dewan Komisaris atas Penerapan *Whistleblowing System* (WBS)

Penerapan *whistleblowing system* (WBS) merupakan langkah yang dijalankan Bank Muamalat Indonesia untuk mencegah potensi pelanggaran dalam praktik bisnis. Dewan Komisaris sepenuhnya mendukung pelaksanaan WBS untuk menciptakan iklim kerja yang terbuka, tulus, jujur dan bertanggung jawab di lingkungan Bank Muamalat Indonesia. Bank mendorong setiap pihak agar berani dalam melaporkan jika terdapat pelanggaran atau indikasi *fraud*.

Board of Commissioners View of the Whistleblowing System (WBS) Implementation

The implementation of whistleblowing system (WBS) is an action taken by Bank Muamalat Indonesia to prevent potential violation in business practices. The Board of Commissioners fully supports the implementation of WBS to establish an open, genuine, honest and responsible work climate within Bank Muamalat Indonesia. The Bank encourages each party to be brave in reporting if there is a violation or indication of fraud.

Implementasi WBS di Bank Muamalat Indonesia memberikan kepastian kepada semua pihak untuk bisa berpartisipasi. Dewan Komisaris beranggapan bahwa WBS akan berdampak positif bagi Bank. Di samping itu, Dewan Komisaris turut berperan dalam mekanisme WBS yang telah tertuang dalam pedoman. Tidak hanya

WBS implementation at Bank Muamalat Indonesia gives assurance to all of the Bank's parties to be able to participate. The Board of Commissioners asserted that these WBS will give a positive impact on the Bank. In addition, the Board of Commissioners also plays a role in the WBS mechanism set out in the guidelines. In addition to

melakukan pemantauan, Dewan Komisaris diberikan wewenang untuk menindaklanjuti pelaporan yang masuk dengan tingkat dan batasan tertentu.

monitoring, the Board of Commissioners is given the authority to follow up on reports that come in with certain levels and limits.

Per 31 Desember 2019, Dewan Komisaris mencatat tidak ada laporan yang masuk melalui mekanisme WBS yang telah diterapkan Bank Muamalat Indonesia.

As of December 31, 2019, the Board of Commissioners recorded that there was no report submitted through the WBS mechanism that had been implemented by Bank Muamalat Indonesia.

Perubahan Komposisi Dewan Komisaris

Pada tahun 2019, komposisi Dewan Komisaris Bank Muamalat Indonesia tidak mengalami perubahan, yaitu dengan komposisi sebagai berikut:

Changes in Board of Commissioners Composition

In 2019, the composition of the Board of Commissioners of Bank Muamalat Indonesia remains the same, with the following composition:

Jabatan *Position*	Nama *Name*
Komisaris Utama/Komisaris Independen *President Commissioner/Independent Commissioner*	Ilham Akbar Habibie
Komisaris Independen *Independent Commissioner*	Iggi Haruman Achsien
Komisaris Independen *Independent Commissioner*	Edy Setiadi
Komisaris *Commissioner*	Mohamed Hedi Mejai*
Komisaris *Commissioner*	Abdulsalam Mohammad Joher Al-Saleh*

* Efektif setelah memperoleh persetujuan Uji Kemampuan dan Kepatutan dari OJK
** Effective after receiving approval of the Fit and Proper Test from FSA*

Pada kesempatan ini, saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. Dr. (HC) KH. Ma'aruf Amin dan Dr. H. Oni Sahroni, M.A atas kontibusinya selama masa jabatannya di Bank Muamalat Indonesia. Kami mengucapkan selamat bertugas bagi negeri tercinta Indonesia bagi Prof. Dr. (HC) KH. Ma'aruf Amin.

On this opportunity. I would to express my gratitude to Prof. Dr. (HC) KH. Ma'aruf Amin and Dr. H. Oni Sahroni, M.A for his contribution during his tenure in Bank Muamalat Indonesia. We wish the very best for Prof. Dr. (HC) KH. Ma'aruf Amin for the new responbilities for our beloved country, Indonesia.

Penutup

Tahun 2019 yang sangat menantang telah berhasil dilalui, Dewan Komisaris memberikan apresiasi kepada Direksi dan jajaran manajemen Bank Muamalat Indonesia serta seluruh karyawan atas dedikasi dan kerja keras yang telah dipersembahkan kepada Bank Muamalat Indonesia. Kepada para Pemegang Saham dan pemangku kepentingan atas kepercayaan dan dukungan yang diberikan sehingga Dewan Komisaris dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.

Dewan Komisaris juga mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh nasabah, mitra kerja, dan regulator. Semoga kerja sama yang selama ini telah terjalin dengan baik dapat terus ditingkatkan di masa-masa mendatang.

Closing Statement

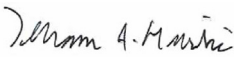
We have been through the year of 2019 which was very challenging year for us. Thus, the Board of Commissioners gave appreciation to the Directors and management of Bank Muamalat Indonesia and all employees for their dedication and hard work given to Bank Muamalat Indonesia. The Board of Commissioners also would like to give appreciation to the Shareholders and stakeholders for the trust and support so that the Board of Commissioners can carry out their duties and responsibilities well.

The Board of Commissioners also expresses its highest gratitude to all customers, business partners and regulators. Hopefully, the well-established cooperation can be continually improved in the future.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Jakarta, Maret 2020

Jakarta, March 2020



Ilham A. Habibie

Komisaris Utama/Komisaris Independen

President Commissioner/Independent Commissioner



1

Edy Setiadi

Komisaris Independen
Independent Commissioner

2

Ilham A. Habibie

Komisaris Utama/Komisaris Independen
President Commissioner/Independent Commissioner

3

Iggi Haruman Achsien

Komisaris Independen
Independent Commissioner



4

Mohamed Hedi Mejai*

Komisaris
Commissioner

5

Abdulsalam Mohammad Joher Al-Saleh*

Komisaris
Commissioner

* Efektif setelah memperoleh persetujuan Uji Kemampuan dan Kepatutan dari OJK
** Effective after receiving approval of the Fit and Proper Test from FSA*

Laporan Direksi
Board of Directors Report



"Dinamika usaha di sepanjang tahun 2019 menjadi tantangan yang harus dihadapi Bank Muamalat Indonesia. Bank telah mengambil sejumlah inisiatif strategis agar Bank Muamalat Indonesia dapat melalui kondisi tersebut dengan hasil yang baik. Sejalan dengan itu, Bank juga menginisiasi program transformasi yang diyakini dapat mengantarkan Bank Muamalat Indonesia meraih untuk tumbuh secara berkelanjutan."

"The business dynamics throughout 2019 had become challenges for BMI to deal with. The Bank had taken few strategic initiatives to get through such challenges with a decent result. The Bank had also initiated transformation program that is believed to be able to equip Bank Muamalat Indonesia for growing sustainably going forward."

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillaahirrohmaanirrohiim

Alhamdulillaahi Rabbil Aalamin, Wa Shalatu Wa Salamu Ala Nabiyyina Muhammad, Wa Ala Aalihi Wa Shahbihi Wa Sallam, Amma Badu.

Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,
Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan Semesta Alam yang telah melimpahkan nikmat, rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga Bank Muamalat Indonesia berhasil melalui tahun 2019 yang penuh tantangan dengan capaian kinerja yang relatif cukup baik.

Kondisi ekonomi global dan nasional yang dinamis sepanjang tahun 2019 menjadi tantangan utama yang dihadapi di tengah upaya Bank untuk memperkuat struktur permodalan. Dalam menghadapi kondisi tersebut, Manajemen telah mengambil sejumlah inisiatif strategis yang diharapkan mampu memberikan dampak yang positif terhadap kinerja Bank baik pada tahun 2019 maupun ke depan secara berkelanjutan.

Selanjutnya perkenankanlah kami selaku Direksi Bank Muamalat Indonesia untuk menyampaikan Laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan Bank di tahun buku 2019 yang menjadi bagian dari pelaksanaan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Kondisi Ekonomi dan Industri Perbankan 2019

Laju pertumbuhan ekonomi global tahun 2019 mengalami kontraksi sepanjang tahun. Kontraksi tersebut utamanya dipicu oleh memburuknya situasi hubungan dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok. Perang dagang antara dua negara penguasa ekonomi global ini berdampak pada merosotnya volume perdagangan dunia. Selain itu, permasalah geopolitik yang terjadi di Inggris dan Hong Kong juga semakin memperkeruh keadaan.

Merespon hal tersebut, beberapa negara melakukan stimulus fiskal dan memperlonggar kebijakan moneternya. Bank Sentral AS (The Fed) bahkan tercatat dua kali menurunkan suku bunga acuan menjadi 1,75%-2,00%.

Di sisi lain, *International Monetary Fund* (IMF) telah dua kali memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global tahun 2019. Proyeksi yang semula ditetapkan 3,5% pada Januari dipangkas sebanyak 0,2% pada April. Angka itu kemudian diturunkan lagi menjadi 3,0% pada Oktober 2019 akibat dampak dari ketidakpastian global ini.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillaahirrohmaanirrohiim

Alhamdulillaahi Rabbil Aalamin, Wa Shalatu Wa Salamu Ala Nabiyyina Muhammad, Wa Ala Aalihi Wa Shahbihi Wa Sallam, Amma Badu.

Dear Distinguished Shareholders and Stakeholders,
All praise is to Allah SWT, the Lord of the Universe that has bestowed all favors, blessings, and grace to all of us, so that Bank Muamalat Indonesia has been able to pass through the year of 2019, despite of the multiple challenges, with a relatively decent performance.

The global and national economic conditions were very dynamic throughout 2019 and had became the main challenge for the Bank in its effort to strengthen its capital structure. In the face of such conditions, the Management had taken several strategic initiatives that were expected to give positive impact to the Bank's performance, both in 2019 and in the future.

Hereafter, please allow us as the Board of Directors of Bank Muamalat Indonesia to deliver our report on the management of the Bank in the fiscal year of 2019, which is also part of the implementation of the Good Corporate Governance principles.

Economic and Banking Sector Conditions in 2019

The global economy in 2019 experienced a contraction throughout the year. This economic contraction was driven by the worsening trade relationship between the United States and the People's Republic of China. The trade war between these two global economic powers caused a decrease in the global trading volume. Other than that, geopolitical issues in the Great Britain and Hong Kong added to the worsening situations.

As a response to these challenges, several countries have made use of fiscal stimuli and have eased their monetary policies. The Federal Reserve (The Fed) has lowered its benchmark on interest rate twice to 1.75%-2.00%.

On the other side, International Monetary Fund (IMF) has cut their global economy growth prediction twice in 2019. The initial projection of 3.5% set in January was reduced by 0.2% as per April. This projection was further lowered to 3.0% as of October 2019 due to the global uncertainty.

Ketidakpastian perekonomian global turut berpengaruh terhadap kinerja industri perbankan di Indonesia. Akibat adanya perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok, aliran modal asing yang masuk ke Indonesia kian tertekan, karena meningkatnya risiko investasi di negara berkembang seperti Indonesia.

The uncertainty in the global economy had also impacted the performance of the banking sector in Indonesia. Due to the trade war between the United States of America versus People's Republic of China, the inflow of foreign capital to Indonesia was under pressure, due to the higher risk of investing in the developing countries, such as Indonesia.

Berkurangnya aliran modal asing yang masuk berpengaruh pada laju pertumbuhan perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Ekonomi Indonesia tumbuh sedikit lebih lambat dibandingkan tahun sebelumnya sejak triwulan pertama 2019. Gejala perlambatan ekonomi inilah yang akhirnya mendorong Bank Indonesia untuk memberikan stimulus moneter bagi perekonomian untuk tetap mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia. Salah satu stimulus moneter yang diberikan adalah dengan menurunkan BI 7-day Reverse Repo Rate (BI-7DRR) sebesar 100 basis poin (bps) secara bertahap menjadi 5,00% pada tahun ini dan juga pelonggaran rasio GWM bagi Bank.

The decrease in capital inflow impacted the growth of Indonesian economy. Indonesian economy showed a sign of slowing down as compared to the year before, since the start of the first quarter in 2019. The economic slowdown forced Bank Indonesia to use monetary stimuli to maintain economic growth. One of the monetary stimuli was used including the lowering of the BI 7-day Reverse Repo Rate (BI-7DRR) by 100 basis point (bps) in several phases to 5.00% this year, as well as the easing in the statutory reserve requirement ratio for the Bank.

Perlambatan pertumbuhan ekonomi ini juga sangat berpengaruh terhadap Bank industri perbankan. Berkurangnya modal masuk dan potensi risiko yang meningkat memberikan sentimen terhadap untuk lebih selektif dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah. Pada akhirnya sentimen ini berdampak pada laju pertumbuhan pembiayaan dan juga laju pertumbuhan aset bank yang lebih lambat.

The slowdown in the growth of the economy also severely impacted the banking sector. The decrease in capital inflow and the increase of risks changed banks' sentiment towards risk, forcing banks to be more selective in distributing financing to customers. This eventually slowed the growth in lending, and eventually the growth in assets of the bank.

Kebijakan Strategis Bank

Sejalan dengan tema yang telah ditentukan, arah kebijakan Bank Muamalat Indonesia untuk tahun 2019 adalah penetrasi bisnis kepada seluruh elemen umat Islam dari hulu ke hilir, pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan, transformasi sistem teknologi dan informasi, serta menjaga tingkat pembiayaan bermasalah di level yang optimal.

Rencana Bisnis Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2019 ini diprioritaskan pada 3 (tiga) fokus utama, yaitu:

1. **Bad Bank and Capital**
   Setelah melakukan serangkaian aksi korporasi dan langkah penguatan permodalan yang dilakukan pada tahun 2018, Bank fokus pada pemulihan *(recovery)* secara agresif dari portofolio *Bad Bank* yang dimilikinya. Untuk penanganan pembiayaan bermasalah, Bank melanjutkan perbaikan proses *collection* dan memperbaharui sistem penagihan khususnya untuk segmen ritel. Sedangkan untuk segmen *Corporate* dan *Commercial*, manajemen telah semaksimal mungkin berusaha untuk meningkatkan produktivitas tim dan melakukan sinergi antara pihak bisnis *Good Bank* dan *Bad Bank* dalam upaya menekan angka pembiayaan bermasalah. Sementara itu, Bank juga melakukan optimalisasi

Strategic Policies of the Bank

In line with the theme that has been set, the policy directions of Bank Muamalat Indonesia in 2019 was focused on penetrating all elements in the Moslem communities both in the upstream and downstream, ensuring the sustainability of business growth, transforming the information and technology systems, as well as maintaining low non-performing loan.
The business plan of Bank Muamalat Indonesia in 2019 could be prioritized into 3 (three) main focuses, namely:

1. *Bad Bank and Capital*
   After a series of corporate actions and steps to strengthen its capital in 2018, the Bank focused on the recovery of bad portfolio that the Bank has, in an aggressive manner. In order to manage the non-performing loans, The Bank continued to improve its collection process and renewed its systems for claims especially for the retail segment. Meanwhile for the Corporate and Commercial segments, the Management aimed to increase the team's productivity and to have a synergy between business parties that were Good and Bad Bank in order to limit the non-performing loans. Furthermore, the Bank also optimized the Risk Weighted Asset (ATMR) to strengthen the Bank's capital. Moreover,

Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR), untuk memberikan ruang dalam penguatan modal yang dimiliki perusahaan. Selain itu, sesuai dengan keputusan RUPSLB tanggal 16 Desember 2019, Bank Muamalat Indonesia melanjutkan rencananya untuk melakukan penambahan modal melalui mekanisme Penawaran Umum Terbatas VI dan penerbitan Sukuk Subordinasi di masa yang akan datang.

accordance to the decision of the extraordinary shareholders meeting on December 16, 2019, Bank Muamalat Indonesia has made plan to increase its capital not only through the Limited Public Offering VI and also the issuance of Syariah subordinated bonds in the future.

2. Good Bank

Sejalan dengan tema Rencana Bisnis Bank, Bank Muamalat Indonesia akan menjadi *one-stop-solution* untuk kebutuhan produk dan jasa keuangan dalam ekosistem bisnis syariah di Indonesia. Untuk mencapainya, beberapa inisiatif yang dilakukan oleh Bank diantaranya adalah meningkatkan produktivitas di semua unit bisnis baik ritel maupun *corporate* dan *commercial*, akselerasi pendanaan dengan sumber dana murah, dan upaya penurunan *cost of fund*. Beberapa upaya untuk meningkatkan pendapatan lainnya adalah, Bank akan fokus pada *fee-based income* dari semua segmen yang ada, khususnya pada segmen bisnis *transactional banking* dan pemanfaatan dana haji secara optimal. Selain itu, upaya peningkatan kapabilitas *digital banking* akan dilakukan untuk mengikuti perkembangan teknologi sehingga dapat melayani kebutuhan dan memudahkan umat dalam bertransaksi dan menggunakan produk Bank Muamalat Indonesia. Selain meningkatkan pendapatan, upaya yang dilakukan adalah penerapan efisiensi biaya yang sudah ditargetkan kepada unit masing-masing yang menjadi prioritas kebijakan manajemen di tahun 2019.

2. Good Bank

In accordance to the theme of the Bank's business plan, Bank Muamalat Indonesia will be a one-stop-solution for all financial products and services in the Syariah business ecosystem in Indonesia. In order to reach this goal, several initiatives that have been done by the Bank include, increasing productivity in all business unit both for retail, as well as corporate and commercial segments, accelerating funding from a low cost sources, and attempting to reduce the cost of fund. Several efforts to increase income include the Bank's focus on fee-based income for all segments, especially for transactional banking segment and the optimization of the use of Hajj fund. Furthermore, efforts to improve the capabilities in digital banking will be continuously carried out given the development in technology in order to serve the needs of consumers and increase the ease of transacting with and using other products of Bank Muamalat Indonesia. Apart from increasing income, these efforts will also help to reduce cost, which has become part of the target for respective units and was part of the priority of the Management policy in 2019.

3. New Bank

Unit kerja Islamic Enterprise and Alliances, yang dibentuk khusus untuk menjalin sinergi Bank dengan organisasi-organisasi Islam dan seluruh elemen umat Islam, akan turut mendorong peningkatan literasi keuangan syariah pada komunitas-komunitas Islam sekaligus turut serta dalam upaya pembentukan ekosistem bisnis syariah.

3. New Bank

The Islamic Enterprise and Alliances work unit, which was formed with the special purpose of developing the Bank's synergy with Islamic organizations and all elements of the Moslem community, would contribute to the Syariah financial literacy of these communities, and the development of Syariah business ecosystem.

Dalam upaya menangkap peluang bisnis yang sesuai dengan perkembangan trend yang terjadi dalam industri keuangan dan perbankan serta menunjang bisnis perusahaan, Bank Muamalat Indonesia akan menguatkan diversifikasi produk yang ditargetkan dapat merangkul nasabah baru. Selain itu, Bank akan fokus pada ekosistem usaha nasabah eksisting dan memanfaatkannya untuk mendapatkan sumber pendapatan baru melalui *cross selling* dan *bundling* produk.

In order to capture business opportunities from the trend in the financial and banking sectors, as well as to support the company's business, Bank Muamalat Indonesia would continue to strengthen its product diversification to acquire new customers. Other than that, the Bank will focus on the existing customers' business ecosystem and capture new sources of income through cross selling and product bundling.

Sejalan dengan strategi dalam menangkap potensi nasabah baru, Bank Muamalat Indonesia meluncurkan gerakan kampanye

In line with the strategy to capture new customers, Bank Muamalat Indonesia launched a campaign of #AyoHijrah with the

bertema #AyoHijrah dengan semangat untuk mengajak nasabah konvensional untuk pindah menggunakan produk syariah dan meningkatkan transaksi nasabah syariah dalam penggunaan produk syariah dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan dari gerakan #AyoHijrah diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Akusisi nasabah yang berbasis bisnis syariah;
b. Menambah jumlah rekening (NoA) dari segmentasi menengah ke atas;
c. Meningkatkan aktivitas transaksi nasabah;
d. Menaikkan *fee-based Income;*
e. Meningkatkan kepedulian dan *image brand* Bank Muamalat Indonesia;
f. Penetrasi pasar yang lebih baik;
g. Perbaikan proses bisnis dan fasilitas E-Channel.

Melalui sinergi dan strategi terhadap ekosistem bisnis syariah tersebut, diharapkan peran Bank Muamalat Indonesia dalam membangun dan melayani umat semakin baik yang pada gilirannya juga akan berdampak positif terhadap pertumbuhan bisnis Bank.

aim to invite conventional customers to switch to Syariah products and to increase transactions and usage of Syariah products by existing customers in their daily lives. The goals of this #AyoHijrah campaign among others are as follows:

a. Acquiring customers for the sharia business;
b. Increasing the number of account (NoA) from the mid to high income segments;
c. Increasing customers' banking activities;
d. Increasing fee-based Income;
e. Increasing the care and brand image of Bank Muamalat Indonesia;
f. Improving the market penetration;
g. Improving business processes and E-Channel facilities;

By having the synergy and strategy that target the sharia business ecosystem, Bank Muamalat Indonesia hopes that it will continue to improve its role in building and serving the Islamic consumers, which in turn will contribute positively to the growth of the Bank's business.

Dalam menghadapi perkembangan teknologi khususnya di dunia perbankan, pengembangan Digital Banking menjadi hal utama. Bank Muamalat Indonesia mempersiapkan diri untuk mengembangkan Digital Banking dengan melalui perkuatan IT *Enterprise Architecture* untuk *platform Digital Banking*. Oleh karena itu, untuk mengurangi dampak perbedaan posisi Bank Muamalat Indonesia dengan kondisi di industri perbankan, Bank Muamalat Indonesia akan melakukan kerjasama dengan *fintech* sebagai sarana untuk menangkap potensi yang ada di masyarakat.

Amidst continued technological development, especially in banking sector, the development of digital banking is crucial. Bank Muamalat Indonesia prepares its capabilities in Digital banking by strengthening the IT Enterprise Architecture for its digital banking. Therefore, to close the gap between Bank Muamalat Indonesia's position and the situations in the banking sector, Bank Muamalat Indonesia will cooperate with fintech companies to facilitate and capture the potential from the general public.

Tantangan yang Dihadapi

Sepanjang tahun 2019, Manajemen dan seluruh karyawan Bank Muamalat Indonesia telah berupaya meningkatkan kinerja dan mencapai target yang ditetapkan dalam RBB. Berbagai upaya telah dilakukan oleh segenap insan Bank Muamalat Indonesia demi dapat menjalankan target yang telah ditetapkan tersebut, tentunya dalam menunaikan tugas tersebut banyak tantangan yang harus dilalui guna bisa mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Tantangan terbesar yang dihadapi oleh Bank tahun 2019 adalah proses penguatan struktur permodalan yang masih terus berjalan. Hingga akhir tahun 2019, Bank masih terus berproses untuk memperkuat permodalan guna menunjang ekspansi bisnis Bank ke depan. Dalam proses mendapatkan investor baru ini, Bank tentunya tidak dapat memutuskan sendiri segala kebijakan yang diambil dikarenakan industri perbankan merupakan industri yang diawasi ketat oleh regulator. Banyak pihak yang terlibat dalam proses penambahan modal ini, salah satunya adalah regulator yang bertugas untuk mengawasi seluruh aktivitas bank termasuk yang terkait dengan

Challenges Ahead

Throughout 2019, the Management and all employees of Bank Muamalat Indonesia have made efforts to improve the Bank's performance and to attain the set target based on the plan. Several efforts have been done by employees in Bank Muamalat Indonesia, despite of multiple challenges faced by each employee in doing their respective tasks, in order to attain the set target.

The main challenge faced by the Bank in 2019 was related to the capital problem. Until the end of 2019, the Bank was still in the process of acquiring new strategic investors in order to strengthen its capital, which will be allocated for future business expansions. In the process of having new investors, the Bank was not able to make decision solely on its discretion, because the banking sector is a highly regulated sector. There are multiple parties that are involved in the process of capital injection, one of which is the regulatory body tasked to supervise all banking activities including those related to the decision to select strategic investors. In this process, apart from supervising the

investor strategis yang akan masuk. Dalam proses ini selain mengawasi proses masuknya investor, keterlibatan regulator juga dalam rangka keberlangsungan bisnis Bank ke depannya dan keberlangsungan ekonomi bangsa pada umumnya.

process of having new investors, the involvement of the regulatory body is also in ensuring the continuity of the business of the Bank in the future and the sustainability of the economy in general.

Selain itu, Bank Muamalat Indonesia juga dihadapkan pada permasalahan sejumlah pembiayaan yang tidak *perform* atau *Non Performing Financing* (NPF/Bad Bank). Manajemen berusaha untuk menekan angka pembiayaan bermasalah dengan melakukan *recovery* dan melakukan *aggresive collection* terhadap nasabah yang bermasalah. *Aggresive collection* dilakukan mulai dari mekanisme pengawasan ketat terhadap *account* yang bermasalah, pencegahan dini untuk nasabah yang diperkirakan akan masuk ke dalam golongan bermasalah, penagihan kepada nasabah, mekanisme lelang terhadap objek pembiayaan sampai dengan *strategy legal approach* bila mana memang diperlukan untuk bisa kembali memulihkan pembiayaan yang telah diberikan.

Moreover, Bank Muamalat Indonesia was also facing several problems related to non-performing loans. The Management has made efforts to reduce non-performing loans by engaging in recovery process and conducting more aggressive collection recovery activities to its non-performing customers. Aggressive collection was done starting from having a strict monitoring mechanism on the bad accounts, using an early warning on customers with potential to be categorized in the non-performing segment, processing collection from customers, and auctioning of the loan guarantees, to using legal approach strategy when needed to ensure the recovery of loans.

Kinerja Bank Muamalat Indonesia Tahun 2019

Pertumbuhan ekonomi dan industri perbankan Indonesia yang secara umum mengalami perlambatan serta masih berjalannya proses penambahan modal memberikan dampak yang besar terhadap kinerja Bank Muamalat Indonesia. Di tengah berbagai tantangan di sepanjang tahun 2019, Bank Muamalat Indonesia tetap mampu menjaga kinerja keuangannya pada level yang cukup baik dan tetap sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Bank Muamalat Indonesia Performance in 2019

Indonesia's economic growth and banking industry which was generally experiencing a slowdown and the ongoing capital strenghtening process had caused a major impact on the performance of Bank Muamalat Indonesia. In the midst of various challenges during the year 2019, Bank Muamalat Indonesia has still been able to maintain its financial performance in a decent level and remain in accordance with prevailing regulations.

Dalam kondisi pertumbuhan ekonomi dan periode konsolidasi tersebut, Bank Muamalat Indonesia memilih untuk selektif dalam memberikan pembiayaan. Terlebih tingkat risiko pembiayaan tahun 2019 juga mengalami peningkatan selaras dengan pelemahan ekonomi nasional.

In such conditions of economic growth and the consolidation period, Bank Muamalat Indonesia chose to be selective in providing financing. Moreover, the level of financing risk in 2019 had increased in line with the weakening of the national economy.

Strategi ini tentunya berdampak pada pembiayaan Bank yang terus turun karena pertumbuhan pembiayaan baru yang tumbuh moderat dan sangat selektif. Hal ini juga sejalan dengan upaya manajemen untuk bisa terus meningkatkan kemampuan Bank baik dalam hal operasional ataupun *assesment* dalam pemberian pembiayaan. Tentunya dengan kondisi pertumbuhan moderat pada pos penyaluran pembiayaan yang diberikan Bank akan menekan porsi pendapatan yang bisa dihasilkan. Kondisi ini pada akhirnya menyebabkan adanya tekanan pada tingkat profitabilitas Bank.

This strategy would impact to the decreasing of the Bank's financing, given that new loans grew only moderately and selectively. This is in line with the Management's efforts to continuously improve the Bank's capabilities on managing its operational activities as well as on assessing its loans. Of course, the moderate growth on several loans would impact the total income generated. This eventually put pressure on the profitability level of the Bank.

Hingga Desember 2019 total aset tercatat sebesar Rp50,56 triliun atau turun sebesar 11,66% persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara pada tahun 2019 Bank Muamalat Indonesia mencatatkan nilai total pembiayaan sebesar Rp29,87 trilliun atau turun 11,00% dibandingkan tahun 2018. Penurunan pembiyaan ini dipengaruhi oleh strategi Bank di tahun 2019 yang selektif dalam menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat. Sementara itu, Dana Pihak Ketiga

Up to December 2019 total assets were recorded at Rp50.56 trillion, decreasing 11.66% compared to the previous year. Meanwhile in 2019, Bank Muamalat Indonesia recorded a total financing of Rp29.87 trillion, decreasing by 11.00% compared to the achievement in 2018. The decrease was due to selective strategy in 2019 in channeling financing to the public. In terms of liabilities, the level of Third Party Fund (TPF) decreased in line with the decline in total assets. At the

(DPK) mengalami penurunan sejalan dengan penurunan total aset. Pada akhir Desember 2019 DPK tercatat sebesar Rp40,36 trilliun turun 11,57% dari posisi tahun lalu. Penurunan DPK ini juga merupakan salah satu strategi Bank untuk menurunkan biaya bagi hasil atau cost of fund. Dari sisi ekuitas Bank Muamalat Indonesia mencatatkan nilai ekuitas sebesar Rp3,94 trilliun naik 0,40% dari tahun lalu sebesar Rp3,92 trilliun.

end of December 2019, the TPF value was recorded at Rp40.36 trillion, decreasing by 11.57% from the previous year. The decline in the value of TPF was also one of the Bank's strategies to lower the cost of fund. In terms of equity, Bank Muamalat Indonesia recorded an equity value of Rp3.94 trillion, increasing by 0.40% from last year's of Rp3.92 trillion.

Pada bulan Desember 2019, Laba Sebelum Pajak (PBT) menunjukkan hasil sebesar Rp26 miliar atau turun sebesar 42,88% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya.

In December 2019, Profit Before Tax (PBT) recorded at Rp26 billion, a decrease of 42.88% compared to the same period in the previous year.

Pada sisi Non-Performing Financing (NPF) baik gross maupun net secara berturut turut Bank Muamalat Indonesia mencatatkan nilai sebesar 5,22% untuk posisi NPF gross dan 4,30% untuk posisi net. Jika dilihat dari posisi tahun lalu tingkat rasio NPF ini mengalami kenaikan dimana pada tahun 2018 Bank Muamalat Indonesia mencatatkan nilai NPF gross sebesar 3,87% dan NPF nett 2,58%. Pada rasio Return On Asset (ROA) Bank Muamalat Indonesia mencatakan penurunan tipis sebesar 3 bps dibandingkan tahun lalu dimana pada tahun 2019 nilai ROA berada pada level 0,05%. Pada rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) tercatat sebesar 99,50% atau turun tajam sebanyak 126bps dibandingkan tahun lalu sebesar 98,24% sementara rasio Financing to Deposit Ratio (FDR) Bank Muamalat Indonesia tercatat sebesar 73,51% naik 33bps dibandingkan tahun lalu yang sebesar 73,18%.

On the Non-Performing Financing (NPF), both gross and net respectively, Bank Muamalat Indonesia recorded a value of 5.22% for the NPF gross position and 4.30% for the net position. If it is seen from last year's position, the NPF ratio has increased. In 2019, Bank Muamalat Indonesia recorded a gross NPF of 3.87% and a net NPF of 2.58%. In the Return On Asset (ROA) ratio, Bank Muamalat Indonesia recorded a slight decline of 3 bps compared to last year as in 2019 the value of ROA was at the level of 0.05%. The Operational Cost to Operational Income (BOPO) ratio was recorded at 99.50% or fell sharply by 126bps compared to last year value of 98.24%. Meanwhile, the Financing to Deposit Ratio (FDR) ratio of Bank Muamalat Indonesia was recorded at 73.51% or increased by 33bps compared to last year value of 73.18%.

Sementara itu, pencapaian Net Income Margin (NIM) tercatat sebesar 0,83% atau 92bps lebih rendah jika dibandingkan dengan angka tahun lalu yang tercatat sebesar 2,22%. Sementara itu CASA rasio pada Desember 2019 tercatat sebesar 45,70% atau lebih baik dari tahun lalu yang tercatat sebesar 39,01%.

Meanwhile, the Net Income Margin (NIM) was recorded at 0.83% or 92bps lower compared to last year's figure which was recorded at 2.22%. Meanwhile, the CASA ratio in December 2019 was recorded at 45.70% or increasing than last year which was recorded at 39.01%.

Perbandingan Target dan Realisasi

Di tengah tantangan eksternal maupun internal, Bank berupaya untuk memenuhi target RBB yang telah ditetapkan dan disetujui oleh pemegang saham melalui RUPS.

Comparison between Target and Realization

In the midst of external and internal challenges, the Bank strives to meet the RBB targets set and approved by shareholders through the GMS.

Total aset Bank tahun 2019 tercatat sebesar Rp50,56 triliun. Pencapaian tersebut mencapai 80% dari target. RBB 2019 yang ditetapkan sebesar Rp64,00 triliun. Penurunan aset ini banyak didorong oleh penurunan pembiayaan. Penurunan pembiayaan ini menjadi bagian dari strategi Bank untuk terlebih dahulu memperbaiki proses pembiayaan secara *end-to-end* dan proses Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

The Bank's total assets for 2019 recorded at Rp50.56 trillion. This achievement reached 80% from the 2019 target, which was set at Rp64.00 trillion. The decrease in assets was mainly driven by the decrease in financing. The decrease in financing was part of the Bank's strategy to prioritize the improvement of end-to-end financing process as well as Good Corporate Governance within the Bank.

Selaras dengan strategi pembiayaan yang sangat selektif, Bank juga tidak agresif dalam hal pendanaan. Tahun 2019, manajemen juga mengambil kebijakan reprofiling dana dengan melepas sebagian dana mahal untuk mengurangi beban bagi hasil. Dengan penerapan strategi tersebut, dana nasabah yang berhasil dihimpun Bank tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 11,57% dibandingkan tahun sebelumnya menjadi Rp40,36 triliun yang setara dengan 86,43% dari target RBB.

In line with the very selective financing strategies, the Bank was also not so aggressive in terms of funding. In 2019, the Management also made the decision to reprofile its funding by releasing high cost funding to lessen the costs of revenue sharing. By implementing this strategy, third party fund that was managed to be collected by the Bank in 2019 decreased by 11.57% as compared to in the previous year to Rp40.36 trillion, or equal to 86.43% of the target.

Profitabilitas Bank tahun 2019 tercatat sebesar Rp26 miliar. Pencapaian profitabilitas tersebut merupakan pencapaian yang relatif baik bagi Bank, karena berada di atas target yang ditetapkan dalam RBB yaitu sebesar Rp12 miliar.

The Bank's profitability in 2019 was recorded at Rp26 billion. The achievement of profitability is a relatively good achievement for the Bank, because it is above the target set in the RBB of Rp12 billion.

Prospek Usaha

Walau masih dipengaruhi oleh faktor global, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 diprediksi akan kembali mengalami peningkatan. Bank Indonesia memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 akan berada pada kisaran 5,1%-5,5%. Roda perekonomian tahun 2020 juga diprediksi akan berputar dengan lebih baik seiring dengan semakin stabilnya situasi politik nasional pasca pemilu tahun 2019.

Business Prospect

Despite the fact that global factors will continue to play a significant role, the Indonesian economy in 2020 is predicted to grow. Bank Indonesia projects that the Indonesian economy will grow at around 5.1 – 5.5% in 2020. The Indonesian economy in 2020 is also expected to be more vibrant, given a more stable political situation after the general election in 2019.

Bank Muamalat Indonesia meyakini akan kembali mendapatkan momentum pertumbuhan yang lebih baik ke depan. Pertumbuhan ini harus diupayakan dengan kerja keras yang dilaksanakan oleh seluruh insan Bank Muamalat Indonesia. Selain itu diharapkan dengan akan masuknya modal baru akan mendorong pertumbuhan bisnis Bank ke depan. Sesuai dengan RBB Bank Muamalat Indonesia proses penambahan modal akan kembali dikerjakan di tahun 2020 dan diharapkan akan selesai sebelum semester 2 tahun 2020.

Bank Muamalat Indonesia is convinced that it will gain back its growth momentum in the future. To strive for growth, all employees of Bank Muamalat Indonesia must work very hard. Moreover, the expected new capital injection will push the Bank's future business growth. In line with the target of Bank Muamalat Indonesia, the planned capital injection will be continued in 2020, and it is hoped to be completed before the 2nd semester of 2020.

Sesuai dengan RBB tahun 2020, Bank akan melanjutkan inisiatif-inisiatif strategis yang telah dibangun di tahun sebelumnya dengan menajamkan fokus untuk bertransformasi. Langkah-langkah strategis yang akan ditempuh oleh Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2020 akan diprioritaskan pada 3 (tiga) fokus utama, yaitu sebagai berikut:

1. *Creative Transformation*, yaitu fokus untuk bertransformasi menjadi Bank yang efisien dan produktif;
2. *Swift Recovery*, yaitu akselerasi pemulihan pembiayaan bermasalah termasuk peningkatan proses pencegahannya;
3. *Shaping the Healthy Business*, yaitu pengembangan bisnis yang sehat dan berkelanjutan.

In accordance to the 2020 target, the Bank will continue its strategic initiatives, which have been built in the past years, and further sharpen its focus towards transformation. Strategic steps that will be done by Bank Muamalat Indonesia in 2020 can be segmented into three priorities, as follows:

1. *Creative Transformation, which focuses on transforming the Bank in order to improve efficiency and productivity;*
2. *Swift Recovery, which pertains the acceleration in recovery of non-performing loans, including the improvement in the prevention process;*
3. *Shaping the Healthy Business, which targets the sound and sustainable business development.*

Upaya Perbaikan dari Dalam

Bank Muamalat Indonesia meyakini Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan upaya peningkatan kinerja Bank. Upaya tersebut haruslah dimulai dari internal Bank Muamalat Indonesia terlebih dahulu. Karena itu, Bank memberikan perhatian yang sangat besar terhadap proses peningkatan kompetensi dan kualitas SDM.

Internal Improvement Efforts

Bank Muamalat Indonesia believes that human resources is key in determining the success of the Company, and the improvement in the Bank's performance. An effort must start internally, within Bank Muamalat Indonesia. Therefore, the Bank gives high attention to the process of improving competencies and quality of its employees.

Tahun 2019, Bank menjalankan sejumlah program strategis yang terkait dengan SDM, baik berhubungan dengan peningkatan kompetensi karyawan maupun aspek lainnya. Salah satu yang menjadi perhatian utama Bank adalah peningkatan kompetensi dan produktifitas *Sales, Service* dan *Operation*. Bagian tersebut merupakan ujung tombak Bank, sehingga kapasitasnya harus terus ditingkatkan secara berkesinambungan.

In 2019, the Bank has run several strategic programs for its employees, both for competency improvement purposes as well as for other aspects. One main attention of the Bank was in the improvement of competencies and productivity of the Sales, Services, and Operations units. These units are key for the Bank's success, such that capacity development must continuously be done.

Bank juga menjalankan program peningkatan kapasitas manajerial dan kepemimpinan. Kompetensi ini sangat dibutuhkan dalam kondisi saat ini agar para *leader* dapat mengarahkan jajarannya dengan lebih baik sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.

The Bank also engaged in several programs targeted to improve leadership and managerial capabilities. These competencies are very much needed, so that each leader can bring improvement to their team in order to ensure that the company's goal is attained.

Berkembangnya *financial technology (fintech)* juga menjadi salah satu perhatian Bank. Karena itu, Bank Muamalat Indonesia juga membangun kemampuan organisasi untuk bersaing dalam era teknologi finansial.

The development of financial technology (fintech) is also being considered by the Bank. Therefore, Bank Muamalat Indonesia also built its organizational capabilities to compete in the financial technology era.

Yang juga tidak kalah penting dalam kondisi saat ini adalah menjaga dan meningkatkan keterlibatan dan keterlekatan karyawan *(staff engagement)*. Soliditas organisasi menjadi sangat penting dalam upaya mencapai tujuan Bank.

It is also important to maintain and improve the involvement and engagement of the staffs. Having a solid organization is critical for achieving the Bank's goal.

Dengan menjalankan program-program tersebut, Bank Muamalat Indonesia meyakini akan kembali dapat meraih kinerja yang baik pada tahun-tahun mendatang.

Through these programs, Bank Muamalat Indonesia is confident that its performance will improve in the coming years.

Teknologi Informasi

Teknologi informasi telah mengubah lanskap bisnis di Indonesia. Terlebih di industri perbankan yang sangat kental dengan teknologi. Bank Muamalat Indonesia berusaha untuk bisa beradaptasi dengan baik. Banyak hal telah direncanakan untuk menjadikan Bank menjadi salah satu *icon digital* perbankan syariah. Salah satunya adalah dengan membuka *digital lounge* di Muamalat Tower, dimana melalui *lounge* ini memungkinkan nasabah untuk bisa melakukan pembukaan rekening secara digital.

Information Technology

Information technology has changed the business landscape in Indonesia. This is especially the case in banking sector, which is heavily relied on technology. Bank Muamalat Indonesia strives to adapt well with this situation. There are numerous plans to make sure the Bank is at the forefront in the digital Syariah banking. One of such efforts includes the opening of the digital lounge in Muamalat Tower, whereby customers can open their account digitally.

Selain itu, Bank Muamalat Indonesia juga melakukan pembaruan terhadap fitur-fitur transaksi pada *mobile banking*. Pada tahun 2019 Bank telah melakukan *soft launching* terhadap aplikasi mobile banking terbaru yang memungkinkan nasabah untuk dapat bertransaksi dengan aman nyaman. Aplikasi tersebut juga menawarkan *interface* yang lebih baik dari sebelumnya.

Apart from that, Bank Muamalat Indonesia continued to renew its transaction features in its mobile banking applications. In 2019, the Bank soft launched its latest mobile banking applications that enables customers to transact in a secure and convenient way. This application also offered better interface than the previous versions.

Bank Muamalat Indonesia berkomitmen untuk terus meningkatkan dan memastikan bahwa infrastruktur teknologi informasi dari Bank yang meliputi perangkat keras, perangkat lunak, jaringan telekomunikasi dan *data center* (beserta *disaster recovery center*) selalu dalam keadaan optimal dalam mendukung operasional Bank.

Bank Muamalat Indonesia is committed in continuously improving and ensuring that its information technology infrastructure, which includes hardware, software, communication network, and data center (including disaster recovery center), is always at optimal conditions to support the Bank's operations.

Dalam mengantisipasi pertumbuhan bisnis, Bank telah meningkatkan kemampuan aplikasi agar dapat mendukung pertumbuhan bisnis dengan fitur-fitur baru yang lebih unggul dengan tujuan memberikan kenyamanan serta keamanan kepada nasabah dalam bertransaksi, serta menunjang peningkatan efisiensi dan efektifitas operasional Bank.

To prepare for business growth, the Bank has also improved its capabilities in developing applications to support business growth through new features that can give the convenient and sense of security for customers, when they are doing their transactions, as well as support the efficiency and effectiveness improvement of the Bank's operations.

Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) menjadi kebutuhan bagi Bank Muamalat

Good Corporate Governance Implementation

The implementation of Good Corporate Governance (GCG) principles is necessary for Bank Muamalat Indonesia, as they are in line with the

Indonesia karena sejalan dengan nilai-nilai syariah yang dikembangkan di lingkungan Bank Muamalat Indonesia. Kompleksitas dan tingkat risiko industri perbankan yang tinggi menjadikan penerapan prinsip-prinsip GCG sangat diperlukan dalam setiap aspek kegiatan usaha Bank. Dengan Tata Kelola Perusahaan yang Baik maka kepercayaan serta keyakinan seluruh nasabah dan para pemangku kepentingan dapat semakin terpelihara dan meningkat.

Syariah values that are being developed in Bank Muamalat Indonesia. The high complexity and risk level of the banking sector require the Bank to enforce GCG principles in all aspects of business activities. With Good Corporate Governance, the trust and confident of all customers and stakeholders can be sustained and even improved.

Bank Muamalat Indonesia secara berkala telah melakukan penilaian sendiri atau evaluasi terhadap 11 (sebelas) faktor penilaian pelaksanaan GCG antara lain pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi dan DPS, pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa serta penerapan fungsi kepatuhan, audit internal dan audit eksternal.

Bank Muamalat Indonesia periodically made self-assessment and evaluation on 11 (eleven) factors of GCG implementation assessment which includes, the implementation of roles and responsibilities of the Board of Commissioners, Board of Directors, and the Syariah Supervisory Board, the implementation of Syariah principles in all activities related to funding, loans, and services, as well as the implementation of compliance, internal and external audits.

Bank Muamalat Indonesia memiliki komitmen untuk meningkatkan pelaksanaan GCG sebagai salah satu prasyarat utama bagi keberhasilan dan keberlanjutan usaha. Bank Muamalat Indonesia menerapkan prinsip-prinsip GCG kepada semua organ dan jenjang organisasi. Pada tahap awal penerapan GCG, Bank memfokuskan pada pemenuhan aspek *governance structure dan governance process* sesuai ketentuan yang berlaku dan/atau memenuhi rekomendasi dari regulasi/otoritas pengawas. Pemenuhan *governance structure* antara lain penyempurnaan organisasi dan tugas masing-masing fungsi dalam struktur organisasi. *Governance process* antara lain melalui penyempurnaan kebijakan dan prosedur Bank, sistem informasi manajemen dan secara berkesinambungan melakukan upaya-upaya dalam memperbaiki kinerja Bank dengan memperhatikan kompleksitas dan karakteristik bisnis Bank serta aspek kehati-hatian dan tata kelola yang baik. Dengan *govenance structure* dan *governance process* yang baik diharapkan dapat meningkatkan *governance outcome*.

Bank Muamalat Indonesia is committed in improving the GCG implementation, which becomes a part of the main requirement of the success and sustainability of the business. Bank Muamalat Indonesia implements GCG principles in all parts and level of the organization. At the early stage of GCG implementation, the Bank focused on the fulfilment of the governance structure and processes to be in accordance to the prevailing regulations and/or on the fulfilment of the recommendations from the regulatory body. Fulfilling the requirements pertaining to governance structure include the improvement of organization structure, and roles of each function in the organization. Governance process was improved through the refinement of the Bank's policy and procedure, upgrading of its information management system, as well as continuous improvement in the Bank's performance by focusing on the complexity and the characteristics of the banking sector, especially in terms of fulfilling the prudent and good governance principles. With a good governance structure and process, the governance outcome is also expected to improve.

Bank Muamalat Indonesia berkomitmen menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan (GCG) dan menyempurnakan implementasinya secara terus menerus. Transparansi *(transparency)*, akuntabilitas *(accountability)*, responsibilitas *(responsibility)*, profesional *(professional)*, dan kewajaran *(fairness)* senantiasa menjadi pedoman *best practice* Bank Muamalat Indonesia dalam mengaktualisasikan bisnis syariah yang sehat dan berkesinambungan serta kompetitif dalam persaingan.

Bank Muamalat Indonesia is committed in implementing GCG principles and to continuously improve the implementation process. Transparency, accountability, responsibility, professionalism, and fairness are continuously become the integral part of best practice guideline in Bank Muamalat Indonesia. In this way, the health and sustainability of the Bank's Syariah business and competitiveness would be actualized.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Bank Muamalat Indonesia berkomitmen untuk memberikan nilai lebih kepada seluruh pemangku kepentingan. Karena itu, Bank menjadikan kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai salah satu program unggulan Bank.

Corporate Social Responsibility

Bank Muamalat Indonesia is committed to give added value to all stakeholders. Therefore, the Bank places the Corporate Social Responsibility (CSR) activities as one of its key programs.

Tahun 2019, program CSR Bank Muamalat Indonesia dapat terlaksana dengan baik. Pada Oktober 2019, CSR Bank Muamalat masuk 2 Besar dalam SUSBA WWF 2019 untuk penilaian *sustainability finance* 2018.

In 2019, Bank Muamalat Indonesia's CSR program was done properly. In October 2019, Bank Muamalat Indonesia CSR activity is ranked in the top 2 from SUSBA WWF 2019 for the evaluation point regarding

Selain itu, Bank Muamalat Indonesia sebagai salah satu bank nominasi CECT Sustainability Awards – MM CSR Universitas Trisakti.

finance sustainability 2018. Apart from that, Bank Muamalat Indonesia is one of the banks that were nominated for CECT Sustainability Awards – MM CSR Trisakti University.

Program ini secara umum sudah terlaksana sesuai dengan rencana yang disusun, namun terdapat beberapa kegiatan yang diundur pelaksanaannya karena adanya penyesuaian jadwal pelaksanaan acara, rencana strategis perusahaan serta budget.

This program in general has been done according to plan, although there were several activities that were delayed due to the adjustment in the timing of the events, change in the strategic plan of the company, or change in the budget allocation.

Terkait dengan strategi keberlanjutan Bank juga telah menyusun Visi Bank dalam rangka keuangan berkelanjutan yaitu Menjadi Bank Syariah terbaik di Indonesia dalam implementasi rencana aksi keuangan berkelanjutan yang sesuai dengan standar internasional. Selain itu Misi Bank Muamalat Indonesia dalam implementasi keuangan berkelanjutan adalah:

1. Membangun lembaga keuangan syariah yang unggul dan berkesinambungan dalam membangun dan melayani ekonomi umat dalam ekosistem keuangan syariah yang berkelanjutan.
2. Keunggulan sumber daya manusia yang islami dan profesional.
3. Orientasi investasi yang inovatif dan ramah lingkungan.

Regarding its sustainability strategy, the Bank has also developed a vision in terms of the financial sustainability, which is to be the best Syariah Bank in Indonesia in terms of the implementation of its financial sustainability plan in accordance to the international standard. In addition, the Mission of Bank Muamalat Indonesia in implementing financial sustainability are:

1. *Building Syariah financial institution that is competitive and sustainable in order to build and serve the economic activities of the Moslem community particularly within the domain of the sustainable Syariah financing.*
2. *Ensuring its employees have Islamic values and are professional.*
3. *Furthering innovative and environmentally friendly investment orientations.*

Perubahan Komposisi Direksi

Komposisi Direksi Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2019 mengalami perubahan sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2019. Pemegang Saham mengangkat Sdr. Avianto Istihardjo sebagai anggota Direksi Bank Muamalat Indonesia. Dengan demikian, komposisi Direksi Bank Muamalat Indonesia pada 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Changes in Board of Directors Composition

The composition of the Board of Directors of Bank Muamalat Indonesia in 2019 changed based on the decision of the Annual General Meeting of Shareholders, that was held on May 17, 2019. The shareholders appointed Mr. Avianto Istihardjo as a member of the Board of Director of Bank Muamalat Indonesia. Therefore, the composition of the Board of Directors of Bank Muamalat Indonesia as of December 31, 2019 is as follows:

Jabatan *Position*	Nama *Name*
Direktur Utama *President Director*	Achmad Kusna Permana
Direktur *Director*	Hery Syafril
Direktur Kepatuhan *Compliance Director*	Andri Donny
Direktur *Director*	Purnomo Budiwibowo Soetadi
Direktur *Director*	Awaldi
Direktur *Director*	Avianto Istihardjo

Komposisi Dewan Pengawas Syariah Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2019 juga mengalami perubahan dengan pengunduran diri Prof. Dr. (HC) KH Ma'ruf Amin selaku Ketua DPS Bank Muamalat Indonesia yang telah terpilih dan dilantik menjadi Wakil Presiden

The composition of the Sharia Supervisory Board of Bank Muamalat Indonesia in 2019 was changed due to the resignation of Prof. Dr. (HC) KH Ma'ruf Amin as the Chairman of the Sharia Supervisory Board of Bank Muamalat Indonesia, whom has elected and inaugurated as the

Republik Indonesia periode 2019-2024 serta Dr. Oni Sahroni yang mengundurkan diri sebagai anggota DPS Bank. Atas nama Manajemen dan seluruh karyawan Bank Muamalat Indonesia, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. Dr. (HC) KH Ma'ruf Amin dan Dr. H. Oni Sahroni, M.A serta mengucapkan selamat bertugas bagi negeri tercinta Indonesia bagi Prof. Dr. (HC) KH Ma'ruf Amin.

Vice President of the Republic of Indonesia for 2019-2024 period and also Dr. H. Oni Sahroni, M.A who resigned from the member of the Sharia Supervisory Board of the Bank. On behalf of the Management and all staff of Bank Muamalat Indonesia, allow me to express our deepest appreciation for Prof. Dr. (HC) KH Ma'ruf Amin and Dr. H. Oni Sahroni, M.A, and wish the very best for Prof. Dr. (HC) KH Ma'ruf Amin for the new responsibilities for our beloved country, Indonesia.

Penutup

Akhir kata, atas nama Direksi, kami menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang selalu mendukung Bank Muamalat Indonesia. Terutama kepada Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah atas pengawasan serta nasihat-nasihatnya yang membangun. Kami juga menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pemegang saham dan regulator yang telah membimbing langkah kami agar tetap menjadi Bank yang menjalankan usaha dengan integritas dalam menyiarkan nilai tambah dari prinsip-prinsip syariah.

Closing

In conclusion, on behalf of the Board of Directors, we would like to convey our appreciation and thank to all parties, who have supported Bank Muamalat. Special appreciation is given to the Board of Commissioners, and the Syariah Supervisory Board for their supervision and constructive advices. We also convey our highest appreciation to our shareholders and to the regulatory bodies who have assisted us in every step to ensure that the Bank operates its business with integrity and showcases added value based on the Syariah principles.

Kepada seluruh karyawan Bank Muamalat Indonesia, ijinkan saya atas nama Direksi mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan kerja kerasnya dalam menghadapi setiap tantangan yang ada. Kami berharap bahwa seluruh karyawan dapat terus berperan serta dalam proses transformasi yang akan dijalankan di tahun 2020. Kami meyakini bahwa fondasi yang telah terbangun saat ini akan membawa Bank Muamalat Indonesia untuk tumbuh lebih pesat dan bersaing lebih jauh dalam industri perbankan nasional ke depan.

To all employees of Bank Muamalat Indonesia, please allow me, on behalf of the Board of Directors, to convey my thank for the dedication and hard work in facing every challenge. We hope that all employees will continue to take their part in the transformation process that will be done in 2020. We believe that the foundation has been put in place so that Bank Muamalat Indonesia can grow even faster and can compete further in the banking sector in the future.

Wassalamualaikum
Warahmatullahi Wabarakatuh,

Jakarta, Maret 2020
Jakarta, March 2020



Achmad K. Permana
Direktur Utama
President Director



1

Avianto Istihardjo

Direktur Risiko
Risk Director

2

Irvan Yulian Noor

Chief Corporate Banking Officer

3

Andri Donny

Direktur Kepatuhan
Compliance Director

4

Purnomo B. Soetadi

Direktur Bisnis Ritel
Retail Banking Director



5
Hery Syafril
Direktur Keuangan
Finance Director

6
Achmad K. Permana
Direktur Utama
President Director

7
Riksa Prakoso
Chief Human Capital Officer

8
Awaldi
Direktur Operasi
Operation Director

Surat Pernyataan Dewan Komisaris Tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2019 PT Bank Muamalat Indonesia Tbk

Responsibility Statement of the Board of Commissioners on the 2019 Annual Report of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk

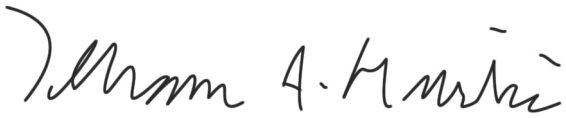
Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk tahun 2019 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan dimaksud.

We, the undersigned, hereby declare that all information in the 2019 Annual Report of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk has been fully disclosed and we are solely responsible upon the accuracy of all contents of the Annual Report.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.
Jakarta, Maret 2020

This statement is made truthfully.
Jakarta, March 2020

Dewan Komisaris
Board of Commissioners



Ilham A. Habibie

Komisaris Utama / Komisaris Independen
President Commissioner / Independent Commissioner



Iggi H. Achsien

Komisaris Independen
Independent Commissioner



Edy Setiadi

Komisaris Independen
Independent Commissioner



Mohamed Hedi Mejai *)

Komisaris
Commissioner



Abdulsalam Mohammad Joher Al-Saleh *)

Komisaris
Commissioner

*) Efektif setelah memperoleh persetujuan Uji Kemampuan dan Kepatutan dari OJK
*) *Effective upon obtaining Fit and Proper Test approval from Financial Services Authority (OJK)*

Surat Pernyataan Direksi Tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2019 PT Bank Muamalat Indonesia Tbk

Responsibility Statement of the Board of Directors on the 2019 Annual Report of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. tahun 2019 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan dimaksud.

We, the undersigned, hereby declare that all information in the 2019 Annual Report of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk has been fully disclosed and we are solely responsible upon the accuracy of all contents of the Annual Report.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.
Jakarta, Maret 2020

This statement is made truthfully.
Jakarta, March 2020

Direksi
Board of Directors

Achmad K. Permana
Direktur Utama
President Director

Hery Syafril
Direktur Keuangan
Finance Director

Purnomo B. Soetadi
Direktur Bisnis Ritel
Retail Banking Director

Awaldi
Direktur Operasi
Operation Director

Andri Donny
Direktur Kepatuhan
Compliance Director

Avianto
Direktur Risiko
Risk Director



03.

Profil Perusahaan

Company Profile



Identitas Perusahaan
Company Identity



Nama *Name*	PT Bank Muamalat Indonesia Tbk
Nama Panggilan *Initial Name*	Bank Muamalat Indonesia (BMI)
Bidang Usaha *Line of Business*	Perbankan Syariah *Sharia Banking*
Tanggal Pendirian *Date of Establishment*	1 November 1991 / Resmi beroperasi pada 1 Mei 1992 *November 1, 1991 / Officially operational on May 1, 1992*
Dasar Hukum Pendirian *Legal Basis of Establishment*	Akta No. 1 tanggal 1 November 1991 Masehi atau 24 Rabiul Akhir 1412 H, dibuat di hadapan Yudo Paripurno, S.H., Notaris, di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-2413.HT.01.01 Tahun 1992 tanggal 21 Maret 1992 dan telah didaftarkan pada kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 30 Maret 1992 di bawah No. 970/1992 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 34 tanggal 28 April 1992 Tambahan No. 1919A. *Deed No. 1 dated November 1, 1991 AD, or Rabiul Akhir 24, 1412 H, made before Yudo Paripurno, S.H., Notary in Jakarta. The Deed of Establishment was ratified by the Justice Minister with Decision Letter No. C2 2413.HT.01.01 of 1992 dated March, 21, 1992, and registered at Central Jakarta District Court on March 30, 1992 with registration No. 970/1992, and anounced in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 34 dated April 28, 1992 Supplement No. 1919A.*
Perubahan Nama *Change of Name*	• Nama pada awal pendirian adalah PT Bank Muamalat Indonesia Tbk sesuai dalam Akta Notari Yudo Paripurno, S.H., Nomor 1 tanggal 1 November 1991. • Perubahan pertama menjadi PT Bank Syariah Muamalat Indonesia Tbk berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 22 Juni 2000 merujuk SK Dir BI No. 32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah. • Perubahan kembali menjadi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk sesuai dengan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 23 April 2008 dan merujuk pada UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. • *At the beginning of its establishment, The initial name of Bank was PT Bank Muamalat Indonesia Tbk in accordance with the Notary Deed of Yudo Paripurno, S.H., No. 1 dated November 1, 1991.* • *The first change of name to PT Bank Syariah Muamalat Indonesia Tbk was based on the Extraordinary General Meeting of Shareholders on June 22, 2000 referring to the Decision Letter of the Board of Directors of Bank Indonesia No. Dir. 32/34/KEP/DIR dated May 12, 1999 concerning Commercial Banks Based on Sharia Principles.* • *The name changed back to PT Bank Muamalat Indonesia Tbk in accordance with the resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders on April 23, 2008 and refer to Law No. 21 of 2008 concerning Sharia Banking.*
Kepemilikan *Ownership*	• Islamic Development Bank (IDB) : 32,74% • Boubyan Bank : 22,00% • Atwill Holdings Limited : 17,91% • National Bank of Kuwait : 8,45% • IDF Investment Foundation : 3,48% • BMF Holdings Limited : 2,84% • Reza Rhenaldi Syaiful : 1,67% • Dewi Monita : 1,67% • Andre Mirza Hartawan : 1,66% • KOPKAPINDO : 1,39% • Pemegang Saham Lainnya/*other shareholders* : 6,19%

Modal Dasar *Authorized Capital*	Rp4.400.000.000.000 (Empat Triliun Empat Ratus Miliar Rupiah) *Rp4,400,000,000,000 (Four Trillion Four Hundred Billion Rupiah)*
Modal Ditempatkan *Issued Capital*	Rp1.103.435.151.000 (Satu Triliun Seratus Tiga Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Lima Juta Seratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah) *Rp1,103,435,151,000 (One Trillion One Hundred Three Billion Four Hundred Thirty-Five Million One Hundred and Fifty Thousand Rupiah)*
Jumlah Karyawan *Total Employees*	3.260 orang *3,260 people*
Jaringan Layanan *Service Network*	276 Total Kantor Layanan - 83 Kantor Cabang - 150 Kantor Cabang Pembantu - 43 Kantor Kas *276 Total Service Offices* *- 83 Branch Offices* *- 150 Sub-Branch Offices* *- 43 Cash Offices* 710 ATM 95 Mobile Branch 120.000 Jaringan ATM Bersama dan ATM Prima *710 ATMs* *95 Mobile Branches* *120,000 ATM Bersama and ATM Prima Network*
Sekretaris Perusahaan *Corporate Secretary*	corporate.affairs@bankmuamalat.co.id
Alamat Kantor Pusat *Head Office Address*	Muamalat Tower Jl. Prof Dr Satrio, Kav. 18 Kuningan Timur, Setiabudi Jakarta Selatan 12940 Telp. : (021) 80666000 Fax. : (021) 80666001 Email : info@bankmuamalat.co.id
Alamat Kantor Cabang Luar Negeri *Address of Overseas Office*	Kantor Cabang Kuala Lumpur, Malaysia *Kuala Lumpur Branch Office, Malaysia*
Situs Web *Website*	www.bankmuamalat.co.id
Kontak Alamat *Contact Address*	Sekretaris Perusahaan *Corporate Secretary* corporate.affairs@bankmuamalat.co.id Hubungan Investor *Corporate Secretary* Tel. : +62 21 – 8066 6000 Fax. : +62 21 – 8066 6001 Email : investor.relations@bankmuamalat.co.id Call Center 1500016 Media Sosial *Social Media* Facebook : BankMuamalatIndonesia Twitter : @BankMuamalat Instagram : @bank.muamalat YouTube : Bank Muamalat
Entitas Asosiasi dan Afiliasi *Associates and Affiliates*	• PT Al Ijarah Indonesia Finance (ALIF) • Baitulmaal Muamalat (BMM) • Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Muamalat • Muamalat Institute • PT Syarikat Takaful Indonesia

Sekilas Bank Muamalat Indonesia

Bank Muamalat Indonesia at a Glance

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk selanjutnya disebut "Bank Muamalat Indonesia" atau "BMI" didirikan berdasarkan Akta No. 1 tanggal 1 November 1991 Masehi atau 24 Rabiul Akhir 1412 H, dibuat di hadapan Yudo Paripurno, S.H., Notaris, di Jakarta dengan nama PT Bank Muamalat Indonesia. Akta pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-2413.HT.01.01 Tahun 1992 tanggal 21 Maret 1992 dan telah didaftarkan pada kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 30 Maret 1992 di bawah No. 970/1992 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 34 tanggal 28 April 1992 Tambahan No. 1919A.

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, hereinafter referred to as "Bank Muamalat Indonesia" or "BMI" was established based on Deed No. 1 dated November 1, 1991 AD or 24 Rabiul Akhir 1412 H, made before Yudo Paripurno, S.H., Notary, in Jakarta under the name PT Bank Muamalat Indonesia. The deed of establishment was approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia with Decree No. C2-2413.HT.01.01 of 1992 dated March 21, 1992 and was registered at the Central Jakarta District Court on March 30, 1992 under No. 970/1992 and announced in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 34 April 28, 1992 Supplement No. 1919A.

Pendirian Bank Muamalat Indonesia digagas oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan pengusaha muslim yang kemudian mendapat dukungan dari Pemerintah Republik Indonesia, sehingga pada 1 Mei 1992 atau 27 Syawal 1412 H, Bank Muamalat Indonesia secara resmi beroperasi sebagai bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah pertama di Indonesia. Puncuknya, pada 27 Oktober 1994, Bank Muamalat Indonesia mendapatkan izin sebagai Bank Devisa setelah setahun sebelumnya terdaftar sebagai perusahaan publik yang tidak listing di Bursa Efek Indonesia (BEI).

The establishment of Bank Muamalat Indonesia was initiated by the Indonesian Ulema Council (MUI), the Association of Indonesian Moslem Intellectuals (ICMI) and Muslim entrepreneurs who later received support from the Government of the Republic of Indonesia. Thus, on May 1, 1992 or 27 Shawwal 1412 H, Bank Muamalat Indonesia officially operated as the first bank that doing business based on sharia principles in Indonesia. On top of that, on October 27, 1994, Bank Muamalat Indonesia obtained a license as a Foreign Exchange Bank after a year before being listed as a public company that without being listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX).

Pada tahun 2003, BMI dengan percaya diri melakukan Penawaran Umum Terbatas (PUT) dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebanyak 5 (lima) kali dan merupakan lembaga perbankan pertama di Indonesia yang mengeluarkan Sukuk Subordinasi Mudharabah. Aksi korporasi tersebut semakin menegaskan posisi Bank Muamalat Indonesia di peta industri perbankan Indonesia.

In 2003, BMI proudly conducted a Limited Public Offering (PUT) with Pre-emptive Right (HMETD) 5 (five) instances and was the first banking institution in Indonesia to issue a Mudharabah Subordinated Sukuk. The corporate action further confirms the position of Bank Muamalat Indonesia in Indonesian banking industry.

BMI terus berinovasi dan mengeluarkan produk-produk keuangan syariah seperti Asuransi Syariah (Asuransi Takaful), Dana Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat (DPLK Muamalat) dan multifinance syariah (Al-Ijarah Indonesia Finance) yang seluruhnya menjadi terobosan di Indonesia. Selain itu produk Bank yaitu Shar-e yang diluncurkan pada tahun 2004 juga merupakan tabungan instan pertama di Indonesia. Produk Shar-e Gold Debit Visa yang diluncurkan pada tahun 2011 tersebut mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai Kartu Debit Syariah dengan teknologi chip pertama di Indonesia serta layanan e-channel seperti internet banking, mobile banking, ATM, dan cash management. Seluruh produk-produk tersebut menjadi pionir produk syariah di Indonesia dan menjadi tonggak sejarah penting di industri perbankan syariah.

BMI continually innovates and issues sharia financial products such as Sharia Insurance (Takaful Insurance), Muamalat Financial Institution Pension Fund (DPLK Muamalat) and sharia multifinance company (Al-Ijarah Indonesia Finance) which are all breakthroughs in Indonesia. In addition, the Bank's product, Shar-e, which was launched in 2004, is also the first instant savings in Indonesia. The Shar-e Gold Debit Visa product, which was launched in 2011, received an award from the Indonesian Museum of Records (MURI) as the first Shariah Debit Card with chip technology in Indonesia as well as comprehensive e-channel services such as internet banking, mobile banking, ATMs, and cash management. All of these products are the pioneers of sharia products in Indonesia and are important milestones in sharia banking industry.

Seiring kapasitas Bank yang semakin diakui, Bank semakin melebarkan sayap dengan terus menambah jaringan kantor cabangnya di seluruh Indonesia. Pada tahun 2009, Bank mendapatkan izin untuk membuka kantor cabang di Kuala Lumpur, Malaysia dan menjadi bank pertama di Indonesia serta satu-satunya yang mewujudkan ekspansi bisnis di Malaysia. Hingga saat ini, Bank telah memiliki 276 kantor layanan termasuk 1 (satu) kantor cabang di Malaysia. Operasional Bank juga

As there is more acknowledgment on the Bank's capacity, Bank Muamalat Indonesia expanded its business by adding more branch offices all over Indonesia. In 2009, the Bank obtained a license to operate a branch office in Kuala Lumpur, Malaysia and become the first and still only bank in Indonesia to expand its business in Malaysia. To date, the Bank has operated 276 offices to serve its customers including 1 (one) branch office in Malaysia. The Bank operation is

didukung oleh jaringan layanan yang luas berupa 710 unit ATM Muamalat, 120.000 jaringan ATM Bersama dan ATM Prima, 95 unit Mobil Kas Keliling serta jaringan ATM di Malaysia melalui Malaysia Electronic Payment (MEPS).

also supported by a wide service network consisting of 710 unit of Muamalat ATMs, 120,000 ATM Bersama and ATM Prima Networks, 95 mobile branch units, and ATM network in Malaysia through Malaysia Electronic Payment (MEPS).

Menginjak usianya yang ke-20 pada tahun 2012, Bank Muamalat Indonesia melakukan rebranding pada logo Bank untuk semakin meningkatkan awareness terhadap image sebagai Bank syariah Islami, Modern dan Profesional. Bank pun terus mewujudkan berbagai pencapaian serta prestasi yang diakui baik secara nasional maupun internasional. Hingga saat ini, Bank beroperasi bersama beberapa entitas anaknya dalam memberikan layanan terbaik yaitu Al-Ijarah Indonesia Finance (ALIF) yang memberikan layanan pembiayaan syariah, (DPLK Muamalat) yang memberikan layanan dana pensiun melalui Dana Pensiun Lembaga Keuangan, dan Baitulmaal Muamalat yang memberikan layanan untuk menyalurkan dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS).

On its 20th anniversary in 2012, Bank Muamalat Indonesia conducted rebranding on its logo to enhance the image awareness as a Islami, Modern, and Professional Sharia Bank. The Bank also continues to realize varied achievements and attainments acknowledged in both Indonesia and the world. Until today the Bank operates together with several subsidiaries in providing the best services, i.e. Al-Ijarah Indonesia Finance (ALIF) which provides sharia financing service, Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK Muamalat) which provides pension funds service, and Baitulmaal Muamalat which provides services of disbursing Zakat, Infak and Sadaqah (ZIS).

Sampai saat ini Bank Muamalat Indonesia terus bermetamorfosa untuk menjadi entitas yang semakin baik dan meraih pertumbuhan jangka panjang. Dengan strategi bisnis yang terarah Bank Muamalat Indonesia akan terus melaju mewujudkan visi menjadi "The Best Islamic Bank and Top 10 Bank in Indonesia with Strong Regional Presence".

Until now, Bank Muamalat Indonesia continues altered into a better entity that achieves a long-term growth. With a well-directed business strategy Bank Muamalat Indonesia continues to move ahead, actualizing its vision to be "The Best Islamic Bank and One of the Top 10 Bank in Indonesia with Strong Regional Presence".

Informasi tentang Perubahan Nama

Bank Muamalat Indonesia pernah melakukan perubahan atau pergantian nama menjadi PT Bank Syariah Muamalat Indonesia Tbk yang disahkan pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 22 Juni 2000 merujuk SK Dir BI No. 32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah yang menentukan kewajiban mencantumkan kata "Syariah" setelah kata "Bank". Bank kembali menggunakan nama Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2008 sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 23 April 2008 dan merujuk pada UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 5 ayat 4 di mana pencantuman kata "Syariah" setelah kata "Bank" hanya berlaku bagi Bank yang mendapatkan izin usaha setelah berlakunya UU Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008.

Information on Change of Name

Bank Muamalat Indonesia had its name changed to PT Bank Syariah Muamalat Indonesia Tbk based on the resolution of Extraordinary General Meeting of Shareholders on June 22, 2000, pursuant to the Decision Letter of the Board of Directors of Bank Indonesia (BI) No. 32/34/KEP/DIR dated May 12, 1999, on Commercial Bank Operating based on the Sharia Principles. The Decision Letter regulates the obligation to utilize the word "Syariah" after the word "Bank". The Bank returned to utilizing the name Bank Muamalat Indonesia in 2008 based on the resolution of Extraordinary General Meeting of Shareholders dated April 23, 2008 and referring to Sharia Banking Act of Law No. 21 of 2008, Article 5 Paragraph 4 which regulates that the use of the word "Syariah" following the word "Bank" applies only to Banks that secure their business after the enactment of Sharia Banking Act (Law No. 21 of 2008).

Jejak Langkah
Milestones

1991

Bank Muamalat Indonesia merupakan bank syariah pertama di Indonesia yang berdiri pada 1 November 1991 atau 24 Rabi'ul Tsani 1412 H.

Bank Muamalat Indonesia is the first sharia bank in Indonesia established on November 1, 1991 or 24 Rabbiul Tsani 1412 H.

1992

Mulai beroperasi pada 1 Mei 1992 atau 27 Syawal 1412 H dan menjadi pelopor bisnis keuangan syariah lainnya.

Began operating on May 1, 1992 or 27 Shawwal 1412 H and became a pioneer of other sharia financial businesses.

1993

Terdaftar sebagai perusahaan publik.

Listed as a public company.

1994

Memperoleh izin sebagai Bank Devisa pada 27 Oktober 1994.

Obtained license as a Foreign Exchange Bank on October 27, 1994.

2008

Penerbitan Sukuk Subordinasi Mudharabah II sebesar Rp314 miliar. Bank kembali menggunakan nama Bank Muamalat Indonesia tahun 2008 sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 23 April 2008.

Issuance of Mudharabah II Subordinated Sukuk amounting to Rp314 billion. The Bank changed its name back to PT Bank Muamalat Indonesia Tbk in 2008 in accordance with the resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders dated April 23, 2008.

2009

Pembukaan kantor cabang internasional pertama di Kuala Lumpur, Malaysia.

The opening of the first international branch office in Kuala Lumpur, Malaysia.

2011

Peluncuran produk Shar-e Gold Debit Visa.

The launch of the Shar-e Gold Debit Visa Card.

2012

- Bank Muamalat Indonesia melakukan rebranding atau perubahan logo.
- Menerbitkan Sukuk Subordinasi Mudharabah Berkelanjutan I Tahap 1 Tahun 2012 senilai Rp800 miliar.
- *Bank Muamalat Indonesia engaged in a rebranding with a logo change.*
- *Issuance of Shelf-Registration Mudharabah Subordinated Sukuk I Tranche I 2012 of Rp800 billion.*

2017

Pada bulan Juli 2017, Bank Muamalat Indonesia menerbitkan Medium Term Notes Syariah (MTNS) dengan total nilai Rp200 miliar, yang terdiri dari Rp100 miliar MTNS subordinasi dengan tenor 5 tahun dan Rp100 miliar MTNS dengan tenor 3 tahun.

In July 2017, Bank Muamalat Indonesia issued a total of Rp200 billion Medium Term Notes Sharia (MTNS), consisting of Rp100 billion subordinated MTNS with 5-year tenor and Rp100 billion with 3-year tenor.

2018

Pada Bulan Oktober 2018, Bank Muamalat Indonesia meluncurkan kampanye #AyoHijrah yang mengajak masyarakat untuk berhijrah, khususnya dalam hal layanan perbankan syariah. Kampanye #AyoHijrah dilandasi oleh cita-cita Bank yang ingin menjadi pusat ekosistem ekonomi syariah di Indonesia. Bank Muamalat Indonesia ingin turut membangun industri halal di dalam negeri yang diselaraskan dengan perkembangan teknologi digital.

In October 2018, Bank Muamalat Indonesia launched the #AyoHijrah campaign inviting people to migrate to Islamic banking services, #AyoHijrah campaign is embodiment of the Bank ideals to be the center of the Islamic economic ecosystem in Indonesia. Bank Muamalat Indonesia wants to support domestic halal industries aligned with the development of digital technology.

2000

Bank Muamalat Indonesia melakukan perubahan atau pergantian nama menjadi Bank Syariah Muamalat Indonesia yang disahkan pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 22 Juni 2000.

Bank Muamalat Indonesia changed its name to Bank Muamalat Indonesia pursuant to the Extraordinary General Meeting of Shareholders on June 22, 2000.

2003

Menerbitkan Sukuk Subordinasi Mudharabah I sebesar Rp200 miliar sebagai sukuk pertama yang diterbitkan oleh lembaga perbankan di Indonesia.

Issued Mudharabah I Subordinate Sukuk of Rp200 billion as the first sukuk issued by banking institution in Indonesia.

2004

Peluncuran produk Shar-e yang merupakan tabungan instan pertama di Indonesia melalui ribuan jaringan online Kantor Pos di seluruh Indonesia, yakni System Online Payment Point (SOPP).

The launch of Shar-e product as the first instant savings in Indonesia through thousands of Post Office online networks throughout Indonesia called System Online Payment Point (SOPP).

2007

Pendirian Al-Ijarah Indonesia Finance (ALIF) bersama dengan Boubyan Bank dan International Leasing and Investment Company (ILIC) sebagai multifinance syariah pertama di Indonesia.

Establishment of Al-Ijarah Indonesia Finance (ALIF) with Boubyan Bank and International Leasing and Investment Company (ILIC) as the first sharia multifinance in Indonesia.

2013

Menerbitkan Sukuk Subordinasi Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2013 senilai Rp700 miliar.

Issuance of Shelf-Registration Mudharabah Subordinated Sukuk I Tranche II 2013 of Rp700 billion.

2014

Memulai proses transformasi Bank Muamalat Indonesia.

Bank Muamalat Indonesia begins its transformation.

2015

Peresmian Muamalat Tower sebagai kantor pusat Bank Muamalat Indonesia.

The Inauguration of Muamalat Tower as the Head Office of Bank Muamalat Indonesia.

2016

Meluncurkan Muamalat Mobile Banking dan meresmikan Lounge Umroh di Terminal 2 Bandara Internasional Soekarno Hatta.

Launch of Muamalat Mobile Banking and Inauguration of Umroh Lounge at Terminal 2 of Soekarno Hatta International Airport.

2019

Meluncurkan aplikasi mobile banking terbaru, Muamalat Digital Islamic Network (DIN) yang dilengkapi dengan berbagai fitur terbaru yang dirancang untuk melakukan transaksi finansial maupun non finansial secara *real time* dengan fitur yang lebih aman.

The launching of the latest mobile banking application, Muamalat Digital Islamic Network (DIN) which is equipped with various latest features designed to conduct financial and non-financial transactions in real time with more secure features.

Logo Perusahaan
Company Logo



Simbol Huruf

Simbol huruf yang diambil dari alfabet arab (hijaiyah) "Dal-Yaa'-Nuun" memiliki makna ganda yaitu:

1. "Ad Diin" yang berarti agama (Islam).
2. "Madaniyah" yang mewakili niat-niat luhur Bank Muamalat Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur sesuai konsep Islam.

Letter Symbol

The letter symbol taken from the Arabic alphabet (hijaiyah) "Dal-Yaa'-Nuun" has dual meaning namely:

1. *"Ad Deen" means religion (Islam).*
2. *"Madaniyah" represents the noble intentions of Bank Muamalat Indonesia to create a just and prosperous society in accordance with the Islamic concept.*

Warna

Terdiri dari 2 warna Hijau dan Ungu yang keduanya juga memiliki makna sebagai berikut:

1. Hijau yang merepresentasikan nilai universal yang segar, memiliki kesesuaian dengan gambaran dunia Islam sehingga relevan menggambarkan nilai Islami.
2. Ungu pada huruf dan tulisan Bank Muamalat, memberikan makna kedewasaan dan kemapanan yang sesuai dengan nilai profesionalisme.

Color

Consists of two colors which are Green and Purple. Both have the following meanings:

1. *Green represents a clear universal value, in accordance with the relevant description of the Islamic world to describe Islamic values.*
2. *Purple on the letters and writings of Bank Muamalat means maturity and stability in accordance with the professionalism value.*

Tulisan

"Pertama Murni Syariah" merupakan simbolisasi bahwa Bank Muamalat Indonesia adalah Bank Syariah pertama di Indonesia.

Writing

"Pertama Murni Syariah" is a symbol that Bank Muamalat Indonesia is the first Sharia Bank in Indonesia.

Bidang Usaha
Line of Business

Bank Muamalat Indonesia yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip Syariah, menjalankan fungsinya sebagai bank dengan menjalankan kegiatan usaha pokok yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan. Disamping melakukan transaksi antar bank berdasar Prinsip Syariah, Bank juga melakukan transaksi pembayaran dan perdagangan nasional dan internasional, yang mencakup jasa kiriman uang, inkaso/ *collection*, transaksi valuta asing, dan pembiayaan ekspor-impor dalam bentuk letter of credit (L/C) yang memberikan pendapatan imbal jasa/komisi kepada Bank.

Bank Muamalat Indonesia, which runs its business based on Sharia principles, carries out its function as a bank through its main business activities, by collecting funds from the public and channeling them back in the form of financing. Besides conducting interbank transactions based on Sharia Principles, the Bank also makes national and international trade and payment transactions, which include remittance, collections, foreign exchange transactions, and export-import financing in the form of letters of credit (L/C) which provide fee income/commission to the Bank.

Kegiatan Usaha Menurut Anggaran Dasar Terakhir

Sesuai Anggaran Dasar Perusahaan yang terakhir, berdasarkan Akta No. 22 Tanggal 11 Oktober 2018 dibuat oleh Ashoya Ratam, S.H., Mkn di Kota Administrasi Jakarta Selatan yang disahkan oleh Surat Keputusan Kemenkumham No. AHU-0024963.AH.01.02 Tahun 2018 Tanggal 9 November 2018, disebutkan bahwa maksud dan tujuan Bank Muamalat Indonesia adalah yaitu menyelenggarakan usaha perbankan berdasarkan prinsip Syariah. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Bank menerapkan prinsip Syariah dalam melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Menghimpun dana dari masyarakat meliputi:
   a. Bentuk simpanan berupa:
      i. Giro berdasarkan prinsip Wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.
      ii. Tabungan berdasarkan prinsip Wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.
      iii. Bentuk lainnya berdasarkan akad Wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.
   b. Bentuk investasi berupa:
      iii. Deposito berjangka berdasarkan akad Mudharabah atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.
      ii. Tabungan berdasarkan akad Mudharabah atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.
      iii. Bentuk lain berdasarkan akad Mudharabah atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.
2. Menyalurkan pembiayaan:
   a. Untuk transaksi jual beli berdasarkan akad antara lain:
      i. Murabahah;
      ii. Istishna;
      iii. Salam;
      iv. Akad lain berdasarkan prinsip Syariah.
   b. Untuk transaksi bagi hasil berdasarkan akad antara lain:
      iii. Mudharabah;
      iv. Musyarakah;
      v. Akad lain berdasarkan prinsip Syariah.

Business Activities According to Latest Articles of Association

In accordance with the latest Company's Articles of Association, based on Deed No. 22 On October 11, 2018, made by Ashoya Ratam, S.H., Mkn in the Administration City of South Jakarta, which was approved by Decree of the Ministry of Law and Human Rights No. AHU-0024963. AH.01.02 of 2018 dated November 9, 2018, it was stated that the purpose and objective of Bank Muamalat Indonesia is to conduct banking business based on Sharia principles. To achieve these aims and objectives, the Company applies Sharia principles in conducting business activities as follows:

1. *Collecting funds from community which include:*
   a. *Deposit in the form of:*
      i. *Current account based on the principle of Wadi'ah or other contracts that do not conflict with Sharia principles.*
      ii. *Savings based on the principle of Wadi'ah or other contracts that do not conflict with Sharia principles.*
      iii. *Other forms are based on the Wadi'ah contract or other contracts that do not conflict with Sharia principles.*
   b. *Form of investment:*
      i. *Time deposits are based on Mudharabah agreements or other contracts that do not conflict with Sharia principles.*
      ii. *Savings based on Mudharabah agreements or other contracts that do not conflict with Sharia principles.*
      iii. *Other forms based on Mudharabah agreements or other contracts that do not conflict with Sharia principles.*
2. *Distributing financing:*
   a. *For sale and purchase transactions based on contracts, such as:*
      i. *Murabahah;*
      ii. *Istishna;*
      iii. *Salam;*
      iv. *Other contracts are based on Sharia principles.*
   b. *For profit sharing transactions based on contracts, such as:*
      i. *Mudharabah;*
      ii. *Musyarakah;*
      iii. *Other contracts are based on Sharia principles.*

c. Penyewaan barang benda bergerak atau tidak bergerak berdasarkan akad antara lain:
   iv. Ijarah;
   v. Ijarah muntahiya bittamlik;
   vi. Akad lain berdasarkan prinsip Syariah.
d. Untuk transaksi pinjam meminjam berdasarkan:
   v. Akad Qardh;
   vi. Akad lain berdasarkan prinsip Syariah.

3. Melakukan pemberian jasa pelayanan berbankan berdasarkan akad antara lain:
   i. Wakalah;
   ii. Hawalah;
   iii. Kafalah;
   iv. Rahn.
4. Membeli, menjual dan/atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata *(underlying transaction)* berdasarkan prinsip Syariah;
5. Membeli surat berharga berdasarkan prinsip Syariah yang diterbitkan oleh Pemerintah dan/atau Bank Indonesia;
6. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip Syariah;
7. Memindahkan uang untuk kepentingan sendiri dan/atau nasabah berdasarkan prinsip Syariah;
8. Menerima pembayaran tagihan atas surat berharga yang diterbitkan dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip Syariah;
9. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat-surat berharga berdasarkan prinsip Wadi'ah yad Amanah atau prinsip lain berdasarkan prinsip Syariah;
10. Melakukan kegiatan penitipan termasuk penatausahaannya untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak dengan prinsip Wakalah;
11. Memberi fasilitas letter of credit (L/C) berdasarkan prinsip Syariah;
12. Memberikan fasilitas garansi bank berdasarkan prinsip Syariah;
13. Melakukan kegiatan usaha kartu debet, charge card berdasarkan prinsip Syariah;
14. Melakukan kegiatan wali amanat berdasarkan akad Wakalah; dan
15. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan Bank sepanjang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan dan mendapatkan fatwa Dewan Syariah Nasional.

Kegiatan Usaha Lain

1. Melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan prinsip Syariah.
2. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank umum Syariah atau Lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah.
3. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan Pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya.

c. Lease of movable or immovable property based on a contract including:
   i. Ijarah;
   ii. Ijarah muntahiya bittamlik;
   iii. Other contracts are based on Sharia principles.
d. For lending and borrowing transactions based on:
   i. Qardh contract;
   ii. Other contracts are based on Sharia principles.

3. Providing services based on contract, among others:
   i. Wakalah;
   ii. Hawalah;
   iii. Kafalah;
   iv. Rahn.
4. Purchasing, selling and/or guaranteeing on their own risk third party securities issued on the basis of underlying transactions based on Sharia principles;
5. Purchasing securities based on Sharia principles issued by the Government and/or Bank Indonesia;
6. Receiving payments from bills for securities and performing calculations with third parties or between third parties based on Sharia principles;
7. Transferring money for their own interests and/or customers based on Sharia principles;
8. Receiving bill payments for securities issued and calculating with or between third parties based on Sharia principles;
9. Providing a place to store goods and securities based on the principles of Wadi'ah yad Amanah or other principles based on Sharia principles;
10. Conduct safekeeping activities including administration for the benefit of other parties based on a contract with the principle of wakalah;
11. Providing letter of credit (L/C) facilities based on Sharia principles;
12. Providing bank guarantee facilities based on Sharia principles;
13. Conducting debit card business activities, charge cards based on Sharia principles;
14. Conducting trustee activities based on Wakalah contract; and
15. Carrying out other activities normally carried out by the Bank as long as they are approved by the Financial Services Authority and obtain the fatwa of the National Sharia Board.

Other Scope of Business

1. Conducting foreign exchange activities based on Sharia principles.
2. Conducting capital participation activities in Sharia public banks or financial institutions conducting business activities based on Sharia principles.
3. Conducting temporary capital participation activities to overcome due to failure of Financing based on Sharia principles provided that they must withdraw their investments.

4. Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun berdasarkan prinsip Syariah.
5. Melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundangan di bidang pasar modal.
6. Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank berdasarkan prinsip Syariah dengan menggunakan sarana elektronik.
7. Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berjangka pendek berdasarkan prinsip Syariah, baik secara langsung atau tidak langsung, melalui pasar uang.
8. Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip Syariah, baik secara langsung atau tidak langsung, melalui pasar modal.
9. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank umum Syariah lainnya yang berdasarkan prinsip Syariah.

Produk dan Layanan yang Diberikan

Produk Penghimpunan Dana

Produk penghimpunan dana Bank adalah sebagai berikut:

1. Tabungan iB Hijrah
   Tabungan dalam mata uang Rupiah yang dapat digunakan untuk beragam jenis transaksi, memberikan akses yang mudah, serta manfaat yang luas. Tabungan iB Hijrah kini hadir dengan dua pilihan kartu ATM/ Debit yaitu: Kartu Shar-E Reguler, Shar-E Gold, dan Shar-E ihram.
2. Tabungan iB Hijrah Valas
   Tabungan dalam denominasi valuta asing US Dollar (USD) dan Singapore Dollar (SGD) bertujuan untuk melayani kebutuhan transaksi dan investasi yang lebih beragam.
3. Tabungan iB Hijrah Haji
   Tabungan haji dan umrah dalam mata uang Rupiah dan valuta asing US Dollar yang dikhususkan bagi Nasabah masyarakat muslim Indonesia yang berencana menunaikan ibadah Haji dan Umrah.
4. Tabungan iB Hijrah Rencana
   Tabungan iB Hijrah Rencana merupakan tabungan berjangka dalam mata uang Rupiah, memiliki setoran rutin bulanan dan tidak bisa ditarik sebelum jangka waktu berakhir kecuali penutupan rekening serta pencairan dana hanya bisa dilakukan ke rekening sumber dana. Tabungan iB Muamalat Rencana dapat membantu mewujudkan berbagai rencana Nasabah di masa yang akan datang.
5. TabunganKu iB
   Tabungan syariah dalam mata uang Rupiah yang sangat terjangkau bagi Nasabah dari semua kalangan Masyarakat.
6. Tabungan iB Hijrah Prima
   Tabungan iB Muamalat Prima merupakan tabungan yang didesain bagi Nasabah yang ingin mendapatkan bagi hasil maksimal dan kebebasan bertransaksi.

4. *Acting as founder and manager of pension funds based on Sharia principles.*
5. *Doing activities in the capital market as long as it does not conflict with Sharia principles and the rules and regulations in the capital market sector.*
6. *Organizing bank activities or products based on Sharia principles using electronic means.*
7. *Publishing, offering and trading short-term letters based on Sharia principles, either directly or indirectly, through the money market.*
8. *Publishing, offering and trading long-term securities based on Sharia principles, either directly or indirectly, through the capital market.*
9. *Providing products or conducting other Sharia Commercial Bank business activities based on Sharia principles.*

Products and Services

Fund Collection Products

The Company's fund collection products are as follows:

1. *iB Hijrah Savings*
   Savings in Rupiah that can be used for various types of transaction provide easy access, and broad benefits. iB Hijrah Savings now comes with two choices of ATM/Debit cards namely: the Shar-E Card Regular, Shar-E Gold, and Shar-E Ihram.
2. *iB Hijrah Valas Savings*
   Savings denominated in foreign currencies US Dollar (USD) and Singapore Dollar (SGD) aim to serve the needs of more diverse transactions and investments.
3. *iB Hijrah Haji Savings*
   Hajj and Umrah savings in Rupiah and US Dollar foreign currencies are reserved for Customers of the Indonesian Moslem community who plan to perform Hajj and Umrah services.
4. *iB Hijrah Rencana Savings*
   iB Hijrah Rencana Savings is a time deposit in Rupiah, has a monthly routine deposit and cannot be withdrawn before the expiration period unless the account closure and disbursement of funds can only be made to the fund source account. The Muamalat iB Savings Plan can help realize various Customer plans in the future.
5. *TabunganKu iB*
   Islamic savings in Rupiah are very affordable for customers from all circles of society.
6. *iB Hijrah Prima Savings*
   Muamalat Prima iB Savings is a savings designed for customers who want to get maximum profit sharing and freedom of transaction.

7. Tabungan iB Hijrah Bisnis
   Tabungan iB Hijrah Bisnis adalah produk tabungan yang digunakan untuk mengakomodir kebutuhan bisnis nasabah Non-Individu dengan memberikan kemudahan dan kenyamanan bertransaksi yang didukung oleh fasilitas Cash Management System.
8. Deposito iB Hijrah
   Deposito syariah dalam mata uang Rupiah dan US Dollar yang fleksibel dan memberikan hasil investasi yang optimal bagi Nasabah. Deposito Mudharabah diperuntukkan bagi Nasabah perorangan dan institusi yang memiliki legalitas badan.
9. Giro iB Hijrah Attijary
   Giro syariah dengan akad Wadiah dalam mata uang Rupiah dan US Dollar yang memudahkan semua jenis kebutuhan transaksi bisnis maupun transaksi keuangan personal Nasabah. Giro ini diperuntukan bagi Nasabah perorangan dan intitusi yang memiliki legalitas badan.
10. Giro iB Hijrah Ultima
    Giro syariah dengan akad Mudharabah dalam mata uang Rupiah dan US Dollar yang memudahkan semua jenis kebutuhan transaksi bisnis maupun transaksi keuangan personal Nasabah. Giro ini diperuntukan bagi Nasabah perorangan dan intitusi yang memiliki legalitas badan.
11. Dana Pensiun Muamalat
    DPLK Muamalat dapat diikuti oleh Nasabah yang berusia minimal 18 tahun, atau sudah menikah, dengan pilihan usia pensiun dan iuran pensiun yang terjangkau, yaitu minimal Rp20.000 (dua puluh ribu Rupiah) per bulan dan pembayarannya dapat didebet secara otomatis dari rekening Bank Muamalat Indonesia atau dapat ditransfer dari bank lain.

Produk Pembiayaan

Dana yang dihimpun oleh Bank sebagian besar disalurkan dalam bentuk pembiayaan, baik untuk usaha produktif maupun untuk keperluan konsumtif. Bank juga melakukan penempatan dana bekerjasama dengan mitra strategis dengan melakukan pembiayaan *chanelling* maupun *executing* melalui Lembaga Keuangan Mikro Kecil yaitu, BMT (Baitul Maal Wa-Tamwil), Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dan perusahaan pembiayaan. Untuk menjaga posisi likuiditas jangka pendek, Bank juga melakukan penempatan dana pada bank lain serta pembelian surat-surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah. Bank juga meningkatkan intensitas pembiayaan yang ditujukan pada pasar yang selama ini mempunyai kinerja pembiayaan yang baik dengan mengalokasikan porsi yang lebih besar kepada UMKM dalam realisasi portfolio pembiayaan.

7. *iB Hijrah Bisnis Savings*
   iB Hijrah Bisnis Savings is a savings product that is used to accommodate the business needs of Non-Individual customers by providing convenience and convenience in transactions supported by the Cash Management System facility.
8. *iB Hijrah Deposit*
   Islamic deposits in Rupiah and US Dollar are flexible and provide optimal investment results for the Customer. Mudharabah deposits are intended for individual customers and institutions that have legal entities.
9. *iB Hijrah Attijary Current Account*
   A Sharia-based current account with Wadiah contract in Rupiah and US Dollar currency which facilitates all types of business transaction needs and Customer's personal financial transactions. This current account is intended for individual and institutional clients which are legal entities.
10. *iB Hijrah Ultima Current Account*
    A Sharia-based current account with Mudharabah agreement in Rupiah and US Dollar currency which facilitates all types of business transaction needs and Customer's personal financial transactions. This current account is intended for individual and institutional clients who have legal entities.
11. *Muamalat Pension Fund*
    The Muamalat Pension Fund can be followed by Customers who are at least 18 years old, or already married, with a choice of retirement age and affordable pension contributions, which is a minimum of Rp20,000 (twenty thousand Rupiah) per month and the payment can be debited automatically from the Bank Muamalat Indonesia account or can be transferred from another bank.

Financing Products

Most of the funds collected by the Company are channelled in the form of financing, both for productive businesses and for consumptive purposes. The Company also conducts fund placements in collaboration with strategic partners by conducting channel financing and executing through Small Microfinance Institutions such as, BMT (Baitul Maal Wa-Tamwil), Syariah Rural Banks (BPRS) and finance companies. To maintain a short-term liquidity position, the Company also places funds in other banks and purchases securities based on Sharia Principles. The Company also increases the intensity of financing aimed at the market, which so far has good financing performance by allocating a larger portion to MSMEs in the realization of the financing portfolio.

Produk Pembiayaan yang Disalurkan oleh Bank adalah sebagai Berikut:

1. **KPR iB Muamalat**
   KPR iB Muamalat adalah pembiayaan yang akan membantu Nasabah untuk memiliki rumah tinggal/ apartemen baru *(indent/ ready stock)* maupun *secondary*. Pembiayaan ini juga dapat digunakan untuk pengalihan *take over* KPR dari bank lain, pembangunan, dan renovasi rumah tinggal. Diperuntukkan bagi perorangan (WNI) cakap hukum yang berusia minimal 21 tahun atau maksimal 55 tahun untuk karyawan, dan 60 tahun untuk wiraswasta atau profesional pada saat jatuh tempo pembiayaan.

2. **iB Muamalat Multiguna**
   Pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan Nasabah dalam pembelian barang halal (selain tanah, bangunan, mobil dan emas) serta sewa jasa yang dibolehkan secara syariah seperti Umrah, wisata dan lainnya
3. **iB Muamalat Koperasi Karyawan**
   Pembiayaan yang diberikan kepada koperasi karyawan untuk disalurkan kepada para anggotanya (karyawan BUMN/PNS/ swasta) dengan tujuan pembelian barang halal. Diperuntukan bagi para anggota koperasi karyawan dan diajukan secara berkelompok.
4. **iB Muamalat Pensiun**
   Pembiayaan yang diberikan kepada para pensiunanPNS/TNI/ Polri/BUMN/BUMD/Swasta untuk pembelian barang konsumtif yang halal (termasuk rumah tinggal dan kendaraan bermotor) atau sewa jasa halal (seperti keperluan pendidikan anak, Umrah, wisata, dan lainnya) dengan ketentuan pembayaran manfaat pensiun wajib dialihkan melalui Bank Muamalat Indonesia.

5. **Pembiayaan Autoloan (Via Multifinance)**
   Pembiayaan yang diberikan kepada end user dengan tujuan pembelian kendaraan bermotor (mobil dan motor) melalui perusahaan multifinance yang bekerja sama dengan Bank Muamalat Indonesia.
6. **iB Modal Kerja Reguler**
   Pembiayaan jangka pendek yang diperuntukkan bagi Nasabah Perorangan atau Badan Usaha untuk memenuhi kebutuhan Modal Kerja Asset Lancar.
7. **iB Modal Kerja Proyek**
   Pembiayaan produktif yang diperuntukkan bagi Nasabah untuk memenuhi kebutuhan Modal Kerja Proyek atas pembangunan, pemeliharan, atau pengadaan, dll.
8. **iB Modal Kerja Konstruksi Developer**
   Pembiayaan modal kerja khusus bagi Developer guna pembangunan properti residensial/non residensial, sarana & prasarana perumahan, dll.

The Financing Products Distributed by the Company are as Follows:

1. ***KPR iB Muamalat***
   KPR iB Muamalat, or iB Muamalat house mortgage is a financing facility to help customers purchase a new landed house/apartment unit (indent/ready stock) or a secondary landed house/apartment unit. This financing scheme is also available for mortgage take over from another bank, house construction, and home renovation. The product is designed for legal conscious Indonesian citizen with minimum age 21 years old and maximum age of 55 years old for employees, and 60 years old for entrepreneurs or professionals at the time of the maturity date.
2. ***iB Muamalat Multiguna***
   A Financing facility to meet the needs of customers in purchasing halal goods (other than land, buildings, cars and gold) and leasing services that are permitted by sharia such as Umrah, holiday, and others.

3. ***iB Muamalat Koperasi Karyawan***
   A financing facility for employee cooperative to channel to the members of the cooperative (SOE employees/civil servants/private employees) for a purchase of halal products. The financing facility is for the members of a cooperative with the proposal submitted as a collective.
4. ***iB Muamalat Pensiun***
   A financing facility for Retired Civil Servants/Soldiers/Police Officers/SOE and Region-owned Enterprise Employees/Private Employees for a purchase of halal consumptive goods (including home and motor vehicles) or halal rental services (such as for children education, Umrah, holiday, and others). The provisions include the payment of the pension benefit must be transferred via Bank Muamalat Indonesia.
5. ***Pembiayaan Autoloan (Via Multifinance)***
   Financing provided to end users with the aim of purchasing motorized vehicles (cars and motorbikes) through multi-finance companies in collaboration with Bank Muamalat Indonesia.

6. ***iB Modal Kerja Reguler***
   Short-term financing intended for Individual Customers or Business Entities to fullfill Current Asset Working Capital needs.

7. ***iB Modal Kerja Proyek***
   Productive financing that is intended for Customers to fulfill Project Working Capital needs for construction, maintenance or procurement, etc.
8. ***iB Modal Kerja Konstruksi Developer***
   Special working capital financing for developers to build residential/ non-residential property, housing facilities, infrastructure, etc.

9. **iB Modal Kerja Lembaga Keuangan Syariah**
   Pembiayaan yang diberikan bagi Lembaga Keuangan Syariah (seperti BPRS, Modal Ventura, KopSyah.) untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yang akan disalurkan kembali ke enduser dengan pola *executing*.
10. **iB Investasi Reguler**
    Pembiayaan jangka panjang yang disediakan dalam rangka pemenuhan pembelian asset tetap, pembelian mesin produksi, atau investasi lainnya selain properti dalam rangka peremajaan, perluasan, peningkatan kapasitas usaha, dan/atau pendirian unit usaha baru *(business expansion).*
11. **iB Properti Bisnis**
    Pembiayaan yang disediakan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan akan pembelian Properti Bisnis sebagai investasi ataupun untuk peremajaan/renovasi dan pembangunan properti bisnis baru diatas lahan milik nasabah.
12. **iB Muamalat Usaha Mikro**
    Pembiayaan dalam bentuk modal kerja dan investasi yang diberikan kepada pengusaha mikro baik untuk perorangan maupun badan usaha non-hukum.
13. **iB Rekening Koran Muamalat**
    Pembiayaan jangka pendek untuk modal kerja yang bersifat fluktuatif dengan perputaran transaksi yang cepat dengan penarikan dana yang dapat dilakukan sesuai kebutuhan melalui Cek atau Bilyet Giro.

Layanan

1. Perbankan Internasional *(Remittance)*
   a. Kas Kilat
      Adalah layanan yang diberikan Bank kepada nasabah Masyarakat lainnya, untuk menerima kiriman uang, baik tunai maupun non-tunai khususnya dari WNI yang bermukim di luar negeri (Tenaga Kerja Indonesia atau Ekspatriat).
   b. Incoming Muamalat Remittance iB
      Adalah kiriman uang masuk dalam denominasi valuta asing yang ditujukan kepada penerima, baik untuk diterima tunai ataupun dikreditkan ke rekening penerima yang merupakan nasabah Bank.
   c. Outgoing Muamalat Remittance iB
      Adalah kiriman uang keluar dalam denominasi valuta asing yang ditujukan kepada penerima, baik untuk diterima tunai ataupun dikreditkan ke rekening penerima pada bank lain, baik di dalam maupun di luar negeri, sesuai dengan instruksi pengirim melalui Bank.

9. ***iB Modal Kerja Lembaga Keuangan Syariah***
   Financing facilities to be given to Islamic Financial Institutions (such as BPRS, venture company, KopSyah) to fulfill working capital needs that will be channelled back to the end-users with a financing executing model.
10. ***iB Investasi Reguler***
    Long-term financing of which is provided in the context of fulfilling fixed asset purchases, purchasing machinery, or other non-property investments in the context of rejuvenation, expansion, increasing business capacity, and/or the establishment of new business units (business expansion).
11. ***iB Properti Bisnis***
    Financing is provided for customers to fulfill the need to purchase Business Property as an investment or for renovation and construction of new business properties on the customer's land.
12. ***iB Muamalat Usaha Mikro***
    Financing in the form of working capital and investment provided to micro entrepreneurs both for individuals and non-legal business entities.
13. ***iB Rekening Koran Muamalat***
    Short-term financing for fluctuating working capital with fast transaction turnover with withdrawals of funds that can be done as needed through Checks or Bilyet Giro.

Services

1. *International Banking (Remittance)*
   a. Flash Cash
      A service provided by the Bank to customers/other communities, to receive money transfers, both cash and non-cash, especially from Indonesian citizens living abroad (Indonesian Workers or Expatriates).
   b. Incoming Muamalat Remittance iB
      An incoming money transfers that are denominated in foreign currencies addressed to the recipient, either to be received in cash or credited to the recipient's account which is a Bank customer.
   c. Outgoing Muamalat Remittance iB
      An outgoing money transfer service in the denomination of foreign currencies intended for recipients, either to be received in cash or credited to the recipient's account at another bank, either in Indonesia or abroad, in accordance with the instructions of the sender through the Bank.

Trade Finance

Produk dan layanan Trade Finance adalah sebagai berikut:

1. Ekspor

   Produk dan layanan transaksi ekspor yang diberikan kepada Nasabah/eksportir Bank meliputi:

   a. Advising L/C

      Layanan yang diberikan Bank untuk meneruskan/menyampaikan L/C kepada Beneficiary yang tercantum dalam L/C baik secara langsung maupun melalui *second* Advising Bank.

   b. Outward Bills

      Layanan yang diberikan Bank untuk menangani dokumen L/C Ekspor berupa: pengujian dokumen L/C Ekspor, Pengiriman dokumen kepada Issuing Bank atau Pihak yang ditunjuk, Penerimaan pembayaran hasil ekspor dan kegiatan lainnya yang masih terkait dengan penanganan dokumen L/C Ekspor.

   c. Negotiation

      Dana talangan yang diberikan oleh Bank kepada Beneficiary atas Presentasi dokumen L/C Ekspor *(Post Shipment Financing)*. Negosiasi dapat dilakukan baik menggunakan fasilitas ataupun tanpa fasilitas Nasabah.

   d. L/C Transfer

      Layanan yang diberikan oleh Bank untuk menerbitkan L/C Transfer berdasarkan L/C yang diterima oleh Bank dari Issuing Bank.

2. Impor

   Produk dan layanan transaksi impor yang diberikan kepada Nasabah/Importir Bank meliputi:

   a. Letter of Credit (L/C)

      Bank Muamalat Indonesia memiliki layanan penerbitan L/C yaitu penerbitan pernyataan oleh Bank atas permintaan Nasabah untuk keuntungan pihak lain *(Beneficiary)*, yang oleh karenanya Bank mengikatkan diri untuk membayar kepada *Beneficiary* apabila *Beneficiary* dapat memenuhi permintaan/persyaratan yang dinyatakan dalam L/C tersebut. Terdapat beberapa macam L/C berdasarkan jangka waktu pembayarannya yaitu:

      i. Sight L/C

         L/C yang meiwajibkan Issuing Bank untuk melaksanakan pembayaran kepada *Beneficiary*, segera setelah dokumen-dokumen yang disediakan *Beneficiary* telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dinyatakan dalam LC.

      ii. Usance L/C

         L/C di mana pada saat dokumen-dokumen yang disediakan *Beneficiary* telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana

Trade Finance

Trade Finance products and services are as follows:

1. *Export*

   Export transaction products and services provided to Bank Customers/exporters are as follows:

   a. *Advising L/C*

      Services provided by the Bank to forward/submit L/C to Beneficiaries listed in L/C either directly or through the second Advising Bank.

   b. *Outward Bills*

      Services provided by the Bank to handle Export L/C documents in the form of: Examine of Export L/C documents, Delivery of documents to Issuing Bank or Nominated Parties, Receipt of payment of export proceeds and other activities that are still related to handling Export L/C documents.

   c. *Negotiation*

      Advanced credit provided by the Bank to the Beneficiary for the presentation of the Export L/C document (Post Shipment Financing). Negotiations can be done using either facilities or without Customer facilities.

   d. *Transfer L/C*

      Services provided by the Bank to issue L/C Transfers based on L/C received by the Bank from the Issuing Bank.

2. *Import*

   Import transaction products and services provided to Bank Customers/Importers include:

   a. *Letter of Credit (L/C)*

      Bank Muamalat Indonesia has an L/C publishing service, namely the issuance of a statement by the Bank at the Customer's request for the benefit of another party (Beneficiary), which is why the Bank binds itself to pay to the Beneficiary if the Beneficiary can fulfill the request/requirements stated in the L/C. There are several types of L/C based on the payment period, namely:

      i. *Sight L/C*

         L/C that requires the Issuing Bank to carry out payments to the Beneficiary, as soon as the documents provided by the Beneficiary have fulfilled the conditions stated in the L/C.

      ii. *Usance L/C*

         L/C where when the documents provided by the Beneficiary have fulfilled the conditions stated in the L/C,

dinyatakan dalam L/C, Issuing Bank berkewajiban untuk memberikan akseptasi draft yang menyatakan bahwa Issuing Bank akan membayar kepada *Beneficiary* dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.

iii. Usance Payable at Sight (UPAS) L/C
L/C yang mewajibkan Issuing Bank untuk melaksanakan pembayaran kepada *Beneficiary* segera setelah dokumen-dokumen yang disediakan *Beneficiary* telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dinyatakan dalam L/C. Di sisi lain *Applicant* akan melakukan pembayaran kepada Issuing Bank dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.

iv. Usance Payable at Usance (UPAU) L/C
Usance L/C di mana Issuing Bank akan melakukan pembayaran kepada *Beneficiary* atas *Draft* (tagihan) yang sudah diterima sesuai akseptasi Bank kepada *Beneficiary*. Di sisi lain, *Applicant* akan melakukan pembayaran kepada Issuing Bank dalam jangka waktu tertentu yang akan datang yang sudah disepakati.

b. Surat Berdokumen dalam Negeri (SKBDN)
Pada dasarnya produk dan layanan yang disediakan untuk eksportir dan importir, dapat juga digunakan untuk mendukung perdagangan dalam negeri. Yang membedakannya adalah acuan *best practice* yang digunakan, di mana transaksi ekspor/impor menggunakan standar internasional yang diatur dalam UCP DC (Uniform Custom Practice on Documentary Collection), sementara untuk transaksi dalam negeri mengikuti Peraturan Bank Indonesia. Oleh karena itu SKBDN lazim juga disebut sebagai L/C Lokal.

c. Bank Garansi
Bank Garansi adalah penerbitan pernyataan oleh Bank atas permintaan nasabah (pihak terjamin) untuk menjamin kewajiban nasabah karena ketidakmampuan nasabah untuk menjalankan kewajibannya dengan baik (wanprestasi) kepada pihak yang menerima jaminan berdasarkan suatu perjanjian yang telah dibuat antara nasabah dengan pihak yang menerima jaminan.

Bank Garansi yang dapat diterbitkan oleh Bank Muamalat Indonesia antara lain:

i. Bid Bond (Jaminan Penawaran)
ii. Performance Bond (Jaminan Pelaksanaan)
iii. Advance Payment Bond (Jaminan Uang Muka)
iv. Retention Bond (Jaminan Pemeliharaan)
v. Payment Bond (Jaminan Pembayaran)
vi. Custom Bond
vii. Shipping Guarantee
viii. Counter Guarantee

d. Klaim Bank Garansi
Adalah layanan yang diberikan oleh Bank atas permintaan *Beneficiary* untuk melakukan penagihan kepada Issuing Bank

the Issuing Bank is obliged to accept a draft stating that the Issuing Bank will pay the Beneficiary within a certain period of time in the future.

iii. Usance Payable at Sight (UPAS) L/C
L/C which requires the Issuing Bank to carry out payments to the Beneficiary as soon as the documents provided by the Beneficiary have fulfilled the conditions stated in the L/C. On the other hand the Applicant will make a payment to Issuing Bank for a certain period of time in the future.

iv. Usance Payable at Usance (UPAU) L/C
Usance L/C where Issuing Bank will make a payment to the Beneficiary for the Draft (bill) that has been received according to the Bank's acceptance to the Beneficiary. On the other hand, the Applicant will make a payment to Issuing Bank within a certain period of time that has been agreed upon.

b. Surat Berdokumen dalam Negeri (SKBDN)
Basically the products and services provided for exporters and importers can also be used to support domestic trade. What distinguishes it is the best practice reference used, where export/import transactions use international standards regulated in the UCP DC (Uniform Custom Practice on Documentary Collection), while for domestic transactions follow Bank Indonesia Regulations. Therefore SKBDN is also commonly referred to as Local L/C.

c. Bank Guarantee
Bank Guarantee is the issuance of a statement by the Bank at the request of the customer (guaranteed party) to guarantee the obligations of the customer because of the inability of the customer to carry out his obligations properly (default) to the party receiving a guarantee based on an agreement made between the customer and the party receiving the guarantee.

Bank Guarantees that can be issued by Bank Muamalat Indonesia include:

i. Bid Bond
ii. Performance Bond
iii. Advance Payment Bond
iv. Retention Bond
v. Payment Bond
vi. Custom Bond
vii. Shipping Guarantee
viii. Counter Guarantee

d. Bank Guarantee Claims
A service provided by the Bank at the request of the beneficiary to collect from Issuing Bank when the applicant

ketika *Applicant* tidak dapat menjalankan kewajibannya dengan baik (wanprestasi) kepada pihak *Beneficiary*.

e. Standby L/C

Standby L/C adalah merupakan suatu bentuk penjaminan dari Bank Penerbit Standby L/C kepada *Beneficiary* terhadap kemungkinan terjadinya wanprestasi/default atas diri *Applicant* (pihak yang dijamin/pemohon Standby L/C).

f. Deposito Plus

Adalah program pemasaran deposito yang dikombinasikan dengan SKBDN. Melalui program ini, nasabah yang menempatkan deposito di Bank, akan dimungkinkan untuk memiliki kendaraan secara langsung.

g. LC Murabahah

LC Murabahah adalah fasilitas pembiayaan modal kerja yang diberikan kepada debitur importir untuk pembayaran atau pelunasan L/C atau SKBDN baik *Sight* (atas unjuk) maupun *Usance* (berjangka) yang diterbitkan melalui Bank Muamalat Indonesia.

h. Buyer Financing

Adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan oleh Bank dalam rangka menjaga kemampuan Nasabah dalam pembelian bahan baku/barang dagangan secara tepat waktu kepada supplier/ penjual sehingga kredibilitas nasabah di mata supplier/penjual terjaga.

i. AR Financing

Adalah suatu produk pembiayaan jangka pendek dengan pemberian dana talangan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja berdasarkan piutang usaha perusahaan dari transaksi perdagangan atau penjualan barang dan jasa.

j. Value Chain Financing

Pembiayaan kepada Nasabah melalui skema pembiayaan vendor maupun distributor.

Layanan 24 Jam

1. ATM Muamalat

ATM Muamalat dilengkapi dengan berbagai fitur untuk memudahkan anda melakukan info saldo, cetak 5 (lima) transaksi terakhir, pembayaran tagihan, pembelian pulsa isi ulang, pembelian tiket, pembayaran premi asuransi, transfer antar bank, pembayaran uang sekolah dan pembayaran ZIS.

2. Muamalat Mobile / Digital Islamic Network (DIN)

Muamalat Mobile adalah aplikasi yang meliputi lokasi ATM/Cabang, Info Produk, Call Center 1 500 016, Bahasa, Kiblat, Jadwal Sholat dan Aplikasi Haji dan Umroh. Mobile Banking Muamalat (DIN) menawarkan kemudahan dalam bertransaksi secara *real time*, aman dan praktis menggunakan perangkat Smartphone Nasabah melalui koneksi Internet (Android, IOS, Blackberry, dan Windows Phone) dengan fitur yang bisa diakses adalah pemindahbukuan, transfer antar Bank, cek saldo, pembayaran Tagihan, pembelian serta IO Transaksi

cannot carry out his obligations properly (default) to the beneficiary.

e. Standby L/C

Standby L/C is a form of guarantee from the Standby Issuing Bank L/C to the Beneficiary of the possibility of default/ default on the applicant (guaranteed party/applicant for Standby L/C).

f. Deposit Plus

A deposit account marketing program combined with SKBDN. Through this program, customers who place deposits at the Bank, it will be possible to have a vehicle directly.

g. LC Murabahah

LC Murabahah is a working capital financing facility granted to importer debtors for the payment of L/C or SKBDN, both Sight and Usance (futures) issued through BMI.

h. Buyer Financing

A short-term financing provided by the Bank in order to maintain the ability of the Customer to purchase raw materials/merchandise in a timely manner to the supplier/ seller so that the customer's credibility in the eyes of the supplier/seller is maintained.

i. AR Financing

A short-term financing product by providing advanced funds to meet working capital requirements based on the company's business receivables from trade transactions or sales of goods and services.

j. Value Chain Financing

Financing to Customers through vendor and distributor financing schemes.

24-Hour Service

1. Muamalat ATM

Muamalat ATM has various features to make it easier for you to do checking balance, printing the last 5 transactions, bill payment, top up prepaid phone credit, insurance premium payments, interbank transfers, school fee payment and ZIS payments.

2. Muamalat Mobile / Digital Islamic Network (DIN)

Muamalat Mobile is an application that provides wide-range of services, including information regarding location of ATMs/Branches, Product Info, Call Center 1 500 016, Languages, Qibla, Prayer Schedules and Applications for Hajj and Umrah. Muamalat Mobile Banking (DIN) offers convenience in transacting in real time, safely and practically using a customer's Smartphone device via an Internet connection (Android, IOS, Blackberry, and Windows Phone) with accessible features such as transfers, bank transfers, balance checks,

terakhir dan Mutasi Rekening. Untuk dapat menggunakan layanan Mobile Banking, nasabah hanya perlu mengunduh aplikasi Mobile Banking Muamalat dari *application store dan play store* dengan kata kunci "Muamalat Mobile" dan melakukan registrasi dan aktivasi di ATM/ Cabang terdekat.

3. Internet Banking Muamalat
   Layanan ini bertujuan untuk memudahkan Nasabah Ritel (Individu) dalam melakukan transaksi finansial seperti pemindahbukuan, transfer antar bank, pembayaran tagihan dan pembelian pulsa serta transaksi non finansial seperti cek saldo, 5 transaksi terakhir dan cek mutasi. Melalui fitur transaksi Debit Online di Internet Banking Muamalat, Nasabah dapat berbelanja di mitra *merchant-merchant* Bank Muamalat Indonesia secara lebih mudah, praktis dan aman.
4. Cash Management System
   Layanan ini lebih berkonsentrasi pada nasabah korporat. Dalam layanan ini, Bank Muamalat Indonesia menyelenggarakan penerimaan/koleksi pemasukan dana *(collection),* pembayaran/ pengeluaran dana *(disbursement)* serta mengelola likuiditas perusahaan.
5. SalaMuamalat
   Merupakan layanan Phone Banking 24 jam melalui telepon 1500016/(021) 1500016 (jika dihubungi melalui telepon seluler) yang memberikan kemudahan kepada Nasabah setiap saat dan di manapun nasabah berada untuk memperoleh informasi mengenai produk, saldo dan informasi transaksi, transfer antar rekening Bank Muamalat Indonesia hingga maksimal Rp50.000.000 (lima puluh juta Rupiah) serta pembayaran ZIS (Zakat, Infaq, Shadaqah).

bill payments, purchase and the latest IO Transaction and Account Mutation. To be able to use the Mobile Banking service, customers only need to download the Muamalat Mobile Banking application from the application store and play store with the keyword "Muamalat Mobile" and register and activate at the nearest ATM/ Branch.

3. *Muamalat Internet Banking*
   This service aims to facilitate Retail Customers (Individuals) in conducting financial transactions such as book-entry, inter-bank transfers, bill payments and credit purchases as well as non-financial transactions such as check balances, the last 5 transactions and check mutations. Through the Debit Online transaction feature on Muamalat Internet Banking, Customers can shop at Bank Muamalat Indonesia merchant partners more easily, practically and safely.
4. *Cash Management System*
   This service concentrates more on corporate customers. In this service, Bank Muamalat Indonesia organizes receipts/collection of funds (collection), payment/disbursement and managing company liquidity.
5. *SalaMuamalat*
   It is a 24-hour Phone Banking service via telephone 1500016/ (021) 1500016 (if contacted via cellular telephone) that provides convenience to the Customer at any time and wherever the customer is located to obtain information about products, balance and transaction information, transfers between Bank Muamalat Indonesia accounts up to a maximum of Rp50,000,000 (fifty million Rupiah) and ZIS payments.

Jaringan Bisnis dan Wilayah Operasi

Pada akhir tahun 2019, Bank Muamalat Indonesia memiliki 276 kantor layanan termasuk 1 (satu) kantor cabang di Malaysia. Operasional Bank juga didukung oleh 95 Mobile Branch ditambah jaringan layanan yang luas berupa 710 unit ATM Muamalat, 120.000 jaringan ATM Bersama dan ATM Prima, serta jaringan ATM di Malaysia melalui Malaysia Electronic Payment (MEPS).

Business Network and Operation Areas

Up to the end of 2019, Bank Muamalat Indonesia has 276 service offices including 1 branch office in Malaysia. The Bank's operation is also supported by 95 Mobile Branches plus an extensive service network of 710 Muamalat ATM units, 120,000 ATM Bersama and ATM Prima networks, and ATM networks in Malaysia through Malaysia Electronic Payment (MEPS).

Jenis Kantor *Office Type*	2019	2018	2017	2016
Kantor Pusat *Head Office*	1	1	1	1
Kantor Cabang Utama *Main Branch Office*	83	83	83	83
Kantor Cabang Pembantu *Sub-Branch Office*	150	150	152	202
Kantor Kas *Cash Office*	43	43	43	778
Kantor Luar Negeri *Overseas Office*	1	1	1	1
Jumlah *Total*	276	276	278	363

Peta Jaringan Bisnis dan Wilayah Operasi

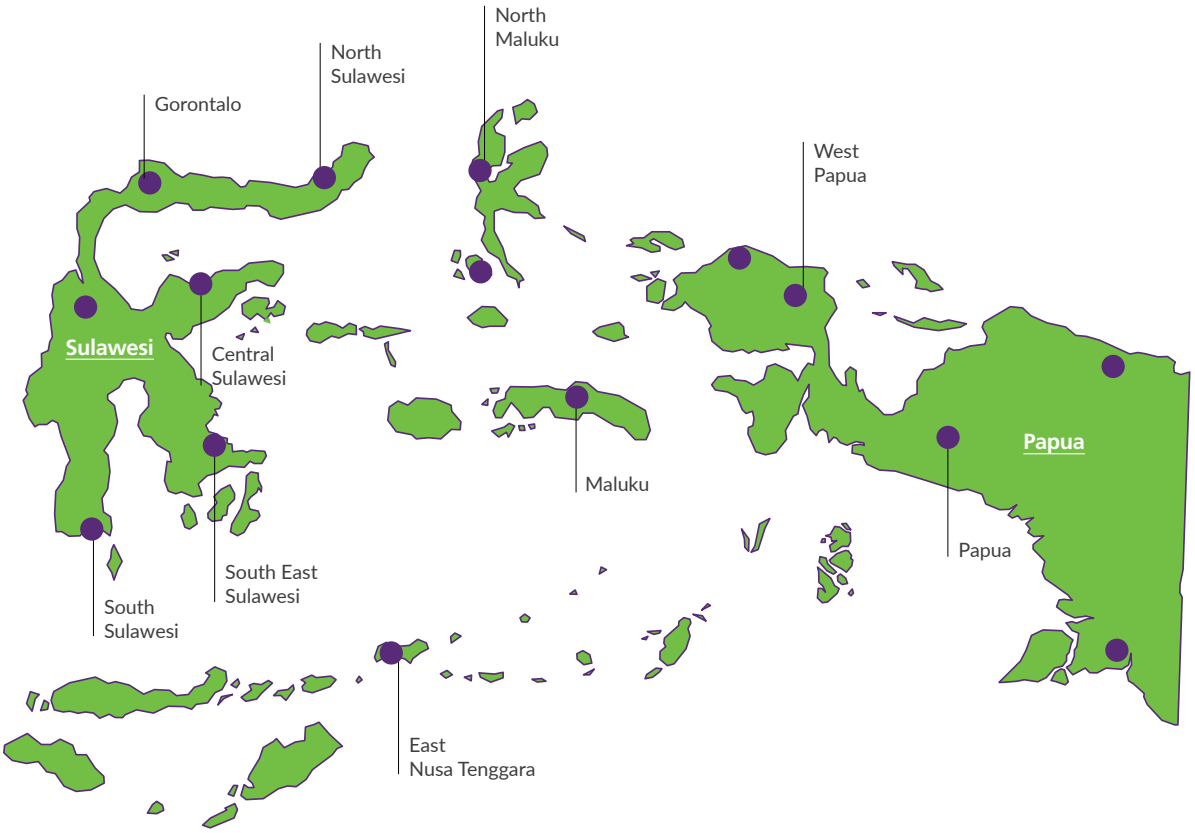
Map of Business Networks and Operating Areas



Dalam Negeri *Domestic*	Jaringan Operasi *Network Operation*
Sumatera	49
Banten	14
Jakarta	41
Jawa Barat	48
Jawa Tengah & DIY	34

Dalam Negeri *Domestic*	Jaringan Operasi *Network Operation*
Jawa Timur, Bali, & Nusa Tenggara	35
Kalimantan	18
Sulawesi	25
Papua & Maluku	11

Luar Negeri *Foreign*	Jaringan/ Jumlah Kantor Cabang *Network/ Number of Branch Offices*
Kuala Lumpur	1



Jenis Kantor *Office Type*	2019	2018	2017	2016
Kantor Pusat *Head Office*	1	1	1	1
Kantor Cabang *Branch Office*	83	83	83	83
Kantor Cabang Pembantu *Sub-Branch Office*	150	150	152	202
Kantor Kas *Cash Office*	43	43	43	78
Kantor Luar Negeri *Overseas Office*	1	1	1	1
Jumlah *Total*	276	276	278	363

Wilayah Operasional
Operational Area

Nama Kantor *Office Name*	Alamat *Address*	Kota/ Kabupaten *City/ District*	Propinsi *Province*	Telepon *Telephone*	Kategori *Category*
BINTARO JAYA	Ruko Emerald Avenue 2 Blok EB/B No. 16-18, Bintaro Jaya, Tangerang Selatan	Tangerang	Banten	(021) 22211090	CABANG UTAMA *MAIN BRANCH*
BUMI SERPONG DAMAI	Jl. Pahlawan Seribu Sektor IV Kav. D7 Blok RD No.73 Ruko Perkantoran BSD Serpong Tangerang 15310	Tangerang Selatan	Banten	(021) 5371036-37	CABANG UTAMA *MAIN BRANCH*
CABANG PEMBANTU MERDEKA	Jl. Merdeka Raya No. 101C Cimone Raya, Karawaci	Tangerang	Banten	(021) 5581052/ 5581067/ 5581015	CABANG PEMBANTU *SUB BRANCH OFFICE*
CABANG PEMBANTU PAMULANG	Jl. Raya Pamulang Blok SH 19/9 Tangerang Selatan 15417	Tangerang Selatan	Banten	(021) 7428865	CABANG PEMBANTU *SUB BRANCH OFFICE*
CABANG PEMBANTU VETERAN BINTARO	Jl. Veteran Raya No.17 KM-3 Jakarta Selatan	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	(021) 7352225/42	CABANG PEMBANTU *SUB BRANCH OFFICE*
KANTOR KAS KARAWACI	Jl. Borobudur Raya Blok M No. 28, Desa Bencongan, Kec. Curug, Tangerang	Tangerang	Banten	(021) 55652521-20	KANTOR KAS *CASH OFFICE*
KANTOR KAS CIKUPA	Jl. Boulevard Ruko Citra Raya Blok H-1 No. 17 R, Desa Cikupa, Kec. Cikupa, Tangerang	Tangerang	Banten	(021) 082817097484 /85/59405380	KANTOR KAS *CASH OFFICE*
KANTOR KAS AL-AZHAR	Jl. Puspitaloka III/2 BSD Serpong Tangerang Selatan	Tangerang Selatan	Banten	(021) 5381944	KANTOR KAS *CASH OFFICE*
CENGKARENG	Komp. Ruko Mutiara Taman palem Blok A3 No. 32-33, Jl. Kamal Raya Outer Ring Road Cengkareng Timur, Jakarta Barat 11730	Jakarta Barat	DKI Jakarta	(021) 54350004	CABANG UTAMA *MAIN BRANCH*
CABANG PEMBANTU DAAN MOGOT TGR	Jl. Daan Mogot No. 32 E, Kel. Sukarasa, Kec. Tangerang, Kota Tangerang	Tangerang	Banten	(021) 55732952	CABANG PEMBANTU *SUB BRANCH OFFICE*
CILEGON	Ruko Monalisa Jl. Raya Serang, Cilegon No.8 RT 001 RW 001 Kel/Kec Cibeber/Cilegon, Banten 42423	Cilegon	Banten	(0254) 397699/394295	CABANG UTAMA *MAIN BRANCH*
GAJAH MADA	Jl. Zainul Arifin No. 1 B-C, Kel. Petojo Utara, Kec. Gambir, Jakarta Pusat	Jakarta Pusat	DKI Jakarta	(021) 6336363	CABANG UTAMA *MAIN BRANCH*
KEDOYA	Jl. Kedoya Raya No. 2 RT/RW 002/007, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat	Jakarta Barat	DKI Jakarta	(021) 5655155, 29335836-37	CABANG UTAMA *MAIN BRANCH*
MANGGA DUA	Ruko Mall Mangga Dua No. 5, Jl. Arteri Mangga Dua, Jakarta 10730	Jakarta Pusat	DKI Jakarta	(021) 62201187	CABANG UTAMA *MAIN BRANCH*
CABANG PEMBANTU TJ. PRIOK	Komp. Pertokoan Enggano Megah, Jl. Enggano No. 11 W, Tanjung Priok, Jakarta Utara 14310	Jakarta Utara	DKI Jakarta	(021) 43909042	CABANG PEMBANTU *SUB BRANCH OFFICE*

Nama Kantor *Office Name*	Alamat *Address*	Kota/ Kabupaten *City/ District*	Propinsi *Province*	Telepon *Telephone*	Kategori *Category*
PLUIT	Komp. Mega Mall Pluit, Jl. Pluit Indah Raya, No. 81-82, Jakarta Utara	Jakarta Utara	DKI Jakarta	(021) 66670001	CABANG UTAMA *MAIN BRANCH*
PURI INDAH	Sentra Niaga Puri Indah Blok T3, No. 12A-14	Jakarta Barat	DKI Jakarta	(021) 5817259	CABANG UTAMA *MAIN BRANCH*
ROXY	Ruko Roxy Mas Blok B1 No. 7 Jl. KH. Hasyim Ashari, Jakarta Barat 10150	Jakarta Pusat	DKI Jakarta	(021) 6325614	CABANG UTAMA *MAIN BRANCH*
CABANG PEMBANTU SLIPI	Jl. KS Tubun No. 146, Petambuaran, Tanah Abang, Jakarta Pusat	Jakarta Pusat	DKI Jakarta	(021) 5326744-45	CABANG PEMBANTU *SUB BRANCH OFFICE*
CABANG PEMBANTU TANAH ABANG	Pasar Regional Tanah Abang Blok A Loss F No. 68 Lantai B2 Jl. Fachrudin Tanah Abang, Kampung Bali, Jakarta Pusat 10250	Jakarta Pusat	DKI Jakarta	(021) 23572380/ 23570004	CABANG PEMBANTU *SUB BRANCH OFFICE*
SERANG	Jl. Ahmad Yani No. 91 Kel. Sumur Pecung Kec. Serang Kota Serang, Banten	Serang	Banten	(0254) 229180	CABANG UTAMA *MAIN BRANCH*
CABANG PEMBANTU BALARAJA	Jl. Raya Serang Jakarta KM 22, Kec. Cikupa, Kab. Tangerang, Banten	Tangerang	Banten	082818932088	CABANG PEMBANTU *SUB BRANCH OFFICE*
TANGERANG CITY	Tangerang City Business Park Blok F No. 56, Jl. Jend Sudirman No. 1 Kota Tangerang	Tangerang	Banten	(021) 55782368/55782528	CABANG UTAMA *MAIN BRANCH*
ARTHALOKA	Gedung Arthaloka Jl. Jend. Sudirman Kav.2, Kel. Karet Tengsin, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat	Jakarta Pusat	DKI Jakarta	(021) 2511414	CABANG UTAMA *MAIN BRANCH*
BOGOR	Jl. Pajajaran No. 165 RT 03 RW 05 Kel. Bantarjati, Kec. Bogor Utara	Bogor	Jawa Barat	(0251) 8320111	CABANG UTAMA *MAIN BRANCH*
CABANG PEMBANTU IPB DARMAGA	Jl. Raya Dramaga RT 02 RW 01 Kel. Babakan, Kec. Dramaga	Kab. Bogor	Jawa Barat	(0251) 8622856	CABANG PEMBANTU *SUB BRANCH OFFICE*
CABANG PEMBANTU CIBINONG	Cibinong City Center Blok A/22, Jl Tegar Beriman No. 01 RT 05 RW 12, Pakansari, Cibinong, Bogor	Kab. Bogor	Jawa Barat	(021) 29231065	CABANG PEMBANTU *SUB BRANCH OFFICE*
KANTOR KAS CILEUNGSI	Jl. Raya Narogong Cileungsi KM 22,5 RT 01 RW 05 Kp. Cibeureum Desa Cileungsi Kidul, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor	Kab. Bogor	Jawa Barat	(021) 82480928	KANTOR KAS *CASH OFFICE*
CILEDUG	Ruko CBD Ciledug Blok D.2 No. 19-20 Karang Tengah, Tangerang 15157	Tangerang	Banten	(021) 7310230	CABANG UTAMA *MAIN BRANCH*
CIPULIR	Jl. Ciledug No. 23 dan 23 A Jakarta Selatan	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	(021) 7228242	CABANG UTAMA *MAIN BRANCH*
KANTOR KAS DARUNNAJAH	Komp. Pesantren Darunnajah, Jl. Ululjami Raya, RT.001 RW.004 No. 86, Pesanggrahan Jaksel 12230	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	(021) 7376085	KANTOR KAS *CASH OFFICE*

Nama Kantor *Office Name*	Alamat *Address*	Kota/ Kabupaten *City/ District*	Propinsi *Province*	Telepon *Telephone*	Kategori *Category*
DEPOK	Jl. Margonda Raya No. 187 RT. 002 RW. 015 Kel. Kemirimuka, Kec. Beji, Depok, Jawa Barat	Depok	Jawa Barat	(021) 77202588	CABANG UTAMA *MAIN BRANCH*
CABANG PEMBANTU CIKEAS	Rukan Transyogi No. 11 Jl. Transyogi Cibubur, Kel. Nagrak, Kec. Gn. Putri, Bogor 16967	Bogor	Jawa Barat	(021) 82481997	CABANG PEMBANTU *SUB BRANCH OFFICE*
CABANG PEMBANTU CIMANGGIS	Jl. Raya Bogor KM. 29, No. 9B RT 004 RW 001, Kel. Mekarsari Kec. Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat	Depok	Jawa Barat	(021) 87713174	CABANG PEMBANTU *SUB BRANCH OFFICE*
CABANG PEMBANTU UNIVERSITAS INDONESIA	Gedung B Pasca Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Depok Jawa Barat	Depok	Jawa Barat	(021) 78849177	CABANG PEMBANTU *SUB BRANCH OFFICE*
KANTOR KAS KRANGGAN	Jl. Transyogi Cibubur Komp. Ruko Kranggan Permai, Blok XVI No.11 RT. 002 RW. 016, Kel. Jatisampurna, Kec. Jatisampurna, Bekasi, Jawa Barat	Bekasi	Jawa Barat	(021) 8444694	KANTOR KAS *CASH OFFICE*
FATMAWATI	Jl. RS. Fatmawati No. 15 B-D Jaksel 12420	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	(021) 7662479-82	CABANG UTAMA *MAIN BRANCH*
CABANG PEMBANTU CINERE	Jl. Cinere Raya Blok A No. 37, Depok, Jawa Barat	Depok	Jawa Barat	(021) 7532201/7532195-96	CABANG PEMBANTU *SUB BRANCH OFFICE*
CABANG PEMBANTU UIN	Komp. Masjid Fatahillah UIN Syarif Hidayatullah Jl. Ir. H. Juanda, Ciputat, Tangerang	Tangerang Selatan	Banten	(021) 7442464-65	CABANG PEMBANTU *SUB BRANCH OFFICE*
KANTOR KAS PB SUDIRMAN	Komplek YYS Pendidikan PB Soedirman, Jl. Pendidikan I Cijantung, Pasar Rebo, Jaktim	Jakarta Timur	DKI Jakarta	(021) 8413728	KANTOR KAS *CASH OFFICE*
MUAMALAT TOWER	Muamalat Tower, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Jakarta	Jakarta	DKI Jakarta	(021) 80666000	CABANG UTAMA *MAIN BRANCH*
PANCORAN	Wisma Haroen, Jl. Raya Pasar Minggu No. 2 B-C, Pancoran, Jakarta Selatan	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	(021) 7973654	CABANG UTAMA *MAIN BRANCH*
CABANG PEMBANTU CONDET	Ruko Mutiara Faza Jl. Raya Condet, Kel. Gedong Kec. Pasar Rebo, Jakarta Timur	Jakarta Timur	DKI Jakarta	(021) 87798827	CABANG PEMBANTU *SUB BRANCH OFFICE*
CABANG PEMBANTU PASAR MINGGU	Jl. Raya Ragunan No. 26, Kel. Pasar Minggu, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	(021) 78848710	CABANG PEMBANTU *SUB BRANCH OFFICE*
KANTOR KAS CAWANG	Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kramat Jati Jl. Dewi Sartika No. 136 Jakarta 13630	Jakarta Timur	DKI Jakarta	(021) 80871489	KANTOR KAS *CASH OFFICE*
KANTOR KAS TEBET	Jl. Tebet Baru Dalam No. 57, Tebet, Jakarta Selatan	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	(021) 8353571	KANTOR KAS *CASH OFFICE*
MELAWAI	Jl. Melawai Raya No. 72, Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	(021) 7200489	CABANG UTAMA *MAIN BRANCH*
KANTOR KAS MAYESTIK	Jl. Kyai Maja No. 51B, Kramat Pela, Kebayoran Baru 12130	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	(021) 72798707	KANTOR KAS *CASH OFFICE*

Nama Kantor *Office Name*	Alamat *Address*	Kota/ Kabupaten *City/ District*	Propinsi *Province*	Telepon *Telephone*	Kategori *Category*
KANTOR KAS AL AZHAR	YPI Al Azhar Jl. Sisingamangaraja, Kebayoran Baru	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	(021) 7253404	KANTOR KAS *CASH OFFICE*
PONDOK INDAH	Ruko Plaza 1 Jalan, Metro Pondok Indah, Sektor II Blok UA Kav. 19, Jakarta Selatan	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	(021) 7501708	CABANG UTAMA *MAIN BRANCH*
WOLTER MONGINSIDI	Jl. Wolter Monginsidi No. 123 D-E RT/RW 001/02, Kel. Rawa Barat, Kec. Keb. Baru, Jakarta Selatan 12180	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	(021) 7226767/7226868/ 7227272	CABANG UTAMA *MAIN BRANCH*
CABANG PEMBANTU KEMANG	Jl. Kemang Raya No. 72C, Kel. Bangka, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	(021) 7195670	CABANG PEMBANTU *SUB BRANCH OFFICE*
BUARAN KLENDER	Ruko Buaran Indah, Blok C No. 9-11, Jl. Raden Inten, Buaran, Klender, Jakarta Timur 13470	Jakarta Timur	DKI Jakarta	(021) 86609797	CABANG UTAMA *MAIN BRANCH*
CABANG PEMBANTU DUREN SAWIT	Jl. Pahlawan Revolusi Blok GG No. 2, Kel. Pondok Bambu, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur	Jakarta Timur	DKI Jakarta	(021) 8605906	CABANG PEMBANTU *SUB BRANCH OFFICE*
KALIMALANG	Ruko Duta Permai Plaza Blok B II No. 20-22 Jl. KH. Noer Ali (d/h Jl. Raya Kalimalang Jakasampurna - Bekasi Barat)	Bekasi	Jawa Barat	(021) 8840867	CABANG UTAMA *MAIN BRANCH*
CABANG PEMBANTU UJUNG MENTENG	Ruko Inkopau Blok A No. 23, Jl Raya Bekasi KM. 25, Ujung Menteng, Cakung, Jakarta Timur 13960	Jakarta Timur	DKI Jakarta	(021) 46827868	CABANG PEMBANTU *SUB BRANCH OFFICE*
CABANG PEMBANTU PONDOK GEDE	Jl. Raya Pondok Gede No. 50B, Kav. No. 9, Kel. Jatirahayu, Kec. Melati, Bekasi	Bekasi	Jawa Barat	(021) 84938042	CABANG PEMBANTU *SUB BRANCH OFFICE*
CABANG PEMBANTU JATIASIH	Komp. Ruko CBS No. 5 Jl. Raya Jatiasih RT 002/04, Jatirasa, Jatiasih, Bekasi	Bekasi	Jawa Barat	(021) 82401324	CABANG PEMBANTU *SUB BRANCH OFFICE*
CABANG PEMBANTU JUANDA	Jl. Ir. H. Juanda No. 60 Margajaya, Bekasi 17141	Bekasi	Jawa Barat	(021) 8850966	CABANG PEMBANTU *SUB BRANCH OFFICE*
CABANG PEMBANTU PONDOK KOPI	Jalan Nusa Indah Raya Blok 40 No. 15 Perumnas Klender Jakarta Timur	Bekasi	Jawa Barat	(021) 86610490	CABANG PEMBANTU *SUB BRANCH OFFICE*
CABANG PEMBANTU BINTARA	Jl. Bintara Raya Komplek Ruko Bintara Bisnis Center No. 8, Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat	Jakarta Timur	DKI Jakarta	(021) 86906904	CABANG PEMBANTU *SUB BRANCH OFFICE*
KANTOR KAS KEMANG PRATAMA	Komplek YPI Al Azhar Kemang Pratama, Bojong, Rawalumbu, Bekasi 17116	Bekasi	Jawa Barat	(021) 82400251	KANTOR KAS *CASH OFFICE*
KANTOR KAS ASRAMA HAJI PONDOK GEDE	Jl. Raya pondok Gede Kel. Pinang Ranti, Kec. Makasar, Jaktim 13560	Jakarta Timur	DKI Jakarta	(021) 8011233	KANTOR KAS *CASH OFFICE*
KALIMAS BEKASI	Jl. Chairil Anwar Ruko Kalimas Blok C. 29-30 Margahayu, Bekasi Timur	Bekasi	Jawa Barat	(021) 8826566	CABANG UTAMA *MAIN BRANCH*

Nama Kantor *Office Name*	Alamat *Address*	Kota/ Kabupaten *City/ District*	Propinsi *Province*	Telepon *Telephone*	Kategori *Category*
KANTOR KAS CIKARANG	Ruko Sentra Cikarang Blok A No. A7 Desa Sukaresmi, Cikarang Selatan, Kab. Bekasi 17530	Bekasi	Jawa Barat	(021) 89900638	KANTOR KAS *CASH OFFICE*
KARAWANG	Jl. Tuparev No. 297, Karawang Barat, Kab. Karawang, Jawa Barat	Karawang	Jawa Barat	(0267) 8452333	CABANG UTAMA *MAIN BRANCH*
KELAPA GADING	Jl. Boulevard Raya Kelapa Gading Blok LA/6 No. 34,35 Jakarta 14240	Jakarta Utara	DKI Jakarta	(021) 45856969	CABANG UTAMA *MAIN BRANCH*
KEMAYORAN	MGK Office Tower B, Jl. Angkasa Kav. B/6 Kota Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat	Jakarta Pusat	DKI Jakarta	(021) 65867770	CABANG UTAMA *MAIN BRANCH*
MATRAMAN	Jl. Matraman Raya No. 148 Ruko Mitra Matraman Blok A1 No. 1-2 Matraman, Jakarta Timur 13150	Jakarta Timur	DKI Jakarta	(021) 85913534/85913552	CABANG UTAMA *MAIN BRANCH*
KANTOR KAS AR RAHMAN	Komp. Masjid AR Rahman Jl. DR. Saharjo No. 100 Menteng Atas, Jakarta Selatan 12960	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	(021) 8282730	KANTOR KAS *CASH OFFICE*
KANTOR KAS KEMENKEU	Gd. Auditorium Dhanapala Jl. Wahidin Raya No. 1, Komplek Kementrian Keuangan, Jakarta Pusat	Jakarta Pusat	DKI Jakarta	(021) 42883774/42885956	KANTOR KAS *CASH OFFICE*
RAWAMANGUN	Jl. Paus No. 83 B-C Kel. Jati, Kec. Pulo Gadung, Jakarta Timur 13220	Jakarta Timur	DKI Jakarta	(021) 47864444	CABANG UTAMA *MAIN BRANCH*
CABANG PEMBANTU RAWAMANGUN	Jl. Sunan Giri No. 1 Rawamangun, Jaktim 13220	Jakarta Timur	DKI Jakarta	(021) 4706725	CABANG PEMBANTU *SUB BRANCH OFFICE*
KANTOR KAS AL FURQON	Jl. Kramat Raya No. 45 Kel. Kramat, Kec. Senen, Jakarta Pusat 10450	Jakarta Pusat	DKI Jakarta	(021) 3157577	KANTOR KAS *CASH OFFICE*
DENPASAR	Jl. Teuku Umar No. 82 Denpasar, Bali	Denpasar	Bali	(0361) 255474	CABANG UTAMA *MAIN BRANCH*
CABANG PEMBANTU NEGARA	Jl. Gatot Subroto No. 11, Negara, Jembrana, Bali	Jembrana	Bali	(0365) 43324	CABANG PEMBANTU *SUB BRANCH OFFICE*
CABANG PEMBANTU DIPONEGORO	Jl. Raya Kuta No. 66F, Badung, Bali	Badung	Bali	(0361) 4727471	CABANG PEMBANTU *SUB BRANCH OFFICE*
JEMBER	Jl. PB. Sudirman No. 35 Jember	Jember	Jawa Timur	(0331) 410433	CABANG UTAMA *MAIN BRANCH*
CABANG PEMBANTU GENTENG	Jl. Diponegoro No. 19 Genteng Banyuwangi	Banyuwangi	Jawa Timur	(0333) 846997	CABANG PEMBANTU *SUB BRANCH OFFICE*
CABANG PEMBANTU SITUBONDO	Jl. A. Yani No. 197 A Situbondo	Situbondo	Jawa Timur	(0338) 670766	CABANG PEMBANTU *SUB BRANCH OFFICE*
CABANG PEMBANTU BANYUWANGI	Jl. Adi Sucipto No. 40 A, Banyuwangi	Banyuwangi	Jawa Timur	(0333) 412136	CABANG PEMBANTU *SUB BRANCH OFFICE*
KANTOR KAS BONDOWOSO	JL. AHMAD YANI NO. 82 BONDOWOSO	Bondowoso	Jawa Timur	(0332) 431450	KANTOR KAS *CASH OFFICE*
KEDIRI	Jl. Hasanuddin No. 26 Kel. Dandangan Kediri 64122	Kediri	Jawa Timur	(0354) 671801-04	CABANG UTAMA *MAIN BRANCH*
CABANG PEMBANTU MADIUN	Jl. Kol Marhadi No. 20 Madiun	Madiun	Jawa Timur	(0351) 493400	CABANG PEMBANTU *SUB BRANCH OFFICE*

Nama Kantor *Office Name*	Alamat *Address*	Kota/ Kabupaten *City/ District*	Propinsi *Province*	Telepon *Telephone*	Kategori *Category*
CABANG PEMBANTU PONOROGO	Jl. Soekarno Hatta Kav. 35 dan 37 Ponorogo	Ponorogo	Jawa Timur	(0352) 488400	CABANG PEMBANTU *SUB BRANCH OFFICE*
CABANG PEMBANTU NGANJUK	Jl. Gatot Subroto No. 52 Nganjuk	Nganjuk	Jawa Timur	(0358) 331900	CABANG PEMBANTU *SUB BRANCH OFFICE*
CABANG PEMBANTU BLITAR	Komplek Ruko Merdeka Timur Center Blok A-3 Kel. Kepanjen Lor, Kec. Kepanjen, Kidul, Blitar	Blitar	Jawa Timur	(0342) 807867	CABANG PEMBANTU *SUB BRANCH OFFICE*
CABANG PEMBANTU TULUNG AGUNG	Jl. Supriyadi No. 43 Tulungagung	Tulungagung	Jawa Timur	(0355) 328500	CABANG PEMBANTU *SUB BRANCH OFFICE*
KH. MAS MANSYUR	Jl. KH. Mas Mansyur 171, Surabaya	Surabaya	Jawa Timur	(0313) 545250	CABANG UTAMA *MAIN BRANCH*
CABANG PEMBANTU LAMONGAN	Jl. Lamonganrejo No. 115, Lamongan	Lamongan	Jawa Timur	(0322) 316201/321086	CABANG PEMBANTU *SUB BRANCH OFFICE*
CABANG PEMBANTU SUMENEP	Komplek Ruko Raden Arya Wiraraja Kav. Blok A, Jl. Trunojoyo No. 214, Sumenep, Madura.	Sumenep	Jawa Timur	(0315) 950192/3	CABANG PEMBANTU *SUB BRANCH OFFICE*
KANTOR KAS SEPANJANG	Jalan Raya Ngelom 83 Taman Sepanjang, Sidoarjo	Sidoarjo	Jawa Timur	(0317) 880311	KANTOR KAS *CASH OFFICE*
KUPANG	Jl. Jend. Sudirman No. 88 E-F, Kupang	Kupang	Nusa Tenggara Timur (NTT)	(0380) 829554/556	CABANG UTAMA *MAIN BRANCH*
MALANG	Jl. Kertanegara No. 2, Malang	Malang	Jawa Timur	(0341) 556020	CABANG UTAMA *MAIN BRANCH*
CABANG PEMBANTU PASURUAN	Jl. Panglima Sudirman No. 34 F, Pasuruan	Pasuruan	Jawa Timur	(0343) 416262	CABANG PEMBANTU *SUB BRANCH OFFICE*
CABANG PEMBANTU PROBOLINGGO	Jl. Sukarno Hatta No. 275 Kav. 4, Kel. Tisnonegaraan, Probolinggo, Jawa Timur	Probolinggo	Jawa Timur	(0335) 430016	CABANG PEMBANTU *SUB BRANCH OFFICE*
CABANG PEMBANTU KEPANJEN	Jl. Raya Sumedang No. 108 Kepanjen, Malang	Malang	Jawa Timur	(0341) 393800	CABANG PEMBANTU *SUB BRANCH OFFICE*
CABANG PEMBANTU BATU	Jl. KH. Agussalim Ruko Sukar Makmur Kav. I No. 100, Batu, Malang	Batu	Jawa Timur	(0341) 592544	CABANG PEMBANTU *SUB BRANCH OFFICE*
MATARAM	Jl. Pejanggik No. 27 Cakranegara-Mataram	Mataram	Nusa Tenggara Barat (NTB)	(0370) 646060	CABANG UTAMA *MAIN BRANCH*
CABANG PEMBANTU TALIWANG-KSB	Jl. Ahmad Yani No. 37 Taliwang 84355	Taliwang	Nusa Tenggara Barat (NTB)	(0370) 626856	CABANG PEMBANTU *SUB BRANCH OFFICE*
KANTOR KAS MASBAGIK	Komplek Masjid Jami' Al-Akbar, Masbagik 83661	Lombok Timur	Nusa Tenggara Barat (NTB)	(0376) 631898	KANTOR KAS *CASH OFFICE*
SURABAYA	Jl. Raya Darmo 81 Surabaya	Surabaya	Jawa Timur	(0315) 611230	CABANG UTAMA *MAIN BRANCH*
CABANG PEMBANTU JOMBANG	Jl. Merdeka No.18A, Kelurahan Candimulyo, Kec. Jombang, Kab. Jombang	Jombang	Jawa Timur	(0321) 870021	CABANG PEMBANTU *SUB BRANCH OFFICE*
CABANG PEMBANTU MOJOKERTO	Jl. Gajah Mada No. 98 D, Mojokerto	Mojokerto	Jawa Timur	(0321) 381638	CABANG PEMBANTU *SUB BRANCH OFFICE*
CABANG PEMBANTU KERTAJAYA	Jl. Kertajaya No. 139 Kel. Airlangga, Kec. Gubeng, Kota Surabaya	Surabaya	Jawa Timur	(031) 5016464	CABANG PEMBANTU *SUB BRANCH OFFICE*
CABANG PEMBANTU RUNGKUT	Jl. Rungkut Kidul Industri No. 49A, Surabaya	Surabaya	Jawa Timur	(031) 8419030	CABANG PEMBANTU *SUB BRANCH OFFICE*
KANTOR KAS GRESIK	Jl. Dr. Soetomo No. 86, Gresik	Gresik	Jawa Timur	(031) 3988233	KANTOR KAS *CASH OFFICE*

Nama Kantor *Office Name*	Alamat *Address*	Kota/ Kabupaten *City/ District*	Propinsi *Province*	Telepon *Telephone*	Kategori *Category*
KANTOR KAS SIDOARJO	Jl. KH. Mukmin No. 11 B6, Sidoarjo	Sidoarjo	Jawa Timur	(031) 8958570	KANTOR KAS *CASH OFFICE*
SURABAYA SUNGKONO	Jl. Mayjend Sungkono No. 107, Kel. Dukuh Pakis, Kec. Dukuh Pakis, Surabaya 60224	Surabaya	Jawa Timur	(0315) 666983	CABANG UTAMA *MAIN BRANCH*
BANDUNG	Jl. Buah Batu No. 276 A Bandung 40265, Kel. Cijagra, Kec. Lengkong	Bandung	Jawa Barat	(022) 7305919/7309229	CABANG UTAMA *MAIN BRANCH*
CABANG PEMBANTU SALMAN	Jl. Gelap Nyawang No. 4 Bandung 40132, Kel. Lebak Siliwangi, Kec. Coblong	Bandung	Jawa Barat	(022) 2530521	CABANG PEMBANTU *SUB BRANCH OFFICE*
CABANG PEMBANTU PASIRKALIKI	Jl. Pasirkaliki 205B (lama 153A), Kel. Pasirkaliki, Kec. Cicendo, Kota Bandung	Bandung	Jawa Barat	(022) 2035859	CABANG PEMBANTU *SUB BRANCH OFFICE*
CABANG PEMBANTU GARUT	Jl. Ciledug No. 247 Garut, Kel. Kota Kulon, Kec. Garut Kota	Garut	Jawa Barat	(0262) 243399	CABANG PEMBANTU *SUB BRANCH OFFICE*
CABANG PEMBANTU CIMAHI	Jl. Amir Machmud No. 315 Ds. Cigugur Tengah, Kec. Cimahi, Kota Cimahi	Cimahi	Jawa Barat	(022) 6643920	CABANG PEMBANTU *SUB BRANCH OFFICE*
CABANG PEMBANTU PURWAKARTA	Jl. RE Martadinata No. 39, Kel. Nagritengah, Kec. Purwakarta, Kota Purwakarta	Purwakarta	Jawa Barat	(0264) 8222999	CABANG PEMBANTU *SUB BRANCH OFFICE*
CABANG PEMBANTU UJUNG BERUNG	Ruko Tritan Point Blok B5-15 Jl. AH Nasution, Kel. Cipadung Wetan, Kec. Panyileukan	Bandung	Jawa Barat	(022) 63721824 - 7832086	CABANG PEMBANTU *SUB BRANCH OFFICE*
CABANG PEMBANTU CICADAS	Jl. Ahmad Yani No. 778 Kel. Cicaheum, Kec. Kiaracondong	Bandung	Jawa Barat	(022) 7277839	CABANG PEMBANTU *SUB BRANCH OFFICE*
CABANG PEMBANTU SUBANG	Jl. Otista No. 94 Subang, Kel. Karang Anyar, Kec. Subang	Subang	Jawa Barat	(0260) 421666	CABANG PEMBANTU *SUB BRANCH OFFICE*
CABANG PEMBANTU VETERAN	Jl. Veteran No. 46B, Kel. Kebon Pisang, Kec. Sumur, Kab Bandung	Bandung	Jawa Barat	(022) 4214261	CABANG PEMBANTU *SUB BRANCH OFFICE*
CABANG PEMBANTU PADALARANG	Jl. Raya Cimareme No. 340 B, Ds. Cimareme, Kec. Ngamprah, Kab. Bandung Barat	Bandung	Jawa Barat	(022) 6867783	CABANG PEMBANTU *SUB BRANCH OFFICE*
CABANG PEMBANTU SOREANG	Soreang Square No.1 Jl. Raya Soreang, Ds. Cingcin, Kec. Soreang, Kab. Bandung	Bandung	Jawa Barat	(022) 5896172	CABANG PEMBANTU *SUB BRANCH OFFICE*
KANTOR KAS KOPO	Jl. Kompleks Pertokoan Kopo Mas Regency N-9 RT. 01 RW. 02, Kel. Margasuka, Kec. Babakan Ciparay, Kodya Bandung	Bandung	Jawa Barat	(022) 5430297	KANTOR KAS *CASH OFFICE*
KANTOR KAS ISTIQOMAH	Jl. Citarum No. 1 Kel. Citarum, Kec. Bandung Wetan, Kodya Bandung 40115	Bandung	Jawa Barat	(022) 4234156	KANTOR KAS *CASH OFFICE*
KANTOR KAS DARUT TAUHID	Jl. Geger Kalong Girang Baru No. 04, Kel. Isola, Kec. Sukasari, Kodya Bandung 40153	Bandung	Jawa Barat	(022) 2007952	KANTOR KAS *CASH OFFICE*

Nama Kantor *Office Name*	Alamat *Address*	Kota/ Kabupaten *City/ District*	Propinsi *Province*	Telepon *Telephone*	Kategori *Category*
CIANJUR	Jl. Ir. H. Djuanda No. 88, Kp. Salakopi RT.03 RW. 18, Kel. Bojongherang, Kec. Cianjur, Kab Cianjur	Cianjur	Jawa Barat	(0263) 280950	CABANG UTAMA *MAIN BRANCH*
CABANG PEMBANTU CIPANAS	Jl. Raya Cipanas (Depan Pasar Cipanas) No. 134 E, Kec. Cipanas, Kab. Cianjur	Cianjur	Jawa Barat	(0263) 520268	CABANG PEMBANTU *SUB BRANCH OFFICE*
CIREBON	Jl. Siliwangi No. 60 Cirebon 45121	Cirebon	Jawa Barat	(0231) 200828	CABANG UTAMA *MAIN BRANCH*
CABANG PEMBANTU KUNINGAN	Jl. Siliwangi No. 124 Kuningan 45511	Kuningan	Jawa Barat	(0232) 879664	CABANG PEMBANTU *SUB BRANCH OFFICE*
CABANG PEMBANTU PLERED	Jl. Ir. H. Juanda (Jalan Cirebon-Bandung) No. 51 RT. 01 RW. 04 Kel. Weru Kidul, Kec. Weru, Kab. Cirebon	Cirebon	Jawa Barat	(0231) 325541	CABANG PEMBANTU *SUB BRANCH OFFICE*
CABANG PEMBANTU INDRAMAYU	Jl. Jend. Sudirman No. 170 RT. 003 RW. 007, Kel. Karanganyar, Kec. Indramayu, Kab. Indramayu	Indramayu	Jawa Barat	(0234) 5278815	CABANG PEMBANTU *SUB BRANCH OFFICE*
CABANG PEMBANTU MAJALENGKA	Jl. KH. Abdul Halim No. 81 RT/RW 03/11 Kab. Majalengka	Majalengka	Jawa Barat	(0233) 8286427	CABANG PEMBANTU *SUB BRANCH OFFICE*
CABANG PEMBANTU ARJAWINANGUN	Jl. Palimanan - Jakarta KM 02 Ds. Junjang RT/ RW 05/03 Kab. Cirebon	Cirebon	Jawa Barat	(0231) 357007	CABANG PEMBANTU *SUB BRANCH OFFICE*
CABANG PEMBANTU SUMBER	Jl. Dewi Sartika No. 10 A, Kel. Tukmudal, Kec. Sumber, Kab. Cirebon	Cirebon	Jawa Barat	(0231) 322775	CABANG PEMBANTU *SUB BRANCH OFFICE*
SUKABUMI	Jl. Jend. Sudirman No. 77 Kota Sukabumi	Sukabumi	Jawa Barat	(0266) 245888	CABANG UTAMA *MAIN BRANCH*
CABANG PEMBANTU CIBADAK	Jl. Siliwangi No. 132 RT 01/RW 17, Kel. Cibadak, Kab. Sukabumi	Sukabumi	Jawa Barat	(0266) 536257	CABANG PEMBANTU *SUB BRANCH OFFICE*
TASIKMALAYA	Jl. HZ. Mustofa No. 294 Kota Tasikmalaya	Tasikmalaya	Jawa Barat	(0265) 326900	CABANG UTAMA *MAIN BRANCH*
CABANG PEMBANTU SINGAPARNA	Jl. Raya Timur Singaparna No. 148, Kec. Singaparna, Kab. Tasikmalaya	Tasikmalaya	Jawa Barat	(0265) 546750	CABANG PEMBANTU *SUB BRANCH OFFICE*
KANTOR KAS CIAMIS	Jl. Mr. Iwakusumasumantri Ruko No. 9, Kab. Ciamis 46211	Ciamis	Jawa Barat	(0265) 777998	KANTOR KAS *CASH OFFICE*
KUDUS	Jl. Ahmad Yani No. IV/4 Kabupaten Kudus. Panjunan Kudus, Jawa Tengah	Kudus	Jawa Tengah	(0291) 4251545	CABANG UTAMA *MAIN BRANCH*
CABANG PEMBANTU PATI	Komplek Puri Plaza No. A-8, Jl. Koloner Sunandar, Pati 59111	Pati	Jawa Tengah	(0295) 387796	CABANG PEMBANTU *SUB BRANCH OFFICE*
PEKALONGAN	Jl. Hayam Wuruk No. 142 Pekalongan, RT. 001/RW. 011, Sampangan	Pekalongan	Jawa Tengah	(0285) 411222	CABANG UTAMA *MAIN BRANCH*
CABANG PEMBANTU PEMALANG	Jl. Jend. Sudirman Timur, No. 32 Pemalang	Pemalang	Jawa Tengah	(0284) 324767	CABANG PEMBANTU *SUB BRANCH OFFICE*
CABANG PEMBANTU BATANG	Jl. Pangeran Diponegoro Ruko Srikandi Blok.A No. 3 Batang	Batang	Jawa Tengah	(0285) 7907511	CABANG PEMBANTU *SUB BRANCH OFFICE*

Nama Kantor *Office Name*	Alamat *Address*	Kota/ Kabupaten *City/ District*	Propinsi *Province*	Telepon *Telephone*	Kategori *Category*
KANTOR KAS PEKAJANGAN	Jl. Raya Pekajangan No. 74 Pekajangan, Kab. Pekalongan	Pekalongan	Jawa Tengah	(0285) 785787	KANTOR KAS *CASH OFFICE*
PURWOKERTO	Komp. Ruko Satria Plaza Blok A5 Jl. Jend. Sudirman Purwokerto 53111	Banyumas	Jawa Tengah	(0281) 642345/642347/ 642350/626273	CABANG UTAMA *MAIN BRANCH*
CABANG PEMBANTU CILACAP	Jl. Gatot Soebroto No. 104 A - RT. 05 RW. 09 Kel. Sidanegara, Kec. Cilacap Tengah, Kab. Cilacap 53223	Cilacap	Jawa Tengah	(0282) 5253195-96-98	CABANG PEMBANTU *SUB BRANCH OFFICE*
CABANG PEMBANTU PURBALINGGA	Jl. Jend. Sudirman No. 189, Purbalingga, RT. 01 RW. 01, Kel. Bancar, Kec. Purbalingga, Kab. Purbalingga, Jawa Tengah	Purbalingga	Jawa Tengah	(0281) 895415	CABANG PEMBANTU *SUB BRANCH OFFICE*
KANTOR KAS KROYA	Jl. Jend.Sudirman No. 18, RT. 14 RW. 04 Kel. Kroya, Kec. Kroya, Kab. Cilacap	Cilacap	Jawa Tengah	(0282) 492532	KANTOR KAS *CASH OFFICE*
SEMARANG	Jl. Sugiyopranoto No. 102 Semarang 50246	Semarang	Jawa Tengah	(024) 3564134	CABANG UTAMA *MAIN BRANCH*
CABANG PEMBANTU MAGELANG	Jl. Tentara Pelajar No. 54 Ruko C, Kel. Cacaban, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang, Jawa Tengah	Magelang	Jawa Tengah	(0293) 313358	CABANG PEMBANTU *SUB BRANCH OFFICE*
CABANG PEMBANTU KENDAL	Jl. Soekarno Hatta No. 242 Kendal 51313	Kendal	Jawa Tengah	(0294) 382700	CABANG PEMBANTU *SUB BRANCH OFFICE*
CABANG PEMBANTU SALATIGA	Jl. Sukowati No. 19 C Salatiga	Salatiga	Jawa Tengah	(0298) 315937	CABANG PEMBANTU *SUB BRANCH OFFICE*
CABANG PEMBANTU WONOSOBO	Jl. RSU No. 10 Wonosobo	Wonosobo	Jawa Tengah	(0286) 325197	CABANG PEMBANTU *SUB BRANCH OFFICE*
KANTOR KAS MASJID BAITURRAHMAN	Jl. Pandanaran No. 126 Semarang 50134	Semarang	Jawa Tengah	(024) 8445285	KANTOR KAS *CASH OFFICE*
KANTOR KAS SRONDOL	Jl. Setiabudi No. 106 B Semarang	Semarang	Jawa Tengah	(024) 7477699	KANTOR KAS *CASH OFFICE*
SOLO	Jl. Slamet Riyadi No. 314 Solo, 57141	Surakarta	Jawa Tengah	(0271) 743457	CABANG UTAMA *MAIN BRANCH*
CABANG PEMBANTU SUKORHAJO	Jl. A. Yani No. 54 B Kartasura Sukoharjo	Sukoharjo	Jawa Tengah	(0271) 780962	CABANG PEMBANTU *SUB BRANCH OFFICE*
CABANG PEMBANTU BOYOLALI	Jl. Pandanaran No. 55 Kel. Siswodipuran Boyolali	Boyolali	Jawa Tengah	(0276) 323484	CABANG PEMBANTU *SUB BRANCH OFFICE*
CABANG PEMBANTU WONOGIRI	Jl. Achmad Yani No. 166 Kabupaten Wonogiri	Wonogiri	Jawa Tengah	(0274) 324021	CABANG PEMBANTU *SUB BRANCH OFFICE*
CABANG PEMBANTU KLATEN	Jl. Pemuda Utara No. 80 Rt. 03/01, Bareng, Klaten Tengah, Kabupaten Klaten	Klaten	Jawa Tengah	(0272) 323244	CABANG PEMBANTU *SUB BRANCH OFFICE*
CABANG PEMBANTU SRAGEN	Jl. Raya Sukowati 133 Sragen	Sragen	Jawa Tengah	(0271) 8823199	CABANG PEMBANTU *SUB BRANCH OFFICE*
CABANG PEMBANTU KARANGANYAR	Jl. Lawu 356 Karanganyar	Karanganyar	Jawa Tengah	(0271) 6497033	CABANG PEMBANTU *SUB BRANCH OFFICE*
TEGAL	Ruko Gajah Mada Town Square No. 3-4 Jl. Gajah Mada Tegal	Tegal	Jawa Tengah	(0283) 354807	CABANG UTAMA *MAIN BRANCH*
YOGYAKARTA	Jl. Margo Utomo (P. Mangkubumi) No. 50 Yogyakarta	Yogyakarta	DI Yogyakarta	(0274) 544416	CABANG UTAMA *MAIN BRANCH*

Nama Kantor *Office Name*	Alamat *Address*	Kota/ Kabupaten *City/ District*	Propinsi *Province*	Telepon *Telephone*	Kategori *Category*
CABANG PEMBANTU WIROBRAJAN	Jl. Kapt. Piere Tendean 56A Yogyakarta 55252	Yogyakarta	DI Yogyakarta	(0274) 414666	CABANG PEMBANTU *SUB BRANCH OFFICE*
CABANG PEMBANTU BANTUL	Jl. Jend. Sudirman No. 40, Bantul,Yogyakarta	Bantul	DI Yogyakarta	(0274) 367121/367183	CABANG PEMBANTU *SUB BRANCH OFFICE*
KANTOR KAS BANTUL	RSU PKU Muhammadiyah Bantul, Jl. Jend. Sudirman 124, Bantul, Yogyakarta	Bantul	DI Yogyakarta	(0274) 368801	KANTOR KAS *CASH OFFICE*
KANTOR KAS UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA	Kampus Terpadu UII, Jl. Kaliurang KM 14,5 Sleman, Yogyakarta 55584	Sleman	DI Yogyakarta	(0274) 898505	KANTOR KAS *CASH OFFICE*
KANTOR KAS UNIVERSITAS GAJAH MADA	Masjid Kampus UGM, Jl. Tevisia 1 Bulaksumur, Yogyakarta 55281	Sleman	DI Yogyakarta	(0274) 548777	KANTOR KAS *CASH OFFICE*
KANTOR KAS AMIKOM	Kampus STMIK AMIKOM, Jl. Ring Road Utara, Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta 55283	Sleman	DI Yogyakarta	(0274) 4477663	KANTOR KAS *CASH OFFICE*
KANTOR KAS YOGYA TIMUR	Jl. Laksda. Adisucipto 130/30 Ambarukmo Blok I Caturtunggal, Depok, Sleman	Yogyakarta	DI Yogyakarta	(0274) 4533881	KANTOR KAS *CASH OFFICE*
KANTOR KAS GODEAN	Jl. Godean Km. 4.5 No. 63 Kenteng RT/ RW 06/02 Nogotirto, Gamping, Sleman, Yogyakarta	Sleman	DI Yogyakarta	(0274) 580893	KANTOR KAS *CASH OFFICE*
BALIKPAPAN	Jl. Jend. Sudirman Komp. Klandasan Permai Blok A No. 6-7 Balikpapan Selatan 76112, Kaltim	Balikpapan	Kalimantan Timur	(0542) 731881	CABANG UTAMA *MAIN BRANCH*
CABANG PEMBANTU TANAH GROGOT	Jl. RA Kartini No. 28, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur	Balikpapan	Kalimantan Timur	(0543) 23434	CABANG PEMBANTU *SUB BRANCH OFFICE*
CABANG PEMBANTU KILO	Jl. Soekarno Hatta KM. 2,5 RT. 15 No. 23 Kel. Gn. Samarinda, Balikpapan 76125, Kaltim	Balikpapan	Kalimantan Timur	(0543) 417682	CABANG PEMBANTU *SUB BRANCH OFFICE*
KANTOR KAS MT. HARYONO	Jl. MT. Haryono No. 185 E Balikpapan, Kaltim	Balikpapan	Kalimantan Timur	(0542) 878742	KANTOR KAS *CASH OFFICE*
BANJARMASIN	Jl. Ahmad Yani KM. 5,2 No.1 Banjarmasin-Kalimantan Selatan (KP.70249)	Banjarmasin	Kalimantan Selatan	(0511) 3264050	CABANG UTAMA *MAIN BRANCH*
CABANG PEMBANTU BANJARBARU	Jl. Ahmad Yani KM. 36 Banjarbaru, Kalimantan Selatan (berjarak 2 ruko dari lokasi existing)	Banjarbaru	Kalimantan Selatan	(0511) 4773199	CABANG PEMBANTU *SUB BRANCH OFFICE*
CABANG PEMBANTU BARABAI	Jl. Pangeran Muhammad Noor, Barabai, Kab. Hulu Sungai Tengah-Kalimantan Selatan	Hulu Sungai Tengah	Kalimantan Selatan	(0517) 43681	CABANG PEMBANTU *SUB BRANCH OFFICE*
CABANG PEMBANTU KAYUTANGI	Ruko Graha Budi Kav. 03, Jl. Trans kalimantan (Jl. Tembus Handil Bakti) Kel. Berangas Timur, Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala, Kalimantan Selatan	Banjarmasin	Kalimantan Selatan	(0511) 4321196	CABANG PEMBANTU *SUB BRANCH OFFICE*

Nama Kantor *Office Name*	Alamat *Address*	Kota/ Kabupaten *City/ District*	Propinsi *Province*	Telepon *Telephone*	Kategori *Category*
PALANGKARAYA	Jl. Diponegoro No. 17 Palangkaraya 73111, Palangka Raya, Kalimantan Tengah	Palangka Raya	Kalimantan Tengah	(0536) 3227092	CABANG UTAMA *MAIN BRANCH*
CABANG PEMBANTU SAMPIT	Jl. Ais Nasution No. 8 Sampit Kab. Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah	Kotawaringin Timur	Kalimantan Tengah	(0531) 30954	CABANG PEMBANTU *SUB BRANCH OFFICE*
CABANG PEMBANTU PANGKALAN BUN	Jl. P. Antasari Kab. Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah	Kotawaringin Barat	Kalimantan Tengah	(0532) 22234	CABANG PEMBANTU *SUB BRANCH OFFICE*
PONTIANAK	Jl. Sultan Syarif Abdurrahman No. 62 A, Kel. Parit Tokaya, Kec. Pontianak Selatan, Kota Pontianak, 78121, Kalimantan Barat	Pontianak	Kalimantan Barat	(0561) 731756	CABANG UTAMA *MAIN BRANCH*
SAMARINDA	Jl. Pahlawan Blok F No. 3A-B Kel. Dadi Mulya Kec. Samarinda Ulu Samarinda, 75123	Samarinda	Kalimantan Timur	(0541) 745511/735697	CABANG UTAMA *MAIN BRANCH*
CABANG PEMBANTU BONTANG	Jl. MT Haryono No.15 RT. 29 RW. 09 Kel. Api-Api Kec. Bontang Utara, Bontang 75311	Bontang	Kalimantan Timur	(0548) 21322-5105906/07	CABANG PEMBANTU *SUB BRANCH OFFICE*
CABANG PEMBANTU SANGATTA	Jl. Yos Sudarso II No. 27 RT. 22 Kec. Sangatta Utara , Kab. Kutai Timur 75611	Kutai Timur	Kalimantan Timur	(0549) 5506227/226	CABANG PEMBANTU *SUB BRANCH OFFICE*
CABANG PEMBANTU TARAKAN	Jl. Jend. Sudirman RT. 40 No. 23 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat, Tarakan 77111	Tarakan	Kalimantan Utara	(0551) 37001	CABANG PEMBANTU *SUB BRANCH OFFICE*
CABANG PEMBANTU BERAU	Jl. Aminuddin Kel. Bugis Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau	Berau	Kalimantan Timur	(0554) 2027043/24442	CABANG PEMBANTU *SUB BRANCH OFFICE*
KANTOR KAS MULAWARMAN	Jl. Tanah Grogot, Kel. Gn. Kelua Fak. Ekonomi Universitas Mulawarman, Kec. Samarinda Ulu, 75123	Samarinda Ulu	Kalimantan Timur	(0541) 204136	KANTOR KAS *CASH OFFICE*
AMBON	Jl. AM. Sangadji No. 45, Kel. Honipopu, Kec. Sirimau, Ambon, Maluku	Ambon	Maluku	(0911) 314444	CABANG UTAMA *MAIN BRANCH*
GORONTALO	Jl. Nani Wartabone No. 26, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo	Gorontalo	Gorontalo	(0435) 831747	CABANG UTAMA *MAIN BRANCH*
CABANG PEMBANTU LIMBOTO	Jl. Jend. Sudirman Kel. Kayubulan, Kec. Limboto, Kab. Gorontalo (Samping Apotik Kimia Farma Limboto/Depan Polres Limboto)	Limboto	Gorontalo	(0435) 881477	CABANG PEMBANTU *SUB BRANCH OFFICE*
CABANG PEMBANTU BOALEMO	Jl. Husin Dj. Rahman Desa Limbato Kec. Tilamuta Kab. Boalemo	Boalemo	Gorontalo	(0443) 211110	CABANG PEMBANTU *SUB BRANCH OFFICE*
JAYAPURA	Ruko Pasific Permai Blok C No. 33 Dok II Jayapura - Papua,99114	Jayapura	Papua	(0967) 551777	CABANG UTAMA *MAIN BRANCH*

Nama Kantor *Office Name*	Alamat *Address*	Kota/ Kabupaten *City/ District*	Propinsi *Province*	Telepon *Telephone*	Kategori *Category*
CABANG PEMBANTU TIMIKA	Jl. Poros Cendrawasih Kel. Kwamki, Distrik Mimika Baru, Timika - Papua	Timika	Papua	(0901) 323999	CABANG PEMBANTU *SUB BRANCH OFFICE*
CABANG PEMBANTU MERAUKE	Jl. Raya Mandala Bampel Distrik Merauke Kab. Merauke	Merauke	Papua	(0971) 324995	CABANG PEMBANTU *SUB BRANCH OFFICE*
CABANG PEMBANTU ABEPURA	Jl. Raya Abepura Kel. Vim Distrik Abepura	Abepura	Papua	(0967) 586777	CABANG PEMBANTU *SUB BRANCH OFFICE*
KENDARI	Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 170 Kendari 93111	Kendari	Sulawesi Tenggara	(0401) 3129903	CABANG UTAMA *MAIN BRANCH*
CABANG PEMBANTU KOLAKA	Jl. Chairil Anwar No. 28 Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Utara	Kolaka	Sulawesi Tenggara	(0405) 2323947	CABANG PEMBANTU *SUB BRANCH OFFICE*
CABANG PEMBANTU BAU-BAU	Jl. Betoambari No. 50A, Kel. Lanto, Kec. Batu Poaro, Kota Baubau	Bau-Bau	Sulawesi Tenggara	(0402) 2822577	CABANG PEMBANTU *SUB BRANCH OFFICE*
CABANG PEMBANTU BOMBANA	Jl. Yos Sudarso Kelurahan Lantawonua Kecamatan Rumbia Kabupaten Bombana	Bombana	Sulawesi Tenggara	(0816) 248049	CABANG PEMBANTU *SUB BRANCH OFFICE*
CABANG PEMBANTU UNAHA KONAWE	Jl. Sapati Kel. Ambekairi Kec. Unaaha Kab Konawe Sultra	Konawe	Sulawesi Tenggara	(0408) 2422444	CABANG PEMBANTU *SUB BRANCH OFFICE*
MAKASSAR	Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 12, Kel. Kunjung Mae, Kec. Mariso Kota Makassar	Makassar	Sulawesi Selatan	(0411) 832777	CABANG UTAMA *MAIN BRANCH*
CABANG PEMBANTU PALOPO	Jl. Jend. Sudirman No. 43 Palopo Kab. Luwu, Kota Palopo	Palopo	Sulawesi Selatan	(0471) 326623	CABANG PEMBANTU *SUB BRANCH OFFICE*
CABANG PEMBANTU PARE-PARE	Jl. Sultan Hasanuddin Ruko Sultan Hasanuddin Petak No. 3 Pare-Pare	Parepare	Sulawesi Selatan	(0421) 28061	CABANG PEMBANTU *SUB BRANCH OFFICE*
CABANG PEMBANTU BONE	Jl. Ahmad Yani No. 169 Kab. Bone	Bone	Sulawesi Selatan	(0481) 27555	CABANG PEMBANTU *SUB BRANCH OFFICE*
CABANG PEMBANTU GOWA	Jl. KH. Wahid hasyim Kompleks Ruko Balla Lompoa Plaza Blok C No. 2 Sungguminasa kabupaten Gowa	Gowa	Sulawesi Selatan	(0411) 8220375	CABANG PEMBANTU *SUB BRANCH OFFICE*
CABANG PEMBANTU MAROS	Jl. Jend. Sudirman No.18-20 Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan	Maros	Sulawesi Selatan	(0411) 373888	CABANG PEMBANTU *SUB BRANCH OFFICE*
CABANG PEMBANTU PETTARANI	Jl. AP. Pettarani Ruko No. 10 D, Makassar, Sulawesi Selatan	Makassar	Sulawesi Selatan	(0411) 432422	CABANG PEMBANTU *SUB BRANCH OFFICE*
KANTOR KAS PANGKEP	Jl. Kemakmuran Komp. Ruko Abadi Blok A/3	Pangkajene Kepulauan	Sulawesi Selatan	(0410) 2312049	KANTOR KAS *CASH OFFICE*
KANTOR KAS ATHIRAH	Jl. Kajaolalido No. 22, Makassar	Makassar	Sulawesi Selatan	(0411) 3690499	KANTOR KAS *CASH OFFICE*
KANTOR KAS PENGAYOMAN	Jl. Pengayoman Ruko Jasper III No. 17, Makassar	Makassar	Sulawesi Selatan	(0411) 441100	KANTOR KAS *CASH OFFICE*

Nama Kantor *Office Name*	Alamat *Address*	Kota/ Kabupaten *City/ District*	Propinsi *Province*	Telepon *Telephone*	Kategori *Category*
KANTOR KAS DAYA	Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 12 Daya, Komp. Bukit Katulistiwa Ruko Blok A No. 7, Kodya Makassar	Makassar	Sulawesi Selatan	(0411) 4772200	KANTOR KAS *CASH OFFICE*
MAMUJU	Jl. Urip Sumoharjo No. 53 Mamuju	Mamuju	Sulawesi Barat	(0426) 22467	CABANG UTAMA *MAIN BRANCH*
CABANG PEMBANTU WONOMULYO	Jl. Jend. Sudirman No. 91, Kel. Sidodadi, Kec. Wonomulyo, Kab. Polewali Mandar	Mamuju	Sulawesi Barat	(0428) 52393	CABANG PEMBANTU *SUB BRANCH OFFICE*
MANADO	Jl. Piere Tendean No. 101 Boulevard Manado Kode Pos 95114 - Sulut	Manado	Sulawesi Utara	(0431) 877778	CABANG UTAMA *MAIN BRANCH*
PALU	Jl. Prof. Moh. Yamin Kompleks Perkantoran D'Vatulemo No. 2-3	Palu	Sulawesi Tengah	(0451) 457555/671	CABANG UTAMA *MAIN BRANCH*
CABANG PEMBANTU PALU BARAT	Jl. Sis Aljufri No. 44 C, Kel. Siranindi, Kec. Palu Barat,Kota Palu Sulawesi Tengah	Palu Barat	Sulawesi Tengah	(0451) 429444/4244444	CABANG PEMBANTU *SUB BRANCH OFFICE*
CABANG PEMBANTU LUWUK	Jl. Urip Sumoharjo No. 30 C, Luwuk, Sulawesi Tengah	Luwuk	Sulawesi Tengah	(0461) 21666	CABANG PEMBANTU *SUB BRANCH OFFICE*
SORONG	Ruko H. Lasedi Jl. Jend Sudirman No. 2a-2b Depan Pasar Bersama, Sorong	Sorong	Papua Barat	(0951) 332777	CABANG UTAMA *MAIN BRANCH*
CABANG PEMBANTU AIMAS	Jl. Klamono KM.19 Depan Alun-Alun Aimas Kab. Sorong	Aimas	Papua Barat	(0951) 3123593	CABANG PEMBANTU *SUB BRANCH OFFICE*
CABANG PEMBANTU MANOKWARI	Jl. Trikora Wosi, Depan Transito Kab. Monokwari, Prov. Papua Barat	Manokwari	Papua Barat	(0986) 212555	CABANG PEMBANTU *SUB BRANCH OFFICE*
TERNATE	Jl. Hasan Esa No.19,Kel. Takoma Ternate	Ternate	Maluku Utara	(0921) 3124458	CABANG UTAMA *MAIN BRANCH*
CABANG PEMBANTU LABUHA BACAN	Jl. Oesman Syah Labuha-Bacan Halmahera Selatan-Maluku Utara	Halmahera	Maluku Utara	(0927) 2321053	CABANG PEMBANTU *SUB BRANCH OFFICE*
CABANG PEMBANTU TIDORE	Jl. Nusantara Kelurahan Indonesiana, Kota Tidore Kepulauan Maluku Utara	Tidore	Maluku Utara	(0921) 3161734	CABANG PEMBANTU *SUB BRANCH OFFICE*
BENGKULU	Jl. S. Parman No. 62 C-D Padang Jati Kota Bengkulu	Bengkulu	Bengkulu	(0736) 348100	CABANG UTAMA *MAIN BRANCH*
CABANG PEMBANTU CURUP	Jl. Merdeka No. 732 Pasar Baru Kota Curup, Kabupaten Rejang Lebong	Rejang Lebong	Bengkulu	(0732) 22290	CABANG PEMBANTU *SUB BRANCH OFFICE*
CABANG PEMBANTU MANNA	Jl. Jendral Sudirman No. 81 Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan	Bengkulu Selatan	Bengkulu	(0739) 21289	CABANG PEMBANTU *SUB BRANCH OFFICE*

Nama Kantor *Office Name*	Alamat *Address*	Kota/ Kabupaten *City/ District*	Propinsi *Province*	Telepon *Telephone*	Kategori *Category*
CABANG PEMBANTU ARGA MAKMUR	Jl. Sutan Syahrir No. 10 Pasar Purwodadi Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara	Bengkulu Utara	Bengkulu	(0737) 521682	CABANG PEMBANTU *SUB BRANCH OFFICE*
JAMBI	Jl. Sultan Agung No. 01 Kel. Murni Kec. Telanai Pura, Kota Jambi	Jambi	Jambi	(0741) 7551241	CABANG UTAMA *MAIN BRANCH*
CABANG PEMBANTU MUARA BUNGO	Jl. M. Yamin No. 14, Kec. Pasar Muara Bungo, Kab. Muara Bungo,Jambi	Bungo	Jambi	(0747) 321778	CABANG PEMBANTU *SUB BRANCH OFFICE*
LAMPUNG	Jl. Raden Intan No. 92 C-D Bandar Lampung	Bandar Lampung	Lampung	(0721) 242123	CABANG UTAMA *MAIN BRANCH*
CABANG PEMBANTU BANDAR JAYA	Jl. Proklamator No. 138 A Bandar Jaya, Lampung Tengah	Lampung Tengah	Lampung	(0725) 527400	CABANG PEMBANTU *SUB BRANCH OFFICE*
CABANG PEMBANTU METRO	Jl. Jend. Sudirman No. 282 B Metro	Metro	Lampung	(0725) 7850500	CABANG PEMBANTU *SUB BRANCH OFFICE*
CABANG PEMBANTU PRINGSEWU	Jl. Ahmad Yani No. 189 Pringsewu	Pringsewu	Lampung	(0729) 23001	CABANG PEMBANTU *SUB BRANCH OFFICE*
CABANG PEMBANTU ZA PAGAR ALAM	Jl. ZA Pagar Alam No. 12 Bandar Lampung	Bandar Lampung	Lampung	(0721) 787324	CABANG PEMBANTU *SUB BRANCH OFFICE*
CABANG PEMBANTU KOTABUMI	Jl. Jend. Sudirman Lingkungan 6 RT. 001, RW. 006, 006, Kotabumi	Lampung Utara	Lampung	(0724) 22402	CABANG PEMBANTU *SUB BRANCH OFFICE*
CABANG PEMBANTU ANTASARI	Jl. P. Antasari No. 134 Bandar Lampung	Bandar Lampung	Lampung	(0721) 709030	CABANG PEMBANTU *SUB BRANCH OFFICE*
CABANG PEMBANTU PANJANG	Jl. Laksamana Yos Sudarso No. 68, Kel. Panjang Utara, Bandar Lampung	Bandar Lampung	Lampung	(0721) 31997	CABANG PEMBANTU *SUB BRANCH OFFICE*
CABANG PEMBANTU AL KAUTSAR	Jl. Soekarno Hatta, Rajabasa, Bandar Lampung	Bandar Lampung	Lampung	(0721) 709097	CABANG PEMBANTU *SUB BRANCH OFFICE*
PADANG	Jl. Rasuna Said No. 107 Padang	Padang	Sumatera Barat	(0751) 7054106	CABANG UTAMA *MAIN BRANCH*
CABANG PEMBANTU BUKITTINGGI	Jl a.yani no 99 D kelurahan benteng psr atas bukittinggi	Bukittinggi	Sumatera Barat	(0752) 302006	CABANG PEMBANTU *SUB BRANCH OFFICE*
CABANG PEMBANTU PAYAKUMBUH	Jl. Soekarno Hatta No. 87 Payakumbuh	Payakumbuh	Sumatera Barat	(0752) 796757	CABANG PEMBANTU *SUB BRANCH OFFICE*
CABANG PEMBANTU SOLOK	Jl. M.Yamin No. 87 Kel. Pasar Pandan Air Mati, Kec. Tanjung Harapan Kota Solok	Solok	Sumatera Barat	(0755) 20011	CABANG PEMBANTU *SUB BRANCH OFFICE*
PALEMBANG	Jl. Kapten A.Rivai Komplek Ruko Taman Mandiri, Palembang	Palembang	Sumatera Selatan	(0711) 351239	CABANG UTAMA *MAIN BRANCH*
CABANG PEMBANTU KAYU AGUNG	Jl. Mochtar Saleh No. 169-170, Kayu Agung, Kab. Ogan Kemering Ilir	Ogan Komering Ilir	Sumatera Selatan	(0712) 323371	CABANG PEMBANTU *SUB BRANCH OFFICE*

Nama Kantor *Office Name*	Alamat *Address*	Kota/ Kabupaten *City/ District*	Propinsi *Province*	Telepon *Telephone*	Kategori *Category*
CABANG PEMBANTU PLAJU	Komp. RS Muhammadiyah Palembang Jl. Jenderal A.Yani 13 Ulu Palembang	Palembang	Sumatera Selatan	(0711) 511107	CABANG PEMBANTU *SUB BRANCH OFFICE*
CABANG PEMBANTU BATURAJA	Jl. Jendral A.Yani No. 324, Kel Kemalaraja, Kec.Baturaja Timur, Kab. OKU	Ogan Komering Ulu	Sumatera Selatan	(0735) 321811	CABANG PEMBANTU *SUB BRANCH OFFICE*
CABANG PEMBANTU ENIM	Jl. Jend. Sudirman Talang Jawa Atas, Muara Enim 31315	Muara Enim	Sumatera Selatan	(0734) 421848	CABANG PEMBANTU *SUB BRANCH OFFICE*
KANTOR KAS PATAL	Jl. R. Sukamto 8 Ilir Timur No. 2 Palembang	Palembang	Sumatera Selatan	(0711) 355844	KANTOR KAS *CASH OFFICE*
PANGKAL PINANG	Jl. Ahamd Yani Dalam Kelurahan Bukit Sari, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang	Pangkalpinang	Bangka Belitung	(0717) 422812/422783	CABANG UTAMA *MAIN BRANCH*
CABANG PEMBANTU TANJUNG PANDAN	Jl. Jend. Sudirman No. 28, Pangkal Lalang, Kota Tanjungpandan - Kab. Belitung, Prov. Kepulauan Bangka Belitung 33412	Belitung	Bangka Belitung	(0719) 21513	CABANG PEMBANTU *SUB BRANCH OFFICE*
CABANG PEMBANTU SUNGAILIAT	Komp. Ruko Permata Indah Blok B No. 6-7 Jl. Jend. Sudirman No. 30, Kota Sungailiat, Kab. Bangka, Prov. Kepulauan Bangka Belitung 33215	Bangka	Bangka Belitung	(0717) 95912	CABANG PEMBANTU *SUB BRANCH OFFICE*
CABANG PEMBANTU KOBA	Jl. Soekarno Hatta II, Simpang Perlang, Kec. Koba, Kab. Bangka Tengah	Bangka Tengah	Bangka Belitung	(0718) 4222222	CABANG PEMBANTU *SUB BRANCH OFFICE*
BANDA ACEH	Jl. Tgk H.M Daud Beureueh No. 174 A-B, Banda Aceh	Banda Aceh	Nanggroe Aceh Darussalam (NAD)	(0651) 635654/55	CABANG UTAMA *MAIN BRANCH*
CABANG PEMBANTU PEUNAYONG	Jl. TP. Polem No. 68 Peunayong Banda Aceh	Banda Aceh	Nanggroe Aceh Darussalam (NAD)	(0651) 26140	CABANG PEMBANTU *SUB BRANCH OFFICE*
BATAM	Komp. Ruko Palm Spring BTC Blok B1 No. 20-21 Batam Kepulauan Riau	Batam	Kepulauan Riau	(0778) 468395	CABANG UTAMA *MAIN BRANCH*
LANGSA	Jl. Ahmad Yani No.1-2 Kota Langsa	Langsa	Nanggroe Aceh Darussalam (NAD)	(0641) 426584	CABANG UTAMA *MAIN BRANCH*
CABANG PEMBANTU LHOKSEUMAWE	Jl. Merdeka No. 2-3 Kel. Simpang Empat, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe	Lhokseumawe	Nanggroe Aceh Darussalam (NAD)	(0645) 631616	CABANG PEMBANTU *SUB BRANCH OFFICE*
MEDAN - BALAIKOTA	Jl. Balai Kota No. 10 D-E, Medan	Medan	Sumatera Utara	(061) 4535353	CABANG UTAMA *MAIN BRANCH*
CABANG PEMBANTU ISKANDAR MUDA	Jl. Iskandar Muda No. 75 Medan	Medan	Sumatera Utara	(061) 4551653	CABANG PEMBANTU *SUB BRANCH OFFICE*
CABANG PEMBANTU BINJAI	Kompleks Binjai Supermall Blok GR-05, Binjai	Medan	Sumatera Utara	(061) 8823434	CABANG PEMBANTU *SUB BRANCH OFFICE*

Nama Kantor *Office Name*	Alamat *Address*	Kota/ Kabupaten *City/ District*	Propinsi *Province*	Telepon *Telephone*	Kategori *Category*
CABANG PEMBANTU SUKARAMAI	Jl. A.R. Hakim No. 70A-70B, Kel. Sukaramai I, Kec. Medan Area, Kota Medan	Medan	Sumatera Utara	(061) 7367476	CABANG PEMBANTU *SUB BRANCH OFFICE*
CABANG PEMBANTU SERDANG	Jl. HM Yamin No. 237, Medan	Medan	Sumatera Utara	(061) 4144343	CABANG PEMBANTU *SUB BRANCH OFFICE*
CABANG PEMBANTU STABAT	Jl. KH. Zainul Arifin No. 52 B-C, Stabat	Langkat	Sumatera Utara	(061) 8912323	CABANG PEMBANTU *SUB BRANCH OFFICE*
MEDAN SUDIRMAN	Jl. Sudirman No. 25 A, Kel. Jati, Kec. Medan Maimun, Medan, Sumatera Utara	Medan	Sumatera Utara	(061) 4579343	CABANG UTAMA *MAIN BRANCH*
PADANG SIDEMPUAN	Jl. Baginda Oloan/ Gatot Subroto No. 08 Padangsidempuan 22718	Padang Sidempuan	Sumatera Utara	(0634) 22999	CABANG UTAMA *MAIN BRANCH*
CABANG PEMBANTU RANTAU PRAPAT	Jl. A.Yani No.171 Rantau Prapat Kab. Labuhan Batu	Labuhan Batu	Sumatera Utara	(0624) 327100	CABANG PEMBANTU *SUB BRANCH OFFICE*
CABANG PEMBANTU PANYABUNGAN	Jl. Willem Iskandar No. 173 Panyabungan 22912	Mandailing Natal	Sumatera Utara	(0636) 321234	CABANG PEMBANTU *SUB BRANCH OFFICE*
PEKANBARU	Jl. Jend. Sudirman No. 411 Kota Pekanbaru, Propinsi Riau	Pekanbaru	Riau	(0761) 862915	CABANG UTAMA *MAIN BRANCH*
CABANG PEMBANTU KAMPAR	Jl. Jend. Sudirman No. 7 Bangkinang	Kampar	Riau	(0762) 20908	CABANG PEMBANTU *SUB BRANCH OFFICE*
PEMATANG SIANTAR	Jl. Sangnawaluh/Asahan Komp. Megaland Blok A No. 6 dan 7, Pematangsiantar	Pematang Siantar	Sumatera Utara	(0622) 26662	CABANG UTAMA *MAIN BRANCH*
CABANG PEMBANTU KISARAN	Jl. Cokroaminoto No. 245 Kisaran	Asahan	Sumatera Utara	(0623) 43558	CABANG PEMBANTU *SUB BRANCH OFFICE*
TANJUNG PINANG	Jl. DI. Panjaitan Blok A No. 3/3A KM. 9 Tanjung Pinang - Kepulauan Riau	Tanjung Pinang	Kepulauan Riau	(0771) 441999	CABANG UTAMA *MAIN BRANCH*
KUALA LUMPUR	Suite 1.03-1.05 Ground Floor No. 67, Wisma Goldhill Jalan Raja Chulan 50200 Kuala Lumpur	Malaysia	Malaysia	(+603 2) 7110807	CABANG UTAMA *MAIN BRANCH*

Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan
Vision, Mission, and Company Culture

Review terhadap Visi dan Misi Perusahaan

Pada tahun 2019, Bank Muamalat Indonesia telah melakukan kajian dan *review* mengenai kesesuaian Visi dan Misi Perusahaan terhadap kondisi Bank saat ini dan tantangan usaha yang akan dihadapi ke depan. *Review* dan persetujuan bersama dari Dewan Komisaris dan Direksi, disimpulkan bahwa Visi dan Misi Perusahaan masih sesuai dengan kondisi Bank Muamalat Indonesia saat ini dan tantangan yang akan dihadapi Bank ke depan. Oleh karenanya Surat Keputusan Direksi No. 238/DIR/KPTS/V/2016 masih dinyatakan berlaku dan tidak mengalami perubahan.

Berikut adalah Visi dan Misi PT Bank Muamalat Indonesia:

Visi
"Menjadi Bank Syariah Terbaik dan termasuk dalam 10 Bank Terbesar di Indonesia dengan eksistensi penguasaan yang diakui di tingkat regional."

Misi
"Membangun **Lembaga Keuangan Syariah yang Unggul dan Berkesinambungan** dengan penekanan pada semangat kewirausahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian, keunggulan sumber daya manusia yang islami dan profesional serta orientasi investasi yang inovatif untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan."

Nilai-Nilai Muamalat

Nilai-nilai Bank Muamalat Indonesia sebagai cara kerja yang harus dilaksanakan oleh seluruh karyawan Muamalat diyakini mampu mengantarkan Bank Muamalat Indonesia mencapai visi misinya. Nilai Utama Bank Muamalat Indonesia adalah Islami – Modern – Profesional, yang kemudian diturunkan menjadi 5 (lima) Perilaku Utama dimana nilai Islami diturunkan menjadi Integritas, nilai Modern diturunkan menjadi Terbuka dan Tanggap, serta nilai Profesional diturunkan menjadi Kompeten dan Prima. Ke-5 (kelima) perilaku utama tersebut untuk selanjutnya diturunkan masing-masing memiliki 7 (tujuh) indikator perilaku dan 11 *Do's and Dont's* sebagai panduan karyawan dalam penerapan nilai-nilai tersebut dalam pelaksanaan kerja sehari-hari.

Review on Company Vision and Mission

In 2019, Bank Muamalat Indonesia conducted study and review on the alignment of the Company's Vision and Mission towards the Bank's condition and the upcoming business challenges. Collective review and agreement of the Board of Commissioners and Directors concludes that the Company's Vision and Mission are still in line with the recent condition of Bank Muamalat Indonesia and the upcoming challenges the Bank will encounter. Accordingly, Director's Decree No. 238/DIR/KPTS/V/2016 is still valid and has not changed.

The following are the Vision and Mission of PT Bank Muamalat Indonesia:

Vision
"To be the Best Islamic and one of the Top 10 Banks in Indonesia with Strong Regional Presence."

Mission
"To develop an excellent and sustainable Islamic financial institution with emphasis on entrepreneurial spirit based on the prudent principle and excellent and professional human resources with strong adherence to Islamic values, and oriented towards innovative investment to optimize values which benefit all stakeholders."

Muamalat Values

The values of Bank Muamalat Indonesia as a way of working that should be implemented by all employees is believed to be capable of delivering Bank Muamalat Indonesia achieve the vision and mission. The Core values of Bank Muamalat Indonesia are Islami – Modern – Professional. These Core values are expanded into five main behaviours. Islami value translates into Integrity, Modern value translates into Openness and Responsiveness, and Professional value translates into Competence and Excellence. Each of these five main behaviours becomes the basis for seven behaviours indicators and 11 Do's and Don'ts which employees use as the guideline in performing their daily tasks.

Insan Muamalat adalah manusia yang selalu memberikan yang terbaik dalam melakukan pekerjaannya

Insan Muamalat always give their best in doing their work



Insan Muamalat adalah manusia yang selalu mengikuti perkembangan zaman, namun tetap memperhatikan kesesuaiannya dengan nilai Islami

Insan Muamalat who always follow the times, but still concern to Islamic values

Insan Muamalat adalah manusia yang memiliki integritas dan menunjukkan akhlakul karimah dalam perilakunya sehari-hari

Insan Muamalat constantly follow current development, but keep following their concern towards Islamic values

Muamalat IDEAL

Nilai Utama Muamalat / *Muamalat Core Values*

Islami | **Modern** | **Profesional**

Perilaku Utama / *Main Behaviours*

Integritas *Integrity*	Terbuka *Open-Minded*	Tanggap *Responsive*	Kompeten *Competent*	Prima *Excellent*
Menjaga integritas dalam setiap aktivitas sesuai ajaran Islam, etika dan aturan yang berlaku. *Maintaining integrity in every activity according to the Islamic teaching, applicable ethics and rules.*	Berpikir positif dan terbuka terhadap perubahan. *Thinking positive and willing to adapt.*	Tanggap dan inovatif dalam memberikan solusi. *Being responsive and innovative in providing solutions.*	Kompeten dan bertanggung jawab terhadap tugas dan kewajiban. *Being competent and responsible for duties.*	Berorientasi pada proses dan layanan prima. *Process oriented and excellent services.*

Tinjauan Rencana dan Strategi

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, maka telah disusun rencana jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, yaitu sebagai berikut:

Corporate Plans and Strategies

To obtain the vision and mission, short-term, mid-term and long-term plans have been arranged, as follows:



1. Rencana Jangka Pendek

   Sesuai dengan Rencana Bisnis Bank (RBB) tahun 2020, Bank akan melanjutkan inisiatif-inisiatif strategis yang telah dibangun di tahun sebelumnya dengan menajamkan fokus untuk bertransformasi. Langkah-langkah strategis yang akan ditempuh oleh Bank Muamalat Indonesia pada Tahun 2020 akan diprioritaskan pada 3 (tiga) fokus utama, yaitu sebagai berikut:

   a. *Creative Transformation*, yaitu fokus untuk bertransformasi menjadi Bank yang efisien dan produktif.
   b. *Swift Recovery*, yaitu akselerasi pemulihan pembiayaan bermasalah termasuk peningkatan proses pencegahannya.
   c. *Shaping the Healthy Business*, yaitu pengembangan bisnis yang sehat dan berkelanjutan.

2. Rencana Jangka Menengah

   Pencapaian target dalam jangka menengah adalah Bank Muamalat Indonesia sebagai Bank Syariah terbesar di Indonesia dengan kinerja efisiensi dan profitabilitas yang tinggi. Hal tersebut untuk mencapai visi jangka menengah sebagai Top 15

1. *Short-term Plan*

   In accordance with the Bank Business Plan (RBB) for 2020, the Bank will continue its strategic initiatives that have been arranged in the previous years by sharpening focus on transformation. Bank Muamalat Indonesia will carry out the strategic steps prioritizing on 3 (three) main focuses, such as:

   a. *Creative Transformation, a focus on transformation to be efficient and productive Bank.*
   b. *Swift Recovery, an acceleration of non-performing financing, including improving the prevention process.*
   c. *Shaping the Healthy Business, a sound and sustainable business development.*

2. *Mid-term Plan*

   Mid-term target achievement of Bank Muamalat Indonesia as the Biggest Sharia Bank in Indonesia is to perform high efficiency and profitability performance. It aims to obtain mid-term vision as Top 15 Bank in Indonesia and at once, be the biggest Sharia

Bank di Indonesia dan sekaligus menjadi Bank Syariah terbesar di Indonesia dengan kinerja efisiensi dan profitabilitas yang sejajar dengan perbankan kelas dunia.

3. Rencana Jangka Panjang
Bank Muamalat Indonesia diproyeksikan dapat menjadi Bank Syariah terbaik dan termasuk dalam 10 besar bank di Indonesia dengan eksistensi yang diakui di tingkat regional.

Untuk mencapai misi tersebut, maka Bank Muamalat Indonesia harus menentukan rencana pembangunan jangka pendek. Rencana-rencana tersebut tidak hanya untuk memenuhi target di tahun 2020, tapi juga harus mendukung pada keberlanjutan fase berikutnya. Oleh karena itu, pada Rencana Bisnis Bank Tahun 2020 ini Bank Muamalat Indonesia telah menentukan tema, yaitu: "Transformasi untuk Pertumbuhan Bisnis yang Berkelanjutan".

Arah Kebijakan Bank

Sejalan dengan tema dan rencana jangka pendek yang telah dijelaskan di atas, maka arah kebijakan Bank Muamalat Indonesia untuk tahun 2020 adalah bertransformasi untuk menjadi Bank yang produktif dan efisien, melanjutkan pemulihan penyelesaian pembiayaan bermasalah termasuk pencegahannya, serta pertumbuhan bisnis yang sehat dan berkelanjutan.

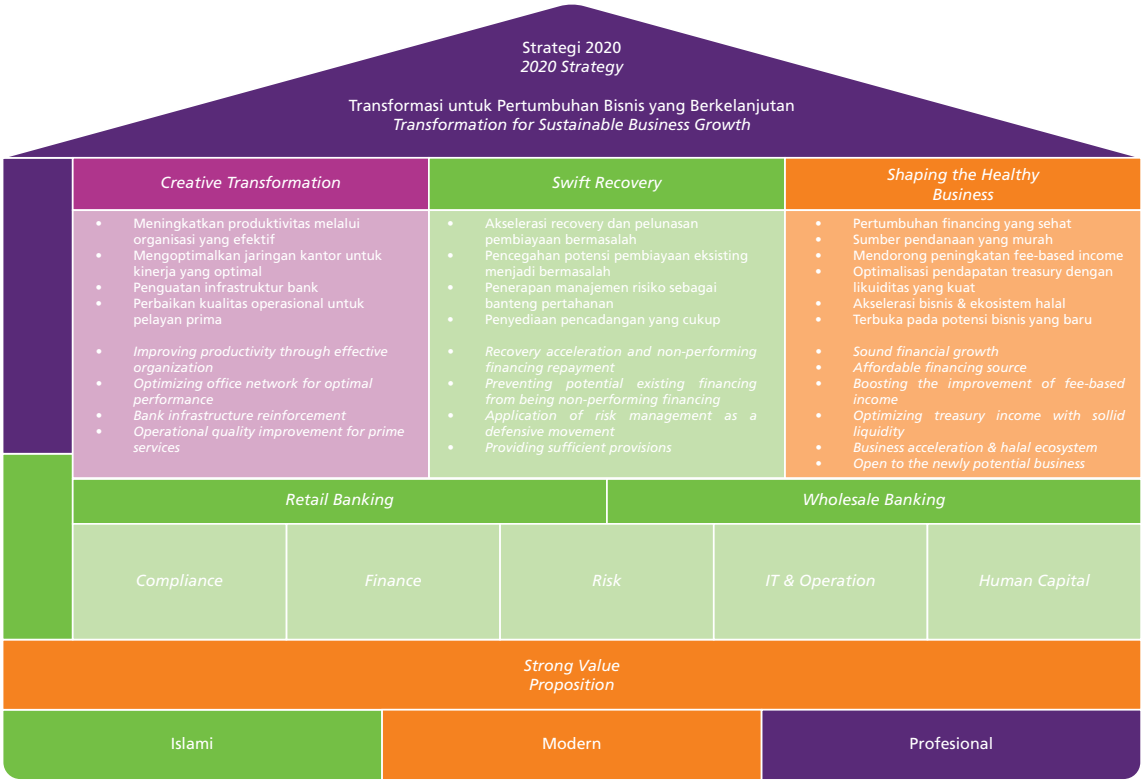
Bank in Indonesia with efficiency and profitability performance that competes with world-class banks.

3. *Long-term Plan*
Bank Muamalat Indonesia is projected to be the best Sharia Bank and included in 10 major banks in Indonesia with strong regional presence.

To obtain the mission, Bank Muamalat Indonesia should determine short-term development plans. The plans do not only support 2020 target, but also has to support the upcoming phases. Accordingly, on 2020 Bank Business Plan, Bank Muamalat Indonesia has determined a theme, namely: "Transformation for Sustainable Business Growth".

Bank Policy Direction

In line with the theme and shot-term plan aforementioned, Bank Muamalat Indonesia policy direction for 2020 is to transform into the Bank that is productive and efficient, proceeding the recovery of non-performing financing including its prevention and healthy sustainable business growth.



Langkah–Langkah Strategis yang Akan Ditempuh

Rencana Bisnis Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2020 ini akan diprioritaskan pada 3 (tiga) fokus utama, yaitu:

1. Creative Transformation
   Sejalan dengan tema RBB tahun 2020, Bank Muamalat Indonesia akan fokus bertransformasi untuk menjadi sebuah Bank yang produktif dan efisien untuk memberikan pelayanan yang prima kepada nasabah. Beberapa inisiatif yang akan dilakukan terkait dengan fokus *creative transformation* diantaranya adalah penyempurnaan dan perampingan organisasi yang diikuti dengan optimalisasi sumber daya manusia; pembukaan, peningkatan status cabang, relokasi, dan penutupan jaringan dengan memperhitungkan berbagai aspek untuk mencapai kinerja yang optimal; penguatan infrastruktur; serta perbaikan kualitas operasional untuk menawarkan pelayanan yang prima kepada nasabah.
2. Swift Recovery
   Pada tahun 2020, Bank Muamalat Indonesia akan tetap melanjutkan dan meningkatkan proses pemulihan pembiayaan bermasalah serta pencegahan terhadap potensi macet pada pembiayaan eksisting. Selain itu, Bank Muamalat Indonesia akan berusaha menyediakan pencadangan yang cukup untuk kerugian dari pembiayaan bermasalah. Dalam tahapan pencegahan, Bank Muamalat Indonesia akan fokus pada penguatan implementasi manajemen risiko baik untuk bisnis maupun operasional.

Strategic Steps Taken

Strategic Steps Taken by the Bank Muamalat Indonesia Business Plan for 2020 will be prioritized on 3 (three) main focuses, such as:

1. *Creative Transformation*
   In line with RBB 2020 theme, Bank Muamalat Indonesia will focus on transformation to be a productive and efficient Bank in providing prime services to consumers. Several initiatives will be carried out related to creative transformation focus, such as improvement and streamlining of the organization followed by optimization of human resources; opening, improving branch status, relocating, and closing the network by taking into account various aspects to achieve optimal performance; infrastructure reinforcement; and operational quality improvement to provide prime services to the consumers.

2. *Swift Recovery*
   In 2020, Bank Muamalat Indonesia will continue and improve the process of recovering non-performing financing and preventing potential defaults on existing financing. In addition, Bank Muamalat Indonesia will try to provide sufficient reserves for losses from non-performing financing. In the prevention phase, Bank Muamalat Indonesia will focus on strengthening the implementation of risk management for both business and operations.

3. Shaping the Healthy Business

Dalam upaya meningkatkan pertumbuhan bisnis yang sehat dan berkelanjutan, Bank Muamalat Indonesia akan menguatkan seluruh aspek pada sumber pendapatan, seperti pembiayaan yang sehat, pendanaan yang murah, peningkatan fee-based income, optimalisasi pendapatan treasury dengan likuiditas yang kuat, akselerasi pada ekosistem bisnis halal, dan menangkap peluang bisnis baru.

Dari segi pembiayaan, Bank Muamalat Indonesia akan fokus pada jenis dan target nasabah yang memiliki bobot risiko rendah, baik untuk segmen ritel maupun korporasi. Pendapatan berbasis jasa juga akan ditingkatkan dari produk trade finance maupun transactional banking. Selain itu, pendapatan dari kegiatan treasury akan dioptimalkan sejalan dengan pengelolaan likuiditas bank.

Dari sisi penghimpunan dana, Bank Muamalat Indonesia akan meningkatkan porsi dana murah, yaitu produk CASA sehingga dapat memperkecil margin expenses. Sementara itu, Bank Muamalat Indonesia akan melanjutkan dan meningkatkan bisnis terkait dengan ekosistem halal melalui kerjasama strategis dengan berbagai pihak. Untuk menghadapi perkembangan zaman dan kebutuhan nasabah, Bank Muamalat Indonesia akan membuka peluang bisnis baru, seperti bekerjasama dengan fintech syariah maupun e-commerce.

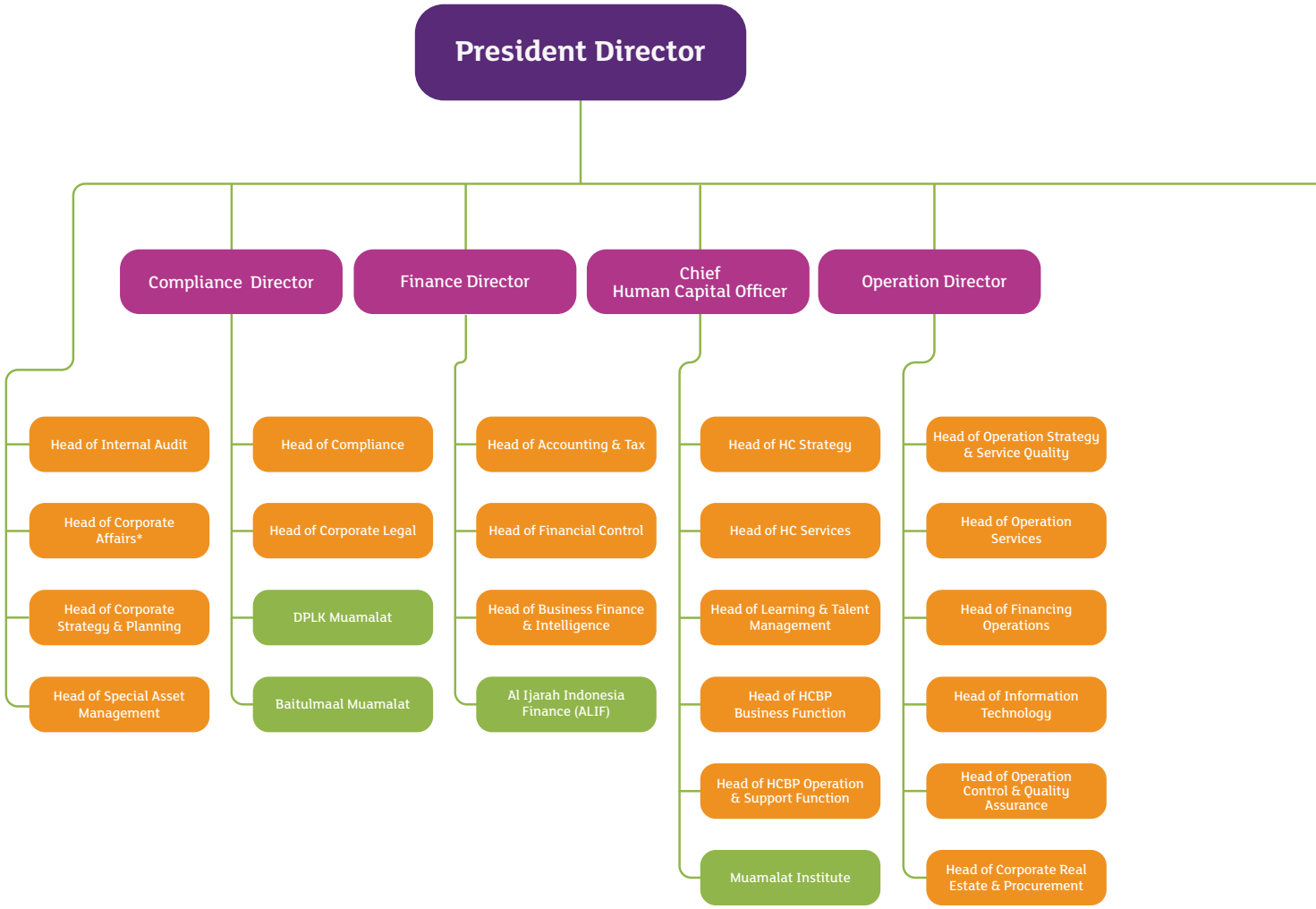
3. Shaping the Healthy Business

In an effort to promote healthy and sustainable business growth, Bank Muamalat Indonesia will strengthen all aspects of revenue sources, such as healthy financing, low-cost funding, increased fee-based income, optimizing treasury income with strong liquidity, acceleration in the halal business ecosystem, and seize new business opportunities.

In terms of funding, Bank Muamalat Indonesia will focus on consumers types and target that has low risk weight, both for retail and corporation segment. Service-based income will also be improved from trade finance and transactional banking products. In addition, income coming from treasury activities will be optimized in accordance with bank's liquidity management.

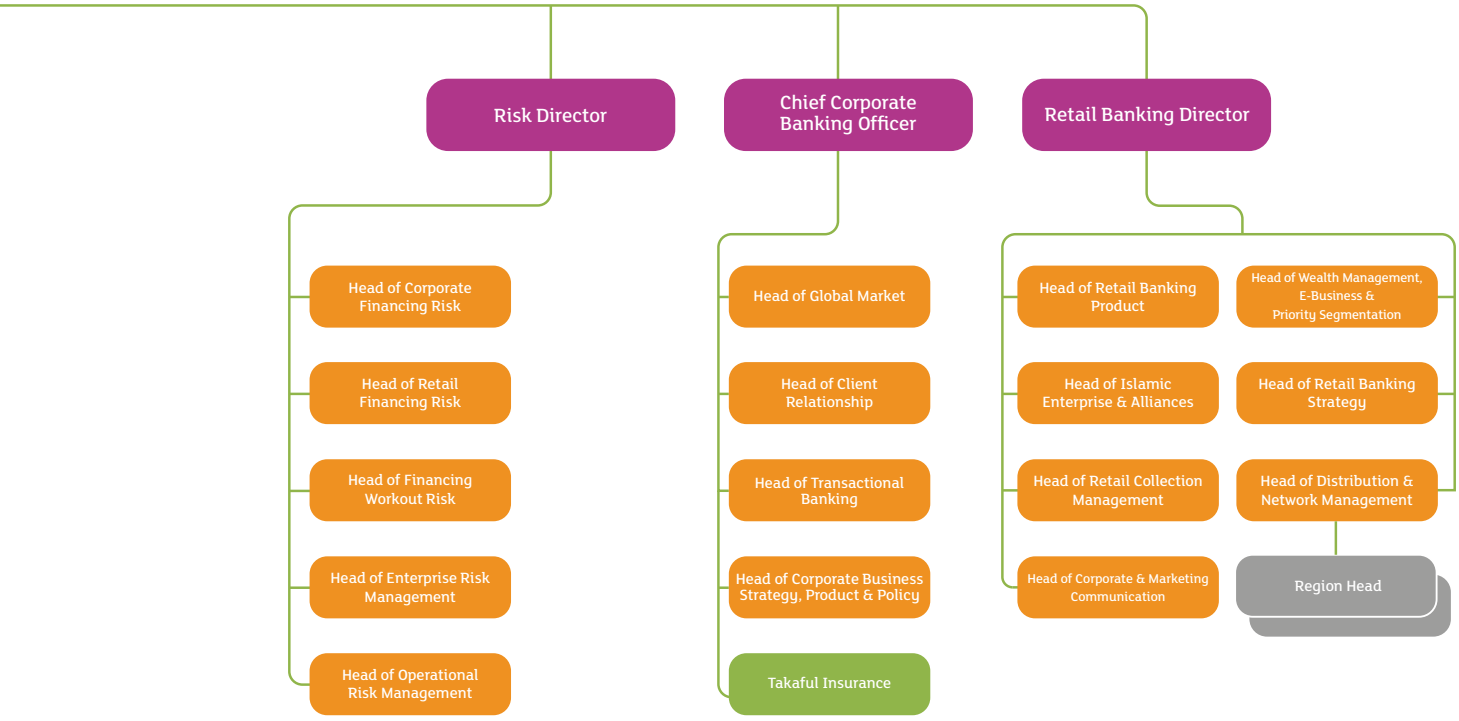
In terms of fund raising, Bank Muamalat Indonesia will increase the portion of low-cost funds, namely CASA products so as to reduce margin expenses. Meanwhile, Bank Muamalat Indonesia will continue and improve business related to the halal ecosystem through strategic cooperation with various parties. To face the current development and the needs of customers, Bank Muamalat Indonesia will open new business opportunities, such as cooperation with Islamic fintech and e-commerce.

Struktur Organisasi
Organization Structure



*) also act as Corporate Secretary

Committee :
1. ALCO
2. IT Steering Committee
3. Risk Management Committee
4. Human Capital Committee



Struktur Organisasi sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 029/B/DIR-KPTS/X/2019 tentang Penyempurnaan Struktur Organisasi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk tanggal 28 Oktober 2019.

Organizational Structure in accordance with Directors Decree No. 029/B/DIR-KPTS/X/2019 concerning Improvement of the Organizational Structure of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dated October 28, 2019.

Profil Dewan Pengawas Syariah
Sharia Supervisory Board Profile



Usia *Age*	45 tahun *45 years old*
Kewarganegaraan *Citizenship*	Indonesia
Domisili *Domicile*	Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan Pertama *First Legal Basis of Appointment*	Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 29 Juni 2016 dan telah mendapat persetujuan dari OJK pada tanggal 2 Februari 2017 *Annual General Meeting of Shareholders dated June 29, 2016 and obtained effective decisions from OJK on June 27, 2016*
Dasar Hukum Pengangkatan Terakhir *Last Legal Basis of Appointment*	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 16 Desember 2019 *Extraordinary General Meeting of Shareholders dated December 16, 2019*
Periode Jabatan *Position Period*	Ke-2 (kedua) *Second*
Riwayat Pendidikan *Educational Background*	Magister Ekonomi dan Keuangan Syariah dari Universitas Indonesia pada tahun 2007 *Master of Economics and Sharia Finance from University of Indonesia in 2007*
Riwayat Pekerjaan *Professional Careers*	Menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Bank Muamalat Indonesia Tbk sejak diangkat pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 16 Desember 2019. *Served as Chairman of the Sharia Supervisory Board of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk since appointed at the Extraordinary General Meeting of Shareholders on December 16, 2019.*

Sholahudin Al-Aiyub

Ketua Dewan Pengawas Syariah
Chairman of the Sharia Supervisory Board

Rangkap Jabatan *Concurrent Position*	• Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Fatwa dan Bidang Pengkajian Majelis Ulama Indonesia (MUI), • Wakil Sekretaris Badan Pelaksana Harian Dewan Syariah Nasional (DSN), • Katib Syuriah Bidang Bahtsul Masail PBNU, Tenaga Ahli Konsultan Fikih LPPOM-MUI • Dosen Fikih Muamalah pada Pascasarjana Kajian Timur Tengah dan Islam (PSKTTI) Universitas Indonesia • *Deputy Secretary General for Fatwa and Study of the Indonesian Ulema Council (MUI),* • *Deputy Secretary of the National Sharia Board Daily Executing Board (DSN),* • *Katib Syuriah for Bahtsul Masail PBNU, Fikih Expert Advisor of LPPOM-MUI* • *Lecturer in Fikih Muamalah at the University of Indonesia Middle East and Islamic Studies (PSKTTI) Postgraduate*
Kepemilikan Saham Perusahaan *Company Share Ownership*	Nihil *Nil*
Pendidikan dan Pelatihan 2019 *Education and Training in 2019*	Nihil *Nil*
Hubungan Afiliasi *Affiliation*	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dalam hal hubungan keuangan maupun kekeluargaan dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas Syariah dan Pemegang Saham dan Pengendali *He has no affiliation in terms of both financial and family relations with members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors and Major Shareholders or Controlling Shareholders*



Usia *Age*	35 tahun *35 years old*
Kewarganegaraan *Citizenship*	Indonesia
Domisili *Domicile*	Banten
Dasar Hukum Pengangkatan Pertama *First Legal Basis of Appointment*	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 16 Desember 2019 dan efektif setelah memperoleh persetujuan dari OJK *Extraordinary General Meeting of Shareholders dated December 16, 2019 and effective after obtaining approval from OJK*
Dasar Hukum Pengangkatan Terakhir *Last Legal Basis of Appointment*	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 16 Desember 2019 dan efektif setelah memperoleh persetujuan dari OJK *Extraordinary General Meeting of Shareholders on December 16, 2019 and effective after obtaining approval from OJK*
Periode Jabatan *Position Period*	Ke-1 (kesatu) *First*
Riwayat Pendidikan *Educational Background*	• Ahmad Ibrahim Kulliyah of Laws International Islamic University Malaysia tahun 2010 • S2 Fakultas Ilmu Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2015 • S2 Syariah dari Institut Ilmu Quran di Tajun 2016 • *Ahmad Ibrahim Kulliyah of Laws International Islamic University Malaysia in 2010* • *Master of Faculty of Law, University of Indonesia in 2015* • *Master of Sharia from the Institute of Quranic Sciences at Tajun in 2016*

Siti Haniatunnisa *)

Anggota Dewan Pengawas Syariah
Member of the Sharia Supervisory Board

Riwayat Pekerjaan *Professional Careers*	Menduduki berbagai jabatan diantaranya anggota pengurus Majelis Ulama Indonesia Pusat untuk Komisi Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional (2015-2020) dan Pengurus Pleno DSN-MUI (2015-2020) *Occupying various positions including the board member of the Central Indonesian Ulema Council for the Commission on Foreign Relations and International Cooperation (2015-2020) and the Plenary Board of the DSN-MUI (2015-2020)*
Rangkap Jabatan *Concurrent Position*	Nihil *Nil*
Kepemilikan Saham Perusahaan *Company Share Ownership*	Nihil *Nil*
Pendidikan dan Pelatihan 2019 *Education and Training in 2019*	Nihil *Nil*
Hubungan Afiliasi *Affiliation*	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dalam hal hubungan keuangan maupun kekeluargaan dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas Syariah dan Pemegang Saham dan Pengendali *He has no affiliation in terms of both financial and family relations with members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors and Major Shareholders or Controlling Shareholders*

*) Efektif setelah memperoleh persetujuan dari OJK
*) *Effective after obtaining approval from FSA*

Profil Dewan Komisaris
Board of Commissioners Profile



Usia *Age*	56 tahun *56 years old*
Kewarganegaraan *Citizenship*	Indonesia
Domisili *Domicile*	Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan Pertama *First Legal Basis of Appointment*	Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tanggal 28 Juni 2018 dan mendapatkan keputusan efektif dari OJK pada 26 Maret 2019 *Annual General Meeting of Shareholders dated June 28, 2018 and obtained effective decision from OJK on March 26, 2019*
Dasar Hukum Pengangkatan Terakhir *Last Legal Basis of Appointment*	Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tanggal 17 Mei 2019 dan Surat Keputusan Kemenkumham No. AHU-AH.01.03-0283340 Tanggal 28 Mei 2019 *Annual General Meeting of Shareholders on May 17, 2019 and Decree of the Ministry of Law and Human Rights No. AHU-AH.01.03-0283340 dated May 28, 2019*
Periode Jabatan *Position Period*	Ke-2 (kedua) *Second*
Riwayat Pendidikan *Educational Background*	• Desember 2003: Lulus sebagai MBA (Sekolah Pascasarjana Bisnis, Universitas Chicago) • 2001-2003: Program MBA Eksekutif, Sekolah Pascasarjana Bisnis, Universitas Chicago, Kampus Singapura • 1999: Program Eksekutif Internasional, INSEAD, Fontainbleau, Prancis, dan Singapura • Juli 1994: Dianugerahi Gelar Dr.-Ing. dalam Aeronautical Engineering dengan predikat Summa Cum Laude dari Technische Universität München • 1987 Februari: Dianugerahi Gelar Dipl.-Ing. Teknik Aeronautika dengan predikat Cum Laude dari Technische Universität München • Doktorarbeit (PhD. Skripsi) "Finite Volume Numerical Simulation of Longitudinally Oscillating Airfoils Using Euler Equations" • 1981-1987: Technische Universität München, Diplomarbeit (Master Thesis) "Design of 100 Seater Regional Jet" • 1973-1981: Gimnasium Hochrad, Hamburg, Jerman • 1969-1973: Grundschule Windmühlenweg, Hamburg, Jerman • *2003 December: Graduated as MBA (Graduate School of Business, University of Chicago)* • *2001-2003: Executive MBA Program, Graduate School of Business, University of Chicago, Singapore Campus* • *1999: International Executive Program, INSEAD, Fontainbleau, France, and Singapore* • *1994 July: Awarded Dr.-Ing. Degree in Aeronautical Engineering with Summa Cum Laude predicate from the Technische Universität München* • *1987 February: Awarded Dipl.-Ing. Degree in Aeronautical Engineering with Cum Laude predicate from the Technische Universität München* • *Doktorarbeit (PhD. Thesis) "Finite Volume Numerical Simulation of Longitudinally Oscillating Airfoils Using Euler Equations"*

Ilham A. Habibie

Komisaris Utama/Komisaris Independen
President Commissioner/Independent Commissioner

	• *1981-1987: Technische Universität München, Diplomarbeit (Master Thesis) "Design of 100 Seater Regional Jet"* • *1973-1981: Hochrad Gymnasium, Hamburg, Germany* • *1969-1973: Grundschule Windmühlenweg, Hamburg, Germany*
Riwayat Pekerjaan *Professional Careers*	• 2018-present: PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, President Commissioner/Independent Commissioner • 2015: PT Orbit Ventura Indonesia, Founder & Chairman • 2013: PT Inter Media Capital Tbk (publicly listed media company), Independent Commissioner • 2012: PT Industri Mineral Indonesia - Chairman • 2011: PT Malacca Trust Wuwungan Insurance - Commissioner • 2011: PT Ilthabi Digital Edukasi - Chairman • *2018-present: PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, President Commissioner/Independent Commissioner* • *2015: PT Orbit Ventura Indonesia, Founder & Chairman* • *2013: PT Inter Media Capital Tbk (publicly listed media company), Independent Commissioner* • *2012: PT Industri Mineral Indonesia - Chairman* • *2011: PT Malacca Trust Wuwungan Insurance - Commissioner* • *2011: PT Ilthabi Digital Edukasi - Chairman*
Rangkap Jabatan *Concurrent Position*	Nihil *Nil*
Kepemilikan Saham Perusahaan *Company Share Ownership*	Nihil *Nil*
Pendidikan dan Pelatihan 2019 *Education and Training in 2019*	• Keynote Speaker at Indonesia Economic Forum: Towards A $7 Trillion Economy: Opportunities & Challenges, 20 November 2019 • Narasumber dalam Silaturahmi Kerja Nasional ICMI dan Pertemuan Cendekiawan Muslim Se-Asia Tenggara, ICMI, 6 - 8 Desember 2019 • *Keynote Speaker at Silaturahmi Kerja Nasional ICMI and a gathering of Muslim scholars throughout Southeats Asia, ICMI, December 6-8, 2019* • *Speaker for La Nuit des Idees 2019 – Face au Présent, Institut Francais Indonesia, 31 January 2019*
Hubungan Afiliasi *Affiliation*	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dalam hal hubungan keuangan maupun kekeluargaan dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pemegang Saham Utama maupun Pemegang Saham Pengendali *Has no affiliation in terms of both financial and family relations with members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors and Major Shareholders or Controlling Shareholders*
Pernyataan Independensi *Independence Statement*	Belum menjabat lebih dari 2 (dua) periode sebagai Komisaris Independen *Has not served more than 2 (two) terms as an Independent Commissioner*



Usia *Age*	42 tahun *42 years old*
Kewarganegaraan *Citizenship*	Indonesia
Domisili *Domicile*	Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan Pertama *First Legal Basis of Appointment*	Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 23 Juni 2014 dan mendapatkan keputusan efektif dari OJK tanggal 25 November 2014 *Annual General Meeting of Shareholders dated June 23, 2014 and obtained effective decision from OJK on November 25, 2014*
Dasar Hukum Pengangkatan Terakhir *Last Legal Basis of Appointment*	Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tanggal 17 Mei 2019 dan Surat Keputusan Kemenkumham No. AHU-AH.01.03-0283340 Tanggal 28 Mei 2019 *Annual General Meeting of Shareholders on May 17, 2019 and Decree of the Ministry of Law and Human Rights No. AHU-AH.01.03-0283340 dated May 28, 2019*
Periode Jabatan *Position Period*	Ke-2 (kedua) *Second*
Riwayat Pendidikan *Educational Background*	• Sarjana dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Jurusan Manajemen Konsentrasi Keuangan sebagai lulusan terbaik dengan predikat Cum Laude • Global Leadership Executive MBA di SBM ITB dan Aalto University, Finlandia • Bachelor of Economics from the University of Indonesia, Department of Management, Concentration of Finance as the best graduate with Cum Laude • Global Leadership Executive MBA at SBM ITB and Aalto University, Finland • *Bachelor of Economics from University of Indonesia, Department of Management, Majoring in Finance as the best graduate with Cum Laude* • *Global Leadership Executive MBA from SBM ITB and Aalto University, Finland* • *Bachelor of Economics from University of Indonesia, Department of Management, Majoring in Finance with Cum Laude* • *Global Leadership Executive MBA at SBM ITB and Aalto University, Finland*

Iggi Haruman Achsien

Komisaris Independen
Independent Commissioner

Riwayat Pekerjaan *Professional Careers*	• 2014-present: PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, Komisaris Independen • 2013: PT JAMKRIDA Jabar, Komisaris • 2014-2017: OJK – Tim Kerja Komite Pengembangan Jasa Keuangan Syariah, Anggota Investment Banking • 2011-2014: Bank Syariah Mandiri, Tenaga Ahli • 2012-2012: AJB Bumiputera 1912, Komisaris Independen • 2010-2011: PT Insight Investment Management, Komisaris • *2014-present: PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, Independent Commissioner* • *2013: PT JAMKRIDA Jabar, Commissioner* • *2014-2017: OJK - Working Team of Sharia Financial Services Development Committee, Member of Investment Banking* • *2011-2014: Bank Syariah Mandiri, Expert Staff* • *2012-2012: AJB Bumiputera 1912, Independent Commissioner* • *2010-2011: PT Insight Investment Management, Commissioner*
Rangkap Jabatan *Concurrent Position*	Nihil *Nil*
Kepemilikan Saham Perusahaan *Company Share Ownership*	Nihil *Nil*
Pendidikan dan Pelatihan 2019 *Education and Training in 2019*	• Risk Govermance Master Class di Manila oleh CRMS Global pada 18 Oktober 2019 • Workshop Pra-Ijtima'Sanawi Dewan Pengawas Syariah (DPS) Tahun 2019 Bidang Pasar Modal Syariah, Dewan Syariah Nasional, 18 September 2019 • *Risk Governance Master Class in Manila by CRMS Global on October 18, 2019* • *Sharia Supervisory Board (DPS) 2019 Pre-Ijtima'Sanawi Workshop of Sharia Capital Market, National Sharia Board, 18 September 2019*
Hubungan Afiliasi *Affiliation*	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dalam hal hubungan keuangan maupun kekeluargaan dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pemegang Saham Utama maupun Pemegang Saham Pengendali *Has no affiliation in terms of both financial and family relations with members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors and Major Shareholders or Controlling Shareholders*



Usia *Age*	62 tahun *62 years old*
Kewarganegaraan *Citizenship*	Indonesia
Domisili *Domicile*	Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan Pertama *First Legal Basis of Appointment*	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 20 September 2017 dan mendapatkan keputusan efektif dari OJK tanggal 2 Maret 2018 *Annual General Meeting of Shareholders dated September 20, 2017 and obtained effective decision from OJK on March 2, 2018*
Dasar Hukum Pengangkatan Terakhir *Last Legal Basis of Appointment*	Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tanggal 17 Mei 2019 dan Surat Keputusan Kemenkumham No. AHU-AH.01.03-0283340 Tanggal 28 Mei 2019 *Annual General Meeting of Shareholders on May 17, 2019 and Decree of the Ministry of Law and Human Rights No. AHU-AH.01.03-0283340 dated May 28, 2019*
Periode Jabatan *Position Period*	Ke-2 (kedua) *Second*
Riwayat Pendidikan *Educational Background*	• Sarjana Fakultas Peternakan Universitas Padjajaran, Bandung (tahun 1981) • Master of Agriculture Economics dari Universitas Ohio dan lulus pada tahun 1991 • *Bachelor of Animal, Faculty of Husbandry from Padjadjaran University, Bandung (1981)* • *Master of Agriculture Economics from University of Ohio in 1991*
Riwayat Pekerjaan *Professional Careers*	• 1997-2000: Perwakilan Bank Indonesia yang berada di Tokyo, Jepang • 2000-2001: Analis Eksekutif di bidang Human Resources Bank Indonesia • 2001-2002: Kepala Divisi Human Resources Bank Indonesia • 2002-2004: Executive Human Resources Officer Bank Indonesia • 2004 : Direktur Syariah Banking • 2007-2010: Direktur Human Resource • 2010-2012: Direktur Credit, Rural Bank dan SME • 2012-2013: Direktur Eksekutif Syariah Banking Bank Indonesia • Januari 2014-April 2015: Head of Syariah Banking di OJK • 2015-2017: Deputi Komisioner Industri Keuangan Non Bank OJK • *1997-2000: Bank Indonesia Representative in Tokyo, Japan* • *2000-2001: Executive Analyst in the field of Human Resources at Bank Indonesia* • *2001-2002: Head of Bank Indonesia's Human Resources Division* • *2002-2004: Bank Indonesia Executive Human Resources Officer* • *2004 : Director of Syariah Banking* • *2007-2010: Human Resource Director* • *2010-2012: Credit Director, Rural Bank and SME* • *2012-2013: Executive Director of Bank Indonesia Syariah Banking* • *January 2014-April 2015: Head of Syariah Banking at OJK* • *2015-2017: Deputy Commissioner of the FSA Non-Bank Financial Industry*

Edy Setiadi

Komisaris Independen
Independent Commissioner

Rangkap Jabatan *Concurrent Position*	Nihil *Nil*
Kepemilikan Saham Perusahaan *Company Share Ownership*	Nihil *Nil*
Pendidikan dan Pelatihan 2019 *Education and Training in 2019*	• Pembicara dalam Seminar Ekonomi Syariah "Mari Berekonomi Syari'ah Agar Hidup Lebih Berkah", Masyarakat Ekonomi Syariah, Kuala Lumpur 21 September 2019 • Pembicara dalam Seminar Sehari "Prospek Bisnis IKNB 2019 - Peluang dan Risiko di Tahun Menantang", Majalah Stabilitas, Jakarta 12 Maret 2019 • Pembicara dalam Kuliah Umum "Prospektif Industri Perbankan Syariah Tahun 2020", Indonesia Banking School, 6 Desember 2019 • Pembicara dalam Indonesia Financial Sector Outlook 2020 Öpportunities and Challenges amid Softening Global Economy 2020: Strenghtening Risk Mitigation in Non Banking Industry", LPPI, 28 November 2019 • *Speaker at Sharia Economy Seminar "Mari Berekonomi Syari'ah Agar Hidup Lebih Berkah", Sharia Economic Community, Kuala Lumpur on 21 September 2019* • *Speaker at One-Day Seminar "2019 IKNB Business Prospects - Opportunities and Risks in a Challenging Year", Stability Magazine, Jakarta on 12 March 2019* • *Speaker at Public Lecture "Prospective Sharia Banking Industry in 2020", Indonesia Banking School, 6 December 2019* • *Speaker at Indonesia Financial Sector Outlook 2020 Opportunities and Challenges amid Softening Global Economy 2020: Strengthening Risk Mitigation in Non Banking Industry ", LPPI, 28 November 2019*
Hubungan Afiliasi *Affiliation*	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dalam hal hubungan keuangan maupun kekeluargaan dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pemegang Saham Utama maupun Pemegang Saham Pengendali *Has no affiliation in terms of both financial and family relations with members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors and Major Shareholders or Controlling Shareholders*
Pernyataan Independensi *Independence Statement*	Belum menjabat lebih dari 2 (dua) periode sebagai Komisaris Independen *Has not served more than 2 (two) terms as an Independent Commissioner*



Usia *Age*	50 tahun *50 years old*
Kewarganegaraan *Citizenship*	Perancis *French*
Domisili *Domicile*	Saudi Arabia *Saudi Arabia*
Dasar Hukum Pengangkatan Pertama *First Legal Basis of Appointment*	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 20 September 2017 dan dan saat ini sedang dalam proses akhir Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK *Annual General Meeting of Shareholders dated September 20, 2017 and currently in the process of finishing the Fit and Proper Test from FSA*
Dasar Hukum Pengangkatan Terakhir *Last Legal Basis of Appointment*	Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 17 Mei 2019 dan saat ini sedang dalam proses akhir Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK *Annual General Meeting of Shareholders dated May 17, 2019 and currently in the process of finishing the Fit and Proper Test from FSA*
Periode Jabatan *Position Period*	Ke-2 (kedua) *Second*
Riwayat Pendidikan *Educational Background*	• Private Equity and Venture Capital dari Harvard Business School, AS • IDB-Management Development Program di London Business School, Inggris • Master's untuk Development Studies (Development Economics International Law) dari SOAS, University of London, Inggris • MBA dari EDHEC, Prancis • *Private Equity and Venture Capital from Harvard Business School, USA* • *IDB-Management Development Program at London Business School, England* • *Master's for Development Studies (Development Economics International Law) from SOAS, University of London, UK* • *MBA from EDHEC, France*

Mohamed Hedi Mejai

Komisaris
Commissioner

Riwayat Pekerjaan *Professional Careers*	• 2017-present: PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, Commissioner • 2011: Islamic Development Bank, Director of the Investments Department • 2010-2011: Oryx Capital Ltd, Chief Executive Officer & Board Member • 2005-2010: International Investment Bank, Executive Director, Investment & Business Development • *2017-present: PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, Commissioner* • *2011: Islamic Development Bank, Director of the Investment Department* • *2010-2011: Oryx Capital Ltd, Chief Executive Officer & Board Member* • *2005-2010: International Investment Bank, Executive Director, Investment & Business Development*
Rangkap Jabatan *Concurrent Position*	Rangkap jabatan tidak bertentangan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahan Publik *Concurrent positions not conflicting with the Financial Services Authority Regulation No. 33/ POJK.04/2014 concerning Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies*
Kepemilikan Saham Perusahaan *Company Share Ownership*	Mewakili kepemilikan saham dari Islamic Development Bank sebesar 32,74% *Represents share ownership of Islamic Development Bank of 32.74%*
Pendidikan dan Pelatihan 2019 *Education and Training in 2019*	• Speaker in Organization of Islamic Cooperation (OIC) Public Private Investment Forum, Istanbul, Turki, 9 - 10 Desember 2019 • Speaker in Islamic Development Bank (IsDB) PPP Forum, Rabat, Maroko, 10 Maret 2019 In-house Training Workshops: • World Bank Ramp Program - External Fund Managers selection and performance monitoring • Islamic Development Bank - Mercer Pension Awareness and Planning • Islamic Development Ban - Franklin Templeton Strategic Asset Allocation
Hubungan Afiliasi *Affiliation*	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan anggota Direksi, namun beliau memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali. *Has no affiliation with other members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, however he has an affiliation with the Majority Shareholder or Controlling Shareholders.*



Usia *Age*	53 tahun *53 years old*
Kewarganegaraan *Citizenship*	Kuwait
Domisili *Domicile*	Saudi Arabia *Saudi Arabia*
Dasar Hukum Pengangkatan Pertama *First Legal Basis of Appointment*	Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk tanggal 30 Maret 2017 dan efektif setelah lulus Uji Kemampuan dan Kepatuhan dari OJK *Annual General Meeting of Shareholders of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dated March 30, 2017 and effective after passing the FSA Fit and Proper test*
Dasar Hukum Pengangkatan Terakhir *Last Legal Basis of Appointment*	Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 17 Mei 2019 dan dan saat ini sedang dalam proses akhir Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK *Annual General Meeting of Shareholders dated May 17, 2019 and currently in the process of finishing the Fit and Proper Test from FSA*
Periode Jabatan *Position Period*	Ke-2 (kedua) *Second*
Riwayat Pendidikan *Educational Background*	Sarjana di bidang Administrasi Bisnis (Business Administration) Jurusan Keuangan (Finance) dari Kuwait University (1987) *Bachelor in Business Administration (Business Administration) Department of Finance (Finance) from Kuwait University (1987)*

Abdulsalam Mohammad Joher Al-Saleh

Komisaris
Commissioner

Riwayat Pekerjaan *Professional Careers*	• 2017-present: PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, Commissioner • 2014: United Capital Bank (Sudan, Khartoum), Board member • 2013: Boubyan Capital (Subsidiary of Boubyan Bank), Vice Chairman • 2013: Boubyan Takaful Insurance (Subsidiary of Boubyan Bank), Board Member • 2012-present: Boubyan Bank, Deputy Chief Executive Officer • *2017-present: PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, Commissioner* • *2014: United Capital Bank (Sudan, Khartoum), Board member* • *2013: Boubyan Capital (Subsidiary of Boubyan Bank), Vice Chairman* • *2013: Boubyan Takaful Insurance (Subsidiary of Boubyan Bank), Board Member* • *2012-present: Boubyan Bank, Deputy Chief Executive Officer*
Rangkap Jabatan *Concurrent Position*	Deputy Chief Executive Officer untuk Corporate Banking & Treasury Group, Financial Control & Legal Affairs pada Boubyan Bank sejak 2012 *Deputy Chief Executive Officer for Corporate Banking & Treasury Group, Financial Control & Legal Affairs at Boubyan Bank since 2012*
Kepemilikan Saham Perusahaan *Company Share Ownership*	Mewakili kepemilikan saham dari Boubyan Bank sebesar 22% *Represents share ownership of Boubyan Bank of 22%*
Pendidikan dan Pelatihan 2019 *Education and Training in 2019*	Nihil *Nil*
Hubungan Afiliasi *Affiliation*	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan anggota Direksi, namun beliau memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali. *Has no affiliation with other members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, however he has an affiliation with the Majority Shareholder or Controlling Shareholders.*

Profil Direksi
Board of Directors Profile



Usia *Age*	54 tahun *54 years old*
Kewarganegaraan *Citizenship*	Indonesia
Domisili *Domicile*	Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan Pertama *First Legal Basis of Appointment*	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 20 September 2017 dan mendapatkan keputusan efektif dari OJK tanggal 27 Februari 2018 *Annual General Meeting of Shareholders dated September 20, 2017 and obtained effective decisions from FSA on February 27, 2018*
Dasar Hukum Pengangkatan Terakhir *Last Legal Basis of Appointment*	Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tanggal 17 Mei 2019 dan Surat Keputusan Kemenkumham No. AHU-AH.01.03-0283340 Tanggal 28 Mei 2019 *Annual General Meeting of Shareholders on May 17, 2019 and Decree of the Ministry of Law and Human Rights No. AHU-AH.01.03-0283340 dated May 28, 2019*
Periode Jabatan *Position Period*	Ke-2 (kedua) *Second*
Riwayat Pendidikan *Educational Background*	Sarjana Pertanian, Institut Pertanian Bogor tahun 1989 *Bachelor of Agriculture, Bogor Agricultural University in 1989*

Achmad K. Permana

Direktur Utama
President Director

Riwayat Pekerjaan *Professional Careers*	• 1993-2000: Chief General Manager area Bali di Bank Bali • 2000-2005: Vice President di The Hongkong and Shanghai Bank Corporation (HSBC) • 2000-2001: Vice President Jakarta area • 2001-2002: Vice President Produk • 2002-2005: Vice President Kartu dan Produk Aset • 2006: Head of Amanah Retail Banking HSBC • 2006-2009: Executive Vice President dan Head of Syariah Business di Bank Danamon • 2009-2013: Executive Vice President dan Head of Syariah Business di Bank Permata • 2014-2017: Direktur Syariah Banking di Bank Permata • *1993-2000: Chief General Manager Bali area at Bank Bali* • *2000-2005: Vice President at The Hongkong and Shanghai Bank Corporation (HSBC)* • *2000-2001: Jakarta Vice President* • *2001-2002: Product Vice President* • *2002-2005: Vice President of Cards and Asset Products* • *2006: Head of HSBC Retail Banking Amanah* • *2006-2009: Executive Vice President and Head of Syariah Business at Bank Danamon* • *2009-2013: Executive Vice President and Head of Syariah Business at Bank Permata* • *2014-2017: Director of Syariah Banking at Bank Permata*
Rangkap Jabatan *Concurrent Position*	Nihil *Nil*
Kepemilikan Saham Perusahaan *Company Share Ownership*	Nihil *Nil*
Pendidikan dan Pelatihan 2019 *Education and Training in 2019*	• Leadership Alignment Preparation Training di Jakarta oleh ICLIF pada 23 Januari 2019 • Risk Govermance Master Class di Singapore oleh CRMS Global pada 29 Agustus 2019 • GRIT Forces to Leap Bank Muamalat di Bandung oleh Muamalat Institute pada 21 November 2019 • *Leadership Alignment Preparation Training in Jakarta by ICLIF on January 23, 2019* • *Risk Govermance Master Class in Singapore by CRMS Global on August 29, 2019* • *GRIT Forces to Leap Bank Muamalat in Bandung by Muamalat Institute on November 21, 2019*
Hubungan Afiliasi *Affiliation*	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dalam hal hubungan keuangan maupun kekeluargaan dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Utama maupun Pemegang Saham Pengendali *Has no affiliation in terms of both financial and family relations with members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors and Major Shareholders or Controlling Shareholders*



Usia *Age*	50 tahun *50 years old*
Kewarganegaraan *Citizenship*	Indonesia
Domisili *Domicile*	Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan Pertama *First Legal Basis of Appointment*	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 7 September 2015 dan mendapatkan keputusan efektif dari OJK tanggal 21 Maret 2016 *Extraordinary General Meeting of Shareholders dated September 7, 2015 and obtained effective decision from FSA on March 21, 2016*
Dasar Hukum Pengangkatan Terakhir *Last Legal Basis of Appointment*	Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tanggal 17 Mei 2019 dan Surat Keputusan Kemenkumham No. AHU-AH.01.03-0283340 Tanggal 28 Mei 2019 *Annual General Meeting of Shareholders on May 17, 2019 and Decree of the Ministry of Law and Human Rights No. AHU-AH.01.03-0283340 dated May 28, 2019*
Periode Jabatan *Position Period*	Ke-2 (kedua) *Second*
Riwayat Pendidikan *Educational Background*	Sarjana Akuntansi dari Universitas Indonesia *Bachelor of Accounting from University of Indonesia*

Hery Syafril

Direktur Keuangan
Finance Director

Riwayat Pekerjaan *Professional Careers*	• 1993-2003: Akuntan Publik - Ernst & Young • 2003-2009: Chief Financial Officer & Legal Entity Controller - JP Morgan Indonesia (JP Morgan Chase Bank Jakarta Branch & PT JP Morgan Securities Indonesia) • 2009-2012: Controller - PT Bank Rabobank International Indonesia • 2012-2015: CFO & Finance Director di PT Bank QNB Indonesia Tbk • *1993-2003: Public Accountant - Ernst & Young* • *2003-2009: Chief Financial Officer & Legal Entity Controller - JP Morgan Indonesia (JP Morgan Chase Bank Jakarta Branch & PT JP Morgan Securities Indonesia)* • *2009-2012: Controller - PT Bank Rabobank International Indonesia* • *2012-2015: CFO & Finance Director at PT Bank QNB Indonesia Tbk*
Rangkap Jabatan *Concurrent Position*	Nihil *Nil*
Kepemilikan Saham Perusahaan *Company Share Ownership*	Nihil *Nil*
Pendidikan dan Pelatihan 2019 *Education and Training in 2019*	• Leadership Alignment Preparation Training di Jakarta oleh ICLIF pada 23 Januari 2019 • GRIT Forces to Leap Bank Muamalat di Bandung oleh Muamalat Institute pada 21 November 2019 • *Leadership Alignment Preparation Training in Jakarta by ICLIF on January 23, 2019* • *GRIT Forces to Leap Bank Muamalat in Bandung by Muamalat Institute on November 21, 2019*
Hubungan Afiliasi *Affiliation*	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dalam hal hubungan keuangan maupun kekeluargaan dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Utama maupun Pemegang Saham Pengendali *He has no affiliation in terms of both financial and family relations with members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors and Major Shareholders or Controlling Shareholders*



Usia *Age*	51 tahun *51 years old*
Kewarganegaraan *Citizenship*	Indonesia
Domisili *Domicile*	Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan Pertama *First Legal Basis of Appointment*	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 7 September 2015 dan mendapatkan keputusan efektif dari OJK tanggal 21 Maret 2016 *Extraordinary General Meeting of Shareholders dated September 7, 2015 and obtained effective decision from FSA on March 21, 2016*
Dasar Hukum Pengangkatan Terakhir *Last Legal Basis of Appointment*	Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tanggal 17 Mei 2019 dan Surat Keputusan Kemenkumham No. AHU-AH.01.03-0283340 Tanggal 28 Mei 2019 *Annual General Meeting of Shareholders on May 17, 2019 and Decree of the Ministry of Law and Human Rights No. AHU-AH.01.03-0283340 dated May 28, 2019*
Periode Jabatan *Position Period*	Ke-2 (kedua) *Second*
Riwayat Pendidikan *Educational Background*	• Doktor Ilmu Ekonomi dari Universitas Padjajaran pada tahun 2012 • Universitas Padjajaran, Komunikasi Bisnis pada tahun 2006 • *Doctor of Economics from Padjadjaran University in 2012* • *Business Communication from Padjadjaran University in 2006*

Purnomo Budiwibowo Soetadi

Direktur Bisnis Ritel
Retail Banking Director

Riwayat Pekerjaan *Professional Careers*	• 2002: Assistant Vice President - Branch Manager Standard Chartered Bank, Medan Branch • 2003-2004: Vice President - Regional Head Standard Chartered Bank, Jakarta Region • 2005-2008: Senior Vice President - Pemimpin Wilayah Regional II Jawa Barat, Bank Danamon • 2009-2011: Senior Vice President - Pemimpin Divisi Retail Banking Network Distribution, Bank Danamon • 2011-2015: Executive Vice President bertanggung jawab dan melakukan supervisi pada Divisi Change Management Office, Divisi Customer Management & Marketing dan Divisi Product Management Consumer Banking, Bank Negara Indonesia • 2015-present: PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, Retail Business Director • *2002: Assistant Vice President - Branch Manager of Standard Chartered Bank, Medan Branch* • *2003-2004: Vice President - Regional Head of Standard Chartered Bank, Jakarta Region* • *2005-2008: Senior Vice President - Leader of Regional II West Java, Bank Danamon* • *2009-2011: Senior Vice President - Head of the Retail Banking Network Distribution Division, Bank Danamon* • *2011-2015: Executive Vice President with responsibility for supervising the Change Management Office Division, Customer Management & Marketing Division and Product Management Consumer Banking Division, Bank Negara Indonesia* • *2015-present: PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, Retail Banking Director*
Rangkap Jabatan *Concurrent Position*	Rangkap jabatan tidak bertentangan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahan Publik *Concurrent positions not conflicting with the Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 concerning Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies*
Kepemilikan Saham Perusahaan *Company Share Ownership*	Nihil *Nil*
Pendidikan dan Pelatihan 2019 *Education and Training in 2019*	• Leadership Alignment Preparation Training di Jakarta oleh ICLIF pada 23 Januari 2019 • Refeshment RMC ("How do Bank Manage Liquidity Risk") di Jakarta oleh LSPP pada 23 Juli 2019 • GRIT Forces to Leap Bank Muamalat Indonesia di Bandung oleh Muamalat Institute pada 21 November 2019 • *Leadership Alignment Preparation Training in Jakarta by ICLIF on January 23, 2019* • *RMC Refeshment ("How do Bank Manage Liquidity Risk") in Jakarta by LSPP on July 23, 2019* • *GRIT Forces to Leap Bank Muamalat Indonesia in Bandung by Muamalat Institute on November 21, 2019*
Hubungan Afiliasi *Affiliation*	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dalam hal hubungan keuangan maupun kekeluargaan dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Utama maupun Pemegang Saham Pengendali *He has no affiliation in terms of both financial and family relations with members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors and Major Shareholders or Controlling Shareholders*



Usia *Age*	53 tahun *53 years old*
Kewarganegaraan *Citizenship*	Indonesia
Domisili *Domicile*	Tangerang Selatan *South Tangerang*
Dasar Hukum Pengangkatan Pertama *First Legal Basis of Appointment*	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 23 Mei 2016 dan mendapatkan keputusan efektif dari OJK tanggal 24 Maret 2017 *Extraordinary General Meeting of Shareholders dated May 23, 2016 and obtained effective decision from FSA on March 24, 2017*
Dasar Hukum Pengangkatan Terakhir *Last Legal Basis of Appointment*	Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tanggal 17 Mei 2019 dan Surat Keputusan Kemenkumham No. AHU-AH.01.03-0283340 Tanggal 28 Mei 2019 *Annual General Meeting of Shareholders on May 17, 2019 and Decree of the Ministry of Law and Human Rights No. AHU-AH.01.03-0283340 dated May 28, 2019*
Periode Jabatan *Position Period*	Ke-2 (kedua) *Second*
Riwayat Pendidikan *Educational Background*	• Sarjana dari Fakultas Psikologi UGM (Unversitas Gadjah Mada) Yogyakarta pada tahun 1990 • Magister Manajemen/MBA dari IPMI Jakarta dan Monash University pada tahun 1997 • *Bachelor of Psychology from UGM (Gadjah Mada University) Yogyakarta in 1990* • *Master of Management/MBA from IPMI Jakarta and Monash University in 1997*

Awaldi

Direktur Operasi
Operation Director

Riwayat Pekerjaan *Professional Careers*	• 2000-2008: Head of HR - Bank Niaga • 2008-2009: Director of Commerce Leadership Institute - CIMB • 2010-2011: Head of HR & HR Project Manager for Business Transformation – Bank Ekonomi HSBC Group • 2012-2015: Director of Towers Watson Indonesia • 2015-present: PT Bank Muamalat Indonesia, Director • *2000-2008: Head of HR - Bank Niaga* • *2008-2009: Director of Commerce Leadership Institute - CIMB* • *2010-2011: Head Manager of HR & HR Project for Business Transformation – Bank Ekonomi HSBC Group* • *2012-2015: Director of Towers Watson Indonesia* • *2015-present: PT Bank Muamalat Indonesia, Director*
Rangkap Jabatan *Concurrent Position*	Nihil *Nil*
Kepemilikan Saham Perusahaan *Company Share Ownership*	Nihil *Nil*
Pendidikan dan Pelatihan 2019 *Education and Training in 2019*	• Leadership Alignment Preparation Training di Jakarta oleh ICLIF pada 23 Januari 2019 • Certified Professional Coach Program Phase 3 di Jakarta oleh LOOP Institute of Coaching pada 15 Januari 2019 • Community Service di Jakarta oleh LOOP Institute of Coaching pada 16 Februari 2019 • Certified Professional Coach Program Phase 4 di Jakarta oleh LOOP Institute of Coaching pada 15 April 2019 • GRIT Forces to Leap Bank Muamalat di Bandung oleh Muamalat Institute pada 21 November 2019 • *Leadership Alignment Preparation Training in Jakarta by ICLIF on January 23, 2019* • *Certified Professional Coach Program Phase 3 in Jakarta by the LOOP Institute of Coaching on January 15, 2019* • *Community Service in Jakarta by the LOOP Institute of Coaching on February 16, 2019* • *Certified Professional Coach Program Phase 4 in Jakarta by the LOOP Institute of Coaching on April 15, 2019* • *GRIT Forces to Leap Bank Muamalat in Bandung by Muamalat Institute on November 21, 2019*
Hubungan Afiliasi *Affiliation*	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dalam hal hubungan keuangan maupun kekeluargaan dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Utama maupun Pemegang Saham Pengendali *He has no affiliation in terms of both financial and family relations with members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors and Major Shareholders or Controlling Shareholders*



Usia *Age*	48 tahun *48 years old*
Kewarganegaraan *Citizenship*	Indonesia
Domisili *Domicile*	Bekasi
Dasar Hukum Pengangkatan Pertama *First Legal Basis of Appointment*	Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 29 Juni 2016 dan telah mendapatkan keputusan efektif dari OJK tanggal 27 Juni 2016 *Annual General Meeting of Shareholders dated June 29, 2016 and obtained effective decision from FSA on June 27, 2016*
Dasar Hukum Pengangkatan Terakhir *Last Legal Basis of Appointment*	Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tanggal 17 Mei 2019 dan Surat Keputusan Kemenkumham No. AHU-AH.01.03-0283340 Tanggal 28 Mei 2019 *Annual General Meeting of Shareholders on May 17, 2019 and Decree of the Ministry of Law and Human Rights No. AHU-AH.01.03-0283340 dated May 28, 2019*
Periode Jabatan *Position Period*	Ke-2 (kedua) *Second*
Riwayat Pendidikan *Educational Background*	Sarjana Geofisika dan Metereologi dari Institut Teknologi Bandung *Bachelor of Geophysics and Meteorology from the Bandung Institute of Technology*

Andri Donny

Direktur Kepatuhan
Compliance Director

Riwayat Pekerjaan *Professional Careers*	Sejak tahun 1997 telah menduduki berbagai posisi di Bank Muamalat Indonesia Branch Manager, Product Development, Treasury, Assistant Director Corporate Planning, Pelaksana Harian Corporate Secretary, Head of Corporate Planning Division, Pelaksana Tugas Head of Risk Management Division, Head of Finance & Strategy Division, Head of Strategic Change Management Division, Head of Strategic Planning Division *Holding various positions at Bank Muamalat Indonesia since 1997* *Branch Manager, Product Development, Treasury, Assistant Director of Corporate Planning, Daily Acting Corporate Secretary, Head of Corporate Planning Division, Acting Head of Risk Management Division, Head of Finance & Strategy Division, Head of Strategic Change Management Division, Head of Strategic Planning Division*
Rangkap Jabatan *Concurrent Position*	Nihil *Nil*
Kepemilikan Saham Perusahaan *Company Share Ownership*	15.415 lembar dengan presentase 0,0001510% *15,415 sheets with a percentage of 0.0001510%*
Pendidikan dan Pelatihan 2019 *Education and Training in 2019*	• Creative Learning M@16 : Peranan Bank dalam Rezim APU&PPT di Jakarta oleh Bank Muamalat Indonesia pada 11 September 2019 • Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) • GRIT Forces to Leap Bank Muamalat di Bandung oleh Muamalat Institute pada 21 November 2019 • *Creative Learning M @ 16: The Role of Banks in the APU & PPT Regime in Jakarta by Bank Muamalat Indonesia on September 11, 2019* • *Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK)* • *GRIT Forces to Leap Bank Muamalat in Bandung by Muamalat Institute on November 21, 2019*
Hubungan Afiliasi *Affiliation*	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dalam hal hubungan keuangan maupun kekeluargaan dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Utama maupun Pemegang Saham Pengendali *He has no affiliation in terms of both financial and family relations with members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors and Major Shareholders or Controlling Shareholders*



Usia *Age*	49 tahun *49 years old*
Kewarganegaraan *Citizenship*	Indonesia
Domisili *Domicile*	Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan Pertama *First Legal Basis of Appointment*	Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 17 Mei 2019 dan telah mendapatkan keputusan efektif dari OJK tanggal 13 Januari 2020. *Annual General Meeting of Shareholders dated May 17, 2019 and obtained effective decision from FSA on January 13, 2020*
Dasar Hukum Pengangkatan Terakhir *Last Legal Basis of Appointment*	Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 17 Mei 2019 dan telah mendapatkan keputusan efektif dari OJK tanggal 13 Januari 2020 *Annual General Meeting of Shareholders dated May 17, 2019 and obtained effective decisions from FSA on January 13, 2020*
Periode Jabatan *Position Period*	Ke-1 (kesatu) *First*
Riwayat Pendidikan *Educational Background*	• Sarjana Akuntansi dari Universitas Indonesia tahun 1995 • Magister Manajemen jurusan Manajemen Risiko dari Universitas Indonesia tahun 2006 • *Bachelor of Accounting from the University of Indonesia in 1995* • *Master of Management majoring in Risk Management from the University of Indonesia in 2006*

Avianto

Direktur Risiko
Risk Director

Riwayat Pekerjaan *Professional Careers*	• Manajerial senior pada beberapa Bank seperti PT Bank OCBC NISP Tbk, Citibank NA, PT Bank Ekonomi Raharja Tbk (Member HSBC Group) • Executive Director di Corporate Credit Group di DBS Bank Singapore • *Holding senior managerial positions at several banks such as PT Bank OCBC NISP Tbk, Citibank NA, PT Bank Ekonomi Raharja Tbk (HSBC Group Member)* • *Executive Director at Corporate Credit Group at DBS Bank Singapore*
Rangkap Jabatan *Concurrent Position*	Nihil *Nil*
Kepemilikan Saham Perusahaan *Company Share Ownership*	Nihil *Nil*
Pendidikan dan Pelatihan 2019 *Education and Training in 2019*	• Leadership Alignment Preparation Training di Jakarta oleh ICLIF pada 23 Januari 2019 • GRIT Forces to Leap Bank Muamalat di Bandung oleh Muamalat Institute pada 21 November 2019 • *Leadership Alignment Preparation Training in Jakarta by ICLIF on January 23, 2019* • *GRIT Forces to Leap Bank Muamalat in Bandung by Muamalat Institute on November 21, 2019*
Hubungan Afiliasi *Affiliation*	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dalam hal hubungan keuangan maupun kekeluargaan dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas Syariah dan Pemegang Saham dan Pengendali *He has no affiliation in terms of both financial and family relations with members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors and Major Shareholders or Controlling Shareholders*





Pejabat Eksekutif Senior
Senior Management Executives



Usia *Age*	46 tahun *46 years old*
Domisili *Domicile*	Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan *Last Legal Basis of Appointment*	Surat Keputusan Direksi No. 0018/HCE/TAP/LMP/ II/2019 tanggal 19 Februari 2019 *Decree of Directors No. 0018/HCE/TAP/LMP/III/2019 dated February 19, 2019*
Riwayat Pendidikan *Educational Background*	Sarjana dari Universitas Airlangga, Jurusan Keuangan tahun 1995 dengan predikat Cum Laude *Bachelor from Airlangga University, Majoring in Finance in 1995 with Cum Laude*

Irvan Yulian Noor

Chief Corporate Banking Officer

Chief Corporate Banking Officer

Riwayat Pekerjaan *Professional Careers*	• Assistant Managerial Commercial Banking di PT Bank Niaga Tbk • Posisi manajerial beberapa Bank seperti PT Bank Mandiri Tbk, Citibank NA, PT Bank ICBC Indonesia Tbk, PT Bank ANZ Indonesia • Executive Director dan Country Head di Standard Chartered Bank Indonesia • *Assistant Managerial Commercial Banking at PT Bank Niaga Tbk* • *Managerial positions at several banks such as PT Bank Mandiri Tbk, Citibank NA, PT Bank ICBC Indonesia Tbk, PT Bank ANZ Indonesia* • *Executive Director and Country Head at Standard Chartered Bank Indonesia*
Pendidikan dan Pelatihan 2019 *Education and Training in 2019*	• Leadership Alignment Preparation Training di Jakarta oleh ICLIF pada 23 Januari 2019 • GRIT Forces to Leap Bank Muamalat Indonesia di Bandung oleh Muamalat Institute pada 21 November 2019 • *Leadership Alignment Preparation Training in Jakarta by ICLIF on January 23, 2019* • *GRIT Forces to Leap Bank Muamalat Indonesia in Bandung by Muamalat Institute on November 21, 2019*



Usia *Age*	48 tahun *48 years old*
Domisili *Domicile*	Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan *Last Legal Basis of Appointment*	Surat Keputusan Direksi No. 025/DIR-KPTS/VIII/2018 tanggal 9 Agustus 2018 *Decree of Directors No. 025/DIR-KPTS/VIII/2018 dated August 9, 2018*
Riwayat Pendidikan *Educational Background*	Sarjana Jurusan Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran, tahun 1995 *Bachelor of International Relations Department, Padjadjaran University, 1995*
Riwayat Pekerjaan *Professional Careers*	• Management Trainee di PT Bank Niaga Tbk • Posisi manajerial pada beberapa Bank seperti PT Bank Permata Tbk, PT Bank BII Maybank Tbk • Head of Human Capital PT Bank Mega Syariah Tbk • Head of Human Capital Strategy, Bank Muamalat tahun 2015 • *Management Trainee at PT Bank Niaga Tbk* • *Managerial positions at several banks such as PT Bank Permata Tbk, PT Bank BII Maybank Tbk* • *Head of Human Capital of PT Bank Mega Syariah Tbk* • *Head of Human Capital Strategy, Bank Muamalat in 2015*

Riksa Prakoso

Chief Human Capital Officer
Chief Human Capital Officer

Pendidikan dan Pelatihan 2019 *Education and Training in 2019*	• Leadership Alignment Preparation Training di Jakarta oleh ICLIF pada 23 Januari 2019 • Certified Professional Coach Program Phase 1 di Jakarta oleh LOOP Institute of Coaching pada 20 Maret 2019 • Certified Profesional Coach Program Phase 2 di Jakarta oleh LOOP Institute of Coaching pada 15 Mei 2019 • Certified Profesional Coach Program Phase 3 di Jakarta oleh LOOP Institute of Coaching pada 26 Juni 2019 • Certified Profesional Coach Program Phase 4 di Jakarta oleh LOOP Institute of Coaching pada 15 Agustus 2019 • GRIT Forces to Leap Bank Muamalat di Bandung oleh Muamalat Institute pada 21 November 2019 • *Leadership Alignment Preparation Training in Jakarta by ICLIF on January 23, 2019* • *Certified Professional Coach Program Phase 1 in Jakarta by the LOOP Institute of Coaching on March 20, 2019* • *Certified Professional Coach Program Phase 2 in Jakarta by the LOOP Institute of Coaching on May 15, 2019* • *Certified Professional Coach Program Phase 3 in Jakarta by the LOOP Institute of Coaching on June 26, 2019* • *Certified Professional Coach Program Phase 4 in Jakarta by the LOOP Institute of Coaching on August 15, 2019* • *GRIT Forces to Leap Bank Muamalat in Bandung by Muamalat Institute on November 21, 2019*

Profil Pejabat Eksekutif
Executive Management Profile

Nama *Name*	Tanggal Bergabung *Join Date*	Jabatan *Position*	Usia *Age*	Pendidikan Terakhir *Last Education*	Institusi Pendidikan *Educational Institution*
Agung Prambudi	20-Feb-17	Head of Distribution & Network Management	49	S1	Universitas Brawijaya
Agus Andipratama Amir	19-May-16	Head of Islamic Enterprise & Alliances	43	S1	University of South Australia
Anton Hendrianto	3-Jul-17	Head of Learning & Talent Management	40	S2	Universitas Bina Nusantara
Astri Piesca Rini	7-Jan-19	Head of Retail Financing Risk	37	S1	Institut Teknologi Bandung
Aznovri Kurniawan	2-Jan-17	Head of Retail Banking Strategy	44	S1	Institut Teknologi Bandung
Catur Andayani	1-Oct-12	Head of Enterprise Risk Management	50	S2	Universitas Indonesia
Demmy Rizkiadhy	15-Oct-15	Head of Business Finance & Intelligence - Plt.	38	S1	Universitas Trisakti
Denny Riyanto	2-Apr-18	Head of Special Asset Management	50	S1	Universitas Gadjah Mada
Dicky Zakiudin	16-Apr-18	Head of Retail Collection Management	49	S1	Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
Dyah Ekowati	7-May-97	Head of Compliance	48	S1	Institut Pertanian Bogor
Edian Fahmy	1-Jul-10	Head of Operational Risk Management	53	S2	ABFI Perbanas
Esti Budiarti	18-Jul-16	Head of HCBP Operation & Support Function	39	S1	Universitas Indonesia
Faisyal Hakim	23-Sep-19	Head of Corporate Legal	48	S2	Universitas Gadjah Mada
Hayunaji	17-Dec-18	Head of Corporate Affairs	48	S1	Universitas Indonesia
Indu Dewi	28-Aug-17	Head of HC Services	47	S2	Sekolah Tinggi Manajemen PPM Jakarta
Irlan Purnama	17-Nov-14	Head of Transactional Banking	48	S2	Middlesex University
Marjuki	12-Feb-18	Head of Information Technology	56	S2	Sekolah Tinggi Manajemen PPM Jakarta
Moh. Madina Hendrik Soe'oed	12-Apr-19	Head of Global Market	44	S2	Melboorne Unix Monash
Muhammad Ade Kurniawan	1-Aug-16	Head of HC Strategy	36	S1	Universitas Persada Indonesia (YAI)
Muhammad Ilham	1-Sep-16	Head of Financial Control	47	S1	Universitas Andalas
Nanang Basuki	22-Jun-93	Head of Corporate Real Estate & Procurement	48	S2	Institut Teknologi Bandung
Novi Wardi	9-Jan-17	Head of Operation Control & Quality Assurance	44	S2	Universitas Trisakti
Ridwan Moezwir	1-Feb-19	Head of Internal Audit	57	S2	Universitas Gadjah Mada

Nama *Name*	Tanggal Bergabung *Join Date*	Jabatan *Position*	Usia *Age*	Pendidikan Terakhir *Last Education*	Institusi Pendidikan *Educational Institution*
Setiabudi	15-Oct-95	Head of Financing Workout Risk	55	S1	Universitas Brawijaya
Setiawan Sabri	23-Jan-15	Head of Operation Strategy & Service Quality	51	S1	Erasmus University
Supriati Nugroho Pernamawati	22-Jul-15	Head of Corporate & Marketing Communication	44	S1	Universitas Sebelas Maret
Susantyo Irawan	5-Jun-17	Head of Corporate Financing Risk	50	S1	Universitas Padjadjaran
Tugiantoro	12-Sep-12	Head of Accounting & Tax	53	S2	Universitas Budi Luhur
Vinny Rika Anwar	26-Mar-18	Head of Financing Operations	43	S1	Institut Pertanian Bogor
Vino Yudessa Lamantu	9-May-16	Head of HCBP Business Function	41	S1	Universitas Islam Indonesia
Wang Wardhana	4-Jun-18	Head of Wealth Management, E-Business & Priority Segmentation	46	S2	La Trobe University
Wita Hanayori	13-Jun-16	Head of Operation Services	45	S1	Universitas Padjadjaran
Ahmad Safril Ilham	26-Oct-17	Region Head - Regional Sulawesi, Maluku & Papua	42	S2	Universitas Hasanuddin Makassar
Ahmad Salihin	8-Sep-97	Region Head - Regional Jateng & DIY	45	S1	Universitas Hasanuddin Makassar
Ana Hastuti	18-Sep-96	Region Head - Plt. Regional Jakarta 3	43	S1	STIE Adhy Niaga
Aufrieda Artsiana Dewi	1-Aug-17	Region Head - Regional Jatim, Bali & Nusra	50	S1	Universitas Airlangga
Dendy Awara Rezka	17-Dec-18	Region Head - Regional Jakarta 1	46	S1	Universitas Trisakti
Eryk Lufiat	19-Sep-16	Region Head - Regional Jabar	41	S1	Universitas Gadjah Mada
Mahmud Abu Bakar	15-Apr-19	General Manager - Kuala Lumpur Branch	54	S2	University of Leicester, UK
Sahlan	1-May-01	Region Head - Plt. Regional Sumbagsel	42	S1	Universitas Sumatera Utara
Yusra	4-Dec-17	Region Head - Regional Sumbagut	53	S1	Universitas Syiah Kuala
Achmad Faiz	22-Apr-92	Branch Manager - Rawamangun Branch	53	S1	UPN Veteran Jakarta
Ade Koes Djafri	2-Jan-18	Branch Manager - Pematangsiantar Branch	50	S2	Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Adi Widodo Harianto	18-Nov-19	Branch Manager - Cengkareng Branch	46	S1	Insitut Teknologi Sepuluh Nopember
Afrizal	10-Jun-19	Branch Manager - Medan Branch	45	S2	Universitas Sumatera Utara

Nama *Name*	Tanggal Bergabung *Join Date*	Jabatan *Position*	Usia *Age*	Pendidikan Terakhir *Last Education*	Institusi Pendidikan *Educational Institution*
Akbar Sulaiman Karib	31-Dec-04	Branch Manager - Gorontalo Branch	40	S1	Universitas Hasanuddin Makassar
Alan Januar Ahmed	11-Aug-03	Branch Manager - Kediri Branch	41	S1	Universitas Airlangga
Anike Defriana	27-Feb-17	Branch Manager - Otista Branch	45	S1	Universitas Tanjungpura
Anshar	12-Jun-99	Branch Manager - Semarang Branch	47	S1	Universitas Hasanuddin Makassar
Arie Boentaram	17-May-01	Branch Manager - Kebon Jeruk Branch	41	S1	UPI YAI Jakarta
Arief Nur Yusuf	1-Oct-16	Branch Manager - Kalimalang Branch	49	S1	Universitas Merdeka Malang
Bambang Haryo Nugroho	1-Aug-06	Branch Manager - Palu Branch	34	S1	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Bambang Setiawan	3-Jun-96	Branch Manager - Roxy Branch	52	S2	Universitas Pancasila
Bambang Waringin	2-May-18	Branch Manager - Aceh Branch	48	S1	Universitas Syiah Kuala
Betha Muhammad Zaky	1-Feb-07	Branch Manager - Banjarmasin Branch	38	S1	Institut Pertanian Bogor
Bimo Setyawan	6-Apr-17	Branch Manager - Fatmawati Branch	40	S2	Universitas Atmajaya
Budi Santoso	1-Mar-96	Branch Manager - Solo Branch	46	S1	STIE Stikubank
Budi Sulaksana	21-Apr-01	Branch Manager - Denpasar Branch	43	S1	Universitas Muhammadiyah Surakarta
Cahya Adi	2-Jan-17	Branch Manager - Depok Branch	40	S1	Institut Perbanas
Christinawulansari Elok Jatiwaluyaningtias	1-Sep-06	Branch Manager - Jayapura Branch	38	S1	Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya
Danang Rokhmad Sulendra	15-Jun-09	Branch Manager - Malang Branch	34	S1	Universitas Negeri Surabaya
Danie Maulana Lutfie	17-Dec-18	Branch Manager - Batam Branch	39	S1	Universitas Jendral Soedirman
Deny Hindarto	1-Aug-16	Branch Manager - Klender Branch	50	S2	The IPMI Business School
Dewi Fathia	1-Dec-16	Branch Manager - BSD Branch	45	S1	STIE Kampus Ungu
Donny Havianto	1-Dec-96	Branch Manager - Cilegon Branch	45	S1	Sekolah Tinggi Manajemen Labora
Dwi Poedji Widodo	3-Jan-17	Branch Manager - Ternate Branch	47	S2	STIE Malangkucecwara Malang
Efrida Yanti Siregar	18-Mar-03	Branch Manager - P. Sidempuan Branch	40	S1	Universitas Sumatera Utara
Eka Shanti Sistina	2-Jan-03	Branch Manager - Melawai Branch	40	S1	Universitas Brawijaya
Erine Widya Kusumawati	10-Jun-19	Branch Manager - Mayjen Sungkono Branch	40	S1	Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya
Fauzi	23-Jul-92	Branch Manager - Tanjung Pinang Branch	53	S1	Universitas Andalas
Firmansyah Safari	3-Jan-12	Branch Manager - Serang Branch	38	S1	Universitas Islam Bandung
Fitrawan	7-Jan-04	Branch Manager - Kendari Branch	38	S1	Universitas Haluoleo
Giat Waluyo	7-Jan-04	Branch Manager - Purwokerto Branch	42	S1	Universitas Jendral Soedirman

Nama *Name*	Tanggal Bergabung *Join Date*	Jabatan *Position*	Usia *Age*	Pendidikan Terakhir *Last Education*	Institusi Pendidikan *Educational Institution*
Hyang Pramesti Kesumawijaya	24-Nov-14	Branch Manager - Plt. Cianjur Branch	39	S1	Universitas Jenderal Achmad Yani
Imam Puji Raharjo	3-Jul-95	Branch Manager - Bandung Branch	48	D3	Politeknik Negeri Bandung
Ismupdalifah	2-Sep-93	Branch Manager - Tendean Branch	50	S1	Universitas Indonesia
Isvenita Andrianty	7-Nov-11	Branch Manager - Arthaloka Branch	50	S1	Universitas Nasional Indonesia
Kaspul Anwar Tang	15-Jan-07	Branch Manager - Pontianak Branch	37	S1	Universitas Mulawarman Samarinda
M. Asrul	31-Oct-08	Branch Manager - Mamuju Branch	34	S1	Universitas Negeri Makassar
M. Helmi	24-Jan-05	Branch Manager - Bengkulu Branch	43	S1	Universitas Andalas
M. Nahdhudin Al Asady	2-Jan-04	Branch Manager - Cipulir Branch	42	S1	IAIN Walisongo
Maemunah Nurdiana	2-Sep-93	Branch Manager - Sawangan Bojongsari Branch	51	S1	Universitas Sebelas Maret
Melinawati Amran	1-Dec-16	Branch Manager - Bintaro Jaya Branch	46	S2	Universitas Persada Indonesia (YAI)
Melur Musdalifah	4-Jan-16	Branch Manager - Matraman Branch	38	S1	Universitas Sahid
Miky Mardiansyah Pino	25-Aug-16	Branch Manager - Medan Sudirman Branch	43	S1	Universitas Sumatera Utara
Mohamad Haerudin	23-Mar-07	Branch Manager - Pangkal Pinang Branch	34	S1	Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Mohammad Badrudin	13-Aug-07	Branch Manager - Sukabumi Branch	39	S1	Institut Pertanian Bogor
Muhammad Amin	18-Apr-05	Branch Manager - Pekanbaru Branch	40	S1	Universitas Islam Bandung
Muhammad Husein Sucipto	1-Mar-08	Branch Manager - Lampung Branch	35	S1	Universitas Sriwijaya
Muhammad Nurwahyu Ishak	20-Sep-18	Branch Manager - Manado Branch	30	S1	Institut Manajemen Telkom
Nasrulloh	1-Mar-04	Branch Manager - Mataram Branch	40	S2	Universitas Negeri Jember
Neneng Siti Rahmah Niar	15-Sep-17	Branch Manager - KPO Muamalat Tower	46	S1	STIE Adhy Niaga
Pandu Angga Ikhsana	1-Sep-15	Branch Manager - Bogor Branch	37	S1	Institut Teknologi Bandung
Prasetyo Nur Cahyo	1-Dec-17	Branch Manager - Kelapa Gading Branch	36	S1	Universitas Bina Nusantara
Ribut Budi Putro Utomo	10-Aug-03	Branch Manager - Palangkaraya Branch	40	S1	Universitas Muhammadiyah Surakarta
Rifyal Fajri	18-Dec-06	Branch Manager - Jambi Branch	36	S1	STT Telkom
Rina Kanthi	1-Apr-94	Branch Manager - Tasikmalaya Branch	53	S1	STIE YPKP Bandung
Rizma	13-Mar-95	Branch Manager - Surabaya Branch	48	S1	Universitas Muhammadiyah Malang
Sofian Asmat	1-Jul-97	Branch Manager - Tangerang City Branch	47	S2	Universitas Tanjungpura
Sugeng Hernowo	1-Feb-99	Branch Manager - Kudus Branch	42	D3	Politeknik Negeri Semarang
Sulistyanto Hibrizie	3-Oct-16	Branch Manager - Yogyakarta Branch	50	S1	Universitas Gadjah Mada

Nama *Name*	Tanggal Bergabung *Join Date*	Jabatan *Position*	Usia *Age*	Pendidikan Terakhir *Last Education*	Institusi Pendidikan *Educational Institution*
Sumardi	1-Sep-06	Branch Manager - Sorong Branch	39	S1	UPN Veteran Jawa Timur
Suriyansyah	1-Apr-01	Branch Manager - Balikpapan Branch	45	S1	Universitas Lambung Mangkurat
Syahrul Effendi	5-Dec-16	Branch Manager - Langsa Branch	41	S1	Universitas Syiah Kuala
Syaifullah Asyik	2-Dec-03	Branch Manager - Mas Mansyur Branch	41	S2	Universitas Gadjah Mada
Syarifuddin	1-Sep-06	Branch Manager - Kupang Branch	39	S1	Universitas Negeri Makassar
Syaskowar Yuldiansyah	26-Apr-06	Branch Manager - Tegal Branch	36	S1	Universitas Lampung
Syuhardiman	24-Jan-05	Branch Manager - Padang Branch	43	S1	Universitas Andalas
T. Abdullah Suherman	23-Apr-04	Branch Manager - Ambon Branch	39	S1	Universitas Padjadjaran
Tris Reviandi	1-Mar-17	Branch Manager - Ciledug Branch	46	S1	Institut Perbanas
Uki A Wibowo	9-Jan-17	Branch Manager - Pondok Indah Branch	44	S1	Universitas Sam Ratulangi
Vita Rusdianti	1-Dec-16	Branch Manager - Jababeka Branch	30	S1	Universitas Bakrie
Vynna Primayanti	9-Jun-04	Branch Manager - Jember Branch	37	S1	Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya
Wahid Fitrian	15-Oct-12	Branch Manager - Palembang Branch	38	S1	Universitas Sriwijaya
Warno	8-Sep-97	Branch Manager - Samarinda Branch	45	S1	Universitas Balikpapan
Wendy Hilman Natsir	26-Sep-05	Branch Manager - Cirebon Branch	41	S1	Universitas Padjadjaran
Widyanti Hidayat	23-Dec-19	Branch Manager - Karawang Branch	38	S1	Universitas Padjadjaran
Wisnu Satria Bharata	13-Sep-08	Branch Manager - Makassar Branch	34	S1	Universitas Negeri Semarang
Yasa Adimulya	10-May-17	Branch Manager - Puri Indah Branch	42	S1	STEKPI
Yayan Hadiyanto	23-Jun-08	Branch Manager - Pekalongan Branch	39	S2	Universitas Gadjah Mada
Yeyen Djannati	26-Aug-06	Branch Manager - Kalimas Bekasi Branch	38	S1	Universitas Muslim Indonesia Makassar

Bank Muamalat
Pertama Murni Syariah



Hijrah itu Segera

Nikmati kemudahan mewujudkan rencana
dengan hadiah yang dapat dipilih sendiri

Tabungan iB Hijrah Rencana Berhadiah

Sesuai Syariah | Terpercaya | Fleksibel

#AyoHijrah

Info lengkap hubungi: SalaMuamalat **1500016** | www.bankmuamalat.co.id

BankMuamalatIndonesia | BankMuamalat | Bank.Muamalat | BankMuamalat

Bank Muamalat Indonesia terdaftar dan diawasi oleh OJK Otoritas Jasa Keuangan | LPS Lembaga Penjamin Simpanan

Struktur dan Komposisi Pemegang Saham

Structure and Composition of Shareholders

Pemegang Saham Utama

Pemegang saham utama PT Bank Muamalat Indonesia Tbk adalah Islamic Development Bank sebanyak 32,74% dari total keseluruhan saham yang ada. Berikut informasi singkat mengenai Islamic Development Bank.

Main Shareholders

The main shareholder of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk is the Islamic Development Bank with 32.74% of the total existing shares. The following is brief information about the Islamic Development Bank.

Nama *Name*	Islamic Development Bank
Tahun Pendirian *Year of Establishment*	1973
Dasar Hukum Pendirian *Legal Basis of Establishment*	Anggaran Perjanjian hasil Deklarasi of Intent saat Konferensi Menteri Keuangan Negara-Negara Muslim yang berlangsung di Jeddah pada 1973 *The Agreement Budget was the result of the Declaration of Intent during the Minister of Finance Conference of Muslim Countries which took place in Jeddah in 1973*
Bidang Usaha *Business Fields*	Pembangunan Ekonomi Sosial Negara-Negara Muslim *Social Economic Development of Muslim Countries*
Alamat *Address*	Berkantor pusat di Jeddah, Kerajaan Arab Saudi, IDB memiliki empat kantor regional di Rabat, Maroko; Kuala Lumpur, Malaysia; Almaty, Kazakhstan; dan di Dakar, Senegal, dan Kantor Gateway Negara di Turki (Ankara dan Istanbul), dan Indonesia *Headquartered in Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia, IDB has four regional offices in Rabat, Morocco; Kuala Lumpur, Malaysia; Almaty, Kazakhstan; and in Dakar, Senegal, and the State Gateway Offices in Turkey (Ankara and Istanbul), and Indonesia*

Visi dan Misi
Visi:
"Untuk menjadi pemimpin dalam mendorong pembangunan sosial-ekonomi di negara-negara anggota dan komunitas Muslim di negara-negara non-anggota sesuai dengan Syariah"
Vision
"To be a leader in encouraging socio-economic development in member countries and Muslim communities in non-member countries in accordance with Sharia"

Misi:
"IDB berkomitmen untuk mengentaskan kemiskinan; mempromosikan pembangunan manusia; ilmu pengetahuan dan teknologi; Ekonomi Islam; perbankan dan keuangan; dan meningkatkan kerjasama antara negara-negara anggota, bekerjasama dengan mitra pembangunan kita. Nilai-nilai inti tersebut disingkatan dengan PRIDE (Performance, Responsiveness, Integrity, Dedication, Empowerment)".
Mission
"IDB is committed to alleviating poverty; promoting human development; science and technology; Islamic economics; banking and finance; and increasing cooperation between member countries, in collaboration with our development partners. These core values are abbreviated with PRIDE (Performance, Responsiveness, Integrity, Dedication, Empowerment)".

Struktur Organisasi:
Organization Structure:

Organisasi IDB terdiri dari:
1. Dewan Gubernur (Board of Governor), sebagai pembuat kebijakan dan pemegang otorisasi tertinggi;
2. Dewan Direksi Pelaksana (Board of Executive Directors) bertanggung jawab untuk operasional umum Bank sesuai anggaran perjanjian. Terdiri dari 18 BED, 9 orang perwakilan negara pemegangsaham utama (United Arab Emirates, Qatar, Libya, Saudi Arabia, Iran, Nigeria, Turki, Kuwait, dan Mesir. Khusus dalam hal hak suara, Arab Saudi memiliki 50% dari hak suara) dan 9 lainnya dari negara-negara lain;
3. Presiden adalah pelaksana utama Bank yang dipilih untuk masa jabatan 5 tahun.

The IDB organization consists of:
1. *The Board of Governors, as the policy maker and the highest authorization holder;*
2. *The Board of Executive Directors are responsible for the Bank's general operations according to the agreement budget. Consisting of 18 BEDs, 9 representatives of the main shareholders (United Arab Emirates, Qatar, Libya, Saudi Arabia, Iran, Nigeria, Turkey, Kuwait, and Egypt. Specifically in terms of voting rights, Saudi Arabia has 50% of voting rights) and 9 other representatives from other countries;*
3. *The President is the main executor of the Bank elected for a term of 5 years.*

Berdiri pada tahun 1973 dan mulai beroperasi pada 20 Oktober 1975 dengan tujuan utama pembentukan IDB adalah untuk memberi bantuan untuk pembangunan ekonomi dan sosial dari Negara-negara anggota dan komunitas muslim dari Negara non anggota dengan berdasarkan pada prinsip syariah.
Modal dasar yang dimiliki IDB pada awal pendirian di tahun 1975 sebesar ID2 miliar, berasal dari iuran negara-negara anggotanya dan pada tahun 2014 telah meningkat menjadi ID100 miliar. Modal yang ditempatkan IDB sebesar IDR50 miliar. (*ID= Dinar Islam setara dengan satu Special Drawing Right/SDR).
Organisasi IDB terdiri dari Dewan Gubernur (Board of Governor), Dewan Direksi Pelaksana (Board of Executive Directors), dan Presiden. Setiap negara anggota diwakili oleh Dewan Gubernur dan Gubernur Alternatif yang akan bertemu setahun sekali untuk meninjau kegiatan Bank pada tahun sebelumnya dan rencana untuk tahun berikutnya. Dalam aktivitasnya IDB banyak berpartisipasi dalam pemberian modal dan pembiayaan untuk proyek-proyek produktif dan perusahaan. Selain itu, IDB juga aktif memberikan bantuan keuangan kepada negara-negara anggota dalam bentuk lain untuk pembangunan ekonomi dan sosial. Selain itu, IDB sejauh ini juga banyak memberikan bantuan dana khusus untuk tujuan tertentu di antaranya dana untuk bantuan kepada komunitas muslim di negara non-anggota.

It was established in 1973 and started operating on October 20, 1975 with the main objective of establishing the IDB to provide assistance for economic and social development of member countries and the Muslim community of non-member countries based on sharia principles.
*The authorized capital owned by IDB at its inception in 1975 was ID2 billion, coming from contributions from member countries and in 2014 it had risen to ID100 billion. The issued capital of IDB is IDR50 billion. (*ID=Islamic Dinar is equivalent to one Special Drawing Right/SDR).*
The IDB organization consists of the Board of Governors, the Board of Executive Directors and the President. Each member country is represented by a Board of Governors and Alternative Governors who will meet once a year to review the Bank's activities in the previous year and plan for the following year.
In its activities, IDB participates in providing capital and financing for productive projects and companies. In addition, IDB is also active in providing financial assistance to member countries in other forms for economic and social development. In addition, IDB so far has also provided special financial assistance for certain purposes including funds for assistance to Muslim communities in non-member countries.

National Bank of Kuwait Group (30,45%)

1. National Bank of Kuwait (8,45%)

   Didirikan pada tanggal 19 Mei 1952, National Bank of Kuwait lahir melalui Keputusan Amiri Decree dengan modal dasar KD435.349.762/500 (Empat Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Kuwait Dinar dan Lima Ratus Fils), terdiri dari 4.353.497.625 (Empat Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Dua Puluh Lima) saham dengan nilai masing-masing Seratus Fils. National Bank Kuwait masuk menjadi pemegang saham Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2012 setelah membeli sebagian saham Boubyan Bank di Bank Muamalat Indonesia yakni sejumlah 88.702.981 (Delapan puluh delapan juta tujuh ratus dua ribu sembilan ratus delapan puluh satu) lembar saham atau setara dengan 6,00% (enam persen) kepemilikan saham Bank Muamalat Indonesia dan dilanjutkan dengan menambah porsi kepemilikannya menjadi 8,45% (delapan koma empat puluh lima persen) di tahun 2013.

   Selama bertahun-tahun, NBK menjadi lembaga keuangan terkemuka dan berpengaruh di Kuwait dan di seluruh Timur Tengah. NBK saat ini beroperasi melalui jaringan internasional yang besar yang meliputi pusat-pusat keuangan dan bisnis terkemuka di dunia di 16 negara. Kekuatan NBK bertumpu pada profitabilitas yang konsisten, kualitas aset tinggi, dan kapitalisasi yang kuat. NBK menawarkan spektrum penuh jasa keuangan dan investasi yang inovatif dan solusi bagi individu, perusahaan dan nasabah institusi. NBK saat menikmati pangsa pasar yang dominan dengan basis klien yang besar dan terus berkembang lokal dan regional. Selama tahun 2014 telah dianugerahi peringkat tertinggi di antara bank-bank regional oleh lembaga pemeringkat internasional; Moody's (Aa3), Standard & Poor's (A+) dan Fitch Ratings (AA-), dan masuk dalam peringkat di antara daftar 50 (lima puluh) bank teraman di dunia versi Global Finance.

2. Boubyan Bank (22,00%)

   Boubyan Bank adalah Bank Kuwait yang didirikan pada tahun 2004 melalui Keputusan Amiri Decree No. 88 dengan modal disetor 100 juta Dinar Kuwait. Menjadi pemegang saham PT Bank Mumalat Indonesia Tbk sejak tahun 2005, dalam aktivitasnya, Boubyan Bank menjalankan semua kegiatan bisnis perbankan (keuangan dan komersial) sesuai dengan peraturan Bank Sentral Kuwait.

   Pemegang saham utama Boubyan Bank yang memiliki kontrol lebih dari 5% (lima persen) per 31 Desember 2019 sesuai dengan annual report Boubyan Bank tahun 2019 adalah sebagai berikut:

   a. National Bank of Kuwait S.A.K 59,15%
   b. The Commercial Bank of Kuwait S.A.K 11,19%

National Bank of Kuwait Group (30.45%)

1. *National Bank of Kuwait (8.45%)*

   Founded on May 19, 1952, National Bank of Kuwait was born through the Amiri Decree with authorized capital KD 435,349,762/500 (Four Hundred Thirty Five Million Three Hundred Forty Nine Thousand Seven Hundred Sixty Two Kuwait Dinars and Five Hundred Fils) , consisting of 4,353,497,625 (Four Billion Three Hundreds Fifty Million Four Hundreds Ninety Seven Thousand Six Hundred Twenty Five) shares with each value of Hundred Fils.

   National Bank Kuwait became one of the shareholder of Bank Muamalat Indonesia in 2012 after purchasing a portion of Boubyan Bank shares in Bank Muamalat Indonesia, amounting to 88,702,981 (Eighty eight million seven hundred two thousand nine hundred eighty one) shares or equivalent to 6.00% (six percent) of the share ownership of Bank Muamalat Indonesia and continued with adding the portion of ownership to 8.45% (eight point forty five percent) in 2013.

   Over the years, NBK has become a leading and influential financial institution in Kuwait and throughout the Middle East. Curently NBK operates through a large international network which includes the world's leading financial and business centers in 16 countries. The strength of NBK relies on consistent profitability, high asset quality, and strong capitalization. NBK offers a full spectrum of innovative financial and investment services and solutions for individuals, companies and institutional customers. NBK enjoys a dominant market share with a large and growing local and regional client base. Throughout 2014, NBK was awarded the highest ranking among regional banks by international rating agencies; Moody's (Aa3), Standard & Poor's (A +) and Fitch Ratings (AA-), as well as ranked among the 50 (fifty) safest banks in the world by Global Finance.

2. *Boubyan Bank (22.00%)*

   Boubyan Bank is a Kuwait Bank established in 2004 through Amiri Decree No. 88 with a paid-in capital of 100 million Kuwaiti Dinars. Being a shareholder of PT Bank Mumalat Indonesia Tbk since 2005, in its activities, Boubyan Bank runs all banking business activities (financial and commercial) in accordance with the regulations of the Central Bank of Kuwait.

   Boubyan Bank's main shareholders that have more than 5% control as of December 31, 2018 in accordance with the 2018 Boubyan Bank annual report are as follows:

   a. National Bank of Kuwait S.A.K 59.15%
   b. The Commercial Bank of Kuwait S.A.K 11.19%

3. (Sedco) Group (24,23%)

SEDCO Group adalah kelompok perusahaan investasi terkemuka di bidang investasi ekuitas, real estate dan bisnis lainnya yang didirikan pada tahun 1976. Berkedudukan di Jeddah, Arab Saudi, lingkup aktivitas SEDCO Group berkembang tidak saja di wilayah Arab Saudi namun juga mulai menyebar ke seluruh dunia.

Kepemilikan SEDCO Group di Bank Muamalat Indonesia adalah sejak tahun 2005 melalui tiga perusahaan anggota Group yaitu Atwill Holdings Limited, BMF Holdings Limited dan IDF investment Foundation dengan total kepemilikan 24,23%, sebagai berikut:

a. Atwill Holdings Limited (17,91%)

Atwill Holdings Limited adalah perusahaan yang berkedudukan di Trident Trust Company (BVI) Limited, Trident Chambers, PO BOX 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands. Perusahaan ini menjadi pemegang saham PT Bank Muamalat Indonesia Tbk sejak tahun 2005. Sejak awal pendiriannya, perusahaan ini didirikan dengan tujuan menjadi perusahaan investasi besar. Dari waktu ke waktu Atwill Holdings Limited terus mengembangkan sayap bisnisnya. Saat ini, Atwill Holding Limited menanamkan investasinya tidak hanya pada pasar dalam negeri tapi juga bagian belahan dunia lainnya.

b. IDF Investment Foundation (3,48%)

Menjadi pemegang saham Bank Muamalat Indonesia sejak tahun 2005, IDF Investment ditetapkan sebagai badan hukum independen berdasarkan Art 552. Perusahaan ini berdomisili di Vaduz, Kerajaan Liechtenstein dan didirikan dengan tujuan pemerataan kekayaan bagi individu dan organisasi dan terus mengembangkan kemajuan bagi seluruh masyarakat dunia.

c. BMF Holdings Limited (2,84%)

BMF Investment adalah perusahaan yang berkedudukan di Trident Trust Company (BVI) Limited, Trident Chambers, PO BOX 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands. Menjadi pemegang saham PT Bank Muamalat Indonesia Tbk sejak tahun 2005, Perusahaan ini didirikan dengan tujuan menjadi perusahaan investasi besar. Dari waktu ke waktu BMF Investment terus mengembangkan sayap bisnisnya.

4. Pemegang Saham Lainnya (12,58%)

Pemegang saham lainnya yang memegang 12,58% kepemilikan Bank Muamalat Indonesia merupakan badan usaha maupun perorangan. Pemegang saham lainnya berbadan hukum maupun perorangan yang tersebar di seluruh Indonesia.

3. (Sedco) Group (24.23%)

SEDCO Group is a leading group of investment companies in equity investment, real etates and other businesses which was founded in 1976. Located in Jeddah, Saudi Arabia, the scope of SEDCO Group's activities did not developed in Saudi Arabia only but also began to spread throughout the world.

SEDCO Group's ownership in Bank Muamalat Indonesia has started since 2005 through three Group member companies namely Atwill Holdings Limited, BMF Holdings Limited and IDF investment Foundation with a total ownership of 24.23%, as follows:

a. Atwill Holdings Limited (17.91%)

Atwill Holdings Limited is a company located at Trident Trust Company (BVI) Limited, Trident Chambers, PO BOX 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands. The company has been a shareholder of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk since 2005. Since its establishment, the company was built with the aim of becoming a large investment company. From time to time, Atwill Holdings Limited continues to expand its business. At the moment, Atwill Holdings Limited invests not only in the domestic market but also in other parts of the world.

b. IDF Investment Foundation (3.48%)

Being a shareholder of Bank Muamalat Indonesia since 2005, IDF Investment was established as an independent legal entity based on Art 552. The company is domiciled in Vaduz, Kingdom of Liechtenstein. It is established with the aim of equitable distribution of wealth for individuals and organizations and continually develops progress for the entire world community.

c. BMF Holdings Limited (2.48%)

BMF Investment is a company located at Trident Trust Company (BVI) Limited, Trident Chambers, PO BOX 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands. Being a shareholder of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk since 2005, the company is established with the aim of becoming a large investment company. From time to time, BMF Investment continues to expand its business.

4. Other Shareholders (12.58%)

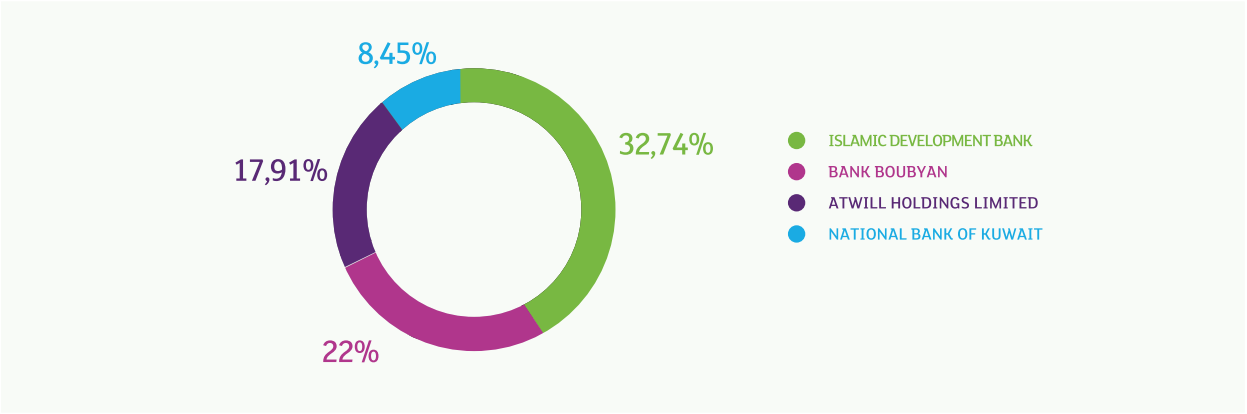
Other shareholders holds 12.58% ownership of Bank Muamalat Indonesia that consisting of business entities and individuals. The other individuals and legal entities shareholders are spread throughout Indonesia.

Komposisi Pemegang Saham
Composition of Shareholders

Nama Pemegang Saham *Name of Shareholders*	Status *Status*	Jumlah Saham (lembar) *Number of Shares (pages)*	Persentase Kepemilikan (%) *Percentage of Ownership (%)*
ISLAMIC DEVELOPMENT BANK	ASING *FOREIGN*	3.341.894.294	32,74
BANK BOUBYAN	ASING *FOREIGN*	2.245.694.513	22,00
ATWILL HOLDINGS LIMITED	ASING *FOREIGN*	1.828.090.034	17,91
NATIONAL BANK OF KUWAIT	ASING *FOREIGN*	862.755.656	8,45
IDF INVESTMENT FOUNDATION	ASING *FOREIGN*	355.461.941	3,48
BMF HOLDINGS LIMITED	ASING *FOREIGN*	289.985.977	2,84
REZA RHENALDI SYAIFUL	LOKAL *LOCAL*	170.527.590	1,67
DEWI MONITA	LOKAL *LOCAL*	170.250.000	1,67
IR. ANDRE MIRZA HARTAWAN, MBA	LOKAL *LOCAL*	169.500.000	1,66
KOPERASI PERKAYUAN APKINDO – MPI (KOPKAPINDO)	LOKAL *LOCAL*	142.012.245	1,39
MASYARAKAT (MASING-MASING <5%) *PUBLIC (EACH <5%)*	LOKAL *LOCAL*	631.530.085	6,19
JUMLAH MODAL DITEMPATKAN DAN DISETOR PENUH *THE AMOUNT OF CAPITAL IS PLACED AND DEPOSED FULL*		10.207.702.335	
SAHAM DALAM PORTEPEL *STOCK IN PORTEPEL*		32.965.648.490	
JUMLAH *TOTAL*		43.173.350.825	100,00

Keterangan:
Nilai Nominal Saham A Rp200
Nilai Nominal Saham B Rp100

Information:
Share A nominal value Rp200
Share B nominal value Rp100



Komposisi Pemegang Saham dengan Kepemilikan >5%
Shareholders Composition with >5% Ownership

Nama Pemegang Saham *Name of Shareholders*	Jumlah Saham (lembar) *Total of Shares (sheet)*	Persentase Kepemilikan (%) *Percentage of Ownership (%)*
ISLAMIC DEVELOPMENT BANK	3.341.894.294	32,74
BANK BOUBYAN	2.245.694.513	22,00
ATWILL HOLDINGS LIMITED	1.828.090.034	17,91
NATIONAL BANK OF KUWAIT	862.755.656	8,45

Komposisi Pemegang Saham dengan Kepemilikan <5%
Shareholders Composition with <5% Ownership

Kelompok Pemegang Saham *Shareholders Group*	Domestik *Domestic*			Asing *Foreign*		
	Jumlah Saham *Total of Shares*	%	Jumlah Pemegang Saham *Total of Shareholders*	Jumlah Saham *Total of Shares*	%	Jumlah Pemegang Saham *Total of Shareholders*
IDF INVESTMENT FOUNDATION				355.461.941	3,48	
BMF HOLDINGS LIMITED				289.985.977	2,84	
REZA RHENALDI SYAIFUL	170.527.590	1,67				
DEWI MONITA	170.250.000	1,67				
ANDRE MIRZA HARTAWAN, MBA.IR	169.500.000	1,66				
KOPERASI PERKAYUAN APKINDO – MPI (KOPKAPINDO)	142.012.245	1,39				
MASYARAKAT (MASING-MASING <5%) *PUBLIC (EACH <5%)*	631.530.085	6,19	338.889			

Jumlah Pemegang Saham dan Persentase Berdasarkan Klasifikasi
Number of Shareholders and Percentage Based on Classification

Nama Pemegang Saham *Name of Shareholders*	Jumlah Pemegang Saham *Total of Shareholders*	Jumlah Saham (lembar) *Total of Shares (pages)*	Persentase Kepemilikan (%) *Percentage of Ownership (%)*
Lokal *Domestic*			
Perorangan Indonesia *Indonesian Individual*	337.144	804.993.075	7,89
Pemerintah Daerah *Local Government*	495	4.565.715	0,04
Koperasi *Cooperative*	769	148.221.700	1,46

Jumlah Pemegang Saham dan Persentase Berdasarkan Klasifikasi
Number of Shareholders and Percentage Based on Classification

Nama Pemegang Saham *Name of Shareholders*	Jumlah Pemegang Saham *Total of Shareholders*	Jumlah Saham (lembar) *Total of Shares (pages)*	Persentase Kepemilikan (%) *Percentage of Ownership (%)*
Yayasan *Foundation*	111	85.985.365	0,84
Dana Pensiun *Pension Fund*	15	85.552.570	0,84
Asuransi *Insurance*	6	10.848.540	0,11
Bank	14	20.807.860	0,20
Perseroan Terbatas *Company*	225	15.335.310	0,15
Badan Usaha Lain *Other Business Entity*	114	107.509.785	1,05
Jumlah *Total*	338.893	1.283.819.920	12,58
Asing *Foreign*			
Badan Usaha Asing *Foreign Business Entity*	6	8.923.882.415	87,42
Total	338.899	10.207.702.335	100,00

Kepemilikan Saham oleh Dewan Komisaris dan Direksi
Share Ownership by Board of Commissioners and Directors

Nama *Name*	Jabatan *Position*	Jumlah Saham Bank Muamalat Indonesia *Total of Bank Muamalat Indonesia Shares*	Presentase Kepemilikan (%) *Percentage of Ownership (%)*
Andri Donny	Direktur *Director*	15.415	0,0001510

Kronologi Penerbitan dan/atau Pencatatan Saham
Chronology of the Issuance and/or Listing of Shares

Tahun *Year*	Aksi Korporasi *Corporate Action*	Jumlah Saham Baru *Total of New Shares*	Tanggal Pencatatan di Bursa *Listing Date on the Exchange*
1993	Penawaran Umum Saham Perdana *Public Offering of Initial Shares*	2.489.090	28 Oktober *October 28*
1998	Penawaran Umum Terbatas I Seri Saham B dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu *Limited Public Offering I Share B Series with Pre-emptive Rights*	17.504.936	22 Juni *June 22*
2000	Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu *Capital Addition without Pre-Emptive Rights*	400.000	22 Juni *June 22*

Kronologi Penerbitan dan/atau Pencatatan Saham
Chronology of the Issuance and/or Listing of Shares

Tahun *Year*	Aksi Korporasi *Corporate Action*	Jumlah Saham Baru *Total of New Shares*	Tanggal Pencatatan di Bursa *Listing Date on the Exchange*
2002	Penawaran Umum Terbatas II Seri Saham C dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu *Limited Public Offering II Share C Series with Pre-emptive Rights*	276.975.562	29 Oktober *October 29*
2005	Penawaran Umum Terbatas III Seri Saham C dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu *Limited Public Offering III Share C Series with Pre-emptive Rights*	498.743.597	28 April *April 28*
2010	Penawaran Umum Terbatas IV Seri Saham C dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu *Limited Public Offering IV Share C Series with Pre-emptive Rights*	820.251.749	28 Oktober *October 28*
2011	Pembagian Saham Bonus (Rasio 15:1) *Distribution of Bonus Shares (Ratio of 15:1)*	78.352.338	26 Mei *May 26*
2012	Pemecahan Nilai Saham/ Stock Split • Saham Seri A dan B (Rp1.000) menjadi Saham Seri A (Rp200) • Saham Seri C (Rp500) menjadi Saham Seri B (Rp100) *Stock Split* • *Series A and B Shares (Rp1,000) become Series A Shares (Rp200)* • *Series C Shares (Rp500*	7.391.784.490	21 November *November 21*
2013	Penawaran Umum Terbatas V Saham Seri B dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu *Limited Public Offering V Series B Shares with Pre-emptive Rights*	2.815.917.885	7 November *November 7*

Kronologi Penerbitan dan/atau Pencatatan Efek Lainnya

Hingga akhir tahun 2019, Bank tidak menerbitkan Efek dalam bentuk apapun selain yang telah dipaparkan pada Keronologis Penerbitan dan Pencatatan Saham di atas. Dengan demikian, tidak terdapat informasi tentang nama efek lainnya, tahun penerbitan efek lainnya, tingkat bunga/imbalan efek lainnya, tanggal jatuh tempo efek lainnya, nilai penawaran efek lainnya, nama bursa dimana efek lainnya dicatatkan, dan peringkat efek.

Chronology of the Issuance and/or Listing of Other Securities

Until the end of 2019, the Bank does not issue Securities in any form other than those described in the aforementioned Chronology of the Issuance and Listing of Shares. Thus, there is no information about other securities names, other securities issuance years, interest rates/other securities benefits, other securities maturity dates, other securities offer values, names of exchanges where other securities are listed, and rating of securities.

Profil Entitas Anak dan Entitas Asosiasi

Al-Ijarah Indonesia Finance

PT Al Ijarah Indonesia Finance (ALIF) didirikan pada bulan November 2006 di Jakarta dan memulai operasionalnya pada tanggal 27 Agustus 2007. Perusahaan keuangan syariah yang didirikan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan keuangan masyarakat Indonesia. Modal awal yang disetorkan adalah sebesar Rp105 miliar, yang ditempatkan sama rata oleh tiga lembaga keuangan terkemuka Indonesia dan Timur Tengah, yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Boubyan Kuwait, International Leasing & Investment Company (ILIC).

Profile of Subsidiaries and Associates

Al-Ijarah Indonesia Finance

PT Al Ijarah Indonesia Finance (ALIF) was established in November 2006 in Jakarta and began its operations on August 27, 2007. Islamic finance companies is established to meet the financial financing needs of the Indonesian people. The initial paid-in capital was Rp105 billion, which was placed equally by the three leading financial institutions in Indonesia and the Middle East, namely Bank Muamalat Indonesia, Kuwait Boubyan Bank, International Leasing & Investment Company (ILIC).

ALIF pada mulanya didirikan untuk melayani kebutuhan pembiayaan bagi komunitas bisnis Indonesia dan Asia Tenggara, dengan menawarkan pembiayaan minimal sebesar Rp2 miliar per transaksi dan jasa konsultasi keuangan. Krisis ekonomi global yang dimulai tahun 2010 lalu telah mendorong ALIF untuk mengubah fokus bisnis pada pembiayaan ritel. Hal ini di samping untuk meningkatkan sumber pendanaan, juga untuk mengambil manfaat dari pertumbuhan sektor konsumsi yang sangat besar di Indonesia dewasa ini dan di masa mendatang.

At the beginning, ALIF was originally established to serve the financing needs of the business community of Indonesia and Southeast Asia, by offering a minimum financing of Rp2 billion per transaction and financial consulting services. The global economic crisis began in 2010 has prompted ALIF to change its business focus on retail financing. This is in addition to increase funding sources, also to take advantage of the huge consumption sector growth in Indonesia today and in the future.

Saat ini ALIF menawarkan berbagai jenis produk pembiayaan, mulai dari pembiayaan komersial untuk investasi barang modal untuk keperluan usaha seperti mesin dan alat berat maupun pembiayaan konsumtif (ritel) seperti mobil dan sepeda motor. Semua produk pembiayaan tersebut didasarkan pada prinsip keuangan syariah dengan menggunakan skema pembiayaan Ijarah Muntahia Bittamlik (Sewa dan Beli), dan Murabahah (Jual dan Beli).

Currently, ALIF offers various types of financing products, ranging from commercial financing for investment in capital goods to business needs such as machinery and heavy equipment and consumer (retail) financing such as cars and motorbikes. All of these financing products are based on the principles of sharia finance using the Ijarah Muntahia Bittamlik (Rental and Buy) and Murabahah (Selling and Buying) financing schemes.

Baitulmaal Muamalat (BMM)

Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1994 membentuk unit pengelola dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS), serta dana sosial kebajikan yang kemudian disebut Baitulmaal. Unit yang awalnya didirikan atas dasar tanggung jawab Bank Muamalat Indonesia terhadap pemberdayaan ekonomi mikro ini, pada tanggal 16 Juni 2000 diresmikan sebagai yayasan Baitulmaal Muamalat.

Baitulmaal Muamalat (BMM)

In 1994, Bank Muamalat Indonesia formed a Zakat, Infaq, and Alms (ZIS) fund management unit, as well as a charity fund which was later called Baitulmaal. The unit which was originally founded on the basis of the responsibility of Bank Muamalat Indonesia towards micro-economic empowerment, was officially inaugurated on June 16, 2000 as the Baitulmaal Muamalat foundation.

Kemudian, sesuai tuntutan masyarakat akan lembaga amil zakat yang independen dan profesional, dan UU No. 38 tahun 1999, pada tanggal 22 Desember 2000 badan hukum Yayasan Baitulmaal Muamalat dikukuhkan sebagai lembaga amil zakat nasional oleh Menteri Agama Republik Indonesia.

Moreover, according to the demands of the community for an independent and professional amil zakat institution, and Law No. 38 of 1999, on December 22, 2000 the Baitulmaal Muamalat Foundation was confirmed as a national amil zakat institution by the Minister of Religion of the Republic of Indonesia.

Baitulmaal Muamalat memfokuskan kegiatannya dalam 3 (tiga) aspek:

1. Mengelola dana-dana sosial sesuai prinsip syariah Islam.
2. Mengembangkan komunitas yang mandiri, tumbuh dan berkarakter.
3. Menjadi mediator pengembangan usaha dan lembaga keuangan mikro syariah.

Baitulmaal Muamalat focuses its activities in three aspects.

1. *Managing social funds according to Islamic sharia principles.*
2. *Developing an independent, growing and characterized community.*
3. *Becoming a business development mediator and Sharia microfinance institution.*

Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan dengan memfungsikan dan memanfaatkan jaringan kantor layanan Bank Muamalat Indonesia yang tersebar di seluruh wilayah Nusantara, Indonesia. Baitulmaal Muamalat telah mendapat kepercayaan dari badan internasional seperti Islamic Development Bank dan menjadi model pemberdayaan di Indonesia yang menjalankan fungsi *Corporate Social Responsibility* Bank Muamalat Indonesia.

These activities are carried out by functioning and utilizing the Bank Muamalat Indonesia service office network which is spread throughout Indonesia. Baitulmaal Muamalat has gained the trust of international institution such as the Islamic Development Bank and has become a model of empowerment in Indonesia that carries out the Corporate Social Responsibility function of Bank Muamalat Indonesia.

Layanan pembayaran BMM dengan nomor rekening Bank Muamalat Indonesia sebagai berikut:

1. Zakat: 301.00711.99
2. Infaq-sadaqah: 301.00719.53
3. Bantuan Kemanusiaan: 301.00721.63

BMM payment service with account number Bank Muamalat Indonesia as follows:

1. *Zakat: 301.00711.99*
2. *Infaq-sadaqah: 301.00719.53*
3. *Humanitarian Assistance: 301.00721.63*

DPLK Muamalat

Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Muamalat, merupakan suatu badan hukum yang didirikan oleh PT Bank Muamalat Indonesia Tbk pada tanggal 12 September 1997 dan disahkan berdasarkan SK Menteri Keuangan No. Kep-485/ KM.17/1997 tanggal 10 Oktober 1997. Program pensiun yang dilaksanakan adalah Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP). DPLK Muamalat menawarkan kemudahan perencanaan keuangan masa depan bagi karyawan maupun pekerja mandiri dan pengelolaan dana nasabahnya dilakukan secara profesional sebagai investasi jangka panjang dalam wujud rekening pribadi nasabah. Sehingga, apapun profesi nasabah, bisa mendapat jaminan kesinambungan penghasilan selama masa pensiun kelak jika telah menjadi peserta DPLK Muamalat.

Beragam pilihan umur pensiun, pengelolaan dana secara syariah, beragam paket investasi dengan hasil pengembangan yang kompetitif, fleksibel, jaringan luas dan akses 24 jam menjadi faktor keuntungan bagi nasabah untuk mempersiapkan lebih dini masa pensiunnya di DPLK Muamalat.

Keuntungan bagi perusahaan yang mengikutsertakan karyawannya sebagai peserta DPLK di antaranya adalah tidak dibebankan pajak (Pph 25), sebagai sarana untuk mempersiapkan pesangon/dana pensiun karyawannya (sesuai UU No. 13 Th 2003 tentang Ketenagakerjaan) serta dapat melaporkan ke Kementerian Keuangan sebagai badan yang telah menyelenggarakan dana pensiun.

Muamalat Institute

Muamalat Institute (MI) didirikan pada tahun 1999, namun cikal bakalnya telah ada sejak tahun 1992 dengan nama Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Perbankan Syariah (LPPBS).
Pendirian Muamalat Institute adalah dalam rangka:

1. Meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat, khususnya umat Islam di Indonesia melalui pendirian lembaga-lembaga berdasarkan prinsip syariah.
2. Menumbuhkembangkan dan mensosialisasikan lembaga keuangan syariah di Indonesia sehingga dapat menjadi salah satu fondasi perekonomian bangsa.
3. Mencetak tenaga-tenaga profesional berkualitas yang menguasai prinsip-prinsip ekonomi syariah sehingga dapat lebih berperan serta dalam pengembangan ekonomi Indonesia.
4. Mengembangkan, mensosialisasikan dan memberikan pendidikan mengenai sistem ekonomi syariah kepada masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam. Untuk dapat mencapai hasil tersebut MI memberikan jasa di bidang riset, pelatihan, konsultasi, dan publikasi.

DPLK Muamalat

Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), is a legal entity established by PT Bank Muamalat Indonesia Tbk on September 12, 1997 and ratified based on Decree of the Minister of Finance No. Kep-485/ KM.17/1997 dated October 10, 1997. Pension splan implemented is a Defined Contribution Pension Program (PPIP). Muamalat Pension Fund offers the convenience of future financial planning for employees and independent workers and the management of customer funds is done professionally as a long-term investment in the form of a customer's personal account. Thus, whatever profession of the customers, they can get a guarantee of continuity of income during the retirement period if they has become participants in the Muamalat DPLK.

A wide selection of retirement age, sharia fund management, a variety of investment packages with competitive, flexible, extensive network development and 24-hour access are some of the advantageous factors for customers to prepare for their retirement earlier in the Muamalat DPLK.

There are several benefits for companies that registered their employees as DPLK participants such as, free tax (Pph 25), as a means of preparing severance/pension funds for their employees (according to Law No. 13 of 2003 on Manpower) and they can report to the Ministry of Finance as the organizing agency pension fund.

Muamalat Institute

Muamalat Institute (MI) was founded in 1999, but its inception started in 1992 as an education institution called Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Perbankan Syariah (LPPBS), or Education Institution for Sharia Banking Development. Muamalat Institute has the following objectives:

1. *Improving the economic life of the community, especially Moslems in Indonesia through the establishment of institutions based on sharia principles.*
2. *Developing and promoting sharia financial institutions in Indonesia so that they can become one of the foundations of the national economy.*
3. *Generating quality professionals with excellent knowledge of Sharia economic principles so that they can play an important role in the economic growth of the country.*
4. *Developing, promoting and educating regarding the sharia economic system to the Indonesian people, especially Indonesian Moslem society. To reach these goals, MI provides services in the fields of research, training, consulting and publication.*

PT Syarikat Takaful Indonesia

PT Syarikat Takaful Indonesia (Perusahaan) berdiri pada 24 Februari 1994 atas prakarsa Tim Pembentukan Asuransi Takaful Indonesia (TEPATI) yang dimotori oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) melalui Yayasan Abdi Bangsa, PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, Syarikat Takaful Malaysia Bhd. (STM), PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, Departemen Keuangan RI, serta beberapa pengusaha muslim Indonesia. Melalui dua perusahaan operasionalnya, yaitu PT Asuransi Takaful Keluarga dan PT Asuransi Takaful Umum, Perusahaan melayani kebutuhan masyarakat Indonesia akan jasa asuransi dan perencanaan keuangan yang berlandaskan prinsip syariah.

PT Syarikat Takaful Indonesia

PT Syarikat Takaful Indonesia (Company) was established on February 24, 1994 on the initiative of the Formation Team of Takaful Insurance Indonesia (TEPATI) which was led by the Indonesian Moslem Intellectuals Association (ICMI) through Abdi Bangsa Foundation, PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, Syarikat Takaful Malaysia Bhd. (STM), PT Tugu Mandiri Life Insurance, the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia, and several other Indonesian Moslem entrepreneurs. Through its two operational companies, namely PT Asuransi Takaful Keluarga and PT Takaful Umum Insurance, the Company serves the needs of the Indonesian people for insurance and financial planning services based on sharia principles.

Entitas Asosiasi
Associates

Nama *Name*	Alamat *Address*	Bidang Usaha *Business Fields*	Kepemilikan Saham (%) *Share Ownership (%)*	Tahun Pendirian *Year of Establishment*	Status Operasi *Operation Status*
PT Al Ijarah Indonesia Finance (ALIF)	Menara Palma lantai 25, Jl. HR. Rasuna Said Blok X2 Kav. 6 Kuningan, Jakarta Selatan, 12950 Indonesia	Pembiayaan *Financing*	33,333	2006	Sudah beroperasi *Already in operation*
Yayasan Baitulmaal Muamalat (BMM)	Ruko Mitra Matraman Blok A1 No. 27, Jl. Matraman Raya, RT. 1/RW. 4, Kb. Manggis, Matraman. Jakarta Timur, 13150 Indonesia	Dana Sosial *Social Funds*		2000	Sudah beroperasi *Already in operation*
DPLK Muamalat	Gedung Muamalat Tower Lt. 10 Jalan Prof. Dr. Satrio Kav. 18 Karet Kuningan, Jakarta Selatan, 12940 Indonesia	Pengelola Dana Pensiun *Pension Fund Management*		1997	Sudah beroperasi *Already in operation*
Muamalat Institue	Jl. Tanjung Duren Raya No. 7 A-B-C, Jakarta Barat Grogol Petamburan, Jakarta Barat, 11470 Indonesia			1999	
PT Syarikat Takaful Indonesia	Graha Takaful Indonesia Jl. Mampang Prapatan Raya No. 100, Jakarta, 12790 Indonesia	Asuransi Syariah *Sharia Insurance*		1994	

Ventura Bersama

Joint Venture

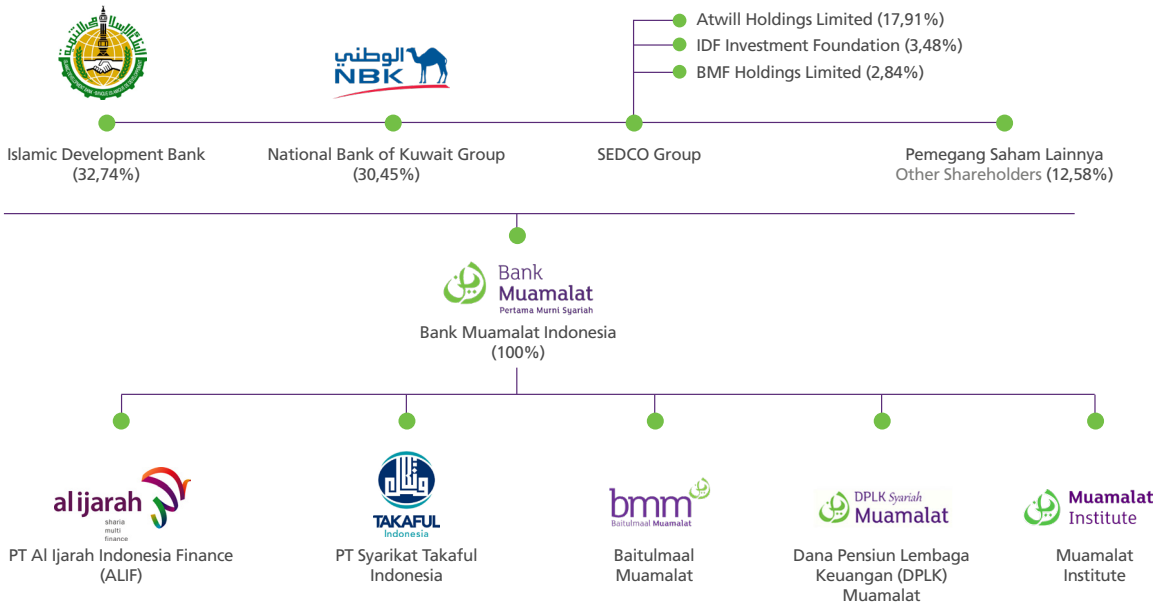
Special Purpose Vehicle

Hingga 31 Desember 2019, Bank Muamalat Indonesia tidak memiliki entitas Special Purpose Vehicle.

Special Purpose Vehicle

As of December 31, 2019, Bank Muamalat Indonesia does not have a Special Purpose Vehicle entity.

Struktur Grup Perusahaan
Corporate Group Structure



Lembaga dan/atau Profesi Penunjang
Supporting Institutions and/or Professionals

Biro Administrasi Efek *Securities Administration Bureau*	
Nama Lembaga/Profesi *Name of Institution/Profession*	PT Datindo Entrycom
Alamat *Address*	JL Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120 Telp. : (021) 350 8077 Fax. : (021) 350 8078
Jasa yang Diberikan *Services Provided*	Biaya Jasa Administrasi Saham *Stock Administration Services Fee*
Periode Penugasan *Assignment Period*	2013 sd sekarang *2013 up to present*
Biaya *Cost*	Rp198.000.000 per tahun *Rp198,000,000 per year*

Kustodian *Custodian*	
Nama Lembaga/Profesi *Name of Institution/Profession*	Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
Alamat *Address*	Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 1, Lt. 5 Jl. Jend. Sudirman kav. 52-53, Jakarta 12190 Indonesia Telp. : (021) 515 2855 Fax. : (021) 5299 1199
Jasa yang Diberikan *Services Provided*	Tempat penitipan kolektif dan administrasi produk pasar modal yang diterbitkan Bank *A place for collective safekeeping and administration of capital market products issued by the Bank*
Periode Penugasan *Assignment Period*	-
Biaya *Cost*	-

Kantor Akuntan Publik *Public Accountant Firm*	
Nama Lembaga/Profesi *Name of Institution/Profession*	Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali
Alamat *Address*	Menara Kuningan Lt. 11 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 5, Jakarta 12940 Indonesia
Jasa yang Diberikan *Services Provided*	Mengaudit Laporan Keuangan untuk Tahun Buku 2019 *Auditing Financial Statements for 2019 fiscal year*
Periode Penugasan *Assignment Period*	Tahunan buku 2019 *2019 fiscal year*
Biaya *Cost*	Biaya Audit tahunan sebesar Rp880.000.000 *Annual Audit Fee of Rp880,000,000*

Notaris *Notary*	
Nama Lembaga/Profesi *Name of Institution/Profession*	Ashoya Ratam S.H., Mkn.
Alamat *Address*	Jl. Suryo No. 54, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12180
Jasa yang Diberikan *Services Provided*	Pengurusan akta notariil Bank *Arrangement of Bank notary deed*
Periode Penugasan *Assignment Period*	2015 sd sekarang *2015 up to present*
Biaya *Cost*	Rp84.700.000,00 (Pengurusan akta RUPS) *Rp84,700,000,00 (Arrangement of AGMS & EGMS deed)*

Lembaga Pemeringkat *Rating Agencies*	
Nama Lembaga/Profesi *Name of Institution/Profession*	PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO)
Alamat *Address*	Panin Tower Senayan City Lantai 17, Jl. Asia Afrika Lot 19, Jakarta 10270 Telp. : (021) 7278 2380 Fax. : (021) 72782370
Jasa yang Diberikan *Services Provided*	Melaksanakan kegiatan pemeringkatan produk Bank *Carrying out bank product ranking activities*
Periode Penugasan *Assignment Period*	-
Biaya *Cost*	Rp84.700.000,00 (Pengurusan akta RUPS tahun 2019)

Wali Amanat *Trustee*	
Nama Lembaga/Profesi *Name of Institution/Profession*	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Alamat *Address*	Gedung BRI 1 Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46, Jakarta 10210
Jasa yang Diberikan *Services Provided*	Pihak yang mewakili kepentingan efek *The party representing the interests of securities*
Periode Penugasan *Assignment Period*	-
Biaya *Cost*	-

Konsultan Hukum *Legal Consultant*	
Nama Lembaga/Profesi *Name of Institution/Profession*	Assegaf Hamzah & Partners
Alamat *Address*	Capital Place, Level 36 & 37 Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 18, Jakarta 12710, Indonesia Telp. : (021) 2555 7800 Fax. : (021) 2555 7899 Email : www.ahp.co.id
Jasa yang Diberikan *Services Provided*	Memberikan layanan Konsultan Hukum *Providing Legal Consultant Services*
Periode Penugasan *Assignment Period*	-
Biaya *Cost*	-

Konsultan Hukum *Legal Consultant*	
Nama Lembaga/Profesi *Name of Institution/Profession*	Makes & Partners
Alamat *Address*	Menara Batavia, 7th Floor Jl KH. Mas Mansyur Kav. 126 Karet, Jakarta Pusat 10220, Indonesia Telp. : (021) 574 7181 Fax. : (021) 574 7180 Website : www.makeslaw.com
Jasa yang Diberikan *Services Provided*	Memberikan layanan konsultan hukum *Providing Legal Consultant Services*
Periode Penugasan *Assignment Period*	-
Biaya *Cost*	-

Jasa Berkala Profesi Penunjang Pasar Modal Tahun 2019
Capital Market Supporting Institution Periodical Services in 2019

Profesi Penunjang *Institution*	Jasa *Service*	Komisi (Fee) dalam Jutaan Rp (Termasuk Pajak) *Commission (Fee) in Millions of Rp (Tax Included)*	Periode Penugasan *Assignment Period*
Akuntan Publik *Public Accountant*	Mengaudit Jasa Keuangan Tahun Buku 2019 *Auditing Financial Services for 2019 Fiscal Year*	Biaya Audit tahunan Bank sebesar Rp880.000.000 *The annual audit fee of the Bank is Rp880,000,000*	Tahunan Buku 2019 *2019 Fiscal Year*
Konsultan Hukum *Legal Consultant*	Tidak Ada *None*	Tidak Ada *None*	Tidak Ada *None*
Penilai *Evaluator*	Tidak Ada *None*	Tidak Ada *None*	Tidak Ada *None*
Notaris *Notary*	Tidak Ada *None*	Tidak Ada *None*	Tidak Ada *None*

Informasi Website Perusahaan

Penerapan keterbukaan informasi di Bank Muamalat Indonesia mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Perusahaan Publik dan Emiten. Berdasarkan ketentuan tersebut, Perusahaan memuat informasi yang dipersyaratkan dan selalu disempurnakan dari tahun ke tahun dengan memperhatikan 4 (empat) bagian utama informasi yang wajib dimuat pada website perusahaan, yaitu:

1. Informasi umum emiten atau perusahaan publik;
2. Informasi bagi pemodal atau investor;
3. Informasi tata kelola perusahaan;
4. Informasi tanggung jawab sosial perusahaan.

Website Perusahaan biasanya dipergunakan sebagai alat untuk mempromosikan produk atau jasa yang ditawarkan oleh Perusahaan, dengan desain penyajian yang menarik, tampil dalam dua bahasa yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, terdapat logo Perusahaan sebagai identitas dan sistem navigasi yang simpel sehingga memudahkan pengunjungnya dalam mencari informasi. Data dan informasi yang ditampilkan senantiasa diperbaharui setiap kali ada perubahan, selain untuk memenuhi ketentuan peraturan juga menerapkan prinsip GCG.

Dengan tersedianya website Bank Muamalat sebagai sarana keterbukaan informasi tentang Perusahaan, diharapkan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat luas serta tentunya Pemegang Saham.

Informasi yang disajikan di dalam website Bank Muamalat Indonesia antara lain:

Company Website Information

The implementation of information disclosure at Bank Muamalat Indonesia refers to the Financial Services Authority Regulation No. 8/POJK.04/2015 concerning Public Company and Issuer Websites. Based on these provisions, the Company contains the information required and is always improved from year to year by taking into account four main sections of information that must be posted on the company's website, namely:

1. *General information of the issuer or public company;*
2. *Information for investors;*
3. *Corporate governance information;*
4. *Corporate social responsibility information.*

The Company's website is usually used as a means to promote products or services offered by the Company with an attractive presentation design and two languages namely English and Indonesian. There is a Company logo as an identity and a simple navigation system that makes it easy for visitors to find information. The data and information displayed is always updated when any change occurs in order to fulfill regulatory requirements and apply GCG principles.

With the availability of Bank Muamalat's website as a means of information disclosure about the Company, it is expected to increase public reliance and Shareholders towards the Company.

Information presented on the Bank Muamalat Indonesia website includes:

Kategori *Category*	Halaman Arsip *Archive Page*	Keterangan *Description*
Consumer & Retail Banking	Home	Menampilkan Berita dan artikel terkini tentang Bank Muamalat Indonesia, Produk Unggulan dan Promo, Kalkulator KPR, FAQ (Pendanaan), nomor call center, menu klik internet Banking dan Cash Management System, Kurs Jual Beli/suku bunga, serta alamat media sosial. *Displaying the latest news and articles about Bank Muamalat Indonesia, Featured Products and Promos, Mortgage Calculators, FAQs (Funding), call center numbers, internet banking and Cash Management System click menu, Buy and Sell rates/interest rates, and social media addresses.*
Coporate Banking	Produk dan Layanan Treasury *Treasury Product and Service*	Informasi singkat akan berbagai produk dan layanan yang diberikan oleh Bank Muamalat Indonesia seperti: Tabungan, Giro, Pembiayaan, Deposito, Trade Finance, International Banking, Layanan Corporate, Foreign Exchange, dan lainnya. *Brief information on various products and services provided by Bank Muamalat Indonesia such as: Savings, Current Accounts, Financing, Deposits, Trade Finance, International Banking, Corporate Services, Foreign Exchange, and others.*
e-Banking		Informasi layanan digital Bank Muamalat Indonesia seperti: Muamalat DIN (Digital Islamic Network), Mobile Banking Muamalat, Internet Banking Muamalat, ATM Muamalat, dan Gerai Muamalat. *Information on digital services of Bank Muamalat Indonesia such as: Muamalat DIN (Digital Islamic Network), Muamalat Mobile Banking, Muamalat Internet Banking, Muamalat ATM, and Muamalat Stores.*

Kategori *Category*	Halaman Arsip *Archive Page*	Keterangan *Description*
Tentang Muamalat *About Muamalat*	Profil Bank Muamalat Indonesia *Bank Muamalat Indonesia Profile*	Menjelaskan secara singkat akan sejarah Bank Muamalat Indonesia. *Briefly explaining the history of Bank Muamalat Indonesia.*
	Visi dan Misi *Vision and Mission*	Menampikan visi dan misi Bank Muamalat Indonesia. *Showing the vision and mission of Bank Muamalat Indonesia.*
	Manajemen Muamalat *Muamalat Management*	Menampilkan foto dan profil singkat para pejabat manajemen seperti: Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas, Sekretaris Perusahaan, Komite-Komite, dan Struktur Organisasi. *Displaying photos and brief profiles of management officials such as: Directors, Board of Commissioners, Board of Trustees, Corporate Secretary, Committees, and Organization Structure.*
	Anak Perusahaan *Subsidiary*	Informasi mengenai anak perusahaan. *Information about subsidiaries.*
	Penghargaan *Awards*	Foto dan narasi mengenai penghargaan yang diterima Bank Muamalat Indonesia sepanjang tahun 2019 hingga beberapa tahun terakhir. *Photos and narration about the awards received by Bank Muamalat Indonesia throughout 2019 and the last few years.*
	Hubungan Investor *Investor Relations*	Menampilkan semua data dan informasi mengenai laporan keuangan perbuan, per triwulan, laporan tahunan, laporan GCG, laporan keberlanjutan, laporan exposure risiko, Pemegang saham, sukuk, RUPS, alamat bagian hubungan investor sebagai keterbukaan akan informasi Perusahaan. *Displaying all data and information regarding monthly financial reports, quarterly reports, annual reports, GCG reports, sustainability reports, risk exposure reports, shareholders, sukuk, RUPS, address of investor relations as disclosure of Company information.*
	CSR	Menampilkan foto dan berita singkat akan kegiatan tanggung jawab sosial Perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. *Displaying photos and brief news about the Company's social responsibility activities towards the community and the surrounding environment.*
	Berita *News*	Artikel dan berita mengenai Bank Muamalat Indonesia terkini. *Latest articles and news about Bank Muamalat Indonesia.*
	Seputar Ayo Hijrah *About Ayo Hijrah*	Informasi seputar kampanye "Ayo Hijrah" yang digaungkan oleh Bank Muamalat Indonesia khususnya dalam hal layanan perbankan. *Information about the "Ayo Hijrah" campaign held by Bank Muamalat Indonesia, especially in terms of banking services.*
Hubungi Kami *Contact Us*	Kontak Perusahaan *Head Office Contact Information*	Berisikan alamat, nomor telepon, alamat email dan sosial media yang bisa diakses oleh masyarakat. *Containing an address, telephone number, e-mail address and social media that can be accessed by the public.*
	Pengaduan Nasabah *Customer Complaints*	Terdapat formulir pengaduan bila masyarakat merasa ada kejanggalan dalam pelayanan Bank Mualamat Indonesia dan akan menjamin kerahasiaan pelapor. *There is a complaint form if the public feels that there is something unusual about the service of Bank Mualamat Indonesia and Bank Mualamat Indonesia will guarantee the confidentiality of the reporter.*
	Edukasi Perbankan *Banking Education*	Informasi mengenai aturan perbankan dan hak-hak yang dimiliki oleh nasabah/konsumen. *Information about banking rules and customers/consumers rights.*
	Jaringan Muamalat *Muamalat Network*	Menyajikan alamat-alamat kantor cabang atau kantor kas untuk memudahkan masyarakat. *Presenting the addresses of branch offices or cash offices to facilitate public.*
	SalamMuamalat *SalaMuamalat*	Merupakan layanan telepon perbankan melalui jalur nomor 1500016 atau (021) 8066 8000 sehingga masrakat/nasabah mudah menghubungi selama 24 jam. *Banking telephone service through hotline 1500016 or (021) 8066 8000 so that people/customers can easily contact us for 24 hours.*
ZIswaf		Informasi dan tata cara untuk Cash Waqaf Linked sukuk. *Information and procedures for Cash Waqf Linked sukuk.*
Karir *Career*		Menginformasikan lowongan kerja yang terbuka di Bank Muamalat Indonesia disertai persayaratan dan info tanggal ditutup. *Informing available job vacancies at Bank Muamalat Indonesia with the requirements and the deadline of application.*

Program Pendidikan dan Pelatihan Manajemen

Management Training and Education Program

Pendidikan dan/atau Pelatihan Dewan Komisaris
Board of Commissionrs Education and/or Training

Nama *Name*	Jabatan *Position*	Nama Pelatihan/Workshop/Konfrensi/Seminar *Name of Training/Workshop/Conference/Seminar*	Lembaga Penyelenggara *Organizer*	Waktu dan Tempat *Time and Place*
Ilham Akbar Habibie	Komisaris Utama/ Komisaris Independen *President Commissioner/ Independent Commissioner*	- Keynote Speaker at Indonesia Economic Forum: Towards A $7 Trillion Economy: Opportunities & Challenges	Indonesia Economic Forum	20 November 2019
		- Narasumber dalam Silaturahmi Kerja Nasional ICMI dan Pertemuan Cendekiawan Muslim Se-Asia Tenggara - Keynote Speaker at Silaturahmi Kerja Nasional *ICMI and a gathering of Muslim scholars throughout Southeats Asia*	ICMI	Jakarta, 6 - 8 Desember 2019 *Jakarta on December 6-8, 2019*
		-Speaker for La Nuit des Idees 2019 – Face au Présent	Institut Francais Indonesia	31 January 2019
Iggi Haruman Achsien	Komisaris Independen *Independent Commissioner*	-Risk Govermance Master Class	CRMS Global	Manila, 18 sd 19 Oktober 2019 *Manila on October 18-19, 2019*
		-Workshop Pra-Ijtima'Sanawi Dewan Pengawas Syariah (DPS) Tahun 2019 Bidang Pasar Modal Syariah, Dewan Syariah Nasional	Dewan Syariah Nasional	Jakarta, 18 September 2019 *Jakarta on September 18, 2019*
Edy Setiadi	Komisaris Independen *Independent Commissioner*	- Speaker at Sharia Economy Seminar "Mari Berekonomi Syari'ah Agar Hidup Lebih Berkah"	Sharia Economic Community	Kuala Lumpur, 21 September 2019
		- Speaker at One-Day Seminar "2019 IKNB Business Prospects - Opportunities and Risks in a Challenging Year"	Stability Magazine	Jakarta, 12 March 2019
		- Speaker at Public Lecture "Prospective Sharia Banking Industry in 2020"	Indonesia Banking School	6 December 2019
		- Speaker at Indonesia Financial Sector Outlook 2020 Opportunities and Challenges amid Softening Global Economy 2020: Strengthening Risk Mitigation in Non Banking Industry "	LPPI	28 November 2019
Hedi Mejai	Komisaris *Commissioner*	- Speaker in Organisation of Islamic Cooperation (OIC)	Public Private Investment Forum	Istanbul, Turki, 9 - 10 December 2019
		- Speaker in Islamic Development Bank (IsDB)	PPP Forum	Rabat, Maroko, 10 March 2019

Pendidikan dan/atau Pelatihan Direksi
Board of Directors Education and/or Training

Nama *Name*	Jabatan *Position*	Nama Pelatihan/Workshop/Konfrensi/Seminar *Name of Training/Workshop/Conference/Seminar*	Lembaga Penyelenggara *Organizer*	Waktu dan Tempat *Time and Place*
Achmad Kusna Permana	Direktur Utama *President Director*	-Leadership Alignment Preparation Training	-ICLIF	-Jakarta pada 23 Januari 2019 *Jakarta on January, 23 2019*
		-Risk Govermance Master Class	-CRMS Global	-Singapore pada 29 Agustus 2019 *Singapore on August 29, 2019*
		-GRIT Forces to Leap Bank Muamalat	-Muamalat Institute	-Bandung pada 21 November 2019 *Bandung on November 21, 2019*

Pendidikan dan/atau Pelatihan Direksi
Board of Directors Education and/or Training

Nama *Name*	Jabatan *Position*	Nama Pelatihan/Workshop/Konfrensi/Seminar *Name of Training/Workshop/Conference/Seminar*	Lembaga Penyelenggara *Organizer*	Waktu dan Tempat *Time and Place*
Hery Syafril	Direktur Keuangan *Finance Director*	-Leadership Alignment Preparation Training *-Certified Professional Coach Program Phase 4*	-ICLIF	-Jakarta pada 23 Januari 2019 *Jakarta on January 23, 2019*
		-GRIT Forces to Leap Bank Muamalat *-GRIT Forces to Leap Bank Muamalat Indonesia*	-Muamalat Institute	-Bandung pada 21 November 2019 *Bandung on November 21, 2019*
Purnomo Budiwibowo Soetadi	Direktur Bisnis Ritel *Retail Banking Director*	-Leadership Alignment Preparation Training	-ICLIF	-Jakarta pada 23 Januari 2019 *Jakarta on January 23, 2019*
		-Refeshment RMC ("How do Bank Manage Liquidity Risk")	-LSPP	-Jakarta pada 23 Juli 2019 *Jakarta on July 23, 2019*
		-GRIT Forces to Leap Bank Muamalat	-Muamalat Institute	-Bandung pada 21 November 2019 *Bandung on November 21, 2019*
Awaldi	Direktur Operasi *Operation Director*	-Leadership Alignment Preparation Training	-ICLIF	-Jakarta pada 23 Januari 2019 *Jakarta on January 23, 2019*
		-Certified Professional Coach Program Phase 3	-LOOP Institute of Coaching	-Jakarta pada 15 Januari 2019 *Jakarta on January 15, 2019*
		-Community Service	-LOOP Institute of Coaching	-Jakarta pada 16 Februari 2019 *Jakarta on February 16, 2019*
		-Certified Professional Coach Program Phase 4	-LOOP Institute of Coaching	-Jakarta pada 15 April 2019 *Jakarta on April 15, 2019*
		-GRIT Forces to Leap Bank Muamalat Indonesia	-Muamalat Institute	-Bandung pada 21 November 2019 *Bandung on November 21, 2019*
Avianto	Direktur Risiko *Risk Director*	-Leadership Alignment Preparation Training	-ICLIF	-Jakarta pada 23 Januari 2019 *Jakarta on January 23, 2019*
		-GRIT Forces to Leap Bank Muamalat	-Muamalat Institute	-Bandung pada 21 November 2019 *Bandung on November 21, 2019*

Pendidikan dan/atau Pelatihan Direksi
Board of Directors Education and/or Training

Nama *Name*	Jabatan *Position*	Nama Pelatihan/Workshop/Konfrensi/Seminar *Name of Training/Workshop/Conference/Seminar*	Lembaga Penyelenggara *Organizer*	Waktu dan Tempat *Time and Place*
Andri Donny	Direktur Kepatuhan *Compliance Director*	-Creative Learning M@16 : Peranan Bank dalam Rezim APU&PPT -GRIT Forces to Leap Bank Muamalat	-Bank Muamalat Indonesia	-Jakarta pada 11 September 2019 *Jakarta on September 11, 2019*

Pendidikan dan/atau Pelatihan Komite Audit
Audit Committee Education and/or Training

Nama *Name*	Jabatan *Position*	Nama Pelatihan/Workshop/Konfrensi/Seminar *Training/Workshop/Conference/Seminar*	Lembaga Penyelenggara *Organizer*	Waktu dan Tempat *Time and Place*
Iggi Haruman Achsien	Ketua *Chairman*	-Risk Governance Master Class -Workshop Pra-Ijtima'Sanawi Dewan Pengawas Syariah (DPS) Tahun 2019 Bidang Pasar Modal Syariah, Dewan Syariah Nasional	CRMS Global Dewan Syariah Nasional	Manila, 18 sd 19 Oktober 2019 *Manila on October 18-19, 2019* Jakarta, 18 September 2019 *Jakarta on September 18, 2019*
Tindomora Siregar	Anggota *Member*	Communication & Writing Skill For Internal Audit	ACC Training	Jakarta, 30 sd 31 Januari 2019 *Jakarta on January 30-31, 2019*

Pendidikan dan/atau Pelatihan Komite Nominasi dan Remunerasi
Nomination and Remuneration Committee Education and/or Training

Nama *Name*	Jabatan *Position*	Nama Pelatihan/Workshop/Konfrensi/Seminar *Name of Training/Workshop/Conference/Seminar*	Lembaga Penyelenggara *Organizer*	Waktu dan Tempat *Time and Place*
Ilham Akbar Habibie	Ketua *Chairman*	- Keynote Speaker at Indonesia Economic Forum: Towards A $7 Trillion Economy: Opportunities & Challenges	Indonesia Economic Forum	20 November 2019
		- Narasumber dalam Silaturahmi Kerja Nasional ICMI dan Pertemuan Cendekiawan Muslim Se-Asia Tenggara - Keynote Speaker at Silaturahmi Kerja Nasional *ICMI and a gathering of Muslim scholars throughout Southeats Asia*	ICMI	Jakarta, 6 - 8 Desember 2019 *Jakarta on December 6-8, 2019*
		-Speaker for La Nuit des Idees 2019 – Face au Présent	Institut Francais Indonesia	31 January 2019
Iggi Haruman Achsien	Anggota *Member*	-Risk Governance Master Class	CRMS Global	Manila, 18 sd 19 Oktober 2019 *Manila on October 18-19, 2019*
		- Workshop Pra-Ijtima'Sanawi Dewan Pengawas Syariah (DPS) Tahun 2019 Bidang Pasar Modal Syariah	Dewan Syariah Nasional	Jakarta, 18 September 2019 *Jakarta on September 18, 2019*

Pendidikan dan/atau Pelatihan Komite Nominasi dan Remunerasi
Nomination and Remuneration Committee Education and/or Training

Nama *Name*	Jabatan *Position*	Nama Pelatihan/Workshop/Konfrensi/Seminar *Name of Training/Workshop/Conference/Seminar*	Lembaga Penyelenggara *Organizer*	Waktu dan Tempat *Time and Place*
Riksa Prakoso	Anggota *Member*	- Leadership Alignment Preparation Training	-ICLIF	-Jakarta pada 23 Januari 2019 *Jakarta on January 23, 2019*
		- Certified Professional Coach Program Phase 1	-LOOP Institute of Coaching	-Jakarta pada 20 Maret 2019 *Jakarta on March 20, 2019*
		- Certified Profesional Coach Program Phase 2	-LOOP Institute of Coaching	-Jakarta pada 15 Mei 2019 *Jakarta on May 15, 2019*
		-Certified Profesional Coach Program Phase 3	-LOOP Institute of Coaching	-Jakarta pada 26 Juni 2019 *Jakarta on June 26, 2019*
		-Certified Profesional Coach Program Phase 4	-LOOP Institute of Coaching	-Jakarta pada 15 Agustus 2019 *Jakarta on August 15, 2019*
		-GRIT Forces to Leap Bank Muamalat	-Muamalat Institute	-Bandung pada 21 November 2019 *Bandung on November 21, 2019*
Edy Setiadi	Anggota *Member*	- Speaker at Sharia Economy Seminar "Mari Berekonomi Syari'ah Agar Hidup Lebih Berkah"	Sharia Economic Community	Kuala Lumpur, 21 September 2019
		- Speaker at One-Day Seminar "2019 IKNB Business Prospects - Opportunities and Risks in a Challenging Year"	Stability Magazine	Jakarta, 12 March 2019
		- Speaker at Public Lecture "Prospective Sharia Banking Industry in 2020"	Indonesia Banking School	6 December 2019
		- Speaker at Indonesia Financial Sector Outlook 2020 Opportunities and Challenges amid Softening Global Economy 2020: Strengthening Risk Mitigation in Non Banking Industry "	LPPI	28 November 2019
Hedi Mejai	Anggota *Member*	- Speaker in Organisation of Islamic Cooperation (OIC)	Public Private Investment Forum	Istanbul, Turki, 9 - 10 Desember 2019
		- Speaker in Islamic Development Bank (IsDB)	PPP Forum	Rabat, Maroko, 10 Maret 2019

Pendidikan dan/atau Pelatihan Komite Pemantau Risiko
Risk Monitoring Committee Education and/or Training

Nama *Name*	Jabatan *Position*	Nama Pelatihan/Workshop/Konfrensi/ Seminar *Name of Training/Workshop/Conference/Seminar*	Lembaga Penyelenggara *Organizer*	Waktu dan Tempat *Time and Place*
Edy Setiadi	Ketua *Chairman*	- Speaker at Sharia Economy Seminar "Mari Berekonomi Syari'ah Agar Hidup Lebih Berkah	Sharia Economic Community	Kuala Lumpur, 21 September 2019
		- Speaker at One-Day Seminar "2019 IKNB Business Prospects - Opportunities and Risks in a Challenging Year"	Stability Magazine	Jakarta, 12 March 2019
		- Speaker at Public Lecture "Prospective Sharia Banking Industry in 2020"	Indonesia Banking School	6 December 2019

Pendidikan dan/atau Pelatihan Komite Pemantau Risiko
Risk Monitoring Committee Education and/or Training

Nama *Name*	Jabatan *Position*	Nama Pelatihan/Workshop/Konfrensi/ Seminar *Name of Training/Workshop/Conference/Seminar*	Lembaga Penyelenggara *Organizer*	Waktu dan Tempat *Time and Place*
Edy Setiadi	Ketua *Chairman*	- Speaker at Indonesia Financial Sector Outlook 2020 Opportunities and Challenges amid Softening Global Economy 2020: Strengthening Risk Mitigation in Non Banking Industry "	LPPI	28 November 2019

Pendidikan dan/atau Pelatihan Komite Tata Kelola Perusahaan
Corporate Governance Committee Education and/or Training

Nama *Name*	Jabatan *Position*	Nama Pelatihan/Workshop/Konfrensi/Seminar *Name of Training/Workshop/Conference/Seminar*	Lembaga Penyelenggara *Organizer*	Waktu dan Tempat *Time and Place*
Edy Setiadi	Ketua *Chairman*	- Speaker at Sharia Economy Seminar "Mari Berekonomi Syari'ah Agar Hidup Lebih Berkah	Sharia Economic Community	Kuala Lumpur, 21 September 2019
		- Speaker at One-Day Seminar "2019 IKNB Business Prospects - Opportunities and Risks in a Challenging Year"	Stability Magazine	Jakarta, 12 March 2019
		- Speaker at Public Lecture "Prospective Sharia Banking Industry in 2020"	Indonesia Banking School	6 December 2019
		- Speaker at Indonesia Financial Sector Outlook 2020 Opportunities and Challenges amid Softening Global Economy 2020: Strengthening Risk Mitigation in Non Banking Industry "	LPPI	28 November 2019
Hedi Mejai	Anggota *Member*	- Speaker in Organisation of Islamic Cooperation (OIC)	Public Private Investment Forum	Istanbul, Turki, 9 - 10 Desember 2019
		- Speaker in Islamic Development Bank (IsDB)	PPP Forum	Rabat, Maroko, 10 Maret 2019

Pendidikan dan/atau Pelatihan Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary Education and/orTraining

Nama *Name*	Jabatan *Position*	Nama Pelatihan/Workshop/Konfrensi/Seminar *Name of Training/Workshop/Conference/Seminar*	Lembaga Penyelenggara *Organizer*	Waktu dan Tempat *Time and Place*
Hayunaji	Head of Corporate Affairs	Komunikasi Internal di Era 4.0 *Internal Communication in Era 4.0*	-Badan Pengurus Pusat Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia *-Board of Indonesian Public Relations Association*	Jakarta, 28 Februari 2019 *Jakarta, February 28, 2019*
		Pengembangan Integrasi Sistem Pelaporan Elektronik (SPE) dan IDXNET *Development of Electronic Reporting System (SPE) and IDXNET*	-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia *-Financial Services Authority (OJK) and Indonesia Stock Exchange*	Jakarta, 14 Mei 2019 *Jakarta, May 14, 2019*
		The Importance of Records Management	-Crown Records Management	Jakarta, 9 Agustus 2019 *Jakarta, August 9, 2019*
		Indonesian National Risk Asessment on Money Laundering & Terrorist Financing	-PPATK	Jakarta, 11 September 2019 *Jakarta, September 11, 2019*
		Online Single Submission (OSS) dan Hal – Hal yang Perlu Dilakukan oleh Perusahaan Terbuka	- ICSA (Indonesia Corporate Secretary Association) dan Bursa Efek Indonesia	Jakarta, pada 8 Oktober 2019 *Jakarta, on October 8, 2019*
		Strategi Nasional Pencegahan Korupsi	- Tim Sekretariat Stranas PK *-The Stranas PK Secretariat Team*	Bandung, 13 Desember 2019 *Bandung, December 13, 2019*

Pendidikan dan/atau Pelatihan Unit Audit Internal
Internal Audit Unit Education and/or Training

Nama *Name*	Jabatan *Position*	Nama Pelatihan/Workshop/Konfrensi/Seminar *Name of Training/Workshop/Conference/Seminar*	Lembaga Penyelenggara *Organizer*	Waktu dan Tempat *Time and Place*
Ridwan Moezwir *)	Head of Internal Audit	Senior Management Forum Q1 2020	Bank Muamalat Indonesia	Jakarta, 16 Januari 2019 *Jakarta, January 16, 2019*
		Creative Learning M@16 : Sosialisasi Prosedur Pelaksanaan Audit	Bank Muamalat Indonesia	Jakarta, 20 Desember 2019 *Jakarta, December 20, 2019*
		Business Corner - Tipologi Kejahatan Perbankan	Candra Advocate & Counselor at Law	Jakarta, 12 Desember 2019 *Jakarta, December 12, 2019*
		Creative Learning M@16 : Workshop Penyusunan RKAT 2020 Internal Audit	Bank Muamalat Indonesia Tbk	Jakarta, 14 November 2019 *Jakarta, November 14, 2019*
		Service Strategy Workshop	Lentera Consulting	Jakarta, 23 Oktober 2019 *Jakarta, October 23, 2019*
		Creative Learning M@16: Jangan Grogi jadi Saksi	Bank Muamalat Indonesia	Jakarta, 10 Oktober 2019 *Jakarta, October 10, 2019*
		Creative Learning M@16 : Peranan Bank dalam Rezim APU&PPT	Bank Muamalat Indonesia	Jakarta, 11 September 2019 *Jakarta, September 11, 2019*
		Individual Learning Development Plan (ILDP) Creative Thinking For Innovation	Bank Muamalat Indonesia	Jakarta, 26 Agustus 2019 *Jakarta, August 26, 2019*
		Job Evaluation Training 2019	Willis Tower Watson	Jakarta, 15 Juli 2019 *Jakarta, July 15, 2019*
		Sharia Banking Training For Executive	Bank Muamalat Indonesia	Jakarta, 27 Maret 2019 *Jakarta, March 27, 2019*

*) masa tugas telah berakhir pada tanggal 31 Januari 2020
**) service periode ended on January 31, 2020*

Pendidikan dan/atau Pelatihan Departemen Manajemen Risiko
Risk Management Department Education and/or Training

Nama *Name*	Jabatan *Position*	Nama Pelatihan/Workshop/Konfrensi/Seminar *Name of Training/Workshop/Conference/Seminar*	Lembaga Penyelenggara *Organizer*	Waktu dan Tempat *Time and Place*
Catur Andayani	Head of Enterprise Risk Management	Creative Learning M@16 : Mortgage Workshop Sosialisasi Prosedur Pelaksanaan Audit	Bank Muamalat Indonesia	Jakarta, 20 Desember 2019 *Jakarta, December 20, 2019*
		Business Corner - Tipologi Kejahatan Perbankan *Business Corner - Banking Crime Typology*	Candra Advocate & Counselor at Law	Jakarta, 12 Desember 2019 *Jakarta, December 12, 2019*
		Service Strategy Workshop	Lentera Consulting	Jakarta, 23 Oktober 2019 *Jakarta, October 23, 2019*
		Creative Learning M@16: Jangan Grogi jadi Saksi *Creative Learning M@16: Don't be nervous about being a witness*	Bank Muamalat Indonesia	Jakarta, 10 Oktober 2019 *Jakarta, October 10, 2019*
		Graduation MODP FL 2: MODP FL 2	Bank Muamalat Indonesia	Jakarta, 7 Oktober 2019 *Jakarta, October 7, 2019*
		Creative Learning M@16: Update Sektor Properti *Creative Learning M@16: Property Sector Update*	Bank Muamalat Indonesia	Jakarta, 20 September 2019 *Jakarta, September 20, 2019*
		Creative Learning M@16 : Peranan Bank dalam Rezim APU&PPT *Creative Learning M@16: The Role of Banks in the AML & CFT Regime*	Bank Muamalat Indonesia	Jakarta, 11 September 2019 *Jakarta, September 11, 2019*
		Individual Learning Development Plan (ILDP) Creative Thinking for Innovation	Bank Muamalat Indonesia	Jakarta, 26 Agustus 2019 *Jakarta, August 26, 2019*
		Job Evaluation Training 2019	Willis Tower Watson	Jakarta, 15 Juli 2019 *Jakarta, July 15, 2019*



04.

Analisis dan Pembahasan Manajemen

Management Discussion and Analysis



Tinjauan Industri
Industry Overview

Kondisi Ekonomi Global

Perekonomian global pada sepanjang tahun 2019 terus mengalami kontraksi pertumbuhan, dimana konflik perang dagang antara Tiongkok dan Amerika masih menjadi topik utama bagi kebanyakan perekonomian dunia. Dimana konflik dua negara ini banyak mengakibatkan kontraksi ekonomi di banyak negara terutama negara-negara yang menjadikan kedua negara tersebut sebagai mitra dagang utama. Selain konflik perdagangan antara Tiongkok dan China yang banyak menjadi triger perekonomian isu Brexit di Inggris dan juga demo besar yang terjadi di Hong Kong beberapa waktu yang lalu turu berkontribusi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dunia.

Pada Q4 2019 perekonomian Amerika berada pada level pertumbuhan 2,3% melemah jika dibandingkan dengan angka pada Q4 2018 yang berada pada 2,5%, pelemahan pertumbuhan perekonomian ini banyak disebabkan oleh perlambatan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan pada tahun 2019 yang mencerminkan penurunan laba bisnis perusahaan di Amerika yang mana hal ini berkontribusi pada penurunan nilai investasi pada sektor bisnis. Selain itu ketidakpastian tentang kebijakan perdagangan (Presiden Trump) juga menghambat pertumbuhan ekonomi Amerika pada tahun 2019. Di sisi lain pertumbuhan negara Tiongkok juga mengalami hal serupa dimana pada Q4 2019 ini pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 6,0% melemah 7,36% secara YoY. Perlambatan ekonomi ini merupakan akibat dari melambatnya pertumbuhan sektor manufaktur Tiongkok yang merupakan titik terlemah dalam 17 tahun terakhir. Selain sektor ekonomi retail yang menurun juga turut mendukung perlambatan pertumbuhan ekonomi Tiongkok.

Selain itu dari sisi pasar keuangan global juga mengalami pergeseran investasi, dimana banyak pelaku pasar mencoba mencari aman dengan menempatkan investasi mereka kepada investasi yang dianggap aman seperti obligasi pemerintah AS dan Jepang, serta komoditas emas.

Perlambatan ekonomi yang terjadi sepanjang tahun 2019 juga berpengaruh kepada proyeksi yang dilakukan oleh IMF, dimana IMF sepanjang tahun 2019 telah dua kali melakukan koreksi terhadap proyeksi pertumbuhan ekonomi global 2019. Proyeksi yang semula ditetapkan sebesar 3,5% pada Januari diturunkan sebanyak 0,2% pada bulan April 2019. Angka itu kemudian diturunkan lagi menjadi 3,0% pada Oktober 2019.

Merespon perlambatan pasar tersebut Bank Sentral AS (The Federal Reserve) tercatat dua kali menurunkan suku bunga acuan menjadi 1,75%-2,00% demi mendorong perekomiannya agar tetap tumbuh dan tidak terus tenggelam. Sementara pemerintah Tiongkok juga terus meningkatkan kewaspadaannya dimana Presiden Xi Jin Ping telah menyerukan kepada seluruh pelaku ekonomi di Tiongkok untuk mempertahankan kewaspadaan tingginya terhadap situasi *"black swan"* sementara kondisi yang mengarah pada *"grey rhino"*

Global Economic Outlook

The global economy in 2019 experienced constant growth, where trade war between China and the U.S. is still the main topic among the world economic industry. The conflict between the two countries has caused economic contraction in many different countries, especially the major trading partners of these two countries. Aside from the trade war between China and the U.S. which becomes the trigger of Brexit in U.K and large protests in Hong Kong some time ago, it also contributes to the world economic growth.

The U.S. economy growth in 2019 Q4 is on the level of 2.3%, lower compared to the figure in 2018 Q4, which was on 2.5%. The decline in economic growth is due to overall slower economic growth in 2019, which are reflected on the decreasing profit in various business in America and causing the decrease in investment values in the business sector in general. Aside from that, uncertainty regarding the trade policy (President Trump) has also constrained the U.S. economic growth in 2019. On the other hand, China's growth has also experienced the same thing where in 2019 Q4, the economic growth was recorded at 6.0%, decreasing 7.36% compared to the previous year. The economic slowdown is the impact of the slowdown in growth in China manufacturing industry, which is the lowest in the past 17 years. Aside from the declining retail economic sector, it also contributes to the slowing down of China's economic growth.

The global financial market also experienced a shift in investment, where many market players are searching for a safety net by placing their investments on the ventures that are considered safe such as Japan and U.S. Government Bond, as well as gold commodity.

The economy also slowed down throughout 2019, which impact the IMF projection, where IMF has revised the global economic growth projection twice in 2019. The projection, set at 3.5% on January was revised by 0.2% on April 2019. The number was then revised again to 3.0% on October 2019.

In response to the slowing down market, the U.S. Federal Reserve lowered the base interest rate twice to 1.75%-2.00% in order to maintain their economic growth and stability. Meanwhile, the Chinese government has also increased its awareness, where President Xi Jin Ping has instructed to all market players in China to always be alert on the 'black swan' sittuation as the condition which is leaning towards

harus segera hindari demi menjaga momentum pertumbuhan perekonomiannya.

Terkait dengan perlambatan ekonomi dua negara ini banyak ekonom memiliki kekhawatiran karena efek dari perlambatan tersebut bersifat sistemik terhadap banyak negara. Jika perlambatan ekonomi kedua negara tersebut terlalu cepat, akan menjadi masalah nyata bagi baik bagi internal negara tersebut ataupun krisis ekonomi yang dialami oleh negara mitra.

Kedepannya kita berharap negosiasi dagang antara Amerika dan China bisa berjalan dengan baik dan ekonomi bisa kembali menemukan momentum untuk bisa *rebound*. Kedua negara telah mengambil langkah nyata dengan menanda tangani perjanjian yang akan menurunkan tarif dan akan meningkatkan volume dari perdagangan. Angin segar ini tentunya harus ditindak lanjuti dengan langkah-langkah konkrit oleh kedua negara agar efeknya bisa juga dirasakan oleh negara mitra dagang lainnya. Disisi lain dengan harapan pulihnya hubungan ekonomi dua negara kuat ini diharapkan ekonomi kedepannya bisa lebih stabil dan pertumbuhan perekonomian bisa kembali bergeliat.

'grey rhino' has to be avoided immideately to preserved the economic growth momentum.

In relation to the slowing down of these two countries' economy, many economist have expressed their concern on the effect, which may be sistemic to different countries. If the economic slow down happens too fast, then it will become an actual problem for the country internally or creating economic crisis in the countries which become their partners.

Moving forward, we're hoping that the trade negotiation between U.S. and China will go well and economy can find its momentum to do a rebound. The two countries have taken an existing step by signing an agreement to reduce the tariff and increase the trade volume. This relief should be followed up by concrete steps from both countries so the impact can also be extended to the partners. On the other side, with the hope that economic relation between both countries can recover, economy can stay stable and increase the economic growth.

Kondisi Ekonomi Indonesia

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2019 secara *year on year* tercatat sebesar 5,02% sedikit di bawah pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2018 yang tercatat sebesar 5,17%. Sementara pertumbuhan Indonesia jika dilihat pada kuartal IV tercatat tumbuh sebesar 4,97% lebih rendah dari pertumbuhan kuartal IV-2018 yang sebesar 5,17%, begitupula jika dilihat dari pertumbuhan di kuartal III-2019 yang sebesar 5,02%. Melambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia ini adalah dampak dari melemahnya perdagangan global dan lesunya investasi yang masuk ke Indonesia.

Salah satu faktor yang menyebabkan seretnya modal masuk ke Indonesia dikarenakan naiknya risiko investasi yang dipicu oleh perang dagang antara Amerika dan China. Selain itu melemahnya pertumbuhan ekonomi Indonesia juga didorong oleh melemahnya perekonomian mitra dagang utama Indonesia seperti Singapura dan Korea Selatan.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia selam tahun 2019 didorong oleh 3 faktor utama yang menjadi motor pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) yaitu Industri lainnya, jasa perusahaan dan Informasi dan Komunikasi. Jika dilihat dari struktur PDB ketiga jasa tersebut memiliki pertumbuhan yang palng signifikan dibandingkan dengan sektor jasa yang lain. Sektor jasa lainnya misalnya berdasar data yang dirilis oleh BPD selama tahun 2019 tumbuh 10,78% yoy, industri jasa perusahaan tumbuh 10,49% yoy dan industri Informasi dan Komunikasi tumbuh 9,71%.

Indonesian Economic Outlook

The Indonesian economic growth in 2019, compared year on year, was recorded at 5.02% slightly under the Indonesia economic growth in 2018, which was recorded at 5.17%. While, Indonesian growth on 4th quarter was recorded at 4.97% lower than the previous year which was 5.17%, and on from 3rd quarter growth of 5.02%. The slow economic growth was due to the decline of global trade and drop of investments in Indonesia.

One of the factors which caused the delay of capital entrance to Indonesia is the increase of investment risk due to U.S. and China trade war. Other factor which caused the decline in Indonesian economic growth is the decline in economic growth of primary trade partners like Singapore and South Korea.

In 2019, Indoensian economic growth has been influenced by 3 key factors, which are the driver of growth in Gross Domestic Product (GDP), namely supplementary industries, service company, as well as information and communication. Based on the GDP stucture, the three service companies have the most significant growth compared to other service sectors. Supplementary service sectors for example, according to the data released by BPD in 2019, grew 10.78% compared to the same period previous year, while service industry companies grew 10.49% compared to the same period previous year, while Information and Communication industry grew 9.71%.

Jika dilihat dari struktur dan pertumbuhan PDB menurut pengeluaran pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan PMBT menjadi 2 faktor utama yang mendorong pertumbuhan PDB. Dimana sub sektor Makanan, Minuman dan Selain Restoran menjadi kontributor utama dari pertumbuhan konsumsi rumah tangga ini.

Based on the GDP growth and structure, according to expenditure growth in household consumption and PMBT, they have became the 2 main factors which pushed the PDM growth. Meanwhile,various sub-sectors, such as food and drinks, and aside from restaurant, have become the main contributor from the growth in household consumption.

Dari sisi inflasi pada tahun 2019 ini Indonesia mengalami tingkat inflasi sebesar 2,72% secara yoy. tingkat inflasi ini merupakan tingkat inflasi terendah selama 10 tahun belakangan dan jauh dari dibawah target pemerintah yang berada pada kisaran 3,5%.

In accordance with the 2019 inflation, Indonesia's inflation rate was 2.72% compared to the same period previous year. This inflation is the lowest in the past 10 years and much lower under the government target which are around 3.5%.

Nilai tukar rupiah pada tahun 2019 ditutup menguat terhadap beberapa mata uang negara lain. Nilai tukar rupiah terhadap Dollar Amerika tercatat pada Rp13.901 per tanggal 31 Desember 2019 turun 4,06% jika dibandingkan dengan nilai tukar terhadap Dollar Amerika diawal tahun 2019 yang tercatat sebesar Rp14.465.

Rupiah exchange rate in 2019 was closed stronger than several other foreign currencies. Rupiah against U.S. Dollar was recorded at Rp13,901,- as of December 31, 2019, decreasing 4.06% when compared to the value in the beginning of the year 2019, which was Rp14,465.

Sementar itu posisi cadangan devisa Indonesia tercatat sebesar $129,2 Juta per 31 Desember 2019. Angka ini jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun lalu yang sebesar $120,7. Posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 7,6 bulan impor atau 7,3 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Bank sentral menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Perkembangan cadangan devisa pada Desember 2019 terutama dipengaruhi oleh penerimaan devisa migas, penarikan pinjaman luar negeri pemerintah, dan penerimaan valas lainnya.

While the foreign exchange reserve position is recorded at $129.2 million as of December 31, 2019, this number is far higher compared to the previous year of $120.7 million. The foreign exchange reserve position is equal to financing of 7.6 months of imports or 7.3 months of imports and payment of government foreign debts, as well as being above the international standard of sufficiency around 3 months of imports. The central bank sees the foreign exchange reserve is able to support the external sector resilience as well as stabilizing the macroeconomy and financial system. The growth of foreign exchange reserve on December 2019 was influenced by foreign exchange in oil and gas sector, withdrawal of government foreign loans and other foreign exchange incomes.

Kondisi Industri Perbankan

Banking Industry Outlook

Di tengah kondisi ekonomi global dan nasional yang cukup menantang, industri perbankan masih dapat menjalankan fungsi intermedianya dengan cukup baik. Namun demikian, pertumbuhan industri perbankan tahun 2019 relatif lebih lambat dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jumlah kredit yang diberikan bank mengalami pertumbuhan sebesar 6,77% (Nov to Nov) dibandingkan tahun sebelumnya. Total kredit yang diberikan Bank mencapai Rp5.947.800 miliar (Oktober 2019) dibandingkan Rp5.573.389 miliar pada periode yang sama pada tahun 2018. Pertumbuhan penyaluran kredit tersebut berada sedikit diatas pertumbuhan tahun sebelumnya secara y-o-y.

In the midst of challenging global and national economic condition, banking industry is still able to function well. However, the growth of banking industry in 2019 is relatively slower compared to the previous year. Based on the data of Financial Services Authority (OJK), the amount of credit provided by the bank has grown 6.77% (Nov to Nov) compared to the previous year. The total credit provided by the Bank reached Rp5,947,800 billions (October 2019) compared to Rp5,573,389 billions compared to the same period in 2018. The growth of lending is slightly above average compared to the same period previous year.

Total aset industri perbankan tahun 2019 (hingga November) mencapai Rp8.410.906 miliar, meningkat 6,77% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp7.877.836 miliar.

The total of banking industry asset in 2019 (up to November) reached Rp8,410,906 billion, increasing 6.77% compared to the previous year which was Rp7,877,836 billion.

Industri perbankan syariah tumbuh lebih tinggi dibandingkan perbankan umum. Total aset industri perbankan syariah (hingga November) tahun 2019 mencapai Rp507.761 miliar, meningkat 6,38% dibandingkan pada periode yang sama pada tahun sebelumnya Rp477.327 miliar. Sementara jika diukur dari pertumbuhan year to date selama tahun 2019 industri perbankan syariah tumbuh 8,77% dari awal tahun 2019, dimana pada Desember 2018 total aset bank syariah tercatat sebesar Rp466.800 milliar.

The Sharia banking industry grew higher compared to the general banking industry. The total of Sharia banking industry asset in 2019 (up to November) reached Rp507,761 billion, increasing 6.38% compared to the previous year which was Rp477,327 billion. Meanwhile, based on the year-to-date growth in 2019, Sharia banking industry has grown 8.77% from the beginning of 2019, where the total asset of sharia bank was recoded at Rp466,800 billion on December 2018.

Pertumbuhan aset perbankan syariah secara *year to date* tersebut utamanya ditunjang oleh peningkatan pembiayaan bagi hasil yang pada tahun 2019 (hingga Novermber) naik 14,69% menjadi Rp166.880 miliar, dari posisi akhir tahun 2018 sebesar Rp145.507 miliar. Nilai total pembiayaan yang berhasil disalurkan oleh bank syariah secara year to date juga mengalami peningkatan sebesar 8,95%, dimana pada awal akhir 2018 total pembiayaan yang berhasil disalurkan oleh Bank Syariah tercatat sebesar Rp320.240 milliar. Sementara dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun perbankan syariah tahun 2019 (year to date) mencapai Rp408.397 miliar, meningkat 9,83% dibandingkan akhir tahun tahun 2018 yang tercatat sebesar Rp371.828 miliar.

The growth of Sharia banking asset in year-to-date is mainly supported by the increase of profit sharing financing in 2019 (up to November) increased 14.69% to Rp166,880 billion, from the end of 2018 of Rp145,507 billion. The total financial value sucessfully distributed by Sharia bank in year-to-date also increased 8.95%, where in the beginning of 2018, total financial value sucessfully distributed by Sharia bank was recorded Rp320,240 billion. Meanwhile, Sharia bank successfully collected 3rd party fund in 2019 (year-to-date) of Rp408.397 billion, increasing 9.83% compared to the end of 2018 which was Rp371,828 billion.

Hal yang masih perlu untuk di waspadai adalah masih relatif tingginya rasio pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*/NPF) perbankan syariah yang di tahun 2019 (*year to date*) adalah sebesar 3,49%. Dibandingkan posisi akhir tahun 2018, NPF perbankan syariah mengalami peningkatan, 21 bps dimana pada Desember 2018 posisi NPF perbankan syariah adalah sebesar 3,26%.

The high ratio of Non-Performing Financing (NPF) of the Sharia banking has been a consideration which in 2019 (year-to-date) reached 3.49%. Compared to the end of year 2018, Sharia banking NPF sees an increase, 21 bps where in December 2018, the NPF position of Sharia banking was only 3.26%.

Pada sisi pendapatan perbankan syariah berhasil membukukan peningkatan margin yang cukup signifikan, dimana pada bulan November 2019 ytd perbankan syariah membukukan laba sebelum pajak sebesar Rp7.941 milliar naik 14,53% dibandingkan dengan posisi pada akhir tahun 2018 yang tercatat sebesar Rp6.934 milliar.

Based on the income, Sharia banking sucessfully recorded significant income margin, where in November 2019 (year-to-date), Sharia Banking recorded profit before tax of Rp7,941 billion, increasing 14.53% compared to end of 2018, which was Rp6,934 billion.

Kinerja sektor jasa keuangan yang cukup baik ini didukung oleh berbagai macam inisiatif yang di luncurkan OJK dan Bank Indonesia baik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi maupun menyediakan sumber dana pembiayaan jangka panjang.

The good performance of financial services sector is supported by different initiatives by OJK and Bank Indonesia, be it the ones that supported the growth of economy or provide long-term source of funding.

Posisi Bank Muamalat Indonesia di Industri Perbankan Syariah

Bank Muamalat Indonesia sebagai pioneer di industri perbankan syariah Indonesia memiliki posisi yang unik dan sekaligus menjadi tantangan tersendiri khususnya bagi pengembangan bisnisnya. Sebagai pioneer Bank Muamalat Indonesia menginisiasi beberapa lembaga keuangan maupun non-keuangan yang memiliki kaitan terhadap industri keuangan syariah di Indonesia. Bank Muamalat Indonesia memiliki peran yang cukup besar dalam pendirian Multifinance Syariah, Asuransi Syariah, DPLK syariah, hingga pendirian lembaga pelatihan maupun lembaga zakat dan sosial.

Bank Muamalat Indonesia Position in Sharia Banking Industry

Bank Muamalat Indonesia as the pioneer in Sharia banking industry in Indonesia holds a unique position, while providing challenge especially in business development. As the pioneer, Bank Muamalat Indonesia initiated various financial and non-financial institutions which are related to Sharia banking industry in Indonesia. Bank Muamalat Indonesia has a substantial role in the establishment of Multifinance Syariah, Asuransi Syariah, DPLK syariah as well as training institutions, zakat and social institutions.

Bank Muamalat Indonesia juga menjadi bank syariah pertama dan satu-satunya yang memiliki cabang penuh di luar negeri. Namun, Bank Muamalat Indonesia tidak akan cukup berpuas diri hanya dengan status sebagai pelopor industri perbankan syariah di Indonesia saja, tetapi akan senantiasa meningkatkan performa bisnisnya melalui layanan prima di seluruh jaringan kantornya dan senantiasa mengembangkan produk serta jasa yang dapat mendukung kebutuhan nasabah baik perorangan maupun korporasi. Bank Muamalat Indonesia yakin, dengan dukungan pemerintah, otoritas, maupun bank sentral, penetrasi industri perbankan syariah akan semakin tinggi dan Bank Muamalat Indonesia akan senantiasa mempersiapkan diri untuk dapat bersaing dalam kompetisi antar perbankan syariah dan juga perbankan nasional.

Bank Muamalat Indonesia also becomes the first and only Sharia bank with overseas branches. However, Bank Muamalat Indonesia isn't just satisfied of becoming the pioneer of Sharia banking industry in Indonesia but also determined to escalate its business performance through prime services in all branches, and keep developing products and services to support the customers need, both corporate and individuals. Bank Muamalat Indonesia is certain, with the support from government, authority, and central bank, Sharia banking industry will penetrate faster. Bank Muamalat Indonesia will be ready to compete in the Sharia and national banking industry competition.

Secara garis besar, kondisi Bank Muamalat Indonesia saat ini dapat ditinjau melalui tabel analisa SWOT berikut ini:

In general, the condition of Bank Muamalat Indonesia today can be seen through this SWOT analysis table:

S	W	O	T
STRENGTHS	**WEAKNESSES**	**OPPORTUNITIES**	**THREATS**
• Pelopor Bank Syariah • Top of Mind • Jaringan yang Luas • Basis Nasabah yang Besar & Loyal • Manajemen yang Berpengalaman • Semangat Keislaman yang Kuat (Ghiroh) • *Pioneer of Sharia Banks* • *Top of Mind* • *Wide Network* • *Large Customer Base & Loyalty* • *Experienced Management* • *The Islamic Strong Spirit (Ghiroh)*	• Kurangnya Modal • Struktur Dana yang Mahal • Budaya Sales yang Rendah • Produktivitas Aset Rendah • Produktivitas Menurun • Akses Forex & Hedging Terbatas • *Lack of Capital* • *Expensive Fund Structure* • *Low Sales Culture* • *Low Asset Productivity* • *Decreased Productivity* • *Access Forex & Hedging Limited*	• Pertumbuhan Ekonomi dan Perbankan yang Masih Tertinggal • Pertumbuhan Bisnis Retail dan Konsumsi • Penetrasi Syariah yang Tinggi • Dukungan Pemerintah *(Government Goodwill)* • Trend Gaya Hidup Islami • Momentum Penambahan Modal • *Most Islamic Banking Positioning* • Optimalisasi Kekuatan Shareholders (IDB) • *Economic growth and Decelerated Banking* • *Retail Business Growth and Consumption* • *High Sharia Penetration* • *Government Goodwill* • *Islamic Lifestyle Trends* • *Additional Capital Momentum* • *Most Islamic Banking* • *Positioning* • *Strength Optimization Shareholders (IDB)*	• Meningkatkan Kompetisi • Perlambatan Ekonomi Global • *Stakeholder* yang Militan • *Branding* Islami Kompetitor • *Increasing Competition* • *Global Economic Slowdown* • *Militant Stakeholders* • *Islamic Branding Competitors*

Pada tahun 2019 ini perbankan syariah di Indonesia mampu menjaga momentum positif untuk bisa terus tumbuh ditengah tekanan pertumbuhan moderat ekonomi global dan meningkatnya risiko bisnis di Indonesia. Berdasar data yang diperoleh pada akhir bulan November 2019 perbankan syariah berhasil membukukan nilai total aset sebesar Rp507.761 miliar naik 8,77% secara *year to date*.

In 2019, Sharia banking industry is able to sustain positive moment to grow in the midst of global economic moderate growth pressure and the increase of business risk in Indonesia. Based on data collected on the end of November 2019, Sharia banking is able to record total asset value of Rp507,761 billion, an increase of 8.77% in year-to-date.

Dibandingkan dengan Bank Umum Syariah lainnya, nilai total aset Bank Muamalat Indonesia berada di posisi kedua dengan nilai total aset sebesar Rp50.555 miliar terbesar kedua setelah Bank Mandiri Syariah dengan nilai total aset sebesar Rp112.297 miliar. Peringkat ketiga masih ditempati oleh Bank BNI Syariah dengan nilai total aset sebesar Rp49.954 milliar.
Sumber: OJK, Laporan Keuangan Individual Bank Desember 2019

The total asset value of Bank Muamalat Indonesia is on second place compared to other Sharia banks, with Rp50,555 billion, right after Bank Mandiri Syariah with total asset value of Rp112,297 billion. The third place is held by Bank BNI Syariah with total asset value of Rp49,954 billion.
Source: OJK, Individual Bank Financial Report, Desember 2019

Total Aset Bank Muamalat Indonesia mengalami koreksi sebesar 11,66% (yoy) lebih rendah dibandingkan realisasi tahun lalu yang tercatat sebesar Rp57,23 triliun. Penurunan tersebut ditopang oleh penurunan jumlah realisasi pembiayaan dan juga dana pihak ketiga.
Sumber: OJK, Laporan Keuangan Individual Bank Desember 2019

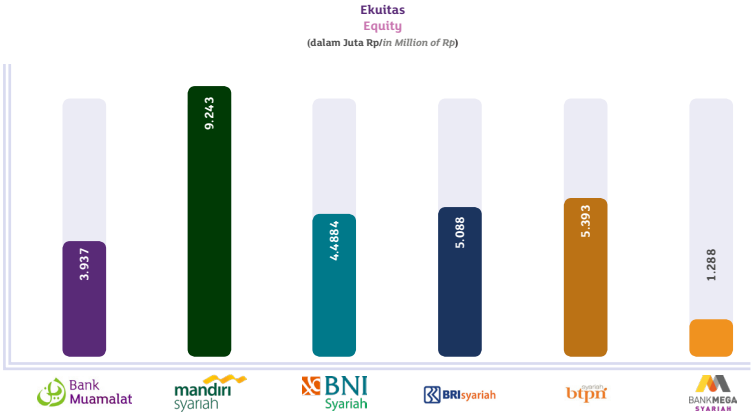
Bank Muamalat Indonesia total asset experienced a correction of 11.66% (yoy), lower compared to last year which was recorded at Rp57.23 billion. The decline is supported by the decrease in financing amount as well as third party fund.
Source: OJK, Individual Bank Financial Report, Desember 2019

Dari sisi pembiayaan secara total, Bank Muamalat Indonesia berhasil membukukan nilai total pembiayaan sampai dengan posisi bulan Desember 2019 sebesar Rp28.877 Miliar. Jumlah ini masih berada di bawah Bank Syariah Mandiri yang mencapai Rp99.809 Miliar dan BNI Syariah mencapai Rp32.285 Miliar.

Based on total financing, Bank Muamalat Indonesia sucessfully recorded total financing value of Rp28,877 billion in December 2019. This numbers are still below Bank Syariah Mandiri with Rp99,809 billion and BNI Syariah with 32,285 billion.

Disisi liabilitas Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Muamalat Indonesia pada periode Desember 2019 tercatat sebesar Rp40.356 milliar juga berada pada posisi ketiga dibawah Bank Mandiri Syariah dan Bank BNI syariah yang masing-masing pada akhir tahun 2019 berhasil membukukan total DPK sebesar Rp75.288 miliar untuk Bank Syariah Mandiri dan Rp32.285 untuk Bank Mandiri Syariah.

On the side of Third party Fund liability, Bank Muamalat Indonesia recorded Rp40,356 billion on December 2019, which is also on the third position under both Bank Syariah Mandiri and Bank BNI Syariah, which respectively recorded Rp75,288 billion for Bank Syariah Mandiri and Rp32,285 billion for Bank BNI Syariah by the end of 2019.

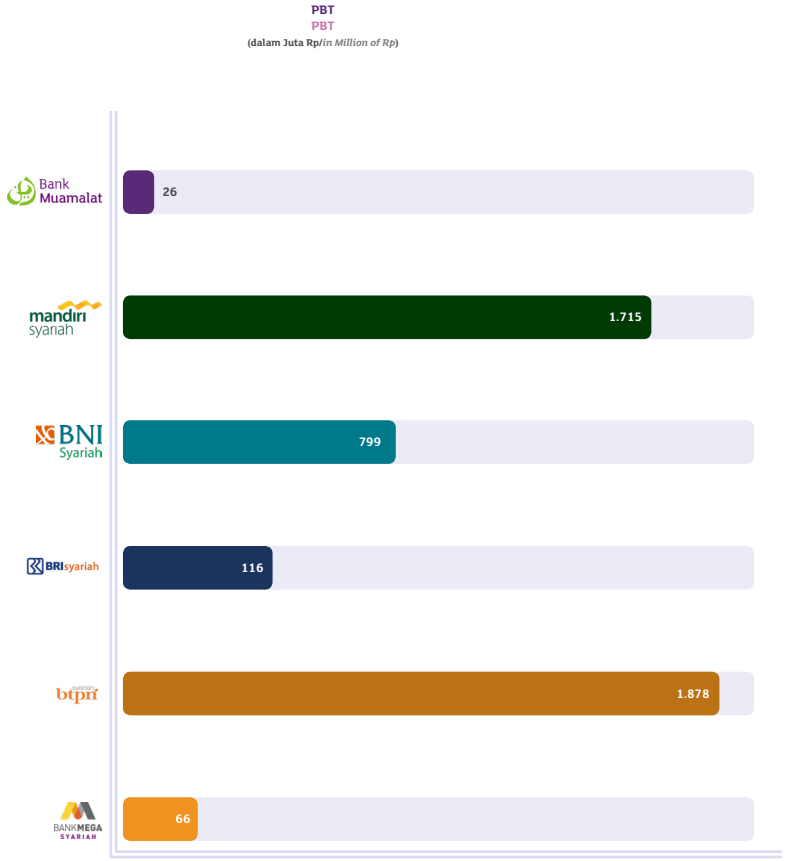


Sumber: OJK, Laporan Keuangan Individual Bank Desember 2019

Source: OJK, Bank's Individual Financial Report December 2019

Pada sisi ekuitas Bank Muamalat Indonesia menempati posisi ketiga terbesar, dimana pada Desember 2019 nilai ekuitas tercatat sebesar Rp3.937 miliar. Bank Mandiri Syariah masih menjadi yang tertinggi dengan nilai ekuitas sebesar Rp9.234 miliar. Terkait dengan posisi ekuitas ini Bank Muamalat Indonesia akan berusaha untuk bisa meningkatkan secara signifikan dalam kurun waktu dekat ini dengan melakukan penambahan modal melalui mekanisme penawaran umum, yang mana penambahan modal melalui mekanisme penawaran umum ini terakhir dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2013 hal ini tentunya sangat berbeda dengan kebanyakan Bank Syariah lainnya yang telah melakukan penambahan modal dalam beberapa tahun belakangan ini.

On the equity side, Bank Muamalat Indonesia is on the third position, where in December 2019 the equity value is recorded at Rp3,937 billion. Bank Mandiri Syariah has the highest equity value of Rp9,234 billion. In relation with this equity position, Bank Muamalat Indonesia will attempt to significantly increase within a short period of time with capital rise through public offering mechanism, the latest is done by Bank Muamalat Indonesia in 2013. This is certainly different from other Sharia Bank which has done this type of capital rise in the past several years.



Sumber: OJK, Laporan Keuangan Individual Bank Desember 2019

Source: OJK, Bank's Individual Financial Report December 2019

Secara kinerja Bank Muamalat Indonesia memang masih belum menunjukkan kinerja yang begitu memuaskan seiring dengan masih berlangsungnya porses penyehatan Bank. Pada sisi laba, ditengah tekanan likuiditas dan juga permodalan pada diakhir tahun 2019 Bank Muamalat Indonesia berhasil membukukan laba sebesar Rp26 miliar. Jumlah laba ini tentunya masih berada jauh dibawah Bank Syariah lainnya namun perolehan laba ini merupakan sebuah pencapaian yang baik ditengah ujian yang saat ini sedang dihadapi oleh Bank Muamalat Indonesia. Posisi tertinggi Bank Syariah yang dapat mencatatkan nilai laba adalah Bank BTPN Syariah yang berhasil membukukan laba sebesar Rp1.878 miliar diikuti oleh Bank Mandiri Syariah yang berhasil membukukan laba sebesar Rp1.715 miliar.

Bank Muamalat Indonesia is yet to show satisfying performance, alongside the bank restructuring process. On the profite side, in the midst of pressure from liquidity and capital by the end of 2019, Bank Muamalat Indonesia managed to record Rp26 billion in profit. This numbers are still below other Sharia banks, but this profit revenue is an achievement of its own considering the struggle faced by Bank Muamalat Indonesia today. The highest profit position of Sharia bank is BTPN Syariah with Rp1,878 billion, followed by Bank Mandiri Syariah with Rp1,715 billion.

Tinjauan Operasional
Operational Overview

Sebagai pioneer di industri perbankan syariah di Indonesia, Bank Muamalat Indonesia terus berupaya untuk memperkuat posisinya di industri. Secara umum, kegiatan usaha yang dilakukan Bank Muamalat Indonesia yaitu menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan, serta memberikan layanan jasa perbankan lainnya.

As the pioneer in Sharia banking industry in Indonesia, Bank Muamalat Indonesia constantly attempt to strenghten its position in the industry. In general, Bank Muamalat Indonesia carries out various businesses, such as raising public funds and channeling them through funding, as well as providing other banking services.

Strategi Bank Muamalat Indonesia 2019

Bank Muamalat Indonesia telah sejak lama menjadi *top of mind* dalam masyarakat. Nilai ini yang ingin dipertahankan sekaligus kembali ditumbuhkan dan dikembangkan oleh Bank Muamalat Indonesia di kalangan masyarakat, khususnya umat Islam. Sebagai negara dengan mayoritas muslim terbesar, maka seharusnya bukanlah hal sulit untuk melakukan penetrasi pasar. Kendala yang dihadapi selama ini, Bank Muamalat Indonesia merasa masih belum optimal dalam merangkul umat. Oleh karena itu, dimulai dengan komitmen yang kuat dan didukung dengan sarana, prasarana, serta fitur produk yang sesuai dengan kebutuhan umat, maka untuk tahun 2018 ini Bank Muamalat Indonesia berkomitmen untuk lebih serius dalam menjalin hubungan yang lebih baik dengan seluruh elemen umat Islam. Sesuai dengan tema yang diusung dalam RBB ini yaitu "Membangun dan Melayani Ekonomi Umat Menuju Pertumbuhan Bisnis yang Berkelanjutan". Dimulai dengan menjalin kerja sama strategis dengan 3 (tiga) organisasi Islam besar di Indonesia yang telah mulai dijalin sejak tahun 2017 yaitu Muhammadyah, Nahdlatul Ulama dan Hidayatullah. Selain itu, bekerja sama juga dengan lembaga zakat dan wakaf seperti Rumah Zakat, Dompet Dhuafa, dan BAZNAS. Sebagai upaya memfasilitasi bisnis ekonomi syariah, bertempat di kantor pusat Bank Muamalat Indonesia (Muamalat Tower) juga telah disediakan 1 (satu) lantai khusus *one stop service* atau layanan satu atap (Lantap) yang telah bekerja sama dengan Kementerian Agama untuk melayani berbagai kepentingan ibadah haji dan umrah.

Bank Muamalat Indonesia 2019 Strategy

Bank Muamalat Indonesia has always been the top of mind of the public. The value needs to be preserved, also grown and developed by Bank Muamalat Indonesia among the public, especially in the Moslem community. As the country with largest Moslem majority, it shouldn't be difficult to do a market penetration. The struggle faced by Bank Muamalat Indonesia is the feeling that it's still not optimal in reaching out to the community. Therefore, it began with a strong commitment and supported by the right facilities, infrastructure, and product features that cater to the needs of the public. In 2018, Bank Muamalat Indonesia is commited to be more serious in building better relationship with the Moslem community of all elements. This is in accordance with the theme of this RBB which is "Building and Serving People's Economy Leading to Sustainable Business Growth." Started with strategic cooperation with 3 (three) large Moslem organizations in Indonesia which has been in place since 2017, which are Muhammadyah, Nahdlatul Ulama and Hidayatullah. Aside from that, working together with charity and wakaf foundation such as Rumah Zakat, Dompet Dhuafa, and BAZNAS. As an effort to facilitate Sharia economic business, a one-stop service has been provided a place in Bank Muamalat Indonesia headquarters (Muamalat Tower). In cooperation with Ministry of Religion, the services provided are serving different hajj and umrah products.

Selain itu, silaturahmi juga terus dilakukan dengan seluruh pemuka agama. Selain untuk keperluan bisnis, Bank Muamalat Indonesia juga kerap mengundang pemuka agama untuk memberikan *tausyiah* kepada karyawan, tidak hanya di kantor pusat namun juga di seluruh jaringan Bank Muamalat Indonesia. Hal ini dilakukan untuk memupuk kembali nilai-nilai spiritual yang diperlukan oleh karyawan, terlepas dari apapun tugas dan perannya, namun semangat persatuan dan kesatuan dalam membangun Bank Muamalat Indonesia menuju Bank Syariah terbesar dengan tetap mempertahankan nilai-nilai dasarnya adalah pondasi paling penting yang diperlukan oleh bank ini.

Aside from that, relationship with religious leaders are maintained. Aside from business purpose, Bank Muamalat Indonesia also invited religious leaders to provide tausiyah to employees, not only in headquarters but also in all Bank Muamalat Indonesia network. This is done to cultivate spiritual values needed by employees, aside from what roles and jobs they are doing. The united spirit which is required to build Bank Muamalat Indonesia to the largest Sharia bank by keeping its principal values is the most important foundation needed by this bank.

Untuk mengoptimalkan area bisnis di kalangan pelaku ekonomi syariah, Bank Muamalat Indonesia telah menentukan langkah-langkah strategis yang akan ditempuh dengan konsisten untuk kedepannya. Diantaranya adalah sebagai berikut:

To optimized the business among the Sharia economy practitioners, Bank Muamalat Indonesia already defines its strategic steps which will be consistently done in the future. The steps are as follows:

1. Haji & Umrah

   Dengan potensi jamaah haji dan umrah sebanyak 1 juta jamaah setiap tahunnya, Bank Muamalat Indonesia berkomitmen untuk memfasilitasi ibadah tersebut dengan menciptakan *platform* layanan terpadu atau *one stop service* untuk jamaah haji dan umroh dengan sebutan **1hram** (*1 Stop Service Hajj & Umrah Muamalat*) yang bertempat di Lantai 19 Muamalat Tower. Fasilitas ini bertujuan untuk mengakomodasi seluruh pemangku kepentingan, seperti badan pemerintah, regulator serta penyedia perjalanan haji dan umrah swasta. Selain itu, yang tak kalah pentingnya adalah mengembangkan produk dan layanan yang dapat menjadi solusi untuk semua pemangku kepentingan haji dan Umrah. Kebutuhan yang dimaksud tidak hanya bagi pelaku pasar haji dan umrah saja tetapi juga untuk para jamaah. Yaitu misalnya dengan penerbitan kartu debit **1hram**, pembiayaan umrah, serta instrumen pendanaan serta transaksional lainnya.

2. Lembaga Pendidikan

   Menawarkan kerja sama secara menyeluruh dengan menyediakan kebutuhan untuk institusi pendidikan, siswa, anggota manajemen dan fakultas, serta orang tua siswa itu sendiri. Indonesia memiliki potensi pasar sebanyak kurang lebih 100.000 (seratus ribu) institusi pendidikan swasta. Potensi ini kemudian yang akan dioptimalkan melalui berbagai instrumen pendanaan dan transaksional yang dimiliki oleh Bank Muamalat Indonesia. Selain itu juga untuk institusinya sendiri akan ditawarkan pembiayaan berupa modal kerja atau investasi. Seluruh transaksi tersebut akan menjadi sebuah sistem yang terintegrasi sehingga memunculkan ikatan khusus antara lembaga/institusi pendidikan tersebut dengan Bank Muamalat Indonesia.

3. Masjid

   Mengajak seluruh jamaah dan pengurus masjid untuk bertransaksi menggunakan produk-produk Bank Muamalat Indonesia baik produk pendanaan maupun pembiayaan melalui *Platform* Komunikasi Berbasis Aplikasi Terpadu.

4. Rumah Sakit

   Menawarkan produk pembiayaan, pendanaan, maupun CMS (*Cash Management System*) untuk rumah sakit, pasien, dokter dan karyawan. Contoh produknya antara lain: pembiayaan modal kerja, investasi, dan pembiayaan piutang usaha untuk rencana asuransi kesehatan pemerintah.

5. Zakat dan Wakaf

   Menyediakan solusi *end-to-end* untuk lembaga zakat dan wakaf, *Muzakki* (pembayar) dan *Mustahiq* (penerima manfaat), dengan menawarkan produk*: Wakaf Saving Plan*, platform penggalangan berbasis web & pembiayaan berbasis Wakaf.

1. Hajj and Umrah

   With the potential of 1 million Hajj and Umrah participants annually, Bank Muamalat Indonesia is commited to facilitate the pilgrimages by the establishment of Hajj and Umrah one-stop-service under the name of 1hram (1 Stop Service Hajj & Umrah Muamalat). This service is located in Muamalat Tower floor 19, with objective to accommodate all the stakeholder such as government, regulators as well as private of Hajj and Umrah providers. Another important matter is to develop products and services to be sollution for all Hajj and Umrah stakeholders need. The needs are not limited to all the market players but also to the pilgrims, for example, with the issuance of 1hram Debit Card, Umrah financing as well as other financing instruments and transactions.

2. Educational Institutions

   Offering overall cooperation by providing the need for educational institutions, students, members of management and faculty, as well as parents of those students. Indonesia has a potential of about 100,000 (a hundred thousand) private education institutions. This potential is then optimized through different financing instruments and transaction owned by Bank Muamalat Indonesia. Aside from that, the institution will be offered capital financing and investment. All of the transations will be an integrated system to develop a bond between the institution/foundation with Bank Muamalat Indonesia.

3. Mosque

   Inviting all the people and mosque managers to use Bank Muamalat Indonesia products for transactions, be it financing or funding, torugh the Integrated Application-Based Communication Platform.

4. Hospitals

   Offering financing, funding or Cash Management System (CMS) products for hospitals, patients, doctors and employees. Examples of the products are: capital financing, investments, payments for receiveables for government health insurance plan.

5. Charity and Wakaf

   Providing end-to-end sollutions for charity and wakaf foundations, Muzakki (payer) and Mustahiq (receiver), by offering products like Wakaf Saving Plan, a web-based fundraising platform & Wakaf-based financing.

6. Organisasi Islam
   Untuk memanfaatkan potensi yang cukup besar dari anggota dan unit bisnis dari berbagai Organisasi Islam di Indonesia, maka Bank Muamalat Indonesia menawarkan sistem terintegrasi yang dapat dikembangkan untuk institusi pendidikan, rumah sakit dan masjid yang berafiliasi dengan Organisasi Islam. Selain itu, diperkuat dengan manfaat tambahan lainnya seperti sistem bagi hasil dan program *sponsorship*.

7. Lembaga Keuangan Mikro Islam
   Menyediakan sistem *end-to-end* untuk Lembaga Keuangan Mikro Islam, pelanggan dan pemangku kepentingan lainnya melalui instrumen pendanaan dan transaksional, fasilitas pembiayaan *Linkage (two-step)* dan *Sub-account facilities*.

8. Perdagangan GCC dan Pengiriman Uang
   Memfasilitasi transaksi keuangan lintas batas dengan fokus pada negara-negara GCC dengan menyediakan fasilitas untuk kegiatan ekspor-impor dan pengiriman uang secara umum.

9. Peluang Lain: Ustadz, Pariwisata dan Perhotelan Halal, Busana Muslim, Pedagang Eceran & *Payment Gateway*.

Mendalami dan memahami kebutuhan-kebutuhan nasabah, khususnya para pelaku ekonomi syariah, dengan menyediakan instrumen pendanaan, pembiayaan, transaksional dan produk serta fasilitas lainnya yang dimiliki oleh Bank Muamalat Indonesia sehingga dapat menyerap kebutuhan pasar tersebut dengan lebih optimal.

Selain itu, melalui unit kerja *Islamic Enterprise and Alliances* yang telah dimiliki oleh Bank Muamalat Indonesia sejak tahun 2017 dan kini telah di revitalisasi, Bank akan menggarap sektor-sektor yang terkait erat dengan bidang garapan organisasi-organisasi Islam dan turunanannya, antara lain adalah sebagai berikut:

a. Memfokuskan Pembiayaan Konsumer kepada pegawai, guru, dokter yang bekerja di amal-amal usaha milik Organisasi Islam yang telah bekerjasama dengan Bank Muamalat Indonesia;
b. Pembiayaan SME kepada beberapa sektor perdagangan ritel berbasis komunitas Islam, Jasa keuangan syariah, jasa perjalanan haji dan umroh;
c. Melakukan *Strategic Partnership* dengan asosiasi bisnis berbasis syariah, seperti Asosiasi Penyelenggara Haji & Umroh, komunitas-komunitas bisnis Islam, dll;
d. Melakukan *Strategic Partnership* dengan Pengelola *Fintech* berbasis *Peer to Peer Financing* untuk dapat mengembangkan ekspansi pembiayaan.

Pengembangan bisnis baru yang fokus pada *Islamic Enterprise and Alliances* ini diharapkan mampu menjembatani antara kebutuhan umat dan kepentingan Bank Muamalat Indonesia untuk meningkatkan literasi perbankan syariah pada masyarakat muslim, khususnya.

6. Islamic Organization
To utilise large potentials of the members and business unit of various Islamic Organizations in Indonesia, Bank Muamalat Indonesia offers an integrated system which can be developed for education, hospital and mosque, which are affiliated with the organization. In addition, different added benefits such as profit sharing system and sponsorship programs are also available.

7. Islamic Micro Financial Institutions
Offering end-to-end system for Islamic Micro Financial Institutions, customers and other stakeholder through funding and transactional instruments, financial facilities Linkage (two-step) and Sub-account facilities.

8. GCC Trading and Remittance
Facilitating cross border financial transaction by focusing on GCC countries by providing services for export-import activities and general remittance.

9. Other Opportunities: Ustadz, Halal Hospitality and Tourism, Moslem Fashion, Retailers and Payment Gateway

Understanding the needs of the customers, expecially the business parties in Sharia economy, by providing funding instruments, financial, transactionals and other facilities owned by Bank Muamalat Indonesia to optimize the absorption of different market needs.

Furthermore, through Islamic Entreprise and Alliances unit, which has been owned by Bank Muamalat Indonesia since 2017 and has been revitalized, the Bank will work on sectors with strong relations with Islamic organizations and its byproducts, such as:

a. Focusing customer financing on employees, teachers, and doctors who are working in charities of Islamic Organizations that cooperate with Bank Muamalat Indonesia;
b. SME financing for several Islamic community-based retails, Sharia financial services, Hajj and Umrah travel services;
c. Establish strategic partnership with Sharia-based business associations, such as Hajj & Umroh Organizer Associations, Islamic business communities and others;
d. Establish strategic partnership with peer-to-peer financing-based fintech managers to expand financing.

New business expansion which focuses on Islamic Enterprise and Alliances hopefully can connect the need of the people and Bank Muamalat Indonesia, to continue developing Sharia banking knowledge, especially to the Moslem communities.

Aspek Pemasaran
Marketing Aspects

Strategi Pemasaran

Untuk terus memberikan produk dan layanan terbaik, Bank Muamalat Indonesia melakukan pendekatan *human customer centric*, sebagai strategi dalam mengembangkan produk dan layanan maupun pemasarannya, terutama di segmen Konsumer dan Ritel, yang dirancang berdasarkan pemahaman atas kebutuhan atau keinginan para nasabah Bank Muamalat Indonesia. Dinamika persaingan yang semakin ketat dan perkembangan teknologi yang pesat menuntut bank untuk senantiasa berinovasi dalam berbagai hal baik produk, layanan, maupun strategi pemasaran agar senantiasa dapat memenuhi kebutuhan nasabah. Strategi pemasaran didasari atas pemahaman akan kebutuhan dan keinginan para nasabah *(voice of customer)*. Guna menggali pemahaman tersebut, dilakukan pendekatan secara langsung kepada customer melalui program *customer engagement* untuk mendapatkan *customer insight* yang kemudian diterjemahkan menjadi produk atau layanan yang dibutuhkan. Kemudian dikomunikasikan melalui program pemasaran dan media yang fokus pada masing-masing target segmen nasabah yang dituju dengan saluran distribusi yang sesuai bagi masing-masing target segmen tersebut. Di samping itu juga dilakukan sinergi antara sektor Konsumer dan Ritel dengan sektor *Business Banking* dengan pendekatan *value chain model*. Di mana dalam suatu mata rantai bisnis yang memberikan nilai tambah pada masing-masing tahapan antara lain dengan mengidentifikasi produk dan layanan Bank Muamalat Indonesia yang dibutuhkan agar dapat mempermudah proses dalam pengembangan bisnis. Aktivitas promo bersama partner strategis juga menjadi salah satu strategi promosi yang cukup efektif dalam meningkatkan *awareness* dan akuisisi nasabah baru. Program pemasaran yang dijalankan bersifat nasional maupun lokal yang didesentralisasikan kepada setiap Kantor Wilayah. Sehingga jenis program pemasaran yang dilaksanakan dapat berbeda di setiap wilayah sesuai dengan fokus segmen maupun potensi yang ada di masing-masing wilayah tersebut. Bank Muamalat Indonesia akan terus melakukan optimalisasi dan pengembangan dari produk, program, dan layanan dari tahun sebelumnya. Bank Muamalat Indonesia akan lebih fokus untuk melakukan promosi dan pemasaran melalui digital media sesuai dengan era modernisasi yang sedang berlangsung tanpa meninggalkan *traditional promotion* yang sudah lebih diketahui dan diakses oleh nasabah dan masyarakat, mengedepankan layanan yang *excellent,* serta ikut aktif berperan dalam memberikan edukasi tentang perbankan syariah yang mudah dimengerti oleh masyarakat untuk segala umur melalui interaksi langsung.

Marketing Strategy

To continue providing the best products and services, Bank Muamalat Indonesia is implementing human customer centric as product and services development as well as marketing strategy. This is done especially in Consumer and Retail segments, which are planned based on the understanding of the customers' demands and needs. The tight competition and rapid technology development required banks to always innovate in both products and services, as well as marketing strategy to answer the customers' need. Marketing strategy is based on the need and demand of the customers (voice of customer). To understand that, direct approaches to customers are done through customer engagement programs to gain customer insight, which will be translated into products or services. This will then be communicated through marketing programs and media, each focusing on different customer segmentations, through appropriate individual distribution channels. In addition, synergy between Consumer and Retail sector with Business Banking sector are done through value chain model approach. In one of the business chains, which provide added value to each steps includes identifying the demanded products and services of Bank Muamalat Indonesia, to simplify the business development process. Promotional activities with strategic partners is also one effective promotional strategy in increasing awareness as well as acquiring new customers. Marketing programs are local and nationalsin nature, which are decentralized through different Area Offices. Therefore, each area will be able to personalized the marketing program according to their segmentation focus and available potentials. Bank Muamalat Indonesia will continue to optimize and develop the products, programs and services from the previous years. Bank Muamalat Indonesia will focus to promote and market through digital media, as aligned with the modern era without abandoning the well-known traditional promotions, which customers are currently accessing and be familiar with. Placing the excellent service forward, as well as actively taking the role of educators in Sharia banking industry, to provide simple information to public of all ages through direct interaction.

Kedepannya Bank Muamalat Indonesia senantiasa berusaha untuk bisa memberikan produk perbankan yang terbaik bagi para nasabah dengan mengedepankan kualitas dan juga sisi syariah sebagai salah satu keunggulan yang dimiliki oleh Bank Muamalat Indonesia. Selain itu Bank Muamalat Indonesia juga berusaha untuk bisa memaksimalkan kemitraan dengan umat dan meningkatkan peran lembaga Islam yang selama ini telah berjalan, sesuai dengan fokus yang telah dicanangkan Bank Bank Muamalat Indonesia.

Moving forward, Bank Muamalat Indonesia will continue to provide the best banking products for all customers by placing the quality first, as well as the Sharia aspects as one of the advantages owned by Bank Muamalat Indonesia. Aside from that, Bank Muamalat Indonesia also continues to maximize the partnership with people to improve the Islamic foundation role which has run according to the focus on Bank Muamalat Indonesia strategy.

Perubahan Perilaku Konsumen

Bank telah menganalisa dan menyesuaikan strategi terhadap perubahan perilaku konsumen akibat perubahan teknologi baru. Untuk menyesuaikan strategi bisnisnya dengan perubahan teknologi, Bank berupaya untuk memperbaharui infrastruktur teknologi informasinya. Salah satu yang paling penting adalah menyesuaikan Muamalat Mobile Banking maupun Internet Banking dengan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan nasabah. Saat ini, nasabah lebih mengutamakan kecepatan dalam transaksi dan mulai mengurangi transaksi fisik dengan cabang. Oleh karenanya, optimalisasi pada Muamalat Mobile Banking maupun Internet Banking merupakan langkah yang perlu diambil oleh Bank. Selain itu dalam menghadapi perkembangan teknologi khususnya di dunia perbankan, pengembangan Digital Banking menjadi hal utama. Bank Muamalat Indonesia mempersiapkan diri untuk mengembangkan Digital Banking dengan melalui perkuatan IT Enterprise Architecture untuk platform Digital Banking baik melalui pengembangan mandiri ataupun bekerjasama dengan mitra strategis lainnya.

Transformation in Consumer Behaviour

Bank has analyzed and adjusted the strategy to the change in consumer behaviour in relation with new technology availability. Adjusting its business strategy with the new technology Bank is attempting to renew its information technology infrastructure. One of the most important factors is by adjusting Muamalat Mobile Banking and other Internet Banking with consumer demands. Today, customer is placing transaction speed first and is gradually eliminating physical transaction with branch offices. Therefore, optimizing Muamalat Mobile Banking and Internet Banking is a needed step to take. In facing the technology development, especially in banking industry, Digital Banking Improvement is priority. Bank Muamalat Indonesia is ready to develop Digital Banking through strengthening its IT Enterprise Architecture for Digital Banking platform, be it through independent development or cooperation with other strategic partners.

Perubahan Metode Pembiayaan

Beberapa perbaikan telah dilakukan oleh Perseroan dari waktu ke waktu guna meningkatkan kualitas pembiayaan yang diberikan serta kecepatan proses yang dilakukan, seperti diperkuatnya struktur manajemen risiko Perseroan, yang diikuti dengan diperkuatnya komite pembiayaan, serta adanya sentralisasi organisasi yang memproses pembiayaan guna meningkatkan baik kualitas maupun kecepatan proses pembiayaan dan juga tentunya penggunan teknologi.

Saat ini untuk memproses pembiayaan Bank Muamalat Indonesia telah menggunakan system inisiasi pembiayaan yang dikembangkan secara mandiri oleh Bank. Melalui system ini memberikan kemudahan dalam *tracking* status aplikasi pembiayaan yang masuk/diproses hingga melakukan perekaman/pencatatan secara digital yang pada akhirnya dapat dijadikan bahan *monitoring* dan *review* oleh Bank termasuk juga dokumen-dokumen pendukung lainnya.

Dalam hal peningkatan kemampuan analisa katrakter dan kapasitas Nasabah yang mengajukan pembiayaan, Bank telah menggunakan Sistem Layanan Informasi Kredit (SLIK) dari OJK, sebagai pengganti

Transformation in Financing Method

Several improvements have been made by the Company from time to time in order to improve the quality of the financing provided and the speed of the processes carried out, such as the strengthening of the Company's risk management structure, which was followed by the strengthening of the financing committee, and the centralization of the organization that processes the financing to improve both the quality and speed of the process. financing and also of course the use of technology.

Today, for its financing process, Bank Muamalat Indonesia is using the financing initation system, which is developed independently. This system simplifies the tracking status of financing application, both incoming and processed, to the digitalization of recording and note-taking. In the end, this can act as monitoring and review components by Bank, as well as other supporting documents.

In analyzing the character and capacity of the customer who is asking for financing, Bank has used the Credit Information System Service (SLIK) from OJK, as a replacement for SID BI Checking, and

SID BI Checking, dan menggunakan PEFINDO tools serta analisa lainya yang melibatkan teknologi agar dapat membantu proses analisa menjadi lebih efisine dan efektif.

Pengaruh Produk Baru

Perseroan telah menerbitkan produk baru salah satunya yaitu KPR iB Angsuran Super Ringan. Produk tersebut memiliki kinerja yang cukup baik karena *value proposition* yang selaras dengan kebutuhan nasabah. Melalui penerbitan produk tersebut, pembiayaan dengan segmen ini berhasil ditumbuhkan dengan lebih baik. Selain itu produk berkonsep *Value Chain* yang diberikan kepada nasabah turut berkontribusi terhadap pertumbuhan Bank Muamalat Indonesia dikarenkan produk ini mampu memberikan solusi komprehensif bagi kepentingan bisnis nasabah terutama korporasi.

Tinjauan per Segmen Usaha

Kegiatan usaha Bank Muamalat Indonesia berdasarkan segmen usaha diklasifikasikan menjadi Segmen Ritel, Korporasi, Perbankan Internasional, dan *Treasury*. Penjelasan terkait rincian setiap kegiatan usaha Bank Muamalat Indonesia diuraikan sebagai berikut:

Segmen Ritel

Dalam kurun tahun 2019, Bank Muamalat Indonesia melanjutkan kampanye #AyoHijrah yang telah diluncurkan pada kuartal terakhir tahun 2018 sebagai strategi perusahaan dalam memfokuskan kegiatan usahanya pada segmen Retail yang menggawangi bisnis Konsumer dan SME.

Organisasi bisnis Retail Bank Muamalat Indonesia tersebar di seluruh kota-kota Indonesia di bawah supervisi unit Distribution & Network Management. Jaringan kantor dengan akses yang mudah dihadirkan ke tengah-tengah masyarakat untuk dapat melayani segala bentuk kebutuhan produk dan layanan keuangan syariah yang dibutuhkan masyarakat, seperti produk penghimpunan / pengelolaan dana serta investasi ataupun kebutuhan pembiayaan Konsumer dan SME yang berbasis teknologi terkini dalam layanan e-banking demi memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi nasabah.

Organisasi bisnis Retail Bank Muamalat Indonesia telah memiliki struktur organisasi yang solid dan komprehensif, selain unit Distribustion & Network Management yang mengawasi performance seluruh jaringan kantor, terdapat unit Retail Banking Strategy yang merancang strategi bisnis perbankan retail secara menyeluruh dan terus menerus antara lain seperti *performance management*, perbaikan proses bisnis dan portfolio bisnis retail. Bagian pengembangan produk dan layanan dari sisi pendanaan dan pembiayaan ditangani oleh unit Retail Banking Product. Terkait penanganan produk investasi, *bancassurance* dan segmen prioritas ditangani oleh bagian *Wealth Management*

using PEFINDO tools as well as other analysis with technology to help efficient and effective analytical process.

New Product Influence

Bank has released new products, one of them is KPR iB Angsuran Super Ringan (Very Light Installment). The product generates good performance because of the aligned value propositions with customer demands. Through the product, financing in this segment can develop better. This product, which has Value Chain concept provided for the customer, has also contributed to the growth of Bank Muamalat Indonesia because this product is able to provide comprehensive solution for customers' bussiness especially the corporates.

Business Segmentation Overview

Bank Muamalat Indonesia business activities based on segmentation are classified into Retail, Corporation, International Banking, and Treasury. Further explanation regarding the details in every Bank Muamalat Indonesia business activity is provided below:

Retail Segment

In 2019, Bank Muamalat Indonesia continued the #AyoHijrah campaign which was launched in the last quarter of 2018 as a corporate strategy to focus its business activities on the Retail segment that oversees the Consumer and SME businesses.

Bank Muamalat's retail business organization is spread throughout Indonesian cities under the supervision of the Distribution & Network Management unit. Office network with easy access presented to the community to be able to serve all forms of Islamic financial products and services that are needed by the community, such as fund collection / management products as well as investments or financing needs for consumers and SMEs based on the latest technology in e-banking services in order to provide convenience and comfort for customers.

Bank Muamalat Indonesia Retail Business Organization has a solid structure and comprehensive organization. In addition to the Distribustion & Network Management that oversees the performance of the entire network office, there is a Retail Banking Strategy unit that designs strategies retail banking business as a whole and continuously between others such as performance management, business process improvement and retail business portfolio. Product and service development section the funding and financing sides are handled by the Retail Banking unit Product. Related to handling investment products, bancassurance and priority segments are handled by Wealth Management

e-Business & Priority Segmentation. Dari sisi meningkatkan *market share* terhadap masyarakat dalam komunitas Islamic telah dilengkapi juga dengan bagian Islamic Enterprise Alliances. Adapun bagian yang mengoordinasikan seluruh aktivitas pemasaran bisnis Retail seperti *campaign, bank image* akan dikelola oleh bagian Marketing Communication.

Dengan struktur organisasi yang ada tersebut, Bank Muamalat Indonesia akan senantiasa mengembangkan produk dan layanan dengan melibatkan teknologi digital serta program pemasaran yang efektif. Selama tahun 2019, Bank Muamalat Indonesia memiliki jaringan kantor yang tersebar di seluruh Indonesia sebagai berikut:

1. Kantor : 276 titik
2. Mobile Branch : 95 unit
3. ATM : 710 unit

Produk dan Layanan

Sebagai perusahaan yang berkecimpung dalam industri perbankan, Bank Muamalat Indonesia menjalankan usahanya berdasarkan prinsip Syariah serta fungsi sebagai bank dengan kegiatan usaha pokok yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan. Dalam melakukan transaksi berdasarkan Prinsip Syariah, Perusahaan juga melakukan transaksi pembayaran dan perdagangan nasional dan internasional, yang mencakup jasa kiriman uang, *inkaso/collection*, transaksi valuta asing, dan pembiayaan ekspor-impor dalam bentuk *letter of credit* (L/C) yang memberikan pendapatan imbal jasa/komisi kepada perusahaan.

Dengan semakin meningkatnya ragam kebutuhan nasabah terhadap produk syariah melalui *voice of customer* yang berhasil dikumpulkan perusahaan, menyebabkan Bank Muamalat Indonesia harus senantiasa mampu untuk menjawab tantangan melalui produk dan layanan yang selalu siap untuk ditawarkan dengan kualitas prima.

1. Produk Penghimpunan Dana
   Produk penghimpunan dana Perusahaan adalah sebagai berikut:
   a. **Tabungan iB Hijrah:**
      Tabungan dalam mata uang Rupiah yang dapat digunakan untuk beragam jenis transaksi, memberikan akses yang mudah, serta manfaat yang luas. Tabungan iB Hijrah kini hadir dengan beragam pilihan kartu ATM/Debit yaitu Kartu Debit GPN, Shar-E Reguler, Shar-E Gold dan Shar-E Ihram.
   b. **Tabungan iB Hijrah Valas**
      Tabungan dalam denominasi valuta asing US Dollar (USD) dan Singapore Dollar (SGD) bertujuan untuk melayani kebutuhan transaksi dan investasi yang lebih beragam.
   c. **Tabungan iB Hijrah Haji**
      Tabungan haji dan umrah dalam mata uang Rupiah dan valuta asing US Dollar yang dikhususkan bagi Nasabah masyarakat muslim Indonesia yang berencana menunaikan ibadah Haji dan Umrah.

e-Business & Priority Segmentation. In terms of increasing the market share of the community in the Islamic community has been completed also with the Islamic Enterprise Alliances section. As for the section which coordinates all Retail business marketing activities like a campaign, image banks will be managed by the Marketing department Communication.

With the existing organizational structure, Bank Muamalat Indonesia will always developing products and services by involving digital technology and effective marketing programs. During 2019, Bank Muamalat Indonesia had a network of offices spread throughout Indonesia as follows:

1. *Office : 276 points*
2. *Mobile Branch : 95 units*
3. *ATM : 710 units*

Products and Services

As a company engaged in the banking industry, Bank Muamalat Indonesia runs its business based on principles Sharia and functions as a bank with main business activities, i.e. raising funds from the community and channeling it back inside form of financing. In conducting transactions based on the Sharia Principles, the Company also conducts payment transactions and national and international trade, which includes shipping services money, collections, foreign exchange transactions, and financing export-import in the form of letter of credit (L/C) that provides fee/commission income to the company.

With the increasing variety of customer needs for Sharia products through collected voice of customers company, causing Bank Muamalat Indonesia to always be able to to answer challenges through products and services always ready to be offered with prime quality.

1. *Funding Product*
   The Company's funding products are as follows:
   a. ***iB Hijrah Savings:***
      Savings in Rupiah that can be used for various types of transactions, which provide access easy, as well as broad benefits. IB Hijrah savings now comes with a wide selection of ATM/Debit cards namely Cards GPN debits, Shar-E Regular, Shar-E Gold and Shar-E Ihram.
   b. ***iB Hijrah Valas Savings***
      Savings in foreign currency denominations in US Dollars (USD) and Singapore Dollar (SGD) aims to serve the needs more diverse transactions and investments.
   c. ***iB Hijrah Haji Savings***
      Hajj and Umrah savings in Rupiah and US Dollar foreign exchange specifically for the Customer Indonesian Muslim community that plans to fulfill Hajj and Umrah worship.

d. **Tabungan iB Hijrah Rencana**
Tabungan iB Hijrah Rencana merupakan tabungan berjangka dalam mata uang Rupiah, memiliki setoran rutin bulanan dan tidak bisa ditarik sebelum jangka waktu berakhir kecuali penutupan rekening serta pencairan dana hanya bisa dilakukan ke rekening sumber dana. Tabungan iB Muamalat Rencana dapat membantu mewujudkan berbagai rencana Nasabah di masa yang akan datang.

e. **TabunganKu iB**
Tabungan syariah dalam mata uang Rupiah yang sangat terjangkau bagi Nasabah dari semua kalangan Masyarakat.

f. **Tabungan iB Hijrah Prima**
Tabungan iB Muamalat Prima merupakan tabungan yang didesain bagi Nasabah yang ingin mendapatkan bagi hasil maksimal dan kebebasan bertransaksi.

g. **Tabungan iB Hijrah Bisnis**
Tabungan iB Hijrah Bisnis adalah produk tabungan yang digunakan untuk mengakomodir kebutuhan bisnis nasabah Non Individu dengan memberikan kemudahan dan kenyamanan bertransaksi yang didukung oleh fasilitas *Cash Management System*.

h. **Deposito iB Hijrah**
Deposito iB Hijrah adalah produk deposito mudharabah dalam mata uang Rupiah dan US Dollar yang memfasilitasi kebutuhan nasabah perorangan maupun non perorangan untuk berinvestasi secara syariah, fleksibel, serta memberikan hasil investasi yang optimal.

i. **Deposito iB Hijrah DHE SDA**
Deposito iB Hijrah adalah produk deposito mudharabah dalam mata uang Rupiah dan US Dollar yang memfasilitasi nasabah non perorangan yang ingin menginvestasikan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) secara syariah, fleksibel, serta memberikan hasil investasi yang optimal. DHE SDA bersumber dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan sumber daya alam (pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan).

j. **Giro iB Hijrah Attijary**
Giro syariah dengan akad Wadiah dalam mata uang Rupiah dan US Dollar yang memudahkan semua jenis kebutuhan transaksi bisnis maupun transaksi keuangan personal Nasabah. Giro ini diperuntukan bagi Nasabah perorangan intitusi yang memiliki legalitas badan.

k. **Giro iB Hijrah Ultima**
Giro syariah dengan akad Mudharabah dalam mata uang Rupiah dan US Dollar yang memudahkan semua jenis kebutuhan transaksi bisnis maupun transaksi keuangan personal Nasabah. Giro ini diperuntukan bagi Nasabah perorangan intitusi yang memiliki legalitas badan.

l. **Giro Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA)**
yaitu Rekening Giro Khusus dengan akad wadiah dan mudharabah yang dimiliki Nasabah dalam mata uang IDR

d. ***iB Hijrah Rencana Savings***
iB Hijrah Rencana Savings is a term savings in Rupiah, has a regular monthly deposit and cannot be withdrawn before the time period expires except closing accounts and withdrawing funds can only be made to the source account. iB Muamalat Savings Plans can help realize various plans Customers in the future.

e. ***TabunganKu iB***
Islamic Savings in very Rupiah affordable for customers from all walks of life.

f. ***iB Hijrah Prima Savings***
Tabungan iB Muamalat Prima is a savings account designed for customers who want to get the results maximum and freedom of transactions.

g. ***iB Hijrah Bisnis Savings***
IB Hijrah Bisnis Savings is a savings product used to accommodate the customer's business needs Non Individuals by providing convenience and transaction convenience supported by Cash facilities Management System.

h. ***iB Hijrah Deposits***
IB Hijrah Deposits are mudharabah deposit products in Rupiah and US Dollar which facilitate the needs of individual and non-individual customers to invest in a sharia, flexible, and giving manner optimal investment return.

i. ***iB Hijrah DHE SDA Deposit***
iB Hijrah DHE SDA Deposits are mudharabah deposit products in Rupiah and US Dollar which facilitate non-individual customers who want to invest foreign exchange Sharia Natural Resource Exports (DHE SDA), flexible, and provide optimal investment returns. DHE SDA is sourced from the activities of exploitation, management, and/or processing natural resources (mining, plantation, forestry and fisheries).

j. ***iB Hijrah Attijary Giro***
Sharia demand deposit with a Wadiah contract in Rupiah and US Dollars facilitates all types of needs business transactions and personal financial transactions Customer. This demand deposit is intended for individual customers institutions that have legality.

k. ***iB Hijrah Ultima Giro***
Sharia demand deposit with Mudharabah contract in currency Rupiah and US Dollar which makes it easy for all types business transaction requirements and financial transactions personal Customer. This demand deposit is intended for the Customer individual institutions that have legality.

l. ***Foreign Exchange Exports from Natural Resource Exports (DHE SDA)***
namely a Special Demand Deposit Account with a wadiah contract and mudharabah owned by the Customer in IDR and

dan USD, yang digunakan khusus untuk penerimaan DHE SDA. Rekening ini bersumber dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan Sumber Daya Alam pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan.

m. **Dana Pensiun Muamalat**

DPLK Muamalat dapat diikuti oleh Nasabah yang berusia minimal 18 tahun, atau sudah menikah, dengan pilihan usia pensiun dan iuran pensiun yang terjangkau, yaitu minimal Rp20.000 (dua puluh ribu Rupiah) per bulan dan pembayarannya dapat didebet secara otomatis dari rekening Bank Muamalat Indonesia atau dapat ditransfer dari bank lain.

2. Produk Pembiayaan

Dana yang dihimpun oleh Perusahaan sebagian besar disalurkan dalam bentuk pembiayaan, baik untuk usaha produktif maupun untuk keperluan konsumtif. Perusahaan juga melakukan penempatan dana bekerjasama dengan mitra strategis dengan melakukan pembiayaan *chanelling* maupun *executing* melalui Lembaga Keuangan Mikro Kecil yaitu, BMT (*Baitul Maal Wa-Tamwil*), Koperasi, Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dan perusahaan pembiayaan. Untuk menjaga posisi likuiditas jangka pendek, Perusahaan juga melakukan penempatan dana pada bank lain serta pembelian surat-surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah. Perusahaan juga meningkatkan intensitas pembiayaan yang ditujukan pada pasar yang selama ini mempunyai kinerja pembiayaan yang baik dengan mengalokasikan porsi yang lebih besar kepada UMKM dalam realisasi portfolio pembiayaan. Produk pembiayaan yang disalurkan oleh Perusahaan adalah sebagai berikut:

a. **KPR iB Muamalat**

KPR iB Muamalat adalah produk pembiayaan yang akan membantu Nasabah untuk memiliki rumah tinggal/apartemen baru (*indent/ready stock*) maupun *secondary*. Pembiayaan ini juga dapat digunakan untuk pengalihan take over KPR dari bank lain, pembangunan, renovasi rumah tinggal, dan peruntukan lainnya. Diperuntukan bagi perorangan (WNI) cakap hukum yang berusia minimal 21 tahun atau maksimal 55 tahun untuk karyawan, dan 60 tahun untuk wiraswasta atau profesional pada saat jatuh tempo pembiayaan.

b. **iB Muamalat Multiguna**

Pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan Nasabah dalam pembelian barang halal serta sewa jasa yang dibolehkan secara syariah seperti Umrah, wisata, dan lainnya.

c. **iB Muamalat Koperasi Karyawan**

Pembiayaan yang diberikan kepada koperasi karyawan untuk disalurkan kepada para anggotanya (pegawai BUMN/PNS/swasta) dengan tujuan pembelian barang halal. Diperuntukan bagi para anggota koperasi karyawan dan diajukan secara berkelompok.

USD, which is used specifically for receiving DHE SDA. This account is sourced from business activities, management, and / or processing of natural resources mining, plantation, forestry, and fisheries.

m. ***Dana Pensiun Muamalat***

Muamalat DPLK can be followed by customers who are at least 18 years old, or already married, by choice of retirement age and affordable pension contributions, i.e. a minimum of Rp20,000 (twenty thousand Rupiah) per month and the payment that can be debited automatically from the account Bank Muamalat Indonesia or can be transferred from a bank other.

2. *Financing Products*

Most of the funds raised by the Company are channeled in the form of financing, both for productive businesses and for consumptive purposes. The Company also does placement of funds in collaboration with strategic partners with channeling and executing financing through Small Micro Financial Institutions namely, BMT (Baitul Maal Wa-Tamwil), Cooperatives, Sharia Rural Banks (BPRS) and finance company. To maintain the term liquidity position short, the Company also places funds in other banks as well as securities purchases based on the Sharia Principles. the Company also increased the intensity of financing aimed at markets that have been performing so far good financing by allocating more portions great to MSMEs in the realization of the financing portfolio. The financing products distributed by the Company are as follows:

a. ***KPR iB Muamalat***

KPR iB Muamalat is a financing product that will help the Customer to have a new houses/apartments (indent / ready stock) or secondary. Financing This can also be used to take over KPR transfers from other banks, construction, renovation of residential houses, and other designation. Intended for individuals (WNI) legal competent who is at least 21 years old or maximum 55 years for employees, and 60 years for entrepreneurs or professional when the financing is due.

b. ***iB Muamalat Multiguna***

This financing aims to meet the needs of the Customer in the purchase of halal goods as well as permitted rental of services syariah like Umrah, travel, and others.

c. ***iB Muamalat Koperasi Karyawan***

Funding provided to employee cooperatives for distributed to its members (SOEs/civil servants/private) for the purpose of purchasing halal goods. For members of the employee cooperative and submitted in a manner in groups.

d. **iB Muamalat Pensiun**
iB Muamalat Pensiun adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada para pensiunan PNS/TNI/Polri/BUMN/BUMD/Swasta untuk pembelian barang konsumtif yang halal (termasuk rumah tinggal dan kendaraan bermotor) atau sewa jasa halal (seperti keperluan pendidikan anak, umroh, wisata, dan lainnya) dengan ketentuan pembayaran manfaat pensiun wajib dialihkan melalui Bank Muamalat Indonesia.

e. **Pembiayaan Channeling melalui Perusahaan Pembiayaan**
Pembiayaan yang diberikan kepada *end user* dengan tujuan pembelian kendaraan bermotor (mobil dan motor) ataupun multiguna melalui perusahaan pembiayaan *(multifinance)* yang bekerja sama dengan Bank Muamalat Indonesia.

f. **iB Hijrah Modal Kerja (Reguler/Pelaksanaan Project)**
Pembiayaan jangka pendek dengan Prinsip Syariah yang diberikan kepada Nasabah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja usaha/bisnis dengan tujuan produktif seperti pembelian persediaan barang dagangan atau pelaksanaan proyek.

g. **iB Hijrah Modal Kerja Konstruksi Developer**
Pembiayaan modal kerja untuk developer guna pembangunan perumahan, pertokoan, perkantoran yang akan dijual kembali oleh *developer.*

h. **iB Hijrah Modal Kerja kepada LKS**
Pembiayaan yang diberikan kepada Lembaga Keuangan Syariah (LKS), untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yang akan disalurkan kembali oleh LKS tersebut kepada masing-masing *enduser (pola pembiayaan executing).*

i. **Pembiayaan Rekening Koran Syariah (PRKS)**
Pembiayaan modal kerja berputar untuk kebutuhan nasabah yang bersifat mendesak, fluktuatif dan berulang.

j. **iB Hijrah Investasi**
Pembiayaan jangka panjang untuk digunakan membiayai pembelian barang-barang modal/tambahan investasi dalam rangka peremajaan, perluasan, peningkatan kapasitas usaha.

k. **iB Hijrah Properti Bisnis**
Pembiayaan yang diberikan dalam rangka pembelian/pembangunan atau renovasi properti bisnis/aset usaha dalam rangka menunjang kegiatan usaha produktif nasabah.

l. **iB Hijrah Asset Refinance**
Pembiayaan dalam bentuk pembelian sebagian porsi (hishah) atas aset yang telah dimiliki nasabah yang kemudian menjadi modal usaha kerjasama (syirkah) berupa penyewaan asset untuk memperoleh keuntungan yang dibagi sesuai nisbah yang disepakati.

m. **Pembiayaan Agunan Tunai**
Pembiayaan untuk menunjang kebutuhan produktif nasabah baik modal kerja maupun investasi dengan agunan tunai.

d. ***iB Muamalat Pensiun***
iB Muamalat Pensiun is a financing facility given to retired civil servants/ National Armed Forces/National Police/ SOe/ ROe/Private for purchasing halal consumer goods (including residential and motorized vehicles) or rent halal services (such as children's educational needs, umrah, travel, and others) with the terms of payment of benefits pensions must be transferred through Bank Muamalat Indonesia.

e. ***Channeling Financing through Financing Companies***
Funding provided to end users with a purpose purchase of motorized vehicles (cars and motorcycles) or multipurpose through multifinance companies in collaboration with Bank Muamalat Indonesia.

f. ***iB Hijrah Modal Kerja (Regular/Project Implementation)***
Short-term financing using Sharia Principles given to the Customer to meet working capital business with productive purposes such as purchase of merchandise inventory or execution project.

g. ***iB Hijrah Modal Kerja Konstruksi Developer***
Working capital financing for developer on construction of housing, shops, offices will be resold by the developer.

h. ***iB Hijrah Modal Kerja to LKS***
Funding provided to financial institutions Sharia (LKS), to meet the needs of working capital will be distributed again by the LKS to each of them enduser (executing financing pattern).

i. ***Pembiayaan Rekening Koran Syariah (PRKS)***
Working capital financing revolves for customer needs which is urgent, fluctuating and repetitive.

j. ***iB Hijrah Investasi***
Long-term financing to be used to finance purchase of capital goods/additional investment in rejuvenation, expansion, business capacity building.

k. ***iB Hijrah Properti Bisnis***
Financing provided in the context of purchasing/construction or renovation of business property/business assets in order to support customers' productive business activities.

l. ***iB Hijrah Asset Refinance***
Financing in the form of purchasing a portion (hishah) for assets that have been owned by customers who later become venture capital cooperation (syirkah) in the form of rentals assets to obtain profit divided accordingly agreed ratio.

m. ***Cash Collateral Financing***
Funding to support customers' productive needs both working capital and investment with cash collateral.

Islamic Enterprise & Alliances

Sebagai salah satu *focus* strategi *'new business'* Bank Muamalat Indonesia, Islamic Enterprise & Alliances (IEA) berupaya memberikan solusi finansial perbankan kepada berbagai institusi layanan keumatan yang meliputi Haji & Umrah, Pendidikan, Zakat dan Wakaf (ZISWAF), Islamic Organizations, Rumah Sakit, Masjid, Islamic Micro Finance Institution dan Halal Industries.

Adapun solusi yang ditawarkan meliputi tata kelola keuangan, pembiayaan dan *added value service* berbasis teknogi seperti aplikasi Umrah (SISKOPATUH) ZISWAF, Sekolah maupun Masjid.

Engagement via ORMAS ISLAM juga dibangun melalui perjanjian antar institusi dengan tujuan percepatan bisnis dari sisi bank dan solusi yang spesifik dari sisi ORMAS ISLAM.

Islamic Enterprise & Alliances

As one of the focuses of Bank Muamalat Indonesia's 'new business' strategy, Islamic Enterprise & Alliances (IEA) seeks to provide solutions financial financial banking solutions to various public service institutions which includes Hajj & Umrah, Education, Zakat and Waqf (ZISWAF), Islamic Organizations, Hospitals, Mosques, Islamic Micro Finance Institution and Halal Industries.

The solutions offered include financial governance, technology-based financing and value added services such as Umrah (SISKOPATUH) ZISWAF, School and Mosque applications.

Engagement via Islamic's Community Organization was also established through agreement between institutions with the aim of accelerating business in terms of banks and specific solutions from the side of Islamic's Community Organization

Wealth Management dan e-Business Management

Tahun 2019, *Wealth Management & E-Business Management* telah melakukan berbagai inisiatif dengan beberapa pencapaian di bidang produk investasi, *bancassurance* dan penyelenggaraan jasa sistem pembayaran untuk meningkatkan pertumbuhan bisnis Bank Muamalat Indonesia. Pada pertengahan tahun 2019 unit kerja *Priority Segmentation* bergabung dengan Divisi *Wealth Management & e-Business Management* sehingga menjadi Divisi *Wealth Management, e-Business & Priority Segmentation* dengan tujuan untuk memperkuat strategis bisnis baik dari sisi produk maupun layanan terutama untuk menjawab kebutuhan segment nasabah *high networth Individu* (HNWI) maupun Nasabah Bank Muamalat Indonesia secara keseluruhan.

Inisiatif dan pencapaian beberapa produk pada Divisi Wealth Management, e-Business & Priority Segmentation antara lain:

1. Di Bidang Produk Investasi/Inisiatif Baru
   a. Penjualan Produk Obligasi Pemerintah Berbasis Syariah secara Online & Offline

      Bank Muamalat Indonesia sudah ditunjuk oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia menjadi Mitra Distribusi (MIDIS) dalam menjual Produk Sukuk Ritel (SR011) pada Triwulan I tahun 2019. Selain itu, Bank Muamalat Indonesia juga akan menjadi MIDIS untuk penjualan produk Sukuk Tabungan secara Online dan berkolaborasi dengan Internet Banking. Bank Muamalat Indonesia berkesempatan melakukan penjualan Sukuk Tabungan (ST) seri 006 secara on-line pada Triwulan IV 2019 dan memberikan hasil juara ke 2 kategori Bank Syariah terbaik. Selain menjadi Mitra Distribusi (MIDIS) dalam menjual Sukuk Ritel & Sukuk Tabungan, Bank Muamalat Indonesia telah mengaktifkan penjualan Obligasi Pemerintah berbasis syariah di pasar sekunder.

Wealth Management and e-Business Management

In 2019, Wealth Management & E-Business Management has carried out various initiatives with several achievements in the field of investment products, bancassurance and payment system services to increase the business growth of Bank Muamalat Indonesia. In mid-2019 the Priority Segmentation work unit joined the Wealth Management & e-Business Management Division to become the Wealth Management, e-Business & Priority Segmentation Division with the aim of strengthening business strategy both in terms of products and services, especially to answer the needs of the high networth customer segment Individual (HNWI) as well as Bank Muamalat Indonesia Customers as a whole.

Initiatives and achievements of several products in the Wealth Division Management, e-Business & Priority Segmentation include:

1. *In the Field of Investment Products / New Initiatives*
   a. *Sharia - Based Government Bond Products Online & Offline Sales*

      Bank Muamalat Indonesia has been appointed by the Ministry Finance of the Republic of Indonesia becomes a Distribution Partner (MIDIS) in selling Retail Sukuk Products (SR011) in the First Quarter 2019. In addition, Bank Muamalat Indonesia will also became MIDIS for the sale of Sukuk Tabungan products on an online basis and collaborate with Internet Banking. Bank Muamalat Indonesia has the opportunity to sell On-line Sukuk Savings (ST) series 006 in Quarter IV 2019 and provides the results of the second place in the category of Islamic Banks best. Besides being a Distribution Partner (MIDIS) in selling Sukuk Retail & Sukuk Savings, Bank Muamalat Indonesia has activated the sale of sharia-based Government Bonds on the secondary market.

b. Penjualan Produk Surat Berharga Syariah Negara
Berencana memberikan layanan alternatif investasi SBSN melalui pasar lelang yang diselenggarakan oleh Pemerintah dengan menyediakan beberapa alternatif produk investasi syariah yang menarik dan aman.

c. Sistem Integrasi pada Wealth Management
Telah berhasil mempersiapkan sistem integrasi Wealth Management (WMSHijrah) untuk produk-produk Wealth Management sehingga memberikan nilai tambah bagi nasabah dan juga dapat membantu operasional wealth management secara efisien.

2. Di Bidang Produk *Bancassurance*

a. Customer Gathering
Sebagai salah satu bentuk apresiasi terhadap Nasabah, sepanjang tahun 2019 Bank Muamalat Indonesia telah melaksanakan Customer Gathering event yang tersebar di seluruh Region. Tema yang diangkat pada Customer Gathering event ini sangat beragam dan disesuaikan dengan profil dan kebutuhan Nasabah di tiap-tiap Region, diantaranya konsep & keunggulan asuransi syariah, economic outlook, sharia wealth management & financial planning, kesehatan, dan lain-lain.

b. Customer Reward
Di samping Customer Gathering, Bank Muamalat Indonesia juga melaksanakan program Customer Reward berupa pemberian hadiah bagi Nasabah yang membeli produk Bancassurance.

c. Sales Campaign & Award
Pada tahun 2019 telah dilaksanakan sejumlah program campaign dan award yang dibuat khusus bagi sales team dengan performa terbaik, di antaranya: Korea Trip, Lokal Trip dan program lainnya.

d. Produk dan Mitra Asuransi Baru
Bank Muamalat Indonesia berkomitmen untuk menghadirkan rangkaian produk Bancassurance yang lengkap sehingga dapat memenuhi seluruh kebutuhan perencanaan keuangan Nasabah. Untuk itu, pada tahun 2019 Bank Muamalat Indonesia meluncurkan produk Unit Link bekerjasama dengan PT Sun Life Financial Indonesia. Selain itu Bank Muamalat Indonesia juga melakukan kerjasama distribusi dengan dua perusahaan asuransi lainnya yaitu PT Avrist Assurance dan Asuransi Takaful Keluarga.

e. Sertifikasi Keahlian *Wealth Management*
Bank Muamalat Indonesia berkomitment untuk senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan perlindungan kepada Nasabah dalam memasarkan produk Bancassurance. Untuk itu, di tahun 2019 telah dilaksanakan program Sertifikasi Internal *Wealth Management* bagi seluruh *sales team* Bank Muamalat Indonesia. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas dan pemahaman *sales team*,

b. *Sales of State Sharia Securities Products*
Plans to provide alternative SBSN investment services through the auction market organized by the Government by providing several attractive and safe alternative sharia investment products.

c. *System Integration in Wealth Management*
Has successfully prepared a wealth management integration system (WMSHijrah) for Wealth Management products so as to provide added value for customers and can also assist wealth management operations efficiently.

2. *In the Field of Bancassurance Products*

a. *Customer Gathering*
As one form of appreciation for the Customer, throughout 2019 Bank Muamalat Indonesia has been carrying out Customer Gathering events that are spread throughout the Region. Themes raised on the Customer The gathering was very diverse and adjusted with the profile and needs of the Customer in each Region, including the concept & excellence of Islamic insurance, economic outlook, sharia wealth management & financial planning, health, etc.

b. *Customer Reward*
In addition to Customer Gathering, Bank Muamalat Indonesia also carries out a Customer Reward program in the form of gift giving for customers who buy products Bancassurance.

c. *Sales Campaign & Award*
In 2019, various campaigns and award programs have been implemented. These programs were established especially for outperform sales team, including: Korea Trip, Local Trip, and other programs.

d. *New Insurance Products and Partners*
Bank Muamalat Indonesia is committed to presenting a complete Bancassurance product range so it can meet all financial planning needs Customer. For this reason, in 2019 Bank Muamalat Indonesia launches Unit Link products in collaboration with PT Sun Life Financial Indonesia. Besides that Bank Muamalat Indonesia also did distribution cooperation with the two insurance companies, namely PT Avrist Assurance and Tafakul Keluarga Insurance.

e. *Wealth Management Expertise Certification*
Bank Muamalat Indonesia is committed to always apply the principle of prudence, transparency, and protection to the Customer in marketing the Bancassurance products. To that end, in 2019 Internal Wealth Management Certification program has been implemented for all Bank Muamalat Indonesia's sales team. This program aims to increase the capabilities and understanding of the sales team, especially

khususnya mengenai produk *Wealth Management*, sehingga dapat meminimalisir terjadinya *misselling* atau kesalahan dalam menjelaskan fitur dan manfaat produk kepada Nasabah.

regarding Wealth Management products, so that they can minimize misselling or mistakes in explaining the features and benefits of the product to Customer.

3. Di Bidang Penyelenggaraan Jasa Sistem Pembayaran

Bank Muamalat Indonesia juga senantiasa melakukan berbagai upaya guna mendukung Bank Indonesia dan OJK dalam meningkatkan transaksi non-tunai demi mewujudkan cashless society. Dengan tetap fokus mewujudkan Bank Muamalat Indonesia sebagai transactional banking account, sepanjang tahun 2019 jumlah pengguna Mobile Banking Muamalat meningkat sebesar 47% jika dibandingkan dengan tahun 2018. Selain itu, pengembangan fitur e-Channel terus dilakukan seperti penambahan fitur pembayaran tagihan dan pembelian seperti top up Ovo dan Gopay, penambahan ini telah dilakukan di Mobile Banking dan ATM Bank Muamalat Indonesia sehingga memberi dampak positif pada meningkatkan jumlah transaksi keuangan nasabah sehari-hari. Pengembangan fitur ini mampu memenuhi kebutuhan nasabah yang pada akhirnya meningkatkan kesetiaan nasabah yang tercermin pada peningkatan saldo rata-rata rekening nasabah di Bank Muamalat Indonesia.

Di samping itu, layanan *Automatic Teller Machine* (ATM) juga terus dioptimalkan kinerjanya, salah satunya adalah dengan melakukan strategi relokasi. Strategi tersebut sukses menaikkan fee based income bagi Bank Muamalat Indonesia, terkhusus segmen ATM Off Premises. Pemilihan lokasi di luar kantor untuk penempatan ATM tetap menjadi perhatian agar tetap memfasilitasi kebutuhan transaksi nasabah secara praktis dan menyeluruh.

Per Desember 2019, Bank Muamalat Indonesia memiliki jumlah ATM sebanyak 710 unit dan 95 unit Mobile Branch yang tersebar di seluruh Indonesia untuk melayani kebutuhan nasabah Bank Muamalat Indonesia.

3. In the Field of Providing Payment System Services

Bank Muamalat Indonesia also continues to do various efforts to support Bank Indonesia and OJK in increasing non-cash transactions to realize cashless society. By staying focused on realizing Muamalat Bank Indonesia as a transactional banking account, all along in 2019 the number of Muamalat Mobile Banking users increased by 47% compared to 2018. In addition, e-Channel feature development continues to be carried out such as the addition of bill payment and purchase features such as Ovo and Gopay top ups. This addition has been made at Mobile Banking and ATM Bank Muamalat Indonesia so that it has a positive impact on increasing the number of daily customer financial transactions. The development of this feature is able to meet customer needs, which in turn increases customer loyalty, which is reflected in an increase in the average balance of customer accounts at Bank Muamalat Indonesia.

In addition, the Automatic Teller Machine (ATM) service also continues to be optimized for performance, one of which is by doing a relocation strategy. The strategy was successful in raising fee-based income for Bank Muamalat Indonesia, especially the ATM Off Premises segment. The choice of location outside the office for ATM placement remains a concern in order to continue to facilitate customer transaction needs in a practical and comprehensive manner.

As of December 2019, Bank Muamalat Indonesia has a total of 710 ATMs and 95 units of Mobile Branch spread throughout Indonesia to serve the needs of Bank Muamalat Indonesia's customers.

4. Priority Segmentation

Untuk menunjang perkembangan bisnis serta terus fokus pada kebutuhan produk maupun layanan untuk segment HNWI dipertengahan tahun 2019 layanan Muamalat Prioritas berpindah pengelolaan ke divisi Wealth Management, e-Business & Priority Segmentation.

Perpindahan pengelolaan ini diharapkan agar Layanan Muamalat Prioritas dapat menjawab kebutuhan Segment HNWI dari produk Wealth Management maupun layanan transaksi perbankan melalui e-business Management dan tetap memperkuat brand image Layanan Muamalat Prioritas yang sudah terbangun.

Sejak Muamalat Prioritas diperkenalkan pada 30 Januari 2017, sampai akhir Desember 2019 telah lebih dari 5.000 Nasabah dikonversi menjadi Nasabah Muamalat Prioritas dengan total

4. Priority Segmentation

To support business development and continue to focus on the needs of products and services for the HNWI segment, by mid-2019, the management of Muamalat Priority services was transferred to the Wealth Management, e-Business & Priority Segmentation divisions.

This management transfer is expected to provide Muamalat Services Priority, so that it can answer the needs of the HNWI segment of the product Wealth Management and banking transaction services through e-business Management and continue to strengthen the brand image of Muamalat Priority services that have been built.

Since Muamalat Priority was introduced on 30 January 2017. Until the end of December 2019, more than 5,000 customers have been converted into Muamalat Priority Customers with total funds

kelolaan dana Rp7,2 Triliun. Jumlah yang tersebar di seluruh cabang ini meningkat 141% dibandingkan dengan total Nasabah pada tahun 2018 atau 164% secara year on year. Perkembangan layanan Muamalat Prioritas di tahun 2019 cukup signifikan, bahkan mampu berkontribusi 18% dari total dana pihak ketiga Bank Muamalat Indonesia.

Layanan Muamalat Prioritas juga ditawarkan untuk terus menunjang gerakan #AyoHijrah yang dicanangkan oleh Manajemen pada tahun 2018. Gerakan #AyoHijrah adalah gerakan yang mengajak Nasabah maupun masyarakat luas untuk terus meningkatkan diri dalam setiap aspek kehidupan. Layanan Muamalat Prioritas hadir untuk menjawab kebutuhan Nasabah dalam rangka retensi dan meningkatkan jumlah Nasabah serta meningkatkan pertumbuhan dana dan *fee based income* maka Layanan Muamalat Prioritas ditawarkan secara lebih luas ke seluruh wilayah kerja Bank Muamalat Indonesia.

under management of Rp7.2 Trillion. The number spread across all branches increased 141% compared to total customers in 2018 or 164% year on year. The development of Muamalat Priority services in 2019 was quite significant, even more it was able to contribute 18% of the total third party funds of Bank Muamalat Indonesia.

Muamalat Prioritas services are also offered to continue support the #AyoHijrah movement launched by Management in 2018. The #AyoHijrah movement is a movement that invites customers and the wider community to continue to improve themselves in every aspect of life. Muamalat Prioritas services are here to answer the customers' needs in the context of retention and increasing the number of Customers and increasing fund and fee based growth income, then the Muamalat Priority Service is offeredwidely throughout the working area of Bank Muamalat Indonesia.

Dalam rangka memberikan nilai tambah bagi Nasabah, Muamalat Prioritas senantiasa menyempurnakan layanan dengan berbagai penawaran sebagai berikut:

1. ***Syariah Financial Solution***
   membantu mewujudkan target pengembangan finansial Nasabah dengan menawarkan serangkaian produk pengelolaan keuangan, pengelolaan investasi dan proteksi yang sesuai prinsip syariah.

2. ***Personalized and Convenience Access***
   menawarkan layanan pribadi yang memberikan kenyamanan akses bertransaksi, diantaranya sebagai berikut:

   a. Kartu Shar-E Debit Prioritas dengan desain baru yang lebih ekslusif sebagai identitas Nasabah Muamalat Prioritas yang dapat digunakan untuk transaksi pembayaran di jaringan *merchant* VISA di seluruh dunia dan jaringan GPN di Indonesia.
   b. *Dedicated Relationship Manager* yang dihadirkan khusus untuk membantu mengoptimalkan perencanaan pengelolaan keuangan dan investasi Nasabah.
   c. *Call Center Dedicated Line* yang siap memberikan layanan informasi melalui telepon 24/7 di SalaMuamalat 1500016 pilihan 1.
   d. *Electronic Channels* yang dapat diakses setiap saat sesuai preferensi transaksi Nasabah melalui *Muamalat Mobile Banking, Muamalat Internet Banking dan Muamalat ATM* dengan limit yang lebih fleksibel sesuai kebutuhan Nasabah.

3. *Preferential and Convenience Service*, memberikan layanan istimewa untuk kenyamanan dan privasi Nasabah
   a. *Priority Center* tersedia di cabang Muamalat Tower, Melawai,Medan, Bandung, Surabaya dan Makassar.
   b. *Safe Deposit Box* tersedia di cabang Muamalat Tower.
   c. *Priority Lane**
   d. *Priority Parking Lot**

   *tersedia di beberapa kantor cabang utama

In order to provide added value for the Customer, Muamalat Prioritas is always perfecting the service with a variety offer as follows:

1. ***Syariah Financial Solution***
   help realize financial development targets Customers by offering a series of management products finance, investment management and protection in accordance with the Sharia Principles.

2. ***Personalized and Convenience Access***
   offering services mindividuals who provide convenient access to transactions, including the following:

   a. Shar-E Priority Debit Card with more exclusive design as the identity of the Muamalat Priority Customer can be used for payment transactions on the network VISA merchants throughout the world and the GPN network in Indonesia.
   b. Dedicated Relationship Manager specially presented to help optimize financial management plan and customers' investments.
   c. Dedicated Call Center Lines that are ready to provide services telephone information 24/7 at SalaMuamalat 1500016 choice 1.
   d. Electronic Channels that can be accessed at any time in accordances with Customers' preferences transaction through Muamalat Mobile Banking, Muamalat Internet Banking and Muamalat ATM with more flexible limits according to customer needs.

3. *Referential and Convenience Service, provide services special for the comfort and privacy of the Customer*
   a. Priority Center is available at the Muamalat Tower branch, Melawai, Medan, Bandung, Surabaya and Makassar.
   b. Safe Deposit Box is available at the Muamalat Tower branch.
   *c. Priority Lane**
   *d. Priority Parking Lot**

   **available at several main branch offices*

4. *Loyalty and Rewards*, menawarkan layanan apresiasi untuk melengkapi gaya hidup Nasabah dan keluarga.
5. Regional Capability, memberikan layanan istimewa dengan memanfaatkan kapabilitas regional Bank Muamalat Indonesia
   a. *Malaysian Desk*.
   b. *Priority Meeting Room* di Bank Muamalat Indonesia Kuala Lumpur.

Strategi Segmen Ritel

Langkah strategis yang paling mendasar untuk dibenahi adalah terkait sumber daya manusia, baik secara kompetensi, produktivitas, maupun struktur organisasi. Untuk mengakselerasi pertumbuhan bisnis, khususnya dalam segmen ritel, Bank Muamalat Indonesia akan mengkaji ulang struktur unit bisnis dan unit *support*, termasuk sumber daya *support* dan *operational* yang berada di kantor pusat. Peran unit-unit tersebut dalam mengakselerasi pertumbuhan bisnis ritel sangatlah penting, sehingga langkah ini dirasa perlu segera dilakukan mengingat dampaknya yang cukup signifikan terhadap bisnis.

Selain itu, untuk meningkatkan produktivitas *retail sales* di seluruh unit Bank Muamalat Indonesia, maka *Key Performance Indicators* (KPI) untuk tahun 2019 akan lebih spesifik dan dimonitoring secara periodik. KPI tersebut juga akan diperkuat dengan pencapaian *fee based* khususnya untuk unit-unit terkait. Sejalan dengan penguatan sistem KPI tersebut, Bank Muamalat Indonesia juga akan membuat skema baru dalam pemberian insentif yang diharapkan dapat menjadi *booster* bagi *retail sales* dalam menjalankan amanahnya.

Untuk target bisnis, pembiayaan ritel akan difokuskan kepada pembiayaan UMKM dan KPR dengan beberapa strategi sebagai berikut:

- Strategi pembiayaan tidak hanya ditujukan untuk pembiayaan baru namun juga ditawarkan kepada nasabah-nasabah existing melalui program *cross sell* dan *top up* (baik inisiatif bank maupun nasabah). Selain itu juga dapat ditawarkan kepada nasabah *liabilities* dengan program *back to back* ataupun *bundling* bagi nasabah perorangan maupun badan usaha.
- Pembiayaan dititik beratkan kepada target market berikut:
  i. Sektor ekonomi yang memiliki catatan kinerja dan NPF yang bagus.
  ii. Sesuai dengan visi BMI, pembiayaan kepada lembaga keuangan Syariah, koperasi Syariah (baik dengan *pola executing* maupun *channeling*), serta organisasi Islam juga menjadi salah satu inisiatif yang akan dilakukan.
- Sejalan dengan proyeksi bisnis properti ke depan, pembiayaan bisnis properti juga menjadi salah satu produk andalan.
- Aktivasi pembiayaan rekening koran syariah (PRKS) dengan akad musyarakah dilakukan sebagai upaya mempercepat pencapaian target pembiayaan hal ini dilatar belakangi oleh masih banyaknya kebutuhan *rapid transaction* yang hanya dapat diakomodir dengan pembiayaan rekening koran.

4. *Loyalty and Rewards, offering appreciation services for complete the lifestyle of the customer and family.*
5. *Regional Capability, providing special services with leverage the regional capabilities of Bank Muamalat Indonesia*
   a. *Malaysian Desk.*
   b. *Priority Meeting Room at Bank Muamalat Indonesia Kuala Lumpur.*

Retail Segment Strategy

The basic strategic step to be improved is human resources, be it competency, productivity or organizational structure. To accelerate business growth, especially in retail segment, Bank Muamalat Indonesia will revisit business unit structure and support, including resources support and operationals in the headquarter. The role of these units in accelerating the growth of retail business is very important, so this step is deemed necessary to be carried out immediately considering the significant impact on the business.

Aside from that, to improve retail sales productivity in all Bank Muamalat Indonesia units, the Key Performance Indicators (KPI) for 2019 will be more specific and periodically monitored. Those KPI is also strengthened by fee-based achievements expecially to related units. Aligned with KPI system reinforcements, Bank Muamalat Indonesia will also create a new scheme in incentive reward, which is expected to be a booster for retail sales in working its call.

For business target, retail financing will be focused on MSME financing and KPR with strategies as follows:

- *Payment strategy isn't only for new financing but also for existing customers though cross sell and top up programs (be it bank or cutomers' initiative). Besides, it can also be offered to liabilities customers through back-to-back or bundling programs for individuals customers or business.*
- *Financing is emphasized to the following target markets:*
  i. Economy sector with good NPF and performance record.
  ii. According to BMI vision, financing to Sharia financial institution, Sharia union (be it executing or channeling method), as well as Islamic organizations is also one initiative to be done.
- *As aligned with property business projections in the future, property business financing is one of the main products.*
- *Sharia current account financing (PRKS) activation with akad musyarakah is done as an effort to speed up financing target. This is motivated by the many requirements for rapid transactions which can only be accommodated by financing bank accounts.*

- Meningkatkan *ticket size* dari pembiayaan Ritel, baik UMKM maupun KPR dengan meningkatkan limit dari pembiayaan UMKM dan menyasar target market yang sesuai dan lebih *mature*, sehingga dapat mempercepat pencapaian target untuk meningkatkan *market share* perbankan Syariah, dengan tetap menjaga kualitas portofolio.
- Untuk meningkatkan daya saing BMI, terus dilakukan perbaikan proses pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah, yang fokus kepada peningkatan kecepatan proses.
- Pembiayan konsumer perumahan difokuskan pada nasabah-nasabah yang memiliki kualitas yang baik, berkerjasama dengan *developer* perumahan segmen menengah, *selected property agent*, dan perbaikan proses pembiayaan.
- Strategi pada pembiayaan multiguna dilakukan dengan meluncurkan pembiayaan pola *chanelling* dengan Koperasi dan meningkatkan kerjasama dengan perusahaan yang telah berkerjasama untuk membayar *payroll* melalui BMI ataupun kerjasama *salary deduction* tanpa kerjasama *payroll* di BMI.
- Strategi pada pembiayaan KPR dilakukan dengan penambahan pilihan skema program supaya lebih menarik dan fleksibel untuk nasabah.
- Sebagai salah satu langkah dalam perbaikan kualitas portofolio, maka salah satu strategi bank adalah menawarkan produk *retail financing* dengan skema *pricing* yang kompetitif untuk memperoleh nasabah yang berkualitas baik. Untuk menghasilkan skema financing dengan *pricing* yang kompetitif salah satunya dengan pengembangan konsep produk *bundling* antara *funding* dan *financing* guna menghasilkan profit yang lebih optimal dari kedua sisi.

- *Increase ticket size from retail financing, be it SME or Home Ownership by increasing the limit from SME financing and aiming for more mature target. This is to speed up the achievements and to increase market share of Sharia banking while keeping the portfolio quality.*
- *To increase competitiveness of Bank Muamalat Indonesia, financing improvement is continuously done to meet the need of the customers, focusing of process speed improvement.*
- *Financing for customers in housing area is focused on those with good quality, working together with housing developers for middle class, selected property agents and financing process improvement.*
- *Multifunction financing strategy, which is done by channeling pattern financing with Union and cooperation with companies to do payroll assistance with Bank Muamalat Indonesia or cooperation for salary deduction without payroll assistance at Bank Muamalat Indonesia.*
- *Home ownership financing strategy is done through additional scheme selections to make a more interesting and flexible program for the public.*
- *As one of the portfolio quality improvement steps, one of the strategies is to offer retail financing product with competitive price scheme, to obtain good quality customers. To create financing scheme with competitive pricing, one of them is by developing the bundling product concept between funding and financing, to acquire optimized profit from both sides.*

Untuk mempercepat pencapaian target pembiayaan, sinergi pembiayaan antara segmen ritel dan korporasi pun akan diperkuat. Hal tersebut akan dicapai melalui beberapa cara, diantaranya adalah:

- Penyaluran pembiayaan modal kerja korporasi kepada *developer* perumahan yang memiliki *track record* yang baik dan mendorong konsumennya untuk mengajukan pembiayaan KPR Syariah atau iB Properti Bisnis melalui Bank Muamalat Indonesia.
- Meningkatkan aktivitas *supply chain* financing dimana Bank Muamalat Indonesia menyediakan modal kerja kepada nasabah ritel maupun menyediakan *Account Payable Financing* kepada nasabah korporasinya.
- Penyaluran pembiayaan kepada nasabah korporasi dan mendorong pembiayaan konsumer kepada karyawan/staf yang berada dalam lingkungan perusahaan tersebut.

To speed up financing target achievement, the financing synergy between retail and corporation segments need to be strengthened. This can be done through different steps, such as:

- *Distribution of corporate working capital financing to housing developer with good track record, and push its consumer to apply Sharia housing ownership or iB Properti Bisnis through Bank Muamalat Indonesia.*
- *Increase supply chain activity financing, where Bank Muamalat Indonesia provide working capital for its retail customers or Account Payable Financing for its corporate customers.*
- *Distribution of financing to its corporate customers and push consumer financing to the staffs and employees in the corporation.*

Untuk penghimpunan dana ritel akan dilakukan melalui beberapa program penting yaitu:

a. Muamalat Prioritas
   Program ini diharapkan dapat menjaring nasabah-nasabah prima dan akan menyasar segmen nasabah *high net worth*

Retail fund is gathered through several important programs, which are:

a. Muamalat Prioritas
   This program is aimed to gather prime customers and will tap into the high net worth income segment. Muamalat

income. Muamalat Prioritas menawarkan layanan dan produk yaitu *free safe deposit box*, *priority lounge* di 5 cabang utama Bank Muamalat Indonesia (Cabang Medan Iskandar Muda, Cabang Makassar Sam Ratulangi, Cabang Bandung Buah Batu, Cabang Surabaya Darmo, Cabang Melawai Jakarta) dan *service*, *program incremental balance*, dan *welcoming gift* saat menjadi nasabah prioritas. Layanan Muamalat Prioritas akan ditawarkan kepada nasabah terpilih diantaranya:

i. Nasabah eksisting yang memiliki portofolio funding dengan saldo rata-rata ≥ Rp500 juta selama 6 bulan terakhir.
ii. Nasabah prioritas baru yang pernah memiliki pembiayaan dengan plafon ≥ Rp2,5 Miliar dan tingkat kolektibilitas 1 (satu).
iii. Nasabah yang berorientasi pada layanan/*service* dan tidak sensitif kepada perubahan nisbah serta memiliki keinginan untuk mendapatkan profit dari produk selain produk bank.

b. Transactional Banking
Meningkatkan jumlah nasabah yang menggunakan rekening tabungan mereka untuk transaksi sehari-hari sehingga saldo rata-rata tabungan pada gilirannya akan meningkat. Penambahan fitur digital banking Muamalat yang semakin memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi nasabah pengguna dalam melakukan transaksi perbankan yang pada gilirannya dapat meningkatkan saldo rata-rata dan loyalitas kepada Bank Muamalat Indonesia.

c. Product Proposition
Fokus pada produk dengan komitmen atau pembayaran terjadwal, dengan proposisi yang fokus kepada 4 target market, yaitu Masjid, Institusi Pendidikan, Haji dan Umrah, dan *Employee Benefit.*

d. Peningkatan *Fee Based Income* melalui optimalisasi *Bancassurance*
i. Manulife Zhafirah Savelink: program referal dari RM ataupun CS Bank Muamalat Indonesia.
ii. Manulife Zhafirah Proteksi Sejahtera: program penjualan oleh RM dan CS Bank Muamalat Indonesia yang memiliki sertifikasi AAJI/AASI.
iii. Manulife Medicash: program penjualan *Direct Marketing/ Telemarketing.*

Khusus untuk Cabang Kuala Lumpur, penghimpunan dana akan ditingkatkan melalui penambahan fasilitas Tabungan yang dapat dipergunakan untuk transaksi sehari-hari, dengan target peningkatan saldo rata-rata tabungan dan *forex income*. Keterbatasan jaringan akan diatasi dengan layanan *mobile banking* untuk mendorong pelanggan dalam memanfaatkan Bank Muamalat Indonesia sebagai Bank transaksional utama mereka, dan bekerja sama dengan bank-bank setempat dalam penerimaan setoran tunai.

Prioritas offers products and services such as free safe deposit box, priority lounge in 5 main branches of Bank Muamalat Indonesia (Medan Iskandar Muda Branch, Makassar Sam Ratulangi Branch, Bandung Buah Batu, Branch Surabaya Darmo Branch, Melawai Jakarta Branch) and service program incremental balance and welcoming gift upon signing up as priority customers. Muamalat Prioritas services will be offered to selected customers, which are:

i. Existing customers with funding portofolio of average balance of ≥ Rp500 million for the last 6 months.

ii. New priority customer with ceiling financing of ≥ Rp2.5 billion with collectibility stage of 1 (one).

iii. Customer orientation on service, not sensitive to ratio change with the aim for profit gain from products other than banking.

b. Transactional Banking
Increasing the number of customers who are using their savings for everyday transaction that their average balance is increasing. The addition of Muamalat's digital banking features that increasingly provide convenience and comfort for customers in conducting banking transactions can increase the average balance and loyalty to Bank Muamalat Indonesia.

c. Product Proposition
Focus on product with commitment or scheduled payment, with proposition focusing on 4 target markets which are Mosque, Educational Institution, Hajj and Umrah, and Employee Benefit.

d. Increase in Fee-based Income through Bancassurance optimalizations
i. Manulife Zhafirah Savelink: referral program from RM or CS of Bank Muamalat Indonesia.
ii. Manulife Zhafirah Proteksi Sejahtera: sales program from RM or CS of Bank Muamalat Indonesia with AAJI/AASI certification.
iii. Manulife Medicash: Direct Marketing/Telemarketing sales program.

Especially for Kuala Lumpur branches, fund raising will be increased through additional saving facilities which can be used for everyday transactions, with the target of average balance increase and forex income. Network limitation will be overcome with mobile banking services to push customers to use Bank Muamalat Indonesia as the main transactional bank, while working together with the local bank in accepting cash deposit.

Berikut kami sampaikan beberapa produk dan program dalam rangka peningkatan *low cost funding* dan *fee based income* dari *service charge, trade finance* dan *foreign exchange*.

Here are the products and programs to increase low cust funding and fee-based income from service charge, trade finance and foreign exchange.

No.	Nama Program/Produk *Program/Product Name*	Kategori *Category*	Rencana Pelaksanaan *Plan*	PIC *PIC*
1.	Pengembangan Bank Garansi Umum *Development of General Bank Guarantee*	FBI	Q2 2019	TBD
2.	Pengembangan Cash Management *Cash Management Development*	FBI	Q2 2019	TBD
3.	Bundling Penjualan Produk Tabungan Haji *Hajj Saving Bundling Sales*	FBI	Q1 2019	RBO
4.	Revamp Tabungan Muamalat Mudharabah *Muamalat Mudharabah Saving Revamp*	FBI	Q2 2019	RBO
5.	Aktivasi Pasar Sukuk Sekunder *Secondary Sukuk Market Activation*	FBI	Q2 2019	TSY
6.	Peningkatan Transaksi Saudi Riyal (SAR) *Increase in Saudi Riyal (SAR) Transaction*	FBI	Q2 2019	TSY
7.	Biller Gojek (Mobile, ATM, IB, Gerai) *Gojek Biller (Mobile, ATM, IB, Store)*	FBI	Q1 2019	EBM
8.	Biller Grab (Mobile, ATM, IB, Gerai) *Grab Biller (Mobile, ATM, IB, Store)*	FBI	Q1 2019	EBM
9.	Biller Tokopedia (Mobile, ATM, IB) *Tokopedia Biller (Mobile, ATM, IB)*	FBI	Q2 2019	EBM
10.	Biller Bukalapak (Mobile, ATM, IB) *Bukalapak Biller (Mobile, ATM, IB)*	FBI	Q2 2019	EBM
11.	Biller BPJS Kesehatan & BPJS Ketenagakerjaan (ATM, IB) *BPJS Kesehatan & BPJS Ketenagakerjaan Biller (ATM, IB)*	FBI	Q2 2019	EBM
12.	Biller PDAM Siantar & Makassar (Gerai) *PDAM Siantar & Makassar Biller (Store)*	FBI	Q1 2019	EBM
13.	Biller Airlines, KAI, PGN (Mobile, ATM, IB) *Airlines, KAI, PGN Biller (Mobile, ATM, IB)*	FBI	Q4 2019	EBM
14.	Biller TV & Internet Provider (IB, Gerai) *TV & Internet Provider Biller (IB, Store)*	FBI	Q3 2019	EBM
15.	Pembiayaan Back to Back SME *SME Back-to-Back Financing*	Bundling	Telah Berjalan pada 2018 hingga 2019 *Ran in 2018, continued in 2019*	RBO
16.	Pembiayaan Beragunan Tabungan Prima Berhadiah *SME Back-to-Back Financing*	Bundling	Telah Berjalan pada 2018 hingga 2019 *Ran in 2018, continued in 2019*	RBO

Profitabilitas Segmen Retail

Retail Segment Profitability

Dalam miliar Rp
In billion Rp

	2019	2018	Growth	%
Third Party Fund	35.834	35.469	365	1,03%
Financing	10.537	11.792	(1.255)	-10,64%

Di tahun 2019, segment Retail membukukan dana pihak ketiga sebesar Rp35,83 triliun, naik sebesar Rp364,61 miliar atau tumbuh sebesar 1,03% dibanding tahun sebelumnya. Pertumbuhan dana pihak ketiga ini dipicu oleh kenaikan CASA sebesar Rp1,01 triliun atau 6,26% sedangkan TD turun Rp645,06 miliar atau 3,34%. Hal ini sejalan dengan fokus Bank Muamalat Indonesia di tahun 2019 untuk terus menumbuhkan penghimpunan dana umat melalui program Ayo Hijrah. Di sisi pembiayaan, segmen Retail membukukan pembiayaan sebesar Rp10,54 triliun atau turun sebesar Rp1,26 triliun dibanding tahun 2018. Penurunan ini terutama disebabkan fokus Bank Muamalat Indonesia untuk memperbaiki kualitas portfolio pembiayaan.

In 2019, the Retail segment posted third party funds of Rp35.83 trillion, up by Rp364.61 billion or growing by 1.03% compared to the previous year. The growth of third party funds was triggered by an increase in CASA of Rp1.01 trillion or 6.26% while TDs decreased by Rp645.06 billion or 3.34%. This is in line with the focus of Bank Muamalat in 2019 to continue to grow community fund raising through the Ayo Hijrah program. On the financing side, the Retail segment posted financing of Rp10.54 trillion, down by Rp1.26 trillion compared to 2018. This decrease was mainly due to the focus of Bank Muamalat on improving the quality of the financing portfolio.

Dalam miliar Rp
In billion IDR

	2019	2018	Growth
NIM from Financing	490	419	71
Margin Income	1.281	1.393	(112)
FTP Financing	(791)	(974)	183
NIM from Funding	809	841	(32)
Margin Expense	(1.459)	(1.318)	(140)
FTP Funding	2.268	2.160	108
Net Income Margin	1.299	1.260	39
Fee Based Income			
- Financing Fee	5,4	11	(5,8)
- E-Channel Fee	40	33	7,0
- Admin Funding	70	69	0,5
- Bancassurance Fee	46	32	13,86
- Gain on Forex & Securities	3,5	0,4	3,1
Total Fee Based Income	165	146	19
Total Revenue	1.464	1.406	58

Pada tahun 2019, Segmen Retail berhasil membukukan total Revenue sebesar Rp1,46 triliun, tumbuh sebesar Rp57,89 miliar atau 4,12% dibanding tahun lalu. Net Income Margin tercatat sebesar Rp1,30 triliun dihasilkan dari NIM from Funding sebesar Rp809,17 miliar dan NIM from Financing sebesar Rp489,87 miliar. Dari Fee based Income, Retail berhasil membukukan sebesar Rp165,03 miliar, naik sebesar Rp18,66 miliar atau 12,75% dibanding tahun sebelumnya.

Komposisi *fee based income Retail* 2019 didominasi oleh pendapatan admin funding 42,28%, Bancassurance fee 27,88% dan E-Channel fee 24,50%. Retail mencatat pendapatan Admin funding sebesar Rp69,77 miliar, bancassurance Fee dan E-Channel fee masing-masing tercatat sebesar Rp46,01 miliar dan Rp40,43 miliar. Dibanding tahun 2018, Kenaikan fee based income sebesar Rp18,66 miliar terutama disebabkan kenaikan bancassurance fee sebesar Rp13,86 miliar atau tumbuh 43,12%. Di tahun 2019, salah satu strategi yang dijalankan bank adalah berupaya meningkatkan fee based income melalui optimalisasi *bancassurance*. Bank Muamalat Indonesia berkomitmen untuk menghadirkan layanan produk bancassurance yang dapat memberikan solusi proteksi bagi nasabah Bank Muamalat Indonesia.

Segmen Korporasi dan Komersial

Segmen korporasi dan komersial masih menjadi tulang punggung bagi Bank Muamalat Indonesia. Segmen ini membidik nasabah korporasi melalui produk pembiayaan dan simpanan yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah.

Strategi Segmen Korporasi dan Komersial

Selain untuk menjaga besaran volume secara bank wide, segmen korporasi juga diarahkan untuk mendukung perkembangan bidang-bidang yang selama ini menjadi garapan organisasi Islam dalam melayani kebutuhan umat. Untuk memenuhi target pembiayaan korporasi dan komersial, berikut ini adalah langkah-langkah strategis yang akan ditempuh:

1. Pemilihan target market yang potensial, sesuai dengan arah kebijakan pemerintah yang memiliki *historical* NPF industri yang rendah dan sesuai dengan kemampuan dan kompetensi yang dimiliki oleh Bank Muamalat Indonesia.
2. Meningkatkan *portfolio* yang memiliki bobot risiko rendah dengan fokus pada pembiayaan BUMN dan *Blue Chip Company.*
3. Meningkatkan *green portfolio* untuk menciptakan pembiayaan berkelanjutan dengan menerapkan manajemen risiko sosial dan lingkungan.
4. Meningkatkan program *cross selling* antar unit bisnis.
5. Melakukan ekspansi bisnis korporasi dan komersial di Indonesia Timur.
6. Meningkatkan *fee base income* melalui sindikasi dengan penetrasi *low to mid size club deal*.
7. Meningkatkan produktivitas produk pembiayaan modal kerja jangka pendek *Trade Finance* melalui program *Value Chain*.

In 2019, the Retail Segment managed to book a total Revenue of Rp1.46 trillion, growing by Rp57.89 billion or 4.12% compared to last year. Net Income Margin was recorded at Rp1.30 trillion generated from NIM from Funding amounting to Rp809.17 billion and NIM from Financing of Rp489.87 billion. From Fee-based Income, Retail managed to record IDR 165.03 billion, an increase of Rp18.66 billion or 12.75% compared to the previous year.

The composition of fee-based income Retail 2019 is dominated by admin funding income of 42.28%, Bancassurance fee of 27.88% and E-Channel fee of 24.50%. Retail recorded income from Admin funding of Rp69.77 billion, bancassurance fees and E-Channel fees were recorded at Rp46.01 billion and Rp40.43 billion, respectively. Compared to 2018, the increase in fee based income by Rp18.66 billion was mainly due to an increase in bancassurance fees of Rp13.86 billion or grew by 43.12%. In 2019, one of the strategies implemented by banks is to try to increase fee-based income through optimization of bancassurance. Bank Muamalat Indonesia is committed to providing bancassurance product services that can provide protection solutions for Bank Muamalat Indonesia's customers.

Corporate and Commercial Segment

Corporate and commercial segment is the backbone for Bank Muamalat Indonesia. This segment is aiming for corporate customers through financing and saving products which can be customized according to customers' need.

Corporate and Commercial Segment Strategy

Aside from maintaining the volume as wide, corporate segment is also aimed to support the fields which are utilized by Islamic Organization to serve the people. To achieve the corporate and commercial financing, here are the strategic steps to be done:

1. *Choosing the potential target market, according to the government policy direction with low historical NPF industry, equivalent to the ability and competency of Bank Muamalat Indonesia.*
2. *Improving low risk portfolio, by focusing on state-owned enterprises (SOEs) and Blue Chip Company.*
3. *Improving green portfolio to create sustainable financing by appluing the social and environmental risk management.*
4. *Improving cross selling program between business units.*
5. *Expanding corporation and commercial business in eastern Indonesia.*
6. *Increasing the fee-base income through syndication with low to mid size club deal.*
7. *Improve productivity of financing profucts for short term Trade Finance working capital through Value Chain program.*

8. Mengembangkan produk pembiayaan modal kerja *post-shipment financing* untuk transaksi *Documentary Collection*, melalui skema *Account Receivable Financing.*
9. Menyelenggarakan program *reward* pencapaian target *fee based income* kepada unit bisnis untuk meningkatkan pemasaran dan transaksi *Trade Finance.*
10. Mengembangkan produk pembiayaan Mudharabah Muqayyadah untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang memiliki preferensi tertentu dalam penyaluran dananya.

8. Developing post-shipment financing working capital financing product for Documentary Collection transaction, through Account Receivable Financing scheme.
9. Held reward program for fee-based income target achievements to business units to increase the marketing and transaction of Trade Finance.
10. Developing the financing product of Mudharabah Muqayyadah to fulfil customers' need of specific preference in fund distribution.

Selain itu, keberadaan Cabang Kuala Lumpur diharapkan dapat menjembatani kebutuhan-kebutuhan korporasi yang beroperasi di kedua negara, baik melalui bilateral financing maupun sindikasi. Untuk penghimpunan dana korporasi, Bank memiliki dua tujuan utama, yaitu meningkatkan pertumbuhan *low cost of fund* melalui produk CASA (Tabungan dan Giro), serta pemenuhan kebutuhan dana untuk mendukung ekspansi pembiayaan, sementara kebutuhan tersebut belum dapat dipenuhi dari penghimpunan dana CASA/Ritel. Dana korporasi akan dihimpun melalui strategi sebagai berikut:

Aside from that, Kuala Lumpur branch is aimed to connect the corporate needs in both countries, be it through bilateral financing or syndication. To gather corporate fund, the Bank has two main purposes, which are to increase low cost of fund growth through CASA (saving and current account) products, as well as fulfill fund requirement for financial expansion if those aren't supported by CASA/Retail fund collection. The corporate fund is collected through these strategies:

1. CASA
   a. Target pasar penghimpunan CASA nasababah korporasi adalah Perusahaan Tbk dan groupnya, perusahaan skala korporasi, Universitas dan Perguruan Tinggi, BUMN dan turunannnya serta lembaga pemerintahan (BLU), organisasi Islam skala nasional, dan perusahaan kategori NBFI.

   b. CASA dari nasabah-nasabah pembiayaan, akan ditingkatkan melalui pemantauan *covenant* yang lebih ketat, monitoring CASA *thru-put,* serta melakukan *cross sell* terhadap *supplier/ buyer* dan groupnya.
   c. Upaya peningkatan CASA dari nasabah-nasabah non-pembiayaan, dilakukan dengan menawarkan layanan Transactional Banking, baik dalam hal *cash management* maupun *trade finance*. Layanan *Cash Management* yang saat ini ada akan lebih ditingkatkan fitur, kapabilitas, dan reliabilitasnya. Selain itu, Bank akan menawarkan layanan EDC untuk sarana *collection*, *Corporate Debit Card* (CDC), serta meningkatkan limit transfer untuk bertransaksi via layanan internet *banking.*
   d. Melalui unit Organisasi Islam, Bank akan melakukan *strategic partnership* dengan Ormas Islam, Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nasional & Lembaga yang berbasis Islam & sosial kemasyarakatan lainnya; sehingga diharapkan mutasi-mutasi transaksi lembaga-lembaga tersebut dapat dilakukan melalui Bank.
   e. Dari sisi keorganisasian, Bank akan membentuk tim yang khusus menggarap pasar Islamic, BUMN, dan perusahaan-perusahaan yang memiliki kegiatan bisnis yang bersentuhan dengan kerjasama Indonesia dan Saudi Arabia.

1. CASA
   a. CASA corporate customer target market are the public corporations (tbk) and its group, corporate scale companies, University and Higher Education Institutions, BUMN and its subsidiaries as well as government institutions (BLU), Islamic Organization on national scame and companies on NBFI category.
   b. CASA from financing customers will be improved from strict covenant monitoring, CAS thru-put monitoring and cross selling activities to supplier/buyer and their groups.

   c. CASA improvement from non-financing customers is done through offering Transactional Banking Services, be it from cash management or trade finance. Cash management services available today will be improved in term of capability and relaibility. Aside from that, Bank will offer EDC service for collection, Corporate Debit Card (CDC), as well as increase the transfer limit for internet banking.

   d. Through Islamic Organizational units, the Bank will do strategic partnership with Islamic Mass Organizations, Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nasional and other Islamic-based Foundations as well as other social communities; hoping that the mutations and transactions of those institutions can be done through Bank.
   e. From organizational side, the Bank will build a special team for Islamic market, BUMN and companies with business related to Indonesia and Saudi Arabia cooperation.

Penganekaragaman produk dan layanan, penajaman fokus bisnis, penataan organisasi, akan diiringi dengan pembuatan-pembuatan program taktikal marketing yang menarik dan mendorong produktifitas RM.

2. Deposito Berjangka
   a. Penghimpunan deposito nasabah korporasi, dilakukan untuk menutup gap kebutuhan dana pembiayaan dan penghimpunan dana retail dan CASA Bank. Selain itu, penghimpunan deposito korporasi, dapat memperbaiki *maturity profile* Bank.
   b. Aktifitas penghimpunan deposito korporasi, diarahkan untuk meningkatkan diversifikasi (mengurangi risiko konsentrasi) dan penurunan *Cost of Fund*. Diversifikasi dilakukan dengan cara meningkatkan akuisi nasabah-nasabah baru, terutama dari sektor perusahaan-perusahaan swasta besar. Penurunan *cost of fund* dilakukan dengan cara meningkatkan koordinasi antara unit pengelola *funding* korporasi dengan Treasury.
   c. Peningkatan kinerja penghimpunan Deposito Berjangka, juga akan dilakukan dengan melakukan perbaikan di sisi proses, meningkatkan *service* level, efisiensi, dan infrastruktur untuk mitigasi *operational risk*.
   d. Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi proses penjualan, akan dibentuk unit kerja yang bertugas melakukan telemarketing dan peningkatan kompetensi personal *middle office*.

Selain itu, Bank juga akan menyelenggarakan program *cross selling* melalui pengembangan penggunaan CMS untuk Nasabah pengguna layanan dan produk *Trade Finance* baik ekspor impor maupun perdagangan lokal. Selain dari sisi sumber daya manusia dan bisnis, strategi pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan juga perlu didukung dengan perbaikan proses manajemen risiko dan pengendalian internal. Langkah-langkah strategis yang akan dilakukan antara lain:

1. Memulai Proyek LSMK pada tanggal 16 Januari untuk memperbaiki proses pelaporan dan membuat laporan kualitas;
2. Memperkuat struktur organisasi Manajemen Risiko dan Fungsi Pengendalian Internal untuk menghindari kecurangan;
3. Menyusun ulang Organisasi Anti Fraud; dan
4. Memperkuat Tim Manajemen Risiko – Rekrutmen *Chief Risk Officer* (CRO).

Strategi ini diambil berdasarkan hasil identifikasi dan analisa atas permasalahan-permasalahan yang terjadi. Oleh karena itu, Bank Muamalat Indonesia perlu mengambil langkah startegis yang komprehensif demi mengakselerasi pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

Products and services diversity, sharpening of the business focus, organizational restructurization will be followed with interesting tactical marketing programs which will push the RM productivity.

2. *Time Deposit*
   a. *The deposit collection from corporate customers is done to fill the gap in the financing needs and the retail fund collection and Bank's CASA. in addition, the corporate deposit collection is done to improve the maturity profile of the Bank.*
   b. *The activities related to the collection of corporate deposit are done to increase the diversification (reducing the concentration risk), and to reduce Cost of Fund. Diversification is done by improving new customer acquisitions, especially customers from the large private corporate segment. The reduction of the cost of fund is done by improving the coordination between the corporate funding management unit and the Treasury.*
   c. *The improvement in the performance of time deposit collection will also be done by improving the process, by increasing service level, efficiency, and infrastructure, so as to mitigate the operational risks.*
   d. *To improve the effectiveness and efficiency of the sales process, a work unit will be created with the purpose of conducting telemarketing and improving competencies of middle office personnel.*

Other than that, the Bank also organizes cross selling program by developing the use of CMS for customers that use Trade Finance services and products, both for export and import, as well as for local trade purposes. Apart from the human resource and business aspects, the sustainable business growth strategy also needs to be supported by the improvement in the risk management and internal control processes. Strategic actions that will be done in this respect, include among others:

1. *Starting the LSMK project on the 16th January with the goal of improving the reporting process and creating report on quality;*
2. *Strengthening the organization structure for the Risk Management and the Internal Control functions to prevent instances of frauds;*
3. *Reorganizing the Anti-Fraud unit; and*
4. *Strengthening the Risk Management team – through the recruitment of the Chief Risk Officer (CRO).*

These strategies are taken based on the results of the identification and analyses of the existing problems. Therefore, Bank Muamalat Indonesia finds it necessary to take comprehensive strategic steps in order to accelerate the growth of its business in sustainable manner.

Profitabilitas Segmen Corporate

Profitability of Corporate Segments

Dalam miliar Rp
In billion IDR

	2019	2018	Growth	%
Third Party Fund	4.523	10.166	(5.643)	-55,51%
Financing	19.331	21.768	(2.437)	-11,20%

Pada 2019, Segment Corporate membukukan dana pihak ketiga sebesar Rp4,52 triliun, turun signifikan sebesar Rp5,64 triliun atau 55,51% dibanding tahun sebelumnya. Hal ini dilakukan sebagai langkah reprofiling penghimpunan dana dengan meningkatkan fokus penghimpunan dana pada produk Current Account dan Saving Account. Di sisi aset, segmen Corporate mencatat pembiayaan sebesar Rp19,33 triliun, turun sebesar Rp2,44 triliun atau 11,20% dibanding tahun lalu. Perlambatan pembiayaan terjadi karena di tahun 2019 segmen Corporate masih berfokus pada perbaikan kualitas portofolio.

In 2019, the Corporate segment booked third party funds of Rp4.52 trillion, a significant decrease of Rp5.64 trillion or 55.51% compared to the previous year. This is done as a step to reprofiling fund raising by increasing the focus of raising funds on the Current Account and Saving Account products. On the asset side, the Corporate segment recorded financing of Rp19.33 trillion, down by Rp2.44 trillion or 11.20% compared to last year. The slowdown in funding occurred because in 2019 the Corporate segment was still focused on improving portfolio quality.

Dalam miliar Rp
In billion IDR

	2019	2018	Growth
NIM from Financing	(253)	(160)	(93)
Margin Income	1.199	1.575	(376)
FTP Financing	(1.452)	(1.736)	283
NIM from Funding	129	216	(88)
Margin Expense	(566)	(607)	41
FTP Funding	695	823	(129)
Total Net Income Margin	(124)	56	(180)
Fee Based Income			
- Financing Fee	21	45	(24)
- Service Fee	8,5	15	(6,7)
- Trade Fee	96	127	(31)
Total Fee Based Income	125	187	(62)
Total Revenue	0,6	243	(242)

Total revenue segmen Corporate pada tahun 2019 tercatat sebesar Rp0,63 miliar atau turun sebesar Rp242,11 miliar dibanding tahun sebelumnya. Total Fee based income tercatat sebesar Rp125,09 miliar di tahun 2019. Komposisi fee based income Corporate didominasi oleh Trade fee sebesar 76,54% diikuti oleh Financing fee dan Service fee masing-masing sebesar 16,69% dan 6,78%.

Total revenue of the Corporate segment in 2019 was recorded at Rp0.63 billion or decreased by Rp242.11 billion compared to the previous year. Total fee based income was recorded at Rp125.09 billion in 2019. The composition of Corporate fee based income was dominated by Trade fees of 76.54%, followed by Financing fees and Service fees of 16.69% and 6.78% respectively.

Secara year on year, Fee based income tercatat turun sebesar Rp61,66 miliar atau 33,02% dibanding tahun lalu. Penurunan terbesar disebabkan turunnya Trade fee diikuti Financing fee dan Service fee. Trade fee tercatat sebesar Rp95,74 miliar atau turun 24,64% dibanding tahun lalu. Financing fee tercatat sebesar Rp20,87 miliar, turun sebesar Rp23,69 miliar atau 53,16% dibanding tahun sebelumnya (yoy). Penurunan financing fee dikarenakan adanya penurunan disbursement financing di tahun 2019.

On a year-to-year basis, Fee-based income was recorded to decrease by Rp61.66 billion or 33.02% compared to last year. The biggest decrease was due to a decrease in Trade fees followed by Financing fees and Service fees. Trade fees were recorded at Rp95.74 billion, down 24.64% compared to last year. Financing fees were recorded at Rp20.87 billion, down by Rp23.69 billion or 53.16% compared to the previous year (yoy). The decline in financing fees is due to a decrease in disbursement financing in 2019.

Dalam miliar Rp
In billion IDR

	2019	2018	Growth
Margin Income	407,86	253,92	153,94
Margin Expense	(119,93)	(237,93)	118,00
Total Net Income Margin	287,93	15,99	271,94
Gain on Forex	22,01	15,14	6,87
Gain on Securities	22,21	12,69	9,51
Fee Based-Income	44,21	27,84	16,38
Total Revenue	332,15	43,83	288,32

Selain bisnis Funding dan Financing, segmen Corporate juga memiliki bisnis Treasury. Kala pembiayaan tumbuh tidak terlalu kencang, bisnis treasury bank justru mencetak kenaikan revenue cukup signifikan. Dari kegiatan mengelola asset dan liabilitas dihasilkan total revenue sebesar Rp332,15 miliar atau naik sebesar Rp288,32 miliar. Total revenue tersebut dihasilkan dari net income margin sebesar Rp287,93 miliar dan fee based income sebesar Rp44,21 miliar. Kedepan, bisnis treasury akan terus ditingkatkan untuk meningkatkan pertumbuhan pendapatan Bank sesuai target yang diharapkan.

In addition to the Funding and Financing business, the Corporate segment also has a Treasury business. When financing grew not too fast, the bank's treasury business actually scored a significant increase in revenue. From the activities of managing assets and liabilities generated total revenue of Rp332.15 billion or an increase of Rp288.32 billion. The total revenue was generated from a net income margin of Rp287.93 billion and fee-based income of Rp44.21 billion. In the future, the treasury business will continue to be improved to increase the Bank's revenue growth according to the expected target.

Perbankan Internasional

Bank Muamalat Indonesia mengoperasikan Kantor Cabang di Kuala Lumpur, Malaysia. Dengan status sebagai *full branch*, kantor Cabang Kuala Lumpur dapat melayani nasabah Interbank, Korporasi dan Ritel di Malaysia melalui berbagai macam produk dan layanan jasa perbankan dalam denominasi Rupiah ataupun Dollar AS.

Pencapaian Cabang Kuala Lumpur di tahun 2019 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2018. Hal ini dapat dilihat dengan adanya peningkatan total Net Profit (loss) sebesar 38% dari Rp26,7 Miliar tahun 2018 menjadi Rp36,9 Miliar tahun 2019. Selain itu pada tahun 2019 terjadi pertumbuhan dari sisi Financing di Cabang Kuala Lumpur yaitu adanya kenaikan total financing sebesar 3% dari Rp677 Miliar tahun 2018 menjadi Rp696 Miliar tahun 2019. Dengan adanya kenaikan tersebut menyebabkan adanya peningkatan total fee base income menjadi Rp9,8 Miliar. Pada tahun 2019, Cabang Kuala Lumpur membukukan penghimpunan dana

International Banking

Bank Muamalat Indonesia operates a branch in Kuala Lumpur, Malaysia. With a full branch status, the Kuala Lumpur branch can serve Interbank, Corporate, and Retail customers in Malaysia through various banking products and services in Indonesian Rupiah and U.S. Dollar denomination.

The achievement of Kuala Lumpur Branch in 2019 experience an increase when compared to 2018. This can be seen through the total of Net Profit (loss) of 38% from Rp26.7 Billion in 2018, to Rp36.9 Billion in 2019. Also, in 2019 Kuala Lumpur Branch has undergone financial growth, which is an increase in financing of 3% from Rp677 Billion in 2018 to Rp696 Billion in 2019. The rise brings an increase to the total fee base income to Rp9.8 Billion. In 2019, Kuala Lumpur Branch recorded a collected fund equivalent to Rp1,376 Trillion. Meanwhile, the distribution portfolio is

sebesar ekuivalen Rp1.376 triliun. Sementara portfolio penyaluran pembiayaannya tercatat sebesar sebesar ekuivalen Rp696 miliar yang seluruhnya berada dalam kategori kolektabilitas lancar dengan NPF 0%.

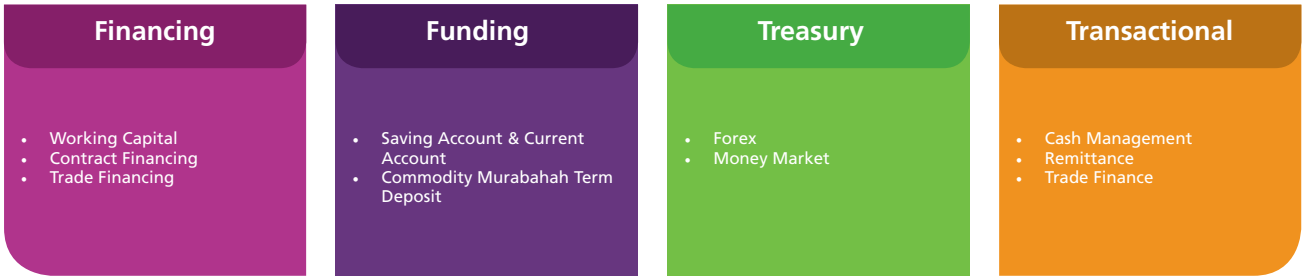
recorded at equivalent to Rp696 million which are in the category of current collectability with NPF 0%.

Produk dan Layanan Perbankan Internasional

BMIKL melayani lembaga keuangan, klien korporasi, dan klien ritel dengan menyediakan produk dan layanan jasa yang mencakup pembiayaan, pendanaan, transaksional perbankan, serta produk dan layanan *Treasury* sebagai berikut:

International Banking Products and Services

BMIKL serves financial institutions, corporate clients, and retail clients by providing product and services which includes financing, funding banking transaction as well as treasury as follow:



Strategi Perbankan Internasional

1. Treasury Business

   2019 merupakan tahun yang berat bagi perekonomian domestik maupun global. Hal ini berdampak kepada penurunan jumlah volume transaksi forex Cabang Kuala Lumpur di tahun 2019 tercatat mengalami penurunan sebanyak Rp1,94 T yaitu dari Rp19,84 T di tahun 2018 menjadi Rp17,9 T di tahun 2019. Penurunan volume transaksi ini menyebabkan penurunan forex income, sebesar 6,11% yaitu dari Rp8,83 miliar di tahun 2018 menjadi Rp8,29 miliar di tahun 2019.

2. Funding Business

   Akselerasi Funding Business, mengalami penyelarasan agar sejalan dengan strategi Bank serta menyesuaikan dengan aturan Regulator terkait Pinjaman Luar Negara (PLN). Tahun 2019, Cabang Kuala Lumpur berhasil mencatatkan jumlah funding kelolaan sebesar Rp1.332 T.

3. Financing Business

   Meskipun situasi makro ekonomi dan liquiditas tidak mendukung di tahun 2019, Cabang Kuala Lumpur masih tetap membukukan kenaikan portfolio pembiayaannya sebesar 2,79%, dengan total financing kelolaan Rp696 miliar yang seluruhnya dalam status kolektibilitas lancar. Dari sisi *exposure type* pembiayaan, maka

International Banking Strategy

1. *Treasury Business*

   2019 is a tough year for both domestic and global economy. This influences the decline in foreign exchange transaction volume in Kuala Lumpur Branch in 2019, which was recorded at Rp1.94 T from Rp19.84 T in 2018 to Rp17.9 T in 2019. The regression caused decline in foreign exchange income of 6,11% from Rp8.83 billion in 2018 to Rp8.29 billion in 2019.

2. *Funding Business*

   Business Funding acceleration experience an adjustment to align with the Bank strategy, as well as modifying them with Regulator rules regarding Foreign Loans (PLN). In 2019, Kuala Lumpur Branch managed to record manageable funding of Rp1,332 T.

3. *Financing Business*

   Despite the unsupportive macro economy and liquidity condition, in 2019, Kuala Lumpur Branch managed to record an increase in its financing portfolio of 2.79%, with total manageable financing of Rp696 million from the current collectability status. From financing exposure type, 45% of the financing asset amount is

45% dari jumlah aset pembiayaan adalah berupa pembiayaan modal kerja yang bersifat revolving atau pembiayaan jangka pendek. Sedangkan sisanya berkaitan dengan *project financing.*

4. Operasional

   Dari sisi operasional, selain berfokus pada peningkatan produktivitas dan transaksi, maka fokus pengembangan operasional di tahun 2019, adalah:

   a. Penyempurnaan prosedur-prosedur operasional;
   b. Perbaikan fasilitas *Business Continuity Plan*;
   c. Rencana implementasi Tax baru pada Otoritas Pajak Malaysia.

Kegiatan Segmen Treasury

Sebagai unit bisnis yang yang mempunyai target *Fee Based Income* dan *Net Margin Income*, *Treasury* secara fungsinya dalam mencapai profitabilitas tersebut dibagi menjadi 2 (dua) unit yaitu unit Manajemen Portofolio yang dibantu *Trading Team* untuk mengelola *Net Margin Income* dari *asset* dan *liabilities Treasury* dan unit berikutnya yaitu *Trading Team* beserta *Treasury Sales Team* yang bertanggung jawab dalam peningkatan *Fee Based Income*.

Peningkatan *margin income* dilakukan melalui strategi yang tepat dalam melakukan pembelian dan pengelolaan *asset Treasury* seperti sukuk pemerintah, instrumen moneter Bank Indonesia dan reksadana. Sedangkan efisiensi *margin expense* dilakukan dengan penerbitan Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (SIMA), Deposito antar bank, Pembiayaan yang Diterima (PYD) melalui skema Mudharabah Muqayyadah dan *Medium Term Note* (MTN).

Dalam hal penjualan produk *Foreign Exchange* (Forex) dan Sukuk untuk memperoleh *Fee Based Income*, *Treasury* bekerjasama dengan unit bisnis lain seperti *International Banking*, *Wealth Management*, *Retail Banking*, *Corporate/Commercial Banking* dan *Trade Finance*. Lebih lanjut, *Treasury Sales Team* dalam kegiatan transaksinya melayani nasabah segmentasi korporat dan segmentasi retail. Segmentasi korporat yang disasar adalah nasabah BUMN, nasabah korporat yang bergerak dalam bidang ekspor impor dan institusi keuangan non bank. Sedangkan segmentasi retail yang disasar adalah nasabah terkait dengan *Islamic Business*, nasabah prioritas dan nasabah individu lainnya.

Treasury secara organisasi berada di bawah Divisi Global Market dimana pada tahun 2019 telah dilakukan penguatan fungsi kontrol dan tata kelola dengan membentuk unit *Product and Governance*.

working capital financing, which are revolving or short-term. While the rest is related to project financing.

4. *Operational*

   In terms of operation, aside from focusing on productivity and transaction, the focus on operational development in 2019 are:

   a. Improvement on operational procedure;
   b. Improvement in Business Continuity Plan facility;
   c. New Tax implementation plan to Malaysian Tax Authority.

Treasury Segment Activities

As a business unit that has Fee Based Income and Net Margin Income targets, in achieving profitability, the Treasury function is divided into 2 (two) units, namely the Portfolio Management unit assisted by the Trading Team to manage the Net Margin Income of Treasury assets and liabilities and the next unit is the Trading Team along with the Treasury Sales Team who are responsible for increasing Fee Based Income.

The improvement in margin-based income is done by having an appropriate strategy for purchasing and managing Treasury assets, such as Syariah-based government bond, Bank Indonesia's monetary instruments, and mutual funds. Meanwhile, the efficiency of the margin-based expense is done by publishing the Interbank Mudharabah Investment Certificate (SIMA), interbank deposit, and acceptance payment (PYD) based on the Mudharabah Muqayyadah scheme, and Medium Term Note (MTN).

In terms of selling Foreign Exchange (Forex) and Sukuk products to obtain Fee Based Income, Treasury cooperates with other business units such as International Banking, Wealth Management, Retail Banking, Corporate/Commercial Banking and Trade Finance. Furthermore, Treasury/Treasury Sales Team in its transaction activities serves corporate segmentation and retail segmentation customers. The targeted corporate segmentation are SOE customers, corporate customers engaged in export and import and non-bank financial institutions. Whereas the targeted retail segmentation is customers related to Islamic Business, priority customers and other individual customers.

The Treasury Unit as a business unit is placed under the Global Market Division, whereby in 2019 as a unit it has engaged in strengthening the control and governance functions through the establishment of the Product and Governance unit.

Kinerja Segmen Treasury

Performance of Treasury Segment

Dalam miliar Rupiah
In billion Rupiah

	2019	2018	Growth
Margin Income	407,86	253,92	153,94
Margin Expense	(119,93)	(237,93)	118,00
Total Net Income Margin	287,93	15,99	271,94
Gain on Forex	22,01	15,14	6,87
Gain on Securities	22,21	12,69	9,51
Fee Based-Income	44,21	27,84	16,38
Total Revenue	332,15	43,83	288,32

Selain bisnis Funding dan Financing, segment Corporate juga memiliki bisnis Treasury. Kala pembiayaan tumbuh tidak terlalu kencang, bisnis treasury bank justru mencetak kenaikan *revenue* cukup signifikan. Dari kegiatan mengelola aset dan liabilitas dihasilkan *total revenue* sebesar Rp332,15 miliar atau naik sebesar Rp288,32 miliar. *Total revenue* tersebut dihasilkan dari *net income margin* sebesar Rp287,93 miliar dan f*ee based income* sebesar Rp44,21 miliar. Kedepan, bisnis treasury akan terus ditingkatkan untuk meningkatkan pertumbuhan pendapatan Bank sesuai target yang diharapkan.

In addition to the Funding and Financing business, the Corporate segment also has a Treasury business. When financing did not grow too fast, the bank's treasury business actually scored a significant increase in revenue. From the activities of managing assets and liabilities, total revenue of Rp332.15 billion was generated, an increase of Rp288.32 billion. The total revenue was generated from a net income margin of Rp287.93 billion and had fee-based income of Rp44.21 billion. In the future, the treasury business will continue to be improved to increase the Bank's revenue growth according to the expected target.

iB

Bank Muamalat
Pertama Murni Syariah



Hijrah itu Berkah

Nikmati berkahnya hadiah yang bisa dipilih sendiri

Tabungan iB Hijrah Prima Berhadiah

Sesuai Syariah | Terpercaya | Fleksibel

#AyoHijrah

Info lengkap hubungi: SalaMuamalat **1500016** | www.bankmuamalat.co.id

BankMuamalatIndonesia | BankMuamalat | Bank.Muamalat | BankMuamalat

Bank Muamalat Indonesia terdaftar dan diawasi oleh OJK Otoritas Jasa Keuangan | LPS Lembaga Penjamin Simpanan

Tinjauan Keuangan
Financial Review

Tinjauan keuangan yang diuraikan berikut mengacu kepada Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 yang disajikan dalam Laporan Tahunan ini. Laporan Keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali dan mendapat opini wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk tanggal 31 Desember 2019, serta kinerja keuangan dan arus kas Bank untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Financial review that is outlined is based on the Financial Report ending on the December 31, 2019 and 2018, which is available in this Annual Report. The Financial Report has been audited by public accountant office of Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Al and received an unqualified opinion in all material aspects, for the financial position of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk ending on the December 31, 2019, as well as the financial performance and cashflow for the period ending on the stated date, in accordance to the Indonesian Financial Accounting Standard.

Posisi Keuangan

Financial Position

Dalam jutaan Rupiah
In million Rupiah

Uraian *Description*	2019	2018	Pertumbuhan (Penurunan) *Increase (Decrease)*	
			Rp	%
Kas *Cash*	764.527	776.722	(12.196)	-1,57%
Giro dan Penempatan pada Bank Indonesia *Current Account and Placement at Bank Indonesia*	2.505.388	5.339.429	(2.834.041)	-53,08%
Giro pada Bank Lain *Current Accounts with Other Banks*	340.054	643.637	(303.583)	-47,17%
Penempatan pada Bank Lain *Interbank Placements*	37.826	12.327	25.499	206,86%
Investasi pada Surat Berharga *Investment in Securities*	11.332.895	12.184.953	(852.058)	-6,99%
Piutang *Account Receivables*				
Piutang Murabahah *Murabahah Receivables*	13.805.817	15.325.983	(1.520.165)	-9,92%
Piutang Istishna *Istishna Receivables*	3.688	4.349	(661)	-15,20%
Piutang Ijarah *Ijarah Receivables*	3.964	258	3.706	1435,35%
Jumlah Piutang *Total Receivables*	13.813.470	15.330.590	(1.517.120)	-9,90%
Pinjaman Qardh *Qardh Loans*	577.470	742.213	(164.744)	-22,20%
Pembiayaan Mudharabah *Mudharabah Financing*	748.497	431.872	316.625	73,31%
Pembiayaan Musyarakah *Musyarakah Financing*	14.008.300	15.856.148	(1.847.848)	-11,65%
Penyertaan Saham *Shares Investment*	407.711	6.095	401.616	6589%
Tagihan Akseptasi *Acceptance Receivable*	406.481	437.341	(30.860)	-7,06%
Aset yang Diperoleh untuk Ijarah *Assets Received for Ijarah*	180.520	186.055	(5.535)	-2,97%

Dalam jutaan Rupiah
In million Rupiah

Uraian *Description*	2019	2018	Pertumbuhan (Penurunan) *Increase (Decrease)*	
			Rp	%
Aset Tetap *Fixed Assets*	3.131.871	3.357.284	(225.413)	-6,71%
Aset Pajak Tangguhan *Deferred Tax Assets*	143.111	146.236	(3.125)	-2,14%
Aset Lain-Lain – Netto *Other Assets – Net*	2.157.400	1.776.373	381.027	21,45%
Jumlah Aset *Total Assets*	50.555.519	57.227.276	(6.671.757)	-11,66%

Total Aset

Total aset Bank Muamalat Indonesia tahun 2019 adalah sebesar Rp50.555.519 juta, turun 11,66% dibandingkan dengan tahun sebelumnya Rp57.227.276 juta. Penurunan nilai pada total aset ini disebabkan oleh beberapa faktor, Dana Pihak Ketiga dimana Bank senantiasa menjaga keseimbangannya dengan posisi financing yang juga turun akibat fokus bank untuk memperbaiki kualitas aset.

Total Assets

The total assets of Bank Muamalat Indonesia in 2019 is at Rp50,555,519 million, lower by 11.66% as compared to the previous year, which was in the amount of Rp57,222,276 million. The decrease in Third Party Funds, where bank managing stability between funding and financing position, as the bank focusing on improving asset quality.

Aset Lancar

Current Assets

Uraian *Description*	2019	2018	Pertumbuhan (Penurunan) *Increase (Decrease)*	
			Rp	%
Kas *Cash*	764.527	776.722	(12.196)	-1,57%
Giro dan Penempatan pada Bank Indonesia *Current Account and Placement at Bank Indonesia*	2.505.388	5.339.429	(2.834.041)	-53,08%
Giro pada Bank Lain *Current Accounts with Other Banks*	340.054	643.637	(303.583)	-47,17%
Penempatan pada Bank Lain *Interbank Placements*	37.826	12.327	25.499	206,86%
Total	3.647.794	6.772.115	(3.124.321)	-46,14%

Jumlah aset lancar Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2019 adalah sebesar Rp3.647.794 juta tercatat mengalami penurunan sebesar 46,14% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2018 yang berada pada posisi Rp6.772.115 juta. Hal ini utamanya disebabkan oleh penurunan dari nilai Giro dan Penempatan Pada Bank Indonesia yang menurun sejumlah Rp2.834.041 juta sepanjang tahun 2019. Penurunan dari Giro dan Penempatan Pada Bank Indonesia.

The total of current assets of Bank Muamalat Indonesia in 2019 was Rp3,647,794 million, lower by 46.14% as compared to the same period in 2018, which was of Rp6,772,115 million. This is due to the decrease in the value of Account and Placement at Bank Indonesia by Rp2,834,041 million throughout 2019. The significant decrease in Account and Placement at Bank Indonesia is mainly driven by the liquidity.

Aset Tetap

Aset tetap berada pada posisi Rp3.131.871 juta mengalami penurunan sebesar 6,71% dibandingkan penutupan tahun 2018 yang berada pada posisi Rp3.357.284 juta. Nilai penurunan dari aset tetap ini banyak didorong oleh meningkatnya nilai akumulasi penyusutan dari aset tetap dan juga penurunan dari aset kendaraan yang dimiliki oleh Bank Muamalat Indonesia. Disamping tidak adanya penambahan aset tetap yang bersifat signifikan.

Fixed Assets

The total fixed assets are in the amount of Rp3,131,871 million, lower by 6.71% as compared to the same period in 2018, which was in the amount Rp3,357,284 million. The decrease in the value of the fixed assets is due to the increase of the accummulated depreciation values of the fixed assets as well as the reduction of the values of the vehicles that are owned by Bank Muamalat Indonesia. Besides there are no added significant aset.

Pembiayaan (Netto)

Financing (Nett)

Dalam jutaan Rupiah
In million Rupiah

Uraian *Description*	2019	2018	Pertumbuhan (Penurunan) *Increase (Decrease)*	
			Rp	%
Piutang Murabahah *Murabahah Receivables*	13.805.817	15.325.983	(1.520.165)	-9,92%
Piutang Istishna *Istishna Receivables*	3.688	4.349	(661)	-15,20%
Piutang Ijarah *Ijarah Receivables*	3.964	258	3.706	1435,35%
Pinjaman Qardh *Qardh Loans*	577.470	742.213	(164.744)	-22,20%
Pembiayaan Mudharabah *Mudharabah Financing*	748.497	431.872	316.625	73,31%
Pembiayaan Musyarakah *Musyarakah Financing*	14.008.300	15.856.148	(1.847.848)	-11,65%
Total Financing (Nett)	29.147.736	32.360.823	(3.213.088)	-9,93%

Pembiayaan per 31 Desember 2019 mencapai Rp29.147.736 juta turun 9,93% atau Rp3.213.088 juta dari posisi per 31 Desember 2018 sebesar Rp32.360.823 juta. Penurunan nilai total pembiayaan tersebut banyak dikarenakan penurunan nilai pembiayaan Musyarakah dan juga pembiayaan Mudharabah selama tahun 2019. Faktor utama dari penurunan pembiayaan ini banyak disebakan oleh strategi Bank untuk lebih fokus pada perbaikan kualitas portofolio.

The financing loan as of December 31, 2019 reached Rp29,147,736, lower by 9.93% or Rp3,213,088 million as compared to the period as of December 31, 2018, which was at Rp32,360,823 million. The decrease in the total financing values are due to the decrease in the Musyarakah as well as the Mudharabah financing throughout 2019. The main factor causing the decrease in the financing is the Bank's strategy to focusing on portfolio quality improvement.

Pemberian fasilitas pembiayaan kepada nasabah dipisahkan antara pembiayaan untuk keperluan produktif maupun konsumtif, yang dibukukan berdasarkan akad atau skema yang dipakai yaitu sebagai piutang, pinjaman dan pembiayaan. Masing-masing uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Piutang Murabahah

   Piutang Murabahah sebesar Rp13.805.817 juta tercatat mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2018 yang berada pada posisi Rp15.325.983 juta. Hal ini sejalan dengan fokus

The provision of loan facilities to customers are segmented into productive and consumptive loans, which are recorded based on the contracts or schemes that are used, namely as receivables, loans, and financing. The followings are the explanations:

1. *Murabahah Receivables*

   Murabahah receivables are Rp13,805,817 million, lower than in 2018, which was Rp15,325,983 million. This is in line with the Bank's focus in improving the quality of the financing, such that

Bank dalam melakukan perbaikan kualitas pembiayaan, sehingga pertumbuhan pada beberapa sektor mengalami perlambatan.

2. Piutang Istishna
   Penurunan juga terjadi pada piutang Istishna dimana Bank mencatatkan penurunan pada pembiayaan ini sebesar -15,20% atau Rp661 juta dari Rp4.349 juta tahun 2018 menjadi Rp3.688 juta pada tahun 2019. Penurunan nilai bersih dari Piutang Istishna ini terjadi dikarenakan pelunasan yang dilakukan oleh nasabah.
3. Pinjaman Qardh
   Pada pinjaman Qardh yang disalurkan Bank mencatatkan penurunan pada posisi 2019 yang ditutup pada posisi Rp742.213 juta atau turun sebesar 22,20% dibandingkan realisasi tahun 2018 yang berada pada posisi Rp577.470 juta.
4. Pembiayaan Mudharabah
   Pembiayaan Mudharabah pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 73,13% menjadi Rp748.497 juta dari sebelumnya Rp431.872 juta pada periode yang sama tahun 2018.
5. Pembiayaan Musyarakah
   Penurunan juga terjadi pada pembiayaan Musyarakah, dimana pembiayaan berbasis bagi hasil ini menunjukan koreksi sebesar -11,65% menjadi Rp14.008.300 juta dari posisi Rp15.856.148 juta di tahun 2018.
6. Aset yang Diperoleh untuk Ijarah
   Sedangkan aset yang diperoleh untuk Ijarah yang ditutup pada posisi Rp258 juta tercatat lebih kecil dibandingkan realisasi tahun sebelumnya yang berada pada posisi Rp3.964 juta.

the growth slows down in several sectors.

2. *Istishna Receivables*
   The decrease is also seen in the Istishna receivables in which the Bank recorded a decrease in this financing by -15.20% or Rp661 million from Rp4,349 million in 2018 to Rp3,688 million in 2019. The decrease in the net value of Istishna receivables are due to the repayment from customers.
3. *Qardh Loans*
   Qardh loans distributed by the Bank is recorded to be lower in 2019, which was Rp742,213 million or equal to a decrase by 22.20% as compared to 2018 which was Rp577,470 million.
4. *Mudharabah Financing*
   Mudharabah financing in 2019 increased by 73.13% to Rp748,497 million from previously Rp431,872 million in the same period of 2018.
5. *Musyarakah Financing*
   The Musyarakah financing, whereby the financing is based on profit sharing, shows a decrease by -11.65% to Rp14,008,300 million from Rp15,856,148 million in 2018.
6. *Assets Obtained through Ijarah*
   Meanwhile, the realization of assets which are obtained through Ijarah is lower by Rp258 million than the realization in previous year which was at Rp3,964 million.

Liabilitas dan Ekuitas

Liabilities and Equity

Dalam jutaan Rupiah
In million Rupiah

Uraian *Description*	2019	2018	Pertumbuhan (Penurunan) *Increase (Decrease)*	
			Rp	%
Liabilitas *Liabilities*				
Liabilitas Segera *Current Liabilities*	87.700	198.814	(111.114)	-55,89%
Bagi Hasil yang Belum Dibagikan *Undistributed Revenue Sharing*	76.293	84.055	(7.762)	-9,23%
Simpanan *Deposit*	7.003.756	6.030.144	973.612	16,15%
Simpanan dari Bank Lain *Deposits from Other Banks*	117.315	48.200	69.116	143,40%
Efek-Efek yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali *Securities Sold under Repurchase Agreement*	1.352.033	1.072.328	279.705	26,08%
Liabilitas Akseptasi *Acceptance Payables*	261.934	205.043	56.891	27,75%
Pinjaman yang Diterima *Fund Borrowings*	277.765	1.150.000	(872.235)	-75,85%

Dalam jutaan Rupiah
In million Rupiah

Uraian *Description*	2019	2018	Pertumbuhan (Penurunan) *Increase (Decrease)*	
			Rp	%
Utang Pajak *Tax Payable*	34.265	36.827	(2.562)	-6,96%
Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi *Estimated Losses on Commitments and Contigencies*	1.668	2.620	(952)	-36,32%
Estimasi Liabilitas Imbalan Kerja *Estimated Liabilities for Employment Benefit*	174.522	200.648	(26.126)	-13,02%
Liabilitas Lain-Lain *Other Liabilities*	235.633	426.200	(190.567)	-44,71%
Jumlah Liabilitas *Total Liabilities*	9.622.884	9.454.878	168.005	1,78%
Dana Syirkah Temporer *Temporary Syirkah Fund*	36.995.457	43.850.731	(6.855.273)	-15,63%
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh *Issued and Fully Paid-up Capital*	1.103.435	1.103.435	-	0,00%
Tambahan Modal Disetor - Bersih *Additional Paid-in Capital – Net*	1.578.925	1.578.925	-	0,00%
Keuntungan Pengukuran Kembali Program Imbalan Pasti - Setelah Pajak *Revaulation Profit of Fixed Return Program – After tax*	60.027	67.640	(7.614)	-11,26%
Keuntungan (Kerugian) Belum Direalisasi dari Perubahan Harga Pasar Efek Tersedia untuk Dijual (Afs) *Unrealized Profit (Loss) Based on the Changed in the Market Value of the Available for Sale Securities*	(10.165)	(16.964)	6.799	40,08%
Surplus Revaluasi atas Aset Tetap - Setelah Pajak *Revaluation Surplus of Fixed Assets – After Tax*	690.593	747.432	(56.839)	-7,60%
Saldo Laba *Retained Earnings*	514.363	441.198	73.165	16,58%
Jumlah Ekuitas *Total Equity*	3.937.178	3.921.667	15.511	0,40%
Jumlah Liabilitas, Dana Syirkah Temporer, dan Ekuitas *Total Liabilities, Temporary Syirkah Fund, and Equity*	50.555.519	57.227.276	(6.671.757)	-11,66%

Total Liabilitas

Catatan keuangan Bank Muamalat Indonesia untuk Liabilitas dan equitas pada tahun 2019 adalah sebesar Rp50.555.519 juta dan mengalami penurunan sebesar 11,66% atau Rp6.671.757 juta dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu Rp57.227.276 juta. Penurunan liabilitas ini disebabkan oleh turunnya Dana pihak ketiga yang dikelola oleh Bank dalam rangka *strategy* untuk *reprofiling* seiring dengan melambatnya laju pertumbuhan financing. Simpanan wadiah meningkat cukup signifikan dimana pada tahun 2019 bank terus menggencarkan kampanye Ayo Hijrah dimana salah satu fokusnya adalah peningkatan CASA terutama wadiah. Hal ini akan terus dilakukan pada tahun-tahun yang akan datang, guna memperkuat struktur pendanaan bank.

Total Liabilities

The financial note of Bank Muamalat Indonesia for liabilities and equity in 2019 was Rp50,555,519 million, lower by 11.66% or Rp6,671,757 million as compared to the previous year, which was in the amount of Rp57,227,276 million. The decrease in liabilities can be attributed to the decrease in the third-party fund under the Bank's management, which is part of the Bank's strategy tto reprofiling with limit growth of financing. Wadiah deposits have increased significantly, where in 2019 banks continue to intensify the Ayo Hijrah campaign, where one focus is to increase CASA, especially wadiah. This will continue to be done in the years to come, in order to strengthen the bank's funding structure.

Dalam jutaan Rupiah
In million Rupiah

Uraian *Description*	2019	2018	Pertumbuhan (Penurunan) *Increase (Decrease)*	
			Rp	%
Simpanan *Deposits*	7.003.756	6.030.144	973.612	16,15%
Giro Wadiah *Wadiah Account*	2.531.703	2.451.966	79.736	3,25%
Tabungan Wadiah - Pihak Ketiga *Wadiah Deposit – Third Party*	4.472.054	3.578.178	893.876	24,98%

Dana Syirkah Temporer

Temporary Syirkah Fund

Dalam jutaan Rupiah
In million Rupiah

Uraian *Description*	2019	2018	Pertumbuhan (Penurunan) *Increase (Decrease)*	
			Rp	%
Giro Mudharabah *Mudharabah Account*	1.189.742	1.256.643	-66.901	-5,32%
Tabungan Mudharabah *Mudharabah Deposit*	10.815.180	10.772.544	42.635	0,40%
Deposito Mudharabah *Mudharabah Time Deposit*	22.898.656	28.872.543	-5.973.888	-20,69%
Surat Berharga yang Diterbitkan *Securities Issued*	2.091.880	2.949.000	-857.120	-29,06%
Total	36.995.457	43.850.731	-6.855.273	-15,63%

Posisi dana syirkah temporer pada akhir tahun 2019 mencapai Rp36.995.457 juta, turun sebesar 15,63% atau sebesar Rp6.855.273 juta terhadap posisi dana syirkah temporer pada akhir tahun sebelumnya sebesar Rp43.850.731 juta. Penurunan tersebut terutama dipicu oleh penurunan deposito mudharabah yang turun sebesar Rp5.973.888. Penurunan deposito murabahah ini merupakan salah satu strategi yang diterapkan terkait dengan *reprofiling* penghimpunan dana pihak ketiga guna memperkuat pada produk basis CASA.

The position of temporary syirkah funds at the end of 2019 reached Rp36,995,457 million, decreasing by 15.63% or Rp6,855,273 million compared to the position of temporary syirkah funds at the end of the previous year amounting to Rp43,850,731 million. The decline was mainly triggered by a decrease in mudharabah deposits which decreased by Rp5,973,888 million. The reduction in murabahah deposits is one of the strategies implemented in relation to reprofiling funding for strengthen CASA base products.

Dana Pihak Ketiga

Third Party Fund

Dalam jutaan Rupiah
In million Rupiah

Uraian *Description*	2019	2018	Pertumbuhan (Penurunan) *Increase (Decrease)*	
			Rp	%
Giro *Account*	3.663.198	3.600.980	62.218	1,73%
Tabungan *Saving Account*	14.780.721	14.200.912	579.809	4,08%
Deposit	21.913.293	27.833.681	(5.920.388)	-21,27%
Total DPK	40.357.212	45.635.573	(5.278.361)	-11,57%

Bank Muamalat berhasil menghimpun dana masyarakat selama tahun 2019 sebesar Rp40.357.212 juta. Dana Pihak Ketiga (DPK) mengalami penurunan sebesar 11,57% atau sebesar Rp5.278.361 Juta, dari semula Rp45.635.573 Juta pada tahun 2018. DPK dihimpun dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan dan deposito dengan menggunakan akad wadiah dan mudharabah. Penurunan dari Dana Pihak ketiga pada tahun 2019 berasal dari penurunan nilai deposito sebesar 11,57% dibandingkan dengan posisi tahun lalu. Penurunan nilai deposito ini banyak dipengaruhi oleh strategi perusahaan untuk bisa menurunkan Cost of Fund. Sementara nilai CASA pada tahun 2019 meningkat Rp642.027 juta atau 3,61% dibandingkan dengan jumlah tahun lalu. Jumlah tabungan meningkat Rp579.809 juta dibandingkan dengan tahun 2018 yang tercatat sebesar Rp14.200.912 juta. Sementara nilai Giro juga mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun lalu, dimana pada tahun 2019 Giro tercatat sebesar Rp3.663.198 naik 1,73% dibandingkan dengan tahun lalu yang tercatat sebesar Rp3.600.980. Bank akan senantiasa memberikan yang terbaik dalam memenuhi kebutuhan nasabah baik untuk tujuan transaksional maupun investasi.

Bank Muamalat managed to raise public funds during 2019 amounting to Rp40,357,212 million. Party Funds Third (DPK) decreased by 11.57% or amounting to Rp5,278,361 million, from the original Rp45,635,573 million in the year 2018. DPK is collected from the community in the form of demand deposits, savings and deposits using the Wadiah and Mudharabah agreements. The decline in third-party funds was driven by many a decrease in the value of deposits which decreased significantly in the year 2019 which is 11.57% compared to the position of the year then. The decline in the value of these deposits is heavily influenced by strategy companies to reduce the Cost of Fund. While value CASA in 2019 increased by Rp642,027 or 3.61% compared to number of years ago. Total savings increased by Rp579,809 million compared to 2018 which was recorded at Rp14,200,912 million. While the value of demand deposits also increased compared with last year, where in 2019 Current accounts were recorded at Rp3,663,198 rose 1.73% compared to last year which recorded at Rp3,600,980. Bank will always providing customers needs for transaction or investment.

Ekuitas

Ekuitas Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2019 adalah sebesar Rp3.937.178 juta yang mengalami pertumbuhan sebesar 0,40% atau sebesar Rp11.511 juta terhadap posisi ekuitas pada tahun 2018 yang sebesar Rp3.921.667 juta. Kenaikan tersebut terutama diperoleh dari *retained earning* dan juga surplus terhadap revaluasi aset tetap.

Equity

Bank Muamalat Indonesia's equity as of 2019 was Rp3,937,178 million, increasing 0.40% or Rp11,511 million as compared to the equity position as of the end of 2018, which was Rp3,921,667 million. The increase can be attributed mainly to higher retained earnings and the revaluation surplus of fixed assets.

Laba Rugi dan Penghasilan

Profit and Loss and Income

Dalam jutaan Rupiah
In million Rupiah

Uraian *Description*	2019	2018	Pertumbuhan (Penurunan) *Increase (Decrease)*	
			Rp	%
Jumlah Pendapatan Bank sebagai Mudharib *Total Income of the Bank from Mudharib*	2.779.691	3.220.190	(440.499)	-13,68%
Hak Pihak Ketiga atas Bagi Hasil Dana Syirkah Temporer *Third Parties Share on Returns of Temporary Syirkah Funds*	(2.396.721)	(2.241.737)	(154.984)	-6,91%
Hak Bagi Hasil Milik Bank *Bank's Share in Revenue Sharing*	382.970	978.453	(595.483)	-60,86%
Pendapatan Operasional Lainnya *Other Operational income*	647.444	349.152	298.292	85,43%
Beban Operasional *Operational Expenses*	(1.550.288)	(1.643.034)	92.747	5,64%
Pembalikan (Beban) Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Produktif dan Non Produktif *Reverse (Expense) of Allowance for Impairment of Productive and Non-productive Asset Value*	507.382	352.191	155.191	44,06%
Keuntungan Selisih Kurs *Gain on Foreign Exchange*	32.001	32.108	(107)	-0,33%
Laba Usaha *Income from Operations*	19.509	68.870	(49.361)	-71,67%
Pendapatan (Beban) Non Operasional - Netto *Non-Operating (Expense) - Net Income before Tax*	6.658	(23.064)	29.722	128,87%
Laba sebelum Pajak *Income before Tax*	26.166	45.806	(19.639)	-42,88%
Manfaat (Beban) Pajak *Income Tax Benefits (Expense)*	(9.840)	196	(10.036)	-5.116,04%
Laba Bersih *Net Profit*	16.326	46.002	(29.676)	-64,51%
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan *Comprehensive Total Profit of the Current Year*	15.511	41.348	(25.837)	-62,49%
Laba per Saham Dasar (Dalam Nilai Penuh) *Profit per Base Shares – in Full Amount*	1,60	4,51	(2,91)	-64,51%

Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank sebagai Mudharib

Di tahun 2019, Bank Muamalat Indonesia mencatat pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mudharib sebesar Rp2.779.691 juta, terdapat penurunan sebesar 13,68% atau Rp440.499 juta bila dibandingkan dengan posisi pendapatan tersebut pada akhir tahun 2018 yaitu sebesar Rp3.220.190 juta. Penurunan penerimaan pendapatan ini terjadi karena penurunan posisi pembiayaan yang merupakan komponen utama pendapatan bank. Hal ini seiring dengan fokus bank dalam memperbaiki kualitas portfolio pembiayaan.

Revenue from Fund Management as Mudharib

In 2019, Bank Muamalat Indonesia recorded an income from the management of fund by the Bank as Mudharib in the amount of Rp2,779,691 million, lower by 13.68% or by Rp440,499 million as compared to the income position as of the end of 2018, which was in the amount of Rp3,220,190 million. The decrease in income can be attributed to the decrease in the financing position, as well as the main income. This in line with bank focus to improve the quality of financing portfolio.

Bagi Hasil Dana Syirkah Temporer

Di tahun 2019 Bank mencatat adanya kenaikan Bagi Hasil Dana Syirkah Temporer sebesar 6,91% menjadi Rp2.396.720,81 juta dibandingkan tahun 2018 yang berjumlah Rp2.241.736,94 juta. Hal ini disebabkan oleh peningkatan beban bagi hasil surat berharga yang diterbitkan oleh bank dan juga deposito.

Profit Sharing of the Temporary Syirkah Fund

In 2019, the Bank recorded an increase in the profit sharing of the Temporary Syirkah Fund by 6.91% to Rp2,396,720.81 million, as compared to in 2018 which was in the amount of Rp2,241,736.94 million. This can be attributed to the increase in the expense of the profit sharing of the securities issued by the Bank as well as the increase in time deposit.

Pendapatan Operasional Lainnya

Pendapatan operasional lainnya mengalami kenaikan sebanyak 85,43% menjadi Rp647.444 juta dari tahun sebelumnya yang secara kumulatif berjumlah Rp298.292 juta. Kenaikan pendapatan operasional lainnya secara signifikan ini merupakan kenaikan dari pendapatan jasa administrasi yang dapat dibukukan oleh Bank selama tahun 2019. Serta adanya recovery dari aset yang telah dialihkan.

Other Operational Income

Other operational income increased by 85.43% to Rp647,444 million from previous year, which in cumulative terms stands at Rp298,292 million. The significant increase in the operational income can be attributed to the increase in the income from administrative services, which can be recognized by the Bank throughout 2019. Also there were asset recovery from shifted asset.

Beban Operasional Lainnya

Operational Expenses

Dalam jutaan Rupiah
In million Rupiah

Uraian *Description*	2019	2018	Pertumbuhan (Penurunan) *Increase (Decrease)*	
			Rp	%
Umum dan Administrasi *General and Administrative*	666.163	691.844	(25.681)	-3,71%
Karyawan *Personnel*	770.739	845.632	(74.893)	-8,86%
Bonus Giro Wadiah *Wadiah Account Bonus*	11.257	12.568	(1.311)	-10,43%
Lain-Lain *Others*	102.130	92.991	9.139	9,83%
Jumlah Beban Usaha *Total Expense*	1.550.228	1.643.043	(92.806)	-5,65%

Bank senantiasa menjaga tingkat beban operasional pada level yang optimal, upaya perbaikan operasional bisnis telah dilakukan secara maksimal beberapa tahun terakhir dan juga upaya efisinesi telah bank lakukan demi bisa menekan biaya operasional. Pada tahun 2019 Bank telah berhasil menurunkan beban operasional sebesar Rp92.806 juta secara keseluruhan dimana pada taun 2019 beban operasional Bank tercatat sebesar Rp1.550.288 juta turun 5,65% jika dibandingkan dengan beban operasional tahun lalu yang sebesar Rp1.643.034 juta. Kedepannya bank masih harus lebih berusaha untuk bisa menekan biaya operasional agar bisa lebih efisien.

The Bank continuously maintains its operational expense at the optimal level. Efforts to improve the business operations have been made at maximum in the past years, and efficiency efforts have been done by the Bank to reduce its operational expense. In 2019, the Bank has managed to decrease its operational expense by Rp92,806 million in overall, whereby in 2019 the operational expense of the Bank was recorded at Rp1,550,228 million, or decreasing of 5.65% as compared to the operational expense in previous year, which was Rp1,643,034 million. In the future the Bank will continue to increase the efficiency of its operational expense.

Laba Operasional

Bank mengalami penurunan laba Operasional sebesar Rp49.361 juta menjadi Rp19.509 juta pada tahun 2019. Total laba Operasional mengalamai penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesr Rp68.870 juta. Penurunan laba Operasional ini terjadi dikarenakan penurunan pendapatan bank sebagai mudharib yang terkoreksi cukup dalam sepanjang tahun 2019.

Operating Profit

The Bank recorded a decrease in operating profit by Rp49,361 million to Rp19,509 million in 2019. The total operating profit is lower as compared to the previous year, which was at Rp68,870 million. The decrease in operating profit can be attributed to the decrease in the Bank's income as Mudharib, which decreases relatively significantly throughout 2019.

Laba sebelum Pajak

Laba sebelum pajak yang dimiliki oleh Bank Muamalat pada tahun 2019 adalah sebesar Rp26.166 juta terdapat penurunan sebesar 42.88% atau Rp19.639 juta dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp45.806 juta. Hal utama yang menyebabkan penurunan ini adalah penurunan pendapatan utama bank dari pembiayaan.

Profit Before Tax

Profit before tax of Bank Muamalat in 2019 is recorded at Rp26,166 million, lower by 42.88% or Rp19,639 million as compared to in previous year, which was at Rp45,806 million. The decrease can mainly be attributed to the financing.

Penghasilan Komprehensif Lain

Penghasilan Komprehesif lainnya mencatatkan adanya penurunan sebesar 82,48% menjadi Rp815 juta pada tahun 2019 dibanding tahun 2018 sebesar Rp4.654 juta. Hal ini disebabkan oleh penurunan nilai revaluasi aset tetap yang tidak dilakukan pada tahun 2019 ini.

Other Comprehensive Income

Other Comprehensive Income decreased by 82.48% to Rp815 million in 2019 as compared to 2018, which was Rp4,654 millions. This is due to the decrease in the value of the fixed asset after revaluation, which is not done in 2019.

Penghasilan Komprehensif Periode Berjalan

Pada tahun 2019, Penghasilan Komprehensif lainnya dari Bank Muamalat Indonesia adalah sebesar Rp15.511 juta mengalami penurunan sebesar 62,49% atau Rp25.837 juta dbandingkan dengan tahun 2018 yaitu sebesar Rp41.348 juta.

Comprehensive Income in the Current Period

In 2019, the other comprehensive income of Bank Muamalat Indonesia was Rp15,511 million, decreasing 62.49% or Rp25,837 million as compared to in 2018, which was in the amount of Rp41,348 million.

Laba per Saham Dasar

Laba per saham dasar Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2019 adalah sebesar Rp1,60. Sedangkan pada tahun sebelumnya adalah Rp4,51. Terdapat penurunan sebesar 64,51% dari tahun lalu yang disebabkan oleh penurunan laba bersih bank pada tahun 2019.

Basic Earnings per Share

Profit per base shares of Bank Muamalat Indonesia in 2019 is at Rp1.60. Meanwhile, in the previous year, it was at Rp4.51. There is a decrease of 64,51% from previous year, which attributed to the decrease in the net profit of the Bank in 2019.

Arus Kas

Cash Flow

Dalam jutaan Rupiah
In million Rupiah

Uraian *Description*	2019	2018	Pertumbuhan (Penurunan) *Increase (Decrease)*	
			Rp	%
Arus Kas dari Aktivitas Operasi *Cash Flow from operating Activities*	9.669	797.329	(787.659)	-98,79%
Arus Kas dari Aktivitas Investasi *Cash Flow from Investment Activities*	(1.538.364)	(773.038)	(765.326)	-99,00%
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan *Cash Flow from Financing Activities*	(1.596.911)	(1.600.622)	3.711	0,23%
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas *Net Increase (Decrease) of Cash and Cash Equivalent*	(3.125.605)	(1.576.331)	(1.549.274)	-98,28%
Kas dan Setara Kas Pada Awal Tahun *Cash and Cash Equivalent at the Beginning of the Year*	6.774.187	8.350.518	(1.576.331)	-18,88%
Kas dan Setara Kas Pada Akhir Tahun *Cash and Cash Equivalent at the End of the Year*	3.648.581	6.774.187	(3.125.605)	-46,14%

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Bank mencatat arus kas bersih dari aktivitas operasional untuk tahun 2019 sebesar Rp9.670 juta atau turun sebesar 98,79% dibandingkan posisi tahun sebelumnya sebesar Rp797.329 juta. Arus kas masuk dari kegiatan operasi 2019 sebagian besar dipengaruhi oleh penurunan

Cash Flow from Operating Activities

The Bank recorded a net cash flow from operating activities for the year 2019 in the amount of Rp9,670 million or a decrease by 98.79% as compared to the previous year, which was Rp797,329 million. The cash inflows from operating activities in 2019 were mainly impacted due to

pendapatan dari pengelolaan dana dan juga kenaikan kewajiban terhadap Dana syirkah temporer.

the decrease in income from the fund management, and the increase in the expenses related to the temporary syirkah fund.

Dalam jutaan Rupiah
In million Rupiah

Uraian *Description*	2019	2018	Pertumbuhan (Penurunan) *Increase (Decrease)*	
			Rp	%
Arus Kas dari Aktivitas Operasi *Cash Flow from Operating Activities*				
Penerimaan Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank sebagai Mudharib *Income Received from the Management of Fund by the Bank as Mudharib*	2.498.753	3.252.795	(754.043)	-23,18%
Pembayaran Bagi Hasil Dana Syirkah Temporer *Payment of Temporary Syirkah Funds*	(2.245.082)	(2.121.243)	(123.839)	-5,84%
Penerimaan Pendapatan Operasional Lainnya *Receipt from Other Operating Revenue*	647.444	349.152	298.292	85,43%
Penerimaan Kembali Piutang dan Pembiayaan yang Telah Dihapusbukukan *Reimbursement of Receivables and Written-off Financing*	44.469	35.550	8.919	25,09%
Pembayaran Beban Kepegawaian *Payments for Employee Expenses*	(831.751)	(784.034)	(47.717)	-6,09%
Pembayaran Beban Operasional Lainnya *Payments for Other Operating Expenses*	(564.908)	(631.193)	66.285	10,50%
Pembayaran Pajak Penghasilan *Payment of Income Taxes*	(24.800)	(41.531)	16.731	40,28%
Penerimaan Pendapatan Non Operasional *Receipts from Non-Operating Income*	28.992	14.374	14.618	101,69%
Pembayaran Beban Non Operasional *Payments for Non-Operating Expenses*	(22.335)	(37.438)	15.104	40,34%
Arus Kas dari Operasi sebelum Perubahan Aktiva dari Kewajiban Operasi *Cash Flow from Operating Activities before the Change in Assets from Mandatory Operations*	(469.218)	36.433	(505.651)	-1.387,89%
Penurunan (Kenaikan) Aktiva Operasi *Decrease (Increase) in Operating Assets*				
Penempatan Bank Lain *Placements with Other Banks*	(25.499)	356.545	(382.044)	-107,15%
Piutang *Receivables*	1.491.583	4.779.469	(3.287.886)	-68,79%
Pinjaman Qardh *Qardh Loans*	173.990	(25.851)	199.841	773,04%
Pembiayaan Mudharabah *Mudharabah Financing*	(318.924)	271.682	(590.606)	-217,39%
Pembiayaan Musyarakah *Musyarakah Financing*	2.336.988	3.304.737	(967.749)	-29,28%
Aktiva yang Diperoleh untuk Ijarah Bersih *Assets Acquired for Ijarah Nett*	1.414	13.443	(12.030)	-89,48%
Aktiva Lain-Lain *Other Assets*	1.630.368	(5.068.988)	6.699.357	132,16%
Kenaikan (Penurunan) Kewajiban Operasi *Increase (Decrease) in Operating Liabilities*				
Liabilitas Segera *Current Liabilities*	(111.114)	1.845	(112.959)	-6.122,58%
Simpanan *Deposit*	973.612	(319.124)	1.292.736	405,09%

Dalam jutaan Rupiah
In million Rupiah

Uraian *Description*	2019	2018	Pertumbuhan (Penurunan) *Increase (Decrease)*	
			Rp	%
Simpanan dari Bank Lain *Deposit from Other Banks*	69.116	(24.167)	93.283	385,99%
Utang Pajak *Tax Payables*	(2.562)	(32.111)	29.550	92,02%
Liabilitas Lain-Lain *Other Liabilities*	258.068	856.341	(598.273)	-69,86%
Kenaikan Dana Syirkah Temporer *Increase of Temporary Syirkah Fund*	(5.998.153)	(3.352.925)	(2.645.228)	-78,89%
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Operasi *Net Cash Used in Operating Activities*	9.670	797.329	(787.659)	-98,79%

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Dari akitivitas Investasi, arus kas bank tercatat mengalami sebesar Rp765.326 juta mengalami kenaikan 99,00% jika dibandingkan tahun lalu yang tercatat sebesar Rp773.038 juta. Hal ini utamanya disebabkan oleh pelepasan surat berharga yang dilakukan oleh bank.

Cash Flow from Investing Activities

From its investing activities, the Bank's records an increase of Rp765,326,482 million, a 99.00% increase as compared to the previous year, which was at Rp773,038 million. This is mainly due to the sales of securities that is done to ensure the liquidity level of the Bank.

Dalam jutaan Rupiah
in million Rupiah

Uraian *Description*	2019	2018	Pertumbuhan (Penurunan) *Increase (Decrease)*	
			Rp	%
Arus Kas dari Aktivitas Investasi *Cash Flow from Investing Activities*				
Perolehan Investasi pada Surat Berharga *Acquisition of Securities*	1.377.281.554	(2.251.679.894)	3.628.961.448	161,17%
Hasil Penjualan Investasi pada Surat Berharga *Proceeds from the Sales of Securities*	(2.819.049.635)	1.684.898.199	(4.503.947.834)	-267,31%
Hasil Penjualan Aset Tetap *Proceeds from Sale of Premises and Equipment*	14.823.036	3.008.559	11.814.477	392,70%
Pembelian Aset Tetap *Acquisition of Premises and Equipment*	(111.419.147)	(209.264.574)	97.845.427	46,76%
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi *Net Cash Used in Investment Activities*	(1.538.364.192)	(773.037.710)	(765.326.482)	-99,00%

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Bank membukukan arus kas dari aktivitas pendanaan pada tahun 2019 sebesar Rp1.596.911 Juta yang mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp1.600.622 juta. Hal ini disebabkan oleh aktivitas untuk menutup likuiditas perusahaan selama tahun 2019 dimana bank melakukan transaksi repo dengan pihak ketiga.

Cash Flow from Financing Activities

The Bank recorded a cashflow from its financing activities in 2019 in the amount of Rp1,595,911 million, lower as compared to in 2018, which was in the amount of Rp1,600,622 million. This is due to the Company's activities in ensuring the liquidity throughout 2019, whereby the Bank engages in Repo transactions with third party.

Dalam jutaan Rupiah
In million Rupiah

Uraian *Description*	2019	2018	Pertumbuhan (Penurunan) *Increase (Decrease)*	
			Rp	%
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan *Cash Flow from Financing Activities*				
Pencairan (Penempatan) Sertifikat Investasi Mudharabah *Proceed from (Acquisition of) Interbank Mudharabah Investment*	(904.000)	137.650	(1.041.650)	-756,74%

Dalam jutaan Rupiah
In million Rupiah

Uraian *Description*	2019	2018	Pertumbuhan (Penurunan) *Increase (Decrease)*	
			Rp	%
Penerimaan Pinjaman Diterima *Receipt from Fund Borrowing*	27.765	-	27.765	100,00%
Pembayaran Pinjaman Diterima *Payment of Fund Borrowing*	(900.000)	(1.036.000)	136.000	13,13%
Pembayaran Utang Dividen *Payment of Dividend Liabilities*	-	(2.272)	1.891	83,25%
(Pencairan) Sukuk Subordinasi *Proceed from Subordinate Sukuk*	-	(700.000)	700.000	100,00%
Penerimaan Medium Term Notes *Receipt of Medium Term Notes*	-	-	-	0,00%
Pencairan Medium Term Notes *Medium Term Notes Settlement*	(100.000)	-	(100.000)	0.00%
Penerimaan Medium Term Notes Subordinasi *Receipt of Subordinated MediumTerm Notes*	-	-	-	0,00%
Penerimaan Repo *Inflow from Repo*	2.522.191	-	2.522.191	100,00%
Pencairan Repo *Outflow from Repo*	(2.242.486)	-	(2.242.486)	0,00%
Arus Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan *Net Cash Provided by Financing Activities*	(1.596.911)	(1.600.622)	3.711	0,23%

Rasio Kinerja *Performance Ratio*

No.	Pos-Pos Rasio Kinerja *Performance Ratio Posts*	2019	2018
1.	Kewajiban Penyediaan Modal Minimun (KPMM) *Minimum Capital Provision Obligation (KPMM)*	12,42%	12,34%
2.	Aset Produktif Bermasalah dan Aset Non Produktif Bermasalah terhadap Total Aset Produktif dan Aset Non Produktif *Problematic Productive Assets and Problematic Non-Productive Assets Against Total Productive Assets and Non-Productive Assets*	3,43%	2,60%
3.	Aset Produktif Bermasalah terhadap Total Aset Produktif *Problematic Productive Assets against Total Productive Assets*	3,67%	2,74%
4.	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Aset Keuangan terhadap Aset Produktif *Allowance for Impairment Losses (CKPN) of Financial Assets Against Earning Assets*	1,34%	2,22%
5.	NPF Gross *NPF Gross*	5,22%	3,87%
6.	NPF Net *NPF Nett*	4,30%	2,58%
7.	Return on Assets (ROA) *Return on Assets (ROA)*	0,05%	0,08%
8.	Return on Equity (ROE) *Return on Equity (ROE)*	0,45%	1,16%
9.	Net Imbalan (NI) *Balance Nett (NI)*	0,83%	2,22%

No.	Pos-Pos Rasio Kinerja *Performance Ratio Posts*	2019	2018
10.	Net Operating Margin (NOM) *Net Operating Margin (NOM)*	0,04%	0,15%
11.	Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) *Operating Costs to Operating Income (BOPO)*	99,50%	98,24%
12.	Pembiayaan Bagi Hasil terhadap Total Pembiayaan *Financing Profit Sharing Against Total Financing*	50,08%	50,59%
13.	Financing to Deposit Ratio (FDR) *Financing to Deposit Ratio (FDR)*	73,51%	73,18%

Sepanjang 2019 Bank berhasil menjaga rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum diatas ketentuan yang berlaku. Bank menutup tahun 2019 dengan posisi KPMM pada 12,42% sedikit menurun dibandingkan dengan tahun 2018 yaitu sebesar 12,34%. Untuk NPF netto berada pada level 4,30% masih dibawah ketentuan yang berlaku. Sedangkan Financing to Deposit Ratio (FDR) di tahun 2019 berhasil dipertahankan pada level 73,51%, sejalan dengan pertumbuhan DPK yang mengimbangi posisi pembiayaan.

Throughout 2019 the Bank succeeded in maintaining the ratio of Supply Obligations Minimum capital above applicable regulations. The bank closes in 2019 with the KPMM position at 12.42% slightly decreasing compared to 2018 which was 12.34%. For NPF net at the 4.30% level is still below the provisions regulation. Whereas Financing to Deposit Ratio (FDR) in the year 2019 was successfully maintained at the level of 73.51%, in line with DPK growth that offset the financing position.

Rasio Kepatuhan

Compliance Ratio

No.	Pos-Pos *Posts*	2019	2018
1.	Kepatuhan *(Compliance)*		
	a. Persentase Pelanggaran BMPD *a. Percentage of BMPD Violations*		
	a.1. Pihak Terkait *a. 1. Related Parties*	0,00%	0,00%
	a. 2. Pihak Tidak Terkait *a. 2. Unrelated Party*	0,00%	0,00%
	b. Persentase Pelampauan BMPD *b. Percentage of BMPD Exceedation*		
	b.1. Pihak Terkait *b. 1. Related Parties*	0,00%	0,00%
	b.2. Pihak Tidak Terkait *b. 2. Unrelated Party*	0,00%	0,00%
2.	GWM:		
	a. GWM Rupiah *a. Rupiah Reserve Requirement*	4,82%	5,41%
	b. GWM Valuta Asing *b. Foreign Exchange Reserve Requirement*	1,10%	1,10%
3.	Posisi Devisa Neto (PDN) secara Keseluruhan *Net Open Position (NOP) as a Whole*	0,21%	0,40%

Di tahun 2019 GWM Rupiah mengalami penurunan menjadi 4,82% dari sebelumnya 5,41% di tahun 2018. Sedangkan GWM Valuta Asing berhasil dijaga pada posisi 1,10%. Bank senantiasa menjaga rasio-rasio kepatuhan seperti GWM untuk berada sesuai dengan ketentuan.

In 2019 the GWM of Rupiah decreased to 4.82% from the previous 5.41% in 2018. While the Foreign Exchange Reserve was successfully maintained at 1.10%. The Bank always maintains compliance ratios such as Statutory Reserves to be in accordance with the provisions.

Komitmen dan Kontinjensi
Commitment and Contingencies

Per tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, Bank memiliki kewajiban komitmen dan Kontinjensi dengan ikhtisar sebagai berikut:

As of December 31, 2019 and 2018, the Bank has obligations commitments and contingencies with the following summary:

Dalam jutaan Rupiah
In million Rupiah

Uraian *Description*	2019	2018	Pertumbuhan (Penurunan) *Increase (Decrease)*	
			Rp	%
Tagihan Komitmen *Commitment Bill*				
Fasilitas Pembiayaan yang Belum Ditarik *Undisbursed Financing Facilities for Customers*	-	-	-	0%
Kewajiban Komitmen *Commitment Obligations*				
Fasilitas Pembiayaan kepada Nasabah yang Belum Ditarik *Unused Withdrawal Financing Facilities*	118.764	194.448	(75.684)	-39%
Fasilitas Pembiayaan kepada Bank yang Belum Ditarik *Unused Withdrawal Financing Facilities*	-	-	-	0%
Irrevocable L/C yang Masih Berjalan *Irrevocable L/C That is Still Running*	142.818	299.784	(156.966)	-52%
Posisi Penjualan *Spot* dan *Forward* yang Masih Berjalan *Outstanding Spot and Forward Sales Position*	-	-	-	0%
Tagihan Kontinjensi *Contingency Bill*				
Garansi yang Diterima *Guaranteed Received*	-	-	-	0%
Pendapatan dalam Penyelesaian *Revenue under Settlement*	127.853	73.835	54.018	73%
Kewajiban Kontinjensi *Contingency Obligations*				
Garansi yang Diberikan *Warranty Given*	90.295	285.074	(194.779)	-68%

Jumlah komitmen pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 47% dibandingkan dengan tahun 2018, yang sebagian besar dipengaruhi oleh penurunan Irrevocable L/C yang masih berjalan sebesar 52% dari total sebesar Rp299.784 juta pada tahun sebelumnya menjadi sebesar Rp142.818 juta. Selain itu, kewajiban kontinjensi juga mengalami penurunan sebesar 68% dari sebesar Rp285.074 juta pada tahun sebelumnya menjadi sebesar Rp90.295 juta.

The number of commitments in 2019 decreased by 47% compared to 2018, which was largely influenced by a decrease in the ongoing Irrevocable L/C by 52% from a total of Rp299.784 million in the previous year to Rp142,818 million. In addition, contingent liabilities also decreased by 68% from Rp285,074 million in the previous year to Rp90,295 million.

Informasi Kinerja Keuangan Lain (SEOJK No. 10/2017)

Other Financial Performance Information (SEOJK No. 10/2017)

Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)

Minimum Capital Requirements (KPMM)

Laporan Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)
Report on Calculation of Minimum Capital Provision (KPMM)

dalam Jutaan Rupiah
In million Rupiah

Uraian *Description*	2019	2018	Pertumbuhan (Penurunan) *Increase (Decrease)*	
			(Rp)	(%)
Modal Inti (Tier 1) *Core Capital (Tier 1)*	3.521.078	3.769.336	(248.258)	-6,59%
Modal Inti Utama (CET 1) *Main Core Capital (CET 1)*	3.521.078	3.769.336	(248.258)	-6,59%
Modal Inti Tambahan (AT 1) *Additional Core Capital (AT 1)*	-	-	-	0,00%
Modal Pelengkap (Tier 2) *Complementary Capital (Tier 2)*	350.263	485.670	(135.407)	-27,88%
Total Modal *Total Capital*	3.871.341	4.255.006	(383.619)	-9,02%
Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) *Risk Weighted Assets (ATMR)*	31.171.834	34.473.426	(3.331.596)	-9,66%
Rasio KPMM (Aktual) *KPMM (Current) Ratio*				
Rasio CET 1 *CET Ratio 1*	11,30%	10,93%	0,37%	3,39%
Rasio AT 1 *AT 1 Ratio*	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Rasio Tier 1 *Tier 1 Ratio*	11,30%	10,93%	0,37%	3,39%
Rasio Tier 2 (Paling Tinggi Sama Dengan Tier 1) *Tier 2 Ratio (Highest is Equal to Tier 1)*	1,12%	1,41%	-0,29%	-20,57%
Rasio Total KPMM *KPMM Total Ratio*	12,42%	12,34%	0,08%	0,61%

Kendati terjadi penurunan pada komponen modal inti, rasio KPMM mengalami peningkatan. Hal ini utama disebabkan oleh ATMR yang mengalami penurunan secara signifikan menyusul adanya perlambatan penyaluran pembiayaan dan strategi penyelesaian pembiayaan yang berpotensi mengalami penurunan kualitas di kemudian hari. Hal ini juga memberi dampak pada Rasio KPMM yang mengalami peningkatan menjadi 12,42% dari 12,34%.

Despite the decline in the core capital component, the KPMM ratio has increased. This was mainly due to the RWA that experienced a significant decline following a slowdown in funding distribution and financing settlement strategies that could potentially decline in quality later on. This also had an impact on the KPMM ratio increased to 12.42% from 12.34%.

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) dan Penyisihan Kerugian

Allowance for Impairment Losses (CKPN) and Allowance for Losses

Untuk memberikan jaminan keamanan kepada nasabah atas adanya risiko kredit akibat kegagalan debitur atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati. BMI melakukan pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan

To provide security guarantees to customers for credit risk due to the failure of the debtor or other parties in fulfilling obligations to the Bank in accordance with the agreed agreement, BMI established

Nilai (CKPN) dan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Tahun 2019 Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) mengalami penurunan sebesar Rp473 miliar atau 45,40% dari Rp1,04 triliun di tahun 2018 menjadi Rp569 miliar di tahun 2019, sedangkan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) turun sebesar Rp204 miliar atau 19,66% dari Rp1,04 miliar di tahun 2018 menjadi Rp836 miliar ditahun 2019. Dikarenakan penurunan nilai total pembiayaan pada tahun 2019 dari Rp33,55 triliun menjadi Rp29,86 triliun, turun sebesar Rp3,69 triliun.

Allowance for Impairment Losses (CKPN) and Allowance for Earning Asset Losses (PPAP) as stipulated in the regulations legislator.

In 2019, Allowance for Impairment Losses (CKPN) decreased by Rp473 billion or 45.40% from Rp 1.04 trillion in 2018 to Rp 569 billion in 2019. Meanwhile, the Allowance for Earning Assets (PPAP) decreased by Rp204 billion or 19.66% from Rp1.04 billion in 2018 to Rp836 billion in 2019. This was due to a decrease in the value of total financing in 2019 from Rp33.55 trillion to Rp 29.86 trillion, decreasing by Rp3.69 trillion.

Dalam Jutaan Rupiah
In million Rupiah

No.	Pos-Pos *Posts*	2019				2018			
		CKPN		PPA Wajib Dibentuk *PPA Must be Established*		CKPN		PPA Wajib Dibentuk *PPA Must be Established*	
		Individual *Individual*	Kolektif *Collective*	Umum *General*	Khusus *Special*	Individual *Individual*	Kolektif *Collective*	Umum *General*	Khusus *Special*
1.	Penempatan pada Bank Lain *Placements on Other Banks*	-	810	3.787	-	-	2.072	2.072	-
2.	Tagihan *Spot dan Forward* *Spot and Forward Bills*	-	-	53	-	-	-	33	-
3.	Surat Berharga yang Dimiliki *Securities Issued*	-	14.975	80.000	5.000	-	14.975	9.975	5.000
4.	Tagihan Akseptasi *Acceptance Acceptance*	-	4.784	4.060	-	-	6.362	4.404	-
5.	Piutang Murabahah *Murabahah Receivables*	225.662	112.479	115.174	190.616	84.077	222.162	134.631	86.729
6.	Piutang *Istishna'* *Istishna' Receivables*	-	37	37	-	-	44	44	-
7.	Piutang *Qardh* *Qardh Receivables*	-	3.818	3.698	2.678	-	13.064	4.812	8.231
8.	Piutang Sewa *Lease Receivables*	-	155	-	5.985	-	6.513	-	6.513
9.	Pembiayaan Mudharabah *Mudharabah Financing*	-	8.017	7.346	5.005	-	5.718	5.056	662
10.	Pembiayaan Musyarakah *Musharaka Financing*	-	198.584	108.392	300.284	-	687.723	231.340	541.281
11.	Pembiayaan Lainnya *Other Financing*	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Penyertaan *Inclusion*	-	-	4.077	-	-	-	-	-
13.	Penyertaan Modal Sementara *Temporary Capital Investment*	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	Komitmen dan Kontinjensi *Commitments and Contingencies*	-	-	-	-	-	-	-	-

Transaksi Spot dan Forward

Spot and Forward Transactions

Dalam Jutaan Rupiah
In million Rupiah

No.	Transaksi *Transaction*	Nilai Notional *Notional Value*	Tujuan *Purpose*		Tagihan dan Liabilitas *Bills and Liabilities*	
			Bukan Hedging *Not Hedging*	Hedging	Tagihan *Bills*	Liabilitas *Liabilities*
A	Terkait dengan Nilai Tukar *Related to Exchange Rates*					
1.	Spot	226.787	140.415	86.372	230	279
2.	Forward	-	-	-	-	-
3.	Lainnya/*Other*	2.533.026	112.108	2.420.918	5.085	4.026
B	Lainnya/*Other*	-	-	-	-	-
	Jumlah *Total*	2.759.813	252.523	2.507.290	5.315	4.305

Selama tahun 2019, transaksi *Spot* dan *Forward* untuk nilai nasional mengalami kenaikan sebesar Rp378 miliar dari Rp2,38 triliun di tahun 2018 menjadi Rp2,75 triliun di tahun 2019. Kenaikan tersebut dari kontribusi dengan tujuan Bukan Hedging Rp165 miliar dari Rp87 miliar menjadi Rp252 miliar dan dengan tujuan Hedging Rp213 miliar dari Rp2,29 triliun menjadi Rp2,50 triliun.

During 2019, Spot and Forward transactions for the national value increased by Rp378 billion from Rp2.38 trillion in 2018 to Rp2.75 trillion in 2019. The increase came from contributions with the objective of not Hedging Rp165 billion from Rp87 billion to Rp252 billion and with the aim of Hedging Rp213 billion from Rp2.29 trillion to Rp2.50 trillion.

Laporan Distribusi Bagi Hasil

Production Sharing Distribution Report

Dalam Jutaan Rupiah
In million Rupiah

No.	Indikator *Indicator*	Saldo Rata-Rata *Average Balance*	Pendapatan yang akan Dibagihasilkan *Income which will be Billed*	Nisbah (%) *Ratio (%)*	Porsi Pemillik Dana' *Portion of the Fund Owner*	
					Jumlah Bonus dan Bagi Hasil *Profit Sharing*	Indikasi *Rate of Return* (%) *Rate Indications of Return (%)*
		A	B	C	D	E=(D/A x 100%) x 12
A	PEMBIAYAAN / *FINANCING*					
1.	Bank	-	-			
2.	Non Bank	27.961.250	154.283			
B	PENGHIMPUNAN/ *COLLECTION*					
	DANA/ *FUND*					
1.	Giro Wadiah *Wadiah Giro*					
	a. Bank	21.568	-		-	0,00%
	b. Non Bank	1.326.170	-		-	0,00%

Dalam Jutaan Rupiah
In million Rupiah

No.	Indikator *Indicator*	Saldo Rata-Rata *Average Balance*	Pendapatan yang akan Dibagihasilkan *Income which will be Billed*	Nisbah (%) *Ratio (%)*	Porsi Pemillik Dana' *Portion of the Fund Owner*	
					Jumlah Bonus dan Bagi Hasil *Profit Sharing*	Indikasi *Rate of Return* (%) *Rate Indications of Return (%)*
		A	B	C	D	E=(D/A x 100%) x 12
2	Giro Mudharabah *Mudharabah Account*					
	a. Bank	95.563	51	32,00%	51	0,64%
	b. Non Bank	1.265.460	1.579	32,00%	1.310	1,24%
3	Tabungan Wadiah *Wadiah Savings*					
	a. Bank	-	-		-	-
	b. Non Bank	4.394.180	106		91	0,02%
4	Tabungan Mudharabah *Mudharabah Savings*					
	a. Bank	499.605	312	22,00%	311	0,75%
	b. Non Bank	10.225.181	7.379	22,00%	6.041	0,71%
5	Deposito Mudharabah *Mudharabah Deposit*					
	a. Bank					
	- 1 Bulan/ *Month*	766.052	780	50,00%	780	1,22%
	- 3 Bulan/ *Months*	151.876	931	51,00%	931	7,36%
	- 6 Bulan/ *Months*	220.091	1.619	53,00%	1.618	8.82%
	- 12 Bulan/ *Months*	23.166	101	54,00%	101	5,23%
	b. Non Bank					
	- 1 Bulan/ *Month*	13.604.395	56.632	50,00%	45.449	4,01%
	- 3 Bulan/ *Months*	3.028.292	14.037	51,00%	11.392	4,51%
	- 6 Bulan/ *Months*	2.605.681	13.781	53,00%	11.056	5,09%
	- 12 Bulan/ *Months*	2.375.778	9.757	54,00%	7.804	3,94%
	Jumlah *Total*	68.564.308	261.348		86.935	

Sepanjang tahun 2019 saldo rata-rata Dana Pihak Ketiga sebesar Rp68,56 triliun dari total saldo rata-rata Pembiayaan dan Penghimpunan dana, naik sebesar Rp3,29 triliun dari Rp65,27 triliun di tahun 2018, kenaikan disebabkan oleh naiknya Penghimpunan dana sebesar Rp3,11 triliun. Menghasilkan pendapatan yang akan didistribusikan sebesar Rp261 miliar dengan jumlah bagi hasil bonus sebesar Rp86,9 miliar untuk pemilik dana.

During 2019, the average balance of Third Party Funds was Rp68.56 trillion of the total average balance of Funding and Funding, an increase of Rp3.29 trillion from Rp65.27 trillion in 2018. The increase was due to an increase in Funding by Rp3.11 trillion. Generate revenue to be distributed amounting to Rp261 billion with a bonus profit sharing amount of Rp86.9 billion to the owner of the fund.

Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat

Report on the Source and Distribution of Zakat Funds

Dalam Jutaan Rupiah
In million Rupiah

No.	Pos-Pos *Posts*	2019	2018	Pertumbuhan (Penurunan) *Increase (Decrease)*	
				Rp	%
1.	Saldo Awal Dana Zakat *Initial Balance of Zakat Funds*	-	-	-	0%
2.	Dana Zakat yang Berasal dari: *Zakat Funds Originating from:*			-	0%
	a. Internal BUS *a. Internal BUS*	1.150	653	497	76%
	b. Eksternal BUS *b. External BUS*	9.719	9.933	(214)	-2%
3.	Penyaluran Dana Zakat kepada Entitas Pengelola Zakat: *Distribution of Zakat Funds to the Managing Entity Zakat:*			-	0%
	a. Lembaga Amil Zakat *a. Amil Zakat Institution*	10.869	10.521	348	3%
	b. Badan Amil Zakat *b. Amil Zakat Agency*	-	65	(65)	-100%
4.	Kenaikan (Penurunan) Dana Zakat *Increase (Decrease) in Zakat Funds*	-	-	-	0%
5.	Saldo Akhir Dana Zakat *Final Balance of Zakat Funds*	-	-	-	0%

Sumber Dana Zakat pada tahun 2019 sebesar Rp10,8 miliar, dana zakat yang dikelola berasar dari Internal sebesar Rp1,15 miliar dan Eksternal sebesar Rp9,7 miliar. Total sumber dana meningkat sebesar Rp283 juta dari tahun sebelumnya sebesar Rp10,58 miliar. Penyaluran dana zakat tahun 2019 disalurkan sebesar Rp10,86 miliar naik sebesar Rp348 juta dari tahun sebelumnya Rp10,58 miliar, penyaluran dana zakat disalurkan melalui entitas pengelola zakat yaitu Lembaga Amil Zakat sebesar Rp10,86 miliar.

The source of Zakat Funds in 2019 was Rp10.8 billion. The managed zakat fund from Internal was Rp1.15 billion and External was Rp9.7 billion. Total funding sources increased by Rp283 million from the previous year of Rp10.58 billion. The distribution of zakat funds in 2019 was disbursed as much as Rp10.86 billion, an increase of Rp348 million from the previous year of Rp10.58 billion. The distribution of zakat funds was channeled through zakat management entities namely the Amil Zakat Institution as much as Rp10.86 billion.

Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan

Statement of Sources and Uses of Funds

Dalam Jutaan Rupiah
In million Rupiah

No.	Pos-Pos *Posts*	2019	2018	Pertumbuhan (Penurunan) *Increase (Decrease)*	
				Rp	%
1.	Sumber Dana Kebajikan pada Awal Periode *Sources of Qardhul Hasan Funds in the Beginning of the Period*	-	-	-	0,00%
2.	Penerimaan Dana Kebajikan *Receipt of Qardhul Hasan Funds*				
	a. Infak *a. Infak*	-	-	-	0,00%
	b. Sedekah *b. Sadaqah*	-	-	-	0,00%
	c. Pengembalian Dana Kebajikan Produktif *c. Return of Productive Qordhul Hasan Funds*	-	-	-	0,00%
	d. Denda *d. Penalty*	66	16	50	312,50%
	e. Penerimaan Non Halal *e. Non-halal Recovery*	524	633	(109)	-17,22%
	f. Lainnya *f. Others*	-	-	-	0,00%
	Total Penerimaan *Total Revenue*	590	649	(59)	-9,09%
3.	Penggunaan Dana Kebajikan *Use of Qordhul Hasan funds*				
	a. Dana Kebajikan Produktif *a. Productive Qordhul Hasan*	-	-	-	0,00%
	b. Sumbangan *b. Donation*	590	649	(59)	-9,09%
	c. Penggunaan Lainnya untuk Kepentingan Umum *c. Other Uses for Public Use*	-	-	-	0,00%
	Total Penggunaan *Total Usage*	590	649	(59)	-9,09%
4.	Kenaikan (Penurunan) Sumber Dana Kebajikan *Increase (decrease) in Sources of Qordhul Hasan funds*	-	-	-	0,00%
5.	Sumber Dana Kebajikan pada Akhir Periode *Source of Qordhul Hasan Funds at the end of the Period*	-	-	-	0,00%

Sumber Dana Kebajikan tahun 2019 sebesar Rp590 juta, sumber dana berasal dari Denda Rp66 juta yang berasal dari wanprestasi kegiatan pembiayaan dan Penerimaan non halal Rp524 juta yang berasal dari penempatan Giro di bank konvensional (nostro) yang kemudian untuk disalurkan untuk dana kebajikan. Penyaluran dana kebajikan sendiri di tahun 2019 sebesar Rp590 juta, disalurkan penggunaannya untuk sumbangan sesuai dengan ketentuan syariah yang berlaku dan arahan DPS.

Source of Qordhul Hasan Funds in 2019 was Rp590 million. The source of funds comes from a penalty of Rp66 million originating from defaults on non-halal financing activities and Rp524 million from an account placement in a conventional bank (nostro) which is then to be channeled for Qordhul Hasan funds. In 2019, the distribution of Qordhul Hasan funds alone were Rp590 million, and their use was channeled for donations in accordance with applicable Islamic regulations and DPS directives.

Kemampuan Membayar Utang dan Tingkat Kolektibilitas Piutang

Ability to Pay Debt and Accounts Receivable Rate

Kemampuan Bank dalam memenuhi seluruh kewajiban baik kewajiban jangka panjang maupun jangka pendek, diukur melalui beberapa rasio, antara lain rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio rentabilitas. Kemampuan membayar utang juga tercermin dari telah ikutnya Bank sebagai peserta program penjaminan pada pada Lembaga Penjaminan Simpanan. Rincian penjelasan tentang kemampuan membayar utang dijelaskan sebagai berikut.

The Bank's ability to meet all obligations both long-term and short-term, liabilities is measured through several ratios, including liquidity ratios, solvency ratios, and profitability ratios. The ability to pay debts is also reflected in the Bank's participation as a participant in the guarantee program at the Deposit Insurance Agency. Detailed explanation of the ability to pay debt is explained as follows.

Kemampuan Membayar Utang (Jangka Pendek Maupun Jangka Panjang)

Ability to Pay Debt (Short-term or Long-term)

Kemampuan Membayar Utang Jangka Pendek

Kemampuan Bank dalam membayar utang jangka pendek dapat dilihat dari rasio likuiditas. Rasio likuiditas Bank dapat diukur melalui rasio kredit terhadap dana pihak ketiga (FDR). Tahun 2019, FDR Bank Muamalat mengalami peningkatan sebesar 0,33% dari 73,18% di tahun 2018 menjadi 73,51% di tahun 2019. FDR Bank Muamalat Indonesia yang mencapai 73,51% masih berada dikisaran target FDR yang ditetapkan sesuai regulasi PBI No.17/11/PBI/2015 serta masih berada pada level yang optimal untuk pengelolaan likuiditas dan menjaga efisiensi biaya dana.

Ability to Pay Short-term Debt

The ability of banks to pay short-term debt is reflected from the liquidity ratio. The Bank's liquidity ratio can be measured through ratio of credit to third party funds (FDR). In 2019, FDR Bank Muamalat Indonesia experienced an increase of 0.33% from 73.18% in 2018 and it increased to 73.51% in 2019. Bank Muamalat Indonesia's FDR which reached 73.51% was still within the FDR target set according to PBI regulation No.17/11/PBI/2015 and was still at the optimal level for liquidity management and maintaining cost efficiency of funds.

Kemampuan Membayar Utang Jangka Panjang

Bank Muamalat Indonesia mengukur rasio solvabilitasnya dengan memastikan kecukupan modal Bank untuk dapat memenuhi risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional yang tercermin dari Rasio Kecukupan Modal atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR). CAR adalah rasio modal terhadap aset tertimbang menurut risiko atau *Risk-Weighted Assets* (RWA). Pada tahun 2019, Rasio Kecukupan Modal Bank mencapai 12,42%, mengalami peningkatan sebesar 0,08% jika dibandingkan dengan Rasio Kecukupan Modal tahun 2018 sebesar 12,34%. Peningkatan tersebut disebabkan oleh penurunan RWA yang sebesar Rp3,29 triliun, berbanding lurus dengan run off pembiayaan tahun berjalan. Meskipun demikian CAR Bank Muamalat Indonesia masih diatas ketentuan peraturan yang berlaku.

Ability to Pay Long-term Debt

Bank Muamalat Indonesia measures its solvency ratio by ensuring the Bank's capital adequacy to be able to meet credit risk, risk market and operational risk which is reflected in the Adequacy Ratio Capital or Capital Adequacy Ratio (CAR). CAR is the capital ratio for risk-weighted assets (RWA). In 2019, the Bank's Capital Adequacy Ratio will reach 12.42%, an increase of 0.08% compared to a Capital Adequacy Ratio in 2018 of 12.34%. The increase was caused by a sharp decrease in RWA of Rp 3.29 trillion. This is directly in line with to the current year's financing run-off. Nevertheless, CAR of Bank Muamalat Indonesia is still above the provisions of the applicable regulations.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum, Bank wajib menyediakan modal minimum sesuai dengan profil risiko. Rasio Kecukupan Modal minimum yang ditetapkan OJK adalah sebesar 9% - 10%. Dengan rasio kecukupan Bank berada pada tingkat 12,42%, struktur permodalan Bank memiliki kapabilitas untuk mengimbangi risiko pasar, risiko kredit dan risiko operasional dimana rasio tersebut

In accordance with Regulation of the Financial Services Authority (POJK) No.11 / POJK.03 / 2016 concerning Minimum Capital Requirements, the Bank is required to provide minimum capital in accordance with the risk profile. The minimum Capital Adequacy Ratio determined by OJK is 9% - 10%. With the Bank's adequacy ratio is at the level of 12.42%, the Bank's capital structure has the capability to offset market risk, credit risk and operational risk where the ratio is higher than the

lebih tinggi dari rasio kecukupan minimum OJK dan struktur modal Bank sudah memenuhi Peraturan OJK. Perseroan telah mengelola dengan baik modal Bank dan memiliki kecukupan modal untuk melindungi dari risiko solvabilitas.

minimum OJK adequacy ratio and the Bank's capital structure meets the FSA Regulations. The Company has managed its capital well and has sufficient capital to protect against the risk of solvency.

Selain kewajiban penyediaan modal minimum sesuai profil risiko, sebagaimana disyaratkan oleh regulator, Bank wajib membentuk tambahan modal sebagai penyangga *(buffer)* sesuai profil risiko. Tambahan modal tersebut dapat berupa:

1. *Capital Conservation* Buffer, yang berfungsi sebagai penyangga *(buffer)* apabila terjadi kerugian pada periode krisis.
2. *Countercyclical Buffer*, yang berfungsi sebagai penyangga *(buffer)* untuk mengantisipasi kerugian apabila terjadi pertumbuhan kredit perbankan yang berlebihan sehingga berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan.
3. Capital Surcharge untuk Domestic Systemically Important Bank (D-SIB), yang berfungsi untuk mengurangi dampak negatif terhadap stabilitas sistem keuangan dan perekonomian apabila terjadi kegagalan Bank yang berdampak sistemik melalui peningkatan kemampuan Bank dalam menyerap kerugian.

In addition to the minimum capital requirement according to the risk profile, as required by regulators, the Bank is are required to form additional capital as a buffer according to the risk profile.
The additional capital can be:

1. *Capital Conservation Buffer, which functions as a buffer if there is a loss in a crisis period.*
2. *Countercyclical Buffer, which functions as a buffer to anticipate losses if growth occurs excessive bank credit so potentiallydisrupt financial system stability.*
3. *Capital Surcharge for Domestic Systemically Important Banks (D-SIB), which serves to reduce negative impacts to the stability of the financial system and the economy if Bank failures occur that have a systemic impact through increase the Bank's ability to absorb losses.*

Kolektibilitas Piutang
Receivable Collectibility

Kolektibilitas Kredit Bank terlihat dari total kredit bermasalah (Non Performing Loan - NPL). Pada 31 Desember 2019 dan 2018, Rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan - NPL) netto masing-masing sebesar 4,30% dan 2,58%. Bank telah melakukan pemantauan secara aktif terhadap perkembangan kualitas piutang, khususnya kredit yang telah disalurkan. Pencapaian NPF tersebut mencerminkan kinerja Bank yang sehat karena tercatat masih memenuhi kualifikasi umum bank sehat sesuai ketentuan yang diwajibkan oleh OJK untuk NPF adalah harus di bawah 5%.

The collectibility of bank loans is reflected from the total non-performing loans (NPLs). As of December 31, 2019 and 2018, the ratio of net non-performing loans (NPLs) was 4.30% and 2.58%, respectively. The Bank has actively monitored the development of the quality of receivables, especially loans that have been distributed. The NPF achievement reflects the Bank's healthy performance because it is recorded that it still meets the general qualifications of a healthy bank in accordance with the requirements required by the OJK for NPF which must be below 5%.

Uraian *Description*	2019	2018
Total Kredit Bermasalah - Bukan Bank (Rp Juta) *Total Non-performing Loans - Non-Bank (Rp Million)*	1.548.748	1.293.317
Total Kredit yang Diberikan (Gross) – Bukan Bank (Rp Juta) *Total Loans Given (Gross) - Non-Bank (Rp Million)*	29.665.912	33.393.877
% Kredit Bermasalah (NPL-Bruto) *% of Non-Performing Loans (Gross NPL)*	5,22%	3,87%
% Kredit Bermasalah (NPL-Netto) *% of Non-Performing Loans (Net NPL)*	4,30%	2,58%

Struktur Modal
Capital Structure

Kebijakan Struktur Modal

Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal dan Dasar Pemilihannya

Tujuan utama dari kebijakan Bank atas kebijakan pengelolaan modal adalah untuk memastikan bahwa Bank memiliki modal yang kuat untuk mendukung strategi pengembangan ekspansi usaha Bank saat ini dan mempertahankan kelangsungan pengembangan di masa mendatang, dan untuk memenuhi ketentuan kecukupan permodalan yang ditetapkan oleh regulator serta memastikan agar struktur permodalan Bank telah efisien.

Bank menyusun Rencana Permodalan berdasarkan penilaian dari penelaahan atas kebutuhan kecukupan permodalan yang dipersyaratkan dan mengkombinasikannya dengan tinjauan perkembangan ekonomi terkini. Bank senantiasa akan menghubungkan tujuan keuangan dan kecukupan modal terhadap risiko melalui proses perencanaan modal, begitu pula dengan bisnis yang didasarkan pada permodalan dan persyaratan likuiditas Bank.

Kebutuhan permodalan Bank juga direncanakan dan didiskusikan secara rutin yang didukung dengan data analisis. Permodalan disusun oleh Direksi sebagai bagian dari Rencana Bisnis Bank dan disetujui oleh Dewan Komisaris. Perencanaan ini diharapkan akan memastikan tersedianya modal yang cukup dan terciptanya struktur permodalan yang optimal.

Rincian Struktur Modal

Manajemen permodalan pada Bank Muamalat Indonesia difokuskan kepada pengelolaan struktur permodalan yang sehat untuk menyerap risiko serta memenuhi ketentuan permodalan dari regulator, serta untuk mendukung pertumbuhan bisnis yang sehat. Selama tahun 2019 Bank Muamalat Indonesia berusaha untuk bisa memaksimalisasi segala potensi yang ada untuk bisa memanfaatkan modal yang ada sebaik-baiknya. Berbagai inisiatif yang telah dilakukan terkait dengan permodalan ini adalah dengan melakukan pebaikan pada struktur permbiayaan yang difokuskan kepada pembiayaan dengan sangat memperhatikan faktor risiko yang ada. Selain itu inisiatif penambahan modal melalui mekanisme penerbitan saham baru dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau Penawaran Umum Terbatas VI (PUT VI) dan penerbitan sukuk subrodinasi telah digulirkan dan diharapkan bisa selesai pada tahun 2020. Dalam mengelola permodalan, Bank Muamalat Indonesia memberikan perhatian terhadap tingkat pengembalian modal yang optimal kepada para pemegang sahamnya.

Struktur permodalan saat ini didominasi oleh komponen Modal Inti Utama atau Common Equity Tier 1 (CET 1) sampai dengan 90,95% dari Total Modal Bank, sedangkan pada komponen Modal Pelengkapan didominasi oleh cadanagn umum dan surat utang yang terbitkan oleh Bank sebanyak Rp100 Milliar atau 9,05% dari total modal yang ada.

Capital Structure Policy

Management Policy on Capital Structure and Basis of Election

The main objective of the Bank's policy on capital management policies is to ensure that the Bank has strong capital to support the Bank's current business expansion development strategy and maintain future development, and to meet the capital adequacy requirements set by the regulator and ensure that the capital structure of the bank has been efficient.

The Bank prepares a Capital Plan based on an assessment of a review of the mandatory capital adequacy requirements and combines it with a review of the latest economic developments. The Bank will always link the financial goals and capital adequacy to risk through the capital planning process, as well as businesses that are based on the Bank's capital and liquidity requirements.

The Bank's capital requirements are also planned and discussed routinely and supported by analytical data. Capital is compiled by the Directors as part of the Bank's Business Plan and approved by the Board of Commissioners. This planning is expected to ensure the availability of sufficient capital and the creation of a capital structure the optimal.

Details of Capital Structure

Capital management at Bank Muamalat Indonesia is focused to the management of a sound capital structure to absorb risk and meet the capital requirements of the regulator, as well to support sound business growth. During 2019, Bank Muamalat Indonesia sought to maximize all the existing potential to be able to take advantage of the capital there is the best. Various initiatives carried out related with this capital is to do repairs on financing structure that is focused on financing with very concerned about the existing risk factors. Apart from that initiative capital increase through the mechanism of issuing new shares with Pre-emptive Rights or Rights Limited General VI (LPO VI) and issuance of sukuk subrodination have been rolled out and is expected to be completed by 2020. In managing capital, Bank Muamalat Indonesia puts its attention to optimal return on capital to its shareholders.

The current capital structure is dominated by Main Core Capital components or Common Equity Tier 1 (CET 1) up to 90.95% of Total Bank Capital, Meanwhile, the Equity Capital component is dominated by general reserves and debt securities issued by the Bank in the amount of Rp100 billion or 9.05% of the total available capital.



Ikatan yang Material untuk Investasi Barang Modal

Material Ties for Capital Investment

Sampai dengan akhir tahun 2019, Bank Muamalat Indonesia tidak memiliki ikatan/komitmen yang material terkait investasi barang modal.

Until the end of 2019, Bank Muamalat Indonesia did not have a material commitment/commitment related to investment in goods capital.

Realisasi Investasi Barang Modal

Realization of Capital Goods Investment

Investasi barang modal tahun 2019 sebesar Rp111.419.147 juta, lebih rendah dari tahun 2018 sebesar Rp209.264 juta. Penurunan realisasi investasi barang modal ini memang lebih rendah jika dibandingkan degan realisasi pada tahun 2018, tingkat penurunan realisasi ini merupakan salah satu strategi bank untuk bisa melakukan penghematan dan juga optimalisasi dari barang-barang yang dimiliki oleh Bank. Kedepannya Bank akan terus melanjutkan proses optimasi ini agar seluruh aktivitas yang dilakukan oleh Bank menjadi lebih terukur dan efisien.

Investment in capital goods in 2019 was to Rp111,419,147 million, lower than in 2018 amounting to Rp209,264 million. The decrease in the realization of investment in capital goods is indeed lower if compared to the realization in 2018.the level of decline in this realization is one of the Bank's strategies to be able to make savings and also the optimization of goods owned by the Bank. Going forward, the Bank will continue this optimization process so that all activities carried out by the Bank become more measurable and efficient.

Informasi dan Fakta Material yang Terjadi setelah Tanggal Laporan Akuntan

Material Information and Facts that Occur after the Date of Accountant Report

Pada tanggal 17 Januari 2020 Bank melakukan pembayaran pelunasan atas pembiayaan trade LC dan Non LC dari PT Bank Jtrust Indonesia Tbk sebesar USD2.000.000 (dalam angka penuh) berikut dengan imbal hasil pembiayaan trade LC dan Non LC dengan nisbah setara 3,75% per tahun.

On January 17, 2020, the Bank made payment of LC and Non-LC trade financing from PT Bank Jtrust Indonesia Tbk in the amount of USD2,000,000 (in full amount), along with yields on LC and Non-LC trade financing with a ratio equal to 3.75% per year.

On January 17, 2020 the Bank made full repayment of Trade LC and Non-LC financing from PT Bank Jtrust Indonesia Tbk amounting to USD2.000.000 (in full amount) along with the yield of the trade LC and Non-LC financing with nisbah equivalent to 3,75 per annum.

On January 17, 2020 the Bank made a full repayment of LC and Trade Non-LC financing from PT Bank Jtrust Indonesia Tbk amounting to USD2,000,000 (in full amount) along with the yield of the LC and trade Non-LC financing with ratio equivalent to 3.75 per annum.

Perbandingan antara Target dan Realisasi serta Proyeksi Satu Tahun ke Depan

Comparison between Target and Realization and Projection for One Year in the Future

Pencapaian Target 2019

Pada awal tahun buku 2019, Bank telah menetapkan sejumlah target yang hendak dicapai yang ditungkan dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) 2019. Perbandingan pencapaian beberapa target yang ditetapkan dengan realisasi tahun buku 2019 adalah sebagai berikut:

Achievement of the 2019 Target

At the beginning of the 2019 fiscal year, the Bank set a number of targets to be achieved that is stated in the Bank's Business Plan (RBB) 2019. Comparison of the achievement of several targets set with the realization of the 2019 fiscal year is as follows:

Dalam jutaan Rupiah
In million Rupiah

Uraian *Description*	Realisasi 2018 *2018 Realization*	Target RBB 2019 *2019 RBB Target*	Realisasi 2019 *2019 Realization*	Pencapaian Target (%) *Achievement Target (%)*
Total Aset *Total Assets*	57.227.276	64.000.000	50.555.520	-21,01%
Dana Pihak Ketiga *Third-party Funds*	45.635.574	46.691.709	40.357.214	-13,57%
Pembiayaan *Financing*	33.566.180	31.520.039	29.867.138	-5,21%
Pendapatan *Income*	1.057.220	522.638	382.970	-26,72%
Laba sebelum Pajak *Profit before Tax*	45.806	12.000	26.166	118,05%
Laba Bersih *Net Profit*	46.002	9.000	16.326	81,40%
Aspek Lain yang Dianggap Penting *Other Aspects that are Considered Important*				

Total Aset 2019 belum dapat memenuhi target sebesar Rp64 triliun hal ini utamanya disebabkan oleh tertundanya realisasi penambahan modal pada tahun 2019. Dana Pihak Ketiga tercatat dibawah target Rp46,69 triliun. Penurunan ini merupakan salah satu strategi *reprofiling* Dana Pihak Ketiga serta penyelarasan dengan posisi pembiayaan. Untuk pembiayaan sendiri sedikit sebesar Rp29,87 triliun sedikit dibawah target yang telah diperkirakan sebesar Rp31,52 triliun. Laba sebelum pajak tahun 2019 tercatat sebesar Rp26,16 miliar diatas target sebesar Rp12 miliar, sedangkan laba bersih tercatat sebesar Rp26,16 miliar diatas target sebesar Rp9 miliar.

Total Assets in 2019 have not been able to meet the target of Rp64 trillion. This is mainly due to the delay in the realization of the addition capital in 2019. Third-party funds was recorded below the target of Rp46.69 trillion. This reduction is one of the reprofiling strategies of Third Party Funds and alignment with financing positions. In terms of self-financing, it was totalling to Rp29.87 trillion which is slightly below the estimated target of Rp31.52 trillion. Profit before tax in 2019 was recorded at Rp26.16 billion above the target of Rp12 billion, while net profit was Rp26.16 billion above the target of Rp9 billion.

Target Kinerja Keuangan di Tahun 2020

Financial Performance Targets for 2020

Dalam jutaan Rupiah
In million Rupiah

Uraian *Description*	RBB 2020 *2020 RBB*
Total Aset *Total Assets*	63.118.233
Dana Pihak Ketiga *Third-party Funds*	45.695.627

Dalam jutaan Rupiah
In million Rupiah

Uraian *Description*	RBB 2020 *2020 RBB*
Pembiayaan *Financing*	35.093.590
Pendapatan *Income*	1.173.069
Laba sebelum Pajak *Profit before Tax*	39.590
Laba Bersih *Net Profit*	29.693
Aspek Lain yang Dianggap Penting *Other Aspects That are Considered Important*	

Berdasarkan pemaparan diatas, Bank Muamalat Indonesia telah menetapkan beberapa upaya yang akan dilakukan untuk memperbaiki pencapaian realisasi rencana bisnis melalui Rencana Bisnis Bank (RBB) tahun 2020. Untuk memperbaiki realisasi rencana bisnis khususnya terkait permodalan, hingga saat ini upaya penambahan modal masih tetap berjalan. Hal ini dilakukan untuk menjaga tingkat kecukupan modal Bank dan sebagai mesin penggerak bisnis sehingga Bank dapat mencapai target yang optimal.

Based on the above explanation, Bank Muamalat Indonesia has determined several attempts that will be made to improve achievement realization of the business plan through the Bank Business Plan (RBB) of 2020. To improve the realization of the business plan, especially ones related to the capital, until now the efforts to increase capital are still in progress. This is done to maintain the level of capital adequacy of the Bank and as a business driving machine so that the Bank can reach the optimal target.

Seperti yang telah disampaikan dalam RBB, langkah-langkah strategis yang akan ditempuh oleh Bank Muamalat Indonesia pada Tahun 2020 akan diprioritaskan pada 3 (tiga) fokus utama, yaitu sebagai berikut:

As stated in the RBB, the strategic steps that will be taken by Bank Muamalat Indonesia in 2020 will be prioritized on 3 (three) main focuses, as follows:

1. ***Creative Transformation***

   Pada tahun 2020, Bank Muamalat Indonesia akan fokus bertransformasi untuk menjadi sebuah Bank yang produktif dan efisien untuk memberikan pelayanan yang prima kepada nasabah. Beberapa inisiatif yang akan dilakukan terkait dengan fokus creative transformation diantaranya adalah penyempurnaan dan perampingan organisasi yang diikuti dengan optimalisasi sumber daya manusia; pembukaan, peningkatan status cabang, relokasi, dan penutupan jaringan dengan memperhitungkan berbagai aspek untuk mencapai kinerja yang optimal; penguatan infrastruktur dan kemampuan digital; serta perbaikan kualitas operasional untuk menawarkan pelayanan yang prima kepada nasabah.

   Creative Transformation

   In 2020, Bank Muamalat Indonesia will focus on transformation to become a productive and efficient bank to provide excellent service to customers. Some initiatives that will be carried out are related to focus Creative transformation including improvements and organizational streamlining followed by optimization human Resources; opening, branch status enhancement, relocation, and network closure taking into account various aspects to achieve optimal performance; strengthening digital infrastructure and capabilities; and quality improvement operational to offer excellent service to the customer.

2. ***Swift Recovery***

   Pada tahun 2020, Bank Muamalat Indonesia akan tetap melanjutkan dan meningkatkan proses pemulihan pembiayaan bermasalah serta pencegahan terhadap potensi macet pada pembiayaan eksisting. Selain itu, Bank Muamalat Indonesia akan berusaha menyediakan pencadangan yang cukup untuk kerugian dari pembiayaan bermasalah. Sementara itu, dalam tahapan pencegahan, Bank Muamalat Indonesia akan fokus pada penguatan implementasi manajemen risiko baik untuk bisnis maupun operasional.

   Swift Recovery

   In 2020, Bank Muamalat Indonesia will continue and improve the process of recovering problematic financing and preventing potential defaults on existing financing. In addition, Bank Muamalat Indonesia will try to provide sufficient reserves for losses from problematic financing. Meanwhile, in the prevention phase, Bank Muamalat Indonesia will focus on strengthening the implementation of risk management for both business and operations.

3. ***Shaping the Healthy Business***

Dalam upaya meningkatkan pertumbuhan bisnis yang sehat dan berkelanjutan, Bank Muamalat Indonesia akan menguatkan seluruh aspek pada sumber pendapatan, seperti pembiayaan yang sehat baik melalui pembiayaan baru maupun *re-profile* pembiayaan eksisting, pendanaan yang murah, peningkatan *fee-based income*, akselerasi pada ekosistem bisnis halal, dan menangkap peluang bisnis baru.

Dari segi pembiayaan, Bank Muamalat Indonesia akan fokus pada jenis dan target nasabah yang memiliki bobot risiko rendah, baik untuk segmen ritel maupun korporasi. Pendapatan berbasis jasa juga akan ditingkatkan dari produk *trade finance* maupun transactional banking. Selain itu, pendapatan dari kegiatan treasury akan dioptimalkan sejalan dengan pengelolaan likuiditas bank.

Dari sisi penghimpunan dana, Bank Muamalat Indonesia akan meningkatkan porsi dana murah, yaitu produk CASA sehingga dapat memperkecil margin expenses. Sementara itu, Bank Muamalat Indonesia akan melanjutkan dan meningkatkan bisnis terkait dengan ekosistem halal melalui kerjasama strategis dengan berbagai pihak. Untuk menghadapi perkembangan zaman dan kebutuhan nasabah, Bank Muamalat Indonesia akan membuka peluang bisnis baru, seperti bekerjasama dengan fintech syariah maupun e-commerce.

3. ***Shaping the Healthy Business***

In an effort to promote healthy business growth and sustainable, Bank Muamalat Indonesia will strengthen all aspects of income sources, such as sound financing both through new financing and re-profile financing existing, cheap funding, fee-based increases income, acceleration of the halal business ecosystem, and capture new business opportunity.

In terms of financing, Bank Muamalat Indonesia will focus on the types and targets of customers who have low risk weights, both for the retail and corporate segments. Service-based income will also be increased from trade finance and transactional banking products. In addition, revenue from treasury activities will be optimized in line with bank liquidity management.

In terms of fund raising, Bank Muamalat Indonesia will increase the portion of low-cost funds, namely CASA products so that it can reduce margin expenses. Meanwhile, Bank Muamalat Indonesia will continue and improve business related to the halal ecosystem through strategic cooperation with various parties. To face the times and the needs of customers, Bank Muamalat Indonesia will open new business opportunities, such as cooperation with Islamic fintech and e-commerce.

Kebijakan dan Pembagian Dividen
Dividend Policy and Distribution

Kebijakan Dividen

Kebijakan dividen merupakan persentase yang diambil dari laba bersih per tahun, yang jumlahnya akan ditentukan pada saat RUPST. Bank merencanakan untuk melaksanakan pembagian dividen apabila terdapat surplus kas dari kegiatan operasional setelah dana tersebut disisihkan untuk dana cadangan, kegiatan pendanaan, rencana pengeluaran modal serta modal kerja Bank. Apabila diperlukan, dari waktu ke waktu Bank dapat tidak membagikan dividen kepada Pemegang Saham Bank seperti dalam hal Bank membutuhkan dana untuk melakukan pengembangan usaha atau pemenuhan kecukupan modal atau akuisisi bisnis baru. Berdasarkan hasil keputusa RUPST Bank tanggal 17 Mei 2019 diputuskan bahwa laba bersih Bank tahun 2018 digunakan untuk cadangan Bank, sehingga tidak diadakan pembagian dividen atas laba bersih Bank tahun buku 2018.

Dividend Policy

Dividend policy is a percentage taken from net income per year, the amount of which will be determined at the AGMS. The Bank plans to carry out dividend distribution if there is a cash surplus from operational activities after the funds are set aside for reserve funds, funding activities, capital expenditure plans and working capital of the Bank. If necessary, from time to time, the Bank may not distribute dividends to Bank Shareholders as in the case that the Bank needs funds to conduct business development or fulfil the capital adequacy or acquisition of new business. Based on the decision of the Bank's AGM dated May 17, 2019, it was decided that the Bank's net income in 2018 was used for the Bank's reserve, so there was no dividend distributed on the Bank's net profit for the 2018 fiscal year.

Kepatuhan Pembayaran Pajak
Tax Payment Compliance

Kontribusi Bank Muamalat Indonesia kepada negara, diwujudkan melalui pemenuhan kewajiban Perusahaan sebagai wajib pajak dan sebagai pemotong/pemungut pajak. Pemenuhan kewajiban membayar pajak Perusahaan pada tahun 2019 adalah sebesar Rp34,2 miliar atau menurun 6,96% dibandingkan dengan tahun 2018 yang tercatat sebesar Rp36,8 miliar.

Bank Muamalat Indonesia's contribution to the country was realized through fulfillment of Company obligations as taxpayers and as tax cutters/collectors. Fulfillment of the Company's tax obligation in 2019 was Rp34.2 billion or decreased by 6.96% compared to 2018 which was recorded at Rp36.8 billion.

Dalam jutaan Rupiah
In million Rupiah

Uraian *Description*	2019	2018	Pertumbuhan (Penurunan) *Increase (Decrease)*	
			Rp	%
Pajak Penghasilan/ *Income tax*				
Pasal 4 (2)/*Article 4 (2)*	27.934.554	30.000.225	-2.065.671	-6,88
Pasal 21/ *Article 21*	5.749.423	5.484.992	264.431	4,82
Pasal 23/ *Article 23*	312.877	230.006	82.871	36,02
Pasal 26/ *Article 26*	41.905	10.392	31.513	303,24
Pasal 29/ *Article 29*	62.670	-	62.670	
Pajak Pertambahan Nilai *Value-added Tax*	163.302	1.100.995	-937.693	-85,17
Jumlah/ *Total*	34.264.731	36.826.610	-2.561.879	-6,96

Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan dan atau Manajemen
Employee and/or Management Share Ownership Program

Hingga 31 Desember 2019, Bank tidak mengeluarkan program Kepemilikan Saham oleh Karyawan dan/atau Manajemen (ESOP/MSOP).

Until December 31, 2019, Bank did not issue Share Ownership program by employee and/ or Management (ESOP/MSOP).

Informasi Material Mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Penggabungan/Peleburan Usaha, Akuisisi, Restrukturisasi Utang/Modal
Material Information Regarding Investment, Expansion, Divestment, Merger/Business Consolidation, Acquisition, Debt/Capital Restructuring

Investasi

Bank Muamalat Indonesia tidak melakukan kegiatan investasi di tahun 2019 sehingga informasi terkait tujuan, nilai transaksi dan sumber dana kegiatan investasi tidak disajikan oleh Bank Muamalat Indonesia.

Investment

Bank Muamalat Indonesia did not carry out any investment activities in 2019 so information related to destination, transaction value and source of funds for investment activities is not presented by Bank Muamalat Indonesia.

Ekspansi

Bank Muamalat Indonesia tidak melakukan kegiatan ekspansi di tahun 2019 sehingga informasi terkait tujuan, nilai transaksi dan sumber dana kegiatan ekspansi tidak disajikan oleh Bank Muamalat Indonesia.

Divestasi

Bank Muamalat Indonesia tidak melakukan transaksi kegiatan divestasi yang material di tahun 2019.

Akuisisi

Di tahun 2019, Bank Muamalat Indonesia tidak melakukan kegiatan akuisisi sehingga informasi terkait tujuan, nilai transaksi dan sumber dana kegiatan akuisisi tidak disajikan.

Restrukturisasi Hutang dan Modal

Jumlah piutang yang direstrukturisasi Bank sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp652.179.252 dan Rp100.715.398. Skema restrukturisasi umumnya dilakukan dengan perpanjangan masa pelunasan piutang dan penjadwalan kembali pembayaran yang tertunggak.

Expansion

Bank Muamalat Indonesia did not carry out any expansion activities in 2019 so information related to the purpose, transaction value and source of funds for expansion activities is not presented by Bank Muamalat Indonesia.

Divestment

Bank Muamalat Indonesia did not conduct any material divestment activities in 2019.

Acquisition

In 2019, Bank Muamalat Indonesia did not conduct acquisition activities so information related to the purpose, transaction value and surce of funds for acquisition is not presented.

Debt/Capital Restructuring

Receivables that have been restructured by the Bank as of December 31, 2019 and 2018, was totalling to Rp652,179,252 and Rp100,715,398, respectively. Restructuring scheme generally involves extension of the receivables maturity date and reschuduling of overdue payment.

iB

Bank Muamalat
Pertama Murni Syariah



Wujudkan Rencana Hijrahmu, Bersamaku

Info lengkap hubungi: SalaMuamalat **1500016** | www.bankmuamalat.co.id

BankMuamalatIndonesia BankMuamalat Bank.Muamalat BankMuamalat

#AyoHijrah

Bank Muamalat Indonesia terdaftar dan diawasi oleh OJK | LPS

Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Realization of the Use of Funds from Public Offering

Bank tidak melakukan penawaran umum pada tahun 2019.

The Bank did not make a public offering in 2019.

Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi

Material Transaction Information Containing Conflict Interests and/or Transactions with Affiliates

Pada tahun 2019, tidak terdapat transaksi material yang mengandung benturan kepentingan.

In 2019, there was not material transaction containing conflict of interest.

Transaksi Pihak Berelasi

Bank melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagaimana yang didefinisikan dalam PSAK No. 7 (Penyesuaian 2010), "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi".

Suatu pihak dianggap pihak berelasi dengan Bank jika:

1. langsung atau tidak langsung yang melalui satu atau lebih perantara, suatu pihak (i) mengendalikan, atau dikendalikan oleh, atau berada di bawah pengendalian bersama, dengan Bank; (ii) memiliki kepentingan dalam Bank yang memberikan pengaruh signifikan atas Bank; atau (iii) memiliki pengendalian bersama atas Bank;
2. suatu pihak yang berada dalam kelompok usaha yang sama dengan Bank;
3. suatu pihak adalah ventura bersama dimana Bank sebagai venture;
4. suatu pihak adalah anggota dari personil dari manajemen kunci Bank;
5. suatu pihak adalah anggota keluarga dekat dari individu yang diuraikan dalam butir (1) atau (4);
6. suatu pihak adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama atau dipengaruhi signifikan oleh atau untuk pihak yang memiliki hak suara signifikan pada beberapa entitas, langsung maupun tidak langsung, yaitu individu seperti diuraikan dalam butir (4) atau (5); dan
7. suatu pihak adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari Bank atau entitas yang terkait dengan Bank.

Related Party Transactions

Bank entered into transactions with parties which are defined as related parties in accordance with SFAS No. 7 (Adjustment 2010), regarding "Related Party Disclosure".

A party is considered as a related party of the Bank if:

1. *directly or indirectly through one or more intermediaries, a party (i) controls, or is controlled by, or is under common control with, the Bank; (ii) has an interest in the Bank that gives significant influence over the Bank; or (iii) has joint control over the Bank;*
2. *an entity is a member of the same group as the Bank;*
3. *a party is a joint venture in which the Bank acts as a venture;*
4. *a party is a member of the key management personnel of the Bank;*
5. *a party is a close family member of an individual as described in point (1) or (4);*
6. *a party is an entity that is controlled, jointly controlled or significantly influenced by or have significant voting rights in several entities, directly or indirectly, which are individuals described in point (4) or (5); and*
7. *a party is a post-employment benefit plan program for the employee benefit of either the Bank or its related party.*

Nama Pihak dan Sifat Hubungan Berelasi

Pihak-pihak berelasi terdiri dari Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan kunci, pemegang saham, komisaris PT Syarikat Takaful Indonesia, Pengurus utama Baitul Maal Muamalat dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat, PT Al Ijarah Indonesia Finance berdasarkan PSAK No. 7 (Revisi 2010), "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi".

Name of Party and Relationship

Related parties consist of Board of Commissioners, Board of Directors and key employees, Commissioner of PT Syarikat Takaful Indonesia, management of Baitul Maal Muamalat and Dana Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat, PT Al Ijarah Indonesia Finance (subsidiary) based on SFAS No. 7 (Revised 2010), "Related Party Disclosures".

Tabel di bawah menunjukkan rincian pihak-pihak berelasi dengan Bank Muamalat Indonesia beserta sifat dari transaksi yang dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia tersebut sampai dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019:

The below table elaborates details of related parties with Bank Muamalat Indonesia and the nature of the transactions up to the period ended December 31, 2019:

Pihak Berelasi *Related Parties*	Sifat Hubungan *Nature of Relationship*	Jenis Transaksi *Type of Transaction*
PT Al Ijarah Indonesia Finance	Entitas asosiasi *Associate entity*	Piutang Murabahah, pembiayaan mudharabah dan musyarakah, penyertaan saham dan liabilitas utang sewa pembiayaan *Murabahah receivables, mudharabah and musyarakah financing, investment in shares and obligation under lease finance*
PT Syarikat Takaful Indonesia	Entitas asosiasi *Associate entity*	Penyertaan saham, deposito mudharabah *Investment in shares and mudharabah time deposit*
Karyawan kunci *Key Employees*	Hubungan pengendalian kegiatan Bank *Significant influence on Bank's activities*	Piutang murabahah, pinjaman qardh, pembiayaan musyarakah, giro wadiah, tabungan mudharabah dan deposito mudharabah *Murabahah receivables, funds of qardh, musyarakah financing, wadiah demand deposits, mudharabah saving deposit, and mudharabah time deposits*
Komisaris, Dewan pengawas syariah *Commissioner, Sharia supervisory board*	Hubungan pengendalian kegiatan Bank *Significant influence on Bank's activities*	Giro wadiah dan deposito mudharabah *Wadiah demand deposit and mudharabah time deposits*
Baitul Maal Muamalat	Hubungan pengendalian melalui karyawan kunci *Significant influence through key employees*	Giro wadiah dan deposito mudharabah *Wadiah demand deposit and mudharabah time deposits*

Kewajaran Transaksi

Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, dimana persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

Transaksi dengan pihak-pihak berelasi dilakukan dengan syarat dan kondisi yang sama dengan transaksi-transaksi dengan pihak ketiga. Transaksi yang dilakukan Bank telah memenuhi peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. IX.E.1 tentang "Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu", pada saat transaksi-transaksi tersebut dilakukan.

Fairness of Transactions

The transaction is carried out based on terms agreed by both parties, where such requirements may differ from other transactions undertaken with non-related parties.

Transactions with related parties are conducted under terms and conditions that are similar to third party transactions. These transactions are in accordance with the regulation of Financial Services Authority (FSA) No. IX.E.1 regarding "Transaction with Affiliation and Certain Conflict of Interests", when the transactions are conducted.

Kebijakan Mekanisme Reviu Transaksi

Bank memiliki kebijakan mengenai transaksi yang mengandung benturan kepentingan dan/atau transaksi dengan pihak berelasi. Transaksi material diputuskan oleh Dewan Komisaris dan senantiasa dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, serta telah memenuhi ketentuan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, transaksi material juga harus diputuskan oleh Dewan Komisaris secara Independen.

Transaction Review Mechanism Policy

The Bank has a policy regarding transactions containing conflicts of interest and/or transactions with related parties. Material transactions are decided by the Board of Commissioners and always carried out in regards to the precautionary principle, and have having been complied with the applicable provisions and regulations. In addition, material transactions must also be decided by Independent Board of Commissioners.

Selama tahun 2019 tidak terdapat pelanggaran atas peraturan perundang-undangan terkait dengan transaksi dengan pihak berelasi serta tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

During 2019 there were no violations of the laws and regulations related to transactions with related parties and there were no transactions containing conflicts of interest.

Tujuan Transaksi Pihak Berelasi

Transaksi dengan pihak-pihak berelasi dilakukan terutama untuk kepentingan dan keberlanjutan bisnis Bank Muamalat Indonesia yang berhubungan dengan pinjam-meminjam dana dalam kegiatan normal usaha.

Purpose of Related Party Transactions

Transactions with related parties are carried out mainly for the interest and sustaiablility of Bank Muamalat Indonesia's business related to lending and borrowing in the normal course of their business activities.

Nilai Transaksi Pihak Berelasi

Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan dan rinciannya telah disajikan dalam Catatan 41 atas laporan keuangan.

Value of Related Party Transactions

All material transactions and balances with related parties are disclosed in the relevant notes to the financial statements and the details are presented in Note 41 to the financial statements.

Perubahan Peraturan Perundang-undangan terhadap Perusahaan pada Tahun Buku Terakhir

Changes in Legislation Significant to the Bank in Last Fiscal Year

No.	Peraturan	Pokok Peraturan	Pengaruh terhadap Perseroan
1.	Peraturan Bank Indonesia No. 21/2/PBI/2019 tentang Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa	Pemisahan pengaturan pelaporan LLD dan pelaporan kegiatan penerapan prinsip kehati-hatian (KPPK). Penyelarasan dengan penyempurnaan ketentuan tentang Utang Luar Negeri (ULN) Bank sebagaimana diatur dalam PBI No. 21/1/PBI/2019 tentang Utang Luar Negeri Bank dan Kewajiban Bank Lainnya dalam Valuta Asing. Penguatan mekanisme pelaporan dan pengawasan kegiatan LLD.	Bank menyesuaikan pelaporan LLD dengan ketentuan tentang Utang Luar Negeri dan Kewajiban Lainnya dalam valuta asing.
2.	Peraturan Bank Indonesia No. 21/15/PBI/2019 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank dan Nasabah serta Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 21/28/PADG/2019 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank dan Nasabah	Ruang Lingkup Laporan Penyampaian Laporan LLD dan Koreksi Laporan LLD Pengaksepan Perintah Transfer Dana Keluar (Outgoing Transfer) dan Penatausahaan Dokumen Pendukung Outgoing Transfer Prosedur Perolehan dan Verifikasi terhadap Informasi dari Nasabah Penelitian Kebenaran Laporan Sanksi Penyampaian Hasil Pengawasan DHE SDA	Menyesuaikan cakupan perubahan pelaporan LLD yang wajib disampaikan yaitu (1) laporan rekening khusus DHE yang terdiri dari laporan transaksi rekening khusus DHE serta laporan posisi rekening khusus dan deposito DHE dan (2) laporan transaksi DHE dan DPI yang akan berisi informasi penerimaan DHE dan pengeluaran DPI untuk transaksi no telegraphic transfer (non TT) a/l L/C, D/C dan Non Swift.
3.	Peraturan Bank Indonesia No. 21/3/PBI/2019 dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 21/15/PADG/2019 tentang Penerimaan Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam	Kewajiban penerimaan DHE SDA melalui bank pada Reksus DHE SDA; Pengaturan terkait pembukaan, transfer dana masuk, dan transfer dana keluar pada Reksus DHE SDA; Penyampaian informasi, laporan, dan dokumen pendukung; Pengawasan kewajiban DHE SDA; dan Korespondensi	Bank melakukan pemantauan transaski nasabah yang menerima DHE dan membayar Devisa Pembyayaran Impor dengan menambahkan informasi Devisa Pembayaran Impor.
4.	Peraturan Bank Indonesia No. 21/14/PBI/2019 dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 21/26/PADG/2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor	Ekspor Non SDA Seluruh DHE wajib diterima melalui Bank paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah Bulan Pemberitahuan Pabean Ekspor (PPE) Dalam hal DHE diterima dalam bentuk uang tunai di dalam negeri, DHE wajib disetorkan ke Bank paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah Bulan PPE Nilai DHE yang diterima wajib sesuai dengan Nilai Ekspor atau selisih kurang paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Eksportir menyampaikan Laporan DHE secara daring ke BI paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya setelah bulan pendaftaran PPE dan/atau bulan penerimaan DHE, apabila terdapat: perubahan informasi pada PPE yang memengaruhi DHE; dan/atau perubahan informasi terkait DHE Penyampaian Laporan DHE dilakukan untuk Nilai Ekspor yang lebih besar dari ekuivalen USD10.000,00 Impor Devisa Pembayaran Impor (DPI) wajib dilaporkan ke BI paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah Bulan Pemberitahuan Pabean Impor (PPI) Importir menyampaikan Laporan DPI secara daring ke BI paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya setelah bulan pendaftaran PPI dan/atau bulan pengeluaran DPI Penyampaian Laporan DPI untuk Nilai Impor yang lebih besar dari ekuivalen USD10.000,00 Bank hanya dapat melakukan akseptasi transfer dana DPI dan mengirimkan Message FTMS untuk pengeluaran DPI melalui transaksi TT apabila Perintah Transfer Dana telah dilengkapi dengan informasi Impor Reksus DHE SDA Seluruh DHE SDA wajib diterima melalui Bank pada Reksus DHE SDA paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah Bulan PPE Dalam hal DHE SDA diterima dalam bentuk uang tunai di dalam negeri, DHE wajib disetorkan ke Bank pada Reksus DHE SDA paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah Bulan PPE. Pengaturan terkait pembukaan, transfer dana masuk, dan transfer dana keluar pada Reksus DHE SDA, diantaranya: Pembukaan Reksus DHE SDA Transfer dana masuk ke Reksus DHE SDA Penempatan dana ke dalam deposito DHE SDA Transfer dana keluar dari Reksus DHE SDA PBI ini mulai berlaku tanggal 29 November 2019	Pembuatan rekening khusus DHE SDA dengan cara pembuatan kode produk dan flagging produk tabungan bisnis dan giro DHE SDA.

No.	Regulation	Principal Regulations	Impact on the Company
1.	Bank Indonesia Regulation No. 21/2 / PBI / 2019 concerning Reporting on Foreign Exchange Activities	Separation of LLD reporting arrangements and reporting on the impementation of prudential aspects. Completion of provisions concerning Bank Foreign Debt (ULN) as stipulated in PBI No. 21/1/PBI/2019 concerning Bank Foreign Debt and Other Bank Obligations in Foreign Currencies Strengthening the reporting and monitoring mechanism of LLD activities.	The Bank adjusts the Foreign Exchange Flows in accordance with the provisions concerning Foreign Debt and Other Liabilities in foreign currencies.
2.	Bank Indonesia Regulation No. 21/15/PBI/2019 concerning Monitoring of Bank and Customer Foreign Exchange Activities and Regulation of Board of Governors Members Bank Indonesia No. 21/28/ PADG/2019 concerning Monitoring of Bank and Customer Foreign Exchange Traffic Activities	Scope of reporting Submission of LLD Reports and LLD Report Corrections Acceptance of Outgoing Transfer Funds and Outgoing Transfer Supporting Document Administration Procedure for obtaining and Verifying Information from Customers Reporting validation Penalty Submission the result of DHE SDA monitoring.	Adjust the scope of changes in LLD reporting that must be submitted, i.e. (1) DHE special account statements consisting of DHE special account transaction reports and DHE special account position reports and deposits, (2) DHE and DPI transaction reports that will contain DHE receipt and DPI expenditure information for telegraphic transfer (non-TT) a / l Ll C, D / C all LIC, DIC and Non Swift.
3.	Bank Indonesia Regulation No. 21/3/ PBI/2019 and Regulation of the Board of Governors' Members Bank Indonesia No. 21/15/PADG/2019 concerning Receipts of Foreign Exchange Export Results from Business Activities, Management and / or Processing of Natural Resources	Obligation to receive DHE SDA through bank in a special DHE SDA Account; Arrangements related to opening, incoming transfer funds, and outgoing transfer funds to the DHE SDA special account; Submission of information, reports and supporting documents; Oversight of DHE SDA obligations; and Correspondence	The bank monitors customer transactions that receive DHE and pays Foreign Exchange Import Payment by adding information on Import Payment Foreign Exchange.
4.	Bank Indonesia Regulation 21/14/ PBI/2019 and Regulation of the Board of Governors' Members Bank Indonesia No. 21/26/PADG/2019 concerning Foreign Exchange Export Results and Foreign Exchange Import Payments	Non - Natural Resource (SDA) exports All DHE must be received through the Bank no later than the end of the third month after the Export Customs Notification Month (PPE) Dalam hal DHE diterima dalam bentuk uang tunai di dalam negeri, DHE wajib disetorkan ke Bank paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah Bulan PPE The DHE value received must be in accordance with the Export Value or the difference of no more than Rp50,000,000.00 (fifty million rupiahs) The exporter submits the DHE Report online to BI no later than the 5th of the following month after the month of PPE registration and / or the month of receipt of DHE, if there is: changes in information on PPE that affect DHE; and / or changes in information related to DHE Submission of a DHE Report is carried out for an Export Value more than the equivalent of USD10,000.00Impor Import Payment Foreign Exchange (DPI) must be reported to BI no later than the end of the third month after the Import Customs Notification Month (PPI) The importer submits DPI Report online to BI no later than the 5th of the following month after the month of PPI registration and / or the month of DPI issuance Submission of DPI Reports for Import Value more than USD10,000 equivalent Banks can only accept DPI fund transfers and send FTMS messages for DPI expenses via TT transactions if Fund Transfer Orders are completed with Import information Special DHE SDA account All DHE SDA must be received through the Bank at the special account of DHE SDA no later than the end of the third month after PPE Month In term of the DHE SDA is received in cash in the country, DHE must be deposited with the Bank in the special account of DHE SDA no later than the end of the third month after the PPE Month. Arrangements related to opening, incoming transfer funds, and outgoing transfer funds to Special DHE SDA accounts - Opening of DHE SDA Special accounts Transfer funds into the DHE SDA Special accounts Placement of funds into the DHE SDA Special accounts Transfer funds out of the the DHE SDA Special accounts This regulation entered into force on 29 November 2019	Creating a DHE SDA special account by making product codes and flagging business savings products and DHE SDA demand deposits.

No.	Peraturan	Pokok Peraturan	Pengaruh terhadap Perseroan
5.	Peraturan Bank Indonesia No. 21/1/PBI/2019 dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 21/3/PADG/2019 tentang Utang Luar Negeri Bank dan Kewajiban Bank Lainnya dalam Valas	ULN Bank maupun kewajiban Bank lainnya terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek ≤ 1 (satu) tahun dan Kewajiban Jangka Panjang ≥ lebih dari 1 tahun. Bank yang memiliki ULN Bank dan kewajiban Bank lainnya dalam valuta asing harus menerapkan prinsip kehati-hatian dengan membatasi posisi saldo harian Kewajiban Jangka Pendek paling tinggi 30% dari modal bank.	Bank Muamalat Indonesia telah memenuhi Kewajiban Jangka Pendek yaitu paling tinggi 30% dari modal bank, namun perlu menyesuaikan perhitungan PLN jangka pendek khususnya terkait instumen ULN yang diperhitungkan.
6.	Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2019 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Aktivitas Sekuritisasi Aset bagi Bank Umum	Sekuritisasi Aset adalah proses penerbitan surat berharga oleh penerbit efek beragun aset syariah yang didasarkan pada pengalihan aset syariah dari kreditur awal (originator) yang diikuti dengan pembayaran yang berasal dari hasil penjualan efek beragun aset kepada investor atau pembayaran yang berasal dari dana penerbit. Dalam Sekuritisasi Aset, Bank dapat melakukan aktivitas sebagai Kreditur Awal *(Originator)*, Penyedia Kredit Pendukung *(Credit Enhancement)*, Penyedia Fasilitas Likuiditas (Liquidity Facility), Penyedia Jasa *(Servicer)*, Investor dan/atau Bank Kustodian. Bank dalam melakukan aktivitas Sekuritisasi Aset hanya dapat melakukan Sekuritisasi Aset atas aset syariah yang mendasari *(underlying)* berupa pembiayaan, tagihan yang timbul dari surat berharga syariah, tagihan yang timbul pada kemudian hari *(future receivables)* dan/atau aset syariah lain yang setara.	Produk sekuritisasi aset dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif instrumen pengelolaan likuiditas bagi Bank Muamalat Indonesia.
7.	Peraturan OJK No.12/POJK.03/2019 tentang Pelaporan Bank Umum melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan	Dalam POJK ini diatur mengenai tata cara penyampaian Laporan bank umum melalui Sistem Pelaporan OJK, yang saat ini dilakukan pada Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO). Kriteria Bank yang wajib menyampaikan Laporan dan penunjukan pejabat penanggung jawab dan petugas pelaksana pelaporan. Laporan terdiri atas Laporan harian, Laporan mingguan, Laporan bulanan, Laporan triwulanan, Laporan semesteran, Laporan tahunan, dan Laporan lain. Masing-masing Laporan tersebut memiliki batas waktu pelaporan yang dibagi dalam beberapa periode. Sanksi administratif untuk pelanggaran atas POJK ini, serta sanksi keterlambatan penyampaian Laporan dan kesalahan informasi berdasarkan temuan Bank/OJK. Adapun sanksi atas kesalahan isian yang saling berkaitan hanya dikenakan 1 kali.	Bank Muamalat Indonesia menyesuaikan kewajiban pelaporan melalui sistem APOLO kepada OJK.
8.	Peraturan Bank Indonesia No. 21/6/PBI/2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia No. 20/5/PBI/2018 tentang Operasi Moneter dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 21/9/PADG/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 20/9/PADG/2018 tentang Standing Facilities	Transaksi Deposit Facility dilakukan dengan cara penempatan dana rupiah oleh Peserta Standing Facilities secara berjangka di Bank Indonesia. Penempatan dana rupiah (deposit facility) dalam Standing Facilities Syariah dilakukan dengan mekanisme Bank Indonesia menerima penempatan dana rupiah dari peserta Standing Facilities Syariah tanpa menerbitkan surat berharga salah satunya dilakukan dalam bentuk Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS) menggunakan akad ju'alah.	Bank Muamalat Indonesia dapat mengelola kelebihan likuiditas melalui penempatan dalam bentuk FASBIS sebagaimana yang telah dilakukan.
9.	Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 21/14/PADG/2019 tentang "Perubahan Kedua Atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 20/10/PADG/2018 Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 2/27/PADG/2019 tanggal 26 Desember 2019 tentang "Perubahan Ketiga Atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 20/10/PADG/2018 Tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah"	Perubahan pengaturan yang mencakupi hal-hal sebagai berikut: GWM dalam rupiah bagi BUK: Porsi GWM rata-rata tetap 3% Porsi GWM harian yang semula 3% menjadi 2,5% GWM dalam rupiah bagi BUS dan UUS: Porsi GWM rata-rata tetap 3% Porsi GWM harian yang semula 1,5% menjadi 1%	Bank Muamalat Indonesia menyesuaikan pemenuhan GWM harian dalam rupiah GWM sesuai dengan ketentuan.
10.	Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 9/SEOJK.03/2019 tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama	SEOJK ini mengatur mengenai beberapa hal diantaranya: (1) Pihak Utama Bank yang dilakukan penilaian kembali adalah PSP, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau Pejabat Eksekutif; (2) Cakupan penilaian kembali memuat contoh-contohperbuatanatas permasalahan yang dilakukan oleh Pihak Utama Bank; (3) Tata cara penilaian kembali memuat penjelasan mengenai langkah-langkah pelaksanaan permintaan klarifikasi bukti, data, dan/atau informasikepada Pihak Utama Bank yang dinilai kembali; (4) Penyampaian klarifikasi atas bukti, data, dan/atau informasi dari Pihak Utama Bank yang dinilai kembali dapat dilakukan melalui tanggapan tertulis dan/atau klarifikasi dalam bentuk tatap muka; (5) Pengenaan jangka waktu larangan terhadap Pihak Utama Bank yang ditetapkan dengan predikat Tidak Lulus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) POJK tentang Penilaian Kembali bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan. Sedangkan konsekuensi atas larangan berlaku sejak tanggal surat penetapan OJK	Bank Muamalat Indonesia menyampaikan laporan baru berupa perubahan data Pihak Utama setiap terdapat perubahan.

No.	Regulation	Principal Regulations	Impact on the Company
5.	Bank Indonesia Regulation No. 21/1/PBI/2019 and Regulation of the Board of Governors' Members No. 21/3/PADG/2019 concerning Bank Foreign Debt and Other Bank Obligations in Foreign Currency	Bank External Debts and other Bank liabilities consist of Short-Term Obligations ≤ 1 (one) year and Long-Term Obligations ≥ more than 1 year. Banks that have bank external debt and other bank liabilities in foreign currencies must apply the prudential aspects by limiting the daily balance position for short-term liabilities to a maximum of 30% of bank capital.	Bank Muamalat Indonesia has fulfilled the Short Term Obligations, which is a maximum of 30% of the bank's capital, but it is necessary to adjust the short-term PLN calculations, especially related to the calculated external debt instrument.
6.	FSA Regulation No. 11/POJK.03/2019 concerning Prudential Aspects in Asset Securitization Activities for Commercial Banks	Asset securitization is the process of issuance of securities by issuers of sharia-backed securities based on the transfer of sharia assets from the original creditor (followed by originator) followed by payments originating from the sale of assets-backed securities to investors or payments originating from issuer funds. In Asset Securitization, Banks can conduct activities as Initial Creditor (Originator), Credit Enhancement Provider, Liquidity Facility Provider, Service Provider (Servicer), Investor and / or Custodian Bank. Banks in carrying out Asset Securitization activities can only conduct Assets Securitization of underlying Islamic assets in the form of financing, claims arising from Islamic securities, future receivables and / or other equivalent Islamic assets.	Asset securitization products can be used as an alternative liquidity management instrument for Muamalat Bank.
7.	FSA Regulation No. 12/POJK.03/2019 concerning Commercial Bank Reporting through the Financial Services Authority Reporting System	This POJK regulates the procedure for submitting Commercial Bank Reports through the OJK Reporting System, which is currently carried out in the OJK Online Reporting Application (APOLO). Criteria for Banks that are required to submit Reports and appoint responsible officers and reporting officers. Reports consist of daily reports, weekly reports, monthly reports, quarterly reports, semester reports, annual reports, and other reports. Each report has a reporting deadline which is divided into several periods. Administrative sanctions for violations of this POJK, as well as sanctions for late submission of Reports and misinformation based on Bank / OJK findings. The sanctions for interrelated filling errors are only imposed 1 time.	Bank Muamalat Indonesia adjusted its reporting obligations through the APOLO system to FSA.
8.	Bank Indonesia Regulation No. 21/6/PBI/2019 concerning Third Amendment to Bank Indonesia Regulation No. 20/5 / PBI/2018 concerning Monetary Operations and Board of Governors Members BI Regulation No 21/9 / PADG / 2019 concerning Second Amendment to Regulations of Members of the Board of Governors Number 20/9 / PADG / 2018 concerning Standing Facilities	Transaksi Deposit Facility dilakukan dengan cara penempatan dana rupiah oleh Peserta Standing Facilities secara berjangka di Bank Indonesia. Penempatan dana rupiah (deposit facility) dalam Standing Facilities Syariah dilakukan dengan mekanisme Bank Indonesia menerima penempatan dana rupiah dari peserta Standing Facilities Syariah tanpa menerbitkan surat berharga salah satunya dilakukan dalam bentuk Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS) menggunakan akad ju'alah.	Bank Muamalat Indonesia can manage excess liquidity through placements in the form of FASBIS as has been done.
9.	Regulation of Members of the Board of Governors Number 21/14 / PADG / 2019 concerning "Second Amendment to the Regulation of Members of the Board of Governors Number 20/10 / PADG / 2018 Regulation of Members of the Board of Governors Number 21/27 / PADG / 2019 dated December 26, 2019 concerning "Third Amendment to the Regulation of Members of the Board of Governors Number 20/10 / PADG / 2018 Concerning Statutory Reserves in Rupiahs and Foreign Currencies for Conventional Commercial Banks, Sharia Commercial Banks, and Sharia Business Units	Amend to the regulation which cover the following matters: Statutory Reserve Requirement (GWM) in rupiah for Conventional Bank: The average reserve requirement is fixed 3% The portion of daily reserve requirement which was originally 3% to 2.5% Statutory Reserve Requirement (GWM) in rupiah for Sharia Banking and Sharia Business Units: The average reserve requirement is fixed 3% The portion of the daily reserve requirement which was originally 1.5% to 1%	Bank Muamalat Indonesia adjusts the fulfillment of daily Statutory Reserves in rupiah Statutory Reserves according to regulations.
10.	Financial Services Authority Circular Letter Number 9 / SEOJK.03 / 2019 concerning Revaluation of Main Parties	This SEOJK regulates a number of things including: (1) The main parties of the Bank whose revaluation is PSP, members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and / or Executive Officers; (2) The scope of the revaluation contains examples of the problems made by the Main Party of the Bank; (3) The procedure for revaluation contains an explanation of the steps for implementing the request for clarification of evidence, data, and / or information from the Main Party of the Bank being revalued; (4) Clarification of evidence, data, and / or information from the Main Party of the Bank that is revalued can be done through written responses and / or clarification in the form of face to face; (5) Imposition of prohibition period for Bank Main Parties determined by the title of Disqualified as referred to in Article 11 paragraph (2) POJK concerning Revaluation of Main Parties of Financial Services Institutions. While the consequences of the ban apply from the date of the stipulation of the FSA	Bank Muamalat Indonesia submits a new report in the form of changes in Main Party data whenever there is a change.

No.	Peraturan	Pokok Peraturan	Pengaruh terhadap Perseroan
11.	Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran.	Definisi atas beberapa istilah baru yang terdapat dalam PADG QRIS Implementasi QRIS sebagai standar nasional Pemrosesan Transaksi QRIS, antara lain mengenai para pihak dalam pemrosesan transaksi QRIS, kewajiban untuk memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia Nominal Transaksi QRIS dibatasi paling banyak sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per transaksi.	Bank wajib perlu menyesuaikan implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran.
12.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/9/PBI/2019 dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/23/PADG/2019 tentang Laporan Bank Umum Terintegrasi serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.03/2019 tentang Penyampaian Laporan Melalui Portal Pelaporan Terintegrasi.	Kewajiban dan tanggung jawab pelapor Penyusunan dan penyampaian laporan mengacu metadata BI, OJK & LPS Laporan dibagi menjadi 4 (empat) kelompok informasi, yaitu kelompok informasi Keuangan, kelompok informasi Risiko, kelompok informasi Kegiatan Sistem Pembayaran dan Jasa Keuangan, dan kelompok informasi Data Pokok. Periodisasi dan batas waktu penyampaian laporan dan/ atau koreksi laporan secara online dan offline. Kewajiban penyampaian LHBU, LBBU, LKPBU, LSMK masih tetap berlaku selama 9 (sembilan) bulan, yaitu sejak data akhir Desember 2019 sampai dengan data akhir Agustus 2020. Untuk menyampaikan Laporan melalui Sistem Pelaporan Otoritas penanggung jawab, petugas pelaksana, dan/ atau petugas pelaporan melakukan pendaftaran secara mandiri pada Portal Pelaporan Terintegrasi.	Bank Muamalat Indonesia mempersiapkan insfrastruktur dan data sesuai dengan kebutuhan laporan terintegrasi.
13.	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.23/POJK.01/2019 tentang Perubahan atas POJK No. 12/ POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan	PJK wajib mengidentifikasi, menilai, dan memahami risiko tindak pidana Pencucian Uang dan/ atau tindak pidana Pendanaan Terorisme terkait dengan nasabah, negara atau area geografis, produk, jasa, transaksi atau jaringan distribusi (delivery channels). Dalam melaksanakan kewajiban tersebut, PJK wajib untuk: Mendokumentasikan penilaian risiko; Mempertimbangkan seluruh faktor risiko yang relevan sebelum menetapkan tingkat keseluruhan risiko, serta tingkat dan jenis mitigasi risiko yang memadai untuk diterapkan; Mengkinikan penilaian risiko secara berkala; dan Memiliki mekanisme yang memadai terkait penyediaan informasi penilaian risiko kepada instansi yang berwenang. Penilaian risiko wajib mengacu pada penilaian risiko Indonesia terhadap tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana Pendanaan Terorisme secara nasional (National Risk Assessment) dan secara sektoral (Sectoral Risk Assessment) Proses verifikasi melalui pertemuan langsung (face to face) dapat digantikan dengan verifikasi melalui sarana elektronik milik PJK atau milik pihak ketiga PJK wajib mengidentifikasi dan mengklasifikasikan Calon Nasabah atau Nasabah ke dalam kelompok orang perseorangan (natural person), korporasi, dan perikatan lainnya (legal agreement) Dalam hal Calon Nasabah, Nasabah atau WIC bukan merupakan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), PJK wajib melakukan identifikasi dan verifikasi identitas Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), berdasarkan informasi atau data relevan yang diperoleh dari sumber yang dapat dipercaya.	Ketentuan penambahan sanksi berupa Sanksi denda dapat dikenakan paling banyak sebesar Rp5 miliar bagi orang perseorangan dan paling banyak sebesar Rp15 miliar bagi perusahaan.
14.	Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 21/21/PADG/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/5/PADG/2017 tentang Pelaksanaan Sertifikasi *Treasury* dan Penerapan Kode Etik Pasar	Penambahan pedoman direksi dan pegawai dari pelaku pasar yaitu terkait pencegahan persaingan usaha tidak sehat yang diterbitkan oleh Global Foreign Exchange Committee (GFXC), untuk direksi dan pegawai dari pelaku pasar yang berdasarkan prinsip konvensional dan prinsip syariah. Penambahan pengaturan penyampaian prosedur internal untuk memastikan direksi dan pegawai dari pelaku pasar memahami Kode Etik Pasar kepada Bank Indonesia paling lambat tanggal 14 April 2020. Penyesuaian atas penjelasan mengenai cakupan prosedur internal mengenai penerapan Kode Etik Pasar Penambahan pengaturan penyampaian pernyataan telah memahami dan menerapkan kode etik pasar dari pelaku pasar untuk dipublikasikan pada laman resmi Bank Indonesia Penambahan pengaturan penyampaian laporan melalui sistem pelaporan online Bank Indonesia.	Bank Muamalat Indonesia menyusun prosedur internal mengenai kode etik pasar dan menyesuaikan pelaporan melalui sistem online Bank Indonesia.

No.	Regulation	Principal Regulations	Impact on the Company
11.	Regulation of the Members of the Board of Governors Number 21/18 / PADG / 2019 concerning Implementation of the National Quick Response Code Standard for Payment.	Definitions of several new terms contained in the QRIS PADG Implementation of QRIS as a national standard QRIS Transaction Processing, among others concerning the parties in processing QRIS transactions, the obligation to obtain prior approval from Bank Indonesia QRIS Transaction Nominal is limited to a maximum of IDR. 2,000,000.00 (two million rupiah) per transaction.	Banks are required to adjust the implementation of the National Quick Response Code Standard for Payment.
12.	Bank Indonesia Regulation Number 21/9 / PBI / 2019 and Board of Governors Member Regulation Number 21/23 / PADG / 2019 concerning Integrated Commercial Bank Reports and Financial Services Authority Regulation Number 36 / POJK.03 / 2019 concerning Submission of Reports through the Integrated Reporting Portal.	Obligations and responsibilities of the reporter Report preparation and submission refers to BI, OJK & LPS metadata The report is divided into 4 (four) information groups, namely the Financial information group, the Risk information group, the Payment System Activities and Financial Services Activity group, and the Basic Data information group. Periodization and deadline for report submission and / or report correction online and offline. Obligations to submit LHBU, LBBU, LKPBU, LSMK still apply for 9 (nine) months, from the end of December 2019 to the end of August 2020. To submit a Report through the Reporting System, the responsible authority, implementing officer, and / or reporting officer registers independently on the Integrated Reporting Portal.	Bank Muamalat prepares infrastructure and data according to the requirement of integrated reports.
13.	Financial Services Authority Regulation No.23 / POJK.01 / 2019 concerning Amendments to POJK No. 12 / POJK.01 / 2017 concerning the Implementation of Anti Money Laundering and Prevention of Terrorism Funding Programs in the Financial Services Sector	The PJK must identify, assess, and understand the risks of Money Laundering and / or Terrorism Funding crimes related to customers, countries or geographical areas, products, services, transactions or distribution networks (delivery channels). In carrying out these obligations, PJK is required to: Documenting risk assessments; Consider all relevant risk factors before determining the overall level of risk, as well as the level and type of risk mitigation sufficient to be applied; Updating the risk assessment periodically; and Have an adequate mechanism related to providing risk assessment information to the authorized agencies. Risk assessment must refer to the risk assessment of Indonesia for Money Laundering and National Terrorism Funding (Sectoral Risk) and Sectoral Risk Assessment The verification process through direct meetings (face to face) can be replaced with verification through electronic means owned by PJK or third parties The PJK is obliged to identify and classify prospective customers or customers into groups of natural persons, corporations and other agreements (legal agreement) In the event that a Prospective Customer, Customer or WIC is not a Beneficial Owner, the Provider of Financial Services is obliged to identify and verify the Beneficial Owner's identity, based on relevant information or data obtained from reliable sources.	The provision of additional sanctions in the form of sanctions can be imposed a maximum of IDR. 5 billion for individuals and a maximum of IDR. 15 billion for companies.
14.	Regulation of the Members of the Board of Governors No. 21/21 / PADG / 2019 concerning Amendments to the Members of the Board of Governors' Regulation Number 19/5 / PADG / 2017 concerning the Implementation of Treasury Certification and the Application of the Market Ethics Code	Addition of guidelines for directors and employees of market participants that is related to prevention of unfair business competition published by the Global Foreign Exchange Committee (GFXC), for directors and employees of market participants based on conventional principles and sharia principles. Additions to the regulation of internal procedures to ensure that directors and employees of market participants understand the Market Ethics Code to Bank Indonesia no later than April 14, 2020. Adjustments to explanations regarding the scope of internal procedures regarding the application of the Market Ethics Code Addition of regulation for statement submission that has understood and applied market code of ethics from market participants to be published on the official website of Bank Indonesia Added reporting arrangements through the Bank Indonesia online reporting system.	Bank Muamalat prepares internal procedures regarding market code of ethics and adjusts reporting through Bank Indonesia's online system.

No.	Peraturan	Pokok Peraturan	Pengaruh terhadap Perseroan
15.	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 25/POJK.03/2019 tentang Pelaporan Informasi Nasabah Asing Terkait Perpajakan Kepada Negara Mitra atau Yuridiksi Mitra	LJK Pelapor wajib menyampaikan laporan yang berisi informasi keuangan sesuai Perjanjian Internasional untuk setiap Rekening Keuangan yang diidentifikasikan sebagai Rekening Keuangan yang wajib dilaporkan kepada otoritas perpajakan Indonesia secara daring dengan mekanisme elektronik melalui sistem penyampaian informasi nasabah asing (SIPINA) yang disediakan oleh OJK. LJK Pelapor mencakup: LJK di sektor perbankan: Bank Umum; BPR; dan BPRS LJK di sektor pasar modal: Perusahaan efek; dan Bank Kustodian; LJK di sektor perasuransian: Perusahaan asuransi jiwa dan perusahaan asuransi jiwa syariah; dan Perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi syariah; Rekening Keuangan meliputi: rekening, bagi Bank Umum, BPR, dan BPRS; sub rekening efek, bagi Perusahaan Efek dan Bank Kustodian; dan polis asuransi, bagi Perusahaan Asuransi Jiwa, Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah, Perusahaan Asuransi Umum, dan Perusahaan Asuransi Umum Syariah Laporan berisi informasi keuangan yang paling sedikit memuat: identitas pemegang Rekening Keuangan nomor Rekening Keuangan identitas LJK Pelapor saldo atau nilai Rekening Keuangan; dan penghasilan yang terkait dengan Rekening Keuangan Dalam hal tidak terdapat Rekening Keuangan yang wajib dilaporkan dalam satu tahun kalender, LJK Pelapor tetap wajib menyampaikan laporan nihil kepada otoritas perpajakan Indonesia	Bank Muamalat Indonesia wajib mengidentifikasi pembukaan rekening WNA untuk memastikan pelaporan pajak negara setempat.
16.	Peraturan Bank Indonesia no. 21/13/PBI/2019 dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur no. 21/25/PADG/2019 Rasio Loan To Value Untuk Kredit Properti, Rasio Financing To Value Untuk Pembiayaan Properti, Dan Uang Muka Untuk Kredit Atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor	Penyempurnaan kebijakan mengenai rasio LTV/FTV untuk KP/PP termasuk pengaturan rasio LTV/FTV untuk KP/PP bagi properti berwawasan lingkungan: Penyesuaian batasan maksimum rasio LTV/FTV untuk KP/PP yaitu ditambah 5% dari rasio LTV/FTV yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam ketentuan sebelumnya. Pengaturan batasan maksimum rasio LTV/FTV untuk KP/PP untuk properti berwawasan lingkungan yaitu ditambah 5% dari batasan maksimum rasio LTV/FTV yang sudah direlaksasi. Khusus untuk rasio LTV/FTV yang telah mencapai 100% maka menjadi tidak ditetapkan Bank Indonesia melainkan diserahkan kepada kebijakan bank dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian. Penyesuaian atas persyaratan rasio kredit bermasalah dan rasio pembiayaan bermasalah dari neto menjadi bruto sehingga selengkapnya persyaratan rasio menjadi: rasio kredit bermasalah atau rasio pembiayaan bermasalah secara bruto kurang dari 5% (lima persen); dan rasio KP bermasalah atau rasio PP bermasalah secara bruto kurang dari 5% (lima persen). Penyesuaian persyaratan rasio tersebut juga berdampak kepada persyaratan KP/PP untuk properti yang belum tersedia secara utuh (inden). Penyesuaian salah satu tipe rumah yaitu dari tipe “22m2 sampai dengan 70m2” menjadi tipe “>21m2 sampai dengan 70m2” Penyempurnaan kebijakan mengenai Uang Muka untuk KKB/PKB termasuk pengaturan Uang Muka untuk KKB/PKB bagi kendaraan bermotor berwawasan lingkungan: Penyesuaian batasan minimum Uang Muka untuk KKB/PKB yaitu dikurangi 5%-10% dari yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam ketentuan sebelumnya. Pengaturan batasan minimum Uang Muka untuk KKB/PKB bagi kendaraan bermotor berwawasan lingkungan yaitu dikurangi 5% dari batasan minimum Uang Muka yang sudah direlaksasi. Penyesuaian atas persyaratan rasio KKB bermasalah dan rasio PKB bermasalah dari bruto menjadi neto sehingga selengkapnya persyaratan rasio menjadi: rasio kredit bermasalah atau rasio pembiayaan bermasalah secara bruto kurang dari 5% (lima persen); dan rasio KKB bermasalah atau rasio PKB bermasalah secara neto kurang dari 5% (lima persen).	Bank Muamalat Indonesia menyesuaikan kebijakan FTV untuk pembiayaan properti dan Uang Muka untuk pembiayaan kendaraan bermotor.

No.	Regulation	Principal Regulations	Impact on the Company
15.	*Financial Services Authority Regulation No. 25 / POJK.03 / 2019 concerning Reporting of Foreign Customer Information Regarding Taxation to Partner Countries or Partner Jurisdiction*	*_LJK Reporting must submit a report containing financial information in accordance with the International Agreement for each Financial Account that is identified as a Financial Account that must be reported to the Indonesian taxation authority online by electronic mechanism through a foreign customer information delivery system (SIPINA) provided by OJK.LJK Pelapor mencakup: Financial Institution in Banking Sectors: Commercial Banks; BPR; and BPRS Financial Institution in capital market sector; Securities companies; and Custodian Bank; Financial Institution in insurance sector: Life insurance companies and sharia life insurance companies; and General insurance companies and sharia insurance companies. Financial accounts include: account, for commercial banks, rural banks and SRBs; securities sub accounts, for Securities Companies and Custodian Banks; and insurance policies, for Life Insurance Companies, Sharia Life Insurance Companies, General Insurance Companies, and Sharia General Insurance Companies Laporan berisi informasi keuangan yang paling sedikit memuat: the identity of the holder of the Financial Account Financial Account number identity of Reporting LJK balance or value of the Financial Account; and income related to financial accounts if there is no Financial Account that must be reported within one calendar year, the Reporting LJK is still required to submit a zero report to the Indonesian taxing authority*	*Bank Muamalat Indonesia is required to identify opening a non resident / foreigner account to ensure local state tax reporting.*
16.	*Bank Indonesia Regulation no. 21/13 / PBI / 2019 and Regulation of the Members of the Board of Governors no. 21/25 / PADG / 2019 Loan To Value Ratio For Property Loans, Financing To Value Ratio For Property Financing, And Advances For Credit Or Motorized Vehicle Financing*	*Improve the policy regarding LTV / FTV ratio for KP / PP, including setting the LTV / FTV ratio for KP / PP for environmentally friendly properties: Adjustment of the maximum limit of LTV / FTV ratio for KP / PP that is plus 5% of the LTV / FTV ratio set by Bank Indonesia in the previous provisions. Setting the maximum limit of LTV / FTV ratio for KP / PP for environmentally friendly properties that is plus 5% of the maximum limit of the relaxing LTV / FTV ratio. Specifically for LTV / FTV ratios that have reached 100%, it will not be determined by Bank Indonesia but will be left to the bank's policy by observing the prudential aspects. Adjustment of the requirements for the ratio of non-performing loans and the ratio of non-performing financing from net to gross so that the full ratio requirements become: the ratio of non-performing loans or gross non-financing financing ratio of less than 5% (five percent); andrasio KP bermasalah atau rasio PP bermasalah secara bruto kurang dari 5% (lima persen). Adjustment to the ratio requirements also impacts KP / PP requirements for properties that are not yet available in full (indent). Adjustment of one type of house, that is from type "22m2 to 70m2" to type "> 21m2 to 70m2" Completion of the policy regarding Advances for KKB / PKB including the regulation of Advances for KKB / PKB for environmentally sound motor vehicles: Adjustment to the minimum limit for Advance for KKB / PKB, which is reduced by 5% -10% from what was determined by Bank Indonesia in the previous provisions. Setting a minimum limit for Advances for KKB / PKB for environmentally sound motor vehicles that is reduced by 5% of the minimum limit for Down Payment that has been relaxed. Adjustment of the requirements for the problematic KKB ratio and the problematic PKB ratio from gross to net so that the full ratio requirements become: the ratio of non-performing loans or gross non-performing financing are ratio less than 5% (five percent); and the ratio of non performing vehicle ownership loan or non performing vehicle ownership financing are less than 5% (five percent).*	*Bank Muamalat Indonesia adjusted its FTV policy for property financing and Advances for motor vehicle financing.*

<table>
<tr><th>No.</th><th>Peraturan</th><th>Pokok Peraturan</th><th>Pengaruh terhadap Perseroan</th></tr>
<tr><td>17.</td><td>Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/22/PADG/2019 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah.</td><td>Terdapat perubahan perhitungan RIM syariah dengan memasukkan “Pembiayaan yang Diterima” dan perubahan Parameter Disinsentif Bawah menjadi sbb:
NPF (Gross)
<table>
<tr><th>NPF (Gross)</th><th>KPMM</th><th>Parameter Disinsentif Bawah</th></tr>
<tr><td>≥ 5%</td><td></td><td>0,00</td></tr>
<tr><td rowspan="3">< 5%</td><td>KPMM ≤ 14%</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td>14% < KPMM ≤ 19%</td><td>0,10</td></tr>
<tr><td>KPMM > 19%</td><td>0,15</td></tr>
</table></td><td>Bank Muamalat Indonesia menyesuaikan perhitungan RIM Syariah dan Bank Muamalat Indonesia menjadi tidak perlu membentuk giro RIM Syariah.</td></tr>
<tr><td>18.</td><td>Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/Pojk.03/2019 Tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Bank Umum</td><td>Penerapan strategi anti Fraud paling sedikit memuat 4 (empat) pilar yang terdiri atas pencegahan, deteksi, investigasi, pelaporan dan sanksi serta pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut.
Bank wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan strategi anti fraud Fraud
Laporan dan/atau koreksi laporan</td><td>Bank menyesuaikan kebijakan internal terkait dengan penerapan strategi anti fraud.</td></tr>
</table>

Perubahan Kebijakan Akuntansi yang Diterapkan Perusahaan pada Tahun Buku Terakhir

Standar baru, revisi dan interpretasi yang telah diterbitkan, dan yang berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2019 namun tidak berdampak material terhadap laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. ISAK No. 33 : Transaksi Valuta Asing dan Imbalan di Muka
2. ISAK No. 34 : Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan
3. PSAK No. 24 (Amandemen 2018) : Imbalan Kerja tentang Amandemen Kurtailmen atau Penyelesaian Program”.
4. PSAK 102 : Akuntansi Murabahah (Revisi 2019)
5. ISAK 101 : Pengakuan Pendapatan Murabahah Tangguh Tanpa Risiko Signifikan Terkait Kepemilikan Persediaan
6. ISAK 102 : Penurunan Nilai Piutang Murabahah

Implementasi dari standar-standar tersebut tidak menghasilkan perubahan kebijakan akuntansi dan tidak memiliki dampak terhadap jumlah yang dilaporkan di periode berjalan atau tahun sebelumnya.

Berikut ini adalah ikhtisar beberapa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) - IAI yang relevan untuk Bank namun belum berlaku efektif untuk laporan keuangan 31 Desember 2019:

1. PSAK 72 : Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan
2. PSAK 73 : Sewa

Standar tersebut belum berlaku efektif pada tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2019. Pada saat tanggal penerbitan laporan keuangan ini, manajemen sedang mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru dan revisi tersebut serta pengaruhnya pada laporan keuangan.

<table>
<tr><th>No.</th><th>Regulation</th><th>Principal Regulations</th><th>Impact on the Company</th></tr>
<tr><td>17.</td><td>Regulation of Board of Governor Members Number 21/22 / PADG / 2019 concerning Macroprudential Intermediation Ratio and Macroprudential Liquidity Buffer for Conventional Commercial Banks, Sharia Commercial Banks, and Sharia Business Units.</td><td>There is a change in Sharia RIM calculations by entering "Financing Received" and changing the Lower Disincentive Parameter to the following:
<table>
<tr><th>NPF (Gross)</th><th>KPMM</th><th>Lower Disincentive Parameters</th></tr>
<tr><td>≥ 5%</td><td>-</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td rowspan="3">< 5%</td><td>KPMM ≤ 14%</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td>14% < KPMM ≤ 19%</td><td>0,10</td></tr>
<tr><td>KPMM > 19%</td><td>0,15</td></tr>
</table></td><td>Bank Muamalat Indonesia adjusts Sharia RIM calculations and BBank Muamalat Indonesia does not need to form a Sharia RIM demand deposit.</td></tr>
<tr><td>18.</td><td>Financial Services Authority Regulation Number 39 / Pojk.03 / 2019 Regarding the Implementation of Anti-Fraud Strategies for Commercial Banks</td><td>The implementation of anti-fraud strategy at least contains 4 (four) pillars consisting of prevention, detection, investigation, reporting and sanctions as well as monitoring, evaluation, and follow-up.
Banks are required to submit to the Financial Services Authority the anti fraud fraud strategy Report and / or report correction</td><td>The Bank adjusts internal policies related to the implementation of anti-fraud strategies.</td></tr>
</table>

Changes in Accounting Policies that the Company Applied in the Last Financial Year

The latest standards, revisions and interpretations that become effective on or after January 1, 2019, yet has no material implication for the Bank's report, are as follows:

1. *IFAS 33 : Foreign Currency Transaction and advance Consideration*
2. *IFAS 34 : Uncertainty Over Income Tax Treatments*
3. *Amendment to SFAS 24 : (amendment) Curtailment of Settlement*
4. *SFAS 102 : Accounting for Murabahah (Revised 2019)*
5. *IFAS 101 : Recognition of Deferred Murabahah Revenue Without Significant Risk With Regard to Inventory Ownership*
6. *IFAS 102 : Impairment of Murabahah Receivables*

Implementation of these standards does not change the accounting policies and has no effect on the amounts reported in the current period or the previous year

The following items summarize several Statements of Financial Accounting Standards (SFAS) and the Interpretation of Financial Accounting Standards (IFAS) which were issued by the Financial Accounting Standards Board (FASB) - IAI and are relevant to the Bank but have not come into effect on financial statements as of December 31, 2019:

1. *SFAS 72 : Revenue from Contract with Customer*
2. *SFAS 73 : Rent*

The standards shall be effective only for fiscal year beginning on or after January 1, 2019. As of date of issuance of these financial statements, the management is studying the possible impacts of the adoption of the new standards and those revisions as well as its effects on the financial statements.

Informasi Kelangsungan Usaha
Business Continuity Information

Program Keberlanjutan Usaha Perbankan (Sustainable Banking) bagi Bank Muamalat Indonesia merupakan suatu komitmen berkelanjutan untuk bertindak etis dalam kerangka tanggung jawab terhadap nasabah, pegawai, pemegang saham, lingkungan, serta memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dari komunitas setempat ataupun masyarakat luas. Adapun pelaksanaan program keberlanjutan Bank Muamalat Indonesia antara lain mengacu pada POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten dan perusahaan publik dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 mengenai tanggung jawab sosial perusahaan khususnya yang berbadan hukum perseroan terbatas. Dalam Undang-Undang ini diatur mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan yang bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi secara berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat dan masyarakat umumnya.

The Banking Business Sustainability Program (Sustainable Banking) for Bank Muamalat Indonesia is an ongoing commitment to act ethically within the framework of responsibilities to customers, employees, shareholders, the environment, and to contribute to the economic development of the local community or the wider community. The implementation of Bank Muamalat Indonesia's sustainability program, among others, refers to POJK No.51/POJK.03/2017 concerning the application of sustainable finance to financial service institutions, issuers and public companies and Law No. 40 of 2007 concerning corporate social responsibility, especially those incorporated as limited liability companies. This law regulates social and environmental responsibility that aims to achieve sustainable economic development in order to improve the quality of life and the environment that benefits both the company itself, the local community and society in general.

Sejalan dengan visi jangka menengah Bank Muamalat Indonesia yaitu Menjadi Bank Syariah Terbaik dan Termasuk dalam 10 besar Bank di Indonesia dengan Eksistensi yang diakui Tingkat Regional, Bank senantiasa menetapkan arah pertumbuhan bisnis yang koheren dengan misi yang dimiliki Bank, yakni membangun lembaga keuangan syariah yang unggul dan berkesinambungan dengan penekanan pada semangat kewirausahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian, keunggulan sumber daya manusia yang Islami, modern dan profesional serta orientasi investasi yang inovatif, untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan. Berlandaskan visi dan misi tersebut, Bank Muamalat Indonesia sadar bahwa sangat penting untuk mengintegrasikan seluruh kebijakan dan aksi perusahaan dalam mendukung pola pembiayaan yang berkelanjutan.

In line with the mid-term vision of Bank Muamalat Indonesia, which is to become the Best Sharia Bank and Included in the Top 10 Banks in Indonesia with a Regional Level recognized existence, the Bank has always determined the direction of business growth that is coherent with the mission of the Bank, namely building superior Islamic financial institutions and sustainability with an emphasis on an entrepreneurial spirit based on the principle of prudence, excellently Islamic, modern and professional human resources and innovative investment orientation, to maximize value to all stakeholders. Based on this vision and mission, Bank Muamalat Indonesia realizes that it is very important to integrate all company policies and actions in supporting sustainable financing patterns.

Selanjutnya sebagai wujud dukungan Bank Muamalat Indonesia terhadap pemeliharaan kelestarian lingkungan hidup, Bank menyadari bahwa pembiayaan yang diberikan kepada nasabah memiliki dampak langsung kepada lingkungan maupun sosial ekonomi dimanapun Bank melakukan aktivitas usahanya. Oleh karena itu, Bank Muamalat Indonesia memiliki kebijakan untuk tidak membiayai nasabah yang secara nyata membahayakan lingkungan.

Furthermore, as a form of support of Bank Muamalat Indonesia towards maintaining environmental sustainability, the Bank realizes that financing provided to customers has a direct impact to the environment and social economy everywhere the Bank conducts its business activities. Therefore, Bank Muamalat Indonesia has a policy not to fund actual customers endanger the environment.

Upaya tersebut telah diterapkan pada industri kelapa sawit sebagai salah satu sektor yang memiliki tingkat risiko lingkungan yang tergolong tinggi. Terkait hal ini, Bank Muamalat Indonesia memiliki beberapa kebijakan dalam hal pembiayaan yang diberikan kepada nasabah-nasabah dengan kriteria tertentu guna bersama-sama dengan nasabah dan grup nasabah untuk melakukan aktivitas dan produksi kelapa sawit yang ramah lingkungan secara berkelanjutan.

Those efforts have been implemented on the palm industry as one of the sectors that has relatively high level of environmental risk. In regards with this, Bank Muamalat Indonesia has several policies in financing provided to the customers with certain criteria. Along with other customers and customer groups, Bank Muamalat Indonesia carries out activities and production of palms which is sustainable and environmentally friendly. Bank Muamalat Indonesia prioritizes

Bank Muamalat Indonesia mengutamakan pembiayaan nasabah-nasabah korporasi yang bergerak di bidang kelapa sawit yang telah memiliki sertifikat atau menjadi member Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) dan/atau Roundtable Sustainable Palm Oil (RSPO).

financing to corporate customers that are engaged in palm oil industry and are certified or members of Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) and/or Roundtable Sustainable Palm Oil (RSPO).

Selain itu bank juga telah menyusun Visi dan Misi untuk bisa menunjang rencana keberlanjutan bisnis bank. Program-program baik jangka pendek, menengah dan jangka panjang telah disusun guna mencapai cita-cita yang telah bank canangkan.

In addition, the Bank has compiled a Vision and Mission to be able to support the Bank's business sustainability plan. Short, medium, and long term programs have been prepared in order to achieve the ideals that the Bank has planned.



05.

Fungsi Penunjang Bisnis

Business Support Functions



Sumber Daya Manusia
Human Capital



Bank Muamalat Indonesia sepenuhnya menyadari bahwa karyawan merupakan aset penting dalam menjaga keberlangsungan usaha Bank. Berlandaskan pada hal itu, Bank menjadikan pengelolaan karyawan sebagai salah satu fokus utama untuk menghadapi persaingan bisnis. Pengelolaan dilakukan secara terpadu, sesuai dengan perencanaan korporasi tahunan dan jangka panjang. Dimulai dengan menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan harmonis guna memupuk solidaritas dan loyalitas karyawan sehingga dapat memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan usaha Bank, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Bank Muamalat Indonesia is fully aware that employees are the key asset to maintaining the Bank's business continuity. Hence, the Bank develops people management as one of the main focuses to get involved in business competition. The management is carried out in an integrated manner based on annual and long-term corporation plan, starting with establishing comfortable and harmonious working environment in order to bring up solidarity and loyalty among employees. This way, it could positively impactful to the Bank's short-and-long-term business growth.

Strategi dan program pengembangan karyawan Bank Muamalat Indonesia diselaraskan dengan strategi Bank guna meningkatkan daya saing dan akselerasi kinerja Bank. Untuk itu, salah satu fokus pengelolaan dan pengembangan karyawan adalah untuk terus meningkatkan produktivitas dan *Engagement* karyawan terhadap perusahaan. Fokus tesebut diterjemahkan melalui pelaksanaan program-program yang berkaitan dengan penilaian kinerja karyawan yang lebih terstruktur, optimalisasi efektivitas biaya tenaga kerja, peningkatan skema *reward dan recognition* yang lebih terarah, peningkatan infrastruktur HC dan menjadikan nilai-nilai perusahaan sebagai budaya perusahaan.

People development strategy and program of Bank Muamalat Indonesia is aligned with the Bank's strategy to improve competitiveness and performance acceleration. Therefore, one of the focuses of employee management and development is to keep enhancing productivity and employee engagement in the Company. The focus is translated through programs related to more structured employee performance appraisal, optimizing the effectiveness of staff costs, enhancing more directed reward and recognition schemes, improving HC infrastructure and realizing the corporate values as a corporate culture.

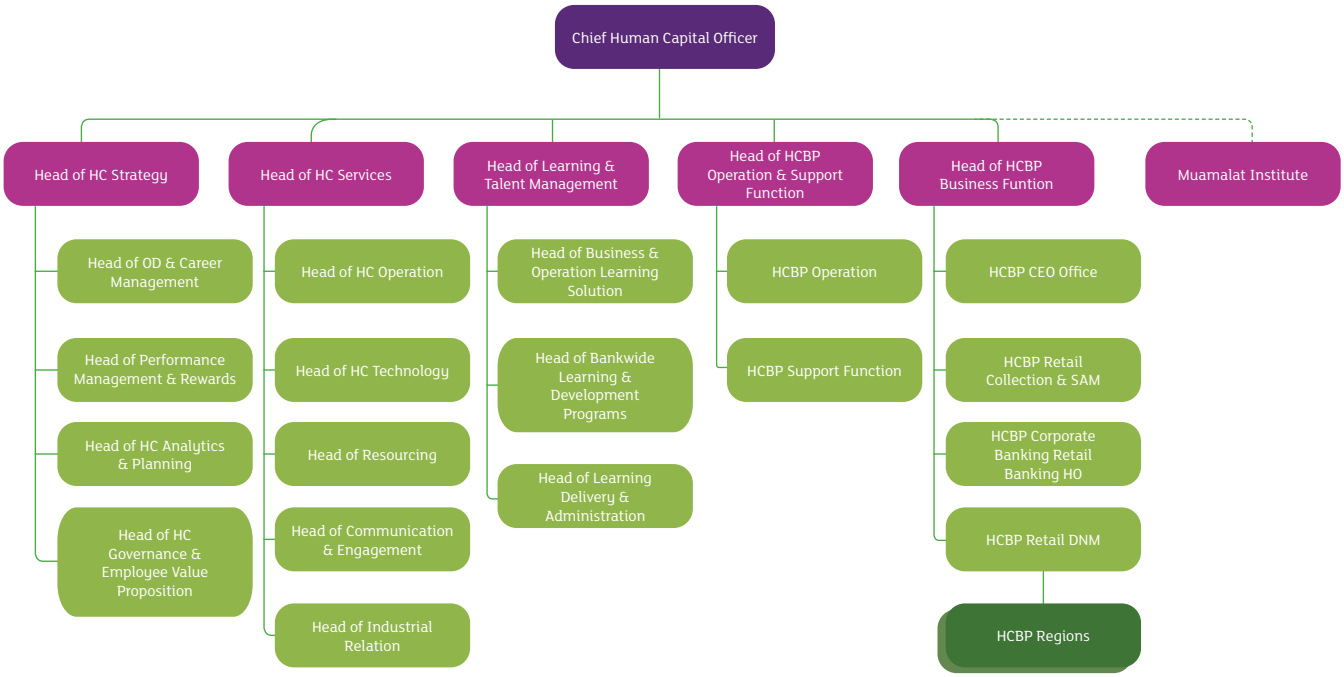
Direktorat Human Capital

Wujud nyata komitmen Bank Muamalat Indonesia terhadap pengelolaan dan pengembangan karyawan adalah dengan dibentuknya Direktorat khusus Human Capital sejak tahun 2016. Direktorat yang dipimpin oleh seorang Chief Human Capital Officer inilah semua hal yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengembangan karyawan dilakukan.

Human Capital Directorate

Bank Muamalat Indonesia's commitment towards people management and development is manifested with the establishment of Human Capital Directorate since 2016. Any matter related to the people management and development is carried out at a directorate that is led by Chief Human Capital Officer.

Struktur Organisasi Direktorat Human Capital
Organization Structure of Human Capital Directorate



Direktorat Human Capital menjangkau seluruh fungsi pengelolaan dan pengembangan karyawan. Mulai dari perencanaan pemenuhan karyawan hingga tahapan pensiun. Terdapat lima fungsi utama dan satu *subsidiary* berupa Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Perbankan Syariah (LPPBS).

Human Capital Directorate covers all people management and development functions, starting from employee fulfillment plan to retirement phase. There are five main functions and one subsidiary, Sharia Banking Development and Education Institution (LPPBS).

Human Capital Strategy memiliki peran dalam menerjemahkan strategi Bank kedalam prioritas SDM melalui pengembangan dan penerapan strategi, kerangka kerja, kebijakan dan prosedur SDM selaras dengan rencana strategis Bank.

Human Capital Strategy takes a role in translating the Bank's strategy into HC priority through strategy development and implementation, framework, policy and HC procedure aligned with the Bank's strategic plans.

Human Capital Services adalah suatu fungsi yang berperan dalam mengelola seluruh aktivitas pemberian layanan transaksional Human Capital kepada karyawan dan pihak-pihak terkait lainnya yang mencakup pembayaran kompensasi dan benefit karyawan, pengelolaan sistem dan basis data Human Capital, rekrutmen karyawan, pengelolaan hubungan industrial serta pengelolaan

Human Capital Services constitutes a function that manages all Human Capital transactional service delivery activities to employees and other related parties. This includes compensation disbursement and employees' benefit, Human Capital system & database management, recruitment, industrial relations management, employee communication & engagement management so that all

komunikasi dan *engagement* karyawan agar seluruh layanan transaksional Human Capital dapat dijalankan dengan efektif, efisien serta sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang berlaku.

transactional services of Human Capital could be proceeded effectively and efficiently in accordance with applicable policies and provisions.

Learning & Talent Management adalah suatu fungsi yang berperan dalam menyusun strategi yang efektif dan efisien serta mengelola seluruh aktivitas dalam pelaksanaan program pembelajaran dan pembinaan talenta di Bank Muamalat Indonesia untuk menciptakan kualitas program pembelajaran dan pembinaan talenta sesuai dengan strategi pengembangan SDM guna mendukung peningkatan kualitas SDM dalam mendukung strategi bisnis Bank yang sudah ditetapkan.

Learning & Talent Management is a function that takes a role in developing effective and efficient strategies as well as managing all activities in the implementation of learning and talent development programs at Bank Muamalat Indonesia. The function is to create quality learning programs and talent development in line with HC development strategies to support the improvement of HC quality in supporting the Bank's established business strategy.

HCBP Business Function adalah suatu fungsi yang berperan dalam memberikan rekomendasi, konsultasi, solusi-solusi strategis dan implementatif tekait dengan sumber daya manusia serta organisasi kepada seluruh *stakeholders* (para Direktur, Pejabat Eksekutif dan seluruh line manager) di Direktorat Retail Banking, Corporate Banking dan CEO Office, termasuk membuat *customization* produk dan program-program Sumber Daya Manusia yang sesuai dengan kebutuhan organisasi di seluruh Direktorat tersebut, agar tercipta ketersediaan organisasi dan sumber daya manusia yang *capable* guna mendukung pencapaian dan produktivitas organisasi.

HCBP Business Function is a function that takes a role in providing recommendations, consultation strategic and implementative solutions related to human resources and organizations to all stakeholders (Directors, Executive Officers and all line managers) in the Directorate of Retail Banking, Corporate Banking and CEO Office, including Human Resources' costumization products and programs that are aligned with the needs of the organization across the Directorate, so as to create the availability of the organization and capable human resources to support the achievement and productivity of the organization.

HCBP Operation and Support Function adalah suatu fungsi yang berperan dalam memberikan rekomendasi, konsultasi dan solusi-solusi strategis dan implementatif tekait dengan sumber daya manusia serta organisasi kepada seluruh *stakeholders* (para Direktur, Pejabat Eksekutif dan seluruh line manager) di Direktorat Operation, Compliance, Risk dan Finance, termasuk membuat *customization* produk dan program-program Sumber Daya Manusia yang sesuai dengan kebutuhan organisasi di seluruh Direktorat Operation, Compliance, Risk dan Finance, agar tercipta ketersediaan organisasi dan Sumber Daya Manusia yang *capable* guna mendukung pencapaian dan produktivitas organisasi.

HCBP Operation and Support Function plays a role in providing recommendations, consultation, as well as strategic and implementable solutions related to human capital and the organization to all stakeholders (Directors, Executive Officers and all line managers) in the Directorate of Operations, Compliance, Risk and Finance, including Human Resources' costumization products and programs that are aligned with the needs of the organization in the entire Directorate of Operations, Compliance, Risk and Finance, to create the availability of capable organizations and Human Resources to support the organization's achievement and productivity.

Muamalat Institute adalah suatu institusi dibawah supervisi Direktorat Human Capital Bank Muamalat Indonesia yang berperan dalam mewujudkan lembaga edukasi ekonomi dan keuangan syariah terbaik di tanah air dengan fokus pada fungsi pelatihan dan konsultasi.

Muamalat Institute runs under the supervision of Human Capital Directorate of Bank Muamalat Indonesia which that a role in realizing the Sharia Islamic economic and financial education institutions in the country with a focus on training and consulting functions.

Pada tahun 2019, Direktorat Human Capital didukung oleh 45 karyawan yang tersebar di kantor pusat dan kantor wilayah.

In 2019, Human Capital Directorate was supported by 45 employees spread across the head office and region offices.

Target dan Rencana Direktorat Human Capital

Target and Plan of Human Capital Directorate

Tahun 2019 merupakan tahun yang sangat penting bagi Bank Muamalat Indonesia. Di tengah kondisi ekonomi dan industri perbankan, khususnya perbankan syariah yang semakin kompetitif, peningkatan kualitas karyawan menjadi sangat penting agar Bank dapat tetap memberikan pelayanan terbaik bagi nasabah sekaligus meningkatkan daya saing Bank.

2019 is a very important year for Bank Muamalat Indonesia. In the midst of economic conditions and the banking industry, especially in the increasingly competitive sharia banking industry, improving the quality of employees is vital for the Bank to continuously provide the best service for customers while increasing the competitiveness of the Bank.

Untuk itu, Direktorat HC telah menyusun sejumlah target dan rencana yang tertuang dalam rencana kerja Direktorat HC.

Target atau rencana kerja Learning & Talent Management pada tahun 2019 adalah:

1. Memberikan solusi Pembelajaran yang tepat dan terintegrasi untuk Peningkatan Produktivitas dan Peningkatan Kinerja di *front office, middle office*, dan *back office*.
2. Membangun akselerasi, memastikan konversi, dan mengatur *Fast Track Program* untuk mendukung optimalisasi organisasi.
3. Meningkatkan kemampuan *talent* yang ada dengan manajemen talenta yang baik dan kepemimpinan untuk mendukung kualifikasi tinggi Perusahaan.
4. Membuat anggaran yang efektif dan pengendalian risiko untuk mendukung efisiensi dan kesadaran risiko Bank di era digital.
5. Membangun Transformasi Human Capital untuk menciptakan Sumber Daya Manusia yang unggul.

Sebagai upaya untuk mencapai visi dan misi Bank Muamalat Indonesia sekaligus target bisnis di tahun 2019, Direktorat HC fokus pada hal-hal sebagai berikut:

1. Peningkatan Produktivitas dan Kinerja Karyawan, melalui implementasi *career management system*, pelaksanaan sertifikasi internal, implementasi *team coaching* secara terstruktur dan melaksanakan program *Performance Improvement Plan* secara *Bank Wide*.
2. Organisasi yang Efektif, melalui optimalisasi proses kerja masing-masing unit kerja, rasio FTE yang lebih seimbang serta perampingan dan optimalisasi jumlah FTE untuk posisi Layer 1 dan Layer 2.
3. Peningkatan bakat dan kemampuan untuk memimpin, melalui peningkatan jumlah promosi dari internal, penentuan HIPO *(High Performance) Successors* untuk posisi-posisi yang kritikal dan peningkatan kemampuan Karyawan untuk memiliki jiwa sebagai pemimpin.
4. Kontrol terhadap *Staff Cost*, melalui peningkatan rasio *revenue per staff cost* dan peningkatan rasio *Asset per staff cost*.

Manajemen Human Capital

Bank Muamalat Indonesia mengimplementasikan kerangka pengembangan karyawan secara menyeluruh, mulai dari rekrutmen karyawan, pengembangan karyawan, pengelolaan kinerja karyawan, hingga persiapan pensiun. Implementasi proses tersebut sebagai wujud nyata dari Nilai-Nilai Utama Bank Muamalat Indonesia, yaitu Islami – Modern – Profesional (IDEAL).

Bank Muamalat Indonesia selalu menempatkan karyawan sebagai mitra strategis. Paradigma ini terbentuk dari adanya pemahaman bahwa karyawan merupakan unsur penggerak terpenting dari seluruh

Hence, the HC Directorate has prepared a number of targets and plans as outlined in the HC Directorate's work plan.

Learning & Talent Management targets or work plans in 2019 are:

1. *Providing appropriate and integrated Learning solutions for Increasing Productivity and Improving Performance in the front office, middle office, and back office.*
2. *Boosting acceleration, ensuring conversions, and managing the Fast Track Program to support organizational optimization.*
3. *Enhancing existing talent capabilities with good talent management and leadership to support the Company's high qualifications.*
4. *Creating an effective budget and risk control to support the efficiency and risk awareness of the Bank in the digital era.*
5. *Building Human Capital Transformation to create preferable Human Resources.*

In an effort to achieve the vision and mission of Bank Muamalat Indonesia as well as business targets in 2019, the HC Directorate focuses on the following matters:

1. *Improving Employee Productivity and Performance, through implementation of career management system, internal certification, structured team coaching and Performance Improvement Plan program on a Bank-Wide basis.*
2. *Effective Organization, through optimizing the work processes of each work unit, a more balanced FTE ratio also simplification and optimization in the number of FTE for Layer 1 and Layer 2 positions.*
3. *Increased talent and ability to lead, through increasing the number of promotions from within, determining HIPO (High Performance) Successors for critical positions and increasing the ability of employees to have a soul as a leader.*
4. *Control of Staff Cost, through increasing revenue ratio per staff cost and increasing Asset ratio per staff cost.*

Human Capital Management

Bank Muamalat Indonesia implements comprehensive people development frame, from recruitment, employee development, employee performance management, and retirement preparation. The process implementation is a manifestation of the Core Values of Bank Muamalat Indonesia, namely Islami – Modern – Professional (IDEAL).

Bank Muamalat Indonesia always positions its employees as strategic partners. This paradigm is resulted from the understanding that employees are the most important driving element of all business

operasional bisnis yang dilaksanakan oleh Bank. Berbagai pencapaian dan pertumbuhan kinerja yang diperoleh hingga saat ini merupakan wujud nyata dari kerja keras dan dedikasi seluruh karyawan Bank.

operations conducted by the Bank. All achievements and performance growth obtained to date is a manifestation of all hard work and dedication of all employees of the Bank.

Perencanaan Human Capital

Karakteristik organisasi modern adalah ramping dan optimal, sehingga organisasi dapat bergerak secara efektif dan efisien. Sejalan dengan hal itu, perencanaan HC tahun 2019 dilaksanakan dengan cermat dan terukur. Penambahan karyawan dilakukan dengan pertimbangan yang sangat matang. Pertimbangan penambahan karyawan dilandasi oleh evaluasi produktivitas karyawan di semua lini.

Selain itu, Bank juga mempertimbangkan semakin banyaknya jenis pekerjaan yang tergantikan oleh teknologi dan tidak membutuhkan Sumber Daya Manusia dalam jumlah besar.

Human Capital Plan

Characteristics of modern organization are lean and optimal, so that an organization can move effectively and efficiently. Therefore, HC plan in 2019 was executed thoroughly and measurably. The addition of employees is done with a very mature consideration. The consideration of adding employees is based on evaluating employee productivity on all fronts.

In addition, the Bank considers more types of works that cannot be replaced by technology and requires Human Resources in large quantities.

Rekrutmen

Rekrutmen adalah salah satu proses penting dalam mengidentifikasi, mencari dan menarik calon karyawan untuk memenuhi kebutuhan organisasi yang telah ditetapkan melalui proses perencanaan HC. Dalam rangka mendukung pengembangan bisnis dan peningkatan kualitas layanan, BMI membutuhkan karyawan berkualitas dan memiliki kompetensi yang baik.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Bank Muamalat Indonesia melakukan proses rekrutmen untuk pemenuhan karyawan di setiap level, baik melalui program *fresh graduates* maupun pemenuhan *professional hire*.

Recruitment

Recruitment is one of the important processes in identifying, finding and attracting prospective employees to meet organizational needs that have been determined through the HC planning process. In order to support business development and improve service quality, BMI requires qualified employees and good competence.

To meet such needs, Bank Muamalat Indonesia conducts recruitment process to meet employees at every level, both through the fresh graduate program and the fulfilment of professional hire.

Job Level	FTE
Board of Management	1
Head of L1	3
Head of L2	12
Region Commercial Head	1
Head of L3	1
Branch Manager	4
Team Leader	2
Sub Branch Manager	14
Sub Branch Operation Service Supervisor	3
Other Officer	118
Clerical	137
Grand Total	296

Role	FTE
Non Grade	1
Senior Management	6
Middle Management/ Professional	18
Junior Management/ Professional	131
Staff	140
Grand Total	296

Generation	FTE
Baby Boomers	1
Generation X	25
Generation Y (Millennials)	238
Generation Z (Millennials)	32
Grand Total	296

Gender	FTE
Male	132
Female	164
Grand Total	296

Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja cukup penting untuk melihat sejauh mana keberhasilan dari program pengembangan SDM yang telah dilakukan Bank Muamalat Indonesia. Penilaian kinerja dilaksanakan berdasarkan Key Performance Indicator (KPI) yang telah ditentukan di awal tahun yang dilaksanakan di pertengahan tahun dan akhir tahun melalui Human Capital Information System (MHP – Muamalat Human Power). Dimana dalam sistem tersebut, penilaian kinerja dilaksanakan secara berjenjang mulai dari penilaian mandiri *(self-assessment)* oleh karyawan dan evaluasi atasan langsung, yang kemudian dikaji dan evaluasi oleh pimpinan unit kerja yang lebih tinggi.

Performance Assessment

Performance Assessment is quite important for the extent of the success of the human capital development carried out by Bank Muamalat Indonesia. The performance assessment is carried out based on Key Performance Indicator (KPI) that has been stipulated at the beginning of the year and conducted in the mid-year and end of the year through Human Capital Information System (MHP – Muamalat Human Power). In the system, the performance assessment is carried out in stages, from self-assessment by employees and direct evaluation by supervisors, which are then reviewed and evaluated by higher-level work unit leaders.

Pengembangan Karier

Pengembangan karier merupakan bagian penting yang menjadi perhatian Direktorat Human Capital. Pengembangan karier dapat digunakan sebagai pendekatan formal dalam upaya peningkatan kepuasan kerja karyawan. Selain itu, melalui pengelolaan karier dapat memastikan ketersediaan karyawan dengan kualifikasi dan pengalaman yang tepat. Perencanaan dan pengembangan karier yang jelas akan membantu karyawan dalam memahami peluang karier dan menentukan jalur kariernya.

Tujuan pengembangan karier sebagai berikut:

1. Membantu pencapaian tujuan individu dan Bank sebagai hubungan timbal balik yang bermanfaat bagi kesejahteraan karyawan dan tujuan perusahaan.
2. Menunjukkan hubungan kesejahteraan karyawan, dimana peningkatan kesejahteraan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan loyalitas.
3. Membantu karyawan memahami potensi dan keahliannya, sehingga mampu menciptakan iklim kerja positif.
4. Mengurangi *turnover*, dimana rendahnya *turnover* dapat menghemat biaya tenaga kerja, khususnya biaya untuk mendidik karyawan baru.

Career Development

Career development is an important part that has been a concern for Human Capital Directorate. Career development can be used as a formal approach in an effort to improve employee work favorable performance. In addition, it also could assure the availability of with appropriate qualification and experience. Definite career plan and development will help employees in understanding career opportunities and making a decision about their career path.

Career development goals are as follows:

1. *Helping the achievement of individual goals and the Bank as a reciprocal relationship that is beneficial to employee welfare and company goals.*
2. *Demonstrating the relationship of employee welfare, where increasing welfare is expected to increase productivity and loyalty.*
3. *Helping employees understand their potential and expertise, so as to create a positive work climate.*
4. *Reducing turnover, where low turnover can save staff costs, especially the cost of educating new employees.*

Serikat Pekerja dan Hubungan Industrial

Dalam rangka menciptakan hubungan kerja yang harmonis, selaras dan berkeadilan guna meningkatkan produktivitas dan *engagement* HC, Bank berupaya untuk melakukan optimalisasi dalam pengelolaan HC dengan tetap memperhatikan kepentingan karyawan. Dalam mewujudkan hubungan kerja tersebut, Bank menjamin hak karyawan untuk berserikat dan berkumpul.

Saat ini terdapat Serikat Pekerja di lingkungan Bank Muamalat Indonesia bernama Syarikat Pejuang Muamalat (SP Muamalat) yang telah tercatat pada Suku Dinas Tenaga Kerja Kotamadya Jakarta Selatan dengan nomor bukti pencatatan No. 804/SP/JS/II/2018 tanggal 28 Februari 2018.

Workers Union and Industrial Relations

To create work relation that is harmonious and fair as to increase HC productivity and engagement, the Bank seeks to optimize HC management by taking into account the interest of employees. In realizing such working relationship, the Bank guarantees its employees to unite and gather.

At present, Bank Muamalat has Workers Union called Syariat Pejuang Muamalat (SP Muamalat) that has been listed in South Jakarta Municipal Manpower Office with the registration No. 804/SP/JS/III/2018 dated February 28, 2018.

Hubungan industrial di Bank Muamalat Indonesia selama ini telah dilaksanakan berdasarkan pada prinsip kesetaraan, kewajaran, rasa keadilan serta nilai-nilai kemanusiaan. Prinsip-prinsip tersebut diwujudkan dalam suatu Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau yang disebut sebagai Ittifaq Muamalat. Dokumen Ittifaq Muamalat disepakati bersama antara manajemen dan pihak karyawan yang diwakili oleh Serikat Pejuang Muamalat (Serikat Pekerja).

Industrial relation in Bank Muamalat Indonesia has been so far based on principles of equality, fairness, sense of justice, and human values. These principles are actualized in Collective Labour Agreement (PKB) or called Ittifaq Muamalat. The document of Ittifaq Muamalat has been collectively agreed upon the management and the employees represented by Serikat Pejuang Muamalat (SPM).

Penyelesaian kasus-kasus kekaryawanan dilakukan melalui proses yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dengan mengutamakan penyelesaian secara bipartit/internal perusahaan tanpa melibatkan pihak ketiga. Di tahun 2019 tidak ada kasus ketenagakerjaan yang sampai disidangkan di Pengadilan Hubungan Industrial.

The settlement of employment cases is conducted through process that is in line with the statutory provisions by prioritizing the settlement by bipartite/internal company without involving third parties. In 2019, no employment cases were to be heard in the Industrial Relations Court.

Keterlibatan Karyawan

Pada tahun 2019, Direktorat HC merilis sejumlah produk baru dan mengimplementasikan program-program sebagai upaya peningkatan *engagement* level Karyawan yang selaras dengan hasil *employee engagement survey* sebelumnya. Diantaranya adalah penerapan career management system, program pelatihan maupun kegiatan yang mendukung pengembangan karier dan manajemen talenta, digitalisasi media pembelajaran, keterbukaan informasi perihal lowongan kerja untuk karyawan internal, transparansi sistem *reward* melalui Total Reward Statement yang dapat diakses secara personal oleh seluruh karyawan serta penyelenggaraan program rekognisi bagi karyawan terbaik.

Employee Engagement

In 2019, the Human Capital Directorate released a number of new products and implemented programs in an effort to increase employee engagement levels in line with the results of previous employee engagement surveys. Among them are the implementation of a career management system, training programs and activities that support career development and talent management, digitalization of learning media, disclosure of information about vacancies for internal employees, reward system transparency through a Total Reward Statement that can be accessed personally by all employees and the implementation of the program recognition for the best employees.

Program Pensiun

Sebagai bentuk apresiasi dan kepedulian terhadap karyawan yang akan memasuki masa pensiun, mulai tahun 2017 Bank Muamalat Indonesia menyelenggarakan pelatihan berwirausaha serta Program Masa Persiapan Purna Karya dengan tujuan untuk meningkatkan kesiapan mental karyawan dalam menghadapi perubahan yang terjadi pada saat pensiun serta memberikan motivasi untuk tetap optimis, memiliki paradigma yang positif sebagai pensiunan serta dapat mengelola waktu yang tersedia untuk tetap hidup dengan semangat.

Pension Program

As a form of appreciation and concern for employees who are about to retire, starting in 2017, Bank Muamalat Indonesia organizes entrepreneurship training and Pre-retirement Program with the aim of increasing employee mental readiness in facing changes that occur at retirement and providing motivation to remain optimistic, having a paradigm that is positive as a retiree and can manage the time available to stay alive with enthusiasm.

Di tahun 2019, Bank Muamalat Indonesia kembali menerapkan Program Masa Persiapan Purna Karya yang merupakan program yang dapat dimanfaatkan karyawan untuk mengambil masa persiapan sebelum masa pensiun sebenarnya yaitu tidak diwajibkan untuk berada di lingkungan kerja namun tetap mendapatkan upah dan benefit sebagai karyawan. Program ini diberikan untuk jangka waktu minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 6 (enam) bulan sebelum usia pensiun.

In 2019, Bank Muamalat Indonesia re-implemented the Pre-retirement Program, which is a program that can be utilized by employees to take the preparation period before retirement. Through this program, employees are not required to be in the work environment but still receive wages and benefits as an employee. This program is provided for a minimum period of 3 (three) months and a maximum of 6 (six) months before retirement age.

Pembentukan Lingkungan Kerja yang Kondusif

Di era digital, upaya-upaya komunikasi kepada karyawan dapat dilakukan dengan lebih mudah dan cepat. Jalur-jalur komunikasi

Establishment of Conducive Work Environment

In the digital era, communication efforts to employees can be made more easily and quickly. Lines of communication have been opened

telah dibuka seluas-luasnya, yang memungkinkan karyawan untuk mendapatkan informasi, instruksi, berita secara cepat dan lengkap. Jalur-jalur komunikasi seperti WA group yang telah berjalan sejak tahun-tahun sebelumnya tetap dipertahankan, namun kemudian ditambah pula dengan jalur-jalur komunikasi lain yang diharapkan mampu meningkatkan kecepatan informasi dan keterikatan karyawan terhadap Perseroan.

as wide as possible, thus allowing employees to get information, instructions, and news quickly and completely. Communication channel, such as WhatsApp (WA) group that has been running since previous years is still maintained, but later also added with other communication channels that are expected to increase the speed of information and employee engagement with the Company.

Fasilitas *email blast* yang mengirimkan informasi-informasi terkini kepada seluruh karyawan dapat diakses oleh karyawan melalui fasilitas email kantor. Muamalat Human Power (MHP), juga merupakan salah satu jalur komunikasi, dimana pengumuman-pengumuman penting, dan peraturan-peraturan terbaru dapat dengan mudah diakses disalah satu menunya yang saat ini juga sudah tersedia versi *mobile*-nya yang dapat diakses dari handphone karyawan. Bagi karyawan di Muamalat Tower disediakan pula *M Channel* pada Televisi di setiap ruang *breakout,* yang memungkinkan karyawan mendapatkan informasi terkait program, produk dan pengetahuan-pengetahuan terbaru yang berkaitan dengan pengembangan karyawan.

Email blast facility that sends the latest information to all employees can be accessed by employees through the office email facility. Muamalat Human Power (MHP) is also one of the lines of communication, where important announcements and the latest regulations can be easily accessed in one of the menus. MHP is now available on a mobile version that can be accessed from employees' mobile phones. Employees at Muamalat Tower also provide M Channel on Television in each breakout room, which allows employees to get information related to the latest programs, products and knowledge related to employee development.

Buletin digital yang menampilkan berita-berita dari unit-unit tertentu juga diterbitkan secara reguler, seperti misalnya *"HC news"* yang menampilkan berita terkait acara-acara karyawan dan pengumuman-pengumuman terkait dengan aktivitas atau produk HC, *"Operation Splash"* yang menampilkan berita dan pengumuman terkait operasional perbankan, *"Fraud Awareness"* yang menampilkan peringatan-peringatan untuk karyawan agar menghindari hal-hal yang dapat menjadi kasus pelanggaran, dan sebagainya.

Digital bulletins that feature news from certain units are also published regularly, such as "HC news" which publishes news related to employee events and announcements related to HC activities or products, "Operation Splash" which lists news and announcements related to banking operations, "Fraud Awareness" which features reminders for employees to avoid things that could be a case of violation, and so on.

Konten berita merupakan hal yang menjadi perhatian manajemen. Hal-hal yang dirasa akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang suatu program, konten-konten yang memuat *reminder* dan ajakan untuk menjadi pribadi yang lebih baik sesuai nilai-nilai perusahaan adalah konten yang menjadi prioritas utama untuk diinformasikan kepada karyawan. Konten berita selalu dikemas dalam bentuk yang menarik dan mudah dimengerti. *CEO Message* merupakan satu hal yang selalu disampaikan dalam kesempatan-kesempatan khusus yang memerlukan penjelasan langsung dari CEO.

News content is a matter of concern to management. Matters that will potentially provide better understanding of a program, the contents that feature reminder and invitation to become a better person in accordance with company values are the top-priority contents to be informed to employees. News content is always presented in an interesting and easy-to-understand form. CEO Message is one thing that is always delivered on special occasions that require direct explanation from the CEO.

Untuk informasi-informasi terkait strategi Bank yang lebih formal, terus dilakukan melalui acara *sharing session* antara manajemen dan karyawan di seluruh unit kerja. Acara-acara yang dikemas dalam bentuk *town hall meeting* dan BOD *road show* yang diikuti oleh karyawan di unit kerja yang dikunjungi diharapkan lebih mendekatkan lagi jarak antara manajemen dan karyawan.

Information on more formal Bank strategies is continuously disseminated through sharing sessions between the management and employees in all work units. Events in the form of town hall meetings and BOD road shows that are participated by employees in the work units visited are expected to bring the management and employees closer.

Program Pengembangan Kompetensi

Bank Muamalat Indonesia berkomitmen untuk memastikan kualitas dan kapabilitas karyawan dilakukan dengan memberikan kesempatan yang sama bagi setiap karyawan untuk mengembangkan dirinya, baik secara personal maupun profesional. Keikutsertaan karyawan dalam

Competency Development Program

Bank Muamalat Indonesia is committed to ensuring the quality and capability of employees by providing equal opportunities for each employee to develop themselves, both personally and professionally. Employee participation in competency development is determined by

pengembangan kompetensi tersebut ditentukan oleh kebutuhan Bank dan karyawan dengan memperhatikan kesetaraan gender dan persamaan kesempatan bagi seluruh karyawan Bank.

the needs of the Bank and employees by taking into account gender equality and equal opportunities for all Bank employees.

Pengembangan karyawan yang berbasis kompetensi ditujukan untuk mendukung karyawan dalam menjalankan pekerjaannya secara optimal yang pada akhirnya dapat membantu Bank dalam mewujudkan tujuannya.

Competency-based employee development is intended to support employees in carrying out their work optimally which in turn can help the Bank in realizing its objectives.

Dalam rangka meningkatkan kualitas karyawan, Bank memiliki program pengembangan kualitas karyawan, yakni melalui program pelatihan internal dan eksternal, yaitu di mana Bank memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengikuti sejumlah pelatihan dan/atau seminar yang diberikan secara berkala.

In order to improve the employees' quality, the Bank operates an employee quality development program, through internal and external training programs. This is where the Bank provides the opportunity for employees to attend a number of trainings and/or seminars that are given regularly.

Pelatihan *mandatory* yang dilakukan di tahun 2019 diantaranya adalah *Basic Sharia Banking, APU PPT, Fraud Awareness, Code of Coduct*, dan juga Risk Management Certification, selain *in class training*, pelatihan ini juga menggunakan pelatihan berbasis teknologi dengan media *digital learning*. Pelatihan lain yang bersifat *non mandatory* dibagi beberapa kategori kemampuan yaitu Technical Skill dan Soft Skill training, contohnya adalah *Basic Financing Analysis* dan Sertifikasi *Treasury Dealer* yang merupakan *Technical Skills training*, selain itu juga terdapat *training* dengan kategori *soft skill* yaitu Individual Learning Development Program (ILDP) yang terdiri dari berbagai jenis *training* contohnya *Impactfull Business Presentation* dan *Effective Presentation Skill.*

Mandatory training conducted in 2019 includes Basic Sharia Banking, APU PPT, Awareness Fraud, Code of Conduct, and Risk Management Certification, and in addition to in-class training, this training also uses technology-based training with digital learning media. Other non-mandatory training is divided into several skill categories namely Technical Skill and Soft Skill training, for example Basic Financing Analysis and Treasury Dealer Certification which are Technical Skills training, in addition there are also training in the soft skill category, namely Individual Learning Development Program (ILDP) which consists of various types of training for example Impactful Business Presentation and Effective Presentation Skill.

Selain training yang bersifat *Mandatory* dan *Non Mandatory*, pada tahun 2019 Learning & Talent Management juga memberikan penghargaan *Non Monetery* kepada para tenaga penjual yang berprestasi dengan memberikan suatu sertifikasi bernama *Certified Financial Planner*, yang berlaku baik nasional maupun internasional, diharapkan pemberian sertifikasi ini dapat memotivasi para tenaga penjual untuk berkinerja lebih baik lagi.

In addition to Mandatory and Non-Mandatory training, in 2019, Learning & Talent Management provides Non-Monetary recognition to salespeople who excel by providing a certification called Certified Financial Planner, which applies both nationally and internationally. This certification is expected to motivate the salespeople to perform even better.

Investasi Pengembangan SDM (Biaya Program Pelatihan dan Pengembangan SDM)

HR Development Investment (HR Training and Development Program Costs)

Penyerapan biaya program pelatihan dan pengembangan SDM oleh perusahaan telah mengikuti ketentuan yang berlaku dari OJK yaitu sebesar 5% dari total Biaya Tenaga Kerja (BTK), pada tahun 2019 perusahaan terus mengembangkan digital learning platform di samping program kompetensi yang bersifat *in class,* hal ini agar efektivitas dan efisiensi dapat terus dijaga demi peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.

The realization of the cost of training programs and development of human resources by the Company has complied with OJK regulation that is 5% of the total staff cost (BTK). In 2019, the Company continued developing digital learning platforms in addition to competency in-class programs, so that effectiveness and efficiency can be maintained for the sake of improving the quality of Human Resources.

Total *man days learning* pada tahun 2019 yaitu 7,55 *man days*, adapun angka tersebut dihasilkan dari 2 metode pelatihan yaitu menggunakan *digital learning* sebesar 32% atau 2,41 *man days learning*, dan sisanya yaitu 68% masih menggunakan metode tatap muka atau sebesar 5,14 *man days learning*.

Total man days learning in 2019 is 7.55, while the number is resulted to 2 training methods, namely using digital learning by 32% or 2.41 man days learning, and the remaining 68% are still using the face-to-face method or by 5.14 man days learning.

Peningkatan penyerapan biaya pelatihan dan juga *man days digital learning* menunjukkan komitmen perusahaan untuk mengembangkan Sumber Daya Manusia melalui media atau fasilitas yang tersedia di perusahaan.

Increased absorption of training costs and also man days digital learning show the Company's commitment to develop Human Resources through the media or facilities available at the company.

Sistem dan Mekanisme Rewards dan Punishment kepada Karyawan

Bank terus mengembangkan *Performance Culture* dengan melanjutkan penerapan Performance Management System (PMS) yang telah berlangsung pada tahun-tahun sebelumnya. Sistem ini wajib dijalankan oleh setiap karyawan secara lebih disiplin dengan penetapan *Most Important Goals* (MIG) yang selaras dengan tujuan organisasi serta terintegrasi antar fungsi-fungsi yang ada di dalam organisasi sehingga semua menuju pada pencapaian target dan tujuan Bank.

Bank Muamalat Indonesia selalu melakukan penataan kembali penerapan *Reward and Punishment* melalui proses *review* menyeluruh terhadap konsep dan kebijakan. Dimana penerapan *Reward dan Punishment* harus lebih mendorong pertumbuhan kinerja disamping konsistensi penerapan sanksi atas kasus-kasus pelanggaran.

Rewards and Punishment Systems and Mechanisms for Employees

The Bank continues to develop Performance Culture by continuing the Performance Management System (PMS) implementation that has taken place since previous years. This system must be carried out by employee in a more disciplined manner by implementing the Most Important Goals (MIG) that are aligned with the organization's goals and integrated between functions within the organization so that all are directed towards achieving the Bank's targets and objectives.

Bank Muamalat Indonesia always rearranges the practice of Reward and Punishment through a thorough review process of concepts and policies. in which the practice of Reward and Punishment should more encourage the growth of performance in addition to the consistency of the sanctions practice on cases of violations.

Assessment Karyawan

Dalam penerapan program pengembangan karier karyawan dan manajemen talenta, dilakukan proses *assessment* karyawan untuk memastikan kompetensi dan kapabilitas karyawan sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Employee Assessment

In implementing employee career development programs and talent management, an employee assessment process is carried out to ensure employee competency and capability in accordance with organizational needs.

Fasilitas dan Kesejahteraan

Dalam hal fasilitas dan kesejahteraan karyawan, Bank Muamalat Indonesia telah memenuhi ketentuan Upah Minimum Provinsi/Kabupaten/Kota (UMP/K) dan Upah Minimum Sektoral Propinsi (UMSP) wilayah masing-masing unit kerja Bank yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kompensasi program kesejahteraan dan fasilitas karyawan Bank Muamalat Indonesia mengacu kepada Ketentuan dan Peraturan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, termasuk pemenuhan upah yang berlaku.

Facility and Welfare

In terms of employee benefits and facilities, Bank Muamalat Indonesia has complied with Province/Regency/City Minimum Wages (UMP/K) and Province Sectoral Minimum Wages (UMSP) areas of Bank's work units stipulated by the Central Government and Regional Governments. The compensation program for employee welfare and facilities of Bank Muamalat Indonesia refers to the provisions and regulations of the Ministry of Manpower and Transmigration, including the fulfillment of applicable wages.

Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Highest and Lowest Salary Ratio

Rasio Gaji Karyawan Tertinggi : Terendah *Highest Employee Salary Ratio : Lowest*	41,7	:	1,0
Rasio Gaji Direksi Tertinggi : Terendah *Highest Salary Ratio of Directors : Lowest*	2,4	:	1,0
Rasio Gaji Komisaris Tertinggi : Terendah *Highest Commissioner Salary Ratio : Lowest*	1,1	:	1,0
Rasio Gaji Direksi Tertinggi : Karyawan Tertinggi *Highest Salary Ratio of Directors : Highest Employee*	2,3	:	1,0

Rencana Pengembangan Human Capital

Guna menunjang strategi dan target bisnis di tahun 2020, Direktorat HC berkomitmen untuk terus memberikan layanan yang terbaik kepada Karyawan melalui penguatan infrastruktur layanan HC, meningkatkan kualitas program-program pengembangan dan pembelajaran bagi Karyawan, menciptakan program bermanfaat yang kreatif dan kompetitif serta memberikan kepastian *career path* Karyawan sehingga dapat meningkatkan Level *Employee Engagement*. Peningkatan Level *Employee Engagement* diharapkan dapat meningkatkan produktivitas Karyawan dalam mencapai target Bank Muamalat Indonesia.

Melanjutkan strategi di tahun sebelumnya, pada tahun 2020 Direktorat Human Capital akan kembali melakukan optimalisasi organisasi sehingga proses kerja dapat berjalan lebih efektif dan produktif. Hal ini didukung juga dengan perbaikan atas program *performance management system*, dimana Bank Muamalat Indonesia selalu berupaya untuk memberikan *rewards* dan *recognition* bagi Karyawan yang berkontribusi lebih kepada Perusahaan secara kompetitif dan adil.

Direktorat HC juga selalu berupaya untuk mendukung *branding* Bank Muamalat Indonesia melalui program-program *employer branding* baik yang ditujukan untuk Karyawan maupun untuk Umum. Fokus ini bertujuan untuk menempatkan Bank Muamalat Indonesia sebagai tempat terbaik untuk bekerja, sehingga dapat menurunkan *HIPO attrition rate* sekaligus menjadi tujuan utama bagi para pekerja untuk mencari pekerjaan. Penguatan *branding* ini perlu didukung dengan penguatan nilai-nilai IDEAL sebagai *core values* Bank Muamalat Indonesia yang menjadi identitas bagi seluruh Karyawan dalam menjalankan kegiatannya sehari-hari.

Human Capital Development Plan

To support business strategies and targets in 2020, the HC Directorate is committed to continuing providing the best service to employees through strengthening HC service infrastructure, improving the quality of development and learning programs for employees, creating creative and competitive program benefits and providing career path certainty Employees so as to increase Employee Engagement Level. The increase in Level Employee Engagement is expected to increase Employee productivity in achieving Bank Muamalat Indonesia's targets.

Continuing the strategy in the previous year, in 2020 the Directorate of Human Capital will again optimize the organization so that work processes can run more effectively and productively. This is also supported by improvements to the performance management system program, where Bank Muamalat Indonesia always endeavors to provide rewards and recognition for employees who contribute more to the Company competitively and fairly.

The HC Directorate also always seeks to support the branding of Bank Muamalat Indonesia through employer branding programs, both for Employees and for the Public. This focus aims to position Bank Muamalat Indonesia as the best place to work, so as to reduce the HIPO attrition rate and become the main goal for workers to find work. Strengthening this branding needs to be supported by strengthening IDEAL values as core values of Bank Muamalat Indonesia, which is an identity for all employees in carrying out their daily activities.

Rencana Pengembangan Pengelolaan SDM

Sebagai perusahaan yang memiliki visi jangka panjang untuk tumbuh dan berkembang secara berkesinambungan *(sustainable growth)*, perusahaan meyakini bahwa struktur organisasi yang efektif dan efisien adalah sebuah poin kritikal guna mendukung tujuan organisasi baik secara finansial maupun non-finansial. Perusahaan senantiasa melakukan *review* atas efektivitas organisasi sesuai dengan dinamika di lingkungan internal serta terus berupaya untuk mampu beradapatasi dan responsif terhadap perkembangan bisnis dan pasar, agar dapat tetap selaras dengan tujuan perusahaan.

Pada tahun 2020 HC secara berkesinambungan melanjutkan prioritas utama (*key action*) korporasi yaitu:

1. Perampingan organisasi dalam rangka peningkatan efektivitas organisasi.
2. Optimaslisasi HC selaras dengan perampingan organisasi dalam rangka peningkatan efektivitas organisasi.
3. Melanjutkan program manajemen karier.
4. Meningkatkan implementasi sistem manajemen kinerja melalui penghargaan dan rekognisi.
5. Penguatan pemahaman dan implementasi nilai-nilai IDEAL.
6. Meningkatkan *engagement* level karyawan melalui program dan benefit yang kreatif dan kompetitif.
7. Perbaikan infrastruktur guna meningkatkan layanan HC kepada karyawan.
8. Program Employer branding baik untuk internal maupun eksternal.

Future Plans for HR Management Development

As a company with a long-term vision to grow and develop sustainably (sustainable growth), the Company believes that an effective and efficient organizational structure is a critical point to support organizational goals both financially and non-financially. The Company always reviews the effectiveness of the organization in accordance with the dynamics in the internal environment and continues to strive to be able to adapt and be responsive to the development of business and markets, in order to remain in line with company goals.

In 2020, HC sustainably continues its corporate key action, namely:

1. *Organization streamlining & improvement.*
2. *HR optimization which is in line with the organization streamlining and improvement.*
3. *Continuing career management program.*
4. *Enhancing the implementation of performance management systems by providing rewards and recognition.*
5. *Strengthening the IDEAL understanding and implementation.*
6. *Increasing employee engagement with creative & competitive programs/benefits.*
7. *Infrastructure improvement to enhance the HC function services.*
8. *Employer branding program for internal and external.*

Statistik Human Capital

Seiring dengan strategi Bank untuk menciptakan organisasi yang ramping dan optimal, jumlah karyawan Bank Muamalat Indonesia terus mengalami tren penurunan. Namun demikian, penurunan jumlah karyawan tersebut tidak mengurangi kualitas layanan yang diberikan Bank kepada nasabah dan juga tidak menjadi kendala dalam ekspansi usaha yang dijalankan Bank.

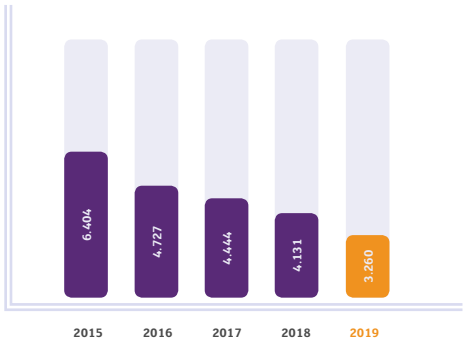
Statistik jumlah karyawan Bank Muamalat Indonesia 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Human Capital Statistics

In line with the Bank's strategy to create streamlined and optimal organization, all employees of Bank Muamalat Indonesia keeps experiencing downtrend. However, the downtrend does not reduce quality given by the Bank to its customers and is not even an obstacle hampering the business expansion run by the Bank.

The following is the statistics of total employees of Bank Muamalat Indonesia in the last 5 years:

Grafik Pertumbuhan FTE 2015-2019
FTE Growth Graph 2015-2019



Profil demografi karyawan Bank tahun 2018 dan 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

The demographic profile of the Bank's employees in 2018 and 2019 can be seen in the following table:

Demografi Karyawan Berdasarkan Masa Kerja
Employee Demographics Based on Years of Services

Masa Kerja *Years of Services*	2019		2018	
	Jumlah *Total*	%	Jumlah *Total*	%
< 1	205	6,3	396	9,6
1 - 2	530	16,3	666	16,1
3 - 5	583	17,9	1.029	24,9
6 - 10	1.257	38,6	1.321	32,0
> 10	685	21,0	719	17,4
Total	3.260	100,0	4.131	100,0

Demografi Karyawan Berdasarkan Gender
Employee Demographics Based on Gender

Gender	2019		2018	
	Jumlah *Total*	%	Jumlah *Total*	%
Pria *Male*	1.965	60	2.431	59
Wanita *Female*	1.295	40	1.700	41
Total	3.260	100	4.131	100

Demografi Karyawan Berdasarkan Lokasi Kerja
Employees Demographics Based on Work Location

Lokasi Kerja *Work Locations*	2019		2018	
	Jumlah *Total*	%	Jumlah *Total*	%
KPNO	897	27,5	1.107	26,8
Jakarta 1	155	4,8	247	6,0
Jakarta 2	187	5,7	253	6,1
Jakarta 3	183	5,6	233	5,6
Jabar *West Java*	268	8,2	347	8,4
Jateng & DIY *Central Java & Special Region of Yogyakarta*	267	8,2	343	8,3
Jatim, Bali & Nusa Tenggara *East Java, Bali & Nusa Tenggara*	334	10,2	407	9,9
Sumatera Bagian Utara *North of Sumatera*	237	7,3	291	7,0
Sumatera Bagian Selatan *South of Sumatera*	233	7,1	290	7,0
Kalimantan	152	4,7	208	5,0
Sulawesi, Maluku & Papua	321	9,8	378	9,2
Cabang Luar Negeri *Foreign Branches*	26	0,8	27	0,7
Total	3.260	100,0	4.131	100,0

Demografi Karyawan Berdasarkan Status Karyawan
Employees Demographics Based on Employment Status

Status Karyawan *Employment Status*	2019		2018	
	Jumlah *Total*	%	Jumlah *Total*	%
Permanen *Permanent*	3.181	97,6	3.974	96,2
Kontrak *Contract*	79	2,4	157	3,8
Total	3.260	100,0	4.131	100,0

Demografi Karyawan Berdasarkan Usia
Employees Demographic Based on Age

Rentang Usia *Age*	2019		2018	
	Jumlah *Total*	%	Jumlah *Total*	%
Hingga 30 Tahun *Up to 30 Years Old*	546	16,7	1.072	26,0
31– 40 Tahun *31-40 Years Old*	2.186	67,1	2.468	59,7
Di atas 40 Tahun *Older than 40 Years Old*	528	16,2	591	14,3
Total	3.260	100,0	4.131	100,0

Demografi Karyawan Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Employees Demographics Based on Educational Level

Tingkat Pendidikan *Educational Level*	2019		2018	
	Jumlah *Total*	%	Jumlah *Total*	%
Pasca Sarjana *Master*	136	4,2%	149	3,6%
Sarjana *Bachelor*	2.850	87,4%	3.588	86,9%
Diploma *Diploma*	262	8,0%	375	9,0%
Di Bawah Diploma *Below Diploma*	12	0,4%	19	0,5%
Total	3.260	100,0%	4.131	100,0%

Demografi Karyawan Berdasarkan Level Organisasi
Employee Demographics Based on Organizational Level

Level Organisasi *Organizational Level*	2019		2018	
	Jumlah *Total*	%	Jumlah *Total*	%
BOC	5	0,2	5	0,1
BOD	6	0,2	5	0,1
DPS	2	0,1	3	0,1
Chief	2	0,1	3	0,1
Head of L1	32	1,0	35	0,8
Head of Subsidiaries	5	0,2	6	0,1
Region Head	9	0,3	9	0,2
Head of L2	116	3,6	124	3,0
L2 Specialist	4	0,1	-	0,0
Region Commercial Head	6	0,2	-	0,0
Region Operation Service Manager	10	0,3	10	0,2
Region RFC Manager	8	0,2	9	0,2
Head of L3	10	0,3	28	0,7
Business Manager	-	0.0	13	0,3
Branch Manager	80	2,5	82	2,0
Branch Operation Service Manager	82	2.5	82	2,0
Team Leader	59	1,8	-	0,0
Sub Branch Manager	142	4,4	142	3,4
Sub Branch Operation Service Supervisor	146	4,5	147	3,6
Other Officer	896	27,5	1.237	29,9

Demografi Karyawan Berdasarkan Level Organisasi
Employee Demographics Based on Organizational Level

Level Organisasi *Organizational Level*	2019		2018	
	Jumlah *Total*	%	Jumlah *Total*	%
Clerical	1.628	49,9	2.173	52,6
NBS	10	0,3	18	0,4
Total	3.260	100,0	4.131	100,0

Pengembangan kompetensi berdasarkan level jabatan dan kategori pelatihan

1. **Tingkat Partisipasi Peserta Pelatihan**
   Tahun 2019: 3.806 Karyawan sudah melakukan kegiatan learning (99,5%) dari total 3.827 karyawan.
2. **Klasifikasi Segmen Pelatihan**
   Bank Wide Training (Seluruh Karyawan), *Sales Training (Sales Staff), Operation Training (Operation & Service Staff), Certification* (*Targeted* Peserta), Kerohanian (Seluruh Karyawan).
3. **Jenis Pelatihan Berdasarkan Kategori**
   Core Training, Retail Banking Business Training, Corporate Business Training, Management, Leadership, Operation, Support, Soft Skill dan juga kerohanian.
4. **Jumlah Peserta Pelatihan Berdasarkan Direktorat**

Competency development based on job levels and training categories

1. ***Training Participation Level***
   In 2019, as many as 3,800 employees participated learning activity (99.5%) of total 3.827 employees.
2. ***Training Segment Classification***
   Bank Wide Training (all employees), Sales Training (Sales Staff), Operation Training (Operation & Service Staff), Certification (Targeted participant), Spirituality (all employees).
3. ***Types of Training Based on Category***
   Core Training, Retail Banking Business Training, Corporate Business Training, Management, Leadership, Operation, Support, Soft Skill and Spirituality.
4. ***Number of Training Participants Based on Directorate***

Directorate	Number of Participation *(Inclass Training & Digital Learning)*
Board	86
CEO Directorate	1.928
Compliance Directorate	740
Corporate Banking Directorate	3.062
Finance Directorate	776
Human Capital Directorate	1.569
Operation Directorate	42.069
Retail Banking Directorate	39.500
Risk Directorate	2.360
Trainee Program	3.155
Total	95.245

5. **Jumlah Pelatihan Berdasarkan Level Jabatan**

5. ***Number of Training Based on Job Level***

Jabatan *Role*	Number of Participation *(Inclass Training & Digital Learning)*
Staff	61.861
Junior *Management/Professional*	28.265
Middle *Management/Professional*	4.198
Senior Management	813
Non Grade	86

Jabatan *Role*	Number of Participation *(Inclass Training & Digital Learning)*
Non Banking Staff	22
Total	95.245

6. Jumlah Pelatihan Berdasarkan Wilayah

6. *Number of Training Based on Region*

Wilayah *Region*	Number of Participation *(Inclass Training & Digital Learning)*
KPNO	20.124
Jakarta 1	5.598
Jakarta 2	6.153
Jakarta 3	6.545
Jabar *West Java*	7.548
Jateng & DIY *Central Java & Special Region of Yogyakarta*	8.958
Jatim, Bali & Nusra *East Java, Bali & Nusa Tenggara*	11.200
Kalimantan	4.847
Sulawesi, Maluku & Papua	9.053
Sumatera Bagian Selatan *South of Sumatera*	7.142
Sumatera Bagian Utara *North of Sumatera*	7.645
Foreign Branches	432
Total	95.245

7. Biaya Pengembangan Kompetensi terhadap BTK

42,73 miliar atau sebesar 6,2% dari Biaya Tenaga Kerja (BTK)

Biaya tersebut termasuk Biaya *Training Program*, Biaya Penggajian *Trainee Program*, Pemagangan *Customer Services* & *Teller*, dan semua biaya terkait dengan pengembangan Sumber Daya Manusia.

Tingkat partisipasi peserta pelatihan pada tahun 2019 yaitu 99,5% dari total jumlah karyawan, adapun rata-rata *Man days learning* sampai dengan Desember 2019 yaitu 7,55 yang berarti per satu karyawan masing-masing mengikuti kegiatan *learning* 7,55 hari per tahun.

7. ***Competency Development Cost on Staff Cost***

42.73 billion or 6.2% of Labor Costs (Staff Cost)

These costs include Program Training Costs, Program Trainee Payroll Costs, Customer Services & Teller Apprenticeship, and all costs related to Human Resources development.

The level of participation of trainees in 2019 was 99.5% of the total number of employees, while the average Man days learning up to December 2019 was 7.55. This means that one employee participated in learning activities averaged to 7.55 days per year.

Kategori Jenis pelatihan yang diikuti yaitu mengenai *Core Training, Business Training, Management, Leadership, Operation, Support, Soft Skill*, dan juga kerohanian.

The types of training that have been participated are among others Core Training, Business Training, Management, Leadership, Operations, Support, Soft Skills, and spirituality.

Berikut adalah detail rata-rata *Man days* per karyawan berdasarkan Direktorat, Level Jabatan dan Wilayah.

Following are the average details of Man days per employee based on Directorate, Position Level and Region.

Directorate	Average Man days
Board	8,27
CEO Directorate	6,35
Compliance Directorate	7,11
Corporate Banking Directorate	5,74
Finance Directorate	5,96
Human Capital Directorate	13,49
Operation Directorate	6,94
Retail Banking Directorate	6,87
Risk Directorate	8,81
Trainee Program	53,47
Bankwide Average	7,55

Wilayah *Region*	Average Man days
KPNO	10,14
Jakarta 1	8,32
Jakarta 2	8,17
Jakarta 3	8,67
Jabar *West Java*	6,92
Jateng & DIY *Central Java & Special Region of Yogyakarta*	7,46
Jatim, Bali & Nusra *East Java, Bali & Nusa Tenggara*	6.74
Kalimantan	5,43
Sulawesi, Maluku & Papua	5,39
Sumatera Bagian Selatan *South of Sumatera*	5,09
Sumatera Bagian Utara *North of Sumatera*	5,85
Foreign Branches	2,57
Bankwide Average	7,55

Jabatan *Role*	Average Man days
Board	8,27
Senior Management	10,63
Middle Management	11,16
Junior Management	8,10
Staff	6,91
Non Banking Staff	2,44
Bankwide Average	7,55

Teknologi Informasi

Information Technology

Di era digital saat ini, Teknologi Informasi (TI) sangat berperan penting untuk mendukung kelancaran kegiatan operasional perusahaan. Terlebih untuk industri jasa perbankan, TI merupakan salah satu kebutuhan wajib. Pasalnya, sistem perbankan secara menyeluruh terkait dengan aspek TI.

In this digital era, Information Technology (IT) plays a key role to support the Company's operational activities. Furthermore, for banking service industry, IT is a mandatory requirement because the overall banking system is related with IT aspect.

Kesiapan TI yang memadai diperlukan untuk mengimbangi inovasi produk dan layanan perbankan yang semakin berkembang dan dinamis. Bank dituntut untuk senantiasa berkolaborasi dalam mengintegrasikan semua layanannya agar dapat menjamin pemberian layanan terbaik bagi nasabah dan pengembangan bisnisnya di masa mendatang.

Adequate IT readiness is required to balance innovations in banking products and services that are increasingly developing and dynamic. The Bank is required to always collaborate in integrating all of their services to guarantee the best service provision for customers and business development in the future.

Bank Muamalat Indonesia terus meningkatkan dan mengoptimalisasikan sarana dan prasarana TI secara berkala, khususnya keamanan penggunaan TI. Melalui layanan berbasis TI, Bank berharap mampu meningkatkan dan memudahkan pelayanan kepada nasabah melalui otomatisasi proses bisnis, efisiensi proses, dan inovasi produk. Hal ini menjadi bagian dari komitmen dan semangat Bank dalam upaya mewujudkan visi dan misi Bank.

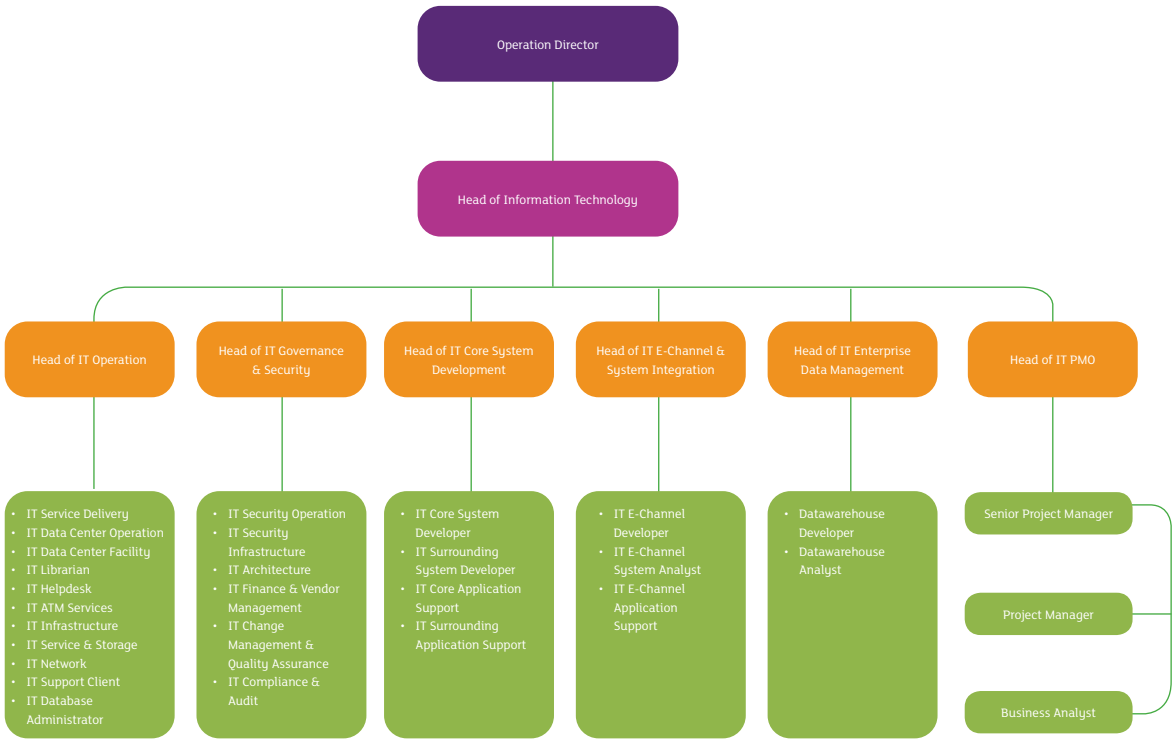
Bank Muamalat Indonesia keeps improving and optimizing its facilities and infrastructure of IT periodically, particularly the security of IT usage. Through IT-based services, the Bank expects to improve and ease its services to the customers through optimization of business process, efficiency process and product innovation. It is a part of commitment and spirit of the Bank in its effort to realize the Bank's vision and mission.

Divisi Teknologi Informasi

Information Technology Division

Tata Kelola Informasi

Information Governance



Penanggungjawab pengelolaan dan pengembangan TI di Bank Muamalat Indonesia berada di bawah Divisi Teknologi Informasi yang dikepalai oleh seorang Kepala Divisi yang bertanggung jawab kepada Direktur Operasional.

The person responsible for managing and developing IT at Bank Muamalat Indonesia is under the Information Technology Division, which is headed by a Head of Division who reports to the Director of Operations.

Saat ini, Divisi IT memiliki 6 unit kerja, yaitu IT Operation, IT Governance & Security, IT Core System Development, IT E-Channel & System Integration, IT Enterprise Data Management & IT Project Management Office.

At present, the IT Division has 6 work units, namely IT Operations, IT Governance & Security, IT Core System Development, IT E-Channel & System Integration, IT Enterprise Data Management & IT Project Management Office.

IT Operation *bertanggung jawab* menjaga *availability dan performance* dari IT Data Center dan IT Infrastructure yang mencakup DC & DRC site, Server, Storage, Network & Application, serta End-user *support* melalui IT Helpdesk sesuai dengan SLA yang ditetapkan.

IT Operation is responsible for maintaining the availability and performance of the IT Data Center and IT Infrastructure that include DC & DRC sites, Servers, Storage, Network & Application, and End-user support through IT Helpdesk in accordance with the SLA specified.

IT Core System Development; IT E-Channel & System Integration; dan, IT Enterprise Data Management bertanggung jawab atas solusi, pengembangan dan *support* aplikasi bank, termasuk diantaranya, Core banking, Trade, Treasury; E-Channel/Digital, ATM, IB, MB, CMS, API/System Integration, serta MIS, Datawarehouse & Regulatory Reporting.

IT Core System Development; IT E-Channel & System Integration; and, IT Enterprise Data Management are responsible for the solution, development and support of bank applications, including, among others, Core banking, Trade, Treasury; E-Channel/Digital, ATM, IB, MB, CMS, API/System Integration, and MIS, Datawarehouse & Regulatory Reporting.

IT Governance & Security bertanggung jawab atas IT Governance *control* yang mencakup IT Change Management & QA, Policy & Procedure, melalui *partnership* dengan unit kerja Audit, Risk dan Compliance, IT Strategic & Budget Planning and Management, serta penerapan dan pengawasan aspek IT Security Bank yang mencakup *IT infrastructure, transactional* dan e*ndpoint (end-user) security*.

IT Governance & Security is responsible for IT Governance control which includes IT Change Management & QA, Policy & Procedure, through partnerships with Audit, Risk and Compliance units, IT Strategic & Budget Planning and Management, as well as the implementation and supervision of aspects of the IT Security of the Bank which includes IT infrastructure, transactional and endpoint (end-user) security.

Pada akhir tahun 2018 terdapat restrukturisasi organisasi melalui penggabungan Unit Kerja Project Management Office (PMO) ke dalam Unit kerja TI. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan keselarasan Rencana Pengembangan TI & Rencana Pengembangan Bisnis melalui peran IT-PMO. Selain itu, penggabungan tersebut juga untuk memastikan pengawasan dan pelaporan *IT Projects delivery* sesuai dengan yang direncanakan dan diharapkan oleh Bank.

At the end of 2018, there was an organizational restructuring through the merger of the Project Management Office (PMO) Work Unit into the IT Work Unit. It aims to improve the alignment of IT Development Plans & Business Development Plans through the role of IT-PMO. In addition, the merger is also to ensure supervision and reporting of IT Projects delivery as planned and expected by the Bank.

Pada akhir tahun 2019, Divisi TI Bank Muamalat Indonesia didukung oleh 69 karyawan.

Program kerja TI tahun 2019 berfokus kepada peningkatan kehandalan IT Infrastructure dan IT Value Delivery & Cost Optimization, melalui IT infrastructure upgrade and replacement, IT vendor and managed-service assessment & contract renegotiation, serta peningkatan ketersediaan IT Resource bekerjasama dengan HC Business partner, peningkatan IT Projects delivery planning & monitoring, serta peningkatan Data Quality & Reporting melalui sejumlah *major projects* dan *initiatives* yang melibatkan unit kerja *support* dan unit bisnis di kantor pusat dan cabang.

Program kerja TI tahun 2020 akan terus mengusahakan Peningkatan Sumber Daya Manusia TI melalui *recruitment human resource* yang berkualitas, peningkatan *skill & knowledge* melalui *training* spesialis TI, pelaksanaan IT Architecture review dengan fokus peningkatan IT delivery, yaitu dari sisi *cost, features* dan *capabilities IT Infrastructure*, Security & Application yang mendukung penguatan *platform* Digital & System Integration Bank, termasuk di dalamnya Data Quality & Reporting seperti LSMK, SLIK, ANTASENA, OBOX, APOLO, dan peningkatan pengendalian dan pengelolaan risiko atas rencana pengembangan bisnis sesuai dengan Bank.

At the end of 2019, the IT Division of Bank Muamalat Indonesia was supported by 69 employees.

The 2019 IT work program focused on improving the reliability of IT Infrastructure and IT Value Delivery & Cost Optimization, through IT infrastructure upgrading and replacement, IT vendors and managed-service assessments & contract renegotiations, as well as increasing the availability of IT Resources in collaboration with HC Business partners, improving IT Project delivery planning & monitoring, as well as enhancing Data Quality & Reporting through a number of major projects and initiatives involving support work units and business units at headquarters and branches.

The IT work program for 2020 will continue to strive for the Improvement of IT Human Resources through the recruitment of quality Human Resources, improvement of skills & knowledge through IT specialist training, implementation of IT Architecture review with a focus on improving IT delivery, namely in terms of cost, features and capabilities of IT Infrastructure, Security & Application that supports the strengthening of the Digital & System Integration Bank platform, including Data Quality & Reporting such as LSMK, SLIK, ANTASENA, OBOX, APOLO, and improving risk control and management of business development plans in accordance with the Bank's risk appetite.



06.

Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance



Komitmen dan Kebijakan Perusahaan dalam Menerapkan Good Corporate Governance

The Commitment and Company Policy in Terms of Good Corporate Governance Implementation

Penerapan praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) telah menjadi kebutuhan dunia usaha. GCG merupakan prinsip-prinsip yang mendasari proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta cerminan dunia usaha yang beretika. Lebih jauh, GCG telah menjadi salah satu faktor fundamental bagi investor dalam menilai kinerja perusahaan yang berkelanjutan hingga masa-masa mendatang.

The implementation of Good Corporate Governance (GCG) has become a necessity for the business world. GCG is the principles that underlie the process and mechanism management of the company based on compliance with regulations legislation and reflection of the ethical business world. Furthermore, GCG has become one of the fundamental factors for investors in assessing the company's ongoing performance up to future times.

Bank Muamalat Indonesia memiliki komitmen untuk meningkatkan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik *(Good Corporate Governance)* sebagai salah satu prasyarat utama bagi keberhasilan dan keberlanjutan usaha. Penerapan GCG pada Bank Muamalat Indonesia dilakukan secara berkelanjutan dimulai dengan proses internalisasi untuk memperoleh kesepahaman pada semua unit kerja Bank tentang arti penting dari penerapan GCG, masing-masing fungsi yang dijalankan diikuti dengan penerapan secara benar dan konsisten. Dengan senantiasa berkomitmen dalam menjalankan bisnis yang berlandaskan GCG, diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dan nyata bagi seluruh pemangku kepentingan. Bank menerapkan kelima prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik, yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Profesional dan Kesetaraan/ Kewajaran. Penerapan prinsip-prinsip GCG Bank Muamalat diuraikan dalam tabel berikut ini:

Bank Muamalat Indonesia is committed to improve the Good Corporate Governance implementation as one of the primary key for business success and sustainability. The implementation of GCG at Bank Muamalat Indonesia is carried out in a sustainable manner starting with the internalisation process to have an understanding in all work units of the Bank regarding the significance of implementing GCG, each function carried out is followed by correctly and consistently implementation. Always committing to running a business based on GCG, it is expected to bring a positive and real contribution to all stakeholders. The Bank implements the five principles of Good Corporate Governance, namely Transparency, Accountability, Responsibility, Professional, and Equality/Fairness. The application of Bank Muamalat's GCG principles is explained in the following table:

Transparansi "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat (hak/informasi) kepada yang berhak menerimanya". (QS. An-Nisa: 58). *Transparency* *"Indeed, Allah commands you to render trusts to whom they are due" (QS. An-Nisa: 58).*
Keterbukaan (*Transparency)* mengandung unsur pengungkapan *(disclosure)* dan penyediaan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas dan akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan dan masyarakat. Bank Muamalat Indonesia dan segenap jajaran Manajemen selalu berupaya untuk menjamin adanya keterbukaan dalam menyampaikan informasi materiil dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan mengenai Bank Muamalat Indonesia serta mudah diakses oleh *stakeholders* sesuai dengan haknya. Kebijakan Bank Muamalat Indonesia dibuat secara tertulis dan dikomunikasikan kepada segenap *stakeholders* yang berhak memperoleh informasi mengenai hal tersebut. Keterbukaan tidak hanya mengungkapkan informasi yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal penting dalam proses pengambilan keputusan sesuai dengan ketentuan syariah, tanpa mengurangi kewajiban Bank untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan organisasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Transparency contains the elements of disclosure and the provision of information in a timely, adequate, clear and accurate manner as well as comparable and easily accessed by the stakeholders and the public. Bank Muamalat Indonesia and all levels of its management always seeks to ensure transparency in conveying the material and relevant information and transparency in the decision making process and on Bank Muamalat Indonesia as well as easily accessed by the stakeholders in accordance with their rights. Bank Muamalat Indonesia policy is made in writing and communicated to all stakeholders who are entitled to obtain the information. Transparency does not only mean the disclosure of information required by the legislation, but it is also important in the decision making process in accordance with the provisions of sharia, without reducing the Bank's obligation to comply with the provision on the confidentiality of the organization in accordance to the legislation in force.*
Akuntabilitas "Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama (orang-orang yang berilmu pengetahuan)" (QS Fathir: 28). "Adakah sama orang yang berilmu pengetahuan dengan yang tidak berilmu pengetahuan" (QS Az-Zumar: 9). "Allah mengangkat derajat orang yang beriman di antara kamu dan orang yang memiliki ilmu pengetahuan beberapa derajat. Allah Maha Mengetahui apa-apa yang kamu lakukan" (QS Al-Mujaadilah: 11). *Accountability* *"Only those fear Allah, from among His servants, who have knowledge" (QS Fathir: 28).* *"Are those who know equal to those who do not know?" (QS Az-Zumar:9).* *"Allah will raise those who have believed among you and those who were given knowledge, by degrees. And Allah is Acquainted with what you do." (QS Al-Mujaadilah: 11).*
Akuntabilitas *(Accountability*) mengandung unsur kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara mempertanggungjawabkannya sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Manajemen Bank Muamalat Indonesia mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu bisnis Bank Muamalat Indonesia harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan pelaku bisnis dengan tetap memperhitungkan kepentingan para pemangku kepentingan. *Accountability contains the elements of clarity of functions within the organization and the way to hold responsible thus management can run effectively. Bank Muamalat Indonesia's Management must be accountable for the performance transparently and fairly. To that end, the business of Bank Muamalat Indonesia should be properly managed, measured and should be in accordance with the interests of the business player while taking into account the interests of stakeholders.*

Responsibilitas
"Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya"(QS Al-Muddatsir: 38).

Responsibility
"Every soul, for what it has earned, will be retained." (QS Al-Muddatsir: 38).

Pertanggungjawaban (*Responsibility)* mengandung unsur kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal serta tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan. Responsibilitas diperlukan agar dapat menjamin terpeliharanya kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai warga korporasi yang baik/*good corporate citizen*. Bank Muamalat Indonesia dan segenap Jajaran Bank Muamalat Indonesia dalam bertindak selalu berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip pengelolaan bank yang sehat, dengan tetap menyadari segala risiko dan implikasi negatif yang mungkin ditimbulkan oleh tindakannya. Bank Muamalat Indonesia dan Jajaran Bank Muamalat Indonesia harus selalu mengingat kepentingan seluruh pemangku kepentingan dalam menjalankan fungsinya dan menetapkan kebijaksanaan atau mengambil keputusan.

Responsibility contains the elements of compliance with the legislations and internal regulations as well as the responsibility towards the society and the environment. Responsibility is required to ensure long-term sustainability of the business and recognition as a good corporate citizen. Bank Muamalat Indonesia and the entire levels of Bank Muamalat Indonesia always uphold the principles of prudence in all of its actions as well as the conformity of the Bank's management with the applicable legislations and the principles of sound bank management, while remained aware of all the possible risks and negative implications caused by its actions. Bank Muamalat Indonesia and the entire levels of Bank Muamalat Indonesia must always consider the interests of all stakeholders in carrying out its functions and determine policies or make decisions.

Profesional
"Barangsiapa meniru-niru suatu kaum, maka ia termasuk golongan mereka" (HR Abu Daud).
"Sesungguhnya Allah mencintai seseorang apabila mengerjakan sesuatu pekerjaan, dilakukan secara profesional (itqon)" (HR Abu Ya'la dan dishahihkan oleh Albany).

Professional
"Whoever imitate a people, then it belonged to them" (HR Abu Dawud).
"Trully, God loves someone who carries out work in a professional manner (itqon)" (HR Abu Ya'la dan dishahihkan oleh Albany).

Profesional yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif, dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun *(independen*), bebas dari benturan kepentingan serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan Bank Muamalat Indonesia. Bank Muamalat Indonesia dan seluruh Jajaran Manajemen menjamin bahwa Bank Muamalat Indonesia dikelola secara profesional tanpa adanya benturan kepentingan dan dapat menghindari pengaruh/tekanan dari pihak manapun *(independen)* yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Implementasi prinsip profesional dan kemandirian dilaksanakan oleh Bank Muamalat Indonesia.

Professional namely possessing competence, able to act objectively, and free of the influence/pressure from other parties (independent), free of conflicts of interest and posseses a strong commitment to develop Bank Muamalat Indonesia. Bank Muamalat Indonesia and all levels of the Management ensure that Bank Muamalat Indonesia is managed in a professional manner without any conflicts of interest and can avoid the influence/pressure from other parties (independent) which are not in accordance with the legislations in force and the principles of sound corporation. Implementation of the principles of professional and independence are carried out by Bank Muamalat Indonesia.

Kesetaraan dan Kewajaran
"Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk berlaku adil dan berbuat kebaikan" (QS An-Nahl: 90).
"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu..." (QS An-Nisa:135).

Fairness
"Indeed, Allah orders justice and good conduct" (QS An-Nahl: 90)" (QS An-Nahl: 90).
"O you who have believed, be persistently standing firm in justice, witnesses for Allah, even if it be against yourselves or parents and relatives..."(QS An-Nisa:135).

Kewajaran dan kesetaraan (*fairness*) mengandung unsur perlakuan yang adil dan kesempatan yang sama sesuai dengan proporsinya dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kesetaraan mengandung unsur kesamaan perlakuan dan kesempatan, sehingga senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham, nasabah dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan dari masing-masing pihak yang bersangkutan antara lain:

1. Bank Muamalat Indonesia menerapkan prinsip kewajaran yang diimplementasikan sebagai keadilan dan kesetaraan (*equal treatment*) di dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bank Muamalat Indonesia menjamin bahwa setiap pemangku kepentingan akan mendapatkan perlakuan yang setara tanpa diskriminasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlau.

Fairness and equality contain the elements of fair treatment and equal opportunity in accordance with its proportion in fulfilling the rights of stakeholders under the agreement and the legislation in force. Equality contains the elements of similarity of treatment and opportunity, thus always consider the interests of shareholders, customers and other stakeholders based on the principles of fairness of each of the parties concerned.

1. *Bank Muamalat Indonesia applies the principle of fairness which is implemented as justice and equality (equal treatment) in fulfilling the rights of the Stakeholders arising under the agreement and the laws and regulations in force.*
2. *Bank Muamalat Indonesia ensures that all stakeholders will receive equal treatment without discrimination in accordance with the laws and regulations in force.*

Kebijakan Dasar Good Corporate Governance

Penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik, melekat tidak hanya dalam setiap kebijakan tetapi juga pada setiap jajaran Bank. Setiap jajaran Bank dituntut untuk menyadari risiko yang mungkin muncul dalam setiap pekerjaan yang dilakukan. Untuk menghindari risiko yang mungkin terjadi, harus menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagai landasan berfikir dan bertindak dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Keberhasilan internalisasi prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik dalam setiap kebijakan akan menjadikan pengelolaan Bank dilakukan secara terbuka, jelas, dapat dipertanggungjawabkan, adil serta independen.

Bank Muamalat menjadikan Anggaran Dasar Perusahaan sebagai dasar pedoman penerapan dan pelaksanaan prinsip-prinsip GCG yang telah

Good Corporate Governance Basic Policy

The application of the Good Corporate Governance principles is not only in every policy but also at every level of the Bank. Every employee is necessary to be aware of the risks that may arise in every work activity. To avoid from the risks that might occur, every element of the Bank must perform the principles of Good Corporate Governance as a basis for deeming and taking the initiatives in carrying out the duties and responsibilities. The successful internalisation of the principles of Good Corporate Governance in every policy will make the management of the Bank to be more transparent, definite, accountable, fair, and independent.

Bank Muamalat establishes the Company's Articles of Association as the basis guidelines for the implementation and application of GCG

disusun dari berbagai acuan Undang Undang dan peraturan regulator yang sesuai dengan kegiatan usaha Perusahaan.

Governance Framework

Bank mengimplementasikan tata kelola perusahaan melalui beberapa tahapan yang dimulai melalui:

1. **Komitmen Tata Kelola**
   Tahapan awal dalam implementasi adalah membangun komitmen jajaran perusahaan untuk menjadi bagian dalam implementasi tata kelola perusahaan. Bentuk implementasi komitmen dimulai dengan membangun landasan yang menjadi dasar pelaksanaan komitmen implementasi seperti Anggaran Dasar Perusahaan, Visi Misi Perusahaan dan *Code of Conduct*.
2. **Struktur Tata Kelola**
   Bank melengkapi dan menempatkan sumber daya yang tepat pada struktur perusahaan dan menyempurnakan berbagai infrastruktur pendukung untuk memastikan *governance process* dapat berjalan sebagaimana mestinya.
3. **Mekanisme Tata Kelola**
   Prinsip-prinsip Tata Kelola dibuat melekat dalam kebijakan, pedoman, prosedur kerja, dan aturan internal lainnya guna memastikan prinsip-prinsip tata kelola terlaksana memenuhi *governance process*nya.
4. **Sosialisasi dan Evaluasi**
   Untuk memastikan jajaran perusahaan dapat mengimplementasikan prinsip-prinsip tata kelola yang telah diinternalisasi dalam sistem perusahaan maka tahapan berikutnya adalah melakukan sosialisasi kepada jajaran perusahan. Dengan dilaksanakannya sosialisasi diharapkan jajaran perusahaan memahami dan dapat mengimplementasikan tata kelola dengan baik dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Evaluasi dilaksanakan untuk memantau sampai sejauh mana implementasi telah dilaksanakan, memperbaiki kekurangan untuk perbaikan kedepan.

Dasar Penerapan Corporate Governance

Penerapan GCG Bank Muamalat Indonesia mengacu kepada beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan regulator antara lain:

Undang-Undang: *Constitution:*	1. Undang Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah 2. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas *1. Law of the Republic of Indonesia No. 21 of 2008 concerning Sharia Banking;* *2. Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.*

principles that have been compiled from various laws and regulations in accordance with the Company's business activities.

Governance Framework

The Bank implements corporate governance through several stages including:

1. ***Governance Commitment***
   The initial stage in implementation is building the commitment of company management to be part of the implementation of corporate governance. The commitment is formed by having a solid foundation as basis of implementation the commitment such as the company's Articles of Association, the Company's Articles of Association, the Company's vision & mision, and code of conduct
2. ***Governance Structure***
   The Bank completes and places the right resources in the Company's structure as well as accomplish several supporting infrastructures to ensure that governance process is running as it is supposed to be.
3. ***Governance Mechanisms***
   The Governance Principles are arranged to be fitted in policies, guidelines, work procedures, and other internal rules to ensure that the governance principles are administered in compliance with the governance process.
4. ***Socialization and Evaluation***
   To make sure that all levels of the Company implement the principles of governance that have been internalised within the Company's system, the next step is then to disseminate information to its management. The socialisation, somehow, is expected that the entire levels will comprehend and be able to properly implement governance in carrying through their duties and responsibilities. Evaluations are conducted to monitor how far the implementation has been performed and to rectify deficiencies for future improvement.

Basic Implementation of Corporate Governance

The application of GCG Bank Muamalat Indonesia refers to several regulations issued by the government and regulators that include:

Peraturan Bank Indonesia: *Bank Indonesia's Regulations:*	1. Peraturan Bank Indonesia No.11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah 2. Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah; 3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/6/PBI/2012 tanggal 18 Juni 2012 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah *1. Bank Indonesia Regulation No. No.11/3/PBI/2009 regarding Sharia Commercial Banks* *2. Bank Indonesia Regulation No. 11/33/PBI/2009 concerning Implementation of Good Corporate Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units;* *3. Bank Indonesia Regulation Number 14/6/PBI/2012 dated on June 18, 2012, concerning Fit and Proper Test for Sharia Commercial Bank and Sharia Bussiness Unit*
Surat Edaran BI: *Bank Indonesia circular letters:*	SEBI No. 12/13/DPbS Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan GCG Bagi Bank Umum Syariah *SEBI No. 12/13/DPbS Year 2010 About GCG Implementation for Shariah General Bank.*
Peraturan OJK: *FSA Regulations:*	1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah 2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan 3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan 4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik 5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik 6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka 7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik 8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan 9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik 10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah 11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum 12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan OJK Nomor 10/POJK.04/2017. *1. Financial Services Authority Regulation Number 8/POJK.03/2014 concerning Risk-Based Rating of Sharia Commercial Bank and Sharia Business Unit.* *2. Financial Services Authority Regulation Number 17/POJK.03/2014 concerning Implementation of Integrated Risk Management for Financial Conglomerate.* *3. Financial Services Authority Regulation Number 18/POJK.03/2014 concerning the Implementation of Integrated Governance for Financial Conglomerate.* *4. Financial Services Authority Regulation Number 33/POJK.04/2014 concerning Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Company.* *5. Financial Services Authority Regulation Number 8/POJK.04/2015 concerning Issuer or Public Company Website.* *6. 6inancial Services Authority Regulation Number 21/POJK.04/2015 concerning Application of Corporate Governance Guidelines for Public Company.* *7. Financial Services Authority Regulation Number 31/POJK.04/2015 concerning Transparency of Material Information or Facts by Issuer or Public Company.* *8. Financial Services Authority Regulation Number 27/POJK.03/2016 concerning Assessment of Capability and Compliance for Parties Main Financial Services Institutions.* *9. Financial Services Authority Regulation Number 29/POJK.04/2016 concerning Annual Reports of Issuers or Public Company.* *10. Financial Services Authority Regulation Number 65/POJK.03/2016 concerning Application of Risk Management for Commercial Banks Sharia and Sharia Business Unit.* *11. Financial Services Authority Regulation Number 46/POJK.03/2017 concerning the Implementation of the Compliance Function of Commercial Banks* *12. Financial Services Authority Regulation Number 32/POJK.04/2014 concerning Plans and Organisation of General Meetings Public Company Shareholders as amended by FSA Regulation Number 10/POJK.04/2017.*

Surat Edaran OJK: *FSA circular letters:*	1. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah; 2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka; 3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.30/SEOJK.04/2016 tanggal 3 Agustus 2016 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik; *1. Financial Services Authority Circular No. 10/SEOJK.03/2014 concerning Soundness Rating of Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units;* *2. Financial Services Authority Circular No. 32/SEOJK.04/2015 concerning Guidelines for Governance of Public Companies;* *3. Financial Services Authority Circular Letter No. 30/SEOJK.04/2016 dated August 3, 2016 concerning the Form and Content of Annual Reports of Issuers or Public Companies.*
Lain - Lain *Others*	1. Anggaran Dasar PT Bank Muamalat Tbk 2. Pedoman Umum *Good Governance* Bisnis Syariah 3. Board Manual PT Bank Muamalat Indonesia Tbk 4. Kebijakan *Good Corporate Governance* PT Bank Muamalat Indonesia Tbk 5. Pedoman dan Prosedur Pelaksanaan Penanganan Pelaporan Pengaduan Nasabah PT Bank Muamalat Indonesia Tbk 6. Kode Etik Bankir 7. Kode Etik Bank Muamalat Indonesia 8. Ittifaq Muamalat. *1. Articles of Association of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk;* *2. General Guidelines for Sharia Business Good Governance;* *3. Manual Board of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk;* *4. Good Corporate Governance Policy of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk;* *5. Guidelines and Procedures for Implementing Customer Complaints Reporting PT Bank Muamalat Indonesia Tbk;* *6. Code of Ethics for Bankers;* *7. Bank Muamalat Code of Ethics;* *8. Ittifaq Muamalat.*

Governance Outcome

Bank Muamalat Indonesia berkomitmen menerapkan prinsip-prinsip GCG secara konsisten dengan tujuan sebagai berikut:

1. Mengendalikan dan mengarahkan hubungan antara Organ Perusahaan (Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah), karyawan, nasabah, mitra kerja, serta masyarakat dan lingkungan agar Bank dijalankan dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.
2. Meningkatkan citra *(image)* Bank Muamalat Indonesia menjadi semakin baik di tingkat nasional maupun regional.

Governance Outcome

Bank Muamalat Indonesia is committed to implement GCG principles consistently with the following objectives:

1. *Control and direct relationships between the Company's Organs (Shareholders, Board of Commissioners, Board of Directors and Sharia Supervisory Board), employees, customers, partners, as well as the public and environment in order for the Bank to run well in accordance with GCG principles.*
2. *Improving the image of Bank Muamalat Indonesia to be better at national and regional levels.*

3. Meningkatkan kinerja Bank Muamalat melalui program-program efisiensi Perusahaan yang tercipta dari terimplementasinya budaya GCG di setiap kegiatan operasional.
4. Meningkatkan pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan.
5. Mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan Bank Muamalat.
6. Mempersiapkan landasan yang kuat bagi pertumbuhan berkelanjutan Bank Muamalat.

3. Improve the performance of Bank Muamalat through the Company's efficiency programs created by the implementation of GCG culture in every operational activity.
4. Increase accountability to stakeholders.
5. Prevent the occurrence of irregularities in the management of Bank Muamalat Indonesia.
6. Prepare a strong foundation for the sustainable growth of Bank Muamalat Indonesia.

Sebagai dampak positif dari manifestasi penerapan dan penegakan tata kelola terhadap penciptaan budaya kerja dan keberlangsungan Perusahaan, Bank Muamalat mendapatkan manfaat berupa beberapa penghargaan yang diterima oleh Bank Muamalat Indonesia antara lain:

As a positive impact of the manifestation of the implementation and enforcement of governance on the creation of a work culture and sustainability of the Company, Bank Muamalat received benefits in the form of several awards received by Bank Muamalat Indonesia including:

No.	Nama Penghargaan *Awards*	Jenis Penghargaan *Type of Awards*	Waktu Penganugerahan *Date of Award*	Pemberi Penghargaan *Appreciator*
1.	2nd The Best Indonesia *Good Corporate Governance* Implementation 2019	The Best Indonesia Good Corporate Governance Implementation	23 Agustus 2019 *August 23, 2019*	Economic Review
2.	Peringkat 1 - Satisfaction, Loyalty, and Engagement Award 2019 *1st Rank - Satisfaction, Loyalty, and Engagement Award 2019*	Satisfaction, Loyalty, and Engagement Award	14 Maret 2019 *March 14, 2019*	Infobank
3.	Bronze Award – Learning & Development Category	HR Excellence Awards 2019	21 November 2019 *November 21, 2019*	Human Resources Online

Peningkatan Kualitas
Quality Improvement

Bank Muamalat secara bertahap telah melakukan berbagai inisiatif dalam upaya peningkatan kualitas implementasi GCG, diantaranya dengan:

1. Mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan dan prosedur secara berkala dalam rangka menjaga efektivitas, kecukupan dan kesesuaian kebijakan dan prosedur yang dimiliki dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Direksi secara berkesinambungan telah melakukan upaya-upaya dalam memperbaiki kinerja Bank dengan memperhatikan aspek kehati-hatian dan Tata Kelola yang Baik.
3. Melakukan penyempurnaan struktur organisasi Bank sejalan dengan fokus bisnis Bank.
4. Secara berkesinambungan melakukan pelatihan dan sertifikasi kepada pejabat dan pegawai.
5. Melakukan sosialisasi dalam rangka membangun budaya kepatuhan *(compliance culture)*, budaya risiko dan budaya anti fraud di lingkungan Bank.
6. Melakukan sosialisasi kode etik Bank dan *corporate culture*.
7. Setiap karyawan diwajibkan untuk membuat persetujuan secara elektronik surat pernyataan kepatuhan, pelaksanaan GCG dan deklarasi *anti fraud* secara berkala.
8. DPS dan Compliance Syariah melakukan pengawalan terhadap penerbitan produk dan aktivitas Bank agar sesuai dengan aspek syariah termasuk melakukan uji petik dalam memastikan penerapan kepatuhan syariah di unit bisnis.

Bank Muamalat has gradually carried out various initiatives in an effort to improve the quality of GCG implementation, among others with:

1. *Evaluate and update the policies and procedures gradually to maintain the productiveness, adequacy, and suitability of the policies and procedures with the provisions and legislation in force.*
2. *The Board of Directors has attempted to develop the Bank's performance by taking into account the prudential and Good Governance aspects, perpetually.*
3. *Advance the organisational structure of the Bank in line with the Bank's business focus.*
4. *Undertake training and certification to officials and employees, sustainably.*
5. *Conducting training and workshop (socialization) to build a compliance culture, risk culture, and anti-fraud culture within the Bank.*
6. *Disseminate the Bank's code of conducts and corporate culture.*
7. *Each employee is necessarily required to make electronic approvals of compliance statements, GCG implementation, and anti-fraud declarations, periodically.*
8. *Sharia Supervisory Board and Sharia Compliance are in charge of the issuance of Bank's products and activities based on sharia respects, including by conducting spotcheck in setting the seal on the implementation of sharia compliance in business units.*

Standar Kualitas Penerapan Corporate Governance

Pada prinsipnya pelaksanaan penerapan GCG di Bank Muamalat berjalan dengan baik dan dilaksanakan sebagai sebuah bentuk kerjasama antara Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh karyawan dalam setiap kegiatan dengan tujuan untuk melindungi kepentingan Bank, *shareholders* dan *stakeholders*.

Untuk memastikan kualitas penerapan GCG, Bank mengadopsi standar terbaik dalam penerapan GCG sesuai dengan Peraturan Peraturan Bank Indonesia tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

Standar-standar tersebut mengatur peran Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasannya untuk memastikan bahwa kepengurusan Perusahaan dilaksanakan oleh Direksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan memberikan nasihat/pendapat atas tindakan/ kegiatan strategis yang akan dan telah dilaksanakan oleh Direksi secara hati-hati untuk mencapai tujuan Perseroan. Direksi menegaskan dalam menjalankan fungsi kepengurusannya dilaksanakan secara amanah dan profesional serta menghindari terjadinya segala potensi benturan kepentingan.

Corporate Governance Implementation Quality standards

The GCG implementation at Bank Muamalat runs properly, and is committed as a form of cooperation amongst the Board of Commissioners, the Board of Directors, and all employees in each activity to protect the interests of the Bank, shareholders and stakeholders.

To ensure for the quality of GCG implementation, the Bank adopts the best standards in the application of GCG in accordance with the Bank Indonesia Regulation concerning Good Corporate Implementation Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units and Regulation of the Financial Services Authority regarding the Implementation of Governance Guidelines Manage Public Companies.

The standards govern the role of the Board of Commissioners in carrying out the supervisory functions to ensure that the management of the Company is well-executed by the Directors with the applicable laws and regulations and provides advice/views on strategic actions/ activities that will and have been undertaken by the Directors to achieve the Company's goals, cautiously. The Board of Directors emphasised that in carrying through management functions, it was done in a professional manner and avoided any potential conflicts of interest. In the same way, the other GCG organs work together to

Demikian juga dengan organ-organ GCG lainnya yang saling bersinergi untuk menciptakan seluruh kegiatan operasional Perseroan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Self Assessment GCG

Kewajiban bank syariah untuk melakukan penilaian sendiri *(self assessment)* akan penerapan GCG di dalam Perusahaan telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 10/SEOJK.03/2014 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah. *Self Assessment* dilakukan secara berkala, dengan memperhatikan 11 (sebelas) faktor penilaian pelaksanaan GCG yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, yaitu:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite;
4. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah;
5. Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa;
6. Penanganan benturan kepentingan;
7. Penerapan fungsi kepatuhan bank;
8. Penerapan fungsi audit internal;
9. Penerapan fungsi audit eksternal;
10. Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) ;
11. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan Good Corporate Governance dan pelaporan internal.

Pada tahun 2019, Bank Muamalat Indonesia melakukan penilaian sendiri (*self-Assessment*) pelaksanaan GCG secara individual dan konsolidasi dengan hasil peringkat 3 (tiga) yang mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Good Corporate Governance yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip Good Corporate Governance yang cukup memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Good Corporate Governance maka secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen Bank.

make all the Company's operational activities run under applicable laws and regulations.

Self Assessment GCG

The obligation of sharia banks to conduct a self assessment of the application of GCG in the Company is stipulated in Bank Indonesia Regulation No. 11/33/PBI/2009 dated 7 December 2009 concerning Implementation of Good Corporate Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units and Financial Services Authority Circular Letter No. 10/SEOJK.03/2014 Concerning Rating of Soundness of Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units. Self-assessment is carried out on 11 (eleven) assessment factors of GCG implementation stipulated by Bank Indonesia, namely:

1. *Implementation of duties and responsibilities of the Board of Commissioners;*
2. *Implementation of duties and responsibilities of the Board of Directors;*
3. *Completeness and implementation of the Committee's duties;*
4. *Implementation of duties and responsibilities of the Sharia Supervisory Board;*
5. *Implementation of sharia principles in the activities of funding and financing as well as services;*
6. *Handling of conflicts of interest;*
7. *Implementation of the bank's compliance functions;*
8. *Implementation of internal audit functions;*
9. *Implementation of external audit functions;*
10. *Legal Lending Limit;*
11. *Transparency of financial and non-financial conditions, report of Good Corporate Governance implementation and internal reporting.*

In 2019, Bank Muamalat Indonesia conducted an assessment (self-assessment) GCG implementation individually and consolidated with the results of rank 3 (three) that reflect The Bank's management has implemented Good Corporate Governance pretty well or moderate. This is reflected in the application of the principles of Good Corporate Governance adequate. If there are weaknesses in the application Good Corporate Governance principles are generally weak it is quite significant and requires sufficient attention from Bank management.

Analisis
Analysis

Dengan memperhatikan kertas kerja *self assessment* secara komprehensif dan terstruktur, mencakup baik *governance structure, governance process* dan *governance outcome* dapat diidentifikasi mengenai permasalahan berupa kelemahan dan penyebabnya *(root caused)* dan kekuatan pelaksanaan *Good Corporate Governance* sebagai berikut:

with regard to the self-assessment paper in a comprehensive and structured manner, covering both governance structure, governance process and governance outcomes can be identified regarding problems in the form of weaknesses and their causes (root caused) and the implementation strengths Good Corporate Governance as follows:

- Kekuatan pelaksanaan *Good Corporate Governance* PT Bank Muamalat Indonesia Tbk antara lain:
- *The strengths of implementing PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Good Corporate Governance include:*

Governance Structure

Bank Muamalat telah memiliki struktur organisasi Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah (DPS), Satuan Kerja Audit Intern, Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Kepatuhan yang memadai dan masing-masing fungsi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Komposisi anggota Dewan Komisaris, Direksi, DPS telah sesuai dengan regulasi dan skala bisnis Bank Muamalat. Seluruh anggota Direksi Bank Muamalat telah efektif menjabat karena telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK) oleh OJK. Pengangkatan DPS telah mendapatkan rekomendasi dari DSN-MUI dan permohonan persetujuan seorang anggota DPS yang diangkat melalui RUPSLB tanggal 16 Desember 2019 telah disampaikan kepada OJK. Sementara untuk Dewan Komisaris, seluruh Komisaris Independen yang berjumlah 3 (tiga) orang telah lulus PKK dan 2 (dua) anggota Dewan Komisaris (non independen) masih dalam proses PKK di OJK. Adapun rangkap jabatan anggota Direksi, DPS dan mayoritas anggota Dewan Komisaris Bank telah sesuai dengan ketentuan.

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan DPS telah melalui proses *assessment* oleh Komite Nominasi dan Remunerasi dengan memperhatikan faktor integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan sehingga anggota Dewan Komisaris, Direksi dan DPS memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris, Direksi dan DPS telah memiliki pedoman kerja yang mengatur pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dari masing-masing fungsi. Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pengawasan, Dewan Komisaris telah membentuk dan memperbarui keanggotaan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi serta Komite Tata Kelola Perusahaan. Direksi juga telah membentuk 4 (empat) komite yaitu *Risk Management Committee, IT Steering Committee,* ALCO dan *Human Capital Committee* guna mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.

Infrastruktur tata kelola Bank berupa kebijakan dan prosedur Bank, tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi cukup memadai dan mendukung kegiatan usaha Bank serta telah dikinikan secara berkala. Dalam rangka meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia, Bank juga telah menyelenggarakan *training/workshop*, sosialisasi dan sertifikasi.

Governance Structure

Bank Muamalat has an organizational structure of the Board of Commissioners, Directors, Sharia Supervisory Board (DPS), Internal Audit Work Unit, Risk Management Work Unit and Compliance Work Unit are adequate and each function carries out its duties and responsibilities well. The composition of the members of the Board of Commissioners, Directors, DPS is in accordance with regulations and the business scale of Muamalat Bank. All members The Board of Directors of Bank Muamalat has effectively served because it has passed the Assessment of Capability and Compliance (PKK) by the OJK. Appointment of DPS has obtained a recommendation from DSN-MUI and a request for approval from a DPS member appointed through the EGMS on the date December 16, 2019 was submitted to the FSA. While for the Board of Commissioners, all 3 (three) Independent Commissioners people have passed the PKK and 2 (two) members of the Board of Commissioners (non-independent) are still in the PKK process at OJK. The concurrent positions members of the Board of Directors, DPS and the majority of members of the Board of Commissioners of the Bank are in accordance with the provisions.

The appointment of members of the Board of Commissioners, Directors and DPS has been through an assessment process by the Nomination and Remuneration Committee by taking into account the factors of integrity, competence, and financial reputation so that members of the Board of Commissioners, Directors and DPS has sufficient competence and is relevant to his position to carry out his duties and responsibilities and is capable implementing competencies.

In undertaking the duties and responsibilities, the Board of Commissioners, the Board of Directors and DPS have set work guidelines the implementation of duties and responsibilities of each function. In order to assist the implementation of supervisory duties, the Board of Commissioners have formed and renewed the membership of the Audit Committee, Risk Oversight Committee, Nomination and Remuneration Committee and Corporate Governance Committee. The Board of Directors has also formed 4 (four) committees namely Risk Management Committee, IT Steering Committee, ALCO and the Human Capital Committee to support the effectiveness of the implementation of the duties and responsibilities of the Directors.

The Bank's governance infrastructure in the form of Bank policies and procedures, the main tasks and functions of each organizational structure are sufficient and supports the Bank's business activities and has been updated regularly. In order to improve the competency of Human Resources, the Bank has also held training/workshops, outreach and certification.

Governance Process

Dewan Komisaris telah melakukan upaya-upaya dalam rangka meningkatkan pelaksanaan aspek tata kelola perusahaan antara lain melakukan pengawasan terhadap kegiatan operasional Bank, memenuhi penyelenggaraan rapat-rapat Dewan Komisaris dan memperbarui keanggotaan komite level Dewan Komisaris. Komite-Komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris telah menyampaikan rekomendasi proses perbaikan kepada Dewan Komisaris. Dewan Komisaris dan Komite level Dewan Komisaris telah menyelenggarakan rapat sesuai dengan ketentuan. Dewan Komisaris telah menyelenggarakan rapat bersama Direksi guna melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris kepada Direksi. Dewan Komisaris telah menyetujui Rencana Bisnis Bank (RBB) yang telah disusun dengan memperhatikan kondisi faktor eksternal dan internal Bank. Dewan Komisaris juga telah melakukan pengawasan terhadap realisasi RBB dan menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada OJK.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya memastikan pemenuhan aspek syariah, DPS telah melakukan uji petik di beberapa unit bisnis/cabang. Pelaksanaan uji petik dibantu oleh 2 (dua) orang *Liasion Officer* yang berada di bawah supervisi unit kerja *Compliance*. DPS telah menyelenggarakan rapat rutin bulanan guna membahas dan memberikan opini terhadap usulan produk, jasa dan program sesuai dengan prinsip syariah yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI. DPS telah melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha Bank dan menyampaikan laporan hasil pengawasannya kepada OJK.

Direksi bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan kepengurusan Bank berdasarkan prinsip kehati-hatian, GCG dan syariah. Direksi telah menyusun Rencana Bisnis Bank (RBB) dan telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris. Proses pengambilan keputusan Direksi antara lain dilakukan melalui rapat Direksi yang diselenggarakan seminggu sekali. Dalam rangka merealisasikan target bisnis dalam RBB dan memperbaiki kinerja Bank, Direksi telah melakukan upaya-upaya antara lain menjalankan strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah, peyempurnaan end-to-end process pembiayaan goodbank dan newbank, melakukan pengelolaan risiko likuiditas, melakukan pengelolaan risiko reputasi, memperbaiki tata kelola operasional Bank, melakukan beberapa inisiatif project, Training/workshop & sosialisasi serta melaksanakan penerapan strategi pencegahan Anti Fraud.

Governance Process

The Board of Commissioners has made efforts in order to improve the implementation of aspects of corporate governance, among others supervising the Bank's operational activities, fulfill the Board of Commissioners' meetings and renewing membership Board of Commissioners level committee. Committees formed by the Board of Commissioners have submitted recommendations for the improvement process to the Board of Commissioners. The Board of Commissioners and Its Committee have convened meetings in accordance with the provisions. Board the Commissioners have held a meeting with the Directors to supervise the implementation of duties and responsibilities Directors and giving advice by the Board of Commissioners to the Directors. The Board of Commissioners has approved the Bank's Business Plan (RBB) prepared by taking into account the condition of external and internal factors of the Bank. The Board of Commissioners has also supervised the realisation of the RBB and submitting reports on the results of supervision to FSA.

In order to carry out its duties and responsibilities to ensure compliance with sharia aspects, DPS has conducted pick-test in several business unit/branches. The picking test is assisted by 2 (two) Liaison Officers who are under the supervision of the Compliance work unit. DPS has held regular monthly meetings to discuss and provide opinions on proposed products, services and programs in accordance with Sharia principles regulated in the DSN-MUI Fatwa. DPS has supervised the Bank's business activities and delivered report on the results of its supervision to the FSA.

The Board of Directors is fully responsible for the management of the Bank based on the principles of prudence, GCG and sharia. The Directors have prepared a Bank Business Plan (RBB) and have obtained the approval of the Board of Commissioners. The Board of Directors' decision-making process, among others conducted through a Board of Directors meeting held once a week. In order to realize the business targets in the Bank's Business Plan and improve the Bank's performance, the Board of Directors has made efforts such as implementing a strategy for solving problematic financing, improving end-to-end financing processes for goodbank and newbank, managing liquidity risk, managing reputation risk, improve the operational management of the Bank, undertake several project initiatives, trainings / workshops and implement an Anti Fraud prevention strategy.

Secara berkala, Bank Muamalat juga telah melakukan evaluasi dan pengkinian terhadap ketentuan internal dalam rangka menjaga efektivitas, kecukupan dan kesesuaian ketentuan internal dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip syariah. Pengajuan produk dan aktivitas baru telah dikaji/dievaluasi oleh fungsi-fungsi terkait yaitu Manajemen Risiko, Kepatuhan dan Legal serta telah mendapatkan opini/persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) atas kesesuaian produk dan aktivitas baru dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Melalui upaya-upaya perbaikan terhadap proses bisnis yang telah dilakukan, maka diharapkan dapat memperbaiki *governance outcome* dalam pelaksanaan tata kelola Bank Muamalat.

Governance Outcome

Rencana Bisnis Bank telah disusun dan dikaji secara komprehensif dengan memperhatikan peluang bisnis, kekuatan yang dimiliki Bank serta kelemahan dan ancaman. Direksi telah mengkomunikasikan Rencana Bisnis Bank dan kebijakan strategis Bank Muamalat termasuk kebijakan di bidang kepegawaian kepada seluruh karyawan untuk mencapai visi dan misi Bank Muamalat.

Setiap pengambilan keputusan Dewan Komisaris, DPS dan Direksi Bank Muamalat dilakukan melalui rapat yang dituangkan dalam risalah rapat dan telah ditindaklanjuti oleh fungsi terkait sebagai upaya perbaikan.
Produk dan aktivitas yang diterbitkan oleh Bank Muamalat telah sesuai dengan Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Setiap produk dan aktivitas yang diterbitkan oleh Bank telah mendapat opini syariah dari DPS. Prosedur pelaksanaan (*Standard Operating Procedures*/SOP) dalam penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa Bank juga telah sesuai dengan regulasi dan prinsip syariah.

- Beberapa faktor dalam pelaksanaan GCG yang masih perlu diperbaiki, oleh PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, antara lain:
  1. 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris dan seorang anggota DPS yang telah diangkat melalui RUPS masih dalam proses Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK) dan persetujuan oleh OJK.
  2. Permodalan masih perlu ditingkatkan untuk mendukung ekspansi Bank dan pemenuhan cadangan sesuai dengan regulasi.
  3. Pemenuhan tindak lanjut hasil temuan audit masih perlu ditingkatkan.

Periodically, Bank Muamalat has also conducted evaluations and updates on internal regulations in order to maintain effectiveness, adequacy and suitability of internal provisions with applicable laws and regulations and sharia principles. Product Submission and new activities have been reviewed/evaluated by related functions namely Risk Management, Compliance and Legal and have been obtained opinion/approval from the Sharia Supervisory Board (DPS) on the suitability of new products and activities with the National Sharia Council Fatwa - Indonesian Ulema Council (DSN-MUI).

Through efforts to improve business processes that have been made, it is expected to improve governance outcomes in Bank Muamalat's governance.

Governance Outcome

The Bank's Business Plan has been prepared and reviewed comprehensively by taking into account business opportunities, strengths owned by the Bank as well weaknesses and threats. The Board of Directors has communicated the Bank's Business Plan and Bank Muamalat's strategic policies including the policies at staffing to all employees to achieve the vision and mission of Bank Muamalat.

Every decision made by the Board of Commissioners, DPS and Board of Directors of Bank Muamalat is carried out through a meeting as outlined in the minutes of the meeting and has been followed up by related functions as an improvement effort. Products and activities issued by Bank Muamalat are in accordance with Fatwa issued by the National Sharia Board -
Indonesian Ulema Council (DSN-MUI). Every product and activity issued by the Bank has obtained sharia opinion from DPS. Procedure the implementation (Standard Operating Procedures/SOP) in collecting funds, channeling funds and providing Bank services is also appropriate with Islamic regulations and principles.

- *Several factors in implementing GCG that still need to be improved, by PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, including:*
  1. *2 (two) members of the Board of Commissioners and a member of SSB who have been appointed through the GMS are still in the Fit and Proper Test and approval process by FSA.*
  2. *Capital still needs to be increased to support the Bank's expansion and fulfilment of reserves in accordance with regulations.*
  3. *Fulfillment of follow-up on audit findings still needs to be improved.*

Penerapan Aspek dan Prinsip Tata Kelola Perusahaan Sesuai Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

The Implementation of Good Corporate Governance Aspect and Principles According to Financial Services Authority Regulation

Penerapan Aspek dan Prinsip Tata Kelola Perusahaan Sesuai Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
The Implementation of Good Corporate Governance Aspect and Principles According to Financial Services Authority Regulation

No.	Prinsip *Principal*	Rekomendasi *Recommendation*	Penjelasan Rekomendasi OJK *Explanation of OJK Recommendations*	Penjelasan Penerapan di Bank Muamalat *Explanation of Implementation at Muamalat Bank*	Implementasi *Implementation*
1	Aspek 1: Hubungan Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham; *Aspect 1: Relationship Between the Public Company and Shareholders in Guaranteeing the Rights of the Shareholders*				
	Prinsip 1 Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan RUPS ***Principal 1*** *Increase the Value of Implementing the General Meeting of Shareholders (GMS).*	1. Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara *(voting)* baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham. *1. The Public Company has a way or technical procedure of voting in public or in private, which will put forward the independence and interest of the shareholders.*	Setiap saham dengan hak suara yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara *(one share one vote)*. Pemegang saham dapat menggunakan hak suaranya pada saat pengambilan keputusan, terutama dalam pengambilan keputusan dengan cara pengumpulan suara *(voting)*. Namun demikian, mekanisme pengambilan keputusan dengan cara pengumpulan suara *(voting)* baik secara terbuka maupun tertutup belum diatur secara rinci. Perusahaan Terbuka direkomendasikan mempunyai prosedur pengambilan suara dalam pengambilan keputusan atas suatu mata acara RUPS. Adapun prosedur pengambilan suara *(voting)* tersebut harus menjaga independensi ataupun kebebasan pemegang saham. Sebagai contoh, dalam pengumpulan suara (*voting*) secara terbuka dilakukan dengan cara mengangkat tangan sesuai dengan instruksi pilihan yang ditawarkan oleh pimpinan RUPS. Sedangkan, dalam pengumpulan suara *(voting)* secara tertutup dilakukan pada keputusan yang membutuhkan kerahasiaan ataupun atas permintaan pemegang saham, dengan cara menggunakan kartu suara ataupun dengan penggunaan *electronic voting*. *Each share has one vote. Shareholders may use their vote in decision making, especially by voting during the process of decision-making. However, the mechanism of decision-making by voting has not been arranged in a detailed manner whether it is in public or in private.* *The public company should have a voting procedure in decision-making according to the agenda of the GMS. The procedure should also maintain the independence and the freedom of the shareholders. For example, the public voting is done by raising hands according to the instruction of choice that has been offered by the Chairman of the meeting. On the other hand, private voting is done by either voter cards or electronic voting.*	Bank telah memiliki ketentuan tata cara pengambilan keputusan melalui pengumpulan suara (voting) dalam RUPS baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi dan kepentingan pemegang saham. Ketentuan tersebut diatur dalam Anggaran Dasar Bank dan Prosedur Pelaksanaan RUPS sebagai berikut: 1. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. 2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan RUPS adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar. 3. Pemungutan suara mengenai diri orang dan pemungutan suara mengenai hal-hal lain diatur sebagai berikut: a. Diri orang dilakukan secara tertulis dengan suara tertutup yang tidak ditandatangani; b. Mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali apabila ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang hadir dalam RUPS *The Bank has established decision-making procedures through open or closed voting in the GMS either that promote independence and the interests of shareholders. These provisions are stipulated in the Bank's Articles of Association and the GMS's Implementation Procedures as follows:* *1. GMS Decisions making deliberation is conducted deliberation.* *2. In the event of a an unreached deliberation, the GMS decision is valid if approved by more than 1/2 (one half) of the total shares with voting rights were present at the GMS, unless the legislation and/or the Articles of Association determine that decision is valid if approved by a greater affirmative vote.* *3. A vote on self-person and voting on other matters is set as follows:* *a. The self-made in writing with a closed sound that is not signed; and* *b. Regarding the other things done orally, unless the Chairman of the GMS decides otherwise without objection from 1 (one) or more shareholders present at the GMS.*	Telah diterapkan *Has Been Implemented*

Penerapan Aspek dan Prinsip Tata Kelola Perusahaan Sesuai Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
The Implementation of Good Corporate Governance Aspect and Principles According to Financial Services Authority Regulation

No.	Prinsip *Principal*	Rekomendasi *Recommendation*	Penjelasan Rekomendasi OJK *Explanation of OJK Recommendations*	Penjelasan Penerapan di Bank Muamalat *Explanation of Implementation at Muamalat Bank*	Implementasi *Implementation*
		2. Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan.	Kehadiran seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka bertujuan agar setiap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dapat memperhatikan, menjelaskan dan menjawab secara langsung permasalahan yang terjadi atau pertanyaan yang diajukan oleh pemegang saham terkait mata acara dalam RUPS.	RUPS Tahunan Tanggal 17 Mei 2019 RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 17 Mei 2019 dihadiri oleh seluruh anggota Direksi dan Dewan Pengawas Syariah. Dari 3 (tiga) anggota Dewan Komisaris yang telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan, seluruhnya hadir dalam RUPS. Sementara 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris yang belum lulus PKK, tidak hadir dalam RUPS. RUPS Luar Biasa Tanggal 17 Mei 2019 RUPS Luar Biasa yang diselenggarakan pada tanggal 17 Mei 2019 dihadiri oleh seluruh anggota Direksi. Dari 3 (tiga) orang anggota DPS, yang hadir dalam RUPSLB sebanyak 2 (orang). Dari 3 (tiga) anggota Dewan Komisaris yang telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan, seluruhnya hadir dalam RUPS. Sementara 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris yang belum lulus PKK, tidak hadir dalam RUPS. RUPS Luar Biasa Tanggal 16 Desember 2019 RUPS Luar Biasa yang diselenggarakan pada tanggal 16 Desember 2019 dihadiri oleh seluruh anggota Direksi. Anggota DPS yang hadir 1 (orang), sementara 2 (dua) orang anggota DPS lainnya tidak hadir karena telah mengajukan surat pengunduran diri. Dari 3 (tiga) anggota Dewan Komisaris yang telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan, seluruhnya hadir dalam RUPS. Sementara 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris yang belum lulus PKK, tidak hadir dalam RUPS.	
		2. The Board of Directors and Board of Commissioners of the public company are present in the AGMS.	*The presence of the Board of Directors and Board of Commissioners of the public company is required so that the Board of Directors and Board of Commissioners are able to observe, explain, and answer directly the agendarelated problems or questions that are given by the shareholders in the GMS.*	*Annual General Meeting of Shareholders on May 17, 2019* *Annual GMS held on May 17, 2019 was attended by all members of the Board of Directors and Board Sharia Superintendent. From 3 (three) members The Board of Commissioners who passed the Fit and Proper Test, all of it present at the AGM. While 2 (two) members of the Board of Commissioners who have not yet graduated the Fit and Proper Test, not present at the AGM.* *Extraordinary General Meeting of Shareholders on May 17, 2019* *Extraordinary GMS held on May 17, 2019 was attended by all members of the Board of Directors. From 3 (three) people DPS member, who attended the EGMS as many as 2 (people). From 3 (three) members the Board of Commissioners who passed the Fit and Proper Test, all of it present at the AGM. While 2 (two) members of the Board of Commissioners who have not yet graduated the Fit and Proper Test, not present at the AGM.* *Extraordinary General Meeting of Shareholders on December 16, 2019* *Extraordinary GMS held at December 16, 2019 was attended by all members of the Board of Directors. DPS members who there were 1 person, while 2 people were present other DPS members did not attend due to they had submitted a letter of resignation. Of 3 (three) members of the Board of Commissioners who have passed the Fit and Proper Test, all present at the GMS. While 2 (two) members of the Board of Commissioners who have not passed the Fit and Proper Test, were not present at the GMS.*	

Penerapan Aspek dan Prinsip Tata Kelola Perusahaan Sesuai Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
The Implementation of Good Corporate Governance Aspect and Principles According to Financial Services Authority Regulation

No.	Prinsip *Principal*	Rekomendasi *Recommendation*	Penjelasan Rekomendasi OJK *Explanation of OJK Recommendations*	Penjelasan Penerapan di Bank Muamalat *Explanation of Implementation at Muamalat Bank*	Implementasi *Implementation*
		3. Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs Web Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun . *3. The summary of meeting minutes of the GMS is available on the public company website for at least 1 (one) year.*	Perusahaan Terbuka wajib membuat ringkasan risalah RUPS dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing (minimal dalam bahasa Inggris), serta diumumkan 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan kepada masyarakat, yang salah satunya melalui Situs Web Perusahaan Terbuka. Ketersediaan ringkasan risalah RUPS pada Situs Web Perusahaan Terbuka memberikan kesempatan bagi pemegang saham yang tidak hadir untuk mendapatkan informasi penting dalam penyelenggaraan RUPS secara mudah dan cepat. Oleh karena itu, ketentuan tentang jangka waktu minimal ketersediaan ringkasan risalah RUPS di Situs Web dimaksudkan untuk menyediakan kecukupan waktu bagi pemegang saham untuk memperoleh informasi tersebut. *The Public Company is obliged to make summary of meeting minutes of the GMS in Bahasa Indonesia and in a foreign language (at least in English). It must be announced in 2 (two) working days after the meeting is executed for the public through the public company website. The availability of the summary of meeting minutes provides an opportunity to absent shareholders to get important information during the meeting quickly and easily. The provisions of how long the summary of meeting minutes may be available is to determine the adequate time for shareholders to retrieve the information.*	Bank telah menyusun ringkasan risalah RUPS baik dalam Bahasa Indonesia maupun Bahasa Inggris dan melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat 2 (dua) hari kerja setelah pelaksanaan RUPS, salah satunya adalah melalui Situs Web Bank (www. bankmuamalat.co.id) pada menu hubungan investor-RUPS yang tersedia selama lebih dari 1 (satu) tahun. *The Bank has recorded the GMS resolution summary in Indonesian and English language and perform information disclosure to the public 2 (two) days after the GMS, one of the disclosure was performed through the Bank's website (www.bankmuamalat.co.id) in Investor Relation-GMS menu). The information is available for more than 1 (one) year.*	Telah diterapkan *Has Been Implemented*
	Prinsip 2 Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor. ***Principal 2*** *Increase the Quality of Communication Between the Public*	1. Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor. *1. The Company has a policy of open communication with shareholders or investors.*	Adanya komunikasi antara Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dimaksudkan agar para pemegang saham atau investor mendapatkan pemahaman lebih jelas atas informasi yang telah dipublikasikan kepada masyarakat, seperti laporan berkala, keterbukaan informasi, kondisi atau prospek bisnis dan kinerja, serta Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Terbuka. Disamping itu, pemegang saham atau investor juga dapat menyampaikan masukan dan opini kepada manajemen Perusahaan Terbuka. Kebijakan komunikasi dengan para pemegang saham atau investor menunjukan komitmen Perusahaan Terbuka dalam melaksanakan komunikasi dengan para pemegang saham atau investor. Dalam kebijakan tersebut dapat mencakup strategi, program, dan waktu pelaksanaan komunikasi, serta panduan yang mendukung pemegang saham atau investor untuk berpartisipasi dalam komunikasi tersebut. *Communication between the Public Company with shareholders or investors meant that shareholders and investors gain a clearer understanding of the information that has been published to the public, such as newsletters, information disclosure, condition or business prospects and performance, as well as the Public Company's implementation of corporate governance. In addition, shareholders or investors can also submit feedback and opinions to the management of the Public Company. Communication policy with shareholders or investors shows the commitment of the Public Company in carrying out communications with shareholders or investors. This policy may include strategy, program, and the timing of the communication, and guidance that supports shareholders or investors to participate in the communication.*	Di Kebijakan GCG diatur bahwa dalam melaksanakan hubungan dengan Pemegang Saham, Bank Muamalat Indonesia senantiasa mendorong penerapannya berdasarkan ketentuan sebagai berikut: 1. melindungi hak-hak Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan; 2. menyelenggarakan Daftar Pemegang Saham secara tertib dan teratur sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan; 3. menyediakan informasi mengenai Perseroan secara tepat waktu, benar dan teratur bagi seluruh Pemegang Saham, kecuali hal-hal yang bersifat rahasia; dan 4. memberikan penjelasan yang lengkap dan informasi yang akurat mengenai penyelenggaraan RUPS. Bank Muamalat Indonesia melakukan komunikasi dengan para pemegang saham melalui media komunikasi antara lain melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), website Bank (www.bankmuamalat.co.id), e-mail helpdesk: investor.relations@bankmuamalat.co.id dan melalui surat menyurat dan/atau Fax. *In the GCG policy regulates that in carrying out the relationship with the Shareholder, Bank Muamalat Indonesia continues to encourage its application based on the following conditions:* *1. Protect the rights of shareholders in accordance with the legislation and the Articles of Association;* *2. Maintain the List of Shareholders in an orderly and organized matter in accordance with the legislation and the company's article of association;* *3. Provide information regarding the Company in a timely manner, and regularly to all shareholders, except the things that are secret;* *4. Provide a complete explanation and accurate information regarding the General Meeting of Shareholders.* *Bank Muamalat Indonesia communicates with its shareholders with a medium of communication through the General Meeting of Shareholders (GMS), the Bank's website (www.bankmuamalat.co.id), helpdesk email investor.relations@bankmuamalat.co.id and correspondence/ Fax.*	Telah diterapkan *Has Been Implemented*

Penerapan Aspek dan Prinsip Tata Kelola Perusahaan Sesuai Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
The Implementation of Good Corporate Governance Aspect and Principles According to Financial Services Authority Regulation

No.	Prinsip *Principal*	Rekomendasi *Recommendation*	Penjelasan Rekomendasi OJK *Explanation of OJK Recommendations*	Penjelasan Penerapan di Bank Muamalat *Explanation of Implementation at Muamalat Bank*	Implementasi *Implementation*
		2. Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam Situs Web. *2. The Company has a policy of open communication with shareholders or investors.*	Pengungkapan kebijakan komunikasi merupakan bentuk transparansi atas komitmen Perusahaan Terbuka dalam memberikan kesetaraan kepada semua pemegang saham atau investor atas pelaksanaan komunikasi. Pengungkapan informasi tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan peran pemegang saham atau investor dalam pelaksanaan program komunikasi Perusahaan Terbuka. *Communication between the Public Company with shareholders or investors meant that shareholders and investors gain a clearer understanding of the information that has been published to the public, such as newsletters, information disclosure, condition or business prospects and performance, as well as the Public Company's implementation of corporate governance. In addition, shareholders or investors can also submit feedback and opinions to the management of the Public Company.*	Mekanisme komunikasi Pemegang Saham dengan Bank telah disiapkan salurannya sebagaimana dijelaskan pada website Bank. *The communication mechanism of the Shareholders with the Bank has been prepared by its channel as described on the Bank's website.*	Telah diterapkan *Has Been Implemented*
II	Aspek 2: Fungsi dan Peran Dewan Komisaris *Aspect 2: Functions and Roles of the Board of Commissioners*				
	Prinsip 3 Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris ***Principal 3*** *Strengthen the Membership and Composition of the Board of Commissioners*	1. Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka. *1. Determination of number of the Board of Commissioners members considering the conditions of the Public Company.*	Jumlah anggota Dewan Komisaris dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas dari Dewan Komisaris. Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka wajib mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang berdasarkan ketentuan peraturan OJK tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Selain itu, perlu juga mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka yang antara lain yang meliputi karakteristik, kapasitas, dan ukuran, serta pencapaian tujuan dan pemenuhan kebutuhan bisnis yang berbeda diantara Perusahaan Terbuka. Namun demikian, jumlah anggota Dewan Komisaris yang terlalu besar berpotensi mengganggu efektivitas pelaksanaan fungsi Dewan Komisaris. *Number of the Board of Commissioners members may affect the effectiveness of the implementation of duties of the Board of Commissioners. The determination of number of the Board of Commissioners members of the Public Company shall be based on the provisions of the prevailing laws and regulations. At least 2 (two) members based on the provisions of the Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 on the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies. In addition, it is also necessary to consider the conditions of the Public Company which include characteristics, capacities and sizes, as well as the achievement of objectives and the fulfillment of different business needs among the Public Companies. However, the excessive number of the Board of Commissioners members may potentially disrupt the effectiveness of the implementation of the Board of Commissioners functions.*	Per Desember 2019, jumlah anggota Dewan Komisaris adalah 5 (lima) orang di mana 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen dan berdomisili di Indonesia. Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris tersebut telah memenuhi regulasi dan mempertimbangkan karakteristik, kapasitas, ukuran, dan komposisi terhadap Direksi serta pencapaian tujuan dan pemenuhan kebutuhan bisnis Bank. *As of December 2019, a number of Board Members Commissioners are 5 (five) people where 3 (three) members of the Board of Commissioners is an Independent Commissioner and domiciled in Indonesia. Determination of the amount the member of the Board of Commissioners has meet regulations and consider characteristics, capacity, size, and composition of Directors and achievements the purpose and fulfilment of business needs Bank.*	Telah diterapkan *Has Been Implemented*

Penerapan Aspek dan Prinsip Tata Kelola Perusahaan Sesuai Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
The Implementation of Good Corporate Governance Aspect and Principles According to Financial Services Authority Regulation

No.	Prinsip *Principal*	Rekomendasi *Recommendation*	Penjelasan Rekomendasi OJK *Explanation of OJK Recommendations*	Penjelasan Penerapan di Bank Muamalat *Explanation of Implementation at Muamalat Bank*	Implementasi *Implementation*
		2. Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan. *2. Determination of the Board of Commissioners members composition pays attention to diversity of skills, knowledge, and experience required.*	Komposisi Dewan Komisaris merupakan kombinasi karakteristik baik dari segi organ Dewan Komisaris maupun anggota Dewan Komisaris secara individu, sesuai dengan kebutuhan Perusahaan Terbuka. Karakteristik tersebut dapat tercermin dalam penentuan keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka. Komposisi yang telah memperhatikan kebutuhan Perusahaan Terbuka merupakan suatu hal yang positif, khususnya terkait pengambilan keputusan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang lebih luas. *Composition of the Board of Commissioners is a combination of characteristics both in terms of the Board of Commissioners organs and members of the Board of Commissioners individually, in accordance with the needs of the Public Company. Such characteristics may be reflected in the determination of skills, knowledge, and experience required for the implementation of supervisory and advisory duties by the Board of Commissioners. Composition which has taken into account the needs of the Public Company is a positive thing, especially regarding decision-making in the context of the implementation of supervisory functions which are performed by taking into account various broader aspects.*	Komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan di mana keberagaman tersebut tercermin dalam keahlian dan pengalaman yang dimiliki masing-masing anggota Dewan Komisaris. Anggota Dewan Komisaris memiliki keahlian pada bidang: • Pasar modal dan investasi • Perbankan syariah • Asuransi • Industri keuangan • Manajemen strategis • Keuangan *The composition of the Board of Commissioners members takes into account the diversity of skills, knowledge, and experience required where such diversity is reflected in the skills and experience of each member of the Board of Commissioners. Each of the 5 (five) members of the Board of Commissioners has different skills such as:* • *Capital and Investment Markets* • *Sharia Banking* • *Insurance* • *Financial Industry* • *Strategic Management* • *Finance*	Telah diterapkan *Has Been Implemented*
	Prinsip 4 Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris. *Principal 4* *Improve the Quality of the Implementation of Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners*	1. Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (*Self Assessment)* untuk menilai kinerja Dewan Komisaris. *1. The Board of Commissioners has a self-assessment policy to assess the performance of the Board of Commissioners.*	Kebijakan penilaian sendiri (*Self Assessment*) Dewan Komisaris merupakan suatu pedoman yang digunakan sebagai bentuk akuntabilitas atas penilaian kinerja Dewan Komisaris secara kolegial. *Self Assessment* atau penilaian sendiri dimaksud dilakukan oleh masing-masing anggota untuk menilai pelaksanaan kinerja Dewan Komisaris secara kolegial, dan bukan menilai kinerja individual masing-masing anggota Dewan Komisaris. Dengan adanya *Self Assessment* ini diharapkan masing-masing anggota Dewan Komisaris dapat berkontribusi untuk memperbaiki kinerja Dewan Komisaris secara berkesinambungan. Dalam kebijakan tesebut dapat mencakup kegiatan penilaian yang dilakukan beserta maksud dan tujuannya, waktu pelaksanaannya secara berkala, dan tolok ukur atau kriteria penilaian yang digunakan sesuai dengan dengan rekomendasi yang diberikan oleh fungsi nominasi dan remunerasi Perusahaan Terbuka, dimana adanya fungsi tersebut telah diwajibkan dalam Peraturan OJK tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik. *The Board of Commissioners' self-assessment policy is a guideline used as a form of accountability for the collective performance of the Board of Commissioners. Self-assessment is conducted by each member to assess the performance of the Board of Commissioners collectively, rather than assessing the individual performance of each member of the Board of Commissioners. With this self-assessment is expected that each member of the Board of Commissioners can contribute to improve the performance of the Board of Commissioners on an ongoing basis.* *The policy may include assessment activities undertaken along with their aims and objectives, periodic implementation time, and benchmark or criteria of assessment used in accordance with the recommendations provided by the nomination and remuneration functions of the Public Company, in which the functionality has been required by the Financial Services Authority Regulation No. 34/POJK.04/2014 on the Nomination and Remuneration Committee of Issuers or Public Companies.*	Dewan Komisaris telah memiliki kebijakan penilaian sendiri (Self-Assessment) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris. *The Board of Commissioners has a policy of self-assessment for assess the performance of the Board of Commissioners.*	Telah diterapkan *Has Been Implemented*

Penerapan Aspek dan Prinsip Tata Kelola Perusahaan Sesuai Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
The Implementation of Good Corporate Governance Aspect and Principles According to Financial Services Authority Regulation

No.	Prinsip *Principal*	Rekomendasi *Recommendation*	Penjelasan Rekomendasi OJK *Explanation of OJK Recommendations*	Penjelasan Penerapan di Bank Muamalat *Explanation of Implementation at Muamalat Bank*	Implementasi *Implementation*
		2. Kebijakan penilaian sendiri (*Self Assessment)* untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka. *2. The self-assessment policy to assess the performance of the Board of Commissioners is disclosed in the Public Company's Annual Report.*	Pengungkapan kebijakan *Self Assessment* atas kinerja Dewan Komisaris dilakukan tidak hanya untuk memenuhi aspek transparansi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, namun juga, untuk memberikan keyakinan khususnya kepada para pemegang saham atau investor atas upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam meningkatkan kinerja Dewan Komisaris. Dengan adanya pengungkapan tersebut pemegang saham atau investor mengetahui mekanisme *check and balance* terhadap kinerja Dewan Komisaris. *Disclosure of the self-assessment policy on the performance of the Board of Commissioners is conducted not only to fulfill the transparency aspect as a form of accountability for the implementation of its duties, but also to give confidence to shareholders or investors for the efforts to improve the Board of Commissioners' performance. With the disclosure, shareholders or investors know the mechanism of check and balance on the performance of the Board of Commissioners.*	Kebijakan penilaian sendiri (Self-Assessment) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris telah diungkapkan dalam Laporan Tahunan Bank. *Self-assessment policy to assess the performance of the Board of Commissioners has been disclosed in the Bank's Annual Report.*	Telah diterapkan *Has Been Implemented*
		3. Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan. *3. The Board of Commissioners has a policy related to the resignation of members of the Board of Commissioners if involved in a financial crime.*	Kebijakan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan kebijakan yang dapat meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap Perusahaan Terbuka, sehingga integritas perusahaan akan tetap terjaga. Kebijakan ini diperlukan untuk membantu kelancaran proses hukum dan agar proses hukum tersebut tidak mengganggu jalannya kegiatan usaha. Selain itu, dari sisi moralitas, kebijakan ini membangun budaya beretika di lingkungan Perusahaan Terbuka. Kebijakan tersebut dapat tercakup dalam Pedoman ataupun Kode Etik yang berlaku bagi Dewan Komisaris. Selanjutnya, yang dimaksud dengan terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan adanya status terpidana terhadap anggota Dewan Komisaris dari pihak yang berwenang. Kejahatan keuangan dimaksud seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan serta Tindakan Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. *The resignation policy of the Board of Commissioners members who involved in a financial crime is a policy that can increase stakeholders' trust towards the Public Companies, so that the integrity of the company will be maintained. This policy is required to assist in the smooth running of legal process and to ensure that the legal process does not interfere with business activities. In addition, in terms of morality, this policy builds an ethical culture within the Public Companies. Such policy may be covered in the Guideline or Code of Conduct applicable to the Board of Commissioners. Furthermore, what is meant by involved in a financial crime is the status of convicted person against the members of the Board of Commissioners from the authorized party. Such financial crimes include manipulation and various forms of embezzlement in the financial services as well as Money Laundering Crime Act as referred to in Law No. 8 Year 2010 on the Prevention and Eradication of Money Laundering.*	Dalam Board Manual Bank Muamalat Indonesia di bab Etika Berkaitan dengan Penyuapan dan Kejahatan Keuangan diatur bahwa anggota Dewan Komisaris yang terlibat dalam tindak kejahatan keuangan sebagai status terpidana maka harus mengundurkan diri dari jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris. *In the Board Manual of Bank Muamalat Indonesiain the chapter of Ethics Related to Bribery and Financial Crimes are stipulated that the member of the Board of Commissioners who involved in financial crimes as convicted person shall resign from his position as a member of the Board of Commissioners.*	Telah diterapkan *Has Been Implemented*

Penerapan Aspek dan Prinsip Tata Kelola Perusahaan Sesuai Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
The Implementation of Good Corporate Governance Aspect and Principles According to Financial Services Authority Regulation

No.	Prinsip *Principal*	Rekomendasi *Recommendation*	Penjelasan Rekomendasi OJK *Explanation of OJK Recommendations*	Penjelasan Penerapan di Bank Muamalat *Explanation of Implementation at Muamalat Bank*	Implementasi *Implementation*
		4. Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi. *4. Board of Commissioners or Committee who run the Nomination and Remuneration functions shall establish a succession policy in the Nomination process of the Board of Directors members.*	Berdasarkan ketentuan Peraturan OJK tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, komite yang menjalankan fungsi nominasi mempunyai tugas untuk menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi. Salah satu kebijakan yang dapat mendukung proses Nominasi sebagaimana dimaksud adalah kebijakan suksesi anggota Direksi. Kebijakan mengenai suksesi bertujuan untuk menjaga kesinambungan proses regenerasi atau kaderisasi kepemimpinan di perusahaan dalam rangka mempertahankan keberlanjutan bisnis dan tujuan jangka panjang perusahaan. *Based on the provisions of the Financial Services Authority Regulation No. 34/POJK.04/2014 on the Nomination and Remuneration Committee of Issuers or Public Companies, the committee who run the nomination function has the duty to develop policy and criteria required in the Nomination process of candidates for the Board of Directors members. One of the policies that can support the Nomination process is the succession policy of the Board of Directors members. The succession policy aims to maintain the continuity of the regeneration process or leadership cadre in the company in order to maintain business sustainability and long-term objectives of the company.*	Bank telah memiliki dan menerapkan program *Talent Management dan Succession Plan*. Talent Management mempersiapkan Pool of Talent dari Bank sebagai upaya menyediaan dan penguatan Sumber Daya Insani di Bank. Suksesi diterapkan untuk penyiapan kader-kader terbaik dari Pool of Talent Bank yang siap menduduki posisi-posisi kritikal termauk posisi Direksi. Bank telah memiliki database Pool of Talent dan Successor berdasarkan proses identifikasi talent dan suksesor dengan menggunakan metodologi yang disiapkan Bank. Proses validasi dan kalibrasi dilakukan atas Talent dan Suksesor baik di tingkat Direktorat maupun di tingkat Direksi untuk posisi-posisi strategis yaitu posisi satu level dibawah Direksi dan Region Head. Database ini diperbaharui setiap tahun dan menjadi referensi Manajemen dalam melakukan rotasi maupun promosi Karyawan serta untuk kebutuhan nominasi jabatan strategis termasuk Direksi. *The Bank has owned and implemented Talent Management and Succession Plan program. Talent Management prepares Pool of Talent from the Bank as an effort to provide and strengthen Human Resources at the Bank. Succession is implemented to prepare the best cadres from the Bank's Pool of Talent who are ready to occupy critical positions including the Board of Directors position. The Bank already has database of the Pool of Talent and Successor based on the talent and successor identification process using a methodology prepared by the Bank. The validation and calibration process is carried out on both Talent and Successor at the Directorate level as well as the Board of Directors level for strategic positions, one level position below the Board of Directors and Region Head. This database is updated annually and becomes the reference of Management in rotation and promotion of Employees and for the needs of nomination of strategic positions including the Board of Directors.*	Telah diterapkan *Has Been Implemented*

Penerapan Aspek dan Prinsip Tata Kelola Perusahaan Sesuai Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
The Implementation of Good Corporate Governance Aspect and Principles According to Financial Services Authority Regulation

No.	Prinsip *Principal*	Rekomendasi *Recommendation*	Penjelasan Rekomendasi OJK *Explanation of OJK Recommendations*	Penjelasan Penerapan di Bank Muamalat *Explanation of Implementation at Muamalat Bank*	Implementasi *Implementation*
III	Aspek 3: Fungsi dan Peran Direksi *Aspect 3: Functions and Role of the Board of Directors*				
	Prinsip 5 Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi. ***Principal 5*** *Strengthen the Membership and Composition of the Board of Directors.*	1. Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektifitas dalam pengambilan keputusan. *1. Determination of number of the Board of Directors members considering the Public Companies conditions and the effectiveness of decision making.*	Sebagai organ perusahaan yang berwenang dalam pengurusan perusahaan, penentuan jumlah Direksi sangat mempengaruhi jalannya kinerja Perusahaan Terbuka. Dengan demikian, penentuan jumlah anggota Direksi harus dilakukan melalui pertimbangan yang matang dan wajib mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dimana berdasarkan Peraturan OJK tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang. Disamping itu, dalam penentuan jumlah Direksi harus didasarkan pada kebutuhan untuk mencapai maksud dan tujuan Perusahaan Terbuka dan disesuaikan dengan kondisi Perusahaan Terbuka, meliputi karakteristik, kapasitas dan ukuran Perusahaan Terbuka serta bagaimana tercapainya efektivitas pengambilan keputusan Direksi. *As the organ of the Company authorized in the management of the Company, determination of number of the Board of Directors members greatly affects the performance of the Public Companies. Thus, the determination of number of the Board of Directors members shall be conducted through careful consideration and shall be subject to the provisions of the applicable Laws and Regulations, under the Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.34/2014 on the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers and Public Companies shall consist of at least 2 (two) members. In addition, the determination of number of the Board of Directors members shall be based on the requirement to achieve the aims and objectives of the Public Companies and adjusted to the conditions of the Public Companies which include characteristics, capacities, and sizes of the Public Companies and how to achieve the effectiveness of the Board of Directors' decision-making.*	Komposisi Direksi telah sesuai dengan regulasi dan telah mempertimbangkan karakteristik, kapasitas, dan skala usaha Bank. Per Desember 2019, jumlah Direksi sebanyak 6 (enam) orang dengan pembagian tugas sebagai Direktur Utama, Direktur Bisnis Ritel, Direktur Risiko, Direktur Keuangan, Direktur Operasi dan Direktur Kepatuhan. Direksi memiliki keahlian dan pengalaman yang sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. *The composition of the Directors is in accordance with regulation and have considered business characteristics, capacity and scale Bank. As of December 2019, the number of Directors as many as 6 (six) people with the distribution duties as President Director, Retail Business Director, Risk Director, Finance Director, Operations Director and Compliance Director. Directors have expertise and experience in the field their respective duties.*	Telah diterapkan *Has Been Implemented*
		2. Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan, keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan. *2. Member of the Board of Directors who is in charge of accounting or finance has the skills and/or knowledge in accounting.*	Seperti halnya Dewan Komisaris, keberagaman komposisi anggota Direksi merupakan kombinasi karakteristik yang diinginkan baik dari segi organ Direksi maupun anggota Direksi secara individu, sesuai dengan kebutuhan Perusahaan Terbuka. Kombinasi tersebut ditentukan dengan cara memperhatikan keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang sesuai pada pembagian tugas dan fungsi jabatan Direksi dalam mencapai tujuan Perusahaan Terbuka. Dengan demikian, pertimbangan kombinasi karakteristik dimaksud akan berdampak dalam ketepatan proses pencalonan dan penunjukan individual anggota Direksi ataupun Direksi secara kolegial. *Similarly like the Board of Commissioners, the diversity of composition of the Board of Directors members is a combination of desirable characteristics both in terms of organ of the Board of Directors and members of the Board of Directors individually, in accordance with the needs of the Public Companies. The combination is determined by taking into acount the appropriate skills, knowledge and experience on the division of duties and functions of the Board of Directors in achieving the objectives of the Public Companies. Therefore, the consideration of characteristics combination will have an impact in the accuracy of the nomination process and the individual appointment of the Board of Directors members or the Board of Directors collectively.*	Komposisi anggota Direksi juga memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan sesuai pembagian fungsi, tugas dan wewenang Direksi dalam mencapai tujuan Bank. *Composition of the Board of Directors members also takes into account the diversity of skills, knowledge, and experience required by which devide in function, duties and authorities of the Board of Directors in achieving the Bank's objectives.*	Telah diterapkan *Has Been Implemented*

Penerapan Aspek dan Prinsip Tata Kelola Perusahaan Sesuai Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
The Implementation of Good Corporate Governance Aspect and Principles According to Financial Services Authority Regulation

No.	Prinsip *Principal*	Rekomendasi *Recommendation*	Penjelasan Rekomendasi OJK *Explanation of OJK Recommendations*	Penjelasan Penerapan di Bank Muamalat *Explanation of Implementation at Muamalat Bank*	Implementasi *Implementation*
		3. Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi. *3. Members of the Board of Directors who are in charge of accounting or finance have expertise and/or knowledge in accounting.*	Laporan Keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban manajemen atas pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh Perusahaan Terbuka, yang wajib disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum di Indonesia dan juga peraturan OJK terkait, antara lain peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai penyajian dan pengungkapan Laporan Keuangan Perusahaan Terbuka. Berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai tanggung jawab Direksi atas Laporan Keuangan, Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas Laporan Keuangan, yang ditandatangani Direktur Utama dan anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan. Dengan demikian, pengungkapan dan penyusunan informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan akan sangat tergantung pada keahlian, dan/atau pengetahuan Direksi, khususnya anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan. Adanya kualifikasi keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi yang setidaknya dimiliki anggota Direksi dimaksud dapat memberikan keyakinan atas penyusunan Laporan Keuangan, sehingga Laporan Keuangan tersebut dapat diandalkan oleh para pemangku kepentingan (*stakeholders*) sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi terkait Perusahaan Terbuka dimaksud. Keahlian dan/atau pengetahuan tersebut dapat dibuktikan dengan latar belakang pendidikan, sertifikasi pelatihan dan/atau pengalaman kerja terkait. *Financial Statements is management's accountability report on the management of resources owned by the Public Companies, which must be prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards and the related Financial Services Authority regulations, including the laws and regulations on Capital Market sector governing the presentation and disclosure of Financial Statements of Public Companies. Based on the laws and regulations in the Capital Market sector governing the responsibilities of the Board of Directors on the Financial Statements, the Board of Directors is jointly responsible for the Financial Statements signed by the President Director and member of the Board of Directors who is in charge of accounting and finance.*	Direktur yang membawahkan bidang akuntansi atau keuangan memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja di bidang akuntansi dan keuangan meraih gelar sarjana Akuntansi dari Universitas Indonesia dan memiliki pengalaman berkarir di akuntan publik Ernst & Young (1993-2003). Chief Financial Officer & Legal Entity Controller - JP Morgan Indonesia (JP Morgan Chase Bank Jakarta Branch & PT JP Morgan Securities Indonesia) dan Controller - PT Bank Rabobank International Indonesia; terakhir menjabat sebagai CFO & Finance Director PT Bank QNB Kesawan Tbk (2012-2015) sebelum menjabat sebagai Direktur Keuangan Bank Muamalat yang diangkat melalui RUPS Luar Biasa tanggal 7 September 2015. *Director in charge of the field accounting or finance has a background behind education and work experience in accounting and finance Bachelor of Accounting degree from the University Indonesia and has a career experience in Ernst & Young's public accountant (1993-2003). Chief Financial Officer & Legal Entity Controller - JP Morgan Indonesia (JP Morgan Chase Bank Jakarta Branch & PT JP Morgan Securities Indonesia) and Controller - PT Bank Rabobank International Indonesia; lastly served as CFO & Finance Director of PT Bank QNB Kesawan Tbk (2012-2015) before served as Finance Director of Bank Muamalat was appointed through the Extraordinary General Meeting of Shareholders Ordinary 7 September 2015.*	

Penerapan Aspek dan Prinsip Tata Kelola Perusahaan Sesuai Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
The Implementation of Good Corporate Governance Aspect and Principles According to Financial Services Authority Regulation

No.	Prinsip *Principal*	Rekomendasi *Recommendation*	Penjelasan Rekomendasi OJK *Explanation of OJK Recommendations*	Penjelasan Penerapan di Bank Muamalat *Explanation of Implementation at Muamalat Bank*	Implementasi *Implementation*
	Prinsip 6 Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi. *Principal 6* *Improve the Quality of Duties and Responsibilities of the Board of Directors.*	1. Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (*Self Assessment)* untuk menilai kinerja Direksi. *1. The Board of Directors has a self-assessment policy to assess the performance of the Board of Directors.*	Seperti halnya pada Dewan Komisaris, kebijakan penilaian sendiri (*Self Assessment*) Direksi merupakan suatu pedoman yang digunakan sebagai bentuk akuntabilitas atas penilaian kinerja Direksi secara kolegial. *Self Assessment* atau penilaian sendiri dimaksud dilakukan oleh masing-masing anggota Direksi untuk menilai pelaksanaan kinerja Direksi secara kolegial, dan bukan menilai kinerja individual masing-masing anggota Direksi. Dengan adanya *Self Assessment* ini diharapkan masing-masing anggota Direksi dapat berkontribusi untuk memperbaiki kinerja Direksi secara berkesinambungan. Dalam kebijakan tesebut dapat mencakup kegiatan penilaian yang dilakukan beserta maksud dan tujuannya, waktu pelaksanaannya secara berkala, dan tolak ukur atau kriteria penilaian yang digunakan sesuai dengan dengan rekomendasi yang diberikan oleh fungsi nominasi dan remunerasi Perusahaan Terbuka, dimana pembentukan fungsi tersebut telah diwajibkan dalam Peraturan OJK tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik. *Similarly like the Board of Commissioners, self-assessment of the Board of Directors is a guideline used as a form of accountability for the assessment of the Board of Directors' performance collectively. Self-assessment is carried out by each member of the Board of Directors to assess the implementation of the Board of Directors' performance collectively, and not assessing the individual performance of each member of the Board of Directors. With this self-assessment is expected that each member of the Board of Directors can contribute to improve the performance of the Board of Directors on an ongoing basis.* *Such policy may include assessment activities undertaken along with the purposes and objectives, periodic implementation time, and benchmark or criteria of assessment used in accordance with the recommendations given the Public Companies' nomination and remuneration functions, in which the formation of such functions shall be required in the Financial Services Authority Regulation No. 34/POJK.04/2014 on the Nomination and Remuneration Committee of Issuers or Public Companies.*	Direksi telah memiliki kebijakan penilaian sendiri (self assessment) untuk menilai kinerja Direksi secara kolegial. Selain itu Self-Assessment kinerja Direksi juga dilakukan secara berkala terhadap governance structure, process dan outcome di level Direksi. Berdasarkan hasil Self-Assessment tersebut telah dilakukan upaya-upaya yang perlu ditingkatkan untuk peningkatan kinerja ke depan. *The Board of Directors has an appraisal policy own (self-assessment) to assess collegial performance of the Directors. In addition, Self-Assessment of the performance of the Directors also carried out periodically against governance structure, process and outcome at the Directors level. Based on the results the Self-Assessment has been undertaken efforts that need to be increased for performance improvement going forward.*	Telah diterapkan *Has Been Implemented*

Penerapan Aspek dan Prinsip Tata Kelola Perusahaan Sesuai Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
The Implementation of Good Corporate Governance Aspect and Principles According to Financial Services Authority Regulation

No.	Prinsip *Principal*	Rekomendasi *Recommendation*	Penjelasan Rekomendasi OJK *Explanation of OJK Recommendations*	Penjelasan Penerapan di Bank Muamalat *Explanation of Implementation at Muamalat Bank*	Implementasi *Implementation*
		2. Kebijakan penilaian sendiri (*Self Assessment)* untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan Perusahaan Terbuka. *2. Self-assessment policy to assess the Board of Directors' performance is disclosed in the Public Companies' Annual Report.*	Pengungkapan kebijakan *Self Assessment* atas kinerja Direksi dilakukan tidak hanya untuk memenuhi aspek transparansi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, namun juga untuk memberikan informasi penting atas upaya-upaya perbaikan dalam pengelolaan Perusahaan Terbuka. Informasi tersebut sangat bermanfaat untuk memberikan keyakinan kepada pemegang saham atau investor bahwa terdapat kepastian pengelolaan perusahaan terus dilakukan ke arah yang lebih baik. Dengan adanya pengungkapan tersebut pemegang saham atau investor mengetahui mekanisme *check and balance* terhadap kinerja Direksi. *Disclosure of self-assessment policy on the performance of the Board of Directors is conducted not only to fulfill the transparency aspect as a form of accountability for the implementation of its duties, but also to provide important information on the improvement efforts in the management of the Public Companies. Such information is very useful to provide confidence to the shareholders or investors on certainty of corporate management continues to be carried out in a better direction. With the disclosure, shareholders or investors know the mechanism of check and balance on the performance of the Board of Directors.*	Kebijakan Self-Assessment atas kinerja Direksi diungkapkan dalam bagian Penilaian Kinerja Direksi di Laporan Tahunan. *Self-assessment policy on the performance of the Board of Directors is disclosed in the Board of Directors' Performance Evaluation section in the Annual Report.*	Telah diterapkan *Has Been Implemented*
		3. Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan. *3. The Board of Directors has a policy related to the resignation of members of the Board of Directors if involved in a financial crime.*	Kebijakan pengunduran diri anggota Direksi yang terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan kebijakan yang dapat meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap Perusahaan Terbuka, sehingga integritas perusahaan akan tetap terjaga. Kebijakan ini diperlukan untuk membantu kelancaran proses hukum dan agar proses hukum tersebut tidak mengganggu jalannya kegiatan usaha. Selain itu, dari sisi moralitas, kebijakan ini akan membangun budaya beretika di lingkungan Perusahaan Terbuka. Kebijakan tersebut dapat tercakup dalam Pedoman ataupun Kode Etik yang berlaku bagi Direksi. Selanjutnya, yang dimaksud dengan terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan adanya status terpidana terhadap anggota Direksi dari pihak yang berwenang. Kejahatan keuangan dimaksud seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan serta Tindakan Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. *The resignation policy of the Board of Directors members who involved in a financial crime is a policy that can increase stakeholders' trust towards the Public Companies, so that the integrity of the company will be maintained. This policy is required to assist in the smooth running of legal process and to ensure that the legal process does not interfere with business activities. In addition, in terms of morality, this policy builds an ethical culture within the Public Companies. Such policy may be covered in the Guideline or Code of Conduct applicable to the Board of Directors.* *Furthermore, what is meant by involved in a financial crime is the status of convicted person against the members of the Board of Commissioners from the authorized party. Such financial crimes include manipulation and various forms of embezzlement in the financial services as well as Money Laundering Crime Act as referred to in Law No. 8 Year 2010 on the Prevention and Eradication of Money Laundering.*	Dalam Board Manual Bank Muamalat Indonesia Dalam bab Etika Berkaitan dengan Penyuapan dan Kejahatan Keuangan bagi Direksi antara lain diatur bahwa: 1. Direksi dilarang melakukan tindakan manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan serta tindakan pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pencucian Uang. 2. Anggota Direksi yang terlibat dalam tindak kejahatan keuangan sebagai status terpidana, maka harus mengundurkan diri dari jabatan sebagai anggota Direksi. *In the Board Manual of Bank Muamalat Indonesia in the chapter of Ethics Related to Bribery and Financial Crimes for the Board of Directors, among others stipulated that:* *1. The Board of Directors is prohibited from performing any manipulation actions and any forms of embezzlement in the financial services activities and the criminal act of money laundering as referred to in Law No. 8 Year 2010 on Prevention and Eradication of Money Laundering.* *2. Member of the Board of Directors who involved in financial crimes as a convicted person shall resign from his position as a member of the Board of Directors.*	Telah diterapkan *Has Been Implemented*

Penerapan Aspek dan Prinsip Tata Kelola Perusahaan Sesuai Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
The Implementation of Good Corporate Governance Aspect and Principles According to Financial Services Authority Regulation

No.	Prinsip *Principal*	Rekomendasi *Recommendation*	Penjelasan Rekomendasi OJK *Explanation of OJK Recommendations*	Penjelasan Penerapan di Bank Muamalat *Explanation of Implementation at Muamalat Bank*	Implementasi *Implementation*
IV	Aspek 4: Partisipasi Pemangku Kepentingan *Aspect 4: Stakeholder Participation*				
	Prinsip 7 Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan. ***Principal 7*** *Improve the Corporate Governance Aspect through Stakeholders Participation.*	1. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya *insider trading.* *1. Public Companies have a policy to prevent the occurrence of insider trading.*	Seseorang yang mempunyai informasi orang dalam dilarang melakukan suatu transaksi Efek dengan menggunakan informasi orang dalam sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Pasar Modal. Perusahaan Terbuka dapat meminimalisir terjadinya *insider trading* tersebut melalui kebijakan pencegahan, misalnya dengan memisahkan secara tegas data dan/ atau informasi yang bersifat rahasia dengan yang bersifat publik, serta membagi tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan informasi dimaksud secara proporsional dan efisien. *A person who has inside information is prohibited from engaging in a Securities transaction by using inside information as referred to in the Capital Market Law. Public Companies can minimize the occurrence of insider trading through prevention policy, for example by strictly separating confidential data and/or information with public information, as well as dividing the duties and responsibilities for the management of such information in a proportionate and efficient manner.*	Dalam kebijakan GCG Bank, diatur bahwa Bank senantiasa menyediakan informasi yang cukup, akurat, dipercaya dan tepat waktu kepada segenap pemangku kepentingan dengan mengedepankan prinsip equal treatment. Jajaran Perseroan dilarang untuk membeli atau menjual saham (common stock) atau surat berharga Perseroan lainnya pada saat yang bersangkutan bertanggung jawab atas informasi penting yang tidak dimaksudkan untuk konsumsi publik yang dapat mempengaruhi nilai harga saham dan surat berharga Perseroan. Sebagai informasi bahwa meskipun Bank Muamalat Indonesia merupakan perusahaan terbuka, namun tidak melakukan penawaran umum saham di pasar modal, sehingga potensi terjadinya insider trading sangat rendah. *In the Bank's GCG policy, it is stipulated that the Bank always provides sufficient, accurate, reliable and timely information to all stakeholders by prioritizing the principle of equal treatment. The Company's ranks are prohibited from buying or selling shares (common stock) or other securities of the Company when it is responsible for important information that is not intended for public consumption that may affect the value of the Company's share price and securities. For information that although Bank Muamalat Indonesia is a Public Company, but every public offering of shares is carried out in the capital market which makes the potential for insider trading to be very low.*	Telah diterapkan *Has Been Implemented*
		2. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan anti fraud. *2. Public Companies have anti-corruption and anti-fraud policies*	Kebijakan anti korupsi bermanfaat untuk memastikan agar kegiatan usaha Perusahaan Terbuka dilakukan secara legal, prudent, dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Kebijakan tersebut dapat merupakan bagian dalam kode etik, ataupun dalam bentuk tersendiri. Dalam kebijakan tersebut dapat meliputi antara lain mengenai program dan prosedur yang dilakukan dalam mengatasi praktik korupsi, balas jasa (kickbacks), fraud, suap dan/atau gratifikasi dalam Perusahaan Terbuka. Lingkup dari kebijakan tersebut harus menggambarkan pencegahan Perusahaan Terbuka terhadap segala praktik korupsi baik memberi atau menerima dari pihak lain. *Anti-corruption policy is useful to ensure that the Company's business activities are conducted legally, prudently, and in accordance with the principles of good governance. The policy may be part of the code of conduct or in its own form. In the policy may include among others the programs and procedures undertaken in overcoming practices of corruption, kickbacks, fraud, bribery and/or gratification in the Public Companies. The scope of the policy should illustrate the prevention of the Public Companies against any corrupt practices of either giving or receiving from others.*	Ketentuan terkait anti korupsi dan anti fraud telah diatur dalam Board Manual dan Prosedur. Bank telah menyusun Prosedur Anti Fraud yang secara umum mengatur tugas dan tanggung jawab unit kerja Anti Fraud, wewenang anti fraud, pencegahan, deteksi, investigasi, pelaporan, sanksi, pemantauan, evaluasi tindak lanjut dan whistle blowing system. *Anti-corruption and anti fraud related provisions are set out in the Board Manual and Procedure. The Bank has drawn up Anti-Fraud Procedures which generally governs the tasks and responsibilities of the Anti Fraud work unit, anti fraud authority, prevention, detection, investigation, reporting, sanction, monitoring, followup evaluation and whistle blowing system.*	

Penerapan Aspek dan Prinsip Tata Kelola Perusahaan Sesuai Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
The Implementation of Good Corporate Governance Aspect and Principles According to Financial Services Authority Regulation

No.	Prinsip *Principal*	Rekomendasi *Recommendation*	Penjelasan Rekomendasi OJK *Explanation of OJK Recommendations*	Penjelasan Penerapan di Bank Muamalat *Explanation of Implementation at Muamalat Bank*	Implementasi *Implementation*
		3. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor. 3. Public Companies have a policy on the selection and improvement of ability of suppliers or vendors	Kebijakan tentang seleksi pemasok atau *vendor* bermanfaat untuk memastikan agar Perusahaan Terbuka memperoleh barang atau jasa yang diperlukan dengan harga yang kompetitif dan kualitas yang baik. Sedangkan kebijakan peningkatan kemampuan pemasok atau *vendor* bermanfaat untuk memastikan bahwa rantai pasokan (*supply chain*) berjalan dengan efisien dan efektif. Kemampuan pemasok atau *vendor* dalam memasok/memenuhi barang atau jasa yang dibutuhkan perusahaan akan mempengaruhi kualitas *output* perusahaan. Pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut dapat menjamin kontinuitas pasokan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas yang dibutuhkan Perusahaan Terbuka. Adapun cakupan kebijakan ini meliputi kriteria dalam pemilihan pemasok atau *vendor*, mekanisme pengadaan yang transparan, upaya peningkatan kemampuan pemasok atau *vendor*, dan pemenuhan hak-hak yang berkaitan dengan pemasok atau *vendor*. *Policy on the selection of suppliers or vendors is useful to ensure that the Public Companies acquire the necessary goods or services at competitive prices and good quality. While the policy of improving the skills of supplers or vendors is useful that the supply chain is running efficiently and effectively. The ability of suppliers and vendors in supplying/fulfilling goods or services required by the Company will affect the quality of the Company's output.* *Thus, the implementation of such policies can ensure the continuity of supply, both in terms of quantity and quality required by the Public Companies. Scope of such policies include criteria in the selection of suppliers or vendors, transparent procurement mechanism, efforts to improve the ability of suppliers or vendors, and the fulfillment of rights related to suppliers or vendors.*	Kebijakan GCG mengatur bahwa Bank dalam berinteraksi dengan Penyedia Barang/Jasa antara lain dengan pemasok dan pihak lain yang melakukan transaksi usaha dengan Bank senantiasa menjalin hubungan baik didasarkan atas dasar profesionalisme, kepercayaan, kejujuran, saling menghormati dan memberi kesempatan yang sama dalam memperoleh informasi yang relevan sesuai hubungan bisnis dengan Perseroan sehingga masing-masing pihak dapat membuat keputusan atas dasar pertimbangan yang adil dan wajar. Dalam menjalin hubungan antara Bank dengan Penyedia Barang/ Jasa, seluruh pihak berkewajiban untuk merahasiakan informasi dan melindungi kepentingan masing-masing pihak. Dalam melaksanakan hubungan dengan Penyedia Barang/Jasa, Bank senantiasa mengedepankan prinsip-prinsip sebagai berikut: • Pengadaan barang/jasa harus dilakukan melalui seleksi dan persaingan yang sehat dengan memberikan perlakukan yang setara terhadap semua calon mitra bisnis yang telah memenuhi syarat/kriteria tertentu dari Perseroan. • Semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/ jasa termasuk syarat teknis administrasi, tata cara evaluasi serta hasil evaluasi disampaikan kepada calon mitra bisnis yang akan melakukan bisnis dengan Perseroan. • Memberikan perlakukan yang sama bagi semua calon mitra bisnis secara proporsional dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu dengan cara apapun. • Mekanisme seleksi pemasok atau vendor telah diatur secara detil dalam Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa. *GCG policies regulate that the Bank in interacting with Providers of Goods/Services among others with suppliers and other parties who conduct business transactions with the Bank establish good relationship based on the basis of professionalism, trust, honesty, mutual respect and equal opportunity in obtaining relevant information in accordance with the business relationship with the Bank so that each party may make a decision on the basis of fair and reasonable consideration. In establishing relationship between the Bank and Providers of Goods/Services, all parties are obliged to keep the confidentiality of information and protect the interests of each party. In establishing relationship with Providers of Goods/Services, the Bank always prioritizes the following principles:* • *Procurement of goods/services shall be made through fair selection and competition by providing equal treatment to all prospective business partners who have met certain terms/criteria from the Bank.* • *All provisions and information on procurement of goods/services including technical administrative requirements, evaluation procedures and evaluation results shall be submitted to prospective business partners who will conduct business with the Bank.* • *Provide equal treatment to all prospective business partners proportionately without any intention to benefit a particular party in any way.* • *Suppliers or vendors selection mechanism has been set up in detail in the Procurement of Goods and Services Procedures.*	Telah diterapkan *Has Been Implemented*

Penerapan Aspek dan Prinsip Tata Kelola Perusahaan Sesuai Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
The Implementation of Good Corporate Governance Aspect and Principles According to Financial Services Authority Regulation

No.	Prinsip *Principal*	Rekomendasi *Recommendation*	Penjelasan Rekomendasi OJK *Explanation of OJK Recommendations*	Penjelasan Penerapan di Bank Muamalat *Explanation of Implementation at Muamalat Bank*	Implementasi *Implementation*
		4. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur. *4. Public Companies have a policy on the fulfillment of creditor rights.*	Kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pinjaman kepada kreditur. Tujuan dari kebijakan dimaksud adalah untuk menjaga terpenuhinya hak-hak dan menjaga kepercayaan kreditur terhadap Perusahaan Terbuka. Dalam kebijakan tersebut mencakup pertimbangan dalam melakukan perjanjian, serta tindak lanjut dalam pemenuhan kewajiban Perusahaan Terbuka kepada kreditur. *Policy on the fulfillment of creditor rights is used as a guide in lending to creditors. Purpose of the policy is to maintain the fulfillment of rights and maintain the creditors' trust to the Public Companies. The policy includes consideration in making agreements, as well as follow-up in fulfilling the obligations of the Public Companies to the creditors.*	Pemenuhan hak-hak kreditur telah diatur pada prosedur produk Bank serta tercantum dalam perjanjian. *Fulfillment of creditors' rights that have been regulated in the Bank's product procedures and contained in the agreement.*	Telah diterapkan *Has Been Implemented*
		5.Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan sistem *whistleblowing.* *5. Public Companies have a whistleblowing system policy.*	Kebijakan sistem *whistleblowing* yang telah disusun dengan baik akan memberikan kepastian perlindungan kepada saksi atau pelapor atas suatu indikasi pelanggaran yang dilakukan karyawan atau manajemen Perusahaan Terbuka. Penerapan kebijakan sistem tersebut akan berdampak pada pembentukan budaya tata kelola perusahaan yang baik. Kebijakan sistem *whistleblowing* mencakup antara lain jenis pelanggaran yang dapat dilaporkan melalui sistem *whistleblowing*, cara pengaduan, perlindungan dan jaminan kerahasiaan pelapor, penanganan pengaduan, pihak yang mengelola aduan, dan hasil penanganan dan tindak lanjut pengaduan. *A well-structured whistleblowing system policy will provide assurance of protection to witnesses or whistleblowers for an indication of infringement by the employee or the management of the Public Companies. Implementation of the system policy will have an impact on the establishment of a good corporate governance culture. Whistleblowing system policy includes types of violations that can be reported through the whistleblowing system, complaints, protection and secrecy of whistleblowers, complaints handling, complaints management, and the results of the handling and follow-up of complaints.*	Perseroan telah memiliki kebijakan pelaksanaan Whistleblowing System sebagaimana diatur dalam Kebijakan GCG dan Prosedur Anti Fraud yang mencakup: • Perlindungan kepada Whistleblower. • Sistem Pelaporan dan Mekanisme Tindak Lanjut Laporan Whistleblower. • Pengaduan indikasi fraud. • Contact Center whistleblowing system *The Bank already has a Whistleblowing System policy as stipulated in the GCG Policy and Anti-Fraud Procedures which includes:* • *Protection to Whistleblower.* • *Reporting System and Follow-up Mechanism of Whistleblower's Report.* • *Fraud indication complaints.* • *Contact Center of whistleblowing system*	Telah diterapkan *Has Been Implemented*

Penerapan Aspek dan Prinsip Tata Kelola Perusahaan Sesuai Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
The Implementation of Good Corporate Governance Aspect and Principles According to Financial Services Authority Regulation

No.	Prinsip *Principal*	Rekomendasi *Recommendation*	Penjelasan Rekomendasi OJK *Explanation of OJK Recommendations*	Penjelasan Penerapan di Bank Muamalat *Explanation of Implementation at Muamalat Bank*	Implementasi *Implementation*
		6. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan *6. Public Companies have a policy of providing long-term incentives to Board of Directors and employees.*	Insentif jangka panjang merupakan insentif yang didasarkan atas pencapaian kinerja jangka panjang. Rencana insentif jangka panjang mempunyai dasar pemikiran bahwa kinerja jangka panjang perusahaan tercermin oleh pertumbuhan nilai dari saham atau target-target jangka panjang perusahaan lainnya. Insentif jangka panjang bermanfaat dalam rangka menjaga loyalitas dan memberikan motivasi kepada Direksi dan karyawan untuk menigkatkan kinerja atau produktivitasnya yang akan berdampak pada peningkatan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Adanya suatu kebijakan insentif jangka panjang merupakan komitmen nyata Perusahaan Terbuka untuk mendorong pelaksanaan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan Karyawan dengan syarat, prosedur dan bentuk yang disesuaikan dengan tujuan jangka panjang Perusahaan Terbuka. Kebijakan dimaksud dapat mencakup, antara lain: maksud dan tujuan pemberian insentif jangka panjang, syarat dan prosedur dalam pemberian insentif, serta kondisi dan risiko yang harus diperhatikan oleh Perusahaan Terbuka dalam pemberian insentif. Kebijakan tersebut juga dapat tercakup dalam kebijakan remunerasi Perusahaan Terbuka yang ada. *Long-term incentives are incentives based on the achievement of long-term performance. Long-term incentive plans have a rationale that the long-term performance of the Company is reflected by the growth in the value of shares or other long-term targets of the Company. Long-term incentives are useful in order to maintain loyalty and motivate the Board of Directors and employees to improve their performance or productivity that will impact on improving the Company's performance over the long-term.* *The existence of a long-term incentive policy is a real commitment of the Public Companies to encourage the implementation of providing long-term incentives to the Board of Directors and Employees on terms, procedures and forms that are tailored to the long-term objectives of the Public Companies. Such policy may include mean and objectives of providing long-term incentives, terms and procedures for incentives, as well as conditions and risks that the Public Companies should pay attention to in providing incentives. The policy may also be included in the existing remuneration policy of the Public Companies.*	Long Term Incentive Plan (LTIP) dikembangkan sebagai bagian dari penerapan konsep Talent Management dan Succession Plan di Bank. Talent dan Successor Pool yang tersedia merupakan karyawan terpilih yang diharapkan menjadi penggerak utama proses bisnis perusahaan. Salah satu upaya untuk mempertahankan mereka adalah melalui program retensi baik yang bersifat finansial maupun non finansial. Program LTIP merupakan salah satu program retensi dari sisi finansial dimana skema yang dibuat mengacu pada pencapaian kinerja atas KPI jangka panjang dengan syarat dan kondisi khusus. Beberapa skema ditetapkan dalam beberapa opsi yaitu upfront payment system dengan bonding period dan mekanisme clawback serta opsi deferred incentive. Masing-masing terikat dengan syarat dan ketentuan yang relevan. *Long Term Incentive Plan (LTIP) developed as part of application of the concept of Talent Management and Succession Plan at the Bank.* *Talent and Successor Pool available is a selected employee who is expected to be the main driver of the process company business. One attempt to maintain them is through a good financial retention program and non-financial. LTIP program is one of the retention programs from the financial side where the scheme is made refers to the achievement of performance on KPIs long-term with terms and special conditions.* *Some schemes are specified in several the option is upfront payment system with bonding period and clawback mechanism and deferred incentive options. Each bound by the terms and conditions that are relevant.*	Telah diterapkan *Has Been Implemented*

Penerapan Aspek dan Prinsip Tata Kelola Perusahaan Sesuai Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
The Implementation of Good Corporate Governance Aspect and Principles According to Financial Services Authority Regulation

No.	Prinsip *Principal*	Rekomendasi *Recommendation*	Penjelasan Rekomendasi OJK *Explanation of OJK Recommendations*	Penjelasan Penerapan di Bank Muamalat *Explanation of Implementation at Muamalat Bank*	Implementasi *Implementation*
V	Aspek 5 : KETERBUKAAN INFORMASI *Aspect 5 : Disclosure of Information*				
	Prinsip 8 Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi. ***Prinsip 8*** *Improve the Disclosure of Information.*	1. Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web sebagai media keterbukaan informasi. *1. Public Companies utilize the use of information technology more broadly than the Website as a medium of information disclosure.*	Penggunaan teknologi informasi dapat bermanfaat sebagai media keterbukaan informasi. Adapun keterbukaan informasi yang dilakukan tidak hanya keterbukaan informasi yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun juga informasi lain terkait Perusahaan Terbuka yang dirasakan bermanfaat untuk diketahui pemegang saham atau investor. Dengan pemanfaatan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web diharapkan perusahaan dapat meningkatkan efektivitas penyebaran informasi perusahaan. Meskipun demikian, pemanfaatan teknologi informasi yang dilakukan tetap memperhatikan manfaat dan biaya perusahaan. *The use of information technology can be useful as a medium of information disclosure. The disclosure of information is not only limited to information that has been regulated in the laws and regulations but also other information related to the Company that is felt useful to be known by the shareholders or investors. With the utilization of information technology that is more broadly than the Website is expected that the Company can improve the effectiveness of the dissemination of corporate information. Nevertheless, the utilization of information technology still pays attention to the benefits and costs of the company.*	Perseroan senantiasa berupaya untuk meningkatkan kualitas keterbukaan informasi kepada Stakeholders melalui media teknologi informasi selain website Bank. Media teknologi informasi yang digunakan oleh Bank untuk melakukan pelayanan dan update kebutuhan informasi kepada nasabah atau calon nasabah melalui media sosial yaitu Youtube, Facebook, Twitter dan Instagram. *The Bank continuously strives to improve the quality of information disclosure to Stakeholders through information technology media other than the Bank's website. In order to carry out its services and to update information to customers or potential customers, the Bank also uses social media such as Youtube, Facebook, Twitter and Instagram.*	Telah diterapkan *Has Been Implemented*
		2. Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali. *2. Annual Report of the Public Companies discloses the ultimate beneficial owner of the Public Companies' shares ownership of at least 5% (five percent), other than the disclosure of the ultimate beneficial owners in the shares ownership of the Public Companies through main and controlling shareholders.*	Peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai penyampaian laporan tahunan Perusahaan Terbuka telah mengatur kewajiban pengungkapan informasi mengenai pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham Perusahaan Terbuka serta kewajiban pengungkapan informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Perusahaan Terbuka baik langsung maupun tidak langsung sampai dengan pemilik manfaat terakhir dalam kepemilikan saham tersebut. Dalam Pedoman Tata Kelola ini direkomendasikan untuk mengungkapkan pemilik manfaat akhir atas kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain mengungkapkan pemilik manfaat akhir dari kepemilikan saham oleh pemegang saham utama dan pengendali. *Laws and regulations in the Capital Market sector that regulate the submission of the Public Companies' Annual Report has set out obligation to disclose information concerning shareholders with 5% (five percent) or more ownership of the Public Companies' shares, as well as the obligation to disclose information on main and controlling shareholders of the Public Companies either directly or indirectly up to the ultimate beneficial owner in the shares ownership. In this Governance Guideline is recommended to disclose the ultimate beneficial owner on the Public Companies' shares ownership of at least 5% (five percent), beside to disclose ultimate beneficial owner from the shares ownership by the main and controlling shareholders.*	Bank telah mengungkapkan informasi mengenai pemegang saham yang memiliki lebih dari 5% (lima) persen atau lebih saham Perseroan kepada Regulator dan Masyarakat (melalui website Bank). Pengungkapan informasi tersebut telah diungkapkan pada bagian ikhtisar saham dalam Laporan Tahunan ini. *The Bank has disclosed information regarding shareholders with ownership of more than 5% (five percent) or more shares of the Bank to the Regulator and Public (through the Bank's website). The disclosure of information has been disclosed in the shares highlights in this Annual Report.*	Telah diterapkan *Has Been Implemented*

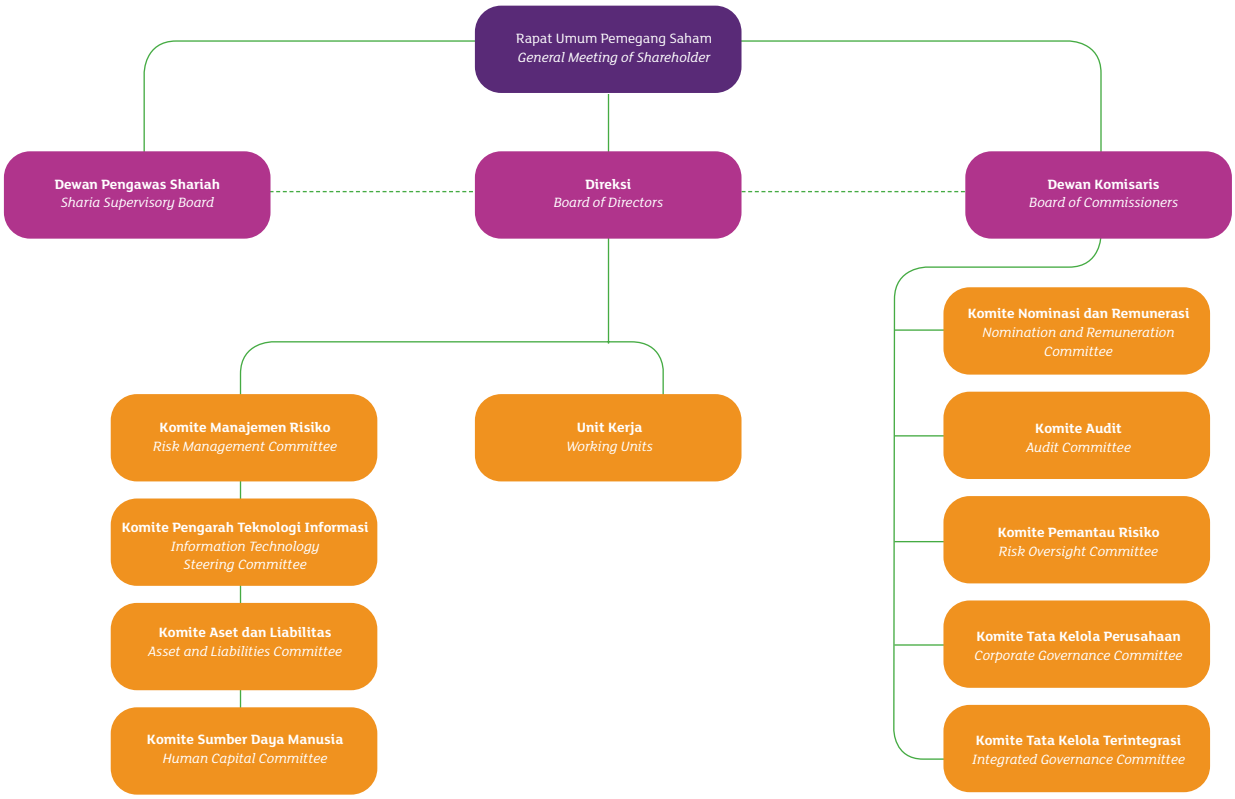
Struktur dan Mekanisme Corporate Governance
Corporate Governance Structure and Mechanism

Struktur Tata Kelola Perusahaan

Struktur organisasi tata kelola Bank Muamalat Indonesia terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi dan komite-komite di bawah Dewan Komisaris dan Direksi. Seluruh elemen ini melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan fungsinya masing-masing.

Corporate Governance Structure

The governance organizational structure of Bank Muamalat Indonesia consists of General Meeting of Shareholders (GMS), Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board, Board of Directors and Committees under the Board of Commissioners and Board of Directors. All of these elements perform their duties and responsibilities in accordance with their respective functions.



Infrastruktur Tata Kelola Perusahaan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan GCG, Bank Muamalat Indonesia memiliki infrastuktur berupa Kebijakan/Prosedur sebagai panduan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya antara lain:

- Anggaran Dasar Bank Muamalat Indonesia
- Board Manual Bank Muamalat Indonesia
- Kebijakan GCG Bank Muamalat Indonesia
- Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi
- Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi
- Prosedur Pelaksanaan rapat Direksi
- Prosedur Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham
- Piagam Komite Audit
- Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi
- Piagam Komite Pemantau Risiko
- Piagam Komite Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance Infrastructure

In order to support GCG implementation, Bank Muamalat Indonesia has infrastructure in the form of Policy/Procedure as a guide in carrying out its functions and duties such as:

- *Bank Muamalat Indonesia's Articles of Association*
- *Bank Muamalat Indonesia Board Manual*
- *Bank Muamalat Indonesia's GCG Policy*
- *Integrated Governance Policy*
- *Integrated Risk Management Policy*
- *Procedure for conducting Directors' meetings*
- *Procedure for Conducting General Meeting of Shareholders*
- *Audit Committee Charter*
- *Nomination and Remuneration Committee Charter*
- *Risk Monitoring Committee Charter*
- *Corporate Governance Committee Charter*

- Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi
- Piagam Komite Aset dan Liabilitas
- Piagam Komite Pengarah Teknologi Informasi
- Piagam Komite Manajemen Risiko
- Pedoman dan Prosedur Anti Fraud
- Piagam Internal Audit
- Kebijakan dan Prosedur penerapan APU-PPT (Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme)

- *Integrated Corporate Governance Committee Charter*
- *Asset and Liability Committee Charter*
- *Information Technology Steering Committee Charter*
- *Risk Management Committee Charter*
- *Anti-Fraud Guidelines and Procedures*
- *Internal Audit Charter*
- *AML-CFT (Anti Money Laundering & Counter Financing Terrorism implementation policies and procedures*

Mekanisme Tata Kelola Perusahaan

Komitmen Perseroan atas Tata Kelola Perusahaan yang baik dituangkan dalam *soft structure* berupa kebijakan dan prosedur operasional yang terkait GCG senantiasa di terapkan dalam kegiatan sehari-hari dan selalu direview secara periodik seperti yang ada dalam tabel diatas. Komitmen berupa kebijakan tersebut dikomunikasikan kepada seluruh elemen dan masing-masing tingkatan dalam organisasi Bank untuk dijadikan acuan/landasan dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam Perseroan.

Dengan melaksanakan GCG secara berkesinambungan, menjadikan seluruh prinsip-prinsip GCG sebagai acuan dalam kegiatan usaha dan interaksi seluruh organ Bank di Bank Muamalat Indonesia.

Interaksi seluruh organ Bank, dimana dalam struktur GCG Bank Muamalat Indonesia, organ utama terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang memiliki kedudukan tertinggi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi. Untuk memaksimalkan fungsi organ utama dalam struktur GCG Bank Muamalat Indonesia, maka dalam pelaksanaannya akan dibantu oleh organ pendukung yang terdiri dari Komite di tingkat Dewan Komisaris, Komite di tingkat Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Sekretaris Perusahaan, Manajemen Risiko dan Internal Audit.

Dewan Komisaris membentuk beberapa komite untuk membantu dan meningkatkan tugas dan fungsi pengawasan. Komite-komite di tingkat Dewan Komisaris Bank Muamalat Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Komite Audit;
2. Komite Pemantau Risiko;
3. Komite Nominasi dan Remunerasi;
4. Komite Tata Kelola Perusahaan;
5. Komite Tata Kelola Terintegrasi.

Beberapa Komite jga dibentuk oleh Direksi dalam rangka membantu tugasnya antara lain:

1. Komite Aset dan Liabilitas;
2. Komite Pengarah Teknologi Informasi;
3. Komite Manajemen Risiko;
4. Komite Sumber Daya Manusia.

Corporate Governance Mechanism

The Company's commitment on good corporate governance is declared within the soft structure in the form of operational policies and procedures related to GCG, which are evermore applied in daily activities and are periodically reviewed as shown in the table above. The commitment, as the policy, is communicated to the entire segments and each level in the Bank's organisation to be employed as a reference/basis in implementing GCG principles in the Company.

With the implementation of GCG continuously has made all GCG principles are applied as a reference in all business activities and interactions for all Bank organ at Bank Muamalat Indonesia.

Interaction amongst the Bank's organs, wherein in the GCG structure of Bank Muamalat Indonesia, the primary organ consists of the highest-level General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Commissioners, the Sharia Supervisory Board and the Board of Directors. To maximize the function of the main organs in the GCG structure of Bank Muamalat Indonesia, the implementation will be assisted by supporting organs consisting of Committees at the Board of Commissioners level, Committees at the Board of Directors level, Sharia Supervisory Board, Corporate Secretary, Risk Management, and Internal Audit.

The Board of Commissioners has formed several committees to assist and improve supervisory duties and functions. Committees at the level of Bank Muamalat's Board of Commissioners are as follows:

1. *Audit Committee;*
2. *Risk Oversight Committee;*
3. *Nomination and Remuneration Committee;*
4. *Corporate Governance Committee;*
5. *Integrated Governance Committee.*

Several Committees were also formed by the Directors in order to assist their duties, including:

1. *Assets and Liabilities Committee;*
2. *Information Technology Steering Committee;*
3. *Risk Management Committee;*
4. *Human Resources Committee.*

Seluruh organ Perusahaan dan organ pendukungnya akan menghormati fungsi dan peranan masing-masing sesuai peraturan yang ada untuk selalu meningkatkan penerapan GCG dari tahun ke tahun.

All Company organs and supporting organs will respect their functions and roles, respectively, in accordance with existing regulations in order to improve the implementation of GCG from year to year.

Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ Perusahaan tertinggi yang mempunyai hak dan kewenangan yang tidak dimiliki Direksi dan Dewan Komisaris dalam batasan yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundangan dan Anggaran Dasar Bank Muamalat Indonesia.

RUPS merupakan media komunikasi antara Direksi dan Dewan Komisaris dengan para pemegang saham melalui kesempatan tanya jawab yang diberikan kepada seluruh pemegang saham yang hadir pada setiap mata acara RUPS.

Penyelenggaraan RUPS Perusahaan dilakukan dengan mengacu pada ketentuan antara lain:

1. Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017.
3. Anggaran Dasar Perseroan

Jenis RUPS

Terdapat 2 (dua) jenis RUPS sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yaitu:

1. RUPS Tahunan
   RUPS ini dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bukan setelah berakhirnya tahun buku. Agenda utama RUPS Tahunan terdiri dari pengajuan Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan dari Direksi untuk disahkan dan disetujui oleh Pemegang Saham, melakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk tahun depan, memutuskan penggunaan laba, mengangkat atau memberhentikan anggota Direksi atau anggota Dewan Komsaris dan memutuskan hal-hal lain yang diperlukan.
2. RUPS Luar Biasa
   Pelaksanaan RUPS Luar biasa dapat diselenggarakan kapan saja sesuai keperluan Perseroan oleh Direksi ataupun Dewan Komisaris, atas permintaan dari Pemegang Saham.

Wewenang RUPS

RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang UU 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar Perseroan.

General Meeting of Shareholders

The General Meeting of Shareholders (GMS) is the top-level organ of the Company having rights and authority that are not owned by the Directors and Board of Commissioners within the boundaries detailed in the provisions of the legislation and the Articles of Association of Bank Muamalat Indonesia.

The GMS is a communication medium amongst the Directors, the Board of Commissioners, and the shareholders through the Q&A given to all shareholders present at each GMS agenda.

In conducting GMS, the Bank refers to following provisions:

1. *Law No. 40 Year 2007 on Limited Liability Companies.*
2. *OJK Regulation No. 32/POJK.04/2014 dated 8 December 2014 concerning the Plans and Organization of General Meeting of Shareholders of Public Companies as amended by OJK Regulation No. 10/POJK.04/2017 dated March 14, 2017.*
3. *Company's articles of association*

Type of GMS

There are 2 (two) types of GMS as expounded in Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, viz.:

1. *Annual GMS*
   This GMS is held no later than 6 (six) not after the end of the financial year. The main agenda of the Annual GMS covers about submitting Financial Statements and Annual Reports from the Directors to be approved and be validated by the Shareholders, appointing a Public Accountant Office for the upcoming year, deciding on the use of profits, appointing or dismissing members of the Board of Directors or members of the Board of Commissioners, and deciding on other necessary matters.
2. *Extraordinary GMS*
   The implementation of the Extraordinary GMS can be held at any time according to the needs of the Company by the Directors or the Board of Commissioners by the request of the Shareholders.

GMS Authorities

The GMS possesses the authority that is not given to the Directors or the Board of Commissioners with the limits specified in Law 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and/or the Company's articles of association.

Wewenang RUPS antara lain adalah :

1. Mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi;
2. Mengesahkan perubahan Anggaran Dasar;
3. Memberikan persetujuan atas Laporan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Laporan Keuangan Perseroan;
4. Menetapkan alokasi penggunaan laba;
5. Menunjuk dan menetapkan biaya jasa akuntan publik;
6. Menetapkan jumlah dan jenis kompensasi serta fasilitas pengurus;
7. Menyetujui Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et decharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukannya masing-masing;
8. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk menentukan dan membayar dividen final;
9. Mengambil keputusan-keputusan menyangkut struktur organisasi misalnya perubahan Anggaran Dasar, penggabungan, peleburan, pemisahan, pembubaran dan likuidasi Perseroan;
10. Mengangkat dan/atau mengubah susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
11. Memutuskan remunerasi yakni: penetapan gaji, tunjangan lain serta honorarium Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
12. Memberi persetujuan terhadap transaksi yang mengandung benturan kepentingan;
13. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit.

Hak Pemegang Saham

1. Pemegang saham dapat melakukan permintaan penyelenggaraan RUPS.
2. Pemegang saham berhak memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.
3. Menerima dividen saham dengan syarat dan ketentuan sesuai dengan keputusan RUPS.
4. Ikut berpartisipasi dalam mengambil keputusan di dalam RUPS berdasarkan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dan Tata Tertib RUPS.
5. Menerima informasi mengenai Tata Tertib RUPS dan prosedur voting di dalam RUPS.

The authorities of the GMS incorporate:

1. *Evaluate the performance of the Board of Commissioners and Directors;*
2. *Approve amendment to the Articles of Association;*
3. *Give approval to the Directors' Report, the Board of Commissioners Supervisory Report, and the Company's Financial Statements;*
4. *Have an effect on the allocation of the use of profits;*
5. *Appoint and determine the cost of public accountant services;*
6. *Determine the amount and type of compensation and management facilities;*
7. *Approve the Annual Report including the Company's Financial Statements and the Supervisory Report of the Board of Commissioners of the Company and provide compensation and discharge of responsibility (acquit et decharge) to members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for the management and supervision actions that they have done, respectively;*
8. *Give power and authority to the Directors to determine and pay dividends;*
9. *Make decisions concerning the organisational structure, for example amendments to the Articles of Association, incorporation, consolidation, separation, liquidation and liquidation of the Company;*
10. *Appointing and/or changing the composition of the Directors and Board of Commissioners;*
11. *Decide on remuneration, such as determination of salaries, other benefits, and honorarium for the Directors and Board of Commissioners of the Company;*
12. *Give approval of transactions that contain conflicts of interest;*
13. *Give power and authority to the Board of Commissioners to appoint a Public Accounting Firm with regard to recommendations from the Audit Committee.*

Rights of Shareholders

1. *Shareholders can make requests to hold a GMS.*
2. *Shareholders are entitled to acquire information on the agenda of the meeting and materials related to the agenda as long as it does not conflict with the interests of the Company.*
3. *Receive stock dividends on terms and conditions in accordance with the GMS decision.*
4. *Participate in making decisions at the GMS based on the applicable terms and conditions and the GMS Rules of Procedure.*
5. *Receive information regarding the GMS Rules and voting procedures in the GMS.*

Pelaksanaan RUPS Tahun 2019 (RUPS Tahunan dan RUPSLB)

Sepanjang tahun 2019, PT Bank Muamalat Indonesia Tbk telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian sebagai berikut:

RUPS Tahunan

RUPS Tahunan diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019, pada pukul 09.43 hingga 14.36 WIB, bertempat di Muamalat Tower Ballroom Lantai 2, Jalan Professor Doktor Satrio Kaveling 18, Jakarta 12940. Rapat dihadiri oleh:

GMS Implementation in 2019 (AGMS and EGMS)

In 2019, PT Bank Muamalat Indonesia Tbk held General Meeting of Shareholders for 3 (three) times with the following details:

AGMS

The Annual GMS was held on Friday, May 17, 2019, at 09.43 to 14.36 WIB, in Muamalat Tower Ballroom 2nd Floor, Jalan Professor Doktor Satrio Kav. 18, Jakarta 12940. The meeting was attended by:

Dewan Pengawas Syariah *Sharia Supervisory Board*		
Ketua *Chairman*	:	K. H. DR. (HC) Ma'ruf Amin
Anggota *Member*	:	Dr. H. Oni Sahroni, MA
Anggota *Member*	:	Drs. H. Sholahudin Al Aiyub, M.Si

Dewan Komisaris *Board of Commissioners*		
Komisari Utama/ Komisaris Independen *President Commissioner/Independent Commissioner*	:	Ilham Akbar Habibie
Komisaris Independen *Independent Commissioner*	:	Iggi Haruman Achsien
Komisaris Independen *Independent Commissioner*	:	Edy Setiadi

Direksi *Board of Directors*		
Direktur Utama *President Director*	:	Achmad Kusna Permana
Direktur *Director*	:	Hery Syafril
Direktur Kepatuhan *Compliance Director*	:	Andri Donny
Direktur *Director*	:	Purnomo Budiwibowo Soetadi
Direktur *Director*	:	Awaldi

dan perwakilan pemegang saham seri A sejumlah 826.649.175 (delapan ratus dua puluh enam juta enam ratus empat puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh lima) saham dan seri B 9.381.053.160 (sembilan miliar tiga ratus delapan puluh satu juta lima puluh tiga ribu seratus enam puluh) saham, total pemegang saham yang hadir sejumlah 9.464.176.555 saham atau 92,716% dari jumlah seluruh saham Seri A dan Seri B dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan yang seluruhnya berjumlah 10.207.702.335, sehingga kuorum telah terpenuhi.

and representatives of series A shareholders amounted to 826,649,175 (eight hundred twenty-six million six hundred forty-nine thousand one hundred seventy-five) shares and series B 9,381,053,160 (nine billion three hundred eighty-one million fifty-three thousand one hundred and six twenty) shares, the total number of shareholders who attended was 9,464,176,555 shares or 92.716% of the total Series A and Series B shares with voting rights issued by the Company amounting to 10,207,702,335; thus, the quorum was fulfilled.

Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat pada Rapat

Dalam mata acara Rapat tersebut telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan menyampaikan pendapat.

Opportunity to Ask Questions and/or Opinions at Meetings

In the agenda of the meeting, the opportunity was given to shareholders and/or the power of attorney of shareholders to have inquiries and to deliver opinions.

Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (voting) secara terbuka. Kecuali pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani, kecuali apabila Pimpinan Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 atau lebih pemegang saham yang hadir dalam Rapat.

Meeting Decision Making Mechanisms

The decision-making mechanism at the Meeting is held by deliberation to reach a consensus. However, should the deliberation to reach consensus be not reached, then the decision-making at the Meeting shall be conducted by open vote. Unless the voting regarding a person is carried out with a closed letter that is not signed unless the Chairperson determines otherwise without objections from 1 or more shareholders present at the Meeting.

Tahapan pelaksanaan RUPS Tahunan Bank Muamalat tahun 2019 dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

All decisions of the meeting have been ratified in Deed No. 28 Notary Utiek R. Abdurachman, SH., MLI., Mkn dated on May 17, 2019 as follows:

Pemberitahuan *Notification*	Pengumuman *Announcement*	Pemanggilan *Invitation*	Pelaksanaan *Implementation*	Hasil dan Keputusan *Result and Verdict*
Bank Muamalat telah menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPST kepada OJK pada tanggal 18 Maret 2019 sebagaimana dalam surat nomor 031/B/PRD-SRT/III/2019. Bank menyampaikan perubahan mata acara RUPST pada tanggal 24 April 2019 sebagaimana surat nomor 082/B/PRD-SRT/IV/2019. *Bank Muamalat has submitted the notification of the agenda of the AGM to FSA on March 18, 2019, as stated in letter number 031/B/PRD-SRT/IIII/2019. The Bank submits the changes to the agenda of the AGM on April 24, 2019, as stated in letter number 082/B/PRD-SRT/IV/2019.*	Bank Muamalat telah mengumumkan RUPST di harian Suara Pembaruan pada tanggal 10 April 2019 dan website Perseroan *Bank Muamalat has announced the AGMS on the Suara Pembaruan daily on April 10, 2019, and the Company's website*	Bank Muamalat telah melakukan pemanggilan untuk RUPST pada harian Investor Daily tanggal 25 April 2019 dan website Perseroan *Bank Muamalat has made an invitation for the AGM on the Daily Investor Daily on April 25, 2019, and the Company's website*	Bank Muamalat melangsungkan RUPST pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2019 pukul 09.43 s/d 14.36 WIB, bertempat di Muamalat Tower, Ballroom Lantai 2, Jalan Professor Doktor Satrio Kaveling 18, Jakarta 12940, Indonesia *Bank Muamalat held an AGM on Friday, May 17, 2019, from 09.43 to 14.36 WIB, located at Muamalat Tower, Ballroom 2nd Floor, Jalan Professor Doctor Satrio Kaveling 18, Jakarta 12940, Indonesia.*	Ringkasan Risalah RUPST telah diumumkan pada tanggal 21 Mei 2019 melalui Harian Kontan *A summary of the minutes of the AGMS was announced on May 21, 2019, through the Harian Kontan*

Seluruh Keputusan rapat telah disahkan dalam Akta No 28 Notaris Utiek R. Abdurachman, SH., MLI., Mkn tanggal 17 Mei 2019 sebagai berikut:

All decisions of the meeting have been ratified in Deed No. 28 Notary Utiek R. Abdurachman, SH., MLI., Mkn dated on May 17, 2019 as follows:

Mata Acara Rapat Ke 1 *1st Meeting Agenda*	Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2018 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah untuk Tahun Buku 2018 serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2018; *Approval of the Company's Annual Report for Fiscal Year 2018 including the Supervisory Report of the Board of Commissioners and Sharia Supervisory Board for Fiscal Year 2018 and the ratification of the Company's Financial Report for Fiscal Year 2018;*
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya *Number of Shareholders Who Ask*	Sebanyak 5 pemegang saham menyampaikan pertanyaan tertulis pada Mata Acara Pertama; *There are five shareholders submitted written inquiries in the First Agenda;*

Pengambilan Keputusan *Decision-making*	Dengan Musyawarah Mufakat *By Consensus*		
	Setuju *Agree*	Abstain *Abstain*	Tidak Setuju *Disagree*
	100%	0%	0%
Keputusan Rapat *Meeting Decision*	Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2018 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah untuk Tahun Buku 2018 dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2018. Selanjutnya dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2018 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah untuk Tahun Buku 2018 serta disahkannya Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2018, maka berarti Rapat telah memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2018, sepanjang tindakan tersebut tercermin dari Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018 serta bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Approving the Company's Annual Report for Fiscal Year 2018, including the Supervisory Report of the Board of Commissioners and Sharia Supervisory Board for Fiscal Year 2018 and ratifying the Company's Financial Report for Fiscal Year 2018. Furthermore, with the approval of the Company's Annual Report for Fiscal Year 2018, including the Supervisory Duties Report of the Board of Commissioners and Supervisory Board Sharia for Fiscal Year 2018 and the ratification of the Company's Financial Report for Fiscal Year 2018, it means that the Meeting has given full redemption and release of responsibility (volledig acquit et de charge) to members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and the Sharia Supervisory Board of the Company for management and supervision The Company has been carried out during Fiscal Year 2018, as long as these actions are reflected in the Annual Report and Financial Report of the Fiscal Year 2018 and do not constitute a criminal offense or violation of the provisions of the applicable laws and regulations.*		

Mata Acara Rapat Ke 2 *2nd Meeting Agenda*	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2018; *Approval for the Use of the Company's Net Profit for Fiscal Year 2018;*		
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya *Number of Shareholders Who Ask*	Sebanyak 2 pemegang saham menyampaikan pertanyaan tertulis pada Mata Acara Kedua; *There are two shareholders submitted written inquiries in the Second Agenda;*		
Pengambilan Keputusan *Decision-making*	Dengan Pemungutan Suara *By Voting*		
	Setuju *Agree*	Abstain *Abstain*	Tidak Setuju *Disagree*
	9.463.869.780 saham *(99,996%)* *9,463,869,780 shares* *(99.996%)*	0%	306.775 saham *(0,003%)* *306,775 shares* *(0.003%)*
Keputusan Rapat *Meeting Decision*	Menyetujui laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2018 setelah Pajak sebesar Rp46.002.044.000,00 (empat puluh enam miliar dua juta empat puluh empat ribu rupiah) seluruhnya dipergunakan untuk cadangan Perseroan, sehingga tidak diadakan pembagian dividen atas laba bersih Perseroan Tahun Buku 2018. *Approving the Company's net profit for Fiscal Year 2018 after tax of Rp46,002,044,000.00 (forty-six billion two million and forty-four thousand rupiah) entirely used for the Company's reserves, so that no dividend was distributed on the Company's net income for Fiscal Year 2018.*		

Mata Acara Rapat Ke 3 *3rd Meeting Agenda*	Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019 dan audit lain yang dibutuhkan Perseroan; *Appointment of a Public Accountant Office to audit the Company's Financial Statements for Fiscal Year 2019 and other audits required by the Company;*		
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya *Number of Shareholders Who Ask*	Tidak terdapat pemegang saham yang menyampaikan pertanyaan maupun pendapat / tanggapan pada Mata Acara Ketiga; *There are no shareholders who submit questions, opinions, responses to the Third Agenda;*		
Pengambilan Keputusan *Decision-making*	Dengan Musyawarah Mufakat *By Consensus*		
	Setuju *Agree*	Abstain *Abstain*	Tidak Setuju *Disagree*
	100%	0%	0%
Keputusan Rapat *Meeting Decision*	Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk, mengakhiri dan/atau mengganti Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019 dan/atau audit lain yang dibutuhkan Perseroan serta menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut. Pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan tersebut diusulkan untuk efektifitas proses penunjukan pengakhiran dan/atau penggantian Kantor Akuntan Publik yang sesuai dengan kondisi Perseroan yang akan dilaksanakan dengan kriteria/batasan yang dianggap sesuai oleh Dewan Komisaris Perseroan dengan kondisi Perseroan. *Approving to give authority to the Company's Board of Commissioners to appoint, dismiss, and/or replace the Public Accountant Firm to audit the Company's Financial Statements for Fiscal Year 2019 and/or other audits required by the Company and determining the appropriate amount of honorarium and other appointment requirements for the appointed Public Accounting Firm. The granting of authority to the Board of Commissioners of the Company is proposed for the effectiveness of the process of appointing the termination and/or replacement of the Public Accountant Office in accordance with the conditions of the Company to be implemented with criteriallimits deemed appropriate by the Board of Commissioners of the Company with the conditions of the Company.*		

Mata Acara Rapat Ke 4 *4th Meeting Agenda*	Pengakhiran Masa Tugas Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan Periode 2014 - 2019 serta Pengangkatan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan Periode Berikutnya; *The discontinuation of the Directors' Board of Commissioners, Board of Commissioners, and Sharia Supervisory Board Period 2014 - 2019 and Appointment of Directors, Board of Commissioners and Sharia Supervisory Board of the Company for the Next Period;*		
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya *Number of Shareholders Who Ask*	Sebanyak 4 pemegang saham menyampaikan pertanyaan tertulis pada Mata Acara Keempat; *There are four shareholders submitted written inquiries in the Fourth Agenda;*		
Pengambilan Keputusan *Decision-making*	Dengan Pemungutan Suara *By Voting*		
	Setuju *Agree*	Abstain *Abstain*	Tidak Setuju *Disagree*
	9,464,073,515 shares (99.998%)	19,750 shares (0.0002%)	83,290 shares (0.0008%)
Keputusan Rapat *Meeting Decision*	1. Menyetujui pengakhiran masa tugas Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan Periode 2014 - 2019 disertai dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama ini untuk kemajuan Perseroan; *1. Approving the term of office discontinuation of the Directors, Board of Commissioners, and the Sharia Supervisory Board of the Company for the period of 2014 - 2019 accompanied by a fervent gratitude for his services for the progress of the Company;*		

2. Dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana terdapat dalam Surat Dewan Komisaris Nomor: 022/B/COM-SRT/V/2019 tanggal 14 Mei 2019, menyetujui susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan Periode 2019 - 2024 sebagai berikut:
   a. Tuan Achmad Kusna Permana selaku Direktur Utama Perseroan;
   b. Tuan Andri Donny selaku Direktur Kepatuhan Perseroan;
   c. Tuan Hery Syafril selaku Direktur Perseroan;
   d. Tuan Purnomo Budiwibowo Soetadi selaku Direktur Perseroan;
   e. Tuan Awaldi selaku Direktur Perseroan;
   f. Tuan Avianto selaku Direktur Perseroan;
   g. Tuan Ilham Akbar Habibie selaku Komisaris Utama sekaligus Komisaris Independen Perseroan;
   h. Tuan Iggi Haruman Achsien selaku Komisaris Independen Perseroan;
   i. Tuan Edy Setiadi selaku Komisaris Independen Perseroan;
   j. Tuan Mohamed Hedi Mejai selaku Komisaris Perseroan;
   k. Tuan Abdulsalam Mohammad Joher Al-Saleh selaku Komisaris Perseroan;
   l. Tuan Kyai Haji Doktor (Honoris Causa) Ma'ruf Amin selaku Ketua Dewan Pengawas Syariah Perseroan;
   m. Tuan Doktor Haji Oni Sahroni, Master of Arts, selaku anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan;
   n. Tuan Doktorandus Haji Sholahudin Al Aiyub, Magister Sains, selaku anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan,

dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun 2024, dengan ketentuan:
   a. bagi calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang belum memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK, pengangkatannya akan berlaku efektif setelah memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK; dan
   b. bagi calon anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang belum memperoleh persetujuan dari OJK, pengangkatannya akan berlaku efektif setelah memperoleh persetujuan dari OJK.

2. By cautiously envisaging the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee as contained in the Letter of the Board of Commissioners Number: 022/B/COM-SRT/VI/2019 dated on May 14, 2019, approving the composition of the Directors, Board of Commissioners, and Sharia Supervisory Board of the 2019-2024 Company Period as following:
   a. Achmad Kusna Permana as the Company's President Director;
   b. Andri Donny as Compliance Director of the Company;
   c. Hery Syafril as Director of the Company;
   d. Purnomo Budiwibowo Soetadi as Director of the Company;
   e. Awaldi as Director of the Company;
   f. Avianto as Director of the Company;
   g. Ilham Akbar Habibie as the President Commissioner and the Independent Commissioner of the Company;
   h. Iggi Haruman Achsien as the Independent Commissioner of the Company;
   i. Edy Setiadi as the Independent Commissioner of the Company;
   j. Mohamed Hedi Mejai as a Commissioner of the Company;
   k. Abdulsalam Mohammad Joher Al-Saleh as Commissioner of the Company;
   l. Kyai Haji Doctor (Honoris Causa) Ma'ruf Amin as Chairman of the Sharia Supervisory Board of the Company;
   m. Dr. Haji Oni Sahroni, Master of Arts, as a member of the Sharia Supervisory Board of the Company;
   n. Dr. Haji Sholahudin Al Aiyub, Master of Science, as a member of the Sharia Supervisory Board of the Company,

without prejudice to the right of the GMS to dismiss him at any time before his term of office in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association, as of the close of the Meeting until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2024, with the following provisions:
   a. for prospective members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company who have not yet received a determination to pass the Fit and Proper Test from the FSA, their appointment will be effective after obtaining the determination to pass the Capability and Compliance Assessment from the FSA; and
   b. for prospective members of the Sharia Supervisory Board of the Company who have not yet obtained approval from the FSA, the appointment will be effective after obtaining approval from the FSA.

	3. Menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan untuk masing-masing anggota Direksi Periode 2019 - 2024; *3. Approving the authorisation to the Board of Commissioners to determine the amount of salary and benefits for each member of the Board of Directors for the 2019-2024 Period;*
	4. Menetapkan besarnya gaji dan tunjangan untuk masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Periode 2019 - 2024 yang akan mengikuti ketentuan Anggaran Dasar Perseroan; *4. Determining the amount of salary and benefits for each member of the Board of Commissioners and Sharia Supervisory Board for the 2019-2024 Period that will follow the provisions of the Company's Articles of Association;*
	5. Menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris guna mewakili Perseroan untuk menandatangani perjanjian (management contract) dengan masing-masing anggota Direksi Periode 2019 - 2024, dengan ketentuan bagi anggota Direksi Periode 2019 – 2024 yang telah menjabat pada periode sebelumnya dan management contract-nya saat ini telah ada dan masih berlaku, maka management contract-nya akan tetap berlaku sesuai dengan jangka waktu management contract tersebut, kecuali jika terdapat perubahan; *5. Approving the authorisation to the Board of Commissioners to represent the Company to sign an agreement (management contract) with each member of the Board of Directors for the 2019-2024 Period, provided that the Directors in the 2019-2024 Period have served in the previous period and the current management contract has existed and is still valid, the management contract will remain in effect in accordance with the period of the management contract, unless there is a change;*
	6. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi guna mewakili Perseroan untuk menandatangani perjanjian (management contract) dengan masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Periode 2019 – 2024, dengan ketentuan bagi anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Periode 2019 – 2024 yang telah menjabat pada periode sebelumnya dan management contract-nya saat ini telah ada dan masih berlaku, maka management contract-nya akan tetap berlaku sesuai dengan jangka waktu management contract tersebut, kecuali jika terdapat perubahan; dan *6. Approving the authorisation to the Directors to represent the Company to sign an agreement (management contract) with each member of the Board of Commissioners and the Sharia Supervisory Board for the 2019-2024 Period, provided that the members of the Board of Commissioners and the Sharia Supervisory Board for the 2019-2024 Period have served in the period before and the current management contract has existed and is still valid, then the management contract will remain in effect in accordance with the period of the management contract, unless there is a change; and*

7. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan berkenaan dengan pengangkatan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan Periode 2019 - 2024 tersebut ke dalam akta Notaris dan memberitahukannya kepada pihak yang berwenang dan sehubungan dengan hal tersebut untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Dewan Pengawas Syariah	
Ketua:	K. H. DR. (HC) Ma'ruf Amin
Anggota:	Dr. H. Oni Sahroni, MA
Anggota:	Drs. H. Sholahudin Al Aiyub, M.Si
Dewan Komisaris	
Komisari Utama/ Komisaris Independen:	Ilham Akbar Habibie
Komisaris Independen:	Iggi Haruman Achsien
Komisaris Independen:	Edy Setiadi
Komisaris:	Mohamed Hedi Mejai
Komisaris:	Abdulsalam Mohammad Joher Al-Saleh
Direksi	
Direktur Utama:	Achmad Kusna Permana
Direktur:	Hery Syafril
Direktur Kepatuhan:	Andri Donny
Direktur:	Purnomo Budiwibowo Soetadi
Direktur:	Awaldi
Direktur:	Avianto

dengan ketentuan bahwa:

a. bagi calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang belum memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK, maka pengangkatannya akan berlaku efektif setelah memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Assessment) dari OJK. Dalam hal yang bersangkutan dinyatakan tidak lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Assessment), maka pengangkatan yang bersangkutan menjadi batal, tanpa diperlukan lagi suatu keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham; dan

b. bagi calon anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang belum memperoleh persetujuan dari OJK, pengangkatannya akan berlaku efektif setelah memperoleh persetujuan dari OJK. Dalam hal yang bersangkutan tidak memperoleh persetujuan dari OJK, maka pengangkatan yang bersangkutan menjadi batal, tanpa diperlukan lagi suatu keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham.

7. Approving the authorisation to the Directors with the right of substitution, to restate the decision regarding the appointment of members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and the Sharia Supervisory Board of the Company for the 2019-2024 Period into a notarial deed and notifying the authorities and in connection with it to undertake every thing which is required in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations.
Furthermore, since the closing of the Meeting, the complete composition of the Sharia Supervisory Board, Board of Commissioners and Directors of the Company for the 2019-2024 Period will be as follows:

Sharia Supervisory Board	
Chairman:	K. H. DR. (HC) Ma'ruf Amin
Member:	Dr. H. Oni Sahroni, MA
Member:	Drs. H. Sholahudin Al Aiyub, M.Si
Board of Commissioners	
President Commissioner/ Independent Commissioner:	Ilham Akbar Habibie
Independent Commissioner:	Iggi Haruman Achsien
Independent Commissioner:	Edy Setiadi
Commissioner:	Mohamed Hedi Mejai
Commissioner:	Abdulsalam Mohammad Joher Al-Saleh
Board of Directors	
President Director:	Achmad Kusna Permana
Director:	Hery Syafril
Compliance Director:	Andri Donny
Director:	Purnomo Budiwibowo Soetadi
Director:	Awaldi
Director:	Avianto

With the provisions declared that:

a. for prospective members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company who have not yet received a determination to pass the Fit and Proper Test from the FSA, their appointment will be effective after obtaining the determination to pass the Fit and Proper Assessment from the OJK. If the person concerned is declared not to have passed the Fit and Proper Assessment, the appointment shall be invalidated, without the need for a decision from the General Meeting of Shareholders; and

b. for prospective members of the Sharia Supervisory Board of the Company who have not yet obtained approval from the FSA, the appointment will be effective after obtaining approval from the FSA. In the event that the party concerned does not obtain approval from the FSA, the appointment concerned becomes void, without the need for a decision from the General Meeting of Shareholders.

Mata Acara Rapat Ke 5 *5th Meeting Agenda*	Pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris atas pelaksanaan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 11 Oktober 2018 dan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 28 Juni 2018; *The responsibility of the Board of Directors and the Board of Commissioners for the implementation of the Resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) on October 11, 2018, and the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) on 28 June 2018;*
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya *Number of Shareholders Who Ask*	Sebanyak 1 pemegang saham menyampaikan pertanyaan tertulis pada Mata Acara Kelima; *There is one shareholder submitted written inquiries in the Fifth Agenda;*
Pengambilan Keputusan *Decision-making*	Tidak diambil keputusan karena sifatnya merupakan penyampaian *No decision is taken due to it is a delivery*
Keputusan Rapat *Meeting Decision*	Mengenai pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris atas pelaksanaan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 11 Oktober 2018 dan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 28 Juni 2018. *Regarding the accountability of the Directors and Board of Commissioners for the implementation of the Resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) on October 11, 2018, and the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) on June 28, 2018.*

Mata Acara Rapat Ke 6 *6th Meeting Agenda*	Penjelasan Pelaksanaan Tindakan Pembelian, Penjualan, Pengalihan dan/atau Tukar Menukar Aset Perseroan dalam rangka Penguatan Modal Perseroan. *Explanation on the Implementation of Actions of Purchasing, Selling, Transferring and/or Exchanging Company Assets in the framework of Strengthening Company Capital.*
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya *Number of Shareholders Who Ask*	Sebanyak 3 pemegang saham menyampaikan pertanyaan tertulis dan 2 pemegang saham menyampaikan tanggapan secara lisan pada Mata Acara Keenam. *There are three shareholders sumbitting the written inquiries and two shareholders submitting the responses in viva voce in the Sixth Meeting Agenda*
Pengambilan Keputusan *Decision-making*	Tidak diambil keputusan karena sifatnya merupakan penyampaian *No decision is taken due to it is a delivery*
Keputusan Rapat *Meeting Decision*	Mengenai penjelasan pelaksanaan tindakan pembelian, penjualan, pengalihan dan/atau tukar menukar aset perseroan dalam rangka penguatan modal Perseroan. *Regarding the exegesis of the actions of purchasng, selling, transferring and/or exchanging company assets in order to strengthen the Company's capital.*

RUPS Luar Biasa

Extraordinary GMS

RUPS Luar Biasa Pertama

Diselenggarakan pada hari, tanggal dan tempat yang sama pada pukul 15.05 sampai 15.44 WIB dengan dihadiri oleh :

The First EGMS

The first EGMS held on the same day, date, and place from 15.05 to 15.44 WIB and attended by:

Dewan Pengawas Syariah *Sharia Supervisory Board*		
Anggota *Member*	:	Dr. H. Oni Sahroni, MA
Anggota *Member*	:	Drs. H. Sholahudin Al Aiyub, M.Si

Dewan Komisaris *Board of Commissioners*		
Komisari Utama/ Komisaris Independen *President Commissioner/Independent Commissioner*	:	Ilham Akbar Habibie
Komisaris Independen *Independent Commissioner*	:	Iggi Haruman Achsien
Komisaris Independen *Independent Commissioner*	:	Edy Setiadi

Direksi *Board of Directors*		
Direktur Utama *President Director*	:	Achmad Kusna Permana
Direktur *Director*	:	Hery Syafril
Direktur Kepatuhan *Compliance Director*	:	Andri Donny
Direktur *Director*	:	Purnomo Budiwibowo Soetadi
Direktur *Director*	:	Awaldi
Direktur *Director*	:	Avianto*

*Efektif setelah memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
**Effective after having obtained the determination to pass the Fit and Proper Test from the Financial Services Authority (FSA)*

dan perwakilan pemegang saham seri A sejumlah 826.649.175 (delapan ratus dua puluh enam juta enam ratus empat puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh lima) saham dan seri B 9.381.053.160 (sembilan miliar tiga ratus delapan puluh satu juta lima puluh tiga ribu seratus enam puluh) saham, total pemegang saham yang hadir sejumlah 9.484.248.265 saham atau 92.912% dari jumlah seluruh saham Seri A dan Seri B dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan yang seluruhnya berjumlah 10.207.702.335, sehingga kuorum telah terpenuhi dan Rapat adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan sesuai dengan mata acara Rapat.

and representative of Series A shareholders totalling 826,649,175 (eight hundred twenty-six million six hundred forty nine thousand one hundred seventy-five) shares and series B 9,381,053,160 (nine billion three hundred eighty-one million fifty-three thousand one hundred sixty) shares, the total number of present shareholders 9,484,248,265 shares or 92,912% of the total Series shares A and Series B with voting rights issued by the Company totalling 10,207,702,335, so the quorum has been fulfilled and the Meeting is valid and has the right to take legal and binding decisions regarding matters discussed in accordance with the agenda of the Meeting.

Tahapan pelaksanaan RUPS Luar Biasa Bank Muamalat tahun 2019 dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

The stages of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Bank Muamalat in 2019 can be seen in the following table:

Pemberitahuan *Pemberitahuan*	Pengumuman *Pengumuman*	Pemanggilan *Pemanggilan*	Pelaksanaan *Pelaksanaan*	Hasil dan Keputusan *Hasil dan Keputusan*
Bank Muamalat telah menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPSLB kepada OJK pada tanggal 18 Maret 2019 sebagaimana dalam surat No.033/B/PRD-SRT/III/2019. Bank menyampaikan perubahan mata acara RUPSLB kepada OJK pada tanggal 24 April 2019 sebagaimana surat nomor 080/B/PRD-SRT/IV/2019. *Bank Muamalat has delivered the agenda EGMS event to FSA on the 18th March 2019 as in letter No.033/B/PRD-SRT/III/2019. Bank conveys change EGMS agenda to OJK on April 24 2019 as a letter number 080/B/PRD-SRT/IV/2019.*	Bank Muamalat telah mengumumkan RUPSLB di harian Suara Pembaruan pada tanggal 10 April 2019 dan website Perseroan *Bank Muamalat has been announced the EGMS at Daily Voice Update on April 10th 2019 and website Company*	Bank Muamalat telah melakukan pemanggilan untuk RUPSLB pada harian Investor Daily tanggal 25 April 2019 dan website Perseroan *Bank Muamalat has been make an invitation for the EGMS on a daily basis Investor Daily the 25th April 2019 and website Company*	Bank Muamalat melangsungkan RUPSLB pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2019 pukul 15.05 s/d 15.44 WIB, bertempat di Muamalat Tower, Ballroom Lantai 2, Jalan Professor Doktor Satrio Kaveling 18, Jakarta 12940, Indonesia *Bank Muamalat hold an EGMS on Friday, dated on May 17 2019 at 15.05 up to 15.44 WIB, at Muamalat Tower, Ballroom Level 2, Professor Doktor Satrio, 12940, Indonesia*	Ringkasan Risalah RUPSLB telah diumumkan pada tanggal 21 Mei 2019 melalui Harian Kontan. *Summary of Minutes of the EGMS was announced on May 21, 2019 through the Harian Kontan.*

Seluruh Keputusan rapat telah disahkan dalam Akta No. 30 Notaris Utiek R. Abdurachman, SH., MLI., Mkn tanggal 17 Mei 2019 sebagai berikut:

All decisions of the meeting have been ratified in Deed No. 30 Notary Utiek R. Abdurachman, SH., MLI., Mkn dated May 17, 2019 as follows:

Mata Acara Rapat Ke 1 *1st Meeting Agenda*	Persetujuan Tindakan Penjaminan Aset Perseroan sebagai Jaminan Utang Perseroan atau Pihak Lain atas Fasilitas Pembiayaan yang akan Diberikan oleh PT Sarana Multigriya Finansial dan/atau Pihak Lain; *Approval of the Company's Assets Guarantee Act as a Guarantee for the Debt of the Company or Other Parties for the Financing Facility to be Provided by PT Sarana Multigriya Finansial and/or Other Parties;*		
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya *Number of Shareholders Who Ask*	Tidak terdapat pemegang saham yang menyampaikan pertanyaan maupun pendapat/tanggapan pada Mata Acara Pertama *There are no shareholders who submit questions or opinions/responses to the First Agenda*		
Pengambilan Keputusan *Decision-making*	Dengan Musyawarah Mufakat *By Consensus*		
	Setuju Agree	Abstain Abstain	Tidak Setuju Disagree
	100%	0%	0%
Keputusan Rapat *Meeting Decision*	Menyetujui penjaminan Aset Perseroan Yang Akan Dijaminkan kepada PT SMF dan/atau pihak lain. Aset Perseroan Yang Akan Dijaminkan adalah tagihan pembiayaan milik Perseroan yang akan dijaminkan Perseroan kepada PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) dan/atau pihak lainnya pada tahun 2019 ini hingga penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2020 yang akan datang, sebagai jaminan utang Perseroan atau pihak lain atas fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh PT Sarana Multigriya Finansial dan/atau pihak lain, baik dalam satu transaksi penjaminan atau lebih yang jumlahnya maksimum sebesar Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun rupiah). *Approving the guarantee of the Company's Assets to be Guaranteed to PT SMF and/or other parties. Company Assets to Be Guaranteed are financing bills owned by the Company that will be guaranteed by the Company to PT Sarana Multigriya Financial (Persero) and/or other parties in 2019 until the holding of the upcoming 2020 Annual General Meeting of Shareholders, as collateral for the Company's or other parties' debt. for financing facilities provided by PT Sarana Multigriya Finansial and/or other parties, both in one or more guarantee transactions with a maximum amount of Rp3,000,000,000,000 (three trillion rupiah).*		

Mata Acara Rapat Ke 2 *2nd Meeting Agenda*	Persetujuan Rencana Akuisisi terhadap Perseroan. *Approval of the Acquisition Plan for the Company.*		
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya *Number of Shareholders Who Ask*	Sebanyak 4 pemegang saham menyampaikan pertanyaan secara lisan pada Mata Acara Kedua. *There are four shareholders who submit inquiries in viva voce in the Second Meeting Agenda.*		
Pengambilan Keputusan *Decision-making*	Dengan Musyawarah Mufakat *By Consensus*		
	Setuju *Agree*	Abstain *Abstain*	Tidak Setuju *Disagree*
	100%	0%	0%
Keputusan Rapat *Meeting Decision*	• Menyetujui rencana akuisisi terhadap Perseroan oleh Al Falah Investment Pte Limited; • Menyetujui Rancangan Akuisisi Bersama; • Menyetujui konsep Akta Akuisisi; • Memberikan kewenangan kepada Direksi untuk melaksanakan rencana akuisisi tersebut dan segala tindakan yang dianggap perlu dalam melaksanakan rencana akuisisi dimaksud, termasuk setiap perubahan atau tambahan yang diputuskan oleh Direksi dan Dewan Komisaris. *• Approving the planned acquisition of the Company by Al Falah Investment Pte Limited;* *• Agreeing on a Joint Acquisition Plan;* *• Approving the concept of the Deed of Acquisition;* *• Giving authority to the Board of Directors to carry out the acquisition plan and all actions deemed necessary in carrying out the acquisition plan referred to, including any changes or additions decided by the Directors and the Board of Commissioners.*		

RUPS Luar Biasa Kedua

Diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2019 dan bertempat di Ballroom B. J. Habibie - Muamalat Tower Lantai 2, Jalan Profesor Doktor Satrio Kaveling 18 Jakarta 12940, pada pukul 09.50 sampai 11.47 WIB dengan dihadiri oleh:

The Second Extraordinary GMS

The Second EGMS was held on Monday, December 16, 2019 and took place at the Ballroom B. J. Habibie - Muamalat Tower 2nd Floor, Jalan Professor Doctor Satrio Kaveling 18 Jakarta 12940, at 09.50 to 11.47 WIB, attended by:

Dewan Pengawas Syariah *Sharia Supervisory Board*		
Anggota *Member*	:	Drs. H. Sholahudin Al Aiyub, M.Si

Dewan Komisaris *Board of Commissioners*		
Komisari Utama/ Komisaris Independen *President Commissioner/Independent Commissioner*	:	Ilham Akbar Habibie
Komisaris Independen *Independent Commissioner*	:	Iggi Haruman Achsien
Komisaris Independen *Independent Commissioner*	:	Edy Setiadi

Direksi *Board of Directors*		
Direktur Utama *President Director*	:	Achmad Kusna Permana
Direktur *Director*	:	Hery Syafril
Direktur Kepatuhan *Compliance Director*	:	Andri Donny
Direktur *Director*	:	Purnomo Budiwibowo Soetadi
Direktur *Director*	:	Awaldi
Direktur *Director*	:	Avianto*

*Efektif setelah memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
**Effective after having obtained the determination to pass the Fit and Proper Test from the Financial Services Authority (FSA)*

dan perwakilan pemegang saham seri A sejumlah 826.649.175 (delapan ratus dua puluh enam juta enam ratus empat puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh lima) saham dan seri B sejumlah 9.381.053.160 (sembilan miliar tiga ratus delapan puluh satu juta lima puluh tiga ribu seratus enam puluh) saham, total pemegang saham yang hadir sejumlah 9.475.514.265 (sembilan miliar empat ratus tujuh puluh lima juta lima ratus empat belas ribu dua ratus enam puluh lima) saham atau 92,83% dari jumlah seluruh saham Seri A dan Seri B dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan yang seluruhnya berjumlah 10.207.702.335 (sepuluh miliar dua ratus tujuh juta tujuh ratus dua ribu tiga ratus tiga puluh lima), sehingga kuorum telah terpenuhi dan Rapat adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan sesuai dengan mata acara Rapat.

and representatives of series A shareholders amounting to 826,649,175 (eight hundred twenty-six million six hundred forty-nine thousand one hundred seventy-five) shares and series Bam9,381,053,160 (nine billion three hundred eighty-one million fifty-three thousand one hundred sixty) shares, the total number of present shareholders is 9,475,514,265 (nine billion four hundred seventy-five million five hundred fourteen thousand two hundred sixty-five) shares or 92.83% of the total Series A and Series B shares with voting rights issued by the Company amounting to 10,207,702,335 (ten billion two hundred seven million seven hundred two thousand three hundred thirty-five), so that the quorum has been fulfilled and the Meeting is valid and has the right to make legal and binding decisions regarding matters discussed according to the agenda of the Meeting.

Tahapan pelaksanaan RUPS Luar Biasa Bank Muamalat tahun 2019 dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

The phases of the 2019 Bank Muamalat Extraordinary GMS are narrated in the following table:

Pemberitahuan *Notification*	Pengumuman *Announcement*	Pemanggilan *Invitation*	Pelaksanaan *Implementation*	Hasil dan Keputusan *Result and Verdict*
Bank Muamalat telah menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPSLB kepada OJK pada tanggal 4 November 2019 sebagaimana dalam surat nomor 194/R/PRD-SRT/XI/2019 *Bank Muamalat has submitted the notice of the EGMS agenda to FSA on November 4, 2019 as stated in letter number 194/R/PRD-SRT/XI/2019*	Bank Muamalat telah mengumumkan RUPSLB di harian Suara Pembaruan pada tanggal 8 November 2019 dan website Perseroan *Bank Muamalat has announced the Extraordinary General Meeting of Shareholders at the Suara Pembaruan daily on November 8, 2019, and the Company's website*	Bank Muamalat telah melakukan pemanggilan untuk RUPSLB pada harian Media Indonesia tanggal 24 November dan website Perseroan *Bank Muamalat has invited for the EGMS on the Media Indonesia daily on November 24 and the Company's website*	Bank Muamalat melangsungkan RUPSLB pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 dan bertempat di Ballroom B.J. Habibie - Muamalat Tower Lantai 2, Jalan Profesor Doktor Satrio Kaveling 18 Jakarta 12940, pada pukul 09.50 sampai 11.47 WIB *Bank Muamalat held an EGMS on Monday, December 16, 2019, and took place in the B.J Ballroom. Habibie - Muamalat Tower 2nd Floor, Jalan Professor Doctor Satrio Kaveling 18 Jakarta 12940, at 09.50 to 11.47 WIB*	Ringkasan Risalah RUPSLB telah diumumkan pada tanggal 18 Desember 2019 melalui Harian Republika. *Summary of Minutes of the EGMS was announced on December 18, 2019, through the Harian Republika.*

Seluruh Keputusan rapat telah disahkan dalam Akta No. 80 Notaris Ashoya Ratam, SH, M.Kn tanggal 16 Desember 2019 sebagai berikut:

All decisions of the meeting have been ratified in Deed No.80 Notary Public date December 16, 2019 as follow:

Mata Acara Rapat Ke 1 *1st Meeting Agenda*	Persetujuan Rencana Penawaran Umum Terbatas ("PUT") VI dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD"); *Approval of VI Limited Public Offering Plan ("PUT") by Granting Pre-emptive Rights ("Rights");*		
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya *Number of Shareholders Who Ask*	Sebanyak 6 (enam) pemegang saham menyampaikan pertanyaan tertulis pada mata acara pertama; *There are six shareholders submitted written inquiries in the First Agenda;*		
Pengambilan Keputusan *Decision-making*	Dengan Musyawarah Mufakat *By Consensus*		
	Setuju *Agree*	Abstain *Abstain*	Tidak Setuju *Disagree*
	100%	0%	0%

Keputusan Rapat	1. Menyetujui pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas (PUT) VI dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut: a. Penerbitan Saham baru Perseroan sebanyak-banyaknya 32.965.648.490 (tiga puluh dua miliar sembilan ratus enam puluh lima juta enam ratus empat puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh) Saham Seri B dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham, dengan harga pelaksanaan yang akan diinformasikan dalam prospektus PUT VI mendatang Dengan demikian, jika saham baru tersebut seluruhnya diambil oleh Pemegang Saham Perseroan, modal ditempatkan dan disetor Perseroan akan meningkat dari 10.207.702.335 (Sepuluh Miliar Dua Ratus Tujuh Juta Tujuh Ratus Dua Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Lima) Saham atau seluruhnya dengan nilai nominal sebesar Rp1.103.435.151.000,- (satu triliun seratus tiga miliar empat ratus tiga puluh lima juta seratus lima puluh satu ribu rupiah), menjadi sebanyak-banyaknya sejumlah 43.173.350.825 (empat puluh tiga miliar seratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu delapan ratus dua puluh lima) Saham yang terdiri dari Saham Seri A dan Saham Seri B, dengan jumlah nominal seluruhnya sebesar Rp4.400.000.000.000,- (empat triliun empat ratus miliar rupiah) dan selisih keseluruhan harga pelaksanaan dengan nilai nominal saham akan dimasukkan sebagai agio saham. b. Penerbitan saham baru tersebut, akan dilakukan dengan cara penerbitan HMETD kepada para Pemegang Saham Perseroan. Jumlah saham yang akan diterbitkan serta rasio jumlah HMETD terhadap saham yang akan diterbitkan akan diinformasikan dalam prospektus PUT VI mendatang. c. Jumlah saham yang ditawarkan dalam PUT VI dengan cara penerbitan HMETD ini, adalah jumlah maksimum saham baru yang diterbitkan tersebut yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Saham hasil pelaksanaan PUT VI ini, memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham yang telah disetor penuh lainnya, termasuk hak untuk memperoleh dividen. d. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (round down). e. Apabila saham yang ditawarkan dalam PUT VI ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang bukti HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya secara proporsional, berdasarkan jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masingmasing pemegang saham yang meminta penambahan efek berdasarkan harga pesanan. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa HMETD yang belum dilaksanakan, maka terhadap seluruh HMETD yang tersisa tersebut akan dibeli seluruhnya oleh Pembeli Siaga (jika ada) dan jika tidak dibeli sebagian oleh Pembeli Siaga tersebut, maka saham tidak akan dikeluarkan dari portepel. Sebagai informasi tambahan, Perseroan tidak akan mencatatkan saham yang ditawarkan dalam PUT VI ini pada Bursa Efek. f. Pemegang saham lama yang tidak melaksanakan haknya untuk membeli saham baru yang ditawarkan dalam PUT VI ini sesuai dengan HMETD-nya akan mengalami penurunan persentase kepemilikan saham atau dilusi. g. Dana yang diperoleh dari hasil PUT VI setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan, guna mengembangkan kegiatan pembiayaan syariah yang merupakan bagian dari kegiatan usaha utama Perseroan serta peruntukan lainnya yang dapat mendukung pertumbuhan bisnis Perseroan. 2. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris yang saat ini anggotanya yang telah efektif terdiri dari: i. Bp. Ilham Akbar Habibie; ii. Bp. Iggi Haruman Achsien; iii. Bp. Edy Setiadi; untuk bersama-sama dengan: iv. Bp. Mohamed Hedi Mejai; v. Bp. Abdulsalam Mohammad Joher Al-Saleh. untuk menyetujui penetapan harga pelaksanaan saham baru Perseroan yang akan diterbitkan dalam PUT VI Perseroan yang akan dimuat dalam Prospektus PUT VI. 3. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan PUT VI, termasuk tetapi tidak terbatas untuk: a. melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pengeluaran saham baru dalam PUT VI; b. melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan PUT VI, tanpa ada suatu tindakan pun yang dikecualikan, kesemuanya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk di Pasar Modal; dan c. menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan sesuai keputusan tersebut (termasuk menegaskan susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan), sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta dan surat maupun dokumen yang diperlukan, hadir dihadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk notaris, dan selanjutnya untuk mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang, untuk memperoleh persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan ketentuan bahwa, khusus untuk penetapan jumlah modal ditempatkan dan disetor serta perubahan modal dasar (jika diperlukan) dilakukan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris.

Meeting Decision	*1. Approving the implementation of VI Limited Public Offering (PUT) by granting Pre-emptive Rights (HMETD), with the following terms and conditions:* *a. Issuance of the Company's new shares as much as 32,965,648,490 (thirty-two billion nine hundred sixty-five million six hundred forty-eight thousand four hundred ninety) Series B Shares with a nominal value of Rp100, - (one hundred Rupiah) per share, with the exercise price to be informed in the upcoming PUT VI prospectus. Thus, should the new shares be taken entirely by the Company's Shareholders, the Company's issued and paid up capital will increase from 10,207,702,335 Shares or all with a nominal value of Rp1,103,435,151,000 (one trillion one hundred three billion four hundred thirty five million one hundred fifty one thousand rupiah), to the maximum amount of 43,173,350,825 (forty-three billion one hundred seventy-three million three hundred fifty thousand eight hundred twenty-five) Shares consisting of Series A Shares and Series B Shares, de with a total nominal value of Rp4,400,000,000,000 (four trillion four hundred billion rupiah) and the difference in the overall exercise price with the nominal value of the shares will be included as additional shares.* *b. Issuance of the new shares will be performed by means of issuance of Rights to the Shareholders of the Company. The number of shares to be issued as well as the ratio of the number of pre-emptive rights to shares to be issued will be informed in the upcoming PUT VI prospectus.* *c. The number of shares offered in PUT VI by means of the issuance of this HMETD, is the maximum number of new shares issued, all of which will be issued from the portfolio by taking into account applicable laws and regulations. The shares resulting from the exercise of PUT VI, have the same and equal rights in all respects with other fully paid up shares, including the right to receive dividends.* *d. Every Rights in the form of portion will be rounded down.* *e. Should the shares offered in this PUT VI be not all taken by the holders of HMETD evidence, then the remainder will be allocated to other shareholders who make an order more than their rights proportionally, based on the number of HMETDs that have been exercised by each shareholder requesting additional securities based on the price of the order. If after the allocation there are still remaining pre-emptive rights, all remaining pre-emptive rights will be purchased entirely by the Standby Buyer (if any) and if not partially purchased by the Standby Buyer, the shares will not be issued from the portfolio. As additional information, the Company will not list the shares offered in this PUT VI on the Stock Exchange.* *f. Former shareholders who do not exercise their rights to buy new shares offered in this PUT VI in accordance with their Pre-emptive Rights will experience a decrease in the percentage of share ownership or dilution.* *g. Funds obtained from the PUT VI after deducting emission costs, will be used to strengthen the Company's capital structure, to develop sharia financing activities that are part of the Company's main business activities and other allotments that can support the growth of the Company's business.* *2. Approving the delegation of authority to the Board of Commissioners, whose members currently consist of:* *i. Ilham Akbar Habibie;* *ii. Iggi Haruman Achsien;* *iii. Edy Setiadi; to be together with:* *iv. Mohamed Hedi Mejai;* *v. Abdulsalam Mohammad Joher Al-Saleh.* *to approve the determination of the exercise price of the Company's new shares to be issued in the Company's PUT VI which will be contained in the Prospectus on PUT VI.* *3. Approving the authority to the Directors of the Company, with the right of substitution, to carry out all and every action required in connection with PUT VI, including but not limited to:* *a. taking all and every necessary action in connection with the issuance of new shares in PUT VI;* *b. taking all and every action needed in connection with PUT VI, without any action being exempted, all of them taking into account the provisions of the applicable laws and regulations, including in the Capital Market; and* *c. revealing/declaring the aforesaid decision in the deeds made before the Notary, to amend and/or to rearrange the provisions of Article 4 of the Company's Articles of Association as a whole according to the decision (including affirming the composition of shareholders in the deed when necessary), as required by and in accordance with the provisions of the applicable legislation, to make or order to make and sign deeds and letters and documents as needed, appear before the authorities/officials including notaries, and subsequently to submit applications to the authorities/officials, to obtain approval and/or deliver notification of the decisions of this Meeting and/or changes to the Company's Articles of Association in the decisions of this Meeting, and to take all and every action needed, in accordance with the applicable laws and regulations.* *With the provision that is specifically for the determination of the amount of issued and paid up capital and changes in authorised capital (if needed), it is carried out by the Directors with the approval of the Board of Commissioners.*

Mata Acara Rapat Ke 2 *2nd Meeting Agenda*	Persetujuan Penerbitan Sukuk Subordinasi; *Approval of Subordinated Sukuk Issuance;*		
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya *Number of Shareholders Who Ask*	Sebanyak 3 (tiga) pemegang saham menyampaikan pertanyaan tertulis pada mata acara kedua; *There are three shareholders who submit written inquiries in the Second Agenda;*		
Pengambilan Keputusan *Decision-making*	Dengan Pemungutan Suara *By Voting*		
	Setuju *Agree*	Abstain *Abstain*	Tidak Setuju *Disagree*
	9.475.430.975 Saham 99,9991% *9,475,430,975 Shares* *99.9991%*	0%	83.290 Saham 0,0009% *83,290 Shares* *0.0009%*
Keputusan Rapat *Meeting Decision*	• Menyetujui Penerbitan Sukuk Subordinasi dengan nilai sebanyakbanyaknya Rp6.000.000.000.000,- (enam triliun rupiah) atau setara dengan nilai lain yang akan disesuaikan dengan kebutuhan Perseroan secara sekaligus maupun bertahap; • Menyetujui pemberian kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan penerbitan Sukuk Subordinasi dimaksud, termasuk untuk menentukan struktur, skema dan akad Sukuk Subordinasi tersebut, serta hal-hal yang lain yang berkaitan dengan penerbitan Sukuk Subordinasi. • *Approving the Issuance of Subordinated Sukuk with a maximum amount of Rp6,000,000,000,000 (six trillion rupiah) or equivalent to other values that will be adjusted to the needs of the Company, simultaneously or gradually;* • *Approving the authority to the Company's Directors to enforce the issuance of the Subordinated Sukuk, including to determine the structure, scheme and contract of the Subordinated Sukuk, as well as other matters relating to the issuance of the Subordinated Sukuk.*		

Mata Acara Rapat Ke 3 *3rd Meeting Agenda*	Perubahan Susunan Dewan Pengawas Syariah Perseroan *Change in the Composition of the Sharia Supervisory Board of the Company*		
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya *Number of Shareholders Who Ask*	Sebanyak 2 (dua) pemegang saham menyampaikan pertanyaan secara tertulis pada mata acara ketiga. *There are two shareholders who submit written inquiries in the Third Agenda;*		
Pengambilan Keputusan *Decision-making*	Dengan Musyawarah Mufakat *By Consensus*		
	Setuju *Agree*	Abstain *Abstain*	Tidak Setuju *Disagree*
	100%	0%	0%
Keputusan Rapat *Meeting Decision*	Menyetujui: 1. Penunjukan Bapak Drs. H. Sholahudin Al-Aiyub, M.Si sebagai Ketua dan Ibu Hj. Siti Haniatunnisa, LLB., MH sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang baru, sehubungan dengan pengunduran diri Bapak DR (HC) KH. Ma'ruf Amin sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah Perseroan melalui suratnya tanggal 17 Oktober 2019 dan pengunduran diri Bapak Oni Sahroni sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan dengan tanggal surat pengunduran dirinya pada 07 November 2019. 2. Susunan Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan sebagai berikut: a. Ketua: Bapak Drs. H. Sholahudin Al-Aiyub, M.Si b. Anggota: Ibu Hj. Siti Haniatunnisa, LLB., MH Dengan ketentuan pengangkatan Hj. Siti Haniatunnisa, LLB., MH akan berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK. Dalam hal pengangkatan yang bersangkutan tidak mendapatkan persetujuan dari OJK, maka pengangkatan yang bersangkutan menjadi batal, tanpa diperlukan lagi suatu keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham. 3. Hal-hal yang berkaitan dengan honorarium maupun tunjangan selaku anggota Dewan Pengawas Syariah akan mengikuti hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat anggota Dewan Pengawas Syariah lainnya yang masih menjabat. 4. Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk mewakili pemegang saham untuk menandatangani perjanjian dengan masingmasing anggota Dewan Pengawas Syariah yang diusulkan tersebut di atas sehubungan dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas Syariah *Approving:* *1. The appointment of Drs. H. Sholahudin Al-Aiyub, M. Sc as Chairperson and Hj. Siti Haniatunnisa, LLB., MH as the new Member of the Sharia Supervisory Board of the Company, in connection with the resignation of DR (HC) KH. Ma'ruf Amin as Chairman of the Sharia Supervisory Board of the Company through his letter on October 17, 2019, and resignation of Oni Sahroni as a member of the Sharia Supervisory Board of the Company with the date of his resignation on November 7, 2019.* *2. 'The composition of the Company's Sharia Supervisory Board Members is as follows:* *a. Chairperson: Drs. H. Sholahudin Al-Aiyub, M. Sc* *b. Member: Hj. Siti Haniatunnisa, LLB., MH* *With the terms of appointment of Hj. Siti Haniatunnisa, LLB., MH, it will be effective after obtaining approval from the FSA. In the event that the appointment concerned does not obtain approval from the FSA, then the appointment concerned becomes called off, without the need for a decision from the General Meeting of Shareholders.* *3. Matters relating to the honorarium and benefits as a member of the Sharia Supervisory Board will follow the results of the decision of the General Meeting of Shareholders who appoints other Sharia Supervisory Board members who are still in office.* *4. Granting authority to the Company's Board of Commissioners to represent shareholders to sign an agreement with each of the proposed Sharia Supervisory Board members above in connection with the appointment of a member of the Sharia Supervisory Board.*		

Keputusan RUPS Tahun Sebelumnya

Pada tahun 2018, Bank Muamalat menyelenggarakan 2 (dua) kali RUPS dengan keputusan yang telah direalisasikan sebagaimana berikut:

Previous Year GMS Resolutions

In 2018, Bank Muamalat held 2 (two) GMS with the following resolutions as follows:

RUPS Tahunan Tanggal 28 Juni 2018

Risalah RUPS telah disahkan dalam Akta No 58 Notaris Ashoya Ratam, SH, MKn tanggal 28 Juni 2018.

Annual GMS on June 28, 2018

Minutes of the GMS have been ratified in Deed No. 58 of Notary Ashoya Ratam, SH, MKn on June 28, 2018.

No.	Mata Acara Rapat *Meeting Agenda*	Keputusan *Decision*	Realisasi *Realization*
1.	Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2017 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah untuk Tahun Buku 2017 serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2017. *Approve the Company's Annual Report for the Fiscal Year, including the Supervisory Report of the Board of Commissioners and the Sharia Supervisory Board for the Fiscal Year 2017 and ratify the Company's Financial Report for the Fiscal Year 2017.*	Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2017 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah untuk Tahun Buku 2017 dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2017. Selanjutnya dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2017 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah untuk Tahun Buku 2017 serta disahkannya Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2017, maka berarti Rapat telah memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2017, termasuk mereka yang berakhir masa jabatannya di Tahun 2017, sepanjang tindakan tersebut tercermin dari Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2017 serta bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Approve the Company's Annual Report for the Fiscal Year, including the Supervisory Report of the Board of Commissioners and the Sharia Supervisory Board for the Fiscal Year 2017 and ratify the Company's Financial Report for the Fiscal Year 2017. Furthermore, with the approval of the Company's Annual Report for Fiscal Year 2017 including the Supervisory Report of the Board of Commissioners and Sharia Supervisory Board for the 2017 Fiscal Year and the ratification of the Company's Financial Report for the Fiscal Year 2017, it means that the Meeting has given full settlement and release of responsibility (volledig acquit et de charge) to members of the Board of Directors, the Board of Commissioners and the Sharia Supervisory Board of the Company for the management and supervision actions of the Company that have been carried through during the 2017 Fiscal Year, including those who have ended their tenure in 2017, so long those actions are reflected in the Annual Report and the Financial Statements of the 2017 Fiscal Year and does not constitute a criminal offense or violation of the provisions of the applicable laws and regulations.*	Sudah direalisasikan dan Laporan Tahunan Perseroan telah disampaikan kepada OJK tanggal tanggal 26 April 2018 *It has already been realized and The Annual Report of the Company has been submitted to OJK on April 26, 2018*
2.	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Baku 2017. *Approval of the Use of the Company's Net Profit for the 2017 Fiscal Year.*	Menyetujui laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2017 setelah Pajak sebesar Rp26,115,563,000,- (dua puluh enam miliar seratus lima belas juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah) seluruhnya dipergunakan untuk cadangan Perseroan, sehingga tidak diadakan pembagian dividen atas laba bersih Perseroan Tahun Buku 2017. *Approved the Company's net profit for the 2017 Financial Year after the Tax of Rp26,115,563,000, - (twenty six billion one hundred fifteen million five hundred sixty three thousand rupiah), all of which are used for the Company's reserves, so that dividends are not paid for the Company's net profit for the Book Year 2017.*	Sudah direalisasikan dan Laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2017 tidak dibagikan dan masuk sebagai komponen modal. *It has already been realized and The Company's net profit for the 2017 Financial Year was not shared and entered as a component of capital.*

No.	Mata Acara Rapat *Meeting Agenda*	Keputusan *Decision*	Realisasi *Realization*
3.	Penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018 dan audit lain yang dibutuhkan Perseroan. *Appointment of a Public Accountant Firm to audit the Company's Financial Statements for Fiscal Year 2018 and other audits required by the Company.*	Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk, mengakhiri dan/atau mengganti Kantor Akuntan Publik yang termasuk peringkat 10 (sepuluh) besar untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018 dan/atau audit lain yang dibutuhkan Perseroan serta menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut. *Gave authority to the Board of Commissioners of the Company to appoint, terminate and/or replace the Public Accountant Office which includes the top 10 (ten) to audit the Company's Financial Statements for 2018 Book Year and/or other audits required by the Company and determine the honorarium and decided other reasonable requirements for the Public Accountant Office.* Pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan tersebut diusulkan untuk efektifitas proses penunjukan pengakhiran dan/ atau penggantian Kantor Akuntan Publik yang sesuai dengan kondisi Perseroan yang akan dilaksanakan dengan kriteria/batasan yang dianggap sesuai Dewan Komisaris Perseroan dengan kondisi Perseroan. *The granting of authority to the Board of Commissioners of the Company is proposed for the effectiveness of the process of appointing the discontinuation and/ or replacement of the Public Accountant Firm in accordance with the conditions of the Company to be carried out with the criteria/limits deemed appropriate to the Board of Commissioners of the Company with the conditions of the Company.*	Sudah direalisasikan dan Dewan Komisaris telah menunjuk Kantor Akuntan Publik yang termasuk peringkat 10 (sepuluh) besar untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018 berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit. Penunjukan berdasarkan surat Dewan Komisaris tanggal 10 Desember 2018 dan telah dilaporkan kepada OJK tanggal 18 Desember 2018. *The Board of Commissioners has appointed a Public Accountant Office which is included in the top 10 (ten) to audit the Company's Financial Statements for 2018 based on recommendations from the Audit Committee. The appointment was based on a letter of the Board of Commissioners dated December 10, 2018 and has been reported to OJK on December 18, 2018.*
4.	Pergesahan dan persetujuan tindakan penjaminan aset Perseroan sebagai jaminan hutang atas fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh PT Sarana Multigriya Finansial dan/atau pihak lain. *Ratification and approval of the actions to guarantee the Company's assets as debt guarantees for financing facilities provided by PT Sarana Multigriya Finansial and/or other parties.*	Menyetujui penjaminan Aset Perseroan Yang Akan Dijaminkan. Aset Perseroan Yang Akan Dijaminkan adalah tagihan pembiayaan milik Perseroan dan/ atau aset Perseroan lainnya yang akan dijaminkan Perseroan kepada PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) dan/atau pihak lainnya pada Tahun 2018 ini hingga penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2019 yang akan datang baik dalam satu transaksi penjaminan atau lebih yang jumlahnya maksimum sebesar Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun rupiah). *Agreed upon Company Assets to be Guaranteed. The Company's Assets To Be Guaranteed are the Company's financing bills and/or other Company assets that the Company will pledge to PT Sarana Multigriya Financial (Persero) and/or other parties in 2018 until the next Annual General Meeting of Shareholdersnext year or more guarantee transactions, the maximum amount of which is Rp3,000,000,000,000 (three trillion rupiahs).*	Sudah direalisasikan dan telah dicatat dalam Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk No. 58 tanggal 28 Juni 2018. *It has already been realized and It has been noted in the Deed of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk No. 58 dated 28 June 2018.*

No.	Mata Acara Rapat *Meeting Agenda*	Keputusan *Decision*	Realisasi *Realization*
5.	Persetujuan tindakan pembelian, penjualan, pengalihan dan/atau tukar menukar aset Perseroan dalam rangka penguatan modal Perseroan. *Approval of the actions of purchasing, selling, transferring and/or exchanging the Company's assets in order to strengthen the Company's capital.*	Menyetujui rencana Peruseroan untuk melaksanakan: 1. Transaksi penjualan aset Perseroan berupa piutang pembiayaan, aset yang diambil alih dan aset lainnya senilai Rp6.000.000.000.000, (enam triliun rupiah) kepada Tameer Sukuk SPC Limited atau investor keuangan lain yang disetujui oleh Perseroan; 2. Transaksi pembelian surat berharga berupa Sukuk Trust Certificate senilai Dolar Amerika Serikat setara dengan Rp8.000.000.000.000; (delapan triliun rupiah) oleh Perseroan dari Najah Sukuk SPC Limited atau investor keuangan lain yang disetujui oleh Perseroan dimana Sukuk Trust Certificate antara lain memiliki karakteristik ber-underlying Sukuk/ Obligasi pemerintah Republik Indonesia dan tidak berbagi hasil); 3. Transaksi penerbitan Sukuk Subordinasi Mudharabah oleh Perseroan kepada Mawthuq SPC Limited atau investor keuangan lain yang disetujui oleh Perseroan senilai Rp1.600.000.000.000,- (satu triliun enam ratus miliar rupiah) yang akan diterbitkan melalui penawaran terbatas (private placement) dan bersifat bilateral; 4. Memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan transaksi tersebut dan segala tindakan yang dianggap perlu dalam melaksanakan transaksi dimaksud. *Agreed to the Company's plan to implement:* *1. Sold the Company assests in the form of financing credits, foreclosed assets and other assets worth Rp6,000,000,000,000 (six trillion rupiahs) to SPC Limited's Tameer Sukuk or other financial investors approved by the Company;* *2. Securities purchase transactions in the form of Sukuk Trust Certificates worth US Dollars are equivalent to Rp8,000,000,000,000; (eight trillion rupiah) by the Company from Najah Sukuk SPC Limited or other financial investors approved by the Company where the Sukuk Trust Certificate has the underlying characteristics of the Government of the Republic of Indonesia Sukuk/Bonds and does not share results);* *3. The Mudharabah Subordinate Sukuk issuance transaction by the Company to Mawthuq SPC Limited or other financial investors approved by the Company worth Rp1,600,000,000,000 (one trillion six hundred billion rupiahs) will be issued through a private placement and is bilateral ; and* *4. Giving authority to the Board of Directors of the Company*	Sudah direalisasikan dan 1. Transaksi penjualan aset Perseroan berupa piutang pembiayaan, aset yang diambil alih dan aset tetap lainnya telah direalisasikan. 2. Transaksi pembelian surat berharga berupa Sukuk Trust Certificate senilai Rp8 T telah direalisasikan. 3. Transaksi penerbitan Sukuk Subordinasi Mudharabah senilai Rp1,6T diterbitkan melalui penawaran terbatas (private placement) dan bersifat bilateral. 4. Direksi Perseroan telah mengupayakan direalisasikannya transaksi sebagaimana angka 1 sampai dengan 3 di atas. *It has already been realized and* *1. The sale of the assets of the Company has financing receivables, assets taken over and other fixed assets have been realized.* *2. Securities purchase transactions in the form of Trust Certificate Sukuk worth Rp8 T has been realized.* *3. Subordinated Sukuk Mudharabah issuance of Rp1,6T issued through limited offering (private placement) and are bilateral.* *4. The Board of Directors of the Company has attempted to realize the transaction as numbered 1 to 3 above.*

No.	Mata Acara Rapat *Meeting Agenda*	Keputusan *Decision*	Realisasi *Realization*
6.	Laporan Pelaksanaan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 20 September 2017 tentang penerbitan 80 Miliar lembar saham untuk segera dijual untuk menambah modal dasar menjadi 11 Triliun. *Report on the Implementation of the General Meeting of Shareholders' resolutions on September 20, 2017, regarding the issuance of 80 billion shares to be immediately sold to increase the authorised capital to 11 trillion.*	1. Menyelujui Penurunan Modal Dasar Perseroan sehingga menjadi Rp4.400.000.000.000,- (empat triliun empat ratus miliar Rupiah), sehingga Modal Dasar serta Modal ditempatkan dan Disetor Perseroan guna memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) UUPT; 2. Memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penurunan Modal Dasar Perseroan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/ menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, untuk mengubah dan/menyusun kembali ketentuan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan sesuai keputusan tersebut (termasuk menegaskan susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan), sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir dihadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk notaris, dan selanjutnya untuk memperoleh persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. *1. Approved the Decrease of the Company's authorized capital to become Rp4,400,000,000,000 (four trillion four hundred billion Rupiah), so that the Company's authorized capital and issued and paid-up capital are in accordance with the provisions of Article 33 paragraph (1) and paragraph (2) of the Company Law; and* *2. authority to the Board of Directors of the Company to carry out all and every action related to the reduction of the Company's authorized capital, such as to declare/decide the decrees made before the Notary, to amend and/rearrange the provisions Article 4 The Company's Articles of Association as a whole are in accordance with the decision (including confirming the composition of the shareholders in the deed when needed), as required by and in accordance with the provisions of the applicable legislation, make or order to make and sign the deeds and documents and documents required, present before the authorities including notaries, and further to obtain approval and/or deliver notification of the resolutions of the Meeting and/or changes to the Company's Articles of Association in the decisions of the Meeting, as well as take all and every action needed, in accordance with the applicable laws and regulations.*	1. Sudah direalisasikan dan Penurunan Modal Dasar Perseroan menjadi Rp4,4T telah dituangkan dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris dan pemberitahuannya telah diterima Kemenkumham tanggal 1 September 2018. 2. Direksi telah menyatakan/ menuangkan keputusan penurunan Modal Dasar Perseroan dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris dan menyusun kembali ketentuan pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan sesuai keputusan RUPS. *1. It has already been realized and Decreased in the Company's authorized capital to Rp4.4T has been stated in the deed made before a Notary and the notification has been received by the Kemenkumham on September 1, 2018.* *2. The Board of Directors has stated/issued a decision to reduce the Company's Authorized Capital in the deed made before the Notary and rearranges the provisions of Article 4 of the Company's Articles of Association in accordance with the resolution of the GMS.*
7.	Laporan Pelaksanaan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 20 September 2017 tentang pelaksanaan pembayaran dividen tahun buku 2016. *Report on the Implementation of the General Meeting of Shareholders' resolutions on September 20, 2017, concerning the implementation of dividend payment for the 2016 fiscal year.*	Tidak diambil keputusan karena sifatnya merupakan laporan, yaitu mengenai Laporan Pelaksanaan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 20 September 2017 tentang pelaksanaan pembayaran dividen Tahun Buku 2016. *There was no any decision taken due to it was a report, namely regarding the Report on the Implementation of the Resolution of the General Meeting of Shareholders on September 20, 2017 concerning the implementation of dividend payment for the Fiscal Year 2016.*	Sudah direalisasikan *Has been realized*
8.	Rencana listing Saham Perseroan. *Plan on listing of the Company's shares.*	Tidak diambil keputusan karena sifatnya penyampaian, yaitu mengenai rencana listing Perseroan pada Bursa Efek Indonesia. *There was no any decision was taken due to the nature of the submission, namely regarding the Company's listing plan on the Indonesia Stock Exchange.*	Belum direalisasikan *Not yet settled*

No.	Mata Acara Rapat *Meeting Agenda*	Keputusan *Decision*	Realisasi *Realization*
9.	Perubahan susunan Pengurus Perseroan. *Changes in the composition of the Company's Management.*	1. Mengesahkan pengunduran diri Masa Paskalis Lingga disertai dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasa beliau selama ini untuk kemajuan Perseroan; 2. Menyetujui pemberhentian dengan hormat Prof. DR. Anwar Nasution selaku Komisaris Utama sekaligus Komisaris Independen Perseroan. Pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (volledig acquit et de charge) kepada Prof. DR. Anwar Nasution untuk segenap tindakan pengawasan Perseroan sejak 1 Januari 2018 sampai dengan ditutupnya Rapat, akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan di Tahun 2019; 3. Menyetujui pengangkatan Ilham Akbar Habibie sebagai Komisaris Utama sekaligus Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang masih menjabat, yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun 2019, dengan ketentuan pengangkatan tersebut akan berlaku efektif setelah Ilham Akbar Habibie memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan sebagai Komisaris Utama sekaligus Komisaris Independen dari OJK; 4. Penetapan Iggi Haruman Achsien sebagai Pelaksana Tugas (Acting) Komisaris Utama Perseroan terhitung sajak ditutupnya Rapat sampai dengan efektifnya jabatan Komisaris Utama Perseroan yang baru. *1. Validated the resignation of the Paspalal Lingga accompanied by gratitude for his services so far for the progress of the Company;* *2. Approved respectful dismissal of Prof. DR. Anwar Nasution as the President Commissioner and Independent Commissioner of the Company. Repayment and release of responsibility (volledig acquit et de charge) to Prof. DR. Anwar Nasution for all of the Company's supervisory actions from 1 January 2018 until the closing of the Meeting, will be decided at the Annual General Meeting of Shareholders of the Company which will be held in 2019;* *3. Approved the appointment of Ilham Akbar Habibie as the President Commissioner and Independent Commissioner of the Company as of the closing of the Meeting until the remaining term of office of members of the Board of Commissioners, namely until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2019, with the provisions of the appointment effective after Ilham Akbar Habibie obtained a determination to pass the Capability and Compliance Assessment as the President Commissioner and Independent Commissioner of the OJK;* *4. Appointed Hargi Achsien Iggi as a tasks executor ofThe President Commissioner of the Company as of the closing of the meeting until the position of the new President Commissioner of the Company was effective.*	Sudah direalisasikan dan Perubahan pengurus telah dicatat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk No. 58 tanggal 28 Juni 2018 dan telah dilaporkan kepada OJK. *It has been realised and the change of management has been recorded in the Deed of Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk No. 58 dated on June 28, 2018, and has been reported to FSA.s*

No.	Mata Acara Rapat *Meeting Agenda*	Keputusan *Decision*	Realisasi *Realization*
		Maka susunan selengkapnya anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut: **Dewan Komisaris** Komisari Utama/ Komisaris Independen: Ilham Akbar Habibie* Komisaris Independen: Iggi Haruman Achsien Komisaris Independen: Edy Setiadi Komisaris: Mohamed Hedi Mejai* Komisaris: Abdulsalam Mohammad Joher Al-Saleh* **Dewan Pengawas Syariah** Ketua: K.H. DR. (HC) Ma'ruf Amin Anggota: DR.H. Oni Sahroni, MA Anggota: Drs. H. Sholahudin Al Aiyub, M.Si **Direksi** Direktur Utama: Achmad Kusna Permana Direktur: Hery Syafril Direktur Kepatuhan: Andri Donny Direktur: Indra Yurana Sugiarto Direktur: Purnomo Budiwibowo Soetadi Direktur: Awaldi *Efektif setelah memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	

No.	Mata Acara Rapat *Meeting Agenda*	Keputusan *Decision*	Realisasi *Realization*
		The complete composition of the members of the Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board, and Directors of the Company is as follows: ***Board of Commissioners*** *President Commissioner/ Independent Commissioner:* — *Ilham Akbar Habibie** *Independent Commissioner:* — *Iggi Haruman Achsien* *Independent Commissioner:* — *Edy Setiadi* *Commssioner:* — *Mohamed Hedi Mejai** *Commssioner:* — *Abdulsalam Mohammad Joher Al-Saleh** ***Sharia Supervisory Board*** *Chairman:* — *K.H. DR. (HC) Ma'ruf Amin* *Member:* — *DR.H. Oni Sahroni, MA* *Member:* — *Drs. H. Sholahudin Al Aiyub, M.Si* ***Board of Diretorsi*** *President Director:* — *Achmad Kusna Permana* *Director:* — *Hery Syafril* *Compliance Director:* — *Andri Donny* *Director:* — *Indra Yurana Sugiarto* *Director:* — *Purnomo Budiwibowo Soetadi* *Director:* — *Awaldi* **Effective after passing the Fit and Proper Test from the Financial Services Authority (FSA)*	

No.	Mata Acara Rapat *Meeting Agenda*	Keputusan *Decision*	Realisasi *Realization*
		5. Menyetujui pernberian kuasa kepada Direksi Perseroan guna mewakili Perseroan untuk menandatangani perjanjian dengan Ilham Akbar Habibie sehubungan dengan pengangkatannya selaku Komisaris Utama sekaligus Komisaris Independen Perseroan. 6. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan berkenaan dengan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi Perseroan tersebut ke dalam akta Notaris dan memberitahukannya kepada pihak yang berwenang dan sehubungan dengan hal tersebut untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. *5. Approved the authorization to the Board of Directors of the Company to represent the Company to sign an agreement with Ilham Akbar Habibie in connection with his appointment as President Commissioner and Independent Commissioner of the Company.* *6. Approved the authorization to the Board of Directors of the Company with substitution rights, to restate the decision regarding changes in the composition of the Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board and Board of Directors of the Company to the Notary deed and notify the relevant authorities and to do everything necessary in accordance with the provisions of applicable laws and regulations.*	

RUPS Luar Biasa Tanggal 11 Oktober 2018

Extraordinary General Meeting of Shareholders on October 11, 2018

Risalah RUPS telah disahkan dalam Akta No 20 Notaris Ashoya Ratam, SH, MKn tanggal 11 Oktober 2018.

Minutes of the General Meeting of Shareholders have been ratified in Deed No. 20 Notary Ashoya Ratam, SH, MKn on October 11, 2018.

No.	Mata Acara Rapat *Meeting Agenda*	Keputusan *Decision*	Realisasi *Realization*
1.	Persetujuan Rencana Penawaran Umum Terbatas VI dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD); *Approval of the VI Limited Public Offering Plan by granting Preemptive Rights (HMETD);*	1. Menyetujui pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas (PUT) VI dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut: • Penerbitan Saham baru Perseroan sampai dengan jumlah paling banyak 20.000.000.000 (dua puluh miliar) Saham Seri B dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham, dengan harga pelaksanaan yang akan diinformasikan dalam prospektus PUT VI mendatang dan jumlah keseluruhan harga pelaksanaan diatas nilai nominal saham akan dibukukan sebagai agio saham. • Penerbitan saham baru tersebut, akan dilakukan dengan cara penerbitan HMETD kepada para Pemegang Saham Perseroan. Rasio jumlah HMETD dengan jumlah saham yang akan diterbitkan akan diinformasikan dalam prospektus PUT VI mendatang. • Jumlah saham yang ditawarkan dalam PUT VI dengan cara penerbitan HMETD ini, adalah jumlah maksimum saham baru yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dari portepel dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Saham hasil pelaksanaan PUT VI ini, memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham yang telah disetor penuh lainnya, termasuk hak untuk memperoleh dividen. • Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan kebawah (round down). • Apabila saham yang ditawarkan dalam PUT VI ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya secara proporsional, berdasarkan jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masingmasing pemegang saham yang meminta penambahan saham berdasarkan harga pesanan. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham yang belum diambil bagian, maka terhadap seluruh saham yang tersisa tersebut dapat diambil seluruhnya atau sebagian oleh Pembeli Siaga. Jika seluruh saham yang tersisa hanya diambil sebagian oleh Pembeli Siaga, maka sisa saham yang tidak diambil bagian oleh pemegang HMETD dan/atau Pembeli Siaga, tidak jadi dikeluarkan dari portepel. Sebagai informasi tambahan, Perseroan belum akan mencatatkan saham yang ditawarkan dalam PUT VI ini di Bursa Efek Indonesia. • Pemegang saham lama yang tidak melaksanakan haknya untuk membeli saham baru yang ditawarkan dalam PUT VI ini sesuai dengan HMETD¬nya akan mengalami penurunan persentase kepemilikan saham atau terdilusi. • Dana yang diperoleh dari hasil PUT VI setelah dikurangi biaya emisi, akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan, guna mengembangkan kegiatan pembiayaan syariah yang merupakan bagian dari kegiatan usaha utama Perseroan serta bagi peruntukan lainnya yang dapat mendukung pertumbuhan bisnis Perseroan. 2. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris yang saat ini anggotanya yang telah efektif terdiri dari: • Bp. IGGI HARUMAN ACHSIEN; • Bp. EDY SETIADI; untuk bersama-sama dengan: • Bp. ILHAM AKBAR HABIBIE; • Bp. MOHAMED HEDI MEJAI; • Bp. ABDULSALAM MOHAMMAD JOHER ALSALEH. untuk menyetujui secara bulat penetapan harga pelaksanaan HMETD atas saham baru Perseroan yang akan diterbitkan dalam rangka PUT VI Perseroan, sebagaimana yang akan dimuat dalam Prospektus PUT VI. 3. Menyetujui pemberian kewenangan kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan PUT VI tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk: • melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pengeluaran saham baru dalam rangka PUT VI; • melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan PUT VI, tanpa ada suatu tindakan pun yang dikecualikan, kesemuanya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan perundangan di bidang Pasar Modal; dan	Sudah direalisasikan Persetujuan Proses Penawaran Umum Terbatas VI dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) ("PUT VI") telah diperbaharui dalam RUPSLB tanggal 16 Desember 2019.

No.	Mata Acara Rapat *Meeting Agenda*	Keputusan *Decision*	Realisasi *Realization*
		• menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan sesuai keputusan tersebut (termasuk menegaskan susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan), sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta dan surat maupun dokumen yang diperlukan, hadir dihadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk notaris, dan selanjutnya untuk mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang, untuk memperoleh persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Dengan ketentuan bahwa khusus untuk penetapan jumlah modal ditempatkan dan disetor serta perubahan modal dasar (jika diperlukan) dilakukan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris. 4. menyetujui penambahan dan/atau penguatan modal lainnya pada Perseroan selain PUT VI dengan nilai sampai dengan Rp2.000.000.000.000 (dua triliun Rupiah) melalui penempatan dana setoran modal, penerbitan surat berharga subordinasi dan/atau transaksi lainnya di luar mekanisme Penawaran Umum Terbatas, di Tahun 2018 maupun yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; dan memberikan mandat kepada mereka yang disebut dalam keputusan butir 2 dari mata acara pertama Rapat ini untuk memberikan persetujuan pada bentuk pelaksanaan penambahan dan/atau penguatan modal lainnya tersebut. 5. Dengan memperhatikan pemberian kewenangan kepada Direksi Perseroan yang telah diputuskan pada mata acara kelima dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 28 Juni 2018, Rapat menyetujui dan menerima penjelasan serta menyetujui langkah yang diperlukan manajemen untuk melakukan perbaikan serta mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan terkait pelaksanaan transaksi (termasuk transaksi asset swap) yang sebelumnya telah disetujui oleh pemegang saham pada mata acara kelima pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tanggal 28 Juni 2018.”	

No.	Mata Acara Rapat *Meeting Agenda*	Keputusan *Decision*	Realisasi *Realization*
1.	Persetujuan Rencana Penawaran Umum Terbatas VI dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD); *Approval of the VI Limited Public Offering Plan by granting Preemptive Rights (HMETD);*	*1. Approving the implementation of VI Limited Public Offering (PUT) by granting Pre-emptive Rights (HMETD), with the following terms and conditions:* • *Issuance of the Company's new shares up to a maximum of 20,000,000,000 (twenty billion) Series B Shares with a nominal value of Rp100, - (one hundred Rupiah) per share, with the exercise price to be informed in the upcoming PUT VI prospectus and the total number of exercise prices above the face value of the shares will be recorded as additional shares.* • *Issuance of the new shares will be carried out by means of issuance of Rights to the Shareholders of the Company. The ratio of the number of pre-emptive rights to the number of shares to be issued will be informed in the upcoming PUT VI prospectus.* • *The number of shares offered in PUT VI by means of the issuance of this HMETD, is the maximum number of new shares that will be issued by the Company from the port by taking into account the applicable laws and regulations. The shares resulting from the exercise of PUT VI, have the same and equal rights in all respects with other fully paid up shares, including the right to receive dividends.* • *Every Rights in the form of fraction will be rounded down (round down).* • *Should the shares offered in this PUT VI be not all taken by the HMETD holders, then the remainder will be allocated to other shareholders who make an order more than their rights proportionally, based on the number of pre-emptive rights that have been exercised by each shareholder requesting additional shares based on the price order. If after the allocation there are still remaining shares that have not been taken part, all of the remaining shares may be taken in whole or in part by the Standby Buyer. If all remaining shares are only partly taken by the Standby Buyer, then the remaining shares that are not taken up by the Rights holder and/or Standby Buyer, will not be removed from the portfolio. As additional information, the Company will not list the shares offered in this PUT VI on the Indonesia Stock Exchange.* • *Former shareholders who do not exercise their rights to buy new shares offered in this PUT VI in accordance with their Pre-emptive Rights will experience a decline in the percentage of share ownership or dilution.* • *Funds obtained from PUT VI after deducting emission costs, will be used to strengthen the Company's capital structure, to develop sharia financing activities that are part of the Company's main business activities as well as for other allotments that can support the Company's business growth.* *2. Approving the delegation of authority to the Board of Commissioners, whose members currently consist of:* • *IGGI HARUMAN ACHSIEN;* • *EDY SETIADI; to be together with:* • *ILHAM AKBAR HABIBIE;* • *MOHAMED HEDI MEJAI;* • *ABDULSALAM MOHAMMAD JOHER ALSALEH.* *to concur unanimously for the determination of the price of the Rights exercise of the Company's new shares to be issued in the framework of the Company's PUT VI, as will be contained in the Prospectus on PUT VI.* *3. Approving the granting of authority to the Directors of the Company, with the right of substitution, to carry out all and every action needed in connection with the PUT VI, including but not limited to:* • *carrying throughn connection with the issuance of new shares in the framework of PUT VI;* • *carrying through all and every action that is needed in connection with PUT VI, without any action being excluded, all of them taking into account the provisions of the applicable laws and regulations, including legislation in the Capital Market; and*	*Has been realised* *The VI Public Offering Process with Pre-emptive Rights ("Rights Issue") continues. The bank is communicating with several investors who are interested in investing in Bank Muamalat Indonesia.*

No.	Mata Acara Rapat *Meeting Agenda*	Keputusan *Decision*	Realisasi *Realization*
		declaring/revealing the aforesaid decision in the deed made before the Notary, to amend and/or to rearrange the provisions of Article 4 of the Company's Articles of Association as a whole according to the decision (including affirming the composition of shareholders in the deed when necessary), as required by and in accordance with the provisions of the prevailing laws and regulations, make or order to make and sign deeds and letters and documents as needed, appear before the authorized parties/officials including notaries, and subsequently to submit applications to the authorized parties/officials, to obtain approval and/or deliver notification of the decisions of this Meeting and/or changes to the Articles of Association of the Company in the decisions of this Meeting, and take all and every action needed, in accordance with applicable laws and regulations. With the provision that specifically for the determination of the amount of issued and paid up capital and changes in authorized capital (if needed), it is carried out by the Directors with the approval of the Board of Commissioners. *4. approving the addition and/or strengthening of other capital in the Company other than PUT VI with a value of up to Rp2,000,000,000,000 (two trillion Rupiahs) through placement of funds for paid up capital, issuance of subordinated securities and/or other transactions outside the mechanism of Limited Public Offering, in 2018 and in the future in accordance with applicable laws and regulations; and mandate to those mentioned in decision item 2 of the first agenda item of this Meeting to give approval on the implementation of the addition and/or strengthening of other capital.* *5. With due regard to the granting of authority to the Directors of the Company which has been decided at the fifth agenda item at the Annual General Meeting of Shareholders on June 28, 2018, the Meeting approved and received explanations and approved the steps needed by management to make improvements and obtain the approval of the Financial Services Authority related to the transaction (including asset swap transactions) which were previously approved by shareholders at the fifth agenda item at the Company's Annual General Meeting of Shareholders on June 28, 2018."*	
2.	Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan; *Approval of amendments to the Company's Articles of Association;*	1. Menyetujui perubahan Pasal 3 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan tentang Kegiatan Usaha (Perseroan). 2. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan berkenaan dengan perubahan dan penyusunan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan ke dalam akta Notaris dan menyampaikan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar tersebut kepada pihak yang berwenang dan sehubungan dengan hal tersebut untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku." *1. Approving changes to Article 3 paragraph 2 of the Company's Articles of Association concerning Business Activities (the Company).* *2. Approving the granting of power of attorney to the Board of Directors of the Company with the right of substitution, to restate the decision regarding the amendment and rearrangement of all provisions of the Company's Articles of Association to the notarial deed and submit notification of the amendment to the Articles of Association to the authorities and in connection with it to make everything needed is in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations."*	Sudah direalisasikan Perubahan Anggaran Dasar tentang Kegiatan Usaha (Perseroan) telah dinyatakan dalam akta notaris dan pemberitahuannya telah diterima Kemenkumham tanggal 9 November 2018. *Has been realised Amendments to the Articles of Association concerning Business Activities (the Company) have been stated in a notarial deed and the notification was received by the Ministry of Law and Human Rights on November 9, 2018.*

No.	Mata Acara Rapat *Meeting Agenda*	Keputusan *Decision*	Realisasi *Realization*
3.	Perubahan Susunan Pengurus Perseroan. *Changes in the composition of the Company's Management.*	Menerima pengunduran diri Bp. INDRA YURANA SUGIARTO, selaku anggota Direksi Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam surat pengunduran dirinya tertanggal 9 Oktober 2018. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (volledig acquit et de charge) kepada Bp. INDRA YURANA SUGIARTO tersebut untuk segenap tindakan pengurusan Perseroan yang telah dilakukannya selama tahun 2018, sepanjang laporan tahunan dan laporan keuangan Perseroan Tahun 2018 disetujui dan disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan di tahun 2019, serta sejauh tindakan pengurusan tersebut tercermin dari Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018 dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Selanjutnya, dengan pengunduran diri Bp. INDRA YURANA SUGIARTO tersebut, susunan selengkapnya anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut: *Accepted the resignation of Mr. INDRA YURANA SUGIARTO, as a member of the Company's Board of Directors as stated in his resignation letter dated October 9, 2018.* *Provided repayment and release of responsibility (volledig acquit et de charge) to Mr. INDRA YURANA SUGIARTO for all Company management actions that have been carried out during 2018, as well as the annual report and financial statements of the Company in 2018 are approved and ratified at the Company's Annual General Meeting of Shareholders which will be held in 2019, and extented that the management actions are reflected in the Report Annual and Financial Statements of the Company for Book Year 2018 and not a criminal offense or violation of the provisions of applicable laws and regulations.* *Furthermore, with the resignation of Mr. INDRA YURANA SUGIARTO, the complete composition of the members of the Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board and Directors of the Company is as follows:*	Pengunduran diri Bapak Indra Yurana Sugiarto telah dinyatakan dalam akta notaris dan telah dilaporkan kepada OJK. *The resignation of Indra Yurana Sugiarto has been stated in a notarial deed and has been reported to the FSA.*

No.	Mata Acara Rapat *Meeting Agenda*	Keputusan *Decision*	Realisasi *Realization*
		Dewan Komisaris Komisari Utama/ Komisaris Independen: Ilham Akbar Habibie Komisaris Independen: Iggi Haruman Achsien Komisaris Independen: Edy Setiadi Komisaris: Mohamed Hedi Mejai Komisaris: Abdulsalam Mohammad Joher Al-Saleh **Dewan Pengawas Syariah** Ketua: K.H. DR. (HC) Ma'ruf Amin Anggota: DR.H. Oni Sahroni, MA Anggota: Drs. H. Sholahudin Al Aiyub, M.Si **Direksi** Direktur Utama: Achmad Kusna Permana Direktur: Hery Syafril Direktur Kepatuhan: Andri Donny Direktur: Purnomo Budiwibowo Soetadi Direktur: Awaldi Dengan ketentuan, pengangkatan Bp. ILHAM AKBAR HABIBIE, Bp. MOHAMED HEDI MEJAI dan Bp. ABDULSALAM MOHAMMAD JOHER AL-SALEH tersebut selaku anggota Dewan Komisaris Perseroan akan berlaku efektif setelah yang bersangkutan memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Assessment) dari OJK. Dalam hal yang bersangkutan dinyatakan tidak lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Assessment), maka pengangkatan yang bersangkutan menjadi batal, tanpa diperlukan lagi suatu keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham. Menyetujui pemberian persetujuan kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan berkenaan dengan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi Perseroan tersebut ke dalam akta Notaris dan memberitahukannya kepada pihak yang berwenang dan sehubungan dengan hal tersebut untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.	

No.	Mata Acara Rapat *Meeting Agenda*	Keputusan *Decision*	Realisasi *Realization*
		Board of Commissioners *President Commissioner/ Independent:* — *Ilham Akbar Habibie* *Independent Commissioner:* — *Iggi Haruman Achsien* *Independent Commissioner:* — *Edy Setiadi* *Commissioner:* — *Mohamed Hedi Mejai* *Commissioner:* — *Abdulsalam Mohammad Joher Al-Saleh* ***Sharia Supervisory Board*** *Chairperson:* — *K.H. DR. (HC) Ma'ruf Amin* *Members:* — *DR.H. Oni Sahroni, MA* *Members:* — *Drs. H. Sholahudin Al Aiyub, M.Si* ***Board of Directors*** *President Director:* — *Achmad Kusna Permana* *Director:* — *Hery Syafril* *Compliance Director:* — *Andri Donny* *Director:* — *Purnomo Budiwibowo Soetadi* *Director:* — *Awaldi* *With the provisions, the appointment of Mr. ILHAM AKBAR HABIBIE, Mr. MOHAMED HEDI MEJAI and Mr. ABDULSALAM MOHAMMAD JOHER AL-SALEH as a member of the Board of Commissioners of the Company will be effective after the person concerned has obtained the determination to pass the Fit and Proper Assessment from the FSA. If the person concerned is declared not to have passed the Fit and Proper Assessment, the appointment shall be canceled, without the need for a decision from the General Meeting of Shareholders.* *Approved the granting of approval to the Directors of the Company with substitution rights, to restate the decision regarding the change in the composition of the Board of Commissioners, the Sharia Supervisory Board and the Board of Directors of the Company to the notarial deed and notify the authorities and in connection with it to do everything which is required in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations.*	

Dewan Pengawas Syariah
Sharia Supervisory Board

Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah telah mengatur bahwa kegiatan usaha bank syariah harus berdasarkan kepada prinsip syariah yaitu fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang dalam hal ini adalah Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN – MUI). Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai organ Bank bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah dilaporkan kepada Direktur Utama untuk selanjutnya disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) setiap semester.

Law No. 21 of 2008 concerning Sharia Banking has stipulated that sharia bank business activities must be based on sharia principles, namely fatwa issued by the authorized institution in this case the National Sharia Council - Indonesian Ulema Council (DSN - MUI). The Sharia Supervisory Board (DPS) as the Bank's organ is tasked with providing advice and advice to the Directors as well as overseeing the activities of the Bank to be in accordance with sharia principles. Sharia Supervisory Board supervision results are reported to the President Director and subsequently submitted to the Financial Services Authority (OJK) every semester.

Dasar Hukum

Pembentukan dan pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Syariah Bank Muamalat Indonesia didasarkan pada beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Undang Undang RI No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Undang Undang RI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
3. Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
4. Peraturan Bank Indonesia No. 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 15/13/PBI/2013.
5. Anggaran Dasar Bank Muamalat Indonesia

Legal Basis

The basis for forming and undertaking the duties of the Sharia Supervisory Board of Bank Muamalat Indonesia is based on the following provisions:

1. *Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.*
2. *Law No. 21 of 2008 concerning Islamic Banking.*
3. *Bank Indonesia Regulation No. 11/33/PBI/2009 concerning Implementation of Good Corporate Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units.*
4. *Bank Indonesia Regulation No. 11/3/PBI/2009 concerning Sharia Commercial Banks as amended by Bank Indonesia Regulation No. 15/13/PBI/2013.*
5. *Bank Muamalat Indonesia's Articles of Association.*

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

Anggota Dewan Pengawas Syariah wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal. Dewan Pengawas Syariah memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Memberikan nasihat dan saran kepada Direksi mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah.
2. Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang telah dikeluarkan Bank Muamalat Indonesia.
3. Sebagai mediator antara Bank Muamalat Indonesia dengan DSN-MUI dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari Bank Muamalat Indonesia yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN-MUI.
4. Mengawasi proses pengembangan produk baru dan kegiatan Bank Muamalat Indonesia agar sesuai dengan fatwa DSN-MUI.
5. Meminta fatwa kepada DSN-MUI untuk produk baru Bank Muamalat Indonesia yang belum ada fatwanya.
6. Sebagai perwakilan DSN-MUI yang ditempatkan di Bank Muamalat Indonesia, Dewan Pengawas Syariah wajib melaporkan atas hasil pengawasannya kepada DSN-MUI dan Otoritas Jasa Keuangan dalam waktu 6 (enam) bulan sekali.

Duties and Responsibilities of Sharia Supervisory Board

It is necessary for the members of the Sharia Supervisory to allocate their time to undertake the duties and responsibilities, appropriately. The Sharia Supervisory Board has the duties and responsibilities that cover:

1. *Giving advice and suggestion to the Directors regarding matters related to sharia features.*
2. *Assessing and making sure the compliance with Sharia Principles on operational guidelines and products that have been issued by Bank Muamalat Indonesia.*
3. *As a mediator between Bank Muamalat Indonesia and DSN-MUI in terms of communicating proposals and suggestions for product and service development from Bank Muamalat Indonesia, which requires a study and fatwa from DSN-MUI.*
4. *Monitoring the process of amplifying new products and activities of Bank Muamalat Indonesia to comply with the DSN-MUI fatwa.*
5. *Appealing for a fatwa from DSN-MUI for Bank Muamalat Indonesia's new products for which the fatwa is still unavailable.*
6. *As a DSN-MUI representative located at Bank Muamalat Indonesia, it is necessary for the Sharia Supervisory Board to report the results of its supervision to DSN-MUI and the Financial Services Authority within 6 (six) months.*

7. Memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional Bank Muamalat Indonesia secara keseluruhan dalam laporan publikasi Bank Muamalat Indonesia.
8. Melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank Muamalat Indonesia.
9. Memberikan opini aspek syariah atas temuan/ penyimpangan yang dijumpai oleh Unit Kerja Internal Audit.
10. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja di Bank Muamalat Indonesia dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

7. Delivering opinions on sharia aspects on the all-inclusive implementation of Bank Muamalat Indonesia in the published report of Bank Muamalat Indonesia.
8. Conducting periodic reviews of the fulfilment of sharia principles on the mechanism of raising funds and channelling funds and services of Bank Muamalat Indonesia.
9. Providing an opinion on sharia aspects of findings/deviations encountered by the Internal Audit Work Unit.
10. Requesting data and information related to sharia aspects from the work unit at Bank Muamalat Indonesia in the context of carrying through their duties.

Dalam melakukan pengawasan terhadap proses pengembangan produk baru Bank Muamalat Indonesia, Dewan Pengawas Syariah melakukan hal hal sebagai berikut:

1. Meminta penjelasan dari pejabat Bank Muamalat Indonesia yang berwenang mengenai tujuan, karakteristik, dan akad yang digunakan dalam produk baru yang akan dikeluarkan.
2. Memeriksa apakah terhadap akad yang digunakan dalam produk baru telah terdapat fatwa DSN-MUI,
   a. Dalam hal telah terdapat fatwa, maka Dewan Pengawas Syariah melakukan analisis atas kesesuaian akad produk baru dengan fatwa DSN- MUI.
   b. Dalam hal belum terdapat fatwa, maka Dewan Pengawas Syariah mengusulkan kepada Direksi Bank untuk melengkapi akad produk baru dengan fatwa dari DSN-MUI.
3. Mereview sistem dan prosedur produk baru yang akan dikeluarkan terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah.
4. Memberikan pendapat syariah atas produk baru yang akan dikeluarkan.

In supervising the new products development of Bank Muamalat Indonesia, the Sharia Supervisory Board performs the following things:

1. Asking an explanation from Bank Muamalat Indonesia officials authorized regarding the purpose, characteristics, and contract used in the new product to be issued.
2. Reviewing about whether the contract employed in the new product has a DSN-MUI fatwa,
   a. Should there be a fatwa, the Sharia Supervisory Board is required to conduct an in-depth analysis of the suitability of the agreement of the new product with the DSN-MUI fatwa.
   b. Should the fatwa be unavailable, the Sharia Supervisory Board proffers to the Board of Directors of the Bank to complete the agreement of the new product with a fatwa from DSN-MUI.
3. Reviewing new product systems and procedures that will be issued related to compliance with Sharia Principles.
4. Providing sharia opinions on new products to be issued.

Dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan Bank Muamalat Indonesia, Dewan Pengawas Syariah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menganalisis laporan yang disampaikan oleh dan/atau yang diminta dari Direksi, pelaksana fungsi audit intern dan/atau fungsi kepatuhan untuk mengetahui kualitas pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah atas kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank.
2. Menetapkan jumlah uji petik (sampel) transaksi yang akan diperiksa dengan memperhatikan kualitas pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah dari masing- masing kegiatan.
3. Memeriksa dokumen transaksi yang diuji petik (sampel) untuk mengetahui pemenuhan Prinsip Syariah sebagaimana dipersyaratkan dalam SOP, antara lain:
   a. Ada tidaknya bukti pembelian barang, untuk akad murabahah sebagai bukti terpenuhinya syarat jual-beli murabahah.
   b. Ada tidaknya laporan usaha nasabah, untuk akad mudharabah/musyarakah, sebagai dasar melakukan perhitungan distribusi bagi hasil.

In term of supervising the activities of Bank Muamalat Indonesia, the Sharia Supervisory Board performs the following things:

1. Analysing the report submitted by and/or requested from the Board of Directors, implementing the internal audit function and/ or compliance function to uncover the quality of implementing Sharia Principles on fundraising activities, fund distribution, and Bank services.
2. Determining the number of sample tests of transactions that are to be examined by deeming the quality of compliance implementation with Sharia Principles of each activity.
3. Conducting the spot-checked transaction documents to find out the fulfilment of Sharia Principles as entailed in the SOP that covers:
   a. Whether there is a proof of purchase of goods, for murabahah contract as evidence of the fulfilment of the conditions for purchasing and selling murabahah.
   b. Whether there is a customer business report, for mudharabah/ musyarakah contract, as a basis for calculating the profit-sharing distribution.

4. Melakukan inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan dan/atau konfirmasi kepada karyawan Bank Muamalat Indonesia dan/atau nasabah untuk memperkuat hasil pemeriksaan dokumen, apabila diperlukan.
5. Melakukan review terhadap prosedur terkait aspek syariah apabila terdapat indikasi ketidaksesuaian pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah atas kegiatan dimaksud.
6. Memberikan pendapat syariah atas kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank.
7. Melaporkan hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah kepada Direksi dan Dewan Komisaris.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Pengawas Syariah

Bank Muamalat telah memiliki Pedoman dan tata tertib kerja bagi Dewan Pengawas Syariah berupa Board Manual Bank Muamalat No CPL.KBJ.013.2016 yang bertujuan untuk mempermudah Dewan Pengawas Syariah dalam memahami peraturan-peraturan yang terkait dengan pelaksanaan fungsi dan tanggung jawabnya. Pedoman Kerja DPS yang diatur dalam Board Manual meliputi antara lain:

1. Fungsi;
2. Persyaratan;
3. Komposisi;
4. Pengangkatan;
5. Rangkap Jabatan;
6. Masa Jabatan dan Pemberhentian;
7. Program Orientasi Dan Peningkatan Kapabilitas;
8. Standar Etika Dewan Pengawas Syariah;
9. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah;
10. Tata Kerja Dewan Pengawas Syariah;
11. Pembagian Tugas Dewan Pengawas Syariah;
12. Rapat Dewan Pengawas Syariah;
13. Hubungan Kerja dengan Dewan Komisaris dan Direksi;
14. Pelaporan Dewan Pengawas Syariah;
15. Hak Kompensasi Dewan Pengawas Syariah; dan
16. Evaluasi Kinerja Dewan Pengawas Syariah.

Kriteria Anggota Dewan Pengawas Syariah

Peraturan Bank Indonesia No. 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah telah menjabarkan persyaratan yang wajib dipenuhi sebagai anggota DPS dan Bank Muamalat telah mencantumkannya di dalam Pedoman Kerja/Board Manual DPS antara lain:

1. memiliki akhlak dan moral yang baik;
2. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perbankan syariah dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;
3. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan Bank yang sehat dan tangguh (sustainable);
4. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan.

4. *Conducting inspections, observations, requests for information and/or confirmations to Bank Muamalat Indonesia employees and/or customers to strengthen the results of document checks, if necessary.*
5. *Reviewing procedures related to sharia aspects should there be indications of non-compliance with the implementation of Sharia Principles for the said activity.*
6. *Providing sharia opinion fundraising activities and channelling of funds and bank services.*
7. *Reporting the results of supervision of the Sharia Supervisory Board to the Directors and Board of Commissioners*

Charter and Code of Conduct Sharia Supervisory Board

Bank Muamalat already has a work guideline and code of conduct for Sharia Supervisory Board in the form of Bank Muamalat Board Manual No CPL.KBJ.013.2016 which aims to facilitate the Council Sharia Supervisors in understanding related regulations by carrying out its functions and responsibilities. The Board Manual of DPS is regulated in the Board Manual includes, among others:

1. *Function;*
2. *Provisos;*
3. *Composition;*
4. *Appointment;*
5. *Concurrent Position;*
6. *Term and Dismissal;*
7. *Orientation and Capability Improvement Program;*
8. *Sharia Supervisory Board Ethics Standards;*
9. *Duties and Responsibilities of the Sharia Supervisory Board;*
10. *Working Procedures of the Sharia Supervisory Board;*
11. *Distribution of Duties of the Sharia Supervisory Board;*
12. *Sharia Supervisory Board Meeting;*
13. *Working Relationships with the Board of Commissioners and Directors;*
14. *Reporting of the Sharia Supervisory Board;*
15. *Sharia Compensation Board Compensation Rights, and;*
16. *Evaluation of Sharia Supervisory Board Performance.*

Criteria of the Sharia Supervisory Board's Member

Bank Indonesia Regulation No. 11/3/PBI/2009 concerning Commercial Banks Sharia has set out the requirements that must be fulfilled as DPS and Muamalat Bank members have included it in the DPS Work Guidelines/Board Manuals include:

1. *having good character and morals;*
2. *committing to complying with Islamic banking regulations and other applicable laws and regulations;*
3. *having a strong commitment to developing a healthy and resilient Bank;*
4. *out of the Disqualified List under the provisions stipulated by Bank Indonesia and/or the Financial Services Authority;`*

5. memiliki keahlian di bidang fiqih mu'amalah;
6. memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah mu'amalah dan pengetahuan di bidang perbankan dan/ atau keuangan secara umum;
7. jika diperlukan anggota DPS dapat pula memiliki keahlian selain fiqih mu'amalah, tetapi harus memiliki pengalaman di bidang perbankan dan atau lembaga keuangan syariah.
8. tidak termasuk dalam daftar kredit/pembiayaan macet; dan
9. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pemegang saham, anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

5. having proficiency in the realm of fiqh mu'amalah;
6. having proper adeptness and experience in the field of sharia mu'amalah and knowledge in banking and/or finance in general;
7. it is necessary for the Sharia Supervisory Board members to have expertise beyond fiqh mu'amalah; however, they must have experience in the field of banking and or Islamic financial institutions;
8. out of the list of poor credit/financing; and
9. never have been declared bankrupt or become a shareholder, a member of the Board of Commissioners or a member of the Board of Directors found guilty of causing a company to be declared bankrupt within the last 5 (five) years before being nominated.

Susunan Keanggotaan Dewan Pengawas Syariah

Membership of the Sharia Supervisory Board

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 11/3/ PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah Pasal 36 (1) bahwa jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah paling kurang 2 (dua) orang atau paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Direksi. Bank Muamalat dari waktu ke waktu berusaha memenuhi komposisi anggota DPS sesuai dengan ketentuan dan mempertimbangkan skala bisnis Bank Muamalat.

Based on Bank Indonesia Regulation No. 11/3 / PBI / 2009 concerning Sharia Commercial Banks Article 36 (1) that the number of members of the Sharia Supervisory Board is at least 2 (two) people or at most 50% (fifty percent) of the total members of the Board of Directors. Bank Muamalat tries to meet the composition of DPS members from time to time in accordance with the provisions and considers the business scale of Bank Muamalat.

Susunan anggota Dewan Pengawas Syariah Bank Muamalat periode 1 Januari - 16 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

The composition of the Sharia Supervisory Board of Bank Muamalat for the period of January 1 - December 16, 2019 is as follows:

Nama *Name*	Jabatan *Position*	RUPS Pengangkatan *Appointment AGMS*	Persetujuan OJK *FSA Approval*	Tanggal Efektif *Effective Date*	Pengangkatan Kembali *Reappointing*
Prof.DR. (HC) KH. Ma'ruf Amin*)	Ketua *Chairman*	RUPS Tahunan 23 April 2009 *Annual GMS April 23, 2009*	-	23 April 2009	RUPS Tahunan 17 Mei 2019 *Annual GMS on May 17, 2019*
DR. H. Oni Sahroni MA**)	Anggota *Member*	RUPS Tahunan 29 Juni 2016 *Annual GMS 29 June 2016*	No. SR-2/PB.13/2017 tanggal 2 Feb 2017 *No. SR-2/PB.13/2017 dated on Feb 2, 2017*	2 Februari 2017	RUPS Tahunan 17 Mei 2019 *Annual GMS on May 17, 2019*
Drs. H. Sholahudin Al Aiyub, M.Si	Anggota *Member*	RUPS Tahunan 29 Juni 2016 *Annual GMS 29 June 2016*	No. SR-2/PB.13/2017 tanggal 2 Feb 2017 *No. SR-2/PB.13/2017 dated on Feb 2, 2017*	2 Februari 2017	RUPS Tahunan 17 Mei 2019 *Annual GMS on May 17, 2019*

*) Mengundurkan diri sebagai Ketua DPS BMI tanggal 17 Oktober 2019 dan ditetapkan melalui RUPS LB tanggal 16 Desember 2019
**) Resigned as Chairman of the BMI Sharia Supervisory Board on October 17, 2019 and determined through the General Meeting of Shareholders on December 16, 2019*
**) Mengundurkan diri sebagai anggota DPS BMI tanggal 7 November 2019 dan ditetapkan melalui RUPS LB tanggal 16 Desember 2019
***) Resigned as Chairman of the BMI Sharia Supervisory Board on November 7, 2019 and determined through the General Meeting of Shareholders on December 16, 2019*

Sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) pada tanggal 16 Desember 2019 telah menetapkan susunan keanggotaan DPS baru yaitu sebagai berikut:

In accordance with the decision of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) on December 16, 2019 has stipulated the composition New DPS membership is as follows:

Nama *Name*	Jabatan *Position*	RUPS Pengangkatan *Appointment AGMS*	Persetujuan OJK *FSA Approval*	Tanggal Efektif *Effective Date*	Pengangkatan Kembali *Reappointing*
Drs. H. Sholahudin Al Aiyub, M.Si *)	Ketua *Chairman*	RUPS LB 16 Desember 2019 *EGMS on December 16 2019*	-	16 Des 2019	-
Hj. Siti Haniatunnisa,LLB., MH**)	Anggota *Member*	RUPS LB 16 Desember 2019 *EGMS on December 16 2019*	-	-	-

*) Pengangkatan Ketua DPS dari jabatan sebelumnya anggota DPS tanpa jeda tidak memerlukan persetujuan dari OJK, namun telah dilaporkan kepada OJK melalui Surat Bank Muamalat No. 237/B/PRD-SRT/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019
**) Appointment of DPS Chairperson from the previous position of DPS member without pause does not require approval from FSA, but has been reported to FSA through Bank Muamalat Letter No. 237/B/PRD-SRT/XII/2019 dated December 19, 2019*
**) Efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK
***) Effective after obtaining approval from FSA*

Rangkap Jabatan

Sesuai Peraturan Bank Indonesia No. 11/3/PBI/2009 Pasal 36 ayat (2), anggota Dewan Pengawas Syariah hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah paling banyak pada 4 (empat) lembaga keuangan syariah lain. Dalam rangka memenuhi ketentuan rangkap jabatan tersebut, Dewan Pengawas Syariah Bank Muamalat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah di lembaga keuangan syariah lain tidak lebih dari 4 (empat) lembaga dengan rincian sebagai berikut:

Concurrent Position

In accordance with Bank Indonesia Regulation No. 11/3/PBI/2009 Article 36 paragraph (2), Sharia Supervisory Board members can only hold concurrent positions as a member of the Sharia Supervisory Board at most at 4 (four) other Islamic financial institutions. In order to fulfil provisions of the concurrent position, the Sharia Supervisory Board of the Bank Muamalat has a dual position as a member of the Supervisory Board Sharia in other sharia financial institutions not more than 4 (four) institutions with the following details:

Keanggotaan DPS periode 1 Januari - 16 Desember 2019

Sharia Board Supervisory membership period January 1 - December 16, 2019

Nama DPS *Names of Sharia Supervisory Board*	Jabatan *Position*	Nama Lembaga/Perusahaan *Name of Institution/Company*
Prof. DR. (HC) KH. Ma'ruf Amin*)	Ketua	PT Bank BNI Syariah
		PT Bank Mega Syariah Indonesia
		PT Bank Mandiri Syariah
		PT BNI Life Insurance
Dr. Oni Sahroni, MA **)	Anggota	PT Adira Dinamika Multifinance Tbk
		PT BNP Paribas Investment Partners
		PT Bank Maybank Indonesia Tbk (Unit Usaha Syariah)
Drs. H. Sholahudin Al-Aiyub, M.Si	Anggota	Indo Mobil Finance Indonesia Syariah
		Suzuki Finance Indonesia Syariah
		PT Reasuransi Syariah Indonesia (dikenal dengan ReINDO Syariah)
		PT Bank Net Indonesia Syariah

*) Mengundurkan diri sebagai Ketua DPS BMI tanggal 17 Oktober 2019 dan ditetapkan melalui RUPS LB tanggal 16 Desember 2020
**) Resigned as Chairman of the BMI Sharia Supervisory Board on October 17, 2019 and determined through the General Meeting of Shareholders on December 16, 2019*
**) Mengundurkan diri sebagai anggota DPS BMI tanggal 7 November 2019 dan ditetapkan melalui RUPS LB tanggal 16 Desember 2020
***) Resigned as Chairman of the BMI Sharia Supervisory Board on November 7, 2019 and determined through the General Meeting of Shareholders on December 16, 2019*

Adapun rincian rangkap jabatan dari susunan anggota Dewan Pengawas Syariah Bank Muamalat sesuai hasil keputusan RUPSLB

The details of the concurrent positions of the composition of the Board members Bank Muamalat Sharia Supervisor according to the

pada tanggal 16 Desember 2019 sebagai berikut:

resolutions of the EGMS on December 16, 2019 as follows:

Nama DPS *Names of Sharia Supervisory Board*	Jabatan *Position*	Nama Lembaga/Perusahaan *Name of Institution/Company*
Drs. H. Sholahudin Al-Aiyub, M.Si	Ketua	Indo Mobil Finance Indonesia Syariah
		Suzuki Finance Indonesia Syariah
		PT Reasuransi Syariah Indonesia (dikenal dengan ReINDO Syariah)
		PT Bank Net Indonesia Syariah
Hj. Siti Haniatunnisa, LLB, MH*)	Anggota	PT Asuransi Jasindo Syariah
		PT Asuransi BRI Life Syariah
		PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera
		DPLK Syariah Muamalat

*) Efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK
**) Effective after obtaining approval from FSA*

Independensi Dewan Pengawas Syariah

Seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah Bank Muamalat Indonesia merupakan pihak independen yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan dengan Perseroan, Dewan Komisaris, Direksi atau Pemegang Saham.

Dewan Pengawas Syariah senantiasa mengutamakan kepentingan Bank di atas kepentingan pribadi dalam melaksanakan tugas pengawasannya agar sesuai dengan prinsip syariah dan tidak dipengaruhi oleh pihak manapun.

Berikut merupakan tabel yang menggambarkan independensi yang dimiliki oleh DPS Bank Muamalat :

Sharia Supervisory Board Independence

All members of the Bank Muamalat Indonesia Sharia Supervisory Board are independent parties who do not possess financial, management, share ownership and/or relationship with the Company, the Board of Commissioners, Directors, or Shareholders.

The Sharia Supervisory Board put the interests of the Bank over personal interests in undertaking the supervisory duties to accede to sharia principles and is not biased by any party.

The following is a table summarising the independence of DPS Bank Muamalat:

Aspek Independensi *Independence Aspects*	Prof.DR. (HC) KH. Ma'ruf Amin*)	DR. H. Oni Sahroni MA**)	Drs. H. Sholahudin Al Aiyub, M.Si	Hj. Siti Haniatunnisa, LLB., MH***)
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi *Having no financial relationship with the Board of Commissioners and Directors*	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi *Having no management relationship in the Company, its subsidiaries, or affiliated companies*	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi *Having no management relationship in the Company, its subsidiaries, or affiliated companies*	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG *Having no any family relations with the Board of Commissioners, Directors, and/or fellow members of the Nomination, Remuneration and GCG Committee*	√	√	√	√
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah *Having not served as a manager of political parties, officials and government*	√	√	√	√

*) Mengundurkan diri sebagai Ketua DPS BMI tanggal 17 Oktober 2019 dan ditetapkan melalui RUPS LB tanggal 16 Desember 2020
**) Resigned as Chairman of the BMI Sharia Supervisory Board on October 17, 2019 and determined through the General Meeting of Shareholders on December 16, 2019*

**) Mengundurkan diri sebagai anggota DPS BMI tanggal 7 November 2019 dan ditetapkan melalui RUPS LB tanggal 16 Desember 2020
***) Resigned as Chairman of the BMI Sharia Supervisory Board on November 7, 2019 and determined through the General Meeting of Shareholders on December 16, 2019*

***) Diangkat melalui RUPS LB tanggal 16 Desember 2019 dan akan efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK
****) Appointed through the General Meeting of Shareholders on December 16, 2019 and will be effective after obtaining approval from the FSA*

Pembagian Tugas Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah senantiasa memastikan seluruh transaksi di Bank Muamalat Indonesia dijalankan sesuai dengan fatwa yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional serta senantiasa mengawasi kegiatan usaha Bank dan memberikan opini mengenai kemurnian prinsip syariah yang dianut, untuk itu telah diatur di dalam Pedoman Kerja mengenai Pembagian tugas diantara para anggota Dewan Pengawas Syariah Bank Muamalat, sebagai berikut:

Distribution of Sharia Supervisory Board Duties

The Sharia Supervisory Board assures that the whole of transactions at Bank Muamalat Indonesia are undertaken in accordance with the fatwa set down by the National Sharia Board and perpetually monitors the business activities of the Bank and provides notions on the purity of sharia principles attached to, for that it has been regulated in the Work Guidelines concerning the Division of Tasks among Bank Muamalat Sharia Supervisory Board members, those are:

No.	Jabatan *Position*	Tugas *Duties*
1.	Ketua *Chairman*	Memimpin semua kegiatan anggota Dewan Pengawas Syariah. Menyusun program kerja pelaksanaan tugasnya. Memimpin rapat Dewan Pengawas Syariah. Menetapkan pembagian tugas para anggota Dewan Pengawas Syariah. *Leading the whole activities of members of the Sharia Supervisory Board.* *Putting work programs in order of their duties.* *Guiding a Sharia Supervisory Board meeting.* *Determining the distribution of duties of members of the Sharia Supervisory Board.*
2.	Anggota *Member*	Membantu Ketua Dewan Pengawas Syariah dalam melaksanakan tugasnya menurut pembidangan yang telah ditetapkan oleh ketua Dewan Pengawas Syariah. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh ketua Dewan Pengawas Syariah. *Assisting the Chairman of the Sharia Supervisory Board in carrying out their duties according to the hearing that has been determined by the chairman of the Sharia Supervisory Board.* *Performing other tasks given by the chairman of the Sharia Supervisory Board.*

Dewan Pengawas Syariah senantiasa memastikan seluruh transaksi di Bank Muamalat Indonesia dijalankan sesuai dengan fatwa yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional serta senantiasa mengawasi kegiatan usaha Bank dan memberikan opini mengenai kemurnian prinsip syariah yang dianut.

The Sharia Supervisory Board always ensures all transactions at Bank Muamalat Indonesia is carried out in accordance with the fatwa stipulated by the National Sharia Board and always supervises business activities of the Bank and provide opinions on purity Islamic principles adopted.

Hubungan Kerja antara Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Direksi

Hubungan kerja Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Direksi adalah hubungan check and balance dengan tujuan akhir untuk kemajuan Bank Muamalat Indonesia serta pelaksanaan operasional Bank Muamalat Indonesia yang sesuai dengan prinsip syariah dan senantiasa mematuhi (comply) peraturan dan perundang-undangan yang berlaku termasuk penerapan GCG.

Working Relationship between Sharia Supervisory Board, Board of Commissioners, and Board of Directors

The working relationship amongst the Sharia Supervisory Board, the Board of Commissioners, and the Board of Directors is a check and balance relationship with the elemental goal for the advancement of Bank Muamalat Indonesia and the operational activities of Bank Muamalat Indonesia which is under sharia principles and always complies with applicable laws and regulations including the implementation of GCG.

Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Direksi sesuai dengan fungsinya masing-masing mempunyai tanggung jawab untuk menjaga kelangsungan usaha Bank Muamalat dalam jangka panjang tercermin pada:

1. Terpeliharanya kesehatan Bank Muamalat Indonesia sesuai prinsip kehati-hatian dan mematuhi (comply) terhadap prinsip syariah Islam serta peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
2. Terlaksananya dengan baik pengendalian internal (internal control) dan manajemen risiko (risk management);
3. Terlindunginya kepentingan stakeholders secara wajar;
4. Terpenuhinya pelaksanaan Good Corporate Governance; dan
5. Terlaksananya suksesi kepemimpinan dan kontinuitas Manajemen di semua lini organisasi.

The Sharia Supervisory Board, the Board of Commissioners and the Board of Directors by their respective functions have the responsibility to maintain the business continuity of Bank Muamalat in the long term reflected in:

1. *Maintaining the Risk-Based Rating of Bank Muamalat Indonesia by the principle of prudence and complying with Islamic sharia principles and the applicable laws and regulations;*
2. *Proper implementation of internal control and risk management;*
3. *Appropriate protection of stakeholder interests;*
4. *The fulfilment of the implementation of Good Corporate Governance; and*
5. *Implementation of leadership succession and continuity of Management in all lines of the organization.*

Kebijakan Pengawasan Dewan Pengawas Syariah

Dalam melakukan pengawasan, Dewan Pengawas Syariah dibantu oleh Sharia Compliance Officer sebagai liaison officer yang antara lain bertugas untuk mendokumentasikan rincian kegiatan dengan

Supervision Policy of Sharia Supervisory Board

In managing the supervision, the Sharia Supervisory Board is supported by the Sharia Compliance Officer as a liaison officer who, among others, is assigned to properly document the details of the activities

baik melalui kertas kerja pengawasan. Kertas kerja tersebut kemudian dituangkan dalam Laporan Pengawasan Dewan Pengawas Syariah periode semesteran yang disampaikan kepada Direksi Bank Muamalat Indonesia, DSN - MUI dan Otoritas Jasa Keuangan.

Rapat Dewan Pengawas Syariah

Sesuai Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan *Board Manua*l Bank Muamalat Indonesia, Dewan Pengawas Syariah wajib menyelenggarkan rapat Dewan Pengawas Syariah paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

Materi-materi yang dibahas dalam rapat Dewan Pengawas Syariah sesuai Board Manual Bank Muamalat Indonesia Syariah antara lain:

1. Hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan produk baru dan hasil *review* produk yang telah ada antara lain mengenai tujuan, karakteristik dan akad yang digunakan sesuai dengan prinsip syariah.
2. Pengajuan aktivitas baru dan review aktivitas Bank yang telah berjalan dari aspek syariah.
3. Permasalahan yang timbul akibat aktivitas Bank yang membutuhkan opini dari DPS.
4. Hasil temuan syariah dari auditor, baik auditor eksternal maupun auditor internal.

Pengambilan keputusan rapat DPS dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Apabila dalam proses pengambilan keputusan terdapat perbedaan pendapat, maka perbedaan pendapat tersebut dicantumkan dalam risalah rapat beserta alasannya.

Frekuensi dan rekapitulasi kehadiran anggota Dewan Pengawas Syariah pada Rapat Dewan Pengawas Syariah dapat dilihat pada Bab Rapat-Rapat DPS, Direksi, dan Dewan Komisaris.

Pelaksanaan Kegiatan Dewan Pengawas Syariah di Tahun 2019

Dewan Pengawas Syariah menyampaikan Laporan Pengawasan Dewan Pengawas Syariah kepada Manajemen Bank Muamalat Indonesia setiap 6 (enam) bulan sekali. Laporan Pengawasan tersebut kemudian disampaikan oleh Manajemen Bank Muamalat Indonesia kepada DSN - MUI dan Otoritas Jasa Keuangan.

Laporan Pengawasan Dewan Pengawas Syariah semester I Tahun 2019 telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat Bank Muamalat Indonesia No. 080/B/CPD-SRT/VIII/2019 tanggal 30 Agustus 2019 dan Laporan Pengawasan Dewan Pengawas Syariah semester II Tahun 2019 telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat Bank Muamalat Indonesia No. 026/B/CPD-SRT/II/2020 tanggal 28 Februari 2020.

Kegiatan pengawasan Dewan Pengawas Syariah meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Pengawas Syariah dibantu oleh 2 (dua) *liasion officer* dari unit Kepatuhah Syariah. Berikut adalah rincian

by means of the supervisory working paper. The working paper was then revealed in the Semester Sharia Supervisory Board Supervisory Report submitted to the Directors of Bank Muamalat Indonesia, DSN-MUI, and the Financial Services Authority.

Meeting of Sharia Supervisory Board

In accordance with Bank Indonesia Regulation No. 11/33/PBI/2009 concerning Implementation of Good Corporate Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units and the Board Manual of Bank Muamalat Indonesia, the Sharia Supervisory Board must hold Sharia Supervisory Board meetings at least 1 (one) time in 1 (one) month.

The materials discussed in the Sharia Supervisory Board meeting in accordance with the Board Manual of Bank Muamalat Indonesia Sharia include:

1. *Matters relating to the development of new products and the results of existing product reviews include the objectives, characteristics, and contracts used in accordance with sharia principles.*
2. *Submission of new activities and review of Bank activities that have been running from the sharia aspect.*
3. *Constraints arising from bank activities requiring opinions from DPS.*
4. *Sharia findings from auditors, both external auditors and internal auditors.*

Decision making of Sharia Supervisory Board meetings is based on consensus agreement. If in the decision-making process there are differences of opinion, then the notions are stated in the minutes of the meeting along with the reasons.

The frequency and recapitulation of the attendance of members of the Sharia Supervisory Board at the Sharia Supervisory Board Meeting Can be seen in chapter Sharia Supervisory Board, the Board of Directors, and the Board of Commissioners meetings.

Implementation of Supervisory Board Activities Sharia in 2019

The Sharia Supervisory Board conveyed the Supervision Report of the Sharia Supervisory Board to the Management of Bank Muamalat Indonesia 6 (six) times a month. The report is then proposed by the Management of Bank Muamalat Indonesia to the DSN-MUI and Financial Services Authority.

Sharia Supervisory Board Supervisory Report for semester I of 2019 has been submitted to the Financial Services Authority through a Bank letter Muamalat Indonesia No. 080 / B / CPD-SRT / VIII / 2019 on 30 August 2019 and Sharia Supervisory Board Supervisory Report semester II The year 2019 Has been submitted to the Financial Services Authority through Bank Muamalat Indonesia letter No. 026 / B / CPD-SRT / II / 2020 dated 28 February 2020.

The supervisory activities of the Sharia Supervisory Board include supervision the implementation of Sharia Principles in collection activities funds and channeling of funds and services. In doing supervision, the Sharia Supervisory Board is assisted by 2 (two) liasion officer of the Kepatuhah Syariah unit. Here are the details supervision

pengawasan Dewan Pengawas Syariah terhadap pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa yang dilakukan selama tahun 2019.

Pengawasan terhadap Penghimpunan Dana

Berdasarkan hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah atas produk penghimpunan dana Bank Muamalat Indonesia, Dewan Pengawas Syariah menilai produk penghimpunan dana di bawah ini telah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN – MUI).

of the Sharia Supervisory Board on the implementation of the Principles Sharia in the collection and distribution of funds as well services performed during 2019.

Supervision of Funding Activities

Based on the results of supervision of the Sharia Supervisory Board for the funding product from Bank Muamalat Indonesia, the Board of Trustees Syariah considers that the funding products below are appropriate with the fatwa of the National Sharia Council - Indonesian Ulema Council (DSN - MUI).

Jenis Produk *Type of Product*	Nama Produk *Name of Product*
Tabungan *Saving*	Tabungan iB Hijrah Tabungan iB Hijrah Haji Tabungan iB Hijrah Rencana Tabungan iB Hijrah Valas Tabungan iB Hijrah Prima Tabungan iB Hijrah Bisnis Tabungan iB Muamalat Sahabat TabunganKu Tabungan Simple iB Corporate Debit Card Tabungan Muamalat Mudharabah Corporate iB
Giro *Current Account*	Giro iB Hijrah Attijary Giro iB Hijrah Ultima
Deposito *Deposits*	Deposito iB Hijrah

Pengawasan terhadap Penyaluran Dana

Selama tahun 2019, Dewan Pengawas Syariah juga melakukan pengawasan terhadap produk penyaluran dana Bank Muamalat Indonesia sebagai berikut:

1. KPR iB Hijrah
2. Pembiayaan Pensiun iB Hijrah
3. Pembiayaan iB Multiguna Hijrah
4. Pembiayaan iB Asset Refinance Hijrah
5. Pembiayaan iB Modal Kerja Hijrah
6. Pembiayaan iB Modal Kerja Konstruksi Developer Hijrah
7. Pembiayaan iB Modal Kerja LKS Hijrah
8. Pembiayaan iB Investasi Hijrah
9. Pembiayaan iB Properti Bisnis Hijrah
10. Pembiayaan iB Pembiayaan Rekening Koran Syariah Hijrah
11. Pembiayaan iB Koperasi Segmen Konsumer Hijrah
12. Pembiayaan iB Multifinance Hijrah

Dewan Pengawas Syariah menilai produk penyaluran dana tersebut telah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN - MUI).

Supervision of Financing Activities

During 2019, the Sharia Supervisory Board also conducted supervision of Bank Muamalat Indonesia Financing Product as follows:

1. *KPR iB Hijrah*
2. *iB Hijrah Pension Funding*
3. *iB Multipurpose Hijrah Financing*
4. *iB Asset Refinance Hijrah Financing*
5. *iB Hijrah Working Capital Financing*
6. *iB Financing for Working Capital for Hijrah Developer Construction*
7. *iB Work Capital Funding for Hijrah LKS*
8. *iB Hijrah Investment Financing*
9. *iB Hijrah Business Property Financing*
10. *iB Financing for Hijrah Syariah Bank Account Financing*
11. *iB Hijrah Consumer Segment Cooperative Financing*
12. *iB Multifinance Hijrah Financing*

The Sharia Supervisory Board assesses the distribution of funds in accordance with the fatwa of the National Sharia Council - Majelis Ulama Indonesia (DSN - MUI).

Pengawasan terhadap Layanan

Dewan Pengawas Syariah melakukan pengawasan terhadap layanan jasa Bank Muamalat Indonesia sebagai berikut:

Supervision of Services

Sharia Supervisory Board conducts oversight of services Bank Muamalat Indonesia services as follows:

Jenis Layanan *Type of Service*	Nama Layanan *Name of Service*
Remittance	Remittance iB Muamalat Remittance BMI-MayBank Remittance BMI-BMMB Remittance BMI-NCB
Trade Finance	Bank Garansi Trade Finance – Ekspor Trade Finance – Impor SBLC (Standby L/C) Letter of Credit SKBDN
Layanan Lainnya *Other Services*	Muamalat Cash Management Jasa Layanan Escrow Cash Pick Up & Delivery Muamalat Mobile Internet Banking ATM Muamalat Gerai Muamalat SalaMuamalat Virtual Account/MPOM Muamalat Foreign Exchange Muamalat Multicurrency Muamalat Investment Service Money Market & Fixed Income

Berdasarkan hasil pengawasan atas layanan jasa Bank Muamalat Indonesia, Dewan Pengawas Syariah menilai layanan jasa tersebut telah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN – MUI).

Based on the results of supervision of Bank Muamalat Indonesia services, the Sharia Supervisory Board assesses these services in accordance with the fatwa of the National Sharia Council - Majelis Ulama Indonesia (DSN - MUI).

Uji Petik dan Kunjungan Dewan Pengawas Syariah

Dalam program uji petik, Dewan Pengawas Syariah melakukan kunjungan, pengamatan dan/atau sharing session kepada karyawan di beberapa Kantor Cabang. Selain itu Dewan Pengawas Syariah juga melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen transaksi untuk memastikan pemenuhan prinsip syariah. Pemeriksaan tersebut dilakukan dengan metode uji petik dibantu oleh Unit Kepatuhan Syariah sebagai Liaison Officer Dewan Pengawas Syariah.

Sharia Supervisory Board Spot-Check and Visit Programs

In the spot-check program, the Sharia Supervisory Board conducts visits, observations and / or sharing sessions with employees in several Branch Offices. In addition, the Sharia Supervisory Board also checks transaction documents to ensure compliance with sharia principles. The inspection conducted by the pick test method assisted by the Compliance Unit Sharia as Liaison Officer of the Sharia Supervisory Board.

Rangkaian uji petik Dewan Pengawas Syariah diakhiri dengan dengan sharing session yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah kepada karyawan. Di tahun 2019, Dewan Pengawas Syariah telah melakukan uji petik ke beberapa cabang yaitu:

The series of sharia Supervisory Board spot-check program end with sharing session conducted by Dewan Sharia Superintendent to employees. In 2019, the Sharia Supervisory Board will conduct a spot-check at several branches, namely:

Periode *Period*	Cabang/Unit Kerja *Branches/Work Unit*
Semester I 2019	Consumer Liability Corporate Legal
Semester II 2019	Cabang Wolter Monginsidi Cabang Depok Cabang Muamalat Tower Cabang Kebun Jeruk Cabang Melawai Cabang Rawamangun

Review, Endorsement atas Kebijakan dan Standard Operational Procedure (SOP)

Di tahun 2019 Dewan Pengawas Syariah dibantu dengan Unit Kepatuhan Syariah melakukan review dan/atau endorsement terhadap kebijakan dan prosedur Bank Muamalat agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN – MUI).

Review, Endorsement of Policies and Standards Operational Procedure (SOP)

In 2019 the Sharia Supervisory Board is assisted by a Unit Shariah Compliance conducts review and / or endorsement on the policies and procedures of Bank Muamalat to be in accordance with fatwa of the National Sharia Council - Indonesian Ulema Council (DSN - MUI).

Dewan Komisaris
Board of Commissioners

Dewan Komisaris merupakan salah satu organ perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar, memberi nasihat kepada Direksi serta memastikan Bank Muamalat telah melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris dilaksanakan dalam RUPS serta penetapan akan masa jabatannya, oleh karenanya Dewan Komisaris melaporkan hasil pengawasannya kepada RUPS yang dihadiri oleh para pemegang saham.

The Board of Commissioners is one of the company's organs in charge of conducting general and / or particular supervision in accordance with the Articles of Association, providing advice to the Directors and ensuring that Bank Muamalat has implemented the principles of Good Corporate Governance. The appointment and dismissal of members of the Board of Commissioners is carried out in the GMS and the determination of the term of office; therefore, the Board of Commissioners reports the results of its supervision to the GMS attended by shareholders.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
2. Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/6/PBI/2012 tanggal 18 Juni 2012 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah;
4. Peraturan Bank Indonesia No. 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 15/13/PBI/2013.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan & Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 37/POJK.03/2017 tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan.
8. Anggaran Dasar Bank Muamalat Indonesia.

Legal Basis

1. *Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.*
2. *RI Law No. 21 of 2008 concerning Islamic Banking.*
3. *Bank Indonesia Regulation Number 14/6/PBI/2012 dated 18 June 2012 concerning the Fit and Proper Test Sharia Banks and Sharia Business Units;*
4. *Bank Indonesia Regulation No. 11/3/PBI/2009 concerning Sharia Commercial Banks as amended by Bank Indonesia Regulation No. 15/13/PBI/2013.*
5. *Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 concerning Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies.*
6. *Financial Services Authority Regulation No.27/POJK.03/2016 concerning Capability & Compliance Assessment for Main Parties of Financial Services Institutions.*
7. *Financial Services Authority Regulation No. 37/POJK.03/2017 concerning Utilization of Foreign Workers and Transfer of Knowledge Programs in the Banking Sector.*
8. *Bank Muamalat Indonesia's Articles of Association.*

Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan kewajiban Dewan Komisaris Bank Muamalat Indonesia antara lain sebagai berikut:

1. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.
2. Memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling kurang mencantumkan waktu kerja dan pengaturan rapat.
3. Melakukan pengawasan atas terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
4. Tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar Bank dan keputusan RUPS.
5. Beritikad baik, dengan prinsip kehati-hatian dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha bank, dengan berupaya untuk mengambil tindakan dalam mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian dan/atau terjadinya kepailitan.

Duties and Reponsibilities

The duties and obligations of the Bank Muamalat Indonesia Board of Commissioners include the following:

1. *Performing the duties and responsibilities in accordance with GCG principles.*
2. *Having Board Manual and Charter that are binding for each member of the Board of Commissioners that at least lists their working time and meeting arrangements.*
3. *Supervising the implementation of GCG in each of the Bank's business activities at all levels of the organization.*
4. *Obeying the provisions of the applicable laws and regulations, the Bank's Articles of Association and RUPS decisions.*
5. *Having a good faith, with the principle of prudence and responsibility in carrying out duties for the interests and business of the bank, by trying to take action in preventing the occurrence or continuing loss and/or bankruptcy.*

6. Melakukan tugas pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam melaksanakan pengurusan Bank termasuk pelaksanaan ketentuan ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Melakukan pengawasan terhadap Direksi untuk memastikan Direksi mematuhi ketentuan internal Bank dan memberi nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Bank.
8. Memberikan pendapat dan saran kepada Direksi dan segenap jajarannya berkaitan dengan pengurusan Bank.
9. Memberikan pendapat dan saran kepada Direksi dan segenap jajarannya berkaitan dengan penyusunan Visi, Misi serta rencana-rencana strategis BMI lainnya seperti yang diatur dalam Anggaran Dasar.
10. Memberikan pendapat dan saran serta pengesahan mengenai rencana bisnis Bank yang diusulkan Direksi.
11. Melakukan penelitian dan penelaahan atas laporan-laporan dari Direksi dan segenap jajarannya, terutama yang berkaitan dengan tugas-tugas spesifik yang telah diputuskan bersama.
12. Meneliti dan menelaah laporan-laporan dari Komite-komite yang ada di bawah Dewan Komisaris.
13. Mengikuti perkembangan kegiatan Bank baik dari informasi-informasi internal yang disediakan oleh Manajemen maupun dari informasi-informasi eksternal yang berasal dari media maupun dari sumber-sumber lainnya.
14. Menghadiri rapat-rapat kerja/koordinasi dengan Direksi dan segenap jajarannya.
15. Melakukan usaha-usaha untuk memastikan bahwa Direksi dan jajarannya telah mematuhi ketentuan perundang-undangan serta peraturan-peraturan lainnya dalam mengelola Bank Muamalat Indonesia.
16. Menyusun rencana kerja Dewan Komisaris untuk periode tahun berjalan.
17. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
18. Memantau efektivitas praktik Good Corporate Governance antara lain dengan mengadakan pertemuan berkala antara Dewan Komisaris dengan Direksi untuk membahas implementasi Good Corporate Governance.
19. Membentuk paling kurang Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Audit, Komite Tata Kelola Terintegrasi dan memastikan komite yang telah dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif.
20. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen, dalam arti melaksanakan tugas secara obyektif dan bebas dari tekanan serta kepentingan pihak manapun, termasuk dalam hubungan satu sama lain maupun hubungan dengan Direksi.
21. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan Fungsi Kepatuhan.

6. *Performing supervisory duties on the policies of the Board of Directors in carrying out the management of the Bank including the implementation of the provisions of the Articles of Association and the decision of the General Meeting of Shareholders and the applicable laws and regulations.*
7. *Supervising the Directors to ensure that the Directors comply with the Bank's internal regulations and provide advice to the Directors in carrying out bank management.*
8. *Providing opinions and suggestions to the Board of Directors and all of its staff related to the management of the Bank.*
9. *Providing opinions and suggestions to the Board of Directors and all its ranks relating to the preparation of the Vision, Mission and other strategic plans of BMI as stipulated in the Articles of Association.*
10. *Providing opinions and suggestions as well as endorsement regarding the Bank's business plan proposed by the Directors.*
11. *Conducting research and study of reports from the Board of Directors and all of its staff, especially those relating to specific tasks that have been decided together.*
12. *Scrutinising and examining the reports of the Committees under the Board of Commissioners.*
13. *Following the development of the Bank's activities both from internal information provided by Management and from external information from the media and from other sources.*
14. *Attending work meetings/coordination with the Board of Directors and all staff.*
15. *Endeavouring to ensure that the Board of Directors and its staff have complied with statutory provisions and other regulations in managing Bank Muamalat Indonesia.*
16. *Developing a work plan for the Board of Commissioners for the current year period.*
17. *Monitoring and evaluating the implementation of the Bank's strategic policies.*
18. *Monitoring the effectiveness of Good Corporate Governance practices, among others, by holding regular meetings between the Board of Commissioners and the Board of Directors to discuss the implementation of Good Corporate Governance.*
19. *Forming at least a Risk Monitoring Committee, Nomination and Remuneration Committee, Audit Committee, Integrated Governance Committee and ensure that the committees that have been formed carry out their duties effectively.*
20. *The Board of Commissioners must carry out their duties and responsibilities independently, in the sense of carrying out their duties objectively and free from pressure and interests of any party, including in relation to each other or relations with the Directors.*
21. *The Board of Commissioners must exercise active supervision over the implementation of the Compliance Function.*

22. Menyetujui kebijakan APU & PPT serta mengawasi pelaksanaan program APU & PPT.
23. Mengkaji efektivitas sistem pengendalian internal, dengan menilai kompetensi dan jumlah sumber daya, ruang lingkup tugas dan kewenangan serta independensi dari Auditor Intern sesuai dengan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum (SPFAIB) yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Bank Indonesia/ Otoritas Jasa Keuangan.
24. Mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Auditor Ekstern, dengan menilai Kompetensi, Independensi serta ruang lingkup tugas Auditor Ekstern.

Hak dan Wewenang

Dewan Komisaris Bank Muamalat Indonesia memiliki hak dan wewenang sebagai berikut:

1. Anggota Dewan Komisaris berhak meminta penjelasan dan menanyakan segala hal yang berhubungan dengan tugas-tugas Dewan Komisaris dan Direksi, dan Direksi wajib menyampaikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
2. Anggota Dewan Komisaris berhak meminta semua keterangan yang berkenaan dengan Perseroan kepada Direksi dan Direksi harus memberikan semua keterangan yang berkenaan dengan Perseroan sebagaimana diperlukan para anggota Dewan Komisaris melalui Dewan Komisaris.
3. Pembagian kerja dan keanggotaan Komite di antara para Anggota Komisaris diatur oleh anggota Dewan Komisaris sendiri, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh Sekretaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris.
4. Pada setiap waktu Dewan Komisaris berdasarkan suatu keputusan Rapat Dewan Komisaris dapat memberhentikan untuk sementara waktu anggota Direksi dari jabatannya dengan menyebutkan alasannya, dengan ketentuan sebagaimana diuraikan dalam Undang-undang Perseroan Terbatas.
5. Berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris, Dewan Komisaris berwenang memberikan kekuasaan sementara untuk menjalankan tindakan pengurusan Perseroan dan mewakili Perseroan terhadap pihak lain kepada seseorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan Dewan Komisaris, jika oleh sebab apa pun jabatan anggota Direksi lowong dan/atau Perseroan tidak mempunyai seorang pun anggota Direksi.
6. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak untuk menerima honorarium dan tunjangan lain sesuai yang ditetapkan sesuai dengan Anggaran Dasar atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

22. *Approving APU & PPT policies and oversee the implementation of the AML & CFT program.*
23. *Reviewing the effectiveness of the internal control system, by assessing the competence and amount of resources, the scope of duties and authority and independence of the Internal Auditor in accordance with the Standards for the Implementation of the Commercial Bank Internal Audit Function (SPFAIB) issued by Bank Indonesia/the Financial Services Authority.*
24. *Assessing the effectiveness of the implementation of the duties of the External Auditor, by assessing the Competence, Independence and scope of duties of the External Auditor.*

Rights and Authorities

The rights and authorities of the Board of Commissioners of Bank Muamalat Indonesia are:

1. *Members of the Board of Commissioners have the right to ask for clarification and ask all matters relating to the duties of the Board of Commissioners and Directors, and the Board of Directors must submit an explanation of everything asked by the Board of Commissioners.*
2. *Members of the Board of Commissioners are entitled to request all information relating to the Company to the Board of Directors and the Board of Directors must provide all information relating to the Company as required by members of the Board of Commissioners through the Board of Commissioners.*
3. *The division of workload and membership of the Committee among the Members of the Board of Commissioners is governed by members of the Board of Commissioners themselves, and for the smooth running of their duties the Board of Commissioners can be assisted by a Secretary appointed by the Board of Commissioners.*
4. *At any time, the Board of Commissioners based on a decision of the Board of Commissioners' Meeting may temporarily dismiss a member of the Board of Directors from his position by stating the reasons, with the provisions as described in the Limited Liability Company Law.*
5. *Based on the decision of the Board of Commissioners' meeting, the Board of Commissioners has the authority to give temporary authority to carry out the Company's management actions and represent the Company to other parties to one or more of them at the expense of the Board of Commissioners, if for whatever reason the position of the Board of Directors is vacant and/or the Company does not have a member of the Board of Directors.*
6. *Each member of the Board of Commissioners is entitled to receive honorarium and other benefits as determined in accordance with the Articles of Association or the decision of the General Meeting of Shareholders.*

Pedoman Kerja/Piagam Dewan Komisaris

Bank Muamalat telah menyusun Pedoman dan tata tertib kerja bagi Dewan Komisaris yang mencakup:

1. Fungsi;
2. Komposisi dan Persyaratan;
3. Pengangkatan dan Masa Jabatan;
4. Rangkap Jabatan;
5. Pengunduran Diri dan Pemberhentian;
6. Komisaris Independen;
7. Program Orientasi dan Peningkatan Kapabilitas;
8. Etika Jabatan;
9. Tugas dan Kewajiban Dewan Komisaris;
10. Hak dan Wewenang Dewan Komisaris;
11. Rapat Dewan Komisaris;
12. Hubungan Kerja antara Dewan Komisaris dan Direksi;
13. Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris,;
14. Komite-Komite Dewan Komisaris; dan
15. Sekretaris Dewan Komisaris.

Kriteria Dewan Komisaris

Persyaratan bagi calon anggota Dewan Komisaris Bank Muamalat Indonesia antara lain sebagai berikut:

1. mempunyai akhlak dan moral yang baik;
2. cakap melakukan perbuatan hukum;
3. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang selama menjabat:
   a. pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
   b. pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
   c. pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
4. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana asal yang disebut dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
5. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Board Manual/Charter of the Board of Commissioners

Bank Muamalat has compiled work guidelines and procedures for the Board of Commissioners which include:

1. *Function;*
2. *Composition and Requirements;*
3. *Appointment and Tenure;*
4. *Concurrent Position;*
5. *Resignation and Dismissal;*
6. *Independent Commissioner;*
7. *Orientation and Capability Improvement Program;*
8. *Ethics Position;*
9. *Duties and Obligations of the Board of Commissioners;*
10. *Rights and Powers of the Board of Commissioners;*
11. *Board of Commissioners Meeting;*
12. *Working Relationship amongst the Board of Commissioners, and Directors;*
13. *Evaluation of the Performance of the Board of Commissioners;*
14. *Committees of the Board of Commissioners; and*
15. *Secretary of the Board of Commissioners.*

Criteria of Board of Commissioners

The requirement for prospective members of the Board of Commissioners of Bank Muamalat Indonesia are as follows:

1. *Have good character and morals;*
2. *Competent in carrying out legal actions;*
3. *In the 5 (five) years prior to appointment, they have never been members of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners who during their tenure:*
   a. *did not hold an annual GMS;*
   b. *his responsibilities as a member of the Board of Directors and/or Board of Commissioners have not been accepted by the GMS or have not provided accountability as a member of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners to the GMS; and*
   c. *have caused the Company that obtained licenses, approvals, or registrations from the Financial Services Authority not to fulfill the obligation to submit annual reports and/or financial reports to the Financial Services Authority.*
4. *Have never been convicted of being proven to have committed an original crime referred to in Law No. 8 of 2010 concerning Criminal Acts of Money Laundering, a crime that is detrimental to the country's finances and/or related to the financial sector, within the last 20 (twenty) years before being nominated;*
5. *Have a commitment to comply with applicable laws and regulations;*

6. memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank Syariah yang sehat;
7. tidak pernah secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam perbuatan rekayasa dan praktik-praktik menyimpang, cedera janji serta perbuatan lain yang merugikan perusahaan dimana yang bersangkutan bekerja atau pernah bekerja;
8. tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus (DTL);
9. memiliki pengetahuan di bidang perbankan dan perbankan syariah yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
10. memiliki kemauan dan kemampuan untuk mengawasi kegiatan usaha BMI agar sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah di bidang perbankan syariah;
11. memiliki pengetahuan dan pemahaman dalam penerapan manajemen risiko;
12. tidak memiliki kredit/pembiayaan macet; dan
13. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah yang menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Ketentuan Masa Jabatan Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal RUPS pengangkatan dan berakhir pada penutupan RUPS tahunan yang ke 5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk sewaktu-waktu memberhentikan sebelum masa jabatan berakhir. Hal tersebut sesuai dengan prosedur sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar/RUPS dan UU Perseroan Terbatas dengan menyebutkan alasannya.

Masa jabatan anggota Dewan Komisaris dibatasi maksimal 2 (dua) kali masa jabatan. Dalam hal seorang anggota Dewan Komisaris berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya, maka masa jabatan penggantinya adalah sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang digantikannya. Apabila terdapat penambahan anggota Dewan Komisaris, maka masa jabatan anggota Dewan Komisaris tersebut akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris lainnya yang telah ada.

Jabatan anggota Dewan Komisaris dinyatakan berakhir, apabila anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan:
1. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
2. mengundurkan diri;
3. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. meninggal dunia; atau
5. masa jabatannya berakhir

6. *Have a commitment to the development of sound operational Sharia Banks;*
7. *Have never been directly or indirectly involved in engineering and deviant practices, broken promises and other actions that harm the company where the person concerned works or has worked;*
8. *Have not listed in the Disqualified List (DTL);*
9. *Have sufficient knowledge in the field of banking and Islamic banking relevant to his position;*
10. *Have the will and ability to supervise BMI's business activities in accordance with the principles of prudence and sharia principles in the field of sharia banking;*
11. *Have the knowledge and understanding in the application of risk management;*
12. *Have not had bad credit/financing; and*
13. *Have never been declared bankrupt or been a member of the Board of Directors and/or Board of Commissioners that was found guilty of causing a company to go bankrupt, within the last 5 (five) years before being nominated.*

Terms of Office for Board of Commissioners

Members of the Board of Commissioners are appointed for a period starting from the date of the appointment GMS and ending at the closing of the 5th (fifth) annual GMS after the date of appointment without prejudice to the right of the GMS to dismiss at any time before the end of the term of office. This is in accordance with procedures as stipulated in the Articles of Association/GMS and the Limited Liability Company Law, stating the reasons.

The term of office of members of the Board of Commissioners is limited to a maximum of 2 (two) terms of service. In the event that a member of the Board of Commissioners resigns or is dismissed before his term of office, his replacement term is the remaining term of office of the member of the Board of Commissioners that he replaces. If there are additional members of the Board of Commissioners, the term of office of the members of the Board of Commissioners will end simultaneously with the end of the existing term of office of the other Commissioners.

The position of member of the Board of Commissioners shall be declared terminated if the relevant member of the Board of Commissioners:
1. *Dismissed based on GMS decision;*
2. *Resign;*
3. *No longer fulfills the requirements as a member of the Board of Commissioners based on the provisions of the Articles of Association and applicable laws and regulations;*
4. *Passed away; or*
5. *His term of services ends.*

Susunan Keanggotaan dan Dasar Pengangkatan Dewan Komisaris

Komposisi susunan keanggotaan Dewan Komisaris per 31 Desember 2019 tercatat Bank telah memiliki 5 (lima) orang anggota Dewan Komisaris yang terdiri atas 3 (tiga) orang Komisaris Independen yang berdomisili di Indonesia dan 2 (orang) Komisaris Non-Independen yang berada di luar Indonesia.

Bank telah memenuhi komposisi jumlah anggota Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan yang mengatur bahwa jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi, paling kurang 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris wajib berdomisili di Indonesia serta Paling kurang 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.

Sesuai dengan ketentuan POJK No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan menyebutkan bahwa calon anggota Dewan Komisaris dan/atau wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum menjalankan tindakan, tugas, dan fungsinya sebagai Dewan Komisaris.

Sampai dengan posisi 31 Desember 2019 tercatat 3 (tiga) orang Dewan Komisaris Bank Muamalat telah dinyatakan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK) oleh OJK, sedangkan 2 (dua) anggota Dewan Komisaris masih dalam proses Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK) oleh OJK. Selama tahun 2019 susunan keanggotaan Dewan Komisaris Bank Muamalat tidak mengalami perubahan. Berikut ini adalah susunan anggota Dewan Komisaris beserta dasar pengangkatan:

Membership Composition and Basis of Appointment of Board of Commissioners

The composition of the Board of Commissioners' membership composition as at 31 December 2019 was recorded by the Bank as having 5 (five) members of the Board of Commissioners consisting of 3 (three) Independent Commissioners domiciled in Indonesia and 2 (Non-Independent Commissioners) outside of Indonesia.

The Bank has fulfilled the composition of the number of members of the Board of Commissioners in accordance with the provisions governing that the number of members of the Board of Commissioners must be at least 3 (three) people and at most the same as the number of members of the Board of Directors, at least 1 (one) member of the Board of Commissioners must be domiciled in Indonesia. less than 50% (fifty percent) of the total members of the Board of Commissioners are Independent Commissioners.

In accordance with the provisions of POJK No. 27/POJK.03/2016 concerning Capability and Appropriateness Assessment for Main Institutions Financial Services states that candidates for the Board of Commissioners and/or must obtain approval from the Financial Services Authority before carrying out its actions, duties and functions as a Board Commissioner.

As of December 31, 2019, there were 3 (three) people registered Bank Muamalat's Board of Commissioners has passed the Fit and Proper Test by FSA, while 2 (two) members of the Board of Commissioners are still in the Fit and Proper Test by FSA. During 2019 arrangement Muamalat Bank's Board of Commissioners membership is not experienced change. The following is the composition of the Board of Commissioners along with the basis appointment:

Nama *Name*	Jabatan *Position*	RUPS Pengangkatan *Appointment AGM*	Persetujuan OJK *FSA Approval*	Tanggal Efektif *Effective Date*	Pengangkatan Kembali *Reappointment*
Ilham Akbar Habibie	Komisaris Utama/ Komisaris Independen *President Commissioner/ Independent Commissioner*	RUPS Tahunan 28 Juni 2018 *Annual GMS June 28, 2018*	No. Kep-51/D.03/2019 tanggal 26 Mar 2019 *No. Kep-51/D.03/2019 dated Mar 26, 2019*	26 Mar 2019	RUPS Tahunan 17 Mei 2019 *Annual GMS May 17, 2019*
Iggi Haruman Achsien	Komisaris Independen *Independent Commissioner*	RUPS Tahunan 23 Juni 2014 *Annual GMS June 23, 2014*	No. Kep-113/D.03/2014 tanggal 25 Nov 2014 *No. Kep-113/D.03/2014 dated Nov 25, 2014*	25 Nov 2014	RUPS Tahunan 17 Mei 2019 *Annual GMS May 17, 2019*
Edy Setiadi	Komisaris Independen *Independent Commissioner*	RUPSLB Tanggal 20 September 2017 *EGMS on September 20, 2017*	No. Kep-36/D.03/2018 tanggal 2 Mar 2018 *No. Kep-36/D.03/2018 dated Mar 2, 2018*	2 Mar 2018	RUPS Tahunan 17 Mei 2019 *Annual GMS May 17, 2019*
Mohamed Hedi Mejai*)	Komisaris *Commissioner*	RUPSLB Tanggal 20 September 2017 *EGMS on September 20, 2017*	-	-	RUPS Tahunan 17 Mei 2019 *Annual GMS May 17, 2019*
Abdulsalam Mohammad Joher Al-Saleh*)	Komisaris *Commissioner*	RUPS Tahunan 30 Maret 2017 *Annual GMS March 30, 2017*	-	-	RUPS Tahunan 17 Mei 2019 *Annual GMS May 17, 2019*

*) Efektif setelah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK
) Effective after obtaining the pass determination of Fit and Proper Test from FSA

Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

Sebagai wujud penerapan prinsip transparansi dalam tata kelola Perusahaan, seluruh anggota Dewan komisaris wajib mengungkapkan kepemilikan sahamnya pada BUS yang bersangkutan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah pasal 16.

Sampai dengan periode 31 Desember 2019 tercatat tidak ada anggota Dewan Komisaris Bank Muamalat Indonesia yang mempunyai saham baik atas nama sendiri maupun secara bersama-sama yang melebihi 5% (lima persen) dari modal disetor pada Bank Muamalat, sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini:

Share Ownership of Board of Commissioners

As a form of applying the principle of transparency in governance The company, all members of the Board of Commissioners must disclose its share ownership in the BUS concerned is in accordance with Bank Indonesia Regulation No. 11/33 / PBI / 2009 concerning Implementation Good Corporate Governance for Sharia Commercial Banks and Business Units Sharia article 16.

As of December 31, 2019, there were no members of the Board of Commissioners of Bank Muamalat Indonesia who owned shares either in their own name or jointly that exceeded 5% (five percent) of the paid-up capital in Muamalat Bank, as presented in the table below:

Nama *Name*	Jabatan *Position*	Jumlah Kepemilikan Saham *Total Shares Ownership*		Jumlah Nominal Saham *Total Shares*	
		Seri A *Series A*	Seri B *Series B*	Seri A *Series A*	Seri B *Series B*
Ilham Akbar Habibie	Komisaris Utama/ Komisaris Independen *President Commissioner/ Independent Commissioner*	-	-	-	-
Iggi Haruman Achsien	Komisaris Independen *Independent Commissioner*	-	-	-	-
Edy Setiadi	Komisaris Independen *Independent Commissioner*	-	-	-	-
Mohamed Hedi Mejai*	Komisaris *Commissioner*	-	-	-	-
Abdulsalam Mohammad Joher Al-Saleh*	Komisaris *Commissioner*	-	-	-	-

*) Efektif setelah memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK
*) *Effective after obtaining the pass determination of Fit and Proper Test from FSA*

Kebijakan Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

Dalam Peraturan Bank Indonesia No. 11/3/PBI/2009 Tentang Bank Umum Syariah pasal 26 ayat 1 dijelaskan mengenai rangkap jabatan anggota Dewan komisaris sebagai berikut:
Anggota Dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai:

1. anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan;
2. anggota Dewan Komisaris atau Direksi yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak lembaga keuangan bukan Bank yang dimiliki oleh Bank;
3. anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) perusahaan yang merupakan pemegang saham Bank; atau
4. pejabat pada paling banyak 3 (tiga) lembaga nirlaba.

Concurrent Position Policy of Board of Commissioners

In Bank Indonesia Regulation No. 11/3/PBI/2009 concerning Sharia Commercial Banks article 26 paragraph 1 explained the concurrent positions of members of the Board of Commissioners as follows:
Members of the Board of Commissioners can only hold concurrent positions as:

1. *Members of the Board of Commissioners, a Board of Directors, or an Executive Officer in 1 (one) non-financial institution/Company;*
2. *Members of the Board of Commissioners or Directors who perform supervisory functions in 1 (one) subsidiary of a non-bank financial institution owned by the Bank;*
3. *Members of the Board of Commissioners, Directors, or Executive Officers of 1 (one) company that is a shareholder of the Bank; or*
4. *Officials in a maximum of 3 (three) non-profit institutions.*

Rangkap jabatan Dewan Komisaris Bank Muamalat per 31 Desember 2019 dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Concurrent position of the Board of Commissioners of Bank Muamalat as of December 31, 2019, can be explained in the table below:

Nama *Name*	Jabatan *Position*	Jabatan pada Perusahaan/ Instansi Lain *Position in Other Companies/Institutions*	Nama Perusahaan/ Instansi Lain *Name of Other Companies/Institutions*
Ilham Akbar Habibie	Komisaris Utama/ Komisaris Independen *President Commissioner/ Independent Commissioner*	Direktur Utama/*President Director*	PT. Ilthabi Rekatama
Iggi Haruman Achsien	Komisaris Independen *Independent Commissioner*	-	-
Edy Setiadi	Komisaris Independen *Independent Commissioner*	-	-
Mohamed Hedi Mejai*	Komisaris *Commissioner*	Direktur *Director*	IDB
Abdulsalam Mohammad Joher Al-Saleh*	Komisaris *Commissioner*	Deputy CEO Board Member Board Member Vice Chairman	Boubyan Bank Boubyan Takaful Insurance United Capital Bank Boubyan Capital

*) Efektif setelah memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK
*) *Effective after obtaining the pass determination of Fit and Proper Test from FSA*

Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris

Selain rangkap jabatan, Peraturan Bank Indonesia No. 11/3/PBI/2009 Tentang Bank Umum Syariah pasal 26 ayat 2 juga menjelaskan mengenai larangan memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua antar sesama anggota Dewan komisaris dan/atau anggota Direksi.

Dewan Komisaris Bank Muamalat menjunjung tinggi prinsip independensi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dan senantiasa mengutamakan kepentingan Bank di atas kepentingan pribadi Dewan Komisaris. Dewan Komisaris juga menjaga agar dalam pelaksanaan tugasnya tidak dipengaruhi oleh pihak manapun.

Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pemegang Saham Pengendali, meliputi:

1. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Direksi lainnya.
2. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
3. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali.
4. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Komisaris lainnya; dan
5. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali.

Affiliated Relation of Board of Commissioners

In addition to concurrent positions, Bank Indonesia Regulation No. 11/3/PBI/2009 concerning Sharia Commercial Banks article 26 paragraph 2 also describes the prohibition of having family relations to the second degree between fellow members of the Board of Commissioners and/or members of the Board of Directors.

The Board of Commissioners of Bank Muamalat upholds the principle of independence in carrying out its duties and responsibilities and always prioritizes the interests of the Bank above the personal interests of the Board of Commissioners. The Board of Commissioners also ensures that the implementation of their duties is not influenced by any party.

Affiliated relations amongst members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, and Controlling Shareholders, include:

1. *Affiliated relationship between members of the Board of Directors with other members of the Board of Directors.*
2. *Affiliated relationship between members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners.*
3. *Affiliated relationship between members of the Board of Directors and the Major Shareholders and/or controllers.*
4. *Affiliated relationship between members of the Board of Commissioners and other Commissioners; and*
5. *Affiliated relationship between members of the Board of Commissioners and the Main Shareholders and/or controlling.*

Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi, Pemegang Saham Pengendali dan anggota Dewan Komisaris lainnya dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini:

The affiliated relationship between members of the Board of Commissioners with members of the Board of Directors, Controlling Shareholders and other members of the Board of Commissioners can be seen as the table below:

Nama *Name*	Jabatan *Position*	Hubungan Keuangan dengan *Financial Relationship with*						Hubungan Keluarga dengan *Family Relationship with*						Hubungan Kepengurusan *Management Relationship*	
		Dewan Komisaris *Board of Commissioners*		Direksi *Board of Directors*		Pemegang Saham *Shareholders*		Dewan Komisaris *Board of Commissioners*		Direksi *Board of Directors*		Pemegang Saham *Shareholders*			
		Ya *Yes*	Tidak *No*	Ya *Yes*	Tidak *No*	Ya *Yes*	Tidak *No*	Ya *Yes*	Tidak *No*	Ya *Yes*	Tidak *No*	Ya *Yes*	Tidak *No*	Ya *Yes*	Tidak *No*
Ilham Akbar Habibie	Komisaris Utama/ Komisaris Independen *President Commissioner/ Independent Commissioner*		√		√		√		√		√		√		√
Iggi Haruman Achsien	Komisaris Independen *Independent Commissioner*		√		√		√		√		√		√		√
Edy Setiadi	Komisaris Independen *Independent Commissioner*		√		√		√		√		√		√		√
Mohamed Hedi Mejai*	Komisaris *Commissioner*		√		√		√		√		√		√		√
Abdulsalam Mohammad Joher Al-Saleh*	Komisaris *Commissioner*		√		√		√		√		√		√		√

*) Efektif setelah memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK
*) *Effective after obtaining the pass determination of Fit and Proper Test from FSA*

Program Pengenalan Perusahaan bagi Komisaris Baru

Dengan latar belakang anggota Dewan Komisaris yang berasal dari berbagai pihak, maka keberadaan Program Orientasi sangat penting untuk dilaksanakan. Hal ini karena antar anggota Dewan Komisaris tidak saling mengenal dan/atau belum pernah bekerja dalam satu tim sebelumnya. Program Orientasi berupa program yang disesuaikan dengan kebutuhan.

Prosedur Program Orientasi meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Program Orientasi mengenai BMI wajib diberikan kepada Anggota Dewan Komisaris yang baru pertama kali menjabat di BMI.
2. Tanggungjawab pelaksanaan Program Orientasi ada pada Komisaris Utama. Jika Komisaris Utama berhalangan maka tanggung jawab pelaksanaan program orientasi berada pada Direktur Utama.
3. Materi yang diberikan pada Program Orientasi meliputi hal-hal sebagai berikut:

Orientation Program for the New Member of Board of Commissioners

With the background of members of the Board of Commissioners who come from various parties, the existence of the Orientation Program is pivotal to be implemented. This is because between members of the Board of Commissioners do not know each other and/or have never worked in one previous team. The Orientation Program is a customized program by necessity.

The Orientation Program Procedures include the following:

1. *The Orientation Program regarding BMI must be given to Members The Board of Commissioners is the first time serving in BMI.*
2. *The responsibility for implementing the Orientation Program rests with the Commissioners Main. If the President Commissioner is absent then responsibility implementation of the orientation program is with the President Director.*
3. *The material provided in the Orientation Program includes matters as follows:*

i. Gambaran mengenai BMI berkaitan dengan tujuan, sifat, lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan berbagai masalah strategis lainnya.
ii. Penjelasan mengenai produk-produk jasa perbankan BMI.
iii. Pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance oleh BMI.
iv. Tanggung jawab hukum anggota Dewan Komisaris.
v. Penjelasan yang berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal serta tugas dan peran Komite Audit dan Komite-komite lain yang dibentuk oleh Dewan Komisaris.
vi. Penjelasan mengenai kewajiban, tugas, tanggung jawab dan hak-hak Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Direksi.
vii. Team building. Dalam kegiatan ini menyertakan seluruh anggota Dewan Komisaris, baik yang baru menjabat maupun yang pernah menjabat sebelumnya dengan tujuan mewujudkan kekompakan dan kerjasama tim sebagai Dewan Komisaris.

4. Program Orientasi yang diberikan dapat berupa presentasi, pertemuan atau kunjungan ke fasilitas BMI, perkenalan dengan para Karyawan Senior dan para Karyawan BMI serta program lainnya.

Pada tahun 2019 Bank Muamalat tidak melaksanakan program orientasi/pengenalan dikarenakan tidak terdapat perubahan struktur keanggotaan Dewan Komisaris baru.

i. The description of BMI is related to the purpose, nature, scope activities, financial and operating performance, strategies, business plans short-term and long-term, competitive position, risk and various other strategic issues.
ii. A description of BMI's banking services products.
iii. Implementation of Good Corporate Governance principles by BMI.
iv. The legal responsibilities of members of the Board of Commissioners.
v. Explanations relating to delegated authority, internal and external audits, control systems and policies internal duties and duties of the Audit Committee and other Committees formed by the Board of Commissioners.
vi. Explanation of obligations, duties, responsibilities and rights Sharia Supervisory Board, Board of Commissioners and Directors.
vii. Team building. In this activity include all members The Board of Commissioners, both those who have recently served and who have never served previously with the aim of realizing compactness and teamwork as a Board of Commissioners.

4. Orientation programs provided can be in the form of presentations, meetings or visits to BMI facilities, introductions with employees Senior and BMI Employees and other programs.

In 2019 Bank Muamalat did not implement the program orientation/ recognition because there is no change in structure new Board of Commissioners membership.

Pembidangan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris

Berdasar kepada kompetensi, pengalaman, dan bidang masing-masing, anggota Dewan Komisaris juga merangkap sebagai Ketua dan/atau anggota Komite-komite Level Komisaris dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris. Keanggotaan Dewan Komisaris dalam Komite-komite level Komisaris adalah sebagai berikut:

Distribution of the Board of Commissioners Supervisory Duties

On the basis of their competence, experience and, realm of work, members of the Board of Commissioners are also concurrently Chairpersons and/or Commissioners-level Committees in order to assist in undertaking the duties and responsibilities of the Board of Commissioners. Membership of the Board of Commissioners in the Commissioners level committees is as follows:

Nama *Name*	Keanggotaan Komite Level Komisaris *Commissioner Level Committee Membership*	Jabatan *Position*
Ilham Akbar Habibie	Komite Nominasi dan Remunerasi *Remuneration and Nomination Committee*	Ketua *Chairman*
	Komite Tata kelola Perusahaan Terintegrasi *Integrated Corporate Governance Committee*	Ketua *Chairman*
Iggi Haruman Achsien	Komite Audit *Audit Committee*	Ketua *Chairman*
	Komite Nominasi dan Remunerasi *Nomination and Remuneration Committee*	Anggota *Member*

Nama *Name*	Keanggotaan Komite Level Komisaris *Commissioner Level Committee Membership*	Jabatan *Position*
Edy Setiadi	Komite Pemantau Risiko Komite Tata Kelola Perusahaan Komite Nominasi dan Remunerasi *Risk Monitoring Committee* *Corporate Governance Committee* *Nomination and Remuneration Committee*	Ketua *Chairman* Anggota *Member*
Mohamed Hedi Mejai*	Komite Tata Kelola Perusahaan *Corporate Governance Commitee* Komite Nominasi dan Remunerasi *Nominationa and Remuneration Committee*	Anggota *Member* Anggota *Member*
Abdulsalam Mohammad Joher Al-Saleh*	Komite Pemantau Risiko *Risk Oversight Committee*	Anggota *Member*

*) Efektif setelah memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK
*) Effective after obtaining the pass determination of Fit and Proper Test from FSA

Keputusan yang Perlu Mendapat Persetujuan Dewan Komisaris

Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah pasal 8 ayat (4) mengatur bawa dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali pengambilan keputusan untuk pemberian pembiayaan kepada Direksi sepanjang kewenangan Dewan Komisaris tersebut ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Selain itu, Dewan Komisaris dapat ikut serta dalam pengambilan keputusan atas hal-hal lain yang ditetapkan dalam anggaran dasar Bank atau peraturan perundang-undangan.

Pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud diatas merupakan bagian dari tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Bank.

Decisions Requiring the Approval from the Board of Commissioners

Bank Indonesia Regulation N0. 11/33/PBI/2009 concerning Implementation Good Corporate Governance for Sharia Commercial Banks and Units Sharia Business article 8 paragraph (4) regulates the carrying in doing supervision, the Board of Commissioners is prohibited from being involved in the taking decision of the Bank's operational activities, except for making the decision to grant financing to the Board of Directors as long as the authority of the Board of Commissioners is stipulated in the Budget Bank Basis or in General Meeting of Shareholders. Other than that, the Board of, Commissioners can participate in decision making for other matters stipulated in the articles of association of the Bank or laws and regulations.

The decision making of the Bank's operational activities by the Board of Commissioners as aforesaid is part of the supervisory duties of the Board of Commissioners so that the act does not eliminate the responsibility of the Board of Directors for the management of the Bank.

Sertifikasi Manajemen Risiko

Dengan semakin kompleksnya kegiatan usaha perbankan akan menyebabkan risiko yang dihadapi juga semakin besar sehingga untuk mendukung pelaksanaan dan pengelolaan manajemen risiko dalam Perusahaan diperlukan pengurus dan pejabat bank yang memiliki kompetensi dan keahlian dalam bidang manajemen risiko.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 11/19/PBI/2009 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum, Dewan Komisaris dan Direksi wajib memiliki Sertifikat Manajemen Risiko yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi, dengan klasifikasi sebagai berikut:

Risk Management Certification

Having acknowledged the complexity of banking business activities, the risks faced will also be greater; thus, in order to support the implementation and management of risk management in the Company, the existence of management and bank officers who have competence and expertise in the Company is necessary.

As regulated in Bank Indonesia Regulation No. 11/19/PBI/2009 concerning Risk Management Certification for Management and Officers of Commercial Banks, Board of Commissioners and Directors must have a Risk Management Certificate issued by a Professional Certification Agency, with the following classification:

Jabatan *Position*	Level *Level*	Masa Berlaku *Validity Period*
Komisaris *Commissioners*	1 (satu) *1 (One)*	4 tahun *4 years*
Komisaris Independen *Independent Commissioner*	2 (dua) *2 (Two)*	4 tahun *4 years*
Direktur Utama dan Direktur dengan aset di atas 10 T *President Director and Director with assets of above 10 trillion*	5 (lima) *5 (Five)*	2 tahun *2 years*

Dalam hal masa berlaku sertifikasi tersebut telah habis, maka wajib dilakukan Program Pemeliharaan *(Refreshment)* secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 4 (empat) tahun untuk tingkat 1 dan 2; atau 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun untuk tingkat 3, 4 dan 5.

Should the validity period of the certification be expired, the Maintenance Program (Refreshment) is neccesarily required to undertake, periodically, at least 1 (one) time in 4 (four) years for levels 1 and 2; or 1 (one) time in 2 (two) years for levels 3, 4 and 5.

Tabel berikut menjabarkan mengenai sertifikasi manajemen risiko yang dimiliki oleh Dewan Komisaris tahun 2019.

The following table describes the risk management certification held by the Board of Commissioners in 2019.

Nama *Name*	Jabatan *Position*	Level Sertifikasi *Certification Level*	Bidang *Field*	Lembaga yang Mengeluarkan Sertifikasi *Institutions Issuing the Certifications*	Tanggal Dikeluarkan *Issuance Date*	Tanggal Kadaluarsa *Expiration Date*
Ilham Akbar Habibie	Komisaris Utama/ Komisaris Independen *President Commissioner/ Independent Commissioner*	2	Risk Management Certification	LSPP	27-Aug-18	27-Aug-22
Iggi Haruman Achsien	Komisaris Independen/ *Independent Commissioner*	2	Risk Management Certification	LSPP	12-Aug-14	12-Aug-23
Edy Setiadi	Komisaris Independen/ *Independent Commissioner*	2	Risk Management Certification	LSPP	26-Oct-17	26-Oct-21
Mohamed Hedi Mejai*	Komisaris/ *Commissioner*	1	Risk Management Certification	LSPP	09-Nov-17	09-Nov-21
Abdulsalam Mohammad Joher Al-Saleh*	Komisaris/ *Commissioner*	1	Risk Management Certification	LSPP	23-Aug-17	23-Aug-21

*) Efektif setelah memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK
*) *Effective after obtaining the pass determination of Fit and Proper Test from FSA*

Program Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris

Dalam rangka meningkatkan kompetensi, sepanjang tahun 2019 Dewan Komisaris telah mengikuti berbagai pelatihan yang secara rinci disampaikan dalam bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Board of Commissioners Competency Development Program

In order to improve competence, throughout 2019, the Board of Commissioners has participated in various trainings on a regular basis details are presented in the Education and Training Program section Management in this Annual Report.

Pengelolaan Benturan Kepentingan Dewan Komisaris

Sesuai pasal 61 Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah

Conflicts of Interest Management of the Board of Commissioners

In accordance article 61 with Bank Indonesia Regulation No. 11/33/PBI/2009 concerning Implementation of Good Corporate Governance

dan Unit Usaha Syariah, dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil tindakan yang dapat mengurangi aset atau mengurangi keuntungan BUS dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan. Oleh karenanya Anggota Dewan Komisaris hendaknya senantiasa harus:

1. Mengutamakan kepentingan Perseroan dan tidak mengurangi keuangan Perseroan dalam hal terjadi benturan kepentingan.
2. Menghindari diri dari pengambilan keputusan dalam situasi dan kondisi adanya benturan kepentingan.
3. Melakukan pengungkapan hubungan kekeluargaan, hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan dengan Anggota Komisaris lain dan/atau anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali Bank dan/atau pihak lainnya dalam rangka bisnis Perseroan.
4. Melakukan pengungkapan dalam hal pengambilan keputusan tetap harus diambil pada kondisi adanya benturan kepentingan.

Keputusan, Rekomendasi dan Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris

Sesuai dengan tugas pokoknya, Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap kinerja Bank Muamalat Indonesia, sekaligus memberikan rekomendasi, saran dan nasihat kepada Direksi. Pengawasan dan nasihat Dewan Komisaris juga disampaikan melalui Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Tata Kelola Perusahaan serta Komite Tata Kelola Terintegrasi yang dibahas pada rapat Dewan Komisaris. Adapun beberapa rekomendasi penting selama tahun 2019, diantaranya:

1. Merekomendasikan fokus bisnis Bank Muamalat ke depan harus memiliki dampak yang positif terhadap peningkatan rentabilitas dan penyelesaian pembiayaan secara agresif, efisiensi operasional dan pertumbuhan bisnis yang moderat harus terefleksi dalam peningkatan profitabilitas Perseroan di masa yang akan datang.
2. Mendorong manajemen untuk mempercepat terealisasinya rencana penambahan modal tahun 2019 dan memperbaiki kualitas aset pembiayaan.
3. Berupaya meningkat pendapatan bank untuk memperbaiki kinerja bank.
4. Mendorong manajemen untuk melakukan strategi percepatan pertumbuhan bisnis yang sejalan dengan strategi optimalisasi modal dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian bank.
5. Perlunya peningkatan penyaluran dana perbaikan kualitas portofolio pembiayaan secara *bankwide*.
6. Meningkatkan monitoring aspek kepatuhan bank terhadap regulasi yang berlaku.
7. Melakukan *review* dan menyempurnakan ketentuan internal bank yang berpotensi menyebabkan pembiayaan bermasalah.
8. Memberikan arahan atas realisasi pemantauan rekomendasi hasil audit.
9. Memantau perkembangan inisiatif optimalisasi dan efisiensi biaya melalui *cost efficiency* program yang telah dilakukan sehingga pencapaian indikator profitabilitas Bank semakin meningkat.

for Banks Sharia General and Sharia Business Unit, In the event of a conflict interests, members of the Board of Commissioners are prohibited from taking actions that can reduce assets or reduce profits BUS and must disclose conflicts of interest in each decision. Therefore Members of the Board of Commissioners should always have to:

1. *Prioritising the interests of the Company and not reducing the Company's finance in the event of a conflict of interest.*
2. *Avoiding yourself from making decisions in situations and conditions of conflict of interest.*
3. *Disclosing family relations, relationships finance, management relations, ownership relations with other Commissioners and/or members of the Board of Directors and/or controlling shareholders of the Bank and/or other parties in the framework of the Company's business.*
4. *Disclosing in terms of decision making still must be taken in the condition of a conflict of interest.*

Decisions, Recommendations, and Implementation of the Duties of the Board of Commissioners

In accordance with its primary duties, the Board of Commissioners supervises the performance of Bank Muamalat Indonesia as well as provides recommendations, suggestions, and advice to the Directors. Oversight and advice of the Board of Commissioners is also conveyed by means of the Audit Committee, the Risk Monitoring Committee and the Nomination and Remuneration Committee, the Corporate Governance Committee and the Integrated Governance Committee discussed at the Board of Commissioners' meeting. As for some important recommendations during 2019, including:

1. *Recommending that the Bank Muamalat's business focus in the future should have a positive impact on increasing profitability and aggressive financing settlement, moderate operational efficiency and business growth should be reflected in increasing the Company's profitability in the future.*
2. *Propelling management to accelerate the realisation of the planned capital increase in 2019 and improve the quality of financial assets.*
3. *Attempting to generate the Bank's revenue to improve bank performance.*
4. *Encouraging management to adopt a strategy for accelerating business growth that is in line with the strategy of capital optimisation while still observing the precautionary principle of banks.*
5. *Requiring to increase the distribution of funds to improve the quality of the bank-wide financing portfolio.*
6. *Improving the monitoring aspects of bank compliance with applicable regulations.*
7. *Reviewing and perfecting internal bank provisions that have the potential to cause problematic financing.*
8. *Providing direction on the realization of monitoring the audit results recommendations.*
9. *Monitoring the progress of the optimisation and cost efficiency initiatives through the cost efficiency program that has been performed so that the achievement of the Bank's profitability indicator increases.*

Penilaian Kinerja Komite-Komite yang Berada di bawah Dewan Komisaris

Dalam pelaksanaan penilaian kinerja Komite-Komite yang berada di bawah Komisaris dilakukan berdasarkan kepada hasil pengisian Self Asessment GCG dan GCG Review yang telah dilakukan secara berkala. Penilaian secara kolektif dan kolegial atas kinerja anggota Komite tingkat Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya melalui penilaian terhadap beberapa aspek atau kriteria diantaranya :

a. Pemenuhan Struktur Organisasi Komite;
b. Ketersediaan Piagam/Charter Komite;
c. Pelaksanaan Rapat Komite; dan
d. Dokumentasi Hasil Rekomendasi Komite.

Selama tahun 2019 Komite-komite yang berada di bawah Dewan Komisaris telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya denngan baik.

Mekanisme Pengunduran Diri dan Pemberhentian Dewan Komisaris

a. Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sebelum pengunduran diri dimaksud.
b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan diri anggota Dewan Komisaris tersebut dalam jangka waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan pengunduran diri.
c. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah:
    1. diterimanya permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
    2. hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf b.
d. Pengunduran diri dan/atau pemberhentian anggota Dewan Komisaris wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak pemberhentian dan/atau pengunduran diri efektif.
e. Dalam hal seluruh anggota Dewan Komisaris diberhentikan dari jabatannya, mengundurkan diri dari jabatannya, atau oleh suatu sebab apapun jabatan Anggota Dewan Komisaris lowong dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Dewan Komisaris maka masa jabatan penggantinya atau masa jabatan seluruh penggantinya adalah sisa masa jabatan Anggota Dewan Komisaris yang digantikannya.
f. Dalam hal terdapat penambahan anggota Dewan Komisaris, maka masa jabatan anggota Dewan Komisaris tersebut akan berakhir bersamaan dengan masa jabatan anggota Dewan Komisaris lainnya yang telah ada.

Performance Assessment of Committees under Board of Commissioners

In conducting the performance evaluation of the Committees located at under the Commissioner is based on the results of filling GCG Self-Assessment and GCG Review that has been conducted, regularly. Collective and collegial assessment of the performance of Committee members Commissioner level in carrying out its duties and responsibilities through an evaluation of several aspects or criteria including:

a. Fulfillment of Committee Organisational Structure;
b. Availability of Committee Charter/Charter;
c. Implementation of Committee Meetings; and
d. Documentation of Committee Recommendations Results.

During 2019, the Committees under the BOC have carried out the duties and responsibilities well.

Resignation and Dismissal Mechanisms of Board of Commissioners

a. Members of the Board of Commissioners are entitled to resign from their positions by giving written notice to the Company within 90 (ninety) days prior to the resignation.

b. The Company is obliged to hold a General Meeting of Shareholders to decide on the application for members of the Board of Commissioners within a period of not later than 90 (ninety) days after receipt of the letter of resignation.
c. It is necessary for the Company to disclose information to the public and submit it to the Financial Services Authority no later than 2 (two) working days after:
    1. receipt of the request for resignation of a member of the Board of Commissioners as referred to in pointr a; and
    2. the results of the GMS as referred to in point b.

d. Resignation and/or dismissal of members of the Board of Commissioners must be reported to the Financial Services Authority no later than 10 (ten) days after the effective dismissal and/or resignation.
e. In the event that all members of the Board of Commissioners are dismissed from their positions, resign from their positions, or for any reason the position of Member of the Board of Commissioners is vacant and the Company does not have any members of the Board of Commissioners, the term of office of his successor or the term of office of all his successors is the remaining term of office of the Members of the Board of Commissioners it replaced.
f. In the event that there are additional members of the Board of Commissioners, the term of office of the members of the Board of Commissioners will end simultaneously with the terms of office of other existing members of the Board of Commissioners.

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan oleh Pemegang Saham dalam RUPS Tahunan pada saat penyampaian laporan Tahunan Perseroan yang mencakup laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, di mana berdasarkan laporan tersebut RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya *(volledig acquit et de charge)* Kepada Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang dilakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada akhir tahun.

Secara umum, kinerja Dewan Komisaris ditentukan berdasarkan tugas kewajiban yang tercantum dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar maupun amanat Pemegang Saham. Kriteria evaluasi disampaikan secara terbuka kepada Dewan Komisaris sejak pengangkatannya.

Hasil evaluasi terhadap kinerja Dewan Komisaris secara keseluruhan dan kinerja masing-masing anggota Dewan Komisaris secara individual akan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam skema kompensasi dan pemberian insentif bagi Dewan Komisaris. Hasil evaluasi kinerja masing-masing anggota Dewan Komisaris secara individual merupakan salah satu dasar pertimbangan bagi Pemegang Saham untuk pemberhentian dan/atau menunjuk kembali anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan. Hasil evaluasi kinerja Dewan Komisaris baik selaku Dewan maupun individu merupakan sarana penilaian serta peningkatan efektivitas Dewan Komisaris.

Penilaian Kinerja Berdasarkan Assessment GCG Aspek Dewan Komisaris

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan melalui Self-Assessment GCG yang dilaksanakan setiap semester dengan melakukan penilaian atas kinerja sendiri (*self Assessment)* atas kompetensi kinerja selama satu semester/ tahun untuk kemudian dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Prosedur Pelaksanaan Penilaian Self Assessment Kinerja Dewan Komisaris

Pelaksanaan *Self-Assessment* GCG untuk kinerja Dewan Komisaris yaitu melalui pengisian kertas kerja yang berisikan kriteria / indikator pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kriteria Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris

Kriteria *Self-Assessment* Dewan Komisaris terkait pelaksanaan GCG Dewan Komisaris dibagi menjadi 3 (tiga) aspek yaitu *Governance Structure*, *Governance Process* dan Governance *Outcome*. *Governance*

Performance Assessment of Board of Commissioners

The performance evaluation of the Board of Commissioners is carried out by the Shareholders in the Annual GMS at the time of submission of the Annual report The Company, which includes reports on the Board of Trustees' duties Commissioner, based on the report the GMS gave full repayment and release of responsibility (volledig acquit et de charge) To the Board of Commissioners for actions supervision conducted in the Financial Year ending in end of year.

In general, the performance of the Board of Commissioners is determined based on the duties stated in the prevailing laws and regulations and the Articles of Association and the mandate of the Shareholders. Evaluation criteria are openly submitted to the Board of Commissioners since their appointment.

Evaluation results on the overall performance of the Board of Commissioners and the performance of each member of the Board of Commissioners individually will be an inseparable part in compensation scheme and incentives for the Board of Commissioners. The results of the performance evaluation of each member of the Board of Commissioners individually is one of the basic considerations for Shareholders to dismiss and/or reappoint the relevant member of the Board of Commissioners. The results of the performance evaluation of the Board of Commissioners both as a Board and individuals are a means of evaluating and increasing the effectiveness of the Board of Commissioners.

Performance Assessment Based on GCG Assessment Aspects of Board of Commissioners

The performance evaluation of the Board of Commissioners is carried out through the GCG Self-Assessment which is carried out every semester by conducting a self-assessment of performance competencies for one semester/year and then reported to the Financial Services Authority.

Procedure of Board of Commissioners Performance Self-Assessment Implementation

The implementation of GCG Self-Assessment for the performance of the Board of Commissioners is by filling out work papers containing criteria/indicators for carrying through the duties and responsibilities of the Board of Commissioners in accordance with the applicable regulations.

Performance Assessment Criteria for Board of Commissioners

The Board of Commissioners Self-Assessment Criteria related to the GCG implementation of the Board of Commissioners are divided into 3 (three) aspects, namely Governance Structure, Governance Process and

structure terdiri dari 14 indikator, *Governance Process* terdiri dari 20 indikator sedangkan *Governance Outcome* terdiri dari 8 indikator.

Pihak yang Melakukan Assessment

Dewan Komisaris melakukan penilaian atas kinerja Dewan Komisaris selama tahun 2019 secara mandiri *(self assessment)* dibantu oleh fungsi terkait.

Hasil Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Berdasarkan hasil *self-assessmen*t yang telah dilaksanakan pada Semester I dan II tahun 2019 dapat disampaikan faktor-faktor positif aspek *Governance Structure*, *Governance Process* dan *Governance Outcome* yang ada pada Dewan Komisaris yaitu:

1. Komposisi anggota Dewan Komisaris Bank Muamalat Indonesia telah sesuai dengan ketentuan.
2. Anggota Dewan Komisaris Bank Muamalat Indonesia memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
3. Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sesuai fungsinya.
4. Pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris telah sesuai dengan ketentuan dan telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi.
5. Rapat koordinasi antara Dewan Komisaris dan Direksi Bank Muamalat Indonesia telah dilakukan sebagai bentuk pengawasan terhadap kegiatan Bank.
6. Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya, Dewan Komisaris secara rutin telah menyelenggarakan rapat-rapat Dewan Komisaris dan rapat Dewan Komisaris bersama Direksi sesuai ketentuan rapat tersebut dilaksanakan dalam rangka melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan pemberian nasihat kepada Direksi.
7. Dewan Komisaris Bank Muamalat Indonesia telah menyetujui dan melakukan pengawasan terhadap Rencana Bisnis Bank.

Governance Outcome. Governance structure consists of 14 indicators, Governance Process consists of 20 indicators while Governance Outcome consists of 8 indicators.

The Party Conducting Assessment

The Board of Commissioners evaluates the performance of the Board of Commissioners during 2019 independently (self assessment) assisted by related function.

Board of Commissioners Performance Assessment Results

Under the results of the self-assessment conducted in Semesters I and II of 2019, it can be conveyed the positive factors of aspects of Governance Structure, Governance Process and Governance Outcome existing in the Board of Commissioners, namely:

1. *The composition of the Board of Commissioners of Bank Muamalat Indonesia is in accordance with the provisions.*
2. *Members of the Board of Commissioners of Bank Muamalat Indonesia have sufficient competence and are relevant to their positions to carry out their duties and responsibilities and are able to implement the competencies they have in carrying out their duties and responsibilities.*
3. *The Board of Commissioners has guidelines in carrying out their duties and responsibilities in accordance with their functions.*
4. *Appointment and/or replacement of members of the Board of Commissioners is in accordance with the provisions and has taken into account the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee.*
5. *Coordination meetings between the Board of Commissioners and Directors of Bank Muamalat Indonesia have been conducted as a form of supervision of the Bank's activities.*
6. *In undertaking the duties and functions, the Board of Commissioners routinely holds Board of Commissioners meetings and Board of Commissioners meetings with the Board of Directors in accordance with the provisions of the meeting carried out in order to supervise the implementation of the duties and responsibilities of the Directors and provide advice to the Directors.*
7. *The Board of Commissioners of Bank Muamalat Indonesia has approved and supervised the Bank's Business Plan.*

8. Dewan Komisaris Bank Muamalat Indonesia telah melakukan upaya-upaya dalam rangka meningkatkan pelaksanaan aspek GCG, antara lain melengkapi keanggotaan komite level Dewan Komisaris dan menyelenggarakan rapat-rapat sesuai ketentuan.

9. Rapat-rapat Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Tata Kelola Perusahaan dan Komite Nominasi dan Remunerasi Bank Muamalat telah diselenggarakan sesuai dengan ketentuan dan telah menetapkan beberapa rekomendasi yang menjadi perhatian dan fokus perbaikan Bank Muamalat Indonesia.

8. The Board of Commissioners of Bank Muamalat Indonesia has made efforts in order to improve the implementation of aspects of GCG, including completing the membership of the Board of Commissioners level committee and holding meetings in accordance with the provisions.

9. Meetings of the Audit Committee, the Risk Monitoring Committee, the Corporate Governance Committee and the Nomination and Remuneration Committee of Bank Muamalat have been held in accordance with the provisions and have established several recommendations that have become the focus and focus of the improvement of Bank Muamalat Indonesia.

Komisaris Independen
Independent Commissioners

Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen untuk mewujudkan objektivitas, independen, fairness, serta dapat memberikan keseimbangan dan perlindungan bagi kepentingan para *stakeholder*.

Independent Commissioners are members of the Board of Commissioners who are not attached to the financial, management, share ownership, and/or family relations with other members of the Board of Commissioners, Directors and/or Controlling Shareholders or relationships with the Bank, which can affect their ability to act independently to realize objectivity, independent, fairness, and can provide balance and protection for the interests of stakeholders.

Keberadaan Komisaris Independen dimaksudkan untuk mendorong terciptanya iklim dan llingkungan kerja yang lebih obyektif dan menempatkan kewajaran (*fairness*) dan kesetaraan di antara berbagai kepentingan termasuk kepentingan pemegang saham minoritas dan pemangku kepentingan lainnya.

The existence of an Independent Commissioner is intended to propel a more objective climate and environment and place fairness and equality among various interests including the interests of minority shareholders and other stakeholders.

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah, Komisaris Independen merupakan anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

In accordance with Bank Indonesia Regulation No. 11/3/PBI/2009 concerning Sharia Commercial Banks, Independent Commissioners are members of the Board of Commissioners who do not have financial, management, share ownership and/or family relations with other members of the Board of Commissioners, Directors and/or controlling shareholders or relationship with banks, which can affect its ability to act independently.

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki:

1. hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi; atau
2. hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham dengan Bank, sehingga dapat mendukung kemampuannya untuk bertindak independen.

In accordance with Bank Indonesia Regulation No. 11/33/PBI/2009 concerning Implementation of Good Corporate Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units, Independent Commissioners are members of the Board of Commissioners who do not have:

1. *financial relations, management, share ownership, and/or family relations with controlling shareholders, members of the Board of Commissioners and/or members of the Board of Directors; or*
2. *financial relationship and/or share ownership relationship with the Bank, so that it can support its ability to act independently.*

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik mendefinisikan Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik dan memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen sebagai berikut:

1. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Emiten atau Perusahaan Publik pada periode berikutnya;
2. tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik tersebut;
3. tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut; dan
4. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.

Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 concerning Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, defines Independent Commissioners as members of the Board of Commissioners who come from outside Issuers or Public Companies and meet the requirements as Independent Commissioners as follows:

1. *S/he is not a person who works or has the authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise the activities of the Issuer or Public Company within the last 6 (six) months, except for reappointment as Independent Commissioner of the Issuer or Public Company in the following period;*
2. *S/he does not have shares either directly or indirectly in the Issuer or Public Company;*
3. *S/he has no affiliation with the Issuer or Public Company, members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or major shareholders of the Issuer or Public Company; and*
4. *S/he does not have a business relationship either directly or indirectly related to the business activities of the Issuer or Public Company.*

Sejalan dengan regulasi tersebut di atas, maka Komisaris Independen Bank Muamalat Indonesia selain memenuhi persyaratan Dewan Komisaris secara umum, wajib memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam *Board Manual* Bank Muamalat Indonesia baik saat diangkat maupun selama menjabat sebagai Komisaris Independen, sebagai berikut:

1. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan pada periode berikutnya;
2. tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;
3. tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Perseroan;
4. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan; dan
5. wajib menjalani masa tunggu (*cooling off*) paling kurang selama 6 (enam) bulan bagi calon anggota Komisaris Independen yang sebelumnya menjabat sebagai anggota Direksi Bank Muamalat kecuali jabatan sebelumnya sebagai Direksi Bank Muamalat yang melakukan fungsi pengawasan.

In line with the aforesaid regulation, the Independent Commissioner of Bank Muamalat Indonesia, in addition to meeting the Board of Commissioners' requirements in general, is necessary to meet the requirements as stipulated in the Bank Muamalat Indonesia Board Manual both when appointed and while serving as Independent Commissioner, as follows:

1. *S/he is not a person who works or has the authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise the activities of the Company within the last 6 (six) months, except for reappointment as an Independent Commissioner of the Company in the following period;*
2. *S/he does not have shares either directly or indirectly in the Company;*
3. *S/he has no affiliation with the Company, members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or major shareholders of the Company;*
4. *S/he does not have a business relationship either directly or indirectly related to the Company's business activities; and*
5. *S/he must have a cooling off period of at least 6 (six) months for candidates for Independent Commissioners who previously served as Directors of Bank Muamalat excluding their erstwhile positions as Directors of Bank Muamalat who perform supervisory functions.*

Bank Muamalat Indonesia memiliki 3 (tiga) Komisaris Independen yang berarti lebih dari 50% jumlah keseluruhan Dewan Komisaris sebagaimanan ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Pemenuhan persyaratan independensi dari anggota Komisaris Independen Bank Muamalat adalah sebagai berikut:

Bank Muamalat Indonesia has 3 (three) Independent Commissioners, which means more than 50% of the total number of the Board of Commissioners as stipulated in the Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 concerning Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies. The fulfillment of independence requirements of Bank Muamalat's Independent Commissioner members are as following:

Kriteria *Criteria*	Komisaris Independen *Independent Commissioners*		
	Ilham Akbar Habibie	Iggi Haruman Achsien	Edy Setiadi
Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Emiten atau Perusahaan Publik pada periode berikutnya. *Not a person who works or has the authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise the activities of the Issuer or Public Company within the last 6 (six) months, except for reappointment as Independent Commissioner of the Issuer or Public Company in the following period.*	√	√	√
Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik tersebut. *Does not have shares either directly or indirectly in the Issuer or Public Company.*	√	√	√

Kriteria *Criteria*	Komisaris Independen *Independent Commissioners*		
	Ilham Akbar Habibie	Iggi Haruman Achsien	Edy Setiadi
Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut. *Has no affiliation relationship with Issuers or Public Companies, members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or Major Shareholders of the Issuer or Public Company.*	√	√	√
Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik tersebut. *Does not have a business relationship, directly or indirectly, related to the business activities of the Issuer or Public Company.*	√	√	√

Pernyataan tentang Independensi Masing-Masing Komisaris Independen

Sehubungan dengan pengangkatan Komisaris Independen seluruh anggota Komisaris Independen Bank Muamalat telah membuat dan menyampaikan pernyataan independensi melalui Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh masing-masing anggota Komisaris Independen mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
2. cakap melakukan perbuatan hukum;
3. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
   a. tidak pernah dinyatakan pailit
   b. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
   c. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan;
   d. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
      i. pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
      ii. pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
      iii. pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
   e. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
   f. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Emiten atau Perusahaan Publik.

Independence Declaration of Independent Commissioners

In connection with the appointment of all Independent Commissioners Bank Muamalat's Independent Commissioner member has made and submit a statement of independence through a Declaration signed by each member of the Board of Commissioners Independent covers the following matters:

1. *have good character, morals, and integrity;*
2. *competent in carrying out legal actions;*
3. *within 5 (five) years before appointment and during served:*
   a. *never declared bankrupt*
   b. *has never been a member of the Board of Directors and / or members The Board of Commissioners who was found guilty of causing a company is declared bankrupt;*
   c. *have never been convicted of a felony which is detrimental to the country's and / or related finances with the financial sector;*
   d. *has never been a member of the Board of Directors and / or members Board of Commissioners who during his tenure:*
      i. *did not hold an annual GMS;*
      ii. *his responsibilities as a member of the Board of Directorsand / or a member of the Board of Commissioners neverreceived by the GMS or never gave accountability as a member of the Board of Directors and / ormembers of the Board of Commissioners to the GMS; and*
      iii. *ever led to a company that gained permission, approval or registration from the Service Authority Finance does not fulfill the obligation of submitting annual report and / or financial report to Financial Fervices Authority.*
   e. *has a commitment to comply with laws and regulations; and*
   f. *have knowledge and / or expertise in a field Issuer or Public Company required.*

Direksi
Board of Directors

Direksi adalah Organ Perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan serta mewakili Perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi wajib mencurahkan tenaga, pikiran, perhatian dan pengabdiannya secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan Perusahaan.

Selain itu, anggota Direksi harus mematuhi Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran.

Directors are Company Organs who are authorised and are fully responsible for the management of the Company for the interests of the Company, in accordance with the aims and objectives and represent the Company, both inside and outside the court in accordance with the provisions of the Articles of Association.

In terms of undertaking the duties, members of the Board of Directors must devote their full energy, thoughts, attention and devotion to the duties, obligations and achievement of the Company's goals.

In addition, members of the Board of Directors must comply with the Company's Articles of Association and laws and regulations and must implement the principles of professionalism, efficiency, transparency, independence, accountability, responsibility, and fairness.

Dasar Hukum

1. Undang Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
2. Undang Undang RI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
3. Peraturan Bank Indonesia No. 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 15/13/PBI/2013.
4. Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
5. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/6/PBI/2012 tanggal 18 Juni 2012 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan & Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan;
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.
9. Anggaran Dasar Bank Muamalat Indonesia.

Legal Basis

1. *Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies*
2. *RI Law No. 21 of 2008 concerning Islamic Banking.*
3. *Bank Indonesia Regulation No. 11/3/PBI/2009 concerning Sharia Commercial Banks as amended by Bank Indonesia Regulation No. 15/13/PBI/2013.*
4. *Bank Indonesia Regulation No. 11/33/PBI/2009 concerning Implementation of Good Corporate Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units.*
5. *Bank Indonesia Regulation Number 14/6/PBI/2012 dated on June 18, 2012, concerning the Fit and Proper Test Sharia Banks and Sharia Business Units*
6. *Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 concerning Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies.*
7. *Financial Services Authority Regulation No.27/POJK.03/2016 concerning Assessment of Capability & Compliance for Main Parties of Financial Services Institutions.*
8. *Financial Services Authority Regulation No. 46/POJK.03/2017 concerning the Implementation of Compliance Functions of Commercial Banks.*
9. *Bank Muamalat Indonesia's Articles of Association.*

Tugas dan Tanggung Jawab

Direksi bertanggung jawab atas tugas dan fungsi melakukan pengurusan dan pengelolaan Perseroan. Pembagian tugas Direksi ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar, keputusan RUPS atau keputusan rapat Direksi. Untuk itu, setiap anggota Direksi bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya masing-masing.

Direksi juga memiliki tugas dan kewajiban secara spesifik terkait strategi dan rencana kerja, pelaksanaan fungsi kepatuhan, penerapan

Duties and Responsibilities

The Board of Directors is responsible for the duties and functions of managing and managing the Company. The division of duties of the Board of Directors is determined in accordance with the applicable laws and regulations, the Articles of Association, the resolution of the GMS or the decision of the Board of Directors meeting. For this reason, each member of the Board of Directors is responsible for carrying out their respective duties.

The Board of Directors also has specific duties and obligations related to strategy and work plans, implementation of the compliance

manajemen risiko, sistem pengendalian internal, keterbukaan dan kerahasiaan informasi, hubungan dengan para pemangku kepentingan, sistem akuntansi dan pembukuan, pelaksanaan prinsip mengenal nasabah dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang/Transaksi Keuangan yang Mencurigakan. Tugas dan kewajiban Direksi Bank Muamalat Indonesia antara lain sebagai berikut:

1. Menyusun kode etik yang berlaku bagi seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, karyawan/pegawai, serta pendukung organ yang dimiliki Bank Muamalat Indonesia dan menyosialisasikannya kepada seluruh karyawan/pegawai yang bekerja pada Bank Muamalat Indonesia serta memuatnya secara lengkap dalam situs web Bank Muamalat Indonesia.
2. Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan Bank berdasarkan prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah.
3. Mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Melaksanakan GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank Muamalat Indonesia pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
5. Dalam rangka melaksanakan GCG, Direksi wajib memiliki fungsi paling kurang Audit Intern, Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko serta Kepatuhan.
6. Dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Bank Muamalat Indonesia.
7. Tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar dan keputusan RUPS serta memastikan seluruh aktivitas Bank telah sesuai dengan ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar dan keputusan RUPS.
8. Mematuhi tata urutan peraturan internal Bank.
9. Melaksanakan pengurusan Bank Muamalat Indonesia untuk kepentingan dan tujuan Bank Muamalat Indonesia.
10. Menetapkan susunan organisasi Bank Muamalat Indonesia di tingkat pusat, wilayah maupun cabang lengkap dengan pelaksanaan tugasnya.
11. Bertindak selaku pimpinan dalam pengurusan Bank Muamalat Indonesia.
12. Direksi harus mengungkapkan kepada pegawai kebijakan Bank Muamalat Indonesia yang bersifat strategis di bidang kepegawaian.
13. Memelihara dan mengurus kekayaan Bank Muamalat Indonesia.
14. Bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Bank Muamalat Indonesia dalam mencapai maksud dan tujuannya.
15. Mewakili Bank Muamalat Indonesia baik di dalam maupun di luar pengadilan.
16. Melakukan segala tindakan dan perbuatan, baik mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Bank Muamalat Indonesia serta mengikat Bank Muamalat Indonesia dengan pihak lain dan atau pihak lain dengan Bank Muamalat Indonesia, dengan pembatasan tertentu.

function, implementation of risk management, internal control systems, disclosure and confidentiality of information, relations with stakeholders, accounting and accounting systems, implementation of the principle of knowing customers and Eradication of Criminal Acts. Money Laundering/Suspicious Financial Transactions. The duties and obligations of the Board of Directors of Bank Muamalat Indonesia include the following:

1. *Develop a code of conducts that applies to all members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners, employees/employees, and supporting organs owned by Bank Muamalat Indonesia and disseminate it to all employees who work at Bank Muamalat Indonesia and include it in full on the Bank Muamalat Indonesia website.*
2. *Take full responsibility for the implementation of Bank management based on prudential principles and Sharia Principles.*
3. *Manage the Bank in accordance with its authorities and responsibilities as stipulated in the Bank's Articles of Association and applicable laws and regulations.*
4. *Carry out GCG in every business activity of Bank Muamalat Indonesia at all organisational levels or levels.*
5. *In order to implement GCG, the Board of Directors must have the functions of at least Internal Audit, Risk Management and the Risk Management and Compliance Committee.*
6. *Have a good faith and full responsibility for carrying out duties for the benefit and business of Bank Muamalat Indonesia.*
7. *Obey the provisions of the prevailing laws and regulations, the Articles of Association and RUPS decisions and ensure that all Bank activities are in accordance with the provisions of the prevailing laws and regulations, the Articles of Association and RUPS decisions.*
8. *Comply with the order of internal regulations of the Bank.*
9. *Undertake the management of Bank Muamalat Indonesia for the interests and purposes of Bank Muamalat Indonesia.*
10. *Determine the organizational structure of Bank Muamalat Indonesia at the central, regional and branch levels complete with the implementation of their duties.*
11. *Act as a leader in the management of Bank Muamalat Indonesia.*
12. *The Board of Directors must disclose to the employees of Bank Muamalat Indonesia's policy which is strategic in the area of employment.*
13. *Maintain and manage the wealth of Bank Muamalat Indonesia.*
14. *Take full responsibility in carrying out its duties for the benefit of Bank Muamalat Indonesia in achieving its aims and objectives.*
15. *Represent Bank Muamalat Indonesia both inside and outside the court.*
16. *Perform all actions and actions, both regarding the management and ownership of Bank Muamalat Indonesia assets and binding Bank Muamalat Indonesia with other parties and or other parties with Bank Muamalat Indonesia, with certain restrictions.*

17. Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.
18. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.
19. Direksi wajib membuat dan memelihara seluruh daftar pemegang saham, Daftar Khusus, risalah RUPS dan risalah rapat Direksi serta dokumen-dokumen keuangan dan dokumen Bank Muamalat Indonesia lainnya.
20. Anggota Direksi baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dilarang memiliki saham lebih dari 25% dari modal disetor perusahaan lain.
21. Setiap anggota Direksi bertanggungjawab secara pribadi atas kerugian Bank Muamalat Indonesia apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugas.
22. Anggota Direksi wajib mengungkapkan kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima per seratus) atau lebih baik pada Bank yang bersangkutan maupun pada bank dan perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri.
23. Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah.
24. Setiap keputusan Direksi bersifat mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.

Hak dan Wewenang Direksi

Dalam melakukan tugasnya, Direksi berwenang untuk menjalankan pengurusan Perseroan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Anggaran Dasar Perseroan serta didasari oleh itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan Perseroan.

1. Menetapkan kebijakan dalam pengurusan BMI, berikut penentuan struktur organisasi BMI.
2. Menolak mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila pemindahan tersebut tidak memenuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar BMI.
3. Mewakili BMI di dalam dan di luar pengadilan.
4. Melakukan segala tindakan, baik yang mengenai pengurusan maupun mengenai pemilikan Perseroan.
5. Mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, dengan pembatasan-pembatasan.
6. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan kepada seseorang atau beberapa orang Direktur yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seseorang atau beberapa orang pegawai Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang atau badan lain.
7. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian BMI termasuk penetapan gaji, pensiun, jaminan hari tua dan penghasilan bagi Karyawan BMI berdasarkan ketentuan yang berlaku.

17. Members of the Board of Directors are prohibited from giving general power to other parties which results in the transfer of duties and functions of the Board of Directors.
18. The Board of Directors is responsible for performing its duties to shareholders through the General Meeting of Shareholders.
19. The Board of Directors must prepare and maintain the entire register of shareholders, the Special Register, minutes of the GMS and minutes of the Board of Directors meeting as well as financial documents and other Bank Muamalat Indonesia documents.
20. Members of the Board of Directors both individually and collectively are prohibited from owning shares of more than 25% of the paid-up capital of other companies.
21. Each member of the Board of Directors is personally responsible for the loss of Bank Muamalat Indonesia if the person concerned is guilty or negligent in carrying out his duties.
22. Members of the Board of Directors must disclose share ownership of 5% (five percent) or better at the Bank concerned or at banks and other companies domiciled at home and abroad.
23. The Board of Directors must provide accurate, relevant and timely data and information to the Board of Commissioners and the Sharia Supervisory Board.
24. Every decision of the Board of Directors is binding and is the responsibility of all members of the Board of Directors.

Rights and Authorities

In conducting the duties, the Board of Directors is authorised to carry out the management of the Company in accordance with policies deemed appropriate, within the limits specified in applicable legislation and/or the Articles of Association of the Company and based on good faith and full responsibility for the interests of the Company.

1. Establish policies in the management of BMI, following the determination of BMI organizational structure.
2. Refuse to register the transfer of rights to shares in the Register of Shareholders if the transfer does not meet the provisions in the BMI's Articles of Association.
3. Represent BMI inside and outside the court.
4. Perform all actions, both regarding the management and regarding the ownership of the Company.
5. Bind the Company with other parties and other parties with the Company, with restrictions.
6. Arrange the transfer of authority of the Board of Directors to represent the Company in and out of the Court to a person or several Directors specifically appointed for it or to a person or several employees of the Company, individually or jointly or to another person or entity.
7. Regulate provisions regarding BMI staffing including the determination of salaries, pensions, old age savings and income for BMI employees based on applicable provisions.

8. Mengangkat, memberi penghargaan dan sanksi serta memberhentikan Karyawan BMI berdasarkan peraturan kepegawaian BMI.
9. Memastikan kompetensi Sumber Daya Insani yang terkait.
10. Menghapus buku piutang macet yang selanjutnya dilaporkan dan dipertanggungjawabkan dalam Laporan Tahunan
11. Membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal Debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Perseroan, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya, dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.
12. Melakukan aktivitas di luar Perseroan yang tidak secara langsung berhubungan dengan kepentingan Perseroan seperti kegiatan mengajar, menjadi pengurus asosiasi bisnis dan sejenisnya diperkenankan sebatas menggunakan waktu yang wajar dan sepengetahuan Direktur Utama atau Direktur lainnya.
13. Jika diperlukan, mempergunakan saran profesional.
14. Menerima gaji berikut fasilitas dan tunjangan lainnya termasuk santunan purnajabatan yang jumlahnya ditetapkan oleh RUPS atau Dewan Komisaris berdasarkan pelimpahan wewenang dari RUPS.
15. Apabila BMI mencapai tingkat keuntungan, maka Direksi dapat menerima insentif sebagai imbalan atas prestasi kerjanya yang besarnya ditetapkan oleh RUPS
16. Menggunakan sarana dan fasilitas Perseroan untuk kegiatan yang berhubungan dengan kepentingan Perseroan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Perseroan.
17. Direksi berhak menerima fasilitas yang ditetapkan Perseroan.

8. Appoint, reward, sanction, and terminates BMI Employees based on BMI staffing regulations.
9. Ensure competency of related human resources.
10. Write off the bad debt book which is subsequently reported and accounted for in the Annual Report
11. Purchase part or all of the collateral, either through an auction or outside the auction based on voluntary surrender by the collateral owner or based on the power to sell outside the auction from the collateral owner if the Debtor does not fulfil his obligations to the Company, provided that the collateral purchased must be disbursed as soon as possible, with due observance of applicable laws and regulations.
12. Conduct activities outside the Company that are not directly related to the interests of the Company such as teaching activities, being a manager of a business association and the like is permitted to use reasonable time and the knowledge of the President Director or other Directors.
13. Take the professional advice, if needed.
14. Receive salary along with other facilities and benefits including retirement benefits, the amount of which is determined by the GMS or the Board of Commissioners based on the delegation of authority from the GMS.
15. If BMI reaches a profit level, the Board of Directors can receive incentives in return for its work performance, the amount of which is determined by the GMS.
16. Use the Company's facilities and facilities for activities related to the interests of the Company, in accordance with the laws and regulations and the Company's policies.
17. The Directors are entitled to receive facilities determined by the Company.

Kewenangan Direksi yang Harus Mendapat Persetujuan Dewan Komisaris

1. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan sejumlah uang yang melampaui kewenangan Direksi yang dari waktu ke waktu akan ditentukan secara tertulis oleh Dewan Komisaris.
2. Membeli, menjual, atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas harta tetap (tanah dan/atau bangunan) dan perusahaan-perusahaan atau memberati harta kekayaan Perseroan yang nilainya sama atau lebih besar dari nilai transaksi material sesuai dengan peraturan pasar modal yang berlaku.
3. Mengikat Perseroan sebagai penjamin/penanggung hutang (corporate guarantor).
4. Mendirikan suatu badan usaha baru.
5. Mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan baik dalam

The Authorities of Board of Directors Requiring the Board of Commissioners Approval

1. Borrow or lend money on behalf of the Company an amount of money that exceeds the authority of the Board of Directors which from time to time will be determined in writing by the Board of Commissioners.
2. Buy, sell, or otherwise release the rights to fixed assets (land and/or buildings) and companies or give assets to the Company that are equal to or greater than the value of material transactions in accordance with applicable capital market regulations.
3. Bind the Company as guarantor of the debt (corporate guarantor).
4. Establish a new business entity.
5. Transfer, relinquish rights, or make debt guarantees for the whole or a large portion of the Company's assets either in 1 (one)

1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain yang terjadi dalam 1 (satu) tahun buku.

6. Membeli atau melepaskan saham Perseroan dalam perusahaan lain.
7. Mengambil tindakan-tindakan hukum atau transaksi yang bersifat strategis yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan secara materiil sesuai dengan peraturan pasar modal yang berlaku, jenis tindakan hukum atau transaksi tersebut dari waktu ke waktu akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

Pedoman Kerja/Piagam Direksi

Bank Muamalat telah memiliki Pedoman dan tata tertib kerja bagi Direksi berupa Board Manual Bank Muamalat No CPL.KBJ.013.2016 yang bertujuan untuk mempermudah Direksi dalam memahami peraturan-peraturan yang terkait dengan pelaksanaan fungsi dan tanggung jawabnya. Board Manual disusun berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum korporasi, peraturan perundang-undangan yang berlaku, arahan Pemegang Saham dan ketentuan Anggaran Dasar yang mengatur tata kerja Direksi. Board Manual merupakan hasil kodifikasi dari berbagai peraturan yang berlaku di Bank Muamalat dan praktik-praktik terbaik (best practices) Good Corporate Governance yang mengatur hal sebagai berikut:

1. Fungsi,
2. Komposisi dan Persyaratan,
3. Pengangkatan dan Masa Jabatan,
4. Pengunduran Diri dan Pemberhentian,
5. Program Orientasi dan Peningkatan Kapabilitas,
6. Independensi (Kemandirian) Direksi,
7. Etika Jabatan,
8. Tugas dan Kewajiban Direksi,
9. Hak dan Wewenang Direksi,
10. Penetapan Kebijakan Pengurusan Perusahaan oleh Direksi,
11. Pendelegasian Wewenang di antara Direktur Perusahaan,
12. Pembagian Tugas Direksi,
13. Rapat Direksi,
14. Komite-Komite Direksi,
15. Hubungan Kerja,
16. Hubungan Dengan Profesi Pasar Modal dan
17. Penggunaan Saran Profesional.

Kriteria Direksi

Persyaratan bagi calon anggota Direksi Bank Muamalat Indonesia antara lain sebagai berikut:

1. **Persyaratan Integritas**
   a. mempunyai akhlak dan moral yang baik;
   b. cakap melakukan perbuatan hukum;

transaction or in a number of stand-alone transactions or related to one another that occur in 1 (one) financial year.

6. *Buy or release the Company's shares in other companies.*
7. *Take legal actions or strategic transactions that can materially affect the Company's business continuity in accordance with applicable capital market regulations, the type of legal action or transaction from time to time will be determined by the Board of Commissioners.*

Board Manual/Charter of Board of Directors

Bank Muamalat has had a work guideline and code of conduct for The Board of Directors is a Board Manual of Bank Muamalat No CPL. KBJ.013.2016which aims to facilitate the Directors in understanding regulations relating to the implementation of functions and its responsibilities. The Board Manual is prepared based on the principles of corporate law, statutory regulation applies, the direction of the Shareholders and the provisions of the Articles of Association governing the work procedures of the Directors. Board Manual is the result modification of various regulations that apply in Bank Muamalat and best practices Good Corporate Governance which regulates the following:

1. *Function,*
2. *Composition and Requirements,*
3. *Appointment and Tenure,*
4. *Resignation and Dismissal,*
5. *Orientation and Capability Improvement Program,*
6. *Independence of the Directors,*
7. *Ethics Position,*
8. *Duties and Obligations of Directors,*
9. *Rights and Authorities of Directors,*
10. *Determination of Company Management Policies by the Directors,*
11. *Delegation of Authority among Company Directors,*
12. *Distribution of Duties of Directors,*
13. *Directors' Meetings,*
14. *Directors' Committees,*
15. *Employment Relations,*
16. *Relationship with Capital Market Professionals, and*
17. *Use of Professional Suggestions.*

Criteria of Board of Directors

The requirements for prospective members of the Board of Directors of Bank Muamalat Indonesia are as follows:

1. ***Integrity Requirements***
   a. Have good character and morals;
   b. Capable of carrying out legal actions;

c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat, tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang:
   i. pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
   ii. pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
   iii. pernah menyebabkan perseroan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan;

d. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana asal yang disebut dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;

e. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;

f. memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank Syariah yang sehat;

g. Tidak pernah secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam perbuatan rekayasa dan praktik-praktik menyimpang, cedera janji serta perbuatan lain yang merugikan Perseroan di mana yang bersangkutan bekerja atau pernah bekerja;dan

h. Tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus (DTL).

2. **Kompetensi**
   a. memiliki pengetahuan dan pemahaman di bidang operasional perbankan syariah yang cukup;
   b. memiliki pengalaman dan keahlian di bidang operasional perbankan, perbankan syariah, bidang keuangan atau keuangan syariah;
   c. memiliki kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank yang sehat dan tangguh; dan
   d. Memiliki pengetahuan dan pemahaman dalam penerapan manajemen risiko.

3. **Reputasi Keuangan**
   a. tidak memiliki kredit/pembiayaan macet;dan
   b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah yang menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

c. In the 5 (five) years prior to his appointment and during his tenure, s/he was never a member of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners who:
   i. never held an annual GMS;
   ii. his responsibilities as a member of the Board of Directors and/or member of the Board of Commissioners have never been accepted by the GMS or have not provided accountability as a member of the Board of Directors and/or member of the Board of Commissioners to the GMS; and
   iii. has caused the company that obtained a permit, approval, or registration from the Financial Services Authority not to fulfil the obligation to submit annual reports and/or financial reports to the Financial Services Authority;

d. have never been convicted of being proven to have committed an original criminal offense referred to in Law Number 8 of 2010 concerning Criminal Acts of Money Laundering, a crime which is detrimental to the country's finances and/or related to the financial sector, within 20 (twenty) years last before being nominated;

e. have a commitment to comply with laws and regulations;

f. have a commitment to the development of healthy operations of Islamic Banks;

g. have never been directly or indirectly involved in acts of engineering and deviant practices, broken promises and other actions that have harmed the Company where the person concerned worked or had worked; and

h. have not listed in the Disqualified List (DTL).

*2. **Competence***
   a. have sufficient knowledge and understanding in the field of Islamic banking operations;
   b. have experience and expertise in banking, sharia banking, sharia finance or finance;
   c. have the ability to conduct strategic management within the framework of developing a healthy and resilient Bank; and
   d. have knowledge and understanding in applying risk management.

*3. **Financial Reputation***
   a. do not have bad credit/financing; and
   b. have never been declared bankrupt or been a member of the Board of Directors and/or Board of Commissioners that was found guilty of causing a company to be declared bankrupt, within the last 5 (five) years before being nominated.

Masa Jabatan Direksi

Direksi diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal RUPS pengangkatan Direksi dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (kelima) setelah tanggal pengangkatan, namun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk sewaktu-waktu memberhentikan Direksi sebelum masa jabatannya berakhir, sesuai dengan prosedur sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar/RUPS dan UU Perseroan Terbatas.

Pada setiap waktu Dewan Komisaris berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris berhak memberhentikan untuk sementara waktu anggota Direksi dari jabatannya dengan menyebutkan alasannya.
Jabatan Direktur akan berakhir, jika anggota Direksi yang bersangkutan:

1. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
2. mengundurkan diri;
3. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. meninggal dunia; atau
5. masa jabatannya berakhir.

Setelah masa jabatannya berakhir, anggota Direksi dapat diangkat kembali oleh RUPS, dengan ketentuan :

1. masa jabatan Direktur Utama dibatasi hanya 2 (dua) kali masa jabatan sebagai Direktur Utama;
2. masa jabatan anggota Direksi (selain Direktur Utama) dibatasi maksimal 2 (dua) kali masa jabatan, kecuali apabila yang bersangkutan diangkat menjadi Direktur Utama, maka masa jabatannya hanya 1 (satu) kali masa jabatan.

Terms of Office of Board of Directors

The Board of Directors is appointed for a period from the date of the GMS to the appointment of the Board of Directors and ends at the close of the 5th (fifth) Annual GMS after the date of appointment, but without prejudice to the right of the GMS to dismiss the Directors at any time before their term of office expires, in accordance with procedures as determined in the Articles of Association/GMS and Limited Liability Companies Law.

At any time, the Board of Commissioners based on the decision of the Board of Commissioners' Meeting has the right to temporarily dismiss a member of the Board of Directors from his position by stating the reasons. The Director position will end, if the member of the Board of Directors concerned:

1. *dismissed based on GMS decision;*
2. *resign;*
3. *no longer fulfil the requirements as a member of the Board of Directors based on the provisions of the Articles of Association and applicable laws and regulations;*
4. *pass away; or*
5. *his term of office is over.*

After the term of office has ended, members of the Board of Directors may be reappointed by the GMS, provided that:

1. *the term of office of the President Director is limited to only 2 (two) times the term of office as President Director;*
2. *the term of office of members of the Board of Directors (other than the President Director) is limited to a maximum of 2 (two) terms of office, unless the person concerned is appointed President Director, then the term of office is only 1 (one) term of office.*

Susunan Keanggotaan dan Dasar Pengangkatan Direksi

Pengangkatan anggota Direksi dilakukan oleh RUPS dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi. Para Direktur diangkat oleh RUPS dari calon atau calon-calon yang diajukan oleh pemegang saham dan/atau kuasanya yang mewakili sekurang-kurangnya 1/10 (satu per sepuluh) dari jumlah seluruh saham Perseroan yang ditempatkan dengan hak suara yang sah dan pencalonan tersebut mengikat bagi RUPS.

Terhadap individu yang dicalonkan sebagai calon Direktur, maka kepada yang bersangkutan dilakukan proses penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang dilaksanakan oleh OJK. Direksi dinyatakan efektif ketika sudah mendapat persetujuan atau dinyatakan lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (PKK) oleh OJK.

Membership Composition and Basis for Appointment of Board of Directors

The appointment of members of the Board of Directors is carried out by the GMS with due regard to the recommendations of the Remuneration and Nomination Committee. Directors are appointed by the GMS from candidates or nominees submitted by shareholders and/or their attorneys representing at least 1/10 (one tenth) of the total number of shares of the Company that are placed with valid voting rights and the nomination is binding for AGM.

With regard to individuals nominated as candidates for Director, a fit and proper test will be conducted to the relevant party conducted by the OJK. The Board of Directors is declared effective when it has been approved or passed the fit and proper test by the FSA.

Bank telah memenuhi komposisi jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan yang mengatur bahwa jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang 3 (tiga) orang, setiap Direksi wajib berdomisili di Indonesia dan Bank wajib memiliki 1 (satu) orang Direktur Kepatuhan yang diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Direktur Utama berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali.

The Bank has complied with the composition of the number of members of the Board of Directors in accordance with the provisions stipulating that the number of members of the Board of Commissioners is at least 3 (three) people, each Board of Directors must be domiciled in Indonesia and the Bank must have 1 (one) Compliance Director appointed by the General Meeting of Shareholders. The President Director is from an independent party to the controlling shareholder.

Seluruh anggota Direksi Bank Muamalat telah dinyatakan lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (PKK) oleh OJK. Berikut ini adalah struktur keanggotaan dan dasar pengangkatan Direksi Bank Muamalat:

All members of the Board of Directors of Bank Muamalat have been declared to have passed the fit and proper test by the FSA. The following is the membership structure and basis for appointing Muamalat Directors Indonesia:

Nama *Name*	Jabatan *Position*	RUPS Pengangkatan *GMS Appointment*	Persetujuan OJK *FSA Approval*	Tanggal Efektif *Effective Date*	Pengangkatan Kembali *Reappointment*
Achmad Kusna Permana	Direktur Utama *President Director*	RUPS Luar Biasa 20 Sept 2017 *Extraordinary GMS on Sep 20, 2017*	No. Kep-32/D.03/2018 tanggal 27 Feb 2018 *No. Kep-32/D.03/2018 dated Feb 27, 2018*	27 Feb 2018 *Feb 27, 2018*	17 Mei 2019 *May 17, 2019*
Hery Syafril	Direktur Keuangan *Finance Director*	RUPS Luar Biasa 7 Sept 2015 *Extraordinary GMS on Sep 7, 2015*	No. Kep-9/D.03/2018 tanggal 21 Mar 2016 *No. Kep-9/D.03/2018 dated Mar 21, 2016*	21 Mar 2016 *Mar 21, 2016*	17 Mei 2019 *May 17, 2019*
Andri Donny	Direktur Kepatuhan *Compliance Director*	RUPS Tahunan 29 Jun 2016 *Annual GMS on Jun 29, 2016*	No. Kep-24/D.03/2018 tanggal 29 Jun 2016 *No. Kep-24/D.03/2018 dated Jun 29, 2016*	29 Jun 2016 *Jun 29, 2016*	17 Mei 2019 *May 17, 2019*
Purnomo Budiwibowo Soetadi	Direktur Bisnis Ritel *Retail Business Director*	RUPS Luar Biasa 7 Sept 2015 *Extraordinary GMS on Sep 7, 2015*	No. Kep-10/D.03/2018 tanggal 21 Mar 2016 *No. Kep-10/D.03/2018 dated Mar 21, 2016*	21 Mar 2016 *Mar 21, 2016*	17 Mei 2019 *May 17, 2019*
Awaldi	Direktur Operasi *Operation Director*	RUPS Luar Biasa 23 Mei 2016 *Extraordinary GMS on May 23, 2016*	No. Kep-32/D.03/2018 tanggal 24 Mar 2017 *No. Kep-32/D.03/2018 dated Mar 24, 2017*	24 Mar 2017 *Mar 24, 2017*	17 Mei 2019 *May 17, 2019*
Avianto Istihardjo*	Direktur Risiko *Risk Director*	RUPS Tahunan 17 Mei 2019 *Annual GMS on May 17, 2019*	No. Kep-9/D.03/2020 tanggal 13 Jan 2020 *No. Kep-9/D.03/2020 dated Jan 13, 2020*	13 Jan 2020 *Jan 13, 2020*	-

*Telah dinyatakan Lulus PKK oleh OJK tanggal 13 Januari 2020
**Have passed the Fit and Proper Test by FSA dated on January 13, 2020*

Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab Masing-Masing Direksi

Pembagian tugas dan wewenang pengurus di antara anggota Direksi dalam batas yang ditentukan dalam Peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar, Keputusan RUPS atau Keputusan rapat Direksi.

Direksi dapat melakukan pembagian tugas dan wewenang di antara anggota Direksi yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS, tetapi dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka penetapan dapat berdasarkan keputusan rapat Direksi.

Duties and Responsibilities Distribution for each Board of Directors

Distribution of duties and authority of management among members of the Board of Directors within the limits specified in the legislation applicable, Articles of Association, Resolutions of the General Meeting of Shareholders or Meeting Resolution of Directors.

Directors can do the distribution of duties and authority in between members of the Board of Directors determined based on the resolution of the GMS, but in the event the GMS does not stipulate, the determination can be based on the decision of the Board of Directors' meeting.

Job description merupakan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab setiap Direktur.

1. Alur Pelaksanaan
   a. Direksi mengajukan usulan *Job description* Direksi
   b. Direksi memberi penjelasan atas latar belakang penyusunan Job Description
   c. Dewan Komisaris melakukan kajian dan memberi rekomendasi kepada RUPS atau memberikan persetujuan bila telah mendapat pelimpahan wewenang dari RUPS
2. Keluaran Hasil
   a. *Job description* Direksi
   b. Rekomendasi Dewan Komisaris kepada RUPS atau Persetujuan wewenang RUPS kepada Dewan Komisaris
   c. Keputusan RUPS atau Keputusan Dewan Komisaris tentang pengesahan *Job description* Direksi

Job description is the division of tasks, authority and the responsibilities of each Director.

1. *Implementation Flow*
   a. *Directors submit proposals for Job Description of the Directors*
   b. *The Board of Directors provides an explanation of the background of the Job Description preparation*
   c. *The Board of Commissioners conducts studies and gives recommendations to the GMS or giving approval if has been delegated authority from the GMS*
2. *Output Results*
   a. *Job Description of the Directors*
   b. *Board of Commissioners' recommendations to the GMS or Approval authority of the GMS to the Board of Commissioners*
   c. *Resolutions of the GMS or the Decision of the Board of Commissioners concerning ratification of the Directors' Job Description*

Kepemilikan Saham Direksi

Di dalam Peraturan Bank Indonesia No. 11/3/PBI/2009 Tentang Bank Umum Syariah Pasal 29 ayat 3 disebutkan bahwa Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada perusahaan lain.

Berikut adalah tabel pengungkapan kepemilikan saham oleh Direksi Bank Muamalat pada tahun 2019:

Share Ownership of Board of Directors

In Bank Indonesia Regulation No. 11/3/PBI/2009 concerning Sharia Commercial Banks Article 29 paragraph 3 states that: Members of the Board of Directors, individually or jointly, are prohibited from owning shares of more than 25% (twenty-five percent) of paid up capital in other companies.

The following is a table of disclosure of share ownership by the Board of Directors of Bank Muamalat in 2019:

Nama *Name*	Jabatan *Position*	Kepemilikan Saham (Lembar Saham) *Share Ownership (Share)*			
		Bank Muamalat Indonesia	Bank Lain *Other Banks*	LJK - Non Bank	Perusahaan Lain *Other Companies*
Achmad Kusna Permana	Direktur Utama *President Director*	-	-	-	-
Hery Syafril	Direktur Keuangan *Finance Director*	-	-	-	-
Andri Donny	Direktur Kepatuhan *Compliance Director*	Seri A : 14.545 Seri B : 870	-	-	-
Purnomo Budiwibowo Soetadi	Direktur Bisnis Ritel *Retail Business Director*	-	-	-	-
Awaldi	Direktur Operasi *Operation Director*	-	-	-	-
Avianto Istihardjo	Direktur Risiko *Risk Director*	-	-	-	-

Rangkap Jabatan Direksi

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 11/3/PBI/2009 Tentang Bank Umum Syariah Pasal 29 ayat 1 disebutkan bahwa Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan dan/ atau lembaga lain. Larangan tersebut dikecualikan apabila:

1. Direksi yang bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan pada perusahaan anak Bank, menjalankan tugas fungsional menjadi anggota Dewan Komisaris pada perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank; dan/atau
2. Direksi menduduki jabatan pada 2 (dua) lembaga nirlaba.

Tabel berikut menjelaskan rangkap jabatan untuk Direksi Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2019:

Concurrent Position of Board of Directors

Base on of Bank Indonesia Regulation No. 11/3/PBI/2009 concerning Sharia Commercial Banks Article 29 paragraph 1 states that: Members of the Board of Directors are prohibited from holding concurrent positions as members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or Executive Officers at other banks, companies and/or institutions. The prohibition is excluded if:

1. *Directors responsible for supervision of participation subsidiary of Bank, functional performing their duties as a member of The board of Commissioners to subsidiary of a non-bank controlled by Bank; and/ or*
2. *Directors occupy position in 2 (two) non-profit institutions.*

The following table explains the concurrent positions for Directors of Bank Muamalat Indonesia in 2019:

Nama *Name*	Jabatan *Posiiton*	Jabatan Pada Perusahaan/ Instansi Lain *Position in Oher Companies/ Institututions*	Nama Perusahaan/ Instansi Lain *Name of Other Companies/Institutions*
Achmad Kusna Permana	Direktur Utama *President Director*	Tidak Ada *None*	-
Hery Syafril	Direktur Keuangan *Finance Director*	Tidak Ada *None*	-
Andri Donny	Direktur Kepatuhan *Compliance Director*	Tidak Ada *None*	-
Purnomo Budiwibowo Soetadi *)	Direktur Bisnis Ritel *Retail Business Director*	Komisaris *Commissioner*	PT Al Ijarah Indonesia Finance
Awaldi	Direktur Operasi *Operation Director*	Tidak Ada *None*	-
Avianto Istihardjo	Direktur Risiko *Risk Director*	Tidak Ada *None*	-

*)Pengunduran diri dari jabatan anggota Komisaris ALIF telah ditetapkan melalui RUPS ALIF pada tanggal 16 Agustus 2019
)Resignantion from the Member of ALIF Commissioner has been determined by ALIF GMS on August 16, 2019

Hubungan Afiliasi Direksi

Direksi ditetapkan untuk menjalankan segala tindakan pengurusan Perseroan atau hubungan dengan pihak lain secara independen tanpa campur tangan pihak-pihak lain atau yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan yang secara material dapat mengganggu keobjektifan dan kemandirian tugas Direksi yang dijalankan semata-mata untuk kepentingan Perusahaan.

Tidak terdapat hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham dan keluarga antar anggota Direksi, anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Pengendali, sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Direksi mampu bertindak secara independen. Berikut ini adalah tabel hubungan keluarga dan hubungan keuangan Direksi dengan Dewan Komisaris,

Affiliation Relation of Board of Directors

The Board of Directors is determined to carry out all management actions of the Company or relations with other parties independently without interference from other parties or contrary to the laws and regulations and the Company's Articles of Association which can materially interfere with the objectivity and independence of the duties of the Board of Directors which are carried out solely for Company interests.

There is no financial relationship, management relationship, share ownership and family relationship between members of the Board of Directors, members of the Board of Directors with members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors with Controlling Shareholders, so that in carrying out their duties and responsibilities the Board of Directors is able to act independently. The following is a table of family relationships and financial relationships of the Directors with the

anggota Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Perusahaan.

Berdasarkan pada Peraturan Bank Indonesia No. 11/3/PBI/2009 juga mengatur tentang larangan memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Direksi dengan anggota Direksi, Pemegang Saham Pengendali dan anggota Direksi lainnya periode 2019 dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini:

Board of Commissioners, other members of the Board of Directors and/or the Controlling Shareholders of the Company.

Based on Bank Indonesia Regulation No. 11/3/PBI/2009 also regulates the prohibition on having family relations up to the second degree with fellow members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners. The affiliation relationship between members of the Board of Directors with members of the Board of Directors, Controlling Shareholders and other members of the Board of Directors in 2019 can be seen as the table below:

Nama *Name*	Jabatan *Position*	Hubungan Keuangan dengan *Financial Relation with*						Hubungan Keluarga dengan *Family Relation with*						Hubungan Kepengurusan *Management Relation*	
		Dewan Komisaris *Board of Commissioners*		Direksi *Board of Directors*		Pemegang Saham *Shareholders*		Dewan Komisaris *Board of Commissioners*		Direksi *Board of Directors*		Pemegang Saham *Shareholders*			
		Ya *Yes*	Tidak *No*	Ya *Yes*	Tidak *No*	Ya *Yes*	Tidak *No*	Ya *Yes*	Tidak *No*	Ya *Yes*	Tidak *No*	Ya *Yes*	Tidak *No*	Ya *Yes*	Tidak *No*
Achmad Kusna Permana	Direktur Utama *President Director*		√		√		√		√		√		√		√
Hery Syafril	Direktur Keuangan *Finance Director*		√		√		√		√		√		√		√
Andri Donny	Direktur Kepatuhan *Compliance Director*		√		√		√		√		√		√		√
Purnomo Budiwibowo Soetadi	Direktur Bisnis Ritel *Retail Business Director*		√		√		√		√		√		√		√
Awaldi	Direktur Operasi *Operation Director*		√		√		√		√		√		√		√
Avianto Istihardjo	Direktur Risiko *Risk Director*		√		√		√		√		√		√		√

Pengelolaan Benturan Kepentingan Direksi

Di dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 Pasal 61, dijelaskan bahwa bila terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif dilarang mengambil tindakan yang dapat mengurangi aset atau mengurangi keuntungan BUS dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan. Oleh karenanya anggota Direksi hendaknya senantiasa harus:

Conflict of Interest Management of Board of Directors

In Bank Indonesia Regulation Number 11/33/PBI/2009 Article 61, it is explained that if there is a conflict of interest, a member of the BoardCommissioners, members of the Board of Directors and Executive Officers are prohibited from taking actions that can reduce assets or reduce profits BUS and must disclose conflicts of interest in each decision. Therefore, members of the Board of Directors should always should:

1. Mengutamakan kepentingan Perseroan dan tidak mengurangi keuangan Perseroan dalam hal terjadi benturan kepentingan.
2. Menghindari diri dari pengambilan keputusan dalam situasi dan kondisi adanya benturan kepentingan.
3. Melakukan pengungkapan hubungan kekeluargaan, hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan dengan anggota Komisaris lain dan/atau anggota Direksi dan/ atau pemegang saham pengendali Bank dan/ atau pihak lainnya dalam rangka bisnis Perseroan.
4. Melakukan pengungkapan dalam hal pengambilan keputusan tetap harus diambil pada kondisi adanya benturan kepentingan.

Program Orientasi/Pengenalan Direksi Baru

Program Orientasi sangat penting untuk dilaksanakan, karena Direktur dapat berasal dari berbagai latar belakang, sehingga untuk dapat membentuk suatu tim kerja yang solid, Program Orientasi tersebut wajib untuk dijalankan. Ketentuan tentang program Orientasi meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Direktur yang baru pertama kali menjabat wajib diberikan Program Orientasi mengenai BMI.
2. Direktur Utama bertanggungjawab untuk mengadakan program Orientasi atau jika Direktur Utama berhalangan maka tanggung jawab pelaksanaan program Orientasi berada pada Komisaris Utama atau Direktur yang ada.
3. Program Orientasi Direktur, antara lain meliputi hal-hal sebagai berikut:
   a. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi berdasarkan hukum.
   b. Penjelasan mengenai produk-produk jasa perbankan BMI.
   c. Pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* oleh BMI.
   d. Gambaran mengenai PT Bank Muamalat Indonesia Tbk berkaitan dengan tujuan, sifat, lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan masalah-masalah strategis lainnya.
   e. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal serta komite audit.
   f. Penjelasan mengenai kewajiban, tugas, tanggung jawab dan hak-hak Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Direksi.
   g. *Team building*. Dalam kegiatan ini menyertakan Direksi, baik yang baru menjabat maupun yang pernah menjabat sebelumnya.

Program Orientasi yang diberikan dapat berupa presentasi, pertemuan atau kunjungan ke fasilitas BMI, perkenalan dengan para Karyawan Senior dan para Karyawan BMI serta program lainnya. Pada tahun 2019, Bank Muamalat telah mengangkat seorang anggota

1. *Prioritising the interests of the Company and not reducing the Company's finances in the event of a conflict of interest.*
2. *Avoiding making decisions in situations and conditions of conflict of interest.*
3. *Disclosing family relations, financial relationships, management relationships, ownership relationships with other Commissioners and/or members of the Board of Directors and/or controlling shareholders of the Bank and/or other parties in the framework of the Company's business.*
4. *Conducting disclosure in terms of decision making must still be taken on the condition of a conflict of interest.*

Orientation Program for the New Board of Directors

The Orientation Program is very important to carry out, because the Director can come from various backgrounds, so to be able to form a solid work team, the Orientation Program is mandatory to run. Provisions regarding the Orientation program include the following:

1. *The New member of Director must be given the Orientation Program regarding BMI.*
2. *The President Director is responsible for organizing the Orientation program or if the President Director is absent then the responsibility for implementing the Orientation program rests with the President Commissioner or the existing Director.*
3. *The Director Orientation Program includes, among others, the following:*
   a. *Information regarding the duties and responsibilities of the Board of Commissioners and Directors based on law.*
   b. *A description of BMI's banking services products.*
   c. *Implementation of Good Corporate Governance principles by BMI.*
   d. *The description of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk relates to the objectives, nature, scope of activities, financial and operating performance, strategies, short-term and long-term business plans, competitive positions, risks and other strategic issues.*
   e. *Information relating to delegated authority, internal and external audit, internal control systems and policies and the audit committee.*
   f. *Explanation of the obligations, duties, responsibilities and rights of the Sharia Supervisory Board, Board of Commissioners and Directors.*
   g. *Team building. In this activity included the Directors, both those who have recently served and who have previously served.*

The Orientation Program provided can be in the form of presentations, meetings or visits to BMI facilities, introductions to Senior Employees and BMI Employees and other programs. In 2019, Bank Muamalat appointed a new member of the Board of Directors, Mr Avianto

Direksi baru yaitu Bapak Avianto Istihardjo sebagai Direktur Risiko yang diangkat melalui RUPS Tahunan tanggal 17 Mei 2019. Direktur baru tersebut telah dilaksanakan program orientasi atau pengenalan kepada perusahaan.

Istihardjo as Risk Director who was appointed through the Annual General Meeting of Shareholders on May 17, 2019. The new Director had carried out an orientation or introduction program to the Company.

Sertifikasi Manajemen Risiko

Risk Management Certification

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 11/19/PBI/2009 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum, Dewan Komisaris dan Direksi wajib memiliki Sertifikat Manajemen Risiko yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi, dengan klasifikasi sebagai berikut:

As regulated in Bank Indonesia Regulation No. 11/19/PBI/2009 concerning Risk Management Certification for Management and Officers of Commercial Banks, Board of Commissioners and Directors must have a Risk Management Certificate issued by a Professional Certification Agency, with the following classification:

Jabatan *Position*	Level *Level*	Masa berlaku *Validity period*
Dewan Komisaris *Board of Commissioners*	1 (satu) *1 (satu)*	4 (empat) tahun *4 years*
Komisaris Independen *Independent Commisisoner*	2 (dua) *2 (dua)*	4 (empat) tahun *4 years*
Direktur Utama dan Direktur dengan aset di atas 10 T *President Director and Director with assets of above 10 trillion*	5 (lima)	2 (dua) tahun *2 years*

Dalam hal masa berlaku sertifikasi tersebut telah habis, maka wajib dilakukan Program Pemeliharaan *(Refreshment)* secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 4 (empat) tahun untuk tingkat 1 dan 2; atau 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun untuk tingkat 3, 4 dan 5.

The validity period of the certification has expired, it must be carried out a Maintenance Program (Refreshment) periodically at least 1 (one) time in 4 (four) years for levels 1 and 2; or 1 (one) time in 2 (two) years for levels 3, 4 and 5.

Tabel berikut menjabarkan mengenai sertifikasi manajemen risiko yang dimiliki oleh Direksi BMI:

The following table describes risk management certification owned by BMI Directors:

Nama *Name*	Jabatan *Posiiton*	Level Sertifikasi *Certification Level*	Bidang *Field*	Lembaga yang Mengeluarkan Sertifikasi *Institutions Issuing the Certification*	Tanggal Dikeluarkan *Issuance Date*	Tanggal Kadaluarsa *Expiration Date*
Achmad Kusna Permana	Direktur Utama *President Director*	5	Risk Management Certification	LSPP	9 Sep 2013 *Sep 9, 2013*	9 Sep 2021 *Sep 9, 2021*
Hery Syafril	Direktur Keuangan *Finance Director*	5	Risk Management Certification	LSPP	22 Mar 2014 *Mar 22, 2014*	22 Mar 2020 *Mar 22, 2020*
Andri Donny	Direktur Kepatuhan *Compliance Director*	5	Risk Management Certification	LSPP	24 Mei 2014 *May 24, 2014*	24 Mei 2020 *May 24, 2020*
Purnomo Budiwibowo Soetadi	Direktur Bisnis Ritel *Retail Business Director*	5	Risk Management Certification	LSPP	21 Nov 2015 *Nov 21, 2015*	21 Aug 2021 *Aug 21, 2021*
Awaldi	Direktur Operasi *Operation Director*	5	Risk Management Certification	LSPP	30 Jun 2016 *Jun 30, 2016*	30 Jun 2020 *Jun 30, 2020*
Avianto Istihardjo	Direktur Risiko *Risk Director*	5	Risk Management Certification	LSPP	19 Mei 2018 *May 19, 2018*	19 Mei 2020 *May 19, 2020*

Program Pengembangan Kompetensi Direksi

Dalam rangka meningkatkan kompetensi, sepanjang tahun 2019 Direksi telah mengikuti berbagai pelatihan yang secara rinci disampaikan dalam bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Directors Competency Development Program

In order to improve competence, throughout 2019, the Board of Directors has attended various training and detailed programs delivered in the Company Profile chapter in this Annual Report

Mekanisme Pengunduran Diri dan Pemberhentian Direksi

Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sebelum pengunduran diri dimaksud. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan anggota Direksi tersebut dalam jangka waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal diterimanya permohonan pengunduran diri.

Anggota Direksi yang mengundurkan diri tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai Direktur sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal disetujuinya pengunduran diri. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah:

1. diterimanya permohonan pengunduran diri anggota Direksi; dan
2. hasil penyelenggaraan RUPS.

   RUPS dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang Direktur yang diberhentikan dari jabatannya dan RUPS dapat mengangkat seseorang sebagai Direktur untuk mengisi suatu lowongan. Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan Direktur yang berhenti secara demikian atau untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari Direktur yag diberhentikan/digantikan tersebut

Direksi wajib memberitahukan perubahan susunan dan nama anggota Direksi kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar perseroan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS atau keputusan yang mengikat diluar RUPS.

Resignation and Dismissal Mechanisms of Board of Directors

Members of the Board of Directors are entitled to resign from their positions by giving written notice to the Company within 90 (ninety) days prior to the resignation. The Company is required to hold a GMS to decide on the application for the members of the Board of Directors within a period of no later than 90 (ninety) days from the date of receipt of the resignation request.

Any member of the Board of Directors who resigns can still be held responsible as a Director from the appointment of the person concerned until the date of resignation. The Company is required to disclose information to the public and submit it to the Financial Services Authority no later than 2 (two) working days after:

1. *receipt of applications for resignation of members of the Board of Directors; and*
2. *the results of the GMS.*

   The GMS can appoint another person to fill the position of a Director who was dismissed from his position and the GMS can appoint someone as a Director to fill a vacancy. The term of office of a person appointed to replace such Director who resigns or to fill the vacancy is the remaining term of office of the Director who was dismissed/replaced.

The Board of Directors must notify the changes in the composition and name of the members of the Board of Directors to the Minister to be recorded in the company register within 30 (thirty) days from the date of the GMS decision or binding decision outside the GMS.

Penilaian Kinerja Komite yang Berada di bawah Direksi

Direksi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat membentuk komite-komite yang pembentukannya dilakukan berdasarkan surat keputusan direksi disertai tugas dan tanggung jawab masing-masing komite. Selanjutnya tugas dan tanggung jawab komite-komite tersebut secara rinci diatur dalam Piagam *(Charter)* Komite level Direksi Bank Muamalat.

Direksi Bank Muamalat telah membentuk komite-komite meliputi Komite Pengarah Teknologi Informasi, Komite Manajemen Risiko (Risk

Performance Assessment of Committees under the Directors

The Board of Directors in carrying out its duties and functions is allowed to form committees whose formation is carried out based on a decision of the board of directors accompanied by the duties and responsibilities of each committee. Furthermore, the duties and responsibilities of these committees are detailed in the Charter of the Bank Muamalat Indonesia Directors' Committees.

The Board of Directors of Bank Muamalat Indonesia has formed committees including the Information Technology Steering Committee,

Management Committee), Komite Aset dan Kewajiban dan Komite Sumber Daya Manusia. Selama periode 2019 Komite-komite yang berada di bawah Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.

Penilaian Kinerja Direksi

Penilaian kinerja Direksi dilakukan oleh Pemegang Saham dalam RUPS Tahunan pada saat penyampaian laporan Tahunan Perseroan, di mana berdasarkan laporan tersebut RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) Kepada Direksi atas tindakan pengelolaan Perseroan yang dilakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada akhir tahun.

Prosedur Pelaksanaan Penilaian Self Assessment Kinerja Direksi

Pelaksanaan Self-Assessment GCG untuk kinerja Direksi yaitu melalui pengisian kertas kerja yang berisikan kriteria/indikator pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kriteria Evaluasi Kinerja Direksi

Penilaian kinerja Direksi juga dilakukan melalui Self Assessment GCG dilaksanakan setiap semester dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Kriteria Self Assessment Direksi terkait pelaksanaan GCG Dierksi dibagi menjadi 3 (tiga) aspek yaitu Governance Structure, Governance Process dan Governance Outcome. Governance structure terdiri dari 15 indikator, Governance Process terdiri dari 15 indikator sedangkan Governance Outcome terdiri dari 14 indikator.

Pihak yang Melakukan Assessment

Direksi melakukan penilaian atas kinerja Direksi selama tahun 2019 secara mandiri *(self assessment)* dibantu oleh fungsi terkait.

Hasil Penilaian Kinerja Direksi

Berdasarkan hasil *self-assessment* yang telah dilaksanakan pada Semester I dan II tahun 2019 dapat disampaikan Faktor-faktor positif aspek Governance Structure, Governance Process dan Governance Outcome yang ada pada Direksi yaitu:

1. Seluruh anggota Direksi telah lulus fit and proper test atau Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK) dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
2. Komposisi anggota Direksi Bank Muamalat telah sesuai dengan ketentuan.
3. Anggota Direksi Bank Muamalat memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta mampu mengimplementasikan

the Risk Management Committee, the Asset and Liability Committee and Human Resources Committee. During 2019, the Committees under the Board of Directors carried out their duties and responsibilities well.

Directors Performance Evaluation Criteria

The performance evaluation of the Directors is carried out by the Shareholders in Annual GMS at the time of submission of the Company's Annual report, based on the report the GMS paid off and release of full responsibility (volledig acquit et de charge) To the Board of Directors for management actions of the Company carried out in the Fiscal Year which ends at the end of the year.

Procedure for Implementing Self-Assessment Directors Performance

The implementation of GCG Self-Assessment for Directors' performance, namely through the filling of working papers containing the implementation criteria/indicators duties and responsibilities of the Directors in accordance with the applicable provisions.

Directors Performance Evaluation Criteria

The performance evaluation of the Directors is also carried out through GCG Self Assessment held every semester and reported to the Service Authority Finance. Directors Self Assessment Criteria related to GCG implementation Dierksi is divided into 3 (three) aspects, namely Governance Structure, Governance Process and Governance Outcome. Governance structure consists of 15 indicators, the Governance Process consists of 15 indicators while the Governance Outcome consists of 14 indicators.

The Party Conducting the Assessment

The Board of Directors assesses the performance of the Directors in 2019 independently (self assessment) assisted by related functions. Directors

Results of the Directors Performance Assessment

Performance Assessment Results Based on the results of the self-assessment carried out at Semester I and II of 2019 can be conveyed positive factors aspects of Governance Structure, Governance Process and Governance Existing outcomes for the Directors are:

1. *All members of the Board of Directors have passed the fit and proper test or Capability and Compliance Assessment (PKK) and has obtain an approval letter from the Financial Services Authority.*
2. *The composition of the Board of Directors of Bank Muamalat is in accordance with provisions.*
3. *Members of the Board of Directors of Bank Muamalat have competencies adequate and relevant to his position to carry out duties and its responsibilities and be able to implement*

kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

4. Direksi telah memiliki pedoman dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sesuai fungsinya.
5. Pengangkatan dan/atau penggantian anggota Direksi Bank Muamalat telah sesuai dengan ketentuan dan telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi.
6. Direksi Bank Muamalat telah menjalankan tugas dan fungsinya tanpa intervensi dari pemegang saham dan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah.
7. Rapat Direksi telah diselenggarakan secara rutin 1 (satu) minggu sekali.
8. Direksi secara berkesinambungan telah melakukan upaya-upaya dalam memperbaiki kinerja Bank dengan memperhatikan aspek kehati-hatian dan tata kelola yang baik.
9. Direksi telah mengungkapkan kebijakan-kebijakan Bank Muamalat yang bersifat strategis di bidang kepegawaian dan mengkomunikasikan kepada pegawai mengenai arah bisnis Bank dalam rangka pencapaian misi dan visi Bank.
10. Direksi telah melaksanakan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

the competencies they have in carrying out their tasks and its responsibilities.

4. *Directors have guidelines in carrying out their duties and its responsibilities according to its function.*
5. *Appointment and / or replacement of members of the Board of Directors Bank Muamalat has complied with the provisions and has heed the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee.*
6. *The Board of Directors of Bank Muamalat has carried out its duties and functions without intervention from shareholders and is responsible full implementation of bank management based on principles caution and sharia principles.*
7. *The Board of Directors' Meetings are held routinely for 1 (one) week once.*
8. *The Board of Directors has continuously made efforts in improving the Bank's performance by taking into account aspects prudence and good governance.*
9. *The Board of Directors has revealed the Bank's policies Strategic Muamalat in the field of staffing and communicating to employees regarding the direction of the Bank's business in order to achieve the Bank's mission and vision.*
10. *The Board of Directors has implemented the principles of Good Corporate Governance in all of the Bank's business activities throughout organization level or level.*

Kebijakan Keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi

Policy on Board of Commissoners and Board of Directors Diversity

Dalam rekomendasi Otoritas Jasa Keuangan yang tertuang dalam Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dinyatakan bahwa Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan. Keberagaman komposisi Dewan Komisaris merupakan kombinasi karakteristik baik dari segi Dewan Komisaris maupun anggota Dewan Komisaris secara individu, sesuai dengan kebutuhan Perseroan.

In the recommendation of the Financial Services Authority stated in Attachment to Financial Services Authority Circular Letter Number 32 / SEOJK.04 / 2015 concerning Guidelines for Open Corporate Governance stated that the determination of the composition of the members of the Board of Commissioners pay attention to the diversity of expertise, knowledge and experience required. The diversity of the composition of the Board Commissioners are a combination of characteristics both in terms of the Board Commissioners and members of the Board of Commissioners individually, as appropriate to the needs of the Company.

Karakteristik tersebut dapat tercermin dalam penentuan keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris Perseroan. Komposisi yang telah memperhatikan kebutuhan Perseroan merupakan suatu hal yang positif, khususnya terkait pengambilan keputusan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang lebih luas.

These characteristics can be reflected in the determination of expertise, knowledge, and experience needed in implementation supervisory duties and providing advice by the Board of Commissioners Company. Composition that has considered the needs of the Company is a positive thing, especially related to taking decisions in the context of carrying out its supervisory functions done by considering various aspects more large.

Pada periode 2019, keberagaman komposisi Dewan Komisaris Perseroan tercermin dalam pendidikan, pengalaman kerja dan usia, dapat dilihat sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

In 2019, the diversity of the composition of the Board of Commissioners The company is reflected in education, work experience and age, can be seen as in the table below:

Nama *Name*	Jabatan *Position*	Jenis Kelamin *Gender*	Usia *(tahun) Age (Year)*	Pendidikan *Education*	Pengalaman Kerja *Work Experiences*	Keahlian *Expertise*
Ilham Akbar Habibie	Komisari Utama/ Komisaris Independen *President Commissioner/ Independent Commissioner*	Pria *Male*	57	• MBA Business • Dr.Ing Tehnik • Dipl.Ing Tehnik	• Mengawasi pekerjaan Direksi agar sesuai dengan Rencana Kerja Perusahaan. • *Supervising the work of the Board of Directors in accordance with the Company's Work Plan.* • Menjalankan operasi Perusahaan agar sesuai dengan Rencana Kerja Perusahaan, termasuk membentuk dan mengawasi/ mengontrol Direksi menjalankan Rencana Kerja Perusahaan. • *Running the Company's operations to be in accordance with the Company's Work Plan, including forming and supervising Directors in running the Company workplan.*	• Ekonomi bisnis • *Business economics* • Tehnik Aeronautika • *Technic of Aeronaitica* • Teknologi Informasi • *Information Technology*

Nama *Name*	Jabatan *Position*	Jenis Kelamin *Gender*	Usia *(tahun) Age (Year)*	Pendidikan *Education*	Pengalaman Kerja *Work Experiences*	Keahlian *Expertise*
Iggi Haruman Achsien	Komisaris Independen *Independent Commissioner*	Pria *Male*	43	• S1 Ekonomi • *Bachelor of Economy* • MBA, Global Leadership Executive	• Terlibat dalam penerbitan Obligasi Syariah Mudharabah Indosat tahun 2002. • *Involved in the issuance of Indosat Mudharabah Syariah Bonds in 2002.* • Terlibat proses penerbitan Sukuk Negara tahun 2008. • *Involved in the process of issuing State Sukuk in 2008.*	• Perbankan syariah • *Syariah banking* • Pasar modal • *Capital market* • Asuransi • *Insurance*
Edy Setiadi	Komisaris Independen *Independent Commissioner*	Pria *Male*	62	• S1 Peternakan • *Bachelor of Livestock* • S2 Ekonomi Pertanian • *Magister of Livestock Economy*	• Deputi Komisioner, IKNB, OJK • *Deputy Commissioner, IKNB, OJK* • Kepala Departemen Perbankan Syariah, OJK • *Head of the Sharia Banking Department, OJK* • Direktur Eksekutif DPBS, BI • *DPBS Executive Director, BI*	• Perbankan • *Banking* • Industri Keuangan Non Bank • *Non-Bank Financial Industry*
Mohamed Hedi Mejai	Komisaris *Commissioner*	Pria *Male*	50	• S1 Ekonomi • *Bachelor of Economy* • MBA, Manajemen Strategis dan Keuangan • *MBA of Strategy Management and Finance*	• Director of the Enterprise Department, IDB • Chief Executive Officer & Board Member, Oryx Capital Ltd. (OC), Dubai, UAE • Executive Director, Investment & Business Development, IIB, Manama, Kingdom of Bahrain • Division Chief, Investment Operation and Marketing, IDB Group	• Ekonomi, Keuangan • *Financial Economics*
Abdulsalam Mohammad JoherAl-Saleh	Komisaris *Commissioner*	Pria *Male*	54	S1 Administrasi Bisnis *Bachelor of Business Administration*	• Deputy CEO, Boubyan Bank • Board Member, Boubyan Takaful Insurance • Board Member, United Capital Bank (Sudan-Khartoum) • Vice Chairman, Boubyan Capital • Regional Manager, National Bank of Abu Dhabi – Kuwait Branch • Head of Domestic Corporate Banking Division, NBK	• Perbankan • *Banking* • Asuransi • *Insurance* • Manajemen Investasi Syariah • *Sharia Investment Management*

Nama *Name*	Jabatan *Position*	Jenis Kelamin *Gender*	Usia *(tahun)* *Age* *(Year)*	Pendidikan *Education*	Pengalaman Kerja *Work Experiences*	Keahlian *Expertise*
Achmad Kusna Permana	Direktur Utama *President Director*	Pria *Male*	54	S1 Pertanian *Bachelor of Agriculture*	• Chief General Manager, PT Bank Bali Indonesia • Senior Vice President Consumer Banking Group, HSBC • Executive Vice President Head of Syariah Banking, Bank Danamon Indonesia • Director Syariah, Permata Bank	• Perbankan Syariah • *Sharia Banking* • Finance
Hery Syafril	Direktur Keuangan *Finance Director*	Pria *Male*	50	S1 Akuntansi *Bachelor of Accountant*	• Akuntan Publik, Ernst & Young • Public Accountant, Ernst & Young • Chief Financial Officer & Legal Entity Controller, JP Morgan Indonesia • Controller, Rabobank • Finance Director, PT Bank QNB Kesawan	• Perbankan • *Banking* • Akuntansi • *Accountant* • Finance • *Finance*
Andri Donny	Direktur Kepatuhan *Compliance Director*	Pria *Male*	48	S1 Geofisika & Meteorologi *Bachelor of Geophysics & Meteorology*	• Branch Manager, Bank Muamalat Indonesia • Product Development, Bank Muamalat Indonesia • Treasury, Bank Muamalat Indonesia • Assistant Director Corporate Planning, Bank Muamalat Indonesia • Pelaksana Tugas Head of Risk Management Division • Head of Finance & Strategy Division • Head of Strategic Change Management Division • Head of Strategic Planning Division	• Perbankan Syariah • *Sharia Banking* • Finance
Purnomo Budiwibowo Soetadi	Direktur Bisnis Ritel *Retail Business Director*	Pria *Male*	51	• S1 Psikologi • Master Komunikasi Bisnis • Doktor Ilmu Ekonomi	• Assistant Vice President – Branch Manager, Standard Chartered Bank • Vice President - Regional Head, Standard Chartered Bank • Senior Vice President - Pemimpin Wilayah Regional II Jawa Barat, Bank Danamon • Senior Vice President - Pemimpin Divisi Retail Banking Network Distribution, Bank Danamon • Executive Vice President – Pemimpin Divisi Customer Management & Marketing, Bank Negara Indonesia	• Perbankan • *Banking* • Finance

Nama *Name*	Jabatan *Position*	Jenis Kelamin *Gender*	Usia *(tahun) Age (Year)*	Pendidikan *Education*	Pengalaman Kerja *Work Experiences*	Keahlian *Expertise*
Awaldi	Direktur Operasi *Operations Director*	Pria *Male*	53	• S1 Psikologi • *Bachelor of Psychology* • MBA International Business	• Head of HR, Bank Niaga • Director of Commerce Leadership Institute, CIMB • Head of HR & HR Project Manager for Business Transformation, Bank Ekonomi HSBC Group • Director of Towers Watson Indonesia	• Perbankan • *Banking* • Human Capital
Avianto Istihardjo	Direktur Risiko *Risk Director*	Pria *Male*	49	• S1 Akuntansi • *Bachelor of Accountant* • Magister Manajemen – jurusan Manajemen Risiko • *Magister of Management*	• General Manager Public Sector & Corporate Credit Processing, PT Bank NISP Tbk • Vice President – Credit Risk Division Head, Bank OCBC NISP • Vice President – Global Consumer Group CitiBusiness Risk Head Citibank Indonesia • Vice President – Institutional Client Group – Local Commercial Bank, Citibank Indonesia • Senior Vice President – Head of Credit Risk Management, PT Bank Ekonomi Raharja Tbk • Head of Corporate Credit Group, DBS Bank • Executive Director – Corporate Credit Group, DBS Bank	• Perbankan • *Banking* • Manajemen Risiko • *Risk Management*

Kebijakan Remunerasi Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Direksi

Remuneration Policy of Sharia Supervisory Board, Board of Commissioners, and Directors

Bank Muamalat telah memiliki kebijakan tata kelola remunerasi yang telah diatur sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 59/POJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Kebijakan tata kelola pemberian remunerasi Bank Muamalat diatur dalam Surat Keputusan No. 50/R/DIR-KPTS/XI/2018 tentang Tata Kelola Pemberian Remunerasi PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk yang ditandatangani bersama oleh Komisaris Utama dan Direktur Utama pada tanggal 12 November 2018.

Bank Muamalat Indonesia has a remuneration management policy which has been regulated in accordance with the Financial Services Authority regulations No. 59/POJK.03/2017 concerning the Implementation of Governance in Granting Remuneration for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units. The governance policy for the provision of Bank Muamalat Indonesia remuneration is regulated in Decree No. 50/R/DIR-KPTS/XI/2018 concerning Governance Providing Remuneration for PT Bank Muamalat Indonesia Tbk signed jointly by the President Commissioner and President Director on November 12, 2018.

Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Kebijakan remunerasi bertujuan untuk mengatur proses dan pendekatan untuk menentukan remunerasi bagi seluruh Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan berdasarkan jenis pekerjaan, prestasi kerja individu, kontribusi kepada Bank, kewajaran dengan dengan peer group dalam industri Bank, serta performance dan kemampuan Bank. Hal ini juga tidak terlepas dari ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Proses pengkajian ulang remunerasi pada Bank Muamalat dilakukan setiap tahun berdasarkan: hasil analisa market dengan peer group industri Bank, kontribusi individual kepada Bank, performance serta kemampuan Bank. Termasuk menerapkan regulasi yang dikeluarkan setiap tahun terkait remunerasi seperti Upah Minimum Propinsi atau Upah Minimum Kota/Kabupaten.

Board of Commissioners and Directors Remuneration Policy

Remuneration policy aims to regulate the process and an approach to determining remuneration for all Directors, Board of Commissioners and employees based on type of work, achievement individual work, contributions to the Bank, fairness with peer groups in the Bank industry, as well as performance and capabilities Bank. This is also inseparable from the provisions and laws. applicable.

The remuneration review process at Muamalat Bank is carried out every year based on: market analysis results with peer groups Bank industry, individual contributions to the Bank, performance as well bank's ability. Including implementing regulations issued every year related to remuneration such as Provincial Minimum Wage or City/ Regency Minimum Wage.

Cakupan Kebijakan Remunerasi dan Implementasinya

Kebijakan pemberian remunerasi ditetapkan dengan mempertimbangkan terciptanya manajemen risiko yang efektif, stabilitas keuangan, kecukupan dan penguatan permodalan, kebutuhan likuiditas dan potensi pendapatan Bank serta kesesuaian dengan prinsip syariah. Yang berlaku pada seluruh unit bisnis pada kantor pusat, kantor wilayah dan kantor cabang yang berlokasi diluar negeri.

Pemberian remunerasi yang sesuai prinsip syariah dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- Pemberian remunerasi harus mempertimbangkan kewajaran dalam harga pasar di industri sejenis dan sesuai dengan kompetensi dan kinerja Karyawan
- Pemberian remunerasi pada awal karyawan bergabung harus disepakati dan tercantum dalam sebuah kontrak kerja yang menganut asas Konsensus
- Pemberian remunerasi harus didasari kesadaran bersama bahwa bekerja merupakan bagian dari mengejar ridha Allah
- Pemberian remunerasi harus mempertimbangkan beban kerja yang diberikan kepada Karyawan atau al ghunmu bil ghurmi

Remuneration Policy Coverage and Its Implementation

The remuneration policy is set with consider the creation of effective risk management, financial stability, adequacy and strengthening of capital, liquidity needs and potential of the Bank's income and suitability with sharia principles. That applies to all business units in head office, regional office and branch office located outside the country.

Providing remuneration in accordance with sharia principles by fulfilling requirements as follows:

- *Providing remuneration must consider fairness in market prices in similar industries and in accordance with Employee competencies and performance*
- *Providing remuneration at the beginning of joining employees must agreed and stated in a work contract adheres to the principle of consensus*
- *Provision of remuneration must be based on that shared awareness work is part of pursuing the pleasure of Allah*
- *Remuneration must consider workload given to employees or al Ghunmu bil Ghurmi*

Remunerasi Dikaitkan dengan Risiko

Dalam memberikan remunerasi kepada karyawan dengan mempertimbangkan potensi risiko yang akan timbul dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.

Perusahaan telah menetapkan pihak-pihak yang menjadi Material Risk Takers (MRT) berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan potensi risiko yang timbul atas suatu jabatan yang dimiliki.

Dalam hal terjadi risiko akibat keputusan yang diambil maka perusahaan berhak untuk menunda pembayaran atau tidak membayarkan remunerasi yang bersifat variabel yang belum dibayarkan kepada pihak yang telah ditetapkan sebagai MRT.

Remuneration Associated with the Risk

In providing remuneration to employees with consider the potential risks that will arise permanently pay attention to the precautionary principle.

The Company has determined the parties to become Material Risk Takers (MRT) based on certain considerations in accordance with potential risks arising from a position held.

In the event of a risk due to a decision taken then the company has the right to delay payment or not pay variable remuneration that is not yet paid to parties who have been designated as MRT.

Pengukuran Kinerja Terkait Remunerasi

Bank telah menentukan metode pengukuran kinerja individu dan jenis risiko dalam menetapkan pemberikan remunerasi sesuai skala dan kompleksitas usaha Bank.

Peninjauan remunerasi dilakukan berkala setiap tahun dengan memperhatikan kinerja individu karyawan, posisi upah terhadap struktur upah (*salary*) serta kinerja dan kemampuan Bank.

Penilaian kinerja individu ditentukan melalui target atau *Most Important Goals* (MIG) yang telah ditentukan pada awal tahun serta peninjauan pencapaian pada akhir tahun. Mekanisme ini telah diatur pada siklus Performance Management System.

Performance Measurement Regarding Remuneration

The Bank has determined the method for measuring individual performance and type of risk in determining remuneration according to scale and complexity of the Bank's business.

Remuneration reviews are conducted annually with pay attention to individual employee performance, wage position towards salary structure and the Bank's performance and capabilities.

Assessment individual performance is determined through the target or Most Important Goals (MIG) which have been determined at the beginning of the year as well review of achievements at the end of the year. This mechanism is regulated in the Performance Management System cycle.

Penyesuaian Remunerasi Dikaitkan dengan Kinerja dan Risiko

Pemberian remunerasi berdasarkan prinsip kehati-hatian baik remunerasi yang bersifat tetap maupun yang bersifat variabel. Untuk remunerasi yang bersifat variabel bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah harus mendapatkan persetujuan Komite Nominasi dan Remunerasi, sedangkan untuk karyawan penetapan remunerasi yang bersifat variabel cukup dengan persetujuan Direksi. Bagi Karyawan pada unit kerja pengawasan dilakukan sesuai dengan kinerja individu dengan tetap memperhatikan objektivitas dan independensi.

Salah satu penerapan manajemen risiko remunerasi adalah ketentuan pemberian remunerasi yang bersifat variabel kepada Material Risk Taker (MRT):

- Pembayaran bertahap dalam jangka waktu minimal 3 (tiga) tahun sejak pembayaran pertama

Adjustment of Remuneration Associated with Performance and Risk

Provision of remuneration based on the principle of good prudence remuneration that is both permanent and variable. For variable remuneration for members of the Board of Directors, the Board Commissioners have to get Sharia Supervisory Board members approval of the Nomination and Remuneration Committee, while for the employee determines remuneration which is variable enough with the approval of the Directors. For employees in the work unit supervision is carried out in accordance with the performance of the individual regularly pay attention to objectivity and independence.

One application of remuneration risk management is provisions on granting variable remuneration to Material Risk Taker (MRT):

- *Payment in stages within a minimum period of 3 (three) years since the first payment*

- Penangguhan pembayaran dapat ditentukan lebih Panjang dari 3 (tiga) tahun sesuai dengan potensi dan jangka waktu risiko atau time horizon of risk
- Bank berhak menunda pembayaran atau tidak membayarankan remunerasi yang bersifat variabel yang belum dibayarkan apabila terbukti melakukan tindakan yang merugikan Bank berdasarkan laporan Komite Pemantau Risiko
- Bank menetapkan jenis tindakan yang merugikan Bank seperti fraud, indikasi konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan bisnis dan berdampak kepada Non-Performing Financing Bank secara keseluruhan.
- Bank dapat menunda pembayaran yang ditangguhkan (malus) kepada MRT pada kondisi tertentu.

- *The suspension of payment can be determined to be Longer than 3 (three) years according to the risk potential and period or time horizon of risk*
- *The bank has the right to delay payment or not pay variable remuneration that has not been paid if it has been proven to have taken an adverse action on the basis of the Bank Risk Monitoring Committee report.*
- *The Bank determines the types of actions that are detrimental to the Bank such as fraud, an indication of a conflict of interest in taking business decisions and impact on Non-Performing Bank Financing as a whole.*
- *Banks can delay deferred payments to the MRT under certain conditions.*

Konsultan Terkait Remunerasi

Dalam mendapatkan data market peer group, Bank Muamalat menggunakan jasa konsultan Willis Tower Watson. Dimana data didapatkan melalui survei yang diikuti oleh sebagian besar industri bank di Indonesia yang menjadi market peer group. Konsultan akan memberikan data statistik dari market yang ikut serta yang akan digunakan sebagai referensi peninjauan remunerasi bersifat tetap dan pemberian remunerasi bersiaft variabel.

Consultant Related to Remuneration

In getting market peer group data, Bank Muamalat using the services of Willis Tower Watson consultants. Where is the data obtained through surveys that are followed by most industries banks in Indonesia which are market peer groups. Consultant will provide statistical data from participating markets used as a reference for reviewing fixed remuneration and granting variable variable remuneration.

Paket Remunerasi dan fasilitas yang diterima oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS
Remuneration package and facilities received by the Directors, Board of Commissioners, and Sharia Supervisory Board

Jenis Remunerasi dan Fasilitas *Remuneration Type and Facilities*	Jumlah Diterima dalam 1 (Satu) Tahun *Amount Received in 1 (One) Year*					
	Direksi *Board of Directors*		Dewan Komisaris *Board of Commissioners*		DPS *Sharia Supervisory Board*	
	Orang *People*	Jutaan (Rp) *Million (Rp)*	Orang *People*	Jutaan (Rp) *Million (Rp)*	Orang *People*	Jutaan (Rp) *Million (Rp)*
Gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lain dalam bentuk non natura*) *Salaries, bonuses, routine benefits, tantiem, and other facilities in non-natura form*)*	6	23.784,62	4	7.649,30	3	938,99
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, asuransi kesehatan, dan sebagainya) yang: a. dapat dimiliki; dan/atau b. tidak dapat dimiliki. *Other facilities in kind (housing, health insurance, etc.) which:* *a. can be owned; and / or* *b. can't be owned.*	-	-	-	-	-	-
Total	6	23.784,62	4	7.649,30	3	938,99

Ket *) : Selama tahun 2015 sd 2019, tidak ada tantiem yang dibayarkan kepada kepada pengurus (Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi). Hal ini sesuai dengan keputusan RUPS tersebut.
*Note *): During 2015 until 2019, no bonuses were paid to the management (Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board and Directors). This is in accordance with the resolution of the GMS.*

Tabel II. Paket Remunerasi yang Dikelompokkan dalam Tingkat Penghasilan yang Diterima oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS dalam 1 (Satu) Tahun
Table II. Remuneration Package Grouped in the Level of Income Received by the Directors, Board of Commissioners, and DPS in 1 (One) Year

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 (Satu) Tahun*) *Remuneration Amount per Person in 1 (One) Year *)*	Jumlah Anggota Direksi *Total of Board of Directors*	Jumlah Anggota Dewan Komisaris *Total of Board of Commissioners*	Jumlah Anggota DPS *Total of Sharia Supervisory Board Members*
Lebih dari Rp2 Miliar *More than Rp2 Billion*	6	-	-
Lebih dari Rp1 Miliar s/d Rp2 Miliar *More than Rp1 Billion - Rp2 Billion*	-	4	-
Lebih dari Rp500 Juta s/d Rp1 Miliar *More than Rp500 Million - Rp1 Billion*	-	-	-
Kurang dari Sama Dengan Rp500 Juta *Less than Equal as Rp500 Million*	-	-	3

Keterangan: *) yang diterima secara tunai
*Description: *) received in cash*

Remunerasi yang Bersifat Variabel

Remunerasi yang bersifat variablel yang diberikan dalam bentuk tunai meliputi insentif dan *performance* bonus.

Pemberian remunerasi yang bersifat variabel bagi MRT dalam bentuk tunai pada tahun pertama dan dapat diberikan dalam bentuk saham pada tahun berikutnya. Dengan syarat apabila ada opsi pemberian/pembagian saham tersedia atau bersamaan dengan tersedianya saham yang dilepas ke publik.

Variable Remuneration

Variablel remuneration provided in cash includes incentives and performance bonuses.

Provision of variable remuneration for MRT in the form of cash in the first year and can be given in the form of shares the following year. With the condition that if there is an option distribution of shares available or concurrently with availability shares released to the public.

Jumlah Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan Pegawai yang Menerima Remunerasi yang Bersifat Variabel Selama 1 (Satu) Tahun dan Total Nominal Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Diterima
Number of Directors, Board of Commissioners, DPS, and Employees Receiving Variable Remuneration for 1 (One) Year and Total Nominal Remuneration Variable Accepted

Remunerasi yang Bersifat Variabel *Remuneration which is Variable*	Jumlah Diterima dalam 1 (Satu) Tahun *Amount Received in 1 (One) Year*							
	Direksi *Board of Directors*		Dewan Komisaris *Board of Commissioners*		DPS *Sharia Supervisory Board*		Pegawai *Employee*	
	Orang *People*	Jutaan (Rp) *Million (Rp)*	Orang *People*	Jutaan (Rp) *Million (Rp)*	Orang *People*	Jutaan (Rp) *Million (Rp)*	Orang *People*	Jutaan (Rp) *Million (Rp)*
Total	Nihil *Nil*	Nihil *Nil*	Nihil *Nil*	Nihil *Nil*	Nihil *Nil*	Nihil *Nil*	Nihil *Nil*	Nihil *Nil*

Jabatan dan Jumlah Pihak yang Dijadikan Material Risk Taker

Penetapan posisi/jabatan yang termasuk kategori Material Risk Taker mengacu kepada kriteria POJK No. 59/POJK.03.2017 antara lain:

- Dewan Komisaris
- Direksi
- Pejabat setingkat Chief
- Karyawan yang menadapatkan remunerasi yang bersifat variabel dengan jumlah sama dengan atau lebih besar dari Rp650.000.000 (enam ratus lima puluh juta rupiah)

Title and Total of Parties Appointed Material Risk Taker

Determination of positions/positions that fall into the Material Risk Taker category refer to POJK No. 59/POJK.03.2017 criteria including:

- *Board of Commissioners*
- *Board of Directors*
- *Chief-level official*
- *Employees who get variable remuneration with an amount equal to or greater than Rp650,000,000 (six hundred fifty million rupiah)*

Share Option

Bank Muamalat Indonesia tidak menerbitkan program share option untuk Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan sepanjang tahun 2019.

Share Option

Bank Muamalat Indonesia does not issue share option programs for Directors, Board of Commissioners and employees throughout 2019.

Jumlah Pegawai yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja dan Total Nominal Pesangon yang Dibayarkan
Total of Employees Affected by Termination of Employment and Total Nominal Severance Paid

Keterangan/Nama *Description/Name*		Jumlah Saham yang Dimiliki (lembar saham) *Number of Shares Owned (shares sheet)*	Jumlah Opsi *Total Option*		Harga Opsi (Rp) *Price Option (Rp)*	Jangka Waktu *Time Period*
			Yang Diberikan (lembar saham) *Gived (share sheet)*	Yang Telah Dieksekusi (lembar saham) *Executed (share sheet)*		
Direksi *Board of Directors*	(nama) *(name)*	-	-	-	-	-
Dewan Komisaris *Board of Commissioners*	(nama) *(name)*	-	-	-	-	-
DPS *Sharia Supervisory Board*	(nama) *(name)*	-	-	-	-	-
Pejabat Eksekutif *Executive Officer*	(jumlah orang) *(people total)*	-	-	-	-	-
Total		-	-	-	-	-

Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Rasio gaji tertinggi dan terendah di Bank Muamalat sesuai grade maksimum masing-masing pegawai tercatat sebagai berikut :

Highest and Lowest Salary Ratio

The ratio of the highest and lowest salaries at Bank Muamalat according to grade each employee's maximum is listed as follows:

Rasio-Rasio *Ratios*	Skala/Perbandingan *Scale/Comparison*
Rasio Gaji Pegawai Tertinggi dan Terendah *Highest and Lowest Employee Salary Ratio*	41,7 : 1,0
Rasio Gaji Direksi Tertinggi dan Terendah *Highest and Lowest Board of Directors Salary Ratio*	2,4 : 1,0
Rasio Gaji Komisaris Tertinggi dan Terendah *Highest and Lowest Board of Commissioners Salary Ratio*	1,1 : 1,0
Rasio Gaji Direksi Tertinggi dan Pegawai Tertinggi *Highest Salary Ratio of Directors and Highest Employees*	2,3 : 1,0

Jumlah Pegawai yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja dan Total Nominal Pesangon yang Dibayarkan
Number of Employees Affected by Termination of Employment and Total Nominal Severance Paid

Jumlah Nominal Pesangon yang dibayarkan per Orang dalam 1 (Satu) Tahun *Nominal amount of severance paid per person in 1 (one) year*	Jumlah Pegawai *Total Employee*
Lebih dari Rp1.000.000.000,00 *More than Rp1,000,000,000*	-
Lebih dari Rp500.000.000,00 sampai dengan Rp1.000.000.000,00 *More than Rp500,000,000 - Rp1,000,000,000*	-
Kurang dari sama dengan Rp500.000.000,00 *Less than Equal Rp500,000,000*	4

Jumlah Remunerasi Variabel yang Ditangguhkan

Bank Muamalat Indonesia tidak memberikan remunerasi yang bersifat variabel yang diberikan dan ditangguhkan sepanjang tahun 2019.

Total of Remuneration for Suspended Variables

Bank Muamalat Indonesia does not provide variable remuneration which was granted and suspended during 2019.

Jumlah Remunerasi yang Diberikan dalam Satu Tahun
Amount of Remuneration Given in One Year

A. Remunerasi yang Bersifat Tetap *A. Permanent Remuneration*		
1. Tunai *1. Cash*	Rp122.018.992.757	
2. Saham/instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank *2. Stock/instrument based on shares that are Bank issued*	Nihil *Nil*	
B. Remunerasi yang Bersifat Variabel *B. Variable Remuneration*		
	Tidak Ditangguhkan *Not Suspended*	Ditangguhkan *Suspended*
1. Tunai *1. Cash*	Nihil *Nil*	Nihil *Nil*
2. Saham/instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank *2. Stock/instrument based on shares that are Bank issued*	Nihil *Nil*	Nihil *Nil*

Informasi Kuantitatif

Informasi kuantitatif mengenai:

1. total sisa Remunerasi yang masih ditangguhkan baik yang terekspos penyesuaian implisit maupun eksplisit;
2. total pengurangan Remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian eksplisit selama periode laporan; dan
3. total pengurangan Remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian implisit selama periode laporan.

Quantitative Information

Quantitative information about:

1. *The total remaining Remuneration that is still suspended is either exposed;*
2. *implicit or explicit adjustments; Total total reduction in Remuneration caused by explicit adjustments during the reporting period; and*
3. *total reduction in Remuneration caused by implicit adjustments during the reporting period.*

Jenis Remunerasi yang Bersifat Variabel*) *Type of Remuneration Characteristic Variable *)*	Sisa yang Masih Ditangguhkan *Remaining Suspended*	Total Pengurangan Selama Periode Laporan *Total Deduction During Report Period*		
		Disebabkan Penyesuaian Eksplisit (A) *Caused Explicit Adjustment (A)*	Disebabkan Penyesuaian Implisit (B) *Caused Implicit Adjustment (B)*	Total (A)+(B)
1. Tunai (dalam juta rupiah) *1. Cash (in million rupiah)*	Nihil *Nil*	Nihil *Nil*	Nihil *Nil*	Nihil *Nil*
2. Saham/ Instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank (dalam lembar saham dan nominal juta rupiah yang merupakan konversi dari lembar saham tersebut) *2. Stock/Instrument based shares issued by the Bank (in shares and par. million rupiah which is a conversion of the stock sheet)*	Nihil *Nil*	Nihil *Nil*	Nihil *Nil*	Nihil *Nil*
	Nihil *Nil*	Nihil *Nil*	Nihil *Nil*	Nihil *Nil*

Keterangan: *) Hanya untuk MRT
*Note: *) Only for MRT*

Rapat Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Direksi

Meeting of Sharia Supervisory Board, Board of Commissioners, and Board of Directors

Ketentuan dan tata pelaksanaan rapat Dewan Komisaris dan Direksi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dinyatakan dalam Anggaran Dasar dan telah kembali ditegaskan dalam Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Pedoman Kerja Direksi.

Provisions and procedures for the implementation of the Board of Commissioners and Board of Directors meeting of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk are stated in the Articles of Association and have been reaffirmed in the Board of Commissioners 'Work Guidelines and Directors' Work Guidelines.

Rapat Dewan Pengawas Syariah

Sesuai Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan *Board Manual* Bank Muamalat Indonesia serta Pedoman kerja, Dewan Pengawas Syariah wajib menyelenggarkan rapat Dewan Pengawas Syariah paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

Pengambilan keputusan rapat DPS dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Apabila dalam proses pengambilan keputusan terdapat perbedaan pendapat, maka perbedaan pendapat tersebut dapat dicantumkan dalam risalah rapat beserta alasannya. Rapat DPS terdiri dari Rapat Internal DPS dan Rapat DPS bersama organ BMI dan/atau bersama *Sharia Compliance*. Rapat DPS diadakan di tempat kedudukan BMI atau di tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia. Pemanggilan rapat DPS dilakukan oleh Ketua atau oleh salah seorang Anggota DPS atau *Sharia Compliance* yang bertindak sebagai Liaison Officer. Rapat DPS untuk mengeluarkan opini Syariah baik untuk produk maupun aktivitas harus dihadiri dan diputuskan oleh seluruh anggota DPS.

Hasil rapat DPS wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik. Seluruh keputusan DPS yang dituangkan dalam risalah rapat merupakan keputusan bersama seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah. Materi-materi yang dibahas dalam rapat Dewan Pengawas Syariah sesuai Board Manual Bank Muamalat Syariah antara lain:

1. Hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan produk baru dan hasil review produk yang telah ada antara lain mengenai tujuan, karakteristik dan akad yang digunakan sesuai dengan prinsip syariah.
2. Pengajuan aktivitas baru dan review aktivitas Bank yang telah berjalan dari aspek syariah.
3. Permasalahan yang timbul akibat aktivitas Bank yang membutuhkan opini dari DPS.
4. Hasil temuan syariah dari auditor, baik auditor eksternal maupun auditor internal.

Shariah Supervisory Board Meeting

In accordance with Bank Indonesia Regulation No. 11/33/PBI/2009 concerning Implementation of Good Corporate Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units and Bank Muamalat Indonesia Board Manuals and work Guidelines, the Sharia Supervisory Board must hold Sharia Supervisory Board meetings at least 1 (one) time in 1 (one) month.

Decision making of SSB meetings is based on consensus agreement. If in the decision-making process there are differences of opinion, then the differences of opinion can be included in the minutes of the meeting along with the reasons. SSB Meetings consist of Internal SSB Meetings and SSB Meetings with BMI organs and / or with the Sharia Compliance Department. SSB meetings are held at the domicile of the IMW or elsewhere in the territory of the Republic of Indonesia. Summons for SSB meetings are made by the Chairperson or by one of the SSB Members or the Sharia Compliance Department acting as Liaison Officer. The SSB meeting to issue Sharia opinions both for products and activities must be attended and decided by all SSB members.

The results of the SSB meeting must be stated in the minutes of the meeting and properly documented. All SSB decisions set forth in the minutes of the meeting are joint decisions of all members of the Sharia Supervisory Board. The material discussed in the Sharia Supervisory Board meeting in accordance with the Board Manual of Bank Muamalat Syariah includes:

1. *Matters relating to the development of new products and the results of existing product reviews include the objectives, characteristics and contracts used in accordance with sharia principles.*
2. *Submission of new activities and review of Bank activities that have been running from the sharia aspect.*
3. *Issues arising from bank activities that require opinions from DPS.*
4. *Sharia findings from auditors, both external auditors and internal auditors.*

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Dewan Pengawas Syariah dalam Rapat Dewan Pengawas Syariah

Sepanjang tahun 2019, Dewan Pengawas Syariah Bank Muamalat melaksanakan rapat internal sebanyak 13 (Tiga Belas) kali. Adapun agenda dan tingkat kehadiran Dewan Pengawas Syariah dalam rapat adalah sebagai berikut:

Meeting Frequency and Sharia Supervisory Board Attendance

During 2019, the Sharia Supervisory Board of Bank Muamalat held internal meetings 13 (Thirteen). a number of times. The agenda and level of attendance of the Sharia Supervisory Board at the meeting are as follows:

Tanggal *Date*	Agenda	Kehadiran *Attendance*		
		Prof. DR (HC) KH. Ma'ruf Amin*)	DR. H. Oni Sahroni MA	Drs. H. Sholahudin Al Aiyub, M.Si
31 Jan 2019 *Jan 31, 2019*	• Benefit Free Transfer, Biaya Layanan VA/CMS & Buku Cek/BG Teknis Pelaksanaan Istishna' • Penerapan Zakat Emas pada Hadiah Titipan berupa Emas • *Benefit Free Transfer, VA/CMS Service Fees & Books Technical Check/BG for Implementing Istishna'* • *Application of Gold Zakat on the Prize DepositGold*	X	√	√
25 Feb 2019 *Feb 25, 2019*	• Penyelesaian Kasus Nasabah Pembiayaan • Pengembalian Hadiah Bersyarat • Iqalah - Pembatalan PPJB & DP • *Settlement of Financing Customer Cases* • *Conditional Gift Returns* • *Iqalah - Cancellation of PPJB & DP*	X	√	√
22 Mar 2019 *Mar 22, 2019*	• Zakat Emas pada Hadiah Titipan berupa Emas • Skema IMFD pada Obyek Barang Indent • Skema Penjaminan beserta Penyelesaiannya • *Settlement of Financing Customer Cases* • *Conditional Gift Returns* • *Iqalah - Cancellation of PPJB & DP*	X	√	√
12 Apr 2019 *Apr 12, 2019*	• Selisih Lebih Kas Teller • Pembiayaan Perencanaan Haji • Rencana Sekuritisasi KPR BMI • Muamalat Digital Banking Cofee Shop • *Difference Over Cash Teller* • *Hajj Planning Financing* • *BMI KPR Securitization Plan* • *Muamalat Digital Banking Cofee Shop*	X	√	√
29 Apr 2019 *Apr 29, 2019*	• Sekuritasasi Aset melalui Penerbitan Efek Beragun Aset Syariah – Surat Partisipasi (EBAS-SP) • Pelunasan dipercepat pada Skema IMBT Refinancing • *Asset Securities through the Issuance of Asset Backed Securities Syariah - Letter of Participation (EBAS-SP)* • *Payment is accelerated in the IMBT Refinancing Scheme*	√	√	√
21 Mei 2019 *May 21, 2019*	Inisiatif ILHAM (Investasi Logam Mulia Hijrah Muamalat) *ILHAM Initiative*	√	√	√
24 Jun 2019 *Jun 24, 2019*	• Pengajuan Perpanjangan Deposito Income Smoothing • Laporan Konsultasi Syariah Periode Januari-Juni 2019 • *Filing for Extension of Income Smoothing Deposits* • *Sharia Consultation Report for January-June 2019*	√	√	√
24 Jul 2019 *July 24, 2019*	• Skema Factoring & Forfeiting berdasarkan Prinsip Syariah • Review Akad Pembiayaan Istishna' Paralel • *Factoring & Forfeiting Schemes based on Principles Sharia* • *Parallel Istishna Financing Review Agreement*	√	√	√
22 Aug 2019 *Aug 22, 2019*	• Mekanisme Teknis Jual Beli Piutang • One Day Service Take Over • Skema Channeling Pembiayaan Talangan Haji • Skema Pembiayaan Properti Indent dengan menggunakan Akad LF Murabahah • Permohonan Rekomendasi DPS untuk Pembiayaan Camp & Resort Syariah • *Technical Mechanisms of Trade in Receivables* • *One Day Service Take Over* • *Pilgrimage Financing Channeling Scheme* • *Indent Property Financing Scheme with use the Murabahah LF Agreement* • *Request DPS Recommendations for Financing Sharia Camp & Resort*	√	√	√
23 Sept 2019 *Sep 23, 2019*	• Mekanisme Teknis Jual Beli Piutang • Pertanyaan Terkait Implementasi MMQ IMFZ • Pola Kerjasama BMI dengan Marketplace & e-Commerce Debit Online • Laporan Program Income Smoothing • *Technical Mechanisms of Trade in Receivables* • *Questions Regarding IMFZ MMQ Implementation* • *Patterns of BMI Collaboration with Debit Online Marketplace & eCommerce* • *Income Smoothing Program Report*	√	√	√

Tanggal *Date*	Agenda	Kehadiran *Attendance*		
		Prof. DR (HC) KH. Ma'ruf Amin*)	DR. H. Oni Sahroni MA	Drs. H. Sholahudin Al Aiyub, M.Si
14 Okt 2019 *Oct 14, 2019*	• Laporan Konsultasi Syariah Periode Juli-September 2019 • Usulan Simplifikasi Pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan • *Sharia Consultation Report for the July-September Period 2019* • *Proposed Simplification of Multipurpose Financing Without Collateral*	√	√	√
29 Nov 2019 *Nov 29, 2019*	• Skema Top Up MMQ • Akad Mu'allaq • Transaksi Jual Beli Emas Digital • Ketentuan Pada Akad IMBT • *MMQ Top Up Scheme* • *Mu'allaq contract* • *Digital Gold Buy and Sell Transactions* • *Provisions on the IMBT Agreement*	-	√	√
13 Des 2019 *Dec 13, 2019*	• Update Inisiatif Jual Beli Emas BMI • Pembahasan tentang income smoothing • *BMI Gold Buy and Sell Initiative Update* • *Discussion of income smoothing*	-	√	√
Total	Jumlah Rapat *Total Meetings*	11	13	13
	Jumlah Kehadiran *Total Attendances*	7	13	13
	Persentase Kehadiran *Attendace Percentage*	63%	100%	100%

Rapat Dewan Komisaris

Sesuai Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014, Anggaran Dasar Perseroan dan Board Manual Bank Muamalat Indonesia, Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan dan mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. Selama tahun 2019 Dewan Komisaris telah menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris sebanyak 8 (delapan) kali dan rapat Dewan Komisaris bersama Direksi sebanyak 15 (lima belas) kali rapat.

Pedoman kerja Dewan Komisaris mengatur rapat Dewan Komsisaris paling sedikit setiap 2 (dua) bulan sekali, dalam rapat tersebut Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi. Segala keputusan Dewan Komisaris diambil dalam rapat Dewan Komisaris. Dewan Komisaris dapat mengadakan rapat sewaktu-waktu atas permintaan 1 (satu) atau beberapa anggota Dewan Komisaris, permintaan Direksi, atau atas permintaan tertulis dari 1 (satu) atau beberapa Pemegang Saham yang mewakili sekurang-kurangnya 1/10 (satu persepuluh) dari jumlah saham dengan hak suara, dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.

Rapat akan diatur oleh Sekretaris Dewan Komisaris mulai dari menyiapkan agenda dan materi hingga pencatatan risalah rapat sebagai bukti yang sah untuk para anggota Dewan komisaris dalam mengambil keputusan apabila ada dissenting opinions dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam rapat.

Meeting of Board of Commissioners

In accordance with OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014, Articles of Association The Company and the Board Manual of Bank Muamalat Indonesia, Board Commissioners must hold a meeting at least 1 (one) time 2 (two) months and hold regular meetings with the Directors at least 1 (one) time in 4 (four) months. During 2019 The Board of Commissioners has convened a meeting of the Board of Commissioners 8 (eight) times and meetings of the Board of Commissioners with the Board of Directors 15 (fifteen) meetings.

The Board of Commissioners work guidelines govern the BOC meeting for at least once every 2 (two) month, at the meeting the Board of Commissioners can invite the Directors. All decisions of the Board of Commissioners taken at the Board of Commissioners meeting. The Board of Commissioners can hold a meeting at any time at the request of 1 (one) or several members of the Board of Commissioners, Board of Directors request, or above written request from 1 (one) or several Shareholders which represents at least 1/10 (one tenth) of the amount shares with voting rights, by mentioning the things to be talked about.

Meetings will be arranged by the Secretary of the Board of Commissioners starting from prepare agendas and materials to record minutes of meetings as valid evidence for members of the Board of Commissioners in take a decision if there are dissenting opinions and for third parties regarding decisions taken at meetings.

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Dewan Komisaris dalam Rapat Dewan Komisaris

Selama tahun 2019 Dewan Komisaris telah menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris sebanyak 8 (delapan) kali dan rapat Dewan Komisaris bersama Direksi sebanyak 15 (lima belas) kali rapat. Adapun agenda dan tingkat kehadiran Dewan Komisaris dalam rapat adalah sebagai berikut:

Meeting Frequency and Attendance of Board of Commissioners

During 2019 the Board of Commissioners held Board of Commissioners meetings 8 (eight) times and Board meetings Commissioners and Directors have 15 (fifteen) meetings. The agenda and level of attendance of the Board of Commissioners in the meeting are as follows:

Tanggal *Date*	Agenda	Kehadiran *Attendance*				
		IAH	IHA	ES	MHM	AMJA
14 Feb 2019 *Feb 14, 2019*	• Laporan Komite level BOC • Pemenuhan Rapat BOC dan Komite level BOC • Hasil audit ALIF • *BOC level Committee Report* • *Meeting BOC and BOC level Committees* • *ALIF audit results*	√	√	√	√	√
29 Mar 2019 *Mar 29, 2019*	Pembahasan Pelaksanaan RUPS *Discussion on GMS Implementation*	X	√	√	√	X
2 Mei 2019 *May 2, 2019*	• Persiapan Right Issue • Rencana Bisnis • Penominasian Direksi • *Right Issue Preparation* • *Business plan* • *Nomination of Directors*	√	√	√	√	X
9 Jul 2019 *Jul 9, 2019*	• Pembahasan tanggapan Pemegang Sahan dan BOC atas Rencana Penguatan Modal Bank Muamalat • *Discussion of Shareholders and BOC responses to Bank Muamalat Capital Strengthening Plan*	√	√	√	√	√
25 Jul 2019 *Jul 25, 2019*	• Perkembangan terkini Right Issue • Keputusan mengenai Escrow Account • Update dari Konsorsium • *Recent developments in Right Issue* • *Decisions regarding Escrow Accounts* • *Updates from the Consortium*	√	√	√	√	√
23 Sep 2019 *Sep 23, 2019*	Keanggotaan Komite level BOC *BOC level Committee Membership*	√	√	√	√	X
27 Nov 2019 *Nov 27, 2019*	Update perkembangan BMI *BMI development updates*	X	√	√	√	√
5 Des 2019 *Dec 5, 2019*	• Media Update • Update Likuiditas • Stakeholders Support • Corporate Action • *Media Update* • *Liquidity Update* • *Stakeholders Support* • *Corporate Action*	√	√	√	√	√
Total	Jumlah Rapat *Total Meetings*	8	8	8	8	8
	Jumlah Kehadiran *Total Attendances*	6	8	8	8	5
	Persentase kehadiran *Attendace Percentage*	75%	100%	100%	100%	63%

Keterangan/*Description:*
IAH Ilham Akbar Habibie
IHA Iggi Haruman Achsien w
ES Edy Setiadi
MHM Mohamed Hedi Mejai
AMJA Abdulsalam Mohammad Joher Al-Saleh

Agenda dan tingkat kehadiran Dewan Komisaris dalam rapat bersama Direksi periode 2019:
Agenda and level of attendance of the Board of Commissioners in the 2019 joint meeting of the Directors:

Tanggal *Date*	Agenda	Kehadiran *Attendance*										
		Dewan Komisaris *Board of Commissioners*						Direksi *Board of Directors*				
		IAH	IHA	ES	MHM	AMJA	AKP	HS	AD	PBS	AW	AI
10 Jan 2019 *Jan 10, 2019*	• BoC-BoD Hightlights • CEO Hightlight 2018 & Overall Strategy 2019 • Financial Performance Highlights 2018 dan proyeksi 2019 • Update Bad Bank dan Collection • Membangun Kembali Infrastruktur Risiko Kuat untuk Pertumbuhan Bisnis Berkelanjutan • Strateri Corporate Banking 2019: Back to Back & Reshaping CB Balance Sheet • Retail Banking Performance 2018 & Strategy 2019 • *BoC-BoD Hightlights* • *CEO Hightlight 2018 & Overall Strategy 2019* • *Financial Performance Highlights 2018 and 2019 projections* • *Bad Bank Update and Collection* • *Rebuilding Strong Risk Infrastructure for Sustainable Business Growth* • *Corporate Banking Strategy: Back to Back & Reshaping CB Balance Sheet* • *Retail Banking 2018 Performance & 2019 Strategy*	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-
14 Feb 2019 *Feb 14, 2019*	• Update proses Right Issue dan Laporan Audit Keuangan tahun 2018 • Target Market Corporate Banking, Limit & Pipeline • Reorganisasi pasca VESPA 2 • Update ALIF • Update Bad Bank dan Collection • Revisi RBB 2019 • *Update on the Right Issue process and the Financial Audit Report 2018* • *Target Market Corporate Banking, Limit & Pipeline* • *Post-VESPA reorganization 2* • *Update ALIF* • *Update Bad Bank and Collection* • *Revised Bank Business Plan Collection*	√	√	√	√	√	√	√	√	X	X	-
15 Mar 2019 *Mar 15, 2019*	• Update Right Issue & RUPSLB • Persiapan Rapat RBBR • *Update Right Issue & EGMS* • *Preparation for RBBR Meeting*	X	√	√	√	X	√	√	√	√	√	-

Agenda dan tingkat kehadiran Dewan Komisaris dalam rapat bersama Direksi periode 2019:
Agenda and level of attendance of the Board of Commissioners in the 2019 joint meeting of the Directors:

Tanggal *Date*	Agenda	Kehadiran *Attendance*										
		Dewan Komisaris *Board of Commissioners*					Direksi *Board of Directors*					
		IAH	IHA	ES	MHM	AMJA	AKP	HS	AD	PBS	AW	AI
28 Mar 2019 *Mar 28, 2019*	• Update RUPS dan Right Issue • Update ALIF • *GMS Update and Right Issue* • *ALIF Update*	X	√	√	X	X	√	√	√	√	X	-
11 Apr 2019 *Apr 11, 2019*	• Update Right Issue dan RUPS • Laporan Keuangan Q1-2019 • *Right Issue Update and RUPS* • *Financial Statements Q1-2019*	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-
2 Mei 2019 *May 2, 2019*	• Update of Right Issue dan RUPS • Update ALIF • *Update of Right Issue and AGM* • *ALIF Update*	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-
16 Mei 2019 *May 16, 2019*	• Persiapan RUPST dan RUPSLB • Financial Highlights April 2019 • *Preparations for the AGMS and EGMS* • *Financial Highlights of April 2019*	√	√	√	X	√	√	√	√	√	√	-
28 Jun 2019 *Jun 28, 2019*	• Update perkembangan Right Issue • Kinerja Bisnis Mei 2019 • *Right Issue Update* • *Business Performance Right Issue May 2019*	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
30 Jul 2019 *Jul 30, 2019*	• Update ALIF • Resolusi tentang Rencana Modal & Pengembangan Terkini • Persetujuan Action Plan • *ALIF Update* • *Resolution on Capital Plans & Development Current* • *Action Plan Approval*	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
22 Aug 2019 *Aug 22, 2019*	• Perkembangan terbaru resolusi penguatan rencana modal • Proposal RUPSLB • Financial Highlight Juli 2019 • Update perkembangan ALIF • *The latest development resolution to strengthen the capital plan Financial Highlight* • *EGMS Proposal* • *Financial Highlight of July 2019* • *Update on ALIF developments*	√	√	√	√	√	√	√	√	√	X	√

Agenda dan tingkat kehadiran Dewan Komisaris dalam rapat bersama Direksi periode 2019:
Agenda and level of attendance of the Board of Commissioners in the 2019 joint meeting of the Directors:

Tanggal *Date*	Agenda	Kehadiran *Attendance*										
		Dewan Komisaris *Board of Commissioners*							Direksi *Board of Directors*			
		IAH	IHA	ES	MHM	AMJA	AKP	HS	AD	PBS	AW	AI
23 Sep 2019 *Sep 23, 2019*	• Perkembangan Terkini BMI • Rencana Skema Rekonsiliasi ALIF • Komposisi baru anggota DPS • *Recent Development of BMI* • *ALIF Reconciliation Scheme Plan* • *New composition of DPS members*	√	√	√	√	X	√	√	√	√	√	√
8 Okt 2019 *Oct 8, 2019*	• Resolution of the Bank	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
28 Okt 2019 *Oct 28, 2019*	• Financial Highlights • Perkembangan BMI • *Financial Highlights* • *Development of BMI*	√	√	√	√	X	√	√	√	√	√	√
20 Nov 2019 *Nov 20, 2019*	• Publikasi laporan keuangan September 2019 • Media Update • Rencana Corporate Actions & RUPSLB • Penunjukan Legal Counsel RBB 2020 • *Publication of financial statements September 2019* • *Media Update* • *Plans for Corporate Actions & EGMS* • *Appointment of Legal Counsel RBB 2020*	√	√	√	√	X	√	√	√	X	X	√
26 Des 2019 *Dec 26, 2019*	• Financial Highlights • Update Likuiditas • Perkembangan BMI • Update AML-CFT • Jadwal BOC Meeting 2020 • Update ALIF • *Financial Highlights* • *Liquidity Update* • *BMI Development* • *AML-CFT Update* • *BOC Meeting 2020 Schedule* • *ALIF Update*	X	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Total	Jumlah Rapat *Total Meetings*	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	8
	Jumlah Kehadiran *Total Attendances*	12	15	15	13	10	15	15	15	13	11	8
	Persentase kehadiran *Attendace Percentage*	80%	100%	100%	87%	67%	100%	100%	100%	87%	73%	100%

Keterangan/*Description :*
IAH Ilham Akbar Habibie
IHA Iggi Haruman Achsien
ES Edy Setiadi
MHM Mohamed Hedi Mejai
AMJA Abdulsalam Mohammad Joher Al-Saleh
AKP Achmad Kusna Permana
HS Hery Syafril
AD Andri Donny
PBS Purnomo Budiwibowo Soetadi
AW Awaldi
AI Avianto Istihardjo

*) Diangkat melalui RUPST tanggal 17 Mei 2019 dan memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK pada 13 Januari 2020
**) Appointed by AGMS dated on May 17, 2019, and acquired a pass determination of Fit and Proper Test from FSA on January 13, 2020*

Ringkasan Tingkat Kehadiran Anggota Dewan Komisaris Dalam Rapat Periode 2019 adalah sebagai berikut:
The Summary of Attendance of Members of the Board of Commissioners in the 2019 Meeting Period is as follows:

No.	Nama *Name*	Rapat *Meeting*			
		Dewan Komisaris (8 kali) *Board of Commissioners (8 times)*	Tingkat Kehadiran *Level of Attendance*	Dewan Komisaris bersama Direksi (15 kali) *Board of Commissioners with Board of Directors (15 times)*	Tingkat Kehadiran *Level of Attendance*
1.	Ilham Akbar Habibie	6/8	75%	12/15	80%
2.	Iggi H. Achsien	8/8	100%	15/15	100%
3.	Edy Setiadi	8/8	100%	15/15	100%
4.	Abdulsalam Mohammad Joher Al-Saleh*)	5/8	63%	10/15	67%
5	Mohamed Hedi Mejai**)	8/8	100%	13/115	87%

Keterangan/*Description:*
*) Diangkat melalui RUPST tanggal 30 Maret 2017 dan akan efektif setelah memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK
**) Diangkat melalui RUPSLB tanggal 20 September 2017 dan akan efektif setelah memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK
**) Appointed through the AGMS on March 30, 2017 and will be effective after obtaining the determination to pass the Fit and Proper Test from the FSA*
***) Appointed through the EGMS on 20 September 2017 and will be effective after obtaining the determination to pass Fit and Proper Test from the FSA*

Rapat Direksi

Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014, Anggaran Dasar Perseroan dan Board Manual Bank Muamalat Indonesia, Direksi wajib mengadakan rapat secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan. Direksi juga wajib mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

Rapat Direksi adalah rapat yang diselenggarakan oleh Direksi untuk membuat berbagai keputusan bisnis, mengevaluasi kinerja Perusahaan dan menetapkan berbagai kebijakan dalam pengurusan Perusahaan. Rapat Direksi dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila:
   a. Dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi.
   b. Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris.
2. Pemanggilan Rapat Direksi harus dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan Anggaran Dasar.
3. Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat dan/atau pengambilan suara, akan dianggap sah apabila rapat dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah Direksi
4. Risalah rapat dibuat oleh Seretaris Perusahaan dan ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir untuk disimpan dan tersedia sewaktu-waktu diminta oleh Dewan Komisaris
5. Perbedaan penapat *(dissenting opinions)* yangterjadi dalam rapat harus dicantumkan didalam risalah rapat beserta alasannya

Meeting of Board of Directors

According to the Financial Services Authority Regulation Number 33/POJK.04/2014, the Company's Articles of Association and Bank Muamalat Indonesia Board Manual, the Board of Directors is required to hold regular meetings at least once a month. The Board of Directors must also hold a Board of Directors Meeting with the Board of Commissioners periodically at least 1 (one) time in 4 (four) months.

Directors' Meetings are meetings held by Directors for make various business decisions, evaluate Company performance and set various policies in managing the company. The Board of Directors meeting is based on the following principles:

1. *The Board of Directors Meeting can be held at any time if:*
   a. *Needed by one or more members of the Board of Directors.*
   b. *At the written request of one or more members. Board of Commissioners.*
2. *Summons for Directors' Meetings must be made by members of the Board of Directors who is entitled to represent the Board of Directors according to the provisions of the Basic Budget.*
3. *Decision making is done by deliberation to consensus and/or voting will be considered valid if the meeting was attended by more than half the number of Directors.*
4. *Minutes of meetings are made by Company Secretary and signed by all members of the Board of Directors present for safekeeping and available at any time requested by the Board of Commissioners.*
5. *Differences in opinions (dissenting opinions) that occur in a meeting must be included in the minutes of the meeting along with the reasons.*

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Direksi dalam Rapat Direksi

Selama tahun 2019 Direksi telah mengadakan rapat internal sebanyak 49 (empat puluh sembilan) kali. Secara rinci jumlah kehadiran masing-masing anggota Direksi pada Rapat Internal Direksi selama tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Meeting Frequency and Attendance Level of Directors

During 2019, the Board of Directors held 49 (forty-nine) internal meetings. In detail, the total attendance of each member of the Board of Directors at the Directors' Internal Meeting during 2019 is as follows:

Tanggal *Date*	Agenda *Agenda*	Kehadiran *Attendance*					
		AKP	HS	AD	PBS	AW	AI*
7 Jan 2019 *Jan 7, 2019*	1. Penyampaian Hasil Evaluasi Transaksi Penarikan Tunai tanpa Menggunakan Buku Tabungan 2. Rencana Konversi Kendaraan Asset dengan Penggunaan Grab Car 3. Persiapan BOC-BOD Meeting: a. Financial Performance Highlight 2018 & Projection 2019 b. Retail Banking Performance 2018 & Strategy 2019 c. Corporate Banking Strategy for 2019 and Beyond: 4. Bad Bank Updates *1. Submitting Evaluation Results of Cash Withdrawal Transactions without Using a Savings Book* *2. Asset Vehicle Conversion Plan with the Use of the Grab Car* *3. Preparation for BOC-BOD Meeting:* *a. Financial Performance Highlights 2018 & Projection 2019* *b. Retail Banking Performance 2018 & Strategy 2019* *c. Corporate Banking Strategy for 2019 and Beyond:* *4. Bad Bank Updates*	√	√	√	√	√	
15 Jan 2019 *Jan 15, 2019*	1. Management Report 2. Bad Bank Updates 3. Liquidity Updates *1. Management Report* *2. Bad Bank Updates* *3. Liquidity Updates*	X	√	√	√	X	
22 Jan 2019 *Jan 22, 2019*	1. Revisi RBB 2019 2. Action Plan Campaign #AyoHijrah 3. Risk Financing Portfolio Quality Improvement Project 4. HC Committee *1. 2019 Bank Business Plan Revision* *2. Action Plan Campaign #AyoHijrah* *3. Risk Financing Portfolio Quality Improvement Project* *4. HC Committee*	√	√	√	X	X	
29 Jan 2019 *Jan 29, 2019*	1. Financing Pipeline Progress (Corporate & Retail Banking) 2. RBBR Posisi Desember 2018 3. Bad Bank Updates *1. Financing Pipeline Progress (Corporate & Retail Banking)* *2. RBBR as of December 2018* *3. Bad Bank Updates*	√	√	√	X	√	

Tanggal *Date*	Agenda *Agenda*	Kehadiran *Attendance*					
		AKP	HS	AD	PBS	AW	AI*
6 Feb 2019 *Feb 6, 2019*	1. Financing Pipeline Progress (Corporate & Retail Banking) 2. Preparation BOC-BOD Meeting a. Corporate Banking Financing Pipeline, Limit & Target Market b. Reorganization Post VESPA-2 c. Rights Issue Process & Audit Financial Statement 2018 Update d. Update Revision 2019 RBB e. ALIF Update f. Action Plan of OJK Audit Findings g. Bad Bank & Collection Updates *1. Financing Pipeline Progress (Corporate & Retail Banking)* *2. Preparation BOC-BOD Meeting* *a. Corporate Banking Financing Pipeline, Limit & Target Market* *b. Reorganization Post VESPA-2* *c. Rights Issue Process & Audit Financial Statement 2018 Update* *d. Update Revision 2019 RBB* *e. ALIF Update* *f. Action Plan of OJK Audit Findings* *g. Bad Bank & Collection Updates*	√	√	√	√	X	
14 Feb 2019 *Feb 14, 2019*	1. Pembahasan Financials 2. ALIF Updates *1. Discussion of Financials* *2. ALIF Updates*	√	√	√	X	X	
19 Feb 2019 *Feb 19, 2019*	1. Media Strategic 2. Financing Performances per Februari 2019 3. CASA Updates 4. Financing Pipeline Progress (Corporate & Retail Banking) 5. Target Market Corporate - Commercial 6. Update Finalisasi Kebijakan TBO-ER dan Sistem FIS TBO-ER 7. Update Pengajuan pembuatan PRKS-Baru 8. Otomatisasi System Reporting *1. Strategic Media* *2. Financing Performances as of February 2019* *3. CASA Updates* *4. Financing Pipeline Progress (Corporate & Retail Banking)* *5. Target Market Corporate - Commercial* *6. Finalization of the TBO-ER Policy and the TBO-ER FIS System* *7. Update on Submission of PRKS-New* *8. Automation System Reporting*	√	√	√	√	√	

Tanggal *Date*	Agenda *Agenda*	Kehadiran *Attendance*					
		AKP	HS	AD	PBS	AW	AI*
25 Feb 2019 *Feb 25, 2019*	1. Financing Pipeline (Corporate & Retail) 2. Update Pengajuan Produk PRKS-Baru 3. Update Finalisasi Kebijakan TBO-ER dan Sistem FIS TBO-ER 4. Otomatisasi Sistem Reporting 5. Bad Bank Updates *1. Financing Pipeline (Corporate & Retail)* *2. Update on PRKS-New Product Submission* *3. Finalizing the TBO-ER Policy and FIS System Update TBO-ER* *4. Automation Reporting System* *5. Bad Bank Updates*	√	√	√	√	√	
1 Mar 2019 *Mar 1, 2019*	Finalisasi Audit 2018 *2018 Audit Finalisation*	√	√	√	√	√	
4 Mar 2019 *Mar 4, 2019*	1. Financing Pipeline Progress (Corporate & Retail Banking) 2. Preparation of Milad BMI ke-27 3. Agenda RUPST 2019 4. HC Statistics Updates *1. Financing Pipeline Progress (Corporate & Retail Banking)* *2. Preparation of the 27th BMI Anniversary* *3. Agenda of the 2019 AGM* *4. HC Statistics Updates*	√	√	√	√	√	
12 Mar 2019 *Mar 12, 2019*	1. Penyesuaian RBB 2019 2. Financing Pipeline Progress (Corporate & Retail) 3. Project Revamping Mobile Banking 4. HC Statistics Updates *1. Adjustment of 2019 RBB* *2. Financing Pipeline Progress (Corporate & Retail)* *3. Project Revamping Mobile Banking* *4. HC Statistics Updates*	√	√	√	X	√	
19 Mar 2019 *Mar 19, 2019*	1. Management Report 2. Financing Pipeline Progress a. (Retail Banking (inc. Consumer Mortgage Portfolio Performance Review & Retail Financing Processing Improvement) b. Corporate Banking 3. CASA Updates *1. Management Report* *2. Financing Pipeline Progress* *a. (Retail Banking (inc. Consumer Mortgage Portfolio Performance Review & Retail Financing Processing Improvement)* *b. Corporate Banking* *3. CASA Updates*	√	√	√	√	√	

Tanggal *Date*	Agenda *Agenda*	Kehadiran *Attendance*					
		AKP	HS	AD	PBS	AW	AI*
27 Mar 2019 *Mar 27, 2019*	1. Media Updates 2. Financing Pipeline Progress (Corporate & Retail) 3. Bad Bank Updates 4. Additional Agenda: a. ALIF b. HC Committee *1. Media Updates* *2. Financing Pipeline Progress (Corporate & Retail)* *3. Bad Bank Updates* *4. Additional Agenda:* *a. ALIF* *b. HC Committee*	√	√	√	√	X	
2 Apr 2019 *Apr 2, 2019*	1. SLIK dan LSMK Data Quality 2. Financing Pipeline Progress (Corporate & Retail) 3. Agenda Operation Update a. Sosialisasi SOP b. Service Framework & Program c. Operation Control Methodology *1. SLIK and LSMK Data Quality* *2. Financing Pipeline Progress (Corporate & Retail)* *3. Operation Update Agenda* *a. SOP socialization* *b. Service Framework & Program* *c. Operation Control Methodology*	√	√	√	√	√	
9 Apr 2019 *Apr 9, 2019*	1. Media Updates (inc. CSR Program Milad Updates) 2. Fee Based Income Pipeline Progress (Corporate & Retail) 3. CASA Updates 4. Bad Bank Updates *1. Media Updates (inc. CSR Milad Updates Program)* *2. Fee Based Income Pipeline Progress (Corporate & Retail)* *3. CASA Updates* *4. Bad Bank Updates*	√	√	√	√	√	
16 Apr 2019 *Apr 16, 2019*	1. Rights Issue Updates 2. Financing Pipeline Progress (Corporate & Retail) 3. ALIF Updates *1. Rights Issue Updates* *2. Financing Pipeline Progress (Corporate & Retail)* *3. ALIF Updates*	√	√	√	√	√	
18 Apr 2019 *Apr 18, 2019*	Proposal of ALIF *Proposal of ALIF*	√	√	√	X	X	
23 Apr 2019 *Apr 23, 2019*	1. Funding (CASA & FBI) Pipeline Progress for Corporate & Retail 2. Rights Issue Updates *1. Funding (CASA & FBI) Pipeline Progress for Corporate & Retail* *2. Rights Issue Updates*	√	X	√	X	√	

Tanggal *Date*	Agenda *Agenda*	Kehadiran *Attendance*					
		AKP	HS	AD	PBS	AW	AI*
30 Apr 2019 *Apr 30, 2019*	1. Rights Issue Updates 2. Financing Pipeline Progress for Corporate & Retail 3. Bad Bank Updates 4. Additional Agenda: a. Progress Hijrah Coffee & Rencana Grand Opening b. Rundown Perayaan Milad ke-27 di Lobby MT *1. Rights Issue Updates* *2. Financing Pipeline Progress for Corporate & Retail* *3. Bad Bank Updates* *4. Additional Agenda:* *a. Progress of Hijrah Coffee & Grand Opening Plan* *b. Rundown of the 27th Anniversary Celebration in the Lobby of MT*	√	√	√	X	√	
7 Mei 2019 *May 7, 2019*	1. Rights Issue & GMS Updates 2. Funding (CASA & FBI) Pipeline Progress for Corporate & Retail 3. Rencana Sekuritisasi *1. Rights Issue & GMS Updates* *2. Funding (CASA & FBI) Pipeline Progress for Corporate & Retail* *3. Securitization Plan*	√	√	√	√	√	
14 Mei 2019 *May 14, 2019*	1. Preparation of AGMS & EGMS 2. Financing Pipeline Progress for Corporate & Retail 3. Bad Bank Updates *1. Preparation of AGMS & EGMS* *2. Financing Pipeline Progress for Corporate & Retail* *3. Bad Bank Updates*	√	√	√	√	√	
28 Mei 2019 *May 28, 2019*	1. Financing Pipeline Progress: a. Corporate Banking b. Retail Banking 2. Antipasi hari Raya Idulfitri a. Liquidity Updates b. Bad Bank Updates *1. Financing Pipeline Progress:* *a. Corporate Banking* *b. Retail Banking* *2. Antipasi Eid al-Fitr* *a. Liquidity Updates* *b. Bad Bank Updates*	√	X	√	√	√	√

Tanggal *Date*	Agenda *Agenda*	Kehadiran *Attendance*					
		AKP	HS	AD	PBS	AW	AI*
18 Jun 2019 *Jun 18, 2019*	1. Preparation of BOC-BOD Meeting: a. Rights Issue Progress Updates b. Business Performance May 2019 2. Update Pasca Hari Raya Idul Fitri: a. Liquidity Updates b. Bad Bank Updates 3. Funding (CASA & FBI) Pipelines Progress for Retail Banking 4. Asuransi Pembiayaan 5. Sosialisasi D&O Liability Insurance 6. ALIF Development Updates *1. Preparation of BOC-BOD Meeting:* *a. Rights Issue Progress Updates* *b. Business Performance May 2019* *2. Post Eid Al-Fitr Update:* *a. Liquidity Updates* *b. Bad Bank Updates* *3. Funding (CASA & FBI) Pipelines Progress for Retail Banking* *4. Financing Insurance* *5. Dissemination of D&O Liability Insurance* *6. ALIF Development Updates*	√	√	√	√	√	√
25 Jun 2019 *Jun 25, 2019*	Financing Pipelines Progress: a. Corporate Banking b. Retail Banking *Financing Pipelines Progress:* *c. Corporate Banking* *d. Retail Banking*	X	√	√	√	√	√
3 Jul 2019 *Jul 3, 2019*	1. Project Update AVENGERS - FOS 2. Funding (CASA & FBI) 3. Pipelines Progress: a. Corporate Banking b. Retail Banking 4. Potensi Aspek Hukum & Strategi Penyelesaian Top 10 NPF Customers *1. Project Update AVENGERS - FOS* *2. Funding (CASA & FBI)* *3. Pipelines Progress:* *a. Corporate Banking* *b. Retail Banking* *4. Potential Legal Aspects & Strategy to Resolve Top 10 NPF Customers*	√	√	√	√	√	X
9 Jul 2019 *Jul 9, 2019*	1. DPLK Muamalat Updates a. Laporan Hasil Pengawasan OJK untuk DPLK Syariah Muamalat b. Info terbaru POJK NO.15 tentang Tata Kelola Dana Pensiun 2. Operation Update 3. Financing Pipelines Progress: a. Corporate Banking b. Retail Banking *1. DPLK Muamalat Updates* *a. OJK Supervisory Report for Muamalat Sharia Pension Fund* *b. Latest POJK NO.15 info on Pension Fund Management* *2. Operation Update* *3. Financing Pipelines Progress:* *a. Corporate Banking* *b. Retail Banking*	√	√	√	√	√	X

Tanggal *Date*	Agenda *Agenda*	Kehadiran *Attendance*					
		AKP	HS	AD	PBS	AW	AI*
16 Jul 2019 *Jul 16, 2019*	1. BMI KL Road Map for 2019 – 2022 2. Funding (CASA & FBI) Pipelines Progress: a. Corporate Banking (inc. Profitability Updates) b. Retail Banking 3. Strategic Initiatives *1. BMI KL Road Map for 2019 - 2022* *2. Funding (CASA & FBI) Pipelines Progress:* *a. Corporate Banking (inc. Profitability Updates)* *b. Retail Banking* *3. Strategic Initiatives*	√	√	√	√	√	√
23 Jul 2019 *Jul 23, 2019*	1. Financing Pipelines Progress a. Corporate Banking b. Retail Banking 2. Bad Bank Updates 3. Progress Update DC-DRC *1. Financing Pipelines Progress* *a. Corporate Banking* *b. Retail Banking* *2. Bad Bank Updates* *3. Progress Update DC-DRC*	√	√	X	X	√	√
30 Jul 2019 *Jul 30, 2019*	1. Retail Financing Pipeline Progress (incl. Budget Marketing e-Business Management) 2. Publikasi Laporan Keuangan per 30 Juni 2019 3. Operation Updates a. Service Quality Improvement Program b. OREO Project Update c. Financing Process Improvement Update 4. ALIF Updates *1. Retail Financing Pipeline Progress (incl. Budget Marketing e-Business Management)* *2. Publication of Financial Statements as of 30 June 2019* *3. Operation Updates* *a. Service Quality Improvement Program* *b. OREO Project Update* *c. Financing Process Improvement Update* *4. ALIF Updates*	√	√	√	√	√	√
6 Aug 2019 *Aug 6, 2019*	1. Corporate Banking Business Update (inc. Funding & Financing) 2. Rencana Investasi BMI di Sukuk Corporate 3. Alur Proses Produk dan Aktifitas Baru *1. Corporate Banking Business Update (inc. Funding & Financing)* *2. BMI Investment Plan in Corporate Sukuk* *3. Product Process Flow and New Activities*	√	X	√	√	X	√

Tanggal *Date*	Agenda *Agenda*	Kehadiran *Attendance*					
		AKP	HS	AD	PBS	AW	AI*
13 Aug 2019 *Aug 13, 2019*	1. Financial Highlights July 2019 2. Bad Bank Updates 3. Collateral Updates *1. Financial Highlights July 2019* *2. Bad Bank Updates* *3. Collateral Updates*	√	√	√	√	X	√
20 Aug 2019 *Aug 20, 2019*	1. Update Progress Project Moana 2. Rencana RUPSLB 3. Resolution on Capital Plan & Latest Development *1. Update Moana's Project Progress* *2. EGMS Plan* *3. Resolution on Capital Plan & Latest Development*	√	√	√	√	X	√
27 Aug 2019 *Aug 27, 2019*	1. Retail Business Update 2. Corporate Business Update (incl. Alternative Instrument of Investment) 3. Update IAT Hasil Review Kopnus 4. Kick Off Meeting Audit Juni 2019 dengan KAP DBSD&A *1. Retail Business Update* *2. Corporate Business Update (incl. Alternative Instrument of Investment)* *3. Update IAT Kopnus Review Results* *4. Kick Off Audit Meeting June 2019 with KAP DBSD & A*	√	√	√	√	X	√
3 Sep 2019 *Sep 3, 2019*	1. Prosedur Penerapan Anti Fraud 2019 2. Hari Pelanggan Nasional (HPN) 3. Bad Bank Updates 4. Revisi Rencana Bisnis 2019 & Kick Off Rencana Bisnis 2020 *1. 2019 Anti-Fraud Application Procedures* *2. National Customer Day (HPN)* *3. Bad Bank Updates* *4. Revision of the 2019 Business Plan & Kick Off the 2020 Business Plan*	√	√	√	√	√	√
10 Sep 2019 *Sep 10, 2019*	1. Financial Highlight Agustus 2019 2. Collection Acceleration 3. Action Plan (Inc. Cost Efficiency Initiatives & Rights Issue Updates) *1. Financial Highlight August 2019* *2. Collection Acceleration* *3. Action Plan (Inc. Cost Efficiency Initiatives & Rights Issue Updates)*	X	√	√	√	√	√
17 Sep 2019 *Sep 17, 2019*	1. Videotron & Review Hijrah Cafe 2. Skema Perdamaian ALIF 3. Retail Banking Product Update 4. Fund Transfer Pricing (FTP) *1. Videotron & Hijrah Cafe Review* *2. ALIF Peace Scheme* *3. Retail Banking Product Update* *4. Fund Transfer Pricing (FTP)*	√	√	√	√	√	√

Tanggal *Date*	Agenda *Agenda*	Kehadiran *Attendance*					
		AKP	HS	AD	PBS	AW	AI*
24 Sep 2019 *Sep 24, 2019*	1. Renewal of Ittifaq & Fun Relax Corner 2. Wealth Management, E-Business, Priority Segmentation 3. Retail Business Update 4. Corporate Business Updates *1. Renewal of Ittifaq & Fun Relax Corner* *2. Wealth Management, E-Business, Priority Segmentation* *3. Retail Business Update* *4. Corporate Business Updates*	√	X	√	√	√	√
1 Okt 2019 *Oct 1, 2019*	1. Bad Bank Updates 2. Corporate Action Updates 3. Financial Implication BMI - ALIF *1. Bad Bank Updates* *2. Corporate Action Updates* *3. Financial Implication BMI - ALIF*	√	√	√	√	√	√
8 Okt 2019 *Oct 8, 2019*	1. Proses HT Muhammadiyah 2. Financial Highlights September 2019 3. Review Materi BoC-BoD Meeting 4. ALIF Progress Updates *1. Muhammadiyah HT Process* *2. Financial Highlights September 2019* *3. Review of BoC-BoD Meeting Materials* *4. ALIF Progress Updates*	√	√	√	√	√	√
15 Okt 2019 *Oct 15, 2019*	1. Corporate Action Update 2. Watchlist Update 3. Update Review Videotron & Café Hijrah 4. Progress TC PMS ALIF	√	√	√	√	√	√
22 Okt 2019 *Oct 22, 2019*	1. Corporate Banking (Financing Pipeline) 2. OREO Project Update / Cost Efficiency 3. Collection Acceleration Update 4. Review Materi BOC-BOD Meeting 28 Oktober 2019 *1. Corporate Banking (Financing Pipeline)* *2. OREO Project Update / Cost Efficiency* *3. Collection Acceleration Update* *4. Review the BOC-BOD Meeting Material October 28, 2019*	√	√	√	X	√	X
29 Okt 2019 *Oct 29, 2019*	1. Penamaan Ballroom & Ruangan 2. Corporate Actions Update 3. Retail Banking Update 4. HC Activities Update 5. Publikasi LK September 2019 *1. Naming Ballroom & Rooms* *2. Corporate Actions Update* *3. Retail Banking Update* *4. HC Activities Update* *5. LK Publication September 2019*	√	√	√	√	√	√

Tanggal *Date*	Agenda *Agenda*	Kehadiran *Attendance*					
		AKP	HS	AD	PBS	AW	AI*
6 Nov 2019 *Nov 6, 2019*	1. Audit Update 2. Financial Highlight Oktober 2019 3. RBB Update *1. Audit Update* *2. Financial Highlights October 2019* *3. Business Bank Plan Update*	√	√	√	X	X	√
12 Nov 2019 *Nov 12, 2019*	1. Corporate Banking (Financing Pipeline) Update 2. Bad Bank & Recognition Update 3. ALIF Updates 4. RBB 2020	√	√	√	√	X	√
19 Nov 2019 *Nov 19, 2019*	1. Branchless Banking Update 2. Corporate Action Update	√	√	√	√	√	√
26 Nov 2019 *Nov 26, 2019*	1. Rencana Bisnis DPLK Muamalat & Rekomendasi Hasil Audit OJK 2. Operation Update (Cost Efficiency) 3. Liquidity Update *1. Muamalat DPLK Business Plan & OJK Audit Result Recommendations* *2. Operation Update (Cost Efficiency)* *3. Liquidity Update*	√	√	√	X	√	√
3 Des 2019 *Dec 3, 2019*	1. EGMS Update 2. Retail Banking Update 3. Liquidity Update 4. Pencatatan BPR/BPRS *1. EGMS Update* *2. Retail Banking Update* *3. Liquidity Update* *4. Recording of BPR / BPRS*	√	√	√	√	√	√
10 Des 2019 *Dec 10, 2019*	1. Media Update 2. Financial Highlights November 2019 3. Bad Bank & Collateral Acceleration 4. Financing & Funding Pipeline: a. Retail Banking b. Corporate Banking *1. Media Update* *2. Financial Highlights November 2019* *3. Bad Bank & Collateral Acceleration* *4. Financing & Funding Pipeline:* *a. Retail Banking* *b. Corporate Banking*	√	√	√	X	√	√

Tanggal *Date*	Agenda *Agenda*	Kehadiran *Attendance*					
		AKP	HS	AD	PBS	AW	AI*
17 Des 2019 *Dec 17, 2019*	1. Preparation of BoC – BoD Meeting 26 Desember 2019 a. Jadwal Meeting 2020 (BOC & BOC Committees) b. Latest Development BMI c. ALIF Update d. Update Related to AML-CFT e. Liquidity Update 2. Benchmark Dokumen Pembiayaan Back to Back 3. Litigation Report 4. SAM Update *1. Preparation of BoC - BoD Meeting December 26, 2019* *a. 2020 Meeting Schedule (BOC & BOC Committees)* *b. Latest Development of BMI* *c. ALIF Update* *d. Update Related to AML-CFT* *e. Liquidity Update* *2. Back to Back Financing Document Benchmarks* *3. Litigation Report* *4. SAM Update*	√	√	√	√	√	√
Jumlah *Total*	Jumlah Rapat *Total Meetings*	49	49	49	49	49	28
	Jumlah Kehadiran *Total Attendance*	46	45	48	37	37	25
	Persentase kehadiran *Percentage of Attendance*	94%	92%	98%	76%	76%	89%

Keterangan :
*) Diangkat melalui RUPST tanggal 17 Mei 2019 dan memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK pada 13 Januari 2020
Description:
**) Appointed through the AGMS on May 17, 2019 and obtained the determination to pass the Capability and Compliance Assessment from FSA on January 13, 2020*

AKP Achmad Kusna Permana
HS Hery Syafril
AD Andri Donny
PBS Purnomo Budiwibowo Soetadi
AW Awaldi
AI Avianto Istihardjo

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Direksi dalam Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris

Selama tahun 2019, Direksi juga mengadakan rapat gabungan dengan Dewan Komisaris sebanyak 15 (lima belas) kali dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Meeting Frequency and Attendance Level of the Directors in the Join Meetings between Director and the Board of Commissioners

During 2019, the Board of Directors also held joint meetings with the Board of Commissioners 15 (fifteen) times with attendance as follows:

No.	Nama *Name*	Jumlah Rapat *Total Meetings*	Jumlah Kehadiran *Total Attendance*	Persentase *Percentage*
1.	Achmad Kusna Permana	15	15	100%
2.	Purnomo B. Soetadi	15	13	87%
3.	Hery Syafril	15	15	100%
4.	Awaldi	15	11	73%
5.	Andri Donny	15	15	100%
6.	Avianto Istihardjo*	8	8	100%

*) Diangkat melalui RUPST tanggal 17 Mei 2019 dan memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK pada 13 Januari 2020
**) Appointed through the AGMS on May 17, 2019, and obtained the determination to pass the Fit and Proper Test from FSA on January 13, 2020*

Rapat Gabungan

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Anggota dalam Rapat Gabungan antara Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Direksi

Sepanjang tahun 2019, Bank Muamalat mengadakan Rapat Gabungan sebanyak 1 kali. Adapun agenda dan tingkat kehadian para anggota dalam rapat adalah sebagai berikut:

Joint Meeting

Meeting Frequency and Attendance of Members in the Joint Meeting amongst the Sharia Supervisory Board, the Board of Commissioners, and the Board of Directors

Throughout 2019, Bank Muamalat held Joint Meetings 1 kali a number of times. The agenda and level of attendance of the members in the meeting are as follows:

Tanggal *Date*	Agenda	Kehadiran *Attendance*													
		MA*	SA	OS	IAH	IHA	ES	MHM**	AMJA**	AKP	HS	AD	PBS	AW	AI***
14 Okt 2019 *Oct 14, 2019*	Update on BMI	√	√	√	√	√	√	√	X	√	√	√	√	√	√
Jumlah *Total*	Jumlah Rapat *Total Meeting*	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Jumlah Kehadiran *Total Attendance*	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1
	Persentase kehadiran (%) *Percentage of Attendance (%)*	100	100	100	100	100	100	100	0	100	100	100	100	100	100

Keterangan/*Description*:
*) Mengundurkan diri sebagai Ketua DPS Bank Muamalat tanggal 14 Oktober 2019
**)Efektif setelah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK
***) Diangkat melalui RUPST tanggal 17 Mei 2019 dan memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK pada 13 Januari 2020
Information:
**) Resigned as Chairman of the Muamalat Bank DPS on October 14, 2019*
***)Effective after obtaining the pass determination of Fit and Proper Test from FSA*
****) Appointed through the AGMS on May 17, 2019 and obtained the determination to pass the Capability and Compliance Assessment from FSA on January 13, 2020*

IAH Ilham Akbar Habibie
IHA Iggi Haruman Achsien
ES Edy Setiadi
MHM Mohamed Hedi Mejai
AMJA Abdulsalam Mohammad Joher Al-Saleh
MA Ma'ruf Amin
SA Sholahudin Al-Aiyub
OS Oni Sahroni
AKP Achmad Kusna Permana
HS Hery Syafril
AD Andri Donny
PBS Purnomo Budiwibowo Soetadi
AW Awaldi
AI Avianto Istihardjo

Komite-Komite Pendukung Dewan Komisaris

Komite pada level Dewan Komisaris Bank Muamalat dibentuk sesuai pasal 11 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, bahwa dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk paling kurang :

1. Komite Audit;
2. Komite Pemantau Risiko; dan
3. Komite Nominasi dan Remunerasi;

Mengingat pentingnya penerapan GCG bagi Bank, maka Bank Muamalat juga membentuk Komite Tata Kelola Perusahaan. Sebagai Entitas Utama dalam konglomerasi keuangan, Bank Muamalat juga memiliki kewajiban untuk membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan yang mengatur bahwa dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris Entitas Utama wajib membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi.

Dalam rangka memenuhi komitmen terhadap peningkatan penerapan tata kelola perusahaan, Bank Muamalat telah membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi yang terpisah dengan Komite Tata Kelola Perusahaan.

Supporting Comittee of Board of Commissioners

The committee at the level of the Board of Commissioners of Bank Muamalat was formed in accordance with article 11 of Bank Indonesia Regulation Number 11/33/PBI/2009 concerning the Implementation of Good Corporate Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units, that in order to support the effectiveness of carrying out its duties and responsibilities, the Board of Commissioners must form at least:

1. *Audit Committee;*
2. *Risk Monitoring Committee; and*
3. *Nomination and Remuneration Committee;*

Considering the importance of implementing GCG for Banks, Bank Muamalat also formed a Corporate Governance Committee. As a Main Entity in a financial conglomerate, Bank Muamalat also has the obligation to form an Integrated Governance Committee as stipulated in article 14 of the Financial Services Authority Regulation Number 18/POJK.03/2014 concerning the Implementation of Integrated Governance for Financial Conglomerates which regulates that in order to support the effectiveness performing its duties, the Board of Commissioners of the Main Entity is required to form an Integrated Governance Committee.

In order to fulfil commitments to improve the implementation of corporate governance, Bank Muamalat has formed an Integrated Corporate Governance Committee that is separate from the Corporate Governance Committee.

Komite Audit
Audit Committee

Dewan Komisaris membentuk Komite Audit guna membantu Dewan Komisaris dalam melakukan evaluasi atas pelaksanaan audit intern dan pemantauan atas tindak lanjut hasil audit guna menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan Bank.

The Board of Commissioners established the Audit Committee to assist the Board of Commissioners in evaluating the implementation of internal audits and monitoring the follow-up of audit results to assess the adequacy of internal control including the adequacy of the Bank's financial reporting process.

Dasar Hukum

Pembentukan Komite Audit didasarkan pada peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
2. Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55 /POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
4. Anggaran Dasar Bank tentang tugas dan wewenang Dewan Komisaris.

Legal Basis

The initiation of the Audit Committee is based on the following rules:

1. *Bank Indonesia Regulation No. 11/33/PBI/2009 dated December 7, 2009, concerning Implementation of Good Corporate Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units.*
2. *Bank Indonesia Circular Letter No. 12/13/DPbS dated April 30, 2010, concerning Implementation of Good Corporate Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units.*
3. *Financial Services Authority Regulation No. 55/POJK.04/2015 dated December 29, 2015, concerning the Formation and Guidelines for the Implementation of the Audit Committee's Work.*
4. *Bank's Articles of Association concerning the duties and authorities of the Board of Commissioners.*

Pedoman Kerja/Piagam Komite Audit

Komite Audit Bank Muamalat telah memiliki Piagam yang mengatur struktur dan keanggotaan, persyaratan keanggotaan, tugas dan tanggung jawab, wewenang, rapat, masa tugas, waktu kerja dan pelaporan. Piagam Komite Audit terakhir dikinikan pada tanggal 2 Mei 2017 dan akan diperbaharui sesuai dengan perkembangan regulasi yang berlaku serta kondisi terkini dari Bank.

Audit Committee Charter

The Bank Muamalat Audit Committee has a Charter governing structure and membership, membership requirements, duties and responsibilities, authority, meetings, tenure, working time and reporting. The last Audit Committee Charter was updated on May 2, 2017, and will be updated in accordance with the development of applicable regulations and the latest conditions of the Bank.

Kriteria Anggota Komite Audit

Persyaratan keanggotaan Komite Audit yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak Independen sebagaimana diatur dalam Piagam Komite Audit antara lain adalah:

1. Wajib memiliki integritas dan reputasi keuangan yang baik.
2. Wajib memiliki kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
3. Wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Bank, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
4. Wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Bank.
5. Wajib memiliki paling kurang satu anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan/atau keuangan.

Criteria of Committee Audit Member

Audit Committee membership requirements originating from Independent Commissioners and Independent Parties as stipulated in the Audit Committee Charter include:

1. *Must have integrity and good financial reputation.*
2. *Must have the ability, knowledge, experience in accordance with the field of work, and be able to communicate well.*
3. *Must understand financial statements, company business specifically related to Bank services or business activities, audit processes, risk management, and legislation in the Capital Market and other related laws and regulations.*
4. *Must comply with the Audit Committee code of ethics established by the Bank.*
5. *Must have at least one member with an educational background and expertise in accounting and/or finance.*

6. Wajib memiliki paling kurang satu anggota yang memiliki keahlian di bidang perbankan syariah.
7. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa assurance, jasa non-assurance, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.
8. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Bank dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir kecuali Komisaris Independen.
9. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Bank.
10. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Bank Muamalat Indonesia.
11. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank Muamalat Indonesia.

Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas Komite Audit sesuai Piagam Komite Audit antara lain adalah:

1. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan audit intern dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
2. Menunjuk, menetapkan fungsi-fungsi dan standar Auditor Eksternal (Kantor Akuntan Publik).
3. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh fungsi audit intern, yang meliputi perencanaan audit, ruang lingkup audit, proses audit dan pelaporan hasil audit, serta memastikan independensi fungsi audit intern.
4. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, auditor intern, Dewan Pengawas Syariah, dan/atau auditor ekstern, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
5. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Bank kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Bank.
6. Melakukan penelaahan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Bank.
7. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya.

6. Must have at least one member who has expertise in sharia banking.
7. Not a person in the Public Accounting Firm, Legal Consultant Office, Public Appraisal Service Office or other party providing assurance services, non-assurance services, appraisal services and/or other consulting services to the relevant Issuer or Public Company within 6 (six) last month.
8. Not a person who works or has the authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise the activities of the Bank within the last 6 (six) months except for Independent Commissioners.
9. Do not have direct or indirect shares in the Bank.
10. Has no affiliation with members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or Major Shareholders of Bank Muamalat Indonesia.
11. Do not have business relationships, directly or indirectly, related to the business activities of Bank Muamalat Indonesia.

Duties and Responsibilities

The duties of the Audit Committee in accordance with the Audit Committee Charter are:

1. Evaluating the implementation of internal audits in order to assess the adequacy of internal control including the adequacy of the financial reporting process.
2. Appointing and determining the functions and standards of the External Auditor (Public Accounting Firm).
3. Evaluating the implementation of tasks carried out by the internal audit function, which includes audit planning, the scope of the audit, the audit process and reporting of audit results, and ensuring the independence of the internal audit function.
4. Evaluating the implementation of follow-up actions by the Board of Directors on audit findings and/or recommendations from the supervision results of the Financial Services Authority, internal auditors, Sharia Supervisory Board, and/or external auditors, to provide recommendations to the Board of Commissioners.
5. Reviewing financial information that will be issued by the Bank to the public and/or authorities, including financial statements, projections and other reports related to Bank financial information.
6. Reviewing compliance with laws and regulations relating to the Bank's activities.
7. Providing an independent opinion in the event of disagreement between management and the Accountant for the services provided.

8. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan fee.
9. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Bank.
10. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Bank.

Wewenang Komite Audit

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit memiliki wewenang sebagaimana diatur dalam Piagam Komite Audit sebagai berikut:

1. Mengakses dokumen, data, dan informasi Bank tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan.
2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
3. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya.
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Ketentuan Masa Jabatan

Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya.

Susunan, Jumlah, Komposisi dan Dasar Pengangkatan Komite Audit

Sesuai pasal 36 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Anggota Komite Audit paling kurang terdiri dari:

1. seorang Komisaris Independen;
2. seorang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang akuntansi keuangan; dan
3. seorang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang perbankan syariah.

Keanggotaan Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 023/B/DIR-KPTS/VIII/2018 tanggal 9 Agustus 2018 tentang Komite Audit PT Bank Muamalat Indonesia Tbk adalah sebagai berikut:

8. *Providing recommendations to the Board of Commissioners regarding the appointment of an Accountant based on independence, the scope of the assignment, and fees.*
9. *Examining complaints relating to the Bank's accounting and financial reporting processes.*
10. *Examining and providing advice to the Board of Commissioners related to the potential conflict of interest of the Bank.*

Authorities of Audit Committee

In performing the duties, the Audit Committee has the authority as stipulated in the Audit Committee Charter as follows:

1. *Accessing bank documents, data and information about employees, funds, assets, and the Company's resources required.*
2. *Communicating directly with employees, including the Board of Directors and those undertaking the functions of internal audit, risk management, and accountants related to the duties and responsibilities of the Audit Committee.*
3. *Involving independent parties outside the Audit Committee members who are needed to help carry out their duties.*
4. *Performing other authorities granted by the Board of Commissioners.*

Terms of Office

The term of service for members of the Audit Committee may not be longer than the term of office of the Board of Commissioners as stipulated in the Articles of Association and can be re-elected only for one subsequent period.

Structure, Total, Composition and Basis of Appointment of Audit Committee

In accordance with article 36 of Bank Indonesia Regulation Number 11/33/PBI/2009 concerning Implementation of Good Corporate Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units, Members of the Audit Committee shall at least consist of:

1. *An Independent Commissioner;*
2. *An Independent party that has expertise in the field of financial accounting; and*
3. *An Independent party that has expertise in sharia banking.*

Audit Committee membership based on Directors Decree No. 023/B/DIR-KPTS/VIII/2018 dated August 9, 2018, concerning the Audit Committee of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk are as follows:

Nama *Name*	Jabatan *Position*	Keterangan *Information*
Iggi H. Achsien	Ketua *Chairman*	Komisaris Independen *Independent Commissioner*

Nama *Name*	Jabatan *Position*	Keterangan *Information*
Achmad Arifin	Anggota *Member*	Pihak Independen ahli di bidang akuntansi keuangan *Independent Party experts in the field of financial accounting*
Herbudhi S. Tomo	Anggota *Member*	Pihak Independen ahli di bidang perbankan syariah *Independent Party experts in the field of Islamic banking*

Pada akhir tahun 2019 terdapat penyesuaian terhadap keanggotan Komite Audit Bank Muamalat yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi No. 032/B/DIR-KPTS/XII/2019 tanggal 5 Desember 2019, dengan susunan anggota sebagai berikut:

At the end of 2019, there was an adjustment to the membership of the Audit Committee of Bank Muamalat, which was determined by Decree of the Board of Directors No. 032/B/DIR-KPTS/XII/2019 dated December 5, 2019, with the composition of members as follows:

Nama *Name*	Jabatan *Position*	Keterangan *Description*
Iggi H. Achsien	Ketua *Chairman*	Komisaris Independen *Independent Commissioner*
Tindomora Siregar	Anggota *Member*	Pihak Independen ahli di bidang perbankan syariah *Independent Party experts in the field of Islamic banking*
Dwi Sasongko	Anggota *Member*	Pihak Independen ahli di bidang akutansi keuangan *Independent Party expert in the field of financial accounting*

Perubahan keanggotaan Komite Audit tersebut masih sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

The change in membership of the Audit Committee is still in accordance with Bank Indonesia Regulation No. 11/33/PBI/2009 dated December 7, 2009 concerning Implementation of Good Corporate Governance for Banks Sharia General and Sharia Business Units and Services Authority Regulations Finance No. 55/POJK.04/2015 dated December 29, 2015 concerning Formation and Guidelines for Audit Committee Work Implementation.

Profil Komite Audit

Profile of Audit Committee



Iggi H. Achsien

Ketua
Chairman of Audit Committee

Profil ketua Komite Audit Iggi H Achsien dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam Buku Laporan Tahunan ini.

The profile of the chairman of the Audit Committee, Iggi H Achsien, can be seen in the chapter of the Company Profile in this Annual Report Book.



Tindomora Siregar

Anggota Komite Audit
Member of Audit Committee

Usia *Age*	61 tahun *61 Years of Age*
Kewarganegaraan *Nationality*	Indonesia
Domisili *Domicile*	Jakarta
Riwayat Pendidikan *Education Background*	S2 Bidang Finance dari Universitas Birmingham, London *Master of Finance of Birmingham University, London*
Riwayat Pekerjaan *Work Experiences*	Bergabung dengan PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk. sejak 2015 sampai Januari 2019 sebagai Kepala SKAI. Jabatan sebelumnya, tahun 2010 s/d 2014 sebagai Direktur Group Penjaminan di LPS. Tahun 1984 s/d 2010 sebagai Pengawas Bank Indonesia dengan berbagai jabatan, yaitu tahun 1984 s/d 1986 sebagai Pengawas Bank Indonesia wilayah kerja Padang, tahun 1992 sebagai Pengawas Bank Indonesia Kantor Pusat Jakarta, tahun 1993 s/d 1997 dimutasi ke kantor perwakilan Bank Indonesia London, tahun 1998 s/d 2003 dimutasi ke Bank Indonesia Pusat Jakarta, tahun 2005 sebagai Pemimpin Cabang Bank Indonesia KEPRI di Batam, tahun 2007 s/d. 2009 dimutasi ke Direktorat Investigasi dan Mediasi Bank Indonesia sebagai investigator madya. *Joined PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk. from 2015 to January 2019 as Head of Internal Audit Unit. Previous position, from 2010 to 2014 as Director of the Guarantee Group at LPS. From 1984 to 2010 as a Supervisor of Bank Indonesia with various positions, from 1984 to 1986 as a Supervisor of Bank Indonesia in the Padang working area, in 1992 as a Supervisor of Bank Indonesia Jakarta Head Office, from 1993 to 1997, he was transferred to the Bank's representative office Indonesia London, from 1998 to 2003, was transferred to Bank Indonesia Pusat Jakarta, in 2005 as Head of Bank Indonesia KEPRI Branch Office in Batam, in 2007 up to. 2009 was transferred to the Directorate of Investigation and Mediation of Bank Indonesia as intermediate investigator.*
Dasar Hukum Pengangkatan *Basis of Appointment*	Surat Keputusan Direksi No. 023/B/DIR-KPTS/X/2019 tentang Komite Audit PT Bank Muamalat Indonesia Tbk tanggal 24 Oktober 2019 *Decree of the Board of Directors No. 023/B/DIR-KPTS/X/2019 concerning the Audit Committee of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk on October 24, 2019.*
Kualifikasi *Qualifications*	Pihak independen yang memiliki keahlian dalam bidang perbankan/keuangan syariah, dan audit. *Independent party who have expertise in banking/sharia finance, and auditing.*



Dwi Sasongko

Anggota Komite Audit
Member of Audit Committee

Usia *Age*	56 tahun *56 Year of Age*
Kewarganegaraan *Nationality*	Indonesia
Domisili *Domicile*	Banten
Riwayat Pendidikan *Education Background*	Akutansi dari Universitas Diponegoro Semarang *Accountant of University of Diponegoro, Semarang*
Riwayat Pekerjaan *Work Experiences*	Memulai karirnya sebagai Auditor di Semarang pada tahun 1987 dengan bekerja di Kantor Akuntan Publik "Tahrir Hidayat". Beliau bergabung di PT Bank Niaga Tbk dengan menduduki beberapa posisi (1991 - 2006) dan kemudian sebagai Head of Internal Audit di PT Bank Permata Tbk (2006 – 2012). *Commenced his career as an Auditor in Semarang in 1987 by working at the "Tahrir Hidayat" Public Accountant Firm. He joined PT Bank Niaga Tbk by holding several positions (1991-2006) and later as Head of Internal Audit at PT Bank Permata Tbk (2006-2012).*
Dasar Hukum Pengangkatan *Basis of Appointment*	Surat Keputusan Direksi No. 032/B/DIR-KPTS/XII/2019 tentang Komite Audit PT Bank Muamalat Indonesia Tbk tanggal 5 Desember 2019. *Decree of the Board of Directors No. 032/B/ DIR-KPTS/XII/2019 concerning the Audit Committee of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk on December 5, 2019.*
Kualifikasi *Qualifications*	Pihak independen yang memiliki keahlian dalam bidang akuntansi keuangan dan audit. *Independent party who have expertise in accountant finance dan auditing.*

Independensi Anggota Komite Audit

Seluruh anggota Komite Audit yang berasal dari Pihak Independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya bertindak independen.

Independence of Member of Audit Committee

All members of the Audit Committee are from Independent Parties does not have a financial relationship, management, ownership shares and/or family relations with the Board of Commissioners, Directors and/or Controlling Shareholders or relationship with the Bank, which can affect their ability to act, independently.

Aspek Independensi *Independence Aspects*	Tindomora Siregar	Dwi Sasongko
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi *Has no financial relationship with the Board of Commissioners and Directors*	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi *Has no management relationship in the Company, its subsidiaries, or affiliated companies*	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi *Has no management relationship in the company, its subsidiaries, or affiliated companies*	√	√

Aspek Independensi *Independence Aspects*	Tindomora Siregar	Dwi Sasongko
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG *Does not have family relations with the Board of Commissioners, Directors, and/or fellow members of the Nomination, Remuneration and GCG Committee*	√	√
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah *Does not serve as a manager of political parties, officials and government*	√	√

Hubungan Afiliasi

Affiliation

Nama *Name*	Jabatan *Position*	Hubungan Keuangan dengan *Financial Relationship with*						Hubungan Keluarga dengan *Family Relationship with*						Hubungan Kepengurusan *Management Relationship*	
		Dewan Komisaris *Board of Commissioners*		Direksi *Board of Directors*		Pemegang Saham *Shareholders*		Dewan Komisaris *Board of Commissioners*		Direksi *Board of Directors*		Pemegang Saham *Shareholders*			
		Ya *Yes*	Tidak *No*	Ya *Yes*	Tidak *No*	Ya *Yes*	Tidak *No*	Ya *Yes*	Tidak *No*	Ya *Yes*	Tidak *No*	Ya *Yes*	Tidak *No*	Ya *Yes*	Tidak *No*
Tindomora Siregar			√		√		√		√		√		√		√
Dwi Sasongko			√		√		√		√		√		√		√

Rapat Komite Audit (Frekuensi Pertemuan dan Tingkat Kehadiran & Persentasenya)

Selama tahun 2019, Komite Audit telah menyelenggarakan 11 (sebelas) kali rapat dengan minimal satu agenda rapat untuk setiap kali rapat termasuk pembahasan mengenai risalah rapat, serta hal-hal yang perlu ditindaklanjuti dari rapat sebelumnya dan beberapa pembahasan lainnya. Berdasarkan notulen rapat Komite Audit, kehadiran dari masing-masing anggota Komite Audit dalam rapat adalah sebagai berikut:

Audit Committee Meetings (Frequency of Meetings, Attendance, and Percentage)

During 2019, the Audit Committee held 11 (eleven) meetings with at least one meeting agenda for each meeting including discussion of minutes of meetings, as well as matters that need to be followed up from previous meetings and several other discussions. On the basis of the minutes of the Audit Committee meeting, the attendance of each Audit Committee member in the meeting is as follows:

Nama *Name*	Jabatan *Position*	Total Rapat *Total Meetings*	Jumlah Kehadiran *Number of Attendance*	Persentase *Percentage*
Iggi H. Achsien	Ketua *Chairman*	11	10	91%
Achmad Arifin*	Anggota *Member*	8	8	100%
Herbudhi S. Tomo**	Anggota *Member*	8	8	100%
Dwi Sasongko***	Anggota *Member*	3	2	67%
Tindomora Siregar****	Anggota *Member*	3	3	100%

*) Berhenti menjabat sebagai anggota komite per tanggal 6 November 2019
**) Berhenti menjabat sebagai anggota komite per tanggal 1 November 2019
***) Ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi No. 032/B/DIR-KPTS/XII/2019 tanggal 5 Desember 2019
****) Pertama kali ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi No. 023/B/DIR-KPTS/X/2019 tanggal 24 Oktober 2019
**) Stop serving as a committee member as of November 6, 2019*
***) Stop serving as a committee member as of November 1, 2019*
****) Stipulated through Directors Decree No. 032/B/DIR-KPTS/XII/2019 dated December 5, 2019*
*****) First determined through Directors Decree No. 023/B/DIR-KPTS/X/2019 dated October 24, 2019*

Pembahasan yang telah dilakukan oleh Komite Audit dalam rapat selama tahun 2019, antara lain sebagai berikut:

1. Pokok-pokok temuan audit 2018, Rencana Kerja dan anggaran Internal Audit Tahun 2019.
2. Kick Off Meeting Audit per 31 Des 2018 dengan KAP DBSDA.
3. Finalisasi hasil Audit periode 2018.
4. Pembahasan rencana strategi internal audit.
5. Presentasi tentang *progress report* 2 (dua) nasabah pembiayaan yang menjadi obyek audit.
6. Laporan Hasil Audit semester I 2019.
7. Pembahasan perubahan rencana Audit tahun 2019.
8. Pembahasan struktur organisasi IAT dan kebutuhan SDM IAT tahun 2019.
9. Pembahasan penunjukkan KAP untuk Laporan Keuangan BMI periode 31 Desember 2019.
10. Pembahasan beberapa laporan hasil audit.
11. Kebijakan Anti Fraud dan usulan perubahan organisasi Anti Fraud.
12. Evaluasi terkait peran IAT sebagai counterpart BI dan OJK serta survei kepuasan manajemen.
13. Update terkait perkembangan Audit Khusus yang baru.
14. Kick Of Meeting General Audit Lap Keuangan per 30 Jun 2019 dengan KAP DBSDA

Pengembangan Kompetensi

Tabel penjabaran pengembangan kompetensi bagi anggota Komite Audit dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan di dalam buku Laporan Tahunan ini

Pelaksanaan Tugas Komite Audit

Selama tahun 2019 Komite Audit telah melaksanakan beberapa aktivitas dalam rangka menjalankan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya, sebagai berikut:

1. ***Review* Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Bank**
   Sebagai perangkat kerja Dewan Komisaris maka Komite Audit secara rutin melakukan *review* dan pengawasan terhadap rancangan dan implementasi Sistem Pengendalian Intern Bank, melalui penelaahan terhadap komponen Pengendalian Internal dan Laporan Hasil Audit yang dilakukan oleh fungsi Internal Audit. Hasil review dimaksud dipergunakan sebagai masukan kepada Dewan Komisaris untuk memberikan pengarahan kepada manajemen dalam menyusun dan mengimplementasikan sistem pengendalian internal, maupun melaksanakan operasional Bank.
2. ***Review* Aktivitas Fungsi Internal Audit**
   Review terhadap aktivitas fungsi Internal Audit dimaksudkan sebagai proses penilaian atas peran dan pelaksanaan fungsi Audit Internal dalam mengevaluasi terhadap rancangan dan implementasi system pengendalian internal, manajemen risiko dan proses tata kelola.

Discussions that have been conducted by the Audit Committee in the meeting during 2019 are:

1. *Highlights of 2018 audit findings, 2019 Internal Audit Work Plan and budget.*
2. *Kick Off Audit Meeting per December 31, 2018, with KAP DBSDA.*
3. *Finalisation of Audit results for the 2018 period.*
4. *Discussion of the internal audit strategy plan.*
5. *Presentation on progress reports of 2 (two) financing customers who are the object of the audit.*
6. *Audit Reports for the first semester 2019.*
7. *Discussion on changes to the 2019 Audit plan.*
8. *Discussion of IAT organizational structure and IAT HR needs in 2019.*
9. *Discussion on the appointment of KAP for BMI Financial Report for the period of December 31, 2019.*
10. *Discussion of several audit results reports.*
11. *Anti-Fraud Policy and proposed changes to the Anti-Fraud organization.*
12. *Evaluation related to the role of the IAT as a counterpart of BI and FSA as well as a survey of management satisfaction.*
13. *Updates related to new Special Audit developments.*
14. *Kick off General Audit Lap Financial Meeting per 30 Jun 2019 with KAP DBSDA.*

Competence Development

The table describing the development of competencies for members of the Audit Committee can be seen in the chapter Company Profile in this Annual Report book.

Duties Implementation of Audit Committee

During 2019, the Audit Committee carried out several activities in the context of carrying out its functions, duties and responsibilities, as follows:

1. ***Reviewing the Effectiveness of the Bank's Internal Control System***
   As a work means of the Board of Commissioners, the Audit Committee routinely reviews and supervises the design and implementation of the Bank's Internal Control System, through a review of the Internal Control component and the Audit Reports conducted by the Internal Audit function. The results of the review referred to are used as input to the Board of Commissioners to provide direction to management in developing and implementing an internal control system, as well as carrying out Bank operations.
2. ***Reviewing of Internal Audit Function Activities***
   The review of the activities of the Internal Audit function is intended as a process of evaluating the role and implementation of the Internal Audit function in evaluating the design and implementation of the internal control system, risk management and governance processes.

Perencanaan Audit Tahunan di-review oleh Komite Audit dan Laporan Hasil Audit oleh fungsi Internal Audit secara rutin dikomunikasikan dalam rapat bulanan kepada Komite Audit. Selama tahun 2019, SKAI telah melakukan 33 audit reguler (sesuai RKAT 2019), 13 audit khusus dan 16 audit investigasi (audit di luar RKAT 2019 karena adanya permintaan oleh Direksi, Komite Audit, Regulator, dll.). Dengan demikian, secara keseluruhan SKAI telah melakukan penugasan audit sebanyak 62 audit atau telah tercapai 188% dari target audit yang direncanakan. Beberapa Rekomendasi yang disampaikan untuk peningkatan pengendalian internal Bank diantaranya:

a. Kelemahan yang dijumpai dari hasil audit agar segera disampaikan kepada pihak management untuk segera dilakukan tindak lanjutnya.
b. Tindak lanjut hasil audit agar selalu dimonitor pelaksanaannya sehingga memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan Bank.
c. Untuk meningkatkan kompetensi dan kemampuan Sumber Daya Manusia audit internal, maka perlu dilakukan pemberian training pengetahuan operasional perbankan bagi auditor yang ada, serta mengikutsertakan pada pendidikan sertifikasi manajemen risiko dan internal audit seperti QIA, CIA, CBA, CISA, CFA.

3. **Pengawasan terhadap Pelaksanaan Audit Eksternal**

Komite Audit melakukan pengawasan terhadap Pelaksanaan Audit Eksternal, melalui evaluasi terhadap proses pemilihan Kantor Akuntan Publik yang akan ditugaskan untuk melakukan audit laporan keuangan tahunan, mengawasi dan mereview pelaksanaan auditnya dan mereview hasil audit laporan keuangan.

Untuk audit laporan keuangan posisi 31 Desember 2019, telah ditunjuk Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali (dbsd&a), dengan beberapa pertimbangan sesuai wewenang yang diberikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan pertimbangan fee yang diajukan, serta mengacu kepada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 36/SEOJK.03/2017 tanggal 11 Juli 2017.

4. **Review Penyajian Laporan Keuangan Publikasi.**

Komite Audit secara periodik melakukan *review* terhadap laporan keuangan triwulanan sebelum dilakukan publikasi. Pelaksanaan *review* tersebut dimaksudkan untuk menilai kewajaran *figure* yang disajikan.

5. **Realisasi Rapat Komite Audit selama tahun 2019**

Pelaksanaan Rapat Komite Audit selama tahun 2019 adalah sebanyak 11 (sebelas) kali, dengan materi pembahasan diantaranya hasil audit tahun 2018, rencana kerja Audit 2019, penunjukan KAP untuk audit laporan keuangan 2019, *update progress* temuan audit internal 2019, kebijakan anti fraud dan struktur organisasi Anti Fraud.

Annual Audit Planning is reviewed by the Audit Committee and the Audit Report by the Internal Audit function is routinely communicated in monthly meetings to the Audit Committee. During 2019, the Internal Audit Unit conducted 33 regular audits (in accordance with RKAT 2019), 13 special audits and 16 investigative audits (audits outside the 2019 RKAT due to requests by the Directors, Audit Committee, Regulators, etc.). Thus, the Internal Audit Unit has completely conducted 62 audit assignments or 188% of the planned audit target has been achieved. Some of the recommendations made to improve the Bank's internal control include:

a. Weaknesses that are found from the results of the audit to be immediately submitted to the management for immediate follow-up.
b. Follow-up of audit results so that their implementation is always monitored so as to provide added value to the achievement of the Bank's objectives.
c. To enhance the competence and capability of internal audit Human Resources, it is necessary to provide training in banking operational knowledge for existing auditors, as well as to include education on risk management certification and internal audit, such as QIA, CIA, CBA, CISA, CFA.

3. ***Supervision of the Implementation of External Audit***

The Audit Committee supervises the External Audit, through an evaluation of the selection process of the Public Accountant Firm that will be assigned to audit the annual financial statements, supervise and review the implementation of the audit and review the results of audits of the financial statements.

For the audit of financial statements as of December 31, 2019, the Public Accountant Firm of Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali (dbsd & a) has been appointed, with several considerations in accordance with the authority given by the General Meeting of Shareholders and consideration of the proposed fees, and refer to the Circular Financial Services Authority No. 36/SEOJK.03/2017 dated on July 11, 2017.

4. ***Reviewing of Presentation of Published Financial Statements.***

The Audit Committee periodically reviews quarterly financial statements before publication. The review is intended to assess the fairness of the figures presented.

5. ***Realization of Audit Committee Meetings during 2019***

The implementation of Audit Committee Meetings during 2019 was 11 (eleven) times, with discussion material including the results of the 2018 audit, 2019 Audit work plan, appointment of KAP for the audit of 2019 financial statements, update progress of the 2019 internal audit findings, anti-fraud policy and organizational structure Anti-Fraud.

Komite Nominasi dan Remunerasi
Nomination and Remuneration Committee

Dewan Komisaris membentuk Nominasi dan Remunerasi untuk menilai, memantau, mengevaluasi dan memastikan bahwa pelaksanaan Sistem Nominasi dan Remunerasi telah berjalan sebagaimana mestinya an sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara teratur dan konsisten, memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas hasil evaluasi mengenai kesesuaian antara sistem Nominasi dan Remunerasi dengan pelaksanaan kebijakan tersebut di internal Bank dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris sepanjang masih dalam lingkup tugas dan kewajiban Dewan Komisaris berdasarkan Ketentuan peraturan yang berlaku.

The Board of Commissioners forms a Nomination and Remuneration to assess, monitor, evaluate and ensure that the implementation of the System Nomination and Remuneration has proceeded accordingly in accordance with the provisions that apply regularly and consistently, provide recommendations to the Board of Commissioners on the results of the evaluation regarding the suitability of the Nomination and Remuneration system with implementation of the policy in the Bank's internal and implement other tasks given by the Board of Commissioners as long as they are within the scope of duties and obligations of the Board of Commissioners based on Regulations in force.

Dasar Hukum

1. Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
2. POJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik
3. Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
4. Anggaran Dasar Bank tentang tugas dan wewenang Dewan Komisaris.

Legal Basis

1. *Bank Indonesia Regulation No. 11/33/PBI/2009 dated December 7, 2009, concerning Implementation of Good Corporate Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units.*
2. *POJK No. 34/POJK.04/2014 concerning the Nomination and Remuneration Committee of Issuers or Public Companies.*
3. *Bank Indonesia Circular Letter No. 12/13/DPbS dated April 30, 2010 concerning Implementation of Good Corporate Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units.*
4. *Bank's Articles of Association concerning the duties and authority of the Board of Commissioners.*

Pedoman Kerja/Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi

Bank Muamalat Indonesia telah memiliki Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi yang senantiasa ditinjau secara berkala dan terakhir pada tanggal 19 September 2017. Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi mengatur antara lain:

1. struktur dan keanggotaan,
2. masa tugas,
3. persyaratan keanggotaan,
4. rapat komite,
5. kode etik,
6. tugas dan tanggung jawab,
7. hubungan dengan pihak-pihak terkait,
8. program kerja,
9. pelaporan,
10. remunerasi dan anggaran
11. evaluasi kinerja.

Board Manual/Charter of Nomination and Remuneration Committee

Bank Muamalat Indonesia has a Nomination and Remuneration Committee Charter which is regularly reviewed and lastly on September 19, 2017. The Nomination and Remuneration Committee Charter regulates, among others:

1. *structure and membership,*
2. *tenure,*
3. *membership requirements,*
4. *committee meeting,*
5. *code of ethics,*
6. *Duties and responsibilities,*
7. *relations with related parties,*
8. *work program,*
9. *reporting,*
10. *remuneration and budget*
11. *performance evaluation.*

Kriteria Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Persyaratan keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak Independen sebagaimana diatur dalam Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi adalah:

Criteria of Member of Nomination and Remuneration Committee

The membership requirements of the Nomination and Remuneration Committee originating from Independent Commissioners and Independent Parties as stipulated in the Nomination and Remuneration Committee Charter are:

1. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi secara bersama-sama memiliki keseimbangan antara keahlian dan pengalaman dengan latar belakang pemahaman yang luas mengenai proses bisnis Bank Muamalat Indonesia secara umum.
2. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi wajib memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.
3. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki kompetensi dan pengalaman yang cukup di bidang:
   a. Peraturan Perundang-undangan (pemahaman mendalam mengenai konsep dan praktik peraturan perundangan, perbankan, *Good Corporate Governance).*
   b. Proses bisnis perbankan syariah.
4. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi harus memiliki sikap yang independen, objektif dan profesional.
5. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi harus memiliki dedikasi, pemahaman yang baik tentang organisasi, lingkungan bisnis, risiko maupun pengendalian.
6. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik.
7. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan konflik kepentingan terhadap Bank Muamalat Indonesia, seperti:
   a. Mempunyai kaitan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat kedua baik menurut garis lurus maupun garis ke samping dengan staf dan pegawai atau Jajaran Manajemen Bank Muamalat Indonesia.
   b. Mempunyai kaitan dengan rekanan Bank Muamalat Indonesia, pihak-pihak lain yang dilarang menurut ketentuan perundang- undangan maupun peraturan lain yang berlaku.
8. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang berasal dari pihak independen wajib memenuhi syarat:
   a. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Bank Muamalat Indonesia, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau Pemegang Saham Utama Bank Muamalat Indonesia.
   b. Memiliki pengalaman terkait Nominasi dan/atau Remunerasi.
   c. Tidak merangkap jabatan sebagai anggota komite lainnya yang dimiliki Bank Muamalat Indonesia.

Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Nominasi dan Remunerasi mempunyai peran membantu pelaksanaan tugas dari Dewan Komisaris dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris, dengan rincian sebagai berikut:
Terkait dengan kebijakan nominasi:

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah.

1. *Members of the Nomination and Remuneration Committee together have a balance between expertise and experience with a background of a broad understanding of the business processes of Bank Muamalat Indonesia in general.*
2. *Members of the Nomination and Remuneration Committee must have good integrity, character and morals.*
3. *Members of the Nomination and Remuneration Committee have sufficient competence and experience in the fields of:*
   a. *Legislation (in-depth understanding of the concepts and practices of legislation, banking, Good Corporate Governance).*
   b. *Sharia banking business process.*
4. *Members of the Nomination and Remuneration Committee must have an independent, objective and professional attitude.*
5. *Members of the Nomination and Remuneration Committee must have dedication, a good understanding of the organisation, the business environment, risk and control.*
6. *Members of the Nomination and Remuneration Committee must have good communication skills.*
7. *Members of the Nomination and Remuneration Committee do not have personal interests/relationships that can cause negative impacts and conflicts of interest on Bank Muamalat Indonesia, such as:*
   a. *Having a family relationship in blood and marriage to the second degree either according to a straight line or sideways line with staff and employees or the Management Board of Bank Muamalat Indonesia.*
   b. *Having links with Bank Muamalat Indonesia's partners, other parties which are prohibited according to the provisions of the legislation or other applicable regulations.*
8. *Members of the Nomination and Remuneration Committee who come from independent parties must meet the following requirements:*
   a. *Having no affiliation with Bank Muamalat Indonesia, members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, or Major Shareholders of Bank Muamalat Indonesia.*
   b. *Having experience related to Nomination and/or Remuneration.*
   c. *Not concurrently serving as another committee member owned by Bank Muamalat Indonesia.*

Duties and Responsibilities

The Nomination and Remuneration Committee has the role of assisting the implementation of the duties of the Board of Commissioners and is responsible to the Board of Commissioners, with the following details:
Related to the nomination policy:

1. *Providing recommendations to the Board of Commissioners regarding the system and procedures for the selection and/or replacement of members of the Board of Commissioners, Directors and Sharia Supervisory Board.*

2. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi dan kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
4. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.
5. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
6. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Dewan Pengawas Syariah.
7. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon pihak independen yang akan menjadi anggota Komite.

Terkait dengan kebijakan remunerasi:
1. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi.
2. Melakukan evaluasi terhadap kesesuaian antara kebijakan remunerasi dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan.

Komite Nominasi dan Remunerasi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab terkait dengan kebijakan remunerasi paling kurang wajib memperhatikan:
1. Kinerja keuangan.
2. Pemenuhan pembentukan Penyisihan Penghapusan Asset.
3. Kewajaran dengan peer group.
4. Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Bank.

Wewenang Komite Nominasi dan Remunerasi

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Nominasi dan Remunerasi mempunyai wewenang sebagai berikut:
1. Mengakses dokumen, data, dan informasi yang diperlukan dari Bank Muamalat Indonesia.
2. Jika diperlukan, Komite Nominasi dan Remunerasi dapat melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Nominasi dan Remunerasi untuk membantu pelaksanaan tugasnya.
3. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

2. *Providing proposals for candidates who qualify as members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and Sharia Supervisory Board to the Board of Commissioners to be submitted to the GMS.*
3. *Providing recommendations to the Board of Commissioners regarding the policies and criteria needed in the Nomination process and performance evaluation policies for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners.*
4. *Assisting the Board of Commissioners in evaluating the performance of members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners based on benchmarks that have been prepared as evaluation material.*
5. *Providing recommendations to the Board of Commissioners regarding the capacity building program for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners.*
6. *Providing recommendations to the Board of Commissioners regarding prospective members of the Board of Commissioners, Directors, and/or Sharia Supervisory Board.*
7. *Providing recommendations to the Board of Commissioners regarding candidates for independent parties who will become members of the Committee.*

Related to remuneration policies:
1. *Evaluating the remuneration policy.*
2. *Evaluating the suitability of the remuneration policy and the implementation of the policy.*
3. *Providing recommendations to the Board of Commissioners regarding the remuneration policy for the Board of Commissioners, Directors, Sharia Supervisory Board, Executive Officers and employees as a whole.*

The Nomination and Remuneration Committee in carrying out its duties and responsibilities related to remuneration policies must at least pay attention to:
1. *Financial performance.*
2. *Compliance with the establishment of Allowance for Asset Losses.*
3. *Fairness with peer groups.*
4. *Consideration of the Bank's long-term goals and strategies.*

Authorities of Nomination and Remuneration Committee

In conducting their duties, the Nomination and Remuneration Committee has the following authorities, such as:
1. *Access documents, data and information needed from Bank Muamalat Indonesia.*
2. *The Nomination and Remuneration Committee can involve independent parties outside the members of the Nomination and Remuneration Committee to assist in carrying out their duties, if necessary.*
3. *Perform other authorities granted by the Board of Commissioners.*

Ketentuan Masa Jabatan

1. Masa jabatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam anggaran dasar.
2. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali.
3. Penggantian anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang bukan berasal dari Dewan Komisaris dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dimaksud tidak dapat lagi melaksanakan fungsinya.

Terms of Office

1. *The term of office of a member of the Nomination and Remuneration Committee is no longer than the term of office of the Board of Commissioners as stipulated in the articles of association.*
2. *Members of the Nomination and Remuneration Committee are appointed for a certain term of office and may be reappointed.*
3. *The replacement of the members of the Nomination and Remuneration Committee that is not from the Board of Commissioners shall be made no later than 60 (sixty) days after the members of the Nomination and Remuneration Committee can no longer carry out their functions.*

Susunan, Jumlah, Komposisi dan Dasar Pengangkatan Komite Nominasi dan Remunerasi

Sesuai pasal 35 Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi paling kurang terdiri dari:

1. 2 (dua) orang Komisaris Independen; dan
2. seorang Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia.

Selain itu, pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi Dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik mengatur bahwa anggota Komite Nominasi dan Remunerasi paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota, dengan ketentuan:

1. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, yang merupakan Komisaris Independen; dan
2. anggota lainnya yang dapat berasal dari:
   a. anggota Dewan Komisaris;
   b. pihak yang berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan; atau
   c. pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia.

Struktur dan keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi Bank Muamalat berdasar Surat Keputusan Direksi No. 025/B/DIR-KPTS/VIII/2018 tanggal 9 Agustus 2018 Komite Nominasi dan Remunerasi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, dengan keanggotaan sebagai berikut:

Structure, Total, Composition, and Basis of Appointment of Nomination and Remuneration Committee

In accordance with article 35 of Bank Indonesia Regulation No. 11/33/PBI/2009 concerning Implementation of Good Corporate Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units, Members of the Nomination and Remuneration Committee shall at least consist of:

1. *2 (two) Independent Commissioners; and*
2. *An Executive Officer in charge of human resources.*

In addition, article 3 of the Financial Services Authority Regulation No. 34/POJK.04/2014 concerning the Nomination and Remuneration Committee of Issuers or Public Companies stipulates that the Nomination and Remuneration Committee members consist of at least 3 (three) members, with the following provisions:

1. *1 (one) chairman and also a member, who is an Independent Commissioner; and*
2. *Other members who can come from:*
   a. *a member of the Board of Commissioners;*
   b. *parties originating from outside the Issuer or Public Company concerned; or*
   c. *parties who occupy managerial positions under the Board of Directors in charge of human resources.*

The structure and membership of the Muamalat Bank Nomination and Remuneration Committee based on Directors' Decree No. 025/B/DIR-KPTS/VIII/2018 dated August 9, 2018, Nomination and Remuneration Committee of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, with the following membership:

Nama *Name*	Jabatan *Position*	Keterangan *Description*
Iggi H Achsien	Ketua *Chairman*	Komisaris Independen *Independent Commissioner*
Edy Setiadi	Anggota *Member*	Komisaris Independen *Independent Commissioner*
Mohamed Hedi Mejai	Anggota *Member*	Komisaris *Commissioner*
Sri Juni Kuntari	Anggota *Member*	Pihak Independen *Independent Party*
Riksa Prakoso	Anggota *Member*	Pejabat Eksekutif Bank *Bank Executive Officer*

Pada akhir tahun 2019 terdapat penyesuaian terhadap keanggotan Komite Nominasi dan Remunerasi Bank Muamalat yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi No. 025/B/DIR-KPTS/X/2019 tanggal 24 Oktober 2019, dengan susunan anggota sebagai berikut:

At the end of 2019 there was an adjustment to the membership of the Muamalat Bank Nomination and Remuneration Committee, which was stipulated through the Decree of the Board of Directors No. 025/B/DIR-KPTS/X/ 2019 dated October 24, 2019, with the composition of members as follows:

Nama *Name*	Jabatan *Position*	Keterangan *Description*
Ilham A. Habibie	Ketua *Chairman*	Komisaris Independen *Independent Commissioner*
Iggi H Achsien	Anggota *Member*	Komisaris Independen *Independent Commissioner*
Edy Setiadi	Anggota *Member*	Komisaris Independen *Independent Commissioner*
Mohamed Hedi Mejai	Anggota *Member*	Komisaris *Commissioner*
Riksa Prakoso	Anggota *Member*	Pejabat Eksekutif Bank *Bank Executive Officer*

Profil Komite Nominasi dan Remunerasi

Profile of Nomination and Remuneration Committee



Ilham A. Habibie

Ketua
Chairman

Profil lengkap dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam Buku Laporan Tahunan ini.
The Profile can be seen in the chapter of the Company Profile in this Annual Report Book.



Iggi H. Achsien

Anggota
Member

Profil dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam Buku Laporan Tahunan ini.
The Profile can be seen in the chapter of the Company Profile in this Annual Report Book.



Edy Setiadi

Anggota
Member

Profil dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam Buku Laporan Tahunan ini.
The Profile can be seen in the chapter of the Company Profile in this Annual Report Book.



Mohamed Hedi Mejai

Anggota
Member

Profil dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam Buku Laporan Tahunan ini.
The Profile can be seen in the chapter of the Company Profile in this Annual Report Book.



Riksa Prakoso

Anggota
Member

Profil dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam Buku Laporan Tahunan ini.
The Profile can be seen in the chapter of the Company Profile in this Annual Report Book.

Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi (Frekuensi Pertemuan dan Tingkat Kehadiran)

Selama periode tahun 2019, Komite Nominasi dan Remunerasi telah menyelenggarakan 3 (tiga) kali rapat dengan minimal satu agenda rapat untuk setiap kali rapat termasuk pembahasan mengenai risalah rapat, serta hal-hal yang perlu ditindaklanjuti dari rapat sebelumnya dan beberapa pembahasan lainnya. Berdasarkan notulen rapat Komite Nominasi dan Remunerasi, kehadiran dari masing-masing anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dalam rapat adalah sebagai berikut:

Meeting of Nomination and Remuneration Committee (Frequency of Meetings and Attendance)

During the 2019, the Nomination and Remuneration Committee held 3 (three) meetings with a minimum of one meeting agenda for each meeting including discussion of minutes of meetings, as well as matters that need to be followed up from prior meetings and several other discussions. Based on the minutes of the Nomination and Remuneration Committee meeting, the attendance of each member of the Nomination and Remuneration Committee at the meeting is as follows:

Nama *Name*	Jabatan *Position*	Total Rapat *Total Meetings*	Jumlah Kehadiran *Number of Attendance*	Persentase *Percentage*
Ilham A. Habibie **)	Ketua *Chairman*	1	1	100%
Iggi H. Achsien	Ketua/Anggota *Chairman/Member*	3	3	100%
Edy Setiadi	Anggota *Member*	3	3	100%
Mohamed Hedi Mejai	Anggota *Member*	3	3	100%
Riksa Prakoso	Anggota *Member*	3	3	100%
Sri Juni Kuntari *)	Anggota *Member*	2	2	100%

*) Berhenti menjabat sebagai anggota komite per tanggal 13 Oktober 2019
**) Ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi No. 025/B/DIR-KPTS/X/2019 tanggal 24 Oktober 2019
**) Stop serving as a committee member as of October 13, 2019*
***) Stipulated through Directors Decree No. 025/B/DIR-KPTS/X/2019 dated October 24, 2019*

Pembahasan yang telah dilakukan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi dalam rapat selama tahun 2019, antara lain sebagai berikut:

1. Pembahasan mengenai penominasian calon anggota Direksi.
2. Pembahasan mengenai pengangkatan kembali anggota Direksi dan Komisaris.
3. Penominasian anggota DPS dan Ketua DPS.
4. Penominasian calon anggota Komite level Komisaris dari pihak independen.

Discussions conducted by the Nomination Committee and Remuneration in meetings during 2019, among others as following:

1. *Discussion on the nomination of candidates for Directors.*
2. *Discussion on the reappointment of members of the Board of Directors and Commissioner.*
3. *Nominating DPS members and DPS Chairman.*
4. *Nominating candidates for Committee level Commissioners from independent party.*

Pengembangan Kompetensi

Tabel penjabaran pengembangan kompetensi bagi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan di dalam buku Laporan Tahunan ini

Pelaksanaan Tugas Komite Nominasi dan Remunerasi

Selama tahun 2019, Komite Nominasi dan Remunerasi telah melaksanakan kegiatan dan memberikan beberapa rekomendasi antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan penilaian dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas calon anggota Direksi dengan mempertimbangkan integritas, keahlian, kompetensi, latar belakang dan pengalaman, untuk selanjutnya dibahas dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
2. Melakukan penilaian dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas calon anggota dan ketua Dewan Pengawas Syariah dengan mempertimbangkan integritas, keahlian, kompetensi untuk selanjutnya dibahas dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
3. Melakukan penilaian dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas calon anggota Komite Audit yang berasal dari Pihak Independen.

Competence Development

The table on the elaboration of competency development for members of the Nomination and Remuneration Committee can be seen in the Company Profile chapter in this Annual Report.

Duties Implementation of Nomination and Remuneration Committee

During 2019, the Nomination and Remuneration Committee has carried out activities and provided several recommendations including the following:

1. *Conduct an assessment and provide recommendations to Board of Commissioners of prospective members of the Board of Directors with consider integrity, expertise, competence, background background and experience, for further discussion in General Meeting of Shareholders (GMS)*
2. *Conduct an assessment and provide recommendations to Board of Commissioners of prospective members and chairman of the Supervisory Board Sharia by considering integrity, expertise, competence for further discussion at the General Meeting Shareholders (GMS).*
3. *Conduct an assessment and provide recommendations to Board of Commissioners for prospective members of the Audit Committee from an Independent Party.*

Kebijakan Suksesi Direksi

Berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, komite yang menjalankan fungsi nominasi mempunyai tugas untuk menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi. Salah satu kebijakan yang dapat mendukung proses Nominasi sebagaimana dimaksud adalah kebijakan suksesi anggota Direksi. Kebijakan mengenai suksesi bertujuan untuk menjaga kesinambungan proses regenerasi atau kaderisasi kepemimpinan di perusahaan dalam rangka mempertahankan keberlanjutan bisnis dan tujuan jangka panjang perusahaan.

Bank Muamalat telah memiliki dan menerapkan program Talent Management dan Succession Plan. Talent Management mempersiapkan Pool of Talent dari Bank sebaga upaya menyediaan dan penguatan Sumber Daya Insani di Bank. Suksesi diterapkan untuk penyiapan kader-kader terbaik dari Pool of Talent Bank yang siap menduduki posisi-posisi kritikal termauk posisi Direksi. Bank telah memiliki database Pool of Talent dan Successor berdasarkan proses identifikasi talent dan suksesor dengan menggunakan metodologi yang disiapkan Bank. Proses validasi dan kalibrasi dilakukan atas Talent dan Suksesor baik di tingkat Direktorat maupun di tingkat Direksi untuk posisi-posisi strategis yaitu posisi satu level dibawah Direksi dan Region Head. Database ini diperbaharui setiap tahun dan menjadi referensi Manajemen dalam melakukan rotasi maupun promosi Karyawan serta untuk kebutuhan nominasi jabatan strategis termasuk Direksi.

Directors Succession Policy

Based on the provisions of the Financial Services Authority Regulation No. 34/POJK.04/2014 concerning the Nomination and Remuneration Committee of Issuers or Public Companies, the committee that carries out the nomination function has the task of preparing the policies and criteria needed in the nomination process for prospective members of the Board of Directors. One of the policies that can support the Nomination process referred to is the succession policy for members of the Board of Directors. The succession policy aims to maintain the continuity of the regeneration process or the regeneration of leadership in the company in order to maintain business sustainability and the long-term goals of the company.

Bank Muamalat has owned and implemented a Talent Management and Succession Plan program. Talent Management prepares the Pool of Talent from the Bank as an effort to provide and strengthen Human Resources at the Bank. Succession is applied to prepare the best cadres of the Pool of Talent Bank who are ready to occupy critical positions including Directors. The Bank has a Pool of Talent and Successor database based on the talent and successor identification process using the methodology prepared by the Bank. The validation and calibration processes are carried out on Talent and Successor both at the Directorate level and at the Board of Directors level for strategic positions, namely one level below the Directors and Region Head. This database is updated every year and serves as a reference for management in conducting rotation and promotion of employees and for the needs of strategic position nominations including the Directors.

Komite Pemantau Risiko
Risk Oversight Committee

Komite Pemantau Risiko dibentuk oleh Dewan Komisaris guna mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris khususnya dalam rangka melakukan evaluasi terhadap kebijakan manajemen risiko dan pelaksanaannya serta evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Unit Kerja Manajemen Risiko.

The Risk Oversight Committee is formed by the Board of Commissioners to support the effectiveness of the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Commissioners, especially in the context of evaluating risk management policies and their implementation as well as evaluating the implementation of the duties of the Risk Management Committee and Risk Management Work Unit.

Dasar Hukum

1. Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
2. Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 perihal Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
3. Anggaran Dasar Bank tentang tugas dan wewenang Dewan Komisaris.

Legal Basis

1. *Bank Indonesia Regulation No. 11/33/PBI/2009 dated December 7, 2009, concerning Implementation of Good Corporate Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units.*
2. *Bank Indonesia Circular Letter No. 12/13/DPbS dated April 30, 2010 concerning Implementation of Good Corporate Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units.*
3. *Bank's Articles of Association concerning the duties and authorities of the Board of Commissioners.*

Pedoman Kerja/Piagam Komite Pemantau Risiko

Bank Muamalat Indonesia telah memiliki Piagam Komite Pemantau Risiko yang senantiasa ditinjau secara berkala, terakhir pada tanggal 19 September 2017 dan akan diperbaharui sesuai dengan perkembangan regulasi yang berlaku serta kondisi terkini dari Bank.
Piagam Komite Pemantau Risiko mengatur antara lain:

1. struktur dan keanggotaan,
2. persyaratan keanggotaan,
3. masa tugas,
4. tugas dan tanggung jawab,
5. wewenang,
6. tata cara dan prosedur penyelenggaraan rapat,
7. pelaporan kepada Dewan Komisaris.

Board Manual/Charter of Risk Oversight Committee

Bank Muamalat Indonesia already has a Risk Oversight Committee Charter which is regularly reviewed, most recently on September 19, 2017, and will be updated in accordance with the development of applicable regulations and the current conditions of the Bank. The Charter of the Risk Monitoring Committee regulates, among others:

1. *structure and membership,*
2. *membership requirements,*
3. *tenure,*
4. *duties and responsibilities,*
5. *authorities,*
6. *the procedures for conducting meetings,*
7. *reporting to the Board of Commissioners.*

Kriteria Anggota Komite Pemantau Risiko

Persyaratan keanggotaan Komite Pemantau Risiko yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak Independen sebagaimana diatur dalam Piagam Komite Pemantau Risiko adalah:

1. Memiliki integritas, reputasi keuangan, akhlak dan moral yang baik.
2. Memiliki latar belakang pendidikan, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai di bidang keuangan dan perbankan.
3. Mampu bekerja sama dan memiliki kemampuan komunikasi yang baik serta menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
4. Memiliki pengetahuan yang memadai mengenai Good Corporate Governance dan manajemen risiko secara umum.

Criteria of Member of Risk Oversight Committee

The requirements for membership of the Risk Oversight Committee originating from Independent Commissioners and Independent Parties as stipulated in the Risk Monitoring Committee Charter are:

1. *Having integrity, financial reputation, good character, and morals.*
2. *Having adequate educational background, abilities, knowledge and experience in finance and banking.*
3. *Being able to work together and have good communication skills and provide sufficient time to carry out their duties.*
4. *Having adequate knowledge about Good Corporate Governance and risk management in general.*

5. Memiliki pengetahuan yang memadai mengenai peraturan perundang-undangan di bidang perbankan dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
6. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.
7. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa assurance, jasa non-assurance, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Bank Muamalat Indonesia dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.
8. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Bank Muamalat Indonesia.
9. Tidak memiliki kepentingan pribadi yang dapat menimbulkan benturan kepentingan terhadap Bank Muamalat Indonesia.
10. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Bank Muamalat Indonesia.
11. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank Muamalat Indonesia.
12. Bukan merupakan pihak yang berasal dari karyawan Bank Muamalat Indonesia.

5. Having sufficient knowledge of banking laws and regulations and other related laws and regulations.
6. Willing to increase competence continuously through education and training.
7. Not a person in a Public Accountant Office, Legal Consultant Office, Public Appraisal Service Office or other parties providing assurance services, non-assurance services, appraisal services and/or other consulting services to Bank Muamalat Indonesia within 6 (six) months lastly.
8. Do not have direct or indirect shares in Bank Muamalat Indonesia.
9. Do not have personal interests that could cause a conflict of interest against Bank Muamalat Indonesia.
10. Having no affiliation with members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or Major Shareholders of Bank Muamalat Indonesia.
11. Do not have business relationships, directly or indirectly, related to the business activities of Bank Muamalat Indonesia.
12. Not a party originating from Bank Muamalat Indonesia employees.

Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas Komite Pemantau Risiko sesuai Piagam Komite Pemantau Risiko adalah:

1. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan strategi manajemen risiko yang disusun Manajemen.
2. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
3. Melakukan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Unit Kerja Manajemen Risiko.
4. Melakukan evaluasi terhadap langkah-langkah yang diambil oleh Direksi dalam rangka memenuhi Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian, khususnya yang berkaitan dengan manajemen risiko.
5. Melakukan evaluasi terhadap permohonan atas usulan Direksi yang berkaitan dengan transaksi atau kegiatan usaha yang melampaui kewenangan Direksi untuk dapat digunakan oleh Dewan Komisaris sebagai dasar pengambilan keputusan.
6. Melakukan evaluasi terhadap struktur organisasi manajemen risiko.

Duties and Responsibilities

The duties of the Risk Oversight Committee in accordance with the Risk Oversight Committee Charter are:

1. Evaluating the risk management policies and strategies prepared by Management.
2. Evaluating the suitability of the risk management policy and the implementation of the policy.
3. Evaluating the implementation of the tasks of the Risk Management Committee and Risk Management Work Unit.
4. Evaluating the steps taken by the Board of Directors in order to meet the Financial Services Authority and other applicable laws and regulations in the context of implementing prudential principles, particularly those relating to risk management.
5. Evaluating requests for Directors 'proposals relating to transactions or business activities that exceed the Board of Directors' authority to be used by the Board of Commissioners as a basis for decision making.
6. Evaluating the risk management organisation structure.

7. Melakukan evaluasi terhadap laporan profil risiko dan laporan Bank baik internal maupun eksternal agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8. Memastikan bahwa unit kerja manajemen risiko memenuhi kriteria independensi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Wewenang Komite Pemantau Risiko

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Pemantau Risiko memiliki wewenang sebagaimana diatur dalam Piagam Komite Pemantau Risiko sebagai berikut:

1. Mengakses dokumen, data, dan informasi Bank tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan.
2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi, pihak yang menjalankan fungsi manajemen risiko dan pihak-pihak lain terkait tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko.
3. Jika diperlukan, Komite Pemantau Risiko dapat melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Pemantau Risiko untuk membantu pelaksanaan tugasnya.
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Ketentuan Masa Jabatan

Masa tugas anggota Komite Pemantau Risiko tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Piagam Komite Pemantau Risiko dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Susunan, Jumlah, Komposisi dan Dasar Pengangkatan Komite Pemantau Risiko

Sesuai pasal 34 Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Anggota Komite Pemantau Risiko paling kurang terdiri dari:

1. seorang Komisaris Independen;
2. seorang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang perbankan syariah;
3. seorang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko.

Keanggotaan Komite Pemantau Risiko berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 024/B/DIR-KPTS/VIII/2018 tanggal 9 Agustus 2018 tentang Komite Pemantau Risiko PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, dengan keanggotaan sebagai berikut:

7. *Evaluating the risk profile report and the Bank's report both internal and external to be in accordance with applicable regulations.*
8. *Ensuring that the risk management work unit meets the independence criteria in carrying out its duties and responsibilities.*

Authorities of Risk Oversight Committee

In carrying out its duties, the Risk Oversight Committee has the authority as stipulated in the Risk Oversight Committee Charter as follows:

1. *Accessing bank documents, data, and information about employees, funds, assets, and company resources needed.*
2. *Communicating directly with employees, including the Board of Directors, parties who perform risk management functions and other parties related to the duties and responsibilities of the Risk Oversight Committee.*
3. *If necessary, the Risk Monitoring Committee can involve independent parties outside the members of the Risk Monitoring Committee to assist in carrying out its duties.*
4. *Performing other authorities granted by the Board of Commissioners.*

Terms of Office

The term of office of members of the Risk Monitoring Committee is no longer than the term of office of the Board of Commissioners as stipulated in the Risk Monitoring Committee Charter and can be re-elected only for 1 (one) subsequent period.

Structure, Total, Composiiton, and Basis of Appointment of Risk Oversight Committee

In accordance with article 34 of Bank Indonesia Regulation No. 11/33/PBI/2009 concerning Implementation of Good Corporate Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units, Members of the Risk Oversight Committee shall at least consist of:

1. *an Independent Commissioner;*
2. *an Independent party that has expertise in sharia banking;*
3. *an Independent party that has expertise in the field of risk management.*

Membership of the Risk Monitoring Committee based on Directors Decree No. 024/B/DIR-KPTS/VIII/2018 dated August 9, 2018 concerning the Risk Monitoring Committee of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, with the following membership:

Nama *Name*	Jabatan *Position*	Keterangan *Information*
Edy Setiadi	Ketua *Chairman*	Komisaris Independen *Independent Commissioner*
Iggi H. Achsien	Anggota *Member*	Komisaris Independen *Independent Commissioner*
Abdulsalam Mohammed Joher Al-Saleh	Anggota *Member*	Komisaris *Commissioner*
Abdulwahhab Abed	Anggota *Member*	Pihak Independen *Independent Party*
Dece Kurniadi	Anggota *Member*	Pihak Independen *Independent Party*

Pada akhir tahun 2019 terdapat penyesuaian terhadap keanggotan Komite Audit Bank Muamalat yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi No. 024/B/DIR-KPTS/X/2019 tanggal 24 Oktober 2019, dengan susunan anggota sebagai berikut:

At the end of 2019, there was an adjustment to the membership of the Audit Committee of Bank Muamalat, which was determined by Decree of the Board of Directors No. 024/B/DIR-KPTS/X/2019 dated October 24, 2019, with the composition of members as follows:

Nama *Name*	Jabatan *Position*	Keterangan *Information*
Edy Setiadi	Ketua *Chairman*	Komisaris Independen *Independent Commissioner*
Abdulsalam Mohammed Joher Al-Saleh	Anggota *Member*	Komisaris *Commissioner*
Abdulwahhab Abed	Anggota *Member*	Pihak Independen *Independent Party*
Dece Kurniadi	Anggota *Member*	Pihak Independen *Independent Party*

Profil Komite Pemantau Risiko

Profil Edy Setiadi dan Abdulsalam Mohammed Joher Al-Saleh dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam buku Laporan Tahunan ini.

Profile of Risk Oversight Committee

The profiles of Edy Setiadi and Abdulsalam Mohammed Joher Al-Saleh can be seen in the Company Profile chapter in this Annual Report.



Edy Setiadi

Ketua
Chairman

Profil lengkap dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam Buku Laporan Tahunan ini.
The Profile can be seen in the chapter of the Company Profile in this Annual Report Book.



Abdulsalam Mohammed Joher Al-Saleh

Anggota
Member

Profil lengkap dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam Buku Laporan Tahunan ini.
The Profile can be seen in the chapter of the Company Profile in this Annual Report Book.



Abdulwahhab Abed

Anggota
Member

Usia *Age*	39 tahun *39 Years of Age*
Kewarganegaraan *Nationality*	Saudi Arabia
Domisili *Domicile*	Jeddah,Saudi Arabia
Riwayat Pendidikan *Education background*	Master of Business (MBA) Finance, McCallum Graduate School of Business, Bentley College, Waltham MA.
Riwayat Pekerjaan *Work Experiences*	-
Dasar Hukum Pengangkatan *Basis of Appointment*	Surat Keputusan Direksi No. 024/B/DIR-KPTS/X/2019 tentang Komite Tata Kelola Perusahaan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk tanggal 24 Oktober 2019 *Decree of the Board of Directors No. 024/B/ DIR-KPTS/X/2019 concerning the Corporate Governance Committee of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dated October 24, 2019*
Kualifikasi *Qualifications*	Pihak independen yang memiliki keahlian dalam bidang perbankan/keuangan, audit dan kepatuhan. *Independent parties who have expertise in banking/finance, auditing and compliance.*



Dece Kurniadi

Anggota
Member

Usia *Age*	49 tahun *49 Years of Age*
Kewarganegaraan *Nationality*	Indonesia
Domisili *Domicile*	Jakarta
Riwayat Pendidikan *Education background*	Magister Manajemen Bidang Keuangan Syariah, Universitas Indonesia
Riwayat Pekerjaan *Work Experience*	Pimpinan Cabang Bank Muamalat Indonesia untuk berbagai segmen di tahun 2006. Associate Partner di Konsultan Perbankan Syariah di "SHG-SAM & Rekan", Associate Partner di Islamic Finance Initiative, saat ini masih menjadi Dosen Program Vokasi Administrasi Keuangan dan Perbankan di Universitas Indonesia, Dosen beberapa mata kuliah Perbankan Syariah di Politeknik Negeri Jakarta serta sebagai anggota dan instruktur di Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia - BI, Commissioners dan Finance Advisor di PT Wichindo Pratama Balikpapan dan instruktur pada Muamalat Institute Anggota POKJA IPMP Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) sampai dengan Februari 2017. *Branch Manager of Bank Muamalat Indonesia for various segments in 2006. Associate Partner in Sharia Banking Consultants at "SHG-SAM & Partners", Associate Partner at the Islamic Finance Initiative, is currently a Lecturer in the Financial and Banking Administration Vocational Program at the University of Indonesia, Lecturer several Sharia Banking courses at the Jakarta State Polytechnic as well as members and instructors at the Indonesian Banking Development Institute - BI, Commissioner and Finance Advisor at PT Wichindo Pratama Balikpapan and instructors at Muamalat Institute Members of the Working Group of the National Economic and Industry Committee (KEIN) until February 2017.*
Dasar Hukum Pengangkatan *Basis of Appointment*	Surat Keputusan Direksi No. 024/B/DIR-KPTS/X/2019 tentang Komite Tata Kelola Perusahaan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk tanggal 24 Oktober 2019 *Decree of the Board of Directors No. 024/B/DIR-KPTS/X/2019 concerning the Corporate Governance Committee of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dated October 24, 2019*
Kualifikasi *Qualification*	Pihak independen yang memiliki keahlian dalam bidang perbankan/keuangan, audit dan kepatuhan. *Independent parties who have expertise in banking/finance, auditing and compliance.*

Independensi Anggota Komite Pemantau Risiko

Seluruh anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari Pihak Independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya bertindak independen.

Independence of Member of Risk Oversight Committee

All members of the Risk Oversight Committee originating from Independent Parties do not have financial, management, share ownership and/or family relationship with the Board of Commissioners, Directors and/or Controlling Shareholders or relationship with the Bank, which may affect their ability to act independently.

Berikut adalah tabel yang menjabarkan mengenai independensi para anggota Komite Pemantau Risiko:

The following table describes the independence of the members of the Risk Monitoring Committee:

Aspek Independensi *Independence Aspects*	Abdulwahab Abed	Dece Kurniadi
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi *Has no financial relationship with the Board of Commissioners and Directors*	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi *Has no management relationship in the company, its subsidiaries, or affiliated companies*	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi *Has no management relationship in the company, its subsidiaries, or affiliated companies*	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG *Does not have family relations with the Board of Commissioners, Directors, and/or fellow members of the Nomination, Remuneration and GCG Committee*	√	√
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah *Does not serve as a manager of political parties, officials and government*	√	√

Hubungan Afiliasi

Affiliation

Nama *Name*	Jabatan *Position*	Hubungan Keuangan dengan *Financial Relationship with*						Hubungan Keluarga dengan *Family Relationship with*						Hubungan Kepengurusan *Management Relationship*	
		Dewan Komisaris *Board of Commissioners*		Direksi *Board of Directors*		Pemegang Saham *Shareholders*		Dewan Komisaris *Board of Commissioners*		Direksi *Board of Directors*		Pemegang Saham *Shareholders*			
		Ya *Yes*	Tidak *No*	Ya *Yes*	Tidak *No*	Ya *Yes*	Tidak *No*	Ya *Yes*	Tidak *No*	Ya *Yes*	Tidak *No*	Ya *Yes*	Tidak *No*	Ya *Yes*	Tidak *No*
Abdulwahab Abed			√		√		√		√		√		√		√
Dece Kurniadi			√		√		√		√		√		√		√

Rapat Komite Pemantau Risiko (Frekuensi Pertemuan dan Tingkat Kehadiran)

Risk Oversight Committee Meeting (Frequency of Meetings and Attendance)

Selama periode tahun 2019, Komite Pemantau Risiko telah menyelenggarakan 6 (enam) kali rapat dengan minimal satu agenda rapat untuk setiap kali rapat termasuk pembahasan mengenai risalah rapat, serta hal-hal yang perlu ditindaklanjuti dari rapat sebelumnya dan beberapa pembahasan lainnya. Berdasarkan notulen rapat Komite Pemantau Risiko, kehadiran dari masing-masing anggota Komite Pemantau Risiko dalam rapat adalah sebagai berikut:

During the 2019 period, the Risk Oversight Committee held 6 (six) meetings with a minimum of one meeting agenda for each meeting including discussion of minutes of meetings, as well as matters that need to be followed up from previous meetings and several other discussions. Based on the minutes of the Risk Monitoring Committee meeting, the attendance of each member of the Risk Monitoring Committee at the meeting is as follows:

Nama *Name*	Jabatan *Position*	Total Rapat *Total Meetings*	Jumlah Kehadiran *Number of Attendance*	Persentase *Percentage*
Edy Setiadi	Ketua *Chairman*	6	6	100%

Nama *Name*	Jabatan *Position*	Total Rapat *Total Meetings*	Jumlah Kehadiran *Number of Attendance*	Persentase *Percentage*
Iggi H. Achsien *)	Anggota *Member*	4	3	75%
Abdulsalam Mohammed Joher Al-Saleh	Anggota *Member*	6	5	83%
Abdulwahhab Abed	Anggota *Member*	6	5	83%
Dece Kurniadi	Pihak Independen *Independent Party*	6	6	100%

*) Berhenti menjabat sebagai anggota komite per tanggal 24 Oktober 2019
*) *Stop serving as a committee member per date Of October 24Th, 2019*

Pembahasan yang telah dilakukan oleh Komite Pemantau Risiko dalam rapat selama tahun 2019, antara lain sebagai berikut:

1. Tingkat kesehatan bank berdasarkan Profil Risiko posisi Desember 2018.
2. Risk infrastructure project 2019.
3. Proyeksi Rating Profil Risiko Bank untuk tahun 2019 .
4. Review pembiayaan segmen retail.
5. Pembahasan perkembangan pelaksanaan ORION (Operation Risk Champion).
6. Evalusasi implementasi FOS (Financing Origination System).
7. Update Bad Bank Segmen Corporate, retail beserta Strategi Penyelesaian per Juni 2019.
8. Retail Mortgage Portfolio Performance Review Mortgage Non Fix Income.
9. Informasi terkait Agunan Pembiayaan dan Perbaikan Data.
10. Update Cost & Recovery Kasus Besar segmen Corporate & Retail.
11. Update Perkembangan Proyek AL Basith – perbaikan data untuk memenuhi regulatory report

Discussions that have been carried out by the Risk Oversight Committee during the meeting in 2019 are:

1. *Bank's Risk-Based Rating based on Risk Profile position in December 2018.*
2. *Risk infrastructure project 2019.*
3. *Bank Risk Profile Rating Projection for 2019.*
4. *Review of retail segment financing.*
5. *Discussion on the development of the implementation of ORION (Operation Risk Champion).*
6. *Evaluation of FOS (Financing Origination System) implementation.*
7. *Bad Bank Corporate, retail and retail segment completion strategies as of June 2019.*
8. *Retail Mortgage Portfolio Performance Review of Non-Fix Income Mortgage.*
9. *Information related to Collateral Financing and Data Repair.*
10. *Update Cost & Recovery of Large Cases in Corporate & Retail segments.*
11. *Update on Development of the AL Basith Project - financing reporting system.*

Pengembangan Kompetensi

Tabel penjabaran pengembangan kompetensi bagi anggota Komite Pemantau Risiko dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan di dalam buku Laporan Tahunan ini

Competence Development

The table describing the development of competencies for members of the Risk Monitoring Committee can be seen in the Company Profile chapter in this Annual Report book.

Pelaksanaan Tugas Komite Pemantau Risiko

Selama tahun 2019, Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan Rencana Kerja Komite, yang dibuat setahun sekali mengacu pada tugas dan tanggung jawab Komite sebagaimana tercantum dalam Piagam Komite.

1. Pelaksanaan Rapat Komite Pemantau Risiko
   Selama tahun 2019 Komite Pemantau Risiko telah menyelenggarakan 6 (enam) rapat Komite Pemantau Risiko sesuai dengan ketentuan dalam piagam Komite Pemantau Risiko.
2. Hal-hal penting yang dibahas dalam rapat Komite Pemantau Risiko
   a. **Tingkat Kesehatan Bank**
      Bank telah melakukan *self assessment* tingkat kesehatan bank

Duties Implementation of Risk Oversight Committee

During 2019, the Risk Oversight Committee has carried out activities in accordance with the Committee's Work Plan, which is made once a year in reference to the duties and responsibilities of the Committee as stated in the Committee Charter.

1. *Implementation of Risk Oversight Committee Meetings*
   During 2019 the Risk Oversight Committee held 6 (six) Risk Oversight Committee meetings in accordance with the provisions in the Risk Oversight Committee charter.
2. *Important matters discussed in the Risk Oversight Committee meeting*
   a. ***Risk-Based Rating of the Bank***
      The Bank has conducted a self-assessment of the risk-based

periode Juni dan Desember 2019 dengan memperhatikan 4 (empat) komponen utama yaitu Profil Risiko, Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG), Profitabilitas dan Permodalan. Tingkat Kesehatan Bank merupakan masalah yang selalu didiskusikan pada setiap pembahasan rapat Komite Pemantau Risiko. Bank agar melakukan upaya-upaya untuk memperbaiki tingkat kesehatan bank.

b. **Profil Risiko Bank**

Memantau dan mengevaluasi Profil Risiko Bank secara berkala setiap triwulan, serta meninjau tindakan korektif untuk aspek risiko yang dinilai tinggi dan memberikan saran untuk perbaikan.

3. Inisiatif dan Rencana Tindakan Terkait dengan Profil Risiko Bank
   a. **Memantau kondisi risiko kredit Bank melalui:**
      i. Status dan kualitas aset yang diproyeksikan (KAP) dari setiap segmen kredit (Korporasi dan Ritel) untuk memastikan bahwa setiap segmen bisnis telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas aset Bank sehingga sesuai dengan risk appetide yang ditentukan
      ii. Tinjauan tematik portofolio pembiayaan yang memiliki korelasi tinggi dengan fluktuasi ekonomi pada 2019.
      iii. Status implementasi sebagai inisiatif dalam meningkatkan proses kredit.
   b. **Mengevaluasi langkah-langkah dan strategi Bank melalui:**
      i. Rencana Anggaran 2019, Strategi Bisnis dan Rencana Bisnis Bank sesuai dengan risk appetide Bank.
      ii. Aspek risiko dari inisiatif/proyek strategis yang sedang berlangsung termasuk pengajuan produk dan aktivitas baru.
      iii. Laporan terbaru tentang implementasi proyek-proyek TI terutama proyek Platform seperti: FOS dan AL Basth

rating of the Bank in the June and December 2019 periods by taking into account 4 (four) main components, namely Risk Profile, Good Corporate Governance (Profitability and Capital). The Risk-Based Rating of the Bank is an issue that is always discussed in every discussion of the Risk Oversight Committee meeting. The Bank is required to make efforts to improve the srisk-based rating.

b. Bank Risk Profile

Monitor and evaluate the Bank's Risk Profile as a whole periodically every quarter, and reviewing corrective actions for the aspects of risk that are rated highly and provide advice for repairs.

3. Initiatives and Action Plans Related to the Bank's Risk Profile
   a. Monitor the Bank's credit risk conditions through:
      i. Status and quality of projected assets (KAP) from each credit segment (Corporate and Retail) to ensure that every business segment has take the steps necessary to maintain and improve the quality of the Bank's assets so that in accordance with the specified risk appetite
      ii. Review of thematic financing portfolios that have high correlation with economic fluctuations in 2019.
      iii. Status of implementation as an initiative in improve the credit process.
   b. Evaluate the steps and strategies of the Bank through:
      i. 2019 Budget Plan, Business Strategy and Plans The Bank's business is consistent with the Bank's risk appetite.
      ii. Risk aspects of current strategic initiatives / projects take place including the submission of products and activities new.
      iii. Latest report on the implementation of IT projects especially Platform projects such as: FOS and AL Basth

Komite Tata Kelola Perusahaan
Corporate Governance Committee

Komite Tata Kelola Perusahaan dibentuk oleh Dewan Komisaris dengan tujuan membantu Dewan Komisaris dalam memastikan terselenggaranya pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

The Corporate Governance Committee was formed by the Board of Commissioners with the aim of assisting the Board of Commissioners in ensuring the implementation of Good Corporate Governance (GCG) in each of the Bank's business activities at all levels of the organization.

Dasar Hukum

1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
2. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 perihal Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
3. Anggaran Dasar Bank tentang tugas dan wewenang Dewan Komisaris.

Legal Basis

1. *Bank Indonesia Regulation Number 11/33/PBI/2009 dated December 7, 2009, concerning Implementation of Good Corporate Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units.*
2. *Bank Indonesia Circular Letter Number 12/13/DPbS dated April 30, 2010, concerning Implementation of Good Corporate Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units.*
3. *Bank's Articles of Association concerning the duties and authorities of the Board of Commissioners.*

Pedoman Kerja/Piagam Komite Tata Kelola Perusahaan

Komite Tata Kelola Perusahaan Bank Muamalat Indonesia telah memiliki Piagam Komite Tata Kelola Perusahaan terakhir dikinikan pada tanggal 19 September 2017 dan akan diperbaharui sesuai dengan perkembangan regulasi yang berlaku serta kondisi terkini dari Bank Piagam Komite tata Kelola Perusahaan mengatur antara lain:

1. prinsip-prinsip GCG;
2. struktur dan keanggotaan;
3. persyaratan keanggotaan;
4. tugas dan tanggung jawab;
5. wewenang;
6. rapat komite;
7. masa tugas;
8. waktu kerja, dan pelaporan.

Manual/Charter of Corporate Governance Committee

Bank Muamalat Indonesia Corporate Governance Committee has a Charter of the Corporate Governance Committee was last updated on September 19, 2017 and will be updated in accordance with the development of applicable regulations and the current conditions of the Bank's Charter of the Corporate Governance Committee regulates, among others:

1. *GCG principles;*
2. *structure and membership;*
3. *membership requirements;*
4. *duties and responsibilities;*
5. *authority;*
6. *committee meeting;*
7. *tenure;*
8. *working time and reporting.*

Kriteria Anggota Komite Tata Kelola Perusahaan

Persyaratan keanggotaan Komite Tata Kelola Perusahaan yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak Independen sebagaimana diatur dalam Piagam Komite Tata Kelola Perusahaan adalah:

1. Wajib memiliki integritas dan reputasi keuangan yang baik.
2. Wajib memiliki kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
3. Wajib mematuhi kode etik yang ditetapkan oleh Bank.
4. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.
5. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang

Criteria of Member of Corporate Governance Committee

The requirements for membership of the Corporate Governance Committee originating from Independent Commissioners and Independent Parties as stipulated in the Charter of the Corporate Governance Committee are:

1. *Must have integrity and good financial reputation.*
2. *Must have the ability, knowledge, experience in accordance with the field of work, and be able to communicate well.*
3. *Must comply with the code of ethics established by the Bank.*
4. *Willing to increase competence continuously through education and training.*
5. *Not a person in the Public Accounting Firm, Legal Consultant Office, Public Appraisal Service Office or other party providing*

memberi jasa assurance, jasa non-assurance, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.

6. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Bank dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir kecuali Komisaris Independen.
7. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Bank Muamalat Indonesia.
8. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Bank Muamalat Indonesia.
9. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank Muamalat Indonesia.

assurance services, non-assurance services, appraisal services and/or other consulting services to the relevant Issuer or Public Company within 6 (six) last month.

6. *Not a person who works or has the authority and responsibility to plan, lead, control, or oversee the activities of the Bank within the last 6 (six) months except for Independent Commissioners.*
7. *Does not have direct or indirect shares in Bank Muamalat Indonesia.*
8. *Has no affiliation with members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or Major Shareholders of Bank Muamalat Indonesia.*
9. *Has no direct or indirect business relationship related to the business activities of Bank Muamalat Indonesia.*

Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Tata Kelola Perusahaan mempunyai peran membantu pelaksanaan tugas dari Dewan Komisaris dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris, dengan rincian sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi atas struktur, kerangka tata kelola dan kebijakan GCG Bank Muamalat Indonesia.
2. Memastikan pelaksanaan kebijakan GCG dalam kegiatan Bank Muamalat Indonesia.
3. Secara berkala mengkaji dan menilai prinsip-prinsip pelaksanaan GCG Bank Muamalat Indonesia dan menyampaikan rekomendasi perbaikan kepada Dewan Komisaris.
4. Menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris kegiatan Bank yang tidak sesuai dengan pelaksanaan GCG.
5. Mengkaji laporan Self-Assessment GCG dan laporan tahunan GCG yang diterbitkan oleh Bank Muamalat Indonesia guna memastikan transparansi dan akurasi laporan serta merekomendasikan perbaikan kepada Direksi.
6. Menyampaikan rekomendasi dalam rangka pemberian endorsement Dewan Komisaris atas laporan GCG dan kebijakan GCG Bank Muamalat Indonesia.
7. Menyusun dan mengkinikan piagam Komite Tata Kelola secara berkala.
8. Menjaga kerahasiaan seluruh dokumen, data dan informasi Bank Muamalat Indonesia.

Duties and Responsibilities

The Corporate Governance Committee has the role of assisting the implementation of the duties of the Board of Commissioners and is responsible to the Board of Commissioners, with the following details:

1. *Evaluating the structure, governance framework, and GCG policy of Bank Muamalat Indonesia.*
2. *Ensuring the implementation of GCG policies in the activities of Bank Muamalat Indonesia.*
3. *Periodically reviewing and assessing the principles of GCG implementation of Bank Muamalat Indonesia and submit recommendations for improvement to the Board of Commissioners.*
4. *Submitting reports to the Board of Commissioners of Bank activities that are not in accordance with GCG implementation.*
5. *Reviewing the GCG Self-Assessment report and the annual GCG report issued by Bank Muamalat Indonesia to ensure the transparency and accuracy of the report and recommend improvements to the Directors.*
6. *Delivering recommendations in the context of granting endorsement to the Board of Commissioners of the GCG report and Bank Muamalat Indonesia's GCG policy.*
7. *Arranging and update Charter of the Governance Committee periodically.*
8. *Maintaining the confidentiality of all documents, data and information of Bank Muamalat Indonesia.*

Wewenang Komite Tata Kelola Perusahaan

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Tata Kelola Perusahaan mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Mengakses dokumen, data, dan informasi Bank tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan.
2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak-pihak lain terkait tugas dan tanggung jawab Komite Tata Kelola Perusahaan.

Authorities of Corporate Governance Committee

In carrying out its duties, the Corporate Governance Committee has the following authority:

1. *Accessing bank documents, data, and information about employees, funds, assets, and company resources needed.*
2. *Communicating directly with employees, including Directors and other parties related to the duties and responsibilities of the Corporate Governance Committee.*

3. Jika diperlukan, Komite Tata Kelola dapat melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Tata Kelola Perusahaan yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya.
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

3. *The Corporate Governance Committee, if necessary, can involve independent parties outside the members of the Corporate Governance Committee that are needed to help carry out its duties.*
4. *Performing other authorities granted by the Board of Commissioners.*

Ketentuan Masa Jabatan

Masa tugas anggota Komite Tata Kelola Perusahaan tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya.

Terms of Office

The term of office of members of the Corporate Governance Committee may not be longer than the term of office of the Board of Commissioners as stipulated in the Articles of Association and can be re-elected for only one subsequent period.

Susunan, Jumlah, Komposisi dan Dasar Pengangkatan Komite Tata Kelola Perusahaan

Struktur dan keanggotaan Komite Tata Kelola Perusahaan Muamalat berdasar Surat Keputusan Direksi Nomor 026/B/DIR-KPTS/VIII/2018 tanggal 9 Agustus 2018 Komite Tata Kelola Perusahaan Bank Muamalat Indonesia Tbk, dengan keanggotaan sebagai berikut:

Structure, Total, Composition, and Basis of Appointment of Corporate Governance Committee

The structure and membership of the Muamalat Bank Corporate Governance Committee based on Directors' Decree Number 026/B/ DIR-KPTS/VIII/2018 dated on August 9, 2018, Bank Muamalat Indonesia Tbk Corporate Governance Committee, with the following membership:

Nama *Name*	Jabatan *Position*	Keterangan *Information*
Edy Setiadi	Ketua *Chairman*	Komisaris Independen *Independent Commissioners*
Iggi H. Achsien	Anggota *Member*	Komisaris Independen *Independent Commissioners*
Mohamed Hedi Mejai	Anggota *Member*	Komisaris *Commissioners*
Sri Hartati Rahayu	Anggota *Member*	Pihak Independen *Independent Party*

Pada akhir tahun 2019 terdapat penyesuaian terhadap keanggotan Komite Tata Kelola Perusahaan Bank Muamalat yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi No. 026/B/DIR-KPTS/X/2019 tanggal 24 Oktober 2019, dengan susunan anggota sebagai berikut:

At the end of 2019, there was an adjustment to the membership of the Bank Muamalat Corporate Governance Committee which was stipulated by Decree of the Directors No. 026/B/DIR-KPTS/X/2019 dated October 24, 2019, with the composition of members as follows:

Nama *Name*	Jabatan *Position*	Keterangan *Information*
Edy Setiadi	Ketua *Chairman*	Komisaris Independen *Independent Commissioners*
Mohamed Hedi Mejai	Anggota *Member*	Komisaris *Commissioners*

Profil Komite Tata Kelola Perusahaan

Profil anggota Komite tata Kelola Perusahaan dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan di dalam buku Laporan Tahunan ini.

Profile of Corporate Governance Committee

The profile of the members of the Corporate Governance Committee can be seen in the chapter Company Profile in this Annual Report book.



Edy Setiadi

Anggota
Member

Profil dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam Buku Laporan Tahunan ini.
The Profile can be seen in the chapter of the Company Profile in this Annual Report Book.



Mohamed Hedi Mejai

Anggota
Member

Profil dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam Buku Laporan Tahunan ini.
The Profile can be seen in the chapter of the Company Profile in this Annual Report Book.

Rapat Komite Tata Kelola Perusahaan (Frekuensi Pertemuan dan Tingkat Kehadiran)

Selama tahun 2019, Komite Tata Kelola Perusahaan telah menyelenggarakan 3 (tiga) kali rapat dengan minimal satu agenda rapat untuk setiap kali rapat termasuk pembahasan mengenai risalah rapat, serta hal-hal yang perlu ditindaklanjuti dari rapat sebelumnya dan beberapa pembahasan lainnya. Kehadiran dari masing-masing anggota Komite Tata Kelola Perusahaan dalam rapat adalah sebagai berikut:

Meetings of Corporate Governance Committee (Frequency of Meetings and Attendance)

During 2019, the Corporate Governance Committee held 3 (three) meetings with a minimum of one meeting agenda for each meeting including discussion of minutes of meetings, as well as matters that need to be followed up from previous meetings and several other discussions. The attendance of each member of the Corporate Governance Committee at the meeting was as follows:

Nama *Name*	Jabatan *Position*	Total Rapat *Total Meetings*	Jumlah Kehadiran *Number of Attendance*	Persentase *Percentage*
Edy Setiadi	Ketua *Chairman*	3	3	100%
Iggi H Achsien *)	Anggota *Member*	2	2	100%

Nama *Name*	Jabatan *Position*	Total Rapat *Total Meetings*	Jumlah Kehadiran *Number of Attendance*	Persentase *Percentage*
Mohamed Hedi Mejai	Anggota *Member*	3	3	100%
Sri Hartati Rahayu**)	Anggota *Member*	2	2	100%

*) Berhenti menjabat sebagai anggota komite per tanggal 24 Oktober 2019
**) Berhenti menjabat sebagai anggota komite per tanggal 12 Oktober 2019
**) Stop serving as a committee member as of October 24, 2019*
***) Stop serving as a committee member as of October 12, 2019*

Pembahasan yang telah dilakukan oleh Komite Tata Kelola Perusahaan dalam rapat selama tahun 2019, antara lain sebagai berikut:

1. Pemenuhan Kepatuhan dan Tata Kelola Perusahaan.
2. Pemenuhan kelengkapan anggota komite level Dewan Komisaris.
3. Pemenuhan rapat Dewan Komisaris dan Komite level Dewan Komisaris.
4. Penyusunan jadwal rapat selama 1 (satu) tahun buku.
5. Proses Penilaian Kemampuan dan Kepatutan anggota Dewan Komisaris.
6. Kewajiban penyampaian laporan evaluasi pelaksanaan audit oleh KAP atas laporan keuangan posisi akhir tahun ke OJK.
7. Perlunya penyusunan kebijakan remunerasi serta pelaksanaan evaluasi secara berkala.
8. Laporan tindak lanjut atas hasil rapat Komite Tata Kelola Perusahaan sebelumnya.

Discussions conducted by the Corporate Governance Committee at the meeting in 2019 included the following:

1. *Compliance with Compliance and Corporate Governance.*
2. *Fulfillment of the completeness of the members of the Board of Commissioners level committee.*
3. *Meeting the Board of Commissioners and Board of Commissioners level meetings.*
4. *Arranging meeting schedule for 1 (one) financial year.*
5. *Capability and Compliance Assessment Process for members of the Board of Commissioners.*
6. *Obligation to submit audit report on audit implementation by Public Accounting Firm on year-end financial statement to FSA.*
7. *The need to formulate a remuneration policy and conduct regular evaluations.*
8. *Follow-up report on the results of the previous Corporate Governance Committee meeting.*

Pengembangan Kompetensi

Tabel penjabaran pengembangan kompetensi bagi anggota Komite Tata Kelola Perusahaan dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan di dalam buku Laporan Tahunan ini

Competence Development

The table on the description of competency development for members of the Corporate Governance Committee can be seen in the Company Profile chapter in this Annual Report book

Pelaksanaan Tugas Komite Tata Kelola Perusahaan

Selama tahun 2019, Komite Tata Kelola Perusahaan telah melakukan kegiatan-kegiatan mengacu pada tugas dan tanggung jawab Komite sebagaimana tercantum dalam Piagam Komite. Beberapa kegiatan dan rekomendasi dari Komite Tata Kelola Perusahaan kepada Dewan Komisaris selama tahun 2018 antara lain:

1. Mengkomunikasikan proses Penilaian Kemampuan dan Kepatutan calon anggota Dewan Komisaris yang masih berjalan kepada OJK.
2. Menyesuaikan keanggotaan komite level Dewan Komisaris sehubungan dengan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris.
3. Direksi menyusun kebijakan remunerasi dan Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan remunerasi.
4. Perlu dilakukan program induksi terutama kepada Komisaris dari luar negeri terkait dengan regulasi di Indonesia.
5. Menjaga dan memenuhi beberapa rasio terkait aspek kepatuhan terhadap regulasi.
6. Agar disusun jadwal rapat 1 (satu) tahun ke depan beserta agendanya untuk rapat Dewan Komisaris, Direksi, DPS, komite-komite level Dewan Komisaris dan komite-komite level Direksi serta rapat gabungan antara Dewan Komisaris bersama dengan Direksi dan DPS.

Duties Implementation of Corporate Governance Committee

During 2019, the Corporate Governance Committee conducted activities referring to the duties and responsibilities of the Committee as stated in the Committee Charter. Several activities and recommendations from the Corporate Governance Committee to the Board of Commissioners during 2018 are as follows:

1. *Communicating the ongoing Capability and Compliance Assessment process for prospective members of the Board of Commissioners to FSA.*
2. *Adjusting the membership of the BOC level committee in connection with the change in the composition of the BOC.*
3. *The Directors formulate the remuneration policy and the Board of Commissioners supervises the implementation of the remuneration policy.*
4. *Induction programs are needed, especially for Commissioners from abroad related to regulations in Indonesia.*
5. *Maintaining and fulfiling several ratios related to aspects of compliance with regulations.*
6. *For the next 1 (one) year meeting schedule and agenda to be prepared for the meetings of the Board of Commissioners, Directors, DPS, Board of Commissioners level committees and Directors level committees and joint meetings between the Board of Commissioners together with the Directors and DPS.*

Komite Tata Kelola Terintegrasi

Integrated Corporate Governance Committee

Dewan Komisaris membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi bertujuan untuk membantu Dewan Komisaris Bank Muamalat Indonesia sebagai Entitas Utama dalam melakukan pengawasan terhadap penerapan tata kelola dalam konglomerasi keuangan sesuai dengan Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip syariah.

The Board of Commissioners formed the Integrated Governance Committee aimed at assisting the Board of Commissioners of Bank Muamalat Indonesia as the Main Entity in monitoring the implementation of governance in financial conglomerates in accordance with the Integrated Governance Policy, applicable laws and regulations and sharia principles.

Dasar Hukum

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 18/ POJK.03/2014 perihal Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.

Legal Basis

1. *Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 18/ POJK.03/2014 concerning the Implementation of Integrated Governance for Financial Conglomerates.*
2. *Financial Services Authority Circular No. 15/SEOJK.03/2015 concerning the Implementation of Integrated Governance for Financial Conglomerates.*

Pedoman Kerja/Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi

Komite Tata Kelola Perusahaan Bank Muamalat telah memiliki Piagam Komite Tata Kelola Perusahaan yang dikinikan pada tanggal 19 September 2017 dan akan diperbaharui sesuai dengan perkembangan regulasi yang berlaku serta kondisi terkini dari Bank. Piagam tersebut mengatur hal - hal sebagai berikut:

1. struktur dan keanggotaan,
2. tugas dan tanggung jawab,
3. sekretaris komite,
4. rapat,
5. kuorum dan keputusan komite,
6. pemanggilan,
7. kehadiran dan pelaksanaan rapat komite,
8. keputusan di luar rapat komite,
9. masa tugas,
10. kajian berkala dan pelaporan.

Board Manual/Charter of Integrated Governance Committee

The Corporate Governance Committee of Bank Muamalat has a Corporate Governance Committee Charter that was updated on September 19, 2017, and will be updated in accordance with the development of applicable regulations and the current conditions of the Bank. The Charter regulates the following matters:

1. *structure and membership,*
2. *duties and responsibilities,*
3. *committee secretary,*
4. *meeting,*
5. *committee quorums and decisions,*
6. *summoning,*
7. *attendance and implementation of committee meetings,*
8. *decisions outside the committee meeting,*
9. *tenure,*
10. *periodic review and reporting.*

Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas Komite Tata Kelola Terintegrasi sesuai Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi adalah:

1. Mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi antara lain melalui penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi; dan
2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama untuk penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.

Duties and Responsibilities

The duties of the Integrated Governance Committee in accordance with the Integrated Governance Committee Charter are:

1. *Evaluating the implementation of Integrated Governance, among others through the assessment of the adequacy of internal control and the implementation of the integrated compliance function; and*
2. *Providing recommendations to the Board of Commissioners of the Main Entity for improvement of the Integrated Governance Guidelines.*

Ketentuan Masa Jabatan

Masa tugas anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris Entitas Utama sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Entitas Utama dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya.

Terms of Office

The term of office of a member of the Integrated Governance Committee may not be longer than the term of office of the Board of Commissioners of the Main Entity as stipulated in the Articles of Association of the Main Entity and can be re-elected for only one subsequent period.

Susunan, Jumlah, Komposisi dan Dasar Pengangkatan Komite Tata Kelola Terintegrasi

Struktur dan keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi telah ditetapkan terakhir melalui Surat Keputusan Direksi No. 027/B/DIR-KPTS/VIII/2018 tanggal 9 Agustus 2018 tentang Komite Tata Kelola Terintegrasi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, dengan keanggotaan sebagai berikut :

Structure, Total, Composition, and Basis of Appointment of Integrated Governance Committee

The structure and membership of the Integrated Governance Committee has been established last through the Decree of the Board of Directors No. 027/B/DIR-KPTS/VIII/2018 dated 9 August 2018 concerning the Integrated Governance Committee of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, with the following membership:

Nama *Name*	Jabatan *Position*	Keterangan *Description*
Iggi H. Achsien	Ketua (merangkap anggota) *Chairman (as member)*	Komisaris Independen BMI *BMI Independent Commissioner*
Dr. H. Oni Sahroni	Anggota *Member*	DPS BMI *BMI Shariah Supervisory Board*
Sri Hartati Rahayu	Anggota *Member*	Pihak Independen *Independent Party*

Pada tahun 2019 terdapat perubahan struktur keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi melalui Surat Keputusan Direksi (SK) Direksi Bank Muamalat Indonesia No. 27/B/DIR-KPTS/X/2019 tanggal 24 Oktober 2019 dengan susunan sebagai berikut:

At the end of 2019, there was an adjustment to the membership of the Bank Muamalat Integrated Governance Committee which was stipulated by Decree of the Directors No. 027/B/DIR-KPTS/X/2019 dated October 24, 2019, with the composition of members as follows:

Nama *Name*	Jabatan *Position*	Keterangan *Description*
Ilham Akbar Habibie	Ketua (merangkap anggota) *Chairman (as member)*	Komisaris Independen BMI *BMI Independent Commissioner*
Dr. H. Oni Sahroni*)	Anggota *Member*	DPS BMI *BMI Shariah Supervisory Board*
Komisaris Independen Alif	Anggota *Member*	ALIF telah mengangkat Komisaris Independen melalui RUPS dan masih proses fit & proper test di OJK *Alif has apointed Independence Commissioner trough AGMS and still process obtaining fit & proper test from OJK*

*) Telah mengundurkan diri sebagai DPS BMI tanggal 7 November 2019 dan di tetapkan melalui RUPS Luar Biasa 16 Desember 2019
) Has resigned as the Sharia Supervisory Board of BMI on November 7, 2019, and was determined through an Extraordinary GMS on December 16, 2019

Profil Komite Tata Kelola Terintegrasi

Profil anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan di dalam buku Laporan tahunan ini.

Profile of Integrated Governance Committee

Profiles of members of the Integrated Corporate Governance Committee can be seen in the Corporate Profile chapter in this Annual Report book.



Ilham A. Habibie

Ketua
Chairman

Profil lengkap dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam Buku Laporan Tahunan ini.
The Profile can be seen in the chapter of the Company Profile in this Annual Report Book.



Dr. H. Oni Sahroni

Anggota
Member

Usia *Age*	45 tahun *45 Years of Age*
Kewarganegaraan *Nationality*	Indonesia
Domisili *Domicile*	Depok
Riwayat Pendidikan *Education Background*	Doktor bidang Fikih Muqaran dari Universitas Al-Azhar, Kairo *Doctor of Fiqh Muqaran from Al-Azhar University, Cairo*
Riwayat Pekerjaan *Work Experiences*	Dewan Pengawas Syariah PT Bank Muamalat Indonesia Tbk sejak Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 29 Juni 2016 dan mengundurkan diri sebagai DPS BMI tanggal 7 November 2019 dan di tetapkan melalui RUPS Luar Biasa 16 Desember 2019 *Sharia Supervisory Board of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk since the General Meeting of Shareholders on 29 June 2016 and resigned as the Sharia Supervisory oard of BMI on 7 November 2019 and determined through the Extraordinary General Meeting of Shareholders on 16 December 2019*
Jabatan Lainnya *Other Positions*	Anggota Badan Pelaksana Harian Dewan Syariah Nasional (DSN), dosen Fikih Ekonomi di Universitas Indonesia dan Syariah Economic & Banking Institute (SEBI), tim ahli Syariah ISRA (International Shari'ah Research Academy for Islamic Finance) Bank Negara Malaysia sejak 2015 dan anggota Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sejak 2016 *Member of the National Sharia Board Daily Executing Board (DSN), lecturer in Economic Jurisprudence at the University of Indonesia and the Syariah Economic & Banking Institute (SEBI), ISRA (International Shari'ah Research Academy for Islamic Finance) Sharia Expert Team of the State Bank of Malaysia since 2015 and member of the Board of the State of Malaysia Islamic Accounting Standards (DSAS) Indonesian Institute of Accountants (IAI) since 2016*
Dasar Hukum Pengangkatan *Legal Basis of Appointment*	Surat Keputusan Direksi No. 027/B/DIRKPTS/VIII/2018 tanggal 9 Agustus 2018 tentang Komite Tata Kelola Terintegrasi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk *Decree of the Board of Directors No.27/B/DIR-KPTS/IX/2018 dated August 9, 2018 regarding the Governance Integrated Committee of Bank Muamalat Indonesia Tbk*
Kualifikasi *Qualification*	Perbankan Syariah, Fikih *Islamic Banking, Fiqh*

Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi (Frekuensi Pertemuan dan Tingkat Kehadiran)

Selama tahun 2019, Komite Tata Kelola Terintegrasi telah menyelenggarakan 2 (dua) kali rapat dengan minimal satu agenda rapat untuk setiap kali rapat termasuk pembahasan mengenai risalah rapat, serta hal-hal yang perlu ditindaklanjuti dari rapat sebelumnya dan beberapa pembahasan lainnya. Berdasarkan notulen rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi, kehadiran dari masing-masing anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi dalam rapat adalah sebagai berikut:

Meetings of Integrated Corporate Governance Committee (Frequency of Meetings and Attendance)

During 2019, the Integrated Governance Committee held 2 (two) meetings with a minimum of one meeting agenda for each meeting including discussion of minutes of meetings, as well as matters that need to be followed up from previous meetings and several other discussions. Based on the minutes of the Integrated Governance Committee meeting, the attendance of each member of the Integrated Governance Committee in the meeting is as follows:

Nama *Name*	Jabatan *Position*	Total Rapat *Total Meetings*	Jumlah Kehadiran *Total Attendance*	Persentase *Percentage*
Iggi H. Achsien*)	Ketua *Chairman*	1	1	100%
Ilham Akbar Habibie**)	Ketua (merangkap anggota) *Chairman and is concurrent as a member*	1	1	100%
Dr. H. Oni Sahroni***)	Anggota *Member*	1	1	100%
Sri Hartati Rahayu****)	Anggota *Member*	1	1	100%

*) Berhenti menjabat sebagai Ketua/Anggota komite
**) Ditetapkan sebagai Ketua (merangkap anggota) komite melalui Surat Keputusan Direksi No. 027/B/DIR-KPTS/X/2019 tanggal 24 Oktober 2019
***) Mengundurkan diri sebagai DPS BMI tanggal 7 November 2019
****) Berhenti menjabat sebagai anggota komite per tanggal 12 Oktober 2019
**) Ceased serving as a Chair/Committee member*
***) Defined as a Chairman (concurrently a member) of the committee through Directors Decree No. 027/B/DIR-KPTS/X/2019 dated October 24, 2019*
****) Resigned as DPS BMI on November 7, 2019*
*****) Stop serving as a committee member as of October 12, 2019*

Pembahasan yang telah dilakukan oleh Komite Tata Kelola Terintegrasi dalam rapat selama tahun 2019, antara lain sebagai berikut:

1. Pembahasan terkait Laporan GCG Terintegrasi per Des 2018 dan Update Terkini.
2. Pembahasan mengenai kondisi ALIF.
3. Pembahasan Prioritas Kerja Komite GCG Terintegrasi.

Discussions that have been carried out by the Integrated Governance Committee in the meeting during 2018, among others, are as follows:

1. *Discussion regarding the Integrated GCG Report as of December 2018 and Latest Update.*
2. *Discussion on ALIF conditions.*
3. *Discussion of the Integrated GCG Committee Work Priorities.*

Pengembangan Kompetensi

Tabel penjabaran pengembangan kompetensi bagi anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan di dalam buku Laporan Tahunan ini

Pelaksanaan Tugas Komite Tata Kelola Terintegrasi

Selama tahun 2019, Komite Tata Kelola Terintegrasi telah melakukan kegiatan-kegiatan mengacu pada tugas dan tanggung jawab Komite sebagaimana tercantum dalam Piagam Komite. Beberapa kegiatan dan rekomendasi dari Komite Tata Kelola Terintegrasi selama tahun 2019 antara lain:

1. ALIF agar melakukan evaluasi terhadapa penyaluran pembiayaan.
2. ALIF memenuhi kepengurusan agar dapat menjalankan kegiatan bisnisnya dengan baik.
3. ALIF agar menindaklanjuti rekomendasi hasil audit Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi.

Competence Development

The table describing the development of competencies for members of the Integrated Governance Committee can be seen in the Company Profile chapter in this Annual Report book.

Duties Implementation of Integrated Governance Committee

During 2019, the Integrated Governance Committee carried out activities referring to the duties and responsibilities of the Committee as stated in the Committee Charter. Several activities and recommendations from the Integrated Governance Committee during 2019 include:

1. *ALIF to conduct an evaluation of the distribution of funding.*
2. *ALIF fulfills management so that it can carry out its business activities well.*
3. *ALIF to follow up on the recommendations of the audit results of the Integrated Internal Audit Work Unit.*

Komite-Komite Tingkat Direksi
Committee under Board of Directors

Sesuai Surat Keputusan Direksi No. 021/B/DIR-KPTS/VIII/2018 tentang Penyempurnaan Struktur Organisasi Muamalat Indonesia maka Direksi telah membentuk 4 (empat) Komite Eksekutif yang dipimpin langsung oleh Direktur Utama (Dirut) dan/atau Direktur terkait, yaitu sebagai berikut:

1. Komite Pengarah Teknologi Informasi
2. Komite Aset dan Liabilitas
3. Komite Manajemen Risiko
4. Komite Sumber Daya Manusia

In accordance with Directors Decree No. 021/B/DIR-KPTS/VIII/2018 concerning the Improvement of Muamalat Indonesia's Organisational Structure, the Board of Directors has formed 4 (four) Executive Committees led directly by the President Director and/or related Directors, as follows:

1. *Information Technology Steering Committee*
2. *Asset and Liability Committee*
3. *Risk Management Committee*
4. *Human Resources Committee*

Komite Pengarah Teknologi Informasi

Dasar Hukum

Pembentukan Komite Pengarah Teknologi Informasi didasarkan pada peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.03/2016 tanggal 1 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.
2. Piagam Komite Pengarah Teknologi Informasi Bank Muamalat Indonesia.

Piagam Komite Pengarah Teknologi Informasi

Komite Pengarah Teknologi Informasi Bank Muamalat Indonesia memiliki Piagam yang mengatur struktur dan keanggotaan, aturan dasar, wewenang dan tanggung jawab, waktu kerja dan pelaporan. Piagam Komite Pengarah Teknologi Informasi terakhir dikinikan pada tanggal 2 Mei 2019 dan akan diperbaharui sesuai dengan perkembangan regulasi yang berlaku serta kondisi terkini dari Bank.

Struktur Keanggotaan

Komite Pengarah Teknologi Informasi Bank Muamalat Indonesia sekurang-kurangnya beranggotakan:

1. Direktur yang membawahkan satuan kerja Teknologi Informasi (TI).
2. Direktur yang membawahkan satuan kerja Manajemen Risiko.
3. Pejabat tertinggi yang membawahkan satuan kerja penyelenggara Teknologi Informasi (TI).
4. Pejabat tertinggi yang membawahkan satuan kerja pengguna Teknologi Informasi (TI).

Information Technology Steering Committee

Legal Basis

The formation of the Information Technology Steering Committee is based on the following rules:

1. *Financial Services Authority Regulation Number 38/POJK.03/2016 dated December 1, 2016, concerning Application of Risk Management in the Use of Information Technology by Commercial Banks.*
2. *Charter of the Bank Muamalat Indonesia Information Technology.*

Charter of IT Steering Committee

Bank Muamalat Indonesia's Information Technology Steering Committee has a Charter governing structure and membership, rules basis, authority and responsibility, work time and reporting.The Charter of the Information Technology Steering Committee was last updated on May 2, 2019, and will be updated under the development of applicable regulations and the current conditions of the Bank

Membership Structure

The Bank Muamalat Indonesia Information Technology Steering Committee has at least the following members:

1. *Director in charge of the Information Technology (IT) work unit.*
2. *Director in charge of the Risk Management work unit.*
3. *The highest official in charge of the Information Technology (IT) operating unit.*
4. *The highest official in charge of the Information Technology (IT) user unit.*

Susunan Komite Pengarah Teknologi Informasi Bank Muamalat tahun 2019 adalah sebagai berikut:
The composition of the Muamalat Bank Information Technology Steering Committee in 2019 is as follows:

Susunan Komite Pengarah TI *The Composition of the IT Steering Committee*	
Penasehat dan Pengawas /*Advisor and Supervisor*	Direktur Utama / *President Director*
Ketua/ *Chairman*	Direktur Operasi / *Director of Operations*
Wakil Ketua I / *Deputy Chair I*	Direktur Kepatuhan / *Compliance Director*
Wakil Ketua II / *Deputy Chair II*	Direktur Keuangan / *Director of Finance*
Wakil Ketua III / *Deputy Chair III*	Direktur Bisnis Ritel / *Retail Business Director*

Susunan Komite Pengarah Teknologi Informasi Bank Muamalat tahun 2019 adalah sebagai berikut:
The composition of the Muamalat Bank Information Technology Steering Committee in 2019 is as follows:

Susunan Komite Pengarah TI *The Composition of the IT Steering Committee*	
Wakil Ketua IV / *Deputy Chair IV*	Chief Corporate Banking Officer
Wakil Ketua V / *Deputy Chair V*	Direktur Risiko *Risk Director*
Sekretaris / *Secretary*	Head of Information Technology
Anggota / *Member*	Semua Kepala Divisi Terkait *All Related Division Heads*

Tugas dan Tanggung Jawab *Duties and Responsibilities*

Jabatan *Position*	Tugas & Tanggung Jawab *Duties and Responsibilities*
Ketua dan Wakil Ketua *Head and Deputy Head*	1. Mengusulkan agenda untuk setiap rapat dengan masukan dari anggota Komite. 2. Memastikan bahwa agenda rapat dan bahan pembahasan yang relevan didistribusikan kepada semua anggota komite setidaknya satu hari kerja sebelum rapat. 3. Menjaga fokus topik pembahasan dalam rapat. 4. Memastikan rapat dimulai dan diakhiri tepat waktu. 5. Berperan sebagai penghubung antara satuan kerja IT dengan satuan kerja pengguna IT dengan Direksi. *1. Propose an agenda for each meeting with input from Committee members.* *2. Ensure that the meeting agenda and relevant discussion materials are distributed to all committee members at least one working day before the meeting.* *3. Maintain the focus of the discussion topic in the meeting.* *4. Ensure meetings begin and end on time.* *5. Act as a liaison between the IT work unit with the IT user work unit and the Directors.*
Sekretaris *Secretary*	1. Menyiapkan dan mendokumentasikan risalah rapat dari setiap rapat dalam format hardcopy dan/atau format elektronik yang sesuai. 2. Menyediakan daftar tindakan yang perlu dibahas dan ditindaklanjuti serta dibuatkan pemaparan, penanggung jawab dan estimasi waktu penyelesaian rapat. 3. Mendistribusikan risalah rapat dan daftar yang perlu ditindaklanjuti kepada seluruh anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi dan satuan kerja terkait *1. Prepare and document the minutes of meetings of each meeting in hardcopy format and/or the appropriate electronic format.* *2. Provide a list of actions that need to be discussed and acted upon and a presentation, responsibility and estimation of the time of the meeting are made.* *3. Distribute minutes of meetings and lists that need to be followed up with all members of the Information Technology Steering Committee and related work units*
Anggota *Member*	1. Menghadiri rapat Komite Pengarah teknologi Informasi tepat waktu. 2. Menjaga kerahasian atas pembahasan topik yang sensitif yang dibahas dalam rapat Komite. 3. Menjaga kerahasiaan informasi yang bersifat rahasia yang dibahas dalam rapat. 4. Menindaklanjuti keputusan rapat Komite Pengarah teknologi Informasi. 5. Anggota Komite diharapkan untuk menghadiri setiap pertemuan dan menginformasikan apabila tidak dapat hadir dala rapat komite. *1. Attend Information Technology Steering Committee meetings on time.* *2. Maintain confidentiality for the discussion of sensitive topics discussed in Committee meetings.* *3. Maintain the confidentiality of confidential information discussed at the meeting.* *4. Follow-up on the decision of the Information Technology Steering Committee meeting.* *5. Committee members are expected to attend each meeting and inform if not present at the committee meeting.*

Wewenang dan Tanggung Jawab Komite Pengarah Teknologi Informasi

Komite Pengarah Teknologi Informasi berwenang menyampaikan saran-saran kepada Direksi tentang rencana strategis teknologi informasi, proyek yang sedang berlangsung saat ini maupun proyek yang akan datang, inisiatif dan menyampaikan rekomendasi kepada Direksi.

Rencana Strategis Teknologi Informasi yang sesuai dengan rencana strategis kegiatan usaha Bank, dengan memperhatikan faktor efisiensi, efektivitas serta hal-hal sebagai berikut:

1. Rencana Pelaksanaan (*roadmap*) untuk mencapai kebutuhan teknologi informasi yang mendukung strategi bisnis Bank.
2. Sumber daya yang dibutuhkan.
3. Keuntungan/manfaat yang akan diperoleh saat rencana diterapkan.
4. Perumusan Kebijakan dan prosedur Teknologi Informasi.
5. Kesesuaian proyek-proyek Teknologi Informasi yang disetujui dengan Rencana Strategis Teknologi Informasi.
6. Kesesuaian pelaksanaan proyek-proyek Teknologi Informasi yang disetujui dengan rencana proyek yang disepakati dalam service level agreement.
7. Kesesuaian Teknologi Informasi dengan kebutuhan sistem informasi manajemen yang mendukung pengelolaan kegiatan usaha Bank.
8. Efektivitas langkah-langkah minimalisasi risiko atas investasi Bank pada sektor Teknologi Informasi.
9. Pemantauan atas kinerja Teknologi Informasi, dan upaya peningkatannya.
10. Upaya penyelesaian permasalahan teknologi informasi.
11. Kecukupan dan alokasi sumber daya yang dimiliki Bank.

Authorities and Responsibilities of IT Steering Committee

The Information Technology Steering Committee has the authority to submit suggestions to the Board of Directors regarding information technology strategic plans, current and future projects, initiatives and deliver recommendations to the Directors.

Information Technology Strategic Plan in accordance with the strategic plan of the Bank's business activities, taking into account the factors of efficiency, effectiveness and the following matters:

1. *Implementation plan (roadmap) to achieve information technology needs that support the Bank's business strategy.*
2. *Resources needed.*
3. *Benefits that will be obtained when the plan is implemented.*
4. *Formulation of Information Technology Policies and procedures.*
5. *Suitability of approved Information Technology projects with the Information Technology Strategic Plan.*
6. *Compliance with the implementation of approved Information Technology projects with the project plans agreed in the service level agreement.*
7. *Suitability of Information Technology with the need for a management information system that supports the management of the Bank's business activities.*
8. *Effectiveness of risk minimization measures for Bank investment in the Information Technology sector.*
9. *Oversight the performance of Information Technology and efforts to improve it.*
10. *Efforts to resolve information technology problems.*
11. *Adequacy and allocation of resources owned by the Bank.*

Rapat

Sesuai dengan piagam Komite Pengarah Teknologi Informasi, rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi wajib diselenggarakan paling kurang 2 (dua) kali dalam satu tahun. Selama tahun 2019, Komite Pengarah Teknologi Informasi telah menyelenggarakan 2 (dua) kali rapat. Berdasarkan notulen rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi, pembahasan yang telah dilakukan oleh Komite dalam rapat antara lain sebagai berikut:

Meeting

In accordance with the Information Technology Steering Committee charter, meeting the Information Technology Steering Committee must be held the most less 2 (two) times in one year. During 2019, the Committee The Director of Information Technology has held 2 (two) meeting times. Based on the minutes of the meeting of the Technology Steering Committee Information, discussions that have been carried out by the Committee in meetings:

Rapat ke *Time of Meeting*	Tanggal *Date*	Agenda
1.	15 Mei 2019 *May 15, 2019*	• Update IT Audit • Update IT Finance • Update IT Strategic
2.	11 Des 2019 *Dec 11, 2019*	• Update IT Projects/Initiaitives • Update IT System Availability • Update IT Budget

Komite ALCO (Asset & Liability Committee)

Komite dibentuk dengan tujuan membantu pelaksanaan tugas Direksi dalam memelihara struktur neraca yang kuat, yang meliputi analisis dan perumusan kebijakan dan strategi, pengambilan keputusan, pengawasan dalam pengelolaan risiko likuiditas, risiko pasar dan permodalan sejalan dengan peraturan BI/OJK maupun strategi bisnis.

Dasar Hukum

Pembentukan ALCO didasarkan pada peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
3. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 perihal Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
4. Piagam ALCO Bank Muamalat Indonesia.

Piagam ALCO

Bank Muamalat Indonesia telah memiliki Piagam yang mengatur antara lain struktur dan Keanggotaan Komite Aset dan Liabilitas, tugas dan wewenang, ketentuan dan mekanisme pelaksanaan rapat, pelaporan dan sekretariat. Piagam Komite Aset dan Liabilitas terakhir dikinikan pada bulan Desember 2016 dan akan diperbaharui sesuai dengan perkembangan regulasi yang berlaku serta kondisi terkini dari Bank.

Struktur Keanggotaan

ALCO Committee (Asset & Liability Committee)

The committee was formed with the aim of assisting the implementation of the Board of Directors' duties in maintaining a strong balance sheet structure, which includes the analysis and formulation of policies and strategies, decision making, supervision in managing liquidity risk, market risk and capital in line with BI/FSA regulations and business strategies.

Legal Basis

The establishment of ALCO is based on the following rules:

1. *Bank Indonesia Regulation No. 11/33/PBI/2009 dated December 7, 2009, concerning Implementation of Good Corporate Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units.*
2. *Financial Services Authority Regulation Number 65/POJK.03/2016 concerning Application of Risk Management for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units.*
3. *Bank Indonesia Circular Letter Number 12/13/DPbS dated April 30, 2010 concerning Implementation of Good Corporate Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units.*
4. *ALCO Charter for Bank Muamalat Indonesia.*

ALCO Charter

Bank Muamalat Indonesia has had a Charter which regulates, among others, the structure and membership of the Asset and Liability Committee, duties and authorities, provisions and mechanisms for conducting meetings, reporting and secretariat. The last Asset & Liability Committee Charter was updated in December 2016 and will be updated in accordance with the development of applicable regulations and the current conditions of the Bank.

Structure of Membership

Susunan Komite ALCO *Susunan Komite ALCO*	
Ketua *Head*	Direktur Utama *President Director*
Wakil Ketua *Deputy Head*	Direktur Keuangan *Finance Director*
Sekretaris *Secretary*	Head of Treasury
Anggota Tetap dengan Hak Suara *Permanent Members with Voting Rights*	• Chief Corporate Banking Officer • Retail Banking Director • Compliance Director • Operation Director • Chief Human Capital Officer • Chief Risk Officer
Anggota Tetap Tanpa Hak Suara *Permanent Members without Voting Rights*	• Head of Global Market • Head of Consumer Banking Business • Head of Special Asset Management • Head of Distribution Network Management • Head of Enterprise Risk Management • Head of Corporate Strategic & Planning • Head of Treasury (merangkap Sekretaris ALCO)
Anggota Tidak tetap tanpa Hak Suara *Non-Permanent Members without Voting Rights*	• Kepala Unit Bisnis yang terkait dengan materi pembahasan dalam Rapat ALCO. • Region Head atau Branch Manager yang terkait dengan materi pembahasan dalam rapat ALCO. • *Head of Business Unit related to the material discussed in the ALCO Meeting.* • *Region Head or Branch Manager related to the discussion material in the ALCO meeting.*

Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas Komite Aset dan Liabilitas sesuai Piagam Komite Aset dan Liabilitas paling kurang meliputi:

1. Melakukan kajian atau tinjauan (*review*) terhadap kebijakan dan strategi pengelolaan aset dan kewajiban Perseroan secara keseluruhan.
2. Memberikan rekomendasi kepada Direksi Perseroan terkait kebijakan dan strategi pengelolaan aset dan kewajiban Perseroan.
3. Melakukan evaluasi terhadap implementasi/pelaksanaan kebijakan dan strategi pengelolaan aset dan kewajiban Perseroan dalam rangka memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan pelaksanaan prinsip kehati-hatian oleh Perseroan selaku Bank Umum Syariah.
4. Melakukan evaluasi terhadap kinerja ALCO.

Rapat

Ketentuan dan mekanisme Pelaksanaan Rapat ALCO Bank Muamalat diatur sebagai berikut:

1. Rapat ALCO dilaksanakan paling sedikitnya 1 (satu) kali setiap bulan pada jadwal dan agenda yang telah ditetapkan.
2. Rapat ALCO didahului oleh rapat ASG. Namun, dalam keadaan tertentu Rapat ALCO dapat langsung dilaksanakan tanpa didahului oleh rapat ASG dan dapat pula dilaksanakan di luar jadwal rapat ALCO yang telah ditetapkan dengan menyesuaikan jadwal Direksi.
3. Setiap anggota ALCO diwajibkan untuk menghadiri rapat ALCO. Dalam hal Anggota ALCO berhalangan untuk menghadiri Rapat ALCO, maka harus diwakili oleh Senior Officer dalam subordinatnya.
4. Rapat ALCO hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh anggota ALCO serta dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua orang Direktur Perseroan, yang terdiri dari Ketua ALCO, atau Wakil Ketua ALCO (jika Ketua ALCO berhalangan hadir) dan Direktur yang membawahi unit bisnis.
5. Rapat ALCO dipimpin oleh Ketua ALCO, atau Wakil Ketua ALCO apabila Ketua ALCO berhalangan untuk menghadiri rapat ALCO.
6. Materi Rapat ALCO disiapkan oleh Sekretaris ALCO.
7. Hasil keputusan rapat ALCO adalah sah jika diputuskan oleh Anggota ALCO yang memiliki hak suara yang menghadiri rapat ALCO.
8. Setiap rapat ALCO dan hasil keputusannya dituangkan ke dalam risalah rapat ALCO yang dibuat dan disampaikan oleh Sekretaris ALCO kepada Ketua ALCO dan Wakil Ketua ALCO untuk ditandatangani oleh Ketua ALCO, Wakil Ketua ALCO dan Sekretaris ALCO.
9. Risalah rapat ALCO yang telah ditandatangani oleh Ketua ALCO, Wakil Ketua ALCO dan Sekretaris ALCO tersebut di atas, untuk selanjutnya didistribusikan oleh Sekretaris ALCO kepada unit kerja terkait.
10. Seluruh dokumen rapat ALCO didokumentasikan oleh Sekretaris ALCO.
11. Hasil keputusan rapat ALCO yang terkait dengan seluruh unit bisnis ditindaklanjuti oleh ALCO dengan menyampaikan memorandum kepada seluruh unit bisnis, Region Head, Branch Manager, dan Operation Manager serta diketahui oleh Direksi. Sementara hasil

Duties and Responsibilities

The duties of the Asset and Liability Committee in accordance with the Asset and Liability Committee Charter at least include:

1. *Reviewing policies and strategies for managing the Company's assets and liabilities as a whole.*
2. *Providing recommendations to the Company's Directors regarding policies and strategies for managing the Company's assets and liabilities.*
3. *Evaluating the implementation of policies and strategies for managing the Company's assets and liabilities in order to comply with applicable laws and regulations relating to the implementation of the precautionary principle by the Company as a Sharia Commercial Bank.*
4. *Evaluating ALCO's performance.*

Meeting

The provisions and mechanism of the ALCO Bank Muamalat Meeting are regulated as follows:

1. *ALCO meetings are held at least once a month on a predetermined schedule and agenda.*
2. *The ALCO meeting is preceded by an ASG meeting. However, in certain circumstances the ALCO Meeting can be directly held without preceded by an ASG meeting and can also be held outside the ALCO meeting schedule that has been set by adjusting the Directors' schedule.*
3. *Every ALCO member is required to attend the ALCO meeting. In the event that ALCO Members are unable to attend ALCO Meetings, they must be represented by the Senior Officer in their subordinates.*
4. *ALCO meetings can only be held if attended by at least 50% (fifty percent) of the total number of ALCO members and attended by at least two Directors of the Company, consisting of the Chair of the ALCO, or the Deputy Chair of the ALCO (if the Chair of the ALCO unable to attend) and the Director in charge of the business unit.*
5. *ALCO meetings are chaired by the Chair of the ALCO, or the Deputy Chair of the ALCO if the Chair of the ALCO is unable to attend the ALCO meeting.*
6. *ALCO Meeting Material is prepared by the ALCO Secretary.*
7. *The results of the decisions of the ALCO meeting are valid if decided by ALCO Members who have voting rights who attend the ALCO meeting.*
8. *Each ALCO meeting and the results of its decision are poured into the minutes of the ALCO meeting made and submitted by the ALCO Secretary to the Chair of the ALCO and the Deputy Chair of the ALCO to be signed by the Chair of the ALCO, the Deputy Chair of the ALCO and the Secretary of the ALCO.*
9. *Minutes of the ALCO meeting signed by the Chair of the ALCO, the Deputy Chair of the ALCO and the Secretary of the ALCO mentioned above, for further distribution by the ALCO Secretary to the relevant work units.*
10. *All ALCO meeting documents are documented by the ALCO Secretary.*
11. *ALCO meeting decisions related to all business units are followed up by ALCO by sending memorandums to all business units, Region Head, Branch Manager, and Operation Manager and known by the Directors. While the decisions of the ALCO meeting which*

keputusan rapat ALCO yang harus ditindaklanjuti oleh unit bisnis terkait disampaikan melalui memorandum khusus.

12. Keputusan rapat ALCO diambil berdasarkan musyawarah mufakat.

must be followed up by the relevant business units are conveyed through a special memorandum.

12. Decisions of the ALCO meetings are taken based on consensus agreement.

Pada tahun 2019 Komite ALCO Bank Muamalat telah melaksanakan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali dengan rincian sebagai berikut:

In 2019, the ALCO Bank Muamalat Committee held 12 (twelve) meetings with the following details:

Rapat Ke *Time of Meeting*	Tanggal *Date*	Agenda Rapat *Meetings Agenda*
1.	22 Jan 2019 *Jan 22, 2019*	1. Liqudity Risk Management 2. Forex Risk Management 3. Net Income Margin (NIM) Management 4. Capital Management
2.	14 Feb 2019 *Feb 14, 2019*	1. Liqudity Risk Management 2. Forex Risk Management 3. Net Income Margin (NIM) Management 4. Capital Management
3.	12 Mar 2019 *Mar 12, 2019*	1. Liqudity Risk Management 2. Forex Risk Management 3. Net Income Margin (NIM) Management 4. Capital Management
4.	16 Apr 2019 *Apr 16, 2019*	1. Liqudity Risk Management 2. Forex Risk Management 3. Net Income Margin (NIM) Management 4. Capital Management
5.	9 Mei 2019 *May 9, 2019*	1. Liqudity Risk Management 2. Forex Risk Management 3. Net Income Margin (NIM) Management 4. Capital Management
6.	19 Jun 2019 *Jun 19, 2019*	1. Update Rasio PLN 2. Ketentuan Spesial Nisbah 3. Nisbah Counter Deposito Bulanan untuk Bulan Juni 2019 4. Mekanisme Persetujuan Dropping 5. Pricing Pembiayaan 6. Formulasi Pricing Negosiasi Wesel Export Usance LC/TR/UPAS 7. Alternatif Investasi untuk Menaikkan RIM dan PLM *1. Ratio PLN Update* *2. Special Provisions Ratio* *3. Monthly Counter Deposit Ratio for June 2019* *4. Dropping Approval Mechanism* *5. Pricing of Financing* *6. Pricing Form Negotiation of Export Usance Wesel LC/TR/UPAS Formulation* *7. Investment Alternatives to Raise RIM and PLM*
7.	19 Jul 2019 *Jul 19, 2019*	1. Ketentuan Spesial Nisbah 2. Nisbah Counter Deposito Bulanan untuk Bulan Juli 2019 3. Mekanisme Persetujuan Dropping 4. Pricing Pembiayaan 5. Formulasi Pricing Negosiasi Wesel Export Usance LC/TR/UPAS 6. Analisa Dampak Perang Dagang Amerika dan China terhadap Industri 7. Penurunan Pricing Funding 8. Target Penurunan COF 9. Meningkatkan CASA Wadiah 10. Kebutuhan Likuiditas USD *1. Special Ratio Provisions* *2. Monthly Counter Deposit Ratio for July 2019* *3. Dropping Approval Mechanism* *4. Pricing of Financing* *5. Negotiation for Export Usance Wesel LC/TR/UPAS Pricing Formulation* *6. Analysis of the Impact of the American and Chinese Trade Wars on Industry* *7. Decreased Pricing Funding* *8. COF reduction targets* *9. Increase CASA Wadiah* *10. USD Liquidity Needs*
8.	15 Aug 2019 *Aug 15, 2019*	1. Stress Test Perang Dagang dan Kondisi RIM BMI 2. ALM Performance (Bankwide Review dan COF) 3. Market share BUS dan Komposisi Pembiayaan Konsumsi Syariah BUS & UUS 4. Liquidity Upadate 5. Pricing Recommendation
9.	19 Sep 19 *Sep 19, 2019*	1. Materi LKRI 2. Leading Issues : - Sosialisasi Fund Transfer Pricing - Valas Perbankan 3. Liquidity Update : Cash Flow IDR dan USD

Rapat Ke *Time of Meeting*	Tanggal *Date*	Agenda Rapat *Meetings Agenda*
10.	17 Okt 19 *Oct 17, 2019*	1. ATMR and KPPM Ratio 2. DPK and Liquid Asset Trends 3. Liquidity Stress Testing 4. Update liquidity conditions - LKRI 5. ALM Performance (Bankwide Review dan COF) 6. Leading Issues: a. NIM, b. COF, c. CASA 7. Liquidity Update : Cash Flow (IDR & USD), dan Pipeline Funding & Financing
11.	19 Nov 19 *Nov 19, 2019*	1. ATMR and KPPM Ratio 2. DPK and Liquid Asset Trends 2. Liquidity Stress Testing 3. Update liquidity conditions - LKRI 4. Hajj Fund Managed Data 5. ALM Performance (Bankwide Review dan COF) 6. Liquidity Update : Cash Flow (IDR & USD), dan Pipeline Funding & Financing
12.	19 Des 19 *Dec 19, 2019*	1. ATMR and KPPM Ratio 2. Funding and RIM Trends 3. Liquidity Key Risk Indicators 4. Cash Flow IDR dan USD 5. Liquidity Projection 6. GWM Projection 7. Pipeline Unit Bisnis 8. Borowing Capacity 9. Pipeline Unit Bisnis 10. Funding & Financing Structure 11. Cost of Fund 12. Calculation of Profit Sharing Ratio

Komite Manajemen Risiko

Dasar Hukum

Pembentukan Komite Manajemen Risiko didasarkan pada peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 65/POJK.03/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum.
3. Kebijakan Umum Manajemen Risiko PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.
4. Piagam Komite Manajemen Risiko PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.

Piagam Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko Bank Muamalat Indonesia telah memiliki Piagam yang mengatur mengenai struktur dan keanggotaan, kewenangan dan tanggung jawab, rapat komite, sekretariat, kuorum dan keputusan komite, dan yang lainnya. Piagam Komite Manajemen Risiko terakhir dikinikan pada tanggal 25 Mei 2018 dan akan diperbaharui sesuai dengan perkembangan regulasi yang berlaku serta kondisi terkini dari Bank.

Struktur Keanggotaan

1. Keanggotaan Komite Manajemen Risiko terdiri dari:
   a. Mayoritas Direksi salah satunya adalah Direktur yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko.

Risk Management Committee

Legal Basis

The establishment of a Risk Management Committee is based on regulations as follows:

1. *Financial Services Authority Regulation No. 65/POJK.03/2016 December 23, 2016 concerning the Implementation of Risk Management For Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units.*
2. *Financial Services Authority Regulation No. 42/POJK.03/2017 concerning Obligations for the Compilation and Implementation of Policies Credit or Bank Financing for Commercial Banks*
3. *General Risk Management Policy of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.*
4. *Risk Management Committee Charter of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.*

Charter of the Risk Management Committee

Bank Muamalat Indonesia's Risk Management Committee already has charter governing structure and membership, authority and responsibility, committee meetings, secretariat, quorum and committee decisions, and others. Management Committee CharterThe last risk was updated on May 25, 2018, and will be updated in accordance with the development of applicable regulations as well as the current conditions of the Bank.

Membership Structure

1. *The Risk Management Committee membership consists of:*
   a. *The majority of Directors is one of the Directors who oversees the Risk Management function.*

b. Pejabat Eksekutif yang memimpin antara lain unit kerja operasional dan unit kerja manajemen risiko.
c. Pimpinan unit Internal Audit.

2. Komite Manajemen Risiko dipimpin oleh Ketua merangkap anggota tetap, Wakil Ketua merangkap Anggota Tetap, dan Sekretaris merangkap Anggota Tetap.

3. Anggota Komite Manajemen Risiko dibagi menjadi:
   a. Anggota tetap dengan hak suara;
   b. Anggota tetap tanpa hak suara; dan
   c. Anggota tidak tetap tanpa hak suara.

b. Executive Officers who lead include operational work units and risk management work units.
c. Head of Internal Audit unit.

2. The Risk Management Committee is chaired by the Chairperson concurrently a permanent member, the Deputy Chairperson concurrently a Permanent Member, and the Secretary concurrently a Permanent Member.

3. Members of the Risk Management Committee are divided into:
   a. Permanent members with voting rights;
   b. Permanent members without voting rights; and
   c. Non-permanent members without voting rights.

Susunan Komite Manajemen Risiko *Risk Management Committee Structure*	
Ketua/anggota tetap dengan hak suara *Chair/permanent member with voting rights*	President Director
Wakil Ketua/anggota tetap dengan hak suara *Deputy Chair/permanent member with voting rights*	Risk Director
Anggota Tetap dengan Hak Suara *Permanent Members with Voting Rights*	1. Compliance Director 2. Finance Director 3. Chief Corporate Banking Officer 4. Retail Banking Director 5. Operation Director 6. Chief Human Capital Officer
Sekretaris 1/Anggota Tetap tanpa Hak Suara *Secretary 1/Permanent Member without Voting Rights*	Head of Enterprise Risk Management
Sekretaris 2/Anggota Tetap tanpa Hak Suara *Secretary 2/Permanent Member without Voting Rights*	Head of Operational Risk Managemnt
Anggota Tetap tanpa Hak Suara *Permanent Members without Voting Rights*	1. Head of Internal Audit 2. Head of Compliance

Tugas dan Tanggung Jawab

Tanggung jawab Komite Manajemen Risiko sesuai dengan piagam Komite Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

1. melakukan kajian atas eksposur risiko Bank secara keseluruhan dan memastikan bahwa eksposur risiko dikelola dengan baik.
2. memberikan arahan dan rekomendasi antara lain:
   a. budaya manajemen risiko pada seluruh level organisasi bank.
   b. kebijakan, strategi dan prosedur penerapan manajemen risiko.
   c. perbaikan atau penyempurnaan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan manajemen risiko.
   d. penetapan (justification) hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang tidak sesuai dengan prosedur normal (irregularities).
3. memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama dan seluruh jajaran Direksi terkait dengan hal-hal yang diajukan kepada Komite Manajemen Risiko.
4. menyampaikan laporan tertulis secara berkala kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris, antara lain:
   a. hasil pengawasan atas penerapan dan pelaksanaan Kebijakan Pembiayaan Bank Muamalat Indonesia.

Duties and Responsibilities

The responsibilities of the Risk Management Committee are in accordance with the charter The Risk Management Committee is as follows:

1. review the Bank's overall risk exposure and ensure that risk exposures are managed properly.
2. provide direction and recommendations, among others:
   a. risk management culture at all levels of the bank organization.
   b. management implementation policies, strategies and procedures risk.
   c. improvement or refinement of the implementation of management risk based on the results of evaluating the implementation of management risk.
   d. justification of matters related to business decisions that are not in accordance with normal procedures (irregularities).
3. provide recommendations to the President Director and all Board of Directors related to matters submitted to Risk Management Committee.
4. submit periodic written reports to the Directors with a copy to the Board of Commissioners, including:
   a. the results of supervision of the application and implementation of the Policy Bank Muamalat Indonesia Funding.

b. hasil pemantauan dan evaluasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Komite.

5. memberikan saran dan langkah perbaikan kepada Direksi terkait dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.
6. dalam hal terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan Kebijakan Pembiayaan Bank Muamalat Indonesia terkait dengan pemenuhan prinsip syariah maka laporan disampaikan pula kepada Dewan Pengawas Syariah.

Kewenangan Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko berwenang untuk:

1. Melaksanakan rapat berkala Komite Manajemen Risiko, termasuk menetapkan agenda pembahasan rapat dan peserta rapat khusus yang perlu menghadiri rapat dimaksud.
2. Mengawasi pelaksanaan kebijakan dan prosedur Bank Muamalat Indonesia serta melakukan kajian berkala dan memberikan masukan perbaikan apabila diperlukan.
3. Memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama dan seluruh jajaran Direksi terkait kerangka kerja, metodologi dan sistem pengelolaan risiko termasuk rencana Kontinjensi serta memastikan efektivitas penerapannya.
4. Melaksanakan kewenangan Komite Kebijakan yaitu:
   a. Memberikan masukan kepada Direksi dalam rangka penyusunan kebijakan terutama yang berkaitan dengan perumusan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan dan kegiatan Bank lainnya.
   b. Mengawasi agar Kebijakan dapat diterapkan dan dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten serta merumuskan pemecahan apabila terdapat hambatan/ kendala dalam penerapan Kebijakan.
   c. Melakukan kajian berkala terhadap Kebijakan dan memberikan saran kepada Direksi apabila diperlukan perubahan/perbaikan Kebijakan.
   d. Memantau dan mengevaluasi antara lain:
      i. Perkembangan kualitas portofolio pembiayaan secara keseluruhan dan operasional Bank Muamalat Indonesia.
      ii. Pelaksanaan kewenangan memutus pembiayaan dan operasional Bank Muamalat Indonesia.
      iii. Proses pembiayaan, perkembangan dan kualitas pembiayaan yang diberikan kepada pihak terkait Bank Muamalat Indonesia dan debitur besar tertentu.
      iv. Pelaksanaan ketentuan Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (BMPP).
      v. Ketaatan terhadap ketentuan perundangan yang berlaku terkait pembiayaan dan operasional Bank Muamalat Indonesia.
      vi. Penyelesaian pembiayaan bermasalah sesuai Kebijakan Pembiayaan Bank Muamalat Indonesia.
      vii. Upaya dalam memenuhi kecukupan jumlah penyisihan penghapusan pembiayaan yang dibentuk Bank Muamalat Indonesia.

b. monitoring and evaluation results in accordance with the tasks and Committee responsibilities.

5. provide suggestions and corrective steps to the relevant Directors with a copy to the Board of Commissioners.
6. in the event of any deviation in the implementation of the Policy Bank Muamalat Indonesia's financing is related to compliance Sharia principles, the report is also submitted to the Sharia Supervisory Board.

Authority of the Risk Management Committee

The Risk Management Committee is authorized to:

1. Carry out regular Risk Management Committee meetings, including set the agenda for the discussion of meetings and special meeting participants who need to attend the meeting.
2. Oversee the implementation of Muamalat Bank policies and procedures Indonesia as well as conducting periodic studies and giving input improvements if needed.
3. Provide recommendations to the President Director and all Board of Directors related to the framework, methodology and system risk management including contingency plans and ensuring effectiveness of its application.
4. Carry out the authority of the Policy Committee, namely:
   a. Provide input to the Directors in the framework of the preparation policies especially related to the formulation of principles caution in financing and other Bank activities.
   b. Oversee that the Policy can be implemented and implemented consistently and consistently as well as formulating a solution if there are obstacles/obstacles in the application Policy.
   c. Conduct periodic reviews of the Policy and provide advice to the Board of Directors if changes/improvements are needed Policy.
   d. Monitor and evaluate, among others:
      i. Development of the quality of the financing portfolio overall and operational of Muamalat Indonesia Bank.
      ii. The exercise of authority decides on financing and Bank Muamalat Indonesia operations.
      iii. The financing process, development and quality financing provided to related parties of the Bank Muamalat Indonesia and certain large debtors.
      iv. Implementation of the provisions for the Maximum Provision of Financing.
      v. Compliance with applicable laws and regulations relating to the financing and operations of Bank Muamalat Indonesia.
      vi. Settlement of problem financing in accordance with Bank Muamalat Indonesia's Financing Policy.
      vii. Efforts to meet the adequacy of the allowance for possible losses on financing established by Bank Muamalat Indonesia.

Sekretariat Komite Manajemen Risiko

1. Komite Manajemen Risiko dilengkapi Sekretaris, yang ditunjuk dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi.
2. Sekretaris Komite Manajemen Risiko bertanggung jawab antara lain:
   a. Menyelenggarakan rapat Komite Manajemen Risiko sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya atau berdasarkan *calendar of events* Bank Muamalat Indonesia, termasuk menyiapkan daftar hadir peserta rapat Komite Manajemen Risiko.
   b. Menyampaikan materi rapat Komite Manajemen Risiko kepada peserta rapat yang diundang selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum rapat diselenggarakan.
   c. Mengundang peserta rapat Komite Manajemen Risiko termasuk melakukan koordinasi untuk persiapan materi yang akan dibahas dalam rapat Komite Manajemen Risiko.
   d. Menyiapkan risalah rapat Komite Manajemen Risiko selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah rapat diselenggarakan untuk ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua Manajemen Risiko.
   e. Mengirimkan risalah rapat kepada seluruh anggota tetap Komite Manajemen Risiko dan seluruh peserta yang hadir berdasarkan kepentingannya untuk ditindaklanjuti.
   f. Melaporkan penyelenggaraan rapat Komite Manajemen Risiko kepada Direksi dan/atau untuk kepentingan lainnya.
   g. Memantau tindak lanjut atas hasil rapat Komite Manajemen Risiko.

Rapat

Pelaksanaan rapat Komite Manajemen Risiko diatur sebagai berikut:

1. Rapat Komite Manajemen Risiko dapat diselenggarakan dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila:
   a. Dihadiri oleh lebih dari setengah (1/2 n + 1) dari anggota tetap dan memiliki hak suara. Anggota tetap dan memiliki hak suara yang berhalangan hadir dapat mewakilkan suaranya kepada anggota tetap dan memiliki hak suaranya lainnya, dan disampaikan kepada Sekretaris Komite Manajemen Risiko minimal 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat Komite Manajemen Risiko.
   b. Anggota tetap Komite Manajemen Risiko dan memiliki hak suara hanya dapat mewakili 1 (satu) suara anggota tetap dan memiliki hak suara lainnya, yang berhalangan hadir; dan
   c. Dihadiri oleh Ketua atau Wakil Ketua Komite Manajemen Risiko atau alternate Direktur yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko.
2. Komite Manajemen Risiko dapat mengambil keputusan atas kebijakan, metodologi, limit dan strategi terkait dengan manajemen risiko. Keputusan yang diambil oleh Komite Manajemen Risiko atas hal-hal tersebut diatas menjadi rekomendasi yang perlu memperoleh keputusan lebih lanjut dari Direksi.

Secretariat of the Risk Management Committee

1. *The Risk Management Committee is equipped with a Secretary, who is appointed and determined by Decree of the Board of Directors.*
2. *The Secretary of the Risk Management Committee is responsible between other:*
   a. *Hold a Risk Management Committee meeting accordingly with a predetermined schedule or based on the calendar of events of Bank Muamalat Indonesia, including preparing a list of attendees at Committee meetings Risk management.*
   b. *Delivered the Risk Management Committee meeting material to meeting participants invited no later than 1 (one) working day before the meeting is held.*
   c. *Invite participants to the Risk Management Committee meeting including coordinating the preparation of material will be discussed at the Risk Management Committee meeting.*
   d. *Prepare minutes of meeting of the Risk Management Committee not later than 5 (five) working days after a meeting is held to be signed by the Chairperson or Deputy Chair of Risk Management.*
   e. *Send minutes of meeting to all permanent members Risk Management Committee and all participants present based on their importance to be followed up on.*
   f. *Report the organization of Management Committee meetings Risks to the Directors and/or for other interests.*
   g. *Monitor the follow up of the results of the Management Committee meeting Risk.*

Meeting

The Risk Management Committee meeting is arranged as follows:

1. *A Risk Management Committee Meeting may be held and entitled to make binding decisions if:*
   a. *Attended by more than half (1/2 n + 1) of permanent members and voting rights. Permanent members and voting rights who are unable to attend can represent their votes to permanent members and have other voting rights, and submit it to the Secretary of the Risk Management Committee at least 1 (one) day before the Risk Management Committee meeting.*
   b. *Permanent members of the Risk Management Committee and have voting rights can only represent 1 (one) permanent member votes and have other voting rights, who are unable to attend; and*
   c. *Attended by the Chairperson or Deputy Chairperson of the Risk Management Committee or alternate Director who oversees the Risk Management function.*
2. *The Risk Management Committee can make decisions on policies, methodologies, limits and strategies related to risk management. Decisions taken by the Risk Management Committee regarding the above matters become recommendations that need to obtain further decisions from the Board of Directors.*

3. Apabila dalam pembahasan rapat Komite Manajemen Risiko diperlukan pengambilan keputusan sesuai butir 2 di atas, maka keputusan diambil berdasarkan mufakat. Apabila tidak terjadi mufakat, maka keputusan dianggap sah apabila disetujui oleh lebih dari setengah (1/2 n + 1) anggota tetap Komite Manajemen Risiko dan memiliki hak suara, yang hadir dan/atau diwakili dalam rapat tersebut dan disetujui oleh Ketua Komite atau Wakil Ketua Komite.

3. If during the discussion of the Risk Management Committee meeting a decision is made in accordance with item 2 above, then the decision is made based on consensus. If consensus does not occur, then the decision is considered valid if approved by more than half (1/2 n + 1) permanent members of the Risk Management Committee and has voting rights, present and/or represented at the meeting and approved by the Chair of the Committee or Deputy Chair Committee.

Penyelenggaraan rapat Komite Manajemen Risiko sepanjang tahun 2019 adalah sebanyak 12 (dua belas) kali dengan rincian sebagai berikut:

The holding of Risk Management Committee meetings throughout 2019 is 12 (twelve) times with the following details:

Rapat ke *Time of Meeting*	Tanggal *Date*	Agenda Rapat *Meeting Agenda*
1.	29-Jan-19 *Jan 29, 2019*	Credit Risk Updates Operational Risk Updates
2.	25-Mar-19 *Mar 25, 2019*	Credit Risk Updates Retail Risk Updates Operational Risk Updates Liquidity Stress Test
3.	22-Mei-19 *May 22, 2019*	1. Operational Risk Updates a. Status Tindak Lanjut Rekomendasi RMC 25 Maret 2019 b. Key Risk Indicator (KRI) Highlight April 2019 c. Loss Event Updates d. Risk Appetite Statement (RAS) Updates e. Presentasi Terkait: • Hasil monitoring dokumen TBO/ER-Retail Banking Operation • Hasil monitoring dokumen TBO/ER-Corporate Banking Operation • Strategi Supervisi Unit Kerja Collection - Retail Collection *1. Operational Risk Updates* *a. Status of Follow-Up Recommendations to the RMC March 25, 2019* *b. Key Risk Indicator (KRI) Highlights April 2019* *c. Loss Event Updates* *d. Risk Appetite Statement (RAS) Updates* *e. Related Presentation:* • *Results of monitoring of TBO/ER-Retail Banking Operation documents* • *Results of monitoring of TBO/ER-Corporate Banking Operation documents* • *Collection Unit Supervision Strategy - Retail Collection*
4.	27-Mei-19 *May 27, 2019*	1. Credit Risk Updates 2. Risk Acceptance Criteria (RAC) Multifinance

Rapat ke *Time of Meeting*	Tanggal *Date*	Agenda Rapat *Meeting Agenda*
5.	27-Jun-19 *Jun 27, 2019*	1. Operational Risk Updates a. Status Tindak Lanjut Rekomendasi RMC 22 Mei 2019 b. Key Risk Indicator (KRI) Highlight Mei 2019 c. Loss Event Updates d. Risk Appetite Statement (RAS) Updates e. Dormant Account Strategy - Retail Banking Product f. TBO/ER Document Monitoring Update - Retail Banking Operation g. TBO/ER Document Monitoring Update - Corporate Banking Operation *1. Operational Risk Updates* *a. Status of Follow-Up on RMC Recommendations on May 22, 2019.* *b. Key Risk Indicator (KRI) Highlight in May 2019* *c. Loss Event Updates* *d. Risk Appetite Statement (RAS) Updates* *e. Dormant Account Strategy - Retail Banking Product* *f. TBO/ER Document Monitoring Update - Retail Banking Operation* *g. TBO/ER Document Monitoring Update - Corporate Banking Operation*
6.	25-Jul-19 *Jul 25, 2019*	1. Operational Risk Updates a. Status Tindak Lanjut Rekomendasi RMC 27 Juni 2019 b. Key Risk Indicator (KRI) Updates c. Nasabah Dormant d. TBO/ER Monitoring e. Annual Review Monitoring f. Loss Event Reported g. Risk Appetite Statement (RAS) Update *1. Operational Risk Updates* *a. Status of Follow Up on RMC Recommendation 27 June 2019* *b. Key Risk Indicator (KRI) Updates* *c. Dormant Customers* *d. TBO / ER Monitoring* *e. Annual Review Monitoring* *f. Loss Event Reported* *g. Risk Appetite Statement (RAS) Update*
7.	29-Jul-19 *Jul 29, 2019*	1. Kebijakan Umum Pembiayaan (KUP) 2. Risk Based Bank Rating (RBBR) 3. Credit Risk Updates 4. Watchlist segmen Corporate dan Commercial *1. General Financing Policy (KUP)* *2. Risk Based Bank Rating (RBBR)* *3. Credit Risk Updates* *4. Corporate and Commercial segment watchlist*
8.	28-Agu-19 *Aug 28, 2019*	1. Operational Risk Updates a. Operational Risk Management Framework - revision 2019 b. Status Tindak Lanjut Rekomendasi RMC 25 Juli 2019 c. Key Risk Indicator Monitoring • TBO/ER Document Update - Financing Operation • Financing Collateral Update - Financing Operation • DRC Testing 2019 Update - ITY d. Loss Event Reported: • Operational Risk Loss Recovery Update • Risk Appetite Statement (RAS) Update *1. Operational Risk Updates* *a. Operational Risk Management Framework - revision 2019* *b. Status of Follow Up on RMC Recommendation July 25, 2019* *c. Key Risk Indicator Monitoring:* • *TBO/ER Document Update - Financing Operation* • *Financing Collateral Update - Financing Operation* • *DRC Testing 2019 Update - ITY* *d. Loss Event Reported:* • *Operational Risk Loss Recovery Update* • *Risk Appetite Statement (RAS) Update*

Rapat ke *Time of Meeting*	Tanggal *Date*	Agenda Rapat *Meeting Agenda*
9.	18-Sep-19 *Sep 18, 2019*	1. Credit Risk Updates 2. Retail Risk Updates
10.	26-Sep-19 *Sep 26, 2019*	1. Operational Risk Updates a. Update Tindak Lanjut Rekomendasi RMC 28 Agustus 2019 • Update Kejadian Internal Fraud Cabang Muamalat Tower • Review Proses Pembukaan Rekening di Luar Kantor b. Key Risk Indicator: • TBO Monitoring Update c. Loss Event Reported: • Highlighted Event • Risk Appetite Statement Update • Ops Loss Recovery Update *1. Operational Risk Updates* *a. Follow-Up Update on RMC Recommendation 28 August 2019* *• Update on Internal Events of the Muamalat Tower Branch Fraud* *• Review of Account Opening Process Outside the Office* *b. Key Risk Indicator:* *• TBO Monitoring Update* *c. Loss Event Reported:* *• Highlighted Event* *• Risk Appetite Statement Update* *• Ops Loss Recovery Update*
11.	25-Nov-19 *Nov 25, 2019*	1. Retail Portfolio Performance Review 2. Credit Risk Updates
12.	28-Nov-19 *Nov 28, 2019*	1. Operational Risk Updates a. Update Tindak Lanjut Rekomendasi ORC Periode Sebelumnya b. Key Risk Indicator: • Monitoring TBO/ER c. Loss Event Reported: • Risk Appetite Statement Update • Ops Loss Recovery Update *1. Operational Risk Updates* *a. Update on Follow Up to ORC Recommendations in the Previous Period* *b. Key Risk Indicator:* *• Monitoring TBO/ER* *c. Loss Event Reported:* *• Risk Appetite Statement Update* *• Ops Loss Recovery Update*

Keputusan di Luar Rapat Komite Manajemen Risiko

1. Pengambilan keputusan oleh Komite Manajemen Risiko dapat dilakukan secara sirkuler kepada seluruh anggota tetap Komite Manajemen Risiko dan memiliki hak suara, berdasarkan persetujuan terlebih dahulu dari Ketua Komite Manajemen Risiko.
2. Keputusan Komite Manajemen Risiko yang dilakukan secara sirkular mengikat semua anggota atau unit kerja di Bank Muamalat Indonesia terkait dengan risiko.

Decisions Outside the Meeting of Risk Management Committee

1. *Decision making by the Risk Management Committee can be made circularly to all permanent members of the Risk Management Committee and has voting rights, based on prior approval from the Chair of the Risk Management Committee.*
2. *The Risk Management Committee's decision which is made circularly binds all members or work units in Bank Muamalat Indonesia related to risk.*

3. Keputusan di luar rapat Komite Manajemen Risiko berlaku apabila telah disetujui oleh seluruh anggota tetap Komite dan memiliki hak suara, secara bulat atas usulan yang diajukan.

Tindak Lanjut Keputusan Komite Manajemen Risiko

1. Apabila Komite Manajemen Risiko memberikan masukan dan rekomendasi yang perlu memperoleh keputusan lebih lanjut dari Direksi, maka masukan dan rekomendasi Komite Manajemen Risiko harus ditindaklanjuti dengan memo usulan yang ditujukan kepada Direksi untuk memperoleh keputusan lebih lanjut. Memo usulan disusun oleh unit kerja yang menyampaikan usulan tersebut dalam rapat Komite Manajemen Risiko.
2. Apabila terdapat Unit Kerja yang melakukan presentasi dalam Rapat Komite Manajemen Risiko, maka rapat wajib dihadiri oleh Kepala Unit Kerja Level 1 (L1) atau pejabat yang setingkat.
3. Apabila diperlukan, keputusan Komite Manajemen Risiko dapat pula ditindaklanjuti dengan penerbitan memorandum atau ketentuan oleh unit kerja yang bertanggung jawab.
4. Sekretaris Komite Manajamen Risiko bertanggung jawab memantau pelaksanaan tindak lanjut dari keputusan Komite Manajemen Risiko.

Komite Sumber Daya Manusia

Perusahaan membentuk Komite Sumber Daya Manusia guna membantu Direksi dan Senior Management dalam memenuhi tanggung jawab supervisory terkait pengembangan organisasi, manajemen suksesi, dan implementasi kebijakan-kebijakan sumber daya manusia. Komite ini dibentuk pada tingkatan/level korporasi, Direktorat, kantor wilayah atau region dan pada unit kerja yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan jaringan kantor dan distribusi. Komite ini diharapkan dapat melakukan mitigasi risiko atas pengelolaan dan penyelesaian setiap masalah ketenagakerjaan.

Dasar Hukum

1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
2. Piagam Komite Sumber Daya Manusia.

Struktur Keanggotaan

Struktur dan keanggotaan Komite Sumber Daya Manusia ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi Nomor No. 023/R/ DIR-KPTS/VI/2017 tanggal 6 Juni 2017 tentang Pembentukan Komite Sumber Daya Manusia PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, dengan keanggotaan sebagai berikut:

3. *Decisions outside the Risk Management Committee meeting apply if it has been approved by all permanent members of the Committee and has voting rights, unanimously for the proposal submitted.*

Decisions Follow-up of Risk Management Committee

1. *If the Risk Management Committee provides input and recommendations that need to obtain further decisions from the Board of Directors, the Risk Management Committee's input and recommendations must be followed up with a memo of proposals addressed to the Board of Directors to obtain further decisions. The proposal memo is prepared by the work unit that submits the proposal in the Risk Management Committee meeting.*
2. *If there is a Work Unit that makes a presentation at the Risk Management Committee Meeting, then the meeting must be attended by the Head of Work Unit Level 1 (L1) or an official of the same level.*
3. *If necessary, the decision of the Risk Management Committee can also be followed up with the issuance of memoranda or provisions by the responsible work unit.*
4. *The Secretary of the Risk Management Committee is responsible for monitoring the implementation of the follow-up of the Risk Management Committee's decision.*

Human Resources Committee

The Company established a Human Resources Committee to assist the Directors and Senior Management in fulfilling supervisory responsibilities related to organizational development, succession management, and implementation of human resource policies. This committee is formed at the corporate level, Directorate, regional office or region and in the work units responsible for managing office and distribution networks. This committee is expected to be able to mitigate risks in the management and resolution of all labor issues.

Legal Basis

1. *Bank Indonesia Regulation Number 11/33/PBI/2009 dated on December 7, 2009, concerning Implementation of Good Corporate Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units.*
2. *Human Resources Committee Charter.*

Membership Structure

The structure and membership of the Human Resources Committee is determined by Decree of the Board of Directors Number No. 023/R/ DIR-KPTS/VI/2017 dated June 6, 2017 concerning the Establishment of the Human Resources Committee of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, with membership as follows:

Susunan Komite Sumber Daya Manusia Level Korporasi *Composition of Corporate Level Human Resources Committee*	
Ketua merangkap anggota *The Chairman and the members*	Direktur Utama / *President Director*
Sekretaris merangkap anggota *Secretary and member*	Head of HC Strategy
Anggota / *Member*	Direktur Kepatuhan / *Compliance Director* Direktur Keuangan / *Finance Director* Direktur Operasi / *Operation Director* Direktur Perbankan Ritel / *Retail Banking Director* Chief Corporate Banking Officer Chief Human Capital Officer Direktur Risiko / *Risk Director*

Tugas dan Tanggung Jawab

Duties and Responbility

Komite Sumber Daya Manusia Level Korporasi:
Human Reourcess Committee Corporate Level

1. Memberikan arahan atas strategi dan kebijakan dalam bidang sumber daya manusia.
2. Menyetujui pelaksanaan program remunerasi sumber daya manusia.
3. Menyetujui proposal penempatan sumber daya manusia untuk posisi-posisi atau jabatan pada unit business, region dan functional head sesuai hirarki yang berlaku.
4. Menyetujui promosi karyawan ke level Senior Management Team dan/atau yang lebih tinggi.
5. Menyetujui usulan khusus di bidang sumber daya manusia yang melebihi kewenangan Head of dan/atau kewenangan Direktur yang membidangi sumber daya manusia.

1. *Provide direction on strategies and policies in the field of human resources.*
2. *Approve the implementation of a remuneration program for human resources.*
3. *Approve proposals for placement of human resources for positions or positions in business units, regions and functional heads according to the applicable hierarchy.*
4. *Approve the promotion of employees to the Senior Management Team and / or higher levels.*
5. *Approve specific proposals in the field of human resources that exceed the authority of the Head of and/or the authority of the Director in charge of human resources.*

Rapat

Dalam menjalankan tugas, tanggung jawab dan kewenangannya, Komite Sumber Daya Manusia pada setiap level akan mengadakan rapat secara berkala dan mengambil keputusan dengan pengaturan sebagai berikut:

Ketentuan Rapat Komite Komite Sumber Daya Manusia adalah sebagai berikut:

1. Rapat Komite dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan atau sewaktu waktu sesuai dengan kebutuhan.
2. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite, dalam hal Ketua Komite berhalangan hadir, maka rapat dipimpin oleh salah satu Anggota Komite.
3. Rapat memenuhi kuorum dan dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya separuh lebih Anggota Komite (50% + 1) yang memiliki hak suara.
4. Rapat dapat dilakukan baik secara face to face dan/atau melalui *video call/conference call*.
5. Ketua dapat mengadakan rapat apabila ada permasalahan mendesak yang harus didiskusikan dan diputuskan oleh Komite.

Meeting

In doing the duties, responsibilities, and authorities, the Human Resources Committee at each level will hold regular meetings and make decisions with the following arrangements:

The provisions for the Human Resources Committee Meeting are as follows:

1. *Committee meetings are held at least once a month or at any time as needed.*
2. *The meeting is chaired by the Chairperson of the Committee, if the Chairperson of the Committee is unable to attend, the meeting is chaired by one of the Committee Members.*
3. *Meetings meet the quorum and are considered valid if attended by at least half more Committee Members (50% + 1) who have voting rights.*
4. *Meetings can be held either face to face and/or via video calls/ conference calls.*
5. *The Chairperson may hold a meeting if there are urgent issues that must be discussed and decided by the Committee.*

6. Komite berwenang mengundang Pimpinan Unit Kerja terk ait sebagai terundang yang diperlukan untuk memberikan informasi dan klarifikasi yang diperlukan sehubungan dengan agenda yang dibicarakan di dalam Rapat Komite.

Selama tahun 2019 Komite SDM telah menyelenggarakan rapat sebanyak 10 (sepuluh) kali rapat.

Pengambilan Keputusan

Pengambilan Keputusan Rapat Komite Komite Sumber Daya Manusia adalah sebagai berikut:

1. Keputusan Komite Sumber Daya Manusia harus diupayakan dicapai melalui musyawarah untuk mufakat dan tanpa melalui voting. 2.
2. Pengambilan keputusan dianggap memenuhi kuorum dan sah jika dihadiri oleh Ketua Komite dan minimal separuh lebih Anggota Komite (50% + 1).
3. Keputusan atas penyelesaian masalah dapat disirkulasikan menggunakan Memorandum sebagai pendukung oleh Anggota Komite apabila tidak terdapat kebutuhan untuk diselesaikan dalam rapat.
4. Pimpinan unit kerja yang diundang khusus dalam Rapat Komite berperan sebagai nara sumber dan diperkenankan memberikan usulan atau rekomendasi, namun tidak memiliki hak suara dalam proses pengambilan keputusan.
5. Pembahasan yang tidak dapat diputuskan oleh Komite pada suatu level dapat diajukan oleh Ketua Komite untuk dibahas dan diputuskan dalam Rapat Komite pada level komite yang lebih tinggi.
6. Hasil dan keputusan dalam setiap Rapat Komite wajib disampaikan kepada Sekretaris Komite pada level Komite yang lebih tinggi dan kepada Head of HC Strategy.

6. *The Committee is authorised to invite the Head of the relevant Work Unit as invited to provide the information and clarification needed in connection with the agenda discussed at the Committee Meeting.*

During 2019 the HR Committee held 10 (ten) meetings.

Decision-Making

The provisions for the Human Resources Committee Meeting are as follows:

1. *Committee meetings are held at least once a month or at any time as needed*
2. *The meeting is chaired by the Chairperson of the Committee, if the Chairperson of the Committee is unable to attend, the meeting is chaired by one of the Committee Members.*
3. *Meetings meet the quorum and are considered valid if attended by at least half more Committee Members (50% + 1) who have voting rights.*
4. *The head of the work unit specifically invited to the Committee Meeting acts as a resource person and is allowed to provide suggestions or recommendations, but does not have voting rights in the decision making process.*
5. *The Chairperson may hold a meeting if there are urgent issues that must be discussed and decided by the Committee.*

6. *The Committee is authorised to invite the Head of the relevant Work Unit as invited to provide the information and clarification needed in connection with the agenda discussed at the Committee Meeting.*

Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary

Sebagai Perusahaan Terbuka, Bank Muamalat wajib memiliki Sekretaris Perusahaan yang berfungsi sebagai penghubung antara Perseroan dengan Pemegang Saham serta Pemangku Kepentingan lainnya, serta memastikan kepatuhan Perseroan terhadap peraturan dan perundang-undangan, khususnya di bidang pasar modal.

As a Public Company, Bank Muamalat is required to have a Corporate Secretary who functions as a liaison between the Company and Shareholders and other Stakeholders, and ensures the Company's compliance with regulations and laws, particularly in the capital market.

Dasar Hukum

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
2. Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/01-2014 Perihal Perubahan Peraturan Nomor I-A: Tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat.

Legal Basis

1. *Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 35/POJK.04/2014 concerning Corporate Secretary of Issuers or Public Companies.*
2. *Decree of the Board of Directors of PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/01-2014 Regarding Amendment to Rule Number I-A: Regarding Listing of Shares and Equity-Type Securities Other Than Shares Issued by Listed Companies.*

Profil Pejabat Sekretaris Perusahaan

Profile of Corporate Secretary



Hayunaji

Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary

Sekretaris Perusahaan saat ini dijabat oleh Hayunaji sesuai dengan Surat Keputusan No. 010/HCE/KEP/XII/2018 dan efektif sejak tanggal 14 Desember 2018. Sekretaris Perusahaan berdomisili di Jakarta.

Warga negara Indonesia, lahir di Jakarta pada 9 Desember 1971. Sebelum bergabung di Bank Muamalat Indonesia pernah menjabat sebagai Vice President, Board Office Head dan CEO Office Head PT Bank CIMB Niaga Tbk (2015-2018), Vice President, Strategy dan Performance Management Head (2014-2015), Senior Manager PT Bank Permata Tbk (2002-2006), Senior Assistant Manager PT Bank Universal Tbk (1999-2002), Assistant Manager PT Bank Duta Tbk (1998-1999). Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia, Jakarta.

The Company Secretary is currently held by Hayunaji in accordance with Decree No. 010/HCE/KEP/XII/2018 and effective since December 14, 2018. The Corporate Secretary is domiciled in Jakarta.

Indonesian citizen, born in Jakarta on December 9, 1971. Before joining Bank Muamalat Indonesia, he served as Vice President, Board Office Head and CEO of PT Bank CIMB Niaga Tbk (2015-2018) Office, Vice President, Strategy and Performance Management Head (2014-2015), Senior Manager of PT Bank Permata Tbk (2002-2006), Senior Assistant Manager of PT Bank Universal Tbk (1999-2002), Assistant Manager of PT Bank Duta Tbk (1998-1999). Obtained a Bachelor of Economics degree from the University of Indonesia, Jakarta.

Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan Emiten Atau Perusahaan Publik adalah:

1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web Emiten atau Perusahaan Publik, penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu, penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham, penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris, dan pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/ atau Dewan Komisaris.
4. Sebagai penghubung antara Emiten atau Perusahaan Publik dengan pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.
5. Menjalankan fungsi menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi rahasia kecuali dalam rangka memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

Uraian tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan Bank Muamalat Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Mewakili Direksi dalam hubungannya dengan lembaga/ institusi baik pemerintah maupun swasta.
2. Bersama dengan Divisi Kepatuhan memantau kepatuhan Bank Muamalat Indonesia terhadap ketentuan dan peraturan tentang perbankan.
3. Mendukung penerapan dan pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) di Bank Muamalat Indonesia.
4. Membuat daftar pemegang saham termasuk kepemilikan saham 5% atau lebih.
5. Memonitor berbagai kegiatan kesekretariatan korporasi dan protokoler, korespondensi dan kerumahtanggaan yang terkait dengan Direksi dan Dewan Komisaris.
6. Melaksanakan dan mengawasi peraturan-peraturan yang berkaitan dengan aksi korporasi, GCG, dan kepatuhan terhadap peraturan pasar modal.
7. Menyelenggarakan RUPS dan aksi korporasi.
8. Melakukan koordinasi dengan unit kerja internal terkait dan pihak eksternal dalam upaya melancarkan kegiatan korporasi dan meningkatkan efektivitas tata kerja yang terkait dengan kegiatan Direksi dan Dewan Komisaris.
9. Mengkoordinasikan/memonitor kegiatan yang berkaitan dengan penerimaan dan penyampaian informasi korporasi serta pelaksanaan rapat Direksi dan Dewan Komisaris.

Duties and Responsibilities

Duties and responsibilities of the Issuer rr Public Company Secretary are:

1. *Following the development of the Capital Market, especially the regulations that apply in the Capital Market.*
2. *Providing input to the Board of Directors and Board of Commissioners of an Issuer or Public Company to comply with the provisions of the legislation in the Capital Market.*
3. *Assisting the Board of Directors and Board of Commissioners in implementing corporate governance which includes disclosure of information to the public, including the availability of information on the website of the Issuer or Public Company, submitting reports to the Financial Services Authority on time, organizing and documenting the General Meeting of Shareholders, organizing and documenting meetings of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners, and the implementation of an orientation program towards the company for the Board of Directors and/or the Board of Commissioners.*
4. *As a liaison between the Issuer or Public Company and the shareholders of the Issuer or Public Company, the Financial Services Authority, and other stakeholders.*
5. *Performing the function of maintaining the confidentiality of documents, data and confidential information except in the context of fulfilling obligations in accordance with statutory regulations or otherwise stipulated in statutory regulations.*

The duties and responsibilities of the Corporate Secretary of Bank Muamalat Indonesia are as follows:

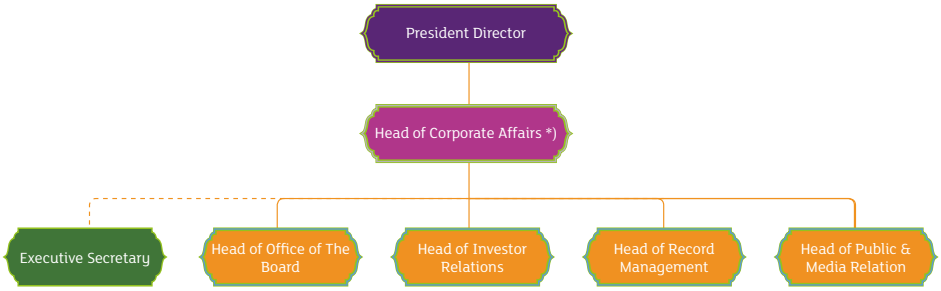
1. *Representing the Directors in relation to institutions both government and private.*
2. *Corporate Secretary, together with the Compliance Division, monitord Bank Muamalat Indonesia's compliance with banking rules and regulations.*
3. *Supporting the implementation and implementation of Good Corporate Governance (GCG) at Bank Muamalat Indonesia.*
4. *Making a list of shareholders including share ownership of 5% or more.*
5. *Monitoring various corporate and protocol secretarial activities, correspondence and housekeeping related to the Board of Directors and the Board of Commissioners.*
6. *Implementing and supervising regulations relating to corporate actions, GCG, and compliance with capital market regulations.*
7. *Organising GMS and corporate actions.*
8. *Coordinating with related internal work units and external parties in an effort to launch corporate activities and improve the effectiveness of work procedures related to the activities of the Directors and Board of Commissioners.*
9. *Coordinating/monitoring activities related to receiving and delivering corporate information and conducting meetings of the Directors and Board of Commissioners.*

10. Memberikan pelayanan kepada para pemangku kepentingan (stakeholders) atas setiap informasi yang dibutuhkan yang dibutuhkan yang berkaitan dengan kondisi Bank Muamalat Indonesia.
11. Sebagai penghubung atau *contact person* antara Bank Muamalat Indonesia dengan Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, otoritas pasar modal lainnya, dan masyarakat.
12. Melakukan aktivitas yang mendukung pelaksanaan prinsip keterbukaan terutama menyangkut kinerja Bank Muamalat Indonesia melalui komunikasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

10. *Providing services to the stakeholders (stakeholders) for any required information needed relating to the condition of Bank Muamalat Indonesia.*
11. *As a liaison or contact person amongst Bank Muamalat Indonesia and the Financial Services Authority, the Indonesia Stock Exchange, other capital market authorities, and the public.*
12. *Conducting activities that support the implementation of the principle of openness, especially concerning the performance of Bank Muamalat Indonesia through communication to interested parties.*

Struktur Organisasi Sekretaris Perusahaan

Organization Structure of Corporate Secretary



Note:
*) Also act as Corporate Secretary

Pelaksanaan Tugas Tahun 2019

Sepanjang tahun 2019, dengan dibantu unit kerja di bawahnya, Sekretaris Perusahaan telah melakukan beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan dan menghadiri pelaksanaan Rapat Direksi sebanyak 49 (empat puluh sembilan) kali dan Rapat gabungan antara Dewan Komisaris dan Direksi sebanyak 15 (lima belas) kali serta membuat risalah hasil Rapat Direksi dan Rapat Gabungan antara Dewan Komisaris serta Direksi.
2. Membantu Direksi dalam menyelenggarakan RUPS Bank yang telah diselenggarakan pada tanggal 17 Mei 2019 dan 16 Desember 2019 di Muamalat Tower, Jakarta.
3. Melakukan pelaporan-pelaporan yang menjadi kewajiban Bank sebagai perusahaan terbuka kepada regulator.
4. Melakukan kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/ *Corporate Social Responsibility* (CSR).
5. Berkoordinasi dengan Biro Administrasi Efek (BAE) dalam mengelola saham Bank Muamalat Indonesia.
6. Menyimpan dan mengelola Daftar Pemegang Saham termasuk kepemilikan saham 5% atau lebih.
7. Melakukan publikasi materi iklan korporasi selama tahun 2019.
8. Menerbitkan siaran pers kepada beberapa rekan media baik cetak maupun elektronik.
9. Melakukan self assesment pelaksanaan GCG Semester I dan II tahun 2019 terkait pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi.
10. Melakukan pengaturan protokoler untuk mendampingi dan memenuhi kebutuhan dari Direksi dan Dewan Komisaris.
11. Mengelola penyimpanan dokumen aktif dan inaktif Perusahaan.

Implementation of Tasks in 2019

During 2019, with the assistance of the work units under it, The Corporate Secretary has carried out several activities as following:

1. *Organizing and Attending the Board of Directors' meeting 49 (forty nine) times and joint meetings between the Board of Commissioners and the Board of Directors for 15 (fifteen) times and make minutes of the results of the Directors' and Joint Meetings between the Board of Commissioners and the Board of Directors.*
2. *Assist the Board of Directors in organizing the Bank's General Meeting of Shareholders has been held on May 17, 2019 and December 16 2019 in Muamalat Tower, Jakarta.*
3. *Performing reports that are the obligations of the Bank as a company open to regulators.*
4. *Conducting Corporate Social Responsibility/Corporate Social Responsibility (CSR).*
5. *Coordinate with the Securities Administration Bureau (BAE) in managing the shares of Bank Muamalat Indonesia.*
6. *Keep and manage the Register of Shareholders including share ownership of 5% or more.*
7. *Publish corporate advertising material during 2019.*
8. *Publish press releases to several print media partners and electronic.*
9. *Conduct self-assessment of the implementation of GCG Semester I and II of 2019 related to the implementation of duties and responsibilities Board of Commissioners and Directors.*
10. *Perform protocol settings to assist and meet the needs of the Directors and Board of Commissioners.*
11. *Manage the Company's active and inactive document storage.*

Pengembangan Kompetensi Sekretaris Perusahaan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugasnya, Sekretaris Perusahaan mengikuti berbagai program untuk pengembangan kompetensi. Program yang diikuti oleh Sekretaris Perusahaan selama tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Komunikasi Internal di Era 4.0 yang diselenggarakan oleh Badan Pengurus Pusat Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia pada 28 Februari 2019 di Jakarta.
2. Pengembangan Integrasi Sistem Pelaporan Elektronik (SPE) dan IDXNET: yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia pada 14 Mei 2019.
3. The Importance of Records Management: yang diselenggarkan oleh Crown Records Management pada 9 Agustus 2019 di Jakarta.
4. *Indonesian National Risk Asessment on Money Laundering & Terrorist Financing*: yang diselenggarakan oleh Ivan Yustiavandana selaku Direktur Pemeriksaan, Riset, dan Pengembangan PPATK pada 11 September 2019 di Jakarta.
5. Online Single Submission (OSS) dan Hal – Hal yang Perlu Dilakukan oleh Perusahaan Terbuka: yang diselenggarakan oleh ICSA (Indonesia Corporate Secretary Association) dan Bursa Efek Indonesia pada 8 Oktober 2019 di Jakarta.
6. Strategi Nasional Pencegahan Korupsi: yang diselenggarakan oleh Tim Sekretariat Stranas PK pada 13 Desember 2019 di Bandung.

Fungsi Investor Relations di Bank Muamalat Indonesia antara lain adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan strategi komunikasi dan menjaga hubungan baik dengan regulator dan para pemegang saham institusi dan individu serta lembaga penunjang pasar modal.
2. Melaksanakan penyampaian pelaporan keterbukaan informasi baik elektronik maupun non elektronik.
3. Mengkoordinir penyusunan laporan tahunan (*annual report)* dan memastikan seluruh informasi yang ditampilkan adalah akurat dan disclosure informasi terpenuhi sesuai regulasi.
4. Mengkoordinir dan menyelenggarakan rapat umum pemegang saham dan aksi korporasi lainnya bersama dengan unit kerja terkait.
5. Menjalin hubungan dengan Biro Administrasi Efek (BAE) dalam penanganan administrasi saham.

Competency Development of Secretary Company

In order to support the implementation of his duties, Secretary The company follows various programs for development competence. Programs attended by the Corporate Secretary during 2019 is as follows:

1. *Internal Communication in Era 4.0 organized by the Agency Manager of the Indonesian Community Relations Center on February 28, 2019 in Jakarta.*
2. *Development of Electronic Reporting System Integration (SPE) and IDXNET: organized by the Financial Services Authority (OJK) and the Indonesia Stock Exchange on May 14, 2019.*
3. *The Importance of Records Management: organized by Crown Records Management on August 9, 2019 in Jakarta.*
4. *Indonesian National Risk Assessment on Money Laundering & Terrorist Financing: organized by Ivan Yustiavandana as the Director of Examination, Research and Development of PPATK on September 11, 2019 in Jakarta.*
5. *Online Single Submission (OSS) and Necessary Things Conducted by a Public Company: organized by ICSA (Indonesian Corporate Secretary Association) and Stock Exchange Indonesia on October 8, 2019 in Jakarta.*
6. *National Corruption Prevention Strategy: organized by The Stranas PK Secretariat Team on December 13, 2019 in Bandung.*

The function of Investor Relations at Bank Muamalat Indonesia, among others are as follows:

1. *Develop communication strategies and maintain relationships both with regulators and institutional and shareholders individuals and capital market supporting institutions.*
2. *Carry out information disclosure reporting both electronic and non electronic.*
3. *Coordinating the preparation of annual reports (annual report) and ensure all information displayed is accurate and information disclosure is met according to regulations.*
4. *Coordinate and hold general meeting of holders shares and other corporate actions together with related work units.*
5. *Establish relationships with the Securities Administration Bureau (BAE) in* administration of shares.

Satuan Kerja Audit Internal
Internal Audit Working Unit

Audit Intern merupakan bagian dari sistem pengendalian intern dengan ruang lingkup pekerjaan audit intern yang mencakup pemeriksaan dan penilaian atas kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian intern bank serta penilaian kinerja yang bertujuan memberikan keyakinan bahwa pengendalian telah berjalan seperti yang ditetapkan.

Dengan perannya sebagai *Third line of defense*, Satuan Kerja Audit Internal Bank Muamalat harus memastikan bahwa pengendalian Internal di setiap line of defense semakin kuat dan matang sesuai dengan ketentuan dan peraturan. Oleh karena itu SKAI terus melakukan inovasi dalam penggunaan metodologi serta *tools* audit sehingga pelaksanaan audit lebih efektif dan efisien.

Internal Audit is part of the internal control system with the scope of internal audit work which includes examining and evaluating the adequacy and effectiveness of the bank's internal control system as well as performance appraisals aimed at providing confidence that the controls have been running as specified.

With its role as the Third line of defense, Bank Muamalat's Internal Audit Unit must ensure that Internal control in each line of defense is stronger and more mature in accordance with the rules and regulations. Therefore, SKAI continues to innovate in the use of audit methodologies and tools so that the audit is more effective and efficient.

Dasar Hukum

Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) dibentuk sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum. Kepala SKAI ditunjuk oleh Direktur Utama sesuai Surat Keputusan Direksi No. 001/DIR/KPTS/I/2019 tanggal 31 Januari 2019 yang telah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris sesuai surat No. 04/B/COM-SRT/I/2019 tanggal 31 Januari 2019 serta telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan surat No. 016/B/PRD-SRT/II/2019 tanggal 18 Februari 2019.

Legal Basis

Internal Audit Work Unit (SKAI) is formed in accordance with the Regulations Republic of Indonesia Financial Services Authority No. 1/POJK.03/2019 concerning Application of Internal Audit Function in Commercial Banks. Head of SKAI appointed by the President Director in accordance with Directors Decree No. 001/DIR/KPTS/II/2019 dated January 31, 2019 which has been approved from the Board of Commissioners in accordance with letter No. 04/B/COM-SRT/II/2019 dated January 31, 2019 and has been reported to the Financial Services Authority with letter No. 016/B/PRD-SRT/III/2019 dated February 18, 2019.

Struktur dan Kedudukan SKAI

SKAI dipimpin oleh Kepala SKAI yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan dapat berkomunikasi dengan Dewan Komisaris secara langsung atau melalui Komite Audit untuk menginformasikan berbagai hal yang berhubungan dengan pelaksanaan audit dan dalam menjalankan fungsi pengawasan untuk mewujudkan visi dan misi Bank. Kepala SKAI diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama Bank dengan persetujuan Dewan Komisaris dan kemudian dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Bank juga telah memiliki Piagam Audit Intern yang berisi tentang struktur dan kedudukan SKAI, tugas dan tanggung jawab, wewenang, kode etik audit intern, persyaratan auditor intern dan pertanggungjawaban SKAI.

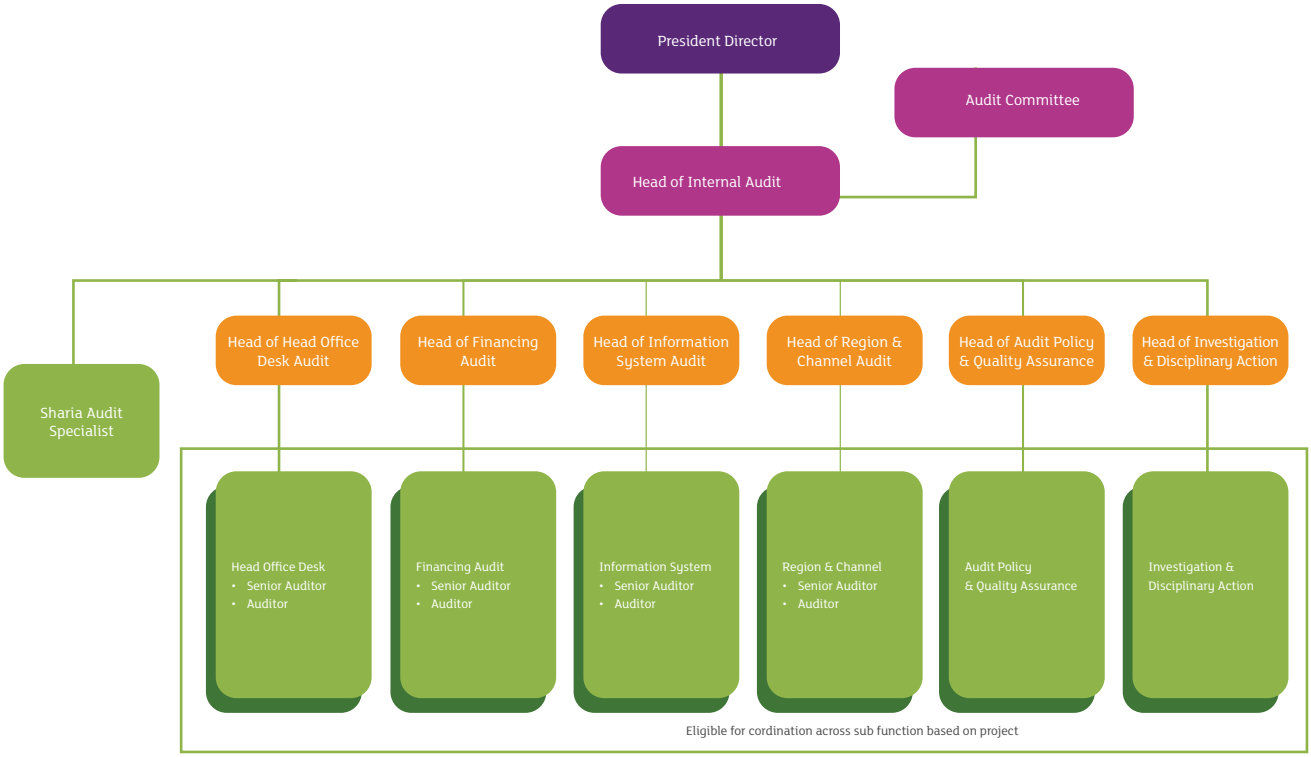
Internal Audit Organization Structure and Total Employees

SKAI is headed by the SKAI Head who is directly responsible to the President Director and can communicate with the Board Commissioner directly or through the Audit Committee to inform various things related to conducting audits and in carrying out supervisory functions to realize the vision and mission of the Bank. The Head of Internal Audit Unit is appointed and dismissed by the President Director of the Bank with the approval of the Board Commissioner and then reported to the Financial Services Authority (OJK).

The Bank also has an Internal Audit Charter which contains information about structure and position of the Internal Audit Unit, duties and responsibilities, authority, internal audit code of ethics, internal auditor requirements and accountability of SKAI.

Struktur Organisasi SKAI per bulan Desember 2019 adalah sebagai berikut:

The organizational structure of the Internal Audit Unit as of December 2019 is as follows:



Profil Kepala SKAI

Profile of Head of SKAI



Ridwan Moezwir

Kepala Satuan Kerja Audit Intern
Head of Internal Audit Work Unit

Kepala SKAI PT Bank Muamalat Indonesia Tbk adalah Ridwan Moezwir. Warga Negara Indonesia, lahir di Bandung, Jawa Barat memperoleh S2 Bidang Finance dari Universitas Gadjah Mada - Yogyakarta. Bergabung dengan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk

The SKAI Head of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk is Ridwan Moezwir. An Indonesian citizen, born in Bandung, West Java obtained a S2 In Finance from Gadjah Mada University - Yogyakarta. Join in with PT Bank Muamalat Indonesia Tbk from January 2019 to now as the

sejak Januari 2019 sampai sekarang sebagai Kepala SKAI. Jabatan sebelumnya, tahun 2018 sebagai Head of Internal Audit di PT Bank Victoria International, Tbk. Tahun 2008 s/d 2017 sebagai Head of Internal Audit di PT Bank UOB Indonesia.

Head of SKAI. Previous position, 2018 as Head of Internal Audit at PT Bank Victoria International, Tbk. In 2008 until 2017 as Head of Internal Audit at PT Bank UOB Indonesia.

Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab SKAI tercantum dalam Piagam Audit Intern dan sesuai dengan Anggaran Dasar Bank Muamalat Indonesia yaitu:

1. Melakukan audit semua bidang kegiatan Bank secara berkala berdasarkan skala prioritas dan tingkat risiko.
2. Audit dilakukan berdasarkan rencana tahunan yang disusun berdasarkan Risk Based Audit (RBA) yang telah disetujui oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama serta mendapat masukan dari pihak-pihak terkait.
3. Melaksanakan audit dengan mengacu pedoman yang berlaku umum, seperti SPFAIB, Pedoman Audit Intern Bank Muamalat Indonesia (Audit Charter).
4. Melaksanakan audit secara reguler pada unit Kantor Pusat dan Kantor Cabang berdasarkan skala prioritas dan tingkat risiko yang telah diperhitungkan sebelumnya sesuai rencana.
5. Bekerja sama dengan unit Kepatuhan dalam hal audit kepatuhan terhadap aturan dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk pemenuhan aspek syariah.
6. Membuat Laporan Hasil Audit dan menyampaikannya kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan dan Direktur terkait.
7. Mengadakan pertemuan rutin dengan Komite Audit untuk mengevaluasi hasil temuan audit serta membahas temuan dan follow up temuan.
8. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
9. Melakukan monitoring pelaksanaan tindak lanjut (follow up) temuan hasil audit.
10. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya.
11. Menyiapkan laporan dari Direktur Utama dan Dewan Komisaris berupa Laporan Pokok-Pokok Hasil Audit untuk disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan laporan lainnya sesuai kebutuhan.
12. Menyiapkan laporan tentang follow up temuan OJK dan Bank Indonesia (BI).
13. Melakukan audit khusus apabila diperlukan.

Duties and Responsibilities

The duties and responsibilities of the Internal Audit Unit are listed in the Internal Audit Charter and are in accordance with the Articles of Association of Bank Muamalat Indonesia, namely:

1. *Conducting audits of all areas of the Bank's activities on a regular basis based on priority scale and risk level.*
2. *The audit is carried out based on an annual plan prepared based on Risk Based Audit (RBA) that has been approved by the President Director and the Chief Commissioner as well as getting input from related parties.*
3. *Carrying through audits with reference to generally accepted guidelines, such as SPFAIB, Internal Audit Guidelines for Bank Muamalat Indonesia (Audit Charter).*
4. *Carrying through regular audits of Head Office and Branch Office units based on priority scale and risk levels that have been calculated previously according to plan.*
5. *Cooperating with the Compliance unit in terms of auditing compliance with applicable rules and regulations, including compliance with sharia aspects.*
6. *Making an Audit Report and submitting it to the President Director and the Board of Commissioners through the Audit Committee with a copy to the Compliance Director and relevant Directors.*
7. *Holding regular meetings with the Audit Committee to evaluate the findings of the audit and discuss the findings and follow up on the findings.*
8. *Providing suggestions for improvements and objective information about the activities examined at all levels of management;*
9. *Monitoring the implementation of the follow-up on the audit findings.*
10. *Developing a program to evaluate the quality of internal audit activities that it does.*
11. *Preparing reports from the President Director and Board of Commissioners in the form of Reports on the Results of Audit to be submitted to the Financial Services Authority (FSA) and other reports as needed.*
12. *Preparing a report on the follow up of FSA and Bank Indonesia (BI) findings.*
13. *Conducting special audits if needed.*

Jumlah Karyawan SKAI

Per posisi 31 Desember 2019, jumlah karyawan SKAI ada 19 (sembilan belas) orang dengan komposisi sebagai berikut:

Number of SKAI Employees

As of December 31, 2019, the number of SKAI employees was 19 (nine twelve) people with the following composition:

Head of IAT	: 1 orang/ *person*
Head Office Desk Audit	: 4 orang/ *people*
Financing Audit	: 5 orang/ *people*
Information System Audit	: 1 orang/ *person*
Region & Channel Audit	: 3 orang/ *people*
Investigation & Disciplinary Action	: 1 orang/ *person*
Audit Policy & Quality Assurance	: 4 orang/ *people*

Kualifikasi dan Sertifikasi

Sampai dengan akhir tahun 2019, auditor yang telah memperoleh Sertifikasi Internal Auditor Bank Level Supervisor dari Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP) adalah sebanyak 5 (lima) orang, 4 (empat) orang BSMR Level 4, 2 (dua) orang orang BSMR Level 3, 13(tiga belas) orang BSMR level 2, termasuk kualifikasi ketrampilan lainnya dengan mengundang beberapa narasumber eksternal berupa inhouse training.

Qualification and Certification

Until the end of 2019, the auditors have obtained it Bank Supervisor Level Internal Auditor Certification from the Institution Banking Professional Certification (LSPP) is 5 (five) people, 4 (four) Level 4 BSMR people, 2 (two) Level 3 BSMR people, 13 (thirteen) BSMR level 2 people, including skills qualifications others by inviting several external speakers in the form inhouse training.

Pelaksanaan Audit Intern

Selama tahun 2019, SKAI telah melakukan 33 audit reguler/umum (yaitu audit yang direncanakan di dalam RKAT 2019), 13 audit khusus dan 16 audit investigasi (yaitu audit di luar RKAT 2019 atau audit karena adanya permintaan oleh Direksi, Komite Audit, Regulator, dll.). Dengan demikian, secara keseluruhan SKAI telah melakukan penugasan audit sebanyak 62 audit (188%).

Internal Audit Implementation

During 2019, the Internal Audit Unit conducted 33 regular/general audits (i.e. planned audits in RKAT 2019), 13 specific audits and 16 investigative audits (i.e. audits outside of RKAT 2019 or audits due to requests by the Directors, Audit Committee, Regulators, etc.). Thus, overall SKAI has done audit assignments as many as 62 audits (188%).

Sistem Pengendalian Intern (SPI)
Internal Control System (SPI)

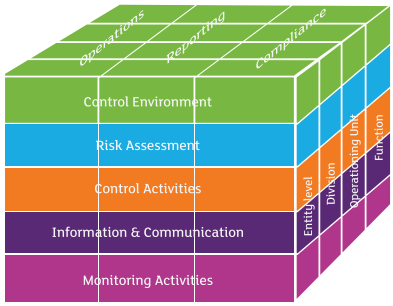
Sistem pengendalian intern merupakan suatu sistem yang dirancang untuk mencapai efektivitas dan efisiensi operasi, kehandalan laporan keuangan dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Proses pengendalian intern melibatkan Dewan Komisaris, Direksi, Manajemen, dan personil lain.

Salah satu konsep sistem pengendalian intern yang saat ini digunakan oleh banyak perusahaan di dunia adalah sistem pengendalian intern yang dirancang oleh *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO). Sistem pengendalian intern menurut COSO mencakup 5 elemen utama sebagaimana gambar dan penjelasan di bawah ini:

Internal control system is a system designed to achieve effectiveness and efficiency of operations, report reliability finance and compliance with laws and regulations which applicable. The internal control process involves the Board of Commissioners, sDirectors, Management and other personnel.

One concept of the internal control system that is currently used by many companies in the world is a control system intern designed by the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). Internal control system according to COSO it includes 5 main elements as shown in Figure 1 and explanation below:

The COSO Cube



1. **Lingkungan Pengendalian**
   Lingkungan pengendalian merupakan dasar dari semua komponen pengendalian internal. Faktor-faktor lingkungan pengendalian mencakup integritas, nilai etis, dan kompetensi dari orang dan entitas, filosofi manajemen dan gaya manajemen, cara manajemen memberikan otoritas dan tanggung jawab serta mengorganisasikan dan mengembangkan orangnya, perhatian dan pengarahan yang diberikan oleh Komisaris.
2. **Penilaian Risiko**
   Yaitu mekanisme yang dirancang untuk mengindentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko-risiko yang berkaitan dengan berbagai aktivitas di mana organisasi beroperasi.
3. **Aktivitas Pengendalian**
   Yaitu pelaksanaan dari kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen untuk membantu memastikan bahwa tujuan dapat tercapai.
4. **Informasi dan Komunikasi**
   Yaitu sistem yang memungkinkan orang atau entitas, memperoleh dan membagi informasi yang diperlukan untuk melaksanakan, mengelola, dan mengendalikan operasinya.
5. **Pemantauan**
   Pelaksanaan sistem pengendalian internal harus dipantau untuk memastikan sistem telah berjalan dengan baik.

1. ***Control Environment***
   The control environment is the basis of all internal control component. Environmental factors control includes integrity, ethical values, and competence from people and entities, management philosophy and management style, the way management gives authority and responsibility as well organizing and developing people, attention and direction given by the Commissioner.
2. ***Risk Assessment***
   Namely a mechanism designed to identify, analyze, and manage the risks associated with various activities in which the organization operates.
3. ***Control Activities***
   Namely the implementation of the policies and procedures set by management to help ensure that goals can be achieved.
4. ***Information and Communication***
   Namely a system that allows people or entities, obtain and share information needed to carry out, manage, and control its operations.
5. ***Monitoring***
   The implementation of the internal control system must be monitored for ensure the system is running well.

SKAI telah melakukan audit untuk memastikan bahwa sistem pengendalian intern telah dilaksanakan dengan baik oleh manajemen, yaitu:

1. Risiko bank telah diidentifikasi dan dikelola secara baik.
2. Risiko dan pengendalian telah dikomunikasikan di semua jajaran organisasi.
3. Interaksi dengan berbagai unit kerja sebagai bagian dari proses tata kelola telah dilaksanakan dengan baik.
4. Tersedia informasi keuangan, manajerial dan operasional yang akurat, handal, utuh dan tepat waktu.
5. Tindakan karyawan tunduk kepada kebijakan, standar (kode etik), prosedur, hukum serta peraturan yang berlaku.
6. Sumber daya diperoleh secara ekonomis, digunakan secara efisien, dan dilindungi secara memadai.
7. Program, perencanaan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai secara optimal.
8. Kualitas pengendalian intern selalu diperbaiki secara berkesinambungan.
9. Ketentuan syariah yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) telah diterapkan dengan baik.
10. Regulasi yang berdampak dan berpengaruh secara signifikan terhadap Bank, diidentifikasi dan dikelola sewajarnya.
11. Dana masyarakat telah dikelola dengan baik.
12. Harta kekayaan Bank telah diamankan dengan baik.

Proses Pengawasan

SKAI melakukan pengawasan secara berkesinambungan dan teratur, baik melalui kegiatan audit *(on site)* maupun pengawasan diluar audit *(off site monitoring)*. Pengawasan yang dilakukan melalui kegiatan audit, dimulai dengan pembuatan rencana audit tahunan yang disetujui oleh Direktur Utama dan Komisaris melalui Komite Audit, merealisasikan rencana audit tersebut sesuai jadwal yang telah ditetapkan, melaporkan hasil audit kepada Direktur Utama dan Komisaris melalui Komite Audit dan kepada pihak-pihak lain yang terkait, dan melakukan pemantauan tindak lanjut terhadap temuan-temuan audit. Tindak lanjut terhadap temuan audit dan pencapaian atas rencana audit tersebut dipantau oleh bagian Quality Assurance (QA) yang merupakan bagian independen di SKAI.

SKAI has conducted an audit to ensure that the system internal control has been implemented well by management, as follow:

1. *Bank risks have been identified and managed properly.*
2. *Risk and control have been communicated at all levels organization.*
3. *Interaction with various work units as part of the process governance has been implemented well.*
4. *Available financial, managerial and operational information that accurate, reliable, intact and on time.*
5. *Employee actions are subject to policies, standards (codes ethics), procedures, applicable laws and regulations.*
6. *Resources are obtained economically, used in a manner efficiently, and adequately protected.*
7. *The program, planning and targets that have been set can achieved optimally.*
8. *The quality of internal control is always continuous improved.*
9. *Sharia provisions issued by the National Sharia Board (DSN) has been implemented well.*
10. *Regulations that have a significant impact and influence towards the Bank, properly identified and managed.*
11. *Community funds have been well managed.*
12. *The Bank's assets have been properly secured.*

Supervision Process

SKAI conducts supervision on an ongoing and regular basis, both through audit activities (on site) and outside supervision audit (off site monitoring). Supervision carried out through Audit activities, starting with making an annual audit plan approved by the President Director and Commissioners through the Committee Audit, realizing the audit plan according to the schedule has been determined, reports the audit results to the President Director and Commissioners through the Audit Committee and to other parties who related, and conduct follow-up monitoring of the findings an audit. Follow up on audit findings and achievements the audit plan is monitored by the Quality Assurance department (QA) which is an independent part of SKAI.

Monitoring Tindak Lanjut Temuan

Sesuai ketentuan Pedoman Kerja Satuan Pengawas Internal mengenai Standar Implementasi tentang Pemantauan Tindak Lanjut, salah satu tugas dari Kepala SPI adalah menyusun dan memelihara sistem untuk memantau tindak lanjut hasil penugasan yang telah disampaikan kepada manajemen.

Monitoring tindak lanjut temuan auditor adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis oleh SKAI untuk menentukan bahwa obyek audit *(auditee)* telah melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan, baik yang berasal dari auditor internal maupun auditor eksternal, dalam tenggang waktu yang telah disepakati sebelumnya. Monitoring tindak lanjut bertujuan untuk menilai secara obyektif sejauh mana pelaksanaan rekomendasi temuan dilaksanakan dan memastikan kebenaran data baik tertulis maupun fisik di lapangan atas laporan tindak lanjut yang pernah disampaikan *auditee.*

Kegiatan monitoring tindak lanjut temuan auditor di tahun 2019 dilaksanakan sepanjang tahun dengan meminta laporan tindak lanjut kepada auditee secara bulanan. Kegiatan cek fisik ke lapangan juga dilakukan untuk melihat realisasi fisik pelaksanaan tindak lanjut pada Kantor Pusat dan Kantor Cabang.

Monitoring Follow-up Findings

In accordance with the Internal Audit Unit's Work Guidelines regarding Implementation Standards on Follow-up Monitoring, one the duty of the Head of SPI is to set up and maintain a system for monitor the follow up of the results of the assignment that have been submitted to management.

Monitoring the follow-up of auditor findings is a series of activities carried out systematically by SKAI to determine that the audit object (auditee) has carried out the recommendations of the audit results, both from internal auditors and auditors externally, within a period of time agreed upon previously. Follow-up monitoring aims to assess objectively the extent to which implementation of the recommendations and findings were implemented ensure the truth of data both written and physical in the field for the follow-up report submitted by the auditee.

Monitoring activities to follow up on the auditor's findings in 2019 implemented throughout the year by requesting a follow-up report to the auditee on a monthly basis. Physical check to the field too done to see the physical realization of the follow-up on Head Office and Branch Office.

Audit Ekstern
External Audit

Bank Muamalat Indonesia telah menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang dan Ali (dbsd&a) yang merupakan sekumpulan dari beberapa Kantor Akuntan Publik. Sebagai anggota (member) dari BKR International yang berkantor pusat di New York dan telah ditunjuk Bambang Sulistiyanto sebagai Managing Partner di Indonesia serta terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Nomor Register AP.0408. KAP Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang dan Ali beralamat di Menara Kuningan lantai 11, Jl HR Rasuna Said Blok X-7 Kav 5, Jakarta 12940. KAP ditugaskan untuk melakukan Audit Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2019.

Bank Muamalat Indonesia has appointed a Public Accounting Firm (KAP) Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang and Ali (dbsd & a) who is a group of several Public Accounting Firms. As a member (member) of BKR International with an office center in New York and has been appointed as Bambang Sulistiyanto Managing Partner in Indonesia and registered with the Service Authority Finance (OJK) with Registration Number AP.0408. KAP Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang and Ali are located on Menara Kuningan floor 11, Jl HR Rasuna Said Blok X-7 Kav 5, Jakarta 12940. KAP assigned to conduct an Audit of Financial Statements for the year ending December 31, 2019.

Penugasan KAP Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang dan Ali (dbsd&a) sebagai akuntan publik merupakan penunjukan yang keempat bagi Bank dalam rangka audit atas informasi keuangan historis tahunan untuk tahun buku 31 Desember 2019 berdasarkan surat No. 151/B/FND-SRT/XII/2109 tanggal 26 Desember 2019 perihal Penunjukan Akuntan Publik. Berikut adalah informasi Akuntan Publik (AP) dan KAP yang telah ditunjuk Bank Muamalat Indonesia untuk tahun 2019, yaitu sebagai berikut:

KAP assignments Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang and Ali (dbsd & a) as a public accountant is the fourth appointment for Bank in the context of an audit of annual historical financial information for the fiscal year December 31, 2019 based on letter No. 151/B/FND-SRT/XII/2109 dated December 26, 2019 concerning Appointment Public Accountant. Following is the Public Accountant (AP) information KAP that has been appointed by Bank Muamalat Indonesia for 2019, as follows:

Akuntan Publik *Public Accountant*		
Nama/ *Name*	:	Drs. Bambang Sulistiyanto, Ak., MBA, CPA.
Nomor Registrasi AP dari Menteri Keuangan *AP Registration Number of the Minister of Finance*	:	AP.0408
Nomor Surat Tanda Terdaftar AP *AP Registered Letter Number*	:	STTD. AP-311/PM.22/2018
Tahun Penugasan *Year of Assignment*	:	2019

Sedangkan Biaya honorarium KAP dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 adalah sebagai berikut :

While KAP honorarium costs from 2014 to 2019 is as follows:

Periode Tahun *Period of the Year*	Signing Partner	Kantor Akuntan Publik *Public Accountant Office*	Kantor Akuntan Publik Asing *Public Accountant Foreign Office*	Honorarium (Rp) *Honorarium (Rp)*
2019	Bambang Sulistiyanto, CPA	Doli, Bambang, *Sulistiyanto, Dadang dan Ali (dbsd&a)*	BKR International	800.000.000
2018	Doli Diapary Siregar, CPA	Doli, Bambang, *Sulistiyanto, Dadang dan Ali (dbsd&a)*	BKR International	1.000.000.000
2017	Doli Diapary Siregar, CPA	Doli, Bambang, *Sulistiyanto, Dadang dan Ali (dbsd&a)*	BKR International	900.000.000
2016	Doli Diapary Siregar, CPA	Doli, Bambang, *Sulistiyanto, Dadang dan Ali (dbsd&a)*	BKR International	1.200.000.000
2015	Aidil Yuzar, SE.Ak, CPA	Aidil Yuzar, SE.Ak, CPA	-	1.350.000.000
2014	Sinarta	Purwantono, Suherman, *& Surja*	Ernst & Young Global Ltd	925.000.000

Bank Muamalat
Pertama Murni Syariah



Hijrah itu Utuh

Nikmati dana yang tersimpan aman,
utuh dan keleluasaan transaksi

Tabungan iB Hijrah

Sesuai Syariah · Terpercaya · Mudah

#AyoHijrah

Info lengkap hubungi: SalaMuamalat **1500016** | www.bankmuamalat.co.id

BankMuamalatIndonesia · BankMuamalat · Bank.Muamalat · BankMuamalat

Bank Muamalat Indonesia terdaftar dan diawasi oleh OJK Otoritas Jasa Keuangan · LPS Lembaga Penjamin Simpanan

Manajemen Risiko
Risk Management

Penerapan manajemen risiko Bank Mualamat merupakan bagian dari seluruh aktivitas perbankan, sehingga setiap pengambilan keputusan stratejik Bank selalu memperhitungkan risiko yang dihadapi. Melalui penerapan manajemen risiko secara komprehensif tersebut, diharapkan Bank dapat melindungi dan menciptakan nilai tambah bagi pemangku kepentingan.

The implementation of Bank Mualamat risk management is part of all banking activities, so that each strategic decision making of the Bank always takes into account the risks faced. Through the implementation of comprehensive risk management, it is hoped that the Bank can protect and create added value for stakeholders.

I. Dasar Penerapan Manajemen Risiko

Penerapan manajemen risiko pada Bank Muamalat Indonesia berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK), Peraturan Bank Indonesia (PBI), Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI), dan dokumen ketentuan lainnya yang diakui sebagai referensi standar maupun ketentuan dalam industri perbankan di Indonesia.

Beberapa regulasi yang terkait dengan manajemen risiko Bank antara lain sebagai berikut:

1. **Penerapan Manajemen Risiko**
   Peraturan OJK No. 65/POJK.03/2016 tanggal 28 Desember 2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
2. **Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan:**
   a. Peraturan OJK No. 17/POJK.03/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan;
   b. Surat Edaran OJK No. 14/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan;
3. **Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit usaha Syariah:**
   a. Peraturan OJK No. 8/POJK.03/2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit usaha Syariah;
   b. Surat Edaran OJK No. 10/SEOJK.03/2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit usaha Syariah;
4. **Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah**
   Peraturan OJK No. 21/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah;
5. **Sistem Pengendalian Intern**
   Surat Edaran OJK No. 35/SEOJK.03/2017 tgl. 07 Juli 2017 tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum beserta perubahannya;
6. **Pelaksanaan Kebijakan Pembiayaan Bank bagi Bank Umum**
   POJK No. 42/POJK.03/2017 perihal Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum.

I. Basic Application of Risk Management

The application of risk management at Bank Muamalat Indonesia is guided by the Financial Services Authority Regulation (POJK), Financial Services Authority Circular Letter (SEOJK), Bank Indonesia Regulation (PBI), Bank Indonesia Circular Letter (SEBI), and other regulatory documents that are recognized as standard references as well as provisions in the banking industry in Indonesia.

Some of the regulations related to Bank risk management include the following:

1. ***Application of Risk Management***
   FSA Regulation No. 65/POJK.03/2016 dated 28 December 2018 concerning the Implementation of Risk Management for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units;
2. ***Implementation of Integrated Risk Management for Financial Conglomerates:***
   a. FSA Regulation No. 17/POJK.03/2014 dated November 19, 2014, concerning the Implementation of Integrated Risk Management for Financial Conglomerates;
   b. FSA Circular No. 14/SEOJK.03/2015 dated May 25, 2015, concerning the Implementation of Integrated Risk Management for Financial Conglomerates;
3. ***Risk-Based rating of Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units:***
   a. FSA Regulation No. 8/POJK.03/2014 dated June 11, 2014, concerning Risk-Based Rating of Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units;
   b. FSA Circular No. 10/SEOJK.03/2014 dated June 11, 2014, concerning Risk-Based Rating of Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units;
4. ***Minimum Capital Requirement for Sharia Commercial Banks***
   FSAK Regulation No. 21/POJK.03/2014 dated November 18, 2014, concerning the Minimum Capital Requirement for Sharia Commercial Banks;
5. ***Internal Control System***
   FSA Circular No. 35/SEOJK.03/2017 dated July 7, 2017, concerning the Standard Guidelines for Internal Control Systems for Commercial Banks and their amendments;
6. ***Implementation of the Bank Financing Policy for Commercial Banks***
   POJK No. 42/POJK.03/2017 concerning the Obligation of Compilation and Implementation of Credit Policy or Bank Financing for Commercial Banks.

II. Fokus Manajemen Risiko di Tahun 2019

Selama tahun 2019 fokus pengembangan manajemen risiko yang telah dijalankan oleh Bank Muamalat Indonesia, antara lain sebagai berikut:

1. ***Target Market dan Risk Acceptance Criteria*** **(TMRAC)**
   Di tahun 2019 ini Bank menetapkan TMRAC pembiayaan, baik untuk segmen Corporate dan Commercial serta RAC untuk Retail sehingga pembiayaan dapat difokuskan pada segmen atau sektor ekonomi yang berkualitas.
2. **Perbaikan Proses Pembiayaan**
   Bank secara kontinyu terus melakukan perbaikan proses pembiayaan secara end-to-end untuk semua segmen pembiayaan. Pada Q3 2019 fase I dari Financing Origination System (FOS) untuk segmen Retail telah berhasil diselesaikan, selanjutnya fase II direncanakan akan selesai dikerjakan pada Q1 2020. Adanya FOS ini diharapkan akan mewujudkan terlaksananya aktivitas pembiayaan yang efektif dan efisien dengan tetap memperhatikan aspek kehati-hatian dari aktivitas pembiayaan yang dijalankan.
3. **Pemantauan terhadap Kualitas Pembiayaan**
   Proses pemantauan pembiayaan diperkuat dengan memperkuat antara lain *risk data analytics* untuk segmen Retail dan melakukan review kinerja pembiayaan untuk semua segmen pembiayaan, termasuk melakukan *stress test*.
4. **Penginian dan Penyempurnaan atas Ketentuan Pembiayaan**
   Perbaikan dan pengkinian atas ketentuan pembiayaan Bank merupakan proses dari evaluasi dan kajian yang dilakukan oleh Bank di sepanjang tahun 2019 ini.
5. **Penguatan Manajemen Risiko Likuiditas dan Pasar**
   Penguatan manajemen risiko likuiditas dan pasar dilakukan antara lain melalui review dan pemantauan beberapa parameter risiko likuiditas dan risiko pasar secara harian, termasuk melakukan *review* atas limit dealer dan tools yang digunakan.
6. **Penguatan Manajemen Risiko Operasional**
   Penguatan manajemen risiko operasional antara lain dilakukan melalui penguatan *risk awarenes*, dan implementasi *Operational Risk Champion* (ORION) pada setiap unit kerja untuk menumbuhkan rasa kepemilikan dan kontrol atas risiko yang dihadapi unit kerja.

III. Penerapan Manajemen Risiko

Tata Kelola Manajemen Risiko

Pelaksanaan manajemen risiko di Bank Muamalat Indonesia menjadi tanggung jawab bersama seluruh manajemen dan seluruh karyawan Bank Muamalat Indonesia. Kesadaran akan risiko akan terus ditanamkan di setiap jenjang organisasi dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari budaya Bank Muamalat Indonesia.

II. Risk Management Focus in 2019

During 2019, the focus of the development of risk management that has been carried out by Bank Muamalat Indonesia, among others, are as follows:

1. ***Target Market and Risk Acceptance Criteria (TMRAC)***
   In 2019, the Bank established financing TMRAC, both for the Corporate and Commercial segments and RAC for Retail so that financing could be focused on quality economic segments or sectors.
2. ***Improvement of the Financing Process***
   The Bank continues to improve end-to-end financing processes for all financing segments. In Q3 2019 phase I of the Financing Origination System (FOS) for the Retail segment was successfully completed, then the second phase is planned to be completed in Q1 2020. The existence of this FOS is expected to realise the implementation of effective and efficient financing activities while still paying attention to the prudential aspects. from the financing activities carried out.
3. ***Monitoring of Financing Quality***
   The financing monitoring process was strengthened by strengthening among others risk data analytics for the Retail segment and conducting a review of financing performance for all financing segments, including conducting stress tests.
4. ***Update and Refinement of Financing Provisions***
   The improvement and updating of the Bank's financing provisions is a process of evaluation and study conducted by the Bank throughout 2019.
5. ***Strengthening Liquidity and Market Risk Management***
   Strengthening liquidity and market risk management is carried out through reviewing and monitoring several parameters of liquidity risk and market risk on a daily basis, including reviewing dealer limits and the tools used.
6. ***Strengthening Operational Risk Management***
   Strengthening operational risk management is carried out through strengthening risk awareness, and implementing Operational Risk Champion (ORION) in each work unit to foster a sense of ownership and control over the risks faced by work units.

III. Application of Risk Management

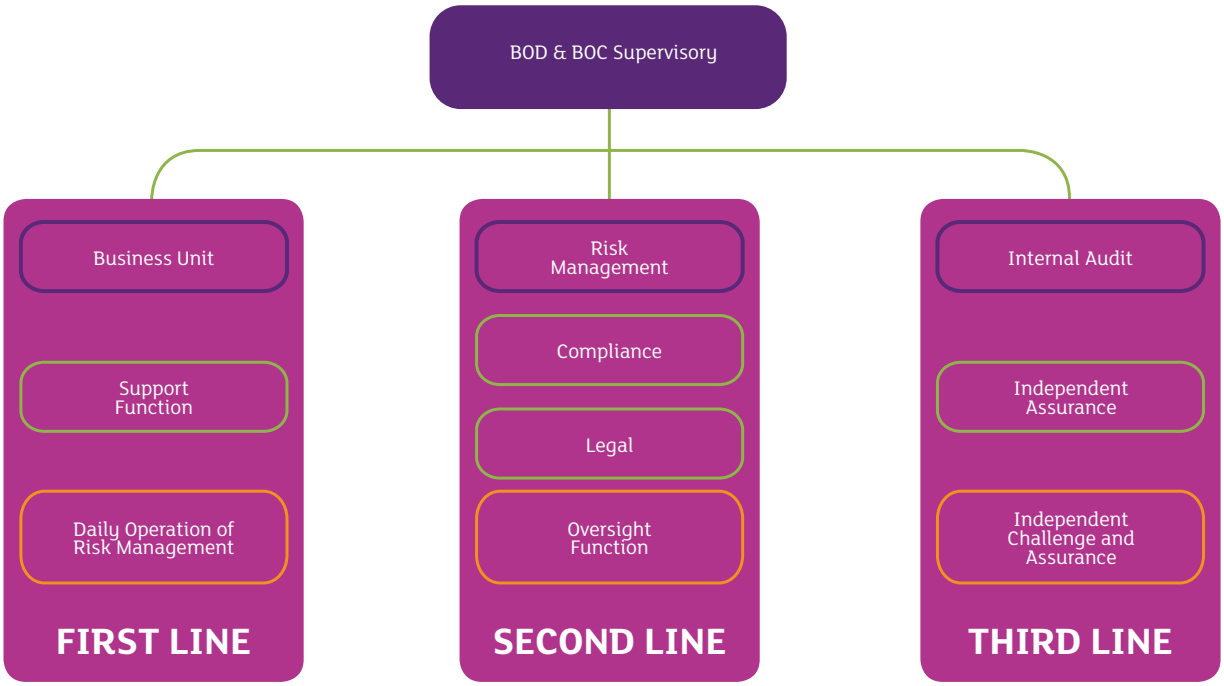
Risk Management Governance

The implemented risk management of Bank Muamalat Indonesia is the mutual responsibility of all managements and employees of Bank Muamalat Indonesia. Risk awareness will continuously be implanted in every organization level and an inseperable part of Bank Muamalat Indonesia's culture.

Bank Muamalat Indonesia menerapkan konsep tiga lini pertahanan *(three lines of defense)* dalam pengelolaan risiko, dimana pengelolaan risiko dilakukan oleh semua lini organisasi dan dilakukan pengawasan oleh Dewan Komisaris dan Direksi, seperti gambar di bawah ini:

Bank Muamalat Indonesia applies 'three lines of defense' concept in the risk management, in which the risk management is made by all organizational lines and supervision of the Board of Commissioners and the Board of Directors, as figure below:

The Three Lines of Defense of Bank Muamalat Indonesia



Lini Pertahanan Pertama *(1st Line of Defense)*

Garis pertahanan pertama terdiri dari unit kerja pengambil dan pemilik risiko yang melaksanakan fungsi bisnis dan unit kerja pendukung. Unit kerja tersebut dalam melaksanakan aktivitas hariannya berhadapan langsung dengan berbagai jenis dan kemungkinan risiko yang dihadapi Bank. Seluruh fungsi pada garis pertahanan pertama bertanggung jawab dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko yang melekat pada setiap produk, kegiatan, proses dan sistem yang dijalankan.

First Line of Defense

The first line of defense consists of risk taker and owner working unit performing business function and supporting working unit. Such working unit, in the performance of its daily activities, is face to face with various risk types and possibilities faced by Bank. All functions in the first line of defense are responsible to identify and manage risk attached to each product, activity, process and system run.

Lini Pertahanan Kedua *(2nd Line of Defense)*

Garis pertahanan kedua terdiri dari unit kerja manajemen risiko, kepatuhan dan hukum. Unit kerja di lini pertahanan kedua berfungsi untuk mengembangkan kerangka, strategi dan ketentuan terkait dengan pengelolaan risiko, kepatuhan dan hukum untuk mendukung proses bisnis Bank.

Second Line of Defense

The Second line of defense consists of risk management, compliance and legal working unit. The working unit in the second line of defense has function to develop framework, strategy and provision related to the risk management, compliance and law to support the business process of Bank.

Lini Pertahanan Ketiga *(3rd Line of Defense)*

Pada garis ketiga pertahanan terdiri dari unit internal audit. Internal audit berfungsi sebagai unit independen yang bertugas melakukan audit yang memberikan nilai tambah kepada *1st line* dan *2nd line of defense*, untuk memastikan bahwa seluruh elemen Bank telah melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya dengan baik termasuk memastikan kesesuaian dengan kebijakan manajemen Bank Muamalat Indonesia dan regulasi yang berlaku.

Tata kelola manajemen risiko dilaksanakan juga melalui peran aktif dalam perumusan tingkat risiko yang akan diambil *(risk appetite)* dan toleransi risiko *(risk tolerance)* yang ditetapkan oleh Direksi dan dipantau secara berkala. Pemantauan atas risiko yang dihadapi Bank Muamalat Indonesia dilakukan melalui pengawasan aktif oleh Dewan Komisaris dan Direksi termasuk pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi. Implementasinya dilakukan melalui rapat berkala Direksi dan komite level Direksi, melalui rapat Komite Manajemen Risiko *(Risk Management Committee)*, *IT Steering Committee* (ITSC), dan *Asset and Liability Committee* (ALCO) yang diselenggarakan sesuai dengan piagam masing-masing komite.

Peran aktif Dewan Komisaris dilakukan secara berkala melalui rapat Dewan Komisaris dan Direksi serta rapat komite level Dewan Komisaris yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite *Komite Tata Kelola Perusahaan* dan Komite Nominasi dan Remunerasi. Arahan dan keputusan komite dipantau tindak lanjutnya oleh komite secara berkala.

Komite Pemantau Risiko

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan rapat secara berkala sesuai dengan tanggung jawabnya sebagai berikut :

Third Line of Defense

The third line of defense comprises Internal Audit unit. The Internal Audit has function as independent unit having duty to do a risk-based audit giving a value added to the first and second defens lines, to ensure that all Bank elements have performed its function and responsibility well including ensure conformity to the management policy of Bank Muamalat Indonesia and the applicable regulations.

Risk management governance is also carried out by an active role in the formulation of the level of risk to be taken (risk appetite) and risk tolerance set by the Directors and monitored regularly. Monitoring of risks faced by Bank Muamalat Indonesia is carried out through active supervision by the Board of Commissioners and Directors, including the exercise of the authority and responsibilities of the Board of Commissioners and Directors. Its implementation is carried out through regular meetings of the Directors and Directors' level committees, through Risk Management Committee, IT Steering Committee (ITSC) and Asset and Liability Committee (ALCO) meetings held in accordance with the charter of each committee.

The active role of the Board of Commissioners is carried out regularly through Board of Commissioners and Board of Directors meetings and Board of Commissioners level committee meetings namely the Audit Committee, the Risk Monitoring Committee, the Good Corporate Governance Committee and the Nomination & Remuneration Committee. The committee's direction and decisions are monitored by the committee on a periodic basis.

Risk Oversight Committee

In carrying out its duties and responsibilities, the Risk Monitoring Committee has conducted regular meetings in accordance with its responsibilities as follows:

No.	Tanggung Jawab *Responsibilities*	Realisasi *Realization*
1.	Melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan strategi manajemen risiko yang disusun Direksi *Evaluate the risk management policies and strategies prepared by the Directors.*	Rapat ROC tanggal 27 Februari 2019, 11 April 2019 dan 11 Juli 2019, 3 Desember 2019 *Meeting of ROC held on February 27, 2019; April 11, 2019; July 11, 2019; and December 3, 2019.*
2.	Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut *Evaluate the suitability of risk management policies and the implementation of these policies.*	Dilaksanakan pada rapat tanggal 11 April 2019 dan 15 Oktober 2019 *Undertaken within the meeting dated on April 11, 2019, and October 15, 2019.*
3.	Melakukan evaluasi terhadap langkah-langkah yang diambil oleh Direksi dalam rangka memenuhi peraturan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian, khususnya yang berkaitan dengan manajemen risiko *Evaluate the steps taken by the Board of Directors in order to comply with Bank Indonesia/Financial Services Authority regulations and other applicable laws and regulations in order to implement the precautionary principle, specifically relating to risk management*	Dilaksanakan pada rapat tanggal 27 Agustus 2019, 15 Oktober 2019 dan 3 Desember 2019 *Undertaken within the meeting dated on August 27, 2019, and October 15, 2019, and December 3, 2019.*

No.	Tanggung Jawab *Responsibilities*	Realisasi *Realization*
4.	Melakukan evaluasi terhadap permohonan atas usulan Direksi yang berkaitan dengan transaksi atau kegiatan usaha yang melampaui kewenangan Direksi untuk dapat digunakan oleh Dewan Komisaris sebagai dasar pengambilan keputusan *Evaluate requests for Directors 'proposals relating to transactions or business activities that exceed the Board of Directors' authority to be used by the Board of Commissioners as a basis for decision making*	--
5.	Melakukan evaluasi terhadap laporan profil risiko dan laporan Bank baik internal maupun eksternal agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku *Evaluate the risk profile and bank reports both internal and external to comply with applicable regulations*	Dilaksanakan pada rapat tanggal 27 Februari 2019 *Undertaken within the meeting dated on February 27, 2019*
6.	Memastikan bahwa unit kerja manajemen risiko memenuhi kriteria independensi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya *Ensure that the risk management work unit meets the independence criteria in carrying out its duties and responsibilities*	Dilaksanakan pada rapat tanggal 11 April 2019 dan 27 Agustus 2019 *Undertaken within the meeting dated on April 11, 2019, and August 27, 2019.*

Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko juga melaksanakan fungsi dan tugas Komite Kebijakan Pembiayaan (KKP) yang wajib dibentuk oleh semua bank sebagaimana ketentuan POJK No. 42/POJK.03/2017 perihal Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum.

Risk Management Committee

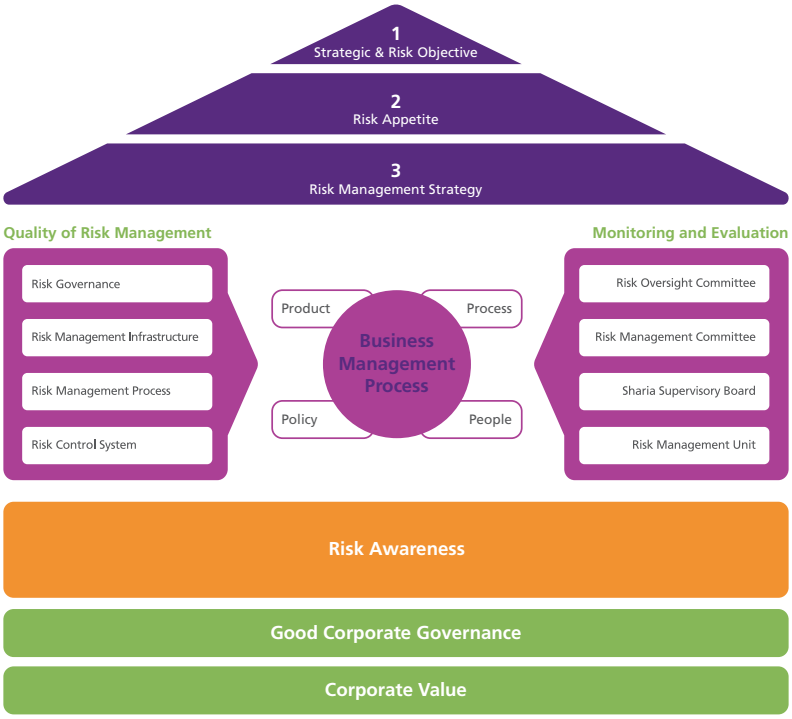
The Risk Management Committee also carries out the functions and duties of the Financing Policy Committee (KKP) which must be formed by all banks as stipulated in POJK No. 42/POJK.03/2017 concerning the Obligation of Compilation and Implementation of Credit Policy or Bank Financing for Commercial Banks.

Kerangka Manajemen Risiko

Kerangka manajemen risiko Bank Muamalat Indonesia disajikan pada gambar berikut ini:

Risk Management Framework

Risk Management Framework of Bank Muamalat Indonesia can be seen in the following chart:



Keberhasilan dari proses manajemen risiko sangat tergantung pada landasan bisnis Bank Muamalat Indonesia, yaitu *Good Corporate Governance* dan *Corporate Value*. Landasan tersebut dibangun melalui penguatan *risk awareness* di seluruh lini kerja Bank Muamalat Indonesia melalui implementasi budaya risiko, komunikasi internal yang baik, kecukupan pelatihan dan sertifikasi terkait manajemen risiko, serta penerapan *reward and punishment* sebagaimana diatur dalam Ittifaq Bank Muamalat Indonesia.

Success of the risk management process deeply depends on the business base of Bank Muamalat Indonesia, that is Good Corporate Governance and corporate value. Such base has been developed through the strengtened risk awareness in all networks of Bank Muamalat Indonesia through the implemented risk culture, good internal communication, sufficient training related to the risk management, and applied reward & punishment as provided in Ittifaq Bank Muamalat Indonesia.

Dengan landasan yang kuat tersebut, Bank Muamalat Indonesia melaksanakan proses bisnis yang tercakup dalam kebijakan, produk, proses dan sumber daya manusia. Pelaksanaan proses bisnis Bank Muamalat Indonesia dilakukan dengan senantiasa memperhatikan mitigasi risiko yang memadai sesuai jenis risiko inheren yang dapat diidentifikasi, dalam bentuk tata kelola, infrastruktur, proses manajemen risiko, dan pengendalian risiko. Hal tersebut tersebut merupakan salah satu bentuk dari penerapan manajemen risiko pada setiap aktivitas bisnis Bank Muamalat Indonesia.

With such strong base, Bank Muamalat Indonesia performs business process contained in policies, products, processes and human resources. Business process implementation of Bank Muamalat Indonesia is achieved by considering the sufficient risk mitigation according to inherent risk type which can be identified, in the form of governance, infrastructure, risk management process, and risk control. Such matter is one of forms of the risk management application in every business activity of Bank Muamalat Indonesia.

Proses pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan atas proses bisnis Bank Muamalat Indonesia dilakukan antara lain melalui *Risk Oversight Committee* di level Dewan Komisaris, Risk Management Committee di level Direksi, Dewan Pengawas Syariah (DPS), dan unit kerja Manajemen Risiko.

Continous monitoring and evaluation process to the business process of bisnis Bank Muamalat is taken place among others through Risk Oversight Committee at the level of the Board of Commissioners, Risk Management Committee at the level of the Board of Directors, Sharia Supervisory Board, and Risk Management unit.

Dengan landasan dan pilar yang kuat, Bank Muamalat Indonesia berupaya untuk mencapai dan melaksanakan *corporate strategy* dan *risk objective*, baik jangka panjang, jangka menengah, maupun jangka pendek, sesuai dengan *risk appetite* untuk menjaga tingkat eksposur risiko Bank. Sementara itu, strategi manajemen risiko disusun sebagai prinsip dasar untuk menciptakan nilai tambah bagi pemangku kepentingan.

With the strong base and pillar, Bank Muamalat Indonesia tries to reach and perform the corporate strategy and risk objective, for long-term, intermediate term, and short term, in accordance with the risk appetite to keep Bank risk exposure level and the risk management strategy composed with basic principles to create a value added for stakeholders.

Satuan Kerja Manajemen Risiko

Bank Muamalat Indonesia telah memiliki satuan kerja manajemen risiko yang merupakan kesatuan dari beberapa unit kerja manajemen risiko dengan kekhususan bidang kerjanya masing-masing antara lain:

1. Corporate Financing Risk (CFR);
2. Retail Financing Risk (RFR);
3. Financing Workout Risk (FWR);
4. Enterprise Risk Management (ERM);
5. Operational Risk Management (ORM).

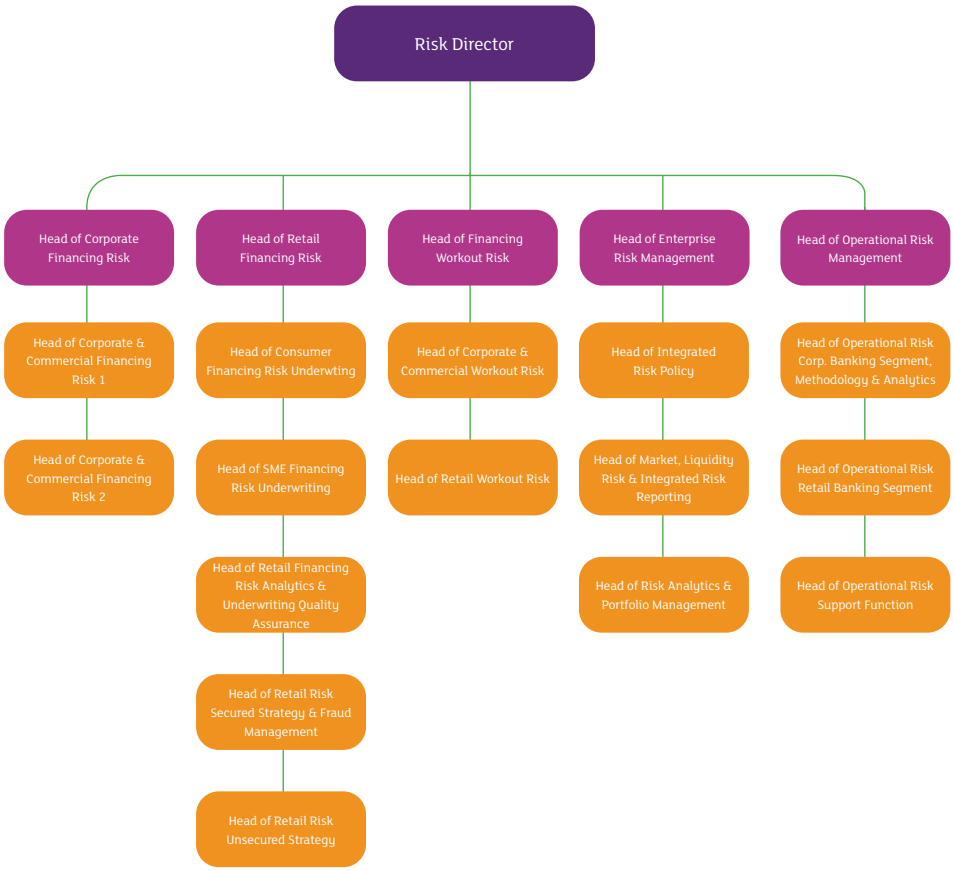
Setiap unit kerja manajemen risiko dipimpin oleh seorang kepala unit kerja yang bertanggung jawab langsung kepada Risk Director. Unit kerja manajemen risiko bersifat independen dari unit bisnis, satuan kerja operasional (*risk taking unit*) dan terhadap satuan kerja yang melaksanakan fungsi audit internal sebagaimana struktur organisasi di bawah ini:

Risk Management Working Unit

Bank Muamalat Indonesia already has a risk management work unit which is a unity of several risk management work units with the specificity of their respective fields of work among others:

1. *Corporate Financing Risk (CFR);*
2. *Retail Financing Risk (RFR);*
3. *Financing Workout Risk (FWR);*
4. *Enterprise Risk Management (ERM);*
5. *Operational Risk Management (ORM).*

Each risk management work unit is led by a head of work unit who reports directly to the Risk Director. The risk management work unit is independent from the business unit, the operational work unit (risk taking unit) and the work unit that carries out the internal audit function as the organizational structure below:



Sampai akhir Desember 2019, sumber daya manusia di unit kerja manajemen risiko yang telah mempunyai sertifikasi manajemen risiko sebanyak 101 orang.

Until the end of December 2019, there are 101 people in the risk management work unit that has had risk management certification.

Profil Head of Enterprise Risk Management

Profile of Head of Enterprise Risk Management



Catur Andayani

Head of Enterprise Risk Management

Head of Enterprise Risk Management

Head of Enterprise Risk Management PT Bank Muamalat Indonesia Tbk adalah Catur Andayani. Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta, memperoleh S1 Teknologi Pertanian dari Institut Pertanian Bogor dan S2 Akuntansi dari Magister Akuntansi - Universitas Indonesia. Bergabung dengan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk sejak tahun 2012

The Head of SKMR of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk is Catur Andayani. Indonesian citizen, born in Jakarta, obtained a Bachelor's degree Agricultural Technology from the Bogor Institute of Agriculture and Masters of Accounting from the Master of Accounting - University of Indonesia. Join PT Bank Muamalat Indonesia Tbk since 2012 and

dan mulai menjabat sebagai Kepala SKMR dari tahun 2015 - sekarang. Jabatan sebelumnya adalah Head Of Policy & Portfolio Management, Risk Management Division - Bank Muamalat Indonesia (2012-2014), dan AVP - Policy, System & Procedure – Bank Mandiri (2009-2012).

started served as Head of SKMR from 2015 - present. Position formerly Head of Policy & Portfolio Management, Risk Management Division - Bank Muamalat Indonesia (2012-2014), and AVP - Policy, System & Procedure - Bank Mandiri (2009-2012).

Proses Manajemen Risiko

Tujuan dari proses manajemen risiko yang baik adalah untuk mengelola risiko yang melekat pada aktivitas perusahaan dengan tujuan untuk memberikan nilai tambah yang berkelanjutan secara maksimal terhadap keseluruhan aktivitas.

Proses manajemen risiko digambarkan sebagai berikut:

Identifikasi risiko bertujuan untuk mengetahui seluruh jenis risiko yang melekat pada setiap produk, aktivitas layanan dan aktivitas fungsional yang berpotensi merugikan Bank dan dilakukan dengan memperhatikan antara lain:

1. Bersifat proaktif (antisipatif) dan bukan reaktif;
2. Mencakup seluruh aktivitas fungsional (kegiatan operasional);
3. Menggabungkan dan menganalisis informasi risiko dari seluruh sumber informasi yang tersedia; dan
4. Menganalisis probabilitas timbulnya risiko serta konsekuensinya.

Aktivitas yang dilakukan Bank dalam rangka melakukan identifikasi risiko antara lain adalah melalui analisis risiko pada setiap produk dan aktivitas baru yang akan diterbitkan, serta analisis atas proposal pembiayaan yang diajukan.

Bank juga melakukan identifikasi risiko melalui penilaian profil risiko dengan mengacu pada standar metodologi yang diatur oleh regulator. Saat ini, risiko utama yang dikelola oleh Bank sebanyak 10 (sepuluh) risiko yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko stratejik, risiko kepatuhan, risiko reputasi, risiko imbal hasil dan risiko investasi.

Pengukuran Risiko

Pengukuran risiko bertujuan untuk mengetahui besaran risiko yang melekat pada aktivitas Bank untuk dibandingkan dengan *risk appetite* Bank sehingga Bank dapat mengambil tindakan mitigasi risiko, dan menentukan modal untuk meng-*cover* risiko residual. Pengukuran risiko dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif dengan menggunakan model matematis ataupun simulasi.

Di Bank Muamalat Indonesia, pengukuran risiko antara lain dapat dilakukan melalui penentuan *risk rating*, *scoring/grading*, *stress testing* dan penilaian profil risiko dengan metodologi mengacu pada ketentuan regulator, peraturan internal dan praktik yang ada.

Secara berkala, Bank melakukan kaji ulang atas metodologi yang digunakan dalam pengukuran risiko, serta kesesuaian limit yang ditetapkan dengan *risk appetite* yang telah ditentukan oleh Bank, perubahan lingkungan bisnis dan kondisi pasar serta ketentuan regulator.

Risk Management Process

The purpose of a good risk management process is to manage the risks inherent in the company's activities with the aim of providing maximum sustainable added value to the overall activity.

The risk management process is described as follows:

Risk identification intends to know all risk types included in every product, service activity and functional activity having potency of injuring Bank Muamalat Indonesia and is carried out by taking attention, among others:

1. *Proactive (anticipative) and not reactive;*
2. *Covers all functional activities (operational activities);*
3. *Combine and scrutinise risk information from all available information sources; and*
4. *Analyse the probability of risk and its consequences.*

Activities undertaken by the Bank in order to identify risks include, among others, risk analysis of each new product and activity to be issued, as well as analysis of proposed financing proposals.

The Bank also identifies risks through an assessment of risk profiles by referring to the methodological standards set by the regulator. Currently, the main risks managed by the Bank are 10 (ten) risks, namely credit risk, market risk, liquidity risk, operational risk, legal risk, strategic risk, compliance risk, reputation risk, yield risk and investment risk.

Risk Measurement

Risk Measurement intends to know the risk size included in Bank activities to be compared with Bank risk appetite so that Bank may take action of the risk mitigation, and determine capital to cover a residual risk. The measurement may be made in qualitative and quantitative using mathematics or simulation model.

At Bank Muamalat Indonesia, measurement of risk can be carried out among others through the determination of risk rating, scoring/grading, stress testing and risk profile assessment using methodology referring to regulatory provisions, internal regulations and existing practices.

The Bank periodically reviews the methodology used in risk measurement, as well as the suitability of the limits set with the risk appetite determined by the Bank, changes in the business environment and market conditions and regulatory provisions.

Pemantauan Risiko

Pemantauan risiko dilakukan dengan membandingkan limit risiko dengan eksposur risiko yang dihadapi. Hasil pemantauan risiko dapat digunakan sebagai salah satu bahan dalam pengambilan keputusan bisnis, menganalisis strategi pengelolaan risiko selanjutnya serta tindakan pemulihan yang diperlukan.

Proses pemantauan risiko di Bank Muamalat Indonesia didukung oleh sistem pelaporan yang memadai. Sistem informasi yang tersedia minimal mencakup laporan atau informasi hal-hal sebagai berikut :

1. Eksposur risiko secara menyeluruh yang mencakup per jenis risiko dan per jenis kegiatan
2. Kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur serta penetapan limit yang telah disetujui
3. Realisasi pelaksanaan manajemen risiko dibandingkan dengan tujuan dan target yang ditetapkan.

Pengendalian Risiko

Pengendalian risiko bertujuan untuk memitigasi risiko ke tingkat yang masih dapat dikelola Bank. Pengendalian risiko dilakukan secara berkala untuk setiap jenis risiko yang dihadapi oleh Bank Muamalat Indonesia.

Salah satu strategi pengendalian risiko atau mitigasi yang dilakukan adalah dengan menentukan batasan/limit risiko, pembiayaan dengan *cover* garansi atau jaminan, penutupan asuransi, sekuritisasi aset (sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku dan prinsip syariah), dan penambahan modal Bank untuk menyerap potensi kerugian.

Sistem Informasi Manajemen Risiko

Sistem informasi manajemen risiko yang dimiliki oleh Bank Muamalat Indonesia salah satunya melalui laporan terkait eksposur risiko hasil dari pemantauan risiko.

Bank juga telah memiliki sistem informasi manajemen risiko antara lain dituangkan dalam laporan profil risiko, laporan Tingkat Kesehatan Bank berbasis risiko, laporan Penyediaan Modal Minimum sesuai profil risiko, laporan Pemantauan *Risk Appetite Statement*, laporan portfolio pembiayaan secara *bankwide* dan per segmen bisnis, laporan risiko operasional, Laporan Key Risk Indicator (LKRI) untuk risiko likuiditas, dan laporan-laporan lainnya. Laporan tersebut dapat dijadikan salah satu sumber untuk pengambilan keputusan bisnis.

Budaya Risiko

Untuk menerapakan manajemen risiko yang efektif dan efisien diperlukan budaya risiko agar nilai-nilai dan persepsi manajemen dan pegawai terhadap risiko sama dan sekaligus menjadi perekat yang dapat mempersatukan seluruh sumber daya manusia untuk meraih tujuan yang telah ditetapkan.

Salah satu program yang dilaksanakan di Bank Muamalat Indonesia terkait dengan penguatan budaya risiko adalah mengimplementasikan

Risk Monitoring

Risk monitoring is carried out considering the risk limit with risk exposure faced. The results of risk monitoring can be used as an ingredient in business decision making, analyzing further risk management strategies and required recovery actions.

The risk monitoring process at Bank Muamalat Indonesia is supported by an adequate reporting system. The minimum available information system includes reports or information on the following matters:

1. *Overall risk exposure which includes per type of risk and per type of activity;*
2. *Compliance with policies and procedures as well as the establishment of agreed limits;*
3. *Realization of the implementation of risk management compared to the objectives and targets set.*

Risk Control

Risk control aims to mitigate risk to a level that can still be managed by the Bank. Risk control is carried out regularly for each type of risk faced by Bank Muamalat Indonesia.

One of the risk control or mitigation strategies undertaken is to determine risk limits, financing with cover guarantees or guarantees, insurance closures, asset securitization (in accordance with applicable laws and Islamic principles), and additional Bank capital to absorb potential losses.

Risk Management Information System

One of the risk management information systems owned by Muamalat Indonesia is through a report related to risk exposure resulting from risk monitoring.

The Bank also has a risk management information system, which is included in the risk profile report, the Bank based Soundness Level report, the Minimum Capital Provision report in accordance with the risk profile, the Risk Appetite Statement Monitoring report, the bank-wide and per-segment financing portfolio report, operational risk report, Key Risk Indicator Report (LKRI) for liquidity risk, and other reports. The report can be used as a source for business decision making.

Risk Culture

To implement effective and efficient risk management, a culture of risk is needed so that the values and perceptions of management and employees of the same risk and at the same time become an adhesive that can unite all human resources to achieve the goals set.

One of the programs implemented at Bank Muamalat Indonesia related to strengthening the risk culture is to implement the

Operational Risk Champion (ORION), yakni penunjukkan seorang penanggung jawab dalam setiap unit kerja sebagai *risk taking unit* (RTU) untuk memantau isu-isu risiko, terutama pada aspek risiko operasional yang terjadi di RTU mereka masing-masing.

Secara berkala, Bank Muamalat Indonesia menyelenggarakan Operational Risk Forum sehingga isu-isu risiko yang ada di tiap RTU dapat diinformasikan dan kemudian ditindaklanjuti sebagai bagian dari perbaikan penerapan manajemen risiko Bank.

Beberapa hal positif yang berhasil dibangun terkait budaya risiko Bank di tahun 2019 adalah terbangunnya kesadaran dari tiap individu dalam melakukan pelaporan atas kejadian risiko operasional, yang sebelumnya masih belum cukup terbangun. Laporan insiden risiko operasional ini tentunya akan sangat membantu bagi Bank dalam melakukan analisis terhadap akar permasalahan yang signifikan atau berulang dari tiap kejadian operasional yang timbul.

Risk Appetite Statement (RAS)

Pada tahun 2019, Bank Muamalat Indonesia menetapkan kembali *Risk Appetite Statement* (RAS) sebagai salah satu bentuk pengendalian risiko terhadap risiko-risiko utama yang dihadapi oleh Bank. RAS adalah tingkat dan jenis risiko yang bersedia diambil oleh Bank dalam rangka mencapai sasaran Bank.

RAS ditentukan sejalan dengan proses perencanaan bisnis dan strategi tahunan, untuk memastikan kesesuaian antara strategi, pertumbuhan, rencana operasional, permodalan dan risiko. Penyusunan RAS dilakukan melalui inisiasi dari unit kerja manajemen risiko dan proses diskusi yang dilakukan bersama unit kerja terkait dan memperoleh persetujuan Direksi.

Bank Muamalat Indonesia memiliki sejumlah parameter dalam RAS yang mencakup permodalan, rentabilitas, risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas dan risiko operasional, di mana *range* dari setiap parameter dari *risk appetite* tersebut dikaji minimal satu tahun sekali atau terdapat perubahan bisnis. Hal ini sejalan dengan POJK No. 65/POJK.03/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah khususnya penerapan manajemen risiko pada pilar 2.

IV. Penilaian Profil Risiko

Sesuai dengan ketentuan POJK No. 65/ POJK.03/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Bank Muamalat Indonesia melakukan penilaian atas profil risiko secara individu dan juga secara konsolidasi

Operational Risk Champion (ORION), namely the appointment of a person in charge in each work unit as a risk-taking unit (RTU) to monitor risk issues, especially in aspects of operational risk that happened in their respective RTU.

Periodically, Bank Muamalat Indonesia organizes the Operational Risk Forum so that risk issues in each RTU can be informed and then followed up as part of improving the implementation of the Bank's risk management.

Some positive things that have been successfully built related to the Bank's risk culture in 2019 are the awakening of awareness from each individual in reporting operational risk events, which had not yet been sufficiently developed. This operational risk incident report will certainly be very helpful for the Bank in conducting an analysis of the significant or recurring root problems of each operational event that arises.

Risk Appetite Statement (RAS)

In 2019, Bank Muamalat Indonesia re-established the Risk Appetite Statement (RAS) as one form of risk control over the main risks faced by the Bank. RAS is the level and type of risk that the Bank is willing to take in order to achieve the Bank's goals.

The RAS is determined in line with the annual business planning and strategy process, to ensure compatibility between strategy, growth, operational plans, capital and risk. The preparation of the RAS is carried out through the initiation of a risk management work unit and the discussion process that is carried out with the relevant work units and obtains Board of Directors approval.

Bank Muamalat Indonesia has a number of parameters in the RAS that include capital, profitability, credit risk, market risk, liquidity risk and operational risk, where the range of each parameter of risk appetite is reviewed at least once a year or there are business changes. This is in line with POJK No. 65/POJK.03/2016 dated on December 23, 2016, concerning the Implementation of Risk Management for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units in particular the application of risk management in pillar 2.

IV.Risk Profile Assessment

According to the provisions of POJK No. 65/POJK.03/2016 dated December 28, 2016 regarding Applied Risk Management for Sharia Commercial Bank and Sharia Business Unit, Bank Muamalat Indonesia makes a risk profile assessment individually and consolidation with

dengan perusahaan anak (PT Al Ijarah Indonesia Finance (ALIF), dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara berkala.

Penilaian profil risiko Bank Muamalat Indonesia secara individu dan juga secara konsolidasi dengan perusahaan anak menggambarkan risiko yang melekat dalam kegiatan bisnis Bank Muamalat Indonesia (risiko inheren) dan KPMR yang mencerminkan sistem pengendalian risiko untuk masing-masing jenis risiko. Penilaian profil risiko Bank Muamalat Indonesia telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari OJK.

Bank telah melakukan beberapa upaya perbaikan untuk meningkatkan KPMR guna memperbaiki profil risiko Bank, sebagai berikut :

1. Direksi dan Dewan Komisaris beserta komite yang dibentuk pada level Direksi dan Dewan Komisaris, serta Dewan Pengawas Syariah (DPS) telah menjalankan peran aktif dalam memperkuat tata kelola manajemen risiko. Di tahun 2019 ini Komite Pemantau Risiko mengadakan rapat secara berkala dengan Direksi dan unit kerja terkait untuk membahas isu-isu terkini, dengan bahasan yang telah dilakukan di tahun 2019 ini antara lain:
   a. Tingkat kesehatan Bank;
   b. Inisiatif perbaikan pengelolaan risiko,
   c. *Review* kinerja pembiayaan segmen Retail,
   d. Perkembangan proyek *Financing Origination System* (FOS) dan proyek untuk perbaikan kualitas data;
   e. Perkembangan kasus-kasus dari nasabah pembiayaan;
   f. Perkembangan kinerja di *new bank* dan *bad bank*, termasuk penyelesaian pembiayaan bermasalah;
   g. Perkembangan proyek ORION.

Di tahun 2019, Komite Manajemen Risiko telah menyelenggarakan rapat dalam rangka membahas isu-isu yang terkait manajemen risiko dan memberikan rekomendasi atas perbaikan dan juga arahan yang perlu dilakukan. Beberapa isu atau topik yang telah dibahas dalam rapat Komite Manajemen Risiko, antara lain mencakup:

a. Kajian atas kinerja portofolio pembiayaan Bank secara *bankwide* dan segmen Retail;
b. Kajian atas portofolio sektor ekonomi tertentu yang banyak dibiayai Bank;
c. Tingkat kesehatan Bank dalam bentuk *Risk Based Bank Rating* (RBBR) per periode laporan dan tindakan perbaikan atas Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) yang telah dilakukan;
d. Kajian atas annalisis *watchlist* pembiayaan segmen Corporate;
e. Penyempurnaan Kebijakan Umum Pembiayaan;
f. Kejadian risiko operasional dan tindak lanjut atas kejadian risiko operasional;
g. *Key Risk Indicator* (KRI);

subsidiaries (PT Al Ijarah Indonesia Finance (ALIF)), and it is reported to the Financial Service Authority (OJK) periodically.

Risk profile assessment of Bank Muamalat Indonesia individually and in consolidation with subsidiaries illustrates risks included in business activity of Bank Muamalat Indonesia (inherent risk) and risk management applicatioin quality reflecting risk control system for each risk type. The risk profile assessment of Bank Muamalat Indonesia has been made in accordance with the prevailing provisions of the Financial Service Authority.

The Bank has made several remedial efforts to improve the KPMR to improve the Bank's risk profile, as follows

1. *The Board of Directors and Board of Commissioners along with committees formed at the level of the Board of Directors and Board of Commissioners, as well as the Sharia Supervisory Board (DPS) have played an active role in strengthening risk management governance. In 2019, the Risk Monitoring Committee will hold regular meetings with the Directors and related work units to discuss current issues, with discussions that have been carried out in 2019, including:*
   a. Risk-Based Rating;
   b. Initiatives to improve risk management;
   c. Review of Retail segment financing performance;
   d. Development of the Financing Origination System (FOS) project and projects to improve data quality;
   e. Development of cases from financing customers;
   f. Performance development in new banks and bad banks, including the settlement of problem financing;
   g. Development of the ORION project.

In 2019, the Risk Management Committee held a meeting in order to discuss issues related to risk management and provide recommendations for improvements and directives that need to be done. Several issues or topics that have been discussed in the Risk Management Committee meetings include:

a. Study on the performance of the Bank's financing portfolio in a bankwide and retail segment;
b. Study of certain economic sector portfolios that are mostly financed by the Bank;
c. The risk-based rating in the form of a Risk Based Bank Rating (RBBR) per reporting period and corrective actions for the Quality of Risk Management Implementation (KPMR) that have been carried out;
d. Review of Corporate segment financing watchlist analysis;
e. Improvement of the General Financing Policy;
f. Operational risk events and follow-up to operational risk events;
g. Key Risk Indicator (KRI);

h. Penyusunan kebijakan, strategi, pengelolaan dan pedoman manajemen risiko;
i. Penetapan kebijakan dan pengelolaan risiko pembiayaan untuk menciptakan kualitas portofolio pembiayaan yang sehat dan *profitable*.

h. Formulate policies, strategies, management and risk management guidelines;
i. Determination of financing policies and risk management to create a healthy and profitable portfolio quality financing.

Pembahasan dalam rapat DPS selama tahun 2019 meliputi antara lain*Discussions at the DPS meeting during 2019 included:*

a. Produk dan program pembiayaan dan dana serta aktivitas Bank yang membutuhkan opini DPS;
b. Laporan-laporan yang perlu disampaikan kepada DPS, termasuk laporan Tingkat Kesehatan Bank.

a. Funding products and programs and funds as well as Bank activities that require DPS opinion;
b. Reports that need to be submitted to DPS, including the Bank Soundness Report.

2. Risiko Kredit

Bank telah banyak melakukan beberapa upaya perbaikan pada aktivitas pembiayaan, namun upaya-upaya tersebut tidak secara langsung mempengaruhi perbaikan kualitas pembiayaan Bank saat ini. Beberapa perbaikan yang telah dilakukan oleh Bank dalam memperbaiki profil risiko kredit, antara lain adalah sebagai berikut:

a. Melaksanakan pengelolaan *bad bank* untuk segmen Wholesale oleh unit kerja Special Asset Management (SAM) dan segmen Retail oleh Retail Collection Management yang terpisah dari unit bisnis yang mengelola *good bank*. Fungsi *financing risk* untuk *bad bank* dilaksanakan oleh unit Financing Workout Risk (FWR) yang independen dari bisnis di bawah supervisi Risk Director;
b. Melaksanakan pengelolaan *good bank* dan *new bank* oleh unit kerja bisnis di segmen Wholesale dan Retail. Fungsi *financing risk* untuk *good bank* dan *new bank* dilaksanakan oleh unit Corporate Financing Risk (CFR) dan Retail Financing Risk (RFR) yang independen dari bisnis di bawah supervisi Risk Director;
c. Menyempurnakan Kebijakan Umum Pembiayaan diperbaharui dan diterbitkan tahun 2019 dan melakukan penyempurnaan ketentuan pembiayaan untuk pembiayaan *good bank* dan *bad bank*;
d. Menyempurnakan proses pembiayaan secara *end-to-end* baik pada segmen Corporate dan Commercial serta Retail. Pada segmen pembiayaan Retail dikembangkan Financing Origination System (FOS) yang telah *live* untuk fase 1 sejak Agustus 2019, saat ini dalam proses *review* dan pengembangan untuk fase 2;
e. Menyempurnakan dan memperkuat proses pemantauan pembiayaan, antara lain melalui implementasi nasabah *watchlist* yang telah berjalan pada tahun 2019 untuk segmen Corporate dan Commercial, serta dalam proses pengembangan untuk segmen Retail. Dengan melakukan proses pemantauan, beberapa pembiayaan kepada group dan nasabah individu yang besar dapat diturunkan sehingga menurunkan risiko konsentrasi pembiayaan;
f. Menetapkan limit kewenangan memutus pembiayaan, yaitu dilakukan oleh Komite Pembiayaan dengan fungsi bisnis

2. Credit Risk

The Bank has made many efforts to improve financing activities, but these efforts do not directly affect the improvement of the Bank's financing quality at this time. Some of the improvements made by the Bank in improving the credit risk profile include the following:

a. Carry out bad bank management for the Wholesale segment by the Special Asset Management (SAM) work unit and the Retail segment by the Retail Collection Management which is separate from the business units that manage the good bank. The financing risk function for bad banks is carried out by the Financing Workout Risk (FWR) unit that is independent of the business under the supervision of the Risk Director;
b. Implement good bank and new bank management by business units in the Wholesale and Retail segments. The financing risk function for good banks and new banks is carried out by the Corporate Financing Risk (CFR) and Retail Financing Risk (RFR) units that are independent of the business under the supervision of the Risk Director;
c. Improve the general financing policy updated and issued in 2019 and make improvements to the financing provisions for financing good banks and bad banks;
d. Improve end-to-end financing processes in both the Corporate and Commercial and Retail segments. In the Retail financing segment, Financing Origination System (FOS) has been developed which has been live for phase 1 since August 2019, currently under review and development for phase 2;
e. Improve and strengthen the financing monitoring process, including through the implementation of a customer watchlist that has been running in 2019 for the Corporate and Commercial segments, as well as in the development process for the Retail segment. By conducting a monitoring process, some financing to large groups and individual customers can be reduced thereby reducing the risk of financing concentration;
f. Set limits on the authority to decide on financing, which is carried out by the Financing Committee with the business

dan fungsi *financing risk* menjadi anggota dan memiliki kewenangan memutus pembiayaan *(voting right)*;

g. Melakukan kajian atas permasalahan di pembiayaan segmen Retail sebagai *lesson learned* untuk perbaikan proses pembiayaan segmen Retail secara *end-to-end*;

h. Melakukan perbaikan kompetensi sumber daya manusia terkait pembiayaan.

i. Melakukan sistem pengendalian risiko dalam bentuk bentuk kaji ulang atas metode, asumsi dan variabel terkait dengan risiko kredit dan dilakukan oleh oleh unit kerja manajemen risiko, antara lain dalam bentuk kaji ulang atas *Target Market* dan *Risk Acceptance Criteria* (TMRAC), *Financing Allocation Limit* (FAL), pengukuran *stress test* portofolio pembiayaan, limit kewenangan memutus pembiayaan, penilaian kinerja portofolio pembiayaan, produk dan program pembiayaan unit bisnis terkait serta perbaikan atas penentuan parameter risiko kredit sebagai bagian dari penilaian Tingkat Kesehatan Bank.

function and financing risk function as a member and have the authority to decide on financing (voting right);

g. Reviewing issues in Retail segment financing as a lesson learned for end-to-end improvement of the Retail segment financing process;

h. Improve human resource competencies related to financing.

i. Perform a risk control system in the form of a review of methods, assumptions and variables related to credit risk and is carried out by the risk management work unit, among others in the form of a review of the Target Market and Risk Acceptance Criteria (TMRAC), Financing Allocation Limit (FAL) measurement of financing portfolio stress tests, authority to decide on financing arrangements, assessment of the performance of the financing portfolio, products and related business unit financing programs as well as improvements to the determination of credit risk parameters as part of the Bank's Risk-Based Rating.

Tabel 1.1. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah
Tabel 1.1. Individual Disclosure of Net Claims by Region

Dalam jutaan Rupiah
In million Rupiah

No.	Kategori Portofolio *Portfolio Categories*	31 Desember 2019 *December 31, 2019* Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah *Net Claim by Region*					
		Jabodetabek *Greater Jakarta*	Jawa *Java*	Sumatera *Sumatera*	Kalimantan *Borneo*	Lainnya *Others*	Jumlah *Total*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)
1.	Tagihan kepada Pemerintah *Claim to The Government*	5.786.550	28	-	-	70	5.786.648
2.	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik *Claim to Public Sector Entities*	-	141.035	111.561	-	-	252.596
3.	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional *Claim to The Multilateral Development Banks and International Institutions*	-	-	-	-	-	-
4.	Tagihan kepada Bank *Claim to The Bank*	536.349	111.976	16.684	-	118.883	783.892
5.	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal *Residential Mortgage Loans*	2.996.118	1.424.277	786.979	437.062	411.300	6.055.737
6.	Pembiayaan Beragun Properti Komersial *Commercial Property Mortgage Loans*	21.700	11.794	13.330	8.256	9.014	64.094
7.	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan *Retired Employee Credit*	48.612	28.551	13.932	9.133	13.877	114.106
8.	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel *Claim to Micro, Small dan Retail Portfolio*	3.076.952	1.956.048	571.146	248.024	266.777	6.118.947
9.	Tagihan kepada Korporasi *Claim to Corporate*	21.030.452	3.011.384	511.844	106.880	712.898	25.373.458
10.	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo *Claim on Past Due*	18	(0)	(0)	-	-	18
11.	Aset Lainnya *Others Asset*	6.067.298	-	-	-	-	6.067.298
	Jumlah *Total*	39.564.049	6.685.092	2.025.476	809.356	1.532.821	50.616.794

Tabel 1.2. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak
Table 1.2. Disclosure of Net Claims Based Remaining Contract Term

Dalam jutaan Rupiah
In million Rupiah

No.	Kategori Portofolio *Portfolio Categories*	31 Desember 2019 *December 31, 2019* Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak *Net Claims Based Remaining Contract Term*					
		< 1 tahun *< 1 year*	>1 thn s.d. 3 thn *> 1 year until 3 years*	>3 thn s.d. 5 thn *> 3 year until 5 years*	> 5 thn *> 5 years*	Non-Kontraktual *Non-Contractual*	Total *Total*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Tagihan kepada Pemerintah *Claim to The Government*	598.865	79.706	117.454	2.787.127	2.203.496	5.786.648
2.	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik *Claim to Public Sector Entities*	133.653	109.808	-	8.417	719	252.596
3.	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional *Claim to The Multilateral Development Banks and International Institutions*	-	-	-	-	-	-
4.	Tagihan kepada Bank *Claim to The Bank*	250.347	72.171	51.606	28.081	381.687	783.892
5.	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal *Residential Mortgage Loans*	47.368	391.949	981.576	4.629.015	5.829	6.055.737
6.	Pembiayaan Beragun Properti Komersial *Commercial Property Mortgage Loans*	540	5.460	28.316	29.683	95	64.094
7.	Pembiayaan Pegawai/ Pensiunan *Retired Employee Credit*	24.981	20.316	29.347	39.374	89	114.106
8.	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel *Claim to Micro, Small and Retail Portfolio*	794.900	1.177.527	886.198	3.098.414	161.908	6.118.947
9.	Tagihan kepada Korporasi *Claim to Corporate*	7.783.357	3.680.091	2.241.266	11.229.362	439.382	25.373.458
10.	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo *Claim on Past Due*	-	18	-	-	(0)	18
11.	Aset Lainnya *Others Asset*	-	-	-	-	6.067.298	6.067.298
	Total	9.634.010	5.537.046	4.335.764	21.849.472	9.260.502	50.616.794

Tabel 1.3. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi
Table 1.3. Disclosure of Net Claims by Economic Sector

No.	Sektor Ekonomi *Economic Sectors*	Tagihan kepada Pemerintah *Claim to The Government*	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik *Claim to Public Sector Entities*	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional *Claim to The Multilateral Development Banks and International Institutions*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
31 Desember 2019 *December 31, 2019*				
1.	Pertanian, Perburuan dan Kehutanan *Agriculture, Hunting and Forestry*	-	76.929	
2.	Perikanan *Fisheries*	-	-	
3.	Pertambangan dan Penggalian *Mining and Quarrying*	-	-	
4.	Industri Pengolahan *Manufacturing Industry*	-	-	
5.	Listrik, Gas dan Air *Electricity, Gas and Water*	-	111.286	
6.	Konstruksi *Construction*	-	-	
7.	Perdagangan Besar dan Eceran *Wholesale and Retail Trade*	-	-	
8.	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum *Accommodation Providers and Food and Beverage Providers*	-	-	
9.	Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi *Transportation, Storage and Communication*	-	-	
10.	Perantara Keuangan *Financial Brokers*	-	-	
11.	Real Estate, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan *Real Estate, Rental Business, and Corporate Services*	-	-	
12.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib *Public Administration, Defense nd Compulsory Social Security*	-	-	
13.	Jasa Pendidikan *Education Services*	-	8.142	
14.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial *Health Services and Social Activities*	-	-	
15.	Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan Lainnya *Social Services, Socio-Cultural, Entertainment and Other Individual*	-	-	
16.	Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga *Households Personal Services*	-	-	
17.	Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya *International and Extra International Agencies*	-	-	
18.	Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya *Undefined Activities*	-	-	
19.	Bukan Lapangan Usaha *Not a Business Field*	-	275	
20.	Lainnya *Others*	5.786.648	55.964	
	Total	5.786.648	252.596	-

Dalam jutaan Rupiah
In million Rupiah

Tagihan kepada Bank *Claim to The Bank*	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal *Residential Mortgage Loans*	Pembiayaan Beragun Properti Komersial *Commercial Property Mortgage Loans*	Pembiayaan Pegawai Pensiunan *Retired Employee Credit*	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel *Claim to Micro, Small dan Retail Portfolio*	Tagihan kepada Korporasi *Claim to Corporate*	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo *Claim on Past Due*	Aset Lainnya *Others Asset*
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
-	-	-	-	481.184	540.418	-	-
-	-	-	-	2.843	325.382	-	-
-	-	-	-	47.031	1.208.821	-	-
-	-	-	-	120.671	3.809.839	-	-
-	-	-	-	23.672	1.745.890	-	-
-	-	-	-	199.245	2.081.520	-	-
-	-	-	-	385.445	4.055.188	-	-
-	-	-	-	20.034	88.465	-	-
-	-	-	-	105.481	1.115.980	-	-
576.305	-	-	-	751.829	661.726	-	-
-	-	-	-	728.708	979.330	-	-
-	-	-	-	1.072	-	-	-
-	-	-	-	402.841	117.240	-	-
-	-	-	-	132.358	1.801	-	-
-	-	-	-	1.724.898	327.737	-	-
-	-	-	-	469	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	28.156	-	-	-
-	6.055.737	64.094	114.106	961.847	-	18	-
207.587	-	-	-	1.163	8.314.121	-	6.067.298
783.892	6.055.737	64.094	114.106	6.118.947	25.373.458	18	6.067.298

Tabel 1.4. Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Wilayah
Table 1.4. Disclosure of Bills and Allowance By Region

Dalam jutaan Rupiah
In million Rupiah

No.	Keterangan *Information*	31 Desember 2019 *December 31, 2019* Wilayah *Region*					
		Jabodetabek *Greater Jakarta*	Jawa *Java*	Sumatera *Sumatera*	Kalimantan *Borneo*	Lainnya *Others*	Total *Total*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(10)
1.	Tagihan *Claims*	38.830.211	6.857.608	2.044.007	813.590	1.500.063	50.045.479
2.	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai (Impaired) *Impaired Claims*	419.595	163.169	98.873	-	-	681.638
	a. Belum Jatuh Tempo *a. Not Past Due Yet*	38.306.167	6.605.537	1.945.090	768.090	1.472.438	49.097.322
	b. Telah Jatuh Tempo *b. Past Due*	524.044	252.071	98.916	45.500	27.626	948.157
3.	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - Individual *Provision for Possible Losses – Individual*	119.386	97.463	8.813	-	-	225.662
4.	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - Kolektif *Provision for Possible Losses - Collective*	169.401	59.410	18.724	6.808	11.030	265.373
5.	Tagihan yang Dihapus Buku *Written-Off Claims*	789.654	98.508	537.413	44.135	62.866	1.532.576

Tabel 1.5. Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Sektor Ekonomi
Table 1.5. Disclosure of Claims and Allowance by Economic Sector

Dalam jutaan Rupiah
In million Rupiah

No.	Sektor Ekonomi *Economic Sector*	Tagihan *Claim*	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai *Impaired Claims*		Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Individual *Provision for Possible Losses – Individual*	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Kolektif *Provision for Possible Losses - Collective*	Tagihan yang hapus buku *Written-Off Claims*
			Belum Jatuh Tempo *Not Past Due Yet*	Telah Jatuh Tempo *Past Due*			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			31-Dec-19				
1.	Pertanian, Perburuan dan Kehutanan *Agriculture, Hunting and Forestry*	1.110.361	1.061.589	48.773	8.281	10.143	-
2.	Perikanan *Fisheries*	330.130	330.130	-	-	3.156	-
3.	Pertambangan dan Penggalian *Mining and Quarrying*	1.262.937	1.258.247	4.690	22.396	8.137	-
4.	Industri Pengolahan *Manufacturing Industry*	4.069.177	3.828.007	241.170	98.002	46.238	2.657
5.	Listrik, Gas dan Air *Electricity, Gas and Water*	1.896.626	1.896.626	-	-	12.040	-
6.	Konstruksi *Construction*	2.298.052	2.227.388	70.664	697	20.606	-
7.	Perdagangan Besar dan Eceran *Wholesale and Retail Trade*	4.525.574	4.322.571	203.003	56.615	32.250	-
8.	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum *Accommodation Providers and Food and Beverage Providers*	109.129	108.731	397	-	1.167	-
9.	Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi *Transportation, Storage, and Communication*	1.270.242	1.238.156	32.085	38.772	9.741	-
10	Perantara Keuangan *Financial Brokers*	1.987.286	1.983.192	4.094	-	15.655	-
11	Real Estate, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan *Real Estate, Rental Business, and Corporate Services*	1.714.016	1.712.855	1.161	-	6.752	-
12	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib *Public Administration, Defense and Compulsory Social Security*	1.073	1.073	-	-	8	-
13	Jasa Pendidikan *Education Services*	529.392	529.353	39	-	4.644	-
14	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial *Health Services and Social Activities*	134.199	133.379	820	-	1.273	-
15	Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan Lainnya *Social Services, Socio-Cultural, Entertainment and Other Individual*	2.059.340	1.910.269	149.071	900	16.785	4.156
16	Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga *Households Personal Services*	469	469	-	-	1	-
17	Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya *International and Extra International Agencies*	-	-	-	-	-	-

Tabel 1.5. Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Sektor Ekonomi
Table 1.5. Disclosure of Claims and Allowance by Economic Sector

Dalam jutaan Rupiah
In million Rupiah

No.	Sektor Ekonomi *Economic Sector*	Tagihan *Claim*	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai *Impaired Claims*		Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Individual *Provision for Possible Losses – Individual*	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Kolektif *Provision for Possible Losses - Collective*	Tagihan yang hapus buku *Written-Off Claims*
			Belum Jatuh Tempo *Not Past Due Yet*	Telah Jatuh Tempo *Past Due*			
18.	Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya *Undefined Activities*	28.163	28.101	62	-	277	-
19.	Bukan Lapangan Usaha *Not a Business Field*	7.202.173	7.010.045	192.128	-	61.736	601.831
20.	Lainnya *Others*	19.517.141	19.517.141	-	-	14.764	923.932
	Total	50.045.479	49.097.322	948.157	225.662	265.373	1.532.576

Tabel 1.6. Pengungkapan Rincian Mutasi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai
Table 1.6 Disclosure of Provision of Possible Losses Mutation Details

Dalam jutaan Rupiah
In million Rupiah

No.	Keterangan *Information*	31-Dec-19	
		CKPN Individual *Provision of Possible Losses - Individual*	CKPN Kolektif *Provision of Possible Losses - Collective*
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Saldo Awal CKPN *Provision of Possible Losses Beginning Balance*	312.795.738	772.687.968
2.	Pembentukan (Pemulihan) CKPN pada Periode Berjalan (Net) *Provisions (Reversal of Provisions) of Possible Losses in Current Year*	19.318	(521.759)
	2.a Pembentukan CKPN pada Periode Berjalan *Provisions of Possible Losses in Current Year*	19.852	-
	2.b Pemulihan CKPN pada Periode Berjalan *Reversal of Provisions of Possible Losses in Current Year*	(534)	(521.759)
3.	CKPN yang Digunakan untuk Melakukan Hapus Buku atas Tagihan pada Periode Berjalan *Provisions of Possible Losses that used for Write-off in Current Year*	(292)	(1.284)
4.	Pembentukan (Pemulihan) Lainnya pada Periode Berjalan *Other Provisions (Other Reversal of Provisions) in Current Year*	25.830	(475.911)
Saldo Akhir CKPN *Provision of Possible Losses Ending Balance*		312.840.593	771.689.014

Pengungkapan Mitigasi Risiko Kredit dengan Pendekatan Standar

Sesuai dengan POJK terkait perhitungan ATMR untuk risiko kredit yang disebutkan sebelumnya, Bank Muamalat Indonesia juga mengakui keberadaan agunan, garansi, penjaminan atau asuransi kredit sebagai teknik mitigasi risiko kredit (MRK). Bank Muamalat Indonesia menggunakan Teknik MRK-Agunan dengan pendekatan sederhana (simple approach) untuk sebagian besar portofolionya, dimana jenis agunan keuangan yang diakui (eligible financial collateral) dalam Teknik MRK Agunan mengacu kepada ketentuan terkait dari OJK.

Tabel 1.7. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Kategori Portofolio dan Skala Peringkat
Table 1.7 Disclosure of Net Claims by Portfolio Category and Rating Scale

31 Dec 2019

No.	Kategori Portofolio/ *Portfolio Categories*	Lembaga Pemeringkat *Rating Agencies*	Peringkat Jangka Panjang *Long-term Rating*			
		Standard and Poor's	AAA	AA+ s.d AA-	A+ s.d A-	BBB+ s.d BBB-
		Fitch Rating	AAA	AA+ s.d AA-	A+ s.d A-	BBB+ s.d BBB-
		Moody's	Aaa	Aa1 s.d Aa3	A1 s.d A3	Baa1 s.d Baa3
		PT Fitch Ratings Indonesia	AAA (idn)	AA+(idn) s.d AA-(idn)	A+(idn) s.d. A-(idn)	BBB+(idn) s.d BBB-(idn)
		PT ICRA Indonesia	[Idr]AAA	[Idr]AA+ s.d [Idr]AA-	[Idr]A+ s.d [Idr]A-	[Idr]BBB+ s.d [Idr]BBB-
		PT Pemeringkat Efek Indonesia	idAAA	idAA+ s.d idAA-	idA+ s.d id A-	id BBB+ s.d id BBB-
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Tagihan kepada Pemerintah *Claim to The Government*		-	-	-	-
2.	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik *Claim to Public Sector Entities*		-	-	-	55.964
3.	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional *Claim to The Multilateral Development Banks and International Institutions*					
4.	Tagihan kepada Bank *Claim to The Bank*		47.403	2.078	13.659	-
5.	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal *Residential Mortgage Loans*		-	-	-	-
6.	Pembiayaan Beragun Properti Komersial *Commercial Property Mortgage Loans*		-	-	-	-
7.	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan *Retired Employee Credit*		-	-	-	-
8.	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel *Claim to Micro, Small dan Retail Portfolio*		-	-	-	356.345
9.	Tagihan kepada Korporasi *Claim to Corporate*		-	-	123.720	536.272
10.	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo *Claim on Past Due*		-	-	-	-
11.	Aset Lainnya *Others Asset*		-	-	-	-
	TOTAL		47.403	2.078	137.379	948.581

Disclosure of Credit Risk Mitigation with Standard Approach

In accordance with POJK related to calculation of RWA for credit risk mentioned earlier, Bank Muamalat Indonesia also acknowledged the existence of collateral, guarantees, guarantees or credit insurance as a credit risk mitigation (MRK) technique. Bank Muamalat Indonesia using the MRK-Collateral technique with a simple approach (simple approach) for most portfolios, which type recognized financial collateral (eligible financial collateral) in The Collateral MRK technique refers to the relevant provisions of the OJK.

Dalam jutaan Rupiah
In million Rupiah

Tagihan Bersih *Net Claims*			Peringkat Jangka Pendek *Long-term Rating*					
BB+ s.d BB-	B+ s.d B-	Kurang dari B-	A-1	A-2	A-3	Kurang dari A-3 *Less than A-3*		
BB+ s.d BB-	B+ s.d B-	Kurang dari B-	F1+ s.d F1	F2	F3	Kurang dari F3 *Less than F3*		
Ba1 s.d Ba3	B1 s.d B3	Kurang dari B3	P-1	P-2	P-3	Kurang dari P-3 *Less than P-3*		
BB+(idn) s.d BB-(idn)	B+(idn) s.d B-(idn)	Kurang dari B-(idn)	F1+(idn) s.d F1(idn)	F2(idn)	F3(idn)	Kurang dari F3(idn) *Less than F3(idn)*	Tanpa Peringkat *Non Rated*	Total
[Idr]BB+ s.d [Idr]BB-	[Idr]B+ s.d [Idr]B-	Kurang dari [Idr]B-	[Idr]A1+ s.d [Idr]A1	[Idr]A2+ s.d [Idr]A2	[Idr]A3+ s.d [Idr] A3	Kurang dari [Idr] A3 *Less than [Idr]A3*		
id BB+ s.d id BB-	id B+ s.d id B-	Kurang dari idB-	idA1	idA2	idA3 s.d id A4	Kurang dari idA4 *Less than idA4*		
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
-	-	-	-	-	-	-	5.786.648	5.786.648
-	-	-	-	-	-	-	196.632	252.596
								-
-	-	-	-	-	-	-	720.751	783.892
-	-	-	-	-	-	-	6.055.737	6.055.737
-	-	-	-	-	-	-	64.094	64.094
-	-	-	-	-	-	-	114.106	114.106
-	-	-	-	-	-	-	5.762.602	6.118.947
-	-	-	-	-	-	-	24.713.465	25.373.458
-	-	-	-	-	-	-	18	18
-	-	-	-	-	-	-	6.067.298	6.067.298
-	-	-	-	-	-	-	49.481.352	50.616.794

Tabel 1.8.a. Pengungkapan Risiko Kredit Pihak Lawan: Transaksi Derivatif
Table 1.8 a. Disclosure of Counterparty Credit Risk: Derivative Transactions

Dalam jutaan Rupiah
In million Rupiah

No.	Variabel yang Mendasari *Underlying Variables*	31-Dec-19							
		Notional Amount			Tagihan Derivatif *Derivative Claim*	Kewajiban Derivatif *Derivative Liabilties*	Tagihan Bersih sebelum MRK *Net Claim before CRM*	*MRK/ CRM*	Tagihan Bersih setelah MRK *Net Claim after CRM*
		< 1 Tahun *< 1 Year*	> 1 Tahun - < 5 Tahun *> 1 Year - < 5 Years*	> 5 Tahun *> 5 Years*					
1.	Shariah Compliant Profit Rate Swap								-
2.	Shariah Compliant Foreign Currency Swap	389.162	442.606	-	4.595	814	30.617	-	30.617
3.	Lainnya *Others*								-
	TOTAL	389.162	442.606	-	4.595	814	30.617	-	30.617

Tabel 1.8.b. Pengungkapan Risiko Kredit Pihak Lawan: Transaksi Repo
Table 1.8 b Disclosure of Counterparty Credit Risk

Dalam jutaan Rupiah
In million Rupiah

No.	Kategori Portofolio *Portfolio Category*	31-Dec-19			
		Nilai Wajar SSB Repo *Fair Value of SSB Repo*	Kewajiban Repo *Obligatory Repo*	Tagihan Bersih *Net Charges*	ATMR
1.	Tagihan kepada Pemerintah *Claims to Government*	1.300.000	1.352.033	1.300.000	-
2.	Tagihan kepada Entitas Publik *Bill on Public Entity*	-	-	-	-
3.	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional *Bill on Development Bank Multilateral and International Institutions*	-	-	-	-
4.	Tagihan kepada Bank *Bill to the Bank*	-	-	-	-
5.	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel *Bill on Micro Business, Enterprises Small and Retail Portfolio*	-	-	-	-
6.	Tagihan kepada Korporasi *Corporate Bill*	-	-	-	-
	TOTAL	1.300.000	1.352.033	1.300.000	-

3. Risiko Pasar

Bank menilai bahwa eksposur risiko pasar yang dihadapi oleh Bank tidaklah signifikan, karena jumlah aset Bank dalam bentuk *trading* masih relatif kecil dan Bank selalu menjaga Posisi Devisa Neto (PDN) di bawah ketentuan yang diatur oleh regulator, yaitu 2% dari modal Bank.

Meskipun eksposur Bank pada risiko pasar tidak signifikan, Bank tetap menjalankan aktivitas manajemen risiko sebagaimana mestinya. Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan KPMR risiko pasar, antara lain:

a. Unit kerja Manajemen Risiko melaksanakan fungsi sebagai *middle office* dalam transaksi pasar yang salah satu tanggung jawabnya adalah mengusulkan kepada Direksi penetapan limit *dealer* secara berjenjang sesuai dengan unit kerja dan jenjang jabatan masing-masing *dealer*. Penetapan limit kepada individu *dealer* ditetapkan oleh Head of Global Market dengan mempertimbangkan pengalaman dan kompetensi *dealer;*
b. Secara berkelanjutan melakukan perbaikan atas prosedur manajemen risiko pasar, melalui proses pemantauan dan pengukuran risiko pasar temasuk limit pada aplikasi Treasury *Front-End*;
c. Melakukan *review* dalam pemantauan transaksi *foreign exchange, money market* dan *fixed income*, terutama terkait dengan penetapan batas nominal transaksi (*dealer limit monitoring*) dan batas kerugian transaksi;
d. Melaksanakan sistem pengendalian risiko dalam bentuk kaji ulang atas metode, asumsi dan variabel terkait dengan risiko pasar dan dilakukan oleh oleh unit kerja manajemen risiko antara lain dalam bentuk kaji ulang atas limit *dealer*, *stress test* risiko pasar serta perbaikan atas parameter risiko pasar sebagai bagian dari penilaian Tingkat Kesehatan Bank.

3. Market Risk

The Bank considers that the market risk exposure faced by the Bank is insignificant, because the amount of Bank assets in the form of trading is still relatively small and the Bank always maintains a Net Open Position (NOP) under the provisions stipulated by the regulator, which is 2% of the Bank's capital.

Although the Bank's exposure to market risk is not significant, the Bank continues to carry out risk management activities as they should. Several efforts have been made to increase the KPMR of market risk, including:

a. The Risk Management work unit carries out its function as a middle office in market transactions, one of the responsibilities of which is to propose to the Directors to determine the level of dealer limits in accordance with the work unit and the position level of each dealer. Determination of limits to individual dealers is determined by the Head of Global Market by considering the experience and competence of the dealer;
b. Continuously improve market risk management procedures, through the process of monitoring and measuring market risk, including limits on Treasury Front-End applications;
c. Conduct reviews in monitoring foreign exchange, money market and fixed income transactions, especially related to setting nominal transaction limits (dealer limit monitoring) and limit loss transactions;
d. Implement a risk control system in the form of a review of methods, assumptions and variables related to market risk and is carried out by the risk management work unit, among others in the form of a review of the dealer limit, market risk stress tests and improvements to market risk parameters as part of the assessment of Risk-Based Rating.

Tabel 2. Pengungkapan Risiko Pasar dengan Menggunakan Metode Standar
Table 2. Market Risk Disclosure Based on Standards Method

No.	Jenis Risiko *Type of Risk*	31-Dec-19	
		Beban Modal *Capital Charge*	ATMR RWA
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Risiko Benchmark Suku Bunga *Interest Rate Benchmark*		
	a. Risiko Spesifik *a. Specific Risk*	-	-
	b. Risiko Umum *b. General Risk*	524	6.554
2.	Risiko Nilai Tukar *Exchange Rate Risk*	662	8.278
3.	Risiko Ekuitas *) *Equity Risk *)*		

Tabel 2. Pengungkapan Risiko Pasar dengan Menggunakan Metode Standar
Table 2. Market Risk Disclosure Based on Standards Method

No.	Jenis Risiko *Type of Risk*	31-Dec-19	
		Beban Modal *Capital Charge*	ATMR RWA
4.	Risiko Komoditas *) *Commodity Risk *)*		
	Total	1.187	14.832

*) Untuk bank yang memiliki perusahaan anak yang memiliki eksposur risiko dimaksud
*) For banks that have subsidiary companies that have the risk exposure referred to

4. Risiko Likuiditas

Pendanaan Bank dari segmen Retail yang menjadi pondasi dasar likuiditas Bank tetap bertumbuh.

Terkait perbaikan pada profil risiko likuiditas, beberapa hal telah dilakukan oleh Bank, antara lain:

a. Unit kerja Manajemen Risiko melasakanakan fungsi sebagai *middle office* dalam transaksi likuiditas yang salah satu tanggung jawabnya adalah mengusulkan kepada Direksi penetapan limit *dealer* secara berjenjang sesuai dengan unit kerja dan jenjang jabatan masing-masing *dealer*. Penetapan limit kepada individu *dealer* ditetapkan oleh Head of Global Market dengan mempertimbangkan pengalaman dan kompetensi *dealer*;
b. Memantau kondisi likuiditas Bank, melalui cash flow Bank secara harian dan perkiraan dana masuk dan keluar secara harian;
c. Memantau pemenuhan ketentuan regulator yang berkaitan dengan likuiditas antara lain Giro Wajib Minimum (GWM), Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM), Aset Likuid/Dana Pihak Ketiga (AL/DPK); dan Aset Likuid/*Non Core Deposit* (AL/NCD);
d. Melaksanakan perbaikan *end-to-end treasury process* dengan memastikan fungsi *middle office* telah memenuhi kaidah *four-eye principle*;
e. Bank juga telah mulai melakukan penyusunan pengukuran terkait *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) dan *Net Stable Funding Ratio* (NSFR) sebagai bagian dari kelengkapan monitoring atas ketahanan likuiditas Bank. Penyusunan ini telah selesai dilakukan di Q4 2019 dan direncanakan akan mulai berjalan di Q1 2020;
f. Melaksanakan sistem pengendalian risiko dalam bentuk kaji ulang atas metode, asumsi dan variabel terkait dengan risiko likuiditas, antara lain terhadap : *stress test* likuiditas yang dilaksanakan secara rutin dua minggu sekali dengan memperhitungkan rencana penarikan nasabah sensitif dan ketersediaan *interbank line* dan perbaikan parameter dan ambang *(threshold)* risiko likuiditas yang dipantau dalam Laporan *Key Risk Indicator* (LKRI) yang dilaporkan secara harian kepada Direksi dan unit kerja terkait.

4. Liquidity Risk

Bank funding from the Retail segment, which forms the basis of the Bank's liquidity, continues to grow.

Regarding improvements to the liquidity risk profile, several things have been done by the Bank, including:

a. The Risk Management work unit carries out the function as a middle office in liquidity transactions, one of the responsibilities of which is to propose to the Directors to determine the level of dealer limits in accordance with the work unit and the position level of each dealer. Determination of limits to individual dealers is determined by the Head of Global Market taking into account dealer experience and competence;
b. Monitor the condition of the Bank's liquidity, through the Bank's cash flow on a daily basis and estimates of incoming and outgoing funds on a daily basis;
c. Monitor compliance with regulatory provisions relating to liquidity, including Statutory Reserves (GWM), Macroprudential Intermediation Ratio (RIM), Liquid Assets/Third Party Funds (AL/DPK); and Liquid/Non-Core Deposit (AL/NCD) assets;
d. Carry out end-to-end treasury process improvements by ensuring that middle office functions meet the four-eye principle principle;
e. The Bank has also begun to make measurements related to Liquidity Coverage Ratio (LCR) and Net Stable Funding Ratio (NSFR) as part of the complete monitoring of the Bank's liquidity resilience. This preparation has been completed in Q4 2019 and is planned to start running in Q1 2020;
f. Implement a risk control system in the form of a review of methods, assumptions and variables related to liquidity risk, including: liquidity stress tests which are carried out regularly every two weeks by taking into account plans for withdrawing sensitive customers and availability of interbank lines and improvement of parameters and thresholds) liquidity risks are monitored in the Key Risk Indicator Report (LKRI) which is reported daily to the Directors and related work units.

Tabel 3.1. Pengungkapan Profil Maturitas Rupiah - Bank secara Individual
Table 3.1 Disclosure of Maturity Profile for Rupiah

Dalam jutaan Rupiah
In million Rupiah

No.	Pos-pos *Posts*		Saldo *Balance*	31-Dec-19 Jatuh Tempo *Due Date*				
				< 1 bulan *< 1 Month*	> 1 bln s.d. 3 bln *> 1 Month till 3 Months*	> 3 bln s.d. 6 bln *> 3 Month till 6 Months*	> 6 bln s.d. 12 bln *> 6 Month till 12 Month*	> 12 bulan *> 12 Months*
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I	Neraca *On Balance*							
	A	Aset *Asset*						
		1 Kas *Cash*	742.366	742.366				
		2 Penempatan pada Bank Indonesia *Placement on Bank of Indonesia*	2.470.404	2.345.404	25.000	50.000	50.000	
		3 Penempatan pada bank lain *Placements on Other Banks*	58.497	58.497				
		4 Surat Berharga *Securities*	11.363.660	155.000	179.852	-	-	11.028.808
		5 Kredit yang diberikan *Loan*	27.237.373	2.246.035	2.536.825	1.682.465	1.850.986	18.921.062
		6 Tagihan lainnya *Others Bills*	1.183.190	1.183.190		-		
		7 Lain-lain *Others*						
	Total Aset *Total Assets*		43.055.490	6.730.492	2.741.677	1.732.465	1.900.986	29.949.870
	B.	Kewajiban *Liabilities*						
		1 Dana Pihak Ketiga *Third Party Funds*	37.400.310	30.473.347	3.587.161	1.951.015	1.388.787	-
		2 Kewajiban pada Bank Indonesia *Liabilities on Bank of Indonesia*	1.352.033					1.352.033
		3 Kewajiban pada bank lain *Liabilities on Other Banks*	1.459.137	1.121.047	206.788	116.798	14.504	-
		4 Surat Berharga yang Diterbitkan *Securities Issued*	1.845.000	245.000	-	-	-	1.600.000
		5 Pinjaman yang Diterima *Borrowing*	250.000	-	-	250.000	-	-

Tabel 3.1. Pengungkapan Profil Maturitas Rupiah - Bank secara Individual
Table 3.1 Disclosure of Maturity Profile for Rupiah

Dalam jutaan Rupiah
In million Rupiah

No.	Pos-pos *Posts*	Saldo *Balance*	31-Dec-19 Jatuh Tempo *Due Date*				
			< 1 bulan *< 1 Month*	> 1 bln s.d. 3 bln *> 1 Month till 3 Months*	> 3 bln s.d. 6 bln *> 3 Month till 6 Months*	> 6 bln s.d. 12 bln *> 6 Month till 12 Month*	> 12 bulan *> 12 Months*
6	Kewajiban lainnya *Other Liabilities*	581.668	581.668	-	-	-	-
7	Lain-lain *Others*	-					
Total Kewajiban *Total Liabillities*		42.888.148	32.421.062	3.793.949	2.317.813	1.403.291	2.952.033
Selisih Aset dengan Kewajiban dalam Neraca *Difference Between Assets with Liabilities in the Balance Sheet*		167.342	(25.690.570)	(1.052.272)	(585.348)	497.695	26.997.837
II	**Rekening Administratif** *Administrative Account*						
A.	Tagihan Rekening Administratif *Administrative Account*						
1	Komitmen *Commitment*	141.067	77.453	63.614	-	-	-
2	Kontinjensi *Contingency*	75.268	29.947	3.708	4.596	13.595	23.422
Total Tagihan Rekening Administratif *Total Administrative Account Claims*		216.335	107.400	67.322	4.596	13.595	23.422

Tabel 3.1. Pengungkapan Profil Maturitas Rupiah - Bank secara Individual
Table 3.1 Disclosure of Maturity Profile for Rupiah

Dalam jutaan Rupiah
In million Rupiah

No.	Pos-pos *Posts*	Saldo *Balance*	31-Dec-19 Jatuh Tempo *Due Date*				
			< 1 bulan *< 1 Month*	> 1 bln s.d. 3 bln *> 1 Month till 3 Months*	> 3 bln s.d. 6 bln *> 3 Month till 6 Months*	> 6 bln s.d. 12 bln *> 6 Month till 12 Month*	> 12 bulan *> 12 Months*
B.	Kewajiban Rekening Administratif *Administrative Account Liabilities*						
1	Komitmen *Commitment*	-					
2	Kontinjensi *Contingency*	-					
	Total Kewajiban Rekening Administratif *Total Administrative Account Liabilities*	-	-	-	-	-	-
	Selisih Tagihan dan Kewajiban dalam Rekening Administratif *Difference Between Charges with Liabilities in the Balance Sheet*	216.335	107.400	67.322	4.596	13.595	23.422
	Selisih [(IA-IB)+(IIA-IIB)] *Difference [(IA-IB)+(IIA-IIB)]*	383.677	(25.583.170)	(984.950)	(580.752)	511.290	27.021.259
	Selisih Kumulatif *Cummulative Difference*		(25.583.170)	(26.568.120)	(27.148.872)	(26.637.582)	383.677

Tabel 3.2. Pengungkapan Profil Maturitas Valas - Bank secara Individual
Table 3.2 Disclosure of Maturity Profile for Foreign Currency

Dalam jutaan Rupiah
In million Rupiah

No.	Pos-pos *Posts*	Saldo *Balance*	31-Dec-19				
			Jatuh Tempo *Due Date*				
			< 1 bulan *< 1 Month*	> 1 bln s.d. 3 bln *> 1 Month till 3 Months*	> 3 bln s.d. 6 bln *> 3 Month till 6 Months*	> 6 bln s.d. 12 bln *> 6 Month till 12 Month*	> 12 bulan *> 12 Months*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I	Neraca *On Balance*						
	A Aset *Asset*						
	1 Kas *Cash*	22.156	22.156	-	-	-	-
	2 Penempatan pada Bank Indonesia *Placement on Bank of Indonesia*	34.984	34.984				
	3 Penempatan pada bank lain *Placements on Other Banks*	63.971	63.971				
	4 Surat Berharga *Securities*						
	5 Kredit yang diberikan *Loan*	1.440.920	27.376	356.114	306.845	26.863	723.722
	6 Tagihan lainnya *Others Bills*	1.188.967	833	47.673	103.300	73.147	964.015
	7 Lain-lain *Others*	32.749	32.749				
	Total Aset *Total Assets*	2.783.747	182.069	403.786	410.145	100.010	1.687.737
	B. Kewajiban *Liabilities*						
	1 Dana Pihak Ketiga *Third Party Funds*	2.956.931	2.179.080	679.576	50.685	47.589	-
	2 Kewajiban pada Bank Indonesia *Liabilities on Bank of Indonesia*						
	3 Kewajiban pada bank lain *Liabilities on Other Banks*	208.307	83.364	124.943			
	4 Surat Berharga yang Diterbitkan *Securities Issued*						
	5 Pinjaman yang Diterima *Borrowing*	27.765	27.765				

Tabel 3.2. Pengungkapan Profil Maturitas Valas - Bank secara Individual
Table 3.2 Disclosure of Maturity Profile for Foreign Currency

Dalam jutaan Rupiah
In million Rupiah

No.	Pos-pos *Posts*	Saldo *Balance*	31-Dec-19				
			Jatuh Tempo *Due Date*				
			< 1 bulan *< 1 Month*	> 1 bln s.d. 3 bln *> 1 Month till 3 Months*	> 3 bln s.d. 6 bln *> 3 Month till 6 Months*	> 6 bln s.d. 12 bln *> 6 Month till 12 Month*	> 12 bulan *> 12 Months*
	6 Kewajiban lainnya *Other Liabilities*	7.677	7.677				
	7 Lain-lain *Others*						
	Total Kewajiban *Total Liabillities*	3.200.680	2.297.887	804.519	50.685	47.589	-
	Selisih Aset dengan Kewajiban dalam Neraca *Difference Between Assets with Liabilities in the Balance Sheet*	(416.933)	(2.115.818)	(400.732)	359.460	52.420	1.687.737
II	Rekening Administratif *Administrative Account*						
A.	Tagihan Rekening Administratif *Administrative Account*						
	1 Komitmen *Commitment*	26.051	5.806	13.336	-	-	6.908
	2 Kontinjensi *Contingency*	39.769	9.155	13.788	8.674	2.147	6.004
	Total Tagihan Rekening Administratif *Total Administrative Account Claims*	65.820	14.961	27.125	8.674	2.147	12.913
B.	Kewajiban Rekening Administratif *Administrative Account Liabilities*						
	1 Komitmen *Commitment*	1.749	194	1.555	-	-	-
	2 Kontinjensi *Contingency*	15.021	750	-	1.360	12.480	430
	Total Kewajiban Rekening Administratif *Total Administrative Account Liabilities*	16.770	944	1.555	1.360	12.480	430
	Selisih Tagihan dan Kewajiban dalam Rekening Administratif *Difference Between Charges with Liabilities in the Balance Sheet*	49.050	14.017	25.570	7.314	(10.333)	12.482

Tabel 3.2. Pengungkapan Profil Maturitas Valas - Bank secara Individual
Table 3.2 Disclosure of Maturity Profile for Foreign Currency

Dalam jutaan Rupiah
In million Rupiah

No.	Pos-pos *Posts*	Saldo *Balance*	31-Dec-19				
			Jatuh Tempo *Due Date*				
			< 1 bulan *< 1 Month*	> 1 bln s.d. 3 bln *> 1 Month till 3 Months*	> 3 bln s.d. 6 bln *> 3 Month till 6 Months*	> 6 bln s.d. 12 bln *> 6 Month till 12 Month*	> 12 bulan *> 12 Months*
	Selisih [(IA-IB)+(IIA-IIB)] *Difference [(IA-IB)+(IIA-IIB)]*	(367.883)	(2.101.801)	(375.162)	366.773	42.087	1.700.219
	Selisih Kumulatif *Cummulative Difference*		(2.101.801)	(2.476.963)	(2.110.190)	(2.068.103)	(367.883)

5. Risiko Operasional

Secara berkelanjutan Bank terus mengupayakan perbaikan atas profil risiko operasional, antara lain :

a. Memperbaiki proses pengelolaan risiko pada proses implementasi produk/aktivitas baru
b. Mengimplementasikan ORION untuk memastikan adanya kepemilikan risiko dan kontrol atas risiko pada setiap RTU;
c. Melaksanakan *Operational Risk Forum* yaitu media/forum pemaparan kondisi pengelolaan risiko operasional oleh RTU sebagai pemilik risiko untuk melakukan pemantauan terhadap hasil identifikasi risiko yang melekat pada RTU dan perkembangan rencana perbaikan yang dilakukan
d. Menyusun Prosedur Penerapan RCSA, merupakan bagian dari proses RCSA di unit kerja kantor pusat serta prosedur penggunaannya untuk mengidentifikasi risiko operasional yang melekat pada aktivitas masing-masing RTU dan pengendalian yang diterapkan
e. Melakukan kaji ulang prosedur KRI, di mana penyempurnaan dilakukan pada indikator utama sesuai permasalahan risiko operasional yang terekspos bagi Bank;
f. Meningkatkan *risk awareness* melalui sertifikasi, kampanye, video dan *email*;
g. Melaksanakan beberapa inisiatif dan proyek terkait dengan operasional Bank antara lain proyek pengembangan FOS, perbaikan kualitas data, proyek efisiensi dan pengembangan otomasi laporan;
h. Bank melaksanakan sistem pengendalian internal dalam bentuk kaji ulang atas metode, asumsi dan variabel terkait dengan risiko operasional dan dilakukan oleh oleh unit kerja Manajemen Risiko

5. Operational Risk

The Bank continues to strive to improve its operational risk profile on an ongoing basis, including:

a. Improve the risk management process in the process of implementing new products/activities
b. Implement ORION to ensure risk ownership and control over risk in each RTU;
c. Carry out an Operational Risk Forum, which is a medium/ forum for exposure to operational risk management conditions by RTU as the risk owner to monitor the results of the identification of risks inherent in the RTU and the development of the improvement plans carried out;
d. Develop RCSA Implementation Procedures, are part of the RCSA process in the head office work unit and procedures for their use to identify operational risks inherent in the activities of each RTU and the controls applied;
e. Review the KRI procedure, in which improvements are made to the main indicators in accordance with operational risk issues that are exposed to the Bank;
f. Increase risk awareness through certifications, campaigns, videos and emails;
g. Carry out a number of initiatives and projects related to the Bank's operations including FOS development projects, improvement of data quality, project efficiency and report automation development;
h. The Bank implements an internal control system in the form of a review of methods, assumptions and variables related to operational risk and is carried out by the Risk Management work unit.

Tabel 4. Pengungkapan Kuantitatif Risiko Operasional
Table 4. Quantitative Disclosures of Operational Risk

Dalam jutaan Rupiah
In million Rupiah

No.	Pendekatan yang Digunakan *Approach Method*	31-Dec-19 Pendapatan Bruto (Rata-rata 3 tahun terakhir) *Gross Income (Average Last 3 years)*	Beban Modal *Capital Charge*	ATMR/ RWA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pendekatan Indikator Dasar *Basic Indicator Approach*	1.626.315	243.947	3.049.341
	Total	1.626.315	243.947	3.049.341

6. Risiko Hukum

Dengan menyadari konsekuensi dari aktivitas bisnis yang dijalaninya dari sisi legal, maka Bank secara kontinu terus melakukan upaya perbaikan dalam hal:

a. Melakukan perbaikan kerangka manajemen risiko, melalui ketentuan dan standarisasi pembuatan kontrak serta pengelolaan notaris mitra Bank;
b. Melakukan perbaikan proses manajemen risiko, melalui; pelaksanaan *legal due diligence* atas *bad bank account*, melakukan kajian hukum atas aksi korporasi Bank, melakukan *review* atas ketentuan terkait operasional dan produk Bank dari sisi hukum, dan membentuk pencadangan atas kasus-kasus yang telah memperoleh keputusan pada tingkat pengadilan.

7. Risiko Stratejik

Bank melakukan perbaikan atas profil risiko stratejik, sebagaimana penjelasan di bawah ini :

a. Melakukan perbaikan kerangka manajemen risiko, melalui penetapkan Rencana Bisnis Bank (RBB) sesuai dengan kondisi Bank, termasuk melaksanakan proses efisiensi;
b. Melakukan perbaikan proses manajemen risiko, dengan terus melakukan beberapa upaya melakukan proses internal yang dibutuhkan dengan investor baru yang berminat untuk melakukan penanaman modal ke Bank;
c. Melakukan kaji ulang atas metode, asumsi dan variabel terkait dengan risiko stratejik antara lain dalam bentuk kaji ulang atas pengungkapan manajemen risiko *(risk management disclosure)* untuk kepentingan laporan keuangan, laporan tahunan dan kepentingan *due diligence* proses penguatan modal.

8. Risiko Kepatuhan

Bank terus berupaya melakukan perbaikan atas profil risiko kepatuhan, antara lain;

a. Melakukan penguatan atas penerapan Program APU dan PPT yang efektif dan efisien;
b. Memantau aspek *prudential banking* dengan membuat *dashboard* rasio *prudential banking;*

6. Law Risk

By being aware of the consequences of its business activities from a legal standpoint, the Bank continues to continuously make improvements in terms of:

a. Improve the risk management framework, through the provisions and standardization of contract making and management of the Bank partner notaries;
b. Improve the risk management process, through; the implementation of legal due diligence on bad bank accounts, conducting legal studies on the Bank's corporate actions, conducting a review of the operational and product related provisions of the Bank from a legal standpoint, and forming a backup for cases that have been granted a decision at the court level.

7. Strategy Risk

The Bank makes improvements to the strategic risk profile, as explained below:

a. Improve the risk management framework, through the establishment of a Bank Business Plan (RBB) in accordance with the conditions of the Bank, including implementing efficiency processes;
b. Improve the risk management process, by continuing to make some efforts to carry out the internal processes needed with new investors who are interested in investing in the Bank;
c. Review methods, assumptions and variables related to strategic risk, including but not limited to reviewing risk management disclosures for the purpose of financial statements, annual reports and the interests of due diligence in the capital strengthening process.

8. Compliance Risk

The Bank continues to make improvements to the compliance risk profile, including:

a. Strengthen the implementation of effective and efficient APU and PPT Programs;
b. Monitor prudential banking aspects by creating a prudential banking ratio dashboard;

c. Memberikan opini/saran dari sisi kepatuhan kepada unit kerja terkait dengan pengembangan produk, program, ketentuan, aktivitas operasional dan permasalahan *compliance* yang dihadapi;
d. Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan syariah yang berlaku;
e. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dari sisi kepatuhan.

9. **Risiko Reputasi**

Bank secara kontinu terus mengupayakan perbaikan atas profil risiko reputasi, antara lain dengan :

a. Menjalin komunikasi dan hubungan yang baik dan intens dengan media, khususnya media yang rutin memberitakan isu Bank;
b. Menempatkan iklan dan berpartisipasi dalam *event* media *(sponsorship)*;
c. Secara aktif membuat dan mendistribusikan *press release* ke media mengenai aktivitas Bank untuk menambah pemberitaan positif atas Bank;
d. Mengembangkan sistem aplikasi pencatatan dan penanganan pengaduan sehingga penanganan pengaduan dapat dilakukan komprehensif;
e. Melaksanakan *Complain Handling Forum* secara berkala (triwulanan) dan melibatkan unit-unit terkait (*product owner* dan unit bisnis), *risk* dan manajemen;
f. Melaksanakan sistem pengendalian internal dalam bentuk kaji ulang atas metode, asumsi dan variabel terkait dengan risiko reputasi dan dilakukan oleh oleh unit kerja manajemen risiko antara lain dalam bentuk kaji ulang atas prosedur dan petunjuk teknis terkait dengan pelayanan kepada nasabah dan laporan pengaduan nasabah.

10. **Risiko Imbal Hasil**

Bank melakukan beberapa perbaikan atas profil risiko imbal hasil, antara lain;

a. Melakukan pemantauan atas *pricing* dana nasabah dan pengendalian atas *cost of fund* yang dibahas dalam rapat ALCO;
b. Mempercepat penyelesaian *bad bank*;
c. Menurunkan konsentrasi pendanaan pada nasabah besar dengan *pricing* yang mahal.

11. **Risiko Investasi**

Upaya untuk memperbaiki profil risiko investasi sejalan dengan upaya perbaikan yang dilakukan pada profil risiko kredit, antara lain:

a. Melakukan pemantauan dan perbaikan pembiayaan berdasarkan akad pembiayaan dan juga memperbaiki kualitas pembiayaan berbasis bagi hasil secara terus menerus;
b. Melakukan kajian atas kinerja pembiayaan termasuk pembiayaan berbasis bagi hasil dan jual beli, dan melakukan kajian untuk mengembangkan ketentuan produk pembiayaan

c. Provide opinions/suggestions from the compliance side to work units related to product development, programs, provisions, operational activities and compliance problems encountered;
d. Assess and evaluate the effectiveness, adequacy, and suitability of policies, regulations, systems and procedures owned by the Bank with the provisions of the applicable laws and regulations and sharia provisions;
e. Improve the quality of human resources in terms of compliance.

*9. **Reputation Risk***

The Bank continues to strive to improve its reputation risk profile, including by:

a. Establish communication and good and intense relations with the media, especially the media that regularly report on Bank issues;
b. Place advertisements and participate in media events (sponsorship);
c. Actively make and distribute press releases to the media about the Bank's activities to increase positive reporting on the Bank;
d. Develop an application system for recording and handling complaints so that complaints can be handled, comprehensively;
e. Conduct Complain Handling Forum on a regular basis (quarterly) and involving related units (product owner and business units), risk and management;
f. Implement an internal control system in the form of reviews of methods, assumptions and variables related to reputation risk and is carried out by the risk management work unit, among others in the form of reviews of procedures and technical instructions related to customer service and customer complaint reports.

*10. **Profit Sharing Risk***

The Bank made several improvements to the yield risk profile, including;

a. Monitor the pricing of customer funds and controlling the cost of funds discussed at the ALCO meeting;
b. Speed up the settlement of bad banks;
c. Reduce the concentration of funding to large customers with expensive pricing.

*11. **Investment Risk***

Efforts to improve the investment risk profile are in line with improvements made to the credit risk profile, including:

a. Monitor and improve financing based on the financing agreement and also improve the quality of profit-sharing based financing, continuously;
b. Review the performance of financing including financing based on profit sharing and buying and selling, and conducting studies to develop financing product provisions

berdasarkan akad dengan mitigasi yang memadai sehingga mengurangi risiko bagi Bank.

Review atas Efektivitas Penerapan Sistem Manajemen Risiko

Bank melakukan evaluasi berkala atas efektivitas penerapan sistem manajemen risiko dilakukan berdasarkan hasil temuan audit internal maupun eksternal dan penilaian Tingkat Kesehatan Bank melalui *self assessment*. Implementasi evaluasi yang dilakukan Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2019 dilakukan dalam bentuk perbaikan manajemen risiko, antara lain mencakup:

1. Menyusun TMRAC segmen Corporate dan Commercial tahun 2019;
2. Menyusun *RAC:*
   a. Segmen Retail:
      i. Pembiayaan properti dan segmen *islamic*;
      ii. Pembiayaan *back to back*;
      iii. Pembiayaan *multifinance*;
   b. Segmen Corporate dan Commercial:
      i. Program pembiayaan (AR *Financing*, *Buyer Financing, Supply Chain*, BPJS Kesehatan);
      ii. Industri kelapa sawit (dalam proses);
3. Melakukan perbaikan proses pembiayaan secara *end-to-end* untuk segmen Retail terkait pembiayaan properti dan segmen *islamic*;
4. Melakukan perbaikan proses pembiayaan secara *end-to-end* untuk segmen Corporate dan Commercial;
5. Mengimplementasikan Moody's Risk Analyst pada segmen Corporate dan Commercial;
6. Membangun *data risk analytics* yang kuat untuk menilai kinerja pembiayaan segmen Retail;
7. Mengimplementasikan identifikasi dan analisis nasabah watchlist untuk segmen Corporate dan Commercial;
8. Melakukan *review* kinerja portofolio pembiayaan secara *bankwide* dan melakukan *stress test* portofolio pembiayaan dengan asumsi terjadi pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap US Dollar;
9. Meningkatkan kualitas data pembiayaan dan mengembangkan *Financing Origination System* (FOS) untuk pembiayaan segmen Retail;
10. Menyempurnakan ketentuan pembiayaan meliputi:
    a. Kebijakan Umum Pembiayaan (penyempurnaan dari ketentuan lama);
    b. Prosedur Pembiayaan Consumer;
    c. Ketentuan limit kewenangan memutus pembiayaan;
    d. *Target market* dan *Financing Allocation Limit* (FAL);
11. Melakukan simulasi pehitungan *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) dan *Net Stable Funding Ratio* (NSFR) walaupun belum menjadi kewajiban bagi bank syariah melakukannya;
12. Melakukan pemantauan risiko likuiditas secara harian dan melakukan perhitungan *stress test* secara berkala serta menyampaikan kepada Direksi dan OJK;

based on contracts with adequate mitigation so as to reduce risk for the Bank.

Risk Management System Implementation Effectiveness Review

The Bank conducts periodic evaluations of the effectiveness of the implementation of the risk management system based on internal and external audit findings and the assessment of the Bank's Soundness through self assessment. The evaluation carried out by Bank Muamalat Indonesia in 2019 was carried out in the form of improved risk management, which included:

1. *Arranging TMRAC in Corporate and Commercial segments in 2019;*
2. *Preparing the RAC:*
   a. *Retail Segment:*
      i. *Property financing and Islamic segments;*
      ii. *Back to back financing;*
      iii. *Multi finance;*
   b. *Corporate and Commercial Segments:*
      i. *Financing programs (AR Financing, Buyer Financing, Supply Chain, Health BPJS);*
      ii. *Palm oil industry (in process);*
3. *End-to-end financing process improvements for the Retail segment related to property financing and the Islamic segment;*
4. *End-to-end financing process improvements for the Corporate and Commercial segments;*
5. *Implement Moody's Risk Analyst in the Corporate and Commercial segments;*
6. *Build strong risk analytics data to assess the performance of the Retail segment financing;*
7. *Implement watchlist customer identification and analysis for the Corporate and Commercial segments;*
8. *Review the performance of financing portfolios on a bank-wide basis and conduct stress tests of portfolio financing on the assumption that there will be a weakening of the Rupiah against the US Dollar;*
9. *Improve the quality of financing data and developing Financing Origination System (FOS) for financing the Retail segment;*
10. *Improve the financing provisions including:*
    a. *General Financing Policy (refinement of old provisions);*
    b. *Consumer Financing Procedure;*
    c. *Provisions on the limit of authority to decide on financing;*
    d. *Target market and Financing Allocation Limit (FAL);*
11. *Perform simulation of calculation of Liquidity Coverage Ratio (LCR) and Net Stable Funding Ratio (NSFR) even though it is not yet an obligation for Islamic banks to do so;*
12. *Monitor liquidity risk on a daily basis and perform stress test calculations regularly and submit it to the Directors and FSA;*

13. Melakukan penguatan manajemen risiko operasional antara lain dilakukan melalui:
    a. Penguatan *risk awarenes* melalui berbagai media, seperti sertifikasi manajemen risiko, *training*, sosialisasi, penyampaian video terkait dengan *risk awareness*;
    b. Implementasi *Operational Risk Champion* (ORION) pada setiap unit kerja untuk menumbuhkan rasa kepemilikan dan kontrol atas risiko yang dihadapi unit kerja;
    c. Pengembangan *Operational Risk Management* (ORM) *tools* seperti *Key Risk Indicator* (KRI) dan *Risk and Control Self Assessment* (RCSA).

13. Strengthen operational risk management, among others, carried out through:
    a. Strengthen risk awareness through various media, such as risk management certification, training, outreach, video delivery related to risk awareness;
    b. Implementation of the Operational Risk Champion (ORION) in each work unit to foster a sense of ownership and control over the risks faced by the work unit;
    c. Development of Operational Risk Management (ORM) tools such as Key Risk Indicator (KRI) and Risk and Control Self Assessment (RCSA).

Pengungkapan Permodalan, Eksposur Risiko dan Penerapan Manajemen Risiko

Capital Disclosure, Risk Exposure and Application of Risk Management

Pengungkapan Permodalan

Capital Disclosure

Struktur Permodalan

Manajemen permodalan pada Bank Muamalat Indonesia difokuskan kepada pengelolaan struktur permodalan yang sehat untuk menyerap risiko serta memenuhi ketentuan permodalan dari regulator, serta untuk mendukung pertumbuhan bisnis yang sehat. Selama tahun 2019 Bank Muamalat Indonesia berusaha untuk bisa memaksimalisasi segala potensi yang ada untuk bisa memanfaatkan modal yang ada sebaik-baiknya. Berbagai inisiatif yang telah dilakukan terkait dengan permodalan ini adalah dengan melakukan pebaikan pada struktur permbiayaan yang difokuskan kepada pembiayaan dengan sangat memperhatikan faktor risiko yang ada. Selain itu inisiatif penambahan modal melalui mekanisme penerbitan saham baru dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau Penawaran Umum Terbatas VI (PUT VI) dan penerbitan sukuk subrodinasi telah digulirkan dan diharapkan bisa selesai pada tahun 2020. Dalam mengelola permodalan, Bank Muamalat Indonesia memberikan perhatian terhadap tingkat pengembalian modal yang optimal kepada para pemegang sahamnya.

Capital Structure

Capital management at Bank Muamalat Indonesia is focused to the management of a healthy capital structure to absorb risk and meet the capital requirements of the regulator, as well to support healthy business growth. During the year 2019 Bank Muamalat Indonesia is trying to maximize all the potential that exists to be able to take advantage of the capital there is the best. Various initiatives have been carried out related with capital this is to do repairs on financing structure that is focused on financing with very concerned about the existing risk factors. Apart from that initiative capital increase through the mechanism of issuing new shares with Pre-emptive Rights or Rights Limited General VI (LPO VI) and issuance of sukuk subrodination rolled out and expected to be completed by 2020. In managing capital, Bank Muamalat Indonesia provides attention to optimal return on capital to its shareholders.

Struktur permodalan saat ini didominasi oleh komponen Modal Inti Utama atau Common Equity Tier 1 (CET 1) sampai dengan 90,95% dari Total Modal Bank, sedangkan pada komponen Modal Pelengkapan didominasi oleh cadanagn umum dan surat utang yang terbitkan oleh Bank sebanyak Rp 100 Milliar atau 9,05% dari total modal yang ada. Berikut adalah rincian dari surat utang yang dimiliki.

The current capital structure is dominated by Core Capital components Main or Common Equity Tier 1 (CET 1) up to 90.95% of Total Bank Capital, while in the Complementary Capital component dominated by public records and debt securities issued by Banks amounting to Rp 100 billion or 9.05% of the total available capital. Here are the details of the debt securities held.

Medium-term Notes Syariah Subordinasi Bank Muamalat Tahun 2017

Pada tanggal 25 Juli 2017, Bank Muamalat Indonesia menerbitkan Medium Term Notes Syariah Subordinasi I Bank Muamalat Tahun 2017 melalui mekanisme private placement yang jatuh tempo pada tanggal 25 Juli 2022 dengan Nisbah Pemegang MTN Syariah Subordinasi sebesar 23,75% per tahun yang dihitung dari Pendapatan yang Dibagihasilkan atau dengan indikasi tingkat bagi hasil yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.250.000,- untuk setiap Rp10.000.000,- per tahun. Penerbitan Surat

Medium-term Notes Sharia Subordinated Muamalat for 2017

On July 25, 2017, Bank Muamalat Indonesia issued Sharia Medium Term Notes Subordinated I of Bank Muamalat Tahun 2017 through a private placement mechanism that is due on July 25, 2022 with Sharia MTN Holder Ratio Subordination of 23.75% per year calculated from Revenue that is generated or with an indication of the level of profit sharing offered is Rp1,250,000, - for every Rp10,000,000 per year. Issuance of Subordinated Securities has been approved by the

Berharga Subordinasi ini telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat No. S-143/PB.13/2017 pada tanggal 20 Juli 2017.

Financial Services Authority through Letter No. S-143/PB.13/2017 at July 20, 2017.

Pengungkapan Kuantitatif Mengenai Struktur Permodalan

Quantitative Disclosure on Capital Structure

Komponen Modal *Components*		Bank
1	**Modal Inti (Tier 1)**	
	1.1. Modal Inti Utama (CET 1) *Common equity Tier 1 (CET 1)*	
	1.1.1. Modal Disetor (saham biasa) *Paid-up Capital (common share)*	
	1.1.1.1. Modal dasar *Authorized Capital*	4.400.000
	1.1.1.2. Modal yang belum disetor *Unpaid Capital*	(3.296.565)
	1.1.1.3. Saham biasa yang dibeli kembali (treasury stocks) *Common share bought back (treasury stocks)*	-
	1.1.2. Cadangan Tambahan Modal (Disclosed Reserves) *Additional Capital Reserves (Disclosed Reserves)*	
	1.1.2.1. Faktor Penambah Cadangan Tambahan Modal *Adding factor of Additional Capital Reserves*	
	1.1.2.1.1 Agio saham biasa *Common paid-in Surplus*	1.578.925
	1.1.2.1.2 Modal sumbangan *Donated Capital*	-
	1.1.2.1.3 Cadangan umum *Common Reserves*	1.487.396
	1.1.2.1.4 Laba tahun-tahun lalu setelah diperhitungkan pajak *Previous years profit after tax has been calculated*	-
	1.1.2.1.5 Laba tahun berjalan setelah diperhitungkan pajak (100%) *Current year profit after tax has been calculated (100%)*	16.326
	1.1.2.1.6 Selisih lebih penjabaran laporan keuangan *Exessive difference of translation of financial statement*	-
	1.1.2.1.7 Dana setoran modal *Fund for Paid Capital*	-
	1.1.2.1.8 Waran yang diterbitkan berbasis saham biasa (paling tinggi 50%) *Common share-based issued warrant (the highest of 50%)*	-
	1.1.2.1.9 Opsi saham yang diterbitkan berbasis saham biasa (paling tinggi 50%) *Common share-based issued share option (the highest of 50%)*	-
	1.1.2.1.10 Pendapatan komprehensif lainnya: potensi keuntungan *Other comprehensive Income: profit potency*	-
	1.1.2.1.11 Saldo surplus revaluasi aset tetap *Fixed asset revaluation surplus balance*	690.593
	1.1.2.2. Faktor Pengurang Cadangan Tambahan Modal *Deduction factor of Additional Capital reserves*	
	1.1.2.2.1 Disagio saham biasa *Common share disagio*	-
	1.1.2.2.2 Rugi tahun-tahun lalu *Previous years loss*	989.358

Komponen Modal *Components*	Bank
1.1.2.2.3 Rugi tahun berjalan *Current year loss*	-
1.1.2.2.4 Selisih kurang penjabaran laporan keuangan *Negative difference of translation of financial statement*	-
1.1.2.2.5 Pendapatan komprehensif lainnya: potensi kerugian *Other comprehensive Income: loss potency*	49.862
1.1.2.2.6 Selisih kurang antara PPA atas aset produktif dan CKPN aset produktif *Negative difference between Regulatory Provision on productive asset and CKPN on productive asset*	266.894
1.1.2.2.7 Selisih kurang jumlah penyesuaian nilai wajar dari instrumen keuangan dalam trading book *Negative differences on adjustment of fair value on financial instrument in trading book*	-
1.1.2.2.8 PPA atas aset non produktif yang wajib dihitung *PPA on non-productive asset required to be calculated*	-
1.1.3. Minority Interest dari CET 1 yang diterbitkan perusahaan anak (khusus untuk konsilidasi) *Minority Interest of CET 1 issued by subsidiaries (special for consolidation)*	-
1.1.4. Faktor Pengurang Modal Inti Utama (CET 1) *Deduction factor of Common Equity Tier 1 (CET 1)*	
1.1.4.1. Perhitungan aset pajak tangguhan (deferred tax) *Asset Calculation of deferred tax*	(143.111)
1.1.4.2. Goodwill	-
1.1.4.3. Aset tidak berwujud lainnya *Other Intangible asset*	
1.1.4.3.1 Copyright	-
1.1.4.3.2 Hak paten *Copyright*	-
1.1.4.3.3 Hak milik intelektual lainnya (termasuk aplikasi piranti lunak (software)) *Other intellectual property rights (including software)*	-
1.1.4.3.4 Lainnya *Others*	-
1.1.4.4. Penyertaan *Equity investment*	(6.095)
1.1.4.5. Kekurangan modal pada perusahaan anak yang berupa perusahaan asuransi (khusus untuk konsolidasi) *Shortfall on the capital of insurance subsidiary (special for consolidation)*	-
1.1.4.6. Eksposur sekuritisasi *Security Exposure*	-
1.1.4.7. Investasi pada instrumen AT 1 bank lain (dalam hal jumlah AT 1 tidak cukup) *Investment in instrument AT 1 of other banks (in the event that the amount of AT 1 is not sufficient)*	-
1.1.4.8.Investasi pada instrumen Tier 2 bank lain (dalam hal jumlah AT 1 dan Tier 2 tidak cukup) *Investment in instrument Tier 2 of other banks (in the event that total AT 1 and Tier 2 are not sufficient)*	-
Total Modal Inti Utama (CET 1) *Total Common Equity Tier 1 (CET 1)*	3.521.078
1.2. Modal Inti Tambahan (AT 1) *Additional Tier 1 (AT 1)*	
1.2.1. Saham preferen (non cumulative) setelah dikurangi pembelian kembali *Preferent share (non cumulative) after deducted by repurchase*	-
1.2.2. Surat berharga subordinasi (perpetual non cumulative) setelah dikurangi pembelian kembali *Subordinated securities (perpetual non cumulative) after deducted by repurchase*	-
1.2.3. Pinjaman subordinasi (perpetual non cumulative) setelah dikurangi pembelian kembali *Subordinated loan (perpetual non cumulative) after deducted by repurchase*	-
1.2.4. Agio dari instrumen modal inti tambahan *Agio from additional tier 1 instrument*	-

	Komponen Modal *Components*	Bank
	1.2.5. Disagio dari instrumen modal inti tambahan *Disagio from additional tier 1*	-
	1.2.6. Penerbitan instrumen modal inti tambahan oleh perusahaan anak yang dibeli oleh pihak lain (khusus untuk konsolidasi) *Issue of additional tier 1 instrument by subsidiary purchased by other parties (special for consolidation)*	-
	1.2.7. faktor pengurang Modal Inti Tambahan (AT 1) *Deduction factor of additionel tier 1 (AT 1)*	
	1.2.7.1. Investasi pada instrumen AT 1 bank lain: *Investment in AT 1 instrument of other banks:*	
	1.2.7.1.1 Saham preferen (non cumulative) *Preferent share (non cumulative)*	-
	1.2.7.1.2 Surat berharga subordinasi (perpetual non cumulative) *Subordinated securities (perpetual non cumulative)*	-
	1.2.7.1.3 Pinjaman subordinasi (perpetual non cumulative) *Subordinated loan (perpetual non cumulative)*	-
	1.2.7.1. Investasi pada instrumen Tier 2 bank lain (Dalam hal jumlah Tier 2 tidak cukup) *Investment in Tier 2 instrument of other banks (in the event that total Tier 2 is not sufficient)*	-
	Total Modal Inti Tambahan (AT 1) *Total Additional Tier 1 (AT 1)*	-
	Total Modal Inti (1.1. + 1.2.) *Total Tier 1 (1.1. + 1.2.)*	3.521.078
2	**Modal Pelengkap (Tier 2)** *Supplementary Capital (Tier 2)*	
	2.1. Saham preferen (cumulative) setelah dikurangi pembelian kembali *Preferent share (cumulative) after deducted by repurchase*	-
	2.2. Surat berharga subordinasi (perpetual cumulative, non perpetual) setelah dikurangi pembelian kembali *Subordinated securities (perpetual cumulative, non perpetual) after dedcuted by repurchase*	100.000
	2.3. Pinjaman subordinasi (perpetual cumulative, non perpetual) setelah dikurangi pembelian kembali *Subordinated loan (perpetual cumulative, non perpetual) after deducted by repurchase*	-
	2.4. Mandatory convertible bond *Mandatory convertible bond*	-
	2.5. Agio dari instrument modal pelengkap *Agio from supplementary capital instrument*	-
	2.6. Disagio dari instrument modal pelengkap *Disagio from supplementary capital instrument*	-
	2.7. Cadangan umum PPA yang wajib dibentuk atas aset produktif (paling tinggi 1,25% ATMR untuk Risiko Kredit) *Common reserve of PPA obliged to be formed on productive asset (the highest is 1,25% ATMR for Credit Risk)*	250.263
	2.8. Cadangan tujuan *Appropriate reserve*	-
	2.9. Penerbitan instrumen modal pelengkap oleh perusahaan anak yang dibeli oleh pihak lain (khusus untuk konsolidasi) *Issue of supplementary capital instrument by subsidiary purchased by other parties (special for consolidation)*	-
	2.10. Instrumen modal pelengkap (Tier 2) lainnya *Other supplementary capital instruments (Tier 2)*	-

	Komponen Modal *Components*	Bank
	2.11. Amortisasi berdasarkan jangka waktu tersisa *Left time period-based Amortization*	-
	2.12. Sinking fund yang dibentuk untuk melunasi instrumen modal pelengkap *Sinking fund formed to pay off the supplementary capital instrument*	-
	2.13. Faktor pengurang modal pelengkap (Tier 2) berupa investasi pada instrumen Tier 2 bank lain *Deduction factor of supplementary capital (Tier 2) in the form of investment in Tier 2 instrument of other banks*	
	2.13.1. Saham preferen (cumulative) *Preferent Share (cumulative)*	-
	2.13.2. Surat berharga subordinasi (perpetual cumulative, non perpetual) *Subordinated securities (perpetual cumulative, non perpetual)*	-
	2.13.3. Pinjaman subordinasi (perpetual cumulative, non perpetual) *Subordinated Loan (perpetual cumulative, non perpetual)*	-
	2.13.4. Mandatory convertible bond *Mandatory convertible bond*	-
	Total Modal Pelengkap (2.1. s.d. 2.13.) *Total Supplementary Capital (2.1. s.d. 2.13.)*	250.263
3	**Total Modal (1+2)** *Total Capital (1+2)*	3.871.341
4	**Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)** *Risk Weighted Asset (ATMR)*	
	4.1. ATMR untuk Risiko Kredit *ATMR for Credit Risk*	28.107.661
	4.2. Selisih Lebih cadangan umum PPA atas aset produktif yang menjadi pengurang ATMR Risiko Kredit *Positive diffference of common reserve of PPA on productive asset to be reducer of ATMR of Credit Risk (-/-)*	-
	4.3. ATMR untuk Risiko Pasar *ATMR for Market Risk*	14.832
	4.4. ATMR untuk Risiko Operasional ATMR for Operational Risk	3.049.341
	Total ATMR (4.1. s.d. 4.4) *Total ATMR (4.1. s.d. 4.4)*	31.171.834
5	**Rasio KPMM (Aktual)** *Ratio of KPMM (Actual)*	
	5.1. Rasio CET 1 Ratio of CET 1	11,30%
	5.2. Rasio AT 1 *Ratio of AT 1*	0,00%
	5.3. Rasio Tier 1 (5.1 + 5.2) *Ratio of Tier 1 (5.1 + 5.2)*	11,30%

	Komponen Modal *Components*	Bank
	5.4. Rasio Tier 2 (paling tinggi sama dengan Tier 1) *Ratio of Tier 2 (the highest is the same as Tier 1)*	1,12%
	5.5. Rasio total (5.3 + 5.4) *Ratio of total (5.3 + 5.4)*	12,42%
6	**Kekurangan CET 1 untuk memenuhi paling rendah 4,5%** *Shortfall of CET 1 to fulfill the lowest of 4,5%*	-
7	**Kekurangan Tier 1 untuk memenuhi paling rendah 6%** *Shortfall of Tier 1 to fulfill the lowest of 6%*	-
8	**Rasio KPMM sesuai profil risiko** *Ratio of KPMM conforms to risk profile*	10,00%
9	**Alokasi pemenuhan KPMM sesuai profil risiko** *Fulfillment allocation of KPMM conforms to risk profile*	
	9.1. Rasio CET 1 (paling rendah 4,5%) *Ratio of CET 1 (the lowest of 4,5%)*	4,50%
	9.2. Rasio AT 1 yang dialokasikan *Ratio ofAT 1 allocated*	0,00%
	9.3. Tambahan CET 1 yang dialokasikan untuk memenuhi paling rendah 6% dari Tier 1 (jika 9.2 < 1,5%) *Additional CET 1 allocated to fulfill the lowest of 6% from Tier 1 (if 9.2 < 1,5%)*	1,50%
	9.4. Rasio Tier 2 yang dialokasikan *Ratio of Tier 2 allocated*	1,12%
	9.5. Tambahan rasio CET 1 yang dialokasikan untuk memenuhi KPMM Profil Risiko (jika 8 > 9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4) *Additional ratio of CET 1 allocated to fulfill KPMM of risk profile (if 8 > 9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4)*	2,88%
	9.6. Pemenuhan rasio KPMM profil risiko *Ratio fulfillment of KPMM of risk profile*	10,00%
10	**Kekurangan modal untuk pemenuhan KPMM profil risiko (8 - 9.6)** *Shortfall of capital to fulfill KPMM of risk profile (8 - 9.6)*	0,00%
11	**CET 1 yang tersedia untuk pemenuhan buffer** *CET 1 available for buffer fulfillment*	2,42%
12	**Jumlah buffer yang wajib dibentuk** *Total buffer obliged to be formed*	
	12.1. Capital Conservation Buffer *Capital Conservation Buffer*	0,00%
	12.2. Countercyclical Buffer *Countercyclical Buffer*	0,00%
	12.3. Capital Surcharge untuk D-SIB *Capital Surcharge untuk D-SIB*	0,00%
	12.4. Total Buffer	0,00%

	Komponen Modal *Components*	Bank
13	**Kelebihan atau Kekurangan CET 1 untuk Pemenuhan Buffer** *Excess of Shortfall of CET 1 for Buffer Fulfillment*	2,42%
	Rasio KPMM (%) *Ratio of KPMM (%)*	12,42%

Kecukupan Permodalan

Sehubungan dengan meningkatnya perkembangan risiko di dunia perbankan saat ini, maka perhitungan kecukupan modal juga perlu disesuaikan sehingga tidak hanya mampu menyerap potensi kerugian yang timbul dari risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional namun juga dari risiko lain yang material. Hal ini sesuai dengan penerapan Basel II Pilar 2 dan juga POJK No. 21/POJK.03/2014 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank Syariah yang mengatur mengenai kecukupan modal Bank sesuai dengan profil risiko Bank dan penetapan strategi untuk memelihara tingkat permodalan Bank (Internal Capital Adequacy Assessment Process/ ICAAP).

Bank Muamalat Indonesia senantiasa menjaga kecukupan modal Bank untuk dapat memenuhi risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional yang tercermin dari Rasio Kecukupan Modal (Capital Adequacy Ratio-CAR). Pada tahun 2019, Rasio Kecukupan Modal Bank mencapai 12,42%, mengalami peningkatan 0,08% jika dibandingkan dengan Rasio Kecukupan Modal tahun 2018 sebesar 12,34%. Sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.03/2014, Rasio Kecukupan Modal minimum dikaitkan dengan profil risiko Bank yang ditetapkan OJK adalah sebesar 9,20%. Dengan rasio kecukupan Bank Muamalat Indonesia berada pada tingkat 12,42%, struktur permodalan Bank memiliki kapabilitas untuk mengimbangi risiko pasar, risiko kredit dan risiko operasional dimana rasio tersebut lebih tinggi dari rasio kecukupan minimum OJK dan struktur modal Bank sudah memenuhi Peraturan OJK.

Capital Adequacy

In connection with the increasing development of risk in the world banking today, then capital adequacy calculations are also necessary adjusted so that it is not only able to absorb potential losses arising from credit risk, market risk, and operational risk however also from other risks that are material. This is in accordance with the application Basel II Pillar 2 and also POJK No. 21/POJK.03/2014 concerning Obligations of The Sharia Bank's Minimum Capital Provision (KPMM) governingregarding the Bank's capital adequacy in accordance with the Bank's risk profile and establishing strategies to maintain the Bank's capital level (Internal Capital Adequacy Assessment Process/ICAAP).

Bank Muamalat Indonesia always maintains sufficient capital Bank to be able to meet credit risk, market risk and risk operations that are reflected in the Capital Adequacy Ratio (Capital) Adequacy Ratio-CAR). In 2019, the Bank's Capital Adequacy Ratio reached 12.42%, an increase of 0.08% when compared with a Capital Adequacy Ratio in 2018 of 12.34%. Corresponding with Financial Services Authority regulation No. 21/POJK.03/2014, Ratio Minimum Capital Adequacy is associated with the Bank's risk profile as determined by OJK is 9,20%. With an adequacy ratio Bank Muamalat Indonesia is at the level of 12.42%, structure Bank capital has the capability to offset market risk, credit risk and operational risk where the ratio is more higher than the OJK minimum adequacy ratio and the Bank's capital structure has fulfilled the FSA regulations.

Pengungkapan Risiko Kredit dengan Pendekatan Standar

Dalam perhitungan ATMR untuk risiko kredit, Bank Muamalat Indonesia mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.21/POJK.03/2014 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah dan juga Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.34 /SEOJK.03/2015 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar bagi Bank Umum Syariah. Berdasarkan pendekatan standar tersebut, perhitungan ATMR untuk beberapa kategori portofolio didasarkan pada peringkat eksternal (external rating) dan sebagian lagi berdasarkan bobot risiko sesuai ketentuan regulator. Peringkat eksternal yang digunakan Bank Muamalat Indonesia adalah peringkat yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat yang diakui regulator sesuai dengan SEOJK No.37/SEOJK.03/2016 tentang Lembaga Pemeringkat yang diakui OJK.

Credit Risk Disclosure with Standard Approach

In the calculation of RWA for credit risk, Bank Muamalat Indonesia refers to the Financial Services Authority Regulation No.21 / POJK.03 / 2014 concerning the Bank's Minimum Capital Requirement Sharia General and also Financial Services Authority Circular No.34 / SEOJK.03/2015 concerning Calculation of Weighted Assets According to Risk for Credit Risk Using the Approach Standards for Islamic Commercial Banks. Based on a standardized approach This is the calculation of RWA for several portfolio categories based on an external rating (external rating) and partially again based on risk weights according to regulator regulations. Ranking externally used by Bank Muamalat Indonesia is ranked issued by a rating agency recognized by the regulator in accordance with SEOJK No.37 / SEOJK.03 / 2016 concerning Institutions Ratings are recognized by FSA.

Tabel 1.9. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Bobot Risiko Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit
Table 1.9. Disclosure of Net Claims Based on Risk Weighted After Impact Calculation of Credit Risk Mitigation

Dalam jutaan Rupiah
In million Rupiah

No.	Kategori Portofolio *Portfolio Categories*	31-Dec-19											
		Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit *Net Claims Based on Risk Weighted After Impact Calculation of Credit Risk Mitigation*										ATMR RWA	Beban Modal *Capital Charge*
		0%	20%	35%	40%	45%	50%	75%	100%	150%	Lainnya *Others*		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
A	Eksposur Neraca *Exposure on Balance Sheet*												
1.	Tagihan Kepada Pemerintah *Claim to The Government*	5.786.648	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik *Claim to Public Sector Entities*	5.411	-	-	-	-	252.596	-	-	-		126.298	12.226
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional *Claim to The Multilateral Development Banks and International Institutions*	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
4.	Tagihan Kepada Bank *Claim to The Bank*	38.715	604.545	-	-	-	179.347	-	-	-		210.583	20.384
5.	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal *Residential Mortgage Loans*	69.734	3.670.093	2.396.180	-	-	-	-	-	-		1.572.682	152.236
6.	Pembiayaan Beragun Properti Komersial *Commercial Property Mortgage Loans*	300	-	-	-	-	-	-	64.094	-		64.094	6.204
7.	Pembiayaan Pegawai/ Pensiunan *Retired Employee Credit*	80.318	-	-	-	-	114.106	-	-	-		57.053	5.523

Tabel 1.9. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Bobot Risiko Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit
Table 1.9. Disclosure of Net Claims Based on Risk Weighted After Impact Calculation of Credit Risk Mitigation

Dalam jutaan Rupiah
In million Rupiah

No.	Kategori Portofolio *Portfolio Categories*	31-Dec-19											
		Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit *Net Claims Based on Risk Weighted After Impact Calculation of Credit Risk Mitigation*										ATMR RWA	Beban Modal *Capital Charge*
		0%	20%	35%	40%	45%	50%	75%	100%	150%	Lainnya *Others*		
8.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel *Claim to Micro, Small dan Retail Portfolio*	479.403	76.694	-	-	-		6.118.947	-	-		4.604.549	445.720
9.	Tagihan kepada Korporasi *Claim to Corporate*	8.667.457	212.849	-	-	-	124.444		25.249.015	-		25.353.807	2.454.248
10.	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo *Claim on past due*	-	-	-	-	-	-	-	18	-		18	2
11.	Aset Lainnya *Others Asset*	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	Total Eksposur Neraca *Total Exposure on Balance Sheet*	15.127.986	4.564.181	2.396.180	-	-	670.493	6.118.947	25.313.127	-	-	31.989.083	3.096.543
B	Eksposur Kewajiban Komitmen/ Kontinjensi pd Transaksi Rekening Administratif *Exposure on Commitments Contingencies for off Balance Sheet Transactions*												
1.	Tagihan Kepada Pemerintah *Claim to The Government*	70										-	-
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik *Claim to Public Sector Entities*	-	-	-	-	-	12.600	-	-	-		6.300	610
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional *Claim to The Multilateral Development Banks and International Institutions*	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-

Tabel 1.9. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Bobot Risiko Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit
Table 1.9. Disclosure of Net Claims Based on Risk Weighted After Impact Calculation of Credit Risk Mitigation

Dalam jutaan Rupiah
In million Rupiah

No.	Kategori Portofolio *Portfolio Categories*	31-Dec-19											
		Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit *Net Claims Based on Risk Weighted After Impact Calculation of Credit Risk Mitigation*										ATMR RWA	Beban Modal *Capital Charge*
		0%	20%	35%	40%	45%	50%	75%	100%	150%	Lainnya *Others*		
4.	Tagihan Kepada Bank *Claim to The Bank*	-	-	-	-	-	2.082	-		-		1.041	101
5.	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal *Residential Mortgage Loans*	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
6.	Pembiayaan Beragun Properti Komersial *Commercial Property Mortgage Loans*	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
7.	Pembiayaan Pegawai/ Pensiunan *Retired Employee Credit*	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
8.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel *Claim to Micro, Small and Retail Portfolio*	-	-	-	-	-		1.163		-		872	84
9.	Tagihan kepada Korporasi *Claim to Corporate*	-	-	-	-	-		74.704				56.028	5.423
10.	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo *Claim on past due*	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	Total Eksposur TRA/ Total Exposure on Off *Balance Transactions*	70	-	-	-	-	14.682	75.866	-	-	-	64.241	6.219
C	Eksposur akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk) *Exposure on Counterparty Credit Risk*												

Tabel 1.9. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Bobot Risiko Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit
Table 1.9. Disclosure of Net Claims Based on Risk Weighted After Impact Calculation of Credit Risk Mitigation

Dalam jutaan Rupiah
In million Rupiah

No.	Kategori Portofolio *Portfolio Categories*	31-Dec-19											
		Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit *Net Claims Based on Risk Weighted After Impact Calculation of Credit Risk Mitigation*										ATMR RWA	Beban Modal *Capital Charge*
		0%	20%	35%	40%	45%	50%	75%	100%	150%	Lainnya *Others*		
1.	Tagihan Kepada Pemerintah *Claim to The Government*	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik *Claim to Public Sector Entities*	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional *Claim to The Multilateral Development Banks and International Institutions*	-										-	-
4.	Tagihan Kepada Bank *Claim to The Bank*	-	3.938	-	-	-	26.679	-	-	-		14.127	1.368
5.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel *Claim to Micro, Small and Retail Portfolio*	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
6.	Tagihan kepada Korporasi *Claim to Corporate*	-										-	-
	Total Eksposur Counterparty Credit Risk *Total Exposure on Counterparty Credit Risk*	-	3.938	-	-	-	26.679	-	-	-	-	14.127	1.368

Tabel 1.10. Pengungkapan Tagihan Bersih dan Teknik Mitigasi Risiko Kredit
Table 1.10. Disclosure of Net Claims and Credit Risk Mitigation Techniques

Dalam jutaan Rupiah
In million Rupiah

No.	Kategori Portofolio *Portfolio Categories*	31-Dec-19					
		Tagihan Bersih *Net Claims*	Bagian yang Dijamin dengan *Portion which Secured by*				Bagian yang Tidak Dijamin *Portion which not Secured*
			Agunan *Collateral*	Garansi *Guarantee*	Asuransi Kredit *Credit Insurance*	Lainnya *Others*	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(3)-[(4)+(5)+(6)+(7)]
A	Eksposur Neraca *Exposure on Balance Sheet*						
1.	Tagihan Kepada Pemerintah *Claim to The Government*	5.786.648	-	-	-		5.786.648
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik *Claim to Public Sector Entities*	252.596	5.411	-	-		247.185
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional *Claim to The Multilateral Development Banks and International Institutions*	-	-	-	-		-
4.	Tagihan Kepada Bank *Claim to The Bank*	783.892	38.715	-	-		745.177
5.	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal *Residential Mortgage Loans*	6.055.737	80.270	-	-		5.975.467
6.	Pembiayaan Beragun Properti Komersial *Commercial Property Mortgage Loans*	64.094	300	-	-		63.794
7.	Pembiayaan Pegawai/ Pensiunan *Retired Employee Credit*	114.106	80.318	-	-		33.788
8.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel *Claim to Micro, Small dan Retail Portfolio*	6.118.947	556.097	-	-		5.562.850

Tabel 1.10. Pengungkapan Tagihan Bersih dan Teknik Mitigasi Risiko Kredit
Table 1.10. Disclosure of Net Claims and Credit Risk Mitigation Techniques

Dalam jutaan Rupiah
In million Rupiah

No.	Kategori Portofolio *Portfolio Categories*	31-Dec-19					
		Tagihan Bersih *Net Claims*	Bagian yang Dijamin dengan *Portion which Secured by*				Bagian yang Tidak Dijamin *Portion which not Secured*
			Agunan *Collateral*	Garansi *Guarantee*	Asuransi Kredit *Credit Insurance*	Lainnya *Others*	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(3)-[(4)+(5)+(6)+(7)]
9.	Tagihan kepada Korporasi *Claim to Corporate*	25.373.458	8.880.306	-	-		16.493.152
10.	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo *Claim on Past Due*	18	-	-	-		18
11.	Aset Lainnya *Others Asset*	-	-	-	-		-
	Total Eksposur Neraca *Total Exposure on Balance Sheet*	44.549.496	9.641.417	-	-	-	34.908.079
B	Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif *Exposure on Commitments/ Contingencies for off Balance Sheet Transactions*						
1.	Tagihan Kepada Pemerintah *Claim to The Government*	70	-	-	-		70
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik *Claim to Public Sector Entities*	41.127	-	-	-		41.127
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional *Claim to The Multilateral Development Banks and International Institutions*	-	-	-	-		-
4.	Tagihan Kepada Bank *Claim to The Bank*	2.082	-	-	-		2.082
5.	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal *Residential Mortgage Loans*	-	-	-	-		-
6.	Pembiayaan Beragun Properti Komersial *Commercial Property Mortgage Loans*	-	-	-	-		-
7.	Pembiayaan Pegawai Pensiunan *Retired Employee Credit*	-	-	-	-		-
8.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel *Claim to Micro, Small dan Retail Portfolio*	1.715	-	-	-		1.715
9.	Tagihan kepada Korporasi *Claim to Corporate*	211.312	-	-	-		211.312

Tabel 1.10. Pengungkapan Tagihan Bersih dan Teknik Mitigasi Risiko Kredit
Table 1.10. Disclosure of Net Claims and Credit Risk Mitigation Techniques

Dalam jutaan Rupiah
In million Rupiah

No.	Kategori Portofolio *Portfolio Categories*	31-Dec-19					
		Tagihan Bersih *Net Claims*	Bagian yang Dijamin dengan *Portion which Secured by*				Bagian yang Tidak Dijamin *Portion which not Secured*
			Agunan *Collateral*	Garansi *Guarantee*	Asuransi Kredit *Credit Insurance*	Lainnya *Others*	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(3)-[(4)+(5)+(6)+(7)]
10.	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo *Claim on Past Due*	-	-	-	-		-
	Total Eksposur TRA *Total Exposure on Off Balance Transactions*	256.306	-	-	-	-	256.306
C	Eksposur akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk) *Exposure on Counterparty Credit Risk*						
1.	Tagihan kepada Pemerintah *Claim to The Government*			-	-		-
2.	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik *Claim to Public Sector Entities*			-	-		-
3.	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional *Claim to The Multilateral Development Banks and International Institutions*			-	-		-
4.	Tagihan kepada Bank *Claim to The Bank*	30.617		-	-		30.617
5.	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel *Claim to Micro, Small dan Retail Portfolio*			-	-		-
6.	Tagihan kepada Korporasi *Claim to Corporate*			-	-		-
	Total Eksposur Counterparty Credit Risk *Total Exposure on Counterparty Credit Risk*	30.617	-	-	-	-	30.617

Tabel 1.11. Pengungkapan Transaksi Sekuritisasi Aset
Table 1.11. Disclosure of Securitization Transactions

No.	Eksposur Sekuritisasi *Securitization Exposures*	31 Desember 2019 *December 31, 2019*					
		Nilai aset yang disekuritisasi *The value of the securitized asset*	Nilai aset yang disekuritisasi yang mengalami penurunan nilai *The value of assets that are securitized which has decreased value*		Laba/ rugi dari aktivitas sekuritisasi *Profit/ loss from securitization activities*	ATMR	Pengurang Modal *Capital Reduction*
			Telah jatuh tempo *Due*	Belum jatuh tempo *Not yet due*			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Bank bertindak sebagai kreditur asal *The Bank acts as the Creditor*	16.312	-	-	-	-	-
2.	Bank bertindak sebagai penyedia kredit pendukung a. Fasilitas penanggung risiko pertama *The bank acts as a supporting credit provider* *a. First Risk Insurer Facility*	-	-	-	-	-	-
	b. Fasilitas penanggung risiko kedua *b. Second risk insurance facility*	-	-	-	-	-	-
3.	Bank bertindak sebagai penyedia fasilitas likuiditas *The bank acts as a facility provider liquidity*	-	-	-	-	-	-
4.	Bank bertindak sebagai penyedia jasa *The bank acts as a service provider*	16.312	-	-	-	-	-
5.	Bank bertindak sebagai Bank kustodian *The bank acts as a custodian bank*	-	-	-	-	-	-
6.	Bank bertindak sebagai pemodal a. Senior trache *Banks act as capitalists* *a. Senior trache*	-	-	-	-	-	-
	b. Junior trache *b. Junior trache*	-	-	-	-	-	-
		32.624	-	-	-	-	-

Tabel 1.12. Pengungkapan Ringkasan Aktivitas Transaksi Sekuritisasi Bank Bertindak sebagai Kreditur Asal
Table 1.12. Disclosure of Summary Securitization Transaction Activity Bank as Creditor

Dalam jutaan Rupiah
In million Rupiah

No.	Eksposur Sekuritisasi *Securitization Exposures*	31 Desember 2019 *December 31, 2019*		30 Juni 2019 *June 30, 2019*	
		Nilai aset yang disekuritisasi *The value of the securitized asset*	Keuntungan (kerugian) penjualan *Sales profit (loss)*	Nilai aset yang disekuritisasi *The value of the securitized asset*	Keuntungan (kerugian) penjualan *Sales profit (loss)*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Tagihan kepada Pemerintah *Claims to Government*	-	-	-	-
2.	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik *Claims on Public Sector Entities*	-	-	-	-
3.	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional *Bill on Multilateral Development Banks and International Institutions*	-	-	-	-

Dalam jutaan Rupiah
In million Rupiah

30 Juni 2019 *June 30, 2019*					
Nilai aset yang disekuritisasi *The value of the securitized asset*	Nilai aset yang disekuritisasi yang mengalami penurunan nilai *The value of assets that are securitized which has decreased value*		Laba/rugi dari aktivitas sekuritisasi *Profit/loss from securitization activities*	ATMR	Pengurang Modal *Capital Reduction*
	Telah jatuh tempo *Due*	Belum jatuh tempo *Not yet due*			
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Tabel 1.12. Pengungkapan Ringkasan Aktivitas Transaksi Sekuritisasi Bank Bertindak sebagai Kreditur Asal
Table 1.12. Disclosure of Summary Securitization Transaction Activity Bank as Creditor

Dalam jutaan Rupiah
In million Rupiah

No.	Eksposur Sekuritisasi *Securitization Exposures*	31 Desember 2019 *December 31, 2019*		30 Juni 2019 *June 30, 2019*	
		Nilai aset yang disekuritisasi *The value of the securitized asset*	Keuntungan (kerugian) penjualan *Sales profit (loss)*	Nilai aset yang disekuritisasi *The value of the securitized asset*	Keuntungan (kerugian) penjualan *Sales profit (loss)*
4.	Tagihan kepada Bank *Claims on Banks*	-	-	-	-
5.	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal *Housing Backed Financing*	16.312	-	-	-
6.	Pembiayaan Beragun Properti Komersial *Commercial Property Backed Financing*	-	-	-	-
7.	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan *Employee/Pension Funding*	-	-	-	-

Tabel 1.12. Pengungkapan Ringkasan Aktivitas Transaksi Sekuritisasi Bank Bertindak sebagai Kreditur Asal
Table 1.12. Disclosure of Summary Securitization Transaction Activity Bank as Creditor

Dalam jutaan Rupiah
In million Rupiah

No.	Eksposur Sekuritisasi *Securitization Exposures*	31 Desember 2019 *December 31, 2019*		30 Juni 2019 *June 30, 2019*	
		Nilai aset yang disekuritisasi *The value of the securitized asset*	Keuntungan (kerugian) penjualan *Sales profit (loss)*	Nilai aset yang disekuritisasi *The value of the securitized asset*	Keuntungan (kerugian) penjualan *Sales profit (loss)*
8.	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel *Claims on Micro, Small Business and Retail Portfolios*	-	-	-	-
9.	Tagihan Kepada Korporasi *Corporate Bill*	-	-	-	-
10.	Aset Lainnya *Other Assets*	-	-	-	-
	Total	16.312	-	-	-

Pengungkapan Perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar
Disclosure of RWA Calculations for Credit Risk Using a Standardized Approach

Tabel 1.13.a. Pengungkapan Eksposur Aset di Neraca
Table 1.13.a. Disclosure of Assets Exposures in Balance Sheet

Dalam jutaan Rupiah
In million Rupiah

No.	Kategori Portofolio *Portfolio Categories*	31-Dec-19		
		Tagihan Bersih *Claim Net*	ATMR sebelum MRK *RWA before CRM*	ATMR setelah MRK *RWA after CRM*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Tagihan kepada Pemerintah *Claim to The Government*	5.786.648	-	-
2.	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik *Claim to Public Sector Entities*	252.596	126.298	123.593
3.	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional *Claim to The Multilateral Development Banks and International Institutions*	-	-	-
4.	Tagihan kepada Bank *Claim to The Bank*	783.892	210.583	192.181
5.	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal *Residential Mortgage Loans*	6.055.737	1.671.223	1.650.390
6.	Pembiayaan Beragun Properti Komersial *Commercial Property Mortgage Loans*	64.094	64.094	63.794
7.	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan *Retired Employee Credit*	114.106	57.053	16.894
8.	Tagihan kepad Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel *Claim to Micro, Small dan Retail Portfolio*	6.118.947	4.589.210	4.187.476

Pengungkapan Perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar
Disclosure of RWA Calculations for Credit Risk Using a Standardized Approach

Tabel 1.13.a. Pengungkapan Eksposur Aset di Neraca
Table 1.13.a. Disclosure of Assets Exposures in Balance Sheet

Dalam jutaan Rupiah
In million Rupiah

No.	Kategori Portofolio *Portfolio Categories*	31-Dec-19 Tagihan Bersih *Claim Net*	ATMR sebelum MRK *RWA before CRM*	ATMR setelah MRK *RWA after CRM*
9.	Tagihan kepada Korporasi *Claim to Corporate*	25.373.458	25.311.237	16.473.501
10.	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo *Claim on past due*	18	18	18
11.	Aset Lainnya *Others Asset*	6.067.298		5.302.771
	TOTAL	50.616.794	32.029.715	28.010.617

Tabel 1.13.b. Pengungkapan Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif
Table 1.13.b. Disclosure of Commitments/Contingent Exposure on Balance Sheet

Dalam jutaan Rupiah
In million Rupiah

No.	Kategori Portofolio *Portfolio Categories*	31-Dec-19 Tagihan Bersih *Claim Net*	ATMR sebelum MRK *RWA before CRM*	ATMR setelah MRK *RWA after CRM*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Tagihan Kepada Pemerintah *Claim to The Government*	70	-	-
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik *Claim to Public Sector Entities*	12.600	6.300	6.300
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional *Claim to The Multilateral Development Banks and International Institutions*	-	-	-
4.	Tagihan Kepada Bank *Claim to The Bank*	2.082	1.041	1.041
5.	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal *Residential Mortgage Loans*	-	-	-
6.	Pembiayaan Beragun Properti Komersial *Commercial Property Mortgage Loans*	-	-	-
7.	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan *Retired Employee Credit*	-	-	-
8.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel *Claim to Micro, Small dan Retail Portfolio*	1.163	872	872
9.	Tagihan kepada Korporasi *Claim to Corporate*	74.704	74.704	74.704
10.	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo *Claim on past due*	-	-	-
	TOTAL	90.619	82.917	82.917

Tabel 1.13.c. Pengungkapan Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)
Table 1.13.c. Disclosure of Potential Credit Risk Exposure Due to Failure of Competitor (Counterparty Credit Risk)

Dalam jutaan Rupiah
In million Rupiah

No.	Kategori Portofolio *Portfolio Categories*	31-Dec-19		
		Tagihan Bersih *Claim Net*	ATMR sebelum MRK *RWA before CRM*	ATMR setelah MRK *RWA after CRM*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Tagihan kepada Pemerintah *Claim to The Government*	-	-	-
2.	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik *Claim to Public Sector Entities*	-	-	-
3.	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional *Claim to The Multilateral Development Banks and International Institutions*	-	-	-
4.	Tagihan Kkepada Bank *Claim to The Bank*	30.617	14.127	14.127
5.	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Keci dan Portofolio Ritel *Claim to Micro, Small dan Retail Portfolio*	-	-	-
6.	Tagihan kepada Korporasi *Claim to Corporate*	-	-	-
	TOTAL	30.617	14.127	14.127

Tabel 1.13.d. Pengungkapan Total Pengukuran Risiko Kredit
Table 1.13.d. Disclosure of Total Credit Risk Measurement

	31-Dec-19
Total ATMR Risiko Kredit *Total of Risk Weighted Assets Credit Risk*	28.107.661
Total Faktor Pengurang Modal *Total of Deduction from Capital Factor*	-

Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi

Pelaksanaan manajemen risiko terintegrasi oleh Bank Muamalat dilakukan dalam rangka menjalankan tanggung jawabnya untuk memantau dan menilai profil risiko anak perusahaan, dalam hal ini adalah PT Al-Ijarah Finance. Proses manajemen risiko terintegrasi ini mencakup 4 tahapan, yakni identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penerapan manajemen risiko terintegrasi mencakup seluruh aspek, baik kualitatif maupun kuantitatif yang dirasa memiliki dampak

Integrated Risk Management Implementation

The implementation of integrated risk management by Bank Muamalat is carried out in order to carry out its responsibilities to monitor and assess the risk profile of the subsidiary, in this case PT Al-Ijarah Finance. This integrated risk management process includes 4 stages, namely identification, measurement, monitoring and control in accordance with applicable regulations.

The implementation of integrated risk management covers all aspects, both qualitative and quantitative that are felt to have an impact

terhadap kondisi dari konglomerasi keuangan Bank Muamalat Indonesia.

Penerapan manajemen risiko terintegrasi di Bank Muamalat Indonesia terefleksikan melalui:

1. **Penentuan Limit Risiko Terintegrasi**
   Penyusunan limit risiko dilakukan oleh unit atau pihak terkait dari Bank Muamalat konglomerasi keuangan. Penentuan limit ini mencakup limit secara keseluruhan maupun untuk tiap jenis risiko. Limit risiko ini akan dikaji ulang secara berkala dan atau jika terdapat perubahan signifikan pada anak perusahaan.
2. **Laporan Profil Risiko Terintegrasi**
   Laporan Profil Risiko Terintegrasi disiapkan setiap semester untuk posisi akhir Juni dan Desember, dan hasil penilaian profil risiko ini disampaikan kepada anggota direksi, khususnya Direktur Risiko dan Direktur Kepatuhan.
3. **Kecukupan Permodalan Terintegrasi**
   Kecukupan permodalan terintegrasi dilakukan melalui pemantauan profil risiko dan perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) terintegrasi, yang disampaikan ke OJK setiap semester.
4. **Komite Manajemen Risiko Terintegrasi**
   Komite Manajemen Risiko Terintegrasi merupakan komite tertinggi dalam Perusahaan Konglomerasi Keuangan Bank Muamalat Indonesia. Di tahun 2019, RMC terintegrasi telah dilaksanakan sebanyak dua kali, yakni pada tanggal 3 September 2019 dan 13 November 2019.

on the condition of the financial conglomerate of Bank Muamalat Indonesia.

The implementation of integrated risk management at Bank Muamalat Indonesia is reflected through:

1. ***Determination of Integrated Risk Limit***
   The preparation of risk limits is carried out by units or related parties of the Bank Muamalat financial conglomerate. This limit determination includes the overall limit as well as for each type of risk. This risk limit will be reviewed periodically and or if there are significant changes in the subsidiary.
2. ***Integrated Risk Profile Report***
   The Integrated Risk Profile Report is prepared every semester for positions at the end of June and December, and the results of this risk profile assessment are submitted to members of the board of directors, specifically the Risk Director and Compliance Director.
3. ***Adequacy of Integrated Capital***
   The adequacy of integrated capital is carried out through monitoring the risk profile and calculation of the Integrated Capital Adequacy Requirement (KPMM), which is submitted to the FSA every semester.
4. ***Integrated Risk Management Committee***
   The Integrated Risk Management Committee is the highest committee in the Bank Muamalat Indonesia Financial Conglomerate Company. In 2019, the integrated RMC was held twice, on 3 September 2019 and 13 November 2019.

Satuan Kerja Kepatuhan
Compliance Working Unit

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum yang merupakan serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat preventif (ex-ante) untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Prinsip Syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah, serta memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

In accordance with the Financial Services Authority Regulation No. 46 / POJK.03 / 2017 12 July 2017 concerning the Implementation of the Bank's Compliance Function which is a series of actions or steps which are preventive (ex-ante) to ensure that policies, provisions, systems and procedures, as well as the business activities carried out by the Bank in accordance with the provisions of the Financial Services Authority and laws and regulations, including Principles Sharia for Islamic commercial banks and sharia business units, as well ensuring Bank compliance with commitments made by Bank to the Financial Services Authority and / or other supervisory authorities.

Sejalan dengan itu Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dan satuan kerja kepatuhan pada Bank Umum Syariah wajib berkoordinasi dengan Dewan Pengawas Syariah terkait pelaksanaan Fungsi Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah

In line with this, the Director who in charge of the Compliance Function and the compliance working unit at a Sharia Commercial Bank is required coordinate with the Sharia Supervisory Board related to implementation function of Compliance with Sharia Principles

Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan Bank Muamalat Indonesia adalah Compliance Director yang diangkat dengan memenuhi persyaratan independensi serta kriteria sebagaimana ditetapkan dalam regulasi dan telah efektif lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK tanggal 27 Juni 2016.

Director in charge of the Compliance Function of Bank Muamalat Indonesia is a Compliance Director who is appointed by compliance independence requirements and criteria as specified in the regulation and has effectively passed the Fit and Proper test from FSA on June 27, 2016.

Adapun tugas dan tanggung jawab Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 46/POJK.03/2017 adalah sebagai berikut:

1. merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank;
2. mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi;
3. menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank;
4. memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang - undangan, termasuk Prinsip Syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah;meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank;
5. meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank;
6. melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank atau pimpinan kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
7. melakukan tugas lain yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

The duties and responsibilities of the Director in charge of the Compliance function in accordance with the Financial Services Authority Regulations No. 46/POJK.03/2017 are as follows:

1. *formulating strategies to encourage the creation of Culture Bank Compliance;*
2. *propose compliance policies or principles compliance that will be determined by the Directors;*
3. *establish the compliance system and procedures used to compile the Bank's internal rules and guidelines;*
4. *ensure that all policies, provisions, systems, and procedures, and business activities carried out by the Bank are appropriate with the provisions of the Financial Services Authority and provision statutory regulations, including Sharia Principles for sharia commercial banks and sharia business units; minimise Bank Compliance Risk;*
5. *minimise the Bank's Compliance Risk;*
6. *conducting the prevention activity so that policies and/or decisions taken by the Directors or management of branch office domiciled abroad does not deviate from the provisions of the Financial Services Authority and the provisions of the legislation; and*
7. *perform other duties related to the Compliance Function.*

Unit kerja Kepatuhan merupakan Satuan Kerja Kepatuhan Bank Muamalat Indonesia yang dibentuk secara tersendiri dan bebas dari pengaruh satuan kerja lainnya, serta mempunyai akses langsung kepada Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan. Kepala Unit kerja Kepatuhan telah memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh regulasi antara lain memenuhi persyaratan independensi, menguasai

The Compliance Unit is a Compliance Unit Bank Muamalat Indonesia which was formed separately and independent from the influence of other work units, as well as having direct access to the Director in charge of the Compliance Function. The Head of Compliance has fulfilled the criteria stipulated by the regulations including fulfilling the independence requirements, mastering the provisions of the Financial Services Authority/

ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)/Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melaksanakan tugas lainnya di luar Fungsi Kepatuhan.

Bank Indonesia and the applicable laws and regulations and not carrying out other duties outside the Compliance Function

Profil Kepala Satuan Kerja Kepatuhan

Profile of Head of Compliance



Dyah Ekowati

Kepala Satuan Kerja Kepatuhan
Head of Compliance

Kepala SKK PT Bank Muamalat Indonesia Tbk adalah Dyah Ekowati. Warga Negara Indonesia, lahir di Yogyakarta, memperoleh S1 Bidang Pertanian dari Institut Pertanian Bogor. Bergabung dengan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk sejak tahun 1997 dan mulai menjabat sebagai Kepala SKK dari tahun 2009-sekarang. Sebelumnya pernah menjabat di beberapa posisi unit kerja Bank Muamalat Indonesia.

The head of compliance PT Bank Muamalat Indonesia Tbk is Dyah Ekowati. An Indonesian citizen, born in Yogyakarta, has a Bachelor's degree In Agriculture from the Bogor Institute of Agriculture. Join PT Bank Muamalat Indonesia Tbk since 1997 and began serving as Head of compliance from 2009-now. Previous ever served in several work units at Bank Muamalat Indonesia.

Tugas dan Tanggung Jawab

Duties and Responsibilities

Satuan Kerja Kepatuhan memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. membantu menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan kepatuhan Bank dalam memenuhi seluruh peraturan internal dan eksternal serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dalam rangka prinsip kehati-hatian;
2. membantu memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku;
3. membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi;
4. melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
5. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap perkembangan risiko-risiko kepatuhan dan pengendalian internal untuk kepentingan Bank sesuai dengan perkembangan bisnis;
6. menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan peraturan perundang-undangan;
7. melakukan kaji ulang dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun

The Compliance Working Unit has the following duties and responsibilities:

1. *assisting to define the steps required ensure Bank compliance in meeting all internal and external regulations and other applicable laws and regulations in the framework of the prudential principle;*
2. *assisting to monitor and maintain the Bank's business activities does not deviate from the applicable provisions;*
3. *arranging the steps in order to support the creation of a Compliance Culture in all business activities of the Bank at every level of the organization;*
4. *identifying, measuring, monitoring and controlling Compliance Risk by referring to the provisions of the Financial Services Authority regarding the Implementation of Risk Management for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units;*
5. *conducting periodic monitoring and evaluation of the development of compliance and internal control risks for the Bank's interests in accordance with business development;*
6. *assessing and evaluating the effectiveness, adequacy and suitability of policies, regulations, systems and procedures owned by the Bank with the laws and regulations;*
7. *conducting a review and/or recommend updating and refining policies, regulations, systems and procedures owned by the Bank*

prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan, termasuk Prinsip Syariah;

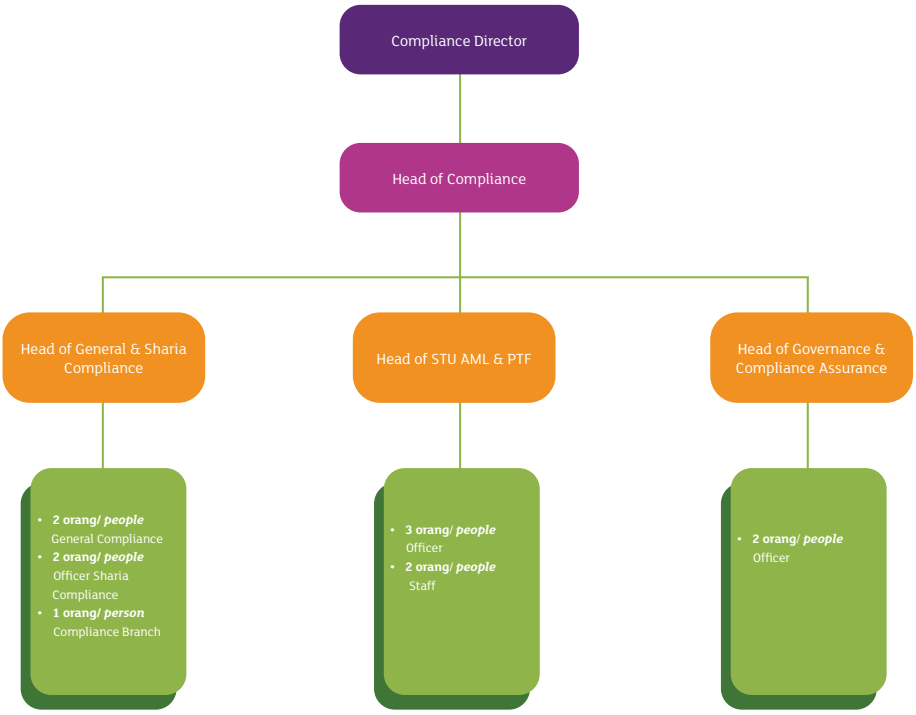
8. melakukan upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan;
9. memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang;
10. melakukan sosialisasi kepada seluruh karyawan Bank mengenai hal-hal yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan terutama mengenai ketentuan yang berlaku;
11. menjalankan peran konsultatif sebagai Strategic Business Partner guna pencegahan dalam rangka mitigasi risiko kepatuhan dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan serta peningkatan efektifitas kepatuhan, pengendalian internal dan GCG; dan
12. melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

to comply with the provisions of the Financial Services Authority and legislation, including Sharia Principles;

8. *making efforts to ensure that the policies, provisions, systems and procedures, and business activities of the Bank are in accordance with the provisions of the Financial Services Authority and the laws and regulations;*
9. *ensuring the Bank's compliance with commitments made by the Bank to the Financial Services Authority and/or other authorized supervisory authorities;*
10. *conducting socialization for all Bank employees regarding matters related to the Compliance Function, especially regarding applicable regulations;*
11. *undertaking a consultative role as a Strategic Business Partner for prevention in order to mitigate compliance risk and provide recommendations for improvement and increase the effectiveness of compliance, internal control and GCG; and*
12. *performing other tasks related to the Compliance Function.*

Struktur Organisasi Unit Kerja Kepatuhan

Organization Structure of Compliance Working Unit



Pada tahun 2019, tidak terdapat perubahan pada organisasi Compliance. Jumlah karyawan Compliance sebanyak 16 (enam belas) orang termasuk Head of Compliance. Struktur organisasi di

In 2019, there were no changes to the Compliance organization. The number of Compliance employees is 16 (sixteen) people including the Head of Compliance. Organizational structure in Under Compliance

bawah Compliance adalah General & Sharia Compliance, Special Task Unit AML & PTF (Unit Kerja Khusus APU & PPT) dan Governance & Compliance Assurance.

Kualifikasi dan Sertifikasi

Sampai akhir tahun 2019, karyawan fungsi SKK Bank Muamalat Indonesia yang telah mengikuti Sertifikasi Manajemen Risiko sebanyak 15 orang terdiri atas 1 orang Level 4, 3 orang Level 3, dan 11 orang Level 2. Untuk Sertifikasi profesi bidang Kepatuhan terdiri atas 3 orang Level 2 dan 9 orang Level 1. Selain sertifikasi profesi karyawan SKK Bank Muamalat juga aktif dalam kegiatan workshop atau training yang diadakan oleh pihak eksternal termasuk oleh regulator (BI/OJK/PPATK).

Pelaksanaan Tugas Satuan Kerja Kepatuhan

Dalam rangka menjaga dan meningkatkan pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, kegiatan kepatuhan yang dilakukan selama tahun 2019 antara lain berkaitan dengan peningkatan budaya kepatuhan, pengelolaan risiko kepatuhan, evaluasi ketentuan internal, pemantauan aspek kehati-hatian Bank, pemantuan kepatuhan terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank dan kegiatan kepatuhan lainnya.

Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka mendukung terciptanya budaya kepatuhan Bank antara lain sebagai berikut:

1. Membangun compliance awareness melalui email blast dengan materi terkait regulasi, GCG, APU-PPT dan Anti Fraud.
2. Melakukan sosialisasi regulasi baru (sharing information) baik secara tertulis maupun melalui forum sosialiasi dan menyampaikan analisa dampak regulasi kepada unit kerja terkait untuk menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari ketentuan dan peraturan yang berlaku.
3. Memberikan opini atas penerapan regulasi termasik penerapan aspek syariah.
4. Melakukan peringatan/teguran, reminder atas kewajiban dan komitmen yang harus disampaikan dan dilaksanakan oleh Unit Kerja atau Unit Bisnis.
5. Menyampaikan hasil GCG review dan rekomendasi perbaikan penerapan GCG kepada Direksi dan Dewan Komisaris, serta memonitor pemenuhan rekomendasi yang dberikan.
6. Melakukan *compliance checklist* terhadap proses pengajuan jaringan kantor baru dan pengajuan produk & aktivitas baru Bank agar sesuai dengan ketentuan BI/OJK.
7. Menyusun kertas kerja *compliance self assessment* sebagai *tools* untuk menilai tingkat kepatuhan cabang terhadap regulasi, APU PPT dan aspek syariah.

are General & Sharia Compliance, Special Task AML & PTF Unit (APU & PPT Special Work Unit) and Governance & Compliance Assurance.

Qualification and Certification

Until the end of 2019, the compliance function employees of Bank Muamalat Indonesia are 15 participated in Risk Management Certifications consists of: 1 person for Level 4, 3 people for Level 3, and 11 people for Level 2. For professional certification in Compliance consists of 3 people for Level 2 and 9 people for Level 1. In addition to the professional certification for the compliance employee, Bank Muamalat is also active in workshops or training activities held by external parties including regulators (BI/OJK/PPATK).

Implementation of Compliance Working Unit

In order to maintain and improve the implementation of compliance functions, compliance activities carried out during 2019 among others related to the improvement of the culture of compliance, compliance risk management, evaluation of internal provisions, monitoring the Bank's prudential aspects, monitoring compliance to commitments made by the Bank and compliance activities the other.

Efforts that have been made in order to support the creation of a Bank compliance culture is as follows:

1. *Build compliance awareness through email blasts with material related to regulation, GCG, APU-PPT and Anti Fraud.*
2. *Conducting socialization new regulations (sharing information) well in writing or through a socialization and submitting forum analysis of the impact of regulations on related work units to safeguard so that the Bank's business activities do not deviate from the provisions and applicable regulation.*
3. *Providing opinions on the application of the regulations including application Islamic aspects.*
4. *Doing warning/reprimand, reminder of obligations and commitments that must be delivered and implemented by the Unit Work or Business Unit.*
5. *Delivering the results of the GCG review and recommendations for improvement the application of GCG to the Directors and Board of Commissioners, as well as monitor the fulfillment of the recommendations given.*
6. *Conduct a compliance checklist for the submission process new office network and new Bank product & activity submissions to comply with BI/OJK regulations.*
7. *Arranging compliance self assessment working papers as tools to assess the level of compliance with the branch of regulation, APU PPT and sharia aspects.*

8. Ikut serta mendampingi dan membantu Dewan Pengawas Syariah dalam agenda Uji Petik Dewan Pengawas Syariah dan melakukan sosialisasi/sharing terkait dengan pemenuhan aspek syariah di Kantor Cabang.
9. Berperan aktif mendampingi Unit Bisnis dalam melakukan edukasi kepada calon nasabah penghimpunan dana khusunya terkait dengan transaksi syariah.
10. Melakukan reminder kepada seluruh unit kerja untuk menyampaikan laporan kepada otoritas pengawas melalui aplikasi Muamalat Report Reminder (MR2) dan melakukan pemantauan terhadap penyampaian laporan.
11. Mengembangkan sertifikasi internal melalui program Muamalat Internal Certification (MIC) dengan materi Basic Sharia Knowledge, Anti Fraud dan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT).
12. Melakukan *training* dan *sharing knowledge* antara lain Basic Sharia Banking, Sharia sharing session dan Training APU & PPT.

8. Participating in accompanying and assisting the Sharia Supervisory Board on the Sharia Supervisory Board's Picking and Conducting Test agenda socialization/sharing related to the fulfillment of sharia aspects in Branch office.
9. Playing an active role in assisting the Business Unit in conducting educating prospective customers to raise funds especially related to sharia transactions.
10. Performing a reminder to all work units to submit reports to the supervisory authority through Muamalat Report Reminder (MR2) application and conduct monitoring of report submission.
11. Developing internal certification through the Muamalat program Internal Certification (MIC) with Basic Sharia Knowledge material, Anti Fraud and Anti Money Laundering and Funding Prevention Terrorism (APU & PPT).
12. Conduct training and knowledge sharing, including Basic Sharia Banking, Sharia sharing session and APU & PPT Training.

Pengelolaan dan Mitigasi Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan muncul ketika bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Bank Indonesia, maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Bank senantiasa berupaya maksimal agar segala ketentuan dan peraturan yang berlaku dapat dilaksanakan dengan baik dan secara terus menerus melakukan langkah-langkah perbaikan dalam kualitas manajemen risiko, sistem pengendalian internal dan pelaksanaan tata kelola yang baik serta memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun prinsip syariah dalam menjalankan kegiatan operasional bank.

Pengelolaan risiko kepatuhan dibahas dalam rapat Risk Management Committee (RMC) yang diselenggarakan secara berkala dan disajikan dalam Laporan Profil Risiko Bank yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara Triwulanan maupun Laporan Tingkat Kesehatan Bank secara Semesteran.

Dalam mengelola risiko kepatuhan, Bank telah melakukan mitigasi risiko kepatuhan antara lain:

1. Melakukan pemantauan terhadap prudential aspect bank antara lain Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM), Posisi Devisa Neto (PDN), Giro Wajib Minumum (GWM), Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) syariah, Giro RIM syariah, Penyangga Likuiditas Moneter (PLM) syariah, Pinjaman Luar Negeri (PLN), Kualitas Aset Produktif dan Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (BMPP).
2. Melakukan *review* atas pelaksanaan tata kelola bank melalui Laporan *Good Corporate Governance* (GCG) *review* yang dilakukan secara periodik dan memonitor perbaikan pelaksanaan GCG.

Compliance Risk Management and Mitigation

Compliance risk arises when the bank does not comply or not implement the Financial Services Authority and/or Bank regulations Indonesia, as well as other laws and regulations applicable. The Bank always tries its best so that all the provisions and applicable regulations can be implemented properly and continuously take corrective steps in the quality of risk management, internal control systems and implementation of good governance and attention to principles caution and sharia principles in carrying out activities bank operations.

Compliance risk management is discussed in a Risk Management meeting Committee (RMC) which is held periodically and presented in the Bank's Risk Profile Report submitted to the Authority Quarterly Financial Services and Soundness Reports Bank on a Semester basis.

In managing compliance risk, the Bank has mitigated Compliance risks include:

1. Monitoring the prudential aspects of intermediate banks others Minimum Capital Requirement (KPMM), Foreign Exchange Position Net (PDN), Statutory Reserves (GWM), Intermediation Ratio Sharia macroprudential (RIM), Sharia RIM Giro, Liquidity Buffer Islamic Monetary (PLM), Foreign Loans (PLM), Asset Quality Earning and Maximum Provision of Financing (BMPP).
2. Reviewing the implementation of bank governance through Good Corporate Governance (GCG) review report conducted periodically and monitor improvements in the implementation of GCG.

3. Melakukan supervisi dan pendampingan kepada unit kerja dan/atau unit bisnis dalam melakukan penerbitan produk, program, operasional, sosialisasi dan/atau pendekatan terhadap nasabah dan calon nasabah serta melakukan pelatihan/*sharing* kepada karyawan baru maupun kepada pihak internal bank.
4. Melakukan perbaikan dan penyempurnaan proses bisnis Bank agar sesuai dengan peraturan yang berlaku baik dari sisi *governace* maupun sisi syariah.
5. Me*review* usulan pembiayaan melalui rapat Komite Pembiayaan level Direksi dengan menyampaikan opini baik dari aspek kepatuhan umum maupun kepatuhan syariah.
6. Menyampaikan opini, *review*, *reminder* dan *sharing info* ketentuan/peraturan terkait Kebijakan dan/atau prosedur terkait pembiayaan, pemenuhan ketentuan syariah dalam pembiayaan dan fatwa, POJK dan SEOJK.
7. Melakukan *Compliance Checklist* yang bertujuan untuk memastikan kesiapan operasional pembukaan, pemindahan alamat dan perubahan status kantor sebelum pengajuan tersebut disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
8. Melakukan penguatan atas penerapan Program APU dan PPT mengacu pada Kebijakan Penerapan APU dan PPT yang paling kurang mencakup 5 (lima) pilar, yaitu:
   a. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi;
   b. Kebijakan dan Prosedur;
   c. Pengendalian Intern;
   d. Sistem Informasi Manajemen; dan
   e. Sumber Daya Manusia dan Pelatihan.

3. *Supervise and assist the work units and/or business unit in publishing products, programs, operational, outreach and/or approach to customers and prospective customers and conduct training/sharing to new employees and internal bank parties.*
4. *Make improvements and completions to the Bank's business processes to comply with applicable regulations both in terms of governace and the sharia side.*
5. *Review the financing proposal through the Financing Committee meeting Directors level by expressing good opinions from aspects general compliance and sharia compliance.*
6. *Delivering opinions, reviews, reminders and sharing info provisions/Regulations related to policies and/or related procedures financing, compliance with sharia provisions in financing and fatwas, POJK and SEOJK.*
7. *Conduct a Compliance Checklist that aims to ensure operational readiness for opening, change of address and changes in office status prior to the submission submitted to the Financial Services Authority (OJK).*
8. *Strengthen the implementation of the AML and CFT programs refer to the most APU and PPT Implementation Policies less covering 5 (five) pillars, namely:*
   a. *Active supervision by the Board of Commissioners and Directors;*
   b. *Policies and Procedures;*
   c. *Internal Control;*
   d. *Management information System; and*
   e. *Human Resources and Training.*

Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT)

Anti Money Laundering and Prevention of Terrorism Funding (APU & PPT)

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT & PPT), selain dibutuhkan perhatian dari Direksi dan Dewan Komisaris, Bank wajib membentuk Unit Kerja Khusus atau menunjuk Pejabat Bank yang bertanggung jawab atas penerapan Program APU dan PPT. Peran Aktif dari Direksi dan Dewan Komisaris sangat diperlukan dalam menciptakan efektifitas penerapan Program APU dan PPT, mengingat peranan Direksi dan Dewan Komisaris akan mempengaruhi tingkat pencapaian tujuan Organisasi dalam penerapan Program APU dan PPT. Selain itu, peranan Direksi dan Dewan Komisaris juga dapat memotivasi karyawan dan Unit Kerja dalam mendorong terbentuknya budaya kepatuhan diseluruh jajaran organisasi. Terbentuknya kerangka kerja tata kelola perusahaan *(Corporate Governance)* yang kuat dalam organisasi akan mendukung pengawasan terhadap pelaksanaan Pedoman Penerapan Program APU dan PPT yang dimiliki.

In order to support the implemented anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing (PPT & PPT), besides needs attention from the Board of Directors and the Board of Commissioners, Bank is obliged to form Special Working Unit or appoint a responsible Bank Officer for the applied APU and PPT program. Active role from the Board of Directors and the Board of Commissioners, is very needed to create applied effectivity of APU and PPT program, in view of role of the Board of Directors and the Board of Commissioners will influence reach level of organization purpose in the applied APU and PPT program. moreover, role of the Board of Directors and the Board of Commissioners may also motivate employees and Working Unit to support a creation of compliance culture in all networks of organization. Formation of the strong Corporate Governance in the organization will support a supervision of the implemented Application Guidance of APU and PPT program owned.

Penerapan Prinsip *Customer Due Diligence* yang sebelumnya dikenal dengan Prinsip Mengenal Nasabah *(Know Your Customer)* juga telah dilaksanakan oleh Bank Muamalat Indonesia. *Customer Due Diligence* (CDD) merupakan kegiatan berupa identifikasi, verifikasi dan pemantauan yang dilakukan Bank untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan profil Calon Nasabah, Walk In Customer, atau Nasabah. Penerapan Prinsip CDD yang dilaksanakan oleh Bank Muamalat Indonesia dalam rangka untuk, mencegah pihak-pihak lain yang berupaya menggunakan Bank Muamalat Indonesia sebagai sarana masuknya uang hasil kejahatan dan sebagai pendukung kegiatan pemberantas serta pencegahan terjadinya tindakan pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Application of Customer Due Diligence principles named CDD previously known as Know Your Customer principles has been also performed by Bank Muamalat. Customer Due Diligence (CDD) is activity in the form of identification, verification and monitoring carried out by Bank to ensure that such transaction conforms to Prospective Customer profile, Walk In Customer, or Customers. The applied CDD principles performed by Bank Muamalat in order to protect, prevent other parties from desiring and trying to use Bank Muamalat as facility of entering the money of crime result and as activity support to eradicate and protect against money laundering action and terrorism funding.

Dalam rangka mencegah Bank Muamalat Indonesia dijadikan sasaran kegiatan pencucian uang dan pendanaan terorisme maka Bank Muamalat Indonesia tunduk pada peraturan yang berlaku.

In order to prevent Bank Muamalat from being the target of money laundering activity and terrorism financing, Bank Muamalat shall obey the applicable regulations.

Kegiatan terkait penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) yang dilakukan selama tahun 2019 antara lain sebagai berikut:

Activities related to the applied Anti-Money Laundering Program (APU) and the Counter-Terrorism Financing (PPT) performed throughout 2019 are as follows:

1. Aktivitas penyusunan dan penyampaian laporan (LTKM, LTKT, LTKL, SIPESAT) serta melakukan kegiatan pengkinian dan pemantauan data nasabah.
2. Melakukan Pemeliharaan Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) serta Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Masal.
3. Pemantauan implementasi penggolongan risiko nasabah menggunakan metode *Risk Based Approach* (RBA), indikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan (alert TKM), dan orang/badan usaha yang ditetapkan sebagai Tersangka atau terdakwa kasus korupsi/pencucian uang.
4. Pemenuhan permintaan data/informasi/dokumen dari pihak eksternal terutama Aparat Penegak Hukum (Apgakum) atau Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP).

1. *Report preparation and submission activities (LTKM, LTKT, LTKL, SIPESAT) and updating activities and monitoring customer data.*
2. *Maintain List of Suspected Terrorists and Organizations Terrorist (DTTOT) and Weapon Proliferation Funding List Mass destruction.*
3. *Monitoring the implementation of customer risk classifications using the Risk Based Approach (RBA) method, indication Suspicious Financial Transactions (TKM alerts), and persons/entities business that is determined as a suspect or defendant in a case corruption/ money laundering.*
4. *Fulfilling requests for data/information/documents from parties externally especially Law Enforcement Officials (Apgakum) or Supervisory and Regulatory Institution (LPP).*

5. Sharing informasi atau reminder terkait dengan penerapan Program APU & PPT kepada seluruh unit kerja terkait.
6. Pelatihan/sosialisasi/*coaching* terkait penerapan Program APU & PPT kepada karyawan terkait.
7. Melakukan *review* dan/atau memberikan opini APU & PPT terkait dengan produk, operasional maupun aktivitas Bank.
8. Menyampaikan proses kegiatan pengikinian data nasabah dengan skala prioritas antara lain untuk nasabah dengan kategori high risk, aktif bermutasi dan bersaldo cukup besar.
9. Pengisian KYC/AML *Questionnaire* yang merupakan bagian dari kegiatan koresponden banking guna memastikan penerapan AML/KYC dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.
10. Permintaan dan penyampaian informasi ke Unit Kerja terkait.
11. Penyampaian Informasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI) dan Laporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
12. Mengikuti pelatihan/workshop terkait APU & PPT dari PPATK, OJK dan FKDKP.
13. Melakukan monitoring CIF dalam rangka memastikan Bank memelihara profil Nasabah secara terpadu (Single CIF) untuk mengurangi data-data CIF yang duplicate.
14. Menyelenggarakan program sertifikasi APU & PPT yang dilaksanakan secara internal bekerjasama dengan Learning & Talent Management dalam rangka meningkatkan pemahaman seluruh karyawan terhadap penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT).

5. Information sharing or reminder related to implementation APU & PPT program to all relevant work units.
6. Training/workshop/coaching related to the implementation of the APU & PPT to related employees.
7. Conduct reviews and/or provide related APU & PPT opinions with products, operations and activities of the Bank.
8. Conveying the process of updating customer data activities the priority scale, among other things, for customers by category high risk, actively mutating and having a large enough balance.
9. Completion of KYC/AML Questionnaire which is part of banking correspondent activities to ensure implementation AML/KYC is implemented in accordance with the provisions.
10. Request and delivery of information to the relevant Work Unit.
11. Submission of Information to the Corruption Eradication Commission Republic of Indonesia (KPK-RI) and Reports to the Reporting Center and Financial Transaction Analysis (PPATK).
12. Following training/workshops related to APU & PPT from PPATK, OJK and FKDKP.
13. Conduct CIF monitoring in order to ensure the Bank maintain the Customer's profile in an integrated manner (Single CIF) for reduce duplicate CIF data.
14. Carrying out the AML & CFT certification program implemented internally in collaboration with Learning & Talent Management in order to increase understanding all employees towards the application of Anti Money Laundering and Prevention of Terrorism Funding (APU & PPT).

Setiap tahun dilakukan kegiatan pengkinian data nasabah dengan skala prioritas antara lain untuk nasabah dengan kategori high risk, aktif bermutasi dan bersaldo cukup besar. Selain itu, secara rutin Unit Kerja Kepatuhan melaporkan hasil monitoring terkait APU & PPT kepada Direksi dan Dewan Komisaris sebagai salah satu bentuk pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris.

Every year customer data updating activities are carried out with the priority scale is for customers in the high risk category, actively mutate and have a large enough balance. In addition, routinely The Compliance Work Unit reports the results of monitoring related to APU & PPT to the Directors and Board of Commissioners as one form active supervision of the Board of Directors and the Board of Commissioners.

Dalam rangka penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU& PPT) sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Unit Kerja Khusus APU & PPT telah menyampaikan laporan atau menindaklanjuti permintaan dari Aparat Penegak Hukum atau pihak eksternal lainnya yang antara lain:

1. *Cash Transaction Report* (CTR), *Suspicious Transaction Report* (STR), Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana dari dan Keluar Negeri (LTKL), serta Sistem Pengguna Jasa Terpadu/SIPESAT kepada PPATK;
2. Penyampaian data/informasi atau laporan kepada PPATK;
3. Penyampaian data/informasi atau pemblokiran rekening kepada KPK; dan
4. Penyampaian data/informasi atau pemblokiran rekening kepada Bareskrim POLRI/Densus dan pihak eksternal lainnya.

In the framework of implementing the Anti Money Laundering Program and Prevention of Terrorism Funding (APU & PPT) in accordance with applicable regulations, APU & PPT Special Work Unit has submit a report or follow up on a request from the Apparatus Law Enforcement or other external parties which include:

1. Cash Transaction Report (CTR), Suspicious Transaction Report (STR), Reports of Transfers and Transfers of Financial Transactions State (LTKL), and Integrated Service User System/SIPESAT to PPATK;
2. Submission of data/information or reports to PPATK;
3. Submission of data/information or account blocking to KPK; and
4. Submission of data/information or account blocking to Bareskrim POLRI/Detachment and other external parties.

Permasalahan Hukum/Litigasi Perusahaan dan Anak Perusahaan

Legal Issues/Litigation of Company and Subsidiaries

Bank Muamalat Indonesia menghadapi permasalahan hukum baik di bidang Perdata maupun Pidana. Periode Januari sampai dengan Desember 2019, tercatat 177 (seratus tujuh puluh tujuh) perkara Perdata yang terdaftar di berbagai Pengadilan dan 16 (enam belas) perkara Pidana yang diperiksa di tahap penyelidikan maupun pengadilan.

Bank Muamalat Indonesia faces legal issues both in the field Civil and Criminal Law. The period of January to December 2019, 177 (one hundred seventy seven) Civil cases were recorded registered in various Courts and 16 (sixteen) Criminal cases examined at the investigation and court stages.

Dari 177 (seratus tujuh puluh tujuh) perkara perdata tersebut tercatat 59 (lima puluh sembilan) perkara telah diputus dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap, sedangkan 118 (seratus delapan belas) perkara masih dalam tahap pemeriksaan di tingkat pertama, tingkat banding maupun tingkat kasasi. Adapun untuk perkara pidana, terdapat 2 (dua) permasalahan hukum pidana yang dinyatakan telah selesai, dan 14 (empat belas) perkara pidana masih dalam pemeriksaan tahap penyelidikan, peyidikan maupun pengadilan.

Of these 177 (one hundred and seventy-seven) civil cases were recorded 59 (fifty-nine) matters have been decided by a decision law enforcement, while 118 (one hundred and eighteen) things are still in the inspection stage on the first floor, floor appeal or cassette level. As for criminal matters, There are 2 (2) criminal law issues that have been stated and 14 (fourteen) criminal cases are under investigation stage of investigation, investigation and judgment.

Permasalahan hukum Bank Muamalat Indonesia Tahun 2019 dapat digambarkan dalam tabel berikut:

The legal problems of Bank Muamalat Indonesia in 2019 can be illustrated in the following table:

Permasalahan Hukum *Legal Issues*	Jumlah *Total*	
	Perdata *Civil*	Pidana *Criminal*
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) *Done (has permanent legal powers)*	59	2
Dalam proses penyelesaian *In the process of completion*	118	14
Total	177	16

Pokok Perkara yang melibatkan Bank Muamalat Indonesia, antara lain:

1. **Perlawanan terhadap eksekusi hak tanggungan dengan dasar wanprestasi, terdaftar di Pengadilan Agama Jember.**
   Bank Muamalat Indonesia telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada Penggugat dengan tujuan untuk pembelian tanah dan bangunan, namun Penggugat tidak memenuhi kewajiban pembayaran kepada Bank Muamalat Indonesia sehingga akan dilakukan lelang eksekusi hak tanggungan melalui KPKNL. Penggugat mengajukan gugatan dengan alasan Bank Muamalat Indonesia telah wanprestasi karena tidak pernah melakukan upaya penyelamatan pembiayaan (restruktur) dan menuntut agar Pengadilan Agama menyatakan lelang yang akan dilakukan adalah tidak sah.

2. **Gugatan perbuatan melawan hukum oleh ahli waris pemilik asal jaminan, terdaftar di Pengadilan Negeri Medan.**
   Bank Muamalat Indonesia telah memberikan pembiayaan kepada debitur (Tergugat) untuk pembelian tanah dan bangunan milik orang tua Penggugat, akan tetapi Penggugat sebagai salah satu dari wahli waris menyatakan tidak mengetahui transaksi jual beli tersebut. Faktanya transaksi jual beli dilakukan oleh dan antara

Key Matters involving Bank Muamalat Indonesia include:

1. ***Resistance to execution of mortgage rights on the basis of default, registered with the Jember Religious Court.***
   Bank Muamalat Indonesia has provided financing facilities to Plaintiffs for the purpose of purchasing land and buildings, however the Plaintiff did not fulfill payment obligations to Bank Muamalat Indonesia so an execution auction will be conducted mortgage rights through the KPKNL. The plaintiff filed a lawsuit on the grounds that Bank Muamalat Indonesia has defaulted because it did not have made efforts to save financing (restructuring) and demand that the Religious Court declare its auctions Will do is not legal.

2. ***Lawsuits against the law by the heirs of the original owner guarantee, registered with the Medan District Court.***
   Bank Muamalat Indonesia has provided financing to debtors (Defendant) for the purchase of land and buildings owned by parents The Plaintiff, but the Plaintiff is one of the Wahli the heirs stated that they did not know about the transaction. The fact is that buying and selling transactions are carried out by and

para ahli waris dengan debitur dan sertifikat tanah telah dibalik nama ke atas nama debitur.

3. **Perlawanan yang diajukan oleh pemilik asal jaminan dengan dasar perbuatan melawan hukum, terdaftar di Pengadilan Negeri Surakarta**

   Bank Muamalat Indonesia memberikan pembiayaan kepada debitur (Tergugat 2) dengan jaminan tanah dan bangunan sebelumnya dimiliki atas dasar PPJB dan kemudian dilanjutkan dengan AJB dan proses balik nama serta dibebani hak tanggungan. Para Penggugat menggugat Para Tergugat dan menyatakan tidak pernah menjual objek sengketa, hanya meminjam uang kepada Tergugat 1 dan menyerahkan sertifikat sebagai jaminan.

Sebagian besar permasalahan hukum perdata yang dihadapi Bank Muamalat Indonesia merupakan perkara perlawanan terhadap eksekusi hak tanggungan yang telah dan atau akan dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia, dimana perkara-perkara tersebut merupakan perkara dengan tingkat risiko yang minim dan tidak terlalu berpengaruh terhadap bisnis Bank Muamalat Indonesia secara keseluruhan. Namun demikian Bank Muamalat akan tetap menangani dan memonitor perkembangan setiap perkara sehingga dapat melindungi hak dan kepentingan hukum Bank Muamalat Indonesia secara maksimal.

between experts inheritance with the debtor and land certificate has been reversed name to on behalf of the debtor.

3. ***Resistance submitted by the original owner of the guarantee with the basis for acts against the law, registered with the District Court Surakarta***

   Bank Muamalat Indonesia provides financing to debtors (Defendant 2) with previous land and building collateral owned on the basis of PPJB and then continued with AJB and the process of transferring the name and being burdened with mortgage rights. Para The plaintiff sued the Defendants and stated no once sold the disputed object, only borrowed money from Defendant 1 and submit the certificate as collateral.

Most of the civil law issues faced by the Bank Muamalat Indonesia is a matter of resistance to the execution of rights liabilities that have been and will be incurred by Bank Muamalat Indonesia, where these are matters of degree the risk is minimal and has little effect on the Bank's business Muamalat as a whole. Bank Muamalat Indonesia, however will continue to handle and monitor the progress of each matter thereby protecting the Bank's legal rights and interests Make the most of it.

Akses Informasi dan Data Perusahaan

Information Access and Company Data

Perseroan senantiasa berkomitmen untuk menerapkan nilai-nilai GCG, diantaranya melalui penerapan keterbukaan informasi baik secara internal maupun eksternal. Pengelolaan dan Keterbukaan akan informasi tentang Perusahaan sangat penting dalam membangun citra Perusahaan di mata publik khusunya para stakeholder. Oleh karenanya Bank Muamalat Indonesia berupaya untuk memberikan informasi yang aktual dan bermanfaat dengan memperhatikan ketentuan terkait data Perusahaan yang tergolong rahasia.

The Company is always committed to implementing GCG values, including through the implementation of information disclosure both internally and externally. Management and disclosure of information about the Company is very important in building the Company's image in the public eye especially stakeholders. Therefore, Bank Muamalat strives to provide actual and useful information by taking into account provisions relating to classified Company data.

Bank Muamalat Indonesia percaya bahwa penyebaran informasi kepada seluruh pemangku kepentingan merupakan bagian penting dari perwujudan prinsip transparansi informasi secara internal dan eksternal, yang diharapkan membantu, menjaga dan meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan persepsi positif dari para pemangku kepentingan terhadap kebijakan dan kegiatan Bank. Untuk menyediakan informasi terkini bagi seluruh pemangku kepentingan, Bank Muamalat Indonesia menyediakan sarana portal informasi melalui situs Perseroan di www.bankmuamalat.co.id.

Bank Muamalat Indonesia believes that information dissemination to all stakeholders is an important part from the embodiment of the principle of information transparency internally and external, which is expected to help, maintain and improve knowledge, understanding, and positive perceptions from stakeholders interest in the policies and activities of the Bank. In terms of providing the up to date information for all stakeholders, Bank Muamalat Indonesia provides a portal of information through the Company's website at www.bankmuamalat.co.id.

Penyediaan informasi bagi Pemegang Saham dan pemangku kepentingan dapat lebih lanjut diakses melalui:

Provision of information for Shareholders and stakeholders can be further accessed by means of:

Media Elektronik

Seiring dengan semakin bekembangnya Bank Muamalat, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi *(Information & Communication Technology/ICT)* yang andal sangatlah dibutuhkan untuk mendukung penyampaian informasi kepada publik baik internal maupun eksternal. Teknologi Informasi (TI) menjadi penting dalam beberapa tahun terakhir sebab akses database elektronik menjadi salah satu alternatif yang penting dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat akan informasi. Karenanya penggunaan TI berbasis digital menjadi tuntutan mutlak dalam pengembangan media komunikasi Bank Muamalat Indonesia saat ini dan di masa mendatang.

Electronic Media

Along with the development of Bank Muamalat, the use of reliable information and communication technology (ICT) is needed to support the delivery of information to the public both internal and external. Information Technology (IT) has become important in recent years because electronic database access has become one of the important alternatives in meeting the needs of the community for information. Thus, the use of digital-based IT is an absolute demand in the development of Bank Muamalat Indonesia communication media now and in the future.

Informasi mengenai Bank Muamalat Indonesia dapat diakses melalui:
Telp: (021) 80666000
Fax: (021) 80666001
Email : Info@bankmuamalat.co.id
Facebook : Bank Muamalat
Twitter : @BankMuamalat
Instagram : @bank.muamalat
Youtube : Bank Muamalat

Information about Bank Muamalat Indonesia can be accessed through:
Telp: (021) 80666000
Fax: (021) 80666001
Email : Info@bankmuamalat.co.id
Facebook : Bank Muamalat
Twitter : @BankMuamalat
Instagram : @bank.muamalat
Youtube : Bank Muamalat

Siaran Pers

Setiap aksi korporasi dan kegiatan penting lainnya secara aktif dipublikasikan melalui berita dan informasi terkini yang tersedia di situs Bank.

Press Conference

Every corporate action and other pivotal activities actively published through the latest news and information available at bank website.

Salamuamalat

Merupakan layanan Phone Banking 24 jam melalui nomor 1500016 dan untuk nasabah yang berada di luar negeri dapat mengaksesnya melalui +6221 8066 8000 yang memberikan kemudahan kepada nasabah, setiap saat dan dimanapun nasabah berada. Dengan menghubungi SalaMuamalat anda dapat melakukan:

1. Informasi Saldo;
2. Cek Mutasi;
3. Pemindahbukuan;
4. Transfer antar rekening Bank Muamalat Indonesia hingga maksimal Rp50.000.000;
5. Pembayaran Zakat Infaq Shodaqoh;
6. Informasi Produk Pendanaan;
7. Informasi Produk Pembiayaan;
8. Layanan Pengaduan dan Kehilangan Kartu;
9. Layanan Virtual Account;
10. Layanan untuk berbicara dengan SalaMuamalat officer.

Salamuamalat

It is a 24-hour Phone Banking service through the number 1500016 and for customers who are abroad can access it through +6221 8066 8000 which provides convenience to customers, at any time and wherever the customer is located. By contacting SalaMuamalat you can do:

1. *Balance Information;*
2. *Check Movements;*
3. *Book-entry;*
4. *Transfers between Bank Muamalat Indonesia accounts up to a maximum of Rp50,000,000;*
5. *Payment of Zakat Infaq Shodaqoh;*
6. *Funding Product Information;*
7. *Information on Financing Products;*
8. *Complaint and Loss of Card Services;*
9. *Virtual Account Services;*
10. *Service to talk with SalaMuamalat officer.*

Sekretaris Perusahaan

Jl. Prof. Dr. Satrio, Kav. 18
Kuningan Timur, Setiabudi
Jakarta Selatan 12940
Telp. : 021-80666000 ext. 117023
Email : corporate.secretary@bankmuamalat.co.id

Corporate Secretary

Jl. Prof. Dr. Satrio, Kav. 18
Kuningan Timur, Setiabudi
South Jakarta 12940
Telp. : 021-80666000 ext. 117023
Email : corporate.secretary@bankmuamalat.co.id

Bank Muamalat Indonesia juga selalu membagikan informasi kepada publik mengenai aktivitas bisnis yang dilakukan. Sepanjang tahun 2019, keterbukaan informasi yang dipaparkan kepada publik adalah:

Bank Muamalat Indonesia always shares information with public regarding business activities carried out. Throughout the year 2019, the disclosure of information presented to the public is:

No.	Keterangan *Description*	Tanggal *Date*	Media *Media*
1.	Publikasi Risalah RUPS Luar Biasa PT Bank Muamalat Indonesia Tbk *Publication of Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk*	18-Des-19 *18-Dec-19*	Website Bank dan Surat Kabar Republika
2.	Publikasi Risalah RUPS Tahunan dan Luar Biasa PT Bank Muamalat Indonesia Tbk *Publication of the Minutes of the Annual and Extraordinary GMS of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk*	21-Mei-19 *21-May-19*	Website Bank dan Surat Kabar Kontan
3.	Publikasi Laporan Keuangan Bank Muamalat Q1 *The publication of Muamalat Bank Financial Report Q1*	20-Mei-19 *20-May-19*	Website Bank dan Surat Kabar Suara Pembaruan
4.	Keterbukaan Informasi tentang Pengumuman RUPS Tahunan dan Luar Biasa PT Bank Muamalat Indonesia Tbk *Information Disclosure regarding Annual General Meeting of Shareholders and Extraordinary PT Bank Muamalat Indonesia Tbk*	10-Apr-19 *10-Apr-19*	Website Bank dan Surat Kabar Suara Pembaruan
5.	Publikasi Laporan Keuangan Bank Muamalat 2018 Q4 *Publication of Muamalat Bank Financial Statements 2018 Q4*	16-Apr-19 *16-Apr-19*	Website Bank dan Surat Kabar Pembaruan
6.	Rancangan Akuisisi atas sekitar 50,3% dari Keseluruhan Saham yang Diterbitkan dalam PT Bank Muamalat Indonesia Tbk oleh Al Falah Investment PTE Limited *The acquisition plan for around 50.3% of the total shares Published in PT Bank Muamalat Indonesia Tbk by Al Falah Investment PTE Limited*	17-Apr-19 *17-Apr-19*	Website Bank dan Surat Kabar Kontan
7.	Penyampaian Laporan Tahunan 2018 *Submission of 2018 Annual Report*	25-Apr-19 *25-Apr-19*	Website Bank
8.	Keterbukaan Informasi tentang Pemanggilan RUPS Tahunan dan Luar Biasa PT Bank Muamalat Indonesia Tbk *Information Disclosure regarding to mobilize the Annual and Extraordinary GMS of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk*	25-Apr-19 *25-Apr-19*	Website Bank dan Surat Kabar Investor Daily

No.	Keterangan *Description*	Tanggal *Date*	Media *Media*
9.	Informasi kepada Pemegang Saham dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas VI ("PUT VI") dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu *Information to Shareholders in the Context of Limited Public Offering I ("LPO VI") with Pre-emptive Rights*	30-Apr-19 *30-Apr-19*	Website Bank dan Surat Kabar Suara Pembaruan
10.	Publikasi Laporan Keuangan Bank Muamalat Q2 *Publication of Muamalat Bank Financial Report Q2*	31-Jul-19 *31-Jul-19*	Website Bank dan Surat Kabar Suara Pembaruan
11.	Keterbukaan Informasi Dalam Rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32 /POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32 /POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu *Information Disclosure in the context of fulfilling Regulations Financial Services Authority No. 32/POJK.04/2015 about Increase Capital of a Public Company by Providing Pre-emptive Rights As Amended By OJK Regulation No. 14/POJK.04/2019 concerning Amendments to the above Financial Services Authority Regulation No. 32/POJK.04/2015 about Increase Capital of a Public Company by Giving Rights Pre-order Securities*	8-Nov-19 *8-Nov-19*	Website Bank dan Surat Kabar Suara Pembaruan
12.	Penyampaian Laporan Berkelanjutan Bank 2018 *Submission of the 2018 Bank Sustainability Report*	8-Nov-19 *8-Nov-19*	Website Bank
13.	Keterbukaan Informasi tentang Pengumuman RUPS Luar Biasa PT Bank Muamalat Indonesia Tbk *Information Disclosure regarding Extraordinary General Meeting of Shareholders PT Bank Muamalat Indonesia Tbk*	8-Nov-19 *8-Nov-19*	Website Bank dan Surat Kabar Suara Pembaruan
14.	Keterbukaan Informasi tentang Pemanggilan RUPS Luar Biasa PT Bank Muamalat Indonesia Tbk *Disclosure of Information regarding Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk*	24-Nov-19 *24-Nov-19*	Website Bank dan Surat Kabar Media Indonesia
15.	Publikasi Laporan Keuangan Bank Muamalat Q3 *The publication of Muamalat Bank Financial Report Q3*	29-Nov-19 *29-Nov-19*	Website Bank dan Surat Kabar Suara Pembaruan
16.	Pemberitahuan Perubahaan Anggota Komite Audit PT Bank Muamalat Indonesia Tbk ("Perseroan") *Notification of Changes in PT Bank Audit Committee Members Muamalat Indonesia Tbk ("The Company")*	9-Des-19 *9-Dec-19*	Website Bank

Kode Etik
Code of Conduct

Bank telah memiliki kode etik yang berisikan standar perilaku, sistem nilai, etika bisnis, etika kerja, komitmen dan penegakan terhadap peraturan-peraturan yang berlaku bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan. Disusun mengacu kepada Kode Etik Bankir Indonesia, *Core Values* Bank Muamalat Indonesia dan Ittifaq serta berdasarkan best practice penerapan *Good Corporate Governance*.

Bank has code of conduct containing attitude standard, value system, business ethics, working ethics, commitment and enforcement to the applicable regulation for members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and employees. It is composed by referring to code of Indonesian Banker Conduct, Core Values of Bank Muamalat and Ittifaq as well as based on the best practice applied to the Good Corporate Governance.

Pokok-Pokok Kode Etik

Inti Kode Etik Bank Muamalat Indonesia antara lain:

1. Kepatuhan terhadap ajaran Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Memastikan Kehalalan Sumber, Proses dan Hasil dari Pekerjaan, yaitu mencakup pengaturan benturan kepentingan, hubungan dengan *stakeholder*, kegiatan politik Karyawan.
3. Menunjukkan Perilaku Disiplin dalam Bekerja dan Menjalankan Ibadah.
4. Menjunjung Tinggi Etika Moral dan Sopan Santun.
5. Menjaga amanah yang diberikan, termasuk pengaturan perilaku untuk menjaga nama baik Perusahaan, menjaga fasilitas Perusahaan, melayani Nasabah dengan baik, dan mencegah tindakan pelanggaran.
6. Menjaga Kerahasiaan Informasi Nasabah dan Perusahaan.

Principles of Code of Conducts

The cores of Code of Conducts of Bank Muamalat Indonesia are:

1. *Compliance to Islamic teaching and the applicable laws and regulations.*
2. *To ensure halal source, Process and Results of Work, that is covering conflict of interest arrangement, relation with stakeholder, employee's political activity.*
3. *To show discipline attitude in working and conducting worship.*
4. *To uphold moral ethics and politeness.*
5. *To keep mandate granted, including attitude arrangement to keep the Corporate's reputation, maintain the Corporate's facilities, serve Customers well, and prevent action from violation.*
6. *To protect Customer's and Corporate's Information Confidentiality.*

Pengungkapan Kepatuhan bahwa Kode Etik Berlaku bagi Seluruh Level Organisasi

Bank Muamalat Indonesia secara berkelanjutan mengimplementasikan penerapan manajemen risiko yang menyeluruh untuk setiap lini kerja Bank, mulai dari staff hingga level manajemen dengan tujuan agar dapat menghasilkan pertumbuhan bisnis yang sehat, serta memaksimalkan nilai tambah bagi pemegang saham dalam jangka panjang.

Disclosure of Compliance Stated Code of Conducts Applied to Entire Organization Levels

Bank Muamalat Indonesia sustainably implements the risk management application comprehensively for each Bank work line, for the purpose of resulting in healthy business growth, as well as maximizes a value added of shareholders for long-term.

Sosialisasi dan Penyebarluasan Kode Etik

Bank Muamalat Indonesia senantiasa melakukan sosialisasi dari tahun ke tahun melalui serangkaian training, menayangkan materi Kode Etik melalui media Muamalat Human Power yang dapat diakses oleh seluruh Karyawan, serta sosialisasi yang dilakukan melalui HC News. Sebagai perwujudan penerapan *Good Corporate Governance*, seluruh Karyawan telah diwajibkan untuk memberikan pernyataan kesanggupan menjalankan Kode Etik secara online melalui aplikasi Muamalat Human Power.

Dissemination and Expansion of Code of Conducts

Bank Muamalat Indonesia always conducts outreach from year to year through a series of training, displaying Code of Ethics through the Muamalat Human Power media that can be accessed by all Employees, as well as outreach conducted through HC News. As a manifestation of the implementation of Good Corporate Governance, all Employees have been required to provide a statement of ability to run the Code of Ethics online through the Muamalat Human Power application.

Kebijakan Anti Korupsi/Fraud dan Sosialisasinya

Anti-Corruption/Fraud Policy and the Implementation

Bank telah mengatur tentang kebijakan Anti Korupsi di Bank yang tertuang di dalam Kode Etik & Perilaku Kepegawaian. Selain itu, dalam rangka mendukung penerapan Kebijakan Anti Korupsi, Bank Muamalat Indonesia memiliki layanan pengaduan nasabah serta program pelaporan pelanggaran sebagaimana dijabarkan di dalam buku Laporan Tahunan ini.

The Bank has regulated the Anti-Corruption policy in the Bank as set out in the Code of Ethics & Staffing Behavior. In addition, in order to support the implementation of the Anti-Corruption Policy, Bank Muamalat Indonesia has a customer complaint service and a violation reporting program as outlined in this Annual Report book.

Fungsi Anti Fraud

Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, fungsi Anti Fraud menerapkan strategi pengendalian fraud dengan mengacu kepada SEBI No. 13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011 yang memiliki 4 (empat) pilar sebagai berikut:

1. Pencegahan yaitu melakukan langkah-langkah dalam rangka mengurangi potensi risiko terjadinya Fraud, antara lain anti *fraud awereness*, identifikasi kerawanan, dan *know your employee* dijabarkan dibawah ini:
   a. **Anti Fraud Awareness**
      Upaya untuk menumbuhkan *Anti Fraud Awareness* dilakukan diantaranya melalui:
      i. Penyampaian Deklarasi Anti Fraud
         Deklarasi Anti Fraud ini wajib untuk diketahui, dipahami dan ditandatangani/disetujui oleh seluruh karyawan BMI dua kali setahun melalui "Muamalat Human Power (MHP)" atau sistem/ aplikasi SDM yang diperbaharui setiap tahunnya.
      ii. Program Employee Awareness
         Secara konsisten melaksanakan program kampanye/sosialisasi Anti Fraud serta Email Blast melalui *employee relations* ke seluruh karyawan di kantor kas, kantor capem dan kantor cabang. Selain itu juga dikirim melalui *News Letter* yang di email kepada seluruh pejabat internal Bank Muamalat Indonesia untuk diteruskan kepada sub ordinat masing-masing. Program kampanye tersebut juga dilaksanakan bekerjasama dengan HC Learning pada saat pelaksanaan program *training reguler* di unit kerja/bisnis seperti Program Mulia, MODP *Future Leader*, dan RFC *Managers Program*.
      iii. Program Customer Awareness
         - Menyampaikan informasi anti fraud di media elektronik Bank: ATM, Mobile Banking, Internet Banking, dan juga melalui media sosial (Twitter, Facebook).
         - Himbauan tertulis di area banking hall.
      iv. Pelaksanaan Training
         Mengikutsertakan karyawan dalam eksternal training/ workshop.
      v. Sosialisasi Anti Fraud
         Telah dilakukan *Training of Trainer* (ToT) Anti Fraud yang diikuti oleh Region Head, Region Operation Manager, Branch Manager, dan Branch Operation

Anti Fraud Function

In the performed function and duties, Anti-Fraud function applies a fraud control strategy referring to SEBI No. 13/28/DPNP dated December 9, 2011 having 4 (four) pillars, that are:

1. *Prevention is to take steps in order to reduce risk potency of the occurred fraud, among others anti-fraud awereness, identification of crisis, and know your employee are explained below:*
   a. ***Anti-Fraud Awareness***
      Trying to grow Anti-Fraud Awareness is made, among others:
      i. *Submitted Anti-Fraud Declaration*
         Anti-fraud declaration is obliged to know, understand and sign/approve by all employees of BMI twice in a year through "Muamalat Human Power (MHP)" or SDM system/application renewed every year.
      ii. *Employee Awareness Program.*
         Campaign program/Anti-Fraud socialization along with Email Blast through the employee relation to all employees in cash office, supporting-branch office and branch office is performed. Moreover, News Letter is emailed to all internal officers of Bank Muamalat Indonesia to be continued to each subordinate. Such campaign program is also performed in cooperation with HC Learning at the time of the performed regular training program in the working/business unit, such as Mulia Program, MODP Future Leader, and RFC Managers Program.
      iii. *Customer Awareness Program*
         - *Delivering anti-fraud information on the Bank's electronic media: ATM, Mobile Banking, Internet Banking, and also through social media (Twitter, Facebook).*
         - *A written appeal in banking hall area.*
      iv. *Training*
         It includes employees in external training/workshop.
      v. *Anti-Fraud Socialization*
         Training of Trainer (ToT) Anti-Fraud attended by Region Head, Region Operation Manager, Branch Manager, and Branch Operation Manager throughout Indonesia area and branch

Manager diseluruh area dan cabang se-Indonesia yang kemudian disebut *Anti Fraud Ambasador* (Ambasador). Ambasador diberi sertifikat dan memiliki kewajiban untuk menyampaikan kampanye di area dan cabang masing-masing.

b. **Identifikasi Kerawanan**
Berdasarkan kasus-kasus *fraud* yang terjadi, aktivitas yang memiliki tingkat kerawanan *fraud* yang tinggi antara lain bidang Operasional, bidang Pembiayaan, dan bidang Teknologi Informasi. Hasil identifikasi kerawanan telah tertuang dalam rekomendasi perbaikan masing-masing kasus dan telah disampaikan kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti.

c. ***Know Your Employee***
Dalam hal proses seleksi atau rekruitmen calon karyawan, Divisi terkait atau Kantor Cabang secara reguler telah melakukan proses penerimaan calon karyawan sesuai dengan prosedur yang berlaku, termasuk yang terkait dengan *screening*.

2. Deteksi yaitu melakukan langkah-langkah dalam mengidentifikasi dan menemukan *Fraud* dalam kegiatan usaha bank, antara lain kebijakan dan mekanisme *whistleblowing, surprise audit* dan *surveillance system* dijabarkan dibawah ini:
   a. Kebijakan dan Mekanisme *Whitsleblowing* Kebijakan *Whitsleblowing* telah tercantum dalam ketentuan internal, yakni terkait perlindungan kepada *whistleblower,* pengaduan fraud dan Sistem Pelaporan & Mekanisme Tindak Lanjut Laporan dengan mengacu pada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku dimana Bank menjamin kerahasiaan identitas pelapor dan laporan yang disampaikannya dengan format bebas.
   b. Surprise Audit Pemeriksaan mendadak untuk meningkatkan kewaspadaan karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam rangka pencegahan fraud di Bank Muamalat Indonesia.
   c. Surveillance System Pemeriksaan secara diam-diam untuk meningkatkan kewaspadaan karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dalam rangka pencegahan *fraud* di Bank Muamalat Indonesia.
3. Investigasi, Pelaporan dan Sanksi yaitu melakukan langkah-langkah dalam rangka menggali informasi (investigasi), sistem pelaporan dan pengenaan sanksi atas *fraud* dalam kegiatan usaha bank.
   a. Investigasi
   Investigasi dilakukan untuk:
      i. Mengumpulkan bukti-bukti yang terkait dengan kejadian yang patut diduga merupakan tindakan *fraud*, sehingga (jika diperlukan) dapat digunakan untuk melakukan tuntutan hukum ke pengadilan.
      ii. Mengetahui bagaimana *fraud* dapat terjadi.

later named Anti-Fraud Ambassador (Ambassador) has been provided. Ambassador gives certificate and obligation to conduct campaign in each area and branch.

b. ***Vulnerability Identification***
Based on fraus cases occurred, activity having high level of fraud crisis among others in the field of Operation, Finance, and Information Technology. Crisis identification results are included in the improvement recommendation of each cases and have been submitted to related parties to follow up.

c. ***Know Your Employee***
In the selection or recruitment process of prospective employees, the related Division or Branch Office egularly, recruitment process of prospective employees in accordance with the applicable procedures, including those relating to the screening has been taken place.

2. Detection is to take steps for identifying and finding Fraud in bank business activity, among others whistleblowing policy and mechanism, surprise audit and surveillance system explained below:
   a. Whistleblowing policy has been included in internal provisions, that is related to protection against whistleblower, fraud complaint and Reporting & Mechanism System of report follow-up referring to the applicable laws and regulations in which the Bank guarantees confidentiality of informant's identity and report submitted in free format.
   b. A surprise audit to increase employee awareness in the performance of duties and responsibilities in order to prevent fraud in Bank Muamalat.
   c. A secret audit to increase employee awareness in the performance of duties and responsibilities in order to prevent fraud in Bank Muamalat Indonesia.

3. Investigatioin, Reporting and Sanction are to take steps in order to dig information (investigation), reporting system and sanction imposed to the fraud in bank business activity.
   a. Investigation
   Investigation is carried for:
      i. To collect evidences related to events which are suspected as fraud, so that (if required) it can be used to file a lawsuit in court.
      ii. To know how fraud can occur.

iii. Mengetahui dampak atas fraud, pihak yang terlibat dan kelemahan dari sistem/proses yang menyebabkan terjadinya *fraud* sehingga dapat ditemukan langkah perbaikan yang efektif.
iv. Pemberian sanksi kepada pelaku *fraud*.

b. **Pelaporan**
Sistem pelaporan mencakup pelaporan secara internal kepada pihak Manajemen Bank maupun kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.

c. **Sanksi**
Pihak yang berwenang memutuskan pengenaan sanksi yang dikategorikan sebagai tindakan fraud berdasarkan hasil rekomendasi Komite Disiplin adalah Direksi. Pengenaan jenis dan kadar berat ringannya sanksi kepada pelaku mengacu kepada ketentuan yang berlaku.

4. Pemantauan, Evaluasi dan Tindak lanjut yaitu melakukan langkah-langkah dalam rangka memantau dan mengevaluasi fraud, serta mekanisme tindak lanjut seperti dijabarkan dibawah ini:
   a. **Pemantauan**
   Melakukan pemantauan terhadap tindakan perbaikan dalam upaya menghindari berulangnya kasus fraud yang sama dan memastikan bahwa rekomendasi perbaikan telah dilaksanakan secara memadai oleh unit kerja terkait.
   b. **Evaluasi**
   Mengevaluasi akar penyebab dari setiap kejadian *fraud* untuk menentukan langkah perbaikan *(corrective action)* yang perlu dilakukan, mencakup evaluasi terhadap kecukupan kontrol (sistem pengendalian) dan pelaksanaan pedoman dan prosedur kerja, proses pengelolaan risiko dan proses tata kelola di unit kerja terkait tempat terjadinya *fraud*.
   c. **Tindak Lanjut**
   Memperbaiki penyebab terjadinya *fraud* dengan memperkuat sistem pengendalian internal, proses pengelolaan risiko dan proses tata kelola yang lebih baik.

Disamping itu fungsi Anti Fraud mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain:

1. Berkewajiban merahasiakan seluruh informasi yang berkaitan dengan identitas pelapor selamanya.
2. Berkewajiban merahasiakan seluruh informasi selama proses investigasi berlangsung.
3. Berkewajiban menyampaikan laporan hasil audit khusus/ investigasi kepada Presiden Direktur, Komisaris melalui Komite Audit dan ditembuskan ke Direktur Kepatuhan untuk mendapatkan arahan yang selanjutnya dilaporkan kepada pihak terkait untuk dapat ditindaklanjuti.
4. Berkewajiban menyerahkan seluruh dokumen dan data termasuk keterangan dari pihak-pihak terkait kepada Komite Disiplin.
5. Menyusun dan melakukan kajian ulang secara berkala atas Pedoman dan Prosedur *Anti Fraud*.

iii. To know impact on the fraud, parties involved and weakness of the system/process causing the fraud so that effective steps of improvement can be found.
iv. Sanction imposed to a fraud actor.

*b. **Reporting***
Reporting system covers internal reporting to Bank Management and the Financial Service Authority and Bank Indonesia.

*c. **Sanction***
The authorized party to decide the imposed sanction categorized as fraud action based on recommendation results of Discipline Committee is the Board of Directors. The imposed sanction type and level of light or heavy sanction to an actor refer to the applicable provisions.

4. Monitoring, Evaluation and Follow-up are to take steps in order to monitor and evaluate fraud, as well as follow-up mechanism as explained below:
   *a. **Monitoring***
   To do a monitoring of improvement to avoid the same repeating fraud case and ensure that recommendation of improvement has been carried out sufficiently by related working unit.
   *b. **Evaluation***
   To evaluate root cause of each fraud event to determine a corrective action required to do, it covers evaluation of control adequacy (control system) and an implemented guidance and work procedures, risk management process and governance process in the working unit related to the occurred place of fraud.
   *c. **Follow-up***
   To correct cause of fraud by strengtening the internal control system, risk management process and better governance process.

Moreover, Anti-Fraud function has duties and responsibilities, among others:

1. to be obliged to conceal all information relating to informant's identity forever.
2. To be obliged to conceal all information during the investigation process being taken place.
3. To be obliged to submit report on special audit result/ investigation to president Director, Commissioners throught the Audit Committee andn copy carbon to Compliance Director to get direction then reported to the related party to follow up.
4. To be obliged to submit all documents and data including information from the parties related to the Discipline Committee.
5. To compose and make review periodically for Anti-Fraud Guidance and Procedures.

6. Memberikan training, sosialisasi ataupun kampanye dan pembinaan kepada seluruh jenjang organisasi dalam rangka antisipasi dan pencegahan terjadinya *Fraud*.
7. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan/implementasi dari Pedoman dan Prosedur Pelaksanaan *Anti Fraud*.
8. Mengevaluasi efektivitas perusahaan dalam mencegah, mendeteksi, menginvestigasi dan memperbaiki dampak *Fraud* yang terjadi.
9. Mengadakan rapat rutin terkait tindak lanjut penanganan *Fraud* dan membuat laporan periodik kepada Direktur Supervisi.
10. Berkoordinasi dengan instansi dan aparatur negara terkait untuk menindaklanjuti kasus *Fraud,* baik yang dilakukan oleh Pelaku internal maupun eksternal.
11. Berkoordinasi dengan unit kerja yang terkait dalam pelaporan kepada Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan guna menyampaikan Laporan Penerapan Strategi *Anti Fraud* setiap semester yang dilakukan pada bulan Januari dan Juli setiap tahunnya.
12. Melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan atas kejadian *Fraud* yang diperkirakan berdampak negatif secara signifikan terhadap Bank, paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Bank mengetahui.
13. Mengadministrasikan seluruh dokumen dengan sebaik-baiknya. Seluruh dokumen bersifat sangat rahasia dan tidak dapat dipinjamkan kepada pihak manapun kecuali atas izin Head of Internal Audit secara tertulis dengan diketahui oleh Presiden Direktur.
14. Dalam melaksanakan tugasnya, fungsi *Anti Fraud* bekerjasama dengan unit kerja lain yang terkait.

Pelaksanaan Tugas Fungsi Anti Fraud pada Tahun 2019

1. Penyampaian Laporan Penerapan Strategi *Anti Fraud* kepada Otoritas Jasa Keuangan semester I dan semester II tahun 2019.
2. Penyampaian Laporan Kejadian *fraud* kepada Otoritas Jasa Keuangan yang diperkirakan berdampak negatif secara signifikan terhadap Bank dan/atau nasabah, termasuk yang berpotensi menjadi perhatian publik.
3. Mengikutsertakan anggota unit kerja *Anti Fraud* dalam training/ pelatihan, seminar atau workshop tentang *anti fraud* yang diselenggarakan oleh pihak eksternal.
4. Sosialisasi *anti frau* kepada seluruh unit bisnis/unit kerja.
5. Melakukan reminder kepada unit bisnis/unit kerja tentang kewajiban pengiriman kejadian *fraud*.
6. Meeting koordinasi pembahasan penyelesaian kasus *fraud* di unit bisnis/unit kerja.
7. Proses investigasi penyelesaian kasus *fraud* di unit bisnis/unit kerja.
8. Rekapitulasi kasus *fraud* di unit bisnis/unit kerja selama tahun berjalan
9. Menyampaikan *Anti Fraud Statement* yang disampaikan dua kali setahun selama tahun 2019.

6. *To give training, socialization or campaign and guidance to all networks of organization for the purpose of Fraud anticipation and prevention.*
7. *To monitor and evaluate the implementantion of Anti-Fraud Guidance and Procedures.*
8. *To evaluate effectivity of the Corporate to prevent, detect, invetigate and improve impact of fraud occurred.*
9. *To hold routine meeting related to follow-up of fraud handling and make periodic report to Supervision Director.*
10. *To coordinate with the related institution and state apparatus reforms to follow up fraud case, done by internal and external actor.*
11. *To coordinate with the related working unit in report to Bank Indonesia and or the Financial Service Authority in order to submit Anti-Fraud Strategy Applying Report of each semester made in January and July every year.*
12. *To report to the Financial Service Authority relating to the Fraud estimated to have negative impact significantly to Bank, no later than 3 (three) business days after Bank has known.*
13. *To administer all documents as well as possible. All documents is very secret and can not be lended to any party except getting permit from Head of Internal Audit in writing acknowledged by President Direktur.*
14. *In the performance of its duties, Anti-Fraud function cooperates with other related working units.*

Implementation of the Anti-Fraud Function in 2019

1. *Submitting the Anti Fraud Strategy Implementation Report to Financial Services Authority semester I and semester II of 2019.*
2. *Submitting a report of fraud events to the Service Authority Financial that is estimated to have a significant negative impact towards the Bank and/or customers, including potential ones become a public concern.*
3. *Involving members of the Anti Fraud work unit in training/ training, seminar or workshop on anti-fraud hosted by an external party.*
4. *Anti-fraud socialization to all business units/work units.*
5. *Reminder business units/work units about obligation to dispatch fraud incidents.*
6. *Coordination meeting to discuss the resolution of fraud cases in the unit business/work unit.*
7. *The process of investigating the resolution of fraud cases in the business unit/unit work.*
8. *Recapitulation of fraud cases in business units/work units during the year walk.*
9. *Submitting Anti Fraud Statement submitted twice a year during 2019.*

10. Selama tahun 2019, *Anti Fraud Ambassador* telah menyampaikan kampanye dengan pencapaian 100% (dari 83 Cabang).

10. During 2019, the Anti Fraud Ambassador has delivered campaigns with 100% achievement (out of 83 branches).

Setiap temuan audit dengan kategori *fraud* akan ditangani oleh unit kerja *Anti Fraud* dan berikut kami sampaikan tabel internal fraud BMI:

Any audit findings in the fraud category will be handled by the unit Anti Fraud work and here we submit the internal fraud table BMI:

Tabel *Internal Fraud* BMI
Internal Fraud BMI Table

Internal Fraud dalam 1 (satu) tahun *Internal Fraud in 1 (one) year*	Jumlah kasus yang dilakukan oleh *Number of cases committed by*					
	Pengurus *Manager*		Pegawai Tetap *Permanent Officer*		Pegawai Tidak Tetap *Non-permanent Officer*	
	Tahun Sebelumnya *Previous year*	Tahun berjalan *Running Year*	Tahun Sebelumnya *Previous year*	Tahun berjalan *Running Year*	Tahun Sebelumnya *Previous year*	Tahun berjalan *Running Year*
Total Fraud	0	0	35	26	0	0
Telah diselesaikan *Already settled*	0	0	35	19	0	0
Dalam proses penyelesaian di internal Bank *In the process of settling in internal Bank*	0	0	0	7	0	0
Belum diupayakan penyelesaiannya *Not yet enabled the solution*	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum *Has been followed up through legal proceedings*	0	0	0	0	0	0

Kasus pada tahun berjalan telah diselesaikan seluruhnya oleh unit *Anti Fraud* bekerja sama dengan unit terkait lainnya. Para pelaku juga telah diberi sanksi sesuai dengan ketentuan internal dan Perjanjian Kerja Bersama/*Ittifaq* Bank Muamalat Indonesia. Selain itu, ada penggantian kerugian oleh pelaku sehingga dampak kerugian finansial bagi Bank Muamalat menjadi kecil.

Cases in the current year have been resolved entirely by the unit Anti Fraud cooperates with other related units. The perpetrators too has been sanctioned in accordance with internal provisions and the Agreement Joint Work/Ittifaq Bank Muamalat Indonesia. In addition, there is a replacement losses by actors so that the impact of financial losses for the Bank Muamalat became small.

Kegiatan Sosialisasi selama Tahun 2019

Pelaksanaan sosialisasi telah dilakukan melalui beberapa cara, antara lain:

1. *Gathering* yaitu kegiatan sosialisasi yang dilakukan pasca kejadian *fraud* yang terjadi di Unit Bisnis/Cabang.
2. *Campaign* yaitu kegiatan sosialisasi yang dilakukan *fraud prevention* di beberapa lokasi yang telah ditetapkan sebelumnya.
3. *Training* yaitu kegiatan sosialisasi yang dilakukan dengan cara menyisipkan materi anti fraud kedalam acara training-training reguler yang diselenggarakan oleh Human Capital Division (HCD)-Learning Center.

Dissemination Activities during 2019

The socialization has been carried out in several ways, between another:

1. *Gathering is a socialization activity carried out after the incident fraud that occurs in the Business Unit/Branch.*
2. *Campaign is a socialization activity carried out by fraud prevention in some predetermined locations.*
3. *Training, namely socialization activities carried out in a way insert anti-fraud material into training events regular organized by the Human Capital Division (HCD) -Learning Center.*

Pelaksanaan kampanye *Anti Fraud* telah dilakukan oleh Anti Fraud Ambasador di cabang masing-masing. Anti Fraud Ambasador terdiri dari Branch Manager, Branch Operation Manager, Regional Manager serta Regional Operation Manager yang telah mengikuti Train the Trainer untuk menyampaikan Kampanye *Anti Fraud.*

Anti Fraud campaign has been carried out by Anti Fraud Ambasador in each branch. Anti Fraud Ambasador consists from Branch Manager, Branch Operation Manager, Regional Manager and Regional Operations Manager who participated in the Train Trainer to deliver the Anti Fraud Campaign.

Pengendalian Gratifikasi
Gratification Control

Bank Muamalat Indonesia menyadari bahwa praktik gratifikasi berpotensi terjadi saat bersinggungan dengan upaya menjalin hubungan kerja dengan pihak ketiga, baik stakeholders maupun vendor. Untuk itu dibutuhkan sebuah pedoman agar seluruh Insan Bank Muamalat Indonesia memiliki pemahaman yang setara tentang perlakuan terhadap gratifikasi serta terhindar dari praktik gratifikasi yang termasuk tindak pidana suap.

Bank Muamalat Indonesia realizes that gratification practice having potency to be occurred when it intersects with efforts of having working relations with any third party, both stakeholders and vendors. For that purpose, a guidance is needed so that all employees of Bank Muamalat Indonesia have equal experiences concerning treatment to the gratification and are escaped from gratification practices which is bribery criminal act. Therefore, Bank Muamalat Indonesia initiates a gratification guidance and control in the circle of Bank.

Untuk itu, Bank Muamalat Indonesia menginisiasi pedoman dan pengendalian gratifikasi di lingkungan Bank. Pedoman dan pengendalian gratifikasi tersebut juga berlaku untuk anak perusahaan Bank Muamalat Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Definisi gratifikasi/hadiah adalah semua bentuk penerimaan atau pemberian baik langsung maupun tidak langsung. Gratifikasi/hadiah dapat berupa uang, barang atau sesuatu penerimaan atau pemberian berupa apa saja (termasuk hiburan dan pelayanan) atau keuntungan lain yang tidak sepatutnya yang diketahui atau patut diduga bahwa penerimaan atau pemberian itu dimaksudkan untuk mempengaruhi keputusan pejabat perusahaan dan/atau pihak lain atau hadiah tersebut diberikan sebagai akibat karena telah melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Such gratification guidance and control is also applied to subsidiaries of Bank Muamalat Indonesia in accordance with the prevailing provisions. Definition of gratification/gift is all forms of acceptance or grant directly and indirectly. The gratification/gift may be in the form of money, goods or a request or grant in any form (including entertaintment and services) or other benefits which are not duly known or alleged that the acceptance or grant is intended to influence an officer's decision of Corporate and/or other parties or the gift is granted as a result of having done or not having done something in one's position contradicting with one's obligation.

Bank melarang seluruh Jajaran Bank menerima atau memberi hadiah dari dan/atau kepada pihak lain yang dimaksudkan untuk atau diduga dapat mempengaruhi keputusan pejabat Bank dan/atau pihak lain. Bank dapat dibenarkan memberikan bantuan (donasi) untuk kepentingan amal atau sosial dalam jumlah yang wajar sepanjang sesuai peraturan dan ketentuan perundang-undangan, ketentuan dan kaidah syariah yang berlaku.

Bank prohibits to all Networks of Bank to accept or grant gift from and/or to other parties intended to or alleged to be able to influence Bank officer's decision and/or other parties. Bank may be justified to grant donation for charity or social interest in a reasonable amount as long as it conforms to the applicable laws and regulations, provisions and norms of Sharia.

Transparansi Kondisi Keuangan dan Non-Keuangan Perusahaan

Trasparency of Financial and Non-Financial Condition of the Company

Bank Muamalat Indonesia telah memenuhi kewajiban transparansi dan publikasi kondisi keuangan dan non-keuangan sesuai ketentuan berlaku, melalui penyampaian dan publikasi informasi baik melalui media cetak maupun situs web Bank sebagaimana berikut ini:

1. Laporan Keuangan Bulanan kepada regulator, yang juga dipublikasikan melalui situs web OJK dan Bank.
2. Laporan Keuangan Triwulan kepada regulator, yang juga dipublikasikan melalui media cetak dan situs web Bank.
3. Laporan Tahunan Bank Muamalat Indonesia yang disusun dan disajikan sesuai ketentuan dan disampaikan kepada regulator, rating agency, lembaga pengembangan perbankan, lembaga/ institusi riset dan majalah keuangan dan dipublikasikan melalui situs web Bank.
4. Informasi Tata Kelola Perusahaan, yang di antaranya adalah Laporan Tahunan Tata Kelola Perusahaan, Visi, Misi, Nilai Perusahaan, Komposisi dan Profil Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Direksi, serta ketentuan internal terkait tata kelola mulai dari Anggaran Dasar hingga Piagam Komite-komite yang juga dipublikasikan melalui situs web Bank.
5. Informasi Produk dan Layanan Perusahaan, termasuk jaringan kantor, dipublikasikan melalui Laporan Tahunan dan situs web Bank, agar nasabah, investor dan masyarakat luas dapat dengan mudah mengakses informasi atas produk dan layanan Bank.
6. Informasi Prosedur Penyampaian Pengaduan, Kebijakan Keamanan Informasi dan Tips bagi Nasabah dalam menggunakan layanan perbankan yang dipublikasikan melalui situs web Bank untuk pelaksanaan ketentuan perlindungan konsumen.
7. Informasi lainnya yang bertujuan untuk mendukung keterbukaan informasi, edukasi keuangan dan layanan kepada masyarakat.

Bank Muamalat Indonesia has fulfilled the obligations of transparency and publication of financial and non-financial conditions in accordance with applicable regulations, through the delivery and publication of information through print media and the Bank's website as follows:

1. *Monthly Financial Reports to regulators, which are also published through the OJK and Bank websites.*
2. *Quarterly Financial Reports to regulators, which are also published through print media and the Bank's website.*
3. *Bank Muamalat Indonesia's Annual Report compiled and presented in accordance with the provisions and submitted to regulators, rating agencies, banking development institutions, research institutions and financial magazines and published through the Bank's website.*
4. *Corporate Governance Information, including Annual Corporate Governance Report, Vision, Mission, Company Values, Composition and Profile of Sharia Supervisory Board, Board of Commissioners and Directors, as well as internal provisions related to governance ranging from the Articles of Association to the Committee Charter committee which is also published through the Bank's website.*
5. *Information on Company Products and Services, including office networks, are published through the Annual Report and the Bank's website, so that customers, investors and the wider community can easily access information about the Bank's products and services.*
6. *Information on Procedure for Submitting Complaints, Information Security Policies and Tips for Customers in using banking services that are published through the Bank's website for the implementation of consumer protection provisions.*
7. *Other information aimed at supporting information disclosure, financial education and services to the public.*

Pembelian Kembali (*Buyback*) Saham dan Obligasi Bank Muamalat Indonesia

Shares and Bonds Buyback of Bank Muamalat Indonesia

Selama tahun 2019, tidak terdapat *buyback* saham maupun buyback obligasi. Selama tahun 2019, tidak terdapat *buyback* saham maupun *buyback* obligasi.

During 2019, there were no share buybacks or bond buybacks.

Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Politik

Provision of Funds for Social and Political Activities

Kebijakan internal Bank melarang keterlibatan Bank termasuk pekerja dalam kegiatan politik, termasuk memberikan dana untuk kepentingan politik. Kebijakan ini diterapkan guna menjaga independensi dan profesionalisme Bank dan pekerja.

The Bank's internal policy prohibits the involvement of the Bank including workers in political activities, including providing funds for political purposes. This policy is implemented to maintain the independence and professionalism of the Bank and workers.

Dalam hal kegiatan sosial, Bank meyakini bahwa kegiatan sosial memberi dampak positif kepada khalayak yang lebih luas untuk jangka panjang.

In terms of social activities, the Bank believes that social activities have a positive impact on a wider audience in the long run.

Pelaksanaan kegiatan sosial dilaporkan dalam bagian khusus tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

The implementation of social activities is reported in a special section on Corporate Social Responsibility in this Annual Report.

Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan

Provision of Funds to Related Parties

Selama tahun 2019, Bank Muamalat Indonesia tidak melanggar dan/atau melampaui batas maksimum pemberian pembiayaan baik kepada pihak terkait maupun pihak tidak terkait dengan Bank.

During 2019, Bank Muamalat Indonesia did not violate and / or exceed the maximum funding limit for both related parties and parties not related to the Bank.

Kebijakan Perlindungan Nasabah

Protection Policy of Customer

Bank Muamalat Indonesia akan terus berupaya melindungi kepentingan seluruh nasabah dan memberikan yang terbaik pada pemenuhan POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, POJK No. 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan, serta SEOJK No. 17/SEOJK.07/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.

Bank Muamalat Indonesia will continue to strive to protect the interests of all customers and provide the best in fulfilling POJK No. 1/POJK.07/2013 concerning Consumer Protection for the Financial Services Sector, POJK No. 18/POJK.07/2018 concerning Consumer Complaint Services in the Financial Services Sector, as well as SEOJK No. 17/SEOJK.07/2018 concerning Guidelines for Implementing Consumer Complaints Services in the Financial Services Sector.

BMI menempatkan nasabah sebagai salah satu pemangku kepentingan yang memiliki peran penting bagi peningkatan kinerja dan keberlanjutan usaha Bank. Oleh karena itu, komitmen untuk memberikan pelayanan prima dan perlindungan bagi para nasabah merupakan prioritas utama. Hal ini diwujudkan dengan adanya layanan pengaduan nasabah di website Bank Muamalat dimana

BMI places the customer as one of the stakeholders who has an important role in improving the performance and sustainability of the Bank's business. Therefore, commitment to provide excellent service and protection for customers is a top priority. This is realized by the existence of a customer complaint service on the Bank Muamalat website where customers can directly contact and report if there

para nasabah dapat langsung menghubungi dan melaporkan bila mendapatkan kendala dalam proses perbankan/ transaksi keuangan di Bank Muamalat Indonesia.

are problems in the banking process/financial transactions at Bank Muamalat Indonesia.

Secara rinci terkait dengan mekanisme prosedur dan pelaksanaan penyelesaian pengaduan nasabah telah dijelaskan pada bab tanggung jawab sosial lingkup tanggung jawab terhadap produk dan/atau jasa serta konsumen pada laporan tahunan ini.

In detail related to the procedure and implementation mechanism settlement of customer complaints has been explained in the responsibility chapter social responsibility scope of responsibility for products and / or services and consumers in this annual report.

Perlindungan Hak Kreditur
Protection Creditor's Rights

Sejalan dengan salah satu prinsip Tata Kelola yang diterbitkan oleh OJK, Bank Muamalat Indonesia menerapkan sistem keterbukaan informasi secara jujur dan transparan serta persamaan perlakuan (*equal treatment*) kepada seluruh kreditur tanpa adanya diskriminasi guna melindungi hak-hak kreditur. Dengan melakukan keterbukaan informasi, seluruh kreditur maupun mitra usaha memperoleh informasi yang relevan sesuai kebutuhannya sehingga masing-masing pihak dapat membuat keputusan yang objektif atas dasar pertimbangan yang adil, wajar dan akurat.

In line with one of the Governance principles issued by FSA, Bank Muamalat Indonesia applies an honest and transparent information disclosure system and equal treatment to all creditors without discrimination to protect the rights of creditors. By disclosing information, all creditors and business partners obtain relevant information according to their needs so that each party can make objective decisions based on fair, reasonable and accurate considerations.

Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk memastikan terpenuhinya hak-hak dan menjaga kepercayaan kreditur terhadap Bank. Bank menjamin hak-hak kreditur dilaksanakan dengan baik, yang dituangkan dalam perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak. Sebagai bagian dari pelaksanaan dari hak-hak kreditur, Bank menjalankan kewajibannya sebagaimana yang diperjanjikan dengan tepat waktu dan berupaya untuk menghindari keterlambatan maupun kelalaian yang berpotensi menimbulkan kerugian kedua belah pihak.

The purpose of this policy is to ensure the fulfillment of rights and maintain creditor trust in the Bank. The bank guarantees that the rights of creditors are properly implemented, as outlined in an agreement agreed by both parties. As part of the implementation of creditor rights, the Bank carries out its obligations as promised in a timely manner and seeks to avoid delays or negligence that could potentially cause harm to both parties.

Sistem Pelaporan Pelanggaran

Whistleblowing System

Sistem Pelaporan Pelanggaran *(Whistleblowing System)* berfungsi sebagai sarana dalam pencegahan, pengungkapan pelanggaran atau tindak kecurangan sehingga dapat meningkatkan kualitas penerapan GCG dalam Perusahaan.

The Whistleblowing System serves as a means of preventing, disclosing violations or fraud so as to improve the quality of GCG implementation in the Company.

Pelaksanaan *Whistleblower* BMI telah diatur dalam Kebijakan *Good Corporate Governance* dan Prosedur *Anti Fraud* Bank Muamalat Indonesia, dimana Perseroan memberikan kesempatan kepada setiap karyawan, mantan karyawan atau pekerja lainnya, anggota dari suatu institusi atau organisasi, serta pihak lainnya untuk dapat menyampaikan/melaporkan suatu tindakan yang dianggap pelanggaran terhadap pelaksanaan GCG Perseroan secara pribadi, baik melalui surat, telepon, email serta media lainnya. Sistem ini menjamin kerahasiaan identitas pelapor dan laporannya.

The implementation of BMI's Whistleblower is regulated in the Good Corporate Governance Policy and the Anti-Fraud Procedure of Bank Muamalat Indonesia, where the Company provides an opportunity for every employee, former employee or other worker, a member of an institution or organisation, and other parties to be able to submit/report an action that is is considered a violation of the Company's GCG implementation personally, whether by letter, telephone, email and other media. This system guarantees the confidentiality of the reporter's identity and report.

Sosialisasi WBS

Bank Muamalat Indonesia melaksanakan sosialisasi *Whistleblowing System* secara berkelanjutan kepada seluruh insan Perseroan dan secara berkala akan melaksanakan pemutakhiran dan penyempurnaan dalam rangka perbaikan berkelanjutan sesuai dengan perkembangan bisnis Perusahaan.

WBS Socialization

Bank Muamalat Indonesia conducts Whistleblowing System socialization continuously to all people of the Company and on an ongoing basis will periodically carry out updates and improvements in the context of continuous improvement in accordance with developments Company business.

Mekanisme Penyampaian Laporan Pelanggaran

Mechanism on Delivering the WBS

Sarana Pelaporan

Bank Muamalat Indonesia menyediakan saluran khusus yang digunakan untuk melayani pengaduan nasabah dan non nasabah melalui saluran sebagai berikut:

PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.
Gedung Muamalat Tower Lantai 9
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18
Jakarta 12950
UP. Internal Audit
atau melalui email kepada: antifraud@bankmuamalat.co.id

Media Reporting

Bank Muamalat Indonesia provides special channels that are used for serving customer and non-customer complaints through channels as follows:

PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.
Gedung Muamalat Tower Lantai 9
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18
Jakarta 12950
UP. Internal Audit
or through email to: antifraud@bankmuamalat.co.id

Kriteria Pelaporan

Pelapor wajib menyampaikan indikasi pelanggaran secara jelas yang dapat dipertanggungjawabkan, dimana minimal meliputi:

1. Kategori pelanggaran yang diadukan;
2. Pihak yang terlibat;
3. Waktu terjadinya pelanggaran;
4. Tempat terjadinya pelanggaran
5. Bagaimana kejadiannya;
6. Bukti bukti pelanggaran (bila ada);
7. Identitas pelapor (nama, alamat, no hp, unit kerja).

Pelapor dapat memberikan informasi tambahan apabila diminta untuk kelengkapan informasi awal indikasi pelanggaran.

Mekanisme Pelaporan

1. *Whistleblower* membuat laporan dengan format bebas, dikirimkan ke fungsi Anti Fraud melalui berbagai media yang ada.
2. Fungsi Anti Fraud mengadministrasikan laporan *whistleblower* yang diterima.
3. Fungsi Anti Fraud menganalisa laporan kasus terindikasi Fraud yang diterima dari *whistleblower.*
4. Jika dari analisa fungsi Anti Fraud diperoleh dugaan kuat adanya Fraud, maka akan dilakukan investigasi lebih lanjut untuk membuktikan kebenaran laporan *whistleblower* tersebut.
5. Proses selanjutnya mengikuti prosedur investigasi dan pelaporan fungsi Anti Fraud sesuai dengan Pedoman dan Prosedur Anti Fraud.

Perlindungan bagi Whistleblower

1. Pelapor atau *Whistleblower* dapat memberikan informasi melalui lisan ataupun tertulis melalui media yang ditentukan.
2. Bank berkomitmen melindungi dan memfasilitasi pemberian perlindungan hukum kepada *Whistleblower* dengan menjaga kerahasiaan identitas *whistleblower* dan laporan yang disampaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Atas segala biaya yang timbul dalam memfasilitasi perlindungan hukum terhadap *Whistleblower* sampai dengan kasus selesai menjadi beban Bank.
4. Bank merahasiakan data identitas *Whistleblower* bagi yang mencantumkan data indentitasnya.
5. Mekanisme *Whistleblowing* ditangani oleh fungsi *Anti Fraud* dan mengacu pada Prosedur Pelaksanaan *Anti Fraud.*

Reporting Criteria

Reporting parties are required to submit clear indications of violations that can be accounted for, which includes as a minimum:

1. *The category of violation complained of;*
2. *The involved parties;*
3. *Time of violation;*
4. *Place of violation*
5. *How it happened;*
6. *Proof of evidence of violation (if any);*
7. *Reporter's identity (name, address, mobile number, work unit).*

The reporter can provide additional information if asked to complete the initial indication of violation information.

Reporting Mechanism

1. *Whistleblowers make reports in a free format, sent to the Anti Fraud function through various media.*
2. *The Anti Fraud function administers the whistleblower report received.*
3. *The Anti Fraud function analyzes the Fraud-indicated case report received from the whistleblower.*
4. *If from the analysis of the Anti Fraud function there is a strong suspicion that there is a Fraud, then further investigations will be carried out to prove the truth of the wistleblower report.*
5. *The next process follows the Anti Fraud investigation and reporting procedure in accordance with the Anti Fraud Guidelines and Procedures.*

Protection against Whistleblower

1. *Informant or Whistleblower may give information verbally or in writing through media determined.*
2. *Bank has commitment to protect and facilitate legal protection given to Whistleblower by keeping the confidentiality of whistleblower identity and information provided in accordance with the prevailing provisions.*
3. *For any cost incurred to facilitate legal protection against Whistleblower until the cases has been settled it shall be Bank's burden.*
4. *Bank keeps the Whistleblower identity data secret for those include their identity data.*
5. *The Whistleblowing mechanism is handled by the Anti-Fraud Function and refers to the procedures for Anti-Fraud Implementation.*

6. *Whistleblower* dapat diberikan *reward* atau *punishment* yang ketentuannya sesuai dengan kebijakan Direksi.
7. Sistem Pelaporan dan mekanisme tindaklanjut laporan diatur Laporan diatur dalam Prosedur Pelaksanaan *Anti Fraud.*

6. *For Whistleblower, reward or punisment may be given, the provisions of which conform to policy of Directors.*
7. *The follow-up report and mechanism is provided in the procedures for the Anti-Fraud Implementation.*

Penanganan Pengaduan

Setiap pelaporan yang masuk akan diproses oleh Fungsi *Anti Fraud* mulai dari proses penerimaan, menganalisa, menginvestigasi, menyusun danmelakukan kajian ulang dari seluruh laporan yang masuk untuk dibuktikan kebenaran dan keabsahannya, untuk kemudian disampaikan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Komite Audit dan Direktur Kepatuhan untuk mendapatkan arahan dalam menindaklanjutinya.

Dalam pelaksanaan tugasnya Fungsi *Anti Fraud* bekerjasma dengan unit kerja lain yang terkait dalam pelaporan kepada Bank Indonesia dan OJK serta dpat berkoordinasi dengan instansi dan aparatur negara dalam menindaklanjuti tindakan ataupun kasus yang ditanganinya baik dari pelaku internal maupun eksternal.

Pihak yang Mengelola Pengaduan

Pengelola WBS adalah penanggung jawab pelaksanaan WBS di Bank Muamalat Indonesia, yaitu Fungsi *Anti Fraud*. Sebagai pengelola WBS, Fungsi Anti Fraud wajib merahasiakan seluruh informasi yang berkaitan dengan identitas pelapor selamanya dan hanya melaporkan kepada Direktur Utama.

The Handling of Complaints

Every incoming report will be processed by the Anti Fraud Function starting from the process of receiving, analyzing, investigating, compiling and conducting a review of all incoming reports to be verified and validity, and then submitted to the President Director with a copy to the Audit Committee and Compliance Director to obtain direction in following up.

In carrying out its duties, the Anti-Fraud Function cooperates with other work units involved in reporting to Bank Indonesia and the FSA and can coordinate with state agencies and apparatuses in following up on actions or cases handled by both internal and external actors.

The Party Managing the Complaint

WBS Manager is the person responsible for implementing WBS at Bank Muamalat Indonesia, which is the Anti Fraud Function. As the manager of WBS, the Anti-Fraud Function must keep all information relating to the identity of the reporter confidential forever and only report to the President Director.

Sumber Daya Manusia
Human Resources

Pembahasan lebih lanjut terkait Sumber Daya Manusia terdapat pada Bab Fungsi Penunjang pada Laporan Tahunan Ini.

Further discussion regarding Human Resource contained the in Supporting Function chapter in this Annual Report Book.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility

Pembahasan lebih lanjut terkait tanggung jawab sosial perusahaan terdapat pada Bab Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

Further discussion regarding corporate social responsibility contained in the Corporate Social Responsibility Chapter.

Pendapatan Non Halal dan Penggunaannya
Non-Halal Income and its Allocations

No.	Sumber Pendapatan Non Halal *Non-Halal Income Sources*	Nilai Pendapatan Non Halal (Rp) *Non-Halal Income Value (Rp)*	Penggunaan Pendapatan Non Halal (Rp) *Allocations of Non Revenue Halal (Rp)*
1.	Pendapatan Bunga Bank Konvensional Tahun 2019 *Conventional Bank Interest Income in 2019*	523.923.169	523.923.169
2.	Dana Denda (Ta'zir) *Fines Funds (Ta'zir)*	66.193.811	66.193.811
	Jumlah *Total*	590.116.980	590.116.980

Penerapan Tata Kelola Terintegrasi

Implementation of Integrated Governance

Dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, maka sebagai konglomerasi keuangan, Bank Muamalat Indonesia diwajibkan menerapkan manajemen risiko dan tata kelola secara terintegrasi. Dalam penerapan manajemen risiko terintegrasi, Konglomerasi Keuangan harus mengelola seluruh risiko yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Konglomerasi Keuangan termasuk risiko yang berasal dari perusahaan anak.

With the issuance of Financial Services Authority Regulation No. 17/POJK.03/2014 concerning the Implementation of Integrated Risk Management for the Financial Conglomerate and Financial Services Authority Regulations No. 18/POJK.03/2014 concerning the Implementation of Integrated Governance For Financial Conglomerates, then as financial conglomerates, Bank Muamalat Indonesia is required to apply risk management and integrated governance. In the application of risk management integrated, the Financial Conglomerate must manage all risks which can directly or indirectly influence business continuity of the Financial Conglomerate including risks from a subsidiary company.

Konglomerasi Keuangan Bank Muamalat Indonesia berkomitmen untuk menerapkan tata kelola terintegrasi yang lebih prudent sesuai dengan prinsip-prinsip GCG sehingga dapat meningkatkan kinerja Konglomerasi Keuangan dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku pada industri jasa keuangan.

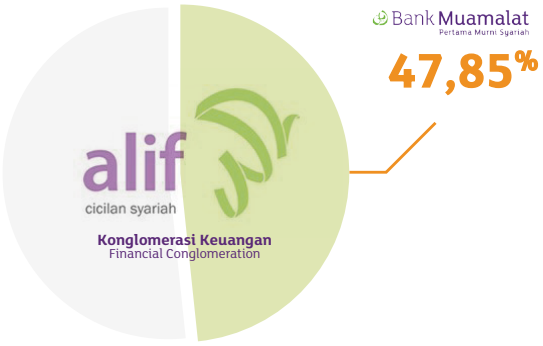
Bank Muamalat Indonesia's Financial Conglomerate is committed to implementing integrated governance that is more prudent in accordance with GCG principles so as to improve performance Financial conglomerates and increase compliance with statutory regulations and applicable ethical values in the financial services industry.

1. Struktur Konglomerasi Keuangan Bank Muamalat Indonesia

Bank Muamalat telah menyampaikan laporan Struktur Konglomerasi Keuangan Bank Muamalat Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat No. 120/BMI/DIR/III/2015 tanggal 27 Maret 2015 perihal Laporan Struktur Konglomerasi Keuangan Bank Muamalat Indonesia. Struktur Konglomerasi Keuangan Bank Muamalat Indonesia tersebut adalah sebagai berikut:

1. The structure of Bank Muamalat Indonesia's Financial Conglomerate

Bank Muamalat has submitted a report on the Financial Conglomeration Structure of Bank Muamalat Indonesia to the Service Authority Finance through Letter No. 120/BMI/DIR/III/2015 27 March 2015 regarding the Financial Conglomerate Structure Report Bank Muamalat Indonesia. Bank Financial Conglomerate Structure of Bank Muamalat Indonesia is as follows:



Bank Muamalat Indonesia berkedudukan sebagai Entitas Utama, karena Bank Muamalat Indonesia merupakan salah satu perusahaan induk dari PT Al Ijarah Indonesia Finance, dimana kepemilikan saham Bank Muamalat Indonesia di PT. Al Ijarah Indonesia Finance per posisi Desember 2019 sebesar 47,85%.

Bank Muamalat Indonesia is a Main Entity, because of the Bank Muamalat Indonesia is one of the holding companies of PT. Al Ijarah Indonesia Finance, where Bank Muamalat Indonesia's share ownership in PT. Al Ijarah Indonesia Finance per position in December 2019 amounted to 47.85%.

PT Al-Ijarah Indonesia Finance (ALIF) adalah perusahaan keuangan syariah yang didirikan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan keuangan masyarakat Indonesia.

PT Al-Ijarah Indonesia Finance (ALIF) is a financial company sharia established to meet financing needs Indonesian public finance.

2. Kepemilikan Saham Konglomerasi Keuangan

Susunan Kepemilikan Saham

Berdasarkan hasil keputusan RUPS LB ALIF yang diselenggarakan pada tanggal 27 Desember 2019 dantaranya menyetujui dan mengesahkan Akta Perjanjian Penyertaan Modal Sementara antara ALIF dengan Bank Muamalat, Bank Sinarmas dan Bank Panin Dubai Syariah sehingga disetujui berlaku efektifnya pengalihan hutang menjadi setoran modal oleh para kreditur.

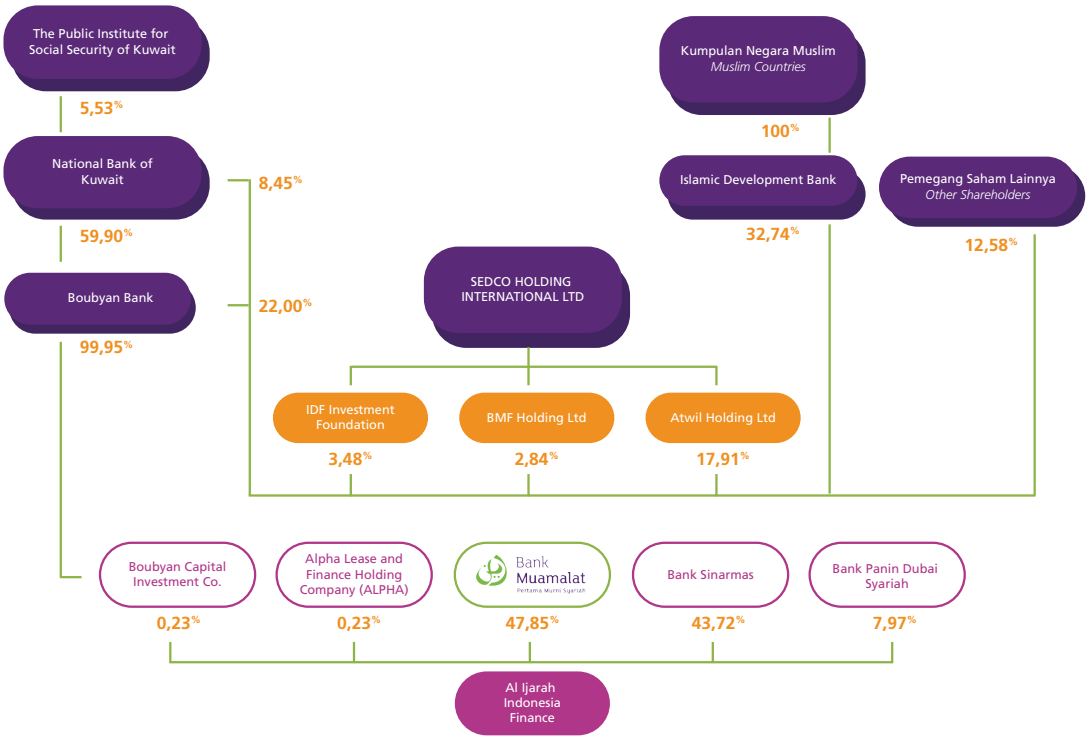
2. Ownership of Financial Conglomerate Shares

Share Ownership Composition

Based on the results of the LB ALIF AGM held on December 27, 2019 and his party agreed and To ratify the Deed of a Temporary Equity Participation Agreement between ALIF and Muamalat Bank, Sinarmas Bank and Bank Panin Dubai Syariah thus approved effective effect the transfer of debt into a capital deposit by creditors.

Struktur Kepemilikan Saham

Share Ownership Structure



3. Infrastruktur Tata Kelola Terintegrasi

a. Kelengkapan Kebijakan

Sebagai Entitas Utama, Bank Muamalat berkoordinasi dengan ALIF untuk menyusun Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi dan Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi.

i. Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi

Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi Bank Muamalat memuat materi terkait Struktur Konglomerasi

3. Integrated Governance Infrastructure

a. Completeness of Policy

As the Main Entity, Muamalat Bank coordinates with ALIF to develop Integrated Governance Policies and Integrated Risk Management Policy.

i. Integrated Governance Policy

Bank Muamalat's Integrated Governance Policy contains material related to Conglomerate Structure

Keuangan Bank Muamalat, Tata Kelola Terintegrasi bagi Entitas Utama, Tata Kelola Terintegrasi bagi Anggota Koglomerasi, Self Assessment Tata Kelola Terintegrasi dan Pelaporan Tata Kelola Terintegrasi.

ii. Kebijakan Umum Manajemen Risiko Terintegrasi dan Manajemen Permodalan Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.

iii. Kebijakan Umum Manajemen Risiko Terintegrasi dan Manajemen Permodalan Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan mengatur tentang Organisasi dan Kewenangan, Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi, Proses Manajemen Risiko Terintegrasi, Sistem Informasi Manajemen Risiko Terintegrasi, Sistem Pengendalian Internal, Profil Risiko Terintegrasi dan Manajemen Permodalan Terintegrasi.

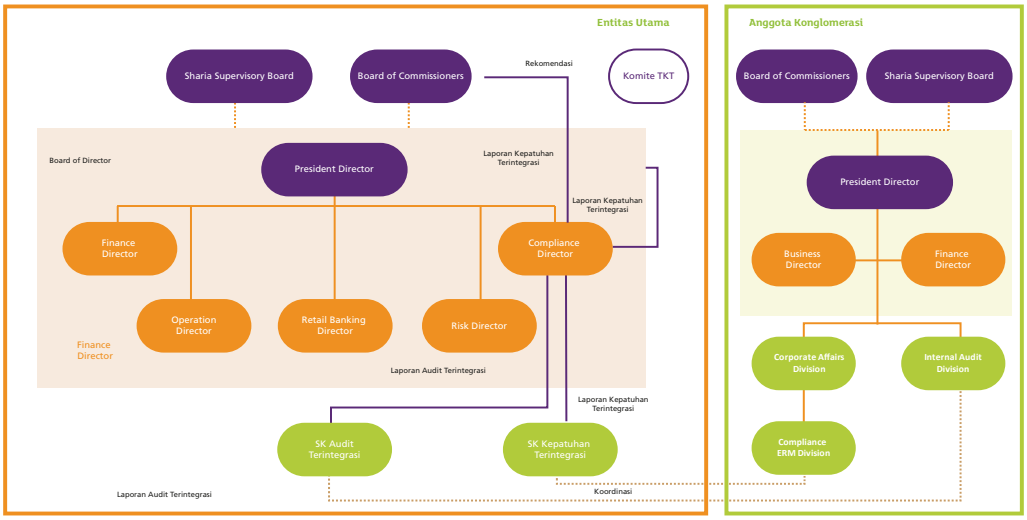
Bank Muamalat's Finance, Integrated Governance for Main Entity, Integrated Governance for Members Coglomeration, Self-Assessment of Integrated Governance and Integrated Governance Reporting.

ii. General Policies on Integrated Risk Management and Integrated Capital Management for Conglomerates.

iii. Finance. General Policies on Integrated Risk Management and Integrated Capital Management for Conglomerates Finance regulates Organizations and Authority, Integrated Risk Management Policy, Integrated Risk Management Process, Information System Integrated Risk Management, Control System Internal, Integrated Risk Profile and Management Integrated Capital.

b. Struktur Tata Kelola Terintegrasi

b. Integrated Governance Structure

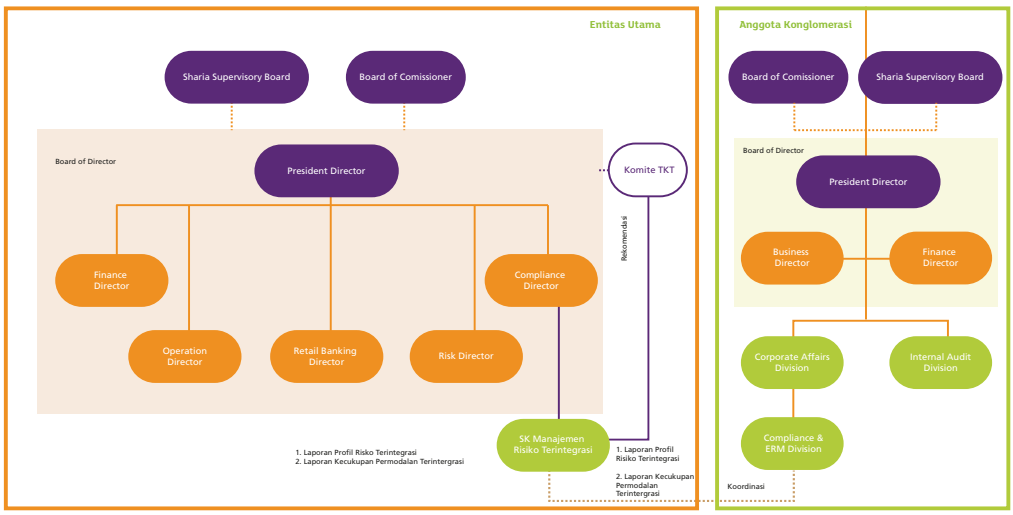


Fungsi Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi dilaksanakan oleh Unit Kerja Compliance Bank Muamalat, sedangkan fungsi Satuan Kerja Internal Audit Terintegrasi dilaksanakan oleh Unit Kerja Internal Audit Bank Muamalat.

The Integrated Compliance Work Unit is carried out by the Unit Bank Muamalat's Compliance, while the Work Unit functions Integrated Internal Audit is carried out by the Internal Audit Work Unit Bank Muamalat.

c. Struktur Manajemen Risiko Terintegrasi

c. Integrated Risk Management Structure



Untuk mendukung penerapan manajemen risiko terintegrasi yang komperehensif dan efektif, Bank Muamalat Indonesia juga telah membentuk Komite Manajemen Risiko Terintegrasi dan Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi.

To support the implementation of comprehensive and effective integrated risk management, Bank Muamalat Indonesia has also formed Integrated Risk Management Committee and Management Work Unit Integrated Risk.

Risk Director bertindak sebagai Pejabat yang membawahkan Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi. Sedangkan fungsi yang menjalankan Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi dibentuk dari beberapa unit kerja yang telah ada di Bank Muamalat Indonesia yaitu unit kerja Enterprise Risk Management, Operational Risk Management dan Accounting and Tax.

The Chief Risk Officer acts as the acting Officer Integrated Risk Management Work Unit. Whereas the functions are run the Integrated Risk Management Work Unit formed from several work units that have been in Bank Muamalat Indonesia, namely units Enterprise Risk Management, Operational Risk Management and Accounting and Tax.

4. Hasil Self Assessment Tata Kelola Terintegrasi

Selain melakukan penilaian GCG secara individual, sebagai konglomerasi keuangan, Bank Muamalat juga melakukan penilaian pelaksanaan tata kelola secara terintegrasi mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.

Penilaian *self assessment* Tata Kelola Terintegrasi Bank Muamalat semester I dan semester II tahun 2019 di peringkat 3 (tiga) dengan definisi peringkat Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari Entitas Utama dan/atau LJK dengan analisa sebagai berikut:

4. Results of Integrated Governance Self-Assessment

In addition to assessing GCG individually, as financial conglomeration, Muamalat Bank also did assessment of the implementation of integrated governance refers the Financial Services Authority Regulation No. 18/POJK.03/2014 concerning the Implementation of Integrated Governance for Conglomerates Finance and Financial Services Authority Circular No. 15/SEOJK.03/2015 concerning the Implementation of Integrated Governance for Financial Conglomerate.

Self-assessment of Integrated Management of Bank Muamalat semester I and semester II of 2019 ranked 3 (three) by definition the ranking of Financial Conglomerates is deemed to have been implementing Integrated Governance in a manner general is quite good. This is reflected by adequate fulfillment adequate for applying the principles of Integrated Governance. If There are weaknesses in the application of governance principles Integrated, in general these weaknesses are quite significant and requires sufficient attention from the Main Entity and/or LJK with the following analysis:

Analisis
Analysis

Kekuatan pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk adalah:
The strengths of implementing Integrated Governance for the Financial Conglomerate of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk are:

1. Governance Structure / *Governance Structure*

Struktur Organisasi Tata Kelola Terintegrasi Entitas Utama (Bank Muamalat) telah memadai. Sementara untuk struktur organisasi ALIF sebagai anggota konglomerasi keuangan telah dilakukan penyesuaian dengan kondisi ALIF. Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Entitas Utama telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan. Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Utama memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai kegiatan bisnis dan risiko utama dari Entitas Utama serta memiliki pengetahuan terhadap kegiatan bisnis utama dan risiko utama dari LJK yang menjadi anggota Konglomerasi Keuangan.

Organizational Structure of Integrated Management of the Main Entity (Bank Muamalat) is adequate. As for the ALIF organizational structure as a member of a financial conglomerate, adjustments have been made to the conditions of ALIF. Board of Commissioners, Directors and Board Sharia Supervisors Main Entity has met the requirements of integrity, competence and financial reputation. The Board of Commissioners and The Main Entity Board of Directors has the knowledge and experience regarding the main business activities and risks of the Main Entity as well has knowledge of the main business activities and main risks of LJK who are members of the Financial Conglomerate.

Seluruh anggota Direksi Entitas Utama telah lulus PKK dan Dewan Pengawas Syariah Entitas Utama telah mendapatkan persetujuan dari OJK. PKK 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris Entitas Utama masih dalam proses di OJK. Sementara terkait dengan kepengurusan anggota konglomerasi (ALIF), seluruh calon Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris yang telah diangkat melalui RUPS masih dalam proses PKK di OJK.

All members of the Main Entity Board of Directors have passed the PKK and the Main Entity Sharia Supervisory Board has received approval from OJK. PKK 2 (two) members of the Board of Commissioners of the Main Entity are still in the process at OJK. While related to management of conglomerate members (ALIF), all candidates for the Board of Directors and prospective members of the Board of Commissioners who have been appointed through AGM is still in the process of PKK at OJK.

Dewan Komisaris Entitas Utama telah memperbarui keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi. Namun demikian, di akhir semester II 2019 terdapat pengunduran diri anggota DPS Entitas Utama yang merupakan anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi. Sementara anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi yang berasal dari Komisaris Independen ALIF belum ditunjuk karena masih dalam proses PKK di OJK. Direksi Entitas Utama telah memiliki Komite Manajemen Risiko Terintegrasi yang bertugas membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama dalam mengelola risiko Konglomerasi Keuangan.

The Board of Commissioners of the Main Entity has renewed the membership of the Integrated Governance Committee. However, at the end of the semester II 2019 there is a resignation of a DPS Main Entity member who is a member of the Integrated Governance Committee. While members of the Integrated Governance Committee from the Independent Commissioner of ALIF have not been appointed because they are still in the PKK process at OJK. The Main Entity Board of Directors has an Integrated Risk Management Committee that is tasked with assisting the implementation of the tasks and responsibility of the Directors of the Main Entity in managing the risk of the Financial Conglomerate.

Sebagai Konglomerasi Keuangan telah dibentuk Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi dan Manajemen Risiko Terintegrasi yang dilaksanakan oleh unit kerja eksisting di Entitas Utama dan independen terhadap satuan kerja operasional (risk-taking unit) pada Entitas Utama maupun LJK dalam Konglomerasi Keuangan. Selain itu, satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Internal Audit di Entitas Utama juga telah dibentuk secara independen. Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi telah disusun menyesuaikan kondisi dan perkembangan Konglomerasi Keuangan Bank muamalat dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris Entitas Utama. Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi telah memuat Kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi Entitas Utama dan Kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi LJK dalam konglomerasi keuangan.

As a Financial Conglomerate an Integrated Compliance Work Unit and Integrated Risk Management have been formed implemented by the existing work units in the Main Entity and independent of the operational work units (risk-taking units) at Main Entity and LJK in the Financial Conglomerate. In addition, the Integrated Internal Audit Work Unit conducted by The Internal Audit Work Unit in the Main Entity has also been formed independently. The Integrated Governance Policy has been prepared adjust the conditions and developments of the Muamalat Bank Financial Conglomerate and have been approved by the Board of Commissioners of the Entity Main. The Integrated Governance Policy includes the Integrated Governance Framework for the Main Entity and the Governance Framework Integrated Management for LJK in financial conglomerates.

2. Governance Process / *Governance Process*

Dewan Komisaris Entitas Utama telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama dan penerapan Tata Kelola Terintegrasi melalui rapat-rapat komite Komisaris dan Komite Tata Kelola Terintegrasi. Pengawasan dan pemberian nasihat/masukan oleh Dewan Komisaris Entitas Utama antara lain dilakukan melalui penyelenggaraan rapat Komisaris Entitas Utama yang membahas antara lain kondisi usaha LJK dalam Konglomerasi Keuangan. Komite Tata Kelola Terintegrasi yang telah dibentuk oleh Dewan Komisaris Entitas Utama, telah menyelenggarakan rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi sebanyak 1 (satu) kali di semester II 2019 dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama terkait proses perbaikan dalam penerapan tata kelola terintegrasi serta penyelesaian permasalahan pada anggota konglomerasi. Direksi Entitas Utama telah menyampaikan Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi kepada Direksi LJK dalam konglomerasi keuangan dan mengarahkan, memantau serta mengevaluasi pelaksanaan Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi. Direksi Entitas Utama telah menindaklanjuti arahan atau nasihat Dewan Komisaris Entitas Utama dalam rangka perbaikan proses dan penyelesaian permasalahan dalam konglomerasi keuangan.

The Main Entity Board of Commissioners has supervised the implementation of the duties and responsibilities of the Main Entity Board of Directors and the application of Integrated Governance through the meetings of the Board of Commissioners and the Integrated Governance Committee. Supervision and providing advice/input by the Board of Commissioners of the Main Entity, among others, is carried out through the holding of Commissioners' meetings The Main Entity that discussed included the business conditions of LJK in the Financial Conglomerate. The Integrated Governance Committee has been formed by the Board of Commissioners of the Main Entity, has held 1 Integrated Corporate Governance Committee meeting (one) time in semester II 2019 and provide recommendations to the Board of Commissioners of the Main Entity regarding the process of internal improvement the application of integrated governance and problem solving for members of conglomerates. The Directors of the Main Entity have submitted the Integrated Governance Policy to the LJK Directors in the financial conglomerate and direct, monitor and evaluate the implementation of the Integrated Governance Policy. Directors of the Main Entity have been follow up on directions or advice of the Board of Commissioners of the Main Entity in order to improve the process and resolve the problem in a financial conglomerate.

Analisis *Analysis*
Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi telah melakukan pemantauan dan mengevaluasi fungsi kepatuhan serta tata kelola di LJK dalam konglomerasi Keuangan (ALIF) antara lain berdasarkan laporan kepatuhan, self assessment GCG dan laporan GCG yang disampaikan secara berkala oleh fungsi kepatuhan ALIF. Dalam melakukan pemantauan dan evaluasi tersebut, Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi berkoordinasi dengan satuan kerja kepatuhan dan manajemen risiko ALIF terkait pemenuhan aspek kepatuhan, perbaikan governance structure, governance process dan governance outcome, proses self-assessment GCG serta penerapan APU PPT ALIF. *The Integrated Compliance Work Unit has monitored and evaluated the compliance and governance functions in LJK within Financial conglomerates (ALIF), among others, based on compliance reports, GCG self assessment and GCG reports submitted periodically by the ALIF compliance function. In carrying out such monitoring and evaluation, the Integrated Compliance Work Unit coordinate with the ALIF compliance and risk management work unit related to compliance, compliance with governance aspects structure, governance process and governance outcome, GCG self-assessment process and the implementation of the ALIF PPT APU.*
Dalam rangka menjalankan proses pemantauan dan evaluasi manajemen risiko di LJK dalam konglomerasi Keuangan, Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi telah berkoordinasi dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko ALIF terkait penerapan manajemen risiko dan profil risiko terintegrasi. SKAI Terintegrasi telah melakukan pemantauan pelaksanaan audit intern yang dilakukan oleh SKAI ALIF melalui korespondensi, permintaan laporan setiap semester, klarifikasi data/informasi yang memerlukan penjelasan lebih lanjut dan memberikan masukan mengenai hal-hal yang perlu diperbaiki. *In order to carry out the process of monitoring and evaluating risk management at LJK in the Financial Conglomerate, the Work Unit Integrated Risk Management has coordinated with the ALIF Risk Management Work Unit related to the implementation of risk management and integrated risk profile. Integrated SKAI has monitored the implementation of internal audits conducted by SKAI ALIF through correspondence, requests for reports every semester, clarification of data/information that requires further explanation and provide input on things that need to be fixed.*
Proses koordinasi antara Entitas Utama dan LJK yang menjadi anggota konglomerasi telah dilakukan dalam upaya penerapan konglomerasi keuangan antara lain penyusunan Perjanjian Kerjasama dan penyampaian data-data dari anggota konglomerasi kepada Entitas Utama untuk keperluan Pengawasan dan Pelaporan. Peningkatan Sumber Daya Manusia Satuan Kerja Terintegrasi yang meliputi fungsi Kepatuhan, Audit Internal, dan Manajemen Risiko terus dilakukan melalui sertifikasi manajemen risiko dan sertifikasi profesi lain sesuai bidang keahlian. Penyusunan Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi dalam pelaksanaannya telah melibatkan Entitas Utama dan anggota konglomerasi untuk mendapatkan masukan dan rekomendasi terkait materi kebijakan. *The process of coordination between the Main Entity and LJK which is a member of a conglomerate has been carried out in the implementation effort financial conglomerates include the preparation of Cooperation Agreements and the submission of data from conglomerate members to Main Entity for Supervision and Reporting purposes. Increased Human Resources Integrated Work Unit which covering the functions of Compliance, Internal Audit, and Risk Management continues to be carried out through risk management certification and certification other professions according to the field of expertise. The preparation of the Integrated Governance Policy in its implementation has involved the Entity Main and conglomerate members to get input and recommendations related to policy material.*
Dalam rangka penguatan permodalan konglomerasi keuangan melalui investor/strategic partner baru masih terus dilakukan dan diupayakan dalam proses realisasi. *In the context of strengthening the capital of financial conglomerates through new investors/strategic partners, efforts are still being made strived in the process of realization.*
3. Governance Outcome / *Governance Outcome*
Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi yang mengatur tentang kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi Entitas Utama dan LJK dalam Konglomerasi Keuangan serta hubungan antara Entitas Utama dan LJK dalam Konglomerasi Keuangan sesuai dengan regulasi dalam rangka memperkuat penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bank Muamalat. Komite Tata Kelola Terintegrasi juga telah dibentuk untuk membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Entitas Utama. Dewan Komisaris Entitas Utama dan Komite Tata kelola Terintegrasi telah menyelenggerakan rapat-rapat seseuai regulasi dan hasil rapat telah dituangkan dalam risalah rapat serta didokumentasikan dengan baik. *The Integrated Governance Policy which regulates the Integrated Governance framework for the Main Entity and LJK within Financial Conglomerates and the relationship between the Main Entity and LJK in the Financial Conglomerate in accordance with internal regulations in order to strengthen the implementation of Integrated Management of Bank Muamalat. The Integrated Governance Committee has also been formed for assist the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Commissioners of the Main Entity. Board of Commissioners of Main Entity and Governance Committee Integrated management has organized meetings according to regulations and the results of meetings have been stated in the minutes of meetings as well well documented.*
Hasil rekomendasi dari Komite Tata Kelola Terintegrasi terkait dengan perbaikan proses tata kelola telah disampaikan kepada LJK dalam konglomerasi keuangan. Direksi Entitas Utama telah memastikan bahwa temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK dan hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain Bank Indonesia, telah ditindaklanjuti oleh LJK dalam Konglomerasi Keuangan. *The recommendations from the Integrated Governance Committee related to the improvement of the governance process have been submitted to LJK in a financial conglomerate. The Main Entity Board of Directors has ensured that audit findings and recommendations from the Work Unit Integrated Internal Audit, external auditors, OJK supervision results and other authority supervision results including Bank Indonesia, has been followed up by LJK in the Financial Conglomerate.*
Konglomerasi Keuangan telah menyusun dan menyampaikan kewajiban pelaporan sesuai ketentuan yang mencakup laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan/Laporan Direktur Kepatuhan Entitas Utama, Laporan Audit Internal Terintegrasi kepada Direktur yang ditunjuk untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap LJK dalam Konglomerasi Keuangan dan Dewan Komisaris Entitas Utama serta Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan Entitas Utama dan Laporan Profil Risiko Terintegrasi. *The Financial Conglomerate has compiled and submitted reporting obligations in accordance with the provisions covering the report carrying out the duties and responsibilities of the Compliance Work Unit / Report of the Main Entity Compliance Director, Internal Audit Report Integrated to the Director appointed to carry out the oversight function of LJK in the Financial Conglomerate and the Main Entity Board of Commissioners and the Director in charge of the Main Entity compliance function and Risk Profile Report Integrated.*

5. Hubungan Entitas Utama Dan Anggota Konglomerasi

a. Prinsip Umum

i. Hubungan Entitas Utama dan anggota Konglomerasi Keuangan dilakukan dengan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

ii. Entitas Utama dan anggota Konglomerasi Keuangan merupakan badan hukum tersendiri yang memiliki Organ Perseroan yang berbeda.

iii. Mekanisme yang berlaku di antara Entitas Utama dengan anggota konglomerasi harus dilakukan melalui mekanisme korporasi yang sehat dan menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dan mengacu pada ketentuan yang berlaku.

iv. Dalam transaksi antara Entitas Utama dan anggota konglomerasi wajib dilandasi prinsip-prinsip sebagai berikut:

- Transparansi *(transparency)* yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
- Akuntabilitas *(accountability)* yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ dalam Konglomerasi Keuangan sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
- Pertanggungjawaban *(responsibility)* yaitu kesesuaian pengelolaan Entitas Utama dan anggota konglomerasi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip pengelolaan yang sehat.
- Profesional *(professional)* yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif dan bebas dari pengaruh atau tekanan dari pihak manapun (independen) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah.
- Kewajaran *(fairness)* yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

b. Mekanisme Pengawasan

Mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Entitas Utama terhadap anggota konglomerasi dilakukan dengan:

i. Penempatan wakil Perusahaan sebagai Anggota Dewan Komisaris dan/atau Direktur Perusahaan Anak.

ii. Keberadaan unit khusus yang menangani pengawasan dan pelaporan Perusahaan Anak (jika diperlukan).

iii. Penyampaian laporan berkala audit intern terintegrasi, laporan kepatuhan terintegrasi dan profil risiko terintegrasi.

iv. Pembentukan komite Tata Kelola Terintegrasi dan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi.

5. Relationship of Main Entity and Conglomerate Members

a. *General Principles*

i. *Relationship of Main Entity and members of the Conglomerate Finance is carried out by complying with regulations current regulation.*

ii. Main Entity and members of the Financial Conglomerate is a separate legal entity that owns Different Company organs.

iii. The mechanism that applies between the Main Entity with members of the conglomerate to be carried out through sound and implementing corporate mechanisms Good Corporate Governance principles and refer to the applicable provisions.

iv. *In transactions between the Main Entity and members conglomerates must be based on principles as following:*

- *Transparency (transparency), namely openness in presenting material information and relevant and openness in the process decision-making.*
- *Accountability (accountability) function and implementation of accountability organ in the Financial Conglomerate so management effectively.*
- *Responsibility (responsibility), i.e. suitability of management of Main Entity and members conglomeration with statutory regulations applicable principles and management principles healthy ones.*
- *Professional (professional) competence, able to act objectively and freely from influence or pressure from any party (independent) and has a high commitment to develop Islamic banks.*
- *Fairness (fairness), namely justice and equality in fulfilling the rights of stakeholders arising under agreements and regulations legislation.*

b. *Supervision Mechanism*

Supervision mechanism conducted by the Main Entity the members of the conglomerate are carried out by:

i. *Placement of Company representatives as Board Members Commissioners and / or Directors of Subsidiaries.*

ii. *The existence of a special unit that handles supervision and reporting of Subsidiaries (if needed).*

iii. *Submitting periodic integrated internal audit reports, integrated compliance report and risk profile integrated.*

iv. *The establishment of an Integrated Governance Committee and `Integrated Risk Management Committee.*

c. Transaksi Entitas Utama dengan Anggota Konglomerasi

i. Transaksi bisnis Entitas Utama dengan Anggota Konglomerasi harus dilakukan atas dasar arm's length relationship sebagaimana layaknya transaksi bisnis dengan pihak lainnya. Pada prinsipnya Perusahaan mengedepankan prinsip kesetaraan terhadap anggota konglomerasi.

ii. Perlakuan istimewa hanya akan diberikan dengan kondisi tertentu sesuai dengan kepentingan Konglomerasi Keuangan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Penerapan Tata Kelola Pada Perusahaan Anak (ALIF)

a. Profil Pemegang Saham ALIF

i. Boubyan Capital Investment Co.

Boubyan Capital adalah perusahaan manajemen investasi syariah berbasis di Kuwait. Perusahaan ini didirikan salah satu bagian investasi Boubyan Bank yang dianugerahi Best Bank Islam di Kuwait oleh Arabian Business.

Perusahaan ini mempunyai beberapa *line of bussiness* yaitu Asset Management, Brokerage Services, Custody, Principal Invesment selain memperoleh dan mengelola properti real estate. Sebagai anak perusahaan dari Boubyan Bank, Boubyan Capital menggabungkan kekuatan dari sumber yang merupakan salah satu lembaga keuangan yang paling cepat berkembang di Kuwait dalam bidang jasa keuangan. Boubyan Capital Invesment Co dimiliki oleh Boubyan Bank sebanyak 99,90% saham.

ii. Bank Muamalat Indonesia

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk ("Bank Muamalat Indonesia") memulai perjalanan bisnisnya sebagai Bank Syariah pertama di Indonesia pada 1 November 1991 atau 24 Rabi'us Tsani 1412 H. Pendirian Bank Muamalat Indonesia digagas oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan pengusaha muslim yang kemudian mendapat dukungan dari Pemerintah Republik Indonesia. Pada 27 Oktober 1994, Bank Muamalat Indonesia mendapatkan izin sebagai Bank Devisa dan terdaftar sebagai perusahaan publik yang tidak listing di Bursa Efek Indonesia (BEI). Bank Muamalat Indonesia merupakan lembaga perbankan pertama di Indonesia yang mengeluarkan Sukuk Subordinasi Mudharabah. Aksi korporasi tersebut semakin menegaskan posisi Bank Muamalat Indonesia di peta industri perbankan Indonesia.

Seiring kapasitas Bank yang semakin diakui, Bank semakin melebarkan sayap dengan terus menambah jaringan kantor cabangnya di seluruh Indonesia. Pada tahun 2009, Bank mendapatkan izin untuk membuka

c. Main Entity Transactions with Conglomerate Members

i. Main Entity business transactions with Members Conglomeration must be done on the basis of arm's length relationship as a business transaction with other parties. In principle, the Company promote the principle of equality with members conglomerate.

ii. Special treatment will only be given with conditions certain according to the interests of the Conglomerate Finance as long as it does not conflict with applicable laws and regulations.

6. Implementation of Governance in Subsidiaries (ALIF)

a. ALIF Shareholder Profile

i. Boubyan Capital Investment Co.

Boubyan Capital is an investment management company sharia is based in Kuwait. This company was founded wrongly one part of the Boubyan Bank investment which was awarded Best Islamic Bank in Kuwait by Arabian Business.

This company has several lines of business namely Asset Management, Brokerage Services, Custody, Principal Investments in addition to obtaining and managing real estate property. As a subsidiary of Boubyan Bank, Boubyan Capital combines the power of the source which is one the fastest growing financial institution in Kuwait in the field of financial services. Boubyan Capital Investment Co. is owned by Boubyan Bank 99,90% of shares.

ii. Bank Muamalat Indonesia

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk ("Bank Muamalat Indonesia ") began its business journey as a bank The first Sharia in Indonesia on November 1, 1991 or 24 Rabbius Tsani 1412 H. Establishment of Muamalat Bank Indonesia was initiated by the Indonesian Ulema Council (MUI), Indonesian Muslim Intellectual Association (ICMI) and Muslim businessman who later received support from the Government of the Republic of Indonesia. On the 27th of October 1994, Bank Muamalat Indonesia obtained a permit as a Foreign Exchange Bank and registered as a company public not listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX). Bank Muamalat Indonesia is a banking institution the first in Indonesia to issue Sukuk Mudharabah Subordination. The corporate action further confirms the position of Bank Muamalat Indonesia in map of the Indonesian banking industry.

As the Bank's capacity is increasingly being recognized, the Bank increasingly spread its wings by continuing to add branch office network throughout Indonesia. On In 2009, the Bank got permission to open branch office

kantor cabang di Kuala Lumpur, Malaysia dan menjadi bank pertama di Indonesia yang mewujudkan ekspansi bisnisnya di Malaysia. Produk Shar-e Gold Debit Visa yang diluncurkan pada tahun 2011 mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai Kartu Debit Syariah dengan teknologi chip pertama di Indonesia serta layanan e-channel seperti internet banking, mobile banking, ATM, dan cash management. Seluruh produk-produk tersebut menjadi pionir produk syariah di Indonesia dan menjadi tonggak sejarah penting di industri perbankan syariah.

in Kuala Lumpur, Malaysia and become the first bank in Indonesia to realize expansion its business in Malaysia. Shar-e Gold Debit Visa product which was launched in 2011 get award from the Indonesian Record Museum (MURI) as a Shariah Debit Card with chip technology first in Indonesia and e-channel services like internet banking, mobile banking, ATMs, and cash management. All of these products become a pioneer of sharia products in Indonesia and a milestone important history in the Islamic banking industry.

Bank terus mewujudkan berbagai pencapaian serta prestasi yang diakui baik secara nasional maupun internasional. Hingga saat ini, Bank beroperasi bersama beberapa entitas anaknya dalam memberikan layanan terbaik yaitu Al-Ijarah Indonesia Finance (ALIF) yang memberikan layanan pembiayaan syariah, (DPLK Muamalat) yang memberikan layanan dana pensiun melalui Dana Pensiun Lembaga Keuangan, dan Baitulmaal Muamalat yang memberikan layanan untuk menyalurkan dana Zakat, Infakdan Sedekah (ZIS).

The Bank continues to realize various achievements as well nationally recognized achievements international. Until now, the Bank operates together several of its subsidiaries in providing services the best is Al-Ijarah Indonesia Finance (ALIF) which provide Islamic financing services, (DPLK Muamalat) which provides pension fund services through the Financial Institution Pension Fund, and Baitulmaal Muamalat who provided services for channeling Zakat, Infaq and Alms (ZIS) funds.

iii. Alpha Lease and Finance Holding Company (ALPHA)
ALPHA menjadi pemegang saham Al Ijarah pada tanggal 24 Juni 2009 setelah pengalihan saham ALIF dari International Leasing & Investment Company (ILIC) kepada ALPHA. ALPHA didirikan untuk mengembangkan dan mengelola portofolio aset leasing di Asia, Afrika Utara, Arab dan negara-negara yang tergabung dalam Dewan Kerjasama Negara Teluk (Gulf Cooperation Council) oleh ILIC, Sukuk Efek Centre (Tadawul) BSC - Bahrain dan Sabaek Leasing & Investment Co - Kuwait pada bulan Desember 2007 di Bahrain.

iii. *Alpha Lease and Finance Holding Company (ALPHA)*
ALPHA became a shareholder of Al Ijarah in June 24, 2009 after the transfer of ALIF shares from the International Leasing & Investment Company (ILIC) to ALPHA. ALPHA was established to develop and managing leasing asset portfolios in Asia, Africa North, Arab and countries incorporated Gulf Cooperation Council Council) by ILIC, Sukuk Securities Center (Tadawul) BSC - Bahrain and Sabaek Leasing & Investment Co. - Kuwait in December 2007 in Bahrain.

iv. Bank Sinarmas
PT Bank Sinarmas Tbk. didirikan pada 18 Agustus 1989 berdasarkan Akta No. 52 tanggal 18 Agustus 1989 dari Buniarti Tjandra, S.H., Notaris di Jakarta, dengan nama PT Bank Shinta Indonesia dan telah diubah dengan Akta No. 91 tanggal 15 September 1989 dari notaris yang sama.Bank memperoleh status sebagai Bank Umum Devisa tahun 1995. Tahun 2005, perjalanan Bank memasuki babak baru setelah PT Sinar Mas Multiartha Tbk., perusahaan financial services yang berada di bawah Kelompok Usaha Sinar Mas mengambil alih 21% saham di PT Bank Shinta Indonesia.

iv. *Sinarmas Bank*
PT Bank Sinarmas Tbk. was founded on August 18, 1989 based on Deed No. 52 dated 18 August 1989 from Buniarti Tjandra, S.H., Notary in Jakarta, by name PT Bank Shinta Indonesia and has been amended by Deed No. 91 dated 15 September 1989 from a notary public same bank. Bank gained status as a Bank General Foreign Exchange in 1995. In 2005, the bank trip entering a new phase after PT Sinar Mas Multiartha Tbk., The financial services company below The Sinar Mas Business Group takes over 21% of the shares at PT Bank Shinta Indonesia

Pada Desember 2006 Bank berganti nama menjadi PT Bank Sinarmas. Pergantian nama tersebut telah disetujui melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. Bank Sinarmas memperoleh ijin untuk pendirian Unit

In December 2006 the Bank changed its name to PT Bank Sinarmas. The name change has been approved through an Extraordinary General Meeting of Shareholders. Bank Sinarmas obtained a permit for the establishment of

Usaha Syariah (UUS), berdasarkan Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia. Pada tahun yang sama Bank memperoleh pengesahan dari Bapepam (sekarang OJK) untuk melakukan kegiatan usaha Wali Amanat. Pada 13 Desember 2010, Bank Sinarmas melakukan Penawaran Saham Umum Perdana (Initial Public Offering /IPO) dengan kode saham BSIM.

Bank Sinarmas menjadi pemegang saham ALIF berdasarkan hasil keputusan RUPS LB ALIF yang diselenggarakan pada tanggal 27 Desember 2019 melalui pengesahan Akta Perjanjian Penyertaan Modal Sementara antara ALIF dengan Bank Sinarmas.

the Unit Sharia Business (UUS), based on Deputy Decree Governor of Bank Indonesia. In the same year the Bank obtained authorization from Bapepam (now OJK) to carry out the business activities of the Trustee. At 13 December 2010, Bank Sinarmas made an offer Initial Public Offering (Initial Public Offering/IPO) with the BSIM stock code.

Bank Sinarmas is a shareholder of ALIF based on the results of the decision of the LB ALIF LB held on December 27, 2019 through the ratification of the Deed of Participation Agreement Meanwhile between ALIF and Bank Sinarmas.

v. Bank Panin Dubai Syariah

Sejak mengawali keberadaan di industri perbankan syariah di Indonesia, Panin Dubai Syariah Bank secara konsisten menunjukkan kinerja dan pertumbuhan usaha yang baik. Panin Dubai Syariah Bank berhasil mengembangkan aset dengan pesat berkat kepercayaan nasabah yang menggunakan berbagai produk pembiayaan dan menyimpan dananya.

Dukungan penuh dari perusahaan induk PT Bank Panin Tbk ("PaninBank") sebagai salah satu bank swasta terbesar di antara 10 (sepuluh) bank swasta terbesar lainnya di Indonesia, serta Dubai Islamic Bank PJSC yang merupakan salah satu bank Islam terbesar di dunia, telah membantu tumbuh kembang Panin Dubai Syariah Bank. Panin Dubai Syariah Bank terus berkomitmen untuk membangun kepercayaan nasabah dan masyarakat melalui pelayanan dan penawaran produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta memenuhi kebutuhan nasabah.

Bank Panin Dubai Syariah menjadi pemegang saham ALIF berdasarkan hasil keputusan RUPS LB ALIF yang diselenggarakan pada tanggal 27 Desember 2019 melalui pengesahan Akta Perjanjian Penyertaan Modal Sementara antara ALIF dengan Bank Panin Dubai Syariah.

v. *Bank Panin Dubai Syariah*

Since starting its existence in the Islamic banking industry in Indonesia, Panin Dubai Syariah Bank consistently show good performance and business growth. Panin Dubai Syariah Bank has successfully developed assets rapidly thanks to the trust of customers who using various financing and saving products the funds.

Full support from the holding company PT Bank Panin Tbk ("PaninBank") as one of the largest private banks in among the 10 (ten) other largest private banks in Indonesia, and Dubai Islamic Bank PJSC, which is one the largest Islamic bank in the world, has helped grow Panin flower Dubai Syariah Bank. Panin Dubai Sharia The Bank continues to be committed to building trust customers and the community through services and offers products that comply with sharia principles as well meet customer needs.

Bank Panin Dubai Syariah becomes a shareholder ALIF based on the results of the ALIF LB AGM decision held on December 27, 2019 through ratification of the Deed of Temporary Temporary Investment Agreement between ALIF and Bank Panin Dubai Syariah.

b. Dewan Pengawas Syariah ALIF

Dewan Pengawas Syariah (DPS) berkewajiban mengawasi kegiatan usaha perusahaan agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah, dengan memberikan nasihat dan saran kepada manajemen mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah.

b. *ALIF Sharia Supervisory Board*

Sharia Supervisory Board (DPS) is obliged to supervise the company's business activities to comply with the provisions and sharia principles, by giving advice and advice to management regarding matters related to Islamic aspects.

DPS ALIF atas nama Bapak M. Faisal Muchtar telah lulus Uji kepatutan dan kelayakan OJK berdasarkan surat keputusan No. KEP-23/NB.22/2015 tertanggal 17 September 2015.

Thus the ALIF DPS is Bp. M. Faisal Muchtar, as Chairman and concurrently ALIF DPS member on behalf of Mr. M. Faisal Muchtar has passed the OJK fit and proper test based on a letter decision No. KEP-23/NB.22/2015 dated September 17, 2015.

Dalam RUPS LB disetujui untuk perubahan Anggaran Dasar ALIF Pasal 17 ayat 13, sehingga jumlah anggota DPS ALIF sekurang-kurangnya ditetapkan sebanyak 1 (satu) orang, sesuai dengan POJK Nomor 30/POJK.05/2014 Tentang Tata Kelola Perusahan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan Pasal 32, yang disebutkan bahwa : Dewan Pengawas Syariah terdiri dari sekurang - kurangnya 1 (satu) orang yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi DSN MUI.

In the AGM LB was approved for amendments to the Articles of Association ALIF Article 17 paragraph 13, so the number of members of ALIF DPS at least 1 (one) person is determined, in accordance with POJK No. 30/POJK.05/2014 concerning Governance Manage a good company for finance companies Article 32, which states that: Sharia Supervisory Board consisting of at least 1 (one) person who is appointed by the GMS on the recommendation of DSN MUI.

c. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris bertanggung jawab mengawasi dan memberikan nasihat kepada Direksi mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan kebijakan Perseroan maupun pelaksanaan pengelolaan Perseroan pada umumnya.

c. Board of Commissioners

The Board of Commissioners is responsible for overseeing and provide advice to the Directors regarding problems relating to Company policy and implementation of the management of the Company in general.

Berdasarkan Hasil RUPS Tahunan yang termuat dalam akta RUPS LB No. 68 tertanggal 31 Oktober 2018, susunan Dewan Komisaris ALIF adalah sebagai berikut :

Based on the Annual GMS Results contained in the deed GMS LB No. 68 dated October 31, 2018, composition of the Council The ALIF Commissioners are as follows:

i.	Presiden Komisaris/ Independen	: Sukamto
ii.	Komisaris	: Purnomo B. Soetadi
iii.	Komisaris	: Tindomora Siregar

i.	*President Commissioner/Independent*	*: Sukamto*
ii.	*Commissioner*	*: Purnomo B. Soetadi*
iii.	*Commissioner*	*: Tindomora Siregar*

Komisaris yang telah lulus uji kepatutan dan kelayakan adalah Bapak Purnomo B. Soetadi (Surat Keputusan No. KEP-65/NB.22/2016).

Commissioners who have passed the fit and proper test is Mr. Purnomo B. Soetadi (Decree No. KEP-65/ NB.22/2016).

Pada tanggal 27 Desember 2019 ALIF menyelenggarakan RUPS LB yang salah satu hasil keputusannya adalah menyetujui perubahan susunan Dewan Komisaris ALIF yaitu sebagai berikut:

On December 27, 2019 ALIF held LB General Meeting of Shareholders whose decision is one of the results approve changes in the composition of the ALIF Board of Commissioners, i.e. as follows:

i.	Presiden Komisaris/Independen	: Sukamto
ii.	Komisaris	: Sucastiyono
iii.	Komisaris	: Purnomo B. Soetadi *)

i.	*President Commissioner/ Independent*	*: Sukamto*
ii.	*Commissioner*	*: Sucastiyono*
iii.	*Commissioner*	*: Purnomo B. Soetadi *)*

Pengunduran diri Bapak Purnomo B. Soetadi telah disetujui pada RUPS tanggal 16 Agustus 2019 dan akan berlaku efektif setelah terdapat Direksi/Komisaris yang dinyatakan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK. 2 (dua) orang anggota Komisaris ALIF saat ini sedang dalam proses Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh OJK.

Mr. Purnomo B. Soetadi's resignation was approved at the AGM on August 16, 2019 and will be effective after there are Directors / Commissioners who have passed Capability and Compliance Assessment from FSA. 2 (two) ALIF Commissioner members are currently in the process Capability and Compliance Assessment by FSA.

Direksi bertanggung jawab menerapkan kebijakan perusahaan dan mengelola Perseroan dengan prinsip kehati-hatian sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kepentingan Perseroan dan untuk mencapai tujuan-tujuan Perseroan yang telah ditetapkan.

Directors are responsible for implementing policies company and manage the Company with principles caution in accordance with the provisions in force for the interests of the Company and to achieve its objectives The company has been established.

d. Direksi ALIF

Direksi bertanggung jawab menerapkan kebijakan perusahaan dan mengelola Perseroan dengan prinsip kehati-hatian sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kepentingan Perseroan dan untuk mencapai tujuan-tujuan Perseroan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Hasil RUPS Tahunan yang termuat dalam akta RUPS LB No. 68 tertanggal 31 Oktober 2018, susunan Dewan Direksi ALIF adalah sebagai berikut:

i. Presiden Direktur : Afrid Wibisono
ii. Direktur : Agus Darmawan
iii. Direktur : Teguh Nogroho

Pada tanggal 27 Desember 2019 ALIF menyelenggarakan RUPS LB yang salah satu hasil keputusannya adalah menyetujui perubahan susunan Direksi ALIF yaitu sebagai berikut:

i. Presiden Direktur : Afrid Wibisono
ii. Direktur : Mochammad Hanggoro Priyo Utomo
iii. Direktur : Priastiti Nawa Agustina
iv. Direktur : Agus Darmawan *)
v. Direktur : Teguh Nugroho *)

*) Masa penugasan akan berakhir setelah jajaran Direksi yang ditunjuk telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK.

Seluruh Direksi ALIF saat ini sedang dalam proses Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh OJK.

d. *ALIF Directors*

Directors are responsible for implementing the Company's policies and manage the Company with principles caution in accordance with the provisions in force for the interests of the Company and to achieve its objectives the Company has been established.

Based on the Annual GMS Results contained in the deed GMS LB No. 68 dated October 31, 2018, composition of the Council The ALIF Directors are as follows:

i. *President Director : Afrid Wibisono*
ii. *Director : Agus Darmawan*
iii. *Director : Teguh Nogroho*

On December 27, 2019 ALIF held a General Meeting of Shareholders LB, whose decision is approved changes in the composition of the ALIF Directors are as follows:

i. *President Director : Afrid Wibisono*
ii. *Director : Mochammad Hanggoro Priyo Utomo*
iii. *iDirector : Priastiti Nawa Agustina*
iv. *Direktur : Agus Darmawan *)*
v. *Direktur : Teguh Nugroho *)*

The assignment period will end after the Board of Directors appointed has passed the Capability and Compliance Assessment from FSA.

All ALIF Directors are currently in the Assessment process Ability and Compliance by FSA.

iB

Bank Muamalat
Pertama Murni Syariah



Hijrah itu Ibadah

Wujudkan safar terbaikmu menuju Baitullah

Tabungan iB Hijrah Haji

Sesuai Syariah

Terpercaya

Mudah

#AyoHijrah

Info lengkap hubungi: SalaMuamalat **1500016** | www.bankmuamalat.co.id

BankMuamalatIndonesia BankMuamalat Bank.Muamalat BankMuamalat

Bank Muamalat Indonesia terdaftar dan diawasi oleh OJK Otoritas Jasa Keuangan LPS Lembaga Penjamin Simpanan



07.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Corporate Social Responsibility



Tata Kelola Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Management of Corporate Social Responsibility



Komitmen Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Bank Muamalat Indonesia menyadari bahwa pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan sebuah tanggung jawab moral kepada para pemangku kepentingan *(stakeholders)* tidak hanya semata-mata memenuhi kepentingan pemegang saham. Bank terus berkomitmen memberikan kontribusi nilai bagi para pemangku kepentingan lainnya karena Bank menyadari bahwa kinerja perusahaan tidak hanya diukur dari aspek ekonomi saja, akan tetapi juga kinerja sosial maupun lingkungan. Bank Muamalat Indonesia juga berkeyakinan bahwa parameter keberhasilan suatu perusahaan dalam sudut pandang CSR adalah mengedepankan prinsip moral dan etis, yakni menggapai suatu hasil terbaik, tanpa merugikan kelompok masyarakat lainnya.

Pelaksanaan program CSR juga merupakan wujud dari kepatuhan Bank terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Bab V, Pasal 74 ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Sejalan dengan itu, Bank juga akan menerapkan Peraturan OJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. Komitmen untuk menjalankan kegiatan CSR yang mendukung implementasi keuangan berkelanjutan tertuang dalam Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) yang disusun Bank.

Corporate Social Responsibility Implementation Commitment

We realize that Corporate Social Responsibility (CSR) implementation is Bank Muamalat Indonesia obligation as a company, not merely to fulfill shareholders' needs, but as a moral act of responsibility to stakeholders. The Bank continues to commit to contributing to other stakeholders because we realize that the company performance not only measured economically but also socially and environmentally. Bank Muamalat Indonesia also believes that the success parameter in CSR perspective is to prioritize any activity based on moral & ethical orientation to achieve the best results without harming any group nor community.

This implementation is also a form of the Bank's compliance with applicabe laws & regulations, particularly Act No. 40 of 2007, Chapter V, Article 74 paragraph (1) and Act No. 25 of 2007 concerning Investment.

Furthermore, the Bank will also implement OJK Regulation No. 51/POJK.03/2017 concerning Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers and Public Companies. The commitment to carry out-is contained in the Sustainable Financial Action Plan (RAKB) prepared by the Bank.



Metode dan Lingkup Due Diligence terhadap Dampak Sosial, Ekonomi dan Lingkungan dari Aktivitas Bank

Bank Muamalat Indonesia telah melaksanakan *due diligence* atas dampak sosial Bank secara terintegrasi dengan metode penentuan isi Laporan Keberlanjutan tahun 2018. *Due diligence* merupakan sebuah proses yang komprehensif dalam menilai dampak positif dan negatif keputusan dan kegiatan perusahaan yang dapat memengaruhi lingkungan hidup, ekonomi, dan aspek sosial.

Bank Muamalat Indonesia menyadari bahwa dengan luasnya wilayah operasional, membuat para pemangku kepentingan memiliki ekspektasi yang berbeda-beda di tiap wilayah sehingga diperlukan kesepahaman akan visi dan misi Bank. Untuk mewujudkannya, Bank telah melakukan proses identifikasi berbagai kelompok pemangku kepentingan yang signifikan terhadap kegiatan bisnis Bank yang terdiri dari pemegang saham, masyarakat, karyawan dan serikat pekerja, pemerintah, regulator & legislatif, nasabah, rekanan, media massa, serta aparat keamanan yang dilakukan menggunakan metode survei.

Identifikasi kelompok pemangku kepentingan menggunakan metode *stakeholders mapping* yang bertujuan agar Bank Muamalat Indonesia mengetahui dengan jelas pihak-pihak yang paling berkepentingan dengan Bank secara timbal-balik; hubungan apa yang dijalin, hal

Method and Scope of Due Diligence Toward Social, Economic and Environmental Activities of the Bank

Bank Muamalat Indonesia has implemented due diligence on the social impact in an integrated manner with the method of determining the contents of 2018 Sustainability Report. Due diligence is a comprehensive process in assessing positive and negative impacts of corporate decisions and activities that can affect the environment, economy, and social aspects.

Because of its operation in large archipelagic country, the bank realizes that stakeholders in different region will have different expectations, so the same page of understanding in the company's vision & mision is needed. To make it happen, the Bank has carried out a process of identifying various groups of significant stakeholders to the Bank's business activities consisting of shareholders, employees & labour union, the government, regulators & legislators, customers and partners, media, as well as society & security forces. which is done using the survey method.

The aim of stakeholders identification using the mapping method is to make the Bank to fully understandthe parties with the most interest in mutual independence with the Bank; what relationships that needs to be established, what kind of communication that needs to be built,

apa yang perlu dikomunikasikan, dan bagaimana memaksimalkan media komunikasi sehingga Bank dapat berhubungan dengan para pemangku kepentingan secara efektif yang pada akhirnya mampu mencapai target yang diharapkan.

and how to maximize the media so that the Bank can engage with stakeholders to be able to achieve the targets.

Stakeholder Penting, Isu dan Risiko yang Terdampak atau Berpengaruh pada Dampak dari Kegiatan Bank

Important Stakeholders, Issues and Risks Which is Affected or Impacted by Activities of the Bank

Berdasarkan hasil *due diligence* yang dilakukan, Bank telah memetakan pihak-pihak dan isu-isu serta risiko penting yang berkaitan dengan kegiatan Bank, yang dipetakan sebagai berikut:

Based on the results of due diligence undertaken, the Bank has mapped the parties and issues as well as the significant risks associated with the Bank's activities, which are described as follows:

Pemangku Kepentingan *Stakeholders*	Pendekatan *Approach*	Topik *Topics*	Respon Terhadap Topik *Response to Topic*	Frekuensi *Frequency*
Pemegang Saham *Shareholders*	Komunikasi • Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) • Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) *Communication* • *Annual General Meeting of Shareholders (AGM)* • *Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS)*	Perusahaan mempertahankan dan meningkatkan nilai usaha sesuai harapan pemegang saham. *The company maintains and increases business value according to shareholders' expectations.*	• Meningkatkan kemampuan, keterampilan dan keahlian karyawan. • Meningkatkan performa perusahaan. • *To improve employees skills & expertise.* • *To improve company performance*	Setidaknya setahun sekali. *At least once a year.*
Media Massa *Mass Media*	• Melaksanakan prinsip-prinsip keterbukaan informasi yang selayaknya diketahui publik melalui penyampaian berita maupun bentuk informasi lainnya. • Melakukan kunjungan ke media maupun ke unit kerja Bank Muamalat Indonesia untuk memperluas wawasan mengenai kegiatan bisnis Bank Muamalat Indonesia. • *Implement the principles of information disclosure that should be known to the public through the delivery of news and other forms of information.* • *Conducting visits to the media and to the work unit of Bank Muamalat Indonesia to broaden insight about the business activities of Bank Muamalat Indonesia.*	Keterbukaan informasi yang akurat dan terkini. *Accurate & up to date information disclosure.*	Memberikan informasi akurat mengenai berita terkini Bank. *To provide accurate & the latest information.*	Setidaknya tiga kali setahun. *At least three times a year.*

Pemangku Kepentingan *Stakeholders*	Pendekatan *Approach*	Topik *Topics*	Respon Terhadap Topik *Response to Topic*	Frekuensi *Frequency*
Masyarakat *Public*	• Memperluas akses dan porsi pembiayaan produktif bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). • Meningkatkan akses keuangan syariah bagi penduduk di daerah populasi rendah. • Menyediakan layanan khusus 'Satu Atap bagi Haji dan Umrah' (1HRAM). • Menyelenggarakan konsultasi edukasi tentang perencanaan keuangan syariah. • *Expanding access and portion of productive financing for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs).* • *Increase access to Islamic finance for residents in low population areas.* • *Providing special services 'One Roof for Hajj and Umrah' (1HRAM).* • *Hold educational consultations on Islamic financial planning.*	• Meningkatnya taraf kehidupan masyarakat ("umat") melalui produk pembiayaan berbasis syariah untuk pengembangan UMKM. • Bertumbuhnya jumlah nasabah syariah hingga ke daerah pelosok nusantara. • Meningkatnya kualitas serta kenyamanan dari layanan khususnya bagi nasabah calon Haji dan Umrah. • Meningkatnya literasi masyarakat luas terkait produk/ layanan perbankan syariah. • *Increasing standard of living ("people") through sharia-based financing products for the development of MSMEs.* • *Growing the number of Islamic customers to remote areas of the archipelago.* • *Increasing quality and convenience of services, especially for prospective Hajj and Umrah customers.* • *Increasing public literacy related to Islamic banking products/ services.*	• Optimalisasi program pembiayaan sektor UMKM yang telah terlaksana. • Meningkatkan jumlah mitra nasabah baru di daerah pelosok nusantara. • Memberikan kualitas layanan melebihi ekspektasi nasabah. • Memberikan konsultasi dan pelatihan yang lebih luas mengenai perencanaan keuangan berbasis syariah kepada masyarakat luas. • *Optimization of MSME sector financing programs that have been implemented.* • *Increase the number of new customer partners in remote areas of the archipelago.* • *Providing quality services beyond customer expectations.* • *Providing broader consultation and training on sharia-based financial planning to the wider community.*	Setidaknya tiga kali setahun. *At least three times a year.*
Pemerintah dan Pembuat Kebijakan *Government and Policy Maker*	• Melakukan komunikasi dan mematuhi seluruh regulasi yang berlaku, termasuk dalam pelaporan rutin. • Membayar pajak, biaya pungutan pemerintah dan biaya terkait non-pajak lainnya. • Melakukan partisipasi aktif dalam musyawarah rencana kegiatan bersama. • Meminta masukan berbagai lembaga pemerintah terhadap aspek-aspek operasional Bank Muamalat Indonesia. • *Communicate and comply with all applicable regulations, including routine reporting.* • *Pay taxes, government fees and other non-tax related costs.* • *Conduct active participation in deliberations on plans for joint activities.* • *Request input from various government agencies on the operational aspects of Bank Muamalat Indonesia.*	• Kepatuhan terhadap seluruh regulasi yang berlaku. • Tata kelola Perusahaan yang Baik. • Kerja sama dalam program *Corporate Social Responsibility* (CSR). • *Compliance with all applicable regulations.* • *Good Corporate Governance.* • *Cooperation in Corporate Social Responsibility (CSR) programs.*	• Melakukan evaluasi secara berkala sebagai alat ukur efektivitas kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. • Meningkatkan program-program Anti Korupsi serta Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT). • Meningkatkan kerja sama program-program CSR dengan Pemerintah. • *Conduct periodic evaluations as a measure of the effectiveness of compliance with applicable regulations.* • *Enhance Anti-Corruption and Anti-Money Laundering and Prevention of Terrorism Financing (APU-PPT) programs.* • *Improve cooperation in CSR programs with the Government.*	Setidaknya tiga kali setahun. *At least three times a year.*

Pemangku Kepentingan *Stakeholders*	Pendekatan *Approach*	Topik *Topics*	Respon Terhadap Topik *Response to Topic*	Frekuensi *Frequency*
Industri sejenis (Bank Syariah lain) *Similar industries (other Sharia banks)*	Berkomunikasi dan berkolaborasi dengan lembaga seperti: • Asosiasi Bank Syariah Indonesia (ASBISINDO). • Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (PKES). • Masyarakat Ekonomi Syariah (MES). *Communicate and collaborate with institutions such as:* • *Indonesian Sharia Bank Association (ASBISINDO).* • *Sharia Economic Communication Center (PKES).* • *Sharia Economic Society (MES).*	• Terjalinnya kerja sama yang baik di antara sesama industri perbankan syariah. • Terciptanya persaingan usaha yang sehat. • Pertemuan berkala diantara sesama pelaku bisnis. • *Good cooperation among fellow Sharia banking industries.* • *The creation of fair business competition.* • *Regular meetings between business people.*	Melaksanakan aktivitas dan kegiatan perbankan syariah yang sesuai dengan prosedur, beretika/*Good Corporate Gorvernance* (GCG). *Carry out Islamic banking activities and activities in accordance with procedures, ethical/Good Corporate Governance (GCG).*	Setidaknya tiga kali setahun. *At least three times a year.*
Nasabah *Customer*	• Menyediakan produk dan layanan keuangan syariah. • Mengadakan pertemuan reguler untuk mendiskusikan isu terkait kontrak yang telah disetujui. • Menyelenggarakan mekanisme pengaduan dan tindak lanjutnya. • Melakukan survei untuk mengetahui kepuasan pelanggan dengan Customer Satisfaction Index. • Menjaga privasi pelanggan. • Mengadakan acara *customer gathering.* • *Providing Islamic financial products and services.* • *Hold regular meetings to discuss issues related to agreed contracts.* • *Carry out the complaints mechanism and follow up.* • *Conduct a survey to find out customer satisfaction with the Customer Satisfaction Index.* • *Maintain customer privacy.* • *Hold customer gatherings.*	• Peningkatan intensitas penyelenggaraan sosialisasi terkait produk dan layanan keuangan Bank terutama bagi nasabah baru dan masyarakat yang belum teredukasi akses keuangan berbasis syariah. • Peningkatan fasilitas dan akses perbankan serta keamanan transaksi. • Transparansi informasi layanan Bank. • *Increasing the intensity of information dissemination related to the Bank's financial products and services, especially for new customers and the public who have not been educated on sharia-based financial access.* • *Improved banking facilities and access and transaction security.* • *Transparency of Bank service information.*	• Konsistensi penyelenggaraan program-program edukasi terbuka kepada setiap nasabah Bank. • Meningkatkan sistem pada fasilitas dan keamanan transaksi perbankan syariah. • Memberikan informasi akurat kepada setiap nasabah mengenai informasi terkini produk dan layanan perbankan syariah. • *The consistency of conducting educational programs is open to every customer of the Bank.* • *Improve the system of facilities and security of Sharia banking transactions.* • *Provide accurate information to each customer regarding the latest information on Sharia banking products and services.*	Setidaknya tiga kali setahun. *At least three times a year.*
Organisasi Kemasyarakatan/ Perusahaan Nirlaba *Community Organizations/Non-profit Companies*	Informasi dan pengembangan kapasitas terkait keuangan berkelanjutan. *Information and capacity building related to sustainable finance.*	• Pengungkapan informasi yang jelas dan terkini. • Peningkatan kapasitas yang berhubungan dengan keuangan berkelanjutan. • *Clear and current information disclosure.* • *Capacity building related to sustainable finance.*	Pelibatan dan penyediaan informasi yang akurat terkait perkembangan terakhir keuangan berkelanjutan Bank. *Involving and providing accurate information related to the latest financial development of the Bank.*	Setidaknya tiga kali setahun. *At least three times a year.*

Pemangku Kepentingan *Stakeholders*	Pendekatan *Approach*	Topik *Topics*	Respon Terhadap Topik *Response to Topic*	Frekuensi *Frequency*
Rekanan *Partner*	• Membuat kontrak kerja yang dilandasi panduan kerja dan Standar Etika Bank. • Melakukan pengawasan serta evaluasi berkala pelaksanaan kontrak kerja sesuai dengan panduan kerja dan Standar Etika Bank. • Melakukan sanksi penghentian kontrak kerja sama terhadap pemasok, yang mengabaikan panduan kerja dan Standar Etika Bank. • *Make a work contract that is based on work guidelines and the Bank's Ethics Standards.* • *Monitor and periodically evaluate the implementation of the work contract in accordance with work guidelines and the Bank's Ethics Standards.* • *Imposing sanctions to terminate the cooperation contract against the supplier, who ignores the work guidelines and the Bank's Ethics Standards.*	Transparansi dalam proses pengadaan *Transparency in the procurement process*	Melaksanakan sistem pengadaan yang mematuhi prinsip-prinsip panduan kerja dan standar etika. *Implement a procurement system that complies with work guiding principles and ethical standards.*	Setidaknya tiga kali setahun. *At least three times a year.*

Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) Bank Muamalat Indonesia tertuang pada prosedur operasional Corporate Social Responsibility 2018, yang berlandaskan pada undang-undang, peraturan, dan kebijakan sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 25 Tahun 2007, tanggal 26 April 2007, Pasal 15 (b) tentang Penanaman Modal.
2. Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 tanggal 18 Agustus 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.
3. Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2011 tanggal 25 November 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
4. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas.
5. Peraturan Pemerintah RI No. 47 Tahun 2012 tanggal 4 April 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.
6. "Setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab perusahaan" Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Pasal 62 ayat 2 point n dan o. Poin n: "Penyaluran dana untuk kegiatan sosial baik jumlah maupun pihak penerima dana; dan Poin o: "Pendapatan non halal dan penggunaannya" dan Pasal 76 ayat 3 poin h: "Penyaluran dana untuk kegiatan sosial baik jumlah mapun pihak penerima dana; dan "Pendapatan non halal dan penggunaannya".
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8/POJK.04/2015 tanggal 26 Juni 2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik. Pasal 6 point d yang berisi "Informasi yang wajib dimuat dalam Situr Web Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 paling kurang meliputi informasi tanggung jawab sosial perusahaan".

The implementation of Bank Muamalat' Indonesia's Corporate Social Responsibility (CSR) is stipulated in the 2018 Corporate Social Responsibility operational procedures, which are based on the following laws, regulations and policies:

1. *Law No. 25 of 2007, April 26, 2007, Article 15 (b) concerning Investment.*
2. *Law No. 13 of 2011 dated 18 August 2011 concerning Handling of the Poor.*
3. *Republic of Indonesia Law No. 23 of 2011 dated November 25, 2011 concerning Management of Zakat.*
4. *Law No. 40 of 2007 dated August 16, 2007 concerning Limited Liability Companies.*
5. *Republic of Indonesia Government Regulation No. 47 of 2012 dated April 4, 2012 concerning Limited Corporate Social and Environmental Responsibility.*
6. *"Every investor is obliged to carry out corporate responsibilities" Bank Indonesia Regulation No. 11/33/PBI/2009 dated December 7, 2009 concerning the Implementation of Good Corporate Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units, Article 62 paragraph 2 points n and o. Point n: "Distribution of funds for social activities, both the amount and the party receiving funds; and Point o: "Non-halal income and use". And Article 76 paragraph 3 point h: "Distribution of funds for social activities both in the amount of funds and the party receiving the funds; and "Non-halal income and usage".*
7. *Financial Services Authority Regulation No. 8/POJK.04/2015 dated June 26, 2015 concerning Website of Issuers or Public Companies. Article 6 point d which contains "Information that must be posted on the Issuer's Web Site or Public Company as referred to in Article 5 at least includes information on corporate social responsibility".*

8. POJK No. 29/POJK.04/2016 tanggal 29 Juli 2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.
9. SEOJK No. 30/SEOJK.04/2016 tanggal 3 Agustus 2016 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten dan Perusahaan Publik.
10. Kebijakan *Good Corporate Governance* No. CPL.KBJ.014.2016.

Organisasi Pengelola CSR

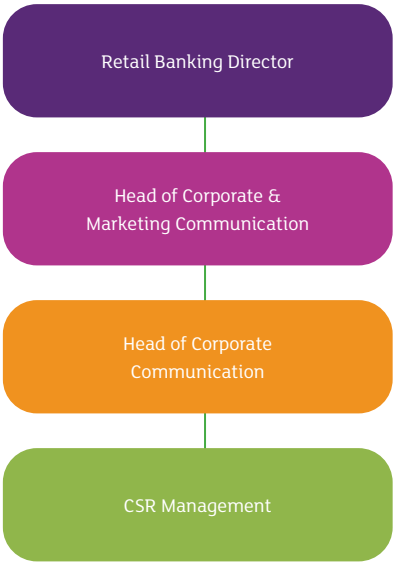
Penanggung jawab pelaksanaan program CSR di Bank Muamalat Indonesia berada pada Function Corporate & Marketing Communication.

8. *POJK No. 29/POJK.04/2016 dated July 29, 2016 concerning Annual Reports of Issuers or Public Companies.*
9. *SEOJK No. 30/SEOJK.04/2016 dated August 3, 2016concerning the Form and Content of Annual Reports of Issuers and Public Companies.*
10. *Good Corporate Governance Policy No. CPL.KBJ.014.2016.*

CSR Management Organization

Responsible for the implementation of CSR programs at Bank Muamalat Indonesia lie in Corporate & Marketing Communication Function.

Struktur Pengelola CSR
CSR Management Structure



Secara struktur organisasi, tim CSR berada di dalam naungan Direktorat Retail Banking di bawah fungsi Corporate & Marketing Communication dan di supervisi langsung oleh Head of Corporate Communication.

Kegiatan CSR dapat diadakan oleh sub-direktorat lainnya yang menyelaraskan sisi bisnis dan korporat, terutama *Islamic Enterprise Alliance*, Distribution Network Management, dan Human Capital dengan berkoordinasi dengan Baitulmaal Muamalat, anak perusahaan yang menjalankan kegiatan filantropi Bank Muamalat Indonesia yang mengelola dana zakat perusahaan.

As an organization structure, the CSR team is under the auspices of the Directorate of Retail Banking under the Corporate & Marketing Communication function and is supervised directly by the Head of Corporate Communication.

Other sub-directorates can also carry out CSR activities that align with its business and corporate purposes, especially Islamic Enterprise Alliance, Distribution Network Management, and Human Capital. Any activity related to this need to be coordinated with Baitulmaal Muamalat (BMM), the bank's subsidiary that managed the company's philanthropic activities, by distributing the company's zakat fund.

Strategi dan Program Kerja Bank dalam Menangani Isu-Isu Sosial, Ekonomi dan Lingkungan

Sepanjang 2019, CSR Bank Muamalat Indonesia fokus pada isu sosial dan lingkungan dengan mengutilisasi Mobile Tatoo Removal Clinic dan Muamalat Mobile Library Muamalat. Sebagai Bank Syariah pertama di Indonesia, Bank memiliki brand #AyoHijrah yang mengajak masyarakat Indonesia ke arah yang lebih baik, dan pelaksanaan CSR di tahun 2019 mencoba menyelaraskan *brand*. Pada tahun 2019 juga, Bank Muamalat Indonesia sudah fokus pada isu sampah plastik yang dikomunikasikan secara eksternal (melalui media sosial) maupun internal (*email blast*).

Adapun terkait isu ekonomi, pada 2019 tim CSR bekerja sama dengan BAZNAS Republik Indonesia dan BMM, menjalankan kegiatan Balai Ternak dengan harapan dapat menaikkan ekonomi para penerima.

Strategy and Work Program of the Bank in Dealing with Social, Economic and Environmental Issues

Throughout 2019, Bank Muamalat Indonesia's CSR focused on social and environmental issues by utilizing Mobile Tatoo Removal Clinic and Muamalat Mobile Library. As pioneer of Sharia banking in the country, the Bank communicated #AyoHijrah campaign that encourage Indonesian people to be "better" in their daily lives. CSR activities will always get in line with this company's brand. Also in the same year, Bank Muamalat Indonesia focused on plastic waste issue. that communicated externally (through social media) or internal (email blast).

In the economic development issue, the CSR team had coordinated with BAZNAS (National Zakat Organization) and BMM, to conduct an activity related to animal husbandry in hope to improve the recipients' income.

Anggaran CSR

Bank Muamalat Indonesia mengalokasi anggaran khusus untuk menjalankan kegiatan-kegiatan CSR. Besaran anggaran CSR sendiri terdiri atas gabungan antara zakat perusahaan dan zakat karyawan sebesar 2,5% dari keuntungan perusahaan dan gaji karyawan, serta berasal dari dana kebajikan/non-halal. Hal ini ditetapkan dalam SOP CSR 2018 serta keputusan manajemen yang diputuskan dalam BOD meeting.

Berikut di bawah ini adalah anggaran CSR pada 2019 yang dijalankan oleh Baitulmaal Muamalat sebagai pengelola zakat dan dana kebajikan Bank Muamalat Indonesia:

CSR Budget

As stipulated in the 2018 CSR Procedure and management decision at the Board of Management Meeting, Bank Muamalat Indonesia allocates combination of 2.5% of the company profits as well as employees salaries and non-halal funds (called 'qardhul hasan') as its yearly CSR budget.

The following is a CSR budget in 2019 managed by Baitulmaal Muamalat as the manager of zakah and benevolent funds of Bank Muamalat Indonesia:

	dalam Rupiah *in Rupiah*
Pendidikan *Education*	3.052.354.885
Kemanusiaan *Humanitarian*	3.769.426.000
Kesehatan *Health*	115.330.000
Ekonomi *Economy*	1.852.453.441
Dakwah Advokasi *Religious Advocacy Activities*	2.640.180.725
Total	11.429.745.051

Pada 2019, melalui anak perusahaannya, Baitulmaal Muamalat, Bank Muamalat Indonesia telah menyalurkan bantuan sebesar Rp11.429.745.051. Adapun fokus utama dari kegiatan CSR pada 2019 selain pendidikan adalah kegiatan filantropi terkait cukup banyaknya bencana yang terjadi di Indonesia pada dua tahun terakhir.

In 2019, the total CSR spending by Bank Muamalat Indonesia is Rp11,429,745,051. Its main focus of distribution are education and philanthropic activities, especially after a number of disasters hit Indonesia for the last two consecutive years.

Tanggung Jawab Sosial Terkait Hak Asasi Manusia

Social Responsibilities Related to Human Rights

Komitemen dan Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Terkait Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapanpun, di manapun, dan kepada siapapun, sehingga sifatnya universal. HAM pada prinsipnya tidak dapat dicabut dan juga tidak dapat dibagi-bagi.

Bank Muamalat Indonesia menjunjung tinggi HAM sebagai pedoman dasar dalam operasional perusahaan. Hal ini berlaku ke dalam (kepada karyawan) dan juga ke luar (kepada pihak di luar perusahaan). Bank juga menjamin terpenuhinya hak dasar tersebut bagi seluruh nasabah dan pihak terkait lainnya.

Isu dan Risiko Terkait HAM yang Relevan dengan Bank

Sebagai perusahaan yang bergerak di industri jasa perbankan syariah, aktivitas Bank Muamalat Indonesia tidak bersinggungan secara langsung dengan isu-isu HAM berat. Namun demikian, terdapat isu-isu HAM yang relevan dan berkaitan langsung dengan aktivitas perusahaan. Isu-isu HAM yang relevan dan berkaitan langsung dengan Bank adalah pada bidang ketenagakerjaan dan pelayanan nasabah.

Kendati tidak memiliki isu-isu HAM berat yang berkaitan langsung dengan aktivitas Bank, namun pelanggaran terhadap ketentuan HAM juga memberikan risiko baik bagi Bank maupun pemangku kepentingan. Risiko yang dihadapi Bank dan juga pemangku kepentingan terkait pelanggaran HAM adalah berkaitan dengan penegakan hukum, baik perdata, pidana maupun hubungan industrial. Selain itu, risiko lain yang mungkin dihadapi Bank adalah risiko kerugian material dan non material yang terkait dengan citra Bank.

Pelaksanaan Kegiatan

Bank Muamalat Indonesia berkomitmen untuk dapat memenuhi berbagai ketentuan terkait HAM, baik yang berlaku bagi karyawan maupun nasabah. Pemenuhan ketentuan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pemenuhan ketentuan HAM bagi karyawan
   a. Kebebasan Berserikat dan Berkumpul
      Bank Muamalat Indonesia membangun hubungan industrial melalui jaminan keberadaan serikat pekerja di lingkungan kerja Bank sebagai bagian dari hak berserikat Karyawan. Serikat pekerja di lingkungan Bank Muamalat Indonesia bernama Serikat Pejuang Muamalat (SPM) yang telah tercatat pada Kantor Departemen Tenaga Kerja Kotamadya Jakarta Pusat dengan nomor bukti pencatatan 482/I/P/II/2009 tanggal 23 Februari 2009.

Commitments and Policy of Social Responsibilities Related to Human Rights

Human rights (HAM) is a legal and normative concept which states that human beings have the inherent right as a human beings. Human rights apply whenever, wherever, and to anyone, so that they are universal. Human Rights in principle inalienable and can not be divided.

Bank Muamalat Indonesia upholds human rights as a basic guideline in company operations. This applies both inside (to employees) and also outside (to parties outside the company). The Bank also guarantees the fulfillment of these basic rights for all customers and other related parties.

Issues and Risks Related to Human Rights Relevant to the Bank

As a company engaged in the Islamic banking service industry, Bank Muamalat Indonesia's activities do not directly interfere with serious human rights issues. However, there are human rights issues that are relevant and directly related to company activities. Human rights issues that are relevant and directly related to the Bank is in the field of employment and customer service.

Even though they do not have serious human rights issues that are directly related to the Bank's activities, violations of human rights provisions also pose risks for both the Bank and its stakeholders. The risks faced by the Bank and also stakeholders related to human rights violations are related to law enforcement, both civil, criminal and industrial relations. In addition, other risks that the Bank may face are the risks of material and non-material losses related to the Bank's image.

Implementation of Activities

Bank Muamalat Indonesia is committed to being able to fulfill various provisions related to human rights, that apply to employees and customers. Fulfillment of these provisions can be explained as follows:

1. *Fulfillment of human rights provisions for employees*
   a. *Freedom of Association and Assembly*
      Bank Muamalat Indonesia builds industrial relations through the guarantee of the existence of trade unions in the work environment of the Bank as part of Employees' union rights. The trade union within Bank Muamalat Indonesia is called the Serikat Pejuang Muamalat (SPM) which has been registered at the Central Jakarta Municipality Department of Labor Office with evidence number 482/II/P/III/2009 dated February 23, 2009.
      The settlement of industrial relations problems at Bank

Penyelesaian masalah-masalah hubungan industrial di Bank Muamalat Indonesia selama ini telah dilaksanakan berdasarkan pada prinsip kesetaraan, kewajaran, rasa keadilan serta nilai-nilai kemanusiaan. Prinsip-prinsip tersebut diwujudkan dalam suatu Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau yang disebut sebagai Ittifaq Muamalat. Dokumen Ittifaq Muamalat disepakati bersama antara manajemen dan pihak karyawan yang diwakili oleh Serikat Pejuang Muamalat (Serikat Pekerja).

Muamalat Indonesia has so far been carried out based on the principles of equality, fairness, a sense of justice and human values. These principles are embodied in a Collective Labor Agreement (PKB) or what is referred to as Ittifaq Muamalat. The Muamalat Ittifaq document was mutually agreed between the management and the employees represented by the Serikat Pejuang Muamalat (Trade Union).

Bank Muamalat Indonesia dan Serikat Pejuang Muamalat (SPM) telah melakukan penandatanganan bersama Ittifaq Muamalat untuk periode 2017-2019, pada tanggal 7 Juni 2017 dan berlaku efektif sejak 17 Juli 2017. Ittifaq Muamalat periode 2017-2019 berisi kesepakatan yang harus dipertanggungjawabkan oleh setiap pemangku kepentingan dan karyawan Bank Muamalat Indonesia.

Bank Muamalat Indonesia and the Serikat Pejuang Muamalat (SPM) have signed with Ittifaq Muamalat for the 2017-2019 period, on 7 June 2017 and have been effective since 17 July 2017. Ittifaq Muamalat for the 2017-2019 period contains an agreement that must be accounted for by all stakeholders and Bank Muamalat Indonesia's employees.

Bank Muamalat Indonesia menyediakan ruang sekretariat bagi Syarikat Pejuang Muamalat, yang terletak di lantai 5 Muamalat Tower, sekretariat dipergunakan untuk kegiatan kordinasi internal pengurus maupun pertemuan pengurus dengan anggota. Penyediaan ruang sekretariat ini sebagai bentuk pelaksanaan dari pasal 3 ayat 3 Perjanjian Kerja Bersama/Ittifaq Bank Muamalat Indonesia tentang ruangan bagi serikat pekerja.

Bank Muamalat Indonesia provide a space for Serikat Pejuang Muamalat secretariat, which is located on the 5th floor of Muamalat Tower, the secretariat used for activity coordination of internal board and meetings committee with members. Provision of this secretariat space as a form of implementation of article 3 paragraph 3 of the Joint Work Agreement/Ittifaq Bank Muamalat Indonesia concerning space for trade unions.

b. Praktik Kerja Paksa

Jam kerja yang berlaku bagi karyawan Bank Muamalat Indonesia telah sesuai dengan pasal 77 Undang-undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu 40 jam dalam 1 minggu. Waktu kerja karyawan Bank Muamalat dapat dijelaskan pada tabel berikut:

b. *Forced Labor Practices*

The working hours that apply to Bank Muamalat Indonesia employees are in accordance with article 77 of Law No. 13 of 2003 concerning Manpower, which is 40 hours a week. The Bank employee's work hours can be explained in the following table:

Uraian *Description*	Karyawan Non Shift *Non Shift Employees*	Karyawan Shift *Shift Employees*
Hari kerja *Working Days*	Senin – Jumat *Monday – Friday*	5 hari dalam 1 minggu *5 days a week*
Jam kerja *Working Hours*	08:00 – 17:00	8 jam sehari *8 hours a day*
Kerja lembur *Overtime*	Maksimum 3 jam/ hari dan 14 jam dalam 1 minggu *Maximum 3 hours/day and 14 hours in 1 week*	
Hak cuti *Leave Rights*	Minimal 15 hari setahun *At least 15 days a year*	

Penetapan waktu kerja tersebut juga untuk memastikan bahwa Bank Muamalat Indonesia terbebas dari praktik kerja paksa, karena karyawan bekerja dengan waktu normal dan memiliki waktu istirahat yang cukup.

The determination of working time is also to ensure that Bank Muamalat Indonesia is free from forced labor practices, because employees work with normal time and have sufficient rest periods.

c. Pekerja Anak

Bank Muamalat Indonesia tidak mempekerjakan pekerja anak. Bank telah mentapkan aturan batas usia minimal dalam merekrut karyawan, yaitu 20 tahun atau telah menamatkan

c. *Child Labor*

Bank Muamalat Indonesia does not employ child labor. The Bank has established a minimum age limit for recruiting employees, which is 20 years old or has completed Diploma

pendidikan jenjang Diploma 3 (D3). Dengan demikian, Bank terbebas dari mempekerjakan pekerja di bawah umur.

d. Izin Cuti

Bank memberikan hak cuti tahunan kepada Karyawan yang meliputi cuti tahunan dan cuti melahirkan serta cuti istri melahirkan (bagi Karyawan pria).

Cuti tahunan yang diberikan dapat dimanfaatkan dalam beberapa bagian, namun salah satu bagiannya harus dimanfaatkan 5 hari kerja berturut-turut atau *blockleave*. Jumlah hak cuti tahunan ditentukan berdasarkan *grade* Karyawan dengan minimal jumlah cuti 15 hari kerja.

Karyawati berhak memperoleh cuti melahirkan selama 1,5 bulan sebelum saatnya melahirkan dan 1,5 bulan setelah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan. Sedangkan bagi Perkerja yang istrinya melahirkan, Perusahaan memberikan cuti sebanyak 2 hari kerja.

Prosedur dan Mekanisme Pengaduan Pelanggaran HAM

Seluruh pengaduan yang masuk melalui call center dan e-mail Bank yaitu: corporate.affairs@bankmuamalat.co.id akan di monitor oleh Bank dibawah kebijakan yang dikelola dan dikeluarkan oleh Direktur Utama.

Dampak Kegiatan dan Pencapaian

Hingga akhir tahun 2019, tidak terdapat laporan, baik dari karyawan maupun nasabah terkait pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia.

3 (D3) education. As such, the Bank is free from employing underage workers.

d. *Leave Permission*

The Bank grants Employees annual leave entitlements which include annual and maternity leave and wife leave (for male employees).

The annual leave granted can be utilized in several parts, but one part must be utilized by 5 working days in a row or blockleave. The amount of annual leave entitlements is determined based on the grade of the Employee with a minimum number of 15 days of work leave.

The employee is entitled to have maternity leave for 1.5 months before the time of delivery and 1.5 months after giving birth according to the calculation of the obstetrician or midwife. Whereas for Workers whose wives give birth, the Company gives two days work leave.

Procedure and Mechanism for Complaints of Human Rights Violations

All complaints, received by call center and Bank e-mail: corporate.affairs@bankmuamalat.co.id will be monitored by the Bank under Bank's Policy that is managed by President Director.

Impact of Activity and Achievement

Until the end of 2019, there were no reports, either from employees or customers related to human rights violations committed by Bank Muamalat Indonesia.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Operasi yang Adil

Corporate Social Responsibilities Related to Fair Operations

Bank Muamalat Indonesia berkomitmen untuk menerapkan pengembangan usaha dengan mengedepankan prinsip operasi yang adil. Bank tunduk dan taat terhadap setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bank Muamalat Indonesia is committed to implementing business development by promoting fair operating principles. The bank is subject to and obeys to all applicable laws and regulations.

Target dan Rencana Kegiatan

Terlaksananya aspek kepatuhan Bank terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang terkait merupakan tujuan utama yang hendak dicapai Bank dalam operasionalnya. Sebagai lembaga yang diawasi oleh banyak pihak, Bank harus memastikan bahwa seluruh kegiatan usahanya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Upaya pencapaian dari tujuan tersebut diterjemahkan dalam program kerja setiap Departemen yang ada di Bank, termasuk juga perilaku setiap karyawan baik dalam kaitan bisnis maupun pribadi.

Target and Activity Plan

The implementation of the Bank's compliance aspect to all relevant laws and regulations is the main objective to be achieved by the Bank in its operations. As an institution overseen by many parties, the Bank must ensure that all of its business activities are in accordance with the applicable laws and regulations. Efforts to achieve these goals are translated into the work programs of each Department in the Bank, including the behavior of every employee both in business and personal relationships.

Kegiatan yang Dilakukan

Anti Korupsi

Sejalan dengan semangat pemerintah Indonesia memberantas korupsi, Bank Muamalat Indonesia memiliki komitmen serupa. Komitmen itu tak terpisahkan dengan impelementasi prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG), yang tujuannya antara lain meningkatkan kepercayaan nasabah dan pemegang saham.

Bank telah memiliki kebijakan Anti Korupsi dan berbagai kebijakan lainnya untuk terlaksananya prinsip GCG pada setiap aspek operasional Bank. Sebagai upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi, Bank juga telah memeliki sistem pelaporan pelanggan yang dikelola oleh Unit Kerja Internal Audit dimana setiap orang dapat melaporkan indikasi terjadinya *fraud* tanpa harus takut terhadap risiko intimidasi baik secara fisik maupun psikologis.

Dengan komitmen tersebut, pada 2019 tidak ada insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil atas insiden tersebut.

Bersaing Secara Sehat

Dalam melaksanakan bisnis, Bank menjunjung tinggi nilai bersaing secara sehat, menentang monopoli dan *anti trust*. Untuk memenangkan persaingan, Bank berupaya semaksimal mungkin dengan cara merumuskan strategi-strategi khusus, yang disesuaikan menurut program dan target yang hendak dicapai. Pada 2019, tidak ada laporan dan tindakan anti-persaingan yang terkait dengan praktik bisnis Bank Muamalat Indonesia.

Activities Performed

Anti-Corruption

In line with the spirit of the Indonesian government in eradicating corruption, Bank Muamalat Indonesia has a similar commitment. That commitment is integral to the implementation of the principle of Good Company Governance (GCG). One of the aims of GCG is to increase the confidence of customers and shareholders.

The Bank has an Anti-Corruption policy and various other policies for the implementation of GCG principles in every aspect of the Bank's operations. As an effort to prevent the occurrence of criminal acts of corruption, the Bank also has a customer reporting system managed by the Internal Audit Unit where anyone can report indications of fraud without having to fear the risk of intimidation both physically and psychologically.

With this commitment, in 2019 there were no proven corruption incidents and actions taken on these incidents.

Healthy Competition

In conducting business, the Bank upholds the value of fair competition, opposes monopoly and anti-trust. To win the competition, the Bank strives as much as possible by formulating specific strategies, which are adjusted according to the program and targets to be achieved. In 2019, there were no reports and anti-competitive actions related to Bank Muamalat Indonesia's business practices.

Pengadaan Barang dan Jasa yang Transparan

Pengadaan Barang dan Jasa di Bank Muamalat Indonesia adalah kegiatan untuk memperoleh Barang dan atau Jasa yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diterimanya Barang dan atau Jasa oleh unit kerja Pengguna di Bank Muamalat Indonesia, baik yang berupa Barang dan atau Jasa pada pemesanan pertama atau pada pemesanan ulang berikutnya.

Salah satu prinsip dasar pengadaan barang dan jasa adalah transparan dan adil yaitu calon Vendor diberikan informasi yang sama terkait Pengadaan Barang dan Jasa, spesifikasi Barang/Jasa yang dibutuhkan Bank, syarat-syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi dan penetapan vendor Barang dan atau Jasa.

Transparent Procurement of Goods and Services

Procurement of Goods and Services at Bank Muamalat Indonesia is an activity to obtain Goods and or Services whose process starts from the planning of needs until the receipt of Goods and or Services by the User work unit at Bank Muamalat Indonesia, whether in the form of Goods and or Services on the first order or on the next reorder.

One of the basic principles of public procurement is transparent and fair that the prospective vendor is given the same information related to the goods/services procurement, specification of goods/services that is needed by the Bank, the terms of the administrative requirements, evaluation procedures, results from evaluation and determination of Goods/Services vendor.

Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa

Goods and Services Procurement Mechanism

Metode *Method*		Nilai Pekerjaan *Value of Work*	Keterangan dan Contoh Pengadaan Barang dan Jasa *Remarks and Goods/Services Procurement Example*
Tender	Dengan Tatap Muka *Offline*	Nilai pekerjaan Rp 250.000.000 s.d. < Rp1.000.000.000 *Value of work Rp250,000,000 to <Rp1,000,000,000*	• Khusus yang dilakukan bersama Procurement Committee, untuk pekerjaan yang bersifat kompleks, contohnya yang melibatkan teknologi tinggi dan atau mempunyai risiko kegagalan yang tinggi. • Dilakukan minimal oleh 3 vendor. • Pengadaan *hardware/software*, *maintenance* IT, sewa kendaraan operasional, asuransi (gedung dan ATM), pekerjaan sipil/renovasi gedung dan lain-lain yang bersifat sentralisasi dan memiliki jangka waktu kerjasama. • Fungsi Pengadaan wajib mengirimkan email pemberitahuan hasil tender kepada calon vendor, dengan mekanisme Tender dengan Tatap Muka. • *Specifically conducted with the Procurement Committee, for complex work, for example involving high technology and or having a high risk of failure.* • *Performed at least by 3 vendors.* • *Procurement of hardware/software, IT maintenance, rental of operational vehicles, insurance (buildings and ATMs), civil works/building renovations and others that are centralized and have a period of cooperation.* • *The Procurement Function is required to send notification of tender results to prospective vendors, with a Face-to-Face Tender mechanism.*
		Nilai pekerjaan ≥ Rp1.000.000.000 (dilakukan bersama Procurement Committee) *Value of work ≥ Rp1,000,000,000* *(conducted with the Procurement Committee)*	

Metode *Method*		Nilai Pekerjaan *Value of Work*	Keterangan dan Contoh Pengadaan Barang dan Jasa *Remarks and Goods/Services Procurement Example*
Tender	Tanpa Tatap Muka *Online*	Nilai pekerjaan Rp1.000.000 s.d. < Rp 250.000.000 *Value of work Rp1,000,000 to < Rp250,000,000*	• Untuk Pengadaan di atas Rp1.000.000 sampai sama dengan Rp 50.000.000 dilakukan minimal oleh 2 Vendor. • Untuk Pengadaan di atas Rp50.000.000 sampai sama dengan Rp250.000.000 dilakukan minimal oleh 3 Vendor. • Pembelian *harddisk, notebook*, furnitur, barang cetakan, barang promosi dan lain-lain yang bersifat rutin atau biasa. • *For procurement above Rp1,000,000 up to Rp50,000,000, a minimum of 2 Vendors is conducted.* • *For procurement above Rp50,000,000 up to Rp250,000,000, a minimum of 3 Vendors is conducted.* • *Purchase of hard disks, notebooks, furniture, printed goods, promotional items and others that are routine or ordinary.*
Non Tender	Pembelian Langsung *Direct Purchase*	• Sampai dengan nilai Rp1.000.000 atau ekivalen per pengadaan • Nilainya berdasarkan harga pasar dan pelaksanaannya dapat dilakukan tanpa kontrak • Batasan nilai pembelian langsung adalah batasan nilai belum termasuk pajak (PPN & PPh) • *Up to a value of Rp1,000,000 or equivalent per procurement* • *The value is based on market prices and its implementation can be done without a contract* • *Limitation of direct purchase value is the value limit not including tax (VAT & PPh)*	• Pengadaan untuk jumlah Barang yang sedikit/*emergency*/dijual umum/harga acuan tersedia. • Pembelian dilaksanakan melalui pembelian langsung dan/atau aplikasi online buying untuk pembelian Barang/Jasa yang terdapat di pasar, tempat pembelian berupa toko, supermarket, bengkel, *online buying*, *website* belanja di internet dll. • Bukti pembelian yang sah (misal invoice, nota/kuitansi). • Pembelian materai, *stamps*, buku, bunga, kue ulang tahun, konsumsi/kudapan untuk *training/meeting*, hadiah, kelengkapan *event*, alat listrik, freon dan lain-lain yang bersifat *urgent*/darurat dan nilai biayanya kecil. • *Procurement for small quantities of goods/emergency/general sale/reference price available.* • *Purchases are made through direct purchases and/or online buying applications to purchase goods/services in the market, where purchases are in the form of shops, supermarkets, workshops, online buying, shopping websites on the internet, etc.* • *Valid proof of purchase (eg invoices, receipts/receipts).* • *Purchase of stamps, books, flowers, birthday cakes, consumption/snacks for training/meetings, gifts, completeness of events, electrical equipment, freon and others that are urgent/emergency and the cost is small.*

Metode *Method*	Nilai Pekerjaan *Value of Work*	Keterangan dan Contoh Pengadaan Barang dan Jasa *Remarks and Goods/Services Procurement Example*
Penunjukan Langsung *Direct Appointment*	Nilai pengadaan di atas Rp1.000.000 *Procurement value is above Rp1,000,000*	• Pengadaan untuk jenis Barang yang sedikit/*emergency*/*non*-stok/bersifat khusus & terbatas/pekerjaan lanjutan. • Penanganan keadaan darurat berdasarkan pernyataan dari Fungsi Risiko Operasional. • Barang dan jasa yang dibutuhkan bagi kinerja utama Perusahaan dan tidak dapat ditunda keberadaannya. • Pekerjaan yang bersifat spesifik karena alasan tertentu (kompleksitas, teknologi, *availability*) yang karena sifatnya tersebut, maka hanya dapat dilaksanakan oleh satu Penyedia Barang/Jasa. • Barang dan jasa yang dimiliki oleh pemegang hak paten atau hak atas kekayaan intelektual (HAKI) atau yang dimiliki dan/atau untuk memenuhi kebutuhan standarisasi operasional sehingga dibutuhkan merk/*brand* tertentu. • Pekerjaan yang bersifat *knowledge intensive* dimana untuk menggunakan dan memelihara produk tersebut membutuhkan kelangsungan pengetahuan dari penyedia barang dan/atau jasa serta diperlukan untuk transfer pengetahuan atau alih teknologi. • Pekerjaan lanjutan/tambahan yang secara teknis merupakan satu kesatuan yang sifatnya tidak dapat dipecah-pecah dari pekerjaan yang sudah dilaksanakan sebelumnya dan sedapat mungkin menggunakan satuan harga menurut harga yang berlaku pada kontrak sebelumnya, sepanjang dapat dipertanggungjawabkan secara profesional. • Pengadaan di daerah tertentu yang tidak ada Vendor lainnya. • Jasa yang hanya bisa diadakan dengan melibatkan pihak/otoritas setempat, misalnya pengamanan dari kepolisian. • *Procurement for types of goods that are small/emergency/non-stock/special & limited/advanced work.* • *Handling emergencies based on statements from the Operational Risk Function.* • *Goods and services needed for the Company's main performance and cannot be postponed.* • *Work that is specific for certain reasons (complexity, technology, availability) which, because of its nature, can only be carried out by one Goods/Service Provider.* • *Goods and services that are owned by patent holders or intellectual property rights (HAKI) or that are owned and/or to meet operational standardization requirements so that certain brand/brands are needed.* • *Knowledge-intensive work where to use and maintain the product requires continuity of knowledge from suppliers of goods and/or services and is required for knowledge transfer or transfer of technology.* • *Continued/additional work that is technically a unity that cannot be broken down from work that has been carried out previously and uses the unit price according to the price prevailing in the previous contract, as long as it can be professionally accounted for.* • *Procurement in certain areas where there are no other vendors.* • *Services that can only be provided by involving local authorities, for example security from the police.*

Prosedur dan Mekanisme Pengaduan Pelanggaran Operasi yang Adil

Berdasarkan kebijakan dan prosedur yang berlaku di Bank Muamalat Indonesia, setiap keluhan dan/atau pengaduan pelanggaran operasi yang adil akan diselesaikan secara musyawarah mufakat, adil serta secepat mungkin. Dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial.

Procedure and Mechanism for Complaints of Fair Operating Violations

Based on the policies and procedures applicable at Bank Muamalat Indonesia, every complaint and/or complaint of Fair Operating Violations will be resolved by consensus, fairly and as soon as possible. This also applies when settling industrial relationship complaints.

Bank Muamalat
Pertama Murni Syariah

#HijrahkanTransaksiOnlinemu

Jadilah yang pertama mencoba Mobile Banking Muamalat baru

Muamalat DIN
The New Mobile Banking



Segera Unduh

Download on the App Store

GET IT ON Google play

#AyoHijrah

Bank Muamalat Indonesia terdaftar dan diawasi oleh OJK dan LPS

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Bidang Lingkungan Hidup

Corporate Social Responsibilities in the Environment

Komitmen dan Kebijakan

Bank Muamalat Indonesia berkomitmen untuk mengelola aspek lingkungan yang timbul dari kegiatan yang dapat menimbulkan dampak langsung maupun tidak langsung terhadap lingkungan. Bank Muamalat Indonesia memfokuskan pengendalian dampak lingkungan dalam menciptakan kegiatan operasional yang lebih ramah lingkungan. Cakupan kegiatan pengelolaan tersebut adalah pada efisiensi energi, air, penggunaan kertas, pengelolaan gedung yang ramah lingkungan, kepatuhan pada izin lingkungan dan perlindungan lingkungan hidup yang melibatkan karyawan.

Tahun 2018, Bank mencanangkan program *Green Campaign* yang ditujukan untuk internal Bank Muamalat Indonesia, dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran karyawan akan pentingnya berkontribusi untuk lingkungan, khususnya keseimbangan antara operasional Bank dengan keberlangsungan lingkungan hidup.

Commitment and Policy

Bank Muamalat Indonesia is committed to managing environmental aspects arising from activities that can have direct or indirect impacts on the environment. Bank Muamalat Indonesia focuses on controlling environmental impacts in creating operational activities that are more environmentally friendly. The scope of management activities is on energy efficiency, water, paper use, environmentally friendly building management, compliance with environmental permits and environmental protection involving employees.

In 2018, the Bank launched a Green Campaign program aimed at internal Bank Muamalat Indonesia, with the aim of raising employee awareness of the importance of contributing to the environment, specifically the balance between the Bank's operations and environmental sustainability.

Isu-Isu dan Risiko Lingkungan yang Relevan dengan Bank

Bank Muamalat Indonesia bergerak di bidang jasa perbankan syariah. Secara umum, aktivitas operasional perbankan tidak memberikan dampak yang besar terhadap lingkungan hidup secara langsung. Namun, dalam operasionalnya, jasa perbankan juga menggunakan energi, kertas dan air yang bersumber dari lingkungan. Selain itu, kendati dalam jumlah yang relatif terbatas, operasional Bank juga menghasilkan limbah dan emisi.

Issues and Environmental Risks Relevant to the Bank

Bank Muamalat Indonesia is engaged in Islamic banking services. In general, banking operational activities do not have a major impact on the environment directly. However, in its operations, banking services also use energy, paper and water sourced from the environment. In addition, although in a relatively limited amount, the Bank's operations also produce waste and emissions.

Pelaksanaan Kegiatan

Penyaluran Pembiayaan Ramah Lingkungan

Bank Muamalat Indonesia telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam berbagai kebijakan dan programnya. Bank memiliki kebijakan ketat yang mengatur semua aktivitas penyaluran pembiayaan, utang, pasar modal, pembiayaan proyek, keuangan, dan penasehat keuangan. Adalah tanggung jawab Bank Muamalat Indonesia untuk memberikan yang terbaik bagi para pemangku kepentingan Bank.

Sebagai tindak lanjut, Bank memperkuat Kemampuan manajemen risiko dengan melakukan peninjauan kepada seluruh nasabah kredit, seperti tertuang dalam syarat dan ketentuan penyaluran kredit yang salah satunya adalah menelaah hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi perusahaan besar dan/atau berisiko tinggi agar proyek yang dibiayai tetap menjaga kelestarian lingkungan.

Implementation of Activities

Distribution of Environmental Friendly Financing

Bank Muamalat Indonesia has integrated the principles of sustainable development into its various policies and programs. The Bank has a strict policy that regulates all financing, debt, capital market, project financing, financial and financial advisory activities. It is the responsibility of Bank Muamalat Indonesia to provide the best for the Bank's stakeholders.

As a follow up, the Bank strengthens its risk management capability by conducting a review of all credit customers, as stipulated in the terms and conditions of lending, one of which is reviewing the results of an Environmental Impact Assessment (AMDAL) for large and/or high risk companies for projects to be funded while preserving the environment.

Kampanye Sampah Plastik

Komitmen Bank dalam menghambat risiko lingkungan juga ditunjukkan melalui kampanye bijak menggunakan plastik yang dilakukan secara internal dan eksternal demi meningkatkan kesadaran polusi sampah plastik.

Plastic Waste Campaign

The Bank commitment to fight environmental issue is also demonstrated through a campaign called "Bijak Menggunakan Plastik", to increase awareness of plastic pollution.

Air untuk Kehidupan

Pada Agustus 2019, Bank Muamalat Indonesia meresmikan donasi penampungan air bersih di Desa Raknamo, NTT. Kegiatan ini adalah salah satu sumbangsih bank terkait air sebagai elemen utama kehidupan manusia. Kegiatan ini juga menjadi salah satu aktivitas kampanye kemerdekaan Republik Indonesia.

Water for life

In August 2019, Bank Muamalat Indonesia donated clean water vessels to poor villagers in Raknamo Village, Nusa Tenggara Timur province. This activity is one of our contributions to provide clean water sanitation as basic element in life. This activity also became one of the bank activities to celebrate Republic of Indonesia's independence day.

Kegiatan Operasional Ramah Lingkungan

Menjaga kualitas lingkungan adalah salah satu hal terpenting yang harus dilakukan oleh segenap Insan Bank. Dalam setiap kegiatan operasional yang dilakukan, Bank Muamalat Indonesia sangat peduli dengan kelestarian dan pelestarian lingkungan, dengan harapan mampu menghasilkan manfaat bagi orang banyak.

Beberapa inisiatif yang dijalankan Bank Muamalat Indonesia antara lain :

1. Gedung Kantor Ramah Lingkungan (*Green Building*)
   Kantor Pusat Bank Muamalat Indonesia yang berlokasi di Jl. Prof Dr Satrio, Kav. 18, Kuningan Timur, Setiabudi Jakarta Selatan 12940, dirancang agar dapat menghemat penggunaan listrik dengan memaksimalkan pencahayaan matahari. Selain itu, Bank berusaha menanam berbagai jenis tumbuhan di area operasionalnya sehingga dapat mengurangi efek pencemaran udara.
2. Efisiensi Pemanfaatan Energi
   Bentuk aksi nyata Bank dalam inisiatif penghematan energi di tahun 2019 telah dilakukan dengan menggunakan alat-alat listrik hemat energi, misalnya dengan mengganti lampu biasa dengan lampu LED, mengganti pendingin ruangan *(refrigerant)* dengan bahan ramah lingkungan, memasang timer dan mengurangi penggunaan kelebihan listrik di seluruh unit kantor Bank.
3. Efisiensi Pemakaian Air
   Bank memiliki komitmen untuk tidak menggunakan air tanah untuk mendukung aktivitas operasionalnya, dengan pertimbangan bahwa penggunaan air tanah secara berlebihan akan menyebabkan beberapa efek negatif pada keberlanjutan lingkungan sekitar, seperti penurunan level tanah dan kualitas air. Bank mengadakan gerakan "Gunakan Air Secukupnya" untuk pemakaian air di toilet, masjid, kantin, taman, dan mesin pendingin udara.
4. Pengelolaan dan Pengurangan Limbah
   Bank melakukan pengelolaan terhadap limbah yang dihasilkan dari operasional, baik limbah domestik maupun limbah Berbahaya, Berbau dan Beracun (B3).

Environmentally Friendly Operational Activities

Maintaining the quality of the environment is one of the most important things that must be done by all Bank Personnel. In every operational activity carried out, Bank Muamalat Indonesia is very concerned with environmental preservation, with the hope of being able to produce benefits for many people.

Some initiatives carried out by Bank Muamalat Indonesia include:

1. *Green Office Building*
   Bank Muamalat Indonesia Head Office, located on Jl. Prof. Dr. Satrio, Kav. 18, Kuningan Timur, Setiabudi South Jakarta 12940, designed to save electricity usage by maximizing solar lighting. In addition, the Bank strives to plant various types of plants in its operational area to reduce the effects of air pollution.
2. *Energy Utilization Efficiency*
   The Bank's concrete actions in energy saving initiatives in 2019 have been carried out using energy-efficient electrical appliances, for example by replacing ordinary lamps with LED lights, replacing refrigerants with environmentally friendly materials, installing timers and reducing the use of excess electricity in all Bank office units.
3. *Water Use Efficiency*
   The Bank has a commitment not to use groundwater to support its operational activities, with the consideration that excessive use of groundwater will cause several negative effects on the sustainability of the surrounding environment, such as a decrease in soil level and water quality. The bank organized the "Use Water Adequately" movement to use water in toilets, mosques, canteens, parks and air conditioning machines.
4. *Waste Management and Reduction*
   The Bank manages waste generated from operations, both domestic and hazardous, odorous and toxic (B3).

5. Efisiensi Pemakaian Kertas
   Bank Muamalat Indonesia tetap berupaya mengurangi limbah kantor dan melakukan daur ulang kapanpun memungkinkan. Bank juga mendorong dilakukannya transaksi tanpa kertas dan penggunaan instrumen perbankan yang ramah lingkungan.
   Bank mendukung gerakan melindungi hutan dengan meningkatkan kesadaran para karyawan untuk tidak menggunakan kertas secara berlebihan melalui program efisiensi pemakaian kertas. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan *Multi Function Device* (MFD) Apeosport V C3070 untuk penggunaan print hitam putih di Kantor Pusat (sejak 2015), dan MFD HP M586 untuk di kantor cabang (sejak tahun 2017) dengan metode cetak 2-sided atau duplex printing.
6. Meminimalisir Risiko Pemanasan Global
   Bank Muamalat Indonesia berkomitmen untuk mengurangi risiko pemanasan global melalui berbagai inisiatif. Untuk mengimbangi emisi gas CO2 yang Bank Muamalat Indonesia hasilkan, Bank memastikan seluruh Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan area lanskap di kantor dan seluruh unit kerja Bank Muamalat Indonesia ditanami dengan berbagai vegetasi yang memiliki daya serap CO2 tinggi, seperti pohon pucuk merah, pohon palem, pohon kurma, pohon Lee Kwan Yu, pohon Tabebuya, serta spesies pohon lainnya.

Mekanisme Pengaduan Terkait Lingkungan

Seluruh pengaduan yang masuk melalui call center dan e-mail Bank yaitu: corporate.affairs@bankmuamalat.co.id akan di monitor oleh Bank dibawah kebijakan yang dikelola dan dikeluarkan oleh Direktur Utama.

Sertifikasi di Bidang Lingkungan

Hingga akhir tahun 2019, Bank Muamalat Indonesia belum memiliki sertifikasi yang berkaitan dengan lingkungan hidup dikarenakan bidang usaha yang dijalankan Bank Muamalat Indonesia tidak banyak bersinggungan dengan lingkungan hidup.

5. Paper Usage Efficiency
Bank Muamalat Indonesia still strives to reduce office waste and recycle whenever possible. The Bank also encourages paperless transactions and the use of environmentally friendly banking instruments.
The Bank supports the movement to protect forests by increasing the awareness of employees not to use paper excessively through an efficient paper usage program. One way is to use the Apeosport V C3070 Multi Function Device (MFD) for the use of black and white printing at the Head Office (since 2015), and the HP M586 MFD for the branch office (since 2017) with the 2-sided or duplex printing method.

6. Minimizing the Risk of Global Warming
Bank Muamalat Indonesia is committed to reducing the risk of global warming through various initiatives. To offset the CO2 gas emissions that Bank Muamalat Indonesia produces, the Bank ensures that all Green Open Space (RTH) and landscape areas in the office and all work units of Bank Muamalat Indonesia are planted with various vegetations that have high CO2 absorption, such as red shoots, palm trees, trees date palm, Lee Kwan Yu tree, Tabebuya tree, and other tree species.

Complaints Mechanism Regarding the Environment

All complaints, received by call center and Bank e-mail: corporate. affairs@bankmuamalat.co.id will be monitored by the Bank under Bank's Policy that is managed by President Director.

Certification in the Environment Field

Until the end of 2019, Bank Muamalat Indonesia do not have certification relating to the environment because the field of business that was run by Bank Muamalat Indonesia did not have much contact with the environment.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Praktik Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Corporate Social Rensponsibilities in Employment, Health and Safety Practice

Komitmen dan Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Praktik Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Bank menyadari bahwa pengelolaan Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja yang baik akan membawa kontribusi maksimal bagi Bank. Pentingnya perhatian terhadap aspek K3, secara langsung dan tidak langsung akan menunjang produktivitas karyawan. Karyawan merupakan modal utama bagi perusahaan, sehingga Bank berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman dan sehat, untuk mendukung pekerja mencapai potensi diri terbaik, serta menciptakan kesejahteraan karyawan.

Commitment and Corporate Social Responsibility Policy in Employment, Health and Safety Practices

The Bank realizes that good management of Labor, Health and Safety will bring maximum contribution to the Bank. The importance of attention to aspects of K3, directly and indirectly will support employee productivity. Employees are the main capital for the company, so the Bank is committed to creating a safe, comfortable and healthy work environment, to support workers to achieve their best potential, and to create employee welfare.

Isu dan Risiko Ketenagakerjaan dan K3 yang Relevan dengan Bank

Isu dan risiko terkait kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan bidang ketenagakerjaan dan K3 utamanya berkaitan dengan aspek ketenagakerjaan dan hubungan industrial, antara lain keseteraan gender dalam kesempatan kerja, keseteraan dalam program pendidikan dan pelatihan, penggunaan tenaga kerja lokal, remunerasi dan kesejahteraan karyawan, promosi, kebebasan berserikat dan pelatihan pensiun, serta kesehatan dan keselamatan kerja.

Bank Muamalat Indonesia memastikan bahwa Bank telah memenuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu-isu tersebut.

Employment Issues and Risks and Occupational Health and Safety (K3) Relevant to the Bank

Issues and risks related to corporate social responsibility activities in the field of employment and K3 are primarily related to aspects of employment and industrial relations, including equality of gender in employment, equality in education and training programs, the use of local labor, remuneration and employee benefits, promotions, freedom of association and retirement training, as well as occupational health and safety.

Bank Muamalat Indonesia ensures that the Bank has complied with laws and regulations relating to these issues.

Kegaiatan yang Dilakukan

Kesejahteraan Karyawan

Bank menyadari bahwa karyawan memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap keberhasilan Bank. Karena itu, peningkatan kesejahteraan karyawan merupakan salah satu fokus utama Bank Muamalat Indonesia.

Dalam hal fasilitas dan kesejahteraan karyawan, Bank Muamalat Indonesia telah memenuhi ketentuan Upah Minimum Provinsi/Kabupaten/Kota (UMP/K) dan Upah Minimum Sektoral Propinsi (UMSP) wilayah masing-masing unit kerja Bank yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kompensasi program kesejahteraan dan fasilitas karyawan Bank Muamalat Indonesia mengacu kepada Ketentuan dan Peraturan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, termasuk pemenuhan upah yang berlaku.

Keseteraan Gender dan Kesempatan Kerja

Sebagai sebuah organisasi yang membawa nilai-nilai Islami–Modern–Profesional, Bank Muamalat Indonesia menjamin adanya kesempatan kerja yang setara dan transparan bagi setiap karyawan. Rekrutmen yang dilaksanakan dengan sistem seleksi yang sudah standar dan

Activities Performed

Employee Welfare

The Bank realizes that employees have a very large contribution to the success of the Bank. Therefore, improving employee welfare is one of the main focuses of Bank Muamalat Indonesia.

In terms of employee benefits and facilities, Bank Muamalat Indonesia has complied with Provincial/Regency/City Minimum Wages (UMP/K) and Provincial Sectoral Minimum Wages (UMSP) areas of each Bank's work units stipulated by the Central Government and Regional Governments. The compensation program for employee welfare and facilities for Bank Muamalat Indonesia refers to the provisions and regulations of the Ministry of Manpower and Transmigration, including the fulfillment of applicable wages.

Gender Equality and Job Opportunities

As an organization that carries Islamic-Modern-Professional values, Bank Muamalat Indonesia guarantees equal and transparent employment opportunities for every employee. Recruitment which is carried out with a standardized and online selection system

online memastikan bahwa kandidat yang diterima menjadi karyawan adalah kandidat yang telah memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan Bank. Sistem manajemen karier yang transparan juga memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh karyawan untuk mencapai karier terbaik berdasarkan kompetensi yang telah ditentukan dan teruji. Perbedaan-perbedaan usia, jenis kelamin, suku, ras dan latar belakang, bukan merupakan isu yang harus dipertimbangkan dalam pemenuhan posisi di dalam organisasi.

ensures that candidates accepted as employees are candidates who have competencies that are in accordance with the needs of the Bank. A transparent career management system also provides equal opportunities for all employees to achieve the best careers based on predetermined and tested competencies. Differences in age, gender, ethnicity, race and background are not issues that must be considered in fulfilling positions in the organization.

Tahun 2019, Bank Muamalat Indonesia tercatat memiliki 3.260 karyawan, yang terdiri dari 1.295 karyawan wanita dan 1.965 karyawan pria. Perimbangan komposisi karyawan tersebut menunjukan bahwa Bank Muamalat Indonesia menjunjung tinggi prinsip kesetaraan gender.

In 2019, Bank Muamalat Indonesia has 3,260 employees, consisting of 1,295 female employees and 1,965 male employees on its record. The balance of employee composition shows that Bank Muamalat Indonesia upholds the principle of gender equality.

Pendidikan dan Pelatihan Karyawan

Penyerapan biaya program pelatihan dan pengembangan SDM oleh perusahaan telah mengikuti ketentuan yang berlaku dari OJK yaitu sebesar 5% dari total Biaya Tenaga Kerja (BTK), pada tahun 2019 perusahaan terus mengembangkan *digital learning platform* disamping program pengembangan kompetensi yang bersifat *in class,* hal ini agar efektivitas dan efisiensi dapat terus dijaga demi peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.

Employee Education and Training

Absorption of the cost program of training and development of human resources by the company has followed the provisions which apply from the FSA amounted to 5% of the total Cost of Labor Employment (BTK), in 2019, the Company continued to develop digital learning platform in addition to the in class program development, this program was implemented so the effectiveness and efficiency can continue to be maintained for in order to keep improving the Human Resources quality.

Total *man days learning* pada tahun 2019 yaitu 7,55 man days, adapun angka tersebut dibagi 2 metode pelatihan yaitu menggunakan *digital learning* sebesar 32% atau 2,41 *man days learning*, dan sisanya yaitu 68% masih menggunakan metode tatap muka atau sebesar 5,14 man days learning.

The total of man days learning in 2019 is 7.55 man days, the numbers are divided by 2 training methods which are digital learning for 32% or 2.41 man days learning, and the rest are face to face method with 68% or 5.14 man days learning.

Peningkatan penyerapan biaya pelatihan dan juga *man days digital learning* menunjukkan komitmen perusahaan untuk mengembangkan Sumber Daya Manusia melalui media atau fasilitas yang tersedia di perusahaan.

The increased absorption of the training cost and also man days digital learning shows the Company's commitment to develop the Human Resources through the media or facilities available in the Company.

Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Occupational Health and Safety Policy

Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) memiliki makna strategis yang menjaga eksistensi dan keberlanjutan usaha Bank. Bank Muamalat Indonesia menghormati hak karyawan untuk bekerja di lingkungan yang sehat dan aman, serta senantiasa menjalankan program K3 di semua daerah operasinya. Implementasi dan pemeliharaan perilaku yang dapat mewujudkan kesehatan dan keselamatan kerja menjadi suatu keharusan untuk dilakukan.

Occupational Health and Safety (K3) has a strategic meaning that maintains the existence and sustainability of the Bank's business. Bank Muamalat Indonesia respects the right of employees to work in a healthy and safe environment, and always runs the K3 program in all areas of its operations. Implementation and maintenance of behaviors that can create health and safety at work are a must.

Perlindungan karyawan terkait K3 telah diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Pemerintah juga telah melengkapi kesehatan kerja karyawan melalui program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) melalui Undang-Undang

Protection of employees related to K3 has been regulated in Law No. 13 of 2003 concerning Manpower, and Law No. 1 of 1970 concerning Work Safety. The government has also completed the occupational health of employees through the Social Security Organizing Agency (BPJS) program through Law No. 24 of 2011. The Government has

No. 24 Tahun 2011. Pemerintah juga telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang mengatur kewajiban setiap entitas usaha dalam menyelenggarakan kegiatan operasional usaha berbasis K3 bagi karyawan.

also issued Government Regulation No. 50 of 2012 concerning the Implementation of an Occupational Safety and Health Management System that regulates the obligations of each business entity in carrying out K3-based business operational activities for employees.

Kegiatan yang Dijalankan Tahun 2019

Untuk menekan risiko kecelakaan kerja, Bank Muamalat Indonesia secara berkala menjalankan program mitigasi bencana. Salah satunya dilakukan dengan Pelatihan Tanggap Darurat di Kantor Pusat. Selain itu, Bank juga menjalankan program BCM (Business Continuity Management) yang salah satunya juga memperhatikan aspek K3.

Activities Performed in 2019

To reduce the risk of work accidents, Bank Muamalat Indonesia regularly runs disaster mitigation programs. One of them is done by Emergency Response Training at the Head Office. In addition, the Bank also runs a BCM (Business Continuity Management) program, one of which also pays attention to the K3 aspect.

Mekanisme Pengaduan Masalah Ketenagakerjaan

Berdasarkan kebijakan dan prosedur yang berlaku di Bank Muamalat Indonesia, setiap keluhan dan/atau pengaduan seorang karyawan atau lebih akan diselesaikan secara musyawarah mufakat, adil serta secepat mungkin. Dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial.

Labor Complaints Mechanism

Based on the policies and procedures applicable at Bank Muamalat Indonesia, every complaint and/or complaint of an employee or more will be resolved by consensus, fairly and as soon as possible. This also applies when settling industrial relationship complaints.

Penyelesaian kasus-kasus kekaryawanan dilakukan melalui proses yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dengan mengutamakan penyelesaian secara bipartit/internal perusahaan tanpa melibatkan pihak ketiga.

The completion of the cases on the employment is done through a process in accordance with the provisions of law to give priority to the completion in bipartite/internal company without involving third party.

Capaian Kegiatan

Pengeloaan aspek ketenagakerjaan dan K3 yang dilakukan secara komprehensif oleh Bank telah membuahkan hasil yang sangat baik. Hal itu dapat dilihat pada aspek-aspek berikut:

1. Tingkat Turnover Karyawan
   Berbagai upaya yang dilakukan Bank Muamalat Indonesia untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis dengan karyawan serta memberikan kepastian karir, membuat tingkat *turnover* karyawan di Bank Muamalat Indonesia dapat dipertahankan pada level yang cukup rendah. Tahun 2019, tingkat *turnover* karyawan Bank Muamalat Indonesia adalah sebesar 11,6%, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 12,6%.
2. Kecelakaan Kerja
   Pada tahun 2019 tidak terdapat kecelakaan kerja pada Bank Muamalat Indonesia.
3. Penghargaan di Bidang Ketenagakerjaan dan K3
   Bank Muamalat Indonesia telah memenangkan penghargaan perunggu di HR Excellence Awards 2019 untuk kategori Belajar & Pengembangan yang diadakan pada hari Kamis, 21 November 2019, di Intercontinental Hotel Jakarta. Bank Muamalat Indonesia menerima penghargaan perunggu dan menyisihkan 7 finalis yang terdiri dari perusahaan-perusahaan terkemuka di Indonesia.

Achievement of Activities

Managing aspects of employment and K3 which is carried out comprehensively by the Bank has produced very good results. This can be seen in the following aspects:

1. *Employee Turnover Rate*
   Various efforts made by Bank Muamalat Indonesia to create harmonious industrial relations with employees and provide career certainty, make the employee turnover rate at Bank Muamalat Indonesia can be maintained at a fairly low level. In 2019, the turnover rate of Bank Muamalat Indonesia employees was 11.6%, lower than the previous year of 12.6%.
2. *Work Accident*
   In 2019, there were no work accident that occured in the Bank Muamalat Indonesia.
3. *Award in the Field of Employment and K3*
   Bank Muamalat Indonesia has won a bronze award at the 2019 HR Excellence Awards for the Learning & Development category held on Thursday, November 21, 2019, at the Intercontinental Hotel Jakarta. Bank Muamalat Indonesia received a bronze award and set aside 7 finalists consisting of leading companies in Indonesia.

Acara ini diprakarsai oleh Human Resources Online, ini pertama kali diadakan di Indonesia.

Kegiatan BCM yang Dijalankan Tahun 2019

Bank telah memiliki program *Business Continuity Management* (BCM) berupa rencana dan strategi Kontinjensi untuk antisipasi atas kejadian dari kondisi internal dan eksternal yang berdampak pada kelancaran operasional Bank. Program BCM bertujuan untuk memastikan Bank Muamalat Indonesia tetap dapat menjalankan kegiatan usaha dan pelayanan terhadap nasabah meskipun terjadi gangguan atau bencana. Guna meningkatkan kesadaran (*awareness*) dari seluruh karyawan dan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*), Bank Muamalat Indonesia sepanjang tahun 2019 telah menjalankan beberapa kegiatan BCM *Awareness Program*, meliputi:

1. Pelatihan tim tanggap darurat
2. Simulasi tim tanggap darurat
3. Kampanye program SAPA BCM

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari implementasi mitigasi risiko operasional dan risiko reputasi yang terdampak dari faktor internal dan eskternal dengan tujuan agar aspek keselamatan dan kesehatan kerja dapat dikelola dengan baik dan tepat.

A. Pelatihan Tim Tanggap Darurat

Program pelatihan Tim Tanggap Darurat (*Emergency Response*) di Muamalat Tower dilakukan dengan bekerjasama *Operational Risk Management* (ORM), *Corporate Real Estate & Procurement* (CRP) dan *Building Management* Muamalat Tower.

Pelatihan ini dilakukan sebagai sarana sosialisasi kepada tim tanggap darurat (*Floor Captain*) di Muamalat Tower dengan kegiatan meliputi Pelatihan Tanggap Darurat, Pelatihan penggunaan alat *Evacuation Chair* dan Pelatihan penggunaan APAR (Alat Pemadam Api Ringan).

1. Pelatihan Tanggap Darurat (*Floor Captain*) di Muamalat Tower
   a. Metode Pelatihan
      Metode pelatihan Prosedur Tanggap Darurat Muamalat Tower dilakukan melalui 2 metode, yaitu metode pelaksanaan pemberian teori (*in class*) dan metode pelaksanaan simulasi praktek (*in class*) yang diinstrukturi oleh pihak *Building Management* Muamalat Tower, Pihak *vendor Security* dan pihak dari tim Dokter rekanan Bank Muamalat Indonesia.

      Adapun materi dan pemateri pada pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:
      i. Sosialisasi Prosedur Tanggap Darurat Muamalat Tower dan pelatihan mitigasi gempa bumi oleh tim *Building Management;*

The event was initiated by Human Resources Online, it was first held in Indonesia.

BCM Activities That Run in 2019

The Bank has a Business Continuity Management (BCM) program in the form of contingency plans and strategies for anticipating events from internal and external conditions that have an impact on fluency bank operations. The BCM program aims to ensure the Bank Muamalat Indonesia can still run its business activities and service to customers despite interruptions or disaster. To increase awareness of all employees and all stakeholders, the Bank Muamalat Indonesia throughout 2019 has been running several BCM Awareness Program activities, including:

1. *Emergency response team training*
2. *Simulation of the emergency response team*
3. *Campaign for SAPA BCM program*

The activity is part of the implementation of risk mitigation operational and reputation risks that are affected by internal factors and external with the aim that the safety and health aspects work can be managed properly and precisely.

A. Emergency Response Team Training

Emergency Response Team training program at Muamalat Tower is carried out in collaboration with Operational Risk Management (ORM), Corporate Real Estate & Procurement (CRP) and Building Management Muamalat Tower.

This training was conducted as a means of socialization to the response team emergency (Floor Captain) at Muamalat Tower with activities including Emergency Response Training, Training in the use of Evacuation tools Chair and Training on the use of APAR (Light Fire Extinguisher).

1. *Emergency Response Training (Floor Captain) at Muamalat Tower*
   a. *Training Method*
      Training methods for the Muamalat Emergency Response Procedure Tower is done through 2 methods, namely the implementation of theory sharing method (in class) and simulation method practices (in class) which are instructed by the Building Muamalat Tower Management, the security vendor and parties from the team of partners of Bank Muamalat Indonesia Doctors.
      The material and presenters in the implementation of activities are as follows:
      i. *Dissemination of Muamalat Tower Emergency Response Procedure and earthquake mitigation training by the Building team Management;*

ii. Penanganan Bantuan Hidup Dasar oleh pihak Dokter rekanan Bank Muamalat Indonesia;

iii. Mitigasi Ancaman Bom oleh tim *vendor Security.*

Saat pemberian teori terkait mitigasi gempa bumi dilakukan juga praktik untuk metode berlindung saat terjadi gempa bumi yaitu sebagai berikut:

ii. Handling of Basic Life Assistance by the Doctor Partners of Bank Muamalat Indonesia.

iii. Bomb Threat Mitigation by the Security vendor team.

When sharing about the theories related to earthquake mitigation, a practice of taking cover or shelter in the event of earthquake were also given as follows:

Metode Berlindung Saat Gempa Bumi
Method of Protection during an Earthquake

Metode *Method*	D *Drop*	C *Cover*	H *Hold on*
Penjelasan *Description*	Turunkan tubuh hingga menyentuh lantai seperti posisi berlutut. *Lower the body to touch the floor like kneeling.*	Lindungi bagian dagu/rahang bawah dan leher bagian belakang dengan tangan, dilanjutkan ke posisi seperti bersujud di bawah meja yang kokoh. *Protect your chin/lower your jaw and the back of your neck using your hands, followed by kneeling position under a study table.*	Berpegangan sekuat-kuatnya pada kaki meja yang kokoh. *Hold on tightly on sturdy table legs.*

b. Pelaksanaan Kegiatan

Waktu Pelaksanaan : Selasa, 26 November 2019
Lokasi : Ruang Kelas Manasiq lt. 19 Muamalat Tower

Pelaksanaan Pelatihan Tanggap Darurat dilakukan kepada seluruh *floor captain* di Muamalat Tower, total peserta yang mengikuti pelatihan berjumlah 30 orang.

b. Implementation of Activities

Time : Tuesday, November 26, 2019
Location : Manasic Class Room, 19th Floor of Muamalat Tower

Implementation of Emergency Response Training conducted to all floor captains at Muamalat Tower, total participants who attended the training were 30 people.

2. Pelatihan *Evacuation Chair*

a. Metode Pelatihan

Pelatihan penggunaan *Evacuation Chair* dilakukan melalui 2 metode pelatihan, yaitu metode pemberian teori terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan metode pelaksanaan praktik penggunaan alat oleh peserta yang dipandu oleh instruktur dari tim *vendor security* yang telah memiliki keahlian.

i. Metode penyampaian teori meliputi hal sebagai berikut:
- Tujuan Penggunaan *Evacuation Chair*
- Tahap persiapan peralatan
- Tahap cara memuat korban pada alat *evacuation chair*
- Tahap cara menuruni tangga darurat

ii. Metode praktik penggunaan *evacuation chair*
- Sesi praktik penggunaan *evacuation chair* yang telah memuat korban dilakukan mulai dari Lantai 6 dengan menuruni tangga darurat sampai dengan lantai *basement* menuju lokasi pintu bagian belakang gedung.
- Peserta melakukan seluruh tahapan sesuai dengan teori yang disampaikan sebelumnya oleh pemateri

2. Evacuation Chair Training

a. Training Method

Training on the use of Evacuation Chair is done through 2 training methods, namely the method of giving theory first and continued with the practice implementation method the use of tools by participants guided by the instructor from a team of security vendor that already has expertise.

i. The method of conveying the theory includes the following:
- *Purpose of Using Evacuation Chair*
- *Equipment preparation stage*
- *Stage of how to load victims on the evacuation device chair*
- *Stage of how to go down the emergency stairs*

ii. Practical methods for using evacuation chairs
- *Practical session on the use of evacuation chair has loaded the victims from the 6th floor by going down the emergency stairs to basement floor leading to the building backside door.*
- *Participants carry out all stages in accordance with theory presented previously by the speaker*

secara bergantian, proses disupervisi langsung oleh instruktur.

alternately, the process is directly supervised by instructor.

b. Pelaksanaan Kegiatan

Waktu Pelaksanaan : Rabu, 27 November 2019
Lokasi : Area tangga darurat lt. 6 sampai basement Muamalat Tower

Pelaksanaan pelatihan penggunaan *evacuation chair* dilakukan kepada seluruh *floor captain* di Muamalat Tower, total peserta yang mengikuti pelatihan berjumlah 15 orang.

b. *Implementation of Activities*

Time : Wednesday, November 27, 2019
Location : Emergency Stairs area, from 6th floor to Muamalat Tower basement.

Conduct training on the use of evacuation chairs performed to all floor captains in Muamalat Tower, the total number of participants who attended the training were 15 people.

3. Pelatihan Penggunaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR)

3. *Training on the Use of Light Fire Extinguishers (APAR)*

a. Metode Pelatihan APAR

Metode pelatihan APAR yang dilakukan adalah dengan praktik langsung mengenai cara penggunaan APAR untuk melakukan pemadaman api dipandu oleh instruktur dari tim *Building Management* Muamalat Tower. Tata cara penggunaan APAR dapat dirangkum dengan panduan sebagai berikut:

a. *APAR Training Method*

The APAR training method used is by direct practice on how to use APAR to put out fire guided by an instructor from the Muamalat Tower Building Management team. The Procedures on using APAR can be summarized with the guidance as follows:

Metode Penggunaan APAR (Alat Pemadam Api Ringan)
APAR Use Method (Light Fire Extinguisher)

Metode *Method*	C Cabut Pin Pengaman *Remove the Safety Pin*	A Arahkan Nozzle ke Titik Api *Point the Nozzle at the Fire*	R Remas Tuas APAR *Squeeze the APAR lever*	A Ayunkan Nozzle seperti Gerakan Menyapu *Swing the Nozzle Like Sweeping Motion*
Penjelasan *Explanation*	Pada saat menarik Pin pengaman, posisi tubuh jongkok tumpu 1 kaki, tabung diletakan di samping kiri badan, tangan kiri memegang leher tabung, tangan kanan menarik pin pengaman, lakukan hentakan 1 kali pada tuas tabung untuk memastikan tidak macet & isi tabung bisa disemburkan. *When pulling the safety pin, position your body in a squat position, put the tub on the left side of your body, hold the up side of the tube, pull the safety pin using your right hand, shake the tube one time to make sure its not stuck and it can be used.*	Hal yang harus diperhatikan adalah arah angin, posisi tubuh kita searah dengan datangnya angin. Arah angin dapat dilihat dari arah kobaran api. *What you have to pay attention to is the win direction, position your body in line with the wind direction. The wind direction can be seen from where the fire is blazing to.*	Jangan ragu saat menekan tuas dan posisikan tabung di sebelah kanan / kiri tubuh kita. *Dont hesistate when pressing the lever and position the tube in the right/lef side of your body.*	Dilarang mengarahkan nozzle langsung ke titik api, arahkan nozzle diatas permukaan benda yang terbakar. *Do not point the nozzle straight to the fire, aim nozzle above the surface of the fire.*

b. Pelaksanaan Kegiatan

Waktu Pelaksanaan : Rabu, 27 November 2019
Lokasi : Area kosong bagian luar samping kanan gedung Muamalat Tower

Pelaksanaan pelatihan penggunaan APAR dilakukan kepada seluruh floor captain di Muamalat Tower, total peserta yang mengikuti pelatihan berjumlah 15 orang.

b. *Implementation of Activities*

Time : Wednesday, November 27, 2019
Location : Empty right area at the outside of Muamalat Tower Building

The training on how to use APAR were carried out to all Muamalat Tower floor captain, with the total attendance of 15 person.

B. Simulasi Tim Tanggap Darurat

Pelaksanaan simulasi tanggap darurat (*Emergency Response*) di Muamalat Tower merupakan hasil kolaborasi antara unit kerja BCM (*Business Continuity Management*), *tim Building Management* Muamalat Tower, *Corporate Real Estate and Procurement* (CRP) dan *Operational Risk Management* (ORM). Kegiatan ini untuk memastikan kecukupan dari prosedur Tanggap Darurat Muamalat Tower dan melatih kesiapan tim/unit tanggap darurat.

1. Pelaksanaan Simulasi Tanggap Darurat

Rancangan Simulasi Tanggap Darurat *Emergency Response Simulation Design*	
Peserta *Participant*	Tim Tanggap Darurat Muamalat Tower, Floor Captain dan Seluruh Penghuni Gedung *Muamalat Tower Emergency Response Team, Floor Captain and All Building Occupants*
Tim Pelaksana *Implementation Team*	Building Management
Tim Pendukung *Supporting Team*	Business Continuity Management, Corp. Real Estate Procurement, Operational Risk Management
Skenario *Scenario*	Adanya Gempa Bumi skala IV-V MMI dan dirasakan di gedung Muamalat Tower *The existence of an earthquake scale IV-V MMI and felt in the Muamalat Tower building*
Tipe *Type*	Simulasi *Simulation*
Metode *Method*	Berlindung saat gempa, call tree, dan evakuasi karyawan *Take cover during earthquake, call tree, and employee evacuation*
Lokasi *Location*	Muamalat Tower
Pelaksanaan Simulasi *Simulation Implementation*	Jumat, 6 Desember 2019 *Friday, December 6, 2019*

2. Ruang Lingkup Simulasi
   a. Melibatkan seluruh penghuni gedung Muamalat Tower, kecuali Karyawan kritikal yaitu yang sedang hamil, pasca operasi, pasca melahirkan maksimal 6 bulan, sakit dan mengalami gangguan mobilitas yang sebelumnya telah diidentifikasi oleh *floor captain* (FC).
   b. Ujicoba infrastuktur pada gedung Muamalat Tower meliputi fungsi dari:
      i. *General alarm*
      ii. *Homing lift system*
      iii. *Door access*
      iv. *Emergency lamp* dan
      v. *Pressurizer fan*

C. Kampanye Program Sapa BCM

Kegiatan kampanye program SAPA BCM merupakan bagian dari mitigasi bencana untuk meningkatkan kesadaran dari seluruh karyawan terkait pentingnya BCM. Pada tahun 2019 kegiatan fokus terhadap penyampaian mitigasi praktis bencana secara tematik,

B. Emergency Response Team Simulation

Implementation of emergency response simulations (Emergency Response) at Muamalat Tower is the result of collaboration between work units BCM (Business Continuity Management), Building Management team Muamalat Tower, Corporate Real Estate and Procurement (CRP) and Operational Risk Management (ORM). This activity is to ensure the adequacy of the Muamalat Tower Emergency Response procedure and training the preparedness of the emergency response team/unit.

1. Implementation of Emergency Response Simulation

2. Simulation Scope
   a. Involving all residents of the Muamalat Tower building, except critical employees, those who are pregnant, post surgery, postpartum a maximum of 6 months, sickness and experiencing mobility impairments that had previously been identified by the floor captain (FC).
   b. Infrastructure tests on the Muamalat Tower building include function of:
      i. General alarm
      ii. Homing lift system
      iii. Door access
      iv. Emergency lamp and
      v. Pressurizer fan

C. BCM Greetings Program Campaign

The BCM SAPA program campaign activities are part of disaster mitigation to increase awareness of all employees related to the importance of BCM. In 2019 the activities will be focused to the thematic delivery of practical disaster mitigation, material is delivered

materi disampaikan baik melalui penyampaian langsung di kelas dan melalui *email blast* atau media MHP (*Muamalat Human Power).* Pada tahun 2019 diluncurkan juga nama program untuk *awareness* BCM yaitu SAPA BCM, merupakan akronim dari Siaga Antisipasi Penanganan bencana.

both through direct delivery in class and through email blasts or MHP (Muamalat Human Power) media. In 2019 a program for awareness was launched BCM, SAPA BCM, is an acronym for Alert Anticipation Disaster management.



Logo SAPA BCM

SAPA BCM logo

Materi mitigasi secara tematik yang telah disampaikan sepanjang tahun 2019 sebagai berikut:

Thematic mitigation material that has been conveyed throughout 2019 as follows:

No.	Tema *Thema*	Judul Materi *Title Material*
1.	Mitigasi Gempa Bumi *Earthquake Mitigation*	Hal yang Perlu Dilakukan Saat Terjadi Gempa Bumi *Things to Do When an Earthquake Occurs*
2.	Penanganan Kabut Asap *Smoke Haze Management*	Penanganan Kabut Asap Cabang Muamalat *Handling of Muamalat Branch Smoke Haze*
3.	Mitigasi Banjir *Flood Mitigation*	Antisipasi Kondisi Banjir *Anticipating Flood Conditions*
4.	Penanganan Banjir *Flood Mitigation*	Penanganan Saat Terjadi Banjir *Handling When Flooding Occurs*
5.	Penanganan Pasca Banjir *Post Flood Handling*	Penanganan Saat Kondisi Banjir Surut *Handling During Flood Conditions*

Tanggung Jawab Sosial Lingkup Tanggung Jawab terhadap Produk/Jasa serta Konsumen

The Social Responsibility for Products/Services and Consumers

Komitmen dan Kebijakan

Bank Muamalat Indonesia berkomitmen untuk terus menjaga tingkat kepuasan nasabah untuk menunjang tercapainya pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Bank pun senantiasa menjaga komitmen atas jaminan kualitas layanan dan komitmen terhadap pelayanan terhadap nasabah maupun mitra usaha. Hal ini menjadi sangat penting bagi Bank, untuk memperkuat atau meningkatkan kepercayaan pelanggan atau mitra usaha Bank, guna keberlangsungan usaha yang berkelanjutan.

Dalam menjalankan tanggung jawab perusahaan kepada nasabah, Bank mengacu pada kebijakan dan regulasi yang berlaku di Indonesia, yaitu:

1. Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
2. Peraturan Bank Indonesia No. 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah, dimana telah diubah dengan PBI No. 10/10/PBI/2008 Tentang perlindungan nasabah.

Commitment and Policy

Bank Muamalat Indonesia is committed to continuously maintaining the level of customer satisfaction to support the achievement of sustainable business growth. The Bank always maintains its commitment to guarantee service quality and its commitment to maintain service quality towards its customers and business partners. This has become very important for the Bank, to strengthen or increase the trust of customers or business partners of the Bank, in order to sustain business sustainability.

In carrying out the company's responsibilities to customers, the Bank refers to policies and regulations that apply in Indonesia, namely:

1. *OJK Regulation No. 1/POJK.07/2013 concerning Consumer Protection in the Financial Services Sector.*
2. *Bank Indonesia Regulation No. 7/7/PBI/2005 concerning Settlement of Customer Complaints, which has been amended by PBI No. 10/10/BI/ 2008 Regarding customer protection.*

Cakupan dan Lingkup Tanggung Jawab terhadap Konsumen

Cakupan dan lingkup utama tanggung jawab sosial kepada nasabah adalah penanganan keluhan pelanggan. Untuk itu, Bank telah menyediakan fasilitas call center yang dapat diakses selama 24 jam oleh nasabah. Selain itu, Bank juga menyediakan counter customer service di setiap kantor layanan.

Lebih jauh lagi, sesuai Peraturan OJK No. 7/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Untuk Konsumen Dan/Atau Masyarakat serta Surat Edaran OJK No. 30/SEOJK.07/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan, Bank juga diharapkan berperan aktif dalam melakukan edukasi literasi keuangan kepada masyarakat.

Scope of Responsibility to Consumers

The main scope of social responsibility to customers is handling customer complaints. For this reason, the Bank has provided call center facilities that can be accessed 24 hours by customers. In addition, the Bank also provides a customer service counter at each service office.

Furthermore, in accordance with OJK Regulation No. 7/POJK.07/2016 concerning Increased Literacy and Financial Inclusion in the Financial Services Sector for Consumers and/or the Community and OJK Circular Letter No. 30/SEOJK.07/2017 concerning Implementation of Activities in the Framework of Increasing Literacy Finance in the Financial Services Sector, the Bank is also expected to play an active role in conducting financial literacy education to the public.

Rencana Kegiatan

Program kerja 2019 yang berhasil akan terus dilanjutkan serta ditingkatkan pada tahun 2020 seperti metode pengukuran. Pada tahun 2020 akan meningkatkan jumlah Customer Engagement dengan cara membangun Service Soul HIJRAH di dalam setiap Frontliner serta menjaga konsistensi layanan prima.

1. Menyelenggarakan Customer Centricity Training bagi Frontliner dan Supervisor Layanan agar memiliki Service Mindset Customer Centricity serta mampu memberikan layanan prima.

Activity Plan

The successful 2019 work program will continue and be enhanced in 2020 as a measurement method. In 2020 the number of Customer Engagement will be increased by building HIJRAH Soul Service within each Frontliner and maintaining excellent service consistency.

1. *Conduct Customer Centricity Training for Frontliners and Service Supervisors to have a Customer Centricity Service Mindset and be able to provide excellent service.*

2. Internalisasi Service Soul HIJRAH kepada seluruh Frontliner dan Supervisor Layanan pada tahap awal dan seluruh karyawan Bank Muamalat Indonesia pada tahap berikutnya.
3. Program Roleplay Bersama guna menjaga konsistensi dalam memberikan layanan prima.
4. Pengukuran kualitas layanan melalui metode *mystery shopper* yang dilakukan oleh pihak internal atapun eksternal sebagai bahan evaluasi internalisasi Service Soul HIJRAH dan layanan prima.
5. Simplifikasi metode pengukuran kualitas layanan kantor cabang serta pengembangan parameter.
6. Program Branch Service Champion bertujuan membentuk Frontliner of The Month yang akan menjadi *rolemodel* serta *service duty* pada setiap kantor cabang.
7. Melaksanakan serangkaian kegiatan Service Champion Awards sebagai sarana seleksi bagi Frontliner dan Supervisor Layanan terbaik Nasional dan membentuk Duta Layanan.
8. Mengadakan acara khusus *(seasonal event)* pada hari-hari besar Islam dan nasional sebagai upaya untuk meningkatkan positif *branding* kepada masyarakat.
9. Program Service Campaign yang dibuat secara berkala untuk meningkatan kesadaran seluruh karyawan terhadap pentingnya layanan prima.
10. Standardisasi aspek tampilan area pelayanan pada kantor cabang serta monitoring berkala guna menjaga tampilan serta fungsi yang ada.
11. Percepatan layanan pembukaan rekening bagi Walk-in Customer.

Pelaksanaan Kegiatan

Pengaduan Nasabah

Pengembangan penanganan pengaduan nasabah terus dilakukan dengan mengacu pada kepuasan nasabah. Dengan adanya sistem penanganan pengaduan nasabah yang komprehensif, sistemastis, responsif, cepat dan tuntas diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan di cabang.

Pada tahun 2018 telah diterima 18.736 pengaduan dan 97,98% dari pengaduan tersebut dapat diselesaikan sesuai Service Level Agreement yang ditetapkan (SLA IN), sementara pada periode 2019 telah diterima 17.570 pengaduan dan pencapaian SLA IN adalah 98,84%. Terjadi penurunan jumlah pengaduan yang diiringi dengan meningkatkan SLA IN atas penanganan pengaduan dibandingkan periode tahun 2018. Penurunan jumlah pengaduan ini karena BMI senantiasa melakukan perbaikan dan pengembangan atas produk, sistem dan proses yang berkaitan dengan transaksi nasabah.

Peningkatan SLA IN pengaduan tidak terlepas dari koordinasi, *awareness* dan tindaklanjut yang dilakukan oleh unit terkait untuk menyelesaikan pengaduan yang diterima.

2. *Internalization of HIJRAH Soul Service to all Frontliners and Service Supervisors at the initial stage and all Bank Muamalat Indonesia employees at the next stage.*
3. *Joint Roleplay Program to maintain consistency in providing excellent service.*
4. *Measurement of service quality through the mystery shopper method conducted by internal or external parties as an evaluation material for the internalization of the HIJRAH Soul Service and excellent service.*
5. *Simplification of methods for measuring branch office service quality and parameter development.*
6. *The Branch Service Champion Program aims to form a Frontliner of the Month which will be a role model and service duty at each branch office.*
7. *Carry out a series of Service Champion Awards as a means of selection for the best National Frontliners and Service Supervisors and form Service Ambassadors.*
8. *Holding special events (seasonal events) on Islamic and national holidays in an effort to increase positive branding to the community.*
9. *Service Campaign Program that is made regularly to increase the awareness of all employees of the importance of excellent service.*
10. *Standardization of aspects of the appearance of service areas at branch offices and periodic monitoring to maintain the appearance and function.*
11. *Accelerated account opening services for Walk-in Customers.*

Implementation of Activities

Customer Complaints

The development of handling customer complaints continues with reference to customer satisfaction. With a comprehensive, systematic, responsive, fast and thorough system for handling customer complaints, it is expected to improve the quality of service at the branch.

In 2018 18,736 complaints were received and 97.98% of these complaints could be resolved according to the established Service Level Agreement (SLA IN), while in 2019 there were 17,570 complaints and the achievement of SLA IN was 98.84%. There has been a decrease in the number of complaints accompanied by an increase in SLA IN over complaint handling compared to 2018. The decrease in the number of complaints is due to BMI constantly making improvements and development of products, systems and processes related to customer transactions.

The increase in SLA IN complaints cannot be separated from the coordination, awareness and follow-up carried out by the related units to resolve the complaints received.

Kerahasian Data Nasabah

Sebagai wujud nyata upaya pengendalian internal, Bank Muamalat Indonesia melaksanakan kebijakan mengenai sistem pelaporan pelanggaran *(whistleblowing system)* secara menyeluruh dalam setiap aspek kegiatan bisnis. Bank Muamalat Indonesia memiliki kebijakan serta sistem pelaporan pelanggaran dan telah melakukan peningkatan secara bertahap baik mengenai mekanisme pelaporan hingga sosialisasi media pelaporan. Untuk lebih mendorong pihak pelapor berani untuk melaporkan pelanggaran atau indikasi *fraud* dengan lebih nyaman dan terbuka, Bank Muamalat Indonesia melalui unit kerja Internal Audit sebagai pihak untuk mengelola laporan *whistleblowing*. Mekanisme pelaksanaan dan hasil *whistleblowing system* selama tahun 2019 dijelaskan pada bagian Kebijakan Pelaporan Pelanggaran *(whistleblowing system)* pada Laporan Tahunan ini.

Confidentiality of Customer Data

As a concrete manifestation of internal control efforts, Bank Muamalat Indonesia implements policies regarding the reporting system violation (whistleblowing system) as a whole in every aspect of business activities. Bank Muamalat Indonesia has violation reporting policies and systems and have carried out gradual improvement both regarding reporting mechanisms to reporting media socialization. To further encourage the reporter to report violations or indications of fraud more comfortably and openly, Bank Muamalat Indonesia through Internal Audit work unit as a party to manage whistleblowing reports. Whistleblowing implementation mechanism and results system for 2019 is explained in the Violation Reporting Policy section (whistleblowing system) in this Annual Report.

Program Literasi Keuangan

Bank Muamalat Indonesia melalui program Muamalat Mobile Library Muamalat melakukan Literasi Keuangan Syariah dibeberapa kota di Indonesia, bekerja sama dengan beberapa komunitas. Kegiatan tersebut bertujuan agar meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap produk-produk jasa keuangan sehingga masyarakat semakin cerdas dalam melakukan transaksi keuangan.

Financial Literacy Program

Bank Muamalat Indonesia through Muamalat Mobile Library has done Islamic Financial Literacy in several cities in Indonesia, by cooperating with several communities. The activity aims to increase public understanding of financial service products so that people are getting smarter in conducting financial transactions.

Penghargaan dan Sertifikasi

Penghargaan terkait bidang pelayanan terhadap konsumen yang diterima selama tahun 2019:

1. Satisfaction Loyalty Engagement (SLE) Index 2019 dari MRI dan Majalah Infobank, Kategori Bank Umum Syariah
   a. 1st SLE Index
   b. 3rd Loyalty Index
   c. 3rd Experience Index
   d. 3rd NPS (Net Promoter Score) Index
   e. 2nd Satisfaction Index Customer Service
   f. 2nd Satisfaction Index Teller
   g. 2nd Satisfaction Index Fisik
   h. 3rd Satisfaction Index ATM

2. Banking Service Excellence 2019 dari MRI dan Majalah Infobank, Kategori Bank Umum Syariah
   a. 5th Overall Performance
   b. 5th Overall Performance minus E-Banking
   c. 5th Customer Service
   d. 5th Teller
   e. 5th Security
   f. 5th Telepon cabang
   g. 4th Fisik kantor layanan

3. Contact Center Service Excellence Award 2019 dari Carre CCSL dan Majalah Service Excellence Salamuamalat untuk Achieving "Exceptional" Service Performance Category Sharia Banking

Award and Certification

Awards related to the field of service to consumers received during 2019:

1. *Satisfaction Loyalty Engagement (SLE) Index 2019 from MRI and Infobank Magazine, Sharia Commercial Bank Category*
   a. *1st SLE Index*
   b. *3rd Loyalty Index*
   c. *3rd Experience Index*
   d. *3rd NPS (Net Promoter Score) Index*
   e. *2nd Satisfaction Index Customer Service*
   f. *2nd Satisfaction Index Teller*
   g. *2nd Physical Satisfaction Index*
   h. *3rd ATM Satisfaction Index*

2. *Banking Service Excellence 2019 from MRI and Infobank Magazine, Sharia Commercial Bank Category*
   a. *5th Overall Performance*
   b. *5th Overall Performance minus E-Banking*
   c. *5th Customer Service*
   d. *5th Teller*
   e. *5th Security*
   f. *5th Branch telephone*
   g. *4th Physical service office*

3. *Contact Center Service Excellence Award 2019 from Carre CCSL and Service Excellence Magazine Salamuamalat for Achieving "Exceptional" Service Performance in the Sharia Banking Category.*

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Bidang Pengembangan Sosial dan Masyarakat

Corporate Social Responsibilities in the Social and Community Development

Komitmen dan Kebijakan

Bank menyadari sepenuhnya bahwa keberhasilan Bank dalam menjalankan usaha tidak luput dari dukungan masyarakat di sekitar lingkungan unit-unit usaha Bank. Untuk itu, Bank terus berupaya untuk membina hubungan baik dengan masyarakat, yang merupakan landasan pokok bagi keberhasilan jangka panjang bisnis dan reputasi Bank. Pelaksanaan tanggung jawab sosial Bank pada aspek sosial kemasyarakatan diarahkan pada program-program yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat di lokasi sekitar Bank yang juga ditujukan untuk memberdayakan potensi ekonomi masyarakat.

Commitment and Policy

The Bank is fully aware that the success of the Bank in conducting business is because the support of the community around the environment of the Bank's business units. For this reason, the Bank continues its efforts to foster good relations with the community, which is the basic foundation for the long-term success of the Bank's business and reputation. The implementation of the Bank's social responsibility in the social aspect is directed at programs that can provide benefits to the community in the vicinity of the Bank which is also intended to empower the economic potential of the community.

Isu dan Risiko Sosial yang Relevan dengan Bank

Sesuai dengan bidang usaha yang dijalankan, tidak terdapat isu dan risiko sosial yang relevan secara langsung dengan Bank. Namun demikian, Bank telah menatapkan empat pilar dan fokus utama dalam kegiatan CSR, yaitu bidang ekonomi, pendidikan, kemanusiaan dan lingkungan.

Issues and Social Risks Relevant to the Bank

In accordance with the line of business carried out, there are no social issues and risks that are directly relevant to the Bank. However, the Bank has set four main pillars and focus on CSR activities, which are economy, education, humanity and environment.

Kegiatan yang Dilaksanakan

Utilisasi Mobile Tattoo Removal Clinic

Mobile Tattoo Removal Clinic telah diutilisasi untuk kegiatan CSR sejak akhir 2018. Mobile Tattoo Removal Clinic adalah wujud realisasi tagline #AyoHijrah melalui sebuah kegiatan CSR. Gerakan ini bertujuan membantu masyarakat Indonesia pada umumnya, dan khususnya menyasar umat Muslim, yang ingin menghapus tato yang terlanjur ada di tubuhnya. Lebih dari 3,000 orang telah berpartisipasi di dalam kegiatan ini. Kegiatan hapus tato tidak hanya dilakukan di daerah Jabodetabek, namun juga daerah lain seperti Jogja, Nusakambangan, Bali dan Lombok.

Selain itu, Mobile Tattoo Removal Clinic juga mengunjungi beberapa Lapas, seperti Lapas Nusakambangan, Lapas Gunung Sindur, Lapas Paledang Bogor hingga Lapas Lampung.

Atas kunjungan dan kegiatan hapus tato yang dilakukan di lapas Nusakambangan, IMS selaku partner Bank Muamalat Indonesia menjalankan kegiatan hapus tato ini, menerima penghargaan dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) pada Agustus 2019 yang diberikan langsung oleh Menkumham Yasona H. Laoly.

Activities Performed

Mobile Tattoo Removal Clinic Utilization

Mobile Tattoo Removal Clinic have been mobilized for CSR activities since the end of 2018. Mobile Tattoo Removal is a form of #AyoHijrah tagline realization through a CSR activity. This movement aims to help Indonesian people in general, particularly targeting Muslims, who want to remove tattoos that are already on their bodies. More than 3,000 people have participated in this activity. Tattoo removal is not only done in the Greater Jakarta area, but also in other areas such as Jogja, Nusakambangan, Bali and Lombok.

In addition, Mobile Tattoo Removal Clinic has also visited several prison, such as Nusa Kambangan state prison, Gunung Sindur state prison, Paledang Bogor state prison, to Lampung state prison.

For tattoo removal event in Nusakambangan State Prison, IMS, as the Bank's partner to conduct the activity, received special award from Ministry of Law and Human Rights in August 2019, honored directly by the minister, Mr. Yasona H. Laoly.

Muamalat Mobile Library

Pada Januari 2019, mobil perpustakaan yang menyediakan lebih kurang 1.000 buku fiksi dan non-fiksi yang dikhususkan untuk anak-anak ini diterjunkan dalam rangka *psychological healing* anak-anak korban tsunami akibat lengseran Gunung Anak Krakatau.

Pada rentang akhir 2018 hingga 2019, sebanyak 973 orang penerima telah menerima bantuan Muamalat Mobile Library yang datang dari kalangan anak sekolah, pemulung hingga komunitas yang membutuhkan.

Muamalat Mobile Library juga diterjunkan dalam kegiatan volunteer day yang diadakan pada April 2019 sebagai rangkaian ulang tahun bank yang ke-27.

Muamalat Mobile Library

In January 2019, Muamalat Mobile Library, that provided around 1,000 non-fiction & fiction books, was deployed as trauma healing to children affected by the tsunami of Anak Krakatau Mountain.

During its activities from the end of 2018 until 2019, a total of 973 recipients had involved in Muamalat Mobile Library, from students, scavangers as well as other communities.

Muamalat Mobile Library was also deployed in the bank's volunteer day event in April 2019 as apart of its 27th anniversary.

Balai Ternak Cimande

Sebagai bank syariah tertua di Indonesia, perlu bagi Bank Muamalat Indonesia untuk ikut serta dalam usaha peningkatan ekonomi dari masyarakat Indonesia. Melalui salah satu kegiatan CSR nya yang dijalankan pada 2019, Bank Muamalat Indonesia membantu setidaknya 20 peternak di daerah Cimande, Bogor, dalam penangkaran hewan ternak. Dengan kegiatan ini, peternak mampu meningkatkan pendapatan tambahan hingga Rp300 ribu/bulan/peternak.

Kegiatan yang diawasi oleh BAZNAS ini diharapkan dapat meningkatkan kehidupan ekonomi para peternak ke depannya.

Cimande Livestock Center

As the oldest Sharia bank in Indonesia, it is necessary for Bank Muamalat Indonesia to participate in the efforts to improve the economy of the Indonesian people. Through one of its CSR activities carried out in 2019, Bank Muamalat Indonesia managed at least 20 local breeders in Cimande village, Bogor, for sustainable goat breeding activity in a selected livestock field. Stock farmers were able to increase their income up to Rp300 thousands/month per person.

The ongoing activity which is still supervised by BAZNAS is expected to improve their economic status in the future.



08.

Laporan Keuangan

Financial Report


SEARCH
TUE 12:30 PM
INFRASTRUCTURE
IDE
FINANCE
SOCIAL NETWORK

Bank Muamalat
Pertama Murni Syariah

PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk

Laporan Keuangan

31 Desember 2019 Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut Beserta Laporan Auditor Independen

The Financial Statements

As of December 31, 2019 And For The Year Ended With Independent Auditor's Report



Bank Muamalat Indonesia terdaftar dan diawasi oleh OJK dan LPS

Bank Muamalat

SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019 (AUDITED)

BOARD OF DIRECTOR'S STATEMENT REGARDING THE RESPONSIBILITY ON THE FINANCIAL STATEMENTS FOR YEAR ENDED DECEMBER 31, 2019 (AUDITED)

PT BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk

Kami yang bertanda tangan di bawah ini/ *We the undersigned:*

1. Nama/ *Name* : Achmad Kusna Permana
   Alamat kantor/ *Office address* : Muamalat Tower, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav.18 Jakarta
   Alamat domisili sesuai KTP atau kartu identitas lain/ *Domicile as stated in ID card* : Tamansari Persada Raya Blok 7 No.3 Jatibening Baru Pondok Gede, Kota Bekasi
   Nomor telepon/ *Phone number* : +62 (21) 80666000
   Jabatan/ *Position* : Direktur Utama / *President Director*

2. Nama/ *Name* : Hery Syafril
   Alamat kantor/ *Office address* : Muamalat Tower, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav.18 Jakarta
   Alamat domisili sesuai KTP atau kartu identitas lain/ *Domicile as stated in ID card* : Jl. Kebon Kacang 39 No. 24 RT. 015 RW. 004 Tanah Abang, Jakarta
   Nomor telepon/ *Phone number* : +62 (21) 80666000
   Jabatan/ *Position* : Direktur Keuangan / *Finance Director*

menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (Bank);
2. Laporan keuangan Bank telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Bank telah diungkapkan secara lengkap dan benar;
   b. Laporan keuangan Bank tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian interen dalam Bank.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

state that:

1. *We are responsible for the preparation and presentation of the financial statements* of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk *(Bank);*
2. *The Bank's financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;*
3. a. *All information contained in the Bank's financial statements has been fully and correctly disclosed;*
   b. *The Bank's financial statements do not contain misleading material information or facts, and do not omit material information and facts;*
4. *We are responsible for the Bank's internal control system.*

This statement letter is made truthfully.

Jakarta, 24 Januari 2020 M/ January 24th, 2020 M
28 Jumadal Ula 1441 H

METERAI TEMPEL EB403AHF183563629 6000 ENAM RIBU RUPIAH

Achmad Kusna Permana
Direktur Utama /*President Director*

Hery Syafril
Direktur Keuangan / *Finance Director*

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk
Muamalat Tower, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Jakarta 12950, Indonesia
Telp. +62 (21) 80 666 000, Fax. +62 (21) 80 666 001
info@bankmuamalat.co.id
www.bankmuamalat.co.id

DAFTAR ISI / *TABLE OF CONTENTS*

		Halaman/ *Page*	
1.	SURAT PERNYATAAN DIREKSI		*1. DIRECTOR'S STATEMENTS LETTER*
2.	DAFTAR ISI		*2. TABLE OF CONTENTS*
3.	LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN		*3. INDEPENDENT AUDITORS' REPORT*
4.	LAPORAN KEUANGAN - Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang terdiri dari:		*4. FINANCIAL STATEMENT - Aa of December 31, 2019 and for the year then ended, are as follow:*
	- Laporan Posisi Keuangan	i - iv	- *Statement of Financial Position*
	- Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	v	- *Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income*
	- Laporan Perubahan Ekuitas	vi	- *Statement of Changes in Equity*
	- Laporan Arus Kas	vii	- *Statement of Cash Flows*
	- Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil	viii	- *Statement of Reconciliation of Income and Revenue Sharing*
	- Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat	ix	- *Statement of Sources and Distribution of Zakat Funds*
	- Laporan Sumber Dana dan Penggunaan Dana Kebajikan	x	- *Statement of Sources and Uses of Qordhul Hasan Funds*
	- Catatan atas Laporan Keuangan	1 - 154	- *Notes to Financial Statement*

****

dbsd&a
Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali
Registered Public Accountants
License No. : 140/KM.1/2013

Branch Office :
Jl. Raya Kalimalang Blok E - No. 4F
Duren Sawit, Jakarta Timur 13440 - Indonesia
Phone : (62-21) 8611 845, 8611 847
Fax : (62-21) 8611 708
E-mail : corporate@kapdbs.co.id

BKR INTERNATIONAL

An independent member of BKR International,
with offices throughout the World

Nomor / *Number* : 00003/3.0266/AU.4/07/0408-1/1/I/2020

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk "Bank" terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2019, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, laporan sumber dan penyaluran dana zakat dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnnya.

Tanggung Jawab Manajemen atas Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material, yang disebabkan oleh kecurangan atau kesalahan.

Tanggung jawab Auditor

Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan opini atas laporan keuangan berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

Shareholders, Boards of Commissioners and Directors
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk

We have audited the accompanying financial statements of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (the "Bank"), which comprise the statement of financial position as of December 31, 2019, and the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity, statement of cash flows, reconciliation of income and revenue sharing, sources and distribution of zakat funds, and sources and uses of qardhul hasan funds for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's Responsibility for the Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan atau kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk pada tanggal 31 Desember 2019, dan kinerja keuangan, arus kas, rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, sumber dan penyaluran dana zakat serta sumber dan penggunaan dana kebajikan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Opinion

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk as of December 31, 2019, and their financial performance, cash flows, reconciliation of income and revenue sharing, sources and distribution of zakat funds, and sources and uses of qardhul hasan funds for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

DOLI, BAMBANG, SULISTIYANTO, DADANG & ALI
Izin Usaha / *Firm License* No. 140/KM.1/2013

Drs. Bambang Sulistiyanto, Ak, MBA, CPA.
Nomor Registrasi Akuntan Publik /
Public Accountant Registration Number
AP. 0408

Jakarta, 24 Januari 2020 / *January 24, 2020*

PT BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk
LAPORAN POSISI KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2019
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
AS OF DECEMBER 31, 2019
(Expressed in thousands of Indonesian Rupiah
unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	31 Desember / *December 31* 2019	31 Desember / *December 31* 2018	
ASET				***ASSET***
KAS	2.a, 3	764.526.569	776.722.379	***CASH***
GIRO DAN PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA	2.d, 4	2.505.388.141	5.339.428.665	***CURRENT ACCOUNTS AND PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA***
GIRO PADA BANK LAIN				***CURRENT ACCOUNTS WITH OTHER BANKS***
Pihak ketiga	2.e, 5	340.053.684	644.921.530	*Third Parties*
Cadangan Kerugian penurunan nilai		--	(1.284.378)	*Allowance for impairment losses*
Neto		340.053.684	643.637.152	*Net*
PENEMPATAN PADA BANK LAIN	2.f, 6			***PLACEMENTS WITH OTHER BANKS***
Pihak ketiga		38.612.888	13.114.109	*Third Parties*
Cadangan Kerugian penurunan nilai		(787.273)	(787.273)	*Allowance for impairment losses*
Neto		37.825.615	12.326.836	*Net*
INVESTASI PADA SURAT BERHARGA	2.g, 7			***INVESTMENTS IN MARKETABLE SECURITIES***
Pihak ketiga		11.347.870.179	12.199.928.132	*Third Parties*
Cadangan Kerugian penurunan nilai		(14.975.000)	(14.975.000)	*Allowance for impairment losses*
Neto		11.332.895.179	12.184.953.132	*Net*
PIUTANG	2.h, 8			***RECEIVABLES***
Piutang *murabahah* - setelah dikurangi margin ditangguhkan sebesar Rp 5.477.953.390 tahun 2019 dan Rp 5.986.601.096 tahun 2018				*Murabahah receivables - net of deferred margin income amounting to Rp 5.477.953.390 in 2019 and Rp 5.986.601.096 in 2018*
Pihak ketiga		14.134.112.000	15.627.019.289	*Third parties*
Pihak berelasi		4.015.775	5.202.404	*Related parties*
Jumlah		14.138.127.775	15.632.221.693	*Total*
Cadangan Kerugian penurunan nilai		(332.310.302)	(306.238.924)	*Allowance for impairment losses*
Bersih		13.805.817.473	15.325.982.769	*Net*
Piutang *Istishna* - setelah dikurangi pendapatan margin yang ditangguhkan masing-masing sebesar Rp 1.925.490 tahun 2019 dan Rp 2.142.034 tahun 2018				*Istishna receivable - net of deferred margin income of Rp 1,925,490 in 2019 Rp 2,142,034 in 2018*
Pihak ketiga		3.725.303	4.392.947	*Third parties*
Cadangan Kerugian penurunan nilai		(37.253)	(43.929)	*Allowance for impairment losses*
Bersih		3.688.050	4.349.018	*Net*
Piutang *Ijarah*				*Ijarah receivables*
Pihak ketiga		9.949.605	6.771.080	*Third parties*
Cadangan Kerugian penurunan nilai		(5.985.397)	(6.512.885)	*Allowance for impairment losses*
Bersih		3.964.208	258.195	*Net*
JUMLAH PIUTANG		14.151.802.683	15.643.385.720	***TOTAL RECEIVABLES***
Cadangan Kerugian penurunan nilai		(338.332.952)	(312.795.738)	*Allowance for impairment losses*
Bersih		13.813.469.731	15.330.589.982	***Net***
PINJAMAN *QARDH*	2.i, 9			***FUNDS OF QARDH***
Pihak ketiga		581.287.380	754.724.242	*Third parties*
Pihak berelasi		--	553.034	*Related parties*
Jumlah		581.287.380	755.277.276	*Total*
Cadangan Kerugian penurunan nilai		(3.817.632)	(13.063.860)	*Allowance for impairment losses*
Bersih		577.469.748	742.213.416	*Net*
PEMBIAYAAN *MUDHARABAH*	2.j, 10			***MUDHARABAH FINANCING***
Pihak ketiga		756.513.534	436.805.379	*Third parties*
Pihak berelasi		--	784.579	*Related parties*
Jumlah		756.513.534	437.589.958	*Total*
Cadangan Kerugian penurunan nilai		(8.016.858)	(5.717.945)	*Allowance for impairment losses*
Bersih		748.496.676	431.872.013	*Net*
PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH*	2.j, 11			***MUSYARAKAH FINANCING***
Pihak ketiga		14.205.215.228	16.290.760.060	*Third parties*
Pihak berelasi		1.668.688	253.111.386	*Related parties*
Jumlah		14.206.883.916	16.543.871.446	*Total*
Cadangan Kerugian penurunan nilai		(198.584.139)	(687.723.411)	*Allowance for impairment losses*
Bersih		14.008.299.777	15.856.148.035	*Net*

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying Notes to Financial Statements are an integral part of financial statements

PT BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk
LAPORAN POSISI KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2019
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
AS OF DECEMBER 31, 2019
(Expressed in thousands of Indonesian Rupiah
unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	31 Desember / *December 31* 2019	31 Desember / *December 31* 2018	
PENYERTAAN SAHAM	2.m, 12	407.711.237	6.095.237	***INVESTMENT IN SHARES***
Cadangan Kerugian penurunan nilai		--	--	*Allowance for impairment losses*
Bersih		407.711.237	6.095.237	*Net*
TAGIHAN AKSEPTASI	2.k, 13			***ACCEPTANCES RECEIVABLE***
Pihak ketiga		411.265.095	443.703.574	*Third parties*
Cadangan Kerugian penurunan nilai		(4.784.387)	(6.362.587)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah		406.480.708	437.340.987	*Total*
ASET YANG DIPEROLEH UNTUK *IJARAH*	2.n, 14			***ASSETS ACQUIRED FOR IJARAH***
Pihak ketiga		198.865.009	200.278.706	*Third parties*
Akumulasi penyusutan		(18.344.581)	(14.223.492)	*Accumulated depreciation*
Jumlah		180.520.428	186.055.214	*Total*
Cadangan Kerugian penurunan nilai		--	--	*Allowance for impairment losses*
Nilai buku - neto		180.520.428	186.055.214	*Book value - net*
ASET TETAP	2.o, 15			***PREMISES AND EQUIPMENT***
setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp1.480.143.143 tahun 2019 dan Rp1.314.861.284 tahun 2018		3.131.870.759	3.357.284.040	*net of accumulated depreciation of Rp1,480,143,143 in 2019 and Rp1,314,861,284 in 2018*
ASET PAJAK TANGGUHAN - NETO	2.ag, 23.d	143.110.743	146.235.882	***DEFERRED TAX ASSETS - NET***
ASET LAIN-LAIN - NETO	16	2.157.400.440	1.776.373.076	***OTHER ASSETS - NET***
JUMLAH ASET		**50.555.519.435**	**57.227.276.046**	***TOTAL ASSETS***

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying Notes to Financial Statements
are an integral part of financial statements

PT BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk
LAPORAN POSISI KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2019
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
AS OF DECEMBER 31, 2019
(Expressed in thousands of Indonesian Rupiah unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	31 Desember / *December 31* 2019	31 Desember / *December 31* 2018	
LIABILITAS, DANA *SYIRKAH TEMPORER* DAN EKUITAS				***LIABILITIES, TEMPORARY SYIRKAH FUNDS AND STOCKHOLDERS' EQUITY***
LIABILITAS				***LIABILITIES***
LIABILITAS SEGERA	2.u, 17	87.699.569	198.813.500	***LIABILITIES DUE IMMEDIATELY***
BAGI HASIL YANG BELUM DIBAGIKAN	18	76.293.382	84.055.187	***UNDISTRIBUTED REVENUE SHARING***
SIMPANAN	2.v, 19			***DEPOSITS***
Giro *wadiah*				*Wadiah demand deposits*
Pihak ketiga		2.501.125.758	2.405.926.553	*Third parties*
Pihak berelasi		30.576.873	46.039.769	*Related parties*
Jumlah		2.531.702.631	2.451.966.322	*Total*
Tabungan *wadiah* - pihak ketiga		4.472.053.545	3.578.177.687	*Wadiah saving deposits - third parties*
Deposito *Wakalah* - pihak ketiga		--	--	*Wakalah deposits - third parties*
Jumlah		7.003.756.176	6.030.144.009	*Total*
SIMPANAN DARI BANK LAIN	2.w, 20	117.315.232	48.199.519	***DEPOSITS FROM OTHER BANKS***
EFEK EFEK YANG DIJUAL DENGAN JANJI DIBELI KEMBALI	21	1.352.033.085	1.072.328.400	***SECURITIES SOLD UNDER REPURCHASE AGREEMENT***
LIABILITAS AKSEPTASI	2.k, 13	261.933.502	205.042.973	***ACCEPTANCES PAYABLE***
PINJAMAN YANG DITERIMA	22	277.765.000	1.150.000.000	***FUND BORROWINGS***
UTANG PAJAK	23	34.264.731	36.826.610	***TAXES PAYABLE***
ESTIMASI KERUGIAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI	2.ag, 24	1.668.380	2.619.922	***ESTIMATED LOSSES ON COMMITMENTS AND CONTINGENCIES***
ESTIMASI LIABILITAS IMBALAN KERJA	2.ac, 25	174.521.826	200.647.816	***ESTIMATED LIABILITIES FOR EMPLOYMENT BENEFIT***
LIABILITAS LAIN-LAIN	26	235.632.878	426.200.362	***OTHER LIABILITIES***
JUMLAH LIABILITAS		**9.622.883.761**	**9.454.878.298**	***TOTAL LIABILITIES***
DANA *SYIRKAH TEMPORER*				***TEMPORARY SYIRKAH FUNDS***
Bukan bank	2x, 27			***Non- banks***
Giro m*udharabah*		1.131.495.575	1.149.013.872	*Mudharabah demand deposits*
Tabungan *mudharabah*				*Mudharabah savings deposits*
Pihak ketiga		10.297.151.050	10.609.005.456	*Third parties*
Pihak berelasi		11.516.570	13.729.264	*Related parties*
Jumlah tabungan *mudharabah*		10.308.667.620	10.622.734.720	*Total mudharabah savings deposits*
Deposito *mudharabah*				*Mudharabah time deposits*
Pihak ketiga		21.548.344.518	27.401.502.444	*Third parties*
Pihak berelasi		364.948.534	432.178.448	*Related parties*
Jumlah deposito		21.913.293.052	27.833.680.892	*Total mudharabah time deposits*
Jumlah dana *syirkah temporer* dari bukan bank		33.353.456.247	39.605.429.484	*Total temporary syirkah funds from non-banks*
Bank				***Banks***
Giro *mudharabah*		58.246.540	107.629.417	*Mudharabah demand deposits*
Tabungan *mudharabah*		506.512.086	149.809.573	*Mudharabah savings deposits*
Deposito *mudharabah*		985.362.514	1.038.862.196	*Mudharabah time deposits*
Jumlah dana *syirkah temporer* dari bank		1.550.121.140	1.296.301.186	*Total temporary syirkah funds from banks*
Surat Berharga Yang Diterbitkan				***Securities Issued***
Sukuk *mudharabah* subordinasi		1.746.880.000	1.600.000.000	*Subordinated mudharabah sukuk*
Medium Term Notes Syariah		--	100.000.000	*Medium Term Notes Sharia*
Medium Term Notes Syariah Subordinasi		100.000.000	100.000.000	*Medium Term Notes Sharia Subordinated*
Sertifikat Investasi *Mudharabah* antar Bank Imbal Hasil Tetap		245.000.000	1.149.000.000	*Certificate of Interbank Mudharabah Investment*
Jumlah Surat Berharga yang diterbitkan		2.091.880.000	2.949.000.000	*Total of Securities Issued*
JUMLAH DANA *SYIRKAH TEMPORER*		**36.995.457.387**	**43.850.730.670**	***TOTAL TEMPORARY SYIRKAH FUNDS***

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying Notes to Financial Statements are an integral part of financial statements

PT BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk
LAPORAN POSISI KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2019
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
AS OF DECEMBER 31, 2019
(Expressed in thousands of Indonesian Rupiah unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	31 Desember / *December 31* 2019	31 Desember / *December 31* 2018	
EKUITAS				***STOCKHOLDERS' EQUITY***
Modal saham - nilai nominal Rp 200 per saham seri A dan Rp 100 per saham seri B Modal dasar - 826.649.175 saham seri A dan 28.346.701 saham seri B tahun 2019 dan 2018 Modal ditempatkan dan disetor penuh 826.649.175 saham seri A dan 9.381.053.160 saham seri B tahun 2019 dan 2018	1.c, 28	1.103.435.151	1.103.435.151	*Capital Stock - par value of Rp 200 for series A shares and Rp 100 for series B shares Authorized - 826,649,175 series A shares and 28,346,701 series B shares in 2019 and 2018 Issued and fully paid - 826,649,175 series A shares and 9,381,053,160 series B shares in 2019 and 2018*
Tambahan modal disetor - bersih	29	1.578.925.257	1.578.925.257	*Additional paid-in capital-net*
Keuntungan pengukuran kembali program imbalan pasti - setelah pajak	25	60.026.597	67.640.348	*Gain from remeasurement of defined benefit plan - net of tax*
Keuntungan (kerugian) belum direalisasi dari perubahan harga pasar efek tersedia untuk dijual (AFS)	7	(10.165.278)	(16.963.907)	*Unrealized gain (loss) from changes in fair value of available for sale Securities (AFS)*
Surplus revaluasi atas aset tetap - setelah pajak	16	690.593.079	747.432.030	*Revalution surplus on premises and equipment - net of tax*
Saldo laba	30	514.363.481	441.198.199	*Retained earnings*
Jumlah Ekuitas		3.937.178.287	3.921.667.078	*Total Stockholders' Equity*
JUMLAH LIABILITAS, DANA *SYIRKAH TEMPORER* DAN EKUITAS		**50.555.519.435**	**57.227.276.046**	***TOTAL LIABILITIES, TEMPORARY SYIRKAH FUNDS AND STOCKHOLDERS' EQUITY***

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying Notes to Financial Statements are an integral part of financial statements

PT BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAINNYA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali laba bersih per saham dasar)

PT BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEAR ENDED
AS OF DECEMBER 31, 2019
(Expressed in thousands of Indonesian Rupiah, except share data)

	Catatan/ *Notes*	31 Desember / *December 31* 2019	31 Desember / *December 31* 2018	
PENDAPATAN PENGELOLAAN DANA OLEH BANK SEBAGAI *MUDHARIB*	31			***REVENUE FROM FUND MANAGEMENT AS MUDHARIB***
Pendapatan dari penjualan		1.178.213.058	1.471.094.206	*Income from sales*
Pendapatan dari bagi hasil		1.217.771.838	1.450.097.899	*Income from revenue sharing*
Pendapatan dari *ijarah* - bersih		4.871.726	30.754.156	*Income from revenue from Ijarah - net*
Pendapatan usaha utama lainnya		378.834.242	268.244.099	*Other main operating income*
Jumlah pendapatan bank sebagai *mudharib*		2.779.690.864	3.220.190.360	*Total revenue from fund management as mudharib*
HAK PIHAK KETIGA ATAS BAGI HASIL DANA *SYIRKAH TEMPORER*	32	(2.396.720.810)	(2.241.736.938)	***THIRD PARTIES' SHARE ON RETURNS OF TEMPORARY SYIRKAH FUNDS***
HAK BAGI HASIL MILIK BANK		382.970.054	978.453.422	***BANK'S SHARE IN REVENUE SHARING***
PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA	33	647.444.024	349.152.499	***OTHER OPERATING INCOME***
BEBAN OPERASIONAL				***OPERATING EXPENSES***
Umum dan administrasi	35	(666.162.881)	(691.843.508)	*General and administrative*
Karyawan	34	(770.738.563)	(845.632.021)	*Employee*
Bonus giro *wadiah*		(11.256.531)	(12.567.672)	*Bonus on wadiah demand deposits*
Lain-lain	37	(102.129.771)	(92.991.134)	*Others*
Jumlah beban usaha		(1.550.287.746)	(1.643.034.335)	*Total other operating expenses*
PEMBALIKAN (BEBAN) CADANGAN KERUGIAN DAN NON PRODUKTIF	36	507.381.659	352.190.637	***REVERSAL (PROVISION) FOR IMPAIRMENT NON-EARNING ASSETS***
KEUNTUNGAN SELISIH KURS		32.000.645	32.107.699	***GAIN ON FOREIGN EXCHANGES***
LABA USAHA		**19.508.636**	**68.869.922**	***INCOME FROM OPERATIONS***
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL				***NON-OPERATING INCOME (EXPENSE)***
Pendapatan Non Operasional	38	20.527.628	14.374.382	*Non-Operating Revenue*
Beban Non Operasional	39	(13.869.866)	(37.438.432)	*Non-Operating Expense*
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL- NETO		6.657.762	(23.064.050)	***NON-OPERATING (EXPENSE) - NET***
LABA SEBELUM PAJAK		**26.166.398**	**45.805.872**	***INCOME BEFORE INCOME TAX***
MANFAAT (BEBAN) PAJAK	23			***INCOME TAX BENEFIT (EXPENSE)***
Pajak Kini		(6.443.221)	(18.471.940)	*Current Tax*
Pajak Tangguhan		(3.396.846)	18.668.112	*Deferred Tax*
		(9.840.067)	196.172	
LABA BERSIH		**16.326.331**	**46.002.044**	***NET INCOME***
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				***OTHERS COMPREHENSIVE INCOME***
Akun-akun yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi				***Item that will not be reclassified to profit or loss***
Penilaian kembali aset tetap	16	--	46.082.307	*Revaluation surplus on premises and equipment*
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	25	(10.151.668)	(39.281.292)	*Remeasurement on defined benefit plan*
Pajak penghasilan terkait		2.537.917	9.820.323	*Related income tax*
Akun-akun yang akan direklasifikasi ke laba rugi				***Item that will be reclassified to profit or loss***
Kenaikan nilai aset keuangan atas efek-efek yang tersedia dijual yang belum direalisasi	7	9.064.839	(28.366.700)	*Unrealized gain in value of available-for-sale mutual fund*
Pajak penghasilan terkait		(2.266.210)	7.091.675	*Related income tax*
Jumlah laba komprehensif lain bersih setelah pajak		(815.122)	(4.653.687)	*Total other comprehensive income net of tax*
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		**15.511.209**	**41.348.357**	***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR***
LABA PER SAHAM DASAR (dalam nilai penuh)		**1,60**	**4,51**	***BASIC EARNINGS PER SHARE (In full amount)***

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying Notes to Financial Statements are an integral part of financial statements

PT BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk
STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEAR ENDED
AS OF DECEMBER 31, 2019
(Expressed in thousands of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	Modal ditempatkan dan disetor penuh/ *Issued and Fully paid capital*	Tambahan modal disetor/ *Additional paid-in capital*	Penghasilan komprehensif lain/ *Other comprehensive income*			Saldo laba / *Retained earnings*		Jumla Ekuitas/ *Total equity*	
				Pengukuran kembali program imbalan pasti - setelah pajak bersih/ *Remeasurement of defined benefit plan - net of tax*	Surplus revaluasi atas aset tetap - setelah pajak bersih/ *Surplus revaluation on premises and equipment - net of tax*	Revaluasi efek tersedia untuk dijual setelah pajak bersih/ *AFS investment revaluation - net of tax*	Ditentukan penggunaannya/ *Appropriated*	Belum Ditentukan penggunaannya/ *Unappropriated*		
Saldo per 31 Desember 2017		**1.103.435.151**	**3.243.925.257**	**97.149.500**	**815.027.626**	**4.311.118**	--	**281.518.252**	**5.545.366.904**	***Balance as of December 31, 2017***
Tagihan Modal Disetor		--	(1.665.000.000)	--	--	--	--	--	(1.665.000.000)	*Paid in capital billed*
Laba belum direalisasi atas surat berharga yang tersedia untuk dijual		--	--	--	--	(21.275.025)	--	--	(21.275.025)	*Unrealized gain on marketable securities of available for sale*
Surplus revaluasi atas aset tetap		--	--	--	46.082.307	--	--	--	46.082.307	*Revaluation surplus on premises and equipment*
Pemindahan penyusutan aset tetap		--	--	--	(113.677.903)	--	--	113.677.903	--	*Depreciation transfer for premises and equipment*
Pengukuran kembali program imbalan pasti		--	--	(29.509.152)	--	--	--	--	(29.509.152)	*Remeasurement of defined benefit plan*
Laba bersih tahun berjalan		--	--	--	--	--	--	46.002.044	46.002.044	*Net income for the year*
Saldo per 31 Desember 2018		**1.103.435.151**	**1.578.925.257**	**67.640.348**	**747.432.030**	**(16.963.907)**	--	**441.198.199**	**3.921.667.078**	***Balance as of December 31, 2018***
Laba belum direalisasi atas surat berharga yang tersedia untuk dijual		--	--	--	--	6.798.629	--	--	6.798.629	*Unrealized gain on marketable securities of available for sale*
Surplus revaluasi atas aset tetap		--	--	--	--	--	--	--	--	*Revaluation surplus on premises and equipment*
Pemindahan penyusutan aset tetap		--	--	--	(56.838.951)	--	--	56.838.951	--	*Depreciation transfer for premises and equipment*
Pengukuran kembali program imbalan pasti		--	--	(7.613.751)	--	--	--	--	(7.613.751)	*Remeasurement of defined benefit plan*
Laba bersih tahun berjalan		--	--	--	--	--	--	16.326.331	16.326.331	*Net income for the year*
Saldo per 31 Desember 2019		**1.103.435.151**	**1.578.925.257**	**60.026.597**	**690.593.079**	**(10.165.278)**	--	**514.363.481**	**3.937.178.287**	***Balance as of December 31, 2019***

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying Notes to Financial Statements
are an integral part of financial statements

PT BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019
(Disajikan dalam ribuan Rupiah)
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk
STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR THE YEAR ENDED
AS OF DECEMBER 31, 2019
(Expressed in thousands of Indonesian Rupiah)
unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	31 Desember / *December 31* 2019	31 Desember / *December 31* 2018	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				***CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES***
Penerimaan pendapatan pengelolaan dana oleh Bank sebagai mudharib		2.498.752.918	3.252.795.480	*Revenue receipt from fund management as mudharib*
Pembayaran bagi hasil dana syirkah temporer		(2.245.081.841)	(2.121.242.974)	*Payment of temporary syirkah funds*
Penerimaan pendapatan operasional lainnya		647.444.024	349.152.499	*Receipt from other operating revenue*
Penerimaan kembali piutang dan pembiayaan yang telah dihapusbukukan		44.469.031	35.549.808	*Receipt from receivables and and financing already written-off*
Pembayaran beban kepegawaian		(831.751.194)	(784.034.219)	*Payments for employee expenses*
Pembayaran beban operasional lainnya		(564.908.025)	(631.192.529)	*Payments for other operating expenses*
Pembayaran pajak penghasilan		(24.800.356)	(41.531.022)	*Payments of income taxes*
Penerimaan pendapatan non operasional		28.992.265	14.374.381	*Receipts from non operating income*
Pembayaran beban non operasional		(22.334.502)	(37.438.432)	*Payments for non operating expenses*
Arus kas dari operasi sebelum perubahan aktiva dari kewajiban operasi		(469.217.680)	36.432.992	*Cash flows from operating activities before changes in operating assets and liabilities*
Penurunan (kenaikan) aktiva operasi :				*Decrease (increase) in operating assets:*
Penempatan Bank Lain		(25.498.779)	356.544.771	*Placements with Bank Indonesia & other banks*
Piutang		1.491.583.037	4.779.469.194	*Receivables*
Pinjaman Qardh		173.989.896	(25.851.291)	*Fund of Qardh*
Pembiayaan Mudharabah		(318.923.576)	271.682.218	*Mudharabah financing*
Pembiayaan Musyarakah		2.336.987.530	3.304.736.710	*Musyarakah financing*
Aktiva yang diperoleh untuk *Ijarah* - bersih		1.413.697	13.443.373	
Aktiva lain-lain		1.630.368.368	(5.068.988.139)	*Other assets*
Kenaikan (penurunan) kewajiban operasi :				*Increase (decrease) in operating liabilities:*
Liabilitas segera		(111.113.931)	1.844.956	*liabilities due immidiately*
Simpanan		973.612.167	(319.123.729)	*Deposits*
Simpanan dari bank lain		69.115.713	(24.167.032)	*Deposits from other banks*
Utang pajak		(2.561.745)	(32.111.246)	*Taxes payable*
Liabilitas lain-lain		258.068.392	856.341.059	*Other liabilities*
Kenaikan Dana *Syirkah Temporer*		(5.998.153.283)	(3.352.925.238)	*Increase of Temporary Syirkah Funds*
Arus Kas Bersih Diperoleh (Digunakan) untuk Aktivitas Operasi		9.669.806	797.328.598	*Net Cash Provide (Used) in Operating Activities*
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				***CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES***
Perolehan investasi pada surat berharga		1.377.281.554	(2.251.679.894)	*Acquisition of securities*
Hasil penjualan investasi pada surat berharga		(2.819.049.635)	1.684.898.199	*Proceeds from sale of securities*
Hasil penjualan aset tetap		14.823.036	3.008.559	*Proceeds from sale of premises and equipment*
Pembelian aset tetap		(111.419.147)	(209.264.574)	*Acquisition of premises and equipment*
Arus Kas Bersih Diperoleh (Digunakan) untuk Aktivitas Investasi		(1.538.364.192)	(773.037.710)	*Net Cash Provide (Used) in Investing Activities*
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				***CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES***
Pencairan (Penempatan) sertifikat investasi mudharabah		(904.000.000)	137.650.000	*Proceed from (acquicition of) interbank mudharabah investment*
Penerimaan pinjaman diterima		27.765.000	--	*Receipt from fund borrowing*
Pembayaran pinjaman diterima		(900.000.000)	(1.036.000.000)	*Payment of fund borrowing*
Pembayaran utang dividen		(380.700)	(2.272.181)	*Payments of dividend liabilities*
(Pencairan) sukuk subordinasi		--	(700.000.000)	*Proceed from Subordinate Sukuk*
(Pencairan) *Medium Term Notes*		(100.000.000)	--	*Proceed from Medium Term Notes*
Penerimaan REPO		2.522.190.697	--	*Payment from REPO*
(Pencairan) REPO		(2.242.486.012)	--	*Proceed from REPO*
Arus Kas Bersih Diperoleh (Digunakan) dari Aktivitas Pendanaan		(1.596.911.015)	(1.600.622.181)	*Net Cash Provided (Used) by Financing Activities*
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS		(3.125.605.401)	(1.576.331.293)	***NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS***
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN		6.774.186.683	8.350.517.976	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT AT BEGINNING OF YEAR***
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN		**3.648.581.282**	**6.774.186.683**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR***
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun terdiri dari:				***Cash and Cash Equivalents at end of year*** *consist of:*
Kas	3	764.526.569	776.722.379	*Cash*
Penempatan pada Bank Indonesia	4	2.505.388.141	5.339.428.665	*Placements with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	5	340.053.684	644.921.530	*Demand deposits with other banks*
Penempatan pada Bank Lain	6	38.612.888	13.114.109	*Placements with other banks*
Jumlah		**3.648.581.282**	**6.774.186.683**	***Total***
AKTIVITAS YANG TIDAK MEMPENGARUHI ARUS KAS:				***ACTIVITIES NOT EFFECTING CASH FLOW***
Surplus Revaluasi Aset Tetap		--	46.082.307	*Surplus Revaluation On Premises and Equipment*

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying Notes to Financial Statements are an integral part of the consolidated financial statements

PT BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk
LAPORAN REKONSILIASI PENDAPATAN DAN BAGI HASIL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019
(Disajikan dalam ribuan Rupiah)

PT BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk
STATEMENT OF RECONCILIATION OF INCOME AND REVENUE SHARING
FOR THE YEAR ENDED AS OF DECEMBER 31, 2019
(Expressed in thousands of Indonesian Rupiah)

	Catatan/ *Notes*	**31 Desember / *December 31* 2019**	**31 Desember / *December 31* 2018**	
PENDAPATAN USAHA UTAMA (AKRUAL)		**2.779.690.864**	**3.220.190.360**	***MAIN OPERATING INCOME (ACCRUAL)***
PENGURANG				***DEDUCTION***
Pendapatan tahun berjalan yang kas atau setara kasnya belum diterima dari:				*Income during the year in which cash or cash equivalents have not been received from:*
Piutang *murabahah*		55.426.982	172.740.697	*Murabahah receivables*
Piutang *ijarah*		842.000	31.437.602	*Ijarah receivables*
Pembiayaan *mudharabah*		6.924.607	3.402.923	*Mudharabah financing*
Pembiayaan *musyarakah*		177.547.599	97.512.470	*Musyarakah financing*
Pendapatan Surat Berharga Bank Indonesia		588.452	2.929.119	*Income from Marketable Securities Bank Indonesia*
Surat berharga		39.608.305	26.318.803	*Marketable securities*
Jumlah		**280.937.946**	**334.341.614**	
PENAMBAH				***ADDITION***
Pendapatan tahun sebelumnya yang kasnya diterima pada tahun berjalan dari:				*Income from previous year in which cash have been received in current year from:*
Piutang *murabahah*		172.740.697	330.157.793	*Murabahah receivables*
Piutang *ijarah*		31.437.602	34.668.641	*Ijarah receivables*
Pembiayaan *mudharabah*		3.402.923	149.044.155	*Mudharabah financing*
Pembiayaan *musyarakah*		97.512.470	365.387.178	*Musyarakah financing*
Surat berharga		26.318.803	3.687.709	*Marketable securities*
Pendapatan Surat Berharga Bank Indonesia :				*Income from Marketable Securities Bank Indonesia:*
Pendapatan Sukuk		2.929.119	56.360.066	*Income from Sukuk*
Jumlah		**334.341.614**	**939.305.542**	***Total***
Laba operasi yang tersedia untuk bagi hasil		**2.833.094.532**	**3.825.154.288**	***Available operating income for profit sharing***
PENDAPATAN TERSEDIA UNTUK BAGI HASIL				***AVAILABLE INCOME FOR PROFIT SHARING***
Bagi hasil yang menjadi hak Bank Syariah		436.373.722	1.662.184.119	*Profit sharing attributable to Sharia Bank*
Bagi hasil yang menjadi hak pemilik dana	32	2.396.720.810	2.162.970.169	*Profit sharing attributable to depositors*
Dirinci atas:				*The details are as follow:*
Hak pemilik dana atas bagi hasil yang sudah didistribusikan		2.173.547.428	2.078.914.982	*Distributed profit sharing attributable to depositors*
Hak pemilik dana atas bagi hasil yang belum didistribusikan	18	223.173.382	84.055.187	*Undistributed revenue sharing attributable to depositors*

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying Notes to Financial Statements are an integral part of the consolidated financial statements

PT BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk
LAPORAN SUMBER DAN PENYALURAN DANA ZAKAT
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019
(Disajikan dalam ribuan Rupiah)

PT BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk
STATEMENT OF SOURCES AND DISTRIBUTION OF ZAKAT FUNDS
FOR THE YEAR ENDED AS OF DECEMBER 31, 2019
(Expressed in thousands of Indonesian Rupiah)

	Catatan/ *Notes*	31 Desember / *December 31* 2019	31 Desember / *December 31* 2018	
Sumber Dana Zakat				***Sources of Zakat Funds***
Internal Bank	29	1.150.051	652.889	*Internal Bank*
Eksternal Bank		9.718.735	9.933.200	*External Bank*
		10.868.786	**10.586.089**	
Penyaluran Dana Zakat				***Distribution of Zakat Funds***
Baitul Maal Muamalat (BMM)		10.868.786	10.455.511	*Baitul Maal Muamalat (BMM)*
Dompet Dhuafa		--	65.289	*Dompet Dhuafa*
BAZNAS		--	65.289	*BAZNAS*
		10.868.786	**10.586.089**	
Surplus		--	--	***Surplus***
Sumber Dana Zakat pada Awal Tahun		--	--	***Sources of Zakat Funds at Beginning of the Year***
Sumber Dana Zakat pada Akhir Tahun		--	--	***Sources of Zakat Funds at End of the Year***

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying Notes to Financial Statements are an integral part of financial statements

PT BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk
LAPORAN SUMBER DANA DAN
PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019
(Disajikan dalam ribuan Rupiah)

PT BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk
STATEMENTS OF SOURCES AND USES
OF QARDHUL HASAN FUNDS
FOR THE YEAR ENDED
AS OF DECEMBER 31, 2019
(Expressed in thousands of Indonesian Rupiah)

	Catatan/ *Notes*	31 Desember / *December 31,* 2019	31 Desember / *December 31,* 2018	
Sumber Dana Kebajikan				***Sources of Qardhul Hasan Funds***
Denda		66.194	15.932	*Penalty*
Pendapatan non-halal		523.923	633.223	*Non-halal income*
		590.117	**649.155**	
Penggunaan Dana Kebajikan				***Uses of Qardhul Hasan Funds***
Sumbangan		590.117	649.155	*Donation*
Surplus		--	--	***Surplus***
Dana Kebajikan pada Awal Tahun	2a	--	--	***Qardhul Hasan Funds at Beginning of the Year***
Dana Kebajikan pada Akhir Tahun	2a	--	--	***Qardhul Hasan Funds at End of the Year***

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying Notes to Financial Statements are an integral part of financial statements

1. UMUM

a. Pendirian Bank dan Informasi Umum

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk ("Bank") didirikan berdasarkan akta No. 1 tanggal 1 November 1991 dari Notaris Yudo Paripurno, S.H., notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.C2.2413.HT.01.01.Th.92 tanggal 21 Maret 1992 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 1919A Tahun 1992, tambahan Berita Negara No. 34 tanggal 28 April 1992.

Bank telah mengalami perubahan nama yang semula PT Bank Syariah Muamalat Indonesia Tbk menjadi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk sesuai dengan akta No. 104 tanggal 12 November 2008 dari notaris Arry Supratno, S.H., notaris di Jakarta. Akta pernyataan keputusan rapat itu telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan No.AHU-98507.AH.01.02.Th.08 tanggal 22 Desember 2008 dan telah dicatat dalam tata usaha pengawasan Bank Indonesia sejak 1 September 2009.

Anggaran dasar Bank mengalami perubahan, berdasarkan akta dari Fathiah Helmi, S.H., No. 23 tanggal 12 Desember 2013 notaris di Jakarta mengenai pengeluaran saham dalam simpanan dengan cara Penawaran Umum Terbatas (PUT V) kepada pemegang saham dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dan persetujuan penjaminan aset Bank dengan nilai lebih 50% dari kekayaan bersih Bank. Perubahan tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.AHU-0123658.AH.01.09 tanggal 23 Desember 2013.

Anggaran dasar Bank telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan akta dari Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., No. 57 tanggal 28 Juni 2018 notaris di Jakarta mengenai penurunan Modal Dasar Perseroan sehingga menjadi Rp4.400.000.000 sehingga Modal Dasar serta Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan memenuhi ketentuan pasal 33 ayat (1) dan (2) UU PT.

Kantor pusat Bank berlokasi di Muamalat Tower, Jalan Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Jakarta.

1. GENERAL

a. Bank Establishment and General Information

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (the "Bank") was established based on notarial deed No. 1 dated November 1, 1991 of Yudo Paripurno, S.H., notary in Jakarta. The deed of establishment was approved by the Minister of Justice in his Decree No.C2.2413.HT.01.01.Th.92 dated March 21, 1992 and was published in Supplement No. 34 to the State Gazette No.1919A of 1992, dated April 28, 1992.

The Bank changed its name from PT Bank Syariah Muamalat Indonesia Tbk to PT Bank Muamalat Indonesia Tbk based on notarial deed No. 104 dated November 12, 2008 of Arry Supratno, S.H., notary in Jakarta. The deed was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decree No. AHU-98507.AH.01.02.Th.08 dated December 22, 2008 and has been recorded in the administration of Bank Indonesia Supervisory since September 1, 2009.

The Bank's articles of association have been amended with Deed of Fathiah Helmi, S.H., No.23 dated December 12, 2013, notary in Jakarta, concerning the issues of shares through Limited Public Offering (Rights Issue V) to existing shareholders with pre-emptive rights and guarantee approval of Bank's assets with value of more than 50% of the Bank's net worth. The latest amendment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his decree No.AHU-0123658.AH.01.09 dated December 23, 2013.

The Bank's articles of association have been amended several times, the latest was based on the deed No. 57 dated June 28, 2018 of Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., notary in Jakarta, concerning the decrease of the Company's Authorized Capital to become Rp4,400,000,000 so that the Authorized Capital, the Issued and Paid-in Capital of the Company comply with the provisions of article 33 paragraphs (1) and (2) of the Corporate Law.

The Bank's head office is located at Muamalat Tower, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Jakarta.

1. UMUM (Lanjutan)

a. Pendirian Bank dan Informasi Umum (lanjutan)

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, Bank memiliki jaringan unit kerja dengan rincian sebagai berikut: (tidak diaudit)

	31 Desember/ *December 31,* 2019	31 Desember/ *December 31,* 2018	
Kantor Cabang	83	83	*Branch Offices*
Kantor Cabang Pembantu	150	150	*Sub-Branch Offices*
Kantor Kas	43	43	*Cash Offices*

Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar Bank yang terakhir, maksud dan tujuan kegiatan Bank adalah menyelenggarakan usaha perbankan dengan prinsip Syariah.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.430/KMK.013/1992 tanggal 24 April 1992, Bank telah memperoleh izin untuk beroperasi sebagai bank umum. Bank memulai aktivitas operasinya sebagai bank pada tanggal 1 Mei 1992. Berdasarkan surat keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.131/KMK.017/1995 tanggal 30 Maret 1995, Bank dinyatakan sebagai Bank yang beroperasi dengan sistem bagi hasil. Sesuai Surat Keputusan Bank Indonesia No. 27/76/KEP/DIR tanggal 27 Oktober 1994, status Bank meningkat menjadi bank devisa.

Pemegang saham mayoritas Bank adalah *Islamic Development* Bank yang dimiliki oleh negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Negara Islam (OKI).

Bank mendirikan Yayasan Baitul Maal Muamalat yang pendiriannya diaktakan dalam akta Notaris Atrino Leswara, S.H., No. 76 tanggal 22 Desember 2000. Salah satu unit usaha yayasan tersebut adalah Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang telah disahkan sebagai Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) pada tanggal 7 November 2001. Tujuan pendirian Baitul Maal Muamalat ini adalah untuk mendorong terwujudnya manajemen zakat, infaq dan shadaqah yang lebih efektif sebagai cerminan kepedulian sosial. Bank menyalurkan penerimaan zakat dan dana kebajikan (*Qardhul Hasan*) kepada Lembaga Amil Zakat tersebut, sehingga Bank tidak secara langsung menjalankan fungsi pengelolaan dana zakat, infaq dan shadaqah dan dana *qardhul hasan*.

1. GENERAL (Continued)

a. Bank Establishment and General Information (continued)

As of December 31, 2019 and 2018, Bank has business unit network with details as follows: (unaudited)

In accordance with article 3 of the Bank's latest articles of association, the scope of its activities is to engage in banking activities based on Islamic Sharia principles.

Based on the Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No.430/KMK.013/1992 dated April 24, 1992, the Bank obtained its business license to operate as a commercial bank. The Bank started its commercial operation on May 1, 1992. Based on Decree No.131/KMK.017/1995 dated March 30, 1995 of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia, the Bank was declared as a bank operating under a revenue sharing system. In accordance with the Decree of Bank Indonesia No.27/76/KEP/DIR dated October 27, 1994, the status of the Bank was upgraded to foreign exchange bank.

The majority shareholder of the Bank is Islamic Development Bank, that is owned by the Organization of the Islamic Cooperation (OIC).

The Bank established Baitul Maal Muamalat Foundation based on notarial deed No. 76 dated December 22, 2000 of Atrino Leswara, S.H. One of the business units under this foundation is the Zakat Management Board (Lembaga Amil Zakat), which was approved to operate as a National Zakat Management Board (Badan Amil Zakat Nasional) on November 7, 2001. The objective of the establishment of Baitul Maal Muamalat is to accelerate the effective management of zakat, infaq, and shadaqah. The zakat and charity funds (Qardhul Hasan funds) received by the Bank are channeled to the Zakat Management Board, therefore, the Bank is not directly involved in the management of zakat, infaq, shadaqah and qardhul hasan funds.

1. UMUM (Lanjutan)

b. Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit dan Karyawan

Susunan Dewan Komisaris pada tanggal 31 Desember 2019 ditetapkan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) PT Bank Muamalat Indonesia Tbk No.29 tanggal 17 Mei 2019, Notaris Utiek R. Abdurachman, S.H., M.Li., M.Kn. Susunan Dewan Komisaris pada tanggal 31 Desember 2018 ditetapkan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) PT Bank Muamalat Indonesia Tbk No.235 tanggal 28 Juni 2018, Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn. Rincian Susunan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. GENERAL (Continued)

b. Board of Commissioners, Board of Directors, Sharia Supervisory Board, Audit Committee and Employees

The composition of the Bank's Board of Commissioners as of December 31, 2018 was determined based on Deed of Resolution of the Bank's Annual General Shareholders' Meeting No.29 dated May 17, 2019, of Notary Utiek R. Abdurachman, S.H., M.Li., M.Kn. The composition of the Bank's Board of Commissioners as of December 31, 2018 was determined based on the Deed of Resolution of the Bank's Annual General Shareholders' Meeting No.235 dated June 28, 2018, of Notary Ashoya Ratam, S.H., M.Kn. Details of the Composition of the Board of Commissioners are as follows:

	31 Desember 2019 dan 2018/ *December 31, 2019 and 2018*	
Dewan Komisaris		***Board of Commissioners***
Komisaris Utama (Independen)	Ilham Akbar Habibie	*President Commissioner (Independent)*
Komisaris (Independen)	Iggi Haruman Achsien	*Commissioner (Independent)*
Komisaris (Independen)	Edy Setiadi	*Commissioner (Independent)*
Komisaris	Mohamed Hedi Mejai*	*Commissioner*
Komisaris	Abdulsalam Mohammad Joher Al-Saleh*	*Commissioner*

*) Efektif setelah mendapat persetujuan *Fit and Proper Test* dari Otoritas Jasa Keuangan.

**) Effective after passing the Fit and Proper Test by the Financial Services Authority.*

Susunan Dewan Direksi pada tanggal 31 Desember 2019 ditetapkan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank Muamalat Indonesia Tbk No.29 tanggal 17 Mei 2019, Notaris Utiek R. Abdurachman, S.H., M.Li., M.Kn. Susunan Dewan Direksi pada tanggal 31 Desember 2018 ditetapkan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) PT Bank Muamalat Indonesia Tbk No.23 tanggal 11 Oktober 2018, Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn. Rincian Susunan Dewan Direksi adalah sebagai berikut:

The composition of the Bank's Board of Directors as of December 31, 2019 was determined based on Deed of Resolution of the Bank's Extraordinary General Shareholders' Meeting No.29 dated May 17, 2019, of Notary Utiek R. Abdurachman, S.H., M.Li., M.Kn. The composition of the Bank's Board of Directors as of December 31, 2018 was determined based on Deed of Resolution of the Bank's Annual General Shareholders' Meeting No.23 dated October 11, 2018, of Notary Ashoya Ratam, S.H., M.Kn. Details of the Composition of the Board of Directors are as follows:

	31 Desember / *December 31,* 2019	**31 Desember / *December 31,* 2018**	
Dewan Direksi			***Board of Directors***
Direktur Utama	Achmad Kusna Permana	Achmad Kusna Permana	*President Director*
Direktur	Purnomo Budiwibowo Soetadi	Purnomo Budiwibowo Soetadi	*Director*
Direktur	Hery Syafril	Hery Syafril	*Director*
Direktur	Andri Donny	Andri Donny	*Director*
Direktur	Awaldi	Awaldi	*Director*
Direktur	Avianto Istihardjo	--	*Director*

1. UMUM (Lanjutan)

1. GENERAL (Continued)

b. Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit dan Karyawan (lanjutan)

Susunan Dewan Pengawas Syariah Bank pada tanggal 31 Desember 2019 ditetapkan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Muamalat Indonesia Tbk No.80 tanggal 16 Desember 2019, Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., dan 31 Desember 2018 ditetapkan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk No.81 tanggal 29 Juni 2016, Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn, adalah sebagai berikut:

b. Board of Commissioners, Board of Directors, Sharia Supervisory Board, Audit Committee and Employees (continued)

The composition of the Bank's Sharia Supervisory Board as of December 31, 2019 based on Deed of Resolution the Bank's Extraordinary General Shareholders' Meeting No.80 dated December 16, 2019, of Notary Ashoya Ratam, S.H., M.Kn, and as of December 31, 2018 based on Deed of Resolution the Bank's Annual General Shareholders' Meeting No.81 dated June 29, 2016, of Notary Ashoya Ratam, S.H., M.Kn, is as follows:

	31 Desember / *December 31,* 2019	**31 Desember / *December 31,* 2018**	
Dewan Pengawas Syariah			***Sharia Supervisory Board***
Ketua	Drs. H. Sholahudin Al Aiyub, M.Si	K.H. Dr. (HC) Ma'ruf Amin	*Chairman*
Anggota	Hj. Siti Haniatunnisa LLB., MH *	Dr. H. Oni Sahroni MA	*Member*
Anggota	--	Drs. H. Sholahudin Al Aiyub, M.Si	*Member*

*) Efektif pengangkatan setelah mendapat persetujuan *Fit and Proper Test* dari OJK.

*) *Effective after passing the fit and proper test by the Financial Services Authority.*

Susunan Komite Audit Bank pada tanggal 31 Desember 2019 ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan No.032/B/DIR-KPTS/XII/2019 tanggal 5 Desember 2019, sedangkan 31 Desember 2018 ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan No.003/B/DIR-KPTS/II/2018 tanggal 1 Pebruari 2018 adalah sebagai berikut:

The composition of the Bank's Audit Committee as of December 31, 2019 based on Decision Letter No.032/B/DIR-KPTS/XII/2019 dated December 5, 2019 and as of December 31, 2018, based on Decision Letter No.003/B/DIR-KPTS/II/2018 dated February 1, 2018, is as follows:

	31 Desember / *December 31,* 2019	**31 Desember / *December 31,* 2018**	
Ketua	Iggi Haruman Achsien	Iggi Haruman Achsien	*Chairman*
Anggota	Tindomora Siregar	Achmad Arifin	*Member*
Anggota	Dwi Sasongko	Herbudhi S. Tomo	*Member*

Kepala Divisi Internal Audit Bank pada tanggal 31 Desember 2019 adalah Ridwan Moenzir sesuai Surat Keputusan Direksi Bank No.001/DIR/KPTS/I/2019 tanggal 31 Januari 2019, sedangkan 31 Desember 2018 adalah Tindomora Siregar sesuai Surat Keputusan Direksi Bank No.321/DIR/KPTS/VIII/2015 tanggal 3 Agustus 2015.

The Bank's Head of Internal Audit Division as of December 31, 2019 is Ridwan Moenzir in accordance with the Decision Letter of the Directors of the Bank No.001/DIR/KPTS/I/2019 dated January 31, 2019, and as of December 31, 2018 is Tindomora Siregar based on the Decision Letter of the Directors of the Bank No.321/DIR/KPTS/VIII/2015 dated August 3, 2015.

1. UMUM (Lanjutan)

b. Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit dan Karyawan (lanjutan)

Sekretaris Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah Hayunaji sesuai Surat Keputusan Direksi No. 218/HCE/PKWTT/IX/2018 tanggal 6 September 2018.

Gaji dan kompensasi lainnya yang dibayarkan kepada Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah dan Komite Audit untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 dijelaskan pada catatan 34.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, Bank masing-masing memiliki 4.742 orang (3.181 karyawan tetap, 79 karyawan kontrak dan 1.482 tenaga kerja borongan) dan 5.693 orang (3.937 karyawan tetap, 160 karyawan kontrak dan 1.596 tenaga kerja borongan) (tidak diaudit).

c. Penawaran Umum Saham, Obligasi Syariah I Subordinasi dan Sukuk Subordinasi *Mudharabah*

Penawaran Umum Saham

Pada tahun 1993, Bank melakukan Penawaran Umum saham sejumlah 2.489.090 saham dengan nilai nominal Rp1.000 (dalam nilai penuh) per saham. Bank telah mendapatkan surat pernyataan efektif sebagai perusahaan publik melalui surat ketua Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) dengan No.S-1860/PM/1993 tanggal 28 Oktober 1993.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Bank yang tercantum dalam akta Notaris Yudo Paripurno, S.H., No. 45, tanggal 22 Juni 1998, para pemegang saham telah menyetujui untuk menerbitkan saham baru Seri B sebanyak 172.504.936 saham dengan harga penawaran Rp1.025 (dalam nilai penuh) per saham, melalui Penawaran Umum Terbatas I dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu *(Rights Issue)*. Penawaran Umum Terbatas I dengan Hak memesan Efek Terlebih Dahulu ini telah dinyatakan efektif oleh Ketua BAPEPAM dengan suratnya No.S-1265/PM/98 pada tanggal 19 Juni 1998.

1. GENERAL (Continued)

b. Board of Commissioners, Board of Directors, Sharia Supervisory Board, Audit Committee and Employees (continued)

The Bank's Corporate Secretary as of December 31, 2019 and 2018 is Hayunaji based on the Decision Letter of the Directors of the Bank No.218/HCE/PKWTT/IX/2018 dated September 6, 2018.

Salaries and other compensation paid to the Board of Commissioners, Board of Directors, Sharia Supervisory Board and Audit Committee for the years ended December 31, 2019 and 2018 are described in note 34.

As of December 31, 2019 and 2018, the Bank has 4,742 employees (3,181 permanent employees, 79 temporary employees and 1,482 contractual workers) and 5,693 employees (3,937 permanent employees, 160 temporary employees and 1,596 contractual workers), respectively (unaudited).

c. Bank's Public Offering of Shares, Subordinated Sharia I Bonds and Subordinated Mudharabah Sukuk

Bank's Public Offering of Shares

In 1993, the Bank conducted an initial public offering of 2,489,090 shares with a par value of Rp1,000 (in full amount) per share. The Bank obtained the notice of effectivity for the initial public offering from the chairman of the Capital Market Supervisory Agency (BAPEPAM) under his letter No.S-1860/PM/1993 dated October 28, 1993.

Based on the Extraordinary General Meeting of Shareholders as stated in notarial deed No. 45 of Yudo Paripurno, S.H., dated June 22, 1998, the shareholders approved the issuance of 172,504,936 B Series shares at an offering price of Rp1,025 (in full amount) per share through Rights Issue I with preemptive rights. The Bank obtained the notice of effectivity for the rights issue from the Chairman of the Capital Market Supervisory Agency (BAPEPAM) under his letter No.S-1265/PM/98 dated June 19, 1998.

1. UMUM (Lanjutan)

c. Penawaran Umum Saham, Obligasi Syariah I Subordinasi dan Sukuk Subordinasi *Mudharabah* (lanjutan)

Penawaran Umum Saham (lanjutan)

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang tercantum dalam akta Notaris Yudo Paripurno, S.H., No. 28 tanggal 29 Oktober 2002, para pemegang saham menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh melalui Penawaran Umum Terbatas (PUT) II saham Seri C sebanyak-banyaknya 276.975.502 saham, senilai Rp138.487.781 melalui proses Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu *(Rights Issue)* II.

Jumlah saham Seri C yang terjual melalui PUT II ini sebesar 208.727.863 lembar saham dengan harga saham Rp500 (dalam nilai penuh).

Sehubungan dengan peningkatan modal disetor tersebut, anggaran dasar pasal 4 telah diubah seperti dinyatakan dalam akta Notaris Yudo Paripurno, S.H., No. 19 tanggal 21 Mei 2003. Penawaran Umum Terbatas II dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu telah dinyatakan efektif oleh Ketua BAPEPAM dengan suratnya No. S-24668/PM/2002 tanggal 15 November 2002.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang tercantum dalam akta notaris Arry Supratno, S.H., No. 237 tanggal 28 April 2005, para pemegang saham menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh melalui Penawaran Umum Terbatas III (PUT III) dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu atas Saham Seri C dengan nilai nominal Rp500 (dalam Rupiah penuh) per lembar saham dan dengan harga penawaran Rp800 (dalam nilai penuh) per lembar saham serta dengan jumlah sebanyak banyaknya 498.743.597 lembar saham. Sehubungan dengan penambahan Saham Seri C ini, pemegang saham menyetujui perubahan ayat 4 dari anggaran dasar Bank yang berkaitan dengan peningkatan jumlah modal dasar dari Rp1.000.000.000 menjadi Rp2.000.000.000 yang kemudian diperbaiki menjadi Rp1.950.000.000 berdasarkan akta notaris Arry Supratno S.H., No. 150 tanggal 27 September 2005. Penawaran Umum Terbatas III dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu telah dinyatakan efektif oleh Ketua BAPEPAM dengan suratnya No.S-863/PM/2005 tanggal 26 April 2005.

1. GENERAL (Continued)

c. Bank's Public Offering of Shares, Subordinated Sharia I Bonds and Subordinated Mudharabah Sukuk (continued)

Bank's Public Offering of Shares (continued)

Based on the Extraordinary General Meeting of Shareholders as stated in notarial deed No. 28 of Yudo Paripurno, S.H., dated October 29, 2002, the shareholders approved the increase of issued and paid-in capital through the issuance of up to a maximum of 276,975,502 C Series shares amounting to Rp138,487,781 through Limited Public Offering with pre-emptive rights (Rights Issue) II.

The shareholders exercised their rights to acquire additional 208,727,863 C Series shares with par value of Rp500 (in full amount) per share during the Rights Issue II.

As a result of the increase in the paid-in capital, article 4 of the articles of association was amended, as stated in notarial deed No. 19 dated May 21, 2003 of Yudo Paripurno, S.H. The Bank obtained the notice of effectivity for the Limited Public Offering with pre-emptive rights (Rights Issue) II from the Chairman of the Capital Market Supervisory Agency (BAPEPAM) under his letter No. S-24668/PM/2002 dated November 15, 2002.

Based on the Extraordinary General Meeting of Shareholders as stated in notarial deed No. 237 dated April 28, 2005 of Arry Supratno, S.H., the shareholders approved the increase of issued and paid-in capital through the issuance of C Series shares through Limited Public Offering with pre-emptive rights III (Rights Issue III) up to a maximum of 498,743,597 shares with par value of Rp500 (in full amount) per share and offering price of Rp800 (in full amount) per share. Consequently, the shareholders agreed to amend article 4 of the Bank's articles of Association, concerning authorized share capital from Rp1,000,000,000 to Rp2,000,000,000, which was subsequently revised to Rp1,950,000,000 under notarial deed No.150 dated September 27, 2005 of Arry Supratno, S.H. Limited Public Offering with pre-emptive rights (Right Issue) III has been declared effective by the Chairman of the Capital Market Supervisory Agency (BAPEPAM) under his letter No.S-863/PM/2005 dated April 26, 2005.

1. UMUM (Lanjutan)

c. Penawaran Umum Saham, Obligasi Syariah I Subordinasi dan Sukuk Subordinasi *Mudharabah* (lanjutan)

Penawaran Umum Saham (lanjutan)

Jumlah Saham Seri C yang terjual melalui PUT III tersebut berjumlah 446.194.051 lembar saham dengan rincian 97.093.489 lembar saham kepada pemegang saham lama dan 349.100.562 lembar saham kepada pembeli siaga. Penambahan modal yang diperoleh melalui PUT III tersebut berjumlah Rp223.097.025 serta tambahan modal disetor sejumlah Rp133.858.215.

Melalui Surat Bapepam-LK No. S-5807/BL/2010 tanggal 28 Juni 2010, Bank telah memperoleh pemberitahuan efektif pernyataan pendaftaran Penawaran Umum Terbatas IV dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebanyak 820.251.749 saham. Setiap pemegang saham yang memiliki saham biasa Seri C mendapatkan 1 (satu) hak untuk membeli 1 (satu) saham biasa Seri C dengan nilai nominal Rp500 per saham (dalam nilai penuh) dengan harga pelaksanaan Rp1.161 per saham (dalam nilai penuh). Penambahan modal yang diperoleh dari PUT IV tersebut berjumlah Rp673.093.004 serta tambahan modal disetor saham berjumlah Rp383.216.603.

Pada tanggal 7 November 2013, Bank memperoleh pernyataan efektif dari Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan dengan suratnya No.S-358/D.04/2013 untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas (PUT V) Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanyak 2.815.917.885 saham. Setiap pemegang saham yang memiliki 4 (empat) saham biasa seri B mendapatkan 1 (satu) hak untuk membeli 1 (satu) saham biasa seri B dengan nilai nominal Rp100 per saham (dalam nilai penuh) dengan harga pelaksanaan Rp480 per saham (dalam nilai penuh). Penambah modal yang diperoleh dari PUT V tersebut berjumlah Rp281.591.788 serta tambahan modal disetorkan berjumlah Rp1.065.194.096.

Bank tidak mencatatkan sahamnya pada Bursa Efek Indonesia.

1. GENERAL (Continued)

c. Bank's Public Offering of Shares, Subordinated Sharia I Bonds and Subordinated Mudharabah Sukuk (continued)

Bank's Public Offering of Shares (continued)

The total amount of C Series shares issued in Rights Issue III was 446,194,051 shares, of which 97,093,489 shares were purchased by existing shareholders and 349,100,562 shares were purchased by standby buyers. The total additional share capital gained from Rights Issue III amounted to Rp223,097,025 and additional paid-in capital amounted to Rp133,858,215.

Under Letter No. S-5807/BL/2010 dated June 28, 2010 of Bapepam-LK, the Bank obtained the notice of effectivity for the Limited Offering of 820,251,749 shares with pre-emptive rights, through Rights Issue IV. Every holder of C series shares shall receive 1 (one) right to purchase 1 (one) new C Series share with par value of Rp500 per share (in full amount) at the exercise price of Rp1,161 per share (in full amount). Additional share capital gained from Rights Issue IV amounted to Rp673,093,004 and additional paid in capital amounted to Rp383,216,603.

On November 7, 2013, the Bank obtained the notice of effectivity from the Board of Commissioner of Financial Services Authority in their letter No. S-358/D.04/2013 for its Limited Public Offering (Rights Issue V) of 2,815,917,885 shares with pre-emptive rights to shareholders. Every holder of 4 (four) B series shares shall receive 1 (one) right to purchase 1 (one) new B series share with par value of Rp100 per share (in full amount) at the exercise price of Rp480 per share (in full amount). Additional share capital gained from Rights Issue V amounted to Rp281,591,788 and additional paid in capital amounted to Rp1,065,194,096.

The Bank has not listed its shares in the Indonesia Stock Exchange.

1. UMUM (Lanjutan)

c. Penawaran Umum Saham, Obligasi Syariah I Subordinasi dan Sukuk Subordinasi *Mudharabah* (lanjutan)

Penawaran Umum Sukuk Subordinasi *Mudharabah* Berkelanjutan I Bank Muamalat tahun 2012

Pada tanggal 22 Juni 2012, Bank memperoleh pernyataan efektif dari Ketua Bapepam-LK melalui surat No. S-7771/BL/2012 atas penawaran umum Sukuk Subordinasi *Mudharabah* Berkelanjutan I Tahap I kepada masyarakat dengan nilai nominal sebesar Rp800.000.000. Pembayaran pendapatan bagi hasil tahap I pertama kali dilakukan pada tanggal 29 September 2012, sedangkan pembayaran pendapatan bagi hasil terakhir akan dilakukan pada tanggal 29 Juni 2022, atau pada waktu lebih awal yaitu tanggal 29 Juni 2017 (ulang tahun ke-5 (lima) sejak tanggal penawaran) jika Bank melaksanakan opsi beli dengan memperhatikan ketentuan pelaksanaan opsi beli. Bank mencatatkan "Sukuk Subordinasi *Mudharabah* Berkelanjutan I Bank Muamalat" dengan jumlah dana sebesar Rp1.500.000.000 pada Bursa Efek sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek No.SP-021/BEI.PPS/04-2012 tanggal 12 April 2012 juncto Addendum Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek No.Ad-SP-012/BEI.PPS/06-2012 tanggal 15 Juni 2012, yang keduanya dibuat antara Bank dengan Bursa Efek Indonesia.

Penawaran Umum Sukuk Subordinasi *Mudharabah* Berkelanjutan I Bank Muamalat tahun 2013

Pada April 2013, Bank telah menerbitkan sukuk subordinasi *mudharabah* berkelanjutan I tahap II dengan nilai nominal sebesar Rp700.000.000. Pembayaran pendapatan bagi hasil tahap II pertama kali dilakukan pada tanggal 28 Juni 2013, sedangkan pembayaran pendapatan bagi hasil terakhir akan dilakukan pada tanggal 28 Maret 2023 atau pada waktu lebih awal yaitu tanggal 28 Maret 2018 jika Bank melaksanakan opsi beli dengan memperhatikan ketentuan pelaksanaan opsi beli. Pokok sukuk akan jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 28 Maret 2023 atau pada waktu lebih awal yaitu tanggal 28 Maret 2018 jika Bank melaksanakan opsi beli.

Masing-masing sukuk subordinasi *mudharabah* berkelanjutan I tahap I dan II telah dilunasi oleh Bank dengan melaksanakan opsi beli.

1. GENERAL (Continued)

c. Bank's Public Offering of Shares, Subordinated Sharia I Bonds and Subordinated Mudharabah Sukuk (continued)

Public Offering of Sustainable Subordinated Mudharabah Sukuk I of Bank Muamalat in 2012

On June 22, 2012, the Bank obtained a notice of effectivity from the Chairman of Bapepam-LK under his letter No.S-7771/BL/2012 on the public offering of Sustainable Subordinated Mudharabah Sukuk I Phase I with total par value of Rp800,000,000. The initial payment of phase I revenue sharing was made on September 29, 2012 and the last payment date will be on June 29, 2022 or on earlier date, on June 29, 2017 (the fifth anniversary since the issuance date), if the Bank decides to exercise its buy option under the agreement. The Bank to list the "Sustainable Subordinated Mudharabah Sukuk I of Bank Muamalat" with a total amount of Rp1,500,000,000 in the Stock Exchange in accordance with Preliminary Agreement for Securities Listing No. SP-021/BEI.PPS/04-2012 dated April 12, 2012 in conjunction with the Amendment to the Preliminary Agreement for Securities Listing No. Ad-SP-012/BEI.PPS/06-2012 dated June 15, 2012, where both agreements were entered into by the Bank and the Indonesia Stock Exchange.

Public Offering of Sustainable Subordinated Mudharabah Sukuk I of Bank Muamalat in 2013

In April 2013, the Bank issued sustainable subordinated mudharabah sukuk I phase II with total par value of Rp700,000,000. The initial profit sharing payment for phase II was made on June 28, 2013, and the last profit sharing will be paid on March 28, 2023 or on earlier date, on March 28, 2018, if the Bank exercised its call option under the agreement. Sukuk principal will mature and be repaid on March 28, 2023 or on earlier date, on March 28, 2018, if the Bank exercised such purchase option.

Both sustainable subordinated mudharabah sukuk I phase I and II have been settled by the Bank by exercising its call option.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan disusun dan disajikan berdasarkan nilai historis, kecuali untuk beberapa akun yang dinilai menggunakan dasar pengukuran lain sebagaimana dijelaskan pada kebijakan akuntansi dari akun tersebut. Laporan keuangan disusun dengan dasar akrual, kecuali laporan arus kas dan laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil.

Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), yaitu PSAK No. 101 (Revisi 2016) "Penyajian Laporan Keuangan Syariah", PSAK No.102 (Revisi 2016) "Akuntansi *Murabahah*", PSAK No. 104 (Revisi 2016) "Akuntansi *Istishna*", PSAK No. 105 "Akuntansi *Mudharabah*", PSAK No. 106 "Akuntansi *Musyarakah*", PSAK No. 107 (Revisi 2016) "Akuntansi *Ijarah*", PSAK No. 110 (Revisi 2015) "Akuntansi Sukuk", dan PSAK No.111 "Akuntansi Wa'd", Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI Revisi 2013), Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Peraturan Bapepam-LK No.VIII.G.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik".

Berdasarkan PSAK No. 101 (Revisi 2016), laporan keuangan bank syariah terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut:

(i) Laporan posisi keuangan;
(ii) Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain;
(iii) Laporan perubahan ekuitas;
(iv) Laporan arus kas;
(v) Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil;
(vi) Laporan sumber dan penyaluran dana zakat;
(vii) Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan; dan
(viii) Catatan atas laporan keuangan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

a. Basis of Financial Statements Presentation

Statement of Compliance

The financial statements have been prepared on a historical cost basis, except for some accounts that were assessed using another measurement basis as explained in the accounting policies of the account. The financial statements have been prepared on accrual basis, except for statement of cash flows and statement of reconciliation of income and revenue sharing.

The financial statements have been prepared and presented in accordance with Statements of Financial Accounting Standard ("SFAS") No. 101 (Revised 2016), "Presentation of Sharia Financial Statements", SFAS No. 102 (Revised 2016) "Accounting for Murabahah", SFAS No. 104 (Revised 2016) "Accounting for Istishna", SFAS No. 105, "Accounting for Mudharabah", SFAS No. 106, "Accounting for Musyarakah", SFAS No. 107, (Revised 2016) "Accounting for Ijarah", SFAS No. 110 (Revised 2015), "Accounting for Sukuk", and SFAS No.111 "Accounting for Wa'd", Indonesia Sharia Banking Accounting Guidelines (PAPSI Revised 2013), Indonesian Financial Accounting Standards established by the Indonesian Institute of Accountants (IAI) and Regulation of Indonesian Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency (Bapepam-LK) No.VIII.G.7 Appendix of the decree of the Chairman of Bapepam-LK No. KEP-347/BL/2012 dated June 25, 2012 regarding the "Guidelines on Financial Statements Presentations and Disclosures for Issuers or Public Companies".

Based on SFAS No. 101 (Revised 2016), sharia bank financial statements consist of the following components:

(i) Statement of financial position;
(ii) Statement of profit or loss and other comprehensive income;
(iii) Statement of changes in equity;
(iv) Statement of cash flows;
(v) Statement of reconciliation of income and revenue sharing;
(vi) Statement of sources and distribution of zakat funds;
(vii) Statement of sources and uses of qardhul hasan funds; and
(viii) Notes to the financial statements.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan (lanjutan)

Pernyataan Kepatuhan (lanjutan)

Laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas merupakan laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial Bank sesuai dengan prinsip syariah.

Laporan arus kas disusun menggunakan metode langsung dan arus kas dikelompokkan atas dasar aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Kas dan setara kas terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan penempatan pada Bank lain yang jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal laporan, sepanjang tidak digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima serta tidak dibatasi penggunaannya.

Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil merupakan rekonsiliasi antara pendapatan Bank yang menggunakan dasar akrual dan pendapatan yang dibagihasilkan kepada pemilik dana yang menggunakan dasar kas.

Laporan sumber dan penyaluran zakat merupakan laporan yang menunjukkan sumber dana dan penyaluran dalam jangka waktu tertentu serta dana zakat yang belum disalurkan pada tanggal tertentu.

Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan merupakan laporan yang menunjukkan sumber dan penggunaan dana kebajikan selama jangka waktu tertentu dan saldo dana kebajikan pada tanggal tertentu.

Bank tidak secara langsung menjalankan fungsi pengelolaan dana zakat, *infaq* dan *shadaqah* dan dana kebajikan. Penyaluran dana zakat, *infaq* dan *shadaqah* dan dana kebajikan dikelola oleh Yayasan Baitul Maal Muamalat.

Mata uang penyajian dan fungsional yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan adalah mata uang Rupiah (Rp). Angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan kecuali, bila dinyatakan secara khusus, adalah dibulatkan dalam ribuan Rupiah.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

a. Basis of Financial Statements Presentation (continued)

Statement of Compliance (continued)

Statement of financial position, statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity and statement of cash flows are the financial statements reflecting the commercial bank activities based on sharia principles.

The statement of cash flows was prepared based on the direct method with cash flows classified into cash flows from operating, investing and financing activities. For the purpose of cash flows statement, cash and cash equivalents consist of cash, current accounts with Bank Indonesia, current accounts with other banks, placements with Bank Indonesia and placements with other banks with maturity within 3 (three) months since the date of the report, which are not pledged as collateral and not restricted.

The statement of reconciliation of income and revenue sharing shows reconciliation between the Bank's income which is prepared under accrual basis and revenue sharing to fund owner which is prepared under cash basis.

Statement of sources and distribution of zakat represents a statement showing the sources and the uses of zakat funds in a certain period and the undistributed funds on specific dates.

Statement of sources and uses of qardhul hasan funds represents a statement indicating the sources and uses of qardhul hasan funds for a period of time and qardhul hasan funds balance on a particular date.

The Bank is not directly involved in the management of zakat, infaq and shadaqah funds and qardhul hasan funds. The distribution of zakat, infaq and shadaqah funds and qardhul hasan funds is managed by Yayasan Baitul Maal Muamalat.

The presentation and functional currency used in the preparation of financial statements is the Indonesian Rupiah (Rp). The figures presented in the financial statements, unless otherwise stated, are rounded in thousands of Rupiah.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan (lanjutan)

Pernyataan Kepatuhan (lanjutan)

Pembukuan Bank, diselenggarakan dalam mata uang Rupiah, mata uang dari lingkungan ekonomi utama dimana Bank beroperasi. Transaksi selama tahun berjalan dalam mata uang asing dicatat dengan kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi. Pada tanggal posisi keuangan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing disesuaikan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu kurs Spot *Reuters* pada pukul 16:00 WIB (Waktu Indonesia Barat). Keuntungan atau kerugian kurs yang timbul dikreditkan atau dibebankan dalam laba rugi tahun yang bersangkutan.

Transaksi valuta asing pada bank Syariah (di luar jual beli bank *notes*) hanya dapat dilakukan untuk kepentingan nasabah dan tidak dibenarkan untuk tujuan spekulatif. Bank melakukan transaksi lindung nilai syariah baik transaksi lindung nilai syariah sederhana *('Aqd al Tahawwuth al-Basith)* yaitu transaksi lindung nilai dengan skema *forward agreement* yang diikuti dengan transaksi spot pada saat jatuh tempo, serta transaksi Lindung Nilai Kompleks *('Aqd al Tahawwuth al-Murakkab)* yaitu transaksi lindung nilai dengan skema berupa rangkaian transaksi spot dan *forward agreement* yang diikuti dengan transaksi spot pada saat jatuh tempo.

Lindung nilai syariah hanya meliputi lindung nilai tukar atas risiko nilai tukar dengan menggunakan mekanisme yang sesuai ketentuan syariah. Item yang di lindung nilai (hedge item) atas nilai tukar dapat berupa aset atau liabilitas yang diakui, komitmen pasti yang belum diakui, prakiraan transaksi yang kemungkinan besar akan terjadi, atau investasi neto pada kegiatan usaha luar negeri.

b. Transaksi Pihak-Pihak Berelasi

Bank melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagaimana yang didefinisikan dalam PSAK No. 7 (Penyesuaian 2010), "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi".

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

a. Basis of Financial Statements Presentation (continued)

Statement of Compliance (continued)

The books of accounts of the Bank are maintained in Indonesian Rupiah, the currency of the primary economic environment in which the Bank operates. Transactions during the year involving foreign currencies are recorded at the rates of exchange prevailing at the time the transactions are made. At financial position date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated into Indonesia Rupiah using exchange rate set by Bank Indonesia (Central Bank), that is Reuters Spot rate at 16:00 WIB (Western Indonesia Time). The resulting gains or losses are credited or charged to current operations.

The Sharia Bank is not allowed to enter into foreign currency transactions for speculative purposes except for foreign currency transactions for its customers. The Bank has no hedging transactions as of December 31, 2019 and 2018. Bank conducts sharia hedging transactions both simple sharia hedging transactions ('Aqd al Tahawwuth al-Basith), which is hedging transactions with a forward agreement scheme followed by spot transactions at maturity, and Complex Hedging transactions (' Aqd al Tahawwuth al -Murakkab), which is a hedging transaction with a scheme in the form of a series of spot transactions and forward agreements followed by spot transactions when they are due.

Sharia hedges only cover exchange rate hedges against exchange rate risks using a mechanism that complies with sharia principles. Hedge items can be in the form of assets or liabilities that are recognized, certain commitments that have not yet been recognized, forecasts of transactions that are likely to occur, or net investment in foreign business activities.

b. Transactions with Related Parties

Bank entered into transactions with parties which are defined as related parties in accordance with SFAS No. 7 (Adjustment 2010) regarding" Related Party Disclosure".

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

b. Transaksi Pihak-pihak Berelasi (lanjutan)

Suatu pihak dianggap pihak berelasi dengan Bank jika:

(1) langsung atau tidak langsung yang melalui satu atau lebih perantara, suatu pihak (i) mengendalikan, atau dikendalikan oleh, atau berada di bawah pengendalian bersama, dengan Bank; (ii) memiliki kepentingan dalam Bank yang memberikan pengaruh signifikan atas Bank; atau (iii) memiliki pengendalian bersama atas Bank;
(2) suatu pihak yang berada dalam kelompok usaha yang sama dengan Bank;
(3) suatu pihak adalah ventura bersama dimana Bank sebagai *venture*;
(4) suatu pihak adalah anggota dari personil dari manajemen kunci Bank;
(5) suatu pihak adalah anggota keluarga dekat dari individu yang diuraikan dalam butir (1) atau (4);
(6) suatu pihak adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama atau dipengaruhi signifikan oleh atau untuk pihak yang memiliki hak suara signifikan pada beberapa entitas, langsung maupun tidak langsung, yaitu individu seperti diuraikan dalam butir (4) atau (5); dan
(7) suatu pihak adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari Bank atau entitas yang terkait dengan Bank.

Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, dimana persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

Transaksi dengan pihak-pihak berelasi dilakukan dengan syarat dan kondisi yang sama dengan transaksi-transaksi dengan pihak ketiga. Transaksi yang dilakukan Bank telah memenuhi peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. IX.E.1 tentang "Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu", pada saat transaksi-transaksi tersebut dilakukan.

Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan dan rinciannya telah disajikan dalam Catatan 41 atas laporan keuangan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

b. Transactions with Related Parties (continued)

A party is considered as a related party of the Bank if:

(1) a party directly or indirectly through one or more intermediaries, (i) controls, or controlled by, or under common control with the Bank; (ii) has substantial importance in the Bank that gives significant influence to the Bank; or (iii) has joint control over the Bank;

(2) an entity is a member of the same group as the Bank;
(3) a party is a joint venture in which the Bank acts as a venturer;
(4) a party is a member of the key management personnel of the Bank;
(5) a party is a close family member of an individual as described in point (1) or (4);

(6) a party is an entity that is controlled, jointly controlled or significantly influenced by or have significant voting rights in several entities, directly or indirectly, which are individuals described in point (4) or (5); and

(7) a party is a post-employment benefit plan program for the employee benefit of either the Bank or its related party.

The transaction is carried out based on terms agreed by both parties, where by such requirements may differ from other transactions undertaken with non-related parties.

Transactions with related parties are conducted under terms and conditions that are similar to third party transactions. These transactions are in accordance with the regulation of Financial Services Authority (FSA) No. IX.E.1 regarding "Transaction with Affiliation and Certain Conflict of Interests" when the transactions are conducted.

All material transactions and balances with related parties are disclosed in the relevant notes to the financial statements and the details are presented in Note 41 to the financial statements.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

c. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Produktif dan Aset Non-Produktif

Aset produktif terdiri dari giro dan penempatan pada Bank Indonesia dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dan Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS), Surat Berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali, giro pada bank lain, penempatan pada bank lain, investasi pada surat berharga, piutang *murabahah*, piutang *ijarah*, piutang *istishna*, pinjaman *qardh*, pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, aset yang diperoleh untuk *ijarah*, serta komitmen dan kontinjensi yang memiliki risiko pembiayaan seperti bank garansi dan *letter of credit* (LC) yang tidak dapat dibatalkan dan *standby letter of credit*.

Aset non-produktif adalah aset Bank selain aset produktif yang memiliki potensi kerugian, antara lain dalam bentuk rekening antar kantor, agunan yang diambil alih dan *suspense accounts*.

Aset produktif atas piutang *murabahah* mengacu pada PSAK No. 102 (Revisi 2016) "Akuntansi *Murabahah*", piutang *Istishna* mengacu pada PSAK No. 104 (Revisi 2016) "Akuntansi *Istishna*", Piutang *Ijarah* mengacu pada PSAK No.107 (Revised 2016) "Akuntansi *Ijarah*", Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* mengacu pada PSAK No.105 : "Akuntansi *Mudharabah*", PSAK No. 106 : "Akuntansi *Musyarakah*" dan Investasi pada surat berharga mengacu pada PSAK 110 (Revisi 2015) "Akuntansi Sukuk" dan aset produktif atas giro dan penempatan pada Bank Indonesia, giro dan penempatan pada bank lain dan investasi pada surat berharga mengacu pada PAPSI 2013.

Bank mengevaluasi apakah terdapat bukti objektif bahwa aset keuangan mengalami penurunan nilai pada setiap tanggal laporan posisi keuangan.

Aset keuangan mengalami penurunan nilai jika bukti objektif menunjukkan bahwa peristiwa yang merugikan telah terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan dan peristiwa tersebut berdampak pada arus kas masa datang atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

c. Allowance for Impairment Losses on Earning and Non-Earning Assets

Earning assets consist of current accounts and placements with Bank Indonesia in the form of Bank Indonesia Sharia Certificates (SBIS) and Bank Indonesia Sharia Deposit Facilities (FASBIS), Securities purchased under agreement to resell, current accounts with other banks, placements with other banks, investments in marketable securities, murabahah receivables, ijarah receivables, istishna receivables, funds of qardh, mudharabah financing, musyarakah financing, assets acquired for ijarah, and commitments and contingencies which carry financing risk, such as bank guarantees, irrevocable letter of credit and standby letter of credit.

Non-earning assets are the Bank's assets other than the earning assets which have potential loss, consisting of inter-office accounts, foreclosed assets and suspense accounts.

Earning assets for murabahah receivables are in accordance with SFAS No. 102 (Revised 2016) "Accounting for Murabahah", Istishna receivables are in accordance with SFAS No. 104 (Revised 2016) "Accounting for Istishna", Ijarah receivables are in accordance with SFAS No. 107 (Revised 2016) "Accounting for Ijarah", Mudharabah and Musyarakah financing are in accordance with SFAS No. 105 "Accounting for Mudharabah", SFAS No.106 "Accounting for Musyarakah" and Investment in securities are in accordance with SFAS No.110 (Revised 2015) "Accounting for Sukuk" and earning assets for current accounts and placements with Bank Indonesia, current accounts and placements with other banks and investment in marketable securities are in accordance with PAPSI 2013.

The Bank assesses whether there is any objective evidence that a financial asset is impaired on each date of statement of financial position.

Financial assets are impaired when an objective evidence indicates that a loss event has occurred after the initial recognition of the asset and that the loss event has an impact on the future cash flows of the financial asset that can be estimated reliably.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

c. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Produktif dan Aset Non-Produktif (lanjutan)

Kriteria yang digunakan oleh Bank untuk menentukan bukti objektif dari penurunan nilai adalah sebagai berikut:

(1) kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam;
(2) pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau margin;
(3) pihak pemberi pinjaman, dengan alasan ekonomi atau hukum sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam, memberikan keringanan (konsesi) pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan tersebut;
(4) terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya;
(5) hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan; atau

(6) data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa datang dari kelompok aset keuangan sejak pengakuan awal aset dimaksud, meskipun penurunannya belum dapat diidentifikasi terhadap aset keuangan secara individual dalam kelompok aset tersebut, termasuk:
   a. memburuknya status pembayaran pihak peminjam dalam kelompok tersebut; dan
   b. kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan wanprestasi atas aset dalam kelompok tersebut.

Estimasi periode antara terjadinya peristiwa dan teridentifikasinya kerugian ditentukan oleh manajemen untuk setiap portofolio yang diidentifikasi. Pada umumnya, periode tersebut bervariasi antara 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan, untuk kasus tertentu diperlukan periode yang lebih lama.

Bank pertama kali menentukan apakah terdapat bukti objektif penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan, dan secara individual atau kolektif untuk aset keuangan yang tidak signifikan secara individual.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

c. Allowance for Impairment Losses on Earning and Non-Earning Assets (continued)

The criteria used by the Bank to determine objective evidence of impairment are as follows:

(1) significant financial difficulty of the issuer or obligor;
(2) any breach of contract, such as a default or delinquency in margin or principal payments;
(3) the lender, for economic or legal reasons relating to the debtor's financial difficulty, grants the debtor a concession that the lender would not otherwise consider;

(4) it becomes probable that the debtor will enter into bankruptcy or other financial reorganization;
(5) the disappearance of an active market of financial assets due to financial difficulties; or
(6) observable data indicating that there is a measurable decrease in the estimated future cash flows from a portfolio of financial assets since the initial recognition of those assets, although the decrease cannot yet be identified individually in the portfolio, including:

   a. adverse changes in the payment status of debtors in the portfolio; and
   b. national or local economic conditions that correlate with breach of contract of the assets in the portfolio.

The estimated period between the occurrence of an event and loss identification is determined by the management for each identified portfolio. In general, the period varies from 3 (three) months to 12 (twelve) months, in exceptional cases, longer periods are necessary.

The Bank first determines whether there is an objective evidence of impairment on financial assets that are individually significant and individually or collectively on financial assets that are not individually significant.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

c. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Produktif dan Aset Non-Produktif (lanjutan)

Jika Bank menentukan tidak terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, terlepas aset keuangan tersebut signifikan atau tidak, maka Bank memasukkan aset tersebut ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko pembiayaan yang serupa dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset keuangan yang penurunan nilainya dilakukan secara individual, dan untuk itu kerugian penurunan nilai telah diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

Bank menetapkan piutang *murabahah* yang harus dievaluasi penurunan nilainya secara individual, jika memenuhi salah satu kriteria di bawah ini:
1. Piutang *murabahah* yang secara individual memiliki nilai signifikan dan memiliki bukti objektif penurunan nilai;
2. Piutang *murabahah* yang direstrukturisasi yang secara individual memiliki nilai signifikan.

Berdasarkan kriteria di atas, Bank melakukan penilaian secara individual untuk piutang *murabahah* dengan plafond lebih besar atau sama dengan Rp25.000.000 dengan kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

Bank menetapkan piutang *murabahah* yang harus dievaluasi penurunan nilainya secara kolektif, jika memenuhi salah satu kriteria di bawah ini:
1. Piutang *murabahah* yang secara individual memiliki nilai signifikan namun tidak memiliki bukti objektif penurunan nilai;
2. Piutang *murabahah* yang secara individual memiliki nilai tidak signifikan;
3. Piutang *murabahah* yang direstrukturisasi yang secara individual memiliki nilai tidak signifikan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

c. Allowance for Impairment Losses on Earning and Non-Earning Assets (continued)

If the Bank determines that there is no objective evidence of impairment for an individually assessed financial asset, whether significant or not, it includes the asset in a group of financial assets with similar financing risk characteristics and collectively assess them for impairment. Financial assets that are individually assessed for impairment, and for which an impairment loss is or continues to be recognized is excluded in the collective assessment of impairment.

The Bank determines murabahah receivables to be evaluated for impairment through individual evaluation if one of the following criteria exists:

1. *Murabahah receivables which individually have significant value with objective evidence of impairment;*
2. *Restructured murabahah receivables which individually have significant value.*

Based on the above criteria, the Bank performs individual assessment for murabahah receivables with limit greater than or equal to Rp25,000,000 with collectibility classification of substandard, doubtful and loss as of December 31, 2019 and 2018.

The Bank determines murabahah receivables to be evaluated for impairment through collective evaluation if one of the following criteria exists:

1. *Murabahah receivables which individually have significant value but there is no objective evidence of impairment;*
2. *Murabahah receivables which individually have non significant value;*
3. *Restructured murabahah receivables which individually have non significant value.*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

c. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Produktif dan Aset Non-Produktif (lanjutan)

Untuk tujuan evaluasi penurunan nilai kolektif atas piutang dan pembiayaan yang diberikan, sebagaimana dimungkinkan dalam PSAK No. 102 (Revisi 2013), Surat Edaran Bank Indonesia No.15/26/DPbS tanggal 10 Juli 2013 dan Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.S-159/PB.13/2014 tertanggal 3 Desember 2014, perihal tanggapan atas usulan ASBISINDO, untuk penerapan pertama kali PSAK No. 102 (Revisi 2013) dan PAPSI 2013, Bank menerapkan ketentuan transisi penurunan nilai secara kolektif dengan menggunakan estimasi yang didasarkan pada ketentuan Bank Indonesia yang berlaku Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. Sesuai dengan PSAK 102 (Revisi 2013) dan Surat OJK tersebut, ketentuan transisi penurunan nilai atas aset keuangan secara kolektif berlaku mulai 1 Januari 2015.

Perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara kolektif dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko piutang yang sama dengan mempertimbangkan segmentasi piutang berdasarkan pengalaman kerugian masa lalu *(probability of default).*

Bank menggunakan metode *net flow rate* dan *migration analysis* yang merupakan suatu metode analisis statistik, untuk menilai cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang yang diberikan secara kolektif. Bank menggunakan data historis minimal 3 (tiga) tahun dalam menghitung *Probability of Default* (PD) dan *Loss of Given Default* (LGD).

Bank menggunakan nilai wajar agunan sebagai dasar arus kas masa datang apabila memenuhi salah satu kondisi berikut:
1. Piutang dan pembiayaan bersifat *collateral dependent*, yaitu jika pelunasan pembiayaan hanya bersumber dari agunan;
2. Pengambilalihan agunan kemungkinan besar terjadi dan didukung dengan perjanjian legal pengikatan agunan.

Kerugian penurunan nilai atas aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi diukur sebesar selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini estimasi arus kas masa datang yang didiskonto menggunakan tingkat margin efektif awal dari aset keuangan tersebut.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

c. Allowance for Impairment Losses on Earning and Non-Earning Assets (continued)

For the purpose of a collective evaluation of impairment on receivables and financing, as allowed under SFAS No. 102 (Revised 2013), the Bank Indonesia Circular Letter No.15/26/DPbS dated July 10, 2013 and Financial Services Authority (FSA) letter No. S-159/PB.13/2014 dated December 3, 2014, concerning respond to ASBISINDO proposal, for the first adoption of SFAS No. 102 (Revised 2013) and PAPSI 2013, the Bank applies the transition rule for collective impairment calculation based on the prevailing Bank Indonesia regulation on The Quality Rating of Assets of Commercial Banks Conducting Business Based on Sharia Principles. In accordance with SFAS No. 102 (revised 2013) and the aforementioned OJK Letter, the transition rule for collective impairment calculation is effective on January 1, 2015.

The calculation of allowance for impairment losses on financial assets which are evaluated collectively is grouped based on similar receivable risk characteristics and by taking into account the receivable segmentation on the basis of historical loss experience (probability of default).

The Bank uses net flow rate method and migration analysis which is a statistical analysis method to assess allowance for impairment losses on collective receivables. The Bank uses at least 3 (three) years historical data to compute the Probability of Default (PD) and Loss of Given Default (LGD).

The Bank uses the fair value of collateral as the basis for future cash flow if one of the following conditions is met:
1. *Claim and account receivables are collateral dependent, i.e. if the source of loans repayment is only from the collateral;*
2. *Takeover of collateral is most likely to occur and be supported by legally binding collateral agreement.*

Impairment losses on financial assets carried at amortized cost are measured as the difference between the carrying amount of the financial assets and present value of estimated future cash flows discounted at the financial assets original effective margin rate.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

c. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Produktif dan Aset Non-Produktif (lanjutan)

Kerugian yang terjadi diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan dicatat pada akun cadangan kerugian penurunan nilai sebagai pengurang terhadap aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi.

Penerimaan kembali atas aset keuangan yang diberikan yang telah dihapusbukukan, pada tahun berjalan dikreditkan dengan menyesuaikan akun cadangan kerugian penurunan nilai. Penerimaan kembali atas pinjaman yang diberikan yang telah dihapusbukukan pada tahun-tahun sebelumnya dicatat sebagai pendapatan operasional selain margin.

Terhadap aset produktif atas piutang *istishna*, pinjaman *qardh*, pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, aset yang diperoleh untuk *ijarah*, serta komitmen dan kontinjensi yang memiliki risiko pembiayaan seperti bank garansi dan *Letter of Credit* (LC), Bank menerapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.16/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang "Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah" yang berlaku efektif tanggal 1 Januari 2015 dan POJK No.12/POJK.03/2015 tanggal 21 Agustus 2015 tentang "Ketentuan Kehati-hatian dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah" yang berlaku sampai dengan 24 Agustus 2017.

Penilaian sebelum tanggal 1 Januari 2015 menggunakan PBI No.13/13/PBI/2011 tanggal 24 Maret 2011 tentang " Penilaian Kualitas Aktiva bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah".

Cadangan kerugian minimum yang harus dibentuk sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) adalah sebagai berikut:

1) Cadangan umum, sekurang-kurangnya sebesar 1% dari aset produktif yang digolongkan lancar, diluar giro dan penempatan pada Bank Indonesia, surat berharga yang diterbitkan pemerintah berdasarkan prinsip syariah dan aset produktif yang dijamin dengan agunan tunai.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

c. Allowance for Impairment Losses on Earning and Non-Earning Assets (continued)

Losses are recognized in statement of profit or loss and other comprehensive income and reflected in an allowance for impairment losses account against financial assets carried at amortized cost.

The recoveries of written-off financial assets in the current year are credited by adjusting the allowance for impairment losses accounts. Recoveries of written-off loans from previous years are recorded as operational income other than margin income.

Against earning assets for istishna receivables, funds of qardh, mudharabah financing, musyarakah financing, assets acquired for ijarah, and commitments and contingencies which carry financing risk, such as bank guarantees and Letter of Credit (LC), the Bank implements Regulation of the Financial Services Authority (POJK) No.16/POJK.03/2014 dated November 18, 2014 regarding "Asset Quality Ratings for Sharia Bank and Sharia Business Unit" which became effective on January 1, 2015 and POJK No.12/POJK.03/2015 dated August 21, 2015 on "Prudential Provisions in relation to the National Economic Stimulus for Sharia Bank and Sharia Business Unit" which is effective until August 24, 2017.

Assessment prior to January 1, 2015 is using PBI No.13/13/PBI/2011 dated March 24, 2011 regarding "Asset Quality Rating for Sharia Bank and Sharia Business Unit".

The minimum allowance to be provided in compliance with Financial Services Authority Regulation (POJK) is as follows:

1) General reserves shall be no less than 1% of total earning assets classified as current, excluding current accounts and placements with Bank Indonesia, and securities issued by the government based on sharia principles and part of earning assets guaranteed with cash collateral.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

c. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Produktif dan Aset Non-Produktif (lanjutan)

Cadangan kerugian minimum yang harus dibentuk sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) adalah sebagai berikut: (lanjutan)

2) Cadangan khusus, sekurang-kurangnya sebesar:
   a) 5% dari aset produktif yang digolongkan Dalam Perhatian Khusus setelah dikurangi nilai agunan;
   b) 15% dari aset produktif yang digolongkan Kurang Lancar setelah dikurangi nilai agunan;
   c) 50% dari aset produktif yang digolongkan Diragukan setelah dikurangi nilai agunan; dan
   d) 100% dari aset produktif yang digolongkan Macet setelah dikurangi nilai agunan.

Kriteria penilaian nilai agunan yang dapat dikurangkan dalam pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).

Kewajiban untuk membentuk penyisihan kerugian aset produktif untuk akad *Ijarah* maupun *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* adalah terhadap piutang *Ijarah* atas kewajiban pokok sewa yang tertunggak. Selain itu wajib dibentuk penyusutan/amortisasi atas aset *Ijarah* maupun *Ijarah Muntahiyah Bittamlik*.

Khusus untuk kualitas surat berharga dan penempatan pada bank ditetapkan menjadi 3 (tiga) golongan yaitu lancar, kurang lancar, dan macet. Sedangkan untuk kualitas penyertaan modal kualitasnya ditetapkan menjadi 4 (empat) golongan yaitu lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet.

Cadangan penyisihan penghapusan untuk komitmen dan kontinjensi yang dibentuk disajikan sebagai liabilitas di laporan posisi keuangan pada akun "Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi".

Apabila manajemen berpendapat bahwa suatu aset produktif sudah tidak dapat ditagih kembali, maka aset tersebut harus dihapusbukukan dengan cara saldo aset produktif dikurangkan dari penyisihan kerugian. Penerimaan kembali aset produktif yang telah dihapusbukukan dicatat sebagai penambahan penyisihan kerugian tahun berjalan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

c. Allowance for Impairment Losses on Earning and Non-Earning Assets (continued)

The minimum allowance to be provided in compliance with Financial Services Authority Regulation (POJK) is as follows: (continued)

2) Special reserves, shall be at least:
   a) 5% of earning assets classified as Special Mention after deducting the collateral value;
   b) 15% of earning assets classified as Substandard after deducting the collateral value;
   c) 50% of earning assets classified as Doubtful after deducting the collateral value; and
   d) 100% of earning assets classified as Loss after deducting the collateral value.

The criteria for assessment of the value of collateral that can be deducted in the calculation of allowance for impairment losses are based on Financial Services Authority Regulations (POJK).

The requirement to establish allowance for impairment losses for Ijarah and Ijarah Muntahiyah Bittamlik contracts are to Ijarah receivable on the principal obligation for overdue lease. Furthermore, it is required to depreciate/amortize the assets of Ijarah and Ijarah Muntahiyah Bittamlik.

For marketable securities and placements with other banks, the quality rating is classified into 3 (three) classifications: current, substandard, and loss. Quality rating of equity investment is determined into 4 (four) categories: current, substandard, doubtful and loss.

The allowance for impairment losses on commitments and contingencies is presented as a liability in the statement of financial position under "Estimated Losses on Commitments and Contingencies account".

If management believes that certain earning assets are not recoverable then those assets should be written off by deducting the balance of earning assets from their respective allowances. Recoveries of earning assets that have been written off are recorded as additional allowance for impairment losses in the current year.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

c. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Produktif dan Aset Non-Produktif (lanjutan)

Aset non-produktif adalah aset Bank selain aset produktif yang memiliki potensi kerugian, antara lain dalam bentuk rekening antar kantor, agunan yang diambil alih dan *suspense accounts*.

AYDA adalah aset yang diperoleh Bank, baik melalui pelelangan atau di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal nasabah tidak memenuhi kewajibannya kepada Bank (catatan 2.r).

Bank wajib menggunakan nilai yang terendah apabila terdapat beberapa nilai dari penilai independen atau penilai internal Bank.

AYDA yang telah dilakukan upaya penyelesaian, ditetapkan memiliki kualitas:
a) Lancar, apabila dimiliki sampai dengan 1 (satu) tahun;
b) Macet, apabila dimiliki lebih dari 1 (satu) tahun.

Rekening Antar Kantor adalah akun tagihan yang timbul dari transaksi antar kantor yang belum diselesaikan dalam jangka waktu tertentu.

Suspense account adalah akun yang digunakan untuk menampung transaksi yang tidak teridentifikasi atau tidak didukung dengan dokumen pencatatan yang memadai sehingga tidak dapat diklasifikasikan dalam akun yang seharusnya.

Bank wajib melakukan upaya penyelesaian rekening antar kantor dan *suspense account*.

Kualitas rekening antar kantor dan *suspense account* ditetapkan sebagai berikut:
1) Lancar, apabila tercatat dalam pembukuan Bank sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari.
2) Macet, apabila tercatat dalam pembukuan Bank lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

c. Allowance for Impairment Losses on Earning and Non-Earning Assets (continued)

Non-earning assets are the Bank's assets other than the earning assets which have potential loss, consisting of inter-office accounts, foreclosed assets and suspense accounts.

Foreclosed asset is an asset acquired through auction or over the counter based on voluntary submission by collateral owner or based on the power of attorney to sell over the counter from collateral owner in the event of customer's failure in meeting his liabilities to the Bank (note 2.r).

The Bank is required to use the lowest price if there are several values proposed by the independent or internal appraiser.

The quality of foreclosed assets in settlement process is determined as follows:
a) Current, if acquired within 1 (one) year;

b) Loss, if acquired more than 1 (one) year.

Inter-branch account is the claims arising from inter-branch transactions that are unsettled after a certain period of time.

Suspense account is an account containing unidentified transactions or transactions which are unable to be classified to the proper account due to the lack of adequate supporting documents.

The Bank is required to settle its inter-branch account and suspense account.

The quality of inter branch account and suspense account is determined as follows:
1) Current, if the transaction has been recorded in the Bank's book up to 180 (one hundred and eighty) days.
2) Loss, if the transaction has been recorded in the Bank's book over 180 (one hundred and eighty) days.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

d. Giro dan Penempatan pada Bank Indonesia

Giro dan penempatan pada Bank Indonesia terdiri dari giro *wadiah* pada Bank Indonesia dan penanaman dana pada Bank Indonesia berupa Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS) dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS).

FASBIS dan SBIS merupakan sertifikat yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai bukti penitipan dana berjangka pendek dengan prinsip masing-masing adalah *wadiah* dan *jualah*. Giro dan penempatan pada Bank Indonesia disajikan sebesar saldo penempatan.

e. Giro pada Bank Lain

Giro pada bank lain dinyatakan sebesar saldo giro dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai. Bonus yang diterima Bank dari bank umum syariah diakui sebagai pendapatan usaha lainnya. Penerimaan jasa giro dari bank non-syariah tidak diakui sebagai pendapatan Bank dan digunakan untuk dana kebajikan (*qardhul hasan*). Penerimaan jasa giro dari bank non-syariah tersebut sebelum disalurkan dicatat sebagai liabilitas Bank.

f. Penempatan Pada Bank Lain

Penempatan pada bank lain adalah penanaman dana Bank pada bank lainnya yang beroperasi dengan menggunakan prinsip syariah berupa deposito berjangka *mudharabah* dan/atau bentuk penempatan lainnya berdasarkan prinsip syariah.

Penempatan pada bank lain dinyatakan sebesar saldo penempatan dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

Investasi *wakalah* merupakan perjanjian investasi berbasis *wakalah* dimana Bank akan mendapatkan tingkat keuntungan berupa laba diantisipasi. Dana yang diberikan Bank kemudian diinvestasikan pada produk yang halal. Hasil diberikan kepada Bank sebesar laba aktual jika hasil investasi berupa laba aktual lebih kecil dari laba diantisipasi. Jika hasil investasi berupa laba aktual lebih besar dari laba diantisipasi maka yang diterima Bank adalah sebesar laba diantisipasi dan selisihnya akan menjadi pendapatan Bank.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

d. Current Accounts and Placements with Bank Indonesia

Current accounts and placements with Bank Indonesia consist of wadiah current accounts with Bank Indonesia and placements of funds with Bank Indonesia in the form of Bank Indonesia Sharia Deposit Facilities (FASBIS) and Bank Indonesia Sharia Certificates (SBIS).

FASBIS and SBIS are certificates issued by Bank Indonesia as a proof of short term fund deposits under wadiah and jualah principles, respectively. Current accounts and placements with Bank Indonesia are stated at their outstanding balances of placements.

e. Current Accounts with Other Banks

Current accounts with other banks are stated at their outstanding balances net of allowance for impairment losses. Bonuses received by the Bank from commercial banks based on sharia principles are recognized as other operating income. Proceeds of interest on current accounts from non-sharia banks are not recognized as the Bank's income but are recorded as part of the qardhul hasan fund. The proceeds of interest on current accounts from non-sharia banks will be recorded as the Bank's liabilities before distributed.

f. Placement with Other Banks

Placements with other banks represent placements in the form of Mudharabah time deposits and/ or other forms of placement based on sharia principles.

Placements with other banks are stated at their outstanding balance net of allowance for impairment losses.

Wakalah investment is placed fund based on wakalah that the Bank will receive return in the form of anticipated profit. Funds given by the Bank will be invested in sharia products. Return distributed to the bank is based on actual profit if the return from investment was lower than the anticipated profit. If return from investment were higher than the anticipated profit, the investee will receive an amount based on anticipated profit whilst the difference will be recognized as income of the Bank.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

g. Investasi pada Surat Berharga

Surat berharga syariah adalah surat bukti penanaman dalam surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang lazim diperdagangkan di pasar uang syariah dan/atau pasar modal syariah, antara lain obligasi syariah (sukuk), *sukuk trust certificate* (STC) dan sertifikat reksadana syariah.

Pada saat pengakuan awal, entitas menentukan klasifikasi investasi pada sukuk sebagai diukur pada biaya perolehan atau diukur pada nilai wajar.

Investasi pada surat berharga, kecuali Reksadana, diklasifikasikan berdasarkan model usaha yang ditentukan oleh Bank berdasarkan klasifikasi sesuai PSAK No.110 (Revisi 2015) tentang "Akuntansi Sukuk" sebagai berikut:

1) Diukur pada biaya perolehan. Investasi diklasifikasikan sebagai diukur pada biaya perolehan jika: (a) investasi tersebut dimiliki dalam suatu model usaha yang bertujuan utama untuk memperoleh arus kas kontraktual; dan (b) biaya perolehan sukuk termasuk biaya transaksi; (c) selisih antara biaya perolehan dan nilai nominal diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk; (d) rugi penurunan nilai diakui jika jumlah terpulihkan lebih kecil dari jumlah tercatat dan disajikan sebagai penurunan nilai di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

2) Diukur pada nilai wajar

   2.a. Investasi diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (FVTOCI), jika :

      2.a.1. investasi tersebut dimiliki dalam suatu model usaha yang bertujuan utama untuk memperoleh arus kas kontraktual dan melakukan penjualan sukuk;

      2.a.2. persyaratan kontraktual menentukan tanggal tertentu pembayaran pokok dan/atau hasilnya;

      2.a.3. biaya perolehan sukuk termasuk biaya transaksi;

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

g. Investments in Marketable Securities

Sharia marketable securities are proof of investments under sharia principles commonly traded in sharia money market and/or sharia stock exchange, such as sharia bonds (sukuk), sukuk trust certificate (STC) and sharia mutual funds certificates.

At initial recognition, the entity determines the classification of investments in sukuk as measured at cost or at fair value measured.

Investment in securities, except for mutual fund, is classified by business model which is determined by the Bank based on SFAS No. 110 (revised 2015) regarding " Accounting for Sukuk" as follows:

1) Measured at acquisition cost. Investments are classified as measured at cost if: (a) the investment is held within a business model with the primary objective of obtaining contractual cash flows; and (b) the cost of sukuk includes transaction costs; (c) the difference between its acquisition cost and the nominal value is amortized using straight line method over the sukuk time period; (d) an impairment loss is recognized if the recoverable amount is less than the carrying amount and is presented as impairment in the statements of profit or loss and other comprehensive income.

2) Measured at fair value.

   2.a. Investments are measured at fair value through other comprehensive income (FVTOCI), if:

      2.a.1. the investment is held within a business model with the primary objective of obtaining contractual cash flows and selling sukuk;

      2.a.2. contractual terms specify a specific date of principal and/or result payments.

      2.a.3. the cost of sukuk includes transaction costs;

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

g. Investasi pada Surat Berharga (lanjutan)

2) Diukur pada nilai wajar (lanjutan)

2.a. Investasi diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (FVTOCI), jika : (lanjutan)

2.a.4 selisih antara biaya perolehan dan nilai nominal diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk, dan diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain;

2.a.5. Keuntungan dan kerugian dari perubahan nilai wajar diakui dalam penghasilan komprehensif lain setelah memperhitungan saldo biaya perolehan dan nilai nominal yang belum diamortisasi dan saldo akumulasi keuntungan atau kerugian nilai wajar yang telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain sebelumnya; dan

2.a.6. Rugi penurunan nilai diakui jika jumlah terpulihkan lebih kecil dari jumlah tercatat dan disajikan sebagai penurunan nilai di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

2.b. Investasi diukur pada nilai Wajar melalui Laba Rugi (FVTPL)

2.b.1. Investasi tersebut dimiliki dalam suatu model usaha yang bertujuan utama untuk memperoleh keuntungan penjualan;

2.b.2. Biaya perolehan sukuk termasuk biaya transaksi;

2.b.3 Selisih nilai antara nilai wajar dan jumlah tercatat diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain;

2.b.4 Perubahan nilai wajar diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain; dan

2.b.5 Rugi penurunan nilai diakui jika jumlah terpulihkan lebih kecil dari jumlah tercatat dan disajikan sebagai penurunan nilai di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

g. Investments in Marketable Securities (continued)

2) Measured at fair value (continued)

2.a. Investments are measured at fair value through other comprehensive income (FVTOCI), if: (continued)

2.a.4. the difference between its acquisition cost and the nominal value is amortized using straight line method over the sukuk time period, and is recognized in the statements of profit or loss and other comprehensive income;

2.a.5. Gain and loss from changes in fair value is recognized in other comprehensive income net of unamortized balance of acquisition cost and nominal value and the balance of accumulated fair value of profit or loss recognized in the previous other comprehensive income; and

2.a.6 An impairment loss is recognized if the recoverable amount is less than the carrying amount and is presented as impairment in the statements of profit or loss and other comprehensive income.

2.b Investments are measured at fair value through Profit or Loss (FVTPL)

2.b.1. The investment is held within a business model with the primary objective of gaining sales profit;

2.b.2. The cost of sukuk includes transaction costs;

2.b.3. The difference between its fair value and carrying value is recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income;

2.b.4 The changes of fair value are recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income; and

2.b.5 An impairment loss is recognized if the recoverable amount is less than the carrying amount and is presented as impairment in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

g. Investasi pada Surat Berharga (lanjutan)

Investasi dalam unit penyertaan reksadana syariah dinyatakan sebesar nilai pasar sesuai nilai aset bersih dari reksadana pada tanggal laporan posisi keuangan.

Wesel ekspor merupakan transaksi yang timbul karena adanya pembayaran dimuka kepada pihak lain sehubungan dengan transaksi ekspor impor nasabah. Wesel ekspor dinyatakan sebesar saldonya.

h. Piutang

Piutang adalah tagihan yang timbul dari transaksi jual beli berdasarkan akad *murabahah* dan *istishna* serta tagihan pokok sewa yang tertunggak atas transaksi dengan akad *ijarah*.

Murabahah adalah akad jual beli antara nasabah dengan Bank, dimana Bank membiayai kebutuhan konsumsi, investasi dan modal kerja nasabah yang dijual dengan harga pokok ditambah dengan keuntungan yang diketahui dan disepakati bersama. Pembayaran atas pembiayaan ini dilakukan dengan cara mengangsur dalam jangka waktu yang ditentukan.

Piutang *murabahah* pada awalnya diukur pada nilai wajar ditambah/dikurangkan dengan pendapatan dan/biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan merupakan pendapatan dan/biaya tambahan untuk memperoleh aset keuangan tersebut dan setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode margin efektif dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

Istishna adalah akad penjualan antara *al-mustashni* (pembeli) dan *al-shani* (produsen yang juga bertindak sebagai penjual). Berdasarkan akad tersebut, pembeli menugasi produsen untuk membuat atau mengadakan *al-mashnu* (barang pesanan) sesuai spesifikasi yang diisyaratkan pembeli dan menjualnya dengan harga yang disepakati.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

g. Investments in Marketable Securities (continued)

Investments in sharia mutual funds are stated at market value based on net asset value of mutual funds on the date of the statement of financial position.

Export bills are transactions that occur due to advance payments to other parties in connection with export and import transactions of customers. Export bills are stated at their outstanding balance.

h. Receivables

Receivables represent claims arising from the sale and purchase transactions based on murabahah and istishna contract as well as overdue principal lease claims of transactions under ijarah contract.

Murabahah is a sale and purchase contract between the customer and Bank, whereby Bank finances the consumption, investment and working capital needs of the customer, sold at a principal price plus a certain margin that is mutually informed and agreed. Repayment on this financing is made in installments within a specified period.

Murabahah receivables are initially measured at fair value plus/minus directly attributable transaction cost and income that are additional income and/cost to obtain the respected financial assets, and after the initial recognition murabahah receivables are measured at amortized cost using the effective margin method less any allowance for impairment losses.

Istishna is a sale and purchase contract between al-mustashni (buyer) and al-shani (manufacturer also acting as the seller). Based on the contract, the buyer orders the manufacturer to produce or to supply al-mashnu (goods ordered) according to the specifications required by the buyer and to sell them at agreed price.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

h. Piutang (lanjutan)

Piutang *istishna* disajikan sebesar tagihan termin kepada pembeli akhir dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai. Margin *istishna* yang ditangguhkan disajikan sebagai pos lawan piutang *istishna*.

Piutang *ijarah* (porsi pokok sewa) merupakan akrual piutang sewa atas porsi pokok yang belum direalisasikan oleh nasabah dan; piutang pendapatan *ijarah* merupakan akrual piutang sewa atas bagian keuntungan (*ujroh*) transaksi *ijarah muntahiyah bittamlik* dari angsuran nasabah pada bulan berikutnya yang diakui secara proporsional.

Piutang pendapatan *ijarah* diakui pada saat jatuh tempo sebesar sewa porsi *ujroh* dan piutang *ijarah* sebesar sewa porsi pokok yang belum diterima dan disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu sebesar saldo piutang.

i. Pinjaman *Qardh*

Pinjaman *qardh* adalah penyaluran dana dengan akad *qardh*.

Akad *qardh* adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati.

Pinjaman *qardh* meliputi pembiayaan dengan akad *hawalah*. Akad *hawalah* adalah akad pengalihan utang dari pihak yang berutang (nasabah) kepada pihak lain (Bank) yang wajib menanggung atau membayar. Atas transaksi ini Bank mendapatkan imbalan (*ujroh*) dan diakui sebagai pendapatan pada saat diterima.

Pinjaman *qardh* diakui sebesar jumlah dana yang dipinjamkan pada saat terjadinya. Kelebihan penerimaan dari pinjaman atas *qardh* yang dilunasi diakui sebagai pendapatan/*ujroh* pada saat terjadinya. Pada tanggal laporan posisi keuangan, pinjaman *qardh* dinyatakan sebesar saldo pinjaman dikurangi dengan saldo cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk berdasarkan hasil penilaian oleh manajemen terhadap kualitas pembiayaan yang ada.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

h. Receivables (continued)

Istishna receivables are stated at the amount billed to final customer less allowance for impairment losses. Deferred istishna margin is presented as a contra account of istishna receivables.

Ijarah receivables are based on unrealized accrual rent income from principal portion and; Ijarah receivable represents portion of accrual rent income (ujroh) from the following month's installment of ijarah muntahiyah bittamlik which is recognized proportionally.

Ijarah income receivables are recognized at maturity in the amount of ujroh portion of rent and ijarah receivables are recognized at accrued principal portion of rent and presented at the net realizable value, which is equal to the balance of the receivables.

i. Funds of Qardh

Funds of qardh represent a distribution of funds under qardh agreement.

Qardh agreement is a borrowing agreement with the condition that the borrower should repay the financing at a specified period of time.

Funds of qardh include hawalah financing agreement. Hawalah is transfer of debts from debtors (customer) to another party (Bank) which is obligated to assume the liability or to pay. The Bank will obtain a fee (ujroh) from this transaction, which is recognized as income when received.

Qardh receivables are recognized at the same amount of funds lent when incurred. Any excess amount paid by the borrower in repaying a qardh is recognized as revenue/ujroh when incurred. On the date of the statement of financial position, fund of qardh is stated at the outstanding financing balance less allowance for impairment losses which is provided based on the management's review of the financing quality.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

j. Pembiayaan

Mudharabah merupakan pembiayaan kerjasama antara Bank sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dengan nasabah sebagai pelaksana usaha (*mudharib*) selama jangka waktu tertentu. Pembagian hasil keuntungan dari proyek atau usaha tersebut ditentukan sesuai dengan *nisbah (pre-determined ratio)* yang telah disepakati bersama. Pada tanggal laporan posisi keuangan, pembiayaan *mudharabah* dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan saldo cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk berdasarkan hasil penilaian oleh manajemen terhadap kualitas pembiayaan yang ada.

Musyarakah adalah akad kerjasama yang terjadi diantara para pemilik modal untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan dengan *nisbah* pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal. Pada tanggal laporan posisi keuangan, pembiayaan *musyarakah* dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan saldo cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk berdasarkan hasil penilaian oleh manajemen terhadap kualitas pembiayaan yang ada. Bank telah melakukan penjualan atas KPR kepada pihak ketiga. Atas penjualan tersebut, Bank telah memindahkan risiko dan manfaat atas kepemilikan KPR kepada pihak lawan. Oleh karena itu, pada tanggal efektif penjualan, Bank menghentikan pengakuan atas KPR tersebut. Penjualan tersebut telah memenuhi kriteria jual putus seperti yang tertuang dalam PBI No.7/4/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005

k. Tagihan dan Liabilitas Akseptasi

Tagihan dan liabilitas akseptasi merupakan transaksi *Letter of Credit* (L/C) dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) yang diaksep oleh bank pengaksep (*accepting bank*).

Tagihan dan liabilitas akseptasi dinyatakan sebesar nilai *Letter of Credit* (L/C) dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN). Tagihan akseptasi disajikan setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

Tagihan akseptasi diklasifikasikan sebagai biaya perolehan diamortisasi. Liabilitas akseptasi diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

j. Financing

Mudharabah financing is a joint financing made between Bank as the owner of the funds (shahibul maal) and the customer as a business executor (mudharib) during a certain period. The profit sharing from the project or the business is determined in accordance with the mutually agreed nisbah (pre-determined ratio). On the date of the statement of financial position, mudharabah financing is stated at the outstanding financing balance less allowance for impairment losses which is provided based on the management's review of the financing quality.

Musyarakah is a partnership contract among funds owners to contribute funds and conduct a business on a joint venture basis in a partnership with the profit sharing based on a predetermined ratio, while the losses are borne proportionally based on the capital contribution. On the date of the statement of financial position, Musyarakah financing is stated at the outstanding financing balance less allowance for impairment losses which is provided based on the management's review on the financing quality. The Bank sold its KPR to third parties. In relation with the above mention sale, the Bank has transferred the risk and rewards of ownership of the KPR to counterparty. Hence, at the effective date of the sale, the Bank derecognized the KPR. The sale has fulfill the criteria of true sale according to Bank Indonesia regulation No. 7/4/PBI/2005 dated January 20, 2005.

k. Acceptance Receivables and Payables

Acceptance receivables and payables represent Letters of Credit and Domestic Letters of Credit transactions that have been accepted by the accepting bank.

Acceptance receivables and payables are stated at value of Letters of Credit and Domestic Letters of Credit. Acceptance receivables are stated net of allowance for impairment losses.

Acceptance receivables are classified as amortized costs. Acceptances payables are classified as financial liabilities at amortized cost.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

l. Surat-surat Berharga yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali dan Surat-surat Berharga yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali

Transaksi Repo dengan Bank Indonesia menggunakan akad Rahn dan Qardh serta Al Ba'i Al Wa'd. Surat-surat berharga yang dijual dengan janji untuk dibeli kembali pada pengakuan awal disajikan sebagai surat berharga Repo dengan mereverse surat berharga, dan menyajikan kewajiban Repo pada liabilitas sejumlah nilai yang disepakati atau harga pasar. Sebagai kewajiban sebesar harga beli kembali surat berharga tersebut. Surat berharga yang dijual dicatat sebagai surat berharga repo dalam laporan keuangan. Dengan mekanisme repo ini secara substansi risiko dan manfaat surat-surat berharga tetap berada pada pihak penjual.

Transaksi Reverse Repo dengan Bank Indonesia menggunakan akad yang sama dengan transaksi Repo. Surat-surat berharga yang dibeli dengan janji untuk dijual kembali pada pengakuan awalnya disajikan sebagai tagihan Reverse Repo sejumlah nilai transaksi yang disepakati atau harga pasar.

Transaksi Repo antar bank menggunakan akad *al Ba'i* disertai dengan *Wa'd* dimana surat-surat berharga dijual secara *Al Ba'i Al Haqiqi* atau jual beli putus sebesar harga beli kembali yang disepakati atau harga pasar dan disertai dengan janji membeli kembali (*Al Wa'd*), disajikan dengan mereverse surat berharga dan mencatat janji membeli kembali (*Al Wa'd*) pada off balance sheet sejumlah nilai transaksi Repo. Secara substansi risiko dan manfaat surat-surat berharga beralih ke pihak pembeli. Begitu juga halnya dengan transaksi Reverse Repo antar bank menggunakan mekanisme yang sama dengan transaksi Repo.

m. Penyertaan Saham

Penyertaan saham terutama merupakan penanaman dana dalam bentuk saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan yang tidak melalui pasar modal untuk tujuan investasi jangka panjang.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

l. Securities purchased/sold under resale/ repurchase agreements

Repo transactions with Bank Indonesia use Rahn and Qardh contracts, as well as Al Ba'i Al Wa'd. Marketable securities sold under repurchase agreement at initial recognition are presented as Repo securities by reverting securities, and presenting Repo liabilities to an agreed amount of liability or market price. As an liabilites of the purchase price of the securities. Marketable securities sold are recorded as repo securities in the financial statements. With this repo mechanism the risks and benefits of securities substantially remain with the seller.

Reverse Repo Transactions with Bank Indonesia use the same contract as Repo transactions. Marketable securities purchased with a promise to resell on initial recognition are presented as Reverse Repo bills at an agreed transaction value or market price.

Repo transactions between banks use the Al Ba'i contract accompanied with Wa'd where securities are sold in Al Ba'i Al Haqiqi transaction or an outright sale and purchase and accompanied with a repurchase agreement (Al Wa'd) at the agreed repurchase price or market price, presented by reversing the securities and recording the repurchase agreement (Al Wa'd) on the off balance sheet. Substantially, the risks and benefits of securities are transferred to the buyer. Reverse Repo transactions between banks using the same mechanism as Repo transactions

m. Investment in Shares

Investment in shares of stocks represents investment of funds in the form of shares of non public companies engaged in financing activities for long-term investment purposes.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

m. Penyertaan Saham (lanjutan)

Investasi Bank pada entitas asosiasi diukur dengan menggunakan metode ekuitas. Entitas asosiasi adalah suatu entitas dimana Bank mempunyai pengaruh signifikan atau kepemilikan saham lebih dari 20% hak suara. Pengakuan awal investasi pada entitas asosiasi diakui sebesar biaya perolehan, dan jumlah tercatat tersebut ditambah atau dikurangkan untuk mengakui bagian Bank atas laba rugi entitas asosiasi setelah tanggal perolehan. Bagian Bank atas laba rugi entitas asosiasi diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Penerimaan distribusi dari entitas anak mengurangi nilai tercatat investasi.

Penyertaan saham pada entitas dimana Bank tidak memiliki pengaruh yang signifikan dicatat sesuai dengan PSAK No. 55 (Revisi 2014).

Penyertaan modal sementara adalah penyertaan modal oleh Bank dalam perusahaan debitur untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.

Dividen kas yang diterima atas penyertaan saham diakui sebagai pendapatan.

n. Aset yang Diperoleh untuk *Ijarah*

Aset yang diperoleh untuk *ijarah* merupakan aset yang menjadi objek transaksi sewa (*ijarah*) dan dicatat di laporan posisi keuangan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Objek sewa dalam transaksi *ijarah* disusutkan sesuai kebijakan penyusutan aset sejenis, sedangkan objek sewa dalam *ijarah muntahiyah bittamlik* disusutkan sesuai masa sewa.

Ijarah muntahiyah bittamlik adalah sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa baik dengan jual beli atau pemberian (hibah) pada saat tertentu sesuai akad sewa.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

m. Investment in Shares (continued)

Bank's investments in its associate companies are measured using the equity method. An associated entity is an entity in which Bank has significant influence or share ownership of more than 20% of the voting rights. The initial recognition of investments in associates are recognized at cost and the carrying amount is added or subtracted to recognize the Bank's portion of profit or loss of associates after the acquisition date. Bank's portion of profit or loss of associates are recognized in statement of profit or loss and other comprehensive income. Receipt of distributions from subsidiaries reduce the carrying amount of the investment.

Investment in shares of stocks in which the Bank does not have any significant influence is stated based on SFAS No. 55 (Revised 2014).

Temporary investment in shares is capital participation by a Bank in a debtor company to overcome the consequences of financing failure as referred to in applicable Bank Indonesia regulations.

Cash dividends received from investment in shares of stocks are recognized as income.

n. Assets Acquired for Ijarah

Assets acquired for ijarah represent object of leased assets and are recorded in the statement of financial position at the acquisition cost, net of accumulated depreciation.

Leased object in ijarah transaction is depreciated based on the depreciation policy for similar assets, while leased object in ijarah muntahiyah bittamlik transaction is depreciated based on lease term.

Ijarah muntahiyah bittamlik is a lease transaction between the lessor and lessee to obtain fee from the object leased with the option of transferring the title through purchase or grant at a certain time in accordance with the lease agreement.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

n. Aset yang Diperoleh untuk *Ijarah* (lanjutan)

Perpindahan hak milik objek sewa kepada penyewa dalam *ijarah muntahiyah bittamlik* dapat dilakukan dengan cara:
(i) hibah;
(ii) penjualan sebelum akad berakhir sebesar harga yang sebanding dengan sisa cicilan sewa;
(iii) penjualan pada akhir sewa dengan pembayaran tertentu yang disepakati pada awal akad; dan
(iv) penjualan secara bertahap sebesar harga tertentu yang disepakati dalam akad.

o. Pinjaman yang diterima

Pinjaman diterima merupakan dana yang diterima dari pihak lain dengan liabilitas pembayaran kembali sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman.

Pinjaman diterima diakui sebesar biaya perolehan.

p. Aset Tetap

Bank menerapkan PSAK No. 16 (Revisi 2015), "Aset Tetap" dan ISAK No. 25, "Hak atas Tanah".

ISAK 25 menetapkan bahwa biaya pengurusan legal hak atas tanah dalam bentuk Hak Guna Usaha ("HGU"), Hak Guna Bangunan ("HGB") dan Hak Pakai ("HP") ketika tanah diperoleh pertama kali diakui sebagai bagian dari biaya perolehan tanah pada akun "Aset Tetap" dan tidak diamortisasi.

Aset tetap awalnya diakui sebesar biaya perolehan, yang terdiri atas harga perolehan dan biaya-biaya tambahan yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan supaya aset tersebut siap digunakan sesuai dengan maksud manajemen.

Efektif sejak tanggal 1 November 2014, Bank merubah kebijakan akuntansinya dari metode harga perolehan menjadi metode revaluasi. Bank melakukan penilaian kembali atas seluruh aset tetap yang dimiliki Bank dengan menggunakan jasa dari penilai independen eksternal yang telah terdaftar di OJK.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

n. Assets Acquired for Ijarah (continued)

The transfer of title of the leased object to the lessee in ijarah muntahiyah bittamlik can be conducted through:
(i) a grant;
(ii) sale prior to the end of agreement for an amount equivalent to the remaining lease installments;
(iii) sale prior to the end of the agreement at a specified amount as agreed at the inception of the agreement; and
(iv) installment sales at a specific price as agreed in the agreement.

o. Fund borrowings

Fund borrowings are funds received from other party with payment based on borrowings agreement.

Fund borrowings are recognized at cost.

p. Premises and Equipment

The Bank adopts SFAS No. 16 (Revised 2015), "Premises and Equipment" and IFAS No. 25, "Land Rights".

IFAS 25 prescribes that the legal costs of land rights in the form of Rights on Land for Commercial Use ("Hak Guna Usaha" or "HGU"), Rights on Land for Building (Hak Guna Bangunan or "HGB") and Rights to Use ("Hak Pakai" or "HP") when the land was initially acquired are recognized as part of the cost of the land under the "Premises and Equipment" account and are not amortized.

Premises and equipment are initially recognized at cost, which comprises its purchase price and any costs directly attributable to bringing the asset to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by the management.

Effectively on November 1, 2014, the Bank changed its accounting policy from cost method to revaluation method. The Bank revalued all of its existing premises and equipment using the services of external independent appraisal which is registered at FSA.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

p. Aset Tetap (lanjutan)

Metodologi penilaian yang digunakan Bank dalam metode revaluasi yaitu pendekatan data pasar (*market data approach*).

Kenaikan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi aset tetap dikreditkan pada "surplus revaluasi atas aset tetap" sebagai bagian dari penghasilan komprehensif lainnya. Penurunan yang menghapus nilai kenaikan yang sebelumnya atas aset yang sama dibebankan terhadap "surplus revaluasi atas aset tetap" sebagai bagian dari penghasilan komprehensif; penurunan lainnya dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Penyajian revaluasi aset tetap dilakukan melalui akumulasi penyusutan pada tanggal revaluasi dieliminasi terhadap nilai tercatat bruto aset dan nettonya disajikan kembali sebesar jumlah revaluasi aset. Nilai akumulasi depresiasi dan harga perolehan dinaikkan secara proporsional sehingga nilai bersih aset sama dengan nilai revaluasi.

Setiap periode pelaporan, selisih antara penyusutan berdasarkan nilai revaluasi aset yang diakui di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan penyusutan harga perolehan awal aset ditransfer dari "surplus revaluasi atas aset tetap" ke dalam "saldo laba".

Revaluasi aset tetap dilakukan setiap tahun atau memiliki keteraturan yang cukup reguler untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tidak berbeda secara material dengan jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajar pada akhir periode pelaporan, dan jika suatu aset tetap direvaluasi, maka seluruh aset tetap dalam kelas yang sama direvaluasi.

Aset tetap yang diperoleh dalam pertukaran aset non moneter atau kombinasi aset moneter dan non moneter diukur pada nilai wajar, kecuali:

(i) transaksi pertukaran tidak memiliki substansi komersial, atau
(ii) nilai wajar dari aset yang diterima dan diserahkan tidak dapat diukur secara andal.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

p. Premises and Equipment (continued)

Valuation method used is Market Data Approach.

Increases in the carrying amount arising from revaluation of premises and equipment are credited to "revaluation surplus on premises and equipment" as part of other comprehensive income. Decreases that offset previous increases of the same asset are debited against "revaluation surplus on premises and equipment" as part of other comprehensive income; all other decreases are charged to statement of profit or loss and other comprehensive income.

Presentation of revaluation of premises and equipment through accumulated depreciation at the date of revaluation is eliminated against the gross carrying value of premises and equipment, and the net is restated at the amount of revaluation of premises and equipment. The value of accumulated depreciation and acquisition price is increased proportionally so that the net value of premises and equipment is equal to the revaluation value.

In each reporting period the difference between depreciation based on the revalued carrying amount of the asset charged to statement of profit or loss and other comprehensive income and depreciation based on the asset's original cost is transferred from "revaluation surplus on premises and equipment" to "retained earnings".

The revaluation of premises and equipment is carried out in every years or has periodic regularity to ensure that the carrying amount is not different in material respect from the amount determined at fair value at the end of the reporting period, and in the event that premises and equipment is revaluated, all premises and equipment in the same class are revaluated.

Premises and equipment acquired in exchange for a non-monetary asset or for a combination of monetary and non-monetary assets are measured at fair values, unless:

(i) the exchange transaction lacks commercial substance, or
(ii) the fair value of neither the assets received nor the assets given up can be measured reliably.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

p. Aset Tetap (lanjutan)

Penyusutan aset tetap dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan sesuai maksud penggunaannya dan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi umur manfaat ekonomis sebagai berikut:

	Tahun/ *Years*	Tarif Penyusutan/ *Depreciation Rate*	
Bangunan	20	5%	*Buildings*
Kendaraan bermotor	5	20%	*Vehicles*
Inventaris kantor	5	20%	*Office equipments*
Komputer	5	20%	*Computers*
Perbaikan sarana dan prasarana	5	20%	*Leasehold improvement*

Masa manfaat ekonomis, nilai residu dan metode penyusutan dianalisa setiap akhir tahun dan pengaruh dari setiap perubahan estimasi tersebut berlaku prospektif.

Tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan dan tidak disusutkan.

Konstruksi dalam penyelesaian dicatat sebesar biaya perolehan, yang mencakup kapitalisasi beban pinjaman dan biaya-biaya lainnya yang terjadi sehubungan dengan pendanaan aset tetap dalam penyelesaian tersebut. Akumulasi biaya perolehan akan direklasifikasi ke akun "Aset Tetap" yang bersangkutan pada saat aset tetap tersebut telah selesai.

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada saat terjadinya. Biaya-biaya lain yang terjadi selanjutnya yang timbul untuk menambah, mengganti atau memperbaiki aset tetap dicatat sebagai biaya perolehan aset, jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.

Aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau yang dijual dikeluarkan dari kelompok aset tetap berikut akumulasi penyusutannya. Keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap tersebut dibukukan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

p. Premises and Equipment (continued)

Depreciation of premises and equipment starts when it is available for its intended use and is computed using the straight line method based on the estimated economic useful lives of the assets as follows:

The estimated useful lives, residual values and depreciation method are reviewed at the end of each year, with the effect of any changes in estimate accounted for on a prospective basis.

Land is stated at its amortized cost and is not depreciated.

Constructions in-progress are stated at cost, including capitalized borrowing costs and other charges incurred in connection with the financing of the said asset constructions. The accumulated costs will be reclassified to the appropriate "Premises and Equipment" account when the construction is completed.

The costs of maintenance and repairs are charged to statement of profit or loss and other comprehensive income as incurred. Other costs incurred subsequently to add to, replace part of, or service an item of premises and equipment are recognized as cost of assets if and only if it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the entity and the cost of the item can be measured reliably.

When assets are retired or otherwise disposed of, their carrying values and the related accumulated depreciation and any impairment loss are removed from the accounts and any resulting gain or loss is reflected in statement of profit or loss and other comprehensive income.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

q. Aset Sewa Pembiayaan

Aset sewa pembiayaan disajikan di laporan posisi keuangan tergabung dalam aset tetap. Penyusutan aset sewa pembiayaan sesuai dengan tarif penyusutan aset tetap.

Pembayaran sewa harus dipisahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan bagian yang merupakan pengurangan dari liabilitas sewa sehingga mencapai suatu tingkat bunga yang konstan (tetap) atas saldo liabilitas. Rental kontinjen dibebankan pada periode terjadinya.

Aset sewa pembiayaan disusutkan berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis yang sama dengan aset yang dimiliki sendiri atau disusutkan selama jangka waktu yang lebih pendek antara periode masa sewa dan umur manfaatnya.

Masa manfaat ekonomis, nilai residu dan metode penyusutan direviu setiap akhir tahun dan pengaruh dari setiap perubahan estimasi tersebut berlaku prospektif.

Jika jumlah yang dapat diperoleh kembali dari aset non-keuangan (unit penghasil kas) kurang dari nilai tercatatnya, nilai tercatat aset (unit penghasil kas) dikurangi menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali dan rugi penurunan nilai diakui langsung ke laba rugi.

r. Agunan yang Diambil Alih

Agunan yang diambil alih sehubungan dengan penyelesaian pembiayaan disajikan dalam akun aset lain-lain dan diakui sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi. Nilai bersih yang dapat direalisasi adalah nilai wajar aset setelah dikurangi estimasi biaya pelepasan.

Nilai Agunan yang diambil alih, baik melalui lelang maupun penyerahan secara sukarela dicatat pada nilai wajar setelah dikurangi biaya untuk menjualnya yaitu maksimum sebesar kewajiban nasabah. Bank tidak dapat mengakui keuntungan pada saat pengambilalihan aset.

Agunan akan diambil alih ketika tidak ada lagi sumber pengembalian yang bisa diharapkan dari nasabah. Indikasi atas tidak adanya sumber pengembalian adalah buruknya kondisi keuangan nasabah selama beberapa periode dan terdapat tunggakan angsuran lebih dari 1 (satu) tahun dan termasuk dalam kolektibilitas macet.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

q. Assets under Finance Lease

Assets under finance lease are presented in the statement of financial position as fixed assets. The depreciation of assets under finance lease are adjusted to the rate of depreciation of premises and equipment.

Lease payments are apportioned between finance charges and reduction of the lease obligation so as to achieve a constant rate of interest on the remaining balance of the liability. Contingent rentals are recognized as expenses in the periods in which they are incurred.

Assets under finance leases are depreciated over their expected useful lives on the same basis as owned assets or whenever shorter, the term of the relevant lease and its useful lives.

The estimated useful lives, residual values and depreciation method are reviewed at each year end, with the effect of any changes in estimate accounted for on a prospective basis.

If the recoverable amount of a non-financial asset (cash generating unit) is less than its carrying amount, the carrying amount of the asset (cash generating unit) is reduced to its recoverable amount and an impairment loss is recognized immediately to profit or loss.

r. Foreclosed Assets

Foreclosed assets in settlement of financing facilities are included as part of other assets and are recognized at their net realizable values. Net realizable value is the fair value of an asset after deducting estimated settlement expenses.

The value of a foreclosed assets whether acquired from auction or from voluntary conveyance is noted at fair value less selling price, which is a maximum amount of customer liabilities. Bank cannot recognize gain at asset acquisition.

Foreclosed assets will be acquired when there are no more sources of return that could be expected from the customer. Indication of no source of return is the poor financial condition of customers during some periods and arrears of installments for more than 1 (one) year and categorized as loss.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

r. Agunan yang Diambil Alih (lanjutan)

Manajemen mengevaluasi nilai agunan yang diambil alih secara berkala. Cadangan kerugian penurunan nilai agunan yang diambil alih dibentuk atas penurunan nilai yang terjadi disajikan sebagai pengurangan dari akun agunan yang diambil alih.

Beban perbaikan *(reconditioning cost)* yang timbul setelah pengambilalihan agunan dikapitalisasi dalam akun agunan yang diambil alih tersebut.

Selisih antara nilai agunan yang diambil alih dengan hasil penjualannya diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penjualan agunan.

s. Biaya Dibayar Dimuka

Biaya dibayar dimuka disajikan dalam akun aset lain-lain dan diamortisasi selama masa manfaat dengan menggunakan metode garis lurus *(straight line method)*.

t. Aset Takberwujud

Aset takberwujud adalah aset yang tidak mempunyai wujud fisik yang dibeli oleh Bank dan dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi.

Amortisasi diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan menggunakan metode garis lurus *(straight line method)* berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis selama 5 (lima) tahun.

Masa manfaat ekonomis, nilai residu dan metode amortisasi ditelaah kembali setiap akhir periode.

u. Liabilitas Segera

Liabilitas segera merupakan liabilitas Bank kepada pihak lain yang sifatnya wajib segera dibayarkan sesuai dengan perintah pemberi amanat perjanjian yang ditetapkan sebelumnya. Liabilitas segera dinyatakan sebesar nilai liabilitas Bank kepada pemberi amanat.

v. Simpanan

Simpanan merupakan titipan pihak lain berdasarkan prinsip *wadiah yad-adhdhamanah* dalam bentuk giro *wadiah*, tabungan *wadiah* dan deposito *wakalah*.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

r. Foreclosed Assets (continued)

Management evaluates the value of foreclosed assets regularly. An allowance for impairment losses on foreclosed asset is provided based on the decline in value of foreclosed asset.

Reconditioning costs arising after foreclosure are capitalized in the accounts of the foreclosed collaterals.

The difference between the value of the foreclosed assets and the proceeds from sale of such assets is recorded as gain or loss at the time of sale.

s. Prepaid Expenses

Prepaid expenses are included as part of other assets and are amortized over their useful life using the straight line method.

t. Intangible Assets

Intangible assets are assets that have no physical form which was acquired by the Bank and stated at cost less accumulated amortization.

Amortization is recognized in profit or loss and other comprehensive income using the straight line method based on its estimated useful lives of 5 (five) years.

The estimated useful lives, residual values and amortization method are reviewed at the end of each period.

u. Liabilities Due Immediately

Liabilities due immediately represent obligation to third parties, based on contract or order by those having authority, that should be settled immediately. Liabilities due immediately are stated at the amount of the Bank's liabilities to the trustee.

v. Deposits

Deposits represent third party funds placed based on wadiah yad-adhdhamanah principle in the form of wadiah demand deposits, wadiah saving deposits and wakalah deposit.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

v. Simpanan (lanjutan)

Giro *wadiah* digunakan sebagai instrumen pembayaran dan dapat ditarik setiap saat melalui cek dan bilyet giro, serta dapat mendapatkan bonus sesuai kebijakan Bank. Giro *wadiah* dinyatakan sebesar titipan pemegang giro di Bank.

Tabungan *wadiah* merupakan simpanan pihak lain yang hanya bisa ditarik sesuai dengan kondisi tertentu yang disepakati. Tabungan *wadiah* dinyatakan sebesar nilai simpanan pemegang tabungan di Bank.

w. Simpanan dari Bank Lain

Simpanan dari bank lain terdiri dari liabilitas Bank kepada bank lain dalam bentuk giro *wadiah*. Simpanan dari bank lain dinyatakan sebesar nilai kewajiban Bank kepada bank lain.

Giro *wadiah* digunakan sebagai instrumen pembayaran dan dapat ditarik setiap saat melalui cek dan bilyet giro, serta mendapatkan bonus sesuai dengan kebijakan Bank. Giro *wadiah* dinyatakan sebesar titipan pemegang giro di Bank.

Giro *wadiah* dapat menerima bonus sesuai kebijakan Bank.

x. Dana *Syirkah* Temporer

Dana *syirkah* temporer merupakan investasi dengan akad *mudharabah mutlaqah* dimana pemilik dana *(shahibul maal)* memberikan kebebasan kepada pengelola dana (*mudharib* / Bank) dalam pengelolaan investasinya dan akan memperoleh bagi hasil sesuai dengan *nisbah* yang disepakati. Dana *syirkah* temporer terdiri dari tabungan *mudharabah*, deposito berjangka *mudharabah*, sertifikat investasi *mudharabah* antar bank dan sukuk *mudharabah* subordinasi.

Tabungan *mudharabah* merupakan investasi yang hanya bisa ditarik sesuai dengan persyaratan tertentu yang disepakati. Tabungan *mudharabah* dinyatakan sebesar nilai investasi pemegang tabungan di Bank.

Deposito berjangka *mudharabah* merupakan investasi yang hanya bisa ditarik pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito berjangka *mudharabah* dengan Bank. Deposito berjangka *mudharabah* dinyatakan sebesar nilai nominal sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito berjangka dengan Bank.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

v. Deposits (continued)

Wadiah demand deposits are used as payment instruments and available for withdrawal at any time using cheque and demand deposit slips, and may earn bonus based on the Bank's policy. Wadiah demand deposits are stated at the amount entrusted by depositors.

Wadiah savings deposits represent third party funds that can be withdrawn under certain condition. Wadiah savings deposits are stated at the amounts deposited by the holder.

w. Deposits from Other Banks

Deposits from other banks represent liabilities to other banks in the form of wadiah demand deposits. Deposits from other banks are stated at the amount payable to the other banks.

Wadiah demand deposits are used as payment instruments and available for withdrawal at any time using cheque and demand deposit slips, and receive bonuses according to the Bank's policies. Wadiah demand deposits are stated at the amount entrusted by depositors.

Wadiah demand deposits may receive bonus based on the Bank's policy.

x. Temporary Syirkah Funds

Temporary syirkah funds represent investments under mudharabah mutlaqah contract in which the owners (shahibul maal) entrust the funds to the fund manager (mudharib/ Bank) in managing the investment, and will receive profit share based on the agreed predetermined ratio (nisbah). Temporary syirkah funds consist of mudharabah saving deposits, mudharabah time deposits, mudharabah interbank investment certificates and subordinated mudharabah sukuk.

Mudharabah saving deposits represent third party funds that can be withdrawn under certain conditions. Mudharabah saving deposits are stated at the amount deposited by depositors.

Mudharabah time deposits represent third party funds that can be withdrawn at specific maturity dates based on the agreement between depositors and the Bank. Mudharabah time deposits are stated at nominal values set forth in the agreement between the holder of time deposit and the Bank.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

x. Dana *Syirkah* Temporer (lanjutan)

Sukuk *mudharabah* subordinasi merupakan surat berharga jangka panjang yang diterbitkan berdasarkan akad *mudharabah*. Sukuk *mudharabah* dikelompokkan dalam dana *syirkah* temporer karena bersifat investasi. Sukuk *mudharabah* subordinasi disajikan sebesar nilai nominal. Biaya-biaya yang timbul dari penerbitan sukuk *mudharabah* diamortisasi selama masa periode sukuk.

Dana *syirkah* temporer tidak dapat digolongkan sebagai liabilitas. Hal ini karena Bank tidak mempunyai liabilitas, ketika mengalami kerugian, untuk mengembalikan jumlah dana awal dari pemilik dana kecuali akibat kelalaian atau wanprestasi Bank. Dana *syirkah* temporer tidak dapat digolongkan sebagai ekuitas karena mempunyai waktu jatuh tempo dan pemilik dana tidak mempunyai hak kepemilikan yang sama dengan pemegang saham seperti hak *voting* dan hak atas realisasi keuntungan yang berasal dari aset lancar dan aset non investasi.

Dana *syirkah* temporer merupakan salah satu unsur laporan posisi keuangan dimana hal tersebut sesuai dengan prinsip syariah yang memberikan hak kepada Bank untuk mengelola dan menginvestasikan dana, termasuk untuk mencampur dana dimaksud dengan dana lainnya.

Pemilik dana *syirkah* temporer memperoleh bagian atas keuntungan sesuai kesepakatan dan menerima kerugian berdasarkan jumlah dana dari masing-masing pihak. Pembagian hasil dana *syirkah* temporer berdasarkan konsep bagi hasil.

y. Biaya Emisi/ Biaya Transaksi

Biaya transaksi penerbitan sukuk *mudharabah* dicatat secara terpisah dan disajikan dalam aset sebagai beban tangguhan, yang diamortisasi selama umur sukuk terpendek 5 (lima) tahun dengan metode garis lurus.

z. Pendapatan Pengelolaan oleh Bank sebagai *Mudharib*

Pendapatan pengelolaan dana oleh Bank sebagai *mudharib* terdiri dari pendapatan dari transaksi penjualan dari transaksi *murabahah* dan *istishna*, pendapatan bagi hasil dari *mudharabah* dan *musyarakah*, pendapatan sewa dari *ijarah* dan *ijarah muntahiyah bittamlik* dan pendapatan usaha utama lainnya.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

x. Temporary Syirkah Funds (continued)

Subordinated mudharabah sukuk represents long-term bonds issued under a Mudharabah contract. Mudharabah sukuk are classified as temporary syirkah fund due to its nature as investment. Subordinated mudharabah sukuk are stated at their nominal value. The issuance costs for mudharabah sukuk are amortized based on the term of sharia bonds.

Temporary syirkah funds can not be classified as liability because the Bank has no obligation to return the fund to the owner when the Bank has loss, unless there is negligence or default by the Bank. Temporary syirkah funds cannot be classified as equity since they have maturity and the owner of the funds do not have ownership rights as common shareholders, such as voting rights and right of the profit derived from current assets and non-investment assets.

Temporary syirkah fund is an element of statement of financial position where it is in line with sharia principles, which entitles the Bank to manage and invest funds, including to manage as one portfolio with other type of funds.

The owners of temporary syirkah funds earn profit in accordance with the agreement and receive loss based on the amount of funds from each party. The return of temporary syirkah funds are based on revenue sharing concept.

y. Issuance Cost/ Transaction Cost

Issuance cost of subordinated mudharabah sukuk are recognized separately and stated in assets as a deferred expense, that is amortized using the straight line method over 5 (five) years which is the earliest term of the bonds.

z. Revenue from Fund Management by the Bank as Mudharib

Revenue from fund management as mudharib consists of revenue from sales in murabahah and istishna transaction, income from profit sharing of mudharabah and musyarakah financing, income from ijarah and ijarah muntahiyah bittamlik and other main operating income.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

z. Pendapatan Pengelolaan oleh Bank sebagai *Mudharib* (lanjutan)

Pendapatan atas piutang *murabahah* menggunakan metode setara tingkat imbal hasil efektif (margin efektif). Margin efektif adalah margin yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari piutang *murabahah*. Pada saat menghitung margin efektif, Bank mengestimasi arus kas di masa datang dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian di masa mendatang. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi, provisi dan bentuk lain yang diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian tak terpisahkan dari margin efektif, biaya transaksi dan seluruh premi atau diskon lainnya.

Bank melakukan penghentian amortisasi keuntungan ditangguhkan pada saat pembiayaan diklasifikasikan sebagai *non-performing*. Pendapatan Bank dari transaksi usaha yang diklasifikasikan sebagai *non-performing* dicatat sebagai margin dalam penyelesaian pada laporan komitmen dan kontinjensi.

Pendapatan *istishna* diakui dengan menggunakan metode persentase penyelesaian atau metode akad selesai. Akad dinyatakan selesai jika proses pembuatan barang pesanan selesai dan diserahkan kepada pembeli.

Pendapatan *ijarah* diakui selama masa akad secara proporsional.

Pendapatan usaha *mudharabah* diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai *nisbah* yang disepakati. Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan *mudharib* dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi *mudharabah*.

Pendapatan usaha *musyarakah* yang menjadi hak mitra aktif diakui sebesar haknya sesuai dengan kesepakatan atas pendapatan usaha *musyarakah*, sedangkan pendapatan usaha untuk mitra pasif diakui sebagai hak pihak mitra pasif atas bagi hasil dan liabilitas.

Pendapatan operasi utama lainnya terdiri dari pinjaman *qardh*, pendapatan dari penempatan pada Bank Indonesia, pendapatan dari giro dan penempatan pada bank syariah lain, pendapatan bagi hasil surat berharga syariah, pendapatan *fee* wesel ekspor, dan pendapatan *fee* akseptasi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

z. Revenue from Fund Management by the Bank as Mudharib (continued)

Income from murabahah receivables uses the effective rate of return method (effective margin). Effective margin is the margin that precisely discounts the estimated future cash payments or receipts through the expected life of the murabahah receivables. When calculating the effective margin, Bank estimates the future cash flows considering all contractual terms of the financial instrument, but does not consider the loss of receivables in the future. This calculation includes all commissions, provision fees and other forms accepted by the parties in the contract that are an inseparable part of the effective margin, transaction costs and all other premiums or discounts.

The Bank terminates the amortization of deferred income when the financing are classified as non-performing. The Bank's income from business transactions that are classified as non-performing is recorded as margin of non-performing receivables in the statement of commitments and contingencies.

Revenue from istishna is recognized using percentage of completion or contract completion method. The contract is defined as completed if the process of production is completed and the goods are delivered to the customer.

Revenue from ijarah is recognized proportionally during period of the contract.

Revenue from mudharabah is recognized during the period of profit sharing in accordance with the agreed revenue sharing ratio. Loss incurred due to negligence of mudharib is charged to mudharib and will not reduce the mudharabah investment.

Revenue from musyarakah distributed to an active partner is recognized in accordance with the agreement on musyarakah revenue, whereas revenue distributed to passive partner is recognized as the right of the passive partner in revenue sharing and liability.

Other operating revenue consists of income derived from funds of qardh, placement with Bank Indonesia, current account and placements with other sharia banks, revenue sharing from sharia securities, export bill fee, and acceptance fee revenue.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

aa. Hak Pihak Ketiga Atas Bagi Hasil Dana *Syirkah* Temporer

Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana *syirkah* temporer merupakan bagian bagi hasil milik pihak ketiga yang didasarkan pada prinsip *mudharabah mutlaqah* atas hasil pengelolaan dana mereka oleh Bank. Pendapatan yang dibagikan adalah pendapatan yang telah diterima *(cash basis)*.

Jumlah pendapatan margin dan bagi hasil atas pembiayaan yang diberikan dan dari aset produktif lainnya yang akan dibagikan kepada nasabah penyimpan dana dan Bank, dihitung secara proporsional sesuai dengan alokasi dana nasabah dan Bank yang dipakai dalam pembiayaan yang diberikan dan aset produktif lainnya yang disalurkan. Jumlah pendapatan margin dan bagi hasil yang tersedia untuk nasabah tersebut dibagihasilkan ke nasabah penabung dan deposan sebagai *shahibul maal* dan Bank sebagai *mudharib* sesuai dengan porsi nisbah bagi hasil yang telah disepakati bersama sebelumnya.

Bagi hasil sukuk *mudharabah* subordinasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan, dihitung berdasarkan perkalian antara *nisbah* pemegang sukuk dengan pendapatan yang diterima Bank dalam triwulan terakhir sebagaimana tercantum dalam laporan keuangan triwulanan Bank yang belum diaudit yang dipublikasikan oleh Bank.

Pembayaran pendapatan bagi hasil kepada masing-masing pemegang sukuk akan dilakukan secara proporsional sesuai dengan porsi kepemilikan yang dimiliki dibandingkan dengan jumlah pokok sukuk *mudharabah* yang belum dibayar kembali.

Pendapatan margin dan bagi hasil atas pembiayaan yang diberikan dan aset produktif lainnya yang memakai dana Bank, seluruhnya menjadi milik Bank, termasuk pendapatan dari transaksi Bank berbasis imbalan.

ab. Pendapatan Imbalan Jasa Perbankan

Pendapatan imbalan jasa perbankan pada umumnya diakui pada saat kas diterima.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

aa. Third Parties Share on Returns of Temporary Syirkah Funds

The share of third parties on the return of temporary syirkah funds represents portion of income derived by Bank from managing funds under mudharabah mutlaqah principles. The profit sharing is distributed on the cash basis.

Margin income and profit sharing on financing facilities and other earning assets for distribution to fund owners and the Bank are computed proportionally based on the allocation of funds from owners and the Bank used in financing facilities and other earning assets distributed. The total available margin income and profit sharing are distributed to customers and depositors as shahibul maal and to the Bank as mudharib in accordance with a predetermined ratio.

Subordinated Mudharabah sukuk is paid every 3 (three) months, and calculated based on multiplication between the sukuk holder's ratios and revenue received by the Bank in the last quarter as contained in the unaudited quarterly financial statements of the Bank Publication.

The payment of revenue sharing to the respective sukuk holders will be proportionated in accordance with the portion of ownership compared to the unpaid principal amount of the Mudharabah sukuk.

Margin income and profit sharing from financing facilities and other earning assets distributed using the Bank's funds entirely become the right of the Bank including income from the Bank's fee-based transactions.

ab. Fee Based Income from Banking Services

Fee based income from banking services is generally recognized when cash is received.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

ac. Imbalan Kerja

Efektif sejak tanggal 1 Januari 2015, Bank menerapkan PSAK No. 24 (Revisi 2013), "Imbalan Kerja", yang menghapuskan mekanisme koridor dan pengungkapan atas informasi liabilitas kontinjensi untuk menyederhanakan klasifikasi dan pengungkapan.

Imbalan kerja jangka pendek

Imbalan kerja jangka pendek seperti upah, iuran jaminan sosial, cuti jangka pendek dan tunjangan hari raya diakui selama periode jasa diberikan. Imbalan jangka pendek dihitung sebesar jumlah yang tidak didiskontokan.

Program pensiun iuran pasti

Iuran kepada dana pensiun sebesar persentase tertentu gaji pegawai yang menjadi peserta program pensiun iuran pasti Bank. Iuran dicadangkan dan diakui sebagai biaya ketika jasa telah diberikan oleh pegawai-pegawai tersebut dan pembayarannya dikurangkan dari utang iuran. Iuran terhutang dihitung berdasarkan jumlah yang tidak didiskontokan.

Program imbalan pasti

Imbalan pasca kerja diakui sebagai biaya ketika jasa telah diberikan oleh pegawai yang memenuhi syarat. Imbalan kerja ditentukan berdasarkan peraturan Bank dan persyaratan minimum Undang-undang Tenaga Kerja No.13/2003.

Imbalan pasca-kerja dan imbalan kerja jangka panjang lainnya secara aktuaris ditentukan berdasarkan metode *Projected Unit Credit*.

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto, yang diakui sebagai penghasilan komprehensif lain, terdiri atas:

(i) Keuntungan dan kerugian aktuarial.

(ii) Imbal hasil atas aset program, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas (aset).

(iii) Setiap perubahan dampak batas aset, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas (aset).

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

ac. Employee Benefits

Effective since January 1, 2015, Bank is implementing SFAS No. 24 (Revised 2013), "Employee Benefits", which removes the corridor mechanism and the contingent liabilities disclosures to simplify the classifications and disclosures.

Short-term employee benefits

Short-term employee benefits such as salaries, social security contributions, short-term leaves and allowance of feast day are recognized during the period when services are rendered. Short-term employee benefits are measured using undiscounted amounts.

Defined contribution plan

Contribution payable to the pension fund is equivalent to a certain percentage of salaries for eligible employees under the Bank's defined contribution plan. The contribution is accrued and recognized as expense when services have been rendered by eligible employees and actual payments are deducted from the contribution payable. Contribution payable is measured using undiscounted amounts.

Defined benefit plan

The post-employment benefits are recognized as expense when services have been rendered by eligible employees. The benefits are determined based on Bank regulations and the minimum requirements of Labor Law No.13/2003.

The post-employment benefits and other long-term employee benefits are actuarially determined using the Projected Unit Credit Method.

Remeasurement of net defined benefit liabilities (assets), which is recognized as other comprehensive income, consist of:

(i) Actuarial gain and losses.

(ii) Return on plan assets, excluding an amount that is included in net interest on liabilities (assets).

(iii) The effect of the asset ceiling, excluding any amount that is included in the net interest of liabilities (assets).

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

ac. Imbalan Kerja (lanjutan)

Program imbalan pasti (lanjutan)

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto, yang diakui sebagai penghasilan komprehensif lain tidak direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya.

Biaya jasa lalu diakui sebagai beban pada tanggal yang lebih awal antara ketika amandemen atau kurtailmen program terjadi, dan ketika biaya restrukturisasi atau pesangon diakui, sehingga biaya jasa lalu yang belum *vested* tidak lagi dapat ditangguhkan dan diakui selama periode *vesting* masa depan.

ad. Perpajakan

Efektif sejak tanggal 1 Januari 2015, Bank menerapkan PSAK No 46 (revisi 2013) " Pajak Penghasilan". Penerapan PSAK ini tidak menimbulkan perubahan yang besar terhadap pelaporan keuangan dan pengungkapan dalam laporan keuangan.

Beban pajak tahun berjalan ditetapkan berdasarkan penghasilan kena pajak tahun berjalan. Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer aset dan liabilitas antara pelaporan komersial dan pajak pada setiap tanggal pelaporan.

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan saldo rugi fiskal yang belum dikompensasikan, sepanjang perbedaan temporer dan rugi fiskal yang belum dikompensasikan tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba fiskal pada masa yang akan datang.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah pada setiap tanggal posisi keuangan dan nilai tercatat aset pajak tangguhan tersebut diturunkan apabila tidak lagi terdapat kemungkinan besar bahwa laba fiskal yang memadai akan tersedia untuk mengkompensasi sebagian atau semua manfaat aset pajak tangguhan.

Perubahan terhadap liabilitas pajak diakui pada saat surat ketetapan pajak diterima, atau apabila diajukan keberatan dan atau banding oleh Bank, pada saat telah ada keputusan atas banding dan atau keberatan tersebut.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

ac. Employee Benefits (continued)

Defined benefit plan (continued)

Remeasurement of net defined benefit liabilities (assets), which is recognized as other comprehensive income is not reclassified to profit or loss in the subsequent periods.

Past service costs are recognized as expense at the earlier date between the amendments or occurrence of curtailment program, and when the costs of restructuring or severance is recognized, therefore, unvested past service cost can no longer be deferred and recognized over the future vesting period.

ad. Taxation

Effective on January 1, 2015, Bank adopted SFAS No. 46 (Revised 2013), "Income Taxes". The adoption of the SFAS has no significant impact on the financial reporting and disclosures in the financial statements.

Current tax expense is provided based on the taxable income for the current year. Deferred tax assets and liabilities are recognized for temporary differences between the financial and the tax bases of assets and liabilities at each reporting date.

Deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences and carry forward of uncompensated tax losses to the extent that it is probable for temporary differences and carry forward of uncompensated tax losses to be utilized in deducting future taxable profit.

The carrying amount of deferred tax assets is reviewed at each reporting date and is reduced when it is no longer probable that sufficient taxable profits will be available to compensate part or all of the benefit of the deferred tax assets.

Amendment to tax obligation is recorded when an assessment letter is received or, if objected to or appealed against by the Bank, when the result of such appeal or objection is determined.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

ad. Perpajakan (lanjutan)

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur berdasarkan tarif pajak yang akan berlaku pada tahun saat aset direalisasikan atau liabilitas diselesaikan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku atau yang telah secara substantif telah diberlakukan pada tanggal laporan posisi keuangan. Pengaruh pajak terkait dengan penyisihan untuk dan/ atau pembalikan seluruh perbedaan temporer selama tahun berjalan, termasuk pengaruh perubahan tarif pajak, diakui sebagai "Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan" dan termasuk dalam laba atau rugi neto tahun berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan ke laba komprehensif lainnya dan dilaporkan ke ekuitas.

Aset dan liabilitas atas pajak tangguhan dan pajak kini dapat saling hapus apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus.

ae. Laba per Saham

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik Bank dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan.

af. Informasi Segmen Operasi

Informasi segmen operasi diungkapkan untuk memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi sifat dan dampak keuangan dari aktivitas bisnis yang mana Bank terlibat dalam lingkungan ekonomi dimana Bank beroperasi.

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

a) yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);

b) yang hasil operasinya dikaji ulang secara regular oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan

c) dimana tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

ad. Taxation (continued)

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the year when the asset is realized or the liability is settled based on tax laws that have been enacted or substantively enacted as at statement of financial position reporting date. The related tax effects of the provisions for and/ or reversals of all temporary differences during the year, including the effect of change in tax rates, are recognized as "Income Tax Benefit (Expense)" and included in the net profit or loss for the year, except to the extent that they relate to items previously charged to other comprehensive income and reported to equity.

Assets and liabilities on deferred tax and current tax are offset if there is a legal enforceable right to offset.

ae. Earnings per Share

Basic earnings per share is computed by dividing net income attributable to the owners of the Bank by the weighted average number of shares outstanding during the year.

af. Operating Segment Information

Operating Segment information is disclosed to enable users of financial statements to evaluate the nature and financial effects of the business activities in which the Bank is involved in and the economic environment where the Bank operates.

An operating segment is a component of an entity:

a) that engages in business activities from which it may earn revenue and incur expenses (including revenue and expenses relating to the transaction with other components of the same entity);

b) whose operating results are reviewed regularly by the entity's chief operating decision maker to make decision about resources to be allocated to the segments and assess its performance; and

c) for which discrete financial information is available.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

af. Informasi Segmen Operasi (lanjutan)

Informasi yang digunakan oleh pengambil keputusan operasional dalam rangka alokasi sumber daya dan penilaian kinerja mereka terfokus pada kategori dari setiap produk.

ag. Penggunaan Pertimbangan dan Estimasi Akuntansi yang Signifikan

Penyusunan laporan keuangan Bank mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontinjensi pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian yang melekat dalam melakukan estimasi, dapat menyebabkan jumlah sesungguhnya yang dilaporkan pada periode yang akan datang berbeda dengan jumlah yang diestimasikan.

Pertimbangan

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Bank yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan Bank sebagai berikut:

Usaha yang berkelanjutan

Manajemen Bank telah melakukan penilaian atas kemampuannya untuk melanjutkan kelangsungan usahanya dan berkeyakinan bahwa Bank memiliki sumber daya untuk melanjutkan usahanya di masa mendatang. Selain itu, manajemen tidak mengetahui adanya ketidakpastian material yang dapat menimbulkan keraguan yang signifikan terhadap kemampuan Bank untuk melanjutkan kelangsungan usahanya. Oleh karena itu, laporan keuangan telah disusun atas dasar usaha yang berkelanjutan.

Nilai wajar instrumen keuangan

Semua aset dan liabilitas dimana nilai wajar diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan dapat dikategorikan pada level hirarki nilai wajar, berdasarkan tingkatan input terendah yang signifikan atas pengukuran nilai wajar secara keseluruhan:

Level 1: harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liablitas yang identik yang dapat diakses pada tanggal pengukuran.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

af. Operating Segment Information (continued)

Information reported to the chief operating decision maker for the purpose of resource allocation and assessment of their performance is more specifically focused on the category of each product.

ag. Use of Significant Accounting Judgment and Estimates

The preparation of the Bank's financial statements requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities, and the disclosure of contingent liabilities, at the end of the reporting period. Due to inherent uncertainty in making estimates, actual results reported in future periods might be based on amounts which differ from those estimates.

Judgments

The following judgments are made by management in the process of applying Bank's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in Bank's financial statements as follows:

Going concern

The Bank's management has made an assessment of it's ability to continue as a going concern and is satisfied that the Bank has the resources to continue its business for the foreseeable future. Furthermore, the management is not aware of any material uncertainties that may cast significant doubt on the Bank's ability to continue as a going concern. Therefore, the financial statements continue to be prepared on the going concern basis.

Fair value of financial instruments

All assets and liabilities in which fair value is measured or disclosed in the financial statements can be classified in fair value hierarchy levels, based on the lowest level of input that is significant to the overall fair value measurement:

Level 1: quoted prices (without adjustments) in active markets for identical assets or liabilities which are accessible at the measurement date.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

ag. Penggunaan Pertimbangan dan Estimasi Akuntansi yang Signifikan (lanjutan)

Nilai wajar instrumen keuangan (lanjutan)

Level 2: input selain harga kuotasian yang termasuk dalam level 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas, baik secara langsung atau tidak langsung.

Level 3: input yang tidak dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas.

Kontinjensi

Bank sedang terlibat dalam proses hukum. Perkiraan biaya kemungkinan bagi penyelesaian klaim telah dikembangkan melalui konsultasi dengan bantuan konsultan hukum Bank didasarkan pada analisis hasil yang potensial.

Manajemen tidak berkeyakinan bahwa hasil dari hal ini akan mempengaruhi hasil usaha. Besar kemungkinan, bagaimanapun, bahwa hasil operasi di masa depan dapat secara material terpengaruh oleh perubahan dalam estimasi atau efektivitas dari strategi yang terkait dengan hal tersebut.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko untuk dapat menyebabkan penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun/periode berikutnya, diungkapkan di bawah ini. Bank mendasarkan asumsi dan estimasi yang digunakan pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun.

Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan dapat berubah akibat perubahan pasar atau situasi yang timbul diluar kendali Bank. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi yang digunakan pada saat terjadinya.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

ag. Use of Significant Accounting Judgment and Estimates (continued)

Fair value of financial instruments (continued)

Level 2: inputs other than quoted prices included in level 1 that are observable for the assets and liabilities, either directly or indirectly.

Level 3 : inputs that are not observable for the assets and liabilities.

Contingency

The Bank is currently involved in legal proceedings. The estimate of the probable cost for the resolution of claims has been developed in consultation with the aid of the external legal counsel handling the Bank's defense in this matter and is based upon an analysis of potential results.

Management does not believe that the outcome of this matter will affect the results of operations. It is probable, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the estimates or in the effectiveness of the strategies relating to these proceedings.

Estimates and Assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimating uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year/period are disclosed below. The Bank based its assumptions and estimates on parameters available when the financial statements were prepared.

Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Bank. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

ag. Penggunaan Pertimbangan dan Estimasi Akuntansi yang Signifikan (lanjutan)

Cadangan kerugian penurunan nilai dari piutang, pinjaman *qardh* dan pembiayaan

Manajemen Bank menelaah portofolio piutang, pinjaman *qardh* dan pembiayaan setiap periode untuk menilai penurunan nilai dengan memperbaharui cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk selama periode yang diperlukan berdasarkan analisis berkelanjutan dan pemantauan terhadap rekening individual oleh petugas.

Estimasi tersebut didasarkan pada asumsi mengenai sejumlah faktor dan hasil aktual yang dapat berbeda, yang mengakibatkan perubahan terhadap jumlah cadangan kerugian di masa yang akan datang.

Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan dapat berubah akibat perubahan pasar atau situasi yang timbul diluar kendali Bank. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi yang digunakan pada saat terjadinya.

Penurunan nilai investasi pada surat berharga

Manajemen Bank menentukan bahwa surat berharga memiliki kriteria penurunan nilai yang sama dengan aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi.

Umur ekonomis aset tetap

Manajemen Bank memperkirakan masa manfaat aset tetap berdasarkan periode dimana aset diharapkan akan tersedia untuk digunakan. Masa manfaat ekonomis aset tetap ditinjau secara berkala dan diperbarui jika memiliki ekspektasi yang berbeda dari perkiraan sebelumnya, karena kerusakan secara fisik dan teknis, atau keusangan secara komersial dan legal atau batasan lainnya atas penggunaan aset tersebut. Selain hal tersebut, estimasi masa manfaat dari aset tetap didasarkan pada penilaian secara kolektif dengan menggunakan praktik industri, teknik evaluasi internal dan pengalaman dengan aset serupa.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

ag. Use of Significant Accounting Judgment and Estimates (continued)

Allowance for impairment losses on receivables, funds of qardh and financing

The Bank's management reviews its receivables, funds of qardh and financing portfolio to assess impairment in each period by updating the required allowance for impairment losses made during the period based on the continuing analysis and monitoring of individual accounts by the officers.

Such estimates are based on assumptions of several factors and actual results may differ, resulting in future changes in the amount of allowance for losses.

Existing circumstances and assumptions with regard to future developments may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Bank. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

Impairment of investment in marketable securities

The Bank's management determines that the impairment of marketable securities are based on the same criteria as financial assets carried at amortized cost.

Useful lives of premises and equipment

The Bank's management estimates the useful lives of premises and equipment based on the period over which the assets are expected to be available for use. The estimated useful lives of premises and equipment are reviewed periodically and are updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolescence and legal or other limits on the use of the assets. In addition, estimate of the useful lives of premises and equipment is based on collective assessment of industry practice, internal technical evaluation and experience with similar assets.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

ag. Penggunaan Pertimbangan dan Estimasi Akuntansi yang Signifikan (lanjutan)

Umur ekonomis aset tetap (lanjutan)

Tetap dimungkinkan, bagaimanapun, bahwa hasil masa depan dapat secara material dipengaruhi oleh perubahan estimasi yang disebabkan oleh perubahan faktor-faktor tersebut di atas. Jumlah dan saat pencatatan biaya untuk setiap periode akan dipengaruhi oleh perubahan dari faktor dan keadaan saat pencatatan. Pengurangan dari taksiran masa manfaat dari aset tetap akan meningkatkan beban usaha.

Revaluasi pada aset tetap

Bank mengukur aset tetap berdasarkan nilai revaluasi dengan perubahan nilai wajar yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan dilaporkan dalam ekuitas. Bank menggunakan penilai independen untuk menentukan nilai wajar aset tetap pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018. Lihat Catatan 15 untuk nilai tercatat aset tetap.

Aset pajak tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui atas jumlah pajak penghasilan terpulihkan *(recoverable)* pada periode mendatang sebagai akibat perbedaan temporer yang boleh dikurangkan. Justifikasi manajemen diperlukan untuk menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, sesuai dengan waktu yang tepat dan tingkat laba fiskal di masa mendatang sejalan dengan strategi rencana perpajakan ke depan.

Penurunan nilai aset non-keuangan

Manajemen Bank mengevaluasi penurunan nilai aset non-keuangan apabila terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat aset non-keuangan tidak dapat dipulihkan kembali.

Faktor-faktor penting yang dapat menyebabkan penelaahan penurunan nilai adalah sebagai berikut:

a) performa yang tidak tercapai secara signifikan terhadap ekspektasi historis atau proyeksi hasil operasi di masa yang akan datang;
b) perubahan yang signifikan dalam cara penggunaan aset atau strategi bisnis secara keseluruhan; dan
c) industri atau tren ekonomi yang secara signifikan bernilai negatif.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

ag. Use of Significant Accounting Judgment and Estimates (continued)

Useful lives of premises and equipment (continued)

It is possible, however, that future results of operations be materially affected by changes in estimates brought about by changes in the aforementioned factors. The amounts and timing of recorded expenses for any period are affected by changes of those factors and circumstances during recording. A reduction in the estimated useful lives of premises and equipment increases the recorded operating expenses.

Revaluation of premises and equipment

The Bank measures the premises and equipment at revalued amounts with changes in fair value being recognized in other comprehensive income and reported in the equity. The Bank engaged independent appraisal to determine the fair value of premises and equipment as of December 31, 2019 and 2018. Refer to Note 15 for the carrying values of premises and equipment.

Deferred tax assets

Deferred tax assets are recognized for the future recoverable taxable income arising from deductible temporary difference. Management's judgement is required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, based upon the likely timing on level of future taxable profits together with strategic future tax planning.

Impairment of non-financial assets

The Bank's management assesses impairment of non-financial assets whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying amount of non-financial asset may not be recoverable.

The factors that the Bank considers important which may lead to impairment assessment are the following:

a) significant underperformance related to historical expectation or projected future operating results;
b) significant changes in the manner of use of the assets or the overall business strategy; and
c) significant negative industry or economic trends.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

ag. Penggunaan Pertimbangan dan Estimasi Akuntansi yang Signifikan (lanjutan)

Penurunan nilai aset non-keuangan (lanjutan)

Bank mengakui kerugian penurunan nilai apabila nilai tercatat aset melebihi nilai yang dapat dipulihkan. Jumlah terpulihkan adalah nilai yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurang biaya pelepasan dengan nilai pakai aset (atau unit penghasil kas). Jumlah terpulihkan diestimasi untuk aset individual atau, jika tidak memungkinkan, untuk unit penghasil kas yang mana aset tersebut merupakan bagian daripada unit tersebut.

Estimasi liabilitas imbalan kerja

Estimasi liabilitas imbalan kerja ditentukan berdasarkan perhitungan dari aktuaria. Perhitungan aktuaria menggunakan asumsi-asumsi seperti tingkat diskonto, tingkat pengembalian investasi, tingkat kenaikan gaji, tingkat kematian, tingkat pengunduran diri dan lain-lain.

Karena program tersebut memiliki sifat jangka panjang, maka perkiraan tersebut memiliki ketidakpastian yang signifikan.

ah. Transaksi dan Saldo Mata Uang Asing

Bank menyelenggarakan catatan akuntansi-nya dalam Rupiah. Transaksi yang melibatkan mata uang asing dicatat pada nilai tukar pada saat terjadinya transaksi.

Pada tanggal laporan posisi keuangan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs *Reuters* pada pukul 16:00 WIB (Waktu Indonesia Bagian Barat) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

Keuntungan atau kerugian yang timbul sebagai akibat dari penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dicatat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

ag. Use of Significant Accounting Judgment and Estimates (continued)

Impairment of non-financial assets (continued)

The Bank recognizes an impairment loss whenever the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the higher amount between fair value less costs of disposal using the asset value in use (or cash generating unit). Recoverable amounts are estimated for individual assets or, if not possible, for the cash-generating unit to which the asset belongs.

Estimated liabilities for employee benefits

Estimated liabilities for employee benefits are determined based on actuarial valuation. The actuarial valuation involves assumptions such as discount rate, expected rate of returns on investments, future salary increase, mortality rate, resignation rate and others.

Due to the long-term nature of this plan, such estimates are subject to significant uncertainty.

ah. Transaction and Balance in Foreign Currency

The Bank maintains its accounting records in Indonesian Rupiah. Transactions in foreign currencies are recorded at the exchange rates in effect on the date of the transactions.

On the date of the statement of financial position, all monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated into Rupiah using the Reuters spot rates at 16:00 WIB (Western Indonesian Time) issued by Bank Indonesia.

The resulting gains or losses from the translation of monetary assets and liabilities in foreign currencies are recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income for the current year.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

ah. Transaksi dan Saldo Mata Uang Asing (lanjutan)

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, kurs mata uang asing yang digunakan untuk penjabaran mata uang asing terhadap Rupiah adalah sebagai berikut (dalam nilai penuh):

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

ah. Transaction and Balance in Foreign Currency (continued)

As of December 31, 2019 and 2018, the exchange rates used in translating foreign currency amounts into Rupiah are as follows (in full amount):

	31 Desember/ *December 31,* 2019	**31 Desember/ *December 31,* 2018**	
1 Dinar Kuwait	45.800,21	47.371,98	*1 Kuwaiti Dinar*
1 Euro	15.570,61	16.440,00	*1 Euro*
1 Dolar Amerika Serikat	13.882,50	14.380,00	*1 United States Dollar*
1 Dolar Australia	9.725,39	10.162,35	*1 Australian Dollar*
1 Dolar Singapura	10.315,05	10.554,91	*1 Singapore Dollar*
1 Ringgit Malaysia	3.391,77	3.476,79	*1 Malaysian Ringgit*
1 Riyal Arab Saudi	3.700,72	3.833,34	*1 Saudi Arabian Riyal*
10 Yen Jepang	1.278,10	1.360,20	*10 Japanese Yen*

ai. Perubahan kebijakan akuntansi dan pengungkapan

Standar baru, revisi dan interpretasi yang telah diterbitkan, dan yang berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2019 namun tidak berdampak material terhadap laporan keuangan adalah sebagai berikut:

- ISAK No. 33 : Transaksi Valuta Asing dan Imbalan di Muka
- ISAK No. 34 : Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan
- PSAK No. 24 (Amandemen 2018) : Imbalan Kerja tentang Amandemen Kurtailmen atau Penyelesaian Program".
- PSAK 102 : Akuntansi Murabahah (Revisi 2019)
- ISAK 101 : Pengakuan Pendapatan Murabahah Tangguh Tanpa Risiko Signifikan Terkait Kepemilikan Persediaan
- ISAK 102 : Penurunan Nilai Piutang Murabahah

Implementasi dari standar-standar tersebut tidak menghasilkan perubahan kebijakan akuntansi dan tidak memiliki dampak terhadap jumlah yang dilaporkan di periode berjalan atau tahun sebelumnya.

ai. Changes in accounting policies and disclosures

The latest standards, revisions and interpretations that become effective on or after January 1, 2019, yet has no material implication for the Bank's report, are as follows:

- *IFAS 33 : Foreign Currency Transaction and advance Consideration*
- *IFAS 34 : Uncertainty Over Income Tax Treatments*
- *Amendment to SFAS 24 : (amendment) Curtailment of Settlement*
- *SFAS 102 : Accounting for Murabahah (Revised 2019)*
- *IFAS 101 : Recognition of Deferred Murabahah Revenue Without Significant Risk With Regard to Inventory Ownership*
- *IFAS 102 : Impairment of Murabahah Receivables*

Implementation of these standards does not change the accounting policies and has no effect on the amounts reported in the current period or the previous year.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

ai. Perubahan kebijakan akuntansi dan pengungkapan (lanjutan)

Berikut ini adalah ikhtisar beberapa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) - IAI yang relevan untuk Bank namun belum berlaku efektif untuk laporan keuangan 31 Desember 2019:

- PSAK 72 : Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan
- PSAK 73 : Sewa

Standar tersebut belum berlaku efektif pada tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2019. Pada saat tanggal penerbitan laporan keuangan ini, manajemen sedang mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru dan revisi tersebut serta pengaruhnya pada laporan keuangan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

ai. Changes in accounting policies and disclosures (continued)

The following items summarize several Statements of Financial Accounting Standards (SFAS) and the Interpretation of Financial Accounting Standards (IFAS) which were issued by the Financial Accounting Standards Board (FASB) - IAI and are relevant to the Bank but have not come into effect on financial statements as of December 31, 2019:

- *SFAS 72 : Revenue from Contract with Customer*
- *SFAS 73 : Rent*

The standards shall be effective only for fiscal year beginning on or after January 1, 2019. As of date of issuance of these financial statements, the management is studying the possible impacts of the adoption of the new standards and those revisions as well as its effects on the financial statements.

3. KAS / *3. CASH*

Akun ini terdiri dari: / *This account consists of:*

	31 Desember / *December 31,* 2019		31 Desember / *December 31,* 2018		
	Jumlah nosional mata uang asing/ *Notional amount in foreign currencies* (Dalam nilai penuh/*In full amount*)	**Setara dengan/ *Equivalent to* Rupiah**	**Jumlah nosional mata uang asing/ *Notional amount in foreign currencies* (Dalam nilai penuh/*In full amount*)**	**Setara dengan/ *Equivalent to* Rupiah**	
Rupiah		742.365.238		751.821.975	***Rupiah***
Mata uang asing					***Foreign Currencies***
Dolar Amerika Serikat	1.528.077	21.213.529	1.615.751	23.234.499	*United States Dollar*
Riyal Saudi Arabia	76.066	281.499	154.060	590.564	*Saudi Arabian Riyal*
Dolar Singapura	43.581	449.536	87.435	922.869	*Singapore Dollar*
Ringgit Malaysia	63.910	216.767	43.854	152.472	*Malaysian Ringgit*
		22.161.331		24.900.404	
Jumlah		**764.526.569**		**776.722.379**	***Total***

Saldo kas termasuk uang yang ada pada mesin ATM (*Automated Teller Machines*) pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sejumlah Rp81.459.650 dan Rp89.048.800.

Cash including cash in ATMs (Automated Teller Machines) as of December 31, 2019 and 2018 amounted to Rp81,459,650 and Rp89,048,800, respectively.

4. GIRO DAN PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA / *4. CURRENT ACCOUNTS AND PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA*

a. Berdasarkan jenis dan mata uang: / *a. By type and currencies:*

	31 Desember/ *December 31,* 2019	31 Desember/ *December 31,* 2018	
Pihak ketiga			***Third Party***
Rupiah			***Rupiah***
Giro pada Bank Indonesia	2.075.696.152	2.460.721.545	*Current accounts with Bank Indonesia*
Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS)	219.000.000	2.707.000.000	*Bank Indonesia Sharia Deposit Facility (FASBIS)*
Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)	175.000.000	50.000.000	*Bank Indonesia Sharia Certificates (SBIS)*
Transaksi Kliring TOM	708.089	1.332.140	*Tomorrow Clearing Transaction*
	2.470.404.241	5.219.053.685	
Mata uang asing			***Foreign currency***
Dolar Amerika Serikat			***United States Dollar***
Giro pada Bank Indonesia (2019 : USD2.520.000 dan 2018 : USD3.371.000)	34.983.900	48.474.980	*Current Account with Bank Indonesia (2019 : USD2,520,000 and 2018 : USD3,371,000)*
Deposito Berjangka BI (2019 : Nihil dan 2018: USD5.000.000)	--	71.900.000	*BI Term Deposit (2019: Nil and 2018:USD5,000,000)*
Jumlah	**2.505.388.141**	**5.339.428.665**	***Total***

b. Berdasarkan jangka waktu: / *b. By time period:*

	31 Desember/ *December 31,* 2019	31 Desember/ *December 31,* 2018	
Pihak Ketiga			***Third parties***
Rupiah			***Rupiah***
≤ 1 bulan	2.470.404.241	5.219.053.685	*≤ 1 month*
	2.470.404.241	5.219.053.685	
Mata uang asing			***Foreign currency***
Dolar Amerika Serikat			***United States Dollar***
≤ 1 bulan (2019 : USD2.520.000 dan 2018 : USD8.371.000)	34.983.900	120.374.980	*≤ 1 month (2019 : USD2,520,000 and 2018 : USD8,371,000)*
Jumlah	**2.505.388.141**	**5.339.428.665**	***Total***

4. GIRO DAN PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA (Lanjutan)

4. CURRENT ACCOUNTS AND PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA (Continued)

c. Berdasarkan sisa umur jatuh tempo:

c. By remaining period to maturity:

	31 Desember/ *December 31,* 2019	31 Desember/ *December 31,* 2018	
Pihak Ketiga			***Third parties***
Rupiah			***Rupiah***
≤ 1 bulan	2.470.404.241	5.219.053.685	*≤ 1 month*
	2.470.404.241	5.219.053.685	
Mata uang asing			***Foreign currency***
Dolar Amerika Serikat			***United States Dollar***
≤ 1 bulan (2019 : USD2.520.000 dan 2018 : USD8.371.000)	34.983.900	120.374.980	*≤ 1 month (2019 : USD2,520,000 and 2018 : USD8,371,000)*
Jumlah	**2.505.388.141**	**5.339.428.665**	***Total***

d. Rata-rata tingkat bonus tahunan dan rasio Giro Wajib Minimum (GWM) adalah sebagai berikut:

d. The annual average bonus rate and Statutory Reserves Requirement (Giro Wajib Minimum/GWM) ratio are as follows:

	31 Desember/ *December 31,* 2019	31 Desember/ *December 31,* 2018	
Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS)	4,25%	5,25%	*Bank Indonesia Sharia Deposit Facilities (FASBIS)*
Rasio GWM (tidak diaudit) :			*Statutory Reserves Requirement Ratio (unaudited):*
Rupiah	4,82%	5,41%	*Rupiah*
Mata uang asing	1,10%	1,10%	*Foreign currencies*

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No.20/3/PBI/2018 tanggal 29 Maret 2018, setiap bank diwajibkan memelihara Giro Wajib Minimum (GWM) dalam Rupiah dan Valuta Asing yang besarnya ditetapkan sebesar 5% dan 1% dari dana pihak ketiga dalam Rupiah dan Valuta asing.

Based on Bank Indonesia Regulation No.20/3/PBI/2018 dated March 29, 2019, every bank is required to maintain Minimum Statutory Reserves Requirement in Rupiah and Foreign Currencies equivalent to 5% and 1% of its third party funds denominated in Rupiah and Foreign Currencies.

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No.21/27/PADG/2019 tanggal 26 Desember 2019, terdapat perubahan bahwa setiap bank diwajibkan memelihara Giro Wajib Minimum (GWM) dalam Rupiah dan Valuta Asing yang besarnya ditetapkan sebesar 4% dan 1% dari dana pihak ketiga dalam Rupiah dan Valuta asing.

Based on Bank Indonesia Regulation No.21/27/PADG/2019 dated December 26, 2019, there is amendment to the Statutory Reserves Requirement, where every bank is required to maintain Minimum Statutory Reserves Requirement (GWM) in Rupiah and Foreign Currencies equivalent to 4% and 1% of its third party funds denominated in Rupiah and Foreign Currencies.

Saldo giro pada Bank Indonesia disediakan untuk memenuhi persyaratan Giro Wajib Minimum (GWM) dari Bank Indonesia.

The balance of current accounts with Bank Indonesia is maintained to meet the Minimum Statutory Reserves Requirement (GWM) of Bank Indonesia.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, Bank telah memenuhi Giro Wajib Minimum sesuai dengan ketentuan OJK.

As of December 31, 2019 and 2018, the Bank has complied with the Minimum Statutory Reserves Requirement under the FSA.

5. GIRO PADA BANK LAIN / *5. CURRENT ACCOUNTS WITH OTHER BANKS*

a. Berdasarkan mata uang: / *a. By currencies:*

	31 Desember / *December 31,* 2019		31 Desember / *December 31,* 2018		
	Jumlah nosional Mata uang asing/ *Notional amount in Foreign currencies* (Dalam nilai penuh/ *In full amount*)	**Ekuivalen/ *Equivalent to* Rupiah**	**Jumlah nosional Mata uang asing/ *Notional amount in Foreign currencies* (Dalam nilai penuh/ *In full amount*)**	**Ekuivalen/ *Equivalent to* Rupiah**	
Pihak ketiga					***Third parties***
Rupiah		55.884.433		57.545.689	***Rupiah***
Mata uang asing					***Foreign currencies***
Dolar Amerika Serikat	17.859.302	247.931.754	39.899.206	573.750.587	*United States Dollar*
Dolar Singapura	239.885	2.474.429	174.068	1.837.273	*Singapore Dollar*
Ringgit Malaysia	8.861.872	30.057.430	2.078.220	7.225.533	*Malaysian Ringgit*
Euro	141.007	2.195.571	203.988	3.353.692	*Euro*
Riyal Arab Saudi	266.057	984.604	154.654	592.843	*Saudi Arabian Riyal*
Dinar Kuwait	10.000	458.002	10.000	473.720	*Kuwaiti Dinar*
Yen Jepang	527.819	67.461	1.088.603	142.193	*Japanese Yen*
		284.169.251		587.375.841	
Jumlah		**340.053.684**		**644.921.530**	***Total***
Cadangan kerugian penuruan nilai		--		(1.284.378)	*Allowance for impairment losses*
Bersih		**340.053.684**		**643.637.152**	***Net***

b. Berdasarkan jenis dan bank: / *b. By type and bank:*

	31 Desember / *December 31,* 2019		
	Jumlah nosional Mata uang asing/ *Notional amount in Foreign currencies* (Dalam nilai penuh/ *In full amount*)	**Ekuivalen/ *Equivalent to Rupiah***	
Pihak ketiga			***Third Parties***
Rupiah			***Rupiah***
Bank Syariah			***Sharia Bank***
PT BPD Jatim - Unit Usaha Syariah	--	13.360.761	*PT BPD Jatim - Sharia Business Unit*
PT BPD Sulselbar - Unit Usaha Syariah	--	1.064.230	*PT BPD Sulselbar - Sharia Business Unit*
PT Bank BRI Syariah	--	1.656.668	*PT Bank BRI Syariah*
PT BPD Jateng - Unit Usaha Syariah	--	1.045	*PT BPD Jateng - Sharia Business Unit*
PT Bank Syariah Mandiri	--	22.308	*PT Bank Syariah Mandiri*
		16.105.012	

5. GIRO PADA BANK LAIN (Lanjutan)

5. CURRENT ACCOUNTS WITH OTHER BANKS (Continued)

b. Berdasarkan jenis dan bank: (lanjutan)

b. By type and bank: (continued)

	31 Desember / *December 31, 2019*		
	Jumlah nosional Mata uang asing/ *Notional amount in Foreign currencies* (Dalam nilai penuh/ *In full amount*)	**Ekuivalen/ *Equivalent to Rupiah***	
Bank Umum Konvensional			***Conventional Bank***
PT Bank Central Asia Tbk	--	30.088.132	*PT Bank Central Asia Tbk*
PT BPD Papua	--	15.970	*PT BPD Papua*
PT BPD Sumbar	--	49.360	*PT BPD Sumbar*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	--	6.213.160	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT BPD Jateng	--	--	*PT BPD Jateng*
Standard Chartered Bank Indonesia	--	586.881	*Standard Chartered Bank Indonesia*
PT BPD Sumsel Babel	--	103.074	*PT BPD Sumsel Babel*
PT BPD Lampung	--	86.163	*PT BPD Lampung*
PT BPD Sumut	--	45.668	*PT BPD Sumut*
PT BPD Riau	--	25.719	*PT BPD Riau*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	--	14.721	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT BPD Jambi	--	13.166	*PT BPD Jambi*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	--	380	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
Bank Jabar Banten	--	8.841	*Bank Jabar Banten*
Lain-lain (di bawah Rp10.000)	--	2.528.186	*Others (below Rp10,000)*
		55.884.433	
Mata uang asing			***Foreign currencies***
Bank Syariah			***Sharia Bank***
Malayan Banking Berhad	910.079	4.050.624	*Malayan Banking Berhad*
Bank Islam Malaysia Berhad	269.402	12.575.376	*Bank Islam Malaysia Berhad*
Bank Muamalat Malaysia Berhad	269.268	1.013.073	*Bank Muamalat Malaysia Berhad*
Bank Simpanan Nasional	232.847	1.011.651	*Bank Simpanan Nasional*
		18.650.724	

5. GIRO PADA BANK LAIN (Lanjutan) / *5. CURRENT ACCOUNTS WITH OTHER BANKS (Continued)*

b. Berdasarkan jenis dan bank: (lanjutan) / *b. By type and bank: (continued)*

	31 Desember / *December 31,* 2019		
	Jumlah nosional Mata uang asing/ *Notional amount in Foreign currencies* (Dalam nilai penuh / *In full amount*)	**Ekuivalen/ *Equivalent to* Rupiah**	
Mata uang asing			***Foreign currencies***
Bank Umum Konvensional			***Conventional Bank***
Citibank NA, cabang New York	31.921.260	232.728.148	*Citibank NA, New York branch*
PT Bank Central Asia Tbk	7.794.634	9.352.313	*PT Bank Central Asia Tbk*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	149.747	5.434.790	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
Standard Chartered Bank Indonesia	125.866	2.195.571	*Standard Chartered Bank Indonesia*
The Development Bank of Singapore Limited	174.068	2.474.428	*The Development Bank of Singapore Limited*
N.V. De Indonesische Overzeese Bank (Indover Bank)	--	--	*N.V. De Indonesische Overzeese Bank (Indover Bank)*
Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad	317.772	11.387.252	*Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad*
The National Commercial Bank	29.654	522.014	*The National Commercial Bank*
Al-Rajhi Banking & Investment (SAR)	182.411	462.591	*Al-Rajhi Banking & Investment (SAR)*
Bank Boubyan, Kuwait	10.000	458.002	*Boubyan Bank, Kuwait*
Citibank NA, Cabang Indonesia	22.101	222.758	*Citibank NA, Indonesia Branch*
Al-Rajhi Banking & Investment (MYR)	78.851	19.455	*Al-Rajhi Banking & Investment(MYR)*
PT Bank Negara Indonesia Tokyo (Persero) Tbk	1.088.603	67.461	*PT Bank Negara Indonesia Tokyo (Persero) Tbk*
PT Kookmin Bank	11.464	193.744	*PT Kookmin Bank*
		284.169.251	
Jumlah		**340.053.684**	***Total***
Cadangan kerugian penurunan nilai		--	*Allowance for impairment losses*
Bersih		**340.053.684**	***Net***

	31 Desember / *December 31,* 2018		
	Jumlah nosional Mata uang asing/ *Notional amount in Foreign currencies* (Dalam nilai penuh/ *In full amount*)	**Ekuivalen/ *Equivalent to Rupiah***	
Pihak ketiga			***Third Parties***
Rupiah			***Rupiah***
Bank Syariah			***Sharia Bank***
PT BPD Jatim - Unit Usaha Syariah	--	4.707.411	*PT BPD Jatim - Sharia Business Unit*
PT BPD Sulselbar - Unit Usaha Syariah	--	2.450.105	*PT BPD Sulselbar - Sharia Business Unit*
PT Bank BRI Syariah	--	1.987.493	*PT Bank BRI Syariah*
PT BPD Jateng - Unit Usaha Syariah	--	1.001	*PT BPD Jateng - Sharia Business Unit*
PT Bank Syariah Mandiri	--	22.389	*PT Bank Syariah Mandiri*
		9.168.399	

5. GIRO PADA BANK LAIN (Lanjutan)

5. CURRENT ACCOUNTS WITH OTHER BANKS (Continued)

b. Berdasarkan jenis dan bank: (lanjutan)

b. By type and bank: (continued)

	31 Desember / *December 31, 2018*		
	Jumlah nosional Mata uang asing/ *Notional amount in Foreign currencies* (Dalam nilai penuh/ *In full amount*)	**Ekuivalen/ *Equivalent to Rupiah***	
Bank Umum Konvensional			***Conventional Bank***
PT Bank Central Asia Tbk	--	30.646.696	*PT Bank Central Asia Tbk*
PT BPD Papua	--	5.118.747	*PT BPD Papua*
PT BPD Sumbar	--	4.449.994	*PT BPD Sumbar*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	--	4.100.904	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT BPD Jateng	--	1.455.406	*PT BPD Jateng*
Standard Chartered Bank Indonesia	--	1.124.163	*Standard Chartered Bank Indonesia*
PT BPD Sumsel Babel	--	101.487	*PT BPD Sumsel Babel*
PT BPD Lampung	--	69.274	*PT BPD Lampung*
PT BPD Sumut	--	44.379	*PT BPD Sumut*
PT BPD Riau	--	25.260	*PT BPD Riau*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	--	18.445	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT BPD Jambi	--	14.019	*PT BPD Jambi*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	--	380	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
Lain-lain (dibawah Rp10.000)	--	1.208.136	*Others (below Rp10,000)*
		57.545.689	
Mata uang asing			***Foreign currencies***
Bank Syariah			***Sharia Bank***
Malayan Banking Berhad	910.079	3.164.154	*Malayan Banking Berhad*
Bank Islam Malaysia Berhad	269.402	936.655	*Bank Islam Malaysia Berhad*
Bank Muamalat Malaysia Berhad	269.268	936.187	*Bank Muamalat Malaysia Berhad*
Bank Simpanan Nasional	232.847	809.561	*Bank Simpanan Nasional*
		5.846.557	

5. GIRO PADA BANK LAIN (Lanjutan)

5. *CURRENT ACCOUNTS WITH OTHER BANKS (Continued)*

b. Berdasarkan jenis dan bank: (lanjutan)

b. By type and bank: (continued)

	31 Desember / *December 31, 2018*		
	Jumlah nosional Mata uang asing/ *Notional amount in Foreign currencies* (Dalam nilai penuh/ *In full amount*)	**Ekuivalen/ *Equivalent to* Rupiah**	
Mata uang asing			***Foreign currencies***
Bank Umum Konvensional			***Conventional Bank***
Citibank NA, cabang New York	31.921.260	459.027.722	*Citibank NA, New York branch*
PT Bank Central Asia Tbk	7.794.634	112.086.835	*PT Bank Central Asia Tbk*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	149.747	2.153.365	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
Standard Chartered Bank Indonesia	125.866	2.069.314	*Standard Chartered Bank Indonesia*
The Development Bank of Singapore Limited	174.068	1.837.273	*The Development Bank of Singapore Limited*
N.V. De Indonesische Overzeese Bank (Indover Bank)	78.122	1.284.378	*N.V. De Indonesische Overzeese Bank (Indover Bank)*
Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad	317.772	1.104.827	*Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad*
The National Commercial Bank	29.654	113.675	*The National Commercial Bank*
Al-Rajhi Banking & Investment (SAR)	182.411	479.168	*Al-Rajhi Banking & Investment (SAR)*
Bank Boubyan, Kuwait	10.000	473.720	*Boubyan Bank, Kuwait*
Citibank NA, cabang Indonesia	22.101	317.813	*Citibank NA, Indonesia Branch*
Al-Rajhi Banking & Investment (MYR)	78.851	274.149	*Al-Rajhi Banking & Investment(MYR)*
PT Bank Negara Indonesia Tokyo (Persero) Tbk	1.088.603	142.193	*PT Bank Negara Indonesia Tokyo (Persero) Tbk*
PT Kookmin Bank	11.464	164.852	*PT Kookmin Bank*
		587.375.841	
Jumlah		**644.921.530**	***Total***
Cadangan kerugian penurunan nilai		(1.284.378)	*Allowance for impairment losses*
Bersih		**643.637.152**	***Net***

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 tingkat pengembalian (bonus dan bunga) rata-rata dari giro pada bank lain adalah sebesar 0,08% dan 0,09%.

As of December 31, 2019 and 2018, the average return (bonus and interest) of current accounts with other banks is 0.08% and 0.09%.

Bank melakukan penilaian terhadap giro pada bank lain secara individual dengan mempertimbangkan adanya bukti objektif penurunan nilai.

The Bank assessed current accounts with other banks individually for impairment based on whether an objective evidence of impairment exists.

5. GIRO PADA BANK LAIN (Lanjutan)

b. Berdasarkan jenis dan bank: (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2019 seluruh giro pada bank lain dikelompokkan lancar, kecuali untuk giro pada Indover Bank pada tanggal 31 Desember 2018 dikelompokkan macet.

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai giro pada bank lain adalah sebagai berikut:

5. CURRENT ACCOUNTS WITH OTHER BANKS (Continued)

b. By type and bank: (continued)

All current accounts with other banks as of December 31, 2019 are classified as current except current account with Indover Bank as of December 31, 2018, which is classified as loss.

The changes in allowance for impairment losses on current accounts with other banks are as follows:

	31 Desember/ *December 31,* 2019	**31 Desember/ *December 31,* 2018**	
Saldo awal tahun	1.284.378	1.268.407	*Balance at the beginning of the year*
Pembentukan (Pembalikan) selama tahun berjalan (Catatan 36)	--	--	*Provision (Reversal) during the year (Note 36)*
Penghapusbukuan	(1.284.378)	--	*Written - Off*
Selisih Kurs	--	15.971	*Exchange rate differences*
Saldo akhir tahun	**--**	**1.284.378**	***Balance at the end of the year***

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 telah memadai.

Management believes that allowance for impairment losses as of December 31, 2019 and 2018 is adequate.

Pendapatan jasa giro yang diterima dari giro pada bank umum konvensional untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp523.923 dan Rp633.223 yang dijadikan dana kebajikan yang disalurkan melalui Baitul Maal Muamalat.

Interest income received from current accounts with conventional banks for the years ended December 31, 2019 and 2018 amounted to Rp523,923 and Rp633,223, respectively, which is treated as social charitable funds which are distributed through Baitul Maal Muamalat.

Tidak terdapat giro pada bank lain yang dijadikan jaminan pada 31 Desember 2019 dan 2018.

No current accounts with other banks is used as collateral as of December 31, 2019 and 2018.

6. PENEMPATAN PADA BANK LAIN / *6. PLACEMENTS WITH OTHER BANKS*

a. Berdasarkan jenis: / *a. By type:*

	31 Desember/ *December 31,* 2019	31 Desember/ *December 31,* 2018	
Pihak ketiga			***Third Parties***
Rupiah			***Rupiah***
Deposito berjangka *mudharabah*			*Mudharabah Time Deposits*
BPRS Wakalumi	1.451.233	1.451.233	*BPRS Wakalumi*
BPRS Dana Cipaganti	418.830	418.830	*BPRS Dana Cipaganti*
BPRS Baiturrahman	100.000	100.000	*BPRS Baiturrahman*
BPRS Bina Rahmah	100.000	100.000	*BPRS Bina Rahmah*
BPRS Baktimakmur Indah	100.000	100.000	*BPRS Baktimakmur Indah*
BPRS Rifatul Ummah	100.000	100.000	*BPRS Rifatul Ummah*
BPRS Hareukat Lambaro	100.000	100.000	*BPRS Hareukat Lambaro*
BPRS PNM Mentari	50.000	50.000	*BPRS PNM Mentari*
BPRS Hikmah Wakilah	50.000	50.000	*BPRS Hikmah Wakilah*
BPRS Amanah Sejahtera	50.000	50.000	*BPRS Amanah Sejahtera*
BPRS Amanah Bangsa	36.000	36.000	*BPRS Amanah Bangsa*
BPRS Harum Hikmahnugraha	30.000	30.000	*BPRS Harum Hikmahnugraha*
BPRS Daya Artha Mandiri	26.750	26.750	*BPRS Daya Artha Mandiri*
	2.612.813	2.612.813	
Mata uang asing			***Foreign Currencies***
Dolar Amerika Serikat			***United States Dollar***
Deposito Jaminan			*Collateral Deposit*
Investasi Wakalah BIMB (2019: MYR10.000.000 dan 2018:MYR2.400.000	33.917.700	8.344.296	*BIMB Wakalah Investment (2019: MYR10,000,000 and 2018: MYR2,400,000)*
Citibank N.A New York (2019: USD150.000 2018:USD150.000)	2.082.375	2.157.000	*Citibank N.A New York (2019: USD150,000 and 2018: USD150,000)*
	36.000.075	10.501.296	
Jumlah	**38.612.888**	**13.114.109**	***Total***
Cadangan kerugian penurunan nilai	(787.273)	(787.273)	*Allowance for impairment losses*
Bersih	**37.825.615**	**12.326.836**	***Net***

b. Berdasarkan jangka waktu: / *b. By maturity:*

	31 Desember/ *December 31,* 2019	31 Desember/ *December 31,* 2018	
Pihak ketiga			***Third parties***
Rupiah			***Rupiah***
≥ 1 - ≤ 3 bulan	1.543.983	2.051.913	*≥ 1 - ≤ 3 months*
> 3 - ≤ 12 bulan	1.068.830	560.900	*> 3 - ≤ 12 months*
	2.612.813	2.612.813	
Mata uang asing			***Foreign currency***
Dolar Amerika Serikat			***United States Dollar***
≥ 1 - ≤ 3 bulan	--	8.344.296	*≥ 1 - ≤ 3 months*
≥ 12 bulan	36.000.075	2.157.000	*≥ 12 months*
	36.000.075	10.501.296	
Jumlah	**38.612.888**	**13.114.109**	***Total***
Cadangan kerugian penurunan nilai	(787.273)	(787.273)	*Allowance for impairment losses*
Bersih	**37.825.615**	**12.326.836**	***Net***

6. PENEMPATAN PADA BANK LAIN (Lanjutan) / *6. PLACEMENTS WITH OTHER BANKS (Continued)*

c. Berdasarkan sisa umur jatuh tempo / *c. By remaining period to maturity:*

	31 Desember/ *December 31,* 2019	31 Desember/ *December 31,* 2018	
Pihak Ketiga			***Third parties***
Rupiah			***Rupiah***
≤ 1 bulan	1.693.983	2.021.325	*≤ 1 month*
> 1 - ≤ 3 bulan	618.830	98.738	*> 1 - ≤ 3 months*
> 3 - ≤ 12 bulan	300.000	492.750	*> 3 - ≤ 12 months*
	2.612.813	2.612.813	
Mata uang asing			***Foreign currencies***
Dolar Amerika Serikat			*United States Dollar*
≤ 1 bulan	--	8.344.296	*≤ 1 month*
> 3 - ≤ 12 bulan	36.000.075	--	*> 3 - ≤ 12 months*
≥ 12 bulan	--	2.157.000	*≥ 12 months*
	36.000.075	10.501.296	
Jumlah	**38.612.888**	**13.114.109**	***Total***
Cadangan kerugian penurunan nilai	(787.273)	(787.273)	*Allowance for impairment losses*
Bersih	**37.825.615**	**12.326.836**	***Net***

d. Berdasarkan kolektibilitas: / *d. By collectibility:*

	31 Desember/ *December 31,* 2019	31 Desember/ *December 31,* 2018	
Pihak ketiga			***Third parties***
Lancar	38.067.307	12.568.528	*Current*
Macet	545.581	545.581	*Loss*
Jumlah	**38.612.888**	**13.114.109**	***Total***
Cadangan kerugian penurunan nilai	(787.273)	(787.273)	*Allowance for impairment losses*
Bersih	**37.825.615**	**12.326.836**	***Net***

e. Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai penempatan pada bank lain adalah sebagai berikut: / *e. Changes in allowance for impairment losses on placements with other banks are as follows:*

	31 Desember/ *December 31,* 2019	31 Desember/ *December 31,* 2018	
Saldo awal tahun	787.273	787.273	*Balance at the beginning of the year*
Pembentukan selama tahun berjalan (Catatan 36)	--	--	*Provision during the year (Note 36)*
Saldo akhir tahun	**787.273**	**787.273**	***Balance at the end of the year***

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 telah memadai.

Management believes that the allowance for impairment losses as of December 31, 2019 and 2018 is adequate.

6. PENEMPATAN PADA BANK LAIN (Lanjutan)

6. *PLACEMENTS WITH OTHER BANKS (Continued)*

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, tidak ada penempatan pada bank lain yang digunakan sebagai agunan.

As of December 31, 2019 and 2018, there are no placements with other banks used as collateral.

Rata-rata tingkat imbal hasil adalah sebagai berikut:

The annual average return ratio is as follows:

	31 Desember/ *December 31,* 2019	**31 Desember/ *December 31,* 2018**	
Deposito berjangka *mudharabah*	1,22%	2,04%	*Mudharabah time deposit*

7. INVESTASI PADA SURAT BERHARGA

7. *INVESTMENT IN MARKETABLE SECURITIES*

a. Berdasarkan tujuan, mata uang dan jenis:

a. By purpose, currency and type:

	31 Desember/ *December 31,* 2019	**31 Desember/ *December 31,* 2018**	
Diukur pada nilai wajar			***Measured at fair value***
Pihak Ketiga			***Third Parties***
Rupiah			***Rupiah***
Sukuk Pemerintah	20.628.086	2.789.809	*Government Sukuk*
Diukur pada biaya perolehan			***Measured at acquisition cost***
Pihak ketiga			***Third parties***
Rupiah			***Rupiah***
Sukuk korporasi	8.077.681.015	8.085.430.760	*Corporate sukuk*
Sukuk pemerintah	1.949.561.078	2.811.707.563	*Government sukuk*
Surat berharga Repo (Catatan 21)	1.300.000.000	1.300.000.000	*Marketable Repo Securities (Note 21)*
	11.327.242.093	12.197.138.323	
Jumlah	**11.347.870.179**	**12.199.928.132**	***Total***
Cadangan kerugian penurunan nilai	(14.975.000)	(14.975.000)	*Allowance for impairment losses*
Bersih	**11.332.895.179**	**12.184.953.132**	***Net***

7. INVESTASI PADA SURAT BERHARGA (Lanjutan)

7. INVESTMENT IN MARKETABLE SECURITIES (Continued)

b. Berdasarkan kolektibilitas

Bank melakukan penilaian atas penurunan nilai surat berharga secara individual dengan adanya bukti objektif penurunan nilai.

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai investasi pada surat berharga adalah cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya investasi pada surat berharga.

b. By collectibility

The Bank assessed the marketable securities individually for impairment based on whether an objective evidence of impairment exists.

Management believes that the allowance for impairment losses is adequate to cover possible losses that might arise from uncollectible investment in marketable securities.

c. Berdasarkan sisa umur jatuh tempo

Klasifikasi jangka waktu surat berharga berdasarkan sisa umur sampai dengan saat jatuh tempo adalah sebagai berikut:

c. By remaining period to maturity

The classification of marketable securities by the remaining period to maturity is as follows:

	31 Desember/ *December 31,* 2019	**31 Desember/ *December 31,* 2018**	
Pihak ketiga			***Third parties***
Rupiah			***Rupiah***
≤ 2 tahun	1.485.032.354	928.544.243	*≤ 2 years*
> 2 - ≤ 5 tahun	129.207.543	628.644.575	*> 2 - ≤ 5 years*
> 5 tahun	9.733.630.282	10.642.739.314	*> 5 years*
Jumlah	11.347.870.179	12.199.928.132	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(14.975.000)	(14.975.000)	*Allowance for impairment losses*
Bersih	**11.332.895.179**	**12.184.953.132**	***Net***

d. Berdasarkan jenis dan penerbit

1) Sukuk Pemerintah

Sukuk Pemerintah merupakan sukuk yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia dalam rangka pengelolaan portofolio surat utang negara.

d. By type and issuer

1) Government Sukuk

Government Sukuk represents sukuk issued by the Republic of Indonesia in connection with the management of Government bonds portfolio.

Seri/*Series*	**Tingkat bagi hasil rata-rata per tahun/ *Average annual revenue sharing rate* (%)**	**Tanggal jatuh tempo/ *Maturity date***	**31 Desember/ *December 31,* 2019**	**2018**
Diukur pada nilai wajar/ *Measured at fair value*				
Rupiah				
Seri SR 008	8,50%	10 Maret 2019/ *March 10, 2019*	--	1.571.918
Seri SR 009	6,90%	10 Maret 2020/ *March 10, 2020*	1.044.358	752.645
Seri SR 010	5,90%	10 Maret 2020/ *March 10, 2020*	2.229.019	465.246
Seri SR 011	8,05%	10 Maret 2022/ *March 10, 2022*	3.840.862	--
PBS 002	5,45%	15 Januari 2022/ *January 15, 2022*	933.126	--
PBS 026	6,63%	15 Oktober 2024/ *October 15, 2024*	12.580.721	--
			20.628.086	2.789.809

7. INVESTASI PADA SURAT BERHARGA (Lanjutan)

7. *INVESTMENT IN MARKETABLE SECURITIES (Continued)*

d. Berdasarkan jenis dan penerbit (lanjutan)

d. By type and issuer (continued)

1) Sukuk Pemerintah (lanjutan)

1) Government Sukuk (continued)

Seri/*Series*	Tingkat bagi hasil rata-rata per tahun/ *Average annual revenue sharing rate* (%)	Tanggal jatuh tempo/ *Maturity date*	31 Desember/ *December 31,* 2019	2018
Diukur pada biaya perolehan/ *Measured at acquisition cost*				
Rupiah				
Seri IFR 006	10,25%	15 Maret 2030/ *March 15, 2030*	67.094.043	372.558.930
Seri IFR 007	10,25%	15 Januari 2030/ *January 15, 2030*	2.317.405	21.775.351
Seri IFR 0008	8,80%	15 Maret 2025/ *March 15, 2025*	402.574	87.356.398
Seri IFR 0010	10,00%	15 Pebuari 2036/ *Febuary 15, 2036*	165.753.802	431.324.659
Seri PBS 002	5,45%	15 Januari 2022/ *January 15, 2022*	39.026.791	41.796.037
Seri PBS 003	6,00%	15 Januari 2027/ *January 15, 2027*	128.969.818	128.431.243
Seri PBS 004	6,10%	15 Febuari 2037/ *Febuary 15, 2037*	1.048.382.980	851.073.442
Seri PBS 005	6,75%	15 April 2043/ *April 15, 2043*	301.147.829	--
Seri PBS 012	8,88%	15 November 2031/*November 15, 2031*	6.300.099	6.368.132
Seri PBS 013	6,25%	15 Mei 2019/ *May 15, 2019*	--	34.613.679
Seri PBS 014	5,90%	10 Maret 2021/ *March 10, 2021*	1.393.802	108.921.338
Seri PBS 016	6,25%	15 Maret 2020/ *March 15, 2020*	404.868	153.984.460
Seri PBS 017	6,125%	15 Oktober 2025/ *October 15, 2025*	--	91.593.877
Seri PBS 019	6,90%	10 Maret 2020/ *March 10, 2020*	--	67.446.478
Seri PBS 021	8,50%	15 November 2026/ *November 15, 2026*	13.229.381	--
SPNS05032019	6,62%	5 Maret 2019/ *March 5, 2019*	--	53.683.277
SPNS08022019	6,25%	8 Februari 2019/ *February 8, 2019*	--	9.936.597
SPNS08052019	6,53%	8 Mei 2019/ *May 8, 2019*	--	18.750.331
SR008	8,30%	10 Maret 2019/ *March 10, 2019*	--	80.369.843
SR009	6,90%	10 Maret 2020/ *March 10, 2020*	--	196.653.368
SR010	5,90%	10 Maret 2021/ *March 10, 2021*	9.885.307	55.070.123
SR011	3,78%	10 Maret 2022/ *March 10, 2022*	15.252.379	--
SUKBI020120092MSYN	5,34%	2 Januari 2020/ *January 2, 2020*	75.000.000	--
SUKBI150120091MSYN	5,34%	15 Januari 2020/ *January 15, 2020*	25.000.000	--
SUKBI220120091MSYN	5,34%	22 Januari 2020/ *January 22, 2020*	25.000.000	--
SUKBI290120091MSYN	5,08%	29 Januari 2020/ *January 29, 2020*	25.000.000	--
			1.949.561.078	2.811.707.563

2) Sukuk Korporasi

2) Corporate Sukuk

Seri/*Series*	Tingkat bagi hasil rata-rata per tahun/ *Average annual revenue sharing rate* (%)	Tanggal jatuh tempo/ *Maturity date*	Peringkat/ *Rating* 2018	31 Desember/*December 31,* 2019	2018
Diukur pada biaya perolehan/ *Measured at acquisition cost*					
Sukuk *Trust Receipt*	--	29 Juni 2038/ *June 29, 2038*	--	8.000.000.000	8.000.000.000
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahap II Tahun 2013 Seri B	9,60%	10 Desember 2023/ *December 10, 2023*	idAAA(sy)	47.631.015	45.435.600
Sukuk Ijarah Berkelanjutan PLN Tahap 1 Tahun 2013	8,00%	5 Juli 2020/ *July 5, 2020*	idAAA(sy)	15.075.000	14.969.790
Sukuk Ijarah Indosat V Tahun 2012	8,63%	27 Juni 2019/ *June 27, 2019*	idAAA+(sy)	--	10.050.370
Sukuk Berlian Laju Tanker II Seri B	10,30%	5 Juli 2012/ *July 5, 2012*	idD(sy)	5.000.000	5.000.000
Obligasi Sumberdaya Sewatama I Tahun 2012 Seri A	9,60%	31 Maret 2024/ *March 31, 2024*	idA(sy)	9.975.000	9.975.000
				8.077.681.015	8.085.430.760
Jumlah / *Total*				**11.347.870.179**	**12.199.928.132**

7. INVESTASI PADA SURAT BERHARGA (Lanjutan)

7. INVESTMENT IN MARKETABLE SECURITIES (Continued)

e) Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

e) *Changes in allowance for impairment losses are as follows:*

	31 Desember/ *December 31,* 2019	**31 Desember/ *December 31,* 2018**	
Saldo awal	14.975.000	5.000.000	*Beginning balance*
Penyisihan tahun berjalan (Catatan 36)	--	9.975.000	*Provision during the year (Note 36)*
Saldo akhir	**14.975.000**	**14.975.000**	***Ending balance***

f) Perubahan laba yang belum direalisasi atas pemilikan investasi pada surat berharga tersedia untuk dijual:

f) *Changes in unrealized gain on increase in value of investments in securities available for sale:*

	31 Desember/ *December 31,* 2019	**31 Desember/ *December 31,* 2018**	
Saldo Awal	(16.963.907)	4.311.118	*Beginning balance*
Perubahan nilai investasi pada surat berharga - neto	6.798.629	(21.275.025)	*Change in value of investments in securities - net*
Saldo Akhir	**(10.165.278)**	**(16.963.907)**	***Ending balance***

g) Informasi penting lainnya:

Pada tanggal 29 Juni 2018, Bank telah melakukan perjanjian pengalihan portofolio atas piutang *murabahah*, pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, *pinjaman qardh*, Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) dan aktiva lainnya atas margin piutang *murabahah* serta pendapatan yang akan diterima bagi hasil *mudharabah* dan *musyarakah* ("kumpulan tagihan portofolio") yang dimilikinya. Dalam rangka penyehatan Bank, selanjutnya atas kumpulan tagihan portofolio yang telah diverifikasi dan memenuhi kriteria pemilihan untuk dijual dan dialihkan oleh Bank sebagai Kreditur Awal, telah dijual dan dialihkan ke Tameer Sukuk SPC Limited selaku pembeli yang tertuang dalam Perjanjian Pengalihan Portofolio tertanggal 29 Juni 2018.

Nilai pokok kumpulan tagihan portofolio yang dijual dan dialihkan tersebut yang merupakan kumpulan tagihan portofolio yang telah diverifikasi dan memenuhi kriteria pemilihan untuk dijual dan dialihkan dalam mata uang US Dolar sebesar USD423.639.060 (dalam angka penuh) atau senilai Rp6.000.000.000 (1 Dolar AS = Rp14.163) dengan harga sebesar nilai pokok kumpulan tagihan portofolio pada tanggal *cut off* final (29 Juni 2018).

g) *Other significant information is as follows:*

On June 29, 2018, the Bank entered into a portfolio transfer agreement for murabahah receivables, mudharabah financing, musyarakah financing, funds of qardh, foreclosed assets and other assets on the murabahah receivable margin and the revenue to be received for mudharabah and musyarakah ("claims of portfolio") held. Subsequently, for the purpose of Bank restructuring, the claims of verified portfolio meeting the eligibility criteria for sale and transfer by the Bank as the Original Creditor have been sold and transferred to Tameer Sukuk SPC Limited as the buyer as stipulated in the Portfolio Transfer Agreement dated June 29, 2018.

The principal amount of the claims of portfolio sold and transferred, which represent the claims of verified portfolio that meet the eligibility criteria for sale and transfer, is USD423,639,060 (in full amount) or equivalent to Rp6,000,000,000 (1 US Dollar = Rp14,163) at the face value of the claims of portfolio on the final cut off date (June 29, 2018).

7. INVESTASI PADA SURAT BERHARGA (Lanjutan)

g) Informasi penting lainnya: (lanjutan)

Setelah terjadinya penjualan dan pengalihan kepada pembeli, risiko atas kumpulan tagihan portofolio telah beralih dari Bank kepada pembeli termasuk segala keuntungan dan kerugian yang akan timbul dari kumpulan tagihan portofolio tersebut.

Pada tanggal 29 Juni 2018, PT Bank Muamalat Indonesia Tbk menerbitkan Sertifikat *Sukuk Mudharabah* sebesar Rp1.600.000.000 kepada Mawthuq SPC Limited (lihat catatan 27). *Sukuk Mudharabah* yang diterbitkan oleh Bank tidak melalui penawaran umum *(public offering)* tetapi dilakukan dengan mekanisme penawaran terbatas *(private placement)*.

Pada tanggal 29 Juni 2018, PT Bank Muamalat Indonesia Tbk melakukan pembelian *Sukuk Trust Certificate* yang diterbitkan oleh Najah Sukuk SPC limited berdomisili di Uni Emirat Arab dalam mata uang US Dollar sebesar USD564.852.079 (dalam angka penuh) senilai Rp8.000.000.000 (1 USD = Rp14.163). Surat berharga tersebut dengan nama Najah Sukuk 2018-001 *Trust Certificate*. Portofolio dari Najah Sukuk 2018-001 *Trust Certificate* terdiri dari Surat Berharga Negara Indonesia dengan jangka waktu rata-rata 20 (dua puluh) tahun.

Seluruh investasi pada surat berharga pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 dikelompokkan lancar kecuali investasi surat berharga PT Berlian Laju Tanker Tbk dan Sukuk Sumberdaya Sewatama yang dikelompokkan macet.

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai investasi pada surat berharga adalah cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya investasi pada surat berharga.

7. INVESTMENT IN MARKETABLE SECURITIES (Continued)

g) Other significant information is as follows: (continued)

Upon the sale and transfer to the buyer, the risk of claims of portfolio is transferred from the Bank to the buyer including any profits and losses that will arise from the claims of portfolio.

On June 29, 2018, PT Bank Muamalat Indonesia Tbk issued Certificate of Mudharabah Sukuk amounting to Rp1,600,000,000 to Mawthuq SPC Limited (see note 27). The Mudharabah Sukuk was not issued through public offering. It was issued through private placement.

On June 29, 2018, PT Bank Muamalat Indonesia Tbk purchased Sukuk Trust Certificate issued by Najah Sukuk SPC limited, domiciled in the United Arab Emirates amounting to USD564,852,079 (in full amount) or equivalent to Rp8,000,000,000 (1 US Dollar = Rp14,163). The securities are in the form of sukuk under the name of Najah Sukuk 2018-001 Trust Certificate. The portfolio of Najah Sukuk 2018-001 Trust Certificate consists of Government Securities with an average period of 20 (twenty) years.

All investments in securities as of December 31, 2019 and 2018 are classified as current except for investments in securities with PT Berlian Laju Tanker Tbk and Sumberdaya Sewatama Sukuk, which are classified as loss.

Management believes that the allowance for impairment losses is adequate to cover possible losses that might arise from uncollectible securities held to maturity.

8. PIUTANG / *8. RECEIVABLES*

a. Berdasarkan jenis, mata uang dan kolektibilitas: / *a. By type, currencies and collectibility:*

	31 Desember/ *December 31,* 2019	**31 Desember/ *December 31,* 2018**	
Murabahah			***Murabahah***
Rupiah			***Rupiah***
Lancar	10.181.050.035	11.620.544.377	*Current*
Dalam perhatian khusus	1.833.978.725	1.753.210.739	*Special Mention*
Kurang lancar	110.694.246	189.091.058	*Substandard*
Diragukan	57.966.635	6.561.178	*Doubtful*
Macet	513.510.023	220.286.447	*Loss*
	12.697.199.664	13.789.693.799	
Mata uang asing			***Foreign currency***
Lancar	1.336.167.411	1.842.527.894	*Current*
Dalam perhatian khusus	104.760.700	--	*Special Mention*
	1.440.928.111	1.842.527.894	
Jumlah	**14.138.127.775**	**15.632.221.693**	***Total***
Cadangan kerugian penurunan nilai	(332.310.302)	(306.238.924)	*Allowance for impairment losses*
Bersih - *Murabahah*	**13.805.817.473**	**15.325.982.769**	***Net - Murabahah***
Istishna			***Istishna***
Rupiah			***Rupiah***
Lancar	3.725.303	4.392.947	*Current*
Jumlah	3.725.303	4.392.947	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(37.253)	(43.929)	*Allowance for impairment losses*
Bersih - *Istishna*	**3.688.050**	**4.349.018**	***Net - Istishna***
Piutang *ijarah*			***Ijarah receivables***
Rupiah			***Rupiah***
Dalam perhatian khusus	1.667	101.270	*Special Mention*
Kurang lancar	3.420.000	16.111	*Substandard*
Diragukan	5.833	21.239	*Doubtful*
Macet	6.522.105	6.632.460	*Loss*
Jumlah	9.949.605	6.771.080	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(5.985.397)	(6.512.885)	*Allowance for impairment losses*
Bersih - *Ijarah*	**3.964.208**	**258.195**	***Net - Ijarah***
Jumlah	**14.151.802.683**	**15.643.385.720**	***Total***
Cadangan kerugian penurunan nilai	(338.332.952)	(312.795.738)	*Allowance for impairment losses*
Bersih	**13.813.469.731**	**15.330.589.982**	***Net***

8. PIUTANG (Lanjutan) / *8. RECEIVABLES (Continued)*

b. Berdasarkan sektor ekonomi: / *b. By economic sector:*

	31 Desember/ *December 31,* 2019	31 Desember/ *December 31,* 2018	
Pihak ketiga			***Third parties***
Jasa usaha	1.240.844.748	1.348.026.032	*Business services*
Konstruksi	961.374.362	854.015.419	*Construction*
Industri	2.002.080.374	2.113.299.446	*Manufacturing*
Pengangkutan	633.812.199	842.100.990	*Transportation*
Perdagangan	1.998.263.114	2.056.807.542	*Trading*
Sosial/masyarakat	1.759.435.663	1.913.043.317	*Social/public*
Listrik, gas dan air	530.026.655	729.695.910	*Electricity, gas and water*
Pertanian	853.343.552	790.816.636	*Agriculture*
Pertambangan	252.830.865	277.664.326	*Mining*
Lainnya	3.915.775.376	4.712.713.678	*Others*
	14.147.786.908	15.638.183.296	
Pihak berelasi (Catatan 41)			***Related parties (Note 41)***
Jasa usaha	--	1.891.814	*Business services*
Lainnya	4.015.775	3.310.610	*Others*
	4.015.775	5.202.424	
Jumlah	**14.151.802.683**	**15.643.385.720**	***Total***
Cadangan kerugian penurunan nilai	(338.332.952)	(312.795.738)	*Allowance for impairment losses*
Bersih	**13.813.469.731**	**15.330.589.982**	***Net***

c. Berdasarkan jangka waktu: / *c. By maturity:*

	31 Desember/ *December 31,* 2019	31 Desember/ *December 31,* 2018	
Pihak ketiga			***Third parties***
Rupiah			***Rupiah***
≤ 1 tahun	3.764.434.650	3.833.039.733	*≤ 1 year*
> 1 - ≤ 2 tahun	1.184.105.746	617.938.227	*> 1 - ≤ 2 years*
> 2 - ≤ 5 tahun	2.218.456.050	3.430.811.219	*> 2 - ≤ 5 years*
> 5 tahun	6.980.790.462	7.756.394.117	*> 5 years*
	14.147.786.908	15.638.183.296	
Pihak berelasi (Catatan 41)			***Related parties (Note 41)***
≤ 1 tahun	83.419	--	*≤ 1 year*
> 2 - ≤ 5 tahun	472.267	415.333	*> 2 - ≤ 5 years*
> 5 tahun	3.460.089	4.787.091	*> 5 years*
	4.015.775	5.202.424	
Jumlah	**14.151.802.683**	**15.643.385.720**	***Total***
Cadangan kerugian penurunan nilai	(338.332.952)	(312.795.738)	*Allowance for impairment losses*
Bersih	**13.813.469.731**	**15.330.589.982**	***Net***

8. PIUTANG (Lanjutan) / *8. RECEIVABLES (Continued)*

d. Berdasarkan sisa umur jatuh tempo: / *d. By remaining period to maturity:*

	31 Desember/ *December 31,* 2019	**31 Desember/ *December 31,* 2018**	
Pihak ketiga			***Third parties***
Rupiah			***Rupiah***
≤ 1 tahun	5.611.349.549	4.983.746.067	*≤ 1 year*
> 1 - ≤ 2 tahun	1.057.912.542	1.362.436.401	*> 1 - ≤ 2 years*
> 2 - ≤ 5 tahun	2.475.432.678	3.282.598.621	*> 2 - ≤ 5 years*
> 5 tahun	5.003.092.139	6.009.402.207	*> 5 years*
	14.147.786.908	15.638.183.296	
Pihak berelasi (Catatan 41)			***Related parties (Note 41)***
Rupiah			***Rupiah***
≤ 1 tahun	150.876	46.424	*≤ 1 year*
> 1 - ≤ 2 tahun	314.608	237.523	*> 1 - ≤ 2 years*
> 2 - ≤ 5 tahun	961.454	1.117.874	*> 2 - ≤ 5 years*
> 5 tahun	2.588.837	3.800.603	*> 5 years*
	4.015.775	5.202.424	
Jumlah	**14.151.802.683**	**15.643.385.720**	***Total***
Cadangan kerugian penurunan nilai	(338.332.952)	(312.795.738)	*Allowance for impairment losses*
Bersih	**13.813.469.731**	**15.330.589.982**	***Net***

e. Berdasarkan keterkaitan: / *e. By relationship:*

	31 Desember/ *December 31,* 2019	**31 Desember/ *December 31,* 2018**	
Pihak ketiga	14.147.786.908	15.638.183.296	***Third parties***
Pihak berelasi (Catatan 41)			***Related parties (Note 41)***
Karyawan Kunci	4.015.775	5.202.424	*Key Employees*
	4.015.775	5.202.424	
Jumlah	**14.151.802.683**	**15.643.385.720**	***Total***
Cadangan kerugian penurunan nilai	(338.332.952)	(312.795.738)	*Allowance for impairment losses*
Bersih	**13.813.469.731**	**15.330.589.982**	***Net***

f. Tingkat margin rata-rata per tahun: / *f. Average profit margin rates per annum:*

	31 Desember/ *December 31,* 2019	**31 Desember/ *December 31,* 2018**	
Rupiah	11,37%	13,30%	*Rupiah*
Dolar Amerika Serikat	3,67%	6,24%	*United States Dollar*

8. PIUTANG (Lanjutan) / *8. RECEIVABLES (Continued)*

g. Rincian piutang bermasalah menurut sektor ekonomi adalah sebagai berikut:

g. Non-performing receivables by economic sector are as follows:

	31 Desember/ *December 31,* 2019	**31 Desember/ *December 31,* 2018**	
Industri	203.576.835	202.858.657	*Manufacturing*
Pengangkutan	15.435.594	49.866.750	*Transportation*
Sosial/masyarakat	94.978.083	42.471.702	*Social/public*
Perdagangan	153.351.455	29.720.402	*Trading*
Konstruksi	19.542.329	20.359.917	*Construction*
Pertanian	65.797.764	578.264	*Agriculture*
Jasa Usaha	2.256.086	169.601	*Business Services*
Lainnya	137.102.056	76.583.200	*Others*
	692.040.202	422.608.493	
Cadangan kerugian penurunan nilai	(168.886.919)	(90.146.582)	*Allowance for impairment losses*
Bersih	**523.153.283**	**332.461.911**	***Net***

h. Informasi penting lainnya:

Pada tanggal 29 Juni 2018, Bank telah melakukan perjanjian pengalihan portofolio atas piutang murabahah (lihat catatan 7). Selanjutnya atas piutang *murabahah* dan margin *murabahah* yang telah memenuhi kriteria pemilihan dijual dan dialihkan oleh Bank, sebagai Kreditur Awal, ke Tameer Sukuk SPC Limited selaku pembeli yang tertuang dalam Perjanjian Pengalihan Portofolio tertanggal 29 Juni 2018.

Nilai pokok piutang *murabahah* dan margin *murabahah* yang dijual dan dialihkan tersebut adalah sebesar Rp1.550.228.145 yang terdiri dari 2.997 nasabah dengan harga sebesar nilai pokok piutang *murabahah* pada tanggal *cut off* final (29 Juni 2018). Setelah terjadinya penjualan dan pengalihan piutang *murabahah* tersebut, risiko telah beralih dari Bank kepada pembeli termasuk segala keuntungan dan kerugian yang akan timbul.

Jumlah piutang yang direstrukturisasi Bank sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp652.179.252 dan Rp100.715.398. Skema restrukturisasi umumnya dilakukan dengan perpanjangan masa pelunasan piutang dan penjadwalan kembali pembayaran yang tertunggak.

h. Other significant information is as follows:

On June 29, 2018, the Bank entered into a portfolio transfer agreement on murabahah receivables (see note 7). Subsequently, the murabahah receivables and murabahah margin meeting the eligibility criteria are sold and transferred by the Bank, as the Original Creditor, to Tameer Sukuk SPC Limited as the buyer as stated in the Portfolio Transfer Agreement dated June 29, 2018.

The principal amount of the murabahah receivables and murabahah margin sold and transferred is Rp1,550,228,145, consisting of 2,997 debtors at a price equal to the principal amount of the murabahah receivables on the final cut off date (June 29, 2018). Upon the sale and transfer of such murabahah receivables, the risk is transferred from the Bank to the buyer, including any profits and losses that will arise.

Receivables that have been restructured by the Bank as of December 31, 2019 and 2018, amounted to Rp652,179,252 and Rp100,715,398, respectively. Restructuring scheme generally involves extension of the receivables maturity date and rescheduling of overdue payment.

8. PIUTANG (Lanjutan)

h. Informasi penting lainnya: (lanjutan)

Piutang sindikasi merupakan piutang yang diberikan kepada debitur dibawah perjanjian pembiayaan bersama dengan bank-bank lain. Jumlah piutang sindikasi yang diberikan Bank adalah sebesar Rp688.405.453 dan Rp699.218.616 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018. Keikutsertaan Bank sebagai pimpinan sindikasi berkisar 0,80% sampai dengan 63,33% pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, sedangkan sebagai anggota sindikasi berkisar 8,36% sampai dengan 20,08% masing-masing pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

Dalam laporan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) per tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 kepada OJK, Bank tidak memiliki debitur, baik pihak terkait maupun pihak tidak terkait yang tidak memenuhi atau melampaui ketentuan BMPK.

Piutang dijamin agunan yang diikat dengan hak tanggungan atau surat kuasa memasang hak tanggungan atau surat kuasa untuk menjual, deposito *mudharabah* (catatan 27) atau jaminan lain yang umumnya dapat diterima oleh Bank.

Tabel *Non-Performing Financing (NPF*) bruto dan neto atas jumlah piutang adalah sebagai berikut:

8. RECEIVABLES (Continued)

h. Other significant information is as follows: (continued)

Syndicated receivables represent financing provided to debtors under syndication agreements with other banks. The total amount of syndicated receivables provided by the Bank amounted to Rp688,405,453 and Rp699,218,616, as of December 31, 2019 and 2018, respectively. The Bank's participation as a leader in the syndicated receivables is 0.80% to 63.33% as of December 31, 2019 and 2018. The Bank's participation as a member in the syndicated receivables is 8.36% to 20.08% as of December 31, 2019 and 2018, respectively.

In its report on Legal Lending Limit (LLL) to FSA as of December 31, 2019 and 2018, the Bank indicated that there is no debtor, either related party or third party, who did not comply with or who has exceeded the LLL.

Receivables are guaranteed with registered mortgages or power of attorney to mortgage and sell, mudharabah time deposits (note 27) or other collaterals generally accepted by the Bank.

The table of total gross and net Non-Performing Financing (NPF) on receivables is as follows:

	31 Desember/ *December 31,* 2019	**31 Desember/ *December 31,* 2018**	
NPF - bruto	692.040.202	422.608.493	*NPF - gross*
Persentase NPF - bruto	4,82%	2,63%	*Percentage of NPF - gross*
NPF - neto	523.153.285	332.461.911	*NPF - net*
Persentase NPF - neto	3,63%	2,10%	*Percentage of NPF - net*

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai piutang adalah sebagai berikut:

Changes in allowance for impairment losses on receivables are as follows:

	31 Desember/ *December 31,* 2019	**31 Desember/ *December 31,* 2018**	
Saldo awal tahun	312.795.738	410.129.351	*Balance at the beginning of the year*
Penyisihan (pembalikan) tahun berjalan (Catatan 36)	19.318.255	(29.268.657)	*Provision (reversal) during the year (Note 36)*
Penerimaan piutang yang telah dihapusbukukan	5.721.986	25.519.088	*Recovery of written-off receivables*
Penghapusbukuan	(292.363)	(92.664.376)	*Written-off*
Selisih kurs penjabaran	789.337	(919.668)	*Exchange rate differences*
Saldo akhir tahun	**338.332.952**	**312.795.738**	***Balance at the end of the year***

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai piutang adalah cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya piutang tersebut.

Management believes that the allowance for impairment losses is adequate to cover losses that might arise from uncollectible receivables.

9. PINJAMAN *QARDH* / *9. FUNDS OF QARDH*

a. Berdasarkan jenis dan kolektibilitas: / *a. By type and collectibility:*

	31 Desember/ *December 31,* 2019	31 Desember/ *December 31,* 2018	
Rupiah			***Rupiah***
Lancar	369.824.883	481.243.024	*Current*
Dalam perhatian khusus	78.856.931	159.712.804	*Special Mention*
Kurang lancar	130.008.100	78.851.177	*Substandard*
Diragukan	315.200	34.308.962	*Doubtful*
Macet	2.282.266	1.161.309	*Loss*
Jumlah	**581.287.380**	**755.277.276**	***Total***
Cadangan kerugian penurunan nilai	(3.817.632)	(13.063.860)	*Allowance for impairment losses*
Bersih	**577.469.748**	**742.213.416**	***Net***

b. Berdasarkan sektor ekonomi: / *b. By economic sector:*

	31 Desember/ *December 31,* 2019	31 Desember/ *December 31,* 2018	
Pihak ketiga			***Third parties***
Jasa usaha	16.037.652	53.435.732	*Business services*
Konstruksi	6.636.525	7.124.113	*Construction*
Perdagangan	364.503.178	312.049.856	*Trading*
Sosial/masyarakat	950.515	77.209.236	*Social/public*
Pertanian	66.476.280	91.481.280	*Agriculture*
Industri	121.557.999	206.958.000	*Manufacturing*
Lainnya	5.125.231	6.466.025	*Others*
	581.287.380	754.724.242	
Pihak berelasi (Catatan 41)			***Related parties (Note 41)***
Lainnya	--	553.034	*Others*
	--	553.034	
Jumlah	**581.287.380**	**755.277.276**	***Total***
Cadangan kerugian penurunan nilai	(3.817.632)	(13.063.860)	*Allowance for impairment losses*
Bersih	**577.469.748**	**742.213.416**	***Net***

9. PINJAMAN *QARDH* (Lanjutan) / *9. FUNDS OF QARDH (Continued)*

c. Berdasarkan jangka waktu: / *c. By maturity:*

	31 Desember/ *December 31,* 2019	31 Desember/ *December 31,* 2018	
Pihak ketiga			***Third parties***
Rupiah			***Rupiah***
≤ 1 tahun	415.411.035	682.951.165	*≤ 1 year*
> 1 - ≤ 2 tahun	104.709.432	32.786.099	*> 1 - ≤ 2 years*
> 2 - ≤ 5 tahun	17.627.854	38.933.209	*> 2 - ≤ 5 years*
> 5 tahun	43.539.059	53.769	*> 5 years*
	581.287.380	754.724.242	
Pihak berelasi (Catatan 41)			***Related parties (Note 41)***
≤ 1 tahun	--	553.034	*≤1 year*
	--	553.034	
Jumlah	**581.287.380**	**755.277.276**	***Total***
Cadangan kerugian penurunan nilai	(3.817.632)	(13.063.860)	*Allowance for impairment losses*
Bersih	**577.469.748**	**742.213.416**	***Net***

d. Berdasarkan sisa umur jatuh tempo: / *d. By remaining period to maturity:*

	31 Desember/ *December 31,* 2019	31 Desember/ *December 31,* 2018	
Pihak ketiga			***Third parties***
Rupiah			***Rupiah***
≤ 1 tahun	522.245.670	700.036.611	*≤ 1 year*
> 1 - ≤ 2 tahun	15.227.314	19.406.053	*> 1 - ≤ 2 years*
> 2 - ≤ 5 tahun	315.533	35.241.578	*> 2 - ≤ 5 years*
> 5 tahun	43.498.863	40.000	*> 5 years*
	581.287.380	754.724.242	
Pihak berelasi (Catatan 41)			***Related parties (Note 41)***
≤1 tahun	--	553.034	*≤1 year*
	--	553.034	
Jumlah	**581.287.380**	**755.277.276**	***Total***
Cadangan kerugian penurunan nilai	(3.817.632)	(13.063.860)	*Allowance for impairment losses*
Bersih	**577.469.748**	**742.213.416**	***Net***

9. PINJAMAN *QARDH* (Lanjutan) / *9. FUNDS OF QARDH (Continued)*

e. Berdasarkan keterkaitan / *e. By relationship:*

	31 Desember/ *December 31,* 2019	31 Desember/ *December 31,* 2018	
Pihak ketiga	581.287.380	754.724.242	***Third parties***
Pihak berelasi (Catatan 41)			***Related parties (Note 41)***
Karyawan kunci	--	553.034	*Key employees*
Jumlah	**581.287.380**	**755.277.276**	***Total***
Cadangan kerugian penurunan nilai	(3.817.632)	(13.063.860)	*Allowance for impairment losses*
Bersih	**577.469.748**	**742.213.416**	***Net***

f. Rincian pinjaman *qardh* bermasalah menurut sektor ekonomi adalah sebagai berikut / *f. Non-performing funds of qardh by economic sector are as follows:*

	31 Desember/ *December 31,* 2019	31 Desember/ *December 31,* 2018	
Perdagangan	129.958.100	111.757.641	*Trading*
Lainnya	2.647.466	2.563.807	*Others*
Jumlah	**132.605.566**	**114.321.448**	***Total***
Cadangan kerugian penurunan nilai	(119.383)	(1.390.292)	*Allowance for impairment losses*
Bersih	**132.486.183**	**112.931.156**	***Net***

g. Informasi penting lainnya / *g. Other significant information is as follows:*

Tabel *Non-Performing Financing* (NPF) bruto dan neto atas jumlah pinjaman *qardh* adalah sebagai berikut / *The table of total gross and net Non-Performing Financing (NPF) on funds of qardh is as follows:*

	31 Desember/ *December 31,* 2019	31 Desember/ *December 31,* 2018	
NPF - bruto	132.605.566	114.321.448	*NPF - gross*
Persentase NPF - bruto	22,81%	15,14%	*Percentage of NPF - gross*
NPF - netto	132.486.183	112.931.156	*NPF - net*
Persentase NPF - netto	22,79%	14,95%	*Percentage of NPF - net*

9. PINJAMAN *QARDH* (Lanjutan)

9. FUNDS OF QARDH (Continued)

g. Informasi penting lainnya: (lanjutan)

g. Other significant information is as follows: (continued)

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai pinjaman *qardh* adalah sebagai berikut:

Changes in allowance for impairment losses on funds of qardh are as follows:

	31 Desember/ *December 31,* 2019	**31 Desember/ *December 31,* 2018**	
Saldo awal tahun	13.063.860	26.963.718	*Balance at the beginning of the year*
Penyisihan (pembalikan) tahun berjalan (Catatan 36)	(9.430.195)	60.848.315	*Provision (reversal) during the year (Note 36)*
Penerimaan pinjaman yang telah dihapusbukukan	183.967	315.827	*Recovery of written-off*
Penghapusbukuan	--	(75.064.000)	*Written-off*
Saldo akhir tahun	**3.817.632**	**13.063.860**	***Balance at the end of the year***

Pada tanggal 29 Juni 2018, Bank telah melakukan perjanjian pengalihan portofolio atas pinjaman *qardh* (lihat catatan 7). Selanjutnya atas pinjaman *qardh* yang telah memenuhi kriteria pemilihan dijual dan dialihkan oleh Bank, sebagai Kreditur Awal, ke Tameer Sukuk SPC Limited selaku pembeli yang tertuang dalam Perjanjian Pengalihan Portofolio tertanggal 29 Juni 2018.

On June 29, 2018, the Bank entered into a portfolio transfer agreement on funds of qardh (see note 7). Subsequently, funds of qardh meeting the eligibility criteria are sold and transferred by the Bank, as the Original Creditor, to Tameer Sukuk SPC Limited as the buyer as stated in the Portfolio Transfer Agreement dated June 29, 2018.

Nilai pokok pinjaman *qardh* yang dijual dan dialihkan tersebut adalah sebesar Rp74.234.774 yang terdiri dari 719 nasabah dengan harga sebesar nilai pokok pinjaman *qardh* pada tanggal *cut off* final (29 Juni 2018). Setelah terjadinya penjualan dan pengalihan pinjaman *qardh* tersebut, risiko telah beralih dari Bank kepada pembeli termasuk segala keuntungan dan kerugian yang akan timbul.

The principal amount of the funds of qardh sold and transferred is Rp74,234,774 consisting of 719 debtors at a price equal to the principal amount of funds of qardh on the final cut off date (June 29, 2018). Upon the sale and transfer of the funds of qardh, the risk is transferred from the Bank to the buyer, including any profits and losses that will arise.

Dalam laporan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 kepada Bank Indonesia, Bank tidak memiliki debitur, baik pihak terkait maupun pihak tidak terkait yang tidak memenuhi atau melampaui ketentuan BMPK.

In its report on Legal Lending Limit (LLL) to Bank Indonesia as of December 31, 2019 and 2018, the Bank indicated that there is no debtor, either related party or third party, who did not comply with or who has exceeded the LLL.

Tidak terdapat pinjaman *qardh* bermasalah yang direstrukturisasi pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

There are no restructured non-performing funds of qardh as of December 31, 2019 and 2018.

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai piutang adalah cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya pinjaman *qardh* tersebut.

Management believes that the allowance for impairment losses is adequate to cover losses that might arise from uncollectible funds of qardh.

10. PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* / *10. MUDHARABAH FINANCING*

a. Berdasarkan jenis kolektibilitas dan mata uang: / *a. By collectibility and currencies:*

	31 Desember/ *December 31,* 2019	31 Desember/ *December 31,* 2018	
Rupiah			***Rupiah***
Lancar	734.584.115	427.949.525	*Current*
Dalam perhatian khusus	15.813.271	8.944.925	*Special mention*
Kurang lancar	--	33.611	*Substandard*
Diragukan	3.177.770	661.897	*Doubtful*
Macet	2.938.378	--	*Loss*
Jumlah	**756.513.534**	**437.589.958**	***Total***
Cadangan kerugian penurunan nilai	(8.016.858)	(5.717.945)	*Allowance for impairment losses*
Bersih	**748.496.676**	**431.872.013**	***Net***

b. Berdasarkan sektor ekonomi: / *b. By economic sector:*

	31 Desember/ *December 31,* 2019	31 Desember/ *December 31,* 2018	
Pihak ketiga			***Third parties***
Jasa usaha	538.751.824	336.524.101	*Business services*
Sosial/masyarakat	54.171.066	21.933.864	*Social/public*
Perdagangan	7.504.053	7.792.819	*Trading*
Konstruksi	75.000.000	--	*Construction*
Lainnya	81.086.591	70.554.595	*Others*
	756.513.534	436.805.379	
Pihak berelasi (Catatan 41)			***Related parties (Note 41)***
Jasa usaha	--	784.579	*Business services*
	--	784.579	
Jumlah	**756.513.534**	**437.589.958**	***Total***
Cadangan kerugian penurunan nilai	(8.016.858)	(5.717.945)	*Allowance for impairment losses*
Bersih	**748.496.676**	**431.872.013**	***Net***

c. Berdasarkan jangka waktu: / *c. By maturity:*

	31 Desember/ *December 31,* 2019	31 Desember/ *December 31,* 2018	
Pihak ketiga			***Third parties***
Rupiah			***Rupiah***
≤ 1 tahun	99.097.454	7.187.322	*≤ 1 year*
> 1 - ≤ 2 tahun	256.564.424	90.093.155	*> 1 - ≤ 2 years*
> 2 - ≤ 5 tahun	263.497.279	172.086.484	*> 2 - ≤ 5 years*
> 5 tahun	137.354.377	167.438.418	*> 5 years*
	756.513.534	436.805.379	
Pihak berelasi (Catatan 41)			***Related parties (Note 41)***
> 5 tahun	--	784.579	*> 5 years*
	--	784.579	
Jumlah	**756.513.534**	**437.589.958**	***Total***
Cadangan kerugian penurunan nilai	(8.016.858)	(5.717.945)	*Allowance for impairment losses*
Bersih	**748.496.676**	**431.872.013**	***Net***

10. PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* (Lanjutan) / *10. MUDHARABAH FINANCING (Continued)*

d. Berdasarkan sisa umur jatuh tempo: / *d. By remaining period to maturity:*

	31 Desember/ *December 31,* 2019	31 Desember/ *December 31,* 2018	
Pihak ketiga			***Third parties***
≤ 1 tahun	405.837.623	159.195.109	*≤ 1 year*
> 1 - ≤ 2 tahun	164.696.703	65.834.061	*> 1 - ≤ 2 years*
> 2 - ≤ 5 tahun	66.460.213	63.903.324	*> 2 - ≤ 5 years*
> 5 tahun	119.518.995	147.872.885	*> 5 years*
	756.513.534	436.805.379	
Pihak berelasi (Catatan 41)			***Related parties (Note 41)***
> 2 - ≤ 5 tahun	--	784.579	*> 2 - ≤ 5 years*
	--	784.579	
Jumlah	**756.513.534**	**437.589.958**	***Total***
Cadangan kerugian penurunan nilai	(8.016.858)	(5.717.945)	*Allowance for impairment losses*
Bersih	**748.496.676**	**431.872.013**	***Net***

e. Berdasarkan keterkaitan: / *e. By relationship:*

	31 Desember/ *December 31,* 2019	31 Desember/ *December 31,* 2018	
Pihak ketiga	756.513.534	436.805.379	***Third parties***
Pihak berelasi (Catatan 41)			***Related parties (Note 41)***
PT Al Ijarah Indonesia Finance	--	784.579	*PT Al Ijarah Indonesia Finance*
Jumlah	**756.513.534**	**437.589.958**	***Total***
Cadangan kerugian penurunan nilai	(8.016.858)	(5.717.945)	*Allowance for impairment losses*
Bersih	**748.496.676**	**431.872.013**	***Net***

f. Rincian pembiayaan *mudharabah* bermasalah menurut sektor ekonomi adalah sebagai berikut: / *f. Non-performing mudharabah financing by economic sector is as follows:*

	31 Desember/ *December 31,* 2019	31 Desember/ *December 31,* 2018	
Jasa usaha	5.595.686	695.508	*Business services*
Sosial/Masyarakat	520.462	--	*Social/public*
Jumlah	**6.116.148**	**695.508**	***Total***
Cadangan kerugian penurunan nilai	(612.593)	(335.990)	*Allowance for impairment losses*
Bersih	**5.503.555**	**359.518**	***Net***

g. Tingkat bagi hasil rata-rata per tahun: / *g. Average revenue sharing rates per annum:*

	31 Desember/ *December 31,* 2019	31 Desember/ *December 31,* 2018	
Rupiah	9,95%	13,33%	*Rupiah*

10. PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* (Lanjutan)

h. Informasi penting lainnya:

Jumlah pembiayaan yang telah direstrukturisasi Bank pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 yang dilaporkan kepada Bank Indonesia masing masing adalah sebesar Rp198.438.932 dan Rp198.327.208. Skema restrukturisasi umumnya dilakukan dengan perpanjangan masa pelunasan piutang dan penjadwalan kembali pembayaran yang tertunggak.

Pembiayaan sindikasi merupakan pembiayaan yang diberikan kepada debitur di bawah perjanjian pembiayaan bersama dengan bank-bank lain. Tidak terdapat pembiayaan sindikasi kepada debitur masing-masing pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

Pada tanggal 29 Juni 2018, Bank telah melakukan perjanjian pengalihan portofolio atas pembiayaan *mudharabah* dan pendapatan yang akan diterima bagi hasil *mudharabah* (lihat catatan 7). Selanjutnya atas pembiayaan *mudharabah* yang telah memenuhi kriteria pemilihan untuk dijual dan dialihkan oleh Bank, sebagai Kreditur Awal ke Tameer Sukuk SPC Limited selaku pembeli yang tertuang dalam Perjanjian Pengalihan Portofolio tertanggal 29 Juni 2018.

Nilai pokok pembiayaan *mudharabah* yang dijual dan dialihkan tersebut adalah sebesar Rp184.556.210 yang terdiri dari 121 nasabah dengan harga sebesar nilai pokok pembiayaan *mudharabah* pada tanggal *cut off* final (29 Juni 2018). Setelah terjadinya penjualan dan pengalihan pembiayaan *mudharabah* tersebut, risiko telah beralih dari Bank kepada pembeli termasuk segala keuntungan dan kerugian yang akan timbul.

Dalam laporan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) per tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 kepada Bank Indonesia, Bank tidak memiliki debitur baik pihak terkait maupun pihak tidak terkait, sesuai dengan peraturan Bank Indonesia yang tidak memenuhi atau melampaui ketentuan BMPK.

Tabel *Non-Performing Financing* (NPF) bruto dan neto atas jumlah pembiayaan *mudharabah* adalah sebagai berikut:

10. MUDHARABAH FINANCING (Continued)

h. Other significant information is as follows:

Financing that has been restructured by Bank as of December 31, 2019 and 2018, that was reported to Bank Indonesia is amounting to Rp198,438,932 and Rp198,327,208, respectively. Restructuring scheme generally involves extension of the financing maturity date and rescheduling of overdue payment.

Syndicated financing represents financing provided to debtors under syndication agreements with other banks. There was no syndicated financing to debtors as of December 31, 2019 and 2018.

On June 29, 2018, the Bank entered into a portfolio transfer agreement on mudharabah financing and revenue to be received for mudharabah revenue sharing (see note 7). Subsequently, the mudharabah financing meeting the eligibility criteria is sold and transferred by the Bank, as the Original Creditor, to Tameer Sukuk SPC Limited as the buyer as stated in the Portfolio Transfer Agreement dated June 29, 2018.

The principal amount of the mudharabah financing sold and transferred is Rp184,556,210, consisting of 121 debtors at a price equal to the principal amount of mudharabah financing on the final cut off date (June 29, 2018). Upon the sale and transfer of such mudharabah financing, the risk is transferred from the Bank to the buyer, including any profits and losses that will arise.

In its report on Legal Lending Limit (LLL) to Bank Indonesia as of December 31, 2019 and 2018, the Bank indicated that there is no debtor, either related party or third party, who did not comply with or who has exceeded the Legal Lending Limit.

The table of total gross and net Non-Performing Financing (NPF) on mudharabah financing is as follows:

	31 Desember/ *December 31,* 2019	**31 Desember/ *December 31,* 2018**	
NPF - bruto	6.116.148	695.508	*NPF - gross*
Persentase NPF - bruto	0,81%	0,16%	*Percentage of NPF - gross*
NPF - neto	5.503.555	359.518	*NPF - net*
Persentase NPF - neto	0,73%	0,08%	*Percentage of NPF - net*

10. PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* (Lanjutan) / *10. MUDHARABAH FINANCING (Continued)*

h. Informasi penting lainnya: (lanjutan) / *h. Other significant information is as follows: (continued)*

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai pembiayaan *mudharabah* adalah sebagai berikut: / *Changes in allowance for impairment losses on mudharabah financing are as follows:*

	31 Desember/ *December 31,* 2019	31 Desember/ *December 31,* 2018	
Saldo awal tahun	5.717.945	33.601.528	*Balance at the beginning of the year*
Penyisihan (pembalikan) tahun berjalan (Catatan 36)	1.795.110	(28.959.786)	*Provision (reversal) during the year (Note 36)*
Penerimaan pinjaman yang telah dihapusbukukan	503.803	1.076.203	*Recovery of written-off loans*
Saldo akhir tahun	**8.016.858**	**5.717.945**	***Balance at the end of the year***

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai pembiayaan adalah cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya pembiayaan tersebut. / *Management believes that the allowance for impairment losses is adequate to cover possible losses that might arise from uncollectible financing.*

11. PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH* / *11. MUSYARAKAH FINANCING*

a. Berdasarkan jenis kolektibilitas dan mata uang: / *a. By collectibility and currencies:*

	31 Desember/ *December 31,* 2019	31 Desember/ *December 31,* 2018	
Rupiah			***Rupiah***
Lancar	9.825.006.697	12.528.254.659	*Current*
Dalam perhatian khusus	2.640.599.303	2.017.267.155	*Special mention*
Kurang lancar	67.252.684	93.107.182	*Substandard*
Diragukan	55.867.731	19.351.973	*Doubtful*
Macet	429.192.157	643.232.773	*Loss*
	13.017.918.572	15.301.213.742	
Mata uang asing			***Foreign currencies***
Lancar	1.016.106.633	1.137.508.975	*Current*
Dalam perhatian khusus	172.858.711	105.148.729	*Special mention*
	1.188.965.344	1.242.657.704	
Jumlah	**14.206.883.916**	**16.543.871.446**	***Total***
Cadangan kerugian penurunan nilai	(198.584.139)	(687.723.411)	*Allowance for impairment losses*
Bersih	**14.008.299.777**	**15.856.148.035**	***Net***

11. PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH* (Lanjutan) / *11. MUSYARAKAH FINANCING (Continued)*

b. Berdasarkan sektor ekonomi: / *b. By economic sector:*

	31 Desember/ *December 31,* 2019	31 Desember/ *December 31,* 2018	
Pihak ketiga			***Third parties***
Jasa usaha	1.516.029.912	2.008.378.161	*Business services*
Konstruksi	1.236.702.583	1.338.523.664	*Construction*
Industri	1.904.744.807	1.811.910.435	*Manufacturing*
Pengangkutan	622.096.180	744.456.789	*Transportation*
Perdagangan	2.249.832.077	2.669.985.489	*Trading*
Sosial/masyarakat	861.107.892	793.871.625	*Social/public*
Listrik, gas dan air	1.361.455.494	1.323.397.128	*Electricity, gas and water*
Pertanian	367.075.640	543.622.020	*Agriculture*
Pertambangan	1.000.690.831	1.051.364.305	*Mining*
Lainnya	3.085.479.812	4.005.250.444	*Others*
	14.205.215.228	16.290.760.060	
Pihak berelasi (Catatan 41)			***Related parties (Note 41)***
Jasa usaha	--	251.793.144	*Business services*
Lainnya	1.668.688	1.318.242	*Others*
	1.668.688	253.111.386	
Jumlah	**14.206.883.916**	**16.543.871.446**	***Total***
Cadangan kerugian penurunan nilai	(198.584.139)	(687.723.411)	*Allowance for impairment losses*
Bersih	**14.008.299.777**	**15.856.148.035**	***Net***

c. Berdasarkan jangka waktu: / *c. By maturity:*

	31 Desember/ *December 31,* 2019	31 Desember/ *December 31,* 2018	
Pihak ketiga			***Third parties***
Rupiah			***Rupiah***
≤ 1 tahun	3.238.589.110	3.037.255.677	*≤ 1 year*
> 1 - ≤ 2 tahun	2.162.845.140	1.936.112.558	*> 1 - ≤ 2 years*
> 2 - ≤ 5 tahun	2.906.789.008	4.360.358.729	*> 2 - ≤ 5 years*
> 5 tahun	5.896.991.970	6.957.033.096	*> 5 years*
	14.205.215.228	16.290.760.060	
Pihak berelasi (Catatan 41)			***Related parties (Note 41)***
≥ 2 - ≤ 5 tahun	--	248.211.543	*≥ 2 - ≤ 5 years*
> 5 tahun	1.668.688	4.899.843	*> 5 years*
	1.668.688	253.111.386	
Jumlah	**14.206.883.916**	**16.543.871.446**	***Total***
Cadangan kerugian penurunan nilai	(198.584.139)	(687.723.411)	*Allowance for impairment losses*
Bersih	**14.008.299.777**	**15.856.148.035**	***Net***

11. PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH* (Lanjutan) / *11. MUSYARAKAH FINANCING (Continued)*

d. Berdasarkan sisa umur jatuh tempo: / *d. By remaining period to maturity:*

	31 Desember/ *December 31,* 2019	31 Desember/ *December 31,* 2018	
Pihak ketiga			***Third parties***
≤ 1 tahun	6.070.799.736	5.773.222.152	*≤ 1 year*
> 1 - ≤ 2 tahun	1.097.765.694	1.661.809.607	*> 1 - ≤ 2 years*
> 2 - ≤ 5 tahun	2.878.002.325	3.846.191.098	*> 2 - ≤ 5 years*
> 5 tahun	4.158.647.473	5.009.537.203	*> 5 years*
	14.205.215.228	16.290.760.060	
Pihak berelasi (Catatan 41)			***Related parties (Note 41)***
> 1 - ≤ 2 tahun	55.299	--	*> 1 - ≤ 2 years*
≥ 2 - ≤ 5 tahun	267.987	251.871.518	*≥ 2 - ≤ 5 years*
> 5 tahun	1.345.402	1.239.868	*> 5 years*
	1.668.688	253.111.386	
Jumlah	**14.206.883.916**	**16.543.871.446**	***Total***
Cadangan kerugian penurunan nilai	(198.584.139)	(687.723.411)	*Allowance for impairment losses*
Bersih	**14.008.299.777**	**15.856.148.035**	***Net***

e. Berdasarkan keterkaitan: / *e. By relationship:*

	31 Desember/ *December 31,* 2019	31 Desember/ *December 31,* 2018	
Pihak ketiga	14.205.215.228	16.290.760.060	***Third parties***
Pihak berelasi (Catatan 41)			***Related parties (Note 41)***
PT Al Ijarah Indonesia Finance	--	251.793.144	*PT Al Ijarah Indonesia Finance*
Karyawan kunci	1.668.688	1.318.242	*Key employees*
	1.668.688	253.111.386	
Jumlah	**14.206.883.916**	**16.543.871.446**	***Total***
Cadangan kerugian penurunan nilai	(198.584.139)	(687.723.411)	*Allowance for impairment losses*
Bersih	**14.008.299.777**	**15.856.148.035**	***Net***

11. PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH* (Lanjutan) / *11. MUSYARAKAH FINANCING (Continued)*

f. Rincian pembiayaan *musyarakah* bermasalah menurut sektor ekonomi adalah sebagai berikut:

f. Non-performing musyarakah financing by economic sector is as follows:

	31 Desember/ *December 31,* 2019	**31 Desember/ *December 31,* 2018**	
Pengangkutan	31.804.329	56.026.154	*Transportation*
Listrik, gas dan air	--	--	*Electricity, gas and water*
Pertambangan	4.690.236	--	*Mining*
Perdagangan	97.632.706	532.243.574	*Trading*
Konstruksi	71.755.677	46.453.427	*Construction*
Jasa usaha	21.976.572	92.675	*Business services*
Industri	69.827.302	38.334.065	*Manufacturing*
Pertanian	48.090.742	177.785	*Agriculture*
Sosial/masyarakat	78.307.987	26.606.536	*Social/public*
Lainnya	128.227.021	55.757.712	*Others*
Jumlah	**552.312.572**	**755.691.928**	***Total***
Cadangan kerugian penurunan nilai	(29.100.738)	(341.034.807)	*Allowance for impairment losses*
Bersih	**523.211.834**	**414.657.121**	***Net***

g. Tingkat margin rata-rata per tahun:

g. Average profit margin rates per annum:

	31 Desember/ *December 31,* 2019	**31 Desember/ *December 31,* 2018**	
Rupiah	11,83%	12,52%	*Rupiah*
Dolar Amerika Serikat	4,49%	7,94%	*United States Dollar*

h. Informasi penting lainnya:

Pembiayaan sindikasi merupakan piutang yang diberikan kepada debitur di bawah perjanjian pembiayaan bersama dengan bank-bank lain. Jumlah pembiayaan sindikasi yang diberikan Bank adalah sebesar Rp813.179.460 dan Rp818.154.460 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018. Keikutsertaan Bank sebagai pimpinan sindikasi pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 sebesar 3,33% sampai dengan 68,34%, sedangkan sebagai anggota sindikasi berkisar 4,30% sampai dengan 25,00% pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

Jumlah pembiayaan yang telah direstrukturisasi Bank pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 yang dilaporkan kepada Bank Indonesia masing masing adalah sebesar Rp2.404.319.021 dan Rp1.195.620.873. Skema restrukturisasi umumnya dilakukan dengan perpanjangan masa pelunasan piutang dan penjadwalan kembali pembayaran yang tertunggak.

h. Other significant information is as follows:

Syndicated financing represents financing provided to debtors under syndication agreements with other bank. As of December 31, 2019 and 2018, total syndicated financing amounted to Rp813,179,460 and Rp818,154,460, respectively. Bank's participation as leader in the syndicated financing as of December 31, 2019 and 2018 is ranging from 3.33% to 68.34%. Bank's participation as member in the syndicated financing is ranging from 4.30% to 25.00% as of December 31, 2019 and 2018.

Financing that has been restructured by Bank as of December 31, 2019 and 2018, that was reported to Bank Indonesia, is amounting to Rp2,404,319,021 and Rp1,195,620,873, respectively. Restructuring scheme generally involves extension of the financing maturity date and rescheduling of overdue payment.

11. PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH* (Lanjutan)

h. Informasi penting lainnya: (lanjutan)

Pada tanggal 29 Juni 2018, Bank telah melakukan perjanjian pengalihan portofolio atas pembiayaan *musyarakah* dan pendapatan yang akan diterima bagi hasil *musyarakah* (lihat catatan 7). Selanjutnya atas pembiayaan *musyarakah* yang telah memenuhi kriteria pemilihan untuk dijual dan dialihkan oleh Bank, sebagai Kreditur Awal ke Tameer Sukuk SPC Limited selaku pembeli yang tertuang dalam Perjanjian Pengalihan Portofolio tertanggal 29 Juni 2018.

Nilai pokok pembiayaan *musyarakah* yang dijual dan dialihkan tersebut adalah sebesar Rp2.242.643.282 yang terdiri dari 1.877 nasabah dengan harga sebesar nilai pokok pembiayaan *musyarakah* pada tanggal *cut off* final (29 Juni 2018). Setelah terjadinya penjualan dan pengalihan pembiayaan *musyarakah* tersebut, risiko telah beralih dari Bank kepada pembeli termasuk segala keuntungan dan kerugian yang akan timbul.

Dalam laporan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 kepada Bank Indonesia, Bank tidak memiliki debitur baik pihak terkait maupun pihak tidak terkait, sesuai dengan peraturan Bank Indonesia yang tidak memenuhi atau melampaui ketentuan BMPK.

Tabel *Non-Performing Financing* (NPF) bruto dan neto atas jumlah pembiayaan *musyarakah* adalah sebagai berikut:

11. MUSYARAKAH FINANCING (Continued)

h. Other significant information is as follows: (continued)

On June 29, 2018, the Bank entered into a portfolio transfer agreement on musyarakah financing and revenue to be received for musyarakah revenue sharing (see note 7). Subsequently, musyarakah financing meeting the eligibility criteria is sold and transferred by the Bank, as the Original Creditor, to Tameer Sukuk SPC Limited as the buyer as stated in the Portfolio Transfer Agreement dated June 29, 2018.

The principal amount of the musyarakah financing sold and transferred is Rp2,242,643,282, consisting of 1,877 debtors at a nominal value of musyarakah financing at the final cut off date (June 29, 2018). Upon the sale and transfer of such musyarakah financing, the risk is transferred from the Bank to the buyer, including any profits and losses that will arise.

In its report on Legal Lending Limit (LLL) to Bank Indonesia as of December 31, 2019 and 2018, Bank indicated that there is no debtor, either related party or third party, who did not comply with or who has exceeded the Legal Lending Limit.

The table of total gross and net Non-Performing Financing (NPF) on musyarakah financing is as follows:

	31 Desember/ *December 31,* 2019	**31 Desember/ *December 31,* 2018**	
NPF - bruto	552.312.572	755.691.928	*NPF - gross*
Persentase NPF - bruto	3,89%	4,57%	*Percentage of NPF - gross*
NPF - neto	523.211.834	414.657.121	*NPF - net*
Persentase NPF - neto	3,68%	2,51%	*Percentage of NPF - net*

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai pembiayaan *musyarakah* adalah sebagai berikut:

Changes in allowance for impairment losses on musyarakah financing are as follows:

	31 Desember/ *December 31,* 2019	**31 Desember/ *December 31,* 2018**	
Saldo awal tahun	687.723.411	697.067.544	*Balance at the beginning of the year*
Penyisihan (pembalikan) tahun berjalan (Catatan 36)	(534.300.319)	(3.562.025)	*Provision (reversal) during the year (Note 36)*
Penerimaan pinjaman yang telah dihapusbukukan	38.061.480	5.821.573	*Recovery of written-off loans*
Selisih kurs penjabaran	7.099.567	(11.603.681)	*Exchange rate differences*
Saldo akhir tahun	**198.584.139**	**687.723.411**	***Balance at the end of the year***

11. PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH* (Lanjutan) / *11. MUSYARAKAH FINANCING (Continued)*

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai pembiayaan adalah cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya pembiayaan tersebut.

Management believes that the allowance for impairment losses is adequate to cover possible losses that might arise from uncollectible financing.

12. PENYERTAAN SAHAM / *12. INVESTMENTS IN SHARES*

	Tempat kedudukan/ *Domicile*	Persentase kepemilikan/ *Percentage of ownership*	31 Desember / *December 31,* 2019	31 Desember/ *December* 31, 2018	
Pihak berelasi (Catatan 41)					***Related parties (Note 41)***
Metode ekuitas					*Equity method*
PT Al Ijarah Indonesia Finance	Jakarta	33,33%	--	--	*PT Al Ijarah Indonesia Finance*
Penyertaan Modal Sementara					*Temporary Investments In Equity*
PT Al Ijarah Indonesia Finance	Jakarta	44,48%	401.616.000	--	*PT Al Ijarah Indonesia Finance*
Tersedia untuk dijual					*Available for sale*
PT Syarikat Takaful Indonesia	Jakarta	5,91%	6.095.237	6.095.237	*PT Syarikat Takaful Indonesia*
Jumlah			**407.711.237**	**6.095.237**	***Total***

Perubahan penyertaan dalam bentuk saham dengan metode ekuitas adalah sebagai berikut:

The changes in investments in shares accounted for under the equity method are as follows:

	31 Desember / *December 31,* 2018	Bagian laba (rugi) bersih entitas asosiasi/ *Equity in net (loss) profit of associate entities* *)	31 Desember / *December 31,* 2019	
PT Al Ijarah Indonesia Finance	--	--	--	*PT Al Ijarah Indonesia Finance*
Jumlah	**--**		**--**	***Total***

*) Lihat Catatan 39 / *see Note 39*.

	31 Desember / *December 31,* 2017	Bagian laba (rugi) bersih entitas asosiasi/ *Equity in net (loss) income of associate entities* *)	31 Desember / *December 31,* 2018	
PT Al Ijarah Indonesia Finance	24.236.080	(24.236.080)	--	*PT Al Ijarah Indonesia Finance*
Jumlah	**24.236.080**		**--**	***Total***

*) Lihat Catatan 39 / *see Note 39.*

12. PENYERTAAN SAHAM (Lanjutan)

Bank telah membentuk cadangan kerugian penurunan nilai kepada PT Al Ijarah Indonesia Finance secara permanen sebesar nilai penyertaan saham akibat kerugian operasional PT Al Ijarah Indonesia Finance pada tahun 2018 yang melebihi dari nilai penyertaan saham Bank.

Berdasarkan Akta Perjanjian Penyertaan Modal Sementara No.47 tanggal 30 Desember 2019 dihadapan Notaris Aulia Taufani, SH, PT Al Ijarah Indonesia Finance telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) yang menghasilkan keputusan bahwa berlaku efektif pengalihan saham oleh para kreditur yang akan dijadikan sebagai Penyertaan Modal Sementara.

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai penyertaan saham adalah cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian yang timbul dari penyertaan saham tersebut.

12. INVESTMENTS IN SHARES (Continued)

The Bank has permanently formed an allowance for impairment losses for PT Al Ijarah Indonesia Finance at the value of the equity investment due to the operational loss of PT Al Ijarah Indonesia Finance in 2018 which exceeds the value of the Bank's share participation.

Based on the Deed of Temporary Equity Participation Agreement No.47 dated 30 December 2019 before Notary Aulia Taufani, SH, PT Al Ijarah Indonesia Finance has held an Extraordinary General Meeting of Shareholders (RUPS LB) which resulted in a decision that an effective transfer of shares by creditors would be used as Temporary Equity Participation.

Management believes that the allowance for impairment losses on investments in shares is sufficient to cover possible losses arising from such investments.

13. TAGIHAN DAN LIABILITAS AKSEPTASI

a. Berdasarkan jenis dan mata uang:

13. ACCEPTANCES RECEIVABLE AND PAYABLE

a. By type and currency:

	31 Desember / *December 31,* 2019		
	Jumlah nosional mata uang asing/ *Notional amount in foreign currencies* (Dalam nilai penuh/ *In full amount)*	**Setara dengan/ *Equivalent to* Rupiah**	
Pihak ketiga			***Third parties***
Rupiah			***Rupiah***
Impor L/C dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)		308.038.083	*Import L/C and Domestic Letters of Credit*
Spot dan *Forward*		5.315.034	*Spot and Forward*
		313.353.117	
Mata uang asing			***Foreign currencies***
Dolar Amerika Serikat			***US Dollar***
Impor L/C dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)			*Import L/C and Domestic Letters of Credit*
Dollar Amerika Serikat	7.001.489	97.198.175	*United States Dollar*
Euro	45.843	713.803	*Euro*
		97.911.978	
Jumlah		**411.265.095**	***Total***
Cadangan kerugian penurunan nilai		(4.784.387)	*Allowance for impairment losses*
Bersih		**406.480.708**	***Net***

13. TAGIHAN DAN LIABILITAS AKSEPTASI (Lanjutan) / *13. ACCEPTANCES RECEIVABLE AND PAYABLE (Continued)*

a. Berdasarkan jenis dan mata uang: (lanjutan) / *a. By type and currency: (continued)*

	31 Desember / *December 31,* 2018		
	Jumlah nosional mata uang asing/ *Notional amount in foreign currencies* (Dalam nilai penuh/ *In full amount)*	**Setara dengan/ *Equivalent to* Rupiah**	
Pihak ketiga			***Third parties***
Rupiah			***Rupiah***
Impor L/C dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)		327.443.628	*Import L/C and Domestic Letters of Credit*
Spot dan *Forward*		3.344.904	*Spot and Forward*
		330.788.532	
Mata uang asing			***Foreign currencies***
Dolar Amerika Serikat			***US Dollar***
Impor L/C dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)	7.852.228	112.915.042	*Import L/C and Domestic Letters of Credit*
		112.915.042	
Jumlah		**443.703.574**	***Total***
Cadangan kerugian penurunan nilai		(6.362.587)	*Allowance for impairment losses*
Bersih		**437.340.987**	***Net***

b. Berdasarkan sisa umur jatuh tempo: / *b. By remaining period to maturity:*

	31 Desember/ *December 31,* 2019	**31 Desember/ *December 31,* 2018**	
Pihak ketiga			***Third parties***
≤ 1 bulan	148.984.168	169.635.845	*≤ 1 month*
> 1 - ≤ 3 bulan	260.222.154	196.260.022	*> 1 - ≤ 3 months*
> 3 - ≤ 6 bulan	2.058.773	77.807.707	*> 3 - ≤ 6 months*
Jumlah	**411.265.095**	**443.703.574**	***Total***
Cadangan kerugian penurunan nilai	(4.784.387)	(6.362.587)	*Allowance for impairment losses*
Bersih	**406.480.708**	**437.340.987**	***Net***

c. Berdasarkan kolektibilitas: / *c. By collectibility:*

	31 Desember/ *December 31,* 2019	**31 Desember/ *December 31,* 2018**	
Lancar	411.265.095	443.703.574	*Current*
Jumlah	**411.265.095**	**443.703.574**	***Total***
Cadangan kerugian penurunan nilai	(4.784.387)	(6.362.587)	*Allowance for impairment losses*
Bersih	**406.480.708**	**437.340.987**	***Net***

13. TAGIHAN DAN LIABILITAS AKSEPTASI (Lanjutan)

13. ACCEPTANCES RECEIVABLE AND PAYABLE (Continued)

d. Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

d. Changes in the allowance for impairment losses are as follows:

	31 Desember/ *December 31,* 2019	**31 Desember/ *December 31,* 2018**	
Saldo awal tahun	6.362.587	8.004.596	*Balance at the beginning of the year*
Penyisihan (pembalikan) tahun berjalan (Catatan 36)	(1.578.200)	(1.729.854)	*Provision (reversal) during the year (Note 36)*
Selisih Kurs	--	87.845	*Exchange rate differences*
Saldo akhir tahun	**4.784.387**	**6.362.587**	***Balance at the end of the year***

e. Jumlah liabilitas akseptasi adalah sebesar jumlah akseptasi kepada nasabah (sebelum dikurangi cadangan kerugian).

e. Acceptance payables represents the same amount as acceptance receivables from customers (before allowance for impairment losses).

	31 Desember / *December 31,* 2019		
	Jumlah nosional mata uang asing/ *Notional amount in foreign currencies* (Dalam nilai penuh/*In full amount)*	**Setara dengan/ *Equivalent to* Rupiah**	
Pihak ketiga			***Third parties***
Rupiah			***Rupiah***
Impor L/C dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)		251.636.616	*Import L/C and Domestic Letters of Credit*
Spot dan *Forward*		4.304.956	*Spot and Forward*
		255.941.572	
Mata uang asing			***Foreign currencies***
Dolar Amerika Serikat			***US Dollar***
Impor L/C dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)			*Import L/C and Domestic Letters of Credit*
Dollar Amerika Serikat	380.200	5.278.127	*United Stated Dollar*
Euro	45.843	713.803	*Euro*
		5.991.930	
Jumlah		**261.933.502**	***Total***

13. TAGIHAN DAN LIABILITAS AKSEPTASI (Lanjutan) / *13. ACCEPTANCES RECEIVABLE AND PAYABLE (Continued)*

e. Jumlah liabilitas akseptasi adalah sebesar jumlah akseptasi kepada nasabah (sebelum dikurangi cadangan kerugian) (lanjutan)

e. Acceptance payables represents the same amount as acceptance receivables from customers (before allowance for impairment losses) (continued)

	31 Desember / *December 31, 2018*		
	Jumlah nosional mata uang asing/ *Notional amount in foreign currencies* (Dalam nilai penuh/ *In full amount)*	**Setara dengan/ *Equivalent to* Rupiah**	
Pihak ketiga			***Third parties***
Rupiah			***Rupiah***
Impor L/C dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)		183.906.225	*Import L/C and Domestic Letters of Credit*
Spot dan *Forward*		2.581.498	*Spot and Forward*
		186.487.723	
Mata uang asing			***Foreign currencies***
Dolar Amerika Serikat			***US Dollar***
Impor L/C dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)	1.290.351	18.555.250	*Import L/C and Domestic Letters of Credit*
		18.555.250	
Jumlah		**205.042.973**	***Total***

Bank melakukan penilaian atas penurunan nilai tagihan akseptasi secara individual dengan adanya bukti objektif penurunan nilai.

The Bank assessed acceptance receivable individually for impairment based on whether an objective evidence of impairment exists.

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 telah memadai.

Management believes that allowance for impairment losses as of December 31, 2019 and 2018 is adequate.

14. ASET YANG DIPEROLEH UNTUK *IJARAH* / *14. ASSETS ACQUIRED FOR IJARAH*

Akun ini merupakan objek sewa dari transaksi *ijarah muntahiyah bittamlik* dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa dengan hibah.

This account represents lease objects of an ijarah muntahiyah bittamlik transaction which includes an option to transfer the title of ownership over the assets through a grant.

	31 Desember/ *December 31, 2019*	**31 Desember/ *December 31, 2018***	
Multijasa	188.164.104	194.884.306	*Multiservices*
Bangunan	498.020	153.500	*Buildings*
Mesin pembangkit listrik	9.314.930	5.240.900	*Power plant*
Kapal	887.955	--	*Ship*
Jumlah	**198.865.009**	**200.278.706**	***Total***
Akumulasi penyusutan	(18.344.581)	(14.223.492)	*Accumulated depreciation*
Bersih	**180.520.428**	**186.055.214**	***Net***

14. ASET YANG DIPEROLEH UNTUK *IJARAH* (Lanjutan)

14. ASSETS ACQUIRED FOR IJARAH (Continued)

Penyusutan yang dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah sebesar Rp28.864.500 dan Rp7.241.418 untuk posisi 31 Desember 2019 dan 2018.

Depreciation charged to the statements of profit or loss and other comprehensive income is amounting to Rp28,864,500 and Rp7,241,418 as of December 31, 2019 and 2018, respectively.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.16/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014, kewajiban membentuk cadangan umum penyisihan aset produktif tidak berlaku bagi aset produktif dalam bentuk pembiayaan *ijarah* atau pembiayaan *ijarah muntahiyah bittamlik* dan pembentukan cadangan khusus *ijarah*.

Based on the Financial Services Authority Regulation (POJK) No.16/POJK.03/2014 dated November 18, 2014, the obligation to provide allowance for impairment losses on earning assets do not apply to earning assets under ijarah or ijarah muntahiyah bittamlik financing and the provision of ijarah special allowance.

Perubahan akumulasi penyusutan aset yang diperoleh untuk *ijarah* adalah sebagai berikut:

The changes in accumulated depreciation of assets acquired for ijarah are as follows:

	31 Desember/ *December 31,* 2019	**31 Desember/ *December 31,* 2018**	
Saldo awal tahun	14.223.492	20.881.453	*Balance at the beginning of the year*
Penyusutan tahun berjalan	28.864.500	7.241.418	*Depreciation during the year*
Pelunasan	(24.743.411)	(13.899.379)	*Repayment*
Saldo akhir tahun	**18.344.581**	**14.223.492**	***Balance at the end of the year***

15. ASET TETAP

15. PREMISES AND EQUIPMENT

Aset tetap terdiri dari:

Premises and equipment consist of:

	31 Desember 2019 / *December 31, 2019*						
	Saldo awal/ *Beginning balance*	**Penambahan/ *Addition***	**Surplus revaluasi/ *Revaluation Surplus***	**Pengurangan/ *Deduction***	**Reklasifikasi/ *Reclassification***	**Saldo akhir/ *Ending balance***	
Nilai Wajar:							*Fair Value :*
Pemilikan langsung							*Direct acquisitions*
Tanah	1.831.200.535	--	--	--	(43.508.880)	1.787.691.655	*Land rights*
Bangunan	1.353.702.222	43.892.309	--	(47.838.393)	(35.420.147)	1.314.335.991	*Buildings*
Kendaraan bermotor	92.425.596	3.568.800	--	(18.820.246)	(10.175.946)	66.998.204	*Vehicles*
Inventaris kantor	418.287.110	2.291.290	--	(6.103.407)	3.695.471	418.170.464	*Office equipments*
Komputer	703.779.507	61.666.748	--	(32.724.174)	--	732.722.081	*Computers*
Perbaikan sarana dan prasarana	224.062.542	--	--	--	35.420.147	259.482.689	*Leasehold improvement*
	4.623.457.511	111.419.147	--	(105.486.220)	(49.989.355)	4.579.401.084	
Aset sewa pembiayaan kendaraan bermotor	48.687.813	--	--	(22.555.471)	6.480.475	32.612.817	*Vehicles under finance lease*
	4.672.145.324	111.419.147	--	(128.041.691)	(43.508.880)	4.612.013.902	
Akumulasi Penyusutan							*Accumulated Depreciation*
Bangunan	190.255.069	66.581.767	--	(4.182.837)	(28.654.146)	223.999.853	*Buildings*
Kendaraan bermotor	48.370.328	14.895.847	--	(17.080.258)	1.887.540	48.073.457	*Vehicles*
Inventaris kantor	312.843.380	49.860.443	--	(2.460.105)	--	360.243.718	*Office equipments*
Komputer	517.031.616	82.516.032	--	(14.571.584)	--	584.976.064	*Computers*
Perbaikan sarana dan prasarana	200.050.318	5.225.052	--	--	28.654.146	233.929.516	*Leasehold improvement*
	1.268.550.711	219.079.142	--	(38.294.784)	1.887.540	1.451.222.609	
Aset sewa pembiayaan kendaraan bermotor	46.310.573	2.562.016	--	(18.064.515)	(1.887.540)	28.920.534	*Vehicles under finance lease*
	1.314.861.284	221.641.158	--	(56.359.299)	--	1.480.143.143	
Nilai buku	**3.357.284.040**					**3.131.870.759**	***Book value***

15. ASET TETAP (Lanjutan) / *15. PREMISES AND EQUIPMENT (Continued)*

	31 Desember 2018 / *December 31, 2018*						
	Saldo awal/ *Beginning balance*	**Penambahan/ *Addition***	**Surplus revaluasi/ *Revaluation Surplus***	**Pengurangan/ *Deduction***	**Reklasifikasi/ *Reclassification***	**Saldo akhir/ *Ending balance***	
Nilai Wajar:							*Fair Value :*
Pemilikan langsung							*Direct acquisitions*
Tanah	970.436.459	38.148.068	2.417.359	--	820.198.649	1.831.200.535	*Land rights*
Bangunan	1.300.355.221	13.063.243	43.664.948	(15.951.769)	12.570.578	1.353.702.222	*Buildings*
Kendaraan bermotor	92.854.328	30.102.641	--	(30.531.373)	--	92.425.596	*Vehicles*
Inventaris kantor	421.893.371	87.193.316	--	(90.799.577)	--	418.287.110	*Office equipments*
Komputer	689.246.911	40.562.555	--	(50.320.100)	24.290.141	703.779.507	*Computers*
Perbaikan sarana dan prasarana	249.908.428	194.750	--	(13.470.058)	(12.570.578)	224.062.542	*Leasehold improvement*
	3.724.694.718	209.264.574	46.082.307	(201.072.877)	844.488.790	4.623.457.511	
Aset sewa pembiayaan kendaraan bermotor	48.687.813	--	--	--	--	48.687.813	*Vehicles under finance lease*
	3.773.382.531	209.264.574	46.082.307	(201.072.877)	844.488.790	4.672.145.324	
Akumulasi Penyusutan							*Accumulated Depreciation*
Bangunan	135.005.276	63.971.671	--	(8.721.878)	--	190.255.069	*Buildings*
Kendaraan bermotor	34.475.113	17.374.730	--	(3.479.515)	--	48.370.328	*Vehicles*
Inventaris kantor	268.714.177	56.774.704	--	(12.645.501)	--	312.843.380	*Office equipments*
Komputer	437.830.236	91.481.145	--	(25.851.979)	13.572.214	517.031.616	*Computers*
Perbaikan sarana dan prasarana	202.260.191	10.722.340	--	(12.932.212)	--	200.050.318	*Leasehold improvement*
	1.078.284.993	240.324.589	--	(63.631.084)	13.572.214	1.268.550.712	
Aset sewa pembiayaan kendaraan bermotor	41.658.607	4.651.966	--	--	--	46.310.573	*Vehicles under finance lease*
	1.119.943.600	244.976.554	--	(63.631.084)	13.572.214	1.314.861.284	
Nilai buku	**2.653.438.931**					**3.357.284.040**	***Book value***

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 penjualan aset tetap Bank adalah sebagai berikut:

As of December 31, 2019 and 2018, the sales of premises and equipment are as follows:

	31 Desember/ *December 31,* 2019	**31 Desember/ *December 31,* 2018**	
Harga jual	14.823.036	3.008.559	*Selling price*
Jumlah tercatat - neto	(8.464.637)	(1.139.254)	*Net carrying value*
Laba penjualan aset tetap (Catatan 38)	**6.358.399**	**1.869.305**	***Gain on sales of premises and equipment (Note 38)***

Pada tahun 2018, Bank melakukan revaluasi aset tetap berupa Tanah untuk tujuan akuntansi. Hasil revaluasi yang dilakukan oleh KJPP Iskandar & Rekan tanggal 28 Februari 2019 mengakibatkan kenaikan harga perolehan aset tetap berupa Tanah dan Bangunan masing-masing sebesar Rp2.417.359 dan Rp43.664.948. Pada tahun 2017, Bank melakukan revaluasi aset tetap berupa Tanah, Bangunan, Inventaris, Kendaraan dan Perangkat Lunak Komputer untuk tujuan akuntansi. Hasil revaluasi dicatat dan dibukukan sebagai surplus revaluasi aset tetap dalam laporan keuangan Bank per 31 Desember 2018.

In 2018, the Bank carried out revaluation of certain fixed assets consisting of land for accounting purposes. The revaluation conducted by Iskandar & Rekan Public Appraisal Firm dated February, 28, 2019 resulted in the increase in value of fixed assets in the form of land and building amounting to Rp2,417,359 and Rp43,664,948. In 2017, the Bank carried out revaluation of certain fixed assets consisting of land, building, office equipment, vehicle and computer software for accounting purposes. The revaluation conducted is recorded as revaluation surplus of premises and equipment in the financial statements of the Bank as of December 31, 2018.

Metodologi penilaian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan pendekatan biaya, pendekatan pendapatan serta pendekatan pasar untuk tanah dan bangunan serta pendekatan pasar dan pendekatan pendapatan untuk kendaraan, pendekatan biaya dan pendekatan pasar untuk inventaris kantor dan komputer.

Valuation method used is cost approach, income approach, and market data approach for land and building, as well as market approach and income approach for vehicles, cost approach and market approach for office equipment and computers.

Penyusutan yang dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah masing-masing sebesar Rp221.641.158 dan Rp244.976.554 untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 (Catatan 35).

Depreciation charged to the statements of profit or loss and other comprehensive income is amounting to Rp221,641,158 and Rp244,976,554 for the years ended December 31, 2019 and 2018, respectively (Note 35).

15. ASET TETAP (Lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, aset tetap kecuali tanah telah diasuransikan kepada Asuransi Jasindo Syariah, Asuransi Sinarmas Syariah, dan PT Syarikat Takaful Indonesia (pihak berelasi) terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya dengan jumlah pertanggungan masing-masing sebesar Rp1.575.179.464 dan Rp1.639.831.220.

Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut adalah cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset tetap yang dipertanggungkan.

Reklasifikasi aset tetap dari agunan yang diambil alih sebesar Rp820.198.649 merupakan aset tetap berupa tanah. Bank berencana untuk menggunakan aset tersebut.

Tidak terdapat aset tetap milik Bank yang dijadikan sebagai jaminan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

Pada 31 Desember 2019 dan 2018 tidak ada komitmen kontraktual dalam perolehan aset tetap dan aset tetap yang mengalami penurunan nilai. Selain itu, tidak terdapat aset tetap dalam pembangunan serta tidak terdapat dalam aset yang tidak dipakai untuk sementara.

15. PREMISES AND EQUIPMENT (Continued)

As of December 31, 2019, and 2018, premises and equipment except for land were insured by Jasindo Syariah Insurance, Sinarmas Syariah Insurance, and PT Syarikat Takaful Indonesia (related party) against losses from fire and other risks with coverage of Rp1,575,179,464 and Rp1,639,831,220 respectively.

Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses of the premises and equipment insured.

Foreclosed assets in the form of land were reclassified as premises and equipment amounting to Rp820,198,649. The Bank has a plan to utilize the said premises and equipment.

There are no premises and equipment owned by Bank that are pledged as collateral as of December 31, 2019 and 2018.

As of December 31, 2019 and 2018, there is no contractual commitment in acquisition of premises and equipment and impaired premises and equipment. Furthermore, no assets are under construction and no assets are temporarily unused or idle.

16. ASET LAIN-LAIN - NETO

Aset lain-lain terdiri dari:

16. OTHER ASSETS – NET

This account consists of:

	31 Desember/ *December 31,* 2019	**31 Desember/ *December 31,* 2018**	
Aset terbengkalai	574.440.980	574.440.980	*Abandoned assets*
Biaya dibayar dimuka	439.421.715	457.633.122	*Prepaid expenses*
Pendapatan yang masih akan diterima	619.994.197	409.268.262	*Accrued income*
Uang muka operasi	205.835.864	108.684.932	*Advances*
Tagihan ATM	51.349.687	86.918.208	*ATM receivables*
Kelebihan pembayaran pajak (Catatan 23c)	60.323.332	60.323.332	*Estimated claims for tax refund (Note 23c)*
Tagihan kepada pihak ketiga - bersih	16.151.275	32.152.561	*Receivables from third parties - net*
Persediaan alat tulis kantor	13.172.950	10.919.308	*Office supplies*
Setoran jaminan	5.610.711	5.617.418	*Security deposits*
Tagihan *Usance Payable At Usance (UPAU)*	140.000	140.000	*Usance Payable At Usance (UPAU) receivable*
Agunan yang diambil alih -bersih	70.891.630	--	*Foreclosed assets - net*
Uang muka pajak	18.419.805	--	*Prepaid Tax*
Lainnya	81.648.294	30.274.953	*Others*
Jumlah	**2.157.400.440**	**1.776.373.076**	***Total***

16. ASET LAIN-LAIN - NETO (Lanjutan)

16. OTHER ASSETS - NET (Continued)

Dalam akun pendapatan yang masih akan diterima tanggal 31 Desember 2018, terdapat mutasi pengalihan portofolio pada tanggal 29 Juni 2018 dimana Bank telah melakukan perjanjian pengalihan portofolio. Dalam pengalihan portofolio tersebut antara lain terdapat margin piutang *murabahah* dan pendapatan yang akan diterima bagi hasil *mudharabah* dan *musyarakah* (lihat catatan 7, 8, 10, 11).

In the accrued income as of December 31, 2018, there is portfolio transfer on June 29, 2018 where the Bank entered into a portfolio transfer agreement. The portfolio transfer includes, among others, margin of murabahah receivables and revenue to be received for mudharabah and musyarakah held (see note 7, 8, 10, 11).

Nilai pokok atas margin piutang murabahah dan pendapatan yang akan diterima bagi hasil *mudharabah* dan *musyarakah* yang dijual dan dialihkan tersebut adalah sebesar Rp710.077.890 dengan harga sebesar nilai pokok pada tanggal *cut off* final (29 Juni 2018). Setelah terjadinya penjualan dan pengalihan margin piutang *murabahah* dan pendapatan yang akan diterima bagi hasil *mudharabah* dan *musyarakah* tersebut, risiko telah beralih dari Bank kepada pembeli termasuk segala keuntungan dan kerugian yang akan timbul.

The principal amount of the murabahah receivable margin and the revenue to be received for the mudharabah and musyarakah sold and transferred is Rp710,077,890 at a nominal value on the final cut off date (June 29, 2018). Upon the sale and transfer of the margin of murabahah receivables and the revenue to be received for the mudharabah and musyarakah, the risk is transferred from the Bank to the buyer, including any profit and loss that will arise.

Uang muka operasi merupakan uang muka yang digunakan untuk pembelian/renovasi gedung, operasional Bank, dan program aplikasi yang belum terselesaikan sampai 31 Desember 2019 dan 2018.

Advance of operational funds represents term of payment for renovation/purchase of building, operational activity of Bank, and application program in progress as of December 31, 2019 and 2018.

Tagihan *Usance Payable at Usance (UPAU)* merupakan tagihan kepada debitur atas transaksi dengan pihak ketiga, dimana Bank membayarkan terlebih dahulu L/C kepada pihak ketiga setelah tanggal *invoice date* dan saat jatuh tempo debitur baru melunasinya kepada Bank. Atas transaksi ini Bank memperoleh *fee*.

Usance Payable at Usance (UPAU) receivable represents a transaction with third parties where Bank pays in advance the amount of L/C to the third parties after the invoice date, and the applicant will make the payment settlement at the end of the usance term. Bank will receive fees from this transaction.

Pada tanggal 29 Juni 2018, Bank telah melakukan perjanjian pengalihan portofolio. Dalam pengalihan portofolio tersebut antara lain terdapat Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) (lihat catatan 7). Selanjutnya atas AYDA yang telah memenuhi kriteria pemilihan untuk dijual dan dialihkan oleh Bank ke Tameer Sukuk SPC Limited selaku pembeli yang tertuang dalam Perjanjian Pengalihan Portofolio tertanggal 29 Juni 2018.

On June 29, 2018, the Bank entered into a portfolio transfer agreement. The transfer of the portfolio includes, among others, the Foreclosed Assets (AYDA) (see Note 7). Subsequently, foreclosed assets meeting the eligibility criteria are sold and transferred by Bank to Tameer Sukuk SPC Limited as the buyer as stated in the Portfolio Transfer Agreement dated June 29, 2018.

Nilai pokok AYDA yang dijual dan dialihkan tersebut adalah sebesar Rp1.238.259.699 dengan harga sebesar nilai pokok AYDA pada tanggal *cut off* final (29 Juni 2018). Setelah terjadinya penjualan dan pengalihan AYDA tersebut, risiko telah beralih dari Bank kepada pembeli termasuk segala keuntungan dan kerugian yang akan timbul.

The principal amount of foreclosed assets sold and transferred is Rp1,238,259,699 at the principal amount of foreclosed assets on the final cut off date (June 29, 2018). Upon the sale and transfer of the foreclosed assets, the risk is transferred from the Bank to the buyer, including any profits and losses that will arise.

Manajemen Bank telah melakukan reklasifikasi dengan melakukan verifikasi dari masing-masing AYDA berdasarkan manfaat ekonomi masa depan suatu aset yang akan dipakai terutama melalui penggunannya.

The Bank's management has made reclassification by verifying each of the foreclosed assets based on the future economic benefits of an asset to be used primarily through its use.

16. ASET LAIN-LAIN - NETO (Lanjutan) / *16. OTHER ASSETS - NET (Continued)*

Mutasi agunan yang diambil alih adalah sebagai berikut:

The changes in foreclosed assets are as follows:

	31 Desember/ *December 31,* 2019	31 Desember/ *December 31,* 2018	
Saldo awal tahun	--	2.844.792.173	*Balance at the beginning of the year*
Penambahan tahun berjalan	70.891.630	5.230.540	*Addition during the year*
Penyelesaian:			*Settlement:*
Recovery	(43.508.880)	(217.123.385)	*Recovery*
Pelunasan Pengalihan Portofolio (Catatan 7)	--	(1.238.259.699)	*Acquittal of Portfolio Transfer (Note 7)*
Reklasifikasi:			*Reclassification:*
Aset Tetap	43.508.880	(820.198.649)	*Premises and Equipment*
Properti Terbengkalai	--	(574.440.980)	*Abandoned Property*
Saldo akhir tahun	70.891.630	--	*Balance at the end of the year*
Cadangan kerugian penurunan nilai	--	--	*Allowance for impairment losses*
Bersih	**70.891.630**	**--**	***Net***

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai agunan yang diambil alih adalah sebagai berikut:

The changes in allowance for impairment losses of foreclosed assets are as follows:

	31 Desember/ *December 31,* 2019	31 Desember/ *December 31,* 2018	
Saldo awal tahun	--	402.027.959	*Balance at the beginning of the year*
Pembentukan (Pembalikan) selama tahun berjalan (Catatan 36)	--	(402.027.959)	*Provision (Reversal) during the year (Note 36)*
Saldo akhir tahun	**--**	**--**	***Balance at the end of the year***

Manajemen Bank telah membentuk cadangan kemungkinan kerugian penurunan atas nilai agunan yang diambil alih.

The Bank's management has established allowance for possible impairment losses of foreclosed assets.

Tagihan ATM merupakan tagihan kepada bank lain sehubungan dengan transaksi antar bank anggota ATM Bersama berupa transfer dan penarikan tunai.

ATM receivables represent receivables from other banks related to inter-bank transactions using ATM Bersama, such as transfer and withdrawal.

17. LIABILITAS SEGERA / *17. LIABILITIES DUE IMMEDIATELY*

Liabilitas segera kepada pihak ketiga terdiri dari:

Liabilities due immediately to third parties consist of:

	31 Desember/ *December 31,* 2019	31 Desember/ *December 31,* 2018	
Titipan dana nasabah	37.147.298	126.533.975	*Customers funds*
Titipan ATM Bersama	43.858.304	65.496.965	*ATM Bersama funds*
Titipan ZIS	2.768.027	1.347.805	*ZIS funds*
Titipan lainnya	3.925.941	5.434.755	*Other funds*
Jumlah	**87.699.569**	**198.813.500**	***Total***

17. LIABILITAS SEGERA (Lanjutan) / *17. LIABILITIES DUE IMMEDIATELY (Continued)*

Titipan dana nasabah merupakan titipan atas transaksi pengiriman uang melalui lembaga keuangan bank lain.

Customer funds represent funds generated through remittances from other financial institutions.

Titipan ATM Bersama merupakan liabilitas yang timbul karena nasabah Bank melakukan transaksi ATM dengan menggunakan jaringan ATM Prima dan jaringan ATM Bersama.

The ATM Bersama funds represent liabilities arising from the Bank's customers using ATM Prima and ATM Bersama network.

18. BAGI HASIL YANG BELUM DIBAGIKAN / *18. UNDISTRIBUTED REVENUE SHARING*

Akun ini merupakan bagi hasil yang belum dibagikan oleh Bank kepada *shahibul maal* atas keuntungan hasil usaha Bank yang telah disisihkan dari pengelolaan dana nasabah.

This account represents undistributed share of customers (shahibul maal) on income generated by the Bank from managing customers funds.

	31 Desember/ *December 31,* 2019	**31 Desember/ *December 31,* 2018**	
Deposito *mudharabah* berjangka	60.699.989	50.893.246	*Mudharabah time deposits*
Pinjaman yang diterima	10.813.249	25.055.558	*Fund borrowings*
Tabungan *mudharabah*	668.255	670.667	*Mudharabah saving deposits*
Lain-lain	4.111.888	7.435.716	*Others*
Jumlah	**76.293.382**	**84.055.187**	***Total***

19. SIMPANAN / *19. DEPOSITS*

	31 Desember/ *December 31,* 2019	**31 Desember/ *December 31,* 2018**	
Giro wadiah			***Wadiah demand deposits***
Pihak ketiga			***Third parties***
Rupiah	1.955.025.295	1.854.294.967	***Rupiah***
Mata uang asing			***Foreign currencies***
Dolar Amerika Serikat (2019: USD39.063.093 dan 2018: USD38.334.914)	542.284.200	551.241.699	*United States Dollar (2019: USD39,063,093 and 2018: USD38,334,914)*
Dolar Singapura (2019: SIN218.728 dan 2018: SIN22.071)	2.108.131	232.959	*Singapore Dollar (2019: SIN218,728 and 2018: SIN22,071)*
Euro (2019: EUR109.702 dan 2018: EUR9.545)	1.708.132	156.928	*Euro (2019: EUR109,702 and 2018: EUR9,545)*
	2.501.125.758	2.405.926.553	
Pihak berelasi (Catatan 41)			***Related parties (Note 41)***
Rupiah	30.428.815	45.354.109	***Rupiah***
Mata uang asing			***Foreign currency***
Dolar Amerika Serikat (2019: USD10.665 dan 2018: USD47.681)	148.058	685.660	*United States Dollar (2019: USD10,665 and 2018: USD47,681)*
	30.576.873	46.039.769	
	2.531.702.631	**2.451.966.322**	

19. SIMPANAN (Lanjutan) / *19. DEPOSITS (Continued)*

	31 Desember/ *December 31,* 2019	**31 Desember/ *December 31,* 2018**	
Tabungan wadiah			***Wadiah savings***
Pihak ketiga			***Third parties***
Rupiah	4.223.727.031	3.445.176.392	***Rupiah***
Mata uang asing			***Foreign currencies***
Dolar Amerika Serikat (2019: USD17.636.470 dan 2018: USD9.113.188)	244.838.290	131.047.643	*United States Dollar (2019 : USD17,636,470 and 2018: USD9,113,188)*
Dolar Singapura (2019: SIN338.168 dan 2018: SIN185.094)	3.488.224	1.953.652	*Singapore Dollar (2019 : SIN338,168 and 2018: SIN185,094)*
	4.472.053.545	3.578.177.687	
Jumlah	**7.003.756.176**	**6.030.144.009**	***Total***

Giro *wadiah* merupakan simpanan *wadiah yad-dhamanah* dimana nasabah dapat memperoleh bonus berdasarkan kebijakan Bank.

Wadiah demand deposits represent yad-dhamanah wadiah demand deposits, in which costumers are entitled to receive bonuses in accordance with the Bank's policy.

Bonus per tahun untuk simpanan *wadiah* rupiah adalah berkisar antara 0,00% sampai dengan 0,02% untuk tahun 2019 dan antara 0,00% sampai dengan 4,41% untuk tahun 2018. Bank tidak memberikan bonus untuk simpanan *wadiah* dalam mata uang asing.

The annual bonus rates range from 0.00% to 0.02% in 2019 and 0.00% to 4.41% in 2018 for Rupiah wadiah demand deposits. Wadiah demand deposits in foreign currency are not entitled to bonus.

Tabungan *wadiah* merupakan tabungan Haji Arafah dalam mata uang Rupiah dan tidak mendapatkan bonus.

Wadiah savings represent Arafah Hajj savings in Rupiah and are not entitled to bonus.

Tidak terdapat Giro dan Tabungan *wadiah* yang diblokir yang dijadikan sebagai agunan pembiayaan yang diberikan pada 31 Desember 2019 dan 2018.

No Wadiah demand deposits or Wadiah savings are blocked and pledged as collateral for loans extended as of December 31, 2019 and 2018.

20. SIMPANAN DARI BANK LAIN / *20. DEPOSITS FROM OTHER BANKS*

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

	31 Desember/ *December 31,* 2019	**31 Desember/ *December 31,* 2018**	
Giro wadiah			***Wadiah Demand Deposits***
Pihak ketiga			***Third parties***
Rupiah	116.236.756	48.135.083	***Rupiah***
Mata uang asing			***Foreign currencies***
Dolar Amerika Serikat	62.207	64.436	*United States Dollar*
Tabungan wadiah			***Wadiah savings***
Pihak ketiga			***Third parties***
Rupiah	1.016.269	--	*Rupiah*
Jumlah	**117.315.232**	**48.199.519**	***Total***

Tidak terdapat Giro *wadiah* yang diblokir yang dijadikan sebagai agunan pembiayaan yang diberikan pada 31 Desember 2019 dan 2018.

No Wadiah demand deposits are blocked and pledged as collateral for loans extended as of December 31, 2019 and 2018.

21. EFEK - EFEK YANG DIJUAL DENGAN JANJI DIBELI KEMBALI

Berikut ini adalah informasi liabilitas atas efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali per 31 Desember 2019 dan 2018 yaitu:

21. SECURITIES SOLD UNDER REPURCHASE AGREEMENT

Below is the information on securities sold under repurchase agreement as of December 31, 2019 and 2018:

31 Desember 2019 / *December 31, 2019*

Nama Pihak Penjual / *Counterparty*	Jenis Efek / *Type of Security*	Nilai Nominal / *Nominal Amount*	Tarif / *Rate* (%)	Tanggal Mulai / *Value Date*	Tanggal Jatuh Tempo / *Maturity Date*	Nilai Jual / *Selling Price*
Bank Indonesia	IFR 006	299.000.000	10,250	20/12/2019	17/01/2020	348.176.685
Bank Indonesia	IFR 007	19.000.000	10,250	20/12/2019	17/01/2020	21.363.562
Bank Indonesia	IFR 008	85.000.000	8,800	20/12/2019	17/01/2020	82.024.915
Bank Indonesia	IFR 010	256.900.000	10,000	20/12/2019	17/01/2020	265.397.485
Bank Indonesia	PBS 014	3.100.000	6,250	20/12/2019	17/01/2020	27.069.516
Bank Indonesia	PBS 016	93.000.000	6,250	20/12/2019	17/01/2020	88.724.232
Bank Indonesia	PBS 017	239.000.000	6,125	20/12/2019	17/01/2020	216.707.275
Bank Indonesia	PBS 021	205.000.000	8,500	20/12/2019	17/01/2020	207.874.715
Bank Indonesia	PBS 026	100.000.000	6,630	20/12/2019	17/01/2020	94.694.700
Jumlah / *Total*		**1.300.000.000**				**1.352.033.085**

31 Desember 2018 / *December 31, 2018*

Nama Pihak Penjual / *Counterparty*	Jenis Efek / *Type of Security*	Nilai Nominal / *Nominal Amount*	Tarif / *Rate* (%)	Tanggal Mulai / *Value Date*	Tanggal Jatuh Tempo / *Maturity Date*	Nilai Jual / *Selling Price*
Bank Indonesia	PBS 002	150.000.000	5,450	19/12/2018	16/01/2019	132.930.150
Bank Indonesia	PBS 004	200.000.000	6,100	19/12/2018	16/01/2019	138.581.200
Bank Indonesia	PBS 005	300.000.000	6,750	19/12/2018	16/01/2019	209.209.200
Bank Indonesia	PBS 013	100.000.000	6,250	19/12/2018	16/01/2019	93.587.000
Bank Indonesia	PBS 016	300.000.000	6,250	19/12/2018	16/01/2019	281.244.600
Bank Indonesia	PBS 017	100.000.000	6,125	19/12/2018	16/01/2019	82.457.700
Bank Indonesia	SR 010	150.000.000	5,900	19/12/2018	16/01/2019	134.318.550
Jumlah / *Total*		**1.300.000.000**				**1.072.328.400**

Sampai dengan tanggal laporan keuangan diterbitkan, surat-surat berharga tersebut telah dibeli kembali.

Until the date of the issuance of the financial statements, the securities have been repurchased.

Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku, semua surat-surat berharga pada 31 Desember 2019 dan 2018 diklasifikasikan lancar.

Under the applicable Bank Indonesia regulations, all securities as of December 31, 2019 and 2018 are classified as current.

22. PINJAMAN YANG DITERIMA

22. FUND BORROWINGS

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

	31 Desember/ *December 31,* 2019	**31 Desember/ *December 31,* 2018**	
Rupiah			***Rupiah***
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	250.000.000	1.150.000.000	*PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)*
Mata Uang Asing			***Foreign Currencies***
J-Trust Bank	27.765.000	--	*J-Trust Bank*
Jumlah	**277.765.000**	**1.150.000.000**	***Total***

22. PINJAMAN YANG DITERIMA (Lanjutan)

Pada tanggal 22 Oktober 2019, Bank memperoleh fasilitas pembiayaan dari PT Bank Jtrust Indonesia Tbk sebesar Rp27.765.000 berjangka waktu 87 Hari dan porsi nisbah yang disepakati adalah masing-masing sebesar 0,10% untuk Bank dan PT Bank Jtrust Indonesia Tbk sebesar 99,90%.

Berdasarkan akad pembiayaan *mudharabah muqayadah* antara Bank dengan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) No.035/AKAD/SMF-BMI/VI/2017 tanggal 16 Juni 2017, Bank telah menerima fasilitas pembiayaan dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) sebesar Rp250.000.000 berjangka waktu 3 (tiga) tahun dan porsi nisbah yang disepakati adalah masing-masing sebesar 28,64% untuk Bank dan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) sebesar 71,36%.

Berdasarkan akad pembiayaan *mudharabah muqayadah* antara Bank dengan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) No.034/AKAD/SMF-BMI/VI/2017 tanggal 16 Juni 2017, Bank telah menerima fasilitas pembiayaan dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) sebesar Rp450.000.000 berjangka waktu 2 (dua) tahun dan porsi nisbah yang disepakati adalah masing-masing sebesar 32,40% untuk Bank dan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) sebesar 67,60%. Bank telah melakukan pelunasan pinjaman tersebut pada tanggal 17 Juni 2019.

Berdasarkan akad pembiayaan *mudharabah muqayadah* antara Bank dengan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) No.061/AKAD/SMF- BMI/XII/2016 tanggal 23 Desember 2016, Bank telah menerima fasilitas pembiayaan dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) sebesar Rp200.000.000 berjangka waktu 3 (tiga) tahun dan porsi nisbah yang disepakati adalah masing-masing sebesar 32,58% untuk Bank dan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) sebesar 67,42%. Bank telah melakukan pelunasan pinjaman tersebut pada tanggal 27 Desember 2019.

Berdasarkan akad pembiayaan *mudharabah muqayadah* antara Bank dengan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) No.073/AKAD/SMF- BMI/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017, Bank telah menerima fasilitas pembiayaan dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) sebesar Rp250.000.000 berjangka waktu 2 (dua) tahun dan porsi nisbah yang disepakati adalah masing-masing sebesar 28,64% untuk Bank dan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) sebesar 71,36%. Bank telah melakukan pelunasan pinjaman tersebut pada tanggal 19 Desember 2019.

22. FUND BORROWINGS (Continued)

On October 22, 2019 the Bank obtained financing facility from PT Bank Jtrust Indonesia Tbk amounting to Rp.27,765,000, with a period of 87 days and the agreed nisbah portion for the Bank and PT Bank Jtrust Indonesia Tbk is 0.10% and 99.90%, respectively.

Based on the Mudharabah Muqayadah financing agreement between Bank and PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) No.035/AKAD/SMF-BMI/VI/2017 dated June 16, 2017, Bank obtained additional financing facility from PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) amounting to Rp250,000,000, with a period of 3 (three) years and the agreed nisbah portion for Bank and PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) is 28.64% and 71.36%, respectively.

Based on the Mudharabah Muqayadah financing agreement between Bank and PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) No.034/AKAD/SMF-BMI/VI/2017 dated June 16, 2017, Bank obtained additional financing facility from PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) amounting to Rp450,000,000, with a period of 2 (two) years and the agreed nisbah portion for Bank and PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) is 32.40% and 67.60%, respectively. The Bank paid off this borrowing on June 17, 2019.

Based on the mudharabah muqayadah financing agreement between Bank and PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) No. 061/AKAD/SMF-BMI/XII/2016 dated December 23, 2016, Bank obtained additional financing facility from PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) amounting to Rp200,000,000, with a period of 3 (three) years and the agreed nisbah portion for Bank and PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) is 32.58% and 67.42%, respectively. The Bank paid off this borrowing on December 27, 2019.

Based on the Mudharabah Muqayadah financing agreement between Bank and PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) No.073/AKAD/SMF-BMI/XII/2017 dated December 18, 2017, Bank obtained additional financing facility from PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) amounting to Rp250,000,000, with a period of 2 (two) years and the agreed nisbah portion for Bank and PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) is 28.64% and 71.36%, respectively. The Bank paid off this borrowing on December 19, 2019.

22. PINJAMAN YANG DITERIMA (Lanjutan)

Seluruh fasilitas pinjaman yang diterima Bank dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) dijamin dengan fidusia tagihan. Bank telah memenuhi seluruh persyaratan yang telah disepakati dalam akad perjanjian pembiayaan mudharabah tersebut diatas.

22. FUND BORROWINGS (Continued)

All fund borrowings received from PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) are guaranteed with fiduciary collateral. The Bank has complied with all agreed covenants stipulated in the above stated mudharabah financing agreements

23. UTANG PAJAK

23. TAX PAYABLES

a. Utang pajak:

Rincian dari akun ini adalah sebagai berikut:

a. Tax payables:

The details of this account are as follows:

	31 Desember/ *December 31,* 2019	**31 Desember/ *December 31,* 2018**	
Pajak penghasilan:			*Income tax:*
Pasal 4 (2)	27.934.554	30.000.225	*Article 4 (2)*
Pasal 21	5.749.423	5.484.992	*Article 21*
Pasal 23	312.877	230.006	*Article 23*
Pasal 26	41.905	10.392	*Article 26*
Pasal 29	62.670	--	*Article 29*
Pajak Pertambahan Nilai	163.302	1.100.995	*Value Added Tax*
Jumlah	**34.264.731**	**36.826.610**	***Total***

b. Beban pajak penghasilan badan:

b. Corporate income tax expense:

	31 Desember/ *December 31,* 2019	**31 Desember/ *December 31,* 2018**	
(Beban) manfaat pajak:			*Tax (expense) benefit:*
Kini	(6.443.221)	(18.471.940)	*Current*
Tangguhan	(3.396.846)	18.668.112	*Deferred*
Jumlah	**(9.840.067)**	**196.172**	***Total***

23. UTANG PAJAK (Lanjutan) / *23. TAX PAYABLES (Continued)*

b. Beban pajak penghasilan badan: (lanjutan) / *b. Corporate income tax expense: (continued)*

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan seperti yang tercantum dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan penghasilan kena pajak adalah sebagai berikut:

Reconciliation between income before income tax as stated in the statement of profit or loss and other comprehensive income and taxable income is as follows:

	31 Desember/ *December 31,* 2019	**31 Desember/ *December 31,* 2018**	
Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	26.166.398	45.805.872	*Income before tax per statement of profit or loss and other comprehensive income*
Perbedaan temporer			***Temporary differences***
Imbalan pasca kerja karyawan	(36.277.657)	38.399.445	*Provision for post employment benefit*
Penyusutan aset tetap	58.352.516	(1.510.615)	*Depreciation of premises and equipment*
Beban Pesangon	3.928.005	--	*Severance payment*
Bonus	(26.172.882)	(23.290.169)	*Bonuses*
Laba (rugi) yang belum direalisasi atas efek yang diperdangangkan	(12.877.366)	(52.589)	*Unrealized gain (loss) on trading - Securities*
Jumlah perbedaan temporer	(13.047.384)	13.546.072	*Total temporary differences*
Perbedaan permanen			***Permanent differences***
Kenikmatan karyawan dan Direksi	854.606	1.027.617	*Employees and Directors benefits*
Hadiah dan sumbangan	229.660	200.335	*Rewards and donations*
Pemeliharaan dan perbaikan	810.311	1.028.657	*Maintenance and repairs*
Bagian rugi (laba) bersih entitas asosiasi	--	--	*Portion of net loss (income) of an associate entity*
Lain-lain	11.299.294	12.279.206	*Others*
Jumlah perbedaan permanen	13.193.871	14.535.815	*Total permanent differences*
Penghasilan fiskal kena pajak	**25.772.884**	**73.887.758**	***Taxable income***
Beban pajak penghasilan-kini	6.443.221	18.471.940	*Corporate Income tax expense - current*
Dikurangi pembayaran pajak dimuka Pajak Penghasilan Pasal 25	(6.380.551)	(42.433.323)	*Less prepaid income tax for Income Tax Article 25*
Utang (Kelebihan) Pajak Kini	**62.670**	**(23.961.383)**	***Current Tax Payables (Prepaid)***

23. UTANG PAJAK (Lanjutan) / *23. TAX PAYABLES (Continued)*

b. Beban pajak penghasilan badan: (lanjutan) / *b. Corporate income tax expense: (continued)*

Perhitungan pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 akan menjadi dasar dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan Badan.

The income tax calculation for the year ended December 31, 2019 and 2018 shall be the basis in filling the Annual Corporate Income Tax Return.

c. Kelebihan pembayaran pajak / *c. Corporate estimated claim for tax refund*

	31 Desember/ *December 31,* 2019	**31 Desember/ *December 31,* 2018**	
Tahun 2012	--	--	*Year 2012*
Tahun 2013	--	--	*Year 2013*
Tahun 2014	36.361.948	36.361.948	*Year 2014*
Tahun 2018	23.961.383	23.961.383	*Year 2018*
Cadangan tidak tertagihnya pajak lebih bayar	--	--	*Allowance for unrefunded claim for tax refund*
Jumlah (Catatan 16)	**60.323.331**	**60.323.331**	***Total (Note 16)***

Atas kelebihan pembayaran pajak tersebut, Bank telah mengajukan restitusi pajak ke kantor pelayanan pajak.

For the Corporate Estimated Claim for tax refund, the Bank has proposed tax restitution to the tax office.

Bank telah menerima surat keputusan Direktorat Jenderal Pajak No.KEP-00280/KEB/WPJ.06/2017, untuk tahun pajak 2014, tentang keberatan wajib pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang mengabulkan sebagian permohonan keberatan Bank, sehingga Bank mendapatkan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp2.802.838.

The Bank received Decree of the Directorate General of Taxes No.KEP-00280/KEB/ WPJ.06/2017 for fiscal year 2014, regarding the taxpayer's objection to the Tax Underpayment Assessment Letter, granting part of the Bank's objection, so as the Bank receives a refund of tax overpayment amounting to Rp2,802,838.

Atas kelebihan pembayaran pajak tahun 2014 yang belum dikembalikan, Bank telah mengajukan banding atas surat keputusan tersebut ke pengadilan pajak. Surat permohonan banding telah diterima pengadilan pajak pada tanggal 8 September 2017 dan telah terdaftar dengan nomor sengketa pajak : 15-116315-2014.

With regard to the overpayment of non-refundable 2014 taxes, the Bank has appealed against the decree to the tax court. The notice of appeal was received by the tax court on September 8, 2017 and has been registered with tax dispute number: 15-116315-2014.

Untuk kelebihan pembayaran pajak tahun 2013, Bank telah menerima Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. 00028.Pph/WPJ.06/KP. 1203/2018 tentang "Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Kepada PT Bank Muamalat Indonesia" dan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak No. 80105073-01052018, dengan jumlah pajak yang dikembalikan sebesar Rp189.092.930.

With regard to tax overpayment of 2013, the Bank has received the Decree of the Director General of Taxes No.00028.Pph/WPJ.06/KP.1203/2018 regarding "Refund of Tax Overpayment to PT Bank Muamalat Indonesia" and Tax Overpayment Refund Order No.80105073-01052018, with tax refund amounting to Rp189,092,930.

23. UTANG PAJAK (Lanjutan) / *23. TAX PAYABLES (Continued)*

c. Kelebihan pembayaran pajak: (lanjutan)

Untuk kelebihan pembayaran pajak tahun 2012, Bank telah menerima Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. 00029. Pph/WPJ. 06/KP. 1203/2018 tentang "Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Kepada PT Bank Muamalat Indonesia" dan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak No. 80106073-0106-2018, dengan jumlah pajak yang dikembalikan sebesar Rp143.250.052.

c. Corporate estimated claim for tax refund: (continued)

With regard to tax overpayment of 2012, the Bank has received the Decree of the Director General of Taxes No. 00029.Pph/WPJ.06/KP.1203/2018 regarding "Refund of Tax Overpayment to PT Bank Muamalat Indonesia" and Tax Overpayment Refund Order No.80106073-0106-2018, with tax refund amounting to Rp143,250,052.

d. Aset pajak tangguhan / *d. Deferred tax assets*

	31 Desember / *December 31, 2018*	Mutasi di laporan laba rugi/ *Changes in the statements of income*	Penyesuaian pajak tangguhan/ *Deferred tax adjustment*	31 Desember/ *December 31, 2019*	
Aset (liabilitas) pajak tangguhan					***Deferred tax assets (liabilities)***
Imbalan pasca kerja karyawan	50.161.954	(9.069.414)	2.537.917	43.630.457	*Provisions for post employment benefit*
Tantien Direksi, Komisaris dan DPS	25.114.871	(5.370.423)	--	19.744.448	*Tantiem to the Directors, Commissioners and Sharia Supervisory Board*
Bonus Karyawan	2.322.773	(6.678.221)	--	(4.355.448)	*Employee bonuses*
Penyusutan aset tetap	11.285.834	14.588.129	--	25.873.963	*Premises and equipment depreciations*
Beban Pesangon	(1.237.927)	1.237.927	--	--	*Severance payment*
Cadangan kerugian penurunan nilai selain pembiayaan	69.395.706	2.179.976	--	71.575.682	*Allowance for impairment losses other than financing*
Keuntungan (Kerugian) yang belum direalisasi dari surat berharga yang diukur pada nilai wajar melalui laporan keuangan	(16.546)	(28.895)	--	(45.441)	*Unrealized gain (loss) from securities measured at fair value through financial report*
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi dari surat berharga yang tersedia untuk dijual	5.654.636	(255.925)	(2.266.209)	3.132.502	*Unrealized gain (loss) in value of available-for-sale marketable securities*
Surplus revaluasi aset tetap	10.798.402	--	--	10.798.402	*Revaluation Surplus on Premises and equipment*
Penyesuaian setelah penyajian kembali	(27.243.821)	--	--	(27.243.821)	*Adjustment after restatement*
Aset pajak tangguhan - bersih	**146.235.882**	**(3.396.846)**	**271.708**	**143.110.743**	***Deferred tax assets - Net***

	31 Desember / *December 31, 2017*	Mutasi di laporan laba rugi/ *Changes in the statements of income*	Penyesuaian pajak tangguhan/ *Deferred tax adjustment*	31 Desember/ *December 31, 2018*	
Aset (liabilitas) pajak tangguhan					***Deferred tax assets (liabilities)***
Imbalan pasca kerja karyawan	36.696.600	3.645.031	9.820.323	50.161.954	*Provisions for post employment benefit*
Tantien Direksi, Komisaris dan DPS	18.150.790	6.964.081	--	25.114.871	*Tantiem to the Directors, Commissioners and Sharia Supervisory Board*
Bonus Karyawan	8.145.315	(5.822.542)	--	2.322.773	*Employee bonuses*
Penyusutan aset tetap	11.663.488	(377.654)	--	11.285.834	*Premises and equipment depreciations*
Beban Pesangon	(7.879.823)	6.641.896	--	(1.237.927)	*Severance payment*
Cadangan kerugian penurunan nilai selain pembiayaan	67.720.089	1.675.617	--	69.395.706	*Allowance for impairment losses other than financing*
Keuntungan (Kerugian) yang belum direalisasi dari surat berharga yang diukur pada nilai wajar melalui laporan keuangan	(3.399)	(13.147)	--	(16.546)	*Unrealized gain (loss) from securities measured at fair value through financial report*
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi dari surat berharga yang tersedia untuk dijual	(2.155.559)	--	7.091.675	4.936.116	*Unrealized gain (loss) in value of available-for-sale marketable securities*
Surplus revaluasi aset tetap	10.798.402	--	--	10.798.402	*Revaluation Surplus on Premises and equipment*
Penyesuaian setelah penyajian kembali	(31.971.254)	5.954.830	(508.877)	(26.525.301)	*Adjustment after restatement*
Aset pajak tangguhan - bersih	**111.164.649**	**18.668.112**	**16.403.121**	**146.235.882**	***Deferred tax assets - Net***

23. UTANG PAJAK (Lanjutan) / *23. TAX PAYABLES (Continued)*

e. Rekonsiliasi antara beban pajak dan hasil perkalian laba akuntansi dengan tarif pajak efektif yang berlaku adalah sebagai berikut:

e. Reconciliation between the total tax expense and the amounts computed by applying the effective tax rates to income before tax is as follows:

	31 Desember/ *December 31,* 2019	**31 Desember/ *December 31,* 2018**	
Laba sebelum pajak Bank menurut laporan laba rugi dan penghasilan komperehensif lain	26.166.398	45.805.872	*Bank's Income before tax per statement of profit or loss and other comprehensive income*
Beban pajak berdasarkan tarif pajak yang berlaku	6.443.221	18.471.940	*Tax expense at effective tax rates*
Pengaruh pajak atas penghasilan yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal:			*Tax effect of non deductible expenses - net:*
Kenikmatan karyawan dan Direksi	10.810.716	(7.783.435)	*Employees and Directors benefits*
Penyusutan	(14.588.129)	377.654	*Depreciation*
Imbalan pasca kerja	9.069.414	(9.599.861)	*Post Employment benefit*
Lain-lain	(1.895.155)	(1.662.470)	*Others*
Jumlah	3.396.846	(18.668.112)	*Total*
Penyesuaian pajak tangguhan	--	--	*Deferred tax adjustment*
Jumlah beban (manfaat) pajak	**9.840.067**	**(196.172)**	***Total tax expenses (benefits)***

24. ESTIMASI KERUGIAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI / *24. ESTIMATED LOSSES ON COMMITMENTS AND CONTINGENCIES*

a. Estimasi kerugian atas transaksi komitmen dan kontinjensi yang mempunyai risiko pembiayaan:

a. Estimated loss on commitments and contingencies based on its credit risk are as follows:

	31 Desember/ *December 31,* 2019	**31 Desember/ *December 31,* 2018**	
Rupiah			***Rupiah***
Bank garansi	1.658.110	1.610.727	*Bank guarantees*
Penerbitan SKBDN dan L/C yang tidak dapat dibatalkan	--	--	*Irrevocable domestic letters of credit and L/C issued*
	1.658.110	1.610.727	
Mata uang asing			***Foreign currencies***
Bank garansi	10.270	1.009.195	*Bank guarantees*
Penerbitan SKBDN dan L/C yang tidak dapat dibatalkan	--	--	*Irrevocable domestic letters of credit and L/C issued*
	10.270	1.009.195	
Jumlah	**1.668.380**	**2.619.922**	***Total***

24. ESTIMASI KERUGIAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI (Lanjutan)

24. ESTIMATED LOSSES ON COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (Continued)

b. Komitmen dan kontinjensi berdasarkan kolektibilitas sebagai berikut:

b. Commitments and contingencies by collectibility are as follows:

	31 Desember/ *December 31,* 2019	**31 Desember/ *December 31,* 2018**	
Rupiah			***Rupiah***
Bank garansi			*Bank guarantees*
Lancar	75.268.566	190.752.599	*Current*
	75.268.566	190.752.599	
Penerbitan SKBDN dan L/C yang tidak dapat dibatalkan			*Irrevocable domestic letters of credit and L/C issued*
Lancar	141.067.187	281.277.576	*Current*
	216.335.753	472.030.175	
Mata uang asing			***Foreign currencies***
Bank garansi			*Bank guarantees*
Lancar	15.025.637	94.321.023	*Current*
Penerbitan SKBDN dan L/C yang tidak dapat dibatalkan			*Irrevocable domestic letters of credit and L/C issued*
Lancar	1.750.870	18.506.246	*Current*
	1.750.870	18.506.246	
	16.776.507	112.827.269	
Jumlah	**233.112.260**	**584.857.444**	***Total***
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.668.380)	(2.619.922)	*Allowance for impairment losses*
Bersih	**231.443.880**	**582.237.522**	***Net***

c. Ikhtisar perubahan estimasi kerugian atas komitmen dan kontinjensi adalah sebagai berikut:

c. The changes in estimated losses on commitments and contingencies are as follows:

	31 Desember/ *December 31,* 2019	**31 Desember/ *December 31,* 2018**	
Saldo awal tahun	2.619.922	239.185	*Balance at the beginning of the year*
Penyisihan (Pembalikan) selama tahun berjalan (Catatan 36)	(951.542)	2.380.737	*Provision (Reversal) during the year (Note 36)*
Saldo akhir tahun	**1.668.380**	**2.619.922**	***Balance at the end of the year***

Manajemen berpendapat bahwa jumlah estimasi kerugian atas komitmen dan kontinjensi pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 telah memadai.

Management believes that estimated losses on commitments and contingencies as of December 31, 2019 and 2018 is adequate.

25. ESTIMASI LIABILITAS IMBALAN KERJA

25. ESTIMATED LIABILITIES FOR EMPLOYMENT BENEFITS

Bank telah mencatat estimasi liabilitas dan beban imbalan kerja *(employment benefit)* masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 menurut Undang-undang Tenaga Kerja No. 13/2003 berdasarkan perhitungan aktuaria yang dilakukan oleh PT Lastika Dipa, aktuaris independen, berdasarkan laporannya masing-masing pada tanggal 15 Januari 2020 dan 22 Februari 2019.

The Bank has recorded estimated liabilities and expenses for employment benefits for the years ended December 31, 2019 and 2018, in compliance with Labor Law No. 13/2003, based on actuarial calculation performed by PT Lastika Dipa, an independent actuary, as stipulated in their reports dated January 15, 2020 and February 22, 2019, respectively.

Perhitungan aktuaris tersebut menggunakan metode *"Projected Unit Credit"* dengan asumsi-asumsi sebagai berikut:

The actuarial calculations used the "Projected Unit Credit" method with underlying assumptions as follows:

	31 Desember/ *December 31,* 2019	**31 Desember/ *December 31,* 2018**	
Tingkat diskonto per tahun	7,65%	8,15%	*Annual discount rate*
Tingkat kenaikan gaji per tahun	5,00%	4,00%	*Annual salary increase rate*
Tabel mortalita	TMI-III 2011	TMI-III 2011	*Mortality table*
Usia pensiun	55 tahun/*years old*	55 tahun/*years old*	*Retirement age*

Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja:

Remeasurement of employee benefit liabilities:

	31 Desember/ *December 31,* 2019	**31 Desember/ *December 31,* 2018**	
Saldo pada awal tahun	90.187.130	129.468.423	*Balance at the beginning of the year*
(Keuntungan)/kerugian aktuaria	(10.151.668)	(39.281.292)	*Actuarial (gain)/loss*
Saldo pada akhir tahun	80.035.462	90.187.131	*Balance at the end of the year*
Pajak - pajak terkait	(20.008.866)	(22.546.783)	*Related Tax*
Saldo pada akhir tahun - bersih	**60.026.597**	**67.640.348**	***Balance at the end of the year - net***

Beban yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

Expenses recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income are as follows:

	31 Desember/ *December 31,* 2019	**31 Desember/ *December 31,* 2018**	
Biaya jasa kini	24.617.457	29.044.871	*Current service cost*
Biaya bunga	14.346.319	9.988.978	*Interest cost*
Jumlah (Catatan 34)	**38.963.776**	**39.033.849**	***Total (Note 34)***

25. ESTIMASI LIABILITAS IMBALAN KERJA (Lanjutan)

25. *ESTIMATED LIABILITIES FOR EMPLOYMENT BENEFITS (Continued)*

Mutasi atas nilai kini kewajiban imbalan kerja adalah sebagai berikut:

Changes in present value of estimated liabilities for post employment benefits are as follows:

	31 Desember/ *December 31,* 2019	**31 Desember/ *December 31,* 2018**	
Saldo awal tahun	200.647.816	146.786.397	*Balance at the beginning of the year*
Biaya bunga	14.346.319	9.988.978	*Interest cost*
Biaya jasa kini	24.617.457	29.044.871	*Current service cost*
Kerugian (keuntungan) aktuaria	10.151.668	39.281.292	*Actuarial Loss (Gain)*
Pembayaran imbalan kerja tahun berjalan	(75.241.434)	(24.453.722)	*Current year benefit payments*
Saldo pada akhir tahun	**174.521.826**	**200.647.816**	***Balance at the end of the year***

Rincian nilai kini liabilitas imbalan kerja selama tahun berjalan dan 5 (lima) tahun sebelumnya:

Details of present value of post employment benefit liabilities during the year and previous 5 (five) years:

	2019	**2018**	**2017**	**2016**	**2015**	
Nilai kini kewajiban imbalan	174.521.826	200.647.816	146.786.397	140.864.947	204.708.572	*Present value of benefit liabilities*

Imbalan Pasca Kerja

Bank menyelenggarakan imbalan pasca kerja imbalan pasti untuk karyawan sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003. Jumlah karyawan yang berhak memperoleh manfaat tersebut sebanyak 3.183 dan 4.170 karyawan masing-masing untuk 31 Desember 2019 dan 2018.

Post-employment Benefit

The Bank established defined post-employment benefits for its employees in accordance with Labor Law No. 13/2003. The number of employees entitled to the benefits is 3,183 and 4,170 employees as of December 31, 2019 and 2018, respectively.

Program Pensiun Iuran Pasti

Bank menyelenggarakan program pensiun iuran pasti untuk karyawan tetap yang memiliki masa kerja minimum 1 (satu) tahun sejak diangkat menjadi karyawan tetap dan berusia di bawah 55 (lima puluh lima) tahun. Program pensiun ini dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Muamalat yang akta pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. S-438/LK/1997 tanggal 19 Desember 1997. Pendiri DPLK Muamalat adalah Bank.

Defined Contribution Pension Plan

The Bank established a defined contribution pension plan covering all of its permanent employees under 55 (fifty five) years of age with working period of at least 1 (one) year. The pension fund is managed by Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Muamalat, the deed of establishment of which was approved by the Minister of Finance of the Republic of Indonesia in his decree No. S-438/LK/1997 dated December 19, 1997. DPLK Muamalat was established by the Bank.

Bank mengikutsertakan karyawannya dalam program DPLK dengan iuran DPLK 10% dari gaji pokok, dimana Bank mensubsidi sebesar 5% dan sisanya sebesar 5% lagi menjadi beban karyawan. Iuran dana pensiun yang disetor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp31.118.324 dan Rp35.388.103. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 jumlah akumulasi dana pensiun yang merupakan kontribusi Bank masing-masing sebesar Rp15.604.490 dan Rp17.731.159.

The Bank has registered its employees into pension fund with contribution of 10% of the basic salary, of which the Bank subsidies 5% whilst the remaining 5% is paid by the employee. The contribution to the pension fund for the years ended December 31, 2019 and 2018 is amounting to Rp31,118,324 and Rp35,388,103, respectively. As of December 31, 2019 and 2018 Bank's contribution to the total accumulated pension fund is amounting to Rp15,604,490 and Rp17,731,159, respectively.

25. ESTIMASI LIABILITAS IMBALAN KERJA (Lanjutan)

25. ESTIMATED LIABILITIES FOR EMPLOYMENT BENEFITS (Continued)

Program Pensiun Iuran Pasti (lanjutan)

Seluruh karyawan tetap Bank adalah peserta Program Pensiun Iuran Pasti.

Defined Contribution Pension Plan (continued)

All permanent employees of the Bank are members of the defined contribution pension plan.

26. LIABILITAS LAIN-LAIN

26. OTHER LIABILITIES

	31 Desember/ *December 31,* 2019	31 Desember/ *December 31,* 2018	
Titipan operasional pembiayaan	115.286.586	142.420.520	*Operational financing funds*
Biaya yang masih harus dibayar	20.983.839	80.579.532	*Accrued expenses*
Titipan *unclaim*	23.310.327	26.172.171	*Unclaimed funds*
Utang dividen	20.599.595	20.980.294	*Dividends payable*
Utang sewa pembiayaan	555.739	1.855.739	*Obligation under capital lease*
Setoran jaminan	77.060	152.060	*Security deposits*
Pendapatan diterima dimuka	1.800	1.800	*Unearned Income*
Lainnya	54.817.933	154.038.246	*Others*
Jumlah	**235.632.878**	**426.200.362**	***Total***

Biaya masih harus dibayar merupakan cadangan berkaitan dengan operasional bank seperti beban listrik, air dan telepon, zakat perusahaan, jasa konsultan dan cadangan untuk personalia seperti cadangan bonus, kinerja, promosi, pelatihan dan biaya seragam untuk karyawan.

Accrued Expense represents reserve related to the Bank's operational activities, such as electricity, water, and telephone expenses, corporate zakat, consulting service, and reserve for personnel, such as rewards, performance bonuses, promotion, training and uniform for staff.

Titipan operasional pembiayaan merupakan kewajiban bank kepada pihak lain yang harus segera dipenuhi sesuai dengan kesepakatan terkait dengan proses pembiayaan seperti biaya notaris, asuransi atas jaminan, dan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam proses penyitaan agunan.

Operational financing funds represents Bank's obligation to third party to be immediately fulfilled as agreed which is related to financing process, such as cost of notary, insurance of collateral, and other costs incurred due to confiscation of collateral.

Titipan *unclaim* merupakan kewajiban Bank yang akan dibayarkan ke nasabah terkait dengan dengan proses pembiayaan seperti biaya notaris, asuransi atas jaminan, dan biaya lainnya yang telah berumur lebih dari 1 (satu) tahun (365 hari).

Unclaimed funds represents Bank's obligation that will be paid to costumers related to financing process, such as cost of notary, insurance for collateral, and other costs exceeding the period of 1 (one) year (365 days).

Utang sewa pembiayaan merupakan pembayaran sewa untuk kendaraan operasional Bank kepada pihak berelasi (PT Al Ijarah Indonesia Finance) masing-masing sebesar Rp555.739 dan Rp1.855.739 pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 (Catatan 41).

Obligation under capital lease represents rent payment for Bank's operational vehicles to related party (PT Al Ijarah Indonesia Finance), amounting to Rp555,739 and Rp1,855,739 as of December 31, 2019 and 2018, respectively (Note 41).

Utang dividen merupakan dividen kepada para pemegang saham yang belum terealisasi pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

Dividends payables represents dividends from previous years which have not been claimed by the shareholders as of December 31, 2019 and 2018.

26. LIABILITAS LAIN-LAIN (Lanjutan)

Liabilitas lainnya untuk tahun 2018 sebesar Rp154.038.246 dimana sebesar Rp143.054.778 merupakan penerimaan pembayaran atas debitur yang masuk dalam program pengalihan dan penjualan portofolio. Pada tahun 2019 telah diakui sebagai pendapatan bersama dengan pengakuan beban amortisasi sukuk (Catatan 27 Point IV).

26. OTHER LIABILITIES (Continued)

Other liabilities as of 2018 it is amounting to Rp154,038,246, and Rp143,054,778 of which represents receipt of payment for debtors included in the portfolio transfer and sale program. In 2019 has been recognized as income and sukuk amortization expense (Note 27 Point IV).

27. DANA SYIRKAH TEMPORER

27. TEMPORARY SYIRKAH FUNDS

(i) Dana Syirkah Temporer

(i) Temporary Syirkah Funds

	31 Desember/ *December 31,* 2019	**31 Desember/ *December 31,* 2018**	
Giro mudharabah			***Mudharabah demand deposits***
Bukan Bank	1.131.495.575	1.149.013.872	*Non Bank*
Bank	58.246.540	107.629.417	*Bank*
Jumlah	**1.189.742.115**	**1.256.643.289**	***Total***

Giro *mudharabah* merupakan simpanan dana pihak lain yang mendapatkan imbalan bagi hasil dari pendapatan Bank atas penggunaan dana tersebut dengan nisbah yang ditetapkan dan disetujui sebelumnya.

Mudharabah demand deposits represents deposits from third parties which are entitled to receive a share in profit derived by the Bank from the use of such funds based on a predetermined nisbah.

Nisbah dan tingkat bagi hasil untuk giro *mudharabah* adalah sebagai berikut:

The rates of nisbah and profit sharing for mudharabah demand deposits are as follows:

	31 Desember/ *December 31,* 2019		**31 Desember/ *December 31,* 2018**		
	Nisbah	Tingkat Bagi Hasil/ *Profit Sharing Rate*	Nisbah	Tingkat Bagi Hasil/ *Profit Sharing Rate*	
Giro *mudharabah*	32,00%	0,94%	32,00%	1,68%	*Mudharabah demand deposits*

27. DANA SYIRKAH TEMPORER (Lanjutan) / *27. TEMPORARY SYIRKAH FUNDS (Continued)*

(ii) Tabungan *Mudharabah* / *(ii) Mudharabah Saving Deposits*

a. Berdasarkan jenis produk: / *a. By type:*

	31 Desember/ *December 31,* 2019	31 Desember/ *December 31,* 2018	
Bukan Bank			***Non Bank***
Tabungan Ummat	4.950.841.243	5.422.306.191	*Ummat savings*
Tabungan Prima	4.686.702.918	4.563.164.273	*Prima savings*
Tabungan Shar-E	292.587.051	315.842.053	*Shar-E savings*
Tabungan Arafah	68.925.446	80.017.182	*Arafah savings*
Tabungan Wisata	254.233.545	179.670.058	*Wisata savings*
Tabungan Ummat Junior	55.377.417	61.734.963	*Ummat Junior savings*
	10.308.667.620	10.622.734.720	
Bank			***Bank***
Tabungan Ummat	506.512.086	149.809.573	*Ummat savings*
Jumlah	**10.815.179.706**	**10.772.544.293**	***Total***

b. Berdasarkan keterkaitan: / *b. By relationship:*

	31 Desember/ *December 31,* 2019	31 Desember/ *December 31,* 2018	
Bukan Bank			***Non Bank***
Pihak ketiga	10.297.151.050	10.609.005.456	*Third parties*
Pihak berelasi (Catatan 41)	11.516.570	13.729.264	*Related parties (Note 41)*
	10.308.667.620	10.622.734.720	
Bank			***Bank***
Pihak ketiga	506.512.086	149.809.573	*Third parties*
Jumlah	**10.815.179.706**	**10.772.544.293**	***Total***

Tabungan *mudharabah* merupakan simpanan dana pihak lain yang mendapatkan imbalan bagi hasil dari pendapatan Bank atas penggunaan dana tersebut dengan nisbah yang ditetapkan dan disetujui sebelumnya.

Mudharabah savings deposits are entitled to receive a share in profit derived by Bank from the use of funds received based on predetermined ratio.

	31 Desember/ *December 31,* 2019		31 Desember/ *December 31,* 2018		
	Nisbah	Tingkat Bagi Hasil/ *Profit Sharing Rate*	Nisbah	Tingkat Bagi Hasil/ *Profit Sharing Rate*	
Tabungan Shar-E	10 : 90	0,75%	10 : 90	0,83%	*Shar-E saving*
Tabungan Ummat	10 : 90	0,75%	10 : 90	0,83%	*Ummat saving*
Tabungan Prima	34 : 66	1,22%	34 : 66	1,50%	*Prima saving*
Tabungan Arafah	22 : 78	0,74%	22 : 78	2,04%	*Arafah saving*
Tabungan Wisata	30 : 70	2,20%	30 : 70	3,21%	*Wisata Saving*

27. DANA SYIRKAH TEMPORER (Lanjutan) / *27. TEMPORARY SYIRKAH FUNDS (Continued)*

(iii) Deposito Berjangka *Mudharabah* / *(iii) Mudharabah Time Deposits*

a. Berdasarkan keterkaitan: / *a. By relationship:*

	31 Desember/ *December 31,* 2019	31 Desember/ *December 31,* 2018	
Bukan Bank			***Non Bank***
Rupiah			***Rupiah***
Pihak ketiga	19.427.451.448	24.370.863.763	*Third parties*
Pihak berelasi (Catatan 41)	358.693.741	426.104.236	*Related parties (Note 41)*
	19.786.145.189	24.796.967.999	
Mata uang asing			***Foreign currencies***
Pihak ketiga	2.120.893.070	3.030.638.681	*Third parties*
Pihak berelasi (Catatan 41)	6.254.793	6.074.212	*Related parties (Note 41)*
	2.127.147.863	3.036.712.893	
	21.913.293.052	27.833.680.892	
Bank			***Bank***
Rupiah			***Rupiah***
Pihak ketiga	777.125.014	794.402.196	*Third parties*
Mata uang asing			***Foreign currencies***
Pihak ketiga	208.237.500	244.460.000	*Third parties*
	985.362.514	1.038.862.196	
Jumlah	**22.898.655.566**	**28.872.543.088**	***Total***

b. Berdasarkan jangka waktu: / *b. By period:*

	31 Desember/ *December 31,* 2019	31 Desember/ *December 31,* 2018	
Rupiah			***Rupiah***
1 bulan	11.475.996.813	14.202.995.143	*1 month*
3 bulan	3.422.085.622	6.648.406.970	*3 months*
4 bulan	132.259.245	--	*4 months*
6 bulan	2.679.321.403	2.783.385.049	*6 months*
12 bulan	2.853.607.120	1.956.583.033	*12 months*
	20.563.270.203	25.591.370.195	
Mata uang asing			***Foreign currencies***
Dolar Amerika Serikat			*US Dollar*
1 bulan	1.316.016.588	2.170.945.160	*1 month*
3 bulan	306.716.541	495.087.067	*3 months*
6 bulan	202.520.792	592.317.205	*6 months*
12 bulan	510.131.442	22.823.461	*12 months*
	2.335.385.363	3.281.172.893	
Jumlah	**22.898.655.566**	**28.872.543.088**	***Total***

27. DANA SYIRKAH TEMPORER (Lanjutan) / *27. TEMPORARY SYIRKAH FUNDS (Continued)*

(iii) Deposito Berjangka *Mudharabah* (lanjutan) / *(iii) Mudharabah Time Deposits (continued)*

c. Berdasarkan sisa umur jatuh tempo: / *c. By remaining period to maturity:*

	31 Desember/ *December 31,* 2019	**31 Desember/ *December 31,* 2018**	
Rupiah			***Rupiah***
≤ 1 bulan	14.022.031.665	9.574.412.857	*≤ 1 month*
> 1 - ≤ 3 bulan	3.441.097.440	13.044.638.266	*> 1 - ≤ 3 months*
> 3 - ≤ 6 bulan	1.820.797.361	1.857.983.329	*> 3 - ≤ 6 months*
> 6 - 12 bulan	1.279.343.737	1.114.335.743	*> 6 - 12 months*
	20.563.270.203	25.591.370.195	
Mata uang asing			***Foreign currencies***
Dolar Amerika Serikat			*US Dollar*
≤ 1 bulan	1.579.281.767	1.324.620.545	*≤ 1 month*
> 1 - ≤ 3 bulan	680.352.981	1.894.089.384	*> 1 - ≤ 3 months*
> 3 - ≤ 6 bulan	28.213.437	48.391.455	*> 3 - ≤ 6 months*
> 6 - 12 bulan	47.537.178	14.071.509	*> 6 - 12 months*
	2.335.385.363	3.281.172.893	
Jumlah	**22.898.655.566**	**28.872.543.088**	***Total***

Deposito berjangka *mudharabah* merupakan investasi pihak lain yang mendapatkan imbalan bagi hasil dari pendapatan Bank atas penggunaan dana tersebut dengan nisbah yang ditetapkan dan disetujui sebelumnya.

Mudharabah time deposits are entitled to receive a share in profit derived by the Bank from the use of funds received based on predetermined ratio.

(iv) *Sukuk Mudharabah Trust Certificate* / *(iv) Trust Certificate of Mudharabah Sukuk*

	31 Desember/ *December 31,* 2019	**31 Desember/ *December 31,* 2018**	
Sukuk Mudharabah Trust Certificate	1.600.000.000	1.600.000.000	*Trust Certificate of Mudharabah Sukuk*
Beban Bagi Hasil Sukuk	146.880.000	--	*Sukuk Profit Sharing*
Jumlah	**1.746.880.000**	**1.600.000.000**	***Total***

Merupakan surat berharga yang diterbitkan Bank dalam bentuk Sukuk *Mudharabah* dengan jumlah pokok sebesar Rp1.600.000.000 kepada Mawthuq SPC Limited. Sukuk ini berjangka waktu 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tanggal 29 Juni 2018. *Sukuk Mudharabah* yang diterbitkan oleh Bank tidak melalui penawaran umum *(public offering)* tetapi dilakukan dengan mekanisme penawaran terbatas *(private placement)*.

It represents securities issued by Bank in the form of Mudharabah Sukuk with total principal amount of Rp1,600,000,000 to Mawthuq SPC Limited. This Sukuk has a period of 20 (twenty) years since June 29, 2018. The Subordinated Mudharabah Sukuk was not issued through public offering. It was issued through private placement.

27. DANA SYIRKAH TEMPORER (Lanjutan)

(iv) *Sukuk Mudharabah Trust Certificate* (lanjutan)

Atas penerbitan sukuk tersebut, Bank akan membayar *commitment fee* kepada Mawthuq SPC Limited dengan jadual sebagai berikut:

1. Tanggal 29 Juni 2028 sebesar Rp1.397.000.000.
2. Tanggal 29 Juni 2033 sebesar Rp274.000.000.

Selain *commitment fee*, Bank akan membayar *investment plan* sesuai dengan perjanjian kepada Mawthuq SPC Limited terdiri dari:

A. Pengembangan dari modal investasi dana sukuk dengan jadual sebagai berikut:
   1. Tanggal 29 Juni 2028 sebesar Rp1.600.000.000.
   2. Tanggal 29 Juni 2033 sebesar Rp4.263.000.000.
   3. Tanggal 29 Juni 2038 sebesar Rp5.978.000.000.

B. Keuntungan dari pengelolaan investasi dana sukuk dengan jadual sebagai berikut:
   1. Tanggal 29 Juni 2028 sebesar Rp1.265.000.000.
   2. Tanggal 29 Juni 2033 sebesar Rp1.442.000.000.
   3. Tanggal 29 Juni 2038 sebesar Rp2.022.000.000.

(v) *Medium Term Notes Syariah*

***Medium Term Notes* Syariah dan *Medium Term Notes* Syariah Subordinasi**

27. TEMPORARY SYIRKAH FUNDS (Continued)

(iv) Trust Certificate of Mudharabah Sukuk (continued)

Upon the issuance of the sukuk, the Bank will pay the commitment fee to Mawthuq SPC Limited with the following schedule:

1. On June 29, 2028 amounting to Rp1,397,000,000.
2. On June 29, 2033 amounting to Rp274,000,000.

In addition to the commitment fee, the Bank will pay the investment plan in accordance with the agreement to Mawthuq SPC Limited, consisting of:

A. Development of investment capital of sukuk funds with schedule as follows:
   1. On June 29, 2028 amounting to Rp1,600,000,000.
   2. On June 29, 2033 amounting to Rp4,263,000,000.
   3. On June 29, 2038 amounting to Rp5,978,000,000.

B. Proceeds from sukuk fund investment management with schedule as follows:
   1. On June 29, 2028 amounting to Rp1,265,000,000.
   2. On June 29, 2033 amounting to Rp1,442,000,000.
   3. On June 29, 2038 amounting to Rp2,022,000,000.

(v) Sharia Medium Term Notes

Sharia Medium Term Notes (SMTN) and Subordinated Sharia Medium Term Notes (SSMTN)

	31 Desember/ *December 31,* 2019	**31 Desember/ *December 31,* 2018**	
Medium Term Notes Syariah	--	100.000.000	*Sharia Medium Term Notes*
Medium Term Notes Syariah Subordinasi	100.000.000	100.000.000	*Subordinated Sharia Medium Term Notes*
Jumlah	**100.000.000**	**200.000.000**	***Total***

27. DANA SYIRKAH TEMPORER (Lanjutan)

27. TEMPORARY SYIRKAH FUNDS (Continued)

(v) *Medium Term Notes Syariah* (lanjutan)

Medium Term Notes Syariah (MTNS) dan *Medium Term Notes* Syariah Subordinasi (MTNSS) merupakan surat berharga dengan akad *Mudharabah* berjangka waktu menengah yang dikeluarkan oleh Bank kepada Pemegang MTNS/S, yang ditawarkan oleh Penatalaksana kepada pemesan baik melalui Penawaran Terbatas maupun Penawaran Umum.

Berdasarkan akta Perjanjian Penerbitan *Medium Term Notes* Syariah I Bank Muamalat Indonesia tahun 2017 yang tercantum dalam akta Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn No. 28 tanggal 21 Juli 2017, Bank menerbitkan MTN Syariah I dengan jangka waktu 3 tahun sejak tanggal penerbitan sejumlah Rp100.000.000 dengan Nisbah sebesar 20,52%. Atas MTN tersebut telah dilakukan pelunasan dipercepat pada tanggal 29 Mei 2019.

Berdasarkan akta Perjanjian Penerbitan *Medium Term Notes* Syariah Subordinasi I Bank Muamalat Indonesia tahun 2017 yang tercantum dalam akta Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn No. 29 tanggal 21 Juli 2017, Bank menerbitkan MTN Syariah Subordinasi I dengan jangka waktu 5 tahun sejak tanggal penerbitan sejumlah Rp100.000.000 dengan Nisbah sebesar 23,75%.

Bertindak sebagai wali amanat MTNS dan MTNSS ini adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

(v) Sharia Medium Term Notes (continued)

This account represents securities issued in the form of medium-term Mudharabah contracts issued by the Bank to the SMTN/SSMTN holders, offered to subscribers either through a Limited Offering or a Public Offering.

Based on the Notarial Deed of Sharia Medium Term Notes I issued by Bank Muamalat Indonesia in 2017 as stated in Notarial deed of Ashoya Ratam, S.H., M.Kn No. 28 dated July 21, 2017, the Bank has issued SMTN I amounting to Rp100,000,000 with a maturity of 3 years since the issuance date with a Nisbah of 20.52%. The settlement for the said MTN was made earlier, on May 29, 2019.

Based on the Notarial Deed of Subordinated Sharia Medium Term Notes I issued by Bank Muamalat Indonesia in 2017 as stated in Notarial deed of Ashoya Ratam, S.H., M.Kn No.29 dated July 21, 2017, the Bank has issued SSMTN I amounting to Rp100,000,000 with a maturity of 5 years since the issuance date with a Nisbah of 23.75%.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk acts as the trustee for the SMTN & SSMTN.

(vi) Sertifikat Investasi *Mudharabah* antar Bank

(vi) Certificate of Interbank Mudharabah Investment

	31 Desember / *December 31,* 2019		31 Desember / *December 31,* 2018		
	Tingkat bagi hasil / *Revenue sharing rate*	**Jumlah/ *Total***	**Tingkat bagi hasil / *Revenue sharing rate***	**Jumlah/ *Total***	
Bank Jateng	5,50%	245.000.000	7,50%	399.000.000	*Bank Jateng*
BPD Kaltim	--	--	7,45%	200.000.000	*BPD Kaltim*
Bank Jatim	--	--	7,50%	150.000.000	*Bank Jatim*
BPD Kalteng	--	--	7,40%	150.000.000	*BPD Kalteng*
BPD Papua	--	--	7,40%	150.000.000	*BPD Papua*
BPD Jambi	--	--	7,65%	100.000.000	*BPD Jambi*
Jumlah		**245.000.000**		**1.149.000.000**	***Total***

28. MODAL SAHAM / *28. SHARE CAPITAL*

Komposisi pemegang saham pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

The composition of shareholders as of December 31, 2019 and 2018 is as follows:

Nama pemegang saham / *Name of shareholders*	31 Desember 2019 dan 2018 / *December 31, 2019 and 2018*			
	Jumlah saham/ *Number of shares*	Persentase kepemilkan/ *Percentage of ownership*	Jumlah modal disetor/ *Total paid-up capital*	
Saham Seri A				***A Series Shares***
Nilai nominal Rp200 (dalam nilai penuh)				*Nominal value of Rp200 (in full amount)*
Koperasi Perkayuan Apkindo MPI	133.136.480	1,30%	26.627.296	*Koperasi Perkayuan Apkindo MPI*
Islamic Development Bank	132.458.095	1,30%	26.491.619	*Islamic Development Bank*
Badan Pengelola Dana ONHI	99.950.000	0,98%	19.990.000	*Badan Pengelola Dana ONHI*
Reza Rhenaldi Syaiful	261.880	0,00%	52.376	*Reza Rhenaldi Syaiful*
Masyarakat (masing-masing kepemilkan dibawah 5.000.000 saham)	460.842.720	4,52%	92.168.544	*Public (each below 5,000,000 shares)*
Jumlah Saham Seri A	826.649.175	8,10%	165.329.835	*Total A Series Shares*
Saham Seri B				***B Series Shares***
Nilai nominal Rp100 (dalam nilai penuh)				*Nominal value of Rp100 (in full amount)*
Islamic Development Bank	3.209.436.199	31,44%	320.943.620	*Islamic Development Bank*
Boubyan Bank Kuwait	2.245.694.513	22,00%	224.569.451	*Boubyan Bank Kuwait*
Atwil Holding Limited	1.828.090.034	17,91%	182.809.003	*Atwil Holding Limited*
National Bank of Kuwait	862.755.656	8,45%	86.275.566	*National Bank of Kuwait*
IDF Foundation	355.461.941	3,48%	35.546.194	*IDF Foundation*
BMF Holdings Limited	289.985.977	2,84%	28.998.598	*BMF Holdings Limited*
Reza Rhenaldi Syaiful	170.265.710	1.67%	17.026.571	*Reza Rhenaldi Syaiful*
Dewi Monita	170.250.000	1.67%	17.025.000	*Dewi Monita*
Ir. M. Rizal Ismael	--	--	--	*Ir. M. Rizal Ismael*
Koperasi Perkayuan Apkindo MPI	8.875.765	0,09%	887.577	*Koperasi Perkayuan Apkindo MPI*
Andre Mirza Hartawan, MBA, Ir.	169.500.000	1,66%	16.950.000	*Andre Mirza Hartawan, MBA, Ir.*
Badan Pengelola Dana ONHI	5.663.830	0,06%	566.383	*Badan Pengelola Dana ONHI*
Masyarakat (masing-masing kepemilikan dibawah 5.000.000 saham)	65.073.535	0,64%	6.507.353	*Public (each below 5,000,000 shares)*
Jumlah Saham Seri B	9.381.053.160	91,90%	938.105.316	*Total B Series Shares*
Jumlah	**10.207.702.335**	**100,00%**	**1.103.435.151**	***Total***

Pemegang saham mayoritas Bank adalah *Islamic Development Bank* yang dimiliki oleh negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Negara Islam (OKI).

The majority shareholder of the Bank is Islamic Development Bank, which is owned by the Organization of the Islamic Cooperation (OIC).

28. MODAL SAHAM (Lanjutan)

Saham Bank terdiri dari saham Seri A dan B dengan hak suara dan hak dividen yang sama. Saham seri A adalah saham pendiri yang hanya dapat dimiliki atau dipindahkan haknya kepada warga negara Indonesia atau badan hukum yang berkedudukan di Indonesia yang didirikan menurut perundang-undangan Indonesia dan para pengurusnya mayoritas mutlak adalah warga negara Indonesia. Saham Seri B adalah saham biasa yang dikeluarkan kemudian yang dapat dimiliki baik oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang diselenggarakan pada tanggal 17 Mei 2019, para pemegang saham telah memutuskan:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Bank Tahun Buku 2018 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah untuk Tahun Buku 2018 serta Pengesahan Laporan Keuangan Bank Untuk Tahun Buku 2018;

2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Bank Tahun Buku 2018;

3. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk Melakukan Audit Laporan Keuangan Bank Tahun Buku 2019 dan Audit Lain yang Dibutuhkan Bank;

4. Pengakhiran Masa Tugas Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Bank periode 2014-2019 serta Pengangkatan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Bank periode 2019- 2024;

5. Pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris atas pelaksanaan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 11 Oktober 2018 dan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 28 Juni 2018;

6. Penjelasan Pelaksanaan Tindakan Pembelian, Penjualan, Pengalihan dan/atau Tukar Menukar Aset Bank dalam rangka Penguatan Modal Bank.

Sedangkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) menjelaskan:

1. Persetujuan tindakan penjaminan aset Bank sebagai jaminan utang Bank atau pihak lain atas fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh PT Sarana Multigriya Finansial dan/atau pihak lain;

28. SHARE CAPITAL (Continued)

The Bank's shares consist of A and B Series shares, which have the same voting and dividend rights. A series shares are founder shares which can only be owned or transferred to Indonesian citizens, or a corporation established under Indonesian laws and regulations, wherein the members of management should all be Indonesian citizens. B series shares can be owned by either Indonesian or foreign citizens or an Indonesian or foreign corporation.

Based on the Annual General Meeting of Shareholders and Extraordinary General Shareholders' Meeting. held on May 17, 2019, the shareholders have decided:

1. *Approval of the Bank's 2018 Annual Report including the Supervisory Report of the Board of Commissioners and Sharia Supervisory Board for Fiscal Year 2018 and Ratification of the Bank's Financial Statements for Fiscal Year 2018;*

2. *Approval of the Use of Net Profit for Fiscal Year 2018;*

3. *Appointment of Public Accounting Firm to Audit the Bank's Financial Statements for Fiscal Year 2019 and Conduct Other Audits Required by the Bank;*

4. *Termination of the Term of Service of the Bank's Board of Directors, Board of Commissioners, and Sharia Supervisory Board for the Period of 2014-2019 as well as Appointment of the Bank's Board of Directors, Board of Commissioners, and Sharia Supervisory Board for the Period of 2019 -2024;*

5. *Accountability of the Board of Directors and Board of Commissioners for the implementation of the Resolutions of Extraordinary General Shareholders' Meeting dated October 11, 2018 and Annual General Shareholders' Meeting dated June 28, 2018;*

6. *Explanation regarding the Purchase, Sale, Transfer and/or Exchange of the Bank's Assets for the purpose of Strengthening the Bank's Capital.*

While the Extraordinary General Shareholders' Meeting defined the following:

1. *Approval of pledging the Bank's assets as collateral for borrowing funds of the Bank or other parties with regard to financing facilities provided by PT Sarana Multigriya Finansial and/or other parties;*

28. MODAL SAHAM (Lanjutan)

Sedangkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) menjelaskan: (lanjutan)

2. Persetujuan Rencana Akuisisi terhadap Bank.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan pada tanggal 16 Desember 2019, para pemegang saham telah memutuskan:

1. Menyetujui pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas (PUT) VI dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD)

2. Menyetujui penetapan harga pelaksanaan saham baru Perseroan yang akan diterbitkan dalam PUT VI Perseroan yang akan dimuat dalam Prospektus PUT VI.

3. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan PUT VI

4. Penunjukan Bapak Drs. H. Sholahudin Al-Aiyub, M.Si sebagai Ketua dan Ibu Hj. Siti Haniatunnisa, LLB., MH. sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 28 Juni 2018, para pemegang saham telah memutuskan:

1. Menyetujui penurunan modal dasar perseroan sehingga menjadi Rp4.400.000.000;
2. Mengesahkan dan menyetujui Laporan keuangan perseroan tahun buku 2017;
3. Menyetujui memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2018;
4. Menyetujui rencana perseroan dalam rangka penguatan modal perseroan termasuk diantaranya untuk pembelian, penjualan, pengalihan dan/atau tukar menukar aset perseroan;
5. Mengesahkan dan menyetujui penjaminan aset perseroan yang akan dijaminkan kepada PT Sarana Multigriya Finansial (PT SMF) sebagai jaminan hutang atas fasilitas yang diberikan;
6. Menyetujui Pengunduran diri dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris Independen dan Dewan Komisaris sampai dengan tahun 2019; dan

7. Menyetujui rencana perseroan untuk *listing* saham perseroan.

28. SHARE CAPITAL (Continued)

While the Extraordinary General Shareholders' Meeting defined the following: (continued)

2. Approval of the Bank's Acquisition Plan.

Based on the Extraordinary General Meeting of Shareholders held on December 16, 2019, the shareholders have decided:

1. To approve the Public Offering VI with Pre-emptive Rights (Rights Issue VI).

2. To approve the determination of the exercise price of the Company's new shares to be issued in the Company's Rights Issue VI which will be published in the Prospectus of Rights Issue VI.

3. To approve the granting of authority and power to the Directors of the Company, with the right of substitution, to carry out all and every action required in connection with Rights Issue VI.

4. To appoint Drs. H. Sholahudin Al-Aiyub, M.Si as the Chairperson and Mrs. Hj. Siti Haniatunnisa, LLB., MH, as a Member of the Sharia Supervisory Board of the Company.

Based on the Annual General Meeting of Shareholders held on June 28, 2018, the shareholders have decided:

1. To decrease the company's share capital down to Rp4,400,000,000;
2. To authorize and approve the Company's financial statements for fiscal year 2017;
3. To grant authority to the Board of Commissioners of the Company to appoint Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for fiscal year 2018;
4. To approve the company's plan to strengthen the company's capital, including the purchase, sale, transfer and/or exchange assets of the company;
5. To authorize and approve the placement of assets of the company as security, which will be pledged to PT Sarana Multigriya Finansial (PT SMF) as collaterals for the facility received;
6. To approve the resignation and appointment of members of the Board of Independent Commissioners and Board of Commissioners up to 2019; and
7. To approve the company's plan to list the company's shares.

28. MODAL SAHAM (Lanjutan) / *28. SHARE CAPITAL (Continued)*

Pengurus yang memiliki saham Bank pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp2.909 untuk saham Seri A dan Rp87 untuk saham Seri B.

Member of Bank's management that holds Bank shares as of December 31, 2019 and 2018 is amounting to Rp2,909 for A series Shares and Rp87 for B series Shares .

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, tidak ada Dewan Komisaris yang menjadi pemegang saham Bank.

As of December 31, 2019 and 2018, no member of the Board of Commissioner is a shareholder of the Bank.

29. TAMBAHAN MODAL DISETOR / *29. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL*

Tambahan modal disetor terdiri dari :

Additional paid in capital consists of :

	31 Desember / *December 31,* 2019	**31 Desember / *December 31,* 2018**	
Jumlah yang diterima dari:			*Proceeds from:*
Penawaran Umum Terbatas V, 2013	1.070.048.797	1.070.048.797	*Limited Public Offering V, 2013*
Penawaran Umum Terbatas IV, 2010	383.216.603	383.216.603	*Limited Public Offering IV, 2010*
Penawaran Umum Terbatas III, 2005	133.858.215	133.858.215	*Limited Public Offering III, 2005*
Penawaran Umum Terbatas II, 2002	662.290	662.290	*Limited Public Offering II, 2002*
Penawaran Umum Perdana 1993	143.553	143.553	*Initial Public Offering 1993*
Biaya emisi saham yang berasal dari:			*Share issuance cost of:*
Penawaran Umum Terbatas V, 2013	(4.854.701)	(4.854.701)	*Limited Public Offering V, 2013*
Penawaran Umum Terbatas IV, 2010	(1.983.700)	(1.983.700)	*Limited Public Offering IV, 2010*
Penawaran Umum Terbatas III, 2005	(493.727)	(493.727)	*Limited Public Offering III, 2005*
Penawaran Umum Terbatas II, 2002	(1.672.073)	(1.672.073)	*Limited Public Offering II, 2002*
Jumlah	**1.578.925.257**	**1.578.925.257**	***Total***

30. PENGGUNAAN LABA NETO / *30. APPROPRIATION OF NET INCOME*

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 17 Mei 2019, para pemegang saham telah memutuskan untuk melakukan:

Based on the Annual General Meeting of Shareholders held on May 17, 2019, the shareholders have decided:

a. Penyisihan seluruh laba bersih tahun 2018 sebesar Rp46.002.044 ke akun cadangan umum tahun 2018;

a. To establish provision for all net income in 2018 amounting to Rp46,002,044 to the 2018 general reserve account;

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 28 Juni 2018, para pemegang saham telah memutuskan untuk melakukan:

Based on the Annual General Meeting of Shareholders held on June 28, 2018, the shareholders have decided:

a. Penyisihan seluruh laba neto tahun 2017 sebesar Rp26.115.563 ke akun cadangan umum;

a. To establish provision for all net income in 2017 amounting to Rp26,115,563 to the general reserve account;

b. Penyisihan sebagian laba neto tahun 2017 sebesar Rp652.889 sebagai pembayaran zakat Bank tahun 2017;

b. To establish allowance for part of net income in 2017 amounting to Rp652,889 as Zakat payment of Bank of 2017;

30. PENGGUNAAN LABA NETO (Lanjutan)

30. APPROPRIATION OF NET INCOME (Continued)

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 28 Juni 2018, para pemegang saham telah memutuskan untuk melakukan: (lanjutan)

Based on the Annual General Meeting of Shareholders held on June 28, 2018, the shareholders have decided: (continued)

c. Pembayaran zakat Bank diambil dari cadangan biaya yang telah dibentuk pada tahun 2017; dan
d. Tidak ada pembagian dividen atas laba bersih tahun 2017;

c. To make payment of zakat of the Bank, taken from the estimated reserves established in 2017; and
d. That there is no dividend distribution of net income in 2017;

31. PENDAPATAN PENGELOLAAN DANA OLEH BANK SEBAGAI *MUDHARIB*

31. REVENUE FROM FUND MANAGEMENT FOR BANK AS MUDHARIB

	31 Desember / *December 31,* 2019	31 Desember / *December 31,* 2018	
Rupiah			***Rupiah***
Pendapatan dari bagi hasil			***Income from revenue sharing***
Musyarakah	1.139.724.177	1.335.174.322	*Musyarakah*
Mudharabah	46.711.171	58.196.830	*Mudharabah*
Jumlah	1.186.435.348	1.393.371.152	*Total*
Pendapatan dari penjualan			***Income from sales***
Murabahah	1.085.773.963	1.283.050.513	*Murabahah*
Istishna	355.873	482.737	*Istishna*
Jumlah	1.086.129.836	1.283.533.250	*Total*
Pendapatan dari *ijarah* -neto	4.871.726	30.754.156	***Income from ijarah-net***
Pendapatan usaha utama lainnya			***Other main operating income***
Pendapatan bonus FASBIS	67.762.160	41.850.986	*Bonus from FASBIS*
Pendapatan bagi hasil surat berharga - reksadana	8.959.778	31.075.838	*Income from revenue sharing - mutual fund*
Pendapatan *reverse repo* SBSN	--	19.274.851	*Reverse repo SBSN income*
Pendapatan bonus Sertifikat Bank Indonesia Syariah	8.314.112	8.894.325	*Bonus from Bank Indonesia Sharia Certificate*
Pendapatan *fee* wesel ekspor	5.550.371	6.905.778	*Export bill fee*
Pendapatan bagi hasil penempatan pada bank lain	702.525	361.329	*Income from revenue sharing from placements with other banks*
Pendapatan bagi hasil surat berharga	19.530.378	185.933	*Income from revenue sharing from marketable securities*
Pendapatan bonus Giro Bank	25.681	20.440	*Income from CA Placement*
Pendapatan *fee* akseptasi	--	--	*Acceptance fee revenue*
Jumlah	110.845.005	108.569.480	*Total*
Jumlah dipindahkan	2.388.281.915	2.816.228.038	*Total transferred*

31. PENDAPATAN PENGELOLAAN DANA OLEH BANK SEBAGAI *MUDHARIB* (Lanjutan)

31. REVENUE FROM FUND MANAGEMENT FOR BANK AS MUDHARIB (Continued)

	31 Desember / *December 31,* 2019	31 Desember / *December 31,* 2018	
Jumlah pindahan	2.388.281.915	2.816.228.038	*Total carried forward*
Mata uang asing			***Foreign currencies***
Pendapatan dari bagi hasil			***Income from revenue sharing***
Musyarakah	31.336.490	56.726.747	*Musyarakah*
Mudharabah	--	--	*Mudharabah*
Jumlah	31.336.490	56.726.747	*Total*
Pendapatan dari penjualan			***Income from sales***
Murabahah	92.083.222	187.560.956	*Murabahah*
Pendapatan usaha utama lainnya			***Other main operating income***
Pendapatan bagi hasil surat berharga	247.928.327	147.804.502	*Income from revenue sharing from marketable securities*
Keuntungan penjualan surat berharga	17.191.805	10.177.491	*Gain on sale of securities*
Pendapatan bonus Sertifikat Bank Indonesia	27.627	1.455.109	*Bonus from Bank Indonesia Sharia Certificate*
Keuntungan MTM surat berharga FVTPL	2.761.646	134.080	*Gain on FVTPL marketable securities MTM*
Pendapatan Bonus Giro Bank	79.832	73.990	*Income from CA placement*
Pendapatan *fee* wesel ekspor	--	29.447	*Export bill fee*
Pendapatan *fee* akseptasi	--	--	*Acceptance fee revenue*
Jumlah	267.989.237	159.674.619	*Total*
Jumlah	**2.779.690.864**	**3.220.190.360**	***Total***

Pendapatan *murabahah* termasuk pendapatan akrual sebesar Rp55.426.982 dan Rp172.721.881 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

Included in murabahah revenue is accrual income amounting to Rp55,426,982 and Rp172,721,881 for the years ended December 31, 2019 and 2018, respectively.

Pendapatan *mudharabah* termasuk pendapatan akrual sebesar Rp1.586.005 dan Rp3.402.923 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

Included in mudharabah revenue is accrual income amounting to Rp1,586,005 and Rp3,402,923 for the years ended December 31, 2019 and 2018, respectively.

Pendapatan *musyarakah* termasuk pendapatan akrual sebesar Rp191.396.813 dan Rp97.512.470 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

Included in musyarakah revenue is accrual income amounting to Rp191,396,813 and Rp97,512,470 for the years ended December 31, 2019 and 2018, respectively.

32. HAK PIHAK KETIGA ATAS BAGI HASIL DANA *SYIRKAH* TEMPORER

32. THIRD PARTIES' SHARE ON RETURN OF TEMPORARY SYIRKAH FUNDS

Akun ini merupakan distribusi bonus, margin dan bagi hasil untuk nasabah:

This account represents distribution of bonus, margin and profit sharing to the customers:

	31 Desember / *December 31,* 2019	**31 Desember / *December 31,* 2018**	
Deposito berjangka *mudharabah*	1.872.749.596	1.781.525.447	*Mudharabah time deposits*
Beban bagi hasil pinjaman yang diterima	78.850.126	146.741.382	*Fund borrowing profit sharing*
Tabungan *mudharabah*	226.201.528	182.479.798	*Mudharabah saving deposits*
Sukuk *mudharabah* dan MTN subordinasi	181.091.830	84.593.944	*Subordinated mudharabah Sukuk and MTN*
Giro *mudharabah*	37.827.730	46.396.367	*Mudharabah demand deposit*
Jumlah	**2.396.720.810**	**2.241.736.938**	***Total***

33. PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA

33. OTHER OPERATING INCOME

	31 Desember / *December 31,* 2019	**31 Desember / *December 31,* 2018**	
Jasa administrasi	458.820.912	148.542.892	*Administration fees*
Jasa transaksi ATM	48.183.153	38.886.996	*ATM transaction income*
Jasa layanan	102.779.949	98.254.086	*Service fee*
Jasa transaksi L/C	14.211.018	16.372.213	*L/C transaction income*
Lainnya	23.448.992	47.096.312	Others
Jumlah	**647.444.024**	**349.152.499**	***Total***

Jasa administrasi untuk tahun 2019 sebesar Rp458.820.912, dimana sebesar Rp348.328.614 merupakan penerimaan pembayaran atas debitur yang masuk dalam program pengalihan dan penjualan portofolio.

Administration fees as of 2019 it is amounting to Rp458,820,912, and Rp348,328,614 of which represents receipt of payment for debtors included in the portfolio transfer and sale program.

Lain-lain sebesar Rp47.096.312, sebesar Rp27.500.000 merupakan akru pendapatan atas *fee Bancassurance* atas kerjasama yang dilakukan Bank dengan Perusahaan asuransi untuk seluruh pembiayaan yang diberikan Bank tahun 2018, sedangkan di tahun 2019 akru pendapatan atas *fee Bancassurance* sebesar Rp10.150.000.

Others amounting to Rp47,096,312 includes Rp27,500,000 of accrued income of Bancassurance fee for cooperation between the Bank and Insurance Company for all financing extended by the Bank in 2018, meanwhile, the accrued income of Bancassurance fee in 2019 is amounting to Rp10,150,000.

34. BEBAN KARYAWAN / *34. EMPLOYEE EXPENSES*

	31 Desember / *December 31,* 2019	**31 Desember / *December 31,* 2018**	
Gaji, upah, tunjangan dan kesejahteraan karyawan tetap	684.518.410	789.209.210	*Salaries, wages, allowance and benefits for permanent employees*
Beban imbalan kerja (Catatan 25)	38.963.776	39.033.849	*Employee benefit expense (Note 25)*
Pendidikan dan pelatihan	37.030.589	15.308.520	*Education and training*
Beban penelitian dan pengembangan	10.225.788	2.080.442	*Research and development*
Jumlah	**770.738.563**	**845.632.021**	***Total***

Rincian gaji dan tunjangan atas kelompok Direksi, Dewan Komisaris, Komite Audit dan Pejabat Eksekutif adalah sebagai berikut (tidak diaudit):

The details of salaries and allowance of the Board of Commissioners, Board of Directors, Audit Committee and Executive Officers are as follows (unaudited):

	31 Desember 2019/ *December 31, 2019*				
	Jumlah Pegawai/ *Number of employee*	**Gaji/ *Salaries***	**Tunjangan/ *Allowance***	**Jumlah/ *Total***	
Dewan Komisaris/ Komite Audit	7	6.061.137	1.358.098	7.419.235	*Board of Commissioners/ Audit Committee*
Direksi	6	11.988.055	7.843.517	19.831.572	*Board of Directors*
Dewan Pengawas Syariah	2	769.677	82.256	851.933	*Sharia Supervisory Board*
Pejabat Eksekutif	125	48.323.711	45.592.541	93.916.252	*Executive officers*
Jumlah	**140**	**67.142.580**	**54.876.412**	**122.018.992**	***Total***

	31 Desember 2018/ *December 31, 2018*				
	Jumlah Pegawai/ *Number of employee*	**Gaji/ *Salaries***	**Tunjangan/ *Allowance***	**Jumlah/ *Total***	
Dewan Komisaris/ Komite Audit	5	3.734.790	2.513.729	6.248.519	*Board of Commissioners/ Audit Committee*
Direksi	5	11.503.555	7.828.424	19.331.979	*Board of Directors*
Dewan Pengawas Syariah	3	840.000	196.617	1.036.617	*Sharia Supervisory Board*
Pejabat Eksekutif	125	38.536.985	45.542.215	84.079.200	*Executive officers*
Jumlah	**138**	**54.615.330**	**56.080.985**	**110.696.315**	***Total***

35. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI / *35. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES*

	31 Desember / *December 31,* 2019	31 Desember / *December 31,* 2018	
Penyusutan aset tetap (Catatan 15)	221.641.158	244.976.554	*Depreciation of premises and equipment (Note 15)*
Gaji, upah, tunjangan karyawan *outsourcing*	92.989.107	91.656.975	*Salaries, wages and benefits for outsourced employees*
Asuransi penjaminan pihak ketiga (Catatan 44)	85.533.552	88.257.776	*Insurance for third parties fund guarantee (Note 44)*
Promosi	9.621.276	8.050.061	*Promotion*
Sewa	82.488.249	83.079.559	*Rent*
Listrik, air dan telekomunikasi	51.870.878	56.725.091	*Electricity, water and telecommunication*
Perbaikan dan pemeliharaan	53.893.057	51.162.064	*Repair and maintenance*
Beban kantor	23.991.404	27.278.365	*Office expenses*
Transportasi	15.999.928	14.868.801	*Transportation*
Biaya ATM	12.634.501	8.885.690	*ATM expenses*
Asuransi aset tetap	6.373.029	6.647.642	*Insurance for premises and equipment*
Perlengkapan kantor	4.635.760	5.956.208	*Office supplies*
Perjalanan dinas	4.490.690	4.297.553	*Business trip*
Lainnya	292	1.170	*Others*
Jumlah	**666.162.881**	**691.843.508**	***Total***

36. BEBAN (PEMBALIKAN) CADANGAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI ASET PRODUKTIF DAN NON PRODUKTIF / *36. PROVISION FOR (REVERSAL OF) IMPAIRMENT LOSSES OF EARNING AND NON EARNING ASSETS*

	31 Desember / *December 31,* 2019	31 Desember / *December 31,* 2018	
Aset Produktif			***Earning Assets***
Surat Berharga	--	9.975.000	*Marketable Securities*
Piutang	19.318.255	(29.268.657)	*Receivables*
Pembiayaan *Musyarakah*	(534.300.319)	(3.562.025)	*Musyarakah financing*
Pinjaman *Qardh*	(9.430.195)	60.848.315	*Funds of qardh*
Pembiayaan *Mudharabah*	1.795.110	(28.959.786)	*Mudharabah financing*
Tagihan akseptasi	(1.578.200)	(1.729.854)	*Acceptance receivables*
Aset lain-lain	17.765.232	40.153.592	*Other assets*
Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi	(951.542)	2.380.737	*Estimated losses on commitments and contingencies*
	(507.381.659)	49.837.322	
Aset Tidak Produktif			***Non-Earning Assets***
Agunan pembiayaan yang diambil alih	--	(402.027.959)	*Foreclosed assets*
Jumlah	**(507.381.659)**	**(352.190.637)**	***Total***

37. BEBAN USAHA LAIN-LAIN / *37. OTHER OPERATING EXPENSES*

Akun ini terdiri dari: / *This account consists of:*

	31 Desember / *December 31,* 2019	31 Desember / *December 31,* 2018	
Jasa konsultan	33.800.314	27.954.872	*Consultant fees*
Keperluan umum dan kegiatan kantor	10.082.817	12.211.435	*General expenses for office activities*
Beban *fee collection*, dana tabungan giro dan deposito *mudharabah*	48.589.557	39.434.978	*Collection fee, saving deposit, demand deposits and mudharabah time deposits fee*
Beban premi asuransi	5.059.794	8.460.774	*Insurance premiums*
Iuran keanggotaan	988.843	1.333.889	*Membership fees*
Lain-lain	3.608.447	3.595.186	*Others*
Jumlah	**102.129.771**	**92.991.134**	***Total***

38. PENDAPATAN NON OPERASIONAL / *38. NON OPERATING INCOME*

Akun ini terdiri dari: / *This account consists of:*

	31 Desember / *December 31,* 2019	31 Desember / *December 31,* 2018	
Pendapatan non usaha	3.858.818	1.189.505	*Non operating income*
Pendapatan *fee* DPLK	9.861.911	11.023.347	*Fee from DPLK*
Keuntungan penjualan aset tetap (Catatan 15)	6.358.399	1.869.305	*Gain on sale of premises and equipment (Note 15)*
Keuntungan penjualan AYDA	448.500	292.225	*Gain on sale of foreclosed assets*
Jumlah	**20.527.628**	**14.374.382**	***Total***

39. BEBAN NON OPERASIONAL / *39. NON OPERATING EXPENSES*

Akun ini terdiri dari: / *This account consists of:*

	31 Desember / *December 31,* 2019	31 Desember / *December 31,* 2018	
Rugi (laba) bersih dari entitas asosiasi (Catatan 12)	--	24.236.080	*Net loss (profit) from associate entity (Note 12)*
Beban pajak	11.448.034	9.653.101	*Tax expense*
Denda	204.420	1.202.065	*Penalties*
Sumbangan dan hadiah	231.660	277.411	*Donation and gifts*
Beban kerugian penjualan agunan yang diambil alih	81.242	--	*Loss on sale of foreclosed assets*
Lain-lain	1.904.510	2.069.775	*Others*
Jumlah	**13.869.866**	**37.438.432**	***Total***

40. LABA PER SAHAM / *40. EARNINGS PER SHARE*

a. Laba per Saham Dasar / *a. Basic Earnings per Share*

Berikut ini data yang digunakan untuk perhitungan laba per saham dasar: / *The following data is used to compute the basic earnings per share:*

	31 Desember / *December 31,* 2019	31 Desember / *December 31,* 2018	
Laba bersih			***Net income***
Laba bersih untuk perhitungan laba per saham dasar	16.326.331	46.002.044	*Net income for computation of basic earnings per share*
	Lembar/*Shares*	**Lembar/*Shares***	
Jumlah saham			***Number of shares***
Jumlah rata-rata tertimbang saham biasa untuk perhitungan laba per saham dasar (dalam nilai penuh)	10.207.702.335	10.207.702.335	*Weighted average number of outstanding ordinary shares for computing basic earnings per share (in full amount)*
Laba Per Saham	1,60	4,51	***Earnings Per Share***

b. Laba per Saham Dilusian / *b. Diluted Earnings per Share*

Tidak terdapat laba per saham dilusian karena Bank tidak memiliki efek berpotensi saham dilusian. / *There are no diluted earnings per share since there are no potential diluted shares.*

41. INFORMASI MENGENAI TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI / *41. INFORMATION ON TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES*

Pihak-pihak berelasi terdiri dari Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan kunci, pemegang saham, komisaris PT Syarikat Takaful Indonesia, Pengurus utama Baitul Maal Muamalat dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat, PT Al Ijarah Indonesia Finance berdasarkan PSAK No. 7 (Revisi 2010), "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi". / *Related parties consist of Board of Commissioners, Board of Directors and key employees, Commissioner of PT Syarikat Takaful Indonesia, management of Baitul Maal Muamalat and Dana Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat, PT Al Ijarah Indonesia Finance (subsidiary) based on SFAS No. 7 (Revised 2010), "Related Party Disclosures".*

a. Jenis hubungan dan unsur transaksi berelasi / ***a. Type of relationships and transactions of related parties***

Pihak Berelasi / *Related Parties*	**Sifat dari hubungan / *Nature of relationship***	**Sifat dari transaksi / *Nature of Transaction***
PT Al Ijarah Indonesia Finance	Entitas asosiasi/ *Associate entity*	Piutang *Murabahah,* pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*, penyertaan saham dan liabilitas utang sewa pembiayaan/ *Murabahah receivables, mudharabah and musyarakah financing, investment in shares and obligation under lease finance*

41. INFORMASI MENGENAI TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (Lanjutan)

41. INFORMATION ON TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (Continued)

b. Transaksi pihak-pihak berelasi

b. Transaction with related parties

Pihak Berelasi / *Related Parties*	Sifat dari hubungan / *Nature of relationship*	Sifat dari transaksi / *Nature of Transaction*
PT Syarikat Takaful Indonesia	Entitas asosiasi/ *Associate entity*	Penyertaan saham, deposito *mudharabah*/ *Investment in shares and mudharabah time deposit*
Karyawan kunci/ *Key Employees*	Hubungan pengendalian kegiatan Bank /*Significant influence on Bank's activities*	Piutang *murabahah*, pinjaman *qardh*, pembiayaan *musyarakah*, giro *wadiah*, tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah* / *Murabahah receivables, funds of qardh, musyarakah financing, wadiah demand deposits, mudharabah saving deposit, and mudharabah time deposits*
Komisaris, Dewan pengawas syariah/ *Commissioner, Sharia supervisory board*	Hubungan pengendalian kegiatan Bank/ *Significant influence on Bank's activities*	Giro *wadiah* dan deposito *mudharabah*/ *Wadiah demand deposit and mudharabah time deposits*
Baitul Maal Muamalat	Hubungan pengendalian melalui karyawan kunci/ *Significant influence through key employees*	Giro *wadiah* dan deposito *mudharabah*/ *Wadiah demand deposit and mudharabah time deposits*

Dalam kegiatan perbankan, Bank melakukan transaksi signifikan dengan pihak-pihak berelasi sebagai berikut:

For banking activities, the Bank has performed the following significant transactions with related parties:

	31 Desember / *December 31,* 2019	31 Desember / *December 31,* 2018	
Aset			***Assets***
Piutang *murabahah* (Catatan 8)			*Murabahah receivables (Note 8)*
Karyawan kunci	4.015.775	5.202.424	*Key Employees*
	4.015.775	5.202.424	
Pinjaman *qardh* (Catatan 9)			*Funds of qardh (Note 9)*
Karyawan kunci	--	553.034	*Key employees*
Pembiayaan *mudharabah* (Catatan 10)			*Mudharabah financing (Note 10)*
PT Al Ijarah Indonesia Finance	--	784.579	*PT Al Ijarah Indonesia Finance*
Pembiayaan *musyarakah* (Catatan 11)			*Musyarakah financing (Note 11)*
PT Al Ijarah Indonesia Finance	--	251.793.144	*PT Al Ijarah Indonesia Finance*
Karyawan kunci	1.668.688	1.318.242	*Key employees*
	1.668.688	253.111.386	

41. INFORMASI MENGENAI TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (Lanjutan)

41. INFORMATION ON TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (Continued)

b. Transaksi pihak-pihak berelasi (lanjutan)

b. Transaction with related parties (continued)

	31 Desember / *December 31,* 2019	**31 Desember / *December 31,* 2018**	
Aset *Ijarah*			*Ijarah Asset*
Karyawan kunci	36.408	--	*Key employees*
Penyertaan Saham (Catatan 12)			*Investments in shares (Note 12)*
PT Al Ijarah Indonesia Finance	401.616.000	--	*PT Al Ijarah Indonesia Finance*
PT Syarikat Takaful Indonesia	6.095.237	6.095.237	*PT Syarikat Takaful Indonesia*
	407.711.237	6.095.237	
Jumlah aset dari pihak berelasi	413.432.108	265.746.660	*Total assets from related parties*
Jumlah aset	**50.555.519.435**	**57.227.276.046**	***Total assets***
Persentase jumlah aset dari pihak berelasi terhadap jumlah aset	**0,82%**	**0,46%**	***Percentage of total assets from related parties to total assets***
Liabilitas			***Liabilities***
Giro wadiah (Catatan 19)			***Wadiah demand deposits (Note 19)***
Asuransi Takaful/Baitul Maal Muamalat/Dana Pensiun Lembaga Keuangan	28.139.068	44.419.173	*Asuransi Takaful/ Baitul Maal Muamalat/Dana Pensiun Lembaga Leuangan*
Entitas asosiasi	2.149.220	1.520.567	*Associate entities*
Komisaris	73.078	--	*Commissioner*
Karyawan kunci	215.507	100.029	*Key employees*
	30.576.873	46.039.769	
Utang sewa pembiayaan (Catatan 26)			***Obligation under capital lease (Note 26)***
PT Al Ijarah Indonesia Finance	555.739	1.855.739	*PT Al Ijarah Indonesia Finance*
Dana syirkah temporer (Catatan 27)			***Temporary syirkah fund (Note 27)***
Deposito *mudharabah*			*Mudharabah time deposits*
Karyawan kunci	8.615.368	10.809.649	*Key employees*
Entitas asosiasi	300.000	300.000	*Associate entities*
Dewan Pengawas Syariah	961.023	1.116.093	*Members of Sharia Supervisory Board*
PT Syarikat Takaful/Baitul Maal Muamalat/Dana Pensiun Lembaga Keuangan/Muamalat Institute	355.072.143	419.952.706	*PT Syarikat Takaful/ Baitul Maal Muamalat/Dana Pensiun Lembaga Keuangan/ Muamalat Institute*
Tabungan *mudharabah*			*Mudharabah saving deposits*
Karyawan kunci	11.516.570	13.729.264	*Key employees*
	376.465.104	445.907.712	

41. INFORMASI MENGENAI TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (Lanjutan)

41. INFORMATION ON TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (Continued)

b. Transaksi pihak-pihak berelasi (lanjutan)

b. Transaction with related parties (continued)

	31 Desember / *December 31,* 2019	31 Desember / *December 31,* 2018	
Estimasi liabilitas imbalan kerja (Catatan 25)			***Estimated liabilities for employee benefit (Note 25)***
Karyawan kunci	31.935.922	27.709.655	*Key employees*
Jumlah liabilitas dan dana *syirkah* temporer dari pihak berelasi	439.533.278	549.222.170	*Total liabilities and temporary syirkah fund from related parties*
Jumlah liabilitas dan dana *syirkah* temporer	46.618.341.148	53.305.608.968	*Total liabilities and temporary syirkah fund*
Persentase jumlah liabilitas dan dana syirkah temporer pihak berelasi terhadap jumlah liabilitas dan dana syirkah temporer	**0,94%**	**0,89%**	***Percentage of total liabilities and temporary syirkah fund from related parties to total liabilities and temporary syirkah fund***

42. KOMITMEN DAN KONTINJENSI

42. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES

Berikut adalah komitmen dan kontijensi pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

The commitments and contingencies as of December 31, 2019 and 2018 are as follows:

	31 Desember / *December 31,* 2019	31 Desember / *December 31,* 2018	
KOMITMEN			***COMMITMENTS***
Liabilitas komitmen			*Commitment liabilities*
Fasilitas pembiayaan yang belum digunakan	118.763.508	194.447.937	*Unused financing facilities*
Fasilitas L/C yang masih berjalan	1.549.602	18.506.246	*Outstanding irrevocable letters of credit*
Penerbitan SKBDN	141.268.454	281.277.576	*Issuance of SKBDNs*
Jumlah liabilitas komitmen	**261.581.564**	**494.231.759**	***Total commitment liabilities***
KONTINJENSI			***CONTINGENCIES***
Tagihan kontinjensi			*Contingency receivables*
Piutang dan pembiayaan hapus buku	1.628.564.144	1.680.797.134	*Written-off receivables and financing*
Margin dalam penyelesaian	127.853.207	73.835.449	*Margin on non-performing receivables*
Jumlah tagihan kontinjensi	1.756.417.351	1.754.632.583	*Total contingency receivables*
Liabilitas kontinjensi bank garansi	90.294.203	285.073.622	*Contingency liabilities on bank guarantees*
Liabilitas kontinjensi - neto	**1.666.123.148**	**1.469.558.961**	***Contingency liabilities - net***

43. INFORMASI SEGMEN / *43. SEGMENT INFORMATION*

Berikut ini adalah informasi wilayah geografis (tidak diaudit):

The geographical segment information is as follows (unaudited):

	31 Desember / *December 31,* 2019						
	Jabodetabek/ *Jabodetabek*	Jawa/ *Java*	Sumatera/ *Sumatera*	Kalimantan/ *Borneo*	Lainnya/ *Others*	Jumlah/ *Total*	
ASET							***ASSETS***
Kas	281.581.292	165.516.327	151.713.116	48.523.566	117.192.267	764.526.569	*Cash*
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	2.505.388.141	--	--	--	--	2.505.388.141	*Current accounts and placements with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain - neto	321.214.600	8.703.992	486.079	546.137	9.102.876	340.053.684	*Current accounts with other banks - net*
Penempatan pada bank lain - neto	2.175.919	796.028	423.666	--	34.430.001	37.825.615	*Placements with other banks - net*
Investasi pada surat berharga - neto	11.332.895.179	--	--	--	--	11.332.895.179	*Investment in marketable securities - net*
Piutang - neto	7.776.588.825	3.977.380.161	1.105.085.586	333.914.201	620.500.959	13.813.469.731	*Receivables - net*
Pinjaman *qardh* - neto	356.612.364	220.183.914	673.469	--	--	577.469.748	*Funds of Qardh - net*
Pembayaran *mudharabah* - bersih	472.238.102	231.759.348	44.381.187	82.070	35.968	748.496.676	*Mudharabah Financing - net*
Pembiayaan *musyakarah* - bersih	10.358.378.713	2.022.860.851	901.290.802	438.512.983	287.256.428	14.008.299.777	*Musyarakah Financing - net*
Penyertaan saham - neto	407.711.237	--	--	--	--	407.711.237	*Investments in shares - net*
Tagihan akseptasi - neto	371.276.373	25.934.774	8.727.396	--	542.165	406.480.708	*Acceptance receivables - net*
Aset yang diperoleh untuk *ijarah* - neto	2.732.283	431.785	176.446.566	290.187	619.607	180.520.428	*Assets acquired for ijarah - net*
Aset tetap - neto	2.932.076.637	77.270.502	67.449.897	12.713.896	42.359.827	3.131.870.759	*Premises and equipment - net*
Aset pajak tangguhan - neto	143.110.743	--	--	--	--	143.110.743	*Deferred tax assets*
Aset lain-lain - neto	1.131.792.780	533.694.939	115.521.213	207.927.390	168.464.119	2.157.400.440	*Other assets - net*
Jumlah aset	**38.395.773.188**	**7.264.532.622**	**2.572.198.977**	**1.042.510.430**	**1.280.504.218**	**50.555.519.435**	***Total assets***
LIABILITAS							***LIABILITIES***
Liabilitas segera	72.246.055	6.590.136	3.321.954	1.318.467	4.222.957	87.699.569	*Liabilities due immediately*
Simpanan	2.992.960.541	1.906.427.393	797.849.583	303.886.111	1.002.632.549	7.003.756.176	*Deposits*
Simpanan dari bank lain	12.526.851	78.922.439	21.892.033	41.605	3.932.304	117.315.232	*Deposits from other banks*
Bagi hasil yang belum dibagikan	35.997.116	20.438.885	9.127.352	3.691.619	7.038.410	76.293.382	*Undistributed revenue sharing*
Liabilitas akseptasi	227.239.578	34.693.924	--	--	--	261.933.502	*Acceptance payables*
Utang pajak	26.874.282	4.957.691	1.056.849	515.580	860.329	34.264.731	*Tax payables*
Efek - efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	1.352.033.085	--	--	--	--	1.352.033.085	*Securities sold under repurchase agreement*
Pinjaman yang diterima	277.765.000	--	--	--	--	277.765.000	*Fund borrowings*
Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi	1.352.239	316.141	--	--	--	1.668.380	*Estimated losses on commitments and contingencies*
Estimasi liabilitas imbalan kerja	174.521.826	--	--	--	--	174.521.826	*Estimated liabilities for employment benefit*
Liabilitas lain-lain	199.094.254	23.794.224	6.269.671	2.353.614	4.121.114	235.632.878	*Other liabilities*
Jumlah liabilitas	**5.372.610.827**	**2.076.140.833**	**839.517.442**	**311.806.996**	**1.022.807.663**	**9.622.883.761**	***Total liabilities***
DANA SYIRKAH TEMPORER							***TEMPORARY SYIRKAH FUNDS***
Bukan bank							*Non Bank*
Giro *mudharabah*	604.757.322	294.291.691	170.117.011	20.888.490	41.441.061	1.131.495.575	*Mudharabah demand deposits*
Tabungan *mudharabah*	3.062.545.444	3.285.714.882	1.678.035.635	782.028.638	1.500.343.021	10.308.667.620	*Mudharabah savings deposits*
Deposito *mudharabah*	14.101.991.390	4.276.308.707	1.502.363.679	511.926.951	1.520.702.325	21.913.293.052	*Mudharabah time deposits*
Bank							*Bank*
Giro *mudharabah*	1.148.758	15.827.199	39.840.683	449.365	980.536	58.246.540	*Mudharabah demand deposits*
Tabungan *mudharabah*	37.709.475	288.290.428	149.033.062	3.029.287	28.449.834	506.512.086	*Mudharabah savings deposits*
Deposito *mudharabah*	66.820.105	546.974.407	150.950.111	65.874.180	154.743.711	985.362.514	*Mudharabah time deposits*
Sukuk mudharabah trust certificate	1.746.880.000	--	--	--	--	1.746.880.000	*Trust certificate of mudharabah sukuk*
SIMA	245.000.000	--	--	--	--	245.000.000	*Certificate of inter bank mudharabah investment*
MTN Syariah	100.000.000	--	--	--	--	100.000.000	*Sharia MTN*
MTN Syariah Subordinasi	--	--	--	--	--	--	*Subordinated Sharia MTN*
Jumlah dana syirkah temporer	**19.966.852.495**	**8.707.407.313**	**3.690.340.181**	**1.384.196.910**	**3.246.660.489**	**36.995.457.387**	***Total temporary syirkah funds***
PENDAPATAN SEGMEN							***SEGMENT INCOME***
Pendapatan dari penjualan	547.291.673	367.495.160	112.764.226	36.509.953	114.152.045	1.178.213.058	*Income from sales*
Pendapatan bagi hasil	691.754.425	262.629.479	118.864.211	53.955.069	90.568.654	1.217.771.838	*Income from revenue sharing*
Pendapatan *ijarah* - neto	801.418	32.323	3.936.239	50.930	50.816	4.871.726	*Income from ijarah - net*
Pendapatan usaha utama lainnya	347.856.270	16.332.829	12.390.432	--	2.254.712	378.834.242	*Other main operating income*
Pendapatan operasional lainnya	540.586.881	42.108.790	20.363.648	6.766.989	37.617.717	647.444.024	*Other operating income*
Pendapatan non operasional	5.772.598	6.138.562	6.301.798	1.939.148	375.522	20.527.628	*Non operating revenue*
Jumlah pendapatan segmen	2.134.063.265	694.737.142	274.620.554	99.222.090	245.019.466	3.447.662.516	*Total segment income*
BEBAN SEGMEN							***SEGMENT EXPENSES***
Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer	1.605.224.609	423.548.609	186.608.307	57.906.065	123.433.219	2.396.720.810	*Third parties' share on return of temporary syirkah funds*
Beban operasional	599.676.418	167.107.375	143.265.559	33.819.860	67.036.232	1.010.905.443	*Operating expenses*
Beban non operasional	1.633.624	1.715.118	2.510.816	8.010.308	--	13.869.866	*Non operating expenses*
Beban pajak	9.840.067	--	--	--	--	9.840.067	*Tax expenses*
Jumlah beban segmen	2.216.374.718	592.371.101	332.384.682	99.736.233	190.469.451	3.431.336.185	*Total segment expenses*
LABA (RUGI) BERSIH	**(82.311.453)**	**102.366.040**	**(57.764.128)**	**(514.143)**	**54.550.015**	**16.326.331**	***NET INCOME (LOSS)***

43. INFORMASI SEGMEN (Lanjutan) / *43. SEGMENT INFORMATION (Continued)*

Berikut ini adalah informasi wilayah geografis (tidak diaudit): (lanjutan)

The geographical segment information is as follows (unaudited): (continued)

	31 Desember / *December 31,* 2018						
	Jabodetabek/ *Jabodetabek*	Jawa/ *Java*	Sumatera/ *Sumatera*	Kalimantan/ *Borneo*	Lainnya/ *Others*	Jumlah/ *Total*	
ASET							***ASSETS***
Kas	287.907.037	169.234.663	150.142.029	49.613.651	119.824.999	776.722.379	*Cash*
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	5.339.428.665	--	--	--	--	5.339.428.665	*Current accounts and placements with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain - neto	600.622.437	16.273.926	8.699.949	1.021.118	17.019.722	643.637.152	*Current accounts with other banks - net*
Penempatan pada bank lain - neto	709.102	259.414	138.067	--	11.220.253	12.326.836	*Placements with other banks - net*
Investasi pada surat berharga - neto	12.184.953.132	--	--	--	--	12.184.953.132	*Investment in marketable securities - net*
Piutang - neto	8.511.888.372	4.224.658.957	1.041.655.794	385.869.702	1.166.517.157	15.330.589.982	*Receivables - net*
Pinjaman *qardh* - neto	288.030.896	453.079.171	1.103.349	--	--	742.213.416	*Funds of Qardh - net*
Pembayaran *mudharabah* - bersih	152.920.548	243.491.009	35.157.256	256.295	46.905	431.872.013	*Mudharabah Financing - net*
Pembiayaan *musyakarah* - bersih	11.591.226.015	2.416.829.369	1.011.625.061	495.682.509	340.785.081	15.856.148.035	*Musyarakah Financing - net*
Penyertaan saham - neto	6.095.237	--	--	--	--	6.095.237	*Investments in shares - net*
Tagihan akseptasi - neto	399.456.308	27.909.364	9.391.871	--	583.444	437.340.987	*Acceptance receivables - net*
Aset yang diperoleh untuk *ijarah* - neto	2.816.055	445.024	181.856.446	299.084	638.605	186.055.214	*Assets acquired for ijarah - net*
Aset tetap - neto	3.145.970.988	81.725.456	71.338.653	13.446.903	44.802.040	3.357.284.040	*Premises and equipment - net*
Aset pajak tangguhan - neto	146.235.882	--	--	--	--	146.235.882	*Deferred tax assets*
Aset lain-lain - neto	908.171.447	451.785.641	97.791.494	176.015.552	142.608.942	1.776.373.076	*Other assets - net*
Jumlah aset	**43.566.432.123**	**8.085.691.994**	**2.608.899.969**	**1.122.204.813**	**1.844.047.149**	**57.227.276.046**	***Total assets***
LIABILITAS							***LIABILITIES***
Liabilitas segera	163.780.636	14.939.732	7.530.815	2.988.943	9.573.374	198.813.500	*Liabilities due immediately*
Simpanan	2.576.900.542	1.641.409.471	686.938.231	261.642.033	863.253.732	6.030.144.009	*Deposits*
Simpanan dari bank lain	5.146.716	32.425.658	8.994.445	17.094	1.615.606	48.199.519	*Deposits from other banks*
Bagi hasil yang belum dibagikan	39.659.329	22.518.261	10.055.935	4.067.190	7.754.472	84.055.187	*Undistributed revenue sharing*
Liabilitas akseptasi	177.884.380	27.158.593	--	--	--	205.042.973	*Acceptance payables*
Utang pajak	29.290.389	5.055.478	1.077.695	525.750	877.298	36.826.610	*Tax payables*
Efek - efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	1.072.328.400	--	--	--	--	1.072.328.400	*Securities sold under repurchase agreement*
Pinjaman yang diterima	1.150.000.000	--	--	--	--	1.150.000.000	*Fund borrowings*
Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi	2.123.475	496.447	--	--	--	2.619.922	*Estimated losses on commitments and contingencies*
Estimasi liabilitas imbalan kerja	200.647.816	--	--	--	--	200.647.816	*Estimated liabilities for employment benefit*
Liabilitas lain-lain	385.488.596	26.511.805	6.985.742	2.622.425	4.591.794	426.200.362	*Other liabilities*
Jumlah liabilitas	**5.803.250.279**	**1.770.515.445**	**721.582.863**	**271.863.435**	**887.666.276**	**9.454.878.298**	***Total liabilities***
DANA SYIRKAH TEMPORER							***TEMPORARY SYIRKAH FUNDS***
Bukan bank							*Non Bank*
Giro *mudharabah*	614.120.434	298.848.040	172.750.835	21.211.894	42.082.669	1.149.013.872	*Mudharabah demand deposits*
Tabungan *mudharabah*	3.155.849.914	3.385.818.502	1.729.159.195	805.854.168	1.546.052.941	10.622.734.720	*Mudharabah savings deposits*
Deposito *mudharabah*	17.911.973.676	5.431.653.364	1.908.262.310	650.235.972	1.931.555.570	27.833.680.892	*Mudharabah time deposits*
Bank							*Bank*
Giro *mudharabah*	2.122.704	29.245.894	73.618.613	830.347	1.811.859	107.629.417	*Mudharabah demand deposits*
Tabungan *mudharabah*	11.153.220	85.266.802	44.079.065	895.963	8.414.523	149.809.573	*Mudharabah savings deposits*
Deposito *mudharabah*	70.448.063	576.672.063	159.145.859	69.450.781	163.145.430	1.038.862.196	*Mudharabah time deposits*
Sukuk mudharabah trust certificate	1.600.000.000	--	--	--	--	1.600.000.000	*Trust certificate of mudharabah sukuk*
SIMA	1.149.000.000	--	--	--	--	1.149.000.000	*Certificate of inter bank mudharabah investment*
MTN Syariah	100.000.000	--	--	--	--	100.000.000	*Sharia MTN*
MTN Syariah Subordinasi	100.000.000	--	--	--	--	100.000.000	*Subordinated Sharia MTN*
Jumlah dana syirkah temporer	**24.714.668.011**	**9.807.504.665**	**4.087.015.877**	**1.548.479.125**	**3.693.062.992**	**43.850.730.670**	***Total temporary syirkah funds***
PENDAPATAN SEGMEN							***SEGMENT INCOME***
Pendapatan dari penjualan	683.337.876	458.847.401	140.795.248	45.585.628	142.528.053	1.471.094.206	*Income from sales*
Pendapatan bagi hasil	823.727.077	312.733.835	141.541.082	64.248.597	107.847.308	1.450.097.899	*Income from revenue sharing*
Pendapatan *ijarah* - neto	5.059.182	204.047	24.848.626	321.512	320.789	30.754.156	*Income from ijarah - net*
Pendapatan usaha utama lainnya	256.816.593	6.025.039	4.570.723	--	831.744	268.244.099	*Other main operating income*
Pendapatan operasional lainnya	231.277.160	59.103.247	28.582.103	9.498.041	52.799.647	381.260.198	*Other operating income*
Pendapatan non operasional	9.671.131	1.950.084	1.524.946	406.794	821.427	14.374.382	*Non operating revenue*
Jumlah pendapatan segmen	2.009.889.019	838.863.653	341.862.728	120.060.572	305.148.968	3.615.824.940	*Total segment income*
BEBAN SEGMEN							***SEGMENT EXPENSES***
Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer	1.494.569.754	399.827.088	176.157.009	54.662.943	116.520.144	2.241.736.938	*Third parties' share on return of temporary syirkah funds*
Beban operasional	724.865.199	229.991.501	197.177.779	46.546.602	92.262.617	1.290.843.698	*Operating expenses*
Beban non operasional	13.511.482	8.578.056	7.222.354	6.749.953	1.376.587	37.438.432	*Non operating expenses*
Beban pajak	(196.172)	--	--	--	--	(196.172)	*Tax expenses*
Jumlah beban segmen	2.232.750.263	638.396.645	380.557.142	107.959.498	210.159.348	3.569.822.896	*Total segment expenses*
LABA (RUGI) BERSIH	**(222.861.244)**	**200.467.008**	**(38.694.414)**	**12.101.074**	**94.989.620**	**46.002.044**	***NET INCOME (LOSS)***

43. INFORMASI SEGMEN (Lanjutan)

43. SEGMENT INFORMATION (Continued)

Untuk kepentingan manajemen, Bank mengelompokan ke dalam 5 (lima) segmen operasional berdasarkan produk sebagai berikut:

For management purposes, Bank organizes 5 (five) operating segments based on products, as follows:

- Segmen Konsumer
- Segmen Mikro-Retail
- Segmen SME
- Segmen Korporasi
- Segmen Lainnya

- *Consumer Segment*
- *Micro-retail Segment*
- *SME Segment*
- *Corporate Segment*
- *Others Segment*

31 Desember 2019 / *December 31, 2019*

	Konsumer/ *Consumer*	Mikro-Retail/ *Micro-Retail*	SME/ *SME*	Korporasi/ *Corporate*	Lainnya/ *Others*	Jumlah/ *Total*	
ASET							***ASSETS***
Piutang dan Pembiayaan	6.804.031.315	27.869.863	3.644.672.114	19.219.914.087	--	29.696.487.379	*Receivable and financing*
CKPN	(58.691.527)	(233.172)	(27.466.609)	(462.360.273)	--	(548.751.581)	*Allowance for Impairment losses*
Non piutang dan Non pembiayaan	--	--	--	--	21.407.783.637	21.407.783.637	*Non receivable and financing*
Jumlah Aset	**6.745.339.788**	**27.636.691**	**3.617.205.505**	**18.757.553.814**	**21.407.783.637**	**50.555.519.435**	***Total Assets***
LIABILITAS							***LIABILITIES***
Pendanaan	37.426.427.473	--	--	4.523.320.287	221.781.035	42.171.528.795	*Funding*
Non pendanaan	--	--	--	147.470.432	8.236.520.208	8.383.990.640	*Non funding*
Jumlah Liabilitas	**37.426.427.473**	**--**	**--**	**4.670.790.719**	**8.458.301.243**	**50.555.519.435**	***Total Liabilities***
PENDAPATAN							***INCOME***
Pendapatan pengelolaan dana	829.362.337	5.227.149	338.093.404	1.199.149.514	407.858.460	2.779.690.864	*Revenue from fund management*
Pendapatan usaha lainnya	473.289.393	1.218	4.845.017	125.093.734	44.214.662	647.444.024	*Other operating income*
Jumlah pendapatan segmen	**1.302.651.731**	**5.228.367**	**342.938.421**	**1.324.243.248**	**452.073.122**	**3.427.134.888**	***Total segment income***
BEBAN							***EXPENSE***
Hak pihak ketiga atas bagi hasil	(1.710.974.077)	--	--	(565.821.204)	(119.925.529)	(2.396.720.810)	*Third parties' share on return*
Beban CKPN	142.112.067	582.103	76.124.264	288.631.195	--	507.449.629	*Allowance for Impairment losses*
Beban Usaha Lainnya	(595.738.598)	(1.426.863)	(58.567.068)	(23.042.385)	(878.512.832)	(1.557.287.746)	*Other operating expenses*
Jumlah beban segmen	**(2.164.600.608)**	**(844.760)**	**17.557.196**	**(300.232.394)**	**(998.438.361)**	**(3.446.558.927)**	***Total segment expense***
Pendapatan (beban) non operasional-neto	--	--	--	--	45.590.437	45.590.437	*Non operating income(expense) net*
Laba sebelum pajak penghasilan	(861.948.877)	4.383.607	360.495.617	1.024.010.854	(500.774.802)	26.166.398	***Income before tax***
Beban pajak	--	--	--	--	(9.840.067)	(9.840.067)	*Tax expenses*
Laba Neto	**(861.948.877)**	**4.383.607**	**360.495.617**	**1.024.010.854**	**(510.614.869)**	**16.326.331**	***Net Income***

31 Desember 2018 / *December 31, 2018*

	Konsumer/ *Consumer*	Mikro-Retail/ *Micro-Retail*	SME/ *SME*	Korporasi/ *Corporate*	Lainnya/ *Others*	Jumlah/ *Total*	
ASET							***ASSETS***
Piutang dan Pembiayaan	8.423.895.624	112.449.398	3.360.004.475	21.483.774.903	--	33.380.124.400	*Receivable and financing*
CKPN	(149.982.669)	(5.611.148)	(72.698.777)	(805.123.503)	--	(1.033.416.097)	*Allowance for Impairment losses*
Non piutang dan Non pembiayaan	--	--	--	--	24.880.567.743	24.880.567.743	*Non receivable and financing*
Jumlah Aset	**8.273.912.955**	**106.838.250**	**3.287.305.698**	**20.678.651.400**	**24.880.567.743**	**57.227.276.046**	***Total Assets***
LIABILITAS							***LIABILITIES***
Pendanaan	30.326.103.860	--	--	18.972.695.744	1.780.274.594	51.079.074.198	*Funding*
Non pendanaan	--	--	--	211.943.450	2.014.591.320	2.226.534.770	*Non funding*
Jumlah Liabilitas	**30.326.103.860**	**--**	**--**	**19.184.639.194**	**3.794.865.914**	**53.305.608.968**	***Total Liabilities***
PENDAPATAN							***INCOME***
Pendapatan pengelolaan dana	939.585.792	28.697.335	321.534.318	1.609.323.363	321.049.552	3.220.190.360	*Revenue from fund management*
Pendapatan usaha lainnya	156.697.262	51.571	17.779.846	94.424.524	112.306.993	381.260.196	*Other operating income*
Jumlah pendapatan segmen	**1.096.283.055**	**28.748.906**	**339.314.164**	**1.703.747.887**	**433.356.545**	**3.601.450.556**	***Total segment income***
BEBAN							***EXPENSE***
Hak pihak ketiga atas bagi hasil	(917.937.073)	--	--	(962.810.471)	(360.989.394)	(2.241.736.938)	*Third parties' share on return*
Beban CKPN	--	--	--	352.190.637	--	352.190.637	*Allowance for Impairment losses*
Beban Usaha Lainnya	(661.297.229)	(35.941.561)	(99.123.620)	(27.162.496)	(819.509.429)	(1.643.034.335)	*Other operating expenses*
Jumlah beban segmen	**(1.579.234.302)**	**(35.941.561)**	**(99.123.620)**	**(637.782.330)**	**(1.180.498.823)**	**(3.532.580.636)**	***Total segment expense***
Pendapatan (beban) non operasional-neto	--	--	--	--	(23.064.050)	(23.064.050)	*Non operating income(expense) net*
Laba sebelum pajak penghasilan	(482.951.247)	(7.192.655)	240.190.544	1.065.965.557	(770.206.328)	45.805.872	***Income before tax***
Beban pajak	--	--	--	--	196.172	196.172	*Tax expenses*
Laba Neto	**(482.951.247)**	**(7.192.655)**	**240.190.544**	**1.065.965.557**	**(770.010.156)**	**46.002.044**	***Net Income***

Bank tidak menyajikan informasi segmen berdasarkan segmen usaha, karena Bank menjalankan usaha sebagai bank umum syariah dan tidak memiliki kegiatan usaha di luar sektor perbankan.

The Bank does not present business segment information other than banking segment, since the Bank engages mainly in sharia banking activities and has no other significant activities other than banking.

44. JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK UMUM

Berdasarkan Undang-undang No. 24 tanggal 22 September 2004, efektif sejak tanggal 22 September 2005, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia No. 3 tanggal 13 Oktober 2008, Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) dibentuk untuk menjamin kewajiban tertentu bank-bank umum berdasarkan program penjaminan yang berlaku, yang besaran nilai jaminannya dapat berubah jika memenuhi kriteria tertentu yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan LPS No. 2 tanggal 25 November 2010, simpanan yang dijamin meliputi giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan simpanan dari bank lain.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 tahun 2008 tanggal 13 Oktober 2008, tentang "Besarnya Nilai Simpanan yang Dijamin Lembaga Penjaminan Simpanan", maka pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, jumlah simpanan yang dijamin LPS adalah simpanan sampai dengan Rp2.000.000.000 (dalam nilai penuh) untuk per nasabah per bank. Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, Bank adalah peserta dari program penjaminan tersebut.

Beban penjaminan dana pihak ketiga yang dijaminkan kepada Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) adalah Rp85.533.552 dan Rp88.257.776 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 (Catatan 35).

44. GOVERNMENT GUARANTEES ON OBLIGATIONS OF COMMERCIAL BANKS

Pursuant to Law No. 24, dated September 22, 2004, effective on September 22, 2005, as amended with Regulation of the Government of the Republic of Indonesia in Lieu of Law No. 3 dated October 13, 2008, the Government established the Indonesia Deposit Insurance Corporation (LPS) to guarantee certain liabilities of commercial banks based on the prevailing guarantee programs, in which the guaranteed amount may change if they meet certain specified criteria.

Based on LPS Regulation No. 2 dated November 25, 2010, the deposits guaranteed shall include demand deposits, time deposits, certificates of deposits, savings deposits and deposits from other banks.

Pursuant to Regulation of the Government of the Republic of Indonesia No. 66 of 2008, dated October 13, 2008, regarding "the Amount of Public Savings Guaranteed by the Indonesia Deposit Insurance Corporation", as of December 31, 2019 and 2018, the amount of savings guaranteed by LPS is amounting to Rp2,000,000,000 (in full amount) for each customer, each bank. As of December 31, 2019 and 2018, the Bank is a participant of the government guarantee program.

Insurance premium related to third party funds paid to the Indonesia Deposit Insurance Corporation (LPS) amounted to Rp85,533,552 and Rp88,257,776 for the years ended December 31, 2019, and 2018, respectively (Note 35).

45. MANAJEMEN RISIKO

Bank dalam menjalankan usahanya senantiasa dihadapkan pada berbagai risiko. Seiring dengan berkembangnya bisnis Bank, risiko yang dihadapi Bank menjadi semakin kompleks. Bank dituntut untuk mampu menerapkan manajemen risiko yang handal agar dapat beradaptasi dengan kompleksitas kegiatan usaha tersebut. Prinsip-prinsip manajemen risiko yang diterapkan harus dapat mendukung Bank untuk lebih berhati-hati seiring dengan perkembangan kegiatan usaha dan operasional perbankan yang sangat pesat.

Penerapan manajemen risiko di Bank berpedoman pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan dokumen dari *Basel Committee on Banking Supervision (BCBS).*

45. RISK MANAGEMENT

The Bank's business is constantly exposed to various risks. At the course of the development of the Bank's business, risks encountered by the Bank become increasingly complex. Bank is required to implement a reliable risk management in order to adapt to the complexity of the business. The principles of risk management practices should be implemented to support the Bank in the rapid development of business activities and banking operations.

The Bank's risk management implementation is based on Regulation of Bank Indonesia (PBI) regarding Implementation of risk management in Sharia Bank and Sharia Business Unit and documents of Basel Committee on Banking Supervision (BCBS).

45. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

Ruang lingkup manajemen risiko di Bank meliputi:

1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Dewan Direksi, termasuk Dewan Pengawas Syariah sebagai bagian dari tata kelola risiko;
2. Kecukupan kebijakan, pedoman dan penetapan limit risiko;
3. Kecukupan proses manajemen risiko yang mencakup identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko; kecukupan sumber daya manusia baik secara kuantitas maupun kualitas, serta kecukupan sistem informasi manajemen risiko; dan
4. Kecukupan sistem pengendalian risiko yang mencakup pengendalian internal oleh unit internal audit dan Anti *Fraud Team*.

Penerapan manajemen risiko tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya kesadaran risiko pada seluruh lapisan manajemen dan karyawan Bank. Kampanye sadar risiko dimulai dari Dewan Komisaris dan Dewan Direksi yang berperan aktif menjadi motor penggerak bagi kualitas penerapan manajemen risiko Bank. Peran aktif Dewan Komisaris dan Direksi dalam manajemen risiko dilakukan antara lain melalui Komite Pemantau Risiko (komite level Dewan Komisaris) dan Komite Manajemen Risiko (komite level Direksi). Komite-komite tersebut secara rutin melaksanakan rapat untuk membahas mengenai profil risiko dan manajemen risiko yang harus dilakukan oleh Bank.

Pelaksanaan manajemen risiko melibatkan seluruh unsur dalam organisasi mulai dari Manajemen hingga karyawan pelaksana. Seluruh unsur tersebut berperan aktif dalam konteks 'tiga lini pertahanan' manajemen risiko seperti di bawah ini:

1. Lini pertahanan pertama. Garis pertahanan pertama berisi unit kerja pengambil dan pemilik risiko yang melaksanakan fungsi bisnis dan unit kerja pendukung. Unit kerja tersebut dalam melaksanakan aktivitas hariannya berhadapan langsung dengan berbagai jenis dan kemungkinan risiko yang dihadapi Bank. Seluruh fungsi pada garis pertahanan pertama bertanggung jawab dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko yang melekat pada setiap produk, kegiatan, proses dan sistem yang dijalankan;

45. RISK MANAGEMENT (Continued)

Scope of risk management of the Bank covers:

1. *Active supervisory of Board of Commissioners and Board of Directors, including Sharia Supervisory Boards as part of risk governance;*
2. *Adequacy of policy, procedure and determination of risk limit;*
3. *Adequacy of risk management process that includes identification, measurement, monitoring and control of risk; adequacy of human resources in both quantity and quality, as well as adequacy of risk management information system; and*
4. *Adequacy of risk control system that includes internal control by the internal audit unit and Anti-Fraud Team.*

Risk management implementation cannot be carried out without the risk awareness at every level of Management and employees of Bank. Risk awareness campaign is initiated by Board of Commissioners and Board of Directors who participate actively in driving employees engagement in implementing the Bank's quality risk management. The active role of the Boards of Commissioners and Directors is conducted through the Risk Oversight Committee (committee at the level of the Board of Commissioners) and Risk Management Committee (committee at the level of the Board of Directors). These Committees regularly hold meetings to discuss Bank's risk profile and risk management.

The implementation of risk management engages every element at every level of the organization, starting from the Management to executive employees. All elements are active in the context of the "three lines of defense" of risk management, as follows:

1. *First line of defense. The first line of defense includes the business units and supporting units as risk taker or risk owner, which in daily activities, deal directly with various types and possible risk faced by Bank. All functions in the first line of defense are responsible for identifying and mitigating the risk inherent in each product, activity, process, and system;*

45. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

Pelaksanaan manajemen risiko melibatkan seluruh unsur dalam organisasi mulai dari Manajemen hingga karyawan pelaksana. Seluruh unsur tersebut berperan aktif dalam konteks 'tiga lini pertahanan' manajemen risiko seperti di bawah ini: (lanjutan)

2. Lini pertahanan kedua. Garis pertahanan kedua terdiri dari unit kerja manajemen risiko, kepatuhan dan hukum. Unit kerja manajemen risiko bertanggung jawab atas pengembangan dan pelaksanaan strategi manajemen risiko, pemeliharaan dan pengembangan berkelanjutan dari kerangka pengelolaan risiko dan memberikan masukan serta arahan kepada unit kerja bisnis dan unit kerja pendukung mengenai proses pengelolaan risiko, pengukuran risiko dan sistem pelaporan bank; dan

3. Lini pertahanan ketiga. Pada garis ketiga pertahanan berisi unit internal audit. Internal audit berfungsi sebagai unit independen yang bertugas melakukan risk-based audit yang memberikan nilai tambah kepada lini pertahanan pertama dan lini pertahanan kedua, untuk memastikan bahwa seluruh elemen Bank telah melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya dengan baik termasuk memastikan kesesuaian dengan kebijakan manajemen Bank Muamalat dan regulasi yang berlaku.

Ketiga lini pertahanan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan untuk terciptanya penerapan manajemen risiko yang berkualitas, berjalan dengan efektif dan optimal.

Untuk memastikan pertumbuhan bisnis yang berkesinambungan serta memberikan nilai tambah secara jangka panjang kepada pemegang saham maupun pemangku kepentingan lainnya, Bank menerapkan pendekatan yang menyeluruh terhadap sepuluh jenis risiko sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.65/POJK.03/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Risiko kredit dalam pembiayaan terkait dengan kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajibannya sesuai akad atau perjanjian yang telah ditetapkan antara Bank dan nasabah. Semakin besar porsi pembiayaan yang bermasalah karena menurunnya kemampuan nasabah dalam membayar kembali kewajibannya ke Bank, semakin besar pula kebutuhan biaya pencadangan yang harus dibentuk Bank dan berpengaruh pada keuntungan Bank.

45. RISK MANAGEMENT (Continued)

The implementation of risk management engages every element at every level of the organization, starting from the Management to executive employees. All elements are active in the context of the "three lines of defense" of risk management, as follows: (continued)

2. Second line of defense. In the second line of defense, there are risk management, compliance and legal units. The risk management work unit is responsible for the development and implementation of risk management strategies, the maintenance and continuous development of risk management framework, and to provide input and direction to business units and supporting units regarding Bank's processes for risk management, risk measurement and reporting systems; and

3. Third line of defense. In the third line of defense there is the internal audit unit, which functions as an independent unit that performs risk-based audit activities and provides value added to the first and second lines of defense, in order to ensure that all elements at Bank have carried out their functions and responsibilities properly, including ensuring the compliance with Bank Muamalat's management policy and applicable regulation.

Three lines of defense are an integral and inseparable part in creating quality, effective and optimal risk management implementation.

To ensure sustainable business growth, as well as provide added value to stockholder and shareholders, Bank implements risk management that consist of ten types of risks as referred to in the Regulation of Financial Service Authority No. 65/POJK.03/2016, dated December 28, 2016 concerning the Implementation of risk management in Sharia Commercial Bank and Sharia Business Units.

Credit risks in financing are relevant to the ability of the debtor to repay the loans in accordance with the contract between Bank and debtor. The inability of debtors to repay the loans extended would result in an increase in the provision for financing losses and thereby reduce Bank's profit.

45. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

a. Risiko Kredit (Pembiayaan)

Dalam melakukan pengelolaan risiko kredit Bank telah melakukan beberapa perbaikan, baik dalam hal percepatan penyelesaian *bad bank*, penjagaan kualitas *good bank* dan pertumbuhan *new bank*. Beberapa di antara perbaikan yang telah dilakukan oleh Bank meliputi:

1. Melakuan peninjauan kembali ketentuan pembiayaan mulai dari level kebijakan, prosedur sampai dengan level petunjuk teknis.

2. Melakukan penyempurnaan proses pembiayaan secara *end-to-end* pada semua segmen pembiayaan.

   a. Segmen *Corporate*

      (1) Melakukan implementasi *target market* dan *Risk Acceptance Criteria* (RAC) dan melakukan review secara berkala;

      (2) Melakukan pembiayaan dengan fokus antara lain pada BUMN dan perusahaan anaknya;

      (3) Melakukan pembahasan *pipeline* pembiayaan dan pra Komite Pembiayaan;

      (4) Menyempurnakan proposal pembiayaan untuk meningkatkan kualitas analisis pembiayaan;

      (5) Mendorong penggunaan *Moody's Risk Analyst*;

      (6) Menunjuk *Financing Risk Manager* (FRM) spesialis untuk sektor ekonomi tertentu;

      (7) Menyempurnakan keanggotaan Komite Pembiayaan di mana fungsi manajemen risiko menjadi salah satu anggotanya dan memiliki suara *(voting right)* dalam pemutusan pembiayaan.

      (8) Untuk administrasi dan pemantauan, dilakukan antara lain:

         (a) Pemantauanpembayaran nasabah secara harian;
         (b) Implementasi *watchlist* untuk nasabah *good bank* yang terindikasi memiliki kelemahan;

45. RISK MANAGEMENT (Continued)

a. Credit (Financing) Risk

In managing credit risk the Bank has conducted several improvements, by accelerating bad bank settlement, maintaining good bank quality and new bank growth. Some of the improvements that have been made by the Bank include:

1. Reviewing financing regulations starting from the policy, procedure to technical guidance.

2. Improving the end-to-end financing process in all segments.

   a. Corporate Segment

      (1) Implementing target market and Risk Acceptance Criteria (RAC) with periodic reviews;

      (2) Financing with a focus on SOEs and their subsidiaries;

      (3) Discussing the financing pipeline and the pre Financing Committee;

      (4) Improving financing proposals to improve the quality of financing analysis;

      (5) Encouraging the use of Moody's Risk Analyst;

      (6) Appointing Financing Risk Manager (FRM) specialist for certain economic sectors;

      (7) Improving membership of Financing Committee where risk management function is to become a member and have a voting right in financing decision.

      (8) For administration and monitoring, conducting among others:

         (a) Daily monitoring of customer payment;
         (b) Implementation of watchlists for good bank customers who are indicated to have weaknesses.

45. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

a. Risiko Kredit (Pembiayaan) (lanjutan)

2. Melakukan penyempurnaan proses pembiayaan secara *end-to-end* pada semua segmen pembiayaan. (lanjutan)

   a. Segmen *Corporate* (lanjutan)

      (8) Untuk administrasi dan pemantauan, dilakukan antara lain: (lanjutan)

         (c) Reviu setelah pembiayaan dicairkan untuk memastikan kelengkapan dokumen pembiayaan;
         (d) Reviu portofolio pembiayaan pada beberapa industri yang signifikan dibiayai oleh Bank. Dari hasil reviu dilakukan penetapan kriteria untuk sektor ekonomi tertentu;
         (e) Analisis *stress test portofolio* pembiayaan;
         (f) Reviu pembiayaan secara tahunan dan pemantauan pemenuhan *covenant* secara triwulanan.

   b. Segmen *Retail*

      (1) Melakukan penyempurnaan proses pembiayaan pada segmen *Retail* antara lain melalui kajian atas permasalahan pembiayaan yang selama ini terjadi.

      (2) Melakukan pembiayaan properti dengan cakupan yang terbatas, yaitu:

         (a) Ditujukan kepada nasabah *fixed income* yang bekerja pada perusahaan tertentu yang bekerja sama dengan Bank;
         (b) Fokus pada area tertentu seperti di pulau Jawa, sementara untuk pulau lain belum akan dibuka;
         (c) Melakukan kerja sama dengan *developer* untuk mempercepat proses.

3. Melakukan percepatan penyelesaian *bad bank*, melalui *collection* dan kerja sama dengan balai lelang, serta memperbaiki manajemen data dalam upaya pengelolaan *bad bank* untuk segmen Retail maupun *Corporate*.

45. RISK MANAGEMENT (Continued)

a. Credit (Financing) Risk (continued)

2. Improving the end-to-end financing process in all segments. (continued)

a. Corporate Segments (continued)

(8) For administration and monitoring, conducting among others: (continued)

(c) Post booking review to ensure completeness of financing documents;

(d) Review of portfolios for several significant industries financed by the Bank. From the results of the review, criteria for certain economic sectors are determined;
(e) Analysis of financing portfolio stress test;
(f) Annual review of financing and quarterly covenant monitoring.

b. Retail Segment

(1) Improving financing process in Retail segment through, among others, lesson learned from the problems that have occurred.

(2) Extending property financing with limited coverage, such as:

(a) Focusing on fixed income customers who work in certain companies determined by the Bank;

(b) Focusing on certain areas such as on Java, while other islands will not yet be targeted;
(c) Cooperating with developers to accelerate turnover time.

3. Accelerating bad bank settlement through collection, and cooperation with auction house, and improving data management to manage bad bank for the Retail and Corporate segments.

45. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

45. RISK MANAGEMENT (Continued)

a. Risiko Kredit (Pembiayaan) (lanjutan)

4. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia terkait pembiayaan melalui pelatihan analisis pembiayaan.

5. Mengembangkan *Financing Origination System* (FOS) yang mulai diimplementasikan untuk pembiayaan properti sejak Agustus 2019.

(i) Kualitas aset keuangan

Tabel di bawah menunjukkan kualitas aset keuangan berdasarkan golongan aset untuk semua aset keuangan yang mempunyai risiko pembiayaan (diluar cadangan kerugian penurunan nilai) (tidak diaudit):

a. Credit (Financing) Risk (continued)

4. Improving human resources competencies related to financing through training in financing analysis.

5. Developing Financing Origination System (FOS) which has been implemented for property financing since August 2019.

(i) Financial assets quality

The table below shows financial assets quality per class of assets for all financial assets exposed to financing risk (gross of allowance for impairment losses) (unaudited):

***31 Desember / December 31*, 2019**

	Belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai/ *Neither past due nor impaired*		Telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai/ *Past-due but not impaired*	Mengalami penurunan nilai/ *Impaired*	Jumlah/ *Total*	
	Tingkat tinggi/ *High grade*	Tingkat standar/ *Standard grade*				
ASET						***ASSETS***
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	2.505.388.141	--	--	--	2.505.388.141	*Current accounts and placements with Bank Indonesia*
Giro dan penampatan pada bank lain	377.059.680	--	--	1.606.892	378.666.572	*Current accounts and placements with other banks*
Investasi pada surat berharga	11.342.167.957	--	--	5.702.222	11.347.870.179	*Investments in marketable securities*
Piutang *murabahah*	7.978.483.138	2.842.197.483	2.967.645.597	349.801.557	14.138.127.775	*Murabahah receivable*
Piutang *istishna*	3.725.303	--	--	--	3.725.303	*Istishna receivable*
Piutang *ijarah*	9.775.647	21.579	144.460	7.920	9.949.605	*Ijarah receivable*
Pinjaman *qardh*	424.686.461	126.999.568	28.438.805	1.162.546	581.287.380	*Funds of qardh*
Pembiayaan *mudharabah*	488.888.786	257.032.758	9.119.099	1.472.890	756.513.534	*Mudharabah financing*
Pembiayaan *musyarakah*	4.672.961.392	5.035.697.798	3.980.716.626	517.508.100	14.206.883.916	*Musyarakah financing*
Penyertaan saham	--	407.711.237	--	--	407.711.237	*Investment in shares*
Tagihan akseptasi	--	411.265.095	--	--	411.265.095	*Acceptance receivables*
Aset lain-lain *)	234.746.587	2.500.459	2.556	--	237.249.602	*Other assets*)*
Jumlah	**28.037.883.092**	**9.083.425.977**	**6.986.067.142**	**877.262.128**	**44.984.638.339**	***Total***

***31 Desember / December 31*, 2018**

	Belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai/ *Neither past due nor impaired*		Telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai/ *Past-due but not impaired*	Mengalami penurunan nilai/ *Impaired*	Jumlah/ *Total*	
	Tingkat tinggi/ *High grade*	Tingkat standar/ *Standard grade*				
ASET						***ASSETS***
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	5.339.428.665	--	--	--	5.339.428.665	*Current accounts and placements with Bank Indonesia*
Giro dan penampatan pada bank lain	655.963.988	--	--	2.071.651	658.035.639	*Current accounts and placements with other banks*
Investasi pada surat berharga	12.184.953.132	--	--	14.975.000	12.199.928.132	*Investments in marketable securities*
Piutang *murabahah*	8.623.877.372	4.839.194.900	1.753.210.739	415.938.682	15.632.221.693	*Murabahah receivable*
Piutang *istishna*	4.392.947	--	--	--	4.392.947	*Istishna receivable*
Piutang *ijarah*	6.651.598	11.597	95.173	12.712	6.771.080	*Ijarah receivable*
Pinjaman *qardh*	451.936.553	29.306.472	159.712.804	114.321.447	755.277.276	*Funds of qardh*
Pembiayaan *mudharabah*	268.425.803	159.523.722	8.944.925	695.508	437.589.958	*Mudharabah financing*
Pembiayaan *musyarakah*	5.683.948.741	7.981.814.892	2.122.415.884	755.691.929	16.543.871.446	*Musyarakah financing*
Penyertaan saham	--	6.095.237	--	--	6.095.237	*Investment in shares*
Tagihan akseptasi	--	437.340.987	--	6.362.587	443.703.574	*Acceptance receivables*
Aset lain-lain *)	--	574.096.944	--	--	574.096.944	*Other assets*)*
Jumlah	**33.219.578.799**	**14.027.384.751**	**4.044.379.525**	**1.310.069.516**	**52.601.412.591**	***Total***

*) Aset lain-lain terdiri atas piutang pendapatan yang masih akan diterima, penempatan pada PT Pos Indonesia (Persero), setoran jaminan dan tagihan lain-lain.

**) Other assets consist of income receivables, funds with PT Pos Indonesia (Persero), security deposits and other receivables.*

45. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

a. Risiko Kredit (Pembiayaan) (lanjutan)

Kualitas pembiayaan didefinisikan sebagai berikut:

Tingkat tinggi

(a) Giro dan penempatan pada Bank Indonesia, dan giro dan penempatan pada bank lain yaitu giro atau penempatan pada institusi Pemerintah, institusi Pemerintah Daerah, bank yang terdaftar di bursa serta transaksi dengan bank yang memiliki reputasi baik dengan tingkat kemungkinan gagal bayar atas kewajiban yang rendah.

(b) Investasi pada surat berharga yaitu surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah, efek-efek dan obligasi yang termasuk dalam *investment grade* dengan *rating* minimal idBBB (Pefindo), BBB+ (S&P), Baa1 (Moody's) atau BBB+ (Fitch).

(c) Pembiayaan, piutang dan pinjaman yaitu pembiayaan, piutang dan pinjaman kepada debitur dengan riwayat pembayaran yang sangat baik dan tidak pernah menunggak sepanjang jangka waktu pembiayaan; debitur dengan riwayat tidak pernah direstrukturisasi; debitur dengan tingkat stabilitas dan keragaman yang tinggi, memiliki akses setiap saat untuk memperoleh pendanaan dalam jumlah besar dari pasar terbuka, memiliki kemampuan membayar yang kuat dan rasio-rasio neraca yang konservatif.

(d) Aset lain-lain yaitu piutang kepada Pemerintah (termasuk Bank Indonesia) atau Pemerintah Daerah seperti piutang pendapatan yang masih akan diterima.

(e) Penyertaan saham yaitu penyertaan pada perusahaan yang terdaftar pada Bursa dan memiliki tingkat kinerja keseluruhan yang baik.

(f) Tagihan akseptasi yaitu tagihan kepada pihak ketiga yang belum jatuh tempo, dan memiliki kapasitas finansial yang kuat dalam hal pembayaran kembali seluruh kewajibannya secara tepat waktu.

45. RISK MANAGEMENT (Continued)

a. Credit (Financing) Risk (continued)

Financing quality is defined as follows:

High grade

(a) Current accounts and placements with Bank Indonesia, and current accounts and placements with other banks represent current accounts or placements with Government Institutions, Regional Government institutions, banks listed in the stock exchange and transaction with reputable banks with low probability of insolvency.

(b) Investments in marketable securities represent securities issued by Government and investment grade securities and bonds with a rating of at least idBBB (Pefindo), BBB+ (S&P), Baa1 (Moody's) or BBB+ (Fitch).

(c) Financing, receivables and loans represent financing, receivables and loans to debtors with very satisfactory track record of financing repayment and whose accounts did not turn as due during the term of the financing; debtors whose accounts have never been restructured; debtors with high degree of stability and diversity, having access to raise substantial amounts of funds through public market at any time, having very strong debt service capacity and conservative balance sheet ratios.

(d) Other assets represent receivables from the Government (including Bank Indonesia) or Regional Government such as accrued income receivables.

(e) Investments in shares represent investments in companies that are listed in the Stock Exchange and that have good performance as a whole.

(f) Acceptance receivables represent receivables from third parties that have not yet matured, and have a strong financial capacity in terms of repayment of all obligations in time.

45. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

a. Risiko Kredit (Pembiayaan) (lanjutan)

(i) Kualitas aset keuangan (lanjutan)

Kualitas pembiayaan didefinisikan sebagai berikut: (lanjutan)

Tingkat standar

(a) Giro dan penempatan pada bank lain yaitu giro atau penempatan pada bank yang tidak terdaftar di bursa.

(b) Investasi pada surat berharga yaitu surat berharga yang termasuk dalam *non-investment grade* dengan *rating* minimal idBB (Pefindo), BBB- (S&P), Baa3 (Moody's) atau BBB- (Fitch).

(c) Pembiayaan, piutang dan pinjaman yaitu pembiayaan, piutang dan pinjaman kepada debitur dengan riwayat pembayaran yang baik; debitur dengan riwayat pernah direstrukturisasi, akses terbatas untuk memperoleh pendanaan dalam jumlah besar dari pasar terbuka, tingkat pendapatan dan kinerja keseluruhan tidak stabil, memiliki kemampuan membayar yang cukup.

(d) Aset lain-lain yaitu aset keuangan lainnya selain piutang pendapatan yang masih akan diterima kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah seperti tagihan rupa-rupa kepada pihak ketiga lainnya.

(e) Penyertaan saham yaitu penyertaan pada perusahaan yang tidak terdaftar pada Bursa dan memiliki tingkat kinerja keseluruhan yang baik.

(f) Tagihan akseptasi yaitu tagihan kepada pihak ketiga yang belum jatuh tempo, dan memiliki kapasitas finansial yang memadai.

45. RISK MANAGEMENT (Continued)

a. Credit (Financing) Risk (continued)

(i) Financial assets quality (continued)

Financing quality is defined as follows: (continued)

Standard grade

(a) Current accounts and placements with other banks represent current accounts or placements with non-listed banks.

(b) Investments in marketable securities represent non-investment grade securities with a rating of at least idBB (Pefindo), BBB-(S&P), Baa3 (Moody's) or BBB- (Fitch).

(c) Financing, receivables and loans represent financing, receivables and loans to debtors with an average track record of financing repayment; debtors whose accounts have been restructured, having limited access to raise substantial amounts of funds through public market, having volatility of earnings and overall performance, having adequate debt service capacity.

(d) Other assets represent financial assets other than income receivables from the Government or Regional Government such as other receivables to third parties.

(e) Investments in shares represent investments in companies that are not listed in the Stock Exchange and that have good performance as a whole.

(f) Acceptance receivables represent receivables from third parties that have not yet matured, and have adequate financial capacity.

45. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

45. RISK MANAGEMENT (Continued)

a. Risiko Kredit (Pembiayaan) (lanjutan)

a. Credit (Financing) Risk (continued)

(i) Kualitas aset keuangan (lanjutan)

(i) Financial assets quality (continued)

Kualitas pembiayaan didefinisikan sebagai berikut: (lanjutan)

Financing quality is defined as follows: (continued)

Tingkat standar (lanjutan)

Standard grade (continued)

Berdasarkan PSAK 60, aset keuangan yang telah jatuh tempo ditentukan ketika debitur gagal melakukan pembayaran sesuai jadwal. Tabel di bawah menunjukkan *aging analysis* terhadap pembiayaan, piutang dan pinjaman yang diberikan yang telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai (tidak diaudit):

In accordance with SFAS 60, financial asset is due when the repayment is default. The table below shows aging analysis of financing, receivables and loans that are past-due but not impaired (unaudited):

	***31 Desember / December 31,* 2019**				
	≤ 30 hari / *days*	31 - 60 hari/ *days*	61 - 90 hari/ *days*	Jumlah/ *Total*	
Piutang *murabahah*	897.721.686	836.304.687	702.360.673	2.436.387.046	*Murabahah receivables*
Piutang *ijarah*	6.285.782	1.667	29.167	6.316.616	*Ijarah receivables*
Pinjaman *qardh*	261.637.110	48.437.504	46.462.625	356.537.239	*Funds of qardh*
Pembiayaan *mudharabah*	1.061.472	2.333.658	13.381.405	16.776.535	*Mudharabah financing*
Pembiayaan *musyarakah*	952.577.005	958.202.944	438.329.238	2.349.109.187	*Musyarakah financing*
Jumlah	**2.119.283.055**	**1.845.280.460**	**1.200.563.108**	**5.165.126.623**	***Total***

	***31 Desember / December 31,* 2018**				
	≤ 30 hari / *days*	31 - 60 hari/ *days*	61 - 90 hari/ *days*	Jumlah/ *Total*	
Piutang *murabahah*	357.749.038	891.881.297	503.580.404	1.753.210.739	*Murabahah receivables*
Piutang *ijarah*	24.325	70.848	--	95.173	*Ijarah receivables*
Pinjaman *qardh*	133.641.035	13.769	26.058.000	159.712.804	*Funds of qardh*
Pembiayaan *mudharabah*	3.386.039	4.754.966	803.920	8.944.925	*Mudharabah financing*
Pembiayaan *musyarakah*	815.262.030	602.658.391	704.495.463	2.122.415.884	*Musyarakah financing*
Jumlah	**1.310.062.467**	**1.499.379.271**	**1.234.937.787**	**4.044.379.525**	***Total***

(ii) Analisa konsentrasi risiko

(ii) Risk concentration analysis

(a) Sektor geografis

(a) Geographical sectors

Tabel berikut menggambarkan rincian eksposur pembiayaan yang dikategorikan berdasarkan wilayah geografis pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018. Pengelompokan wilayah geografis berdasarkan tempat beroperasinya bisnis Bank yang sekaligus menggambarkan potensial bisnis wilayah masing-masing (tidak diaudit):

The following table shows the details of financing exposures categorized by geographic area as of December 31, 2019 and 2018. Geographic grouping is based on the Bank's business operations which also illustrates the business potential of each region (unaudited):

45. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

45. RISK MANAGEMENT (Continued)

a. Risiko Kredit (Pembiayaan) (lanjutan)

a. Credit (Financing) Risk (continued)

(ii) Analisa konsentrasi risiko (lanjutan)

(ii) Risk concentration analysis (continued)

(a) Sektor geografis (lanjutan)

(a) Geographical sectors (continued)

***31 Desember / December 31,* 2019**

	Jabodetabek/ *Jabodetabek*	Jawa/ *Java*	Sumatera/ *Sumatera*	Kalimantan/ *Borneo*	Lainnya/ *Others*	Jumlah/ *Total*	
ASET							***ASSETS***
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	2.505.388.141	--	--	--	--	2.505.388.141	*Current accounts and placements with Bank Indonesia*
Giro dan penempatan pada bank lain	343.127.555	9.635.282	5.150.401	589.576	20.163.758	378.666.572	*Current accounts and placements with other banks*
Investasi pada surat berharga	11.347.870.179	--	--	--	--	11.347.870.179	*Investments in marketable securities*
Piutang *murabahah*	7.983.604.176	3.861.575.031	922.757.214	345.380.944	1.024.810.410	14.138.127.775	*Murabahah receivable*
Piutang *istishna*	--	3.725.303	--	--	--	3.725.303	*Istishna receivable*
Piutang *ijarah*	61.129	6.781	9.851.041	7.417	23.237	9.949.605	*Ijarah receivable*
Piutang *qardh*	204.476.224	376.798.224	12.932	--	--	581.287.380	*Funds of qardh*
Pembiayaan *mudharabah*	305.278.836	433.577.581	16.305.037	1.268.174	83.905	756.513.534	*Mudharabah financing*
Pembiayaan *musyarakah*	10.240.553.289	2.257.156.264	942.057.155	452.714.566	314.402.642	14.206.883.916	*Musyarakah financing*
Penyertaan saham	407.711.237	--	--	--	--	407.711.237	*Investment in shares*
Tagihan akseptasi	263.542.854	79.541.515	68.180.727	--	--	411.265.095	*Acceptance receivables*
Aset lain-lain *)	88.932.138	89.961.213	31.201.585	8.200.016	18.954.649	237.249.602	*Other assets*)*
Jumlah	**33.690.545.758**	**7.111.977.194**	**1.995.516.092**	**808.160.691**	**1.378.438.600**	**44.984.638.339**	***Total***
Cadangan kerugian penurunan nilai						(627.247.124)	*Allowance for impairment losses*
Bersih						**44.357.391.215**	***Net***
Rekening Administratif							***Administrative Accounts***
LIABILITAS							***LIABILITIES***
Fasilitas pembiayaan yang belum digunakan	111.116.883	3.477.347	429.772	--	3.739.506	118.763.508	*Unused financing facility*
SKBDN yang diterbitkan	103.092.375	35.918.471	2.257.608	--	--	141.268.454	*SKBDN issued*
Fasilitas L/C yang masih berjalan	206.513	599.052	--	--	744.037	1.549.602	*Outstanding L/C*
Bank garansi yang diterbitkan	61.241.796	22.665.045	3.761.126	765.602	1.860.634	90.294.203	*Bank guarantees issued*
Jumlah	**275.657.566**	**62.659.916**	**6.448.506**	**765.602**	**6.344.176**	**351.875.768**	***Total***

***31 Desember / December 31,* 2018**

	Jabodetabek/ *Jabodetabek*	Jawa/ *Java*	Sumatera/ *Sumatera*	Kalimantan/ *Borneo*	Lainnya/ *Others*	Jumlah/ *Total*	
ASET							***ASSETS***
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	5.339.428.665	--	--	--	--	5.339.428.665	*Current accounts and placements with Bank Indonesia*
Giro dan penempatan pada bank lain	632.904.654	5.599.730	760.697	--	18.770.558	658.035.639	*Current accounts and placements with other banks*
Investasi pada surat berharga	12.199.928.132	--	--	--	--	12.199.928.132	*Investments in marketable securities*
Piutang *murabahah*	8.688.602.052	4.300.917.414	1.061.409.926	393.187.398	1.188.104.903	15.632.221.693	*Murabahah receivable*
Piutang *istishna*	--	3.858.670	--	--	534.277	4.392.947	*Istishna receivable*
Piutang *ijarah*	3.521.471	1.847.222	1.222.881	179.506	--	6.771.080	*Ijarah receivable*
Piutang *qardh*	293.100.591	461.053.916	1.122.769	--	--	755.277.276	*Funds of qardh*
Pembiayaan *mudharabah*	154.430.788	247.163.828	35.687.568	260.161	47.613	437.589.958	*Mudharabah financing*
Pembiayaan *musyarakah*	12.086.001.094	2.526.168.576	1.057.391.752	518.107.565	356.202.459	16.543.871.446	*Musyarakah financing*
Penyertaan saham	6.095.237	--	--	--	--	6.095.237	*Investment in shares*
Tagihan akseptasi	223.667.005	125.478.542	65.213.214	29.344.813	--	443.703.574	*Acceptance receivables*
Aset lain-lain *)	348.501.853	107.485.731	43.517.044	21.932.208	52.660.107	574.096.944	*Other assets*)*
Jumlah	**39.976.181.542**	**7.779.573.628**	**2.266.325.850**	**963.011.650**	**1.616.319.917**	**52.601.412.591**	***Total***
Cadangan kerugian penurunan nilai						(1.085.483.706)	*Allowance for impairment losses*
Bersih						**51.515.928.885**	***Net***
Rekening Administratif							***Administrative Accounts***
LIABILITAS							***LIABILITIES***
Fasilitas pembiayaan yang belum digunakan	112.779.804	23.333.752	42.778.546	9.722.397	5.833.438	194.447.937	*Unused financing facility*
SKBDN yang diterbitkan	196.894.303	47.817.188	22.502.206	8.438.327	5.625.552	281.277.576	*SKBDN issued*
Fasilitas L/C yang masih berjalan	12.769.310	3.701.249	925.312	740.250	370.125	18.506.246	*Outstanding L/C*
Bank garansi yang diterbitkan	219.506.688	51.313.252	2.850.736	11.402.945	--	285.073.621	*Bank guarantees issued*
Jumlah	**541.950.105**	**126.165.441**	**69.056.800**	**30.303.919**	**11.829.115**	**779.305.380**	***Total***

*) Aset lain-lain terdiri atas piutang pendapatan yang masih akan diterima, penempatan pada PT Pos Indonesia (Persero), setoran jaminan dan tagihan lain-lain.

**) Other assets consist of income receivables, funds with PT Pos Indonesia (Persero), security deposits and other receivables.*

45. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan) / *45. RISK MANAGEMENT (Continued)*

a. Risiko Kredit (Pembiayaan) (lanjutan) / *a. Credit (Financing) Risk (continued)*

(ii) Analisa konsentrasi risiko (lanjutan) / *(ii) Risk concentration analysis (continued)*

(b) Sektor industri / *(b) Industrial sectors*

Tabel berikut menggambarkan rincian eksposur pembiayaan pada nilai tercatat yang dikategorikan berdasarkan sektor industri pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 (tidak diaudit):

The following table provides the details of the financing exposure at the carrying amounts categorized by industrial sector as of December 31, 2019 and 2018 (unaudited):

	***31 Desember / December 31*, 2019**					
	Pemerintah (termasuk Bank Indonesia)/ *Government (including Bank Indonesia)*	Bank dan lembaga keuangan lainnya/ *Banks and other financial institutions*	Perusahaan lainnya/ *Other companies*	Perseorangan/ *Individuals*	Jumlah/ *Total*	
ASET						***ASSETS***
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	2.505.388.141	--	--	--	2.505.388.141	*Current accounts and placements with Bank Indonesia*
Giro dan penempatan pada bank lain	--	378.666.572	--	--	378.666.572	*Current accounts and placements with other banks*
Investasi pada surat berharga	6.651.411.040	2.496.363.332	2.200.095.808	--	11.347.870.179	*Investments in marketable securities*
Piutang *murabahah*	198.932.861	713.387.897	8.435.355.903	4.790.451.113	14.138.127.775	*Murabahah receivable*
Piutang *istishna*	--	--	905.467	2.819.836	3.725.303	*Istishna receivable*
Piutang *ijarah*	--	--	9.900.661	48.944	9.949.605	*Ijarah receivable*
Piutang *qardh*	--	682.450	569.088.499	11.516.431	581.287.380	*Funds of qardh*
Pembiayaan *mudharabah*	117.913.594	355.251.700	272.849.038	10.499.202	756.513.534	*Mudharabah financing*
Pembiayaan *musyarakah*	--	414.233.188	10.588.975.283	3.203.675.445	14.206.883.916	*Musyarakah financing*
Penyertaan saham	--	407.711.237	--	--	407.711.237	*Investment in shares*
Tagihan akseptasi	--	--	411.265.095	--	411.265.095	*Acceptance receivables*
Aset lain-lain *)	--	--	237.249.602	--	237.249.602	*Other assets*)*
Jumlah	**9.473.645.636**	**4.766.296.376**	**22.725.685.356**	**8.019.010.972**	**44.984.638.339**	***Total***
Cadangan kerugian penurunan nilai					(627.247.124)	*Allowance for impairment losses*
Bersih					**44.357.391.215**	***Net***
Rekening Administratif						***Administrative Accounts***
LIABILITAS						***LIABILITIES***
Fasilitas pembiayaan yang belum digunakan	--	--	118.763.508	--	118.763.508	*Unused financing facility*
Penerbitan SKBDN	--	--	141.268.454	--	141.268.454	*SKBDN issued*
Fasilitas L/C yang masih berjalan	--	--	1.549.602	--	1.549.602	*Outstanding L/C*
Bank garansi yang diterbitkan	--	--	90.294.203	--	90.294.203	*Bank guarantees issued*
Jumlah	**--**	**--**	**351.875.768**	**--**	**351.875.768**	***Total***

	***31 Desember / December 31*, 2018**					
	Pemerintah (termasuk Bank Indonesia)/ *Government (including Bank Indonesia)*	Bank dan lembaga keuangan lainnya/ *Banks and other financial institutions*	Perusahaan lainnya/ *Other companies*	Perseorangan/ *Individuals*	Jumlah/ *Total*	
ASET						***ASSETS***
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	5.339.428.665	--	--	--	5.339.428.665	*Current accounts and placements with Bank Indonesia*
Giro dan penempatan pada bank lain	--	658.035.639	--	--	658.035.639	*Current accounts and placements with other banks*
Investasi pada surat berharga	7.586.784.129	2.476.917.648	2.136.226.355	--	12.199.928.132	*Investments in marketable securities*
Piutang *murabahah*	215.934.772	811.208.085	9.075.588.470	5.529.490.366	15.632.221.693	*Murabahah receivable*
Piutang *istishna*	--	--	2.303.440	2.089.507	4.392.947	*Istishna receivable*
Piutang *ijarah*	--	--	4.255.582	2.515.498	6.771.080	*Ijarah receivable*
Piutang *qardh*	--	1.096.199	744.449.453	9.731.624	755.277.276	*Funds of qardh*
Pembiayaan *mudharabah*	--	310.740.999	117.148.093	9.700.866	437.589.958	*Mudharabah financing*
Pembiayaan *musyarakah*	--	500.845.124	12.257.250.007	3.785.776.315	16.543.871.446	*Musyarakah financing*
Penyertaan saham	--	6.095.237	--	--	6.095.237	*Investment in shares*
Tagihan akseptasi	--	--	443.703.574	--	443.703.574	*Acceptance receivables*
Aset lain-lain *)	--	--	574.096.944	--	574.096.944	*Other assets*)*
Jumlah	**13.142.147.566**	**4.764.938.932**	**25.355.021.918**	**9.339.304.176**	**52.601.412.591**	***Total***
Cadangan kerugian penurunan nilai					(1.085.483.706)	*Allowance for impairment losses*
Bersih					**51.515.928.885**	***Net***
Rekening Administratif						***Administrative Accounts***
LIABILITAS						***LIABILITIES***
Fasilitas pembiayaan yang belum digunakan	--	--	194.447.937	--	194.447.937	*Unused financing facility*
Penerbitan SKBDN	--	--	281.277.576	--	281.277.576	*SKBDN issued*
Fasilitas L/C yang masih berjalan	--	--	18.506.246	--	18.506.246	*Outstanding L/C*
Bank garansi yang diterbitkan	--	--	285.073.621	--	285.073.621	*Bank guarantees issued*
Jumlah	**--**	**--**	**779.305.380**	**--**	**779.305.380**	***Total***

*) Aset lain-lain terdiri atas piutang pendapatan yang masih akan diterima, penempatan pada PT Pos Indonesia (Persero), setoran jaminan dan tagihan lain-lain.

*) *Other assets consist of income receivables, funds with PT Pos Indonesia (Persero), security deposits and other receivables.*

45. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

45. RISK MANAGEMENT (Continued)

a. Risiko Kredit (Pembiayaan) (lanjutan)

a. Credit (Financing) Risk (continued)

(iii) Penurunan nilai aset keuangan:

(iii) Impairment of financial assets:

(a) Giro dan penempatan pada Bank Indonesia

Per tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, aset keuangan ini tidak mengalami penurunan nilai secara individual maupun kolektif.

(a) Current accounts and placements with Bank Indonesia

As of December 31, 2019 and 2018, these financial assets are not individually or collectively impaired.

(b) Giro dan penempatan pada bank lain

Per tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, aset keuangan ini tidak mengalami penurunan nilai secara individual maupun kolektif kecuali giro pada bank N.V. De Indonesische Overzeese Bank (Indover) dikelompokkan macet dan penempatan pada bank lain pada BPRS Rifatul Ummah, BPRS Dana Cipaganti, dan BPRS Dana Artha Mentari dikelompokkan macet.

(b) Current accounts and placements with other banks
As of December 31, 2019 and 2018, these financial assets are not individually or collectively impaired except for current account with N.V. De Indonesische Overzeese Bank (Indover) which is classified as loss and placements with other banks with BPRS Rifatul Ummah, BPRS Dana Cipaganti, and BPRS Dana Artha Mentari which are classified as loss.

(c) Investasi pada surat berharga

Seluruh investasi pada surat berharga pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 dikelompokkan lancar kecuali investasi pada surat berharga pada PT Berlian Laju Tanker Tbk dan Sukuk Sumberdaya Sewatama dikelompokkan macet.

(c) Investment in securities

All investments in securities as of December 31, 2019 and 2018 are classified as current, except for investments in securities with PT Berlian Laju Tanker Tbk and Sumberdaya Sewatama Sukuk, which are classified as loss.

(d) Pembiayaan, piutang dan pinjaman

Rincian pembiayaan, piutang dan pinjaman yang tidak mengalami penurunan nilai dan yang mengalami penurunan nilai adalah sebagai berikut:

(d) Financing, receivables and loans

The details of not impaired and impaired financing, receivables and funds are as follows:

***31 Desember / December 31*, 2019**

	Belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai / *Neither past due nor impaired*		Telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai/ *Past-due but not impaired*	Mengalami penurunan nilai/ *Impaired*	Jumlah/ *Total*	
	Tingkat tinggi/ *High grade* *)	Tingkat standar/ *Standard grade* *)				
Jasa-Jasa Dunia Usaha	1.001.467.006	1.446.093.916	842.456.338	21.646.876	3.311.664.136	*Business services*
Perdagangan, Restoran, dan Hotel	1.279.087.723	2.112.089.759	474.467.330	754.457.610	4.620.102.422	*Trading, restaurants and hotels*
Industri Pengolahan	1.682.284.756	1.245.795.488	856.422.646	243.880.291	4.028.383.180	*Manufacturing*
Konstruksi	764.407.310	1.068.895.772	372.861.720	73.548.667	2.279.713.470	*Construction*
Pengangkutan, Pergudangan dan Komunikasi	88.827.367	601.318.510	517.724.344	48.038.159	1.255.908.379	*Transport, cargo storage and communication*
Jasa-Jasa Sosial/Masyarakat	1.139.078.693	675.950.857	618.707.376	241.928.210	2.675.665.136	*Social/public services*
Pertambangan	89.009.577	962.993.970	195.533.918	5.984.231	1.253.521.696	*Mining*
Listrik, Gas, dan Air	265.704.450	1.145.690.418	469.746.903	10.340.378	1.891.482.149	*Water, gas and electricity*
Pertanian, Kehutanan dan Sarana Pertanian	575.450.659	226.987.799	482.467.394	1.989.620	1.286.895.472	*Agriculture, forestry and agricultural facilities*
Lain-Lain	5.248.302.677	1.213.423.984	334.738.654	296.686.157	7.093.151.472	*Others*
Jumlah	**12.133.620.217**	**10.699.240.475**	**5.165.126.623**	**1.698.500.198**	**29.696.487.512**	***Total***
Cadangan kerugian penurunan nilai					(548.751.581)	*Allowance for impairment losses*
Bersih					**29.147.735.931**	***Net***

45. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

45. RISK MANAGEMENT (Continued)

a. Risiko Kredit (Pembiayaan) (lanjutan)

a. Credit (Financing) Risk (continued)

(iii) Penurunan nilai aset keuangan: (lanjutan)

(iii) Impairment of financial assets: (continued)

(d) Pembiayaan, piutang dan pinjaman (lanjutan)

(d) Financing, receivables and loans (continued)

***31 Desember / December 31*, 2018**

	Belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai / *Neither past due nor impaired*		Telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai/ *Past-due but not impaired*	Mengalami penurunan nilai/ *Impaired*	Jumlah/ *Total*	
	Tingkat tinggi/ *High grade* *)	Tingkat standar/ *Standard grade* *)				
Jasa-Jasa Dunia Usaha	1.548.901.348	2.256.276.014	186.700.255	957.784	3.992.835.401	*Business services*
Perdagangan, Restoran, dan Hotel	1.898.055.053	2.061.398.602	413.460.434	673.721.617	5.046.635.706	*Trading, restaurants and hotels*
Industri Pengolahan	2.096.403.984	1.524.026.293	300.760.320	241.192.720	4.162.383.317	*Manufacturing*
Konstruksi	731.310.413	1.033.095.619	368.443.819	61.623.605	2.194.473.456	*Construction*
Pengangkutan, Pergudangan dan Komunikasi	104.541.465	668.578.196	715.543.378	105.892.904	1.594.555.943	*Transport, cargo storage and communication*
Jasa-Jasa Sosial/Masyarakat	1.329.996.200	745.901.682	660.267.072	69.078.239	2.805.243.193	*Social/public services*
Pertambangan	142.432.038	1.084.082.352	102.514.242	--	1.329.028.632	*Mining*
Listrik, Gas, dan Air	447.885.324	1.508.072.707	97.135.008	--	2.053.093.039	*Water, gas and electricity*
Pertanian, Kehutanan dan Sarana Pertanian	1.034.201.180	354.182.736	191.311.661	756.049	1.580.451.626	*Agriculture, forestry and agricultural facilities*
Lain-Lain	5.705.506.009	1.774.244.784	1.008.243.336	133.437.360	8.621.431.489	*Others*
Jumlah	**15.039.233.014**	**13.009.858.985**	**4.044.379.525**	**1.286.660.278**	**33.380.131.802**	***Total***
Cadangan kerugian penurunan nilai					(1.019.300.955)	*Allowance for impairment losses*
Bersih					**32.360.830.847**	***Net***

(iv) Analisa eksposur maksimum terhadap risiko pembiayaan setelah memperhitungkan dampak agunan dan mitigasi risiko pembiayaan lainnya

(iv) Analysis of maximum exposure to financing risk is made after considering the effect of collateral and other financing enhancements

Nilai tercatat dari aset keuangan Bank selain pembiayaan yang diberikan menggambarkan eksposur maksimum atas risiko pembiayaan.

The carrying value of Bank's financial assets other than financing best represent the maximum exposure to financing risk.

Untuk pembiayaan yang diberikan, Bank menggunakan agunan untuk meminimalkan risiko pembiayaan.

With regard to financing, Bank uses collateral to minimize financing risk.

Berdasarkan klasifikasi, pembiayaan Bank dapat dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu:

Financing are classified into two major categories, namely:

1. *Secured financing*;
2. *Partially secured financing.*

1. *Secured financing;*
2. *Partially secured financing.*

Secured financing, Bank menetapkan jenis dan nilai agunan yang dijaminkan sesuai skema pembiayaan. Jenis dari agunan terdiri dari:

Secured financing, Bank determines the type and value of collateral in accordance with the financing scheme. The types of collateral are as follows:

a. *Physical collateral*, berupa tanah dan bangunan, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), dan properti;

a. Physical collateral, such as land and buildings, proof of vehicle ownership, and property;

b. *Financial collateral*, berupa simpanan (tabungan, giro, deposito), surat berharga, dan emas.

b. Financial collateral, such as time deposit (savings, demand deposit) securities, and gold.

45. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

a. Risiko Kredit (Pembiayaan) (lanjutan)

(iv) Analisa eksposur maksimum terhadap risiko pembiayaan setelah memperhitungkan dampak agunan dan mitigasi risiko pembiayaan lainnya (lanjutan)

Apabila terjadi *default* (gagal bayar), Bank akan menggunakan agunan tersebut sebagai pilihan terakhir untuk pemenuhan kewajiban *counterparty*.

Partially secured financing terdiri dari pembiayaan untuk golongan berpenghasilan tetap, pembiayaan untuk para pensiunan dan pembiayaan konsumer lainnya. Dalam pembayaran kewajibannya, *partially secured financing* umumnya dilakukan melalui pemotongan penghasilan secara otomatis. Dengan demikian, tingkat risiko dari *partially secured financing* tidak sebesar nilai tercatat pembiayaannya.

Mitigasi risiko pembiayaan untuk *partially secured financing* terdiri dari surat keputusan pengangkatan pegawai dan surat keterangan pensiun.

b. Risiko Pasar

Risiko pasar terdiri dari risiko nilai tukar, risiko suku bunga, risiko ekuitas dan risiko komoditas (*on reporting* maupun *off reporting*), akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar.

Tujuan utama Bank mengelola risiko pasar adalah untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif akibat perubahan kondisi pasar terhadap aset dan permodalan Bank.

Sebagai bank devisa, Bank memiliki aset dan liabilitas dalam valuta asing, sehingga nilai dari aset dan liabilitas tersebut selalu terkait dengan perbahan kurs valuta asing terhadap Rupiah. Bank menghadapi risiko nilai tukar, apabila terjadi fluktuasi atas nilai tukar mata uang asing terhadap Rupiah. Fluktuasi nilai tukar dapat juga menimbulkan risiko bagi nasabah yang memperoleh pembiayaan dalam mata uang asing (sementara sumber pengembaliannya dalam valuta Rupiah) dan berdampak pada kemampuan membayar kembali kewajibannya.

45. RISK MANAGEMENT (Continued)

a. Credit (Financing) Risk (continued)

(iv) Analysis of maximum exposure to financing risk after considering the effect of collateral and other financing enhancements (continued)

In the event of default, Bank will use the collateral as the last resort in recovering its investment.

Partially secured financing are financing for fixed income employees, financing for retirees, and financing for other consumers. In their payment obligations, partially secured financing are generally made through automatic payroll deduction. Hence, maximum exposure to financing risk is lower than the carrying value.

Financing risk mitigation for partially secured financing consists of employee recruitment decision letter and certificate of retirement.

b. Market Risk

Market risk includes exchange rate risk, interest rate risk, equity risk and commodity risk, either on or off reporting, as the result of overall changes in market conditions.

Bank's main objective in managing market risk is to minimize the possibility of negative impact due to changes in market conditions on Bank's assets and capital.

As a foreign exchange bank, Bank has assets and liabilities in foreign currencies, which are vulnerable to foreign exchange rate changes. Bank may face exchange rate risk, if there is a fluctuation of foreign exchange rates against Rupiah. Exchange rate changes may also cause losses for Bank's customers who obtain financing in foreign currencies (while the resource to repay is in Rupiah), and this may affect the customers' ability to make repayment.

45. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

b. Risiko Pasar (lanjutan)

Aktivitas manajemen risiko yang dilakukan oleh Bank dalam mengelola dan meningkatkan kualitas profil risiko pasar adalah:

1. Secara berkelanjutan melakukan perbaikan atas prosedur manajemen risiko pasar, melalui proses pemantauan dan pengukuran risiko pasar temasuk limit pada aplikasi Quantum;

2. Mengupayakan perbaikan *end to end Treasury process* dengan memastikan fungsi *middle office* telah memenuhi kaidah *four eyes principles*;

3. Melakukan reviu dalam pemantauan transaksi *foreign exchange*, *money market* dan *fixed income*, terutama terkait dengan penetapan batas nominal transaksi (*dealer limit monitoring*) dan batas kerugian transaksi.

4. Memantau rasio Posisi Devisa Neto agar tidak melanggar ketentuan *regulator* melalui koordinasi antara *Treasury, Compliance* dan Manajemen Risiko.

c. Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas merupakan risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat digunakan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank.

Dalam mengantisipasi terjadinya risiko likuiditas, aktivitas manajemen risiko yang dilakukan oleh Bank adalah:

1. Melaksanakan fungsi *Asset and Liability Committee* (ALCO) untuk membahas manajemen likuiditas dan menetapkan strategi pengelolaan risiko;

2. Memantau pemenuhan ketentuan regulator yang berkaitan dengan likuiditas, seperti Giro Wajib Minimum (GWM), Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM), Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM), aset likuid terhadap dana pihak ketiga dan aset likuid terhadap pendanaan non inti;

3. Mengupayakan alternatif sumber likuiditas baru;

4. Melakukan kajian atas kekuatan likuiditas Bank melalui perhitungan stress test untuk dilaporkan kepada Direksi dan unit terkait;

45. RISK MANAGEMENT (Continued)

b. Market Risk (continued)

Risk management activities carried out by the Bank in managing and improving the quality of market risk profiles include:

1. *Sustainably improving market risk management procedures, through monitoring and measuring market risk, including the limit on monitoring application named Quantum;*

2. *Striving for end-to-end Treasury process improvements by ensuring that middle office functions meet the four eyes principles principle;*

3. *Reviewing the monitoring process of foreign exchange, money market and fixed income transactions especially related to nominal transaction limit setting (dealer limit monitoring) and loss limit monitoring.*

4. *Monitoring the ratio of Net Open Position in order to comply with regulatory provisions through coordination between Treasury, Compliance and Risk Management.*

c. Liquidity Risk

Liquidity risk is a risk due to the Bank's inability to fulfill its obligations as they mature from cash flow and/or high-quality liquid assets without affecting the Bank's operations and financial condition.

To anticipate the liquidity risk, the Bank undertakes the following risk management actions:

1. *Implementing the functions of the Asset and Liability Committee (ALCO) to discuss liquidity management and set the related risk management strategy;*

2. *Monitoring the fulfillment of regulatory provisiona related to liquidity, such as Statutory Reserves Requirement, Macroprudential Liquidity Buffer, Macroprudential Intermediation Ratio, liquid assets to third party fund and liquid assets to non core deposits;*

3. *Seeking alternative sources of new liquidity;*

4. *Reviewing the strength of the Bank's liquidity through stress test calculations and reporting the result to Board of Directors and relevant units;*

45. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan) / *45. RISK MANAGEMENT (Continued)*

c. Risiko Likuiditas (lanjutan) / *c. Liquidity Risk (continued)*

5. Menginisiasi kajian perhitungan dan analisis Liquidity Coverage Ratio (LCR) dan Net Stable Funding Ratio (NSFR) meskipun belum menjadi kewajiban Bank untuk melakukannya.

5. Initiating the calculation and analysis of Liquidity Coverage Ratio (LCR) dan Net Stable Funding Ratio (NSFR) although it is not yet an obligation of the Bank to do so.

Tabel di bawah ini menyajikan informasi mengenai pemetaan aset dan liabilitas keuangan dalam skala waktu tertentu *(maturity buckets)* berdasarkan sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo *(remaining maturity)* pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018:

The table below presents information regarding the mapping of financial assets and liabilities within maturity buckets, by their remaining maturity as of December 31, 2019 and 2018:

	31 Desember / December 31, 2019						
	Sampai dengan 1 bulan/ *Up to 1 month*	Lebih dari 1 bulan sampai dengan 3 bulan/ *More than 1 month up to 3 months*	Lebih dari 3 bulan sampai dengan 1 tahun/ *More than 3 months up to 1 year*	Lebih dari 1 tahun/ *More than 1 year*	Lainnya yang tidak memiliki jatuh tempo/ *Others without maturity*	Jumlah/ *Total*	
ASET							***ASSETS***
Kas	--	--	--	--	764.526.569	764.526.569	*Cash*
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	2.505.388.141	--	--	--	--	2.505.388.141	*Current accounts and placements with Bank Indonesia*
Giro dan penempatan pada bank lain	378.666.572	--	--	--	--	378.666.572	*Current accounts and placements with other banks*
Investasi pada surat berharga	383.843.321	134.668.321	496.380.251	10.332.978.286	--	11.347.870.179	*Investments in marketable securities*
Piutang *murabahah*	1.111.240.019	930.517.384	2.152.146.115	9.944.224.257	--	14.138.127.775	*Murabahah receivable*
Piutang *istishna*	22.478	65.213	442.928	3.194.685	--	3.725.303	*Istishna receivable*
Piutang *ijarah*	--	1.786.474	4.730	8.158.401	--	9.949.605	*Ijarah receivable*
Piutang *qardh*	177.480.220	193.807.404	96.602.928	113.396.828	--	581.287.380	*Funds of qardh*
Pembiayaan *mudharabah*	1.825.768	4.390.541	181.760.298	568.536.926	--	756.513.534	*Mudharabah financing*
Pembiayaan *musyarakah*	506.171.689	815.664.914	3.009.315.293	9.875.732.020	--	14.206.883.916	*Musyarakah financing*
Penyertaan saham	--	--	--	--	407.711.237	407.711.237	*Investment in shares*
Tagihan akseptasi	411.265.095	--	--	--	--	411.265.095	*Acceptance receivables*
Aset lain-lain *)	237.249.602	--	--	--	--	237.249.602	*Other assets*)*
Cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif	--	--	--	--	(627.247.124)	(627.247.124)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah aset	**5.713.152.904**	**2.080.900.251**	**5.936.652.544**	**30.846.221.403**	**544.990.682**	**45.121.917.784**	***Total assets***

	31 Desember / December 31, 2019						
	Sampai dengan 1 bulan/ *Up to 1 month*	Lebih dari 1 bulan sampai dengan 3 bulan/ *More than 1 month up to 3 months*	Lebih dari 3 bulan sampai dengan 1 tahun/ *More than 3 months up to 1 year*	Lebih dari 1 tahun/ *More than 1 year*	Lainnya yang tidak memiliki jatuh tempo/ *Others without maturity*	Jumlah/ *Total*	
LIABILITAS							***LIABILITIES***
Liabilitas segera	87.699.569	--	--	--	--	87.699.569	Liabilities due immediately
Simpanan	7.003.756.176	--	--	--	--	7.003.756.176	*Deposits*
Simpanan dari bank lain	117.315.232	--	--	--	--	117.315.232	*Deposits from other banks*
Bagi hasil yang belum dibagikan	76.293.382	--	--	--	--	76.293.382	*Undistributed revenue sharing*
Liabilitas akseptasi	180.423.917	60.010.778	21.498.807	--	--	261.933.502	*Acceptance payables*
Pinjaman yang diterima	--	178.563.214	99.201.786	--	--	277.765.000	*Fund borrowings*
Liabilitas lain-lain	77.060	--	--	--	--	77.060	*Other liabilities*
Jumlah liabilitas	**7.465.565.336**	**238.573.993**	**120.700.592**	**--**	**--**	**7.824.839.921**	***Total liabilities***
DANA SYIRKAH TEMPORER							***TEMPORARY SYIRKAH FUNDS***
Giro *mudharabah*	1.189.742.115	--	--	--	--	1.189.742.115	*Mudharabah demand deposits*
Tabungan *mudharabah*	10.815.179.706	--	--	--	--	10.815.179.706	*Mudharabah savings deposits*
Deposito *mudharabah*	14.776.731.495	4.103.522.098	4.018.401.974	--	--	22.898.655.566	*Mudharabah time deposits*
Surat Berharga Yang Diterbitkan	389.000.000	--	--	1.702.880.000	--	2.091.880.000	*Securities Issued*
Jumlah dana syirkah temporer	**27.170.653.316**	**4.103.522.098**	**4.018.401.974**	**1.702.880.000**	**--**	**36.995.457.387**	***Total temporary syirkah funds***
Jumlah Liabilitas dan dana syirkah temporer	**34.636.218.652**	**4.342.096.090**	**4.139.102.566**	**1.702.880.000**	**--**	**44.820.297.308**	***Total liabilities and temporary syirkah funds***
Perbedaan Jatuh Tempo	**(28.923.065.747)**	**(2.261.195.839)**	**1.797.549.978**	**29.143.341.403**	**544.990.682**	**301.620.476**	***Maturity gap***

45. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan) / *45. RISK MANAGEMENT (Continued)*

c. Risiko Likuiditas (lanjutan) / *c. Liquidity Risk (continued)*

	***31 Desember / December 31,* 2018**						
	Sampai dengan 1 bulan/ *Up to 1 month*	Lebih dari 1 bulan sampai dengan 3 bulan/ *More than 1 month up to 3 months*	Lebih dari 3 bulan sampai dengan 1 tahun/ *More than 3 months up to 1 year*	Lebih dari 1 tahun/ *More than 1 year*	Lainnya yang tidak memiliki jatuh tempo/ *Others without maturity*	Jumlah/ *Total*	
ASET							***ASSETS***
Kas	--	--	--	--	776.722.379	776.722.379	*Cash*
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	5.339.428.665	--	--	--	--	5.339.428.665	*Current accounts and placements with Bank Indonesia*
Giro dan penempatan pada bank lain	655.287.151	98.738	2.649.750	--	--	658.035.639	*Current accounts and placements with other banks*
Investasi pada surat berharga	--	--	--	12.199.928.132	--	12.199.928.132	*Investments in marketable securities*
Piutang *murabahah*	1.773.199.284	1.578.797.320	1.620.631.860	10.659.593.229	--	15.632.221.693	*Murabahah receivable*
Piutang *istishna*	--	--	627.947	3.765.000	--	4.392.947	*Istishna receivable*
Piutang *ijarah*	--	5.784.121	986.959	--	--	6.771.080	*Ijarah receivable*
Piutang *qardh*	418.352.276	107.456.000	164.899.000	64.570.000	--	755.277.276	*Funds of qardh*
Pembiayaan *mudharabah*	1.764.958	4.492.000	34.607.000	396.726.000	--	437.589.958	*Mudharabah financing*
Pembiayaan *musyarakah*	267.897.146	1.843.738.580	1.845.485.100	12.586.750.620	--	16.543.871.446	*Musyarakah financing*
Penyertaan saham	--	--	--	--	6.095.237	6.095.237	*Investment in shares*
Tagihan akseptasi	214.014.147	124.555.240	56.214.321	17.441.121	31.478.745	443.703.574	*Acceptance receivables*
Aset lain-lain *)	215.532.533	111.547.200	--	247.017.077	--	574.096.810	*Other assets*)*
Cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif	--	--	--	--	(1.085.483.706)	(1.085.483.706)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah aset	**8.885.476.160**	**3.776.469.199**	**3.726.101.937**	**36.175.791.179**	**(271.187.345)**	**52.292.651.130**	***Total assets***

	***31 Desember / December 31,* 2018**						
	Sampai dengan 1 bulan/ *Up to 1 month*	Lebih dari 1 bulan sampai dengan 3 bulan/ *More than 1 month up to 3 months*	Lebih dari 3 bulan sampai dengan 1 tahun/ *More than 3 months up to 1 year*	Lebih dari 1 tahun/ *More than 1 year*	Lainnya yang tidak memiliki jatuh tempo/ *Others without maturity*	Jumlah/ *Total*	
LIABILITAS							***LIABILITIES***
Liabilitas segera	198.813.500	--	--	--	--	198.813.500	Liabilities due immediately
Simpanan	6.030.144.009	--	--	--	--	6.030.144.009	*Deposits*
Simpanan dari bank lain	48.199.519	--	--	--	--	48.199.519	*Deposits from other banks*
Bagi hasil yang belum dibagikan	84.055.187	--	--	--	--	84.055.187	*Undistributed revenue sharing*
Liabilitas akseptasi	105.214.447	74.681.402	25.147.124	--	--	205.042.973	*Acceptance payables*
Pinjaman yang diterima	--	--	900.000.000	250.000.000	--	1.150.000.000	*Fund borrowings*
Liabilitas lain-lain	426.200.362	--	--	--	--	426.200.362	*Other liabilities*
Jumlah liabilitas	**6.892.627.024**	**74.681.402**	**925.147.124**	**250.000.000**	**--**	**8.142.455.550**	*Total liabilities*
DANA SYIRKAH TEMPORER							***TEMPORARY SYIRKAH FUNDS***
Giro *mudharabah*	1.256.643.289	--	--	--	--	1.256.643.289	*Mudharabah demand deposits*
Tabungan *mudharabah*	10.772.544.293	--	--	--	--	10.772.544.293	*Mudharabah savings deposits*
Deposito *mudharabah*	10.899.033.402	14.938.727.650	3.034.782.036	--	--	28.872.543.088	*Mudharabah time deposits*
Surat Berharga Yang Diterbitkan	--	--	1.149.000.000	1.800.000.000	--	2.949.000.000	*Securities Issued*
Jumlah dana syirkah temporer	22.928.220.984	14.938.727.650	4.183.782.036	1.800.000.000	--	43.850.730.670	***Total temporary syirkah funds***
Jumlah Liabilitas dan dana syirkah temporer	23.033.435.431	15.013.409.052	4.208.929.160	1.800.000.000	--	44.055.773.643	***Total liabilities and temporary syirkah funds***
Perbedaan Jatuh Tempo	**(14.253.173.718)**	**(11.311.621.255)**	**(507.974.347)**	**34.375.791.179**	**(271.187.345)**	**8.031.834.514**	***Maturity gap***

*) Aset lain-lain terdiri atas piutang pendapatan yang masih akan diterima, penempatan pada PT Pos Indonesia (Persero), setoran jaminan dan tagihan lain-lain.

*) *Other assets consist of income receivables, funds with PT Pos Indonesia (Persero), security deposits and other receivables.*

**) Liabilitas lain-lain terdiri atas setoran jaminan yang diterima.

**) *Other liabilities consist of security deposits received.*

d. Risiko Operasional / *d. Operational Risk*

Risiko operasional adalah risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.

Operational risk is a risk of losses due to inadequacy and failure of internal processes, human errors, system errors, and/or external events which have an impact on the Bank's operations.

Risiko operasional dapat secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan kerugian baik secara finansial maupun non-finansial serta dapat menghambat Bank dalam mencapai keuntungan dan pertumbuhan.

Operational risk may directly or indirectly result in both financial and non-financial losses as well as inhibit the Bank in achieving profitability and growth.

45. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

d. Risiko Operasional (lanjutan)

Bank mengembangkan kerangka kerja manajemen risiko operasional meliputi hal sebagai berikut:

1. Mengembangkan dan memelihara kerangka kerja, kebijakan dan prosedur pengelolaan risiko operasional secara berkala;

2. Melakukan pengembangan dan penerapan *Operational Risk Management System*: aplikasi *Loss Event Database, Key Risk Indicator* dan *Risk Control Self Assessment* sebagai alat bantu untuk melakukan pemantauan risiko;

3. Melaksanakan *operational risk assessment* terhadap produk/aktivitas baru, kebijakan dan prosedur operasional Bank;

4. Melaksanakan program *Operational Risk Champion* (ORION) dalam rangka menciptakan *risk governance* yang memadai pada masing-masing *risk taking unit*;

5. Menyelenggarakan *Operational Risk Forum* sebagai media pengungkapan pengelolaan risiko operasional pada masing-masing unit kerja dan upaya perbaikan yang dilakukan atas permasalahan risiko operasional berdasarkan kondisi dan kemampuan Bank;

6. Mengembangkan proyek terkait dengan kualitas data untuk memastikan bahwa data yang dicatat dan dilaporkan kepada regulator berkualitas;

7. Melakukan uji atas *Disaster Recovery Center* (DRC) untuk memastikan bahwa operasional Bank tetap berjalan dalam kondisi krisis;

8. Melaksanakan program efisiensi melalui antara lain penjualan aset yang tidak digunakan, penghematan listrik, telepon, dan perlengkapan kantor, melakukan relokasi gedung dan ATM, melakukan review kontrak dengan vendor dan melakukan review atas bandwidth.

9. Melakukan perbaikan dari sisi sumber daya manusia, antara lain melalui pengembangan kompetensi dan *risk awareness* dengan menggunakan *e-learning* dan sertifikasi, antara lain:

   a. Mengembangkan *Individual Learning Development Program* (ILDP), baik secara daring atau langsung;

45. RISK MANAGEMENT (Continued)

d. Operational Risk (continued)

Bank develops a operational risk management framework that covers:

1. *Developing and maintaining operational risk management framework, policies and procedures regularly.*

2. *Building and implementing Operational Risk Management System through Loss Event Database, Key Risk Indicator and Risk Control Self Assessment application used as operational risk monitoring tools.*

3. *Performing operational risk assessment for the new product/activity, Bank's operational policies and procedures.*

4. *Implementing the Operational Risk Champion (ORION) program in order to enhance adequate risk governance of each risk taking unit.*

5. *Organizing Operational Risk Forum as a media for operational risk management disclosure in each working unit and improvement effort in operational risk issues based on conditions and capabilities of the Bank;*

6. *Developing projects related to data quality to ensure the data recorded and reported to regulators is of high quality;*

7. *Performing Disaster Recovery Center (DRC) test to ensure that Bank's operational system works even on crisis.*

8. *Implementing efficiency programs by selling unused assets, saving on the consumption of electricity, telephone and office equipments, relocating buildings and ATMs, reviewing contracts with vendors and reviewing bandwidth usage.*

9. *Improving human resource quality through, among others, competence development, risk awareness by making use of e-learning and certification, such as:*

   a. *Conducting training through Individual Learning Development Program (ILDP), either online or in-person;*

45. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

d. Risiko Operasional (lanjutan)

9. Melakukan perbaikan dari sisi sumber daya manusia, antara lain melalui pengembangan kompetensi dan *risk awareness* dengan menggunakan *e-learning* dan sertifikasi, antara lain: (lanjutan)

   b. Melaksanakan program sertifikasi manajemen risiko untuk karyawan baru serta manajemen senior untuk memenuhi ketentuan *regulator*;

   c. Melakukan pelatihan untuk untuk para teler dan *customer service*;

   d. Mengembangkan budaya risiko dan *anti-fraud* pada unit kerja dalam bentuk e-mail blast, sosialisasi, pelatihan dan quiz.

e. Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis.

Dalam mengelola risiko hukum, Bank melakukan tindakan diantaranya:

1. Melakukan reviu atas perjanjian kerja sama yang dilakukan dengan pihak lain, untuk menjaga posisi Bank dari aspek hukum.
2. Melakukan reviu atas ketentuan terkait operasional dan produk Bank dari sisi hukum untuk meminimalkan terjadinya risiko hukum yang mungkin terjadi.
3. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia mengenai aspek legal yang dihadapi dalam aktivitas pekerjaan sehari-hari;
4. Melaporkan secara berkala kepada Direksi mengenai kasus hukum yang terjadi sehingga dapat diambil tindakan sedini mungkin untuk penyelesaiannya.
5. Merumuskan panduan membuat kontrak, melalui identifikasi ketentuan hukum dan merumuskan tahapan menyusun kontrak;
6. Membentuk pencadangan atas kasus-kasus yang telah memperoleh keputusan pada tingkat pengadilan dan Mahkamah Agung dengan persentase yang berjenjang.
7. Apabila dibutuhkan, unit legal melakukan pendampingan atas proses litigasi yang dihadapi unit kerja di Bank.

45. RISK MANAGEMENT (Continued)

d. Operational Risk (continued)

9. Improving human resource quality through, among others, competence development, risk awareness by making use of e-learning and certification: (continued)

b. Implementing risk management certification program for new employees and senior management to meet the regulatory provisions;

c. Conducting training for tellers and customer service officers;

d. Developing risk culture and anti fraud culture through e-mail blast, promotion, training dan quizzes.

e. Legal Risk

Legal risk is the risk due to lawsuits and/or weaknesses of juridical aspects.

In managing legal risk, the Bank performs actions such as:

1. Reviewing the agreements entered into with third parties, to protect the Bank from legal aspects.

2. Reviewing the provisions related to Bank's operations and product from legal aspect to minimize the legal risks that may occur.

3. Increasing the human resources competence regarding legal aspects encountered in daily work activities;

4. Reporting regularly to BOD the legal issues that occur in order to take immediate action to settle such issues.

5. Formulating guidelines for contracts, by identifying legal provisions and formulating stages of contract preparation;

6. Establishing provision for legal cases that have obtained a court decision at the District/High Court level and the Supreme Court with a tiered percentage.

7. If required, having the legal unit provide guidance on the process of litigation faced by the Bank's business unit.

45. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

45. RISK MANAGEMENT (Continued)

f. Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank.

Dalam memitigasi risiko reputasi, Bank telah melakukan:

1. Mengimplementasikan strategi komunikasi dan media handling dengan media visit, melakukan risk mapping, meningkatkan pemberitaan positif BMI dan secara internal menyiapkan standby statement sebagai standar dalam menjawab isu yang beredar;

2. Mengelola pengaduan nasabah dengan mengembangkan sistem aplikasi pencatatan keluhan dan melaksanakan *complaint handling* forum secara teratur;

3. Meningkatkan kualitas servis dengan pelatihan dan servis ritual untuk membangun *service culture*; dan

4. Mengurangi pembukaan rekening yang mencurigakan dan penanganan atas laporan rekening terindikasi penipuan dengan melakukan *Enhanced Due Dilligent* (EDD).

f. Reputation Risk

Reputation risk is a risk due to decrease at the stakeholders trust level resulting from negative perception to the Bank.

In order to mitigate reputation risk, the Bank has taken the following actions:

1. *Implementing communication strategies and media handling with media visits, conducting risk mapping, increasing positive BMI coverage and internally preparing standby statements as a standard in responding to outstanding issues;*

2. *Handling customer complaints by developing a comprehensive application for customer complaint and organizing complaint handling forum regularly;*

3. *Improving the service quality with training and service rituals to build service culture; and*

4. *Performing Enhanced Due Diligence (EDD) program to the suspected fraud account. This is conducted to minimize the opening of the account for crime.*

g. Risiko Stratejik

Risiko stratejik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Bank menetapkan strategi jangka pendek dan jangka panjang dalam bentuk rencana strategis dan rencana bisnis.

Dalam memitigasi risiko strategi, Bank telah melakukan:

1. Menetapkan fokus untuk melakukan perbaikan kinerja Bank sesuai dengan Rencana Bisnis Bank (RBB);

2. Memperkuat permodalan Bank, melakukan optimalisasi alokasi modal untuk kegiatan Bank dan menjaga pertumbuhan pembiayaan Bank yang sehat;

3. Melakukan efisiensi operasional secara berkelanjutan.

g. Strategic Risk

Strategic risk is a risk due to inaccuracy in decision making of strategic decision and failure in anticipating business environment changes. The Bank established short-period and long-period strategy in the form of strategic plan and business plan.

In order to mitigate strategic risk, the Bank has taken the following actions:

1. *Focusing on improving the Bank's performance in accordance with Bank's Business Plan (RBB);*

2. *Strengthening Bank's capital, optimizing the capital allocation for Bank's activities and maintaining the Bank's healthy financing growth;*

3. *Conducting operational efficiency in a sustainable manner.*

45. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

45. RISK MANAGEMENT (Continued)

h. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan muncul ketika Bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Bank Indonesia, maupun peraturan perundang- undangan lainnya yang berlaku.

Bank senantiasa berupaya maksimal agar segala ketentuan dan peraturan yang berlaku dapat dilaksanakan dengan baik *(comply with regulation)* dan secara terus menurus melakukan langkah-langkah pernaikan dalam kualitas manajemen risiko, sistem pengendalian internal dan pelaksanaan tata kelola yang baik serta memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun prinsip syariah dalam menjalankan kegiatan operasional Bank.

Dalam memitigasi risiko kepatuhan, Bank telah melakukan:

1. Melakukan kampanye budaya kepatuhan antara lain melalui *sharing* informasi regulasi dan fatwa, memberikan opini terhadap penerapan regulasi dan aspek syariah, reminder kepada unit kerja terkait mengenai pemenuhan regulasi serta melakukan *training* dan *sharing knowledge;*

2. Menyampaikan laporan-laporan secara periodik kepada *regulator* dan pihak terkait lain sesuai ketentuan yang berlaku;

3. Melakukan supervisi dan pendampingan kepada unit kerja dan/atau unit bisnis dalam melakukan penerbitan produk, program, operasional, sosialisasi dan/atau pendekatan terhadap nasabah dan calon nasabah serta melakukan pelatihan/*sharing* kepada karyawan baru maupun kepada pihak internal bank;

4. Melakukan perbaikan dan penyempurnaan atas setiap proses bisnis Bank agar sesuai dengan regulasi yang berlaku serta aspek syariah;

5. Melakukan *Compliance Checklist* untuk memastikan kesiapan operasional pembukaan, pemindahan alamat dan perubahan status kantor dan perizinan produk sebelum disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK);

h. Compliance Risk

Compliance risk arises when the Bank does not comply with or fails to enforce the rules of the Financial Services Authority and/or Bank Indonesia, as well as other applicable laws and regulations.

Bank constantly strives to comply with applicable rules and regulations and continuously improves the quality of risk management, internal control system and the implementation of good governance. Bank also maintains prudential banking principles and sharia principles in Bank's operational activities.

In order to mitigate compliance risk, the Bank has taken the following actions:

1. *Conducting compliance cultural campaigns, among others through the sharing of regulations and fatwas, giving opinions on the implementation of regulations and sharia aspects, giving reminder to the relevant work units regarding the fulfillment of regulations and conducting training and knowledge sharing;*

2. *Submitting periodic reports to regulators and other relevant parties in accordance with the applicable regulations;*

3. *Supervising and assisting the working units and/or business units in issuing products, programs, operations, dissemination and/ or approaches to customers and prospective customers as well as training or sharing to new employees and/ or to the bank's internal parties;*

4. *Conducting improvements on every business process of the Bank in order to comply with applicable regulations and shariah aspect;*

5. *Conducting Compliance Checklist to ensure the operational readiness of the opening, change of address and change of office status as well as product licensing before being submitted to the Financial Services Authority (FSA);*

45. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

h. Risiko Kepatuhan (lanjutan)

6. Melakukan penguatan atas penerapan Program APU & PPT yang efektif dan efisien mengacu pada Kebijakan Penerapan APU & PPT yang paling kurang mencakup 5 (lima) pilar, yaitu:

   a. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi;
   b. Kebijakan dan Prosedur;
   c. Pengendalian Internal;
   d. Sistem Informasi Manajemen;
   e. Sumber Daya Manusia dan Pelatihan.

Bank terus berupaya untuk lebih meningkatkan penerapan fungsi kepatuhan agar kedepannya Bank mampu mengahadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.

i. Risiko Imbal Hasil

Risiko imbal hasil *(rate of return risk)* adalah risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan Bank kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima Bank dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga Bank.

Dalam memitigasi risiko imbal hasil, Bank telah melakukan:

1. Melakukan pemantauan atas *pricing* dana dan pembiayaan, dan didiskusikan secara berkala dalam rapat ALCO;

2. Menarik nasabah-nasabah *Retail* bekerja sama dengan *core spiritual market* seperti masjid, pondok pesantren dan organisasi-organisasi keislaman.

j. Risiko Investasi

Risiko investasi *(investment risk)* adalah risiko akibat Bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan bagi hasil berbasis *profit and loss sharing*.

Dalam melakukan pengelolaan risiko investasi dalam pembiayaan beberapa hal yang telah dilakukan Bank adalah:

1. Melakukan pemantauan dan perbaikan pembiayaan berdasarkan akad pembiayaan dan juga memperbaiki pencatatan pembiayaan berbasis bagi hasil secara terus menerus;

45. RISK MANAGEMENT (Continued)

h. Compliance Risk (continued)

6. Strengthening the implementation of effective and efficient APU and PPT Program, referring to the Implementation of APU & PPT Policies that cover at least 5 (five) pillars, namely:

a. Active supervisory of BOC and BOD;

b. Policy and Procedure;
c. Internal control;
d. Information System Management;
e. Human Resources and Training.

Bank is continuously striving to improve the implementation of compliance function in order to be able to handle significant negative effect caused by changes in business conditions and other external factors.

i. Rate of Return Risk

Rate of return risk is the risk due to changes in the rate of return paid by the Bank to customers, due to changes in the rate of return received by the Bank from the allocation of funds, which can affect the behavior of third party fund customers.

In order to mitigate rate of return risk, the Bank has taken the following actions:

1. Monitoring the fund pricing and financing, and holding regular discussion in ALCO;

2. AttractingRetail customers by coordinating with core spiritual markets such as mosques, Islamic boarding schools and Islamic organizations.

j. Investment Risk

Investment risk is a risk due to losses that Bank's bear due to its customer's losses in the term of financing that is based on profit and loss sharing.

In managing investment risk in financing activity, the Bank has taken actions as follows:

1. Monitoring and improving the financing based on contract and also continuously improving the recording of profit and loss sharing financing;

45. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

45. RISK MANAGEMENT (Continued)

j. Risiko Investasi (lanjutan)

j. Investment Risk (continued)

2. Melakukan kajian atas kinerja pembiayaan termasuk pembiayaan berbasis bagi hasil dan jual beli, dan melakukan kajian untuk mengembangkan ketentuan produk pembiayaan berdasarkan akad dengan mitigasi yang memadai sehingga mengurangi risiko bagi Bank.

2. Continuously reviewing the financing performance, including profit sharing financing and cost-plus financing, and also conducting studies to develop the provision of financing products based on contract with adequate mitigation to reduce the risk for Bank.

Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan antara nilai tercatat dan nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan. Nilai wajar yang diungkapkan berdasarkan informasi relevan yang tersedia pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 dan tidak diperbaharui untuk mencerminkan perubahan dalam kondisi pasar yang telah terjadi setelah tanggal tersebut.

The table below presents a comparison between the carrying value and fair value of financial assets and liabilities. The fair value is disclosed based on relevant available information on December 31, 2019 and 2018 and it is not updated to reflect changes in market condition occurring after that date.

	31 Desember / *December 31,* 2019		
	Nilai Tercatat/ *Carrying value*	Nilai wajar/ *Fair value*	
ASET			***ASSETS***
Kas	764.526.569	764.526.569	*Cash*
Giro dan penampatan pada Bank Indonesia	2.505.388.141	2.505.388.141	*Current accounts and placements with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	340.053.684	340.053.684	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada Bank lain	38.612.888	38.612.888	*Placement with other banks*
Investasi pada surat berharga	11.332.895.179	11.322.578.811	*Investments in marketable securities*
Piutang	13.993.990.159	13.993.990.159	*Receivable*
Piutang *qardh*	577.469.748	577.469.748	*Funds of qardh*
Pembiayaan *mudharabah*	748.496.676	748.496.676	*Mudharabah financing*
Pembiayaan *musyarakah*	14.008.299.777	14.008.299.777	*Musyarakah financing*
Penyertaan saham	407.711.237	407.711.237	*Investment in shares*
Tagihan akseptasi	406.480.708	406.480.708	*Acceptance receivables*
Aset pajak tangguhan	143.110.743	143.110.743	*Deferred tax assets*
Aset lain-lain	2.157.423.426	2.157.423.426	*Other assets*
Jumlah aset	**47.424.458.935**	**47.414.142.567**	***Total assets***
LIABILITAS DAN DANA *SYIRKAH* TEMPORER			***LIABILITIES AND TEMPORARY SYIRKAH FUNDS***
Liabilitas segera	87.699.569	87.699.569	*Liabilities due immediately*
Simpanan	7.003.756.176	7.003.756.176	*Deposits*
Simpanan dari bank lain	117.315.232	117.315.232	*Deposits from other banks*
Bagi hasil yang belum dibagikan	76.293.382	76.293.382	*Undistributed revenue sharing*
Liabilitas akseptasi	261.933.502	261.933.502	*Acceptance payables*
Pinjaman yang diterima	277.765.000	277.765.000	*Fund borrowings*
Dana syirkah temporer	36.848.577.387	36.848.577.387	*Temporary syirkah funds*
Total liabilitas dan dana *syirkah* temporer	**44.673.340.248**	**44.673.340.248**	***Total liabilities and temporary syrikah funds***

45. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan) / *45. RISK MANAGEMENT (Continued)*

j. Risiko Investasi (lanjutan) / *j. Investment Risk (continued)*

	31 Desember / *December 31,* 2018		
	Nilai Tercatat/ *Carrying value*	Nilai wajar/ *Fair value*	
ASET			***ASSETS***
Kas	776.722.379	776.722.379	*Cash*
Giro dan penampatan pada Bank Indonesia	5.339.428.665	5.339.428.665	*Current accounts and placements with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	644.921.530	644.921.530	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada Bank lain	13.114.109	13.114.109	*Placement with other banks*
Investasi pada surat berharga	12.184.953.132	12.174.636.764	*Investments in marketable securities*
Piutang	15.516.645.196	15.516.645.196	*Receivable*
Piutang *qardh*	742.213.416	742.213.416	*Funds of qardh*
Pembiayaan *mudharabah*	431.872.013	431.872.013	*Mudharabah financing*
Pembiayaan *musyarakah*	15.856.148.035	15.856.148.035	*Musyarakah financing*
Penyertaan saham	6.095.237	6.095.237	*Investment in shares*
Tagihan akseptasi	437.340.987	437.428.832	*Acceptance receivables*
Aset pajak tangguhan	146.235.882	146.235.882	*Deferred tax assets*
Aset lain-lain	1.776.373.076	1.776.373.076	*Other assets*
Jumlah aset	**53.872.063.657**	**53.861.835.134**	***Total assets***
LIABILITAS DAN DANA *SYIRKAH* TEMPORER			***LIABILITIES AND TEMPORARY SYIRKAH FUNDS***
Liabilitas segera	198.813.500	198.813.500	*Liabilities due immediately*
Simpanan	6.030.144.009	6.030.144.009	*Deposits*
Simpanan dari bank lain	48.199.519	48.199.519	*Deposits from other banks*
Bagi hasil yang belum dibagikan	84.055.187	84.055.187	*Undistributed revenue sharing*
Liabilitas akseptasi	205.042.973	205.042.973	*Acceptance payables*
Pinjaman yang diterima	1.150.000.000	1.150.000.000	*Fund borrowings*
Dana syirkah temporer	43.850.730.670	43.850.730.670	*Temporary syirkah funds*
Total liabilitas dan dana *syirkah* temporer	**51.566.985.858**	**51.566.985.858**	***Total liabilities and temporary syrikah funds***

46. RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM / *46. CAPITAL ADEQUACY RATIO*

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank dihitung berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang kewajiban penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah, yang mencabut peraturan sebelumnya; dan berdasarkan Surat Edaran OJK No.12/SEOJK.03/2015 tanggal 27 April 2015. Rasio KPMM tersebut adalah sebagai berikut:

As of December 31, 2019 and 2018, the Minimum Required Capital Adequacy Ratio (CAR) is calculated based on Regulation of Financial Services Authority (OJK) No.21/POJK.03/2014 dated November 18, 2014 regarding Sharia Bank Minimum Required Capital, which revokes the previous regulation; and based on OJK circular Letter No. 12/SEOJK.03/2015 dated April 27, 2015. The CARs are as follows:

46. RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM (Lanjutan)

46. CAPITAL ADEQUACY RATIO (Continued)

	31 Desember / *December 31,* 2019	**31 Desember / *December 31,* 2018**	
MODAL INTI			***PRIMARY CAPITAL***
Modal disetor	1.103.435.151	1.103.435.151	*Paid-in capital*
Cadangan tambahan modal	2.833.743.136	2.818.231.928	*Disclosed reserve*
Kekurangan Pembentukan PPA aset non-produktif	(266.893.799)	--	*Deficit in PPA provision of non-earning asset*
Faktor Pengurang Modal Inti Utama			*Offsetting Factor from Primary Capital*
Aset Pajak Tangguhan	(143.110.743)	(146.235.882)	*Deferred Tax*
Penyertaan	(6.095.237)	(6.095.237)	*Investment in shares*
Jumlah modal inti	3.521.078.507	3.769.335.960	*Total primary capital*
MODAL PELENGKAP			***SECONDARY CAPITAL***
Pinjaman subordinasi*)	100.000.000	100.000.000	*Subordinated financing*)*
Cadangan umum penyisihan kerugian aset produktif (maksimum 1,25% dari ATMR)	250.263.155	385.670.463	*General reserve of allowance for impairment losses of earning assets (maximum 1.25% of ATMR)*
Jumlah modal pelengkap	350.263.155	485.670.463	*Total secondary capital*
Total Modal	3.871.341.662	4.255.006.423	***Total Capital***
Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)			*Weighted risk assets (RWA)*
ATMR Risiko Kredit	28.107.661.120	30.774.622.562	*RWA For Financing Risk*
ATMR Risiko Pasar	14.831.500	17.446.130	*RWA For Market Risk*
ATMR Risiko Operasional	3.049.341.250	3.681.356.875	*RWA For Operational Risk*
Total Aset Tertimbang Menurut Risiko	31.171.833.870	34.473.425.567	*Total Weighted Risk Assets*
RASIO KPMM			*Capital Adequacy Ratio*
Rasio CET 1	11,30%	10,93%	*CET 1 ratio*
Rasio Tier 1	11,30%	10,93%	*Tier 1 Ratio*
Rasio Tier 2	1,12%	1,41%	*Tier 2 Ratio*
Total Rasio	12,42%	12,34%	*Total Ratio*
Rasio KPMM yang diwajibkan	**10,00 -11,00%**	**10,00 -11,00%**	***Required CAR***

Manajemen sedang melakukan upaya dalam rangka meningkatkan rasio permodalan akibat kualitas aset yang menurun dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan proses Penawaran Umum Terbatas VI dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD);
2. Penerbitan Sukuk Subordinasi; dan
3. Memantapkan fokus strategi, antara lain;
   a. *Creative Transformation*
   b. *Swift Recovery*
   c. *Shaping the Healthy Business*
   d. Strategi Bisnis *Retail*

Management is making efforts in order to increase the capital ratio due to declining asset quality by taking the following steps:

1. *Carrying out the process of Limited Public Offering VI with Pre-emptive Rights;*
2. *Issuing Subordinated Sukuk; and*
3. *Strengthening the focus of the strategy including, among others:*
   a. Creative Transformation
   b. Swift Recovery
   c. Shaping the Healthy Business
   d. Retail Business Strategy

47. POSISI DEVISA NETO

Risiko nilai tukar merupakan risiko yang timbul karena adanya selisih posisi valuta asing yang dimiliki Bank yang tercermin dalam Posisi Devisa Neto (PDN) baik secara individual maupun secara keseluruhan. Termasuk dalam posisi valuta asing tersebut yaitu posisi *trading book* yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan transaksi valuta asing dalam jangka pendek maupun posisi *banking book* dalam rangka pengendalian PDN.

Berikut adalah PDN Bank pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 sebagai berikut:

47. NET OPEN POSITION

Exchange rate risk is the risk due to the differences of foreign exchange positions held by the Bank which is reflected in the Net Open Position (NOP) either individually or as a whole. Included in the foreign exchange position is the position of the trading book which is carried out either to gain foreign exchange transaction income in the short-term period or banking book positions in order to control NOP.

The Bank's NOP as of December 31, 2019 and 2018 is as follows:

	31 Desember / *December 31,* 2019			
Mata uang	**Aset/** ***Assets***	**Liabilitas/** ***Liabilities***	**Posisi Devisa Neto/** ***Net Open Position***	***Currencies***
Laporan Posisi Keuangan*)				***Statement of Financial Position*)***
Dolar Amerika Serikat	3.270.782.270	3.196.915.596	73.866.674	*United States Dollar*
Euro	2.901.973	2.421.999	479.974	*Euro*
Ringgit Malaysia	64.990.844	1.383.095	63.607.749	*Malaysian Ringgit*
Dolar Singapura	2.653.211	5.772.961	3.119.750	*Singapore Dollar*
Riyal Arab Saudi	782.985	--	782.985	*Saudi Arabian Riyal*
Yen Jepang	67.618	--	67.618	*Japanese Yen*
Dinar Kuwait	458.002	--	458.002	*Kuwaiti Dinar*
Jumlah	**3.342.636.903**	**3.206.493.651**	**142.382.752**	***Total***
Laporan Posisi Keuangan dan Rekening Administratif*)				***Statement of Financial Position and Administrative Accounts*)***
Dolar Amerika Serikat	4.031.700.916	4.034.793.939	3.093.023	*United States Dollar*
Euro	2.901.973	2.421.999	479.974	*Euro*
Ringgit Malaysia	650.541.261	650.265.350	275.911	*Malaysian Ringgit*
Dolar Singapura	2.653.211	5.772.961	3.119.750	*Singapore Dollar*
Riyal Arab Saudi	782.985	--	782.985	*Saudi Arabian Riyal*
Yen Jepang	67.618	--	67.618	*Japanese Yen*
Dinar Kuwait	458.002	--	458.002	*Kuwaiti Dinar*
Jumlah	**4.689.105.966**	**4.693.254.249**	**8.277.263**	***Total***
Modal (Catatan 46)			**3.871.341.662**	*Capital (Note 46)*
Rasio PDN (Laporan Posisi Keuangan)			**3,68%**	*NOP Ratio (Statement of Financial Position)*
Rasio PDN (Keseluruhan)			**0,21%**	*NOP Ratio (Overall)*

	31 Desember / *December 31,* 2018			
Mata uang	**Aset/** ***Assets***	**Liabilitas/** ***Liabilities***	**Posisi Devisa Neto/** ***Net Open Position***	***Currencies***
Laporan Posisi Keuangan*)				***Statement of Financial Position*)***
Dolar Amerika Serikat	4.160.574.125	4.102.386.152	58.187.973	*United States Dollar*
Euro	2.069.036	218.663	1.850.373	*Euro*
Ringgit Malaysia	16.658.786	1.407.565	15.251.221	*Malaysian Ringgit*
Dolar Singapura	2.483.092	2.215.767	267.325	*Singapore Dollar*
Riyal Arab Saudi	682.975	23.000	659.975	*Saudi Arabian Riyal*
Yen Jepang	142.354	--	142.354	*Japanese Yen*
Dinar Kuwait	473.719	--	473.719	*Kuwaiti Dinar*
Jumlah	**4.183.084.087**	**4.106.251.147**	**76.832.940**	***Total***
Laporan Posisi Keuangan dan Rekening Administratif*)				***Statement of Financial Position and Administrative Accounts*)***
Dolar Amerika Serikat	4.816.676.271	4.829.036.312	12.360.041	*United States Dollar*
Euro	2.069.036	218.663	1.850.373	*Euro*
Ringgit Malaysia	565.728.964	566.993.541	1.264.577	*Malaysian Ringgit*
Dolar Singapura	2.483.092	2.936.403	453.311	*Singapore Dollar*
Riyal Arab Saudi	682.975	23.000	659.975	*Saudi Arabian Riyal*
Yen Jepang	142.354	--	142.354	*Japanese Yen*
Dinar Kuwait	473.719	--	473.719	*Kuwaiti Dinar*
Jumlah	**5.388.256.411**	**5.399.207.919**	**17.204.350**	***Total***
Modal (Catatan 46)			**4.255.006.423**	*Capital (Note 46)*
Rasio PDN (Laporan Posisi Keuangan)			**1,81%**	*NOP Ratio (Statement of Financial Position)*
Rasio PDN (Keseluruhan)			**0,40%**	*NOP Ratio (Overall)*

*) Merupakan penjumlahan absolut dari selisih aset dan liabilitas.

**) Total absolute differences between Assets and Liabilities.*

49. PERJANJIAN PENTING

Bank menandatangani beberapa perjanjian penting seperti yang tersebut dibawah:

a. Perjanjian Kerjasama dengan PT Multipolar Technology Tbk tentang Pengadaan Server dan *Storage* Untuk Aplikasi *Switching Way4* Bank Muamalat pada tanggal 11 September 2015 dengan nilai kontrak sebesar USD235.000 (dengan nilai penuh) sudah termasuk PPN. Perjanjian ini berlaku mulai pada tanggal 11 Desember 2014 dan akan berakhir pada tanggal 18 Pebruari 2018.

b. Perjanjian Kerjasama dengan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) tentang penyaluran Pembiayaan Hunian Syariah (PHS) dengan nilai sebesar Rp186.000.000. Perjanjian ini berlaku mulai tanggal 27 Juni 2013 dan berakhir pada tanggal 27 Juni 2018.

c. Perjanjian Kerjasama dengan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) tentang penyaluran Pembiayaan KPR Muamalat iB dengan nilai sebesar Rp450.000.000. Perjanjian ini berlaku mulai tanggal 16 Juni 2017 dan berakhir pada tanggal 16 Juni 2019.

d. Perjanjian Kerjasama dengan Arsenal Football Club PLC untuk Club Affinity Cards and Partnership dengan nilai kontrak £975.000 (dalam nilai penuh). Perjanjian ini berlaku mulai tanggal 1 Juni 2015 dan akan berakhir pada tanggal 31 Mei 2018.

e. Perjanjian Kerjasama dengan PT Angkasa Pura Solusi tentang *Co-branding* di *lounge* Umroh Bandar Udara Soekarno Hatta dengan nilai sebesar Rp10.500.000 (belum termasuk pajak). Perjanjian ini berlaku mulai tanggal 18 Juli 2016 dan berkahir pada tanggal 14 Desember 2018.

f. Perjanjian Kerjasama dengan PT Asuransi Astra Buana tentang pemanfaatan layanan asuransi syariah kesehatan bagi karyawan Bank Muamalat dan Anggota Keluarganya dengan nilai sebesar Rp40.620.645. Perjanjian ini berlaku mulai tanggal 23 Juli 2015 dan berakhir pada tanggal 31 Mei 2018.

g. Perjanjian Kerjasama dengan PT Perintis Dinamika Sekatama tentang jasa interior untuk melakukan pekerjaan *Signage* tahap I dengan nilai sebesar Rp7.543.546 dan pekerjaan *Signage* tahap II dengan nilai sebesar Rp11.097.000. Perjanjian ini berlaku mulai tanggal 8 September 2017 dan berakhir pada tanggal 8 September 2018.

49. SIGNIFICANT AGREEMENTS

The Bank has signed several important agreements as described below:

a. Agreement with PT Multipolar Technology Tbk, for Procurement of Server and Storage for Switching Way4 Application of Bank Muamalat dated September 11, 2015, with a contract value amounting to USD235,000 (in full amount) including VAT. This agreement came into effect on December 11, 2014 and expired on February 18, 2018.

b. Agreement with PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) for the extension of Sharia Housing Facility with a value of Rp186,000,000. This agreement came into effect on June 27, 2013 and expired on June 27, 2018.

c. Agreement with PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) for the extension of Muamalat iB Housing Facility with a value of Rp450,000,000. This agreement came into effect on June 16, 2017 and expired on June 16, 2019.

d. Club Affinity Cards and Partnership Agreement with Arsenal Football Club PLC with a contract value of £975,000 (in full amount). This agreement came into effect on June 1, 2015 and expired on May 31, 2018.

e. Agreement with PT Angkasa Pura Solusi on Co-branding at Soekarno Hatta Intl. Airport Umroh Lounge with a value of Rp10,500,000 (excluding VAT). This agreement came into effect on July 18, 2016 and expired on December 14, 2018.

f. Agreement with PT Asuransi Astra Buana regarding the utilization of health services for employees of Bank Muamalat and Members of Their Families with a value of Rp40,620,645. This agreement came into effect on July 23, 2015 and expired on May 31, 2018.

g. Agreement with PT Perintis Dinamika Sekatama for interior services to perform Phase I of Signage work with a value of Rp7,543,546 and Phase II of Signage work with a value of Rp11,097,000. This agreement came into effect on September 8, 2017 and expired on September 8, 2018.

49. PERJANJIAN PENTING (Lanjutan)

Bank menandatangani beberapa perjanjian penting seperti yang tersebut dibawah: (lanjutan)

h. Perjanjian Kerjasama dengan PT Perintis Dinamika Sekatama tentang penunjukkan kontraktor pelaksana pekerjaan renovasi lantai 19 ruang *One Stop Service* Haji & Umroh sebesar Rp1.633.500 dan renovasi Area Manasik sebesar Rp210.000 (termasuk PPN 10%). Perjanjian ini berlaku mulai pada tanggal 17 April 2017 dan berakhir pada tanggal 17 Juni 2018.

i. Perjanjian Kerjasama dengan PT Matajari Mitra Solusi tentang *maintenance* Aplikasi *Switching Way4* Bank Muamalat dengan nilai kontrak sebesar Rp4.738.000. Perjanjian ini berlaku mulai pada tanggal 15 Juli 2019 dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

j. Perjanjian Kerjasama dengan PT Infracom Technology tentang penyedian dan pemanfaatan ATS Lisensi Oracle Core sebesar Rp4.521.000 dan*Managed Service Oracle Middleware* sebesar Rp4.479.000. Perjanjian ini berlaku mulai pada tanggal 1 Januari 2018 dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

k. Perjanjian Kerjasama dengan PT Ajaib Ttx Solusi tentang pemeliharaan perangkat keras *IBM Production* dengan nilai kontrak sebesar Rp4.240.050. Perjanjian ini berlaku mulai pada tanggal 20 Mei 2019 dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

l. Perjanjian Kerjasama dengan PT Digital Mind System tentang pengadaan dan implementasi aplikasi *Financing Origination System* (FOS) dengan nilai kontrak sebesar Rp9.900.000. Perjanjian ini berlaku mulai pada tanggal 17 Oktober 2018 dan akan berakhir pada tanggal 2 Desember 2020.

m. Perjanjian Kerjasama dengan PT Midas Daya Teknologi tentang *Operational Oracle Flexcube Universal Banking Solution* dan *Database Administration Oracle* dengan nilai kontrak sebesar Rp6.160.000. Perjanjian ini berlaku mulai pada tanggal 3 September 2019 dan akan berakhir pada tanggal 3 September 2020.

n. Perjanjian Kerjasama dengan PT Midas Daya Teknologi tentang pengadaan lisensi *My Oracle Support Flexcube* dan *Annual Technical Support Oracle Core Banking MCB* dengan nilai kontrak sebesar Rp4.440.000. Perjanjian ini berlaku mulai pada tanggal 1 Januari 2019 dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

49. SIGNIFICANT AGREEMENTS (Continued)

The Bank has signed several important agreements as described below: (continued)

h. Agreement with PT Perintis Dinamika Sekatama regarding the appointment of contractor for the completion of renovation of One Stop Service Hajj & Umroh room on the 19th floor with a value of Rp1,633,500 and renovation of Manasik area with a value of Rp210,000 (including 10% VAT). This agreement came into effect on April 17, 2017 and expired on June 17, 2018.

i. Agreement with PT Matajari Mitra Solusi, for maintenance Switching Way4 Application of Bank Muamalat, with a contract value amounting to Rp4,738,000. This agreement came into effect on July 15, 2019 and expired on December 31, 2019.

j. Agreement with PT Infracom Technology regarding the provision and utilization of Oracle Core ATS License with a value of Rp4,521,000 and Managed Service Oracle Middleware with a value of Rp4,479,000. This agreement came into effect on January 1, 2018 and expired on December 31, 2019.

k. Agreement with PT Ajaib Ttx Solusi regarding the maintenance of IBM Production hardware, with a value of Rp4,240,050. This agreement came into effect on May 20, 2019 and expired on December 31, 2019.

l. Agreement with PT Digital Mind System regarding the procurement and implementation Financing Origination Application, with a value of Rp9,900,000. This agreement came into effect on October 17, 2018 and expired on December 2, 2020.

m. Agreement with PT Midas Daya Teknologi regarding Operational Oracle Flexcube Universal Banking Solution and Database Administration Oracle, with a contract value amounting to Rp6,160,000. This agreement came into effect on September 3, 2019 and expired on September 3, 2020.

n. Agreement with PT Midas Daya Teknologi regarding a procurement of license My Oracle Support Flexcube and Annual Technical Support Oracle Core Banking MCB , with a contract value amounting to Rp4,440,000. This agreement came into effect on January 1, 2019 and expired on December 31, 2019.

50. INFORMASI TAMBAHAN

a. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 Bank memiliki rasio aset produktif yang diklasifikasikan *non-performing* bruto terhadap total aset produktif masing-masing sebesar 3,67% dan 2,74%.

b. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 Bank memiliki piutang, pinjaman dan pembiayaan yang *non-performing* (NPF) bruto terhadap total piutang, pinjaman dan pembiayaan \masing-masing sebesar 5,22% dan 3,87%.

c. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 Bank memiliki piutang, pinjaman dan pembiayaan yang *non-performing* (NPF) neto terhadap total piutang, pinjaman dan pembiayaan masing-masing sebesar 4,30% dan 2,58%.

d. Rasio piutang dan pembiayaan terhadap total dana pihak ketiga masing-masing pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 sebesar 73,51% dan 73,18%.

50. ADDITIONAL INFORMATION

a. As of December 31, 2019 and 2018, the ratios of the Bank's gross non-performing earning assets to total earning assets are 3.67% and 2.74%, respectively.

b. As of December 31, 2019 and 2018, the ratios of the Bank's gross non-performing financing (NPF) to total receivables, loans and financing are 5.22% and 3.87%, respectively.

c. As of December 31, 2019 and 2018, the ratios of the Bank's net non performing financing (NPF) to total receivables, loans and financing are 4.30% and 2.58%, respectively.

d. As of December 31, 2019 and 2018, the ratios of receivables and financing to total third party deposits are 73.51% and 73.18%, respectively.

51. OPINI DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Berdasarkan surat No.001/BMI/SSB/LO-DPS/I/2019 tanggal 22 Agustus 2019 dan No.015/B/CPD-SRT/II/2019 tanggal 27 Pebruari 2019, masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31Desember 2019 dan 2018, Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank Muamalat menyatakan bahwa secara umum aspek syariah dalam operasional dan produk PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk telah mengikuti fatwa dan ketentuan syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) serta opini syariah dari DPS.

51. OPINION OF THE SHARIA SUPERVISORY BOARD

Based on letters No.001/BMI/SSB/LO-DPS/I/2019 dated August 22, 2019 and No.015/B/CPD-SRT/II/2019 dated February 27, 2019, respectively for the years ended December 31, 2019 and 2018, the Sharia Supervisory Board expresses an opinion that the operation and product of PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk have complied with fatwa and sharia regulations issued by the National Sharia Board of Indonesian Ulama Council (DSN-MUI) and sharia opinion of DPS.

52. PERISTIWA SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN

1. Pada tanggal 17 Januari 2020 Bank melakukan pembayaran pelunasan atas pembiayaan trade LC dan Non LC dari PT Bank Jtrust Indonesia Tbk sebesar USD2.000.000 (dalam angka penuh) berikut dengan imbal hasil pembiayaan trade LC dan Non LC dengan nisbah setara 3,75% per tahun.

52. SUBSEQUENT EVENTS

1. On January 17, 2020 the Bank made full repayment of Trade LC and Non-LC financing from PT Bank Jtrust Indonesia Tbk amounting to USD2,000,000 (in full amount) along with the yield of the trade LC and Non-LC financing with nisbah equivalent to 3.75 per annum.

53. PENGUNGKAPAN TAMBAHAN ATAS AKTIVITAS NON KAS

53. SUPPLEMENTAL DISCLOSURES ON NON CASH ACTIVITIES

Bank mempunyai aktivitas investasi yang tidak mempengaruhi kas dan tidak termasuk dalam laporan arus kas sebagai berikut:

The Bank entered into a non-cash investing activities which are not reflected in the statement of cash flows as follows:

	31 Desember / *December 31,* 2019	**31 Desember / *December 31,* 2018**	
Penurunan (kenaikan) aset dari aktivitas operasi atas:			*Assets decrease (increase) from operating activities for:*
Pelepasan piutang, pinjaman, pembiayaan dan margin atas piutang	--	4.051.662.411	*Disposal of receivables, funding, financing and margin of receivables*
Pelepasan agunan yang diambil alih (AYDA)	--	1.238.259.699	*Disposal of foreclosed assets (AYDA)*
Reklasifikasi Pendapatan yang akan diterima bagi hasil *mudharabah* dan margin restrukturisasi	--	710.077.890	*Reclassification of revenue to be received from mudharabah and restructuring margin*
Penurunan (kenaikan) aset dari aktivitas investasi atas:			*Assets decrease (increase) from investing activities for:*
Penjualan (penempatan) efek - Sukuk *Trust Certificate* (STC)	--	(8.000.000.000)	*Sale (purchase) of securities - Sukuk Trust Certificate (STC)*
Surplus revaluasi aset tetap	--	46.082.307	*Surplus revaluation on premises and equipment*
(Penurunan) Kenaikan kewajiban dari aktivitas pendanaan atas:			*Liabilities decrease (increase) from financing activities for:*
Pencairan (penempatan) Sukuk *Mudharabah Trust Certificate*	--	1.600.000.000	*Proceed from (acquisition of) Sukuk Mudharabah Trust Certificate*

54. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN

54. COMPLETION OF FINANCIAL STATEMENTS

Manajemen Bank bertanggung jawab dalam penyusunan laporan keuangan yang telah diselesaikan dan disetujui untuk diterbitkan oleh Direksi pada tanggal 24 Januari 2020.

The Bank's management is responsible for the preparation of the financial statements that were completed and authorized for issue by the Board of Directors on January 24, 2020.

Bank Muamalat
Pertama Murni Syariah

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk

Muamalat Tower
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18,
Kuningan Timur, Setiabudi
Jakarta Selatan 12940
Telp: (+62 21) 8066 6000
Fax: (+62 21) 8066 6001

www.bankmuamalat.co.id